



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 15

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

Pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendataan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul, tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Berkaitan dengan hal itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 didasarkan pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan dan sasaran daerah yang telah tercantum dalam kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026. Renja tahun 2024 disempurnakan dengan berpedoman pada rancangan RKPD tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 16. Surat Edaran Nomor 000.7.6.1/ 1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 adalah :

1. Untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergi program-program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja sasarnya. Pada tahun 2022, Sekretariat Daerah telah melaksanakan 5 program yang diimplementasikan ke dalam 17 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan. Sampai dengan akhir tahun 2022, Sekretariat Daerah telah melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan dengan menyerap anggaran sebesar Rp.28.701.960.926,00 atau sebesar 98,81 % dari total anggaran sebesar Rp.29.048.004.609,00 Adapun klasifikasi program kegiatan berdasarkan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Realisasi sub kegiatan tahun 2022 dengan deviasi lebih dari 50% terhadap target yang direncanakan tidak ada, karena semua sub kegiatan dapat berjalan dengan baik.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Kondisi tidak dapat diprediksi, semisal kunjungan kerja, jumlah rapat, jumlah tamu, jumlah proposal yang masuk ataupun adanya aturan baru yang berimbas pada proses pelaksanaan kegiatan.
 - b. Adanya pandemi covid-19 yang berimbas pada jalannya kegiatan. Namun pada akhir tahun anggaran, kegiatan dapat berjalan.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
 - a. Lebih mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan dinas terkait
 - b. Melalui mekanisme perubahan rincian obyek dan perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada di tengah pandemi covid-19 termasuk adanya peningkatan harga BBM

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan perencanaan sudah berjalan cukup baik, namun masih ada permasalahan antara lain:

1. Refocusing anggaran untuk penanganan dampak pasca covid-19
2. Adanya kenaikan BBM sehingga perlu adanya rasionalisasi anggaran
3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi dalam hal perencanaan dan keuangan serta kurangnya personil di lapangan

Program dan kegiatan di Sekretariat Daerah pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan selalu diusahakan untuk dapat mencapai target sasaran. Walaupun program kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah tidak secara langsung mendukung visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, namun sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah dapat membantu pencapaian visi dan misi melalui berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, misalnya kebijakan dalam bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, bidang pariwisata, sumber daya alam dan lain sebagainya yang terkandung dalam kegiatan perumusan

kebijakan umum strategis daerah. Banyaknya kerjasama yang telah dijalin dengan berbagai pihak juga turut serta mendukung pencapaian visi dan misi. Jumlah kunjungan kerja juga dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi, karena daerah lain yang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebagian besar juga turut berkontribusi dalam hal capaian jumlah wisatawan.

Adapun capaian program kegiatan pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157	29	29	29	29	32	32	
		Persentase perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perubahan Renja PD	1	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah dokumen profil PD	1	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah dokumen Renja PD	1	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah dokumen Renstra PD	0	1	0	0	0	NA	NA	
		jumlah pelaksanaan Forum PD	1	1	1	1	1	NA	NA	
		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	17	NA	NA	NA	4	4	4	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	1	1	1	1	1	NA	NA	
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	NA	NA	NA	1	1	1	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA perubahan	1	1	1	1	1	NA	NA	
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	4	NA	NA	NA	1	1	1	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Kegiatan Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen perubahan RKA-SKPD jumlah dokumen DPA	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah dokumen perjanjian kinerja	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah dokumen ROPK	1	1	1	1	NA	NA	
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	8	NA	NA	NA	2	2	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja	1	1	1	1	NA	NA	
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	8	NA	NA	NA	2	2	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	64	NA	NA	NA	16	16	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen LKjIP	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah dokumen tepra	12	12	12	12	NA	NA	
		jumlah laporan e-monev	4	4	4	4	NA	NA	
		Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	24	NA	NA	NA	6	6	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	190	38	38	38	38	38	
		persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	14	NA	NA	
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASn	7392	NA	NA	NA	1848	1848	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	NA	NA	
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	8	NA	NA	NA	2	2	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	12	12	12	12	NA	NA	
		jumlah laporan keuangan semesteran	1	1	1	1	NA	NA	
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	52	NA	NA	NA	13	13	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian	3	3	3	3	3	3	
		persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100	100	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian/seragam yang tersedia	196	196	196	196	NA	NA	
		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	784	NA	NA	NA	196	196	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah ASN yang terfasilitasi	132	132	132	132	NA	NA	
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	48	NA	NA	NA	12	12	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti diklat	10	10	10	10	NA	NA	
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40	NA	NA	NA	10	10	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bulan terfasilitasi layanan administrasi umum terlayani	12	12	12	12	12	12	12
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis yang tersedia	100	100	100	100	100	100	100
		jumlah barang cetakan	2615	2615	2615	2615	NA	NA	NA
		jumlah paket yang dikirim	5	5	5	5	NA	NA	NA
		jumlah pengandaan/fotokopi	150000	150000	150000	150000	NA	NA	NA
		jumlah surat yang dikirim	NA	120	120	120	NA	NA	NA
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	NA	NA	NA	12	12	12
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah minum snek tamu yang tersedia	3000	kali	3000	3000	NA	NA	NA
		Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	48	NA	NA	NA	12	12	12
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah frekuensi koordinasi luar daerah	576	576	576	576	NA	NA	NA
		jumlah minum snek rapat yang tersedia	2785	2785	2785	2785	NA	NA	NA
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	800	NA	NA	NA	200	200	200
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPPD	48	NA	NA	NA	12	12	12
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terfasilitasi layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	12	12	12	12	12	12
		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah almari terpelihara	10	10	10	10	NA	NA	NA
		jumlah meja dan kursi terpelihara	50	50	50	50	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah mebel yang dipelihara	240	NA	NA	NA	60	60	60
		Jumlah gedung kantor dan	3	NA	NA	NA	3	3	3

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan atap	2	2	2	2	NA	NA	NA
		jumlah pemeliharaan dinding	2	2	2	2	NA	NA	NA
		jumlah pemeliharaan jaringan listrik	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah pemeliharaan rumah dinas	3	3	3	3	NA	NA	NA
		jumlah pemeliharaan kamar mandi dan WC	10	10	10	10	NA	NA	NA
		jumlah pemeliharaan lantai	100	100	100	100	NA	NA	NA
		jumlah pemeliharaan pagar dan halaman	100	100	100	100	NA	NA	NA
		jumlah pemeliharaan pintu dan jendela	25	25	25	25	NA	NA	NA
		jumlah pemeliharaan taman	50	50	50	50	NA	NA	NA
		jumlah pemeliharaan tempat parkir	50	50	50	50	NA	NA	NA
		jumlah pemeliharaan tower air	5	1	1	1	1	1	1
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan fasilitasi pemenuhan keuangan dan operasional KDH WKDH persentase pemenuhan keuangan dan operasional KDH WKDH	14	14	14	14	14	14	14
		jumlah bulan terfasilitasi gaji dan belanja operasional Bupati dan Wakil Bupati	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14	14	14	14	NA	NA	NA
		jumlah pakaian dinas untuk bupati dan wakil bupati baru	2	NA	NA	NA	2	2	2
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan	14	14	14	14	NA	NA	NA
			4	NA	NA	NA	1	1	1

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan							
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan layanan kebutuhan kerumahtanggaan setda	12	12	12	12	12	12	
		Persentase kebutuhan kerumahtanggaan setda yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah makan dan minum Kepala daerah	4380	4380	4380	4380	NA	NA	
		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	48	NA	NA	NA	12	12	
X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah makan dan minum Wakil Kepala Daerah	4380	4380	4380	4380	NA	NA	
		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	48	NA	NA	NA	12	12	
X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	jumlah alat dapur untuk rumah dinas bupati dan wabup yang dibeli	8	8	8	8	NA	NA	
		jumlah alat kantor untuk rumah dinas bupati dan wabup yang dibeli	2	2	2	2	NA	NA	
		jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	70	70	70	70	NA	NA	
		jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (mobil dan motor)	50	50	50	50	NA	NA	
		jumlah komponen listrik yang tersedia	12	12	12	12	NA	NA	
		jumlah mebelair untuk rumah dinas bupati dan wabup yang dibeli	8	8	8	8	NA	NA	
		jumlah peralatan pendukung pelaksanaan kegiatan (plakat, vandel, karangan bunga, dan bentuk cinderamata lainnya)	12	12	12	12	NA	NA	
		jumlah peralatan kebersihan	12	12	12	12	NA	NA	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target Kegiatan Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang dibeli								
		jumlah peralatan kerja yang difasilitasi pemeliharannya	50	50	50	12	12	NA	NA	NA
		jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	12	12	12	12	12	NA	NA	NA
		jumlah tagihan air dibayar	60	12	12	12	12	12	12	12
		jumlah tagihan listrik dibayar	60	12	12	12	12	12	12	12
		jumlah tagihan surat kabar (7 x 12 bulan)	420	84	84	84	84	84	84	84
		jumlah tagihan telepon dibayar	60	12	12	12	12	12	12	12
		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	48	NA	NA	NA	NA	12	12	12
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah jenis dokumen penataan organisasi	66	10	10	10	10	14	14	14
		Nilai IKM Kabupaten	84,55	81,05	82,22	82,22	82,8	82,8	82,8	82,8
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan	3	3	3	3	3	NA	NA	NA
		jumlah dokumen money kelembagaan PD	1	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah PD yang tersosialisasi kelembagaan	46	46	46	46	46	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	12	NA	NA	NA	NA	3	3	3
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah dokumen evaluasi SOP	1	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah dokumen Forum Konsultasi Publik (FKP)	1	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah dokumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat	2	2	2	2	2	NA	NA	NA
		jumlah dokumen rencana tindak lanjut pengendalian SPIP	1	1	1	1	1	NA	NA	NA
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah Forkompanda (5 kabupaten/kota, 1 propinsi)	6	6	6	6	6	NA	NA	NA
		jumlah kesepakatan rakor terkait bidang kelembagaan,	2	2	2	2	2	NA	NA	NA

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
		ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja							
		jumlah PD yang tersosialisasi RB dan monitoring pelaksanaan RB	46	46	46	46	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	4	NA	NA	NA		1	
X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah laporan monev SOP	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah laporan monev tata naskah dinas	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah laporan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah laporan penyelenggaraan kompetensi inovasi pelayanan public	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah laporan keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan public	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah laporan survei kepuasan masyarakat Pemkab Gunungkidul	2	2	2	2	NA	NA	NA
		jumlah penyelenggara pelayanan publik yang mendapat pembinaan penyelenggara pelayanan publik (koordinasi, pembinaan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik)	46	46	46	46	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	28	NA	NA	NA	7	7	
X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah dokumen LKJIP Pemkab Gunungkidul	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah dokumen perjanjian kinerja PD dan kabupaten	2	2	2	2	NA	NA	NA
		jumlah PD yang terfasilitasi	46	46	46	46	NA	NA	NA

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
		penyusunan LKjIPnya							
		Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah	12	NA	NA	NA	3	3	
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis layanan kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik	2	2	2	2	2	2	
		persentase ketugasan kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100	100	100	100	100	100	
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	jumlah upacara PHBN dan resmi lainnya	12	12	12	12	NA	NA	
		Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	48	NA	NA	NA	12	12	
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	jumlah penerimaan tamu daerah	48	48	48	48	NA	NA	
		Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	48	NA	NA	NA	12	12	
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah fasilitasi dan pendokumentasian kunjungan kerja bupati/wakil bupati	48	48	48	48	NA	NA	
		Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	48	NA	NA	NA	12	12	
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEJISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	40	8	8	8	8	8	
2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	jumlah batas desa yang ditegaskan	14	14	14	14	14	14	
		persentase batas desa yang ditegaskan	40	8	8	8	8	8	
2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	peguasaan batas desa : pembuatan peta batas desa, Berita Acara Kesepakatan, Pembuatan pilar batas desa, pemasangan pilar batas desa	14	14	14	14	NA	NA	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka	4	NA	NA	NA	1	1	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target Kegiatan Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat								
2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Jumlah sarana dan prasarana keistimewaan urusan pertanahan yang tersedia	10	0	2	2	2	2	2	
		Persentase sarana dan prasarana keistimewaan urusan pertanahan yang tersedia	100	100	100	100	100	100	100	
2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penegasan batas wilayah desa	10	0	2	2	2	2	2	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah jenis dokumen administrasi tata pemerintahan	8	8	8	8	8	8	8	
		nilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	3	3	3	3	3	3	3	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD	3	3	3	3	3	3	3	
		Jumlah dokumen penyelenggaraan Pilkada	1	1	1	1	1	1	1	
		jumlah laporan dan tindak lanjut dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	
		Jumlah laporan penyelenggaraan raker perangkat daerah	24	24	24	24	24	24	24	
		Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	NA	NA	NA	NA	3	3	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi	Jumlah dokumen unsur rupa	1	1	1	1	1	1	1	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, dan Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
	Kewilayahan	bumi terinventarisasi jumlah pilar batas kabupaten terpelihara	10	10	10	10	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	NA	NA	NA	1	1	1
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan program/kegiatan PD	1	1	1	1	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen laporan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Gunungkidul	1	1	1	1	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen LKPU kepada DPRD, LPPD kepada pemerintah dan informasi LPPD kepada masyarakat	4	4	4	4	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	24	NA	NA	NA	6	6	6
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kescjahteraan Rakyat	jumlah jenis dokumen kebijakan kesra yang diterapkan	3	3	3	3	3	3	3
		persentase kebijakan kesra yang diterapkan	100	100	100	100	100	100	100
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	jumlah dokumen hasil money bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan	10	10	10	10	NA	NA	NA
		jumlah fasilitasi forum keagamaan	30	30	30	30	NA	NA	NA
		jumlah kebijakan di bidang agama, pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan yang dirumuskan	10	10	10	10	NA	NA	NA
		jumlah organisasi keagamaan yang mendapat bantuan keuangan	2	2	2	2	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	120	NA	NA	NA	30	30	30
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,	jumlah dokumen hasil	8	8	8	8	NA	NA	NA

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Kegiatan Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	monitoring dan evaluasi bidang kesos							
		jumlah dokumen kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan	8	8	8	8	NA	NA	
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masy	32	NA	NA	NA	8	8	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	jumlah dokumen kebijakan di bidang kesehatan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan	10	8	10	10	NA	NA	
		jumlah dokumen kesepakatan koordinasi dan monev bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	10	10	10	10	NA	NA	
		jumlah organisasi sosial yang mendapat bantuan keuangan	2	2	2	2	NA	NA	
		jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan	10	10	10	10	NA	NA	
		Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	40	NA	NA	NA	10	10	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	jumlah jenis dokumen produk	4	4	4	4	4	4	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target Kegiatan Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		hukum daerah yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100		
		persentase produk hukum daerah yang ditetapkan								
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah raperbup yang ditetapkan	50	50	50	50	NA	NA	NA	NA
		jumlah raperda yang ditetapkan	12	12	12	12	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	248	NA	NA	NA	62	62	62	62
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah dokumen laporan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RADHAM)	2	2	2	2	NA	NA	NA	NA
		jumlah konsultasi hukum	20	20	20	20	NA	NA	NA	NA
		jumlah laporan hasil pendampingan hukum	12	12	12	12	NA	NA	NA	NA
		jumlah penanganan kasus litigasi	2	2	2	2	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi bantuan Hukum	8	NA	NA	NA	2	2	2	2
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah dokumen hasil kajian hukum	2	2	2	2	NA	NA	NA	NA
		jumlah pembinaan JDIH	2	2	2	2	NA	NA	NA	NA
		jumlah publikasi dan dokumentasi produk hukum	62	62	62	62	NA	NA	NA	NA
		jumlah sosialisasi PHD	2	2	2	2	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	248	NA	NA	NA	62	62	62	62
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	jumlah jenis dokumen kerjasama	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA
		persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	jumlah dokumen kerjasama daerah dengan daerah	5	5	5	5	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen sinergi perencanaan dan pembangunan dengan pemerintah pusat	10	10	10	10	NA	NA	NA	NA

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Kegiatan Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
		Jumlah dokumentasi hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	1	1	1	1	NA	NA	
		Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga	20	20	20	20	NA	NA	
		Jumlah dokumen hasil pemetaan prioritas kerjasama daerah	1	1	1	1	NA	NA	
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	144	NA	NA	NA	36	36	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100	100	100	100	100	100	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	jumlah jenis dokumen rumusan kebijakan pemda bidang perekonomian	3	3	3	3	3	3	
		dokumen rumusan kebijakan pemda bidang perekonomian	68	10	12	12	14	14	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah laporan kinerja BUMD	2	2	2	2	NA	NA	
		jumlah dokumen kebijakan bidang BUMD	3	3	3	3	NA	NA	
		jumlah laporan kinerja BUKP	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah peserta Bimtek peningkatan SDM BUKP	30	30	30	30	NA	NA	
		draft raperda penyertaan modal PDAM	1	0	1	1	NA	NA	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	NA	NA	NA	3	3	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah dokumen kesepakatan rapat koordinasi dan pembinaan di bidang pariwisata, industri	10	10	10	10	NA	NA	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Kegiatan Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan jasa, UMKM dan koperasi							
		jumlah laporan Tim Pengendali Inflasi Daerah, Kredit Usaha Rakyat, Tim percepatan akses keuangan daerah, dan indeks harga konsumen	19	19	19	19	NA	NA	
		jumlah monitoring pengendalian inflasi daerah	4	4	4	4	NA	NA	
		Jumlah sosialisasi tentang cukai rokok	10	10	10	10	NA	NA	
		jumlah operasi penegakan hukum tentang cukai tembakau	6	6	6	6	NA	NA	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	48	NA	NA	NA	12	12	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	jumlah kesepakatan hasil koordinasi Forum PAD	4	4	4	4	NA	NA	
		jumlah dokumen proyeksi pendapatan daerah	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah kesepakatan desk proyeksi PAD	13	13	13	13	NA	NA	
		jumlah kajian evaluasi tarif retribusi	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah kajian potensi PAD	0	1	0	0	NA	NA	
		jumlah monitoring pendapatan-pendapatan daerah	12	12	12	12	NA	NA	
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8	NA	NA	NA	2	2	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	jumlah jenis dokumen bidang perekonomian	2	2	2	2	NA	NA	
		serapan anggaran program dan kegiatan perangkat daerah	95	94	94	94	94	94	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah dokumen kebijakan strategis daerah	2	2	2	2	NA	NA	
		jumlah kesepakatan koordinasi bidang penyusunan program pembangunan	4	4	4	4	NA	NA	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8	NA	NA	NA	2	2	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	24	24	24	24	NA	NA	
		jumlah kebijakan di bidang pengendalian pembangunan	6	6	6	6	NA	NA	
		Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	96	NA	NA	NA	24	24	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah kesepakatan koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan	12	12	12	12	NA	NA	
		jumlah dokumen laporan pengendalian pembangunan	12	12	12	12	NA	NA	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	48	NA	NA	NA	12	12	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah jenis layanan pengadaan barang dan jasa	2	2	2	2	2	2	
		persentase pelaku pengadaan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	
		jumlah pengadaan langsung/e-purchasing barang/jasa yang terlayani	300	300	300	300	NA	NA	
		jumlah tender/seleksi/tender cepat/penunjukan langsung barang dan jasa yang terlayani	200	200	200	200	NA	NA	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	8	NA	NA	NA	2	2	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	jumlah pelayanan user aplikasi SPSE dan pendukungnya (OPD/ Penyedia)	120	120	120	120	NA	NA	
		jumlah Pelaku pengadaan barang jasa yang mendapat pembinaan SPSE	2	2	2	2	NA	NA	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
		jumlah penyelesaian aduan layanan SPSE	48	48	48	48	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	4	NA	NA	NA	1	1	1
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah konsultasi/pendampingan probity advise pengadaan barang/jasa yang terlayani	3	3	3	3	NA	NA	NA
		jumlah laku pengadaan barang/jasa pemerintah yang mendapatkan pembinaan	3	3	3	3	NA	NA	NA
		jumlah pejabat fungsional PPBJ yang dinilai	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah laku pengadaan barang/jasa yang mengikuti bimbingan teknis PBJ	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah peraturan/kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tersusun	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah personil pelaku pengadaan yang dikirim diklat kompetensi pengadaan barang/jasa	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah sengketa kontrak yang terlayani	2	2	2	2	NA	NA	NA
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	12	NA	NA	NA	3	3	3
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah jenis dokumen rumusan kebijakan pemda dibidang SDA	2	2	2	2	2	2	2
		jumlah rumusan kebijakan pemda dibidang SDA	48	6	6	8	10	10	10
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah kesepakatan rapat koordinasi di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan kelautan	10	10	10	10	NA	NA	NA
		jumlah penerima BLT Dana Bagi hasil cukai hasil tembakau	686	686	686	686	NA	NA	NA

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Kegiatan Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
		jumlah dokumen review perda bidang peternakan	0	1	0	0	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	4	NA	NA	NA	1	1	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	jumlah kesepakatan rapat koordinasi di bidang LH dan SDA	10	10	10	10	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian	4	NA	NA	NA	1	1	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	100	100	100	100	100	
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	jumlah jenis dokumen penataan kelembagaan keistimewaan persentase pemenuhan penataan kelembagaan keistimewaan	5	5	5	5	5	5	
		Jumlah lembaga yang dilakukan penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	
4.01.04.5.01.03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dilakukan penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten/Kota	18	NA	NA	NA	18	18	
4.01.04.5.01.05	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum tindak lanjut kewenangan keistimewaan	1	1	1	1	NA	NA	
		Laporan Pengawasan produk hukum kalurahan tindak lanjut	1	1	1	1	NA	NA	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Kegiatan Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, dan Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
		keistimewaan							
		sosialisasi produk hukum terkait keistimewaan	200	200	200	200	NA	NA	NA
		Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang disusun	4	NA	NA	NA	1	1	1
4.01.04.5.01.06	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengendalian urusan kelembagaan	12	NA	NA	NA	3	3	3
4.01.04.5.01.07	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Gunung Kidul	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah pengampu keistimewaan	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di kabupaten (18 kapanewon)	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah dokumen monitoring pelaksanaan kelembagaan asli	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah dokumen rencana program kegiatan keistimewaan pada kapanewon dan kabupaten (18 kapanewon)	2	2	2	2	NA	NA	NA
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kabupaten/kelurahan	4	NA	NA	NA	1	1	1
4.01.04.5.01.09	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah ASN yang memahami tata naskah dinas keistimewaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	159	159	159	159	NA	NA	NA
		jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi tata naskah dinas keistimewaan lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah kebijakan pengaturan penggunaan pakaian dinas	1	1	1	1	NA	NA	NA
		jumlah laporan monitoring hasil evaluasi SOP kelembagaan asli	1	1	1	1	NA	NA	NA

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Kegiatan Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	di Kabupaten Gunungkidul jumlah dokumen monitoring penyelenggaraan pemerintahan	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah dokumen evaluasi kapawon pengampu keistimewaan	1	1	1	1	NA	NA	
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	jumlah kelompok budaya pemerintahan yang direview	47	47	47	47	47	47	
		persentase peningkatan budaya pemerintahan	100	100	100	100	100	100	
4.01.04.2.02.05	Budaya Pemerintahan Gunung Kidul	jumlah asistensi agen perubahan	159	159	159	159	NA	NA	
		jumlah ASN/Pamong Kalurahan Pemkab Gunungkidul yang meningkat pemahamannya tentang budaya pemerintahan	150	150	150	150	NA	NA	
		jumlah kelompok budaya pemerintahan yang direview	47	47	47	47	NA	NA	
		jumlah laporan monev implementasi budaya pemerintahan	1	1	1	1	NA	NA	
		jumlah laporan pendampingan penyusunan rencana aksi bagi KBP	1	1	1	1	NA	NA	
4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan kabupaten/kota	4	NA	NA	NA	1	1	
4.01.04.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Jumlah sarana dan prasarana keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tersedia	8	0	0	0	2	2	
		Persentase sarana dan prasarana keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tersedia	100	0	0	0	100	100	
4.01.04.2.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kaistimewaan	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tersedia	8	0	0	0	2	2	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022		Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		ketatalaksanaan							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

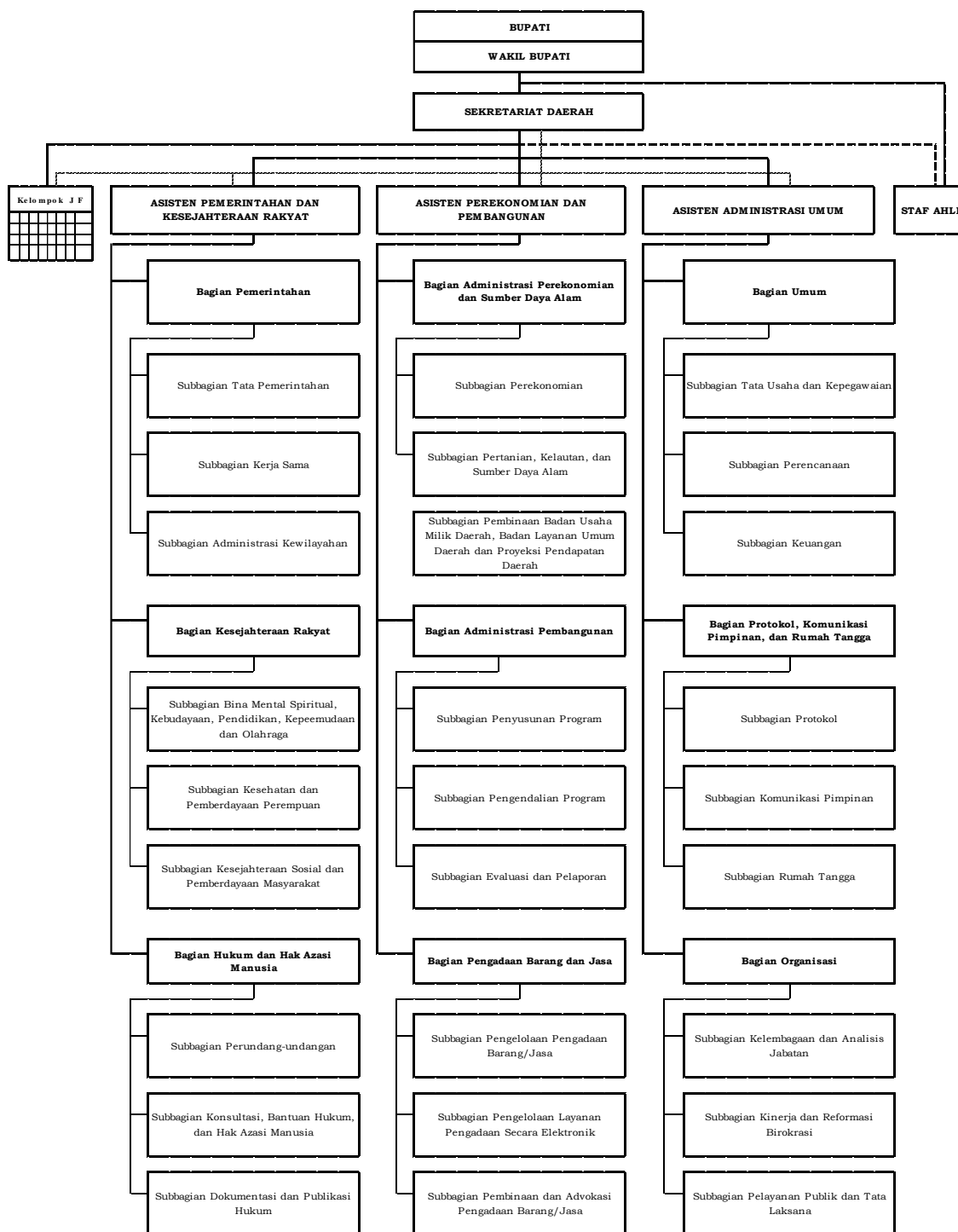
Indikator utama Sekretariat Daerah mengalami perubahan pada tahun 2021 dengan adanya keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 349/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah. Adapun rincian indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator	Sasaran	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Jumlah Deviden yang diterima oleh Pemerintah Daerah per-tahun	Rupiah	-	20.038.086.497	20.959.401.847	21.569.401.847	13.400.975.229	16.569.133.085	20.959.401.847	21.569.401.847	
2	Persentase Rumusan Kebijakan menjadi Kebijakan dan hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun n+1	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Masing-masing bagian dalam organisasi berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi melalui program dan kegiatan yang dijalankan. Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Analisis lingkungan strategis dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah menggunakan pendekatan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan menggunakan teknik analisis yang mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi faktor *internal* dan faktor *eksternal*.

1. Lingkungan internal meliputi :
 - a. kekuatan (*Strengths*), yaitu faktor-faktor yang ada pada organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan. Kekuatan yang dimaksud antara lain:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 - Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah
 - Kualitas Sumber Daya Aparatur
 - Tingginya Motivasi dan Semangat Kerja.
 - b. kelemahan (*Weaknesses*), yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi dan melemahkan posisi suatu organisasi. Kelemahan antara lain:
 - Belum optimalnya koordinasi internal
 - Belum optimalnya pola hubungan kerja dan koordinasi perumusan kebijakan daerah
 - Keterbatasan data dan informasi
 - Belum optimalnya sosialisasi produk-produk perundang-undangan daerah
 - Kurangnya sarana dan prasarana
2. Lingkungan eksternal meliputi :
 - a. peluang (*Opportunities*), yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar. Salah satu peluang yang ada adalah adanya kerjasama antar daerah dan dengan lembaga lain, sehingga meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan pemerintahan
 - b. ancaman (*Threats*), yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang membahayakan atau mengancam eksistensi suatu organisasi. Yang dimaksud dengan ancaman antara lain: keterlambatan penyempaiannya data dan laporan dari dinas/instansi, permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang semakin kompleks serta belum optimalnya keterpaduan program dan kegiatan antar dinas/instansi.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional. Adapun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien

2. Memperluas penyebaran data dan informasi tentang kebijakan daerah dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat
3. Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Mendorong peningkatan pelayanan di bidang Hukum dan HAM dan tersedianya jaringan informasi hukum
5. Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peningkatan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah terkait bidang ekonomi dan sumber daya alam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

2.4. Review terhadap Rencana kerja pemerintah Daerah

Untuk menyempurnakan Rencana Kerja yang telah disusun, telah dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat kalurahan sampai dengan kapanewon, selanjutnya untuk mengakomodir masukan-masukan dari proses yang ada, dilaksanakanlah Forum Lintas Perangkat Daerah untuk membahas usulan-usulan tersebut. Disamping adanya masukan dan usulan dari masyarakat, juga terdapat kebijakan terkait penggunaan anggaran sehingga perlu adanya penyesuaian dalam dokumen Rencana Kerja.

Untuk tahun 2024, jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp. 23.912.199.161,- yang terdiri dari Rp. 23.910.761.161,- bersumber dari APBD dan Rp. 1.430.000.000,- dari dana BKK. Setelah ada penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Nomor 000.7.6.1/ 1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah tahun 2024, pagu anggaran Setda sebesar Rp.15.235.657.495,- dengan rincian Rp13.170.787.495,- bersumber dari APBD dan Rp.2.064.870.000,- bersumber dari BKK.

Adapun penyesuaian yang dilakukan pada rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Hasil Analisis kebutuhan				Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanian	8 persen	525,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanian	8 persen	570.870.000	
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase batas desa yang ditegaskan	8 persen	505,000,000	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah batas desa yang ditegaskan	14desa	570.870.000	
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat	1 dokumen	505,000,000	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat	1 dokumen	570.870.000	
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana pendukung kegiatan penegasan batas wilayah desa	100 persen	20,000,000	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penegasan batas wilayah desa	2 buah	20,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	0,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	2 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	5	6	7 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	10	11	12
	SEKRETARIAT DAERAH	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				SEKRETARIAT DAERAH	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	18,494,239,736	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100Persen	11.590.136.995,00	
	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	45,300,750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32dokumen	27.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	24,684,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	24.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	9,537,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,542,750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,542,750	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	500.000,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5 2	6 1,542,750	7 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	10 2 dokumen	11 500.000,00	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 laporan	2.000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 laporan	500.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	4,451,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	1.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	11,463,957,361	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan	38dokumen	7.965.681.995,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1848 orang	11,387,773,561	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1848 orang	7.934.681.995,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	2,337,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	1.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD	13 laporan	73,846,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD	13 laporan	30.000.000,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan			Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	5 100 persen	6 211,208,125	7 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian	10 3 jenis	11 7.965.681.995,00	12
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	5 196 stel	6 88.708,125	7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	10 10 stel	11 7.934.681.995,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	5 12 dokumen	6 40,000,000	7 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	10 12 dokumen	11 1.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 10 orang	6 82,500,000	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 10 orang	11 30.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Persentase administrasi umum terlayani	5 100 persen	6 1,585,000,000	7 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 jumlah bulan terfasilitasi layanan administrasi umum	10 12 bulan	11 490.375.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 12 paket	6 155,000,000	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 12 paket	11 63.375.500,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	5 12 laporan	6 680,000,000	7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10 12 laporan	11 200.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 200 laporan	6 650,000,000	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 200 laporan	11 200.000.000,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (RP)
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	100,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	27.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	100 persen	166.375,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan terfasilitasi layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	12bulan	2.000.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah mebel yang dipelihara	60 unit	19,965,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah mebel yang dipelihara	60 unit	42.300.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	146,410,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	842.330.000,00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan keuangan dan operasional KDH WKDH	100 persen	878,677,000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi pemenuhan keuangan dan operasional KDH WKDH	14bulan	796.330.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	850,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	46.000.000,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	1 paket	28,677,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	1 paket	2.000.000,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kebutuhan kerumahtanggaan setda yang terpenuhi	100 persen	3,350,000,000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan layanan kebutuhan kerumahtanggaan setda	12bulan	1.482.949.500,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	400,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	187.200.000,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	300,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	140.400.000,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 paket	2,650,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 paket	1.155.349.500,00	
	Penataan Organisasi	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai IKM Kabupaten	82.8 indeks	235,994,000	Penataan Organisasi	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis dokumen penataan organisasi	14jenis	89.000.000,00	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	3 dokumen	54,230,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	3 dokumen	2.000.000,00	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 dokumen	17,765,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 dokumen	2.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	7 dokumen	87,796,500	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunungkidu I, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	7 dokumen	30.000.000,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah	5 3 dokumen	6 76,202,500	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah	10 3 dokumen	11 55.000.000,00	12
	2 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 persen	557,727,500	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis layanan kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik	2 jenis	606.000.000,00	
	2 Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	12 laporan	339,405,000	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	12 laporan	300.000.000,00	
	2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 laporan	177,650,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 laporan	300.000.000	
	2 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	12 laporan	40,672,500	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	12 laporan	6.000.000	
3	3 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100 persen	2,713,162,300	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100 persen	1.109.650.500,00	
	3 Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	3 nilai	454,082,750	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis dokumen administrasi tata pemerintahan	8 jenis	305.000.000,00	
	3 Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	3 dokumen	160,960,250	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	3 dokumen	100.000.000,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (RP)
1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	1 dokumen	68,722,500	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	1 dokumen	35.000.000,00	12
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan otonomi daerah	6 dokumen	224,400,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan otonomi daerah	6 dokumen	170.000.000,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kebijakan kesra yang diterapkan	100 persen	1,939,999,050	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah jenis dokumen kebijakan kesra yang diterapkan	3 jenis	674.650.500,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	30 dokumen	1,182,775,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	30 dokumen	484.650.500,00	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat	8 dokumen	140,124,050	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat	8 dokumen	155.000.000,00	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan pemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, transtibum linmas	10 dokumen	617,100,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan pemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, transtibum linmas	10 dokumen	35.000.000,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Persentase produk hukum daerah yang disusun	5 100 persen	6 244,000,000	7 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 jumlah jenis dokumen produk hukum daerah yang ditetapkan	10 4 jenis	11 95.000.000,00	12
	2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	62 PHD	110,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	62 PHD	40.000.000,00	
	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	2 kasus	92,000,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	8 kasus	40.000.000,00	
	2 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	62 PHD	42,000,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	62 PHD	15.000.000,00	
	2 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	100 persen	75,080,500	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah jenis dokumen kerjasama	3 jenis	35.000.000,00	
	2 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	36 dokumen	75,080,500	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	36 dokumen	35.000.000,00	
4	4 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100 persen	1,274,797,125	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100persen	471.000.000,00	
	4 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	dokumen rumusan kebijakan pemda bidang perekonomian	14 dokumen	568,353,750	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah jenis dokumen rumusan kebijakan pemda bidang perekonomian	3 jenis	115.000.000,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (RP)
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	3 dokumen	275,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	3 dokumen	40.000.000,00	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	12 laporan	140,000,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	12 laporan	40.000.000,00	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2 dokumen	153,353,750	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2 dokumen	35.000.000,00	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Serapan anggaran program dan kegiatan perangkat daerah	94 persen	260,304,000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah jenis dokumen bidang perekonomian	2 jenis	60.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	2 dokumen	148,104,000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	30.000.000,00	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	24 laporan	56,100,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	24 laporan	15.000.000,00	
	Pengelolaan Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan	12 laporan	56,100,000	Pengelolaan Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan	16 laporan	15.000.000,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelaku pengadaan yang terfasilitasi	100 persen	396,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah jenis layanan pengadaan barang dan jasa	2 jenis	290.000.000,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (RP)
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2 dokumen	132,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2 dokumen	100.000.000,00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	1 dokumen	132,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	1 dokumen	160.000.000,00	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	3 orang	132,000,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	3 orang	30.000.000,00	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumusan kebijakan pemda dibidang SDA	10 rumusan	50,139,375	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah jenis dokumen rumusan kebijakan pemda dibidang SDA	2 jenis	6.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelutan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	1 dokumen	20,570,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelutan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	1 dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian	1 dokumen	29,569,375	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	1 dokumen	3.000.000,00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (RP)
1											
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	905,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100persen	1.494.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan penataan kelembagaan keistimewaan	100 persen	610,000,000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah jenis dokumen penataan kelembagaan keistimewaan	5jenis	644.000.000	
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lembaga yang dilakukan penataan bentuk kelembagaan asli kabupaten/kota	18 lembaga	180,000,000	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga yang dilakukan penataan Bentuk kelembagaan Asli kabupaten/Kota	18 lembaga	200.000.000	
	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan yang disusun	1 dokumen	255,000,000	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	5 dokumen	217.000.000	
	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengendalian urusan kelembagaan	3 dokumen	100,000,000	Pembinaan Kelembagaan pelaksana Keistimewaan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan kelembagaan pelaksanaan keistimewaan	47 PD	105.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan	1 dokumen	75,000,000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan	1 dokumen	122.000.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Persentase peningkatan budaya pemerintahan	5 100 persen	6 275.000.000	7 Peningkatan Budaya Pemerintahan	8 Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 jumlah kelompok budaya pemerintahan yang direview	10 47KBP	11 850.000.000	12
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan kabupaten/kota	1 dokumen	275.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan pelaksanaan keistimewaan	2 dokumen	850.000.000	
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tersedia	100 persen	20.000.000						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksanaan Urusan Kelembagaan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	2 buah	20.000.000						
	Total APBD				22.482.199.161					13.170.787.495	
	Total DAIS				1.430.000.000					2.064.870.000	
	Total Anggaran				23.912.199.161					15.235.657.495	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk tahun 2024, Sekretariat Daerah masih melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti tahun sebelumnya. Adapun usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan melalui mekanisme PIWK dan pikir tidak muncul.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD. Ke-10 prioritas nasional tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, serta pembangunan wilayah dan politik, hukum serta pertahanan keamanan. Setda selaku Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah mempunyai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas tersebut. Adapun prioritas pembangunan yang dilaksanakan adalah ekonomi dan pariwisata, social budaya dan penanggulangan kemiskinan, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk sasaran PD dirumuskan dengan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD. Sekretariat Daerah mendukung 1 (satu) prioritas daerah serta 2 (dua) indikator sasaran daerah, yang kemudian dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran Perangkat Daerah. Adapun prioritas dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Adapun tujuan PD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Sekretariat Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	Terwujudnya Kebijakan Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan di tahun 2026	100

Tabel 3.2
Sasaran Sekretariat Daerah

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja BUMD Meningkat	Jumlah Deviden yang diterima Pemerintah Daerah per tahun	21.569.401.847
2	Kualitas Kebijakan Daerah Meningkat	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun n+1	100
		Nilai AKIP	82,5

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Sekretariat Daerah

NO	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU 2022
1	2	3	4
1	Kinerja BUMD Meningkat	Jumlah Deviden yang diterima Pemerintah Daerah per tahun	21.569.401.847
2	Kualitas Kebijakan Daerah Meningkat	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun n+1	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat daerah, yang mana Sekretariat Daerah memiliki fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan. Selain itu, karena adanya perubahan pada susunan perangkat daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki kegiatan yang tidak dimiliki oleh Perangkat Daerah lain karena berhubungan dengan kesekretariatan dan kerumahtanggaan Kepala Daerah. Hasil perumusan program dan kegiatan dikaitkan dengan sasaran PD disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	PD penanggungjawab
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kualitas Kebijakan Daerah Meningkat	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun n+1	100	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	570.870.000	Sekretariat Daerah
					2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	570.870.000	Sekretariat Daerah
					2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	570.870.000	Sekretariat Daerah
			Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun n+1	100	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.109.650.500,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	305.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	35.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	170.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	674.650.500,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	484.650.500,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	155.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	35.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	95.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	40.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	40.000.000,00	Sekretariat Daerah

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	PD penanggungjawab
					4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	15.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	35.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	35.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Kinerja BUMD Meningkat	Jumlah Deviden yang diterima Pemerintah Daerah per tahun	#####	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	471.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	115.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	40.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	40.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	35.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	60.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	30.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	290.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	160.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	30.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	6.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3.000.000,00	Sekretariat Daerah

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	PD penanggungjawab
		Kualitas Kebijakan Daerah Meningkatkan	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun n+1	100	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.494.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	644.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.04.5.01.03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	122.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.04.5.01.08	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	217.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.04.5.01.09	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	850.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	850.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.04.5.09	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	105.000.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.04.5.09.01	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	105.000.000,00	Sekretariat Daerah
				82,5	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.590.136.995,00	Sekretariat Daerah
		Kualitas Kebijakan Daerah Meningkatkan	Nilai AKIP		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.500.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000,00	Sekretariat Daerah

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	PD penanggungjawab
					X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.965.681.995,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.934.681.995,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.375.500,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.375.500,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	27.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.300.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.300.000,00	Sekretariat Daerah

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	PD penanggungjawab
					X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	842.330.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	796.330.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	46.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	1.482.949.500,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	187.200.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	140.400.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.155.349.500,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	89.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	55.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	606.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
					X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6.000.000,00	Sekretariat Daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Sekretariat Daerah merencanakan melaksanakan 5 Program, 20 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan pada tahun 2024.
2. Lokasi pelaksanaan program berada di seluruh Kabupaten Gunungkidul dan luar daerah. Kegiatan yang menysasar di seluruh kawasan Gunungkidul antara lain penyuluhan hukum, pemetaan wilayah, pemasangan patok batas daerah, dan survey kepuasan masyarakat. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan di luar Gunungkidul antara lain kegiatan kerjasama, konsultasi ke kementerian, studi banding dan lain sebagainya.

Program dan kegiatan yang ada di kabupaten Gunungkidul dapat dikelompokkan berdasarkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yakni :

1. Ketentraman dan Ketertiban
2. Reformasi Birokrasi
3. Pendidikan dan Kesehatan
4. Ketahanan Pangan
5. Ekonomi, UMKM, Investasi dan Pariwisata
6. Penanggulangan Kemiskinan
7. Insfrastruktur, LH dan Pengelolaan Bencana

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2024
dan Prakiraan Maju tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					570.870.000				510.000.000
2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				570.870.000				510.000.000
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan (%)		100	570.870.000				510.000.000
2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah batas desa yang ditegaskan (Desa)	(KAB. GUNUNGGIDUL)	14	570.870.000			14	510.000.000
2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGIDUL)	14		Dana Keistimewaan DIY	desa/ katurahan	14	510.000.000
4					14.664.787.495				22.437.000.000
4,01	SEKRETARIAT DAERAH				14.664.787.495				22.437.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	11.590.136.995				17.537.000.000
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	(Semua kapanewon, semua katurahan, KAB. GUNUNGGIDUL)	32	27.500.000			32	54.000.000
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGIDUL)	32	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.	sekretariat daerah	32	30.000.000
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(semua kapanewon, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.	PD	1	3.000.000
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.	PD	1	5.000.000
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGIDUL)	2	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.	PD	2	3.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	2	3.000.000
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	17	500.000		PD	17	3.000.000
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	5	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	5	7.000.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan (Dokumen)	(Semua kapanewon, Semua kalahurahan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	38	7.965.681.995			38	8.078.000.000
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1848	7.934.681.995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1848	8.000.000.000
									8.000.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Akhir Tahun PD	2	3.000.000
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	13	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Keuangan PD	13	75.000.000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian (Jenis)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	3	42.000.000			3	145.000.000
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	196	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	196	10.000.000
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	12	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	12	50.000.000
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000				85.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGIDUL)	10		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	10	85.000.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>jumlah bulan terfasilitasi layanan administrasi umum (Bulan)</i>	(KAB. GUNUNGGIDUL)	12	490.375.500			12	1.850.000.000
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	63.375.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	barang	12	200.000.000
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tamu	12	800.000.000
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGIDUL)	200	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	200	750.000.000
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	arsip	12	100.000.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah bulan terfasilitasi layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bulan)</i>	(KAB. GUNUNGGIDUL)	12	44.300.000			12	260.000.000
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)</i>	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGIDUL)	60	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana	mebel	60	10.000.000 10.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		GUNUNGGKIDUL)		42.300.000	Alokasi Umum.			250.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	3		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.	gedung unit I, II dan Rumah dinas	3	250.000.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan fasilitas pemuhan keuangan dan operasional KDH WKDH (Bulan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	14	842.330.000			14	935.000.000
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	796.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.	KDh dan WKDH	2	860.000.000
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	46.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.	KDh dan WKDH	1	75.000.000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan layanan kebutuhan kerumahtanggaan setda (Bulan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	12	1.482.949.500			12	4.475.000.000
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	(Semua Kapanewon, KAB.		187.200.000	Dana Transfer Umum-Dana			410.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(Paket)	GUNUNGGKIDUL)	12		Alokasi Umum	barang	12	410.000.000
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	12	140.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	barang	12	315.000.000
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	12	1.155.349.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	barang dan jasa	12	3.750.000.000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah jenis dokumen penataan organisasi (Jenis)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	14	89.000.000			14	215.000.000
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	3	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	3	30.000.000
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1	15.000.000
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	7	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	7	90.000.000
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	3	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	3	80.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis layanan kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik (Jenis)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	2	606.000.000			2	1.525.000.000
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGKIDUL)	12	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH/WKDH	12	500.000.000 500.000.000
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGKIDUL)	12	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kdh/wkdh	12	1.000.000.000 1.000.000.000
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	(Semua Kapanewon, KAB. GUNUNGKIDUL)	12	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH/WKDH	12	25.000.000 25.000.000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Kesra Yang Ditindaklanjuti Menjadi Rumusan Kebijakan (%)		100	1.109.650.500				2.795.000.000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah jenis dokumen administrasi tata pemerintahan (Jenis)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	8	305.000.000			8	530.000.000
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGKIDUL)	3	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	3	225.000.000 225.000.000
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	(Semua kapanewon,	1	35.000.000	Dana Transfer	wilayah	1	55.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Kewilayahan (Dokumen)</i>	KAB. GUNUNGGKIDUL			<i>Umum-Dana Alokasi Umum</i>			55.000.000
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	6	170.000.000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	PD	6	250.000.000 250.000.000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>jumlah jenis dokumen kebijakan kesra yang diterapkan (Jenis)</i>	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	3	674.650.500			3	1.900.000.000
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)</i>	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	30	484.650.500	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>kelompok lintas agama, FASI</i>	30	1.500.000.000 1.500.000.000
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)</i>	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	8	155.000.000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>kegiatan kesos</i>	8	300.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, dan Transkrip Lunas (Dokumen)	(Semua kabupaten, KAB. GUNUNGKIDUL)	10	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	10	100.000.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	jumlah jenis dokumen produk hukum daerah yang ditetapkan (Jenis)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	4	95.000.000			4	290.000.000
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	(Semua kabupaten, KAB. GUNUNGKIDUL)	62	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	62	115.000.000
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	(Semua kabupaten, KAB. GUNUNGKIDUL)	2	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN bermasalah hukum	2	120.000.000
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	(Semua kabupaten, KAB. GUNUNGKIDUL)	62	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	62	55.000.000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	jumlah jenis dokumen kerjasama (Jenis)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	3	35.000.000			3	75.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	36	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	36	75.000.000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti Menjadi Rumusan Kebijakan (%)		100	471.000.000				1.565.000.000
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	jumlah jenis dokumen rumusan kebijakan pemda bidang perekonomian. (Jenis)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	3	115.000.000			3	550.000.000
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	3	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BUMD/BLUD	3	200.000.000
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan (Laporan)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	12	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	12	150.000.000
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	2	200.000.000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	jumlah jenis dokumen bidang perekonomian.	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	60.000.000			2	235.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	(Jenis) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	(Semua kabupaten, KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	2	100.000.000
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	(Semua kabupaten, KAB. GUNUNGGKIDUL)	24	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	24	75.000.000
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	(Semua kabupaten, KAB. GUNUNGGKIDUL)	12	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	12	60.000.000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah jenis layanan pengadaan barang dan jasa (Jenis)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	290.000.000			2	740.000.000
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	(Semua kabupaten, KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	2	500.000.000
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	(Semua kabupaten, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	1	120.000.000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	(Semua kabupaten, KAB. GUNUNGGKIDUL)	3	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	3	120.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>jumlah jenis dokumen rumusan kebijakan pemda dibidang SDA (Jenis)</i>	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	6.000.000			2	40.000.000
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)</i>	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KUKM	1	20.000.000
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)</i>	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	3.000.000		masyarakat	1	20.000.000
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)</i>		100	1.494.000.000				540.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	<i>jumlah jenis dokumen penataan kelembagaan keistimewaan (Jenis)</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	5	539.000.000			5	260.000.000
4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota (Lembaga)</i>	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGKIDUL)	18	200.000.000	Dana Keistimewaan DIY	<i>lembaga</i>	18	180.000.000
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)</i>	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	122.000.000	Dana Keistimewaan DIY	<i>Kapanewon</i>	1	80.000.000
4.01.04.5.01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan (Dokumen)</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	47	217.000.000	Dana Keistimewaan DIY	<i>masyarakat</i>	47	280.000.000
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	<i>jumlah kelompok budaya pemerintahan yang direview (Kelompok)</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	1	850.000.000	Dana Keistimewaan DIY	<i>PD</i>	1	280.000.000
4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	(Semua kapanewon, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	850.000.000	Dana Keistimewaan DIY		1	280.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>GUNUNGGKIDUL</i>						
4.01.04.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan				105.000.000				-
4.01.04.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksanaan Keistimewaan	<i>Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksanaan Keistimewaan (Lembaga)</i>			105.000.000	<i>Dana Keistimewaan DIY</i>	<i>PD</i>		-
J U M L A H					15.235.657.495				22.947.000.000

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan terjisebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
SEKRETARIAT DAERAH,

SRI SUHARTANTA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kepala Daerah membuat Surat Edaran nomor 000.7.6.1/1013 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Hal ini mengamanatkan adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyusun awal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026, Menurut Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan ditindaklanjuti Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

a. Pengertian Rencana Kerja PD

Rencana Kerja PD adalah salah satu dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang secara substansial memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul, bahwa untuk mewujudkan visi, misi kepala daerah masing-masing Perangkat Daerah (PD) wajib merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang telah terlaksana dalam satu tahun dan sejauh mana capaian kinerja terhadap target-target yang telah tertuang pada RPJMD.

b. Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam melaksanakan dan mencapai target program dan kegiatan dalam tahun 2024, Tahapan-tahapan proses penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penyusunan Rencana Kerja PD.

Sebelum RKPD diterima, Sekretariat DPRD menyusun Renja yang mencakup usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2021. Tahap persiapan melakukan identifikasi para pemangku kepentingan, pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD, pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan mempersiapkan bahan Forum Koordinasi Perangkat Daerah, serta pengisian formulir Daftar Usulan Rencana Program dan Kegiatan (DURPK), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja PD, serta melakukan analisa dan hubungan antar dokumen meliputi RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, terhadap RPJMD dan Renstra PD, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD.

2. Tahap Penyusunan Renja PD.

Penyusunan renja ini dilakukan sebagai langkah penyusunan Rencana Kerja PD yang berdasarkan Renstra PD sebelum ada masukan dari berbagai pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan musrenbang dan forum Perangkat Daerah. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

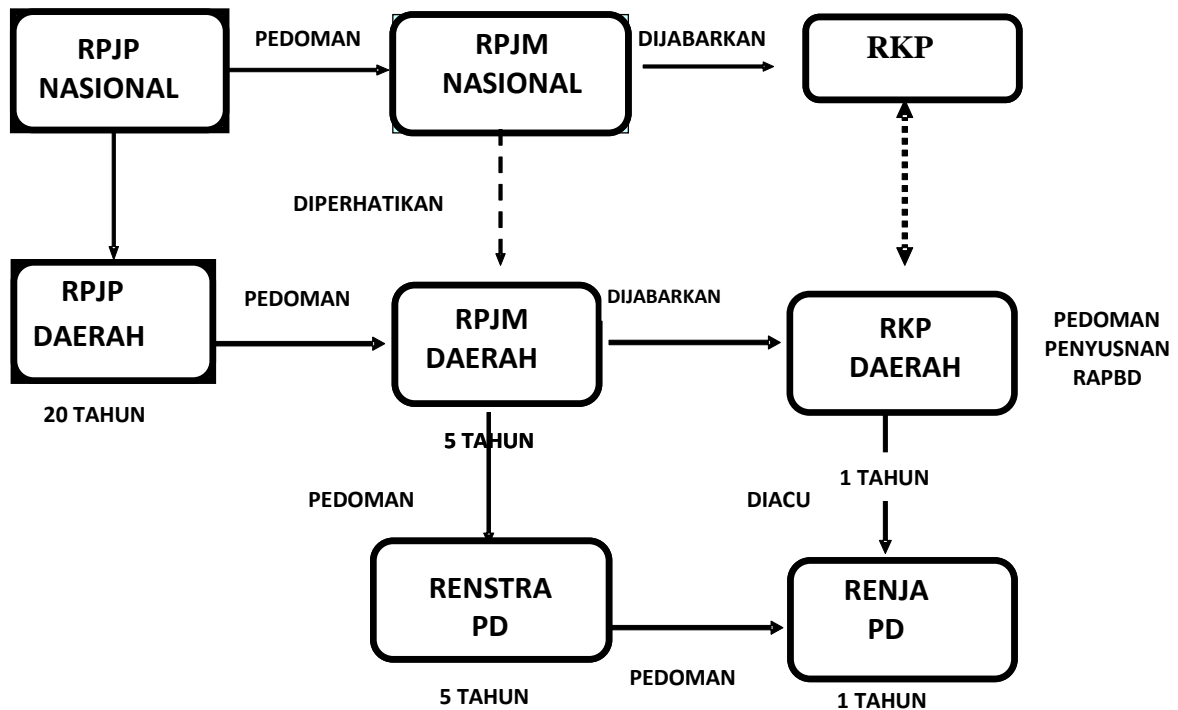
3. Tahap Pelaksanaan Forum PD.

Forum PD dilaksanakan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terhadap Renja PD.

4. Tahap Penetapan Renja PD.

Renja yang sudah diverifikasi dan diajukan kepada Kepala Daerah oleh Bappeda, akan mendapat pengesahan, selanjutnya Renja akan ditetapkan oleh Kepala PD.

c. Keterkaitan Renja PD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dalam Proses Penyusunan RAPBD dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 1.1

Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perda tentang Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan Sekretariat DPRD.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul;
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan;
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi bagian-bagian dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD;
4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sesuai acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 - 4.2 Uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan.
- BAB V PENUTUP
 - 5.1 Catatan Penting
 - 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - 5.3 Rencana Tindak lanjut

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul yang diusulkan pada tahun 2024 sejumlah 2 (dua) program yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu (n-2/Tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan /tahun 2023. Untuk selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun sebelumnya. Evaluasi dan analisis capaian Renja tahun 2022 yang dijabarkan dalam 2 (dua) Program terdapat satu program yang merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD yaitu Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat, dengan jenis program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Sementara peningkatan kualitas pelayanan bidang administrasi dan keuangan merupakan bagian utama dalam pelayanan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fasilitator dan pelayan administrasi dan keuangan DPRD. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 telah terlaksana dengan beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Tersebut rincian evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan triwulan IV sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan :

Berdasarkan indikator pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 triwulan IV ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target. Adapun uraian realisasi program kegiatan yang tidak mencapai target kinerja anggaran tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 79,05%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 75,10% capaian kinerja maupun capaian realisasi fisik tidak dapat maksimal karena adanya sisa anggaran rapat koordinasi dan pada perjalanan dinas yang tidak terlaksana karena disesuaikan dengan undangan dan kegiatan yang dilaksanakan.
- ii. Pendalaman Tugas DPRD
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 78,77%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 77,10% terdapat sisa anggaran pada komponen belanja Pendalaman Tugas DPRD. Terdapat selisih anggaran karena Adanya bimtek adkasi yang hanya terlaksana 1 kali dari target 4 kali karena menyesuaikan agenda pimpinan DPRD.
- iii. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Pada sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 89,58%. sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 86,15%. Adanya sisa anggaran jumpa pers yang tidak dapat terlaksana karena tergantung agenda pimpinan.
- iv. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaa Tugas DPRD

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaa Tugas DPRD pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100% sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 52,48%. Terdapat sisa anggaran karena adanya sisa tiket dan pengambilan penginapan 30% untuk perjalanan dinas luar daerah.

v. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Pada pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 32,54%. Untuk sub kegiatan fasilitasi tugas pimpinan ini sebagian besar anggaran tidak dapat terealisasi karena fasilitasi pimpinan menyesuaikan undangan dan agenda pimpinan, adanya sisa tiket dan pengambilan penginapan 30% untuk perjalanan dinas luar daerah.

vi. Penyusunan Program Kerja DPRD

Pada pelaksanaan sub kegiatan penyusunan program kerja DPRD pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 87,5%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 32,83%. Kegiatan yang tidak dapat terlaksana optimal adalah adanya anggaran rapat Badan Musyawarah yang hanya dapat terlaksana 18 kali dari target 24 kali rapat.

2.1.2 Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan dapat memenuhi target kinerja keluaran, adapun rincian program kegiatan tersebut antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adapun evaluasi masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 6 sub kegiatan antara lain :

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 apabila dilihat dari realisasi kinerja dapat terlaksana 100%, dan dari realisasi anggaran dapat terserap yaitu 99,63%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 apabila dilihat dari realisasi kinerja dapat terlaksana 100%, dengan realisasi anggaran yaitu 99,85%.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 apabila dilihat dari realisasi kinerja dapat terlaksana 100%, dengan realisasi anggaran 99,85%.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 apabila dilihat dari realisasi kinerja dapat terlaksana 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 97,07%.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 apabila dilihat dari realisasi kinerja dapat terlaksana 100%, dengan realisasi anggaran dapat terserap maksimal yaitu 100%.

- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 apabila dilihat dari realisasi kinerja dapat terlaksana 100%, dengan realisasi anggaran yaitu 99,92%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan dimana realisasi capaian, adalah :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan sub kegiatan gaji dan tunjangan ASN pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 95,98%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran terealisasi sebesar 93,83%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 98,63%.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah ini hanya terdapat 1 sub kegiatan, yaitu :
- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Pelaksanaan sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 99,45%.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah ini terdiri dari 7 sub kegiatan, dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 98,18%.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 99,65%.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 99,52%.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 95,45%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 88,72% terdapat sisa anggaran karena realisasi belanja karangan bunga disesuaikan dengan adanya event atau dukacita.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 88,53% terdapat sisa anggaran di

- beberapa komponen belanja barang cetakan dan penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 99,40%.
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 99,95%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan barang milik daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
- a. Pengadaan Mebel
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 98,37%.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 95,81%.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 3 sub kegiatan, dimana realisasinya adalah sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 97,68%.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 57,71% terdapat sisa anggaran karena adanya sisa Anggaran pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik .
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggran sebesar 98,05%.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yang dapat memenuhi capaian target kinerja, dimana capaian kinerja adalah sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 99,89%.
 - b. Pemeliharaan Mebel
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan

- realisasi anggaran sebesar 64,85% terdapat sisa anggaran karena pemeliharaan mebel disesuaikan dengan kondisi barang.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 91,28%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 80,77 % terdapat sisa anggaran karena Pemeliharaan peralatan dan mesin disesuaikan dengan kondisi barang.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 96,45% sehingga untuk sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dapat terlaksana dengan baik.
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 76,51% sehingga untuk sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya terdapat sisa anggaran karena pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor disesuaikan dengan kondisi barang.
8. Penataan Organisasi. Kegiatan ini hanya terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
- a. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 98,06%.
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Pada kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD terdapat 3 sub kegiatan dengan capaian kinerja yang dapat memenuhi target, yaitu :
- a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Pada sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 99,38%.
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Pada sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD pada tahun 2022 hanya dianggarkan atribut yang berupa seragam, name tag dan pin. Dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 98,37%.
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 98,06%.
10. Layanan Administrasi DPRD
Untuk kegiatan layanan administrasi DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan dengan capaian kinerja masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Pada sub kegiatan Pada sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100% sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 40,08%. Adanya sisa anggaran karena disesuaikan dengan agenda rapat-rapat yang lain.

- b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Pada sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100,00% sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 100,00 %. Sehingga pada sub kegiatan ini tidak terdapat sisa anggaran.
- II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdiri dari 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan, adapun evaluasi masing-masing sub kegiatan yang dapat memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :
1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Untuk kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD terdiri dari 3 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Pada sub kegiatan penyediaan penyusunan dan pembahasan program pembentukan daerah pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100% sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 26,90%. Untuk pelaksanaan sub kegiatan ini terdapat sisa anggaran untuk komponen belanja SPPD untuk konsultasi ke provinsi DIY disesuaikan dengan acara Bapemperda.
 - b. Pembahasan Peraturan Daerah
Pada sub kegiatan penyediaan penyusunan dan pembahasan program pembentukan daerah pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100% sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 62,20%. Untuk pelaksanaan sub kegiatan ini terdapat sisa karena adanya sisa tiket dan pengambilan penginapan 30% untuk perjalanan dinas luar daerah.
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
Pada pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan kajian perundang-undangan pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 96,65%.
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
Untuk kegiatan pembahasan kebijakan anggaran terdiri dari 6 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS
Pada pelaksanaan sub kegiatan pembahasan KUA dan PPAS pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 94,04%.
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Pada pelaksanaan sub kegiatan pembahasan perubahan KUA dan PPAS pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 93,20%.
 - c. Pembahasan APBD
Pada pelaksanaan sub kegiatan pembahasan APBD pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 50,20%. Terdapat sisa anggaran karena adanya sisa tiket dan pengambilan penginapan 30% untuk perjalanan dinas luar daerah serta sisa anggaran rapat karena menyesuaikan Badan Anggaran pada saat membahas APBD.

- d. Pembahasan APBD Perubahan
Pada pelaksanaan sub kegiatan pembahasan APBD perubahan pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 94,79%.
 - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Pada pelaksanaan sub kegiatan pembahasan pertanggungjawaban APBD pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 96,83%. Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Pengawasan Penggunaan Anggaran
Pada pelaksanaan sub kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 49,72 %. Pada sub kegiatan ini terdapat sisa anggaran karena adanya sisa tiket dan pengambilan penginapan 30% untuk perjalanan dinas luar daerah, dan adanya sisa anggaran rapat komisi karena beberapa kali rapat kerja diganti dengan monitoring di lapangan.
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - a. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Pada pelaksanaan sub kegiatan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 93,52%.
 - b. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Pada pelaksanaan sub kegiatan penyediaan tenaga ahli fraksi pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 97,62%.
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Untuk kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terdiri dari 2 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pada pelaksanaan sub kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 79,39%. Adanya sisa anggaran rapat karena untuk pokir perubahan tidak dilaksanakan rapat.
 - b. Pelaksanaan Reses
Pada pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan reses pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 99,70%.
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - a. Pengawasan Kode Etik DPRD
Pada pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2022, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 42,86%, terdapat sisa anggaran karena rapat untuk pengawasan kode etik sudah dilaksanakan di awal tahun.
- 2.1.3 Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan:
- Untuk tahun 2022 sampai dengan triwulan IV tidak terdapat sub kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran, sehingga perlu

dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan pada

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Adanya kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja yang tergantung pada agenda dewan dan undangan dari pihak lain.
- Terdapat kegiatan yang menyesuaikan dengan permintaan masyarakat, sehingga jika tidak ada permintaan dari masyarakat maka capaian tidak tercapai 100%.
- Adanya sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak dapat diefisiensi pada APBD perubahan.
- Belum tersedianya database dan sistem informasi secara terintegrasi sehingga harus entri data berulang dan tidak efektif.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra sebagai berikut :

Terdapat beberapa faktor yang akan berpengaruh pada upaya pencapaian target :

1. Perumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan target indikator yang dapat terlaksana.
2. Upaya/strategi dan perbaikan indikator dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
3. Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Adanya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, program dan kegiatan. Sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Dilakukannya pencermatan perencanaan anggaran kegiatan oleh pejabat pengampu kegiatan serta diperlukan sistim monitoring dan evaluasi kegiatan secara intens.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 = 10/4
	SEKRETARIAT DPRD									
4	URUSAN PEMERINTAHAN									
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ Kota terlaksana dengan baik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik								
4 02 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana	500	100	100	100	100	100	277.78	55.55
4 02 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	5	1	1	1	100		2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah Renja Perubahan	5	1	1	100		2	40	
		Pelaksanaan Forum PD	5	1	1	100		2	40	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	3			3	6	50	
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	100		2		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1			1	2	50	
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5	1	1	100		2	40	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4				1	1	25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	5	1	1	100	1	2	40	
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	5	1	1	100	1	2	40	
		Jumlah Dokumen ROPK	5	1	1	100	1	2	40	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8					2	25	
4 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	5	1	1	0	1	1	20	
		Jumlah Perubahan Perjanjian Kinerja	5	1	1	0	1	1	20	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8					2	25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	4	4	4	75	17	25	
4 01 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen e-MONEV (Evaluasi RKPD)	20	4	4	75	35	7	35	
		Jumlah Dokumen Laporan TEPPRA	60	12	12	75	35	21	35	
		Jumlah Dokumen LKJIP	5	1	1	100	40	2	40	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16				25	4	25	
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu	500	100	100	100	75.38	376.92	75.38	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan			14	78	78.57	11	78.57	
		Jumlah ASN yang mendapatkan TPP			12	75	75	9	75	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2240				560	560	25	
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK	5	1	1	100		2	40	
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4				1	1	25	
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jasa laporan keuangan tersedia	60	12	12	75		21	35	
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	60	12	12	75		21	35	
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	5	1	1	100		2	40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 01		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52				13	13	25	
4 02 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	500	100	100	100	100	277.5	55.55	
4 02 01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	210	42	40	40	0	73	34.76	
4 02 01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24				6	6	25	
4 02 01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23				5	5	21.76	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksana	100	100	97.53	97.53	100	271.25	2.71	
4 02 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	60	12	12	75	12	21	35	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48				12	12	25	
4 02 01 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK terpenuhi	60	12	10	100	10	20	33.33	
		Jumlah Laptop terbeli	15	3	3	100	3	6	40	
		Jumlah printer terbeli	15	3	2	100	2	5	33.33	
		Jumlah scanner terbeli	5	1	1	100	1	2	40	
		Jumlah voice recorder			5	100				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian kegiatan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 01	2.06	03	48				12	12	25	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
4 02 01	2.06	03	15	3	8	100		9	60	
		Jumlah peralatan rumah tangga tersedia								
4 02 01	2.06	03	11				3	3	27.27	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								
4 02 01	2.06	04	40	8	16	100		22	55	
		Jumlah belanja bendera yang terbeli								
4 02 01	2.06	04	1250	250	215	100		415	33.2	
		Jumlah cinderamata/ plakat yang terbeli								
4 02 01	2.06	04	50	10				10	20	
		Jumlah dekorasi yang terbeli								
4 02 01	2.06	04			0	0		0	0	
		Jumlah figura yang terbeli								
4 02 01	2.06	04	50	10	22	81.8		22	44	
		Jumlah karangan bunga yang terbeli								
4 02 01	2.06	04	50	10	14	100		21	42	
		Jumlah spanduk yang terbeli								
4 02 01	2.06	04	20				5	5	25	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, SPPD, BKP, Disposisi, box arsip dll	7.325	1.465	1.465	100	1779	24.28		
		Jumlah Fotocopy/penggandaan	100000	20000	18.600	100	33850	33.85		
		Jumlah jilid dokumen	100	20	20	75	35	35		
		Jumlah Cetak Buku Kerja		60	60	100	-	-		
		Jumlah Cetak Kalender		150	150	100	-	-		
		Jumlah cetak buku tata tertib DPRD		100	100	100				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48				12	25		
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bacaan peraturan perundang undangan yang terbeli	50	10	-	-	10	20		
		Jumlah surat kabar / majalah yang terbayar (5jenis)	60	12	12	100	21	35		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5936				1484	1484	25	
4 02	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu DPRD	22.500	4500	6.642	100	8036	8036	35.71	
		Jumlah minum snack tamu DPRD	22.500	4500	6.642	100	8036	8036	35.71	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48				12	12	25	
4 02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi /konsultasi dinas luar daerah Jawa Barat/ Jawa Timur/ Dejabotabek	200	20	28	100	34	34	17	
		Jumlah makan dan minum petugas keamanan rumah dinas dan kantor	12810	2562	2.562	85.1	4185	4185	32.67	
		jumlah makan minum rapat koordinasi yang tersedia	2250	450	497	69	817	817	36.31	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		jumlah minum dan snack rapat koordinasi yang tersedia	2250	450	720	484	67.2	803	35.68	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah wilayah Gunungkidul (TU, PK, Risaalah, Protokol)	1000	200	200	184	92	362	36.2	
		Jumlah perjalanan dinas (TU, PK, Risaalah, Protokol) dalam daerah wilayah DIY	840	168	210	128	61	222	26.42	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96					24	25	
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	500		100	100	100	280	56	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah alamari terbeli	5	1	1		100	2	40	
		jumlah rak arsip terbeli	25	5	5		100	10	40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19				6	6	31.57	
		-								
		Jumlah mesin pemotong rumput terbeli								
		Jumlah vacum cleaner yang terbeli								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2				2	2	100	
4		Jumlah sewa gedung kantor	60	12	-	0		12	20	
		Jumlah sewa gudang	60	12		100		21	35	
		Jumlah sewa kendaraan angkut barang	60	12	25	100		37	61.66	
		Jumlah alat pendingin/AC portebel			2	100				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah Genset yang terbeli								
		Jumlah AC yang terbeli								
		Jumlah Gordyn terbeli								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40				28	28	70	
4 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	400				100	100	176.66	44.16
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat tersedia	60	12			12	12	21	35
		Jumlah surat yang dikirim	7500	150			1500	1500	1310	17.46
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48						12	25
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air (2 rekening)	60	12			12	12	21	35

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah tagihan listrik (5 rekening)	60	12	12	100		21	35	
		Jumlah tagihan telepon (6 rekening)	60	12	12	100		21	35	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	864				216	216	25	
4 02 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa kebersihan kantor dibayar	60	12	12	100		21	35	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48				12	12	25	
4 02 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	500	100	99,43	99,43	100	272,58	54,51	
4 02 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan R2 dan R4 yang terbayar pajaknya (R2 15 unit, R4 11 unit)	130	26	25	100		44	33,84	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
	Pajak, dan Perizinan Kendararaan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas R2 dan R4 terfasilitasi (R2 15 unit, R4 11 unit)	130	26	25	25	100	45	34.61	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1300					325	25	
4 02 01	05	Pemeliharaan Mebel	5	1	1	100		1.50	30	
		Jumlah mebel yang dipelihara	4				1	1	25	
4 02 01	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	20				20	20	
		Jumlah Genset yang terpelihara	10	2	2	100		3	30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah laptop/computer yang terfasilitasi pemeliharannya	50	25	35	32	91.4	42	84	
		Jumlah LCD ruang rapat yang terfasilitasi pemeliharannya	35	7	2	2	100	8	22.85	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terfasilitasi pemeliharannya	25	5	-	-	-	5	20	
		Jumlah printer yang terpelihara	105	21	35	35	100	39	37.14	
		Jumlah scanner yang terpelihara	10	2	2	2	100	3	30	
		Jumlah mesin tik yang dipelihara			2	2	100			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	340					80	23.52	
4 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya tersedia			12	12	100	9		
		Jumlah gedung kantor terpelihara	15	3	4	4	100	3	20	
		Jumlah rumah dinas terpelihara	5	1	1	1	100	1	20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah taman terpelihara	1250	250	-	-	-	250	20	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16				4	4	25	
4 02 01	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC dan alat pendingin yang dipelihara	95	19	25	25		43	45.26	
		Jumlah alat studio, sound sistem yang dipelihara	15	3	3	3		5	33.33	
		Jumlah pemeliharaan jaringan internet	5	1	1	1		2	40	
		jumlah pemeliharaan jaringan listrik	5	1	1	1		2	40	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	400				100	100	25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		bilitasi								
4 02 01 2.13	Penataan Organisasi	Nilai IKM PD	400	80	100	100	100	180	45	
4 01 01 2.13	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen IKM	10	2	2	2	100	4	40	
		Jumlah Dokumen Profil PD	1000	200	200	200	100		40	
		jumlah dokumen reuiu SOP	5	1	1	1	100	2	40	
		Jumlah dokumen RTP	5	1	1	1	100	2	40	
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	500	100	100	100	100	294.40	58.88	
4 02 01 2.15	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapat Gaji dan Tunjangan	70	14	14	14	100	25	35.71	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	2520					630	25	
4 02 01 2.15	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian adat yang tersedia	230	46	46	46	100	92	40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah pakaian batik tradisional yang tersedia								
		Jumlah pakaian dinas harian yang tersedia	225	45	45	100		90	40	
		Jumlah pakaian sipil harian yang tersedia	320	64	64	100		128	40	
		Jumlah pakaian sipil lengkap yang tersedia	230	46	46	100		92	40	
		Jumlah pakaian sipil resmi yang tersedia	230	46	46	100		92	40	
		Jumlah pakaian satpam dan kelengkapannya			16	100		16		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3968				992	992	25	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check Up	225	45	26	100		45	33.33	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	180				45	45	25	
4 02 01 2.16	Layanan	Persentase	500	100	100	100	100	280	56	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 01	Administrasi DPRD	pemenuhan layanan Fasilitasi Administrasi DPRD	155	31	25	25	100	54	34.83	
4 02 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat rapat DPRD	180	12	12	100	45	45	25	
4 02 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60	12	12	100	21	21	35	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	48	80	80	118.75	12	12	25	
4 02 02	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	400	100	100	100	88	239.86	59.96	
4 02 02	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	500	100	100	100				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Propemperda yang disahkan	10	2	2	100	2	2.25	32.5	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8				2	2	25	
4 02 02	Pembahasan Peraturan Daerah	Jasa pembahasan peraturan daerah tersedia			12	100	12	9		
		Jumlah Dokumen Kontrak Jasa pembuatan Naskah Akademik	15	3	3	100	3	6	40	
		Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang tersusun	15	3	3	100	3	6	40	
		Jumlah Raperda yang dibahas	60	12	9	100	9	18	30	
		Jumlah Risalah Rapat-Rapat	125	25	25	100	25	42	33.6	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Peraturan Daerah	72				18	18	25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 02 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Peraturan Perundangan yang dibahas	40	8	8	100		13	32.5	
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	32				8	8	25	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	-								
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4				1	1	25	
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	500	100	100	100	100	281.25	56.5	
4 02 02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disahkan	5	1	1	100		2	40	
		Jumlah Dokumen PIWK yang disyahkan	5	1	1	100		2	40	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	8				2	2	25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 02 02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS perubahan yang disahkan	5	1	1	1	100	1.75	35	
		Jumlah rapat-rapat								
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4					1	25	
4 02 02 02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang disahkan	5	1	1	1	100	1.75	35	
		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	4					1	25	
4 02 02 02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen apbd perubahan yang disahkan	5	1	1	1	100	1	20	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4					1	25	
4 02 02 02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen pertanggungjawaban APBD	5	1	1	1	100	2	40	
		Jumlah LHP yang dibahas			1	1	100	1		
		Jumlah dokumen rekomendasi LKPJ			1	1	100	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	8				2	2	25	
4	2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	400		100	100	82	157	39.25	
4	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	16				4	4	25	
4	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16				4	4	25	
4	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16				4	4	25	
4	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan	16				4	4	25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02	Pemerintahan Bidang Perekonomian	Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian								
4 02 02	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen rekomendasi penggunaan anggaran	20	4	4	100	0	7	35	
4 2		Sosialisasi, Pengawasan pelaksanaan perda			-	-				
4 2 2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD	400	80	93.70	93.70	82	126.12	31.53	
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek Adkasi	15	3	1	33.3		4	26.67	
		Jumlah Bimtek Asdeksi	20	4	24	100		5	25	
		Jumlah Bimtek Lemhanas	5	1	-	-		1	20	
		Jumlah Bimtek Umum	30	6	6	100		12	40	
		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	79				19	19	24.05	
4 02 02	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah belanja publikasi/dokumenntasi	15.000	3.000	-	-		4284	28.56	
		Jumlah pers release kegiatan	120	24	14	58.3		37	30.83	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		anggota DPRD								
		Jumlah publikasi DPRD				1	1	100		
		Jumlah publikasi luar ruang				1	1	100		
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	96						24	25
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pakar dan tim ahli yang terbayar (18 orang x 12 bulan)	60	12		12	12	100	21	35
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	72						18	25
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga ahli fraksi yang terbayar (7 orang x 12 bulan)	60	12		12	12	100	21	35
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	28						7	25
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jasa penyelenggaraan hubungan masyarakat tersedia	60	12		12	12	100	22	36.67
		Jumlah dialog warga.ketua				48	48	100	29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah dialog warga wakil ketua 1			40	40	100	25		
		Jumlah dialog warga wakil ketua 1 & 2			72	72	100	40		
		Jumlah Hearing/dialog/koordinasi dengan pejabat, tokoh masyarakat dan agama	420	84	-	-	-	84	40	
		Jumlah kegiatan Audensi	120	24	5	5	100	28	23.33	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	48					12	25	
4 02 02	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen hasil rapat Banmus	180	36	24	18	75	50	27.77	
		Jumlah Dokumen program kerja DPRD	5	1	1	1	100	1.50	30	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4					1	25	
4 2 2	Penyerapan dan Penghimpunan	Persentase pelaksanaan penyerapan dan	500	100	100	100	100	268.75	53.75	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 02 02 02	Aspirasi Masyarakat	penghimpunan aspirasi masyarakat								
4 02 02 02 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok pikiran yang disahkan	5	1	1	100		1.75	35	
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4				1	1	25	
4 02 02 02 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	15	3	3	100		5	33.33	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12				3	3	25	
4 02 02 02 06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan kode etik DPRD	400	80	80	100		212	53	
4 02 02 02 06	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan implementasi kode etik	20	4	2	100		6	30	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8				2	2	25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Presentase pembahasan kerjasama daerah terlaksana	400	-	-	0	79	94	23.5	
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah nota kesepakatan kerja sama	5	1	1	0	1	1	40	
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4				1	1	25	
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah publikasi kerjasama daerah yang terlaksana	5	1	-	0		1	26	
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	4				1	1	25	
4 2 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	400	100	80	80	82	210.46	52.6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 02 02 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah konsultasi/koordinasi/studi banding/kunjungan kerja DPRD dalam daerah/DIY	180	36	4	4	100	39	21.67	
		Jumlah Koordinasi/konsultasi/studi banding/kunjungan kerja DPRD luar DIY dan Luar Pulau	40	8	8	8	100	16	40	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48					12	25	
4 02 02 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah konsultasi/koordinasi/kunjungan kerja/menghadiri undangan dalam daerah	180	36	36	36	100	53	29.4	
		Jumlah Koordinasi/konsultasi/studi banding/kunjungan kerja DPRD luar DIY dan Luar Daerah	110	22	14	14	100	31	28.18	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48				12	12	25	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran								
	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Jumlah jasa peralatan perlengkapan perkantoran terpenuhi								
		Jumlah belanja spanduk;								
		Jumlah belanja plakat;								
		Jumlah tagihan telepon dibayar (6 rekening x 12 bulan)		72						
		Jumlah tagihan rekening air (2 rekening x 12 bulan)		24						
		jumlah tagihan listrik (5 rek x 12 bln);		60						
		Jumlah tagihan surat		60						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		kabar/majalah (5 jenis x 12 bulan);								
		Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya;		10						
		Jumlah Motor dinas yang terbayar pajaknya;		15						
		Jumlah barang cetakan;		340						
		Jumlah cetak buku kerja;		0						
		Jumlah cetak kalender;		0						
		Jumlah fotocopy;		26.000						
		jumlah jilid;		25						
		jumlah alat elektronik dan mekanik terfasilitasi pemeliharannya;		6						
		jumlah laptop/notebook dan komputer terfasilitasi pemeliharannya;		24						
		jumlah komputer terfasilitasi pemeliharannya;		0						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah peralatan gedung kantor terfasilitasi pemeliharannya;		0						
		Jumlah perlengkapan kantor terfasilitasi pemeliharannya;		8						
		Jumlah buku peraturan perundang-undangan tersedia;		0						
		6 jenis data (arsip persuratan);		6						
		Jumlah ATK yang dibeli;		36						
		Jumlah komponen alat listrik;		31						
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih;		28						
		Jumlah Laptop yang terseli;		46						
		Jumlah kamera terbeli;		2						
		Jumlah dispenser terbeli;		4						
		Jumlah meja kursi tamu terbeli;		2						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah springbed terbeli;		3						
		Jumlah printer terbeli;		3						
		Jumlah komputer terbeli		4						
		jaringan internet terpelihara		1						
		Jumlah dekorasi		1						
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Frekwensi rapat, konsultasi, dan koordinasi								
		Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk pegawai;		3042						
		Jumlah makan minum dan snack tersedia untuk rapat dan tamu;		3625						
		Jumlah tunjangan belanja rumah tangga Ketua DPRD;		12						
		Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam daerah;		313						
		Frekuensi rapat, konsultasi, dan		27						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		koordinasi Luar daerah								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran									
	Pengadaan/pe mbangunan sarana prasarana perkantoran	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dibeli								
		Jumlah AC yang dibeli		10						
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang diperbaiki								
		Jumlah belanja bibit tanaman		4						
		Jumlah belanja obat-obatan/pupuk		6						
		Pemeliharaan gedung rumah dinas		400						
		Jumlah AC yang dipelihara		17						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Pemeliharaan gedung kantor		991						
		Pemeliharaan taman		1						
		Pemeliharaan peralatan kantor		12						
		Jumlah alat-alat pertanian		1						
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		25						
	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas								
	Pengadaan pakaian dinas / khusus	Jumlah pakaian dinas bagi Anggota DPRD								
		Jumlah Pakaian Sipil Harian (PSH) anggota dewan dan sekwan yang tersedia		46						
		Jumlah Pakaian Sipil Resmi (PSR) anggota dewan, sekwan, keprotokolanan yang tersedia		46						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah pakaian batik yang tersedia		46						
		Jumlah pakaian adat/tradisional yang tersedia		46						
	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi								
		Jumlah ASN tertangani dan terfasilitasi kepegawaian ASN (KP, KGB, Pensiun)		45						
	Pengembangan Kapasitas Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kapasitas aparatur								
	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan daerah	Presentase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
	Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat daerah: - Tahunan, Semesteran, Bulanan								
		dokumen laporan keuangan semesteran		1						
		dokumen laporan keuangan akhir tahun		1						
		dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ		12						
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap RPJMD								
	Perencanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah								
		Dokumen LKjIP Tahun 2019		1						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Dokumen Renja Tahun 2021 dan Renja Perubahan Tahun 2020		2						
		Dokumen RKA Tahun 2021 dan RKA Perubahan Tahun 2020		2						
		DPA dan DPPA Tahun 2020		2						
		Dokumen ROPK		1						
		Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		2						
		Draf Renstra PD Tahun 2021 - 2026		1						
	Pengendalian internal	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah								
		Jumlah Laporan TEPPA		12						
		Jumlah Laporan e mone		4						
	Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat daerah	Jumlah profil perangkat daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM perangkat daerah								
	Penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah dokumen standar pelayanan publik		1						
		Dokumen pengukuran survey kepuasan masyarakat		1						
		Dokumen evaluasi SOP		1						
		Dokumen Rencana Tindak Pengendalian SPIP		1						
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Prolegda yang terselesaikan menjadi Perda								
	Pembahasan peraturan daerah	Jumlah prolegda yang sudah ditetapkan								
		Jumlah Raperda yang dibahas		15						
		Jumlah cetak		100						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		buku tatib DPRD		4						
		Jumlah konsultasi/koordinasi Pansus Pembahasan Raperda Wilayah DIY		8						
		Jumlah konsultasi / Kunjungan kerja Pansus Pembahasan Raperda Luar Daerah		1						
		Jumlah konsultasi/fasilitasi/ study banding/ kunjunggan kerja BPPD		12						
		Jumlah Pansus Raperda yang dibentuk		3						
		Jumlah penyusunan NA Raperda inisiatif DPRD		1						
		Jumlah IP Cam								
		jumlah rapat paripurna								
		Rapat-Rapat Paripurna		2						
		Jumlah rapat paripurna PAW								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Jumlah publik hearing, Pers release, dan talk show								
		jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat, dan tokoh agama (6 paket x 12 bulan x 2 kali)		24						
		Jumlah peserta audensi		2.000						
		Jumlah Pers Realese		10						
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	jumlah rapat alat kelengkapan dewan								
		Jumlah rapat alat kelengkapan dewan		7						
	Reses penjangkasan aspirasi masyarakat	jumlah sarana dan prasarana reses								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah pelaksanaan ases		2						
		Jumlah dokumen hasil ases dalam pokok - pokok pikiran		1						
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD dalam peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD								
		Jumlah Bimtek		6						
		Jumlah Konsultasi/Koordinasi / Kunjungan Kerja / Study banding peningkatan kapasitas anggota DPRD (Luar Daerah)		41						
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Jumlah anggota DPRD dan keluarga untuk mendapatkan fasilitas kesehatan: 45 org Anggota, 180 org								
	Penyusunan risalah rapat-	Jumlah Risalah rapat-rapat								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
	rapat DPRD									
		Jumlah dokumen risalah		15						
	Jumlah Total									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul berkaitan erat dengan reposisi dan refungsionalisasi DPRD sebagai badan legislatif daerah yang menjadi salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagai PD Pendukung kinerja DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya menjadi instrumen kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD agar dapat melaksanakan semua tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan *substantif* dan sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*-nya, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan hubungan antar lembaga sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan	Indeks	95	80	82	83	76,04	84,20	82	83	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD

Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 Sekretariat DPRD telah menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain dari pada itu Sekretariat DPRD juga mendukung Tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu : “Optimalisasi ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan taraf hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Program Prioritas Tahun 2024 ada 1 (satu) yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Sedangkan program penunjang adalah Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 9 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Adapun isu penting tahun 2024 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah :

- a. Adanya anggota legislatif periode tahun 2024 – 2029 yang baru sehingga diperlukan fasilitasi terhadap ketugasan anggota legislatif yang baru.
- b. Adanya gedung baru DPRD sehingga diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang gedung baru.

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian-bagian
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian-bagian terdiri dari:

1. Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan.
- b. Subbagian Keuangan.

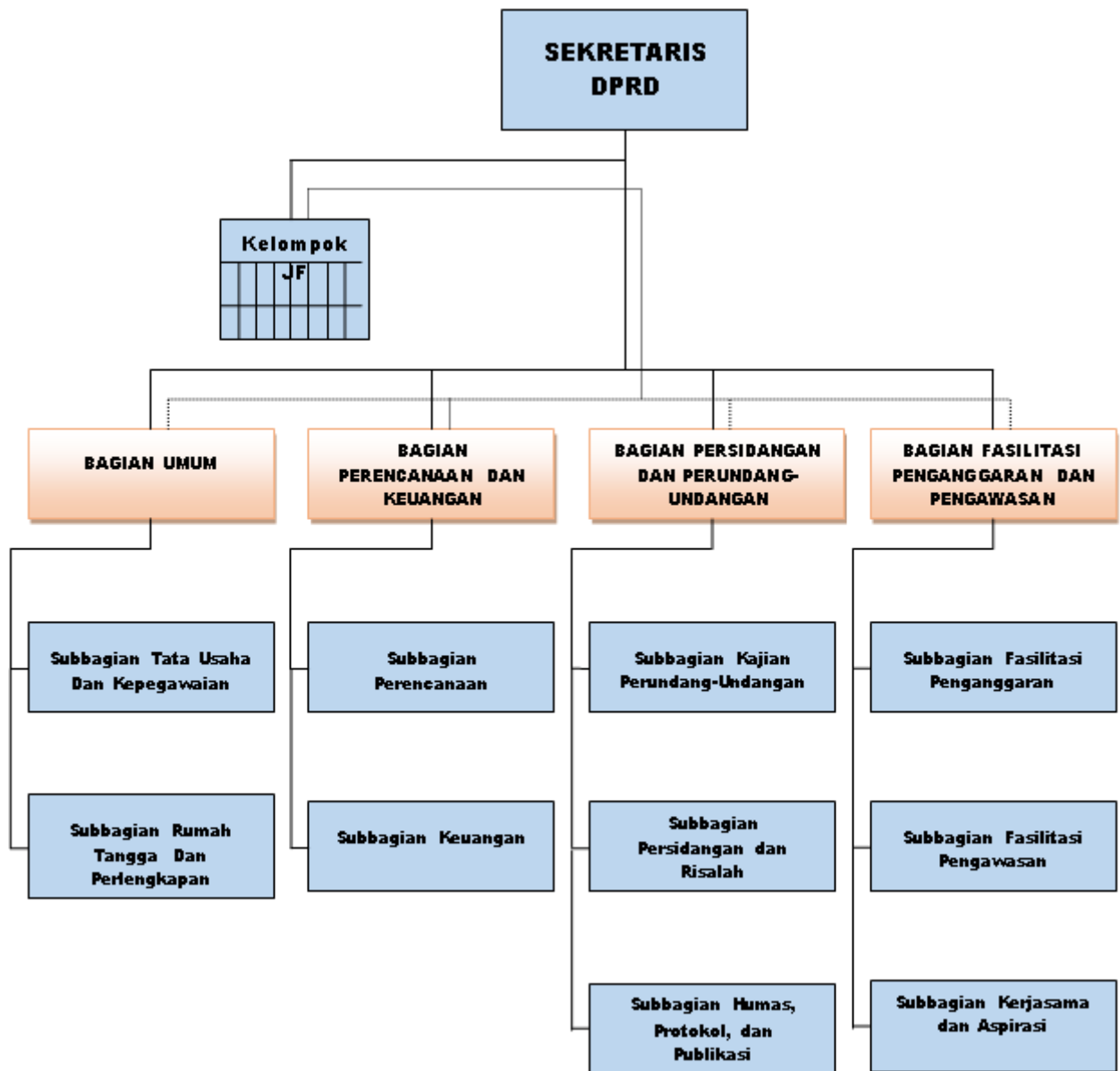
3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari :

- a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan
- b. Subbagian Persidangan dan Risalah
- c. Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dari :

- a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran
- b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan
- c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi

Adapun gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk menyelenggarakan tugas, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan umum di bidang kesekretariatan DPRD;
- perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan DPRD;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesekretariatan DPRD;
- pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan kesekretariatan DPRD;

- penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJM Daerah yang telah dirumuskan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD antara lain :

- 1) Belum optimalnya koordinasi antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- 2) Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan tugas karena adanya beberapa ketugasan yang harus melalui berbagai tahap;
- 3) Adanya penempatan sumber daya manusia yang belum sesuai kebutuhan;
- 4) Tidak meratanya pembebanan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya *overlap* pekerjaan dan kekosongan personil pada beberapa posisi, serta tidak adanya *back up* atau cadangan jika terjadi sesuatu pada orang yang di beri tugas serta tanggung jawab;
- 5) Masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten yang menyebabkan sering terhambatnya beberapa laporan dan ketugasan;
- 6) Terdapat kegiatan yang bersifat tentative sehingga realisasi anggaran dan kinerja tidak dapat terlaksana optimal.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

Analisis lingkungan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD menggunakan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yaitu dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Lingkup internal meliputi :

- a. Kekuatan (*Strengths*), yaitu faktor-faktor yang ada pada organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan;
- b. Kelemahan (*Weaknesses*) yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi dan melemahkan posisi suatu organisasi.

Lingkup eksternal meliputi :

- a. Peluang (*Opportunities*) yaitu faktor-faktor diluar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi untuk dapat eksis, tumbuh dan berkembang serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar.
- b. Ancaman (*Threats*), yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang membahayakan atau mengancam eksistensi suatu organisasi.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD agar dapat ditetapkan secara cermat dan tepat perlu didukung akurasi hasil analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Internal

Menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang berada di dalam Perangkat Daerah

a. Kekuatan

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan mencapai tujuan.

Adapun faktor internal (kekuatan) yang ditemui adalah :

1. tersedianya sarana kerja;
2. tersedianya anggaran/dana; dan
3. adanya struktur organisasi kelembagaan yang jelas

b. Kelemahan

Merupakan ketidakmampuan internal dari organisasi sehingga gagal mencapai sasaran.

Adapun faktor internal (kelemahan) yang ada adalah :

1. masih adanya karyawan yang belum memahami tugas dan fungsi;
2. adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai kebutuhan serta tingkat kedisiplinan masih kurang; dan
3. walaupun struktur organisasi sudah ada tetapi adanya ketugasan dan fungsi Bagian atau Sub Bagian yang tumpang tindih antar bagian.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, baik ditinjau dari segi ekonomi, teknologi, sosial budaya, ekologi dan keamanan.

a. Peluang

Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai sasaran.

Adapun peluang yang ada yang dimungkinkan dapat mendukung dalam mencapai sasaran adalah :

1. adanya upaya pembinaan karyawan untuk meningkatkan disiplin;
2. adanya hubungan koordinasi dengan instansi terkait; dan
3. adanya hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD.
4. Penyesuaian regulasi turunannya.

b. Ancaman

Merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif dan menyebabkan organisasi gagal dalam pencapaian sasaran.

Adapun ancaman yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah :

1. adanya kepentingan – kepentingan pribadi atau partai diluar kelembagaan DPRD;
2. adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam kerja;
3. adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat negara;
4. adanya kesalahan dalam penempatan pembebanan tugas (Adanya kebijakan pelimpahan tugas yang tidak sesuai dengan SOTK maupun Tugas Pokok Fungsi).

Dengan adanya faktor internal dan eksternal sebagaimana tersebut di atas, sebagai input untuk ditetapkan sebagai faktor kunci serta landasan kritis dalam penyusunan rencana strategis instansi, sehingga dokumen ini mampu menjadi dasar pijakan penyusunan kinerja tahunan.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review RKPD dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisa kebutuhan PD. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil review, terdapat perbedaan antara RKPD Sekretariat DPRD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu berdasarkan analisis kebutuhan diperlukan efisiensi anggaran tersebut untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan standar operasional pelayanan Sekretariat DPRD yang baru untuk menggantikan standar operasional pelayanan yang lama dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pemerintah daerah, disamping itu review terhadap RKPD juga menunjukkan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga. Perbedaan setelah dilakukan analisis kebutuhan terhadap RKPD disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan SHBJ, perubahan kebijakan, dan Penyesuaian dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang harus disesuaikan dan kebijakan yang lain-lain.

Perubahan – perubahan yang terjadi untuk RKPD tahun 2024 setelah dilakukan review terhadap kebutuhan disebabkan oleh :

1. Adanya penambahan sarana dan prasarana, perlengkapan dan peralatan pada tahun – tahun yang lalu, sedangkan biaya pemeliharannya tidak bertambah;
2. Adanya gedung baru sehingga diperlukan kelengkapan penunjang baik interior maupun eksterior;
3. Adanya kebijakan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah, dan paket biaya perjalanan dinas luar daerah yang harus disesuaikan dengan kode rekening yang baru;

Selanjutnya Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah disajikan dalam tabel 2.3 :

Tabel 2.3
 Reviu Terhadap Awal RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	SEKRETARIAT DPRD				63,141,520,537	SEKRETARIAT DPRD				30.248.553.130	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik	98 Persen	32,580,130,537	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik	98 Persen	26.877.492.6930 5.773.481.630	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana	100 Persen	81,900,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana	100 Persen	86.180.000	
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13,000,000	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	63.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Wonosari	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Wonosari	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.890.000	

No.	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.915.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6,800,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.790.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.995.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	17 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	17 Laporan	4.240.000	

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp)		
			Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja SKPD				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.050.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan disusun Tepat Waktu	100 Persen	4,168,626,250	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan disusun Tepat Waktu	100 Persen	2.602.697.130		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang	4,089,491,250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 Orang	2.555.819.630		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	13 Laporan	75,135,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	13 Laporan	44.877.500		

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)		
			Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Triwulanan/ Semesteran SKPD				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Terlayani Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	43,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Terlayani Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	3.600.000		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	13,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	3.600.000		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Wonosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	30,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Wonosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Terlaksana	100 persen	1,161,230,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Terlaksana	100 persen	305.104.500		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.672.000		
	Penyediaan Peralatan dan	Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	452,000,000	Penyediaan Peralatan dan	Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	66.325.500		

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang disediakan			Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang disediakan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	70,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	5.334.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Wonosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	125,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Wonosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	21.950.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	91,230,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	10.835.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1484 Dokumen	12,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	366 Dokumen	2.400.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	180,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	80.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	114.588.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	149,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	152.500.000	

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)		
	Daerah		Pemerintah Daerah Terlaksana			Daerah		Pemerintah Daerah Terlaksana				
	Pengadaan Mebel	Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	69,000,000	Pengadaan Mebel	Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	2.000.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	80,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	330 Unit	150.500.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	100 Persen	472,615,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	100 Persen	648.690.800		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	48,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	49.240.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	216 Laporan	304,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	240 Laporan	520.170.800		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	120,115,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	79.280.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	833,900,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	573.230.000v		

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)		
	Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Terlaksana			Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Terlaksana				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	325 Unit	416,150,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	338 Unit	416.975.000		
	Pemeliharaan Mebel	Wonosari	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 Unit	12,500,000	Pemeliharaan Mebel	Wonosari	Jumlah Mebel yang dipelihara	85 Unit	4.400.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 Unit	69,250,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48 Unit	10.200.000		
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit	156,000,000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	138.655.000		
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100 Unit	180,000,000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	3.000.000		
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	24,909,859,287	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Terlaksana	100 Persen	20.727.401.200		

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)		
			Terlaksana									
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Wonosari	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang	24,262,414,287	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Wonosari	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang	20.659.431.200		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Wonosari	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	992 Paket	570,805,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Wonosari	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	270 Paket	67.970.000		
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	76,640,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0	-		
	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD Terlaksana	100 Persen	760,000,000	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD Terlaksana	100 Persen	674.078.000		
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	45 Laporan	369,500,000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	299.678.000		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Wonosari	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	12 Paket	390,500,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Wonosari	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	12 Paket	374.400.000		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	89 Persen	30,561,390,000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	89 Persen	4.475.071.500		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan		Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan	100 Persen	5,485,295,000	Pembentukan Peraturan Daerah dan		Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan	100 Persen	164.671.000		

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)		
	Peraturan DPRD		Daerah dan Peraturan DPRD Tersusun			Peraturan DPRD		dan Peraturan DPRD Tersusun				
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Wonosari	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	35,000,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	77.680.000		
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Peraturan Daerah	18 Dokumen	4,308,210,000	Pembahasan Peraturan Daerah	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen	76.991.000		
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Wonosari	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 Dokumen	854,860,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Wonosari	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0 Dokumen	0		
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	250,000,000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	0 Dokumen	-		
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	37,225,000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	10.000.000		
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksana	100 Persen	4,829,426,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksana	100 Persen	203.638.500		

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	795,000,000	Pembahasan KUA dan PPAS	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	32.395.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	18,000,000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	26.250.000	
	Pembahasan APBD	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	3,404,756,000	Pembahasan APBD	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	53.215.500	
	Pembahasan APBD Perubahan	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	50,490,000	Pembahasan APBD Perubahan	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	35.578.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	561,180,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	56.200.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksana	83 Persen	4,961,702,750	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksana	83 Persen	242.522.500	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	4 Laporan	1,241,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	4 Laporan	96.872.500	

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1,240,702,750	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	48.550.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	1,240,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	48.550.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	1,240,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	48.550.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksana	83 Persen	5,545,897,500	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksana	83 Persen	2.597.204.500	
	Pendalaman Tugas DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	20 Dokumen	2,757,180,000	Pendalaman Tugas DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	475.366.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Wonosari	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 Dokumen	331,400,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Wonosari	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	122 Dokumen	916.341.000	

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Wonosari	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 Orang	1,096,000,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Wonosari	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	180 Orang	900.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Wonosari	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	336,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Wonosari	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	70 Orang	245.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	964,817,500	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	39.997.500	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	60,500,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	20.500.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksana	100 Persen	3,566,850,000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksana	100 Persen	1.203.745.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	11,850,000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	24.280.000	
	Pelaksanaan Reses	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3,555,000,000	Pelaksanaan Reses	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	1.179.465.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksana	83 Persen	51,500,000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksana	83 Persen	0	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Wonosari	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	42,000,000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Wonosari	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dokumen	0	

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	9,500,000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0 Laporan	0	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah Terlaksana	80 Persen	12,000,000	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah Terlaksana	80 Persen	0	
	Fasilitasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Wonosari	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Wonosari	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0 Dokumen	0	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Wonosari	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Dokumen	2,000,000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Wonosari	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	0 Dokumen	0	
	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksana	83 Persen	6,108,718,750	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksana	83 Persen	63.290.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	4,258,718,750	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Dokumen	19.800.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen	55,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen	22.850.000	

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1,795,000,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	20.640.000	
					63,141,520,537					30.248.553.130	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas sebagai fasilitator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berarti Sekretariat DPRD tidak berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak bisa mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, sehingga di dalam dokumen perencanaannya Sekretariat DPRD tidak dapat mencantumkan usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, maka DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi dan anggaran tersebut di atas maka produk hukum atau peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan, yang implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sehingga untuk memberikan arah, tujuan yang akan memandu tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul ke masa depan dalam menghadapi tantangan adanya perubahan paradigma kegiatan pemerintahan yang mengarah pada tercapainya pemerintahan yang baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tahunan, maupun jangka waktu lima tahunan sesuai Sasaran Perangkat Daerah yang termaktub dalam Draft Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yakni Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD Meningkatkan. Adapun tujuan yang ditetapkan disajikan dalam tabel 3.1 .

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu tahun, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dicapai dalam periode I (satu) pada masa sekarang dan tahun selanjutnya selama 5 (lima) tahun sesuai rencana strategis.

Adapun sasaran yang akan dicapai :

1. Kualitas layanan bidang Administrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat;
2. Nilai AKIP PD

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah :

1. Membuat rencana program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD penjabaran dari Rencana Strategis 2021 – 2026 untuk mendukung visi misi daerah.
2. Sebagai acuan dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (Outcome)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kualitas layanan bidang Administrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan

Selanjutnya kami sajikan hubungan antara tujuan Perangkat daerah dengan sasaran Perangkat Daerah pada tabel 3.2, 3.3

Tabel. 3.2
Tujuan
Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan Tahun 2022	85

Tabel. 3.3
Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas layanan bidang <i>Administrasi dan Keuangan</i> bagi Anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	83
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82

Terdapatnya 2 Sasaran Sekretariat DPRD yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama seperti tersebut pada tabel 3.4

Tabel. 3.4
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Gunungkidul

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	83

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan program dan kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Rencana kerja tahunan ini berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Visi Kepala Daerah tahun 2021-2024 :

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026

Misi Kepala Daerah tahun 2021-2024 :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis;
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Dengan pertimbangan Tema pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2024 dan Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) tahun 2024, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah *“Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”*

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi;
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi;

- b. Uraian garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Kegiatan instansi merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberika dukungan pada pencapaian visi dan misi daerah.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan secara profesional terhadap tugas dan kegiatan DPRD Kabupaten Gunungkidul dan mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Berikut kami sajikan rekapitulasi program dan kegiatan yang menjabarkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Prioritas, sasaran daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Reformasi Birokrasi	2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	83%	2 2 4	2.01	4.475.071.500	SEKRETARIAT DPRD		
					2 2 4	2.01	164.671.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
					2 2 4	2.01	77.680.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
					2 2 4	2.01	76.991.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
					2 2 4	2.01	0	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		
					2 2 4	2.01	0	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		
					2 2 4	2.02	10.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD		
					2 2 4	2.02	203.638.500	Pembahasan Kebijakan Anggaran		
					2 2 4	2.02	32.395.000	Pembahasan KUA dan PPAS		
					2 2 4	2.02	26.250.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
					2 2 4	2.02	53.215.500	Pembahasan APBD		
					2 2 4	2.02	35.578.000	Pembahasan APBD Perubahan		

c. Uraian garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Kegiatan instansi merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberika dukungan pada pencapaian visi dan misi daerah.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan secara profesional terhadap tugas dan kegiatan DPRD Kabupaten Gunungkidul dan mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan daftar program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD seperti yang tersebut di atas maka jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah 2 Program 17 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan. Dari sejumlah program kegiatan dan sub kegiatan sudah mengacu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Berikut kami sajikan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada table 4.2 :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4					30.248.553.130				64.458.385.947,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD				30.248.553.130				64.458.385.947,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		98	25.773.481.630				32.413.687.529,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				86.180.000,00				139.785.000,00
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	30				30	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4	63.300.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3.00	68.085.000,00 68.085.000,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)		2.890.000				3.800.000,00
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	2.915.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	3.800.000,00	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	4.790.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	3.800.000,00	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	2	2.995.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2	6.800.000,00	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	2	4.240.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2	4.500.000,00	
								12.800.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	17	5.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17	12.800.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	40.000.000,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah (Layanan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	5	2.602.697.130		5	4.168.626.250,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	546.00	2.555.819.630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	560.00	4.089.491.250,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	4.000.000,00	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	13	44.877.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13	75.135.000,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan ASN yang tertangani (Layanan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	3.600.000		1	43.000.000,00	
4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	6	3.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6	13.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	0	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6.00	30.000.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Layanan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	23	305.104.500		24	1.006.230.000,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	4.00	3.672.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12.00	20.000.000,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	66.325.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12	98.000.000,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	2	5.334.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2	70.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.950.000	Dana Alokasi Umum		165.000.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	5		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5	165.000.000,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	4	10.835.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.00	91.230.000,00	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	366.00	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1484.00	12.000.000,00	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kurjungan Tamu (Laporan)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	12		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	12	250.000.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	114.588.000			300.000.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	12		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	24.00	300.000.000,00	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Layanan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Layanan)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	3	152.500.000		3	82.000.000,00	
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</i>	<i>(SEkretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	2.00	2.000.000		5.00	14.000.000,00	
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.500.000			68.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	330		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	9.00	68.000.000,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jasa layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Layanan)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	6	648.690.800		6	475.500.000,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				49.240.000,00			48.500.000,00	
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	12		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	12	48.500.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	240	520.170.800			305.000.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	79.280.000			122.000.000,00	
						<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	216.00	305.000.000,00	
						<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		122.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Layanan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	18	573.230.000	Umum	18	1.060.250.000,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	338	416.975.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	325.00	500.000.000,00	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	85.00	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.00	13.000.000,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.200.000			77.250.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	48	138.655.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	90	77.250.000,00	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4.00	245.000.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	10.00	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100.00	225.000.000,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (Layanan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	7	20.727.401.200,00		6	24.647.796.279,00	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/ Bulan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	630	20.659.431.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	630	24.085.751.279,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				Umum			485.405.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	45.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	67.970.000	992.00	485.405.000,00	
4.02.01.2.16.0003	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	45.00	76.640.000,00	
4.02.01.2.16.0004	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	24	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	674.078.000	2	790.500.000,00	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					299.678.000		390.000.000,00	
						374.400.000		400.500.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	12		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	12	400.500.000,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (%)</i>		89	4.475.071.500			32.044.698.418,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Jumlah dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD (Dokumen)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	42	164.671.000		42	6.072.995.000,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	2.00	77.680.000	<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	2.00	35.000.000,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	9	76.991.000	<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	18.00	4.893.410.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			-				854.860.000,00	
		<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	0		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	8.00	854.860.000,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			-				250.000.000,00	
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	0.00		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	3.00	250.000.000,00	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			10.000.000,00				39.725.000,00	
		<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	1	39.725.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			203.638.500			6	4.959.426.000,00	
		<i>Jumlah dokumen kegiatan pembahasan kebijakan anggaran (Dokumen)</i>	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	6					
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			32.395.000				795.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	2		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2	795.000.000,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	26.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	28.000.000,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	53.215.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	3.524.756.000,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	35.578.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	50.490.000,00	
					56.200.000			561.180.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	2		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	2	561.180.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (Dokumen)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	4	242.522.500		4	5.013.347.168,00	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	4	96.872.500	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	4	1.253.336.792,00	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	4	48.550.000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	4	1.253.336.792,00	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	4	48.550.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	4	1.253.336.792,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	4	48.550.000,00	<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	4	1.253.336.792,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD (Layanan)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	14	2.597.204.500		13	5.594.947.500,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	1.00	475.366.000	<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	20.00	2.800.180.000,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)</i>	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	180.00	900.000.000		18.00	1.096.000.000,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				245.000.000			336.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	70.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.00	336.000.000,00	
				12	39.997.500		12	970.817.500,00	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	20.500.000		1	60.550.000,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	122.00	916.341.000		24.00	331.400.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	4	1.203.745.000		4	3.772.200.000,00	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	24.280.000		1	12.200.000,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1.00	1.179.465.000		3.00	3.760.000.000,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, dalam daerah, luar daerah, KAB. GUNUNGGIDUL)	0	-		4	46.500.000,00	
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	0.00	-		1.00	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			-	-			46.500.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	0.00			2.00	46.500.000,00	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			0	-		2	12.000.000,00	
		Jumlah layanan pembahasan kerja sama daerah (Layanan)	(Sekretariat DPRD, dalam daerah, luar daerah, KAB. GUNUNGKIDUL)						
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				-			10.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	0.00			1.00	10.000.000,00	
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				-			2.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGKIDUL)	0.00			1.00	2.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah layanan fasilitasi tugas DPRD (Layanan)	(Sekretariat DPRD, dalam daerah, luar daerah, KAB. GUNUNGGIDUL)	4	63.290.000		4	6.573.282.750,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	2	19.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.00	4.573.282.750,00	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	24	22.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24	60.000.000,00	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	(Sekretariat DPRD, KAB. GUNUNGGIDUL)	12.00	20.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.00	1.940.000.000,00	
J U M L A H					30.248.553.130			64.458.385.947,00	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
SEKRETARIAT DPRD,

HERY SUKASWADI

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja Tahun 2024 disempurnakan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan dan arahan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang serta pemulihan pasca *COVID-19*.

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stake holder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal.

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap Rancangan RPJM Daerah dan Rancangan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan RKPD secara resmi dari Bappeda.

3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Renja

Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD melaksanakan forum PD dan mengacu pada dokumen RKPD.

1.1.3 Keterkaitan Renja dengan Renstra.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2024 berpedoman kepada Rancangan Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan teknis dan rencana program sesuai bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

1.1.4 Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Inspektorat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2.Landasan Hukum

1.2.1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

1.2.2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1.2.3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 1.2.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 1.2.8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 1.2.9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025;
 - 1.2.11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - 1.2.12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
 - 1.2.13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
 - 1.2.14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026 ; dan
 - 1.2.16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah :

- 1.3.1 Sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif rencana kerja yang sesuai dengan program prioritas;

- 1.3.2 Sebagai tolok ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan
- 1.3.3 Dasar penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
 - 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP
 - 5.1 Catatan Penting
 - 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah dan Capaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp10.100.607.163,00 (sepuluh miliar seratus juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Program = 3 program
 - Jumlah Kegiatan = 12 kegiatan
 - Jumlah Sub Kegiatan = 36 sub kegiatan
 - Jumlah Anggaran = Rp10.100.607.163,00
- dengan rincian berikut :
- Belanja Operasi = Rp9.903.357.163,00
 - Belanja Modal = Rp197.250.000,00

Tingkat penyerapan keuangan Inspektorat Daerah tahun 2022 sebesar 91,14% dengan realisasi sebesar Rp9.205.216.879,00 dari anggaran sejumlah Rp10.100.607.163,00 sedangkan untuk indikator kinerjanya memperoleh persentase sebesar 99,96%. Hal yang menjadikan catatan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai kinerja sesuai yang direncanakan, antara lain sebagai berikut :

1. Serapan pada belanja gaji tidak bisa diserap secara maksimal, hal ini disebabkan karena Jabatan Inspektur saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) selama 1 (satu) tahun.
2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur, terkait Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (menyesuaikan jadwal panggilan dan informasi dari Pusdiklat Jakarta) dan harus berkoordinasi dengan pihak lain seperti Pusat Pembinaan JFA selaku pihak penyelenggara;
3. Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang tidak dapat diprediksi yang merupakan perintah Bupati ataupun pengaduan dari masyarakat.

Namun dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Adapun kebijakan atau tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

1. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;
2. Meningkatkan peran APIP sebagai *Quality Assurance, Consulting and Early Warning*;
3. Kerjasama dan tanggungjawab ASN dalam mewujudkan sasaran strategis;
4. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi terkait perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
5. Komitmen pimpinan dalam memberikan respon atau tanggapan yang baik.

Adapun gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra tertuang dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
sampai dengan Tahun 2023

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja, Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 layanan	11 layanan	11 layanan	11 layanan	100	11 layanan	11 layanan	100
		Jumlah Dokumen Profil PD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Renja Tahun 2022 dan Renja Perubahan 2021	10 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	n/a
6.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD Tahun 2021 - 2024	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	n/a	n/a	n/a
		Pelaksanaan Forum PD	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	4 dokumen	4 dokumen	25
6.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Tahun 2022	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	25
6.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan Tahun 2021	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	25

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
6.01.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah dokumen ROPK	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	3 dokumen	3 dokumen	25
6.01.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	2 dokumen	2 dokumen	25
6.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	17 Laporan	17 Laporan	25
6.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan e-Monev	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan TEPR	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja/Perangkat Daerah	20 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Laporan	20 Laporan	25
6.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	100	29 dokumen	29 dokumen	100
		Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	130 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2800 Orang/bulan(50x14)	n/a	n/a	n/a	n/a	700 Orang/bulan(50x14)	700 Orang/bulan(50x14)	25
6.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Laporan	4 Laporan	25
6.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	n/a	n/a	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	13 Laporan	13 Laporan	25
6.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 orang	49 orang	49 orang	49 orang	100	100	49 orang	100
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian ASN	245 ASN	49 ASN	49 ASN	49 ASN	100	49 ASN	49 ASN	100
		Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	150 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	30 orang	100
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	6 dokumen	6 dokumen	25
6.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	135 orang	21 orang	21 orang	21 orang	100	n/a	n/a	100
		Peningkatan kualitas aparat pengawasan (Pelatihan Kantor Sendiri/PKS)	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	30 Orang	30 Orang	25
6.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	100	5 layanan	5 layanan	100
		Persentase layanan administrasi umum terlayani	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Paket	4 Paket	25
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll) Jumlah belanja modal Alat Ukur/ Sketmat signmat	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	n/a	n/a	100
6.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah belanja modal Camera	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Handycam	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100	n/a	n/a	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah belanja modal Hardis External	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Komputer PC All in One	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal laptop Core 15	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Mesin Hitung/hand counter	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Penghancur Kertas	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Steam Alat Cuci Mobil	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Scanner ADF	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Paket	4 Paket	25
6.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	50 jenis	-	-	-	100	n/a	n/a	25
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Paket	4 Paket	25
6.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan	25 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	n/a	n/a	100
		Jumlah pengandaan yang tersedia	30000 lembar	6000 lembar	6000 lembar	6000 lembar	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	16 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Paket	4 Paket	25
6.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1040 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	260 dokumen	260 dokumen	25
6.01.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	750 OR	150 OR	150 OR	150 OR	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	16 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	25
		Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	300 OH	60 OH	60 OH	60 OH	100	n/a	n/a	100
6.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	125 OH	25 OH	25 OH	25 OH	100	n/a	n/a	100
		Jumlah minuman dan snack tamu	750 OR	150 OR	150 OR	150 OR	100	n/a	n/a	100
		Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	750 OR	150 OR	150 OR	150 OR	100	n/a	n/a	25

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	44 laporan	44 laporan	25
6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 unit	48 unit	48 unit	48 unit	100	48 unit	48 unit	100
6.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Jumlah belanja mebeleir kantor (meja kursi pegawai)	4 unit	-	-	-	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 unit	1 unit	33,3
6.01.01.2.0 7.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	1 unit	-	-	-	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 unit	1 unit	100
		Jumlah pengadaan korden	5 unit	-	-	-	100	n/a	n/a	100
6.01.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor interior ruang (bantuan disabilitas)	25 unit	-	-	-	-	n/a	n/a	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	6 unit	6 unit	25
6.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100	3 layanan	3 layanan	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	3000 surat	30 surat	30 surat	30 surat	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	25
		Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	60 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100	n/a	n/a	100
6.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x12)	60 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	60 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	36 Laporan	36 Laporan	25
6.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	60 bulan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	n/a	n/a	100
		jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	48 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	25
6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100	4 layanan	4 layanan	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
6.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas roda 2 terpelihara Jumlah dan jenis kendaraan dinas roda 4 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit 35 unit 40 unit 35 unit 832 Unit 14 unit 225 unit 10 unit 168 unit 450 meter	8 unit 7 unit 8 unit 7 unit n/a 1 unit 10 unit 2 unit n/a -	8 unit 7 unit 8 unit 7 unit n/a 1 unit 10 unit 2 unit n/a -	8 unit 7 unit 8 unit 7 unit n/a 1 unit 10 unit 2 unit n/a -	8 unit 7 unit 8 unit 7 unit n/a 1 unit 10 unit 2 unit n/a -	100 100 100 100 n/a 100 100 100 n/a 100	n/a n/a n/a n/a 208 Unit n/a n/a n/a 42 unit n/a -	n/a n/a n/a n/a 208 Unit n/a n/a n/a 42 unit n/a -	100 100 100 100 25 100 100 100 25 100
6.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	
6.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	75 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	n/a	n/a	100	
6.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	60 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	16unit	16 unit	25	
6.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun Nilai IKM PD	25 dokumen 79,45 indeks	25 dokumen 79,45 indeks	25 dokumen 79,45 indeks	25 dokumen 79,45 indeks	100 100	25 dokumen 79,45 indeks	25 dokumen 79,45 indeks	100 100	
6.01.01.2.1 3.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPP Jumlah dokumen SOP Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	10 dokumen 5 dokumen 10 dokumen	2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	100 100 100	n/a n/a n/a	n/a n/a n/a	100 100 100	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100	4 layanan	4 layanan	11=(10/4)
		Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.02.2.0 1.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengangan Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan; RKA murni dan perubahan; dan Review BT)	480 dokumen	96 dokumen	96 dokumen	96 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	384 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	96 Laporan	96 Laporan	25
		Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	n/a	n/a	100
6.01.02.2.0 1.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	420 Audit	84 Audit	84 Audit	84 Audit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	240 Obyek	48 Obyek	48 Obyek	48 Obyek	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	352 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	88 Laporan	88 Laporan	25
		Jumlah Dokumen hasil review Renstra 2021-2024	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
6.01.02.2.0 1.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Laporan	5 Laporan	25
6.01.02.2.0 1.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	150 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	120 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	30 Laporan	30 Laporan	25
6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	600 dokumen	600 dokumen	600 dokumen	600 dokumen	100	600 dokumen	600 dokumen	100
		Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.01.02.2.0 2.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	250 dokumen 5 dokumen 10 dokumen	50 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	50 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	50 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	100 100 100	n/a n/a n/a	n/a n/a n/a	11=(10/4) 100 100 100
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	212 Laporan 100%	n/a 100%	n/a 100%	n/a 100%	n/a 100	53 Laporan 100%	53 Laporan 100%	100 100
6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100	9 dokumen	9 dokumen	100
6.01.03.2.0 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana Jumlah Dokumen PKPT, Peta Pengawasan, KMA Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	100% 15 dokumen 12 Rekomendasi	100% 3 dokumen n/a	100% 3 dokumen n/a	100% 3 dokumen n/a	100 100 n/a	100% n/a 3 Rekomendasi	100% n/a 3 Rekomendasi	100 100 25
6.01.03.2.0 1.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen penyusunan alternatif penyelesaian masalah/langkah strategis untuk percepatan pencapaian kinerja pemerintah daerah : Nota dinas, action plan.	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	n/a	n/a	100
6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen telaahan staf Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	20 dokumen 24 Rekomendasi 3 layanan	4 dokumen n/a 3 layanan	4 dokumen n/a 3 layanan	4 dokumen n/a 3 layanan	100 n/a 100	n/a 6 Rekomendasi 3 layanan	n/a 6 Rekomendasi 3 layanan	100 25 100
6.01.03.2.0 2.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pendampingan dan asistensi terlaksana Jumlah Dokumen hasil asistensi/pendampingan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100% 480 dokumen 764 Perangkat Daerah	100% 98 dokumen n/a	100% 98 dokumen n/a	100% 98 dokumen n/a	100 100 n/a	100% 98 dokumen n/a	100% n/a 191 Perangkat Daerah	100 100 25
6.01.03.2.0 2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan	10 dokumen 5 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	100 100	n/a n/a	n/a n/a	100 100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen hasil evaluasi ZI, WBK, WBBM	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen monev gratifikasi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen monev PMPRB	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah hasil evaluasi maturitas SPTP	35 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	764 Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	191 Perangkat Daerah	191 Perangkat Daerah	25

Penjelasan tabel 2.1. di atas sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang belum memenuhi target yaitu :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, hal ini karena pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman realisasinya tidak maksimal karena tidak dapat memprediksi jamuan kunjungan tamu. Perjalanan Dinas Dalam Daerah terealisasi sebagian karena adanya efisiensi dalam pelaksanaannya. Perjalanan dinas luar daerah terealisasi sebagian karena perjalanan dinas kegiatan lain sudah mencukupi, terutama perjalanan dinas untuk diklat yang berpedoman pada kalender diklat.
 - Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, hal ini karena tidak adanya jadwal dan surat resmi permohonan pengiriman peserta diklat dari Pusdiklat BPKP.
 - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, karena Perjalanan dinas luar daerah untuk reviu LkjIP dikirim ke Kemenpan Jakarta lewat Kantor Pos, objek pemeriksaan khusus dan kasus tidak ada yang berasal dari luar daerah, dan minimnya pemanfaatan pulsa *call center* Saber Pungli.

Faktor penyebab/ penghambat :

- Faktor penyebab tidak tercapainya target tahun 2022 disebabkan karena kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan lintas SKPD, seperti pada kegiatan Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah dan kegiatan Penyelenggaraan Saber Pungli.
- Keterbatasan pegawai yang ada di Inspektorat termasuk dalam Jabatan Fungsional Auditor yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tugas yang dilimpahkannya.
- Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa yang tidak segera menindaklanjuti hasil rekomendasi terkait dengan hasil laporan pemeriksaan.

Faktor pendukung :

- Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi sistem informasi dan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengendalian program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Termasuk pembuatan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta kode etik Inspektorat.

Kebijakan/tindakan yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor penghambat antara lain :

- Melakukan optimalisasi pembagian Auditor dan Penunjang Administrasi Pengawasan dengan memperhatikan beban kerja yang merata. Selain itu diupayakan untuk penambahan pegawai Jabatan Fungsional Auditor lewat jalur mutasi dari pegawai Jabatan Fungsional Umum dan atau Jabatan Struktural.
- Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance Consulting* dan *Early Warning*.
- Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.
- Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan,
- Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan terhadap

seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu juga melaksanakan asistensi terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul terkait pertanggungjawaban APBKal dan penyusunan Rencana APBKal tahun berikutnya.

- Membuka layanan klinik konsultasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

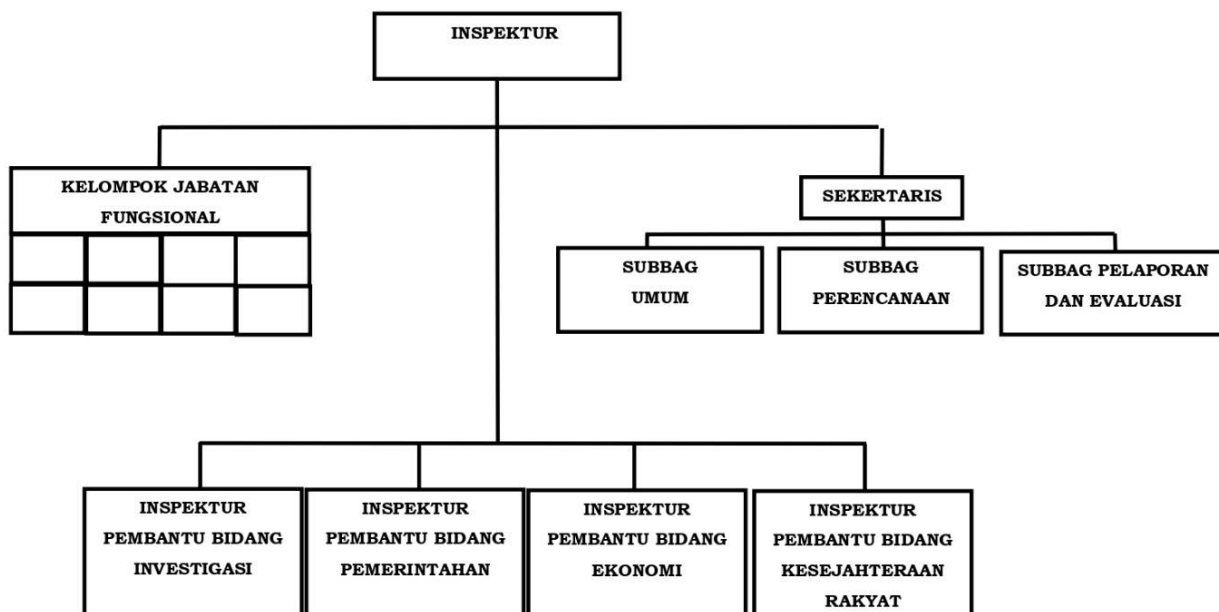
Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya diambil dari indikator *outcome* dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua kegiatan.

Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mengacu pada sasaran pembangunan menurut prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yaitu "*Reformasi Birokrasi*" dengan 2 (dua) sasaran daerah yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkatkan.

Pencapaian kinerja pelayanan, selengkapny dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Inspektorat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)											
	Nilai Maturitas SPJP	Indeks	3,2	3,86	3,87	3,88	3,85	3,85	3,87	3,88	Interval skor <i>Maturity Level SPJP</i> . Menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPJP	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,00	81,00	81,50	82,00	81,77	81,77	81,50	82,00	Hasil dari Reviu Irda terkait evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	
2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)											
	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renja dibagi jumlah program dalam RKPD dan jumlah program dalam Renstra dibagi jumlah program dalam RPJMD	
	Nilai IKM Inspektorat	Nilai	81	81	81,5	81,5	79,32	80,06	81,5	81,5	Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai penimbang	
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan administrasi perkantoran dibagi jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan x 100%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sarana prasarana aparatur	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana dibagi jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan x 100%	
	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang dibagi jumlah PNS x 100%	
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi jumlah keuangan disusun x 100%	



Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Gambar 2.1

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD yang telah dirumuskan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kondisi :

- masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan;
- belum efektifnya pengawasan melekat;
- kecenderungan pelanggaran disiplin aparatur daerah dari tahun ke tahun meningkat; dan
- masih kurangnya pengertian masyarakat dalam masalah hukum.

Permasalahan :

- kecenderungan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersifat boros dan bersifat rutinitas, belum menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugasnya;
- kualitas sumber daya manusia pemerintah belum merata sehingga terjadi penumpukan pekerjaan pada satu personil;
- sistem pembinaan PNS belum memadai dan kinerja PNS belum maksimal;
- kompetensi pegawai belum sesuai dengan formasi jabatan; dan
- rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

2. Dampak terhadap Pencapaian

Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, Inspektorat Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang Pengawasan. Jika dilihat dari

berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan/ pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Belum terpenuhinya sumber daya manusia baik untuk Jabatan Fungsional Auditor, P2 UPD maupun fungsional umum;
- c. Sarana dan prasarana pendukung pemeriksa yang belum memadai dan mencukupi;
- d. Perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan pembinaan dan perbaikan kerja; dan
- e. Sarana dan prasarana pendukung pemeriksa yang belum memadai dan mencukupi;
- f. Belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap OPD yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD

Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasi faktor ekstern terutama merumuskan ancaman.

Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

Kekuatan

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai beberapa hal yang dapat menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan organisasi yaitu :

- a. Kode Etik dan Standar Kerja yang jelas
Beberapa standar kerja Inspektorat antara lain Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten Gunungkidul. Standar Kerja disusun untuk menjaga agar kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.
- b. Pembagian kerja yang jelas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- b. Piagam Audit (*Audit Charter*).
- c. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul dan Surat Perintah Tugas sebagai aplikasi program kerja Inspektorat Daerah yang merupakan rangkaian ketentuan mengenai pembagian kerja.

Kelemahan

Hal-hal yang menjadi masalah bagi Inspektorat Daerah yaitu :

- a. Tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kewenangan yang tidak dimiliki adalah menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu Inspektorat Daerah dapat bekerjasama dengan institusi lain seperti Sekretaris Daerah, atau menaikkan kepada Bupati/Wakil

Bupati untuk mengoptimalkan tindak lanjut guna perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik.

b. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.

Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana kerja juga tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti kendaraan operasional untuk mendukung sistem kerja tim, ruang kerja, ruang dokumen/arsip yang masih terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.

Peluang (*Opportunities*)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar yaitu :

1. Organisasi Pemerintah Daerah mutlak memerlukan Sistem Pengawasan Internal.

Semua teori manajemen menyebutkan pengawasan atau pengendalian (*controlling*) sebagai salah satu fungsi manajemen. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mutlak memerlukan Inspektorat Daerah untuk menjamin dilaksanakannya kebijakan demi tertibnya organisasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Daerah dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akuntabel.

2. Masyarakat menghendaki penegakan hukum.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat menginginkan suatu pemerintahan yang lebih baik. Isu KKN ditanggapi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan seperangkat kebijakan pemberantasan KKN. Beberapa kebijakan yang dapat dikemukakan antara lain :

- a. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
- e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1860/KSP.00/70-73/03/2022 tentang Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022.

3. Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan.

Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan adalah Lembaga/PD dan Kalurahan dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai UPT dari Dinas Pendidikan, Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian semua potensi yang ada dapat dilaksanakan secara optimal. Setiap tahunnya Inspektorat telah berusaha melaksanakan pendampingan terhadap 5 (aspek) pemeriksaan

seperti Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Penatausahaan Keuangan Aset, Persediaan, Pengelolaan Piutang Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, selain itu juga melakukan asistensi dengan sasaran penyusunan pertanggungjawaban APBKal serta penyusunan Rencana APBKal terhadap 144 kalurahan.

Ancaman (Threats)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang membahayakan atau mengancam eksistensi organisasi yaitu :

1. Komitmen manajemen terhadap pengawasan lemah. Inspektorat Daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen (*Decision Maker*).
2. Kurangnya kepedulian obyek pemeriksaan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Kepedulian obyek pemeriksaan dalam tindaklanjut hasil pemeriksaan diukur dari kecepatan penyelesaian pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Semakin lambat tindaklanjut diselesaikan, semakin rendah tingkat kepedulian obrik terhadap eksistensi Inspektorat Daerah dan perbaikan kinerja instansi itu sendiri.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah :

1. Ketersediaan data dan kelengkapan pemeriksaan.
2. Penambahan PNS baik Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD untuk memenuhi kekurangan personel pemeriksa, serta penambahan SDM Fungsional Umum untuk membantu tugas-tugas di kesekretariatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil reuiu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dibutuhkan.

Penjabaran program kegiatan berdasarkan reuiu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	4.003.776.089	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	4.003.776.089	12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Layanan	55.798.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Layanan	55.798.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	51.507.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	51.507.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	320.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	320.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	320.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	320.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	642.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	642.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	555.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	555.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	762.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	762.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.692.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.692.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 Dokumen	3.299.946.589	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 Dokumen	3.299.946.589	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang/bulan (49X14)	3.297.253.589	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang/bulan (49X14)	3.297.253.589	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	693.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	693.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 Orang	39.100.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 Orang	39.100.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang	39.100.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang	39.100.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 Layanan	271.372.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 Layanan	271.372.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.264.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.264.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.229.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.229.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	65.185.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	65.185.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.617.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.617.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.750.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	108.326.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	108.326.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 unit	0	
	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	0	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 Layanan	86.084.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 Layanan	86.084.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.300.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	79.784.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	79.784.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan	251.475.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan	251.475.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182 Unit	169.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182 Unit	169.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	18.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	18.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	57.775.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	57.775.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	141 Unit	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	141 Unit	6.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	501.170.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	501.170.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 Layanan	257.270.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 Layanan	257.270.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pemerintah Daerah	96 Laporan	54.375.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pemerintah Daerah	96 Laporan	54.375.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	19.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	19.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	46.935.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	46.935.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	136.960.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	136.960.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	120 Dokumen	243.900.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	120 Dokumen	243.900.000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53 Laporan	243.900.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53 Laporan	243.900.000	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100%	244.850.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100%	244.850.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9 Dokumen	2.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9 Dokumen	2.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	1.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	1.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	1.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	1.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	3 Layanan	242.850.000	Pendampingan dan Asistensi	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	3 Layanan	242.850.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 Perangkat Daerah	240.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektoral Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 Perangkat Daerah	240.000.000	

1																				
	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			3	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul																
			4	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	47 Perangkat Daerah	6	2.850.000	7	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	9	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	47 Perangkat Daerah	11	2.850.000	12	
							4.749.796.089										4.749.796.089			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Inspektorat Daerah tidak terdapat usulan program atau kegiatan yang berhubungan langsung dari masyarakat, karena sesuai dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP di samping standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara secara nasional.

Peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Adapun tujuan yang dijadikan pedoman Inspektorat Daerah adalah “Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat”.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Rancangan Renstra. Dalam menyusun tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2024, Inspektorat berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 serta mengacu pada tema dan prioritas pembangunan dan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yaitu “*Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia*” dengan prioritas dan sasaran daerah yang dijadikan acuan untuk Inspektorat Daerah adalah “*Reformasi Birokrasi*”.

Selanjutnya hubungan antara tujuan dengan sasaran Inspektorat Daerah dituangkan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Inspektorat Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal	1. Nilai Maturitas SPIP 2. Nilai AKIP PD	3,90 83

Tabel 3.2
Sasaran Inspektorat Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	3,88
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	82

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Nilai Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3,88

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah dengan mempertimbangkan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, maka Inspektorat Daerah mendukung Misi pertama Bupati yaitu “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis” serta Sasaran Daerah adalah “Kapasitas Tata Kelola Pemerintah meningkat” dengan Prioritas Daerah yaitu Reformasi Birokrasi.

Sasaran tersebut dialirkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024, yang terdiri dari 3 Program dijabarkan dalam 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan seperti tertuang pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah tahun 2024

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	<p>Program : Penyelenggaraan Pengawasan</p> <p>Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</p>
		<p>Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</p> <p>Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi</p>
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	<p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>

		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Penataan Organisasi
--	--	---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah.

Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat untuk Tahun 2024 sejumlah Rp4.749.796.089,00 (Empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program, dan 11 (sebelas) kegiatan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah mengacu pada prioritas yang kedua yaitu “*Reformasi Birokrasi*”, seperti yang tertuang dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Prioritas, Sasaran, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Maturnitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	3,88	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	501.170.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	257.270.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	54.375.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	46.935.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	136.960.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	243.900.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	243.900.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	244.850.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	2.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	242.850.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.850.000	Inspektorat Daerah
					6.01.01	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	81,5
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.798.500	Inspektorat Daerah					
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.507.500	Inspektorat Daerah					
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	320.000	Inspektorat Daerah					

6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	320.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	642.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	555.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	762.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.692.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.299.946.589	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.297.253.589	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	693.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.100.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	-	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.100.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.372.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.264.500	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.229.500	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.185.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.617.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.326.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.084.000	Inspektoral Daerah
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000	Inspektoral Daerah

						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.784.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.08.02		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.475.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.700.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.775.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	Inspektorat Daerah
							4.749.796.089	

Tabel 4.3
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju (Rp) 2025	PD
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.003.776.089	9.148.148.460	IRDA
	Kegiatan :			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.798.500	70.764.500	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.299.946.589	8.126.466.546	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.100.000	87.050.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.372.000	497.872.164	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	50.000.000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.084.000	165.310.750	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.475.000	150.674.500	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	501.170.000	1.185.000.000	IRDA
	Kegiatan :			
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	257.270.000	589.000.000	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	243900000	596.000.000	
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	244.850.000	321.030.000	IRDA
	Kegiatan :			
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2000000	6.535.000	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	242850000	314.495.000	
		4.749.796.089	10.654.168.460	

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	100 persen	4.003.776.089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	9.148.148.461
6 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	11 layanan	55.798.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 layanan	70.764.500
6 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Dokumen	51.507.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	62.274.000
6 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	567.500
6 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	570.000

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.01	04	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	642.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.728.000
6	01	01	2.01	05	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.060.000
6	01	01	2.01	06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	17 Laporan	762.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Laporan	1.965.000
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	5 Laporan	1.692.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	2.600.000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	29 dokumen	3.299.946.589	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29 dokumen	8.126.476.546
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	686 Orang/Bulan	3.297.253.589	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		686 Orang/Bulan	8.118.286.546
6	01	01	2.02	05	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	1 Laporan	693.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	790.000

6	01	2,02	07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7.400.000					
															01	13 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Laporan
															01	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul			
6	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	49 orang	39.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 orang	87.050.000						
6	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	6 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	6.550.000						
6	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	49 Orang	39.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 Orang	80.500.000						
6	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	5 layanan	271.372.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 layanan	497.872.165						
6	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Paket	6.264.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	13.105.000						
6	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Paket	75.229.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	193.000.000						
6	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Paket	65.185.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	127.561.000						

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Paket	4 Paket	9.617.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	19.655.900		4 Paket				
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	0 Dokumen	0 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	260 Dokumen	1.565.000						
6	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Laporan	4 Laporan	6.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	5.250.000						
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	49 Laporan	49 Laporan	108.326.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Laporan	137.735.265						
6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	48 unit	48 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 unit	50.000.000						
6	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	0 unit	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 unit	50.000.000						
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	3 layanan	3 layanan	86.084.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 layanan	165.310.750						
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	12 Laporan	12 Laporan	6.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.310.750						
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	36 Laporan	36 Laporan	79.784.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	164.000.000						

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10
6 01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 layanan	251.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 layanan	150.674.500		
6 01	01	2,09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	182 Unit	169.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	182 Unit	114.500.000		
6 01	01	2,09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	45 Unit	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Unit	16.424.500		
6 01	01	2,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	1 Unit	57.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	10.000.000		
6 01	01	2,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	141 unit	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	141 unit	9.750.000		
6 01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	100 persen	501.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	1.185.000.000		
6 01	02	2,01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 layanan	257.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 layanan	589.000.000		
6 01	02	2,01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	96 Laporan	54.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96 Laporan	160.000.000		
6 01	02	2,01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	88 Laporan	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	88 Laporan	160.000.000		

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	5 Laporan	5 Laporan	46.935.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	5 Laporan						
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	30 Laporan	30 Laporan	136.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	30 Laporan						
6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	120 dokumen	120 dokumen	243.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 dokumen	120 dokumen						
6	01	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	53 Laporan	53 Laporan	243.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53 Laporan	53 Laporan						
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	100 persen	100 persen	244.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	100 persen						
6	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan terlaksana	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	9 dokumen	9 dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 dokumen	9 dokumen						
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi						
6	01	03	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi						
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	3 layanan	3 layanan	242.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 layanan	3 layanan						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6	01	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	191 perangkat daerah	240.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	191 perangkat daerah	305.000.000
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	47 perangkat daerah	2.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47 perangkat daerah	9.495.000
									4.749.796.089			10.654.168.460

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan risiko PD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen risiko. Manajemen risiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing PD yang memiliki risiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran daerah maupun sasaran PD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka pemantauan perkembangan penyelesaian temuan.
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan internal maupun eksternal.
3. Melaksanakan asistensi/pendampingan terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban APBKal dan rencana penyusunan APBKal tahun berikutnya.
4. Membuka layanan klinik konsultasi.
5. Melakukan Survei Penilaian Integritas.
6. Meningkatkan Kapasitas SDM, Sarana dan Prasarana.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
INSPEKTORAT DAERAH,

SAPTOYO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LatarBelakang.

Diterapkannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah membawa banyak perubahan sistem dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten. Desentralisasi merubah sistem yang semula sentralistik, sehingga dengan desentralisasi diharapkan akan membawa perubahan peran pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan.

Program-program pembangunan yang disusun secara keseluruhan dirangkum dalam satu bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu jangka pendek (1 tahun). Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada prinsipnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021 - 2026.

Selain itu Rencana Kerja Dinas Kesehatan untuk menselaraskan dari arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 dan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kegiatan. Renjana kerja Dinas Kesehatan memperhatikan juga visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Renstra Propinsi DIY. Dengan

demikian, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tidak lepas dari program yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan dan Provinsi DIY.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja pada tahun 2024 ini didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi bisa sinkron dengan peraturan di tingkat Pusat maupun daerah. Adapun landasan hukum untuk menyusun Rencana kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua atas Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 –2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gunungkidul, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai

referensi dan pedoman dalam menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2024 dan proses awal penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 tetap mengacu pada pencapaian indikator program kesehatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Berdasarkan APBD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tahun 2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2022, Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi belanja Operasi sebesar Rp 311.673.042.272,00 dan belanja modal sebesar Rp 39.234.067.196,00 untuk melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 24 kegiatan. Dari anggaran tersebut, belanja tidak langsung dan belanja modal dapat direalisasikan masing-masing sebesar Rp 301,650,512,299 (92,81%) dan 58,186,572,146 (93,72%).

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPA / A.1 / 1 .02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 04 Januari Tahun 2023 Dinas Kesehatan mendapatkan anggaran sebesar 320.963.832.811. Realisasi amapai dengan bulan Juni tahun 2023 sebesar 123.761.658.940,19.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Oleh karena itu evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dikaitkan dengan dokumen perencanaan jangka menengah atau dengan Renstra masing-masing

perangkat daerah yang telah ditetapkan. Menurut Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, pada tahun 2024 terdapat 6 program yang dijabarkan kedalam 23 kegiatan dan 81 sub kegiatan dengan pagu pendanaan indikatif sebesar Rp 295.955.861.290,00 Yang terdiri dari Dinas Kesehatan , UPT Puskesmas, RSUD dan UPT Laboratorium Kesehatan .

Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 antara lain: 1. Meningkatnya koordinasi antar bidang dan mutu data/informasi pembangunan serta hasil monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Komitmen PD mitra dan para pemangku kepentingan yang cukup baik untuk mewujudkan keselarasan antar lembaga dan antar waktu dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, 3. Perbaikan dalam mutu layanan PD baik secara kuantitas maupun kualitas untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan, dan 4. Kemungkinan masih dilaluinya pandemi Covid-19.

Apabila dilihat dari pencapaian target program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2022 yang merupakan tahun pertama periode Renstra, tingkat capaian dari masing-masing output kegiatan sangat bervariasi. Karena ada beberapa output kegiatan yang selesai pada tahun 2022 ini sehingga tingkat capaiannya 100%, ada pula yang ditargetkan setiap tahun sehingga target pada akhir periode Renstra merupakan akumulasi dari lima tahun periode Renstra. Realisasi tingkat Capaian Kinerja program dan kegiatan dalam Renstra sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 76%. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan sampai dengan triwulan III Tahun 2022 dan perkiraan realisasi capaian tahun 2022 sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Capaian kinerja pelayanan kesehatan berdasar indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta indikator RPJP Kabupaten Gunungkidul. Indikator SPM Bidang Kesehatan terdiri dari 12 indikator sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Target (%)	Realisasi 2022 (%)	Keterangan capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	97	95.23	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	99.85	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95	86.79	
4	Pelayanan kesehatan balita	88	88.04	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	92	100	
6	Pelayanan kesehatan pada usia Produktif	55	41.62	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	40	29.90	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	45	13.29	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	45	22.69	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	70	33.43	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	40	52.13	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	92	100	

Berbagai kendala/hambatan indikator belum mencapai target antara lain disebabkan oleh :

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil*

Jumlah ibu hamil yang sampai usia kehamilan Trimester IV belum terpenuhi semua dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- *Aborsi / keguguran*
- *Kunjungan Pertama (K1) tidak di Trimester I*

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*

Adanya 13 ibu yang tidak mendapatkan layanan kesehatan dikarenakan ibu yang bersangkutan bersalin di rumah sebelum sampai di Fasilitas Kesehatan yang dituju.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*

Adanya sejumlah bayi baru lahir yang belum memperoleh layanan kesehatan disebabkan belum semua bayi yang dilayani sudah sesuai standar (IMD = Inisiasi Menyusu Dini) dan ASI-Eksklusif.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Balita*

Terdapat sejumlah balita yang belum memperoleh layanan kesehatan dikarenakan belum semua balita memperoleh layanan sesuai standar (SDIDTK minimal 2 kali dalam 1 tahun).

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar*

Secara umum, seluruh sekolah di Kabupaten Gunungkidul sudah menjadwalkan pemeriksaan kesehatan anak SD tetapi karena adanya pandemic Covid-19 dan adanya kebijakan Pemerintah tentang sekolah Daring untuk menghindari terjadinya kemungkinan resiko penularan Covid-19 akibat kerumunan, maka kegiatan skrining tahun 2021 tidak dilaksanakan, hal ini sangat mempengaruhi pencapaian target SPM.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif*

Pernyataan Standar pelayanan kesehatan usia produktif sesuai SPM: Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi (termasuk keluarga berencana) dan skrining kesehatan (skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular) sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten / kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei / riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.
3. Pelayanan Skrining faktor risiko adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi:
 - a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - b. Pengukuran tekanan darah.
 - c. Pemeriksaan gula darah.
 - d. Anamnesa perilaku berisiko.

Keterangan : Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS (perikSA payuDara secara kliNIS) dan cek IVA.

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan usia produktif sesuai SPM :

1. Pedoman dan media KIE : minimal 2 Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar per puskesmas.
2. Alat ukur, meliputi : berat badan, tinggi badan, lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, sesuai jumlah sasaran skrining kesehatan.
3. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM) Sesuai kebutuhan

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan kesehatan usia produktif sesuai SPM :

1. Tenaga kesehatan : 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat, untuk melayani pemeriksaan kadar gula darah 5. Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun) Dokter/Bidan terlatih.
2. Tenaga non kesehatan : Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (Petugas Pelaksana Posbindu terlatih), kader kesehatan untuk melayani Pengukuran TB, BB, Lingkar perut dan Tekanan Darah.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Hasil pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target maximal 100%, karena belum terpenuhinya ketentuan sesuai pernyataan standar dalam peraturan

menteri kesehatan tentang standart pelayanan minimal bidang kesehatan, dalam hal :

1. Jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan usia produktif yang tersedia, meliputi : Pedoman dan media KIE, Alat ukur : berat badan, tinggi badan, lingkar perut, index masa tubuh (IMT), tensi meter, glucometer, tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, dan KIT IVA tes.
2. Jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan kesehatan usia produktif, meliputi : Dokter, Bidan, Perawat, Gizi, kesmas dan tenaga non kesehatan terlatih yang mempunyai kualifikasi tertentu (Petugas Posbindu/kader kesehatan terlatih).
3. Disamping itu cakupan layanan usia produktif (15 – 59 tahun), belum mencapai 100% karena dengan adanya kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut*

Adanya sejumlah warga lansia yang belum memperoleh layanan kesehatan disebabkan sasaran sejumlah lansia di wilayah Puskesmas belum bisa diakses dengan *skrining* / layanan sesuai standar karena adanya keterbatasan tenaga dan sarana prasarana (*lansia kit*). Disamping itu cakupan layanan kesehatan pada usia lanjut belum mencapai 100% karena dengan adanya kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi*

Pernyataan Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai SPM :

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam

kurun waktu satu tahun. Estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota.

Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Pelayanan, meliputi : pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan.

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai SPM :

1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE : minimal 2 Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar per puskesmas.
2. Alat ukur, berupa Tensimeter sesuai kebutuhan untuk mengukur tekanan darah.
3. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM) Sesuai kebutuhan

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan penderita hipertensi sesuai SPM, meliputi Dokter, Bidan, Perawat, kesmas :

1. Dokter atau tenaga Kesehatan yang berkompeten atau tenaga kesehatan lain yang terlatih untuk memberikan layanan Pengukuran Tekanan Darah
2. Dokter dan/ atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan/ atau tenaga kesehatan terlatih untuk memberikan layanan edukasi kesehatan
3. Dokter untuk memberikan layanan Terapi farmakologi

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Hasil pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di Kabupaten Gunungkidul BELUM bisa mencapai target maksimal (100%), karena : belum terpenuhinya ketentuan sesuai pernyataan standar dalam peraturan menteri kesehatan tentang standart pelayanan minimal bidang kesehatan, dalam hal :

1. Jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan Penderita hipertensi yang tersedia, meliputi : Pedoman dan media KIE, Alat ukur tensimeter.
2. Jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan kesehatan penderita hipertensi, meliputi : Dokter, Bidan, Perawat, Gizi, kesmas dan tenaga non kesehatan terlatih yang mempunyai kualifikasi tertentu (Petugas Posbindu/kader kesehatan terlatih).
4. Cakupan layanan penderita hipertensi (estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota), belum bisa dicapai 100% karena tidak bisa ketemu dengan sasaran, terutama sasaran usia sekolah dan sasaran yang bekerja. Kegiatan layanan biasanya dilaksanakan pada jam kerja sementara sasaran pada saat yang sama sedang melakukan aktifitasnya masing – masing (sekolah dan bekerja). Disamping itu cakupan layanan penderita hipertensi belum mencapai 100% karena dengan adanya kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus*

Pernyataan Standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai SPM :

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota.

Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Pelayanan, meliputi : pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi, melakukan rujukan jika diperlukan.

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai SPM :

1. Pedoman pengendalian diabetes melitus dan media KIE : minimal 2 Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar per puskesmas.
2. Alat ukur dan BMHP, berupa : Glukometer, Strip tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet, sesuai kebutuhan dan sasaran untuk melakukan pemeriksaan Gula Darah
3. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM) Sesuai kebutuhan

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan penderita diabetes melitus sesuai SPM, meliputi Dokter, Bidan, Perawat, gizi, kesmas :

1. Dokter atau tenaga Kesehatan yang berkompeten atau tenaga kesehatan lain yang terlatih untuk memberikan layanan Pengukuran Kadar Gula Darah
2. Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan/atau tenaga kesehatan terlatih untuk memberikan layanan edukasi gaya hidup dan/atau nutrisi.
3. Dokter untuk memberikan layanan Terapi farmakologi

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes melitus, dinilai dari persentase jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Hasil pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus di Kabupaten Gunungkidul BELUM bisa mencapai target maximal (100%), karena : belum terpenuhinya ketentuan sesuai pernyataan standar dalam peraturan menteri kesehatan tentang standart pelayanan minimal bidang kesehatan, dalam hal :

1. Jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus yang tersedia, meliputi : Pedoman dan media KIE, Alat ukur dan BMHP, berupa : Glukometer, Strip tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet.
2. Jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, meliputi : Dokter, Bidan, Perawat, Gizi, kesmas dan tenaga non kesehatan terlatih yang mempunyai kualifikasi tertentu (Petugas Posbindu/kader kesehatan terlatih).

3. Cakupan layanan penderita diabetes melitus (estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota), belum bisa dicapai (100%) karena tidak bisa ketemu dengan sasaran, terutama sasaran usia sekolah dan sasaran yang bekerja. Kegiatan layanan biasanya dilaksanakan pada jam kerja sementara sasaran pada saat yang sama sedang melakukan aktifitasnya masing – masing (sekolah dan bekerja). Disamping itu cakupan layanan pada penderita hipertensi belum mencapai 100% karena dengan adanya kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan jiwa berat*

Cakupan layanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat belum mencapai 100% karena dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga Tuberkolosis*

Cakupan layanan kesehatan pada orang dengan terduga Tuberkolosis belum mencapai 100% karena ada kemungkinan beberapa penyebab di antaranya adalah kasus mangkir, kasus meninggal, kasus pindah tanpa memberikan pemberitahuan, disamping dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)*

Adanya sejumlah warga negara yang sasarannya rendah dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- Ibu hamil: kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pemeriksaan HIV.

- Penderita TB: kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pemeriksaan HIV.
- Populasi kunci: masih tertutup dan malu dengan adanya layanan kesehatan.
- Warga binaan lembaga pemasyarakatan sudah dilakukan VCT (*Volunteer Counseling and Tasking*) secara rutin.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program dan kegiatan dan diperkirakan mempengaruhi upaya pencapaian target adalah :

1. Adanya beberapa kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.
2. Realisasi kebutuhan barang disesuaikan dengan kebutuhan riil.
3. Ada kegiatan yang salah dalam penentuan target.
4. Dengan canggihnya teknologi, maka informasi tidak harus melalui surat atau datang langsung ke lokasi, hanya melalui media elektronik sana sehingga dapat mengurangi biaya-biaya perjalanan.
5. Kelebihan dalam penentuan jumlah hari per tahun untuk pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL).
6. Meningkatnya beberapa kasus yang tidak bisa diprediksi (seperti kasus DBD, KLB dan lain-lain).
7. Adanya rasionalisasi sumber dana pajak rokok yang dapat mempengaruhi kinerja program dan kegiatan.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab pencapaian target adalah :

1. Penyesuaian target sesuai dengan tahapan
2. Mengoptimalkan program dan kegiatan dengan sumber daya yang ada.
3. Monitoring dan evaluasi secara intensif dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatkan koordinasi-koordinasi dalam rangka percepatan program dan kegiatan dalam pencapaian target target.

Sedangkan capaian Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas kesehatan
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Indikator IKU													
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	51,79	52,38	66,81	66,81	67,49	91,7	223,43	61,20	66,81	66,81	67,49	Kesmas
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	7,2	7	8,2	7,9	7,6	8,38	10,33	12,39	8,2	7,9	7,6	Kesmas
3	Prevalensi Stunting	Persen	na	na	15,5	15,2	14,9	na	na	15,4	15,5	15,2	14,9	Kesmas
	Indikator SPM													
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100	93	97	97	94,49	93,27	94,85	93	97	97	Kesmas
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	100	100	100	100	99,83	99,76	99,63	100	100	100	Kesmas
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	90	95	95	89,27	84,31	86,86	90	95	95	Kesmas
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	100	87,5	88	88	87,45	83,93	80,02	87,5	88	88	Kesmas
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	100	100	90	92	95	3,53	10,21	35,05	90	92	95	Kesmas
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	50	60	40	55	55	31,69	38,54	23,46	40	55	55	P2P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	15
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	60	70	30	40	40	21,24	28,61	28,94	30	40	40	Kesmas
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	45	70	30	45	45	7,70	7,93	32,91	30	45	45	P2P

9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	70	100	30	45	45	19,81	22.69	41,69	30	45	45	P2P
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	100	100	60	70	70	57,37	85.95	39,12	60	70	70	P2P
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	54	61	35	40	40	26,17	12.08	93,43	35	40	40	P2P
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persen	63	73	90	92	92	88,11	87.63	85,20	90	92	92	P2P
	IKK													
13	persentasae pemenuhan fasilitas kesehatan utk UKM dan UKP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
14	Persentase Faskes (Dinkes dan Puskesmas) tersedia Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kesmas
15	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya memiliki izin operasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kesmas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	15
16	Persentase Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Praktik Profesi memiliki Surat Izin Praktik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK

17	Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Gunungkidul terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
18	Persentase Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
19	Persentase perijinan sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman terbit tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
20	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK

21	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	P2P
22	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen	28	28	28	29	29	28	28	28	28	29	29	Kesmas
23	Persentase Posyandu aktif	Persen	30	30	30	35	35	30	30	30	30	35	35	Kesmas
24	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	7	15
25	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
26	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
27	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat

28	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
29	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
30	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
31	IKM penyelenggara BLUD	Indeks	na	na	78,13	78,52	78,52	na	na		78,13	78,52	78,52	Pusk , RSU D
32	IKM PD	Indeks	79,59	80	80,1	80,2	80,3	80,05	81,66	81,72	80,1	80,2	80,3	SDK

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.3.2 Permasalahan Kesehatan Berdasar Tugas dan Fungsi PD Derajat Kesehatan Masyarakat (DKM) bisa diukur berdasar indikator pokok kesehatan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Status Gizi Masyarakat (Prevalensi Stunting, dan Angka Kesakitan akibat Penyakit (*Point Prevalence Rate*). Masalah kesehatan yang muncul di Kabupaten Gunungkidul masih berkisar pada pencapaian indikator utama derajat kesehatan masyarakat. Secara nasional hasil di Kabupaten Gunungkidul memang lebih baik, tetapi bila dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY sebagian masih lebih rendah, yaitu untuk Prevalensi Stunting dan *Point Prevalence Rate*.

Secara umum, permasalahan kesehatan berdasar hasil analisis data dari Puskesmas maupun RSUD Wonosari dan RSUD Saptosari (*data base*) adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya penanganan wasting dan Stunting pada balita;
2. Masih rendahnya cakupan penemuan penderita penyakit TBC dengan BTA (+);
3. Tingginya angka kesakitan penyakit degeneratif (hipertensi, stroke, diabetes mellitus);
4. Masih kurangnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar;
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
6. Masih rendahnya cakupan rumah sehat;
7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
8. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga;
9. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
10. Belum terpenuhinya beban biaya kesehatan bagi masyarakat tidak/kurang mampu;
11. Masih lemahnya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
12. Masih terbatasnya pengelolaan manajemen dan sistem informasi kesehatan yang *up to date*, cepat dan tepat;
13. Adanya pandemic Covid-19 dapat mempengaruhi berbagai capaian program maupu kegiatan.

2.3.2. Isu-isu Sektor Kesehatan

Isu strategis berdasar data dari media (*media review*) dan telaah dari lintas sektor terkait, maka isu strategis sektor kesehatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Alokasi dan komposisi pembiayaan kesehatan :

Biaya kesehatan adalah sejumlah dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan di Kabupaten Gunungkidul berasal dari sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan sumber dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana APBD kabupaten, dipergunakan untuk belanja tidak langsung (gaji pegawai) dan untuk belanja langsung yang melekat pada program dan kegiatan yang ditujukan pada

masyarakat.

2. Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita masih belum tertuntaskan, Gizi Lebih mulai meningkat:

Kasus Gizi buruk di Kabupaten Gunungkidul masih ditemukan walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kondisi terakhir menunjukkan angka dibawah 8%. Ketersediaan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi ekonomi akan berpengaruh dalam pencapaian status gizi masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Penyakit penyerta juga banyak didapati pada kasus-kasus anak dengan gizi buruk. Sementara itu, kasus gizi kurangnya melebihi angka 10% perlu diwaspadai dan juga menjadi perhatian agar tidak semakin jatuh dalam kondisi gizi buruk. Kurang Energi Kronis masih menjadi masalah, namun dilain pihak kasus obesitas terutama obesitas sentral) menjadi beban ganda masalah gizi di Kabupaten Gunungkidul.

3. Peningkatan HIV-AIDS dan NAPZA:

Penyebaran penggunaan NAPZA ternyata ditemukan tidak hanya di daerah perkotaan, melainkan sudah meluas aksesnya sampai pelosok desa. Peningkatan penyalahgunaan NAPZA dapat memicu sex bebas dan penggunaan jarum suntik bergantian. Hal tersebut dapat meningkatkan penderita HIV-AIDS. Generasi muda adalah golongan umur yang menjadi sasaran NAPZA, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam penanganan NAPZA dan penularan HIV-AIDS.

4. Kesehatan Ibu dan Anak:

Kematian ibu beberapa tahun terakhir tidak banyak mengalami penurunan, bahkan untuk beberapa tahun menunjukkan jumlah angka yang tetap. Eklamsi dan perdarahan masih merupakan penyebab kematian ibu melahirkan di Kabupaten Gunungkidul. Antenatal care yang kurang berkualitas ditunjukkan dengan capaian K4 yang belum memenuhi target akan semakin mengancam keberhasilan penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Gunungkidul. Cakupan pertolongan persalinan oleh dukun bayi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal inilah yang memberikan harapan kesehatan ibu semakin membaik karena pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tentu akan semakin naik.

Untuk kesehatan anak, ada beberapa hal yang kurang tersentuh berkaitan dengan kesehatan anak diantaranya deteksi tumbuh kembang. Anak merupakan usia yang rentan terhadap masalah kesehatan, sehingga cakupan imunisasi untuk anak juga perlu mendapat perhatian.

5. PHBS belum optimal:

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diterapkan pada beberapa tatanan (tatanan rumah tangga, tatanan institusi). Pada tatanan rumah tangga, angka perokok yang tinggi (Riskesdas 2018: 23,9% penduduk) menjadi penyebab yang menjadikan cakupan rumah tangga ber-PHBS masih rendah.

6. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas:

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan input yang akan membantu kelangsungan pelayanan kesehatan. Bangunan fisik di Puskesmas dan jaringannya khususnya rumah dinas dijumpai sebagian penggunaannya kurang optimal karena tidak mesti ditempati oleh tenaga Puskesmas yang bersangkutan. Keterbatasan sumberdana untuk pemeliharaan baik untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas membuat beberapa bangunan yang rusak masih belum diperbaiki.

7. Sebagai daerah endemis penyakit DBD:

DBD merupakan penyakit menular yang pada Tahun 2016 mengalami kenaikan lebih dari 100%.

Pemberantasan sarang nyamuk penyebab DBD melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik (G1R1J) yang dilakukan masyarakat sangat efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan DBD, terbukti dari tahun ke tahun kasus DBD mengalami penurunan disamping ditunjang dengan siklus epidemiologi penyakit DBD yang mengalami naik turun secara tiga tahunan dan lima tahunan. Dukungan masyarakat dan pemangku kebijakan sangat diperlukan, agar masalah DBD dapat dituntaskan di wilayah Gunungkidul.

8. Pola penyakit degeneratif semakin meningkat:

Trend baru bahwa, pola penyakit menular semakin digeser posisinya oleh penyakit-penyakit tidak menular atau dengan kata lain penyakit infeksi menjadi non infeksi. Usia harapan

hidup yang semakin meningkat rupanya juga membawa konsekuensi logis terhadap munculnya kasus-kasus penyakit degeneratif, yang didukung dengan perilaku hidup yang tidak sehat. Penyakit degeneratif yang menduduki sepuluh besar penyakit antara lain adalah :

Common cold/Nasopharyngitis Akut, *Skizofrenia*, Hipertensi esensial, Diabetes Melitus (DM), *Vertigo Perifer*, Abses, *Dermatitis* kontak alergi, *Gingivitis*, *Haemoroid*. Data lain berdasar hasil Riskesdas di Kabupaten Gunungkidul (2018) penyakit katarak juga merupakan masalah yang banyak ditemui di kalangan Usila, tindakan operasi baru sebagian kecil yang dilaksanakan.

9. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai:

Kesehatan lingkungan erat kaitannya dengan ketersediaan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), jamban keluarga dan yang pokok adalah ketersediaan air bersih. Sementara ini, ketiga hal tersebut masih menjadi masalah yang belum tertuntaskan di Kabupaten Gunungkidul. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka pelaku-pelaku pembangunan sarana kesehatan lingkungan lebih banyak akan melibatkan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.

10. Desa siaga aktif masih perlu ditingkatkan:

Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, desa siaga bisa dijadikan wadah di tingkat desa. Desa siaga yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar masih bersifat pembentukan tim dan perintisan namun sebagian besar kegiatan nyata belum berjalan dengan baik. Banyak hal yang harus dibenahi untuk keberlangsungan desasiaga aktif.

11. Banyaknya kasus kesehatan jiwa:

Pada Tahun 2020 gangguan kesehatan jiwa masuk dalam 10 besar penyakit di Kabupaten Gunungkidul. Banyak kasus gangguan kesehatan jiwa yang terjadi di Gunungkidul.

Kasus bunuh diri juga menjadi fenomena tersendiri di Kabupaten Gunungkidul, dan hal ini tidak lepas dari masalah kesehatan jiwa. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti penyakit menahun, adanya kepercayaan masyarakat “pulung gantung” dan juga faktor-faktor lainnya tetapi pada dasarnya

penyebab kasus bunuh diri semata-mata bukan disebabkan oleh *faktor ekonomi*.

12. Persiapan operasional Rumah Sakit Saptosari
13. Persiapan sarana dan prasarana Rumah Sakit Ngoro-ngoro Patuk dan Bedoyo Ponjong.
14. Adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

2.1.1 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu sektor kesehatan di atas, maka isu strategis Dinas Kesehatan adalah :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dikarenakan masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal;
2. Belum tertuntaskannya kasus *Stunting* dan *Wasting* pada balita;
3. Masih belum maksimalnya penanganan penyakit menular (masih rendahnya cakupan penemuan penderita TBC dengan BTA (+), peningkatan kasus HIV-AIDS, adanya pandemic Covid, dll)
4. Tingginya angka kesakitan penyakit degeneratif dan tidak menular (hipertensi, stroke, diabetes mellitus, skizoprenia);
5. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kesehatan;
6. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan;
7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, termasuk UKBM dan desa siaga;
8. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai;

2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan diperoleh berdasar hasil usulan dari Puskesmas dan bidang-bidang di Dinas Kesehatan. Usulan dari luar Dinas Kesehatan diperoleh dari hasil musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten, Reses Dewan, dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyampaian usulan kegiatan dan program tersebut dilaksanakan dengan maksud bisa dilakukan perencanaan dengan sistem *bottom up* baik dari Puskesmas maupun dari masyarakat

langsung, sehingga perencanaan tidak dilakukan sentralistik di kabupaten.

Hasil usulan kemudian ditentukan skala prioritasnya berdasarkan ketersediaan pagu anggaran dan juga pada kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang akan dicapai tanpa meninggalkan pencapaian indikator yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Renstra Dinas Kesehatan.

Setelah melalui pembahasan yang intensif dan rasionalisasi program untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang optimal, maka rancangan awal rencana kerja Dinas Kesehatan dengan pagu indikatif sejumlah Rp 298.255.861.290,00 (Dua ratus Sembilan puluh delapan milyar dua ratus limapuluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah). Selengkapnya ditampilkan dalam Tabel 2.3 berikut ini;

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan diperoleh selain hasil usulan dari Puskesmas dan bidang-bidang di Dinas Kesehatan juga dari luar Dinas Kesehatan diperoleh dari hasil musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten, Reses Dewan, dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyampaian usulan kegiatan dan program tersebut dilaksanakan dengan maksud bisa dilakukan perencanaan dengan sistem *bottom up* dari masyarakat langsung, sehingga perencanaan tidak dilakukan sentralistik di kabupaten.

Hasil usulan kemudian ditentukan skala prioritasnya berdasarkan ketersediaan pagu anggaran dan juga pada kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang akan dicapai tanpa meninggalkan pencapaian indikator yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Renstra Dinas Kesehatan.

Setelah melalui pembahasan yang intensif dan rasionalisasi program untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang optimal, maka rancangan awal rencana kerja Dinas Kesehatan berdasarkan usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 dari para pemangku kepentingan kabupaten Gunungkidul berdasarkan prioritas dari sumber dana Pagu Pokok pikiran Dewan (Pokir) sebesar 67.858.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan posbindu kit 6 paket dan Latihan kader deteksi dini penyakit tidak menular 4 paket.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun Renstra Tahun Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menjadi salah satu acuan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

Perencanaan yang disusun oleh pemerintah disusun berdasarkan peran dan fungsi serta kewenangan masing-masing bersama *stake holders* terkait dengan mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan tersebut disusun dengan memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan antar dokumen perencanaan.

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJM nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan kesehatan yang diuraikan dalam rencana program bidang kesehatan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 tidak ada visi dan misi namun mengikuti visi dan misi Presiden Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kementerian Kesehatan meliputi 8 (delapan) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan;

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Adapun prioritas pembangunan kesehatan pada tahun 2020-2024 difokuskan pada enam fokus prioritas yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak;
2. Meningkatnya status gizi masyarakat;
3. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular;
4. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul disusun dengan tetap mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan juga menjadi rujukan dalam penyusunan jenis program kegiatan dan sub kegiatan serta indikator yang akan dicapai terutama untuk Indikator program yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tidak terlepas dari tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 yaitu *“Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022”*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai adalah:
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

b. Sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan dalam indikator yang terukur. Sasaran strategis Dinas Kesehatan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : ” Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat” dan ” Akuntabilitas kinerja PD meningkat” .

Penjabaran Sasaran Daerah ke dalam sasaran Dinas Kesehatan disajikan Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	2	3	4	5	6
Non Urusan					
1	Pendidikan dan Kesehatan	Kapasitas tata Kelola pemerintah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Akuntabilitas kinerja PD meningkat
Urusan Wajib: Kesehatan					
1	Pendidikan dan Kesehatan	Derajat Kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 60%	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Prevalensi Stunting

Hubungan antara tujuan Dinas Kesehatan dengan sasaran Dinas Kesehatan disajikan dalam Tabel 3.2, dan 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Kesehatan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2022
1	2	3	4
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	66,81 per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	8,2 per 1.000 KH
		Prevalensi Stunting	15,50%

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	Angka Kematian Ibu	66,81 per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	8,2 per 1.000 KH
		Prevalensi Stunting	15,50%
2	Akuntabilitas Kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	80,4

Sedangkan untuk indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU Tahun 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	Angka Kematian Ibu	66,81 per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	8,2 per 1.000 KH
		Prevalensi Stunting	15,50%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta dengan memperhatikan kebijakan umum Bupati, prioritas pembangunan baik nasional, provinsi maupun kabupaten dan dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan serta untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, maka telah dirumuskan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan untuk mencapai hal tersebut diatas sebagai berikut :

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
- 2) Pembangunan Puskesmas
- 3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 4) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 5) Pengembangan Rumah Sakit
- 6) Pengembangan Puskesmas
- 7) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 8) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
- 9) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- 10) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 11) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 12) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 13) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 14) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 15) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- 16) Pengadaan Obat, Vaksin
- 17) Pengadaan Bahan Habis Pakai

- 18) Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 19) Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 20) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 18) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - 20) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 21) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - 22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - 23) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

- 24) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
 - 25) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 26) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 27) Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
 - 28) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
 - 29) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - 30) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 31) Pengelolaan Penelitian Kesehatan
 - 32) Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - 33) Operasional Pelayanan Puskesmas
 - 34) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 35) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - 36) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - 37) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - 38) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - 3) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 4) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

- 1) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 3) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
5. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
6. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
 - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Mebel
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Peningkatan Pelayanan BLUD

- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

10. Penataan Organisasi

- 1) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan sesuai table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

B. Uraian Garis Besar Mengenai Rakapitulasi Program dan Kegiatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 298.255.861.290,00.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan dukungan Perangkat Daerah lainnya serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur. Hasil rekapitulasi program dan kegiatan Tahun 2024 disajikan dalam tabel- tabel berikut :

Tabel. 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				138.317.591.573,00				99.748.563.623,00
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	92.774.382.123,00				92.706.271.623,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Data)			147.244.500,00				142.953.000,00
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	7				7	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat			46.685.000,00				45.738.000,00

1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Daerah (Dokumen)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	3					45.738.000,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			61.487.500,00				62.805.000,00
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1				0,00	62.805.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			3.150.000,00				-
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1				1	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			3.150.000,00				1.158.000,00
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	2				2	1.158.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			3.150.000,00				3.150.000,00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	2				2	3.150.000,00

1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	21	19.022.000,00				19.502.000,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	4	10.600.000,00				10.600.000,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Data)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	3	91.203.899.123,00				91.211.446.623,00
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	13230	91.053.666.623,00				91.053.666.623,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	13230	5.780.000,00				5.780.000,00

1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	144.452.500,00			1	5.780.000,00
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)							152.000.000,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	13				13	152.000.000,00
	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi (Data)			34.150.000,00				34.750.000,00
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1				1	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			34.150.000,00				34.750.000,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	7				7	34.750.000,00
	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi (Data)			364.788.500,00				357.922.000,00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	5				5	

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10.000.000,00				10.000.000,00			
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)		10			10.000.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	208.484.500,00						
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00				45			201.618.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20.000.000,00						20.000.000,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)		6			20.000.000,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000,00				498			1.200.000,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.200.000,00						1.200.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	125.104.000,00						125.104.000,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5			125.104.000,00

1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhi (Data)	GUNUNGKIDUL) (Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	3	366.200.000,00				374.200.000,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	12	1.000.000,00				1.000.000,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	212	275.200.000,00				283.200.000,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	2	90.000.000,00				90.000.000,00
		Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara (Data)			658.100.000,00				585.000.000,00

1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	5	315.000.000,00			5	230.000.000,00
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	47.00				47.00	230.000.000,00
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	75	7.000.000,00			75	10.000.000,00
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	150	25.000.000,00			150	25.000.000,00
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	300.000.000,00			1	300.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			11.100.000,00				20.000.000,00

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	30	30				20.000.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		3,03				44.818.650.950,00	6.407.976.000,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	6	6			1.520.510.500,00	1.615.988.000,00
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	6	6			100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	1			198.095.000,00	200.000.000,00
							59.825.000,00	90.000.000,00

1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Disediakan (Unit)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1				1	90.000.000,00
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)			695.140.000,00				802.040.000,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1				1	802.040.000,00
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Paket)			176.793.000,00				212.793.000,00
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1				1	212.793.000,00
		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Paket)			290.657.500,00				211.155.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	360.00				360.00	211.155.000,00
		Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)			43.230.580.450,00				4.671.988.000,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	29				29	

1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	8662	558.830.000,00				8662	175.900.000,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	7719	739.426.000,00				7719	739.426.000,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	7783	24.000.000,00				7822	24.000.000,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	38453	29.000.000,00				38453	29.000.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	8724	25.500.000,00				8724	25.500.000,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai			1.053.085.000,00					27.500.000,00

1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	516023					27.500.000,00
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)						110.000.000,00		110.000.000,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	153755					110.000.000,00
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)						71.000.000,00		71.000.000,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	35260					71.000.000,00
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)						25.000.000,00		25.000.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	8546					25.000.000,00
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)						112.258.000,00		50.058.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1612					50.058.000,00
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan						55.598.000,00		141.658.000,00

1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sesuai Standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	4397	61.922.500,00			4397	141.658.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)							67.700.000,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	10108				10108	67.700.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)			369.766.700,00				370.746.750,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	12				12	370.746.750,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)			308.382.500,00				310.890.000,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	12				12	310.890.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)			1.836.483.000,00				683.363.000,00

1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	4				4	683.363.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)					51.050.000,00		51.050.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1				1	51.050.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)					225.544.750,00		229.147.250,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	7				7	229.147.250,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)					200.275.000,00		200.275.000,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	7				7	200.275.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)					79.450.000,00		70.000.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1				1.00	70.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)					127.417.000,00		129.467.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	6				6	129.467.000,00

Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1632	74.925.000,00						105.000.000,00
		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)							1632	105.000.000,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	4	258.857.000,00						20.000.000,00
		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)							4	20.000.000,00
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	4	36.670.000.000,00						260.167.000,00
		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)							4	260.167.000,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	2	7.000.000,00						670.000.000,00
		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)							2	670.000.000,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	63.800.000,00						10.000.000,00
		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)							1	10.000.000,00

1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	30	77.590.000,00			30	65.000.000,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1020	1.470.000,00			1020	8.170.000,00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1200	500.000,00			1200	1.470.000,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	0	12.450.000,00			0	500.000,00
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan pembinaan (Faskes)			67.560.000,00				120.000.000,00
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan BLUD (Puskesmas)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	80				80	
		Jumlah Puskesmas yang maju penilaian Puskesmas	(Dinas Kesehatan, KAB.)	30				30	

1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	berprestasi tingkat Provinsi (Puskemas)	GUNUNGKIDUL) (Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	15.000.000,00			1	60.000.000,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	80				80	60.000.000,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	71	52.560.000,00			71	60.000.000,00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar (Persentase)		100	58.000.000,00				80.000.000,00
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah izin / rekomendasi izin tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan (Izin)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	780	6.000.000,00			780	10.000.000,00

1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	780	6.000.000,00			780	10.000.000,00
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Gunungkidul terpenuhi (%)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	100	12.000.000,00			100	20.000.000,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	12.000.000,00			1	20.000.000,00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	105	40.000.000,00			105	50.000.000,00
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan			40.000.000,00				50.000.000,00

1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kompetensinya (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	105	378.317.000,00			105	50.000.000,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin (Persentase)		100					265.982.000,00
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi diterbitkan (Sertifikat) Jumlah IRT yang mendapat pengawasan (Industri) Pengkajian Ulang sertifikat Produksi IRTP (kali)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL) (Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL) (Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	90 90 3	217.375.000,00			90 90 3	160.350.000,00

1.02.04.2.06	<p>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)</p>	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	4	217.375.000,00			160.350.000,00
1.02.04.2.06.0001	<p>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</p>	<p>Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terpenuhi (Data)</p>	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	2	160.942.000,00		2	105.632.000,00
		<p>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)</p>			160.942.000,00			105.632.000,00

1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	43				43	105.632.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kalurahan Sehat (Persentase)		17,36				288.241.500,00	288.334.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah peserta KIE keamananan pangan (Orang)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	220				179.794.000,00	179.794.000,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1				179.794.000,00	179.794.000,00
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah Tangga ber PHBS (Rumah Tangga Sasaran (RTS))	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	77036				63.447.500,00	63.540.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)					63.447.500,00	63.540.000,00

1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	2				2	63.540.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	588				661	45.000.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	2				2	45.000.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN							
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya							
2.22.08.5.06.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	(Dinas Kesehatan, KAB. GUNUNGGIDUL)	17					1.766.391.600,00
								1.766.391.600,00

1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	1.038.097.600,00				1.038.097.600,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1	1.038.097.600,00			1	1.038.097.600,00
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)						
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.00	1.038.097.600,00			1.00	1.038.097.600,00
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3,03	728.294.000,00				728.294.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1	5.900.000,00			1	5.900.000,00
		Jumlah Akumulasi Capaian Sub Kegiatan dari Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)						
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			21.00	5.900.000,00			21.00	5.900.000,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpilih/ra Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				722.394.000,00				722.394.000,00

1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	21	21	131.138.000,00			21	131.138.000,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	144	144	131.138.000,00			144	131.138.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	144	144	7.800.000,00			144	7.800.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	813	813	11.870.000,00			813	11.870.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	1275	1275	5.150.000,00			1275	5.150.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	9160	9160	7.200.000,00			9160	7.200.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	2884	2884	7.800.000,00			2884	7.800.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	922	922	1.800.000,00			922	1.800.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.400.000,00				2.400.000,00

1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngilipar I, Ngilipar)	60				60	2.400.000,00
							1.900.000,00		1.900.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngilipar I, Ngilipar)	68				68	1.900.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngilipar I, Ngilipar)	4			238.451.000,00	4	238.451.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngilipar I, Ngilipar)	7			42.870.000,00	7	42.870.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngilipar I, Ngilipar)	2			4.100.000,00	2	4.100.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngilipar I, Ngilipar)	11			63.475.000,00	11	63.475.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngilipar I, Ngilipar)	6			20.050.000,00	6	20.050.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Ngilipar I, Ngilipar)	4			200.000,00	4	200.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	(UPT Puskesmas Ngilipar I, Ngilipar)	10			12.650.000,00	10	12.650.000,00

1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Menular (Dokumen)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	16	140.890.000,00				16	140.890.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	170	18.000.000,00					170	18.000.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	50	3.500.000,00					50	3.500.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	3	150.000,00					3	150.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Nglipar I, Nglipar)	2	1.000.000,00					2	1.000.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	8	9	11	14	15	16	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
1											1.778.343.500,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1.778.343.500,00
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1.121.300.000,00

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik (%)	100	1.121.300.000,00				1	1.121.300.000,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	1	1.121.300.000,00				1	1.121.300.000,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1,00	1.121.300.000,00				1,00	1.121.300.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes Pemerintah yang Terakreditasi dengan Jenjang Paripurna (Persentase)	3,03	662.843.500,00					662.843.500,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	1	5.800.000,00				1	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	26	657.043.500,00				26	657.043.500,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)		59.190.000,00					59.190.000,00

1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	189				189	59.190.000,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	189			1.500.000,00	189	1.500.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	960			7.050.000,00	960	7.050.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	2600			11.500.000,00	2600	11.500.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	11841.00			6.350.000,00	11841.00	6.350.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	4068.00			4.700.000,00	4068.00	4.700.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	1921			3.647.500,00	1921	3.647.500,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	104			3.000.000,00	104	3.000.000,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1.000.000,00		1.000.000,00

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	182				182					1.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	1				1					200.000,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	1				1					2.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	8				8					278.340.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	8				8					278.340.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	3				3					30.150.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	1				1					30.150.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	3				3					6.200.000,00
													6.200.000,00
													3.100.000,00
													3.100.000,00
1.02.02.2.02.20													33.550.000,00
													33.550.000,00

1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	35	9.800.000,00					9.800.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	11	30.750.000,00					30.750.000,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	1	1.200.000,00					1.200.000,00
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	1888	1.200.000,00					1.200.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	16	127.916.000,00					127.916.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatanannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	265	26.500.000,00					26.500.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	26	4.350.000,00					4.350.000,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				1.000.000,00					1.000.000,00

1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	5	1.300.000,00				5	1.000.000,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	6					6	1.300.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Nglipar II, Nglipar)	5	1.050.000,00				5	1.050.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16	
1					1.767.676.500,00				1.816.211.732,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.767.676.500,00				1.816.211.732,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	1.188.058.000,00				1.236.593.232,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	1	1.188.058.000,00			1	1.236.593.232,00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	1	1.188.058.000,00			1	1.236.593.232,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				579.618.500,00				579.618.500,00	

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Faskes Pemerintah yang Terakreditasi dengan Jenjang Paripurna (Persentase)	3,03	5.800.000,00					5.800.000,00			
		Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	1						1			
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	22	5.800.000,00					22			5.800.000,00
			(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)										
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	23	573.818.500,00					23			573.818.500,00
			(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)										
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	235	79.392.600,00					235			79.392.600,00
			(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)										
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	187	500.000,00					187			500.000,00
			(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)										
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	294,00	9.015.905,00					294,00			9.015.905,00
			(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)										
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				7.550.000,00								7.550.000,00

1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	2284	1.550.000,00				2284	7.550.000,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	6418					6418	1.550.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	2583,00	11.550.000,00				2583,00	11.550.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	2918	6.750.000,00				2918	6.750.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	48	2.000.000,00				48	2.000.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	58	2.400.000,00				58	2.400.000,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	227	1.200.000,00				227	1.200.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	6	4.950.000,00				6	4.950.000,00

1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	17	187.956.000,00				17	187.956.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	5.00	17.340.000,00				5.00	17.340.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	28	2.650.000,00				28	2.650.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	2.00	59.480.000,00				2.00	59.480.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	9.00	10.300.000,00				9.00	10.300.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	10.00	22.405.000,00				10.00	22.405.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	16	115.528.995,00				16	115.528.995,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	637	13.050.000,00				637	13.050.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	23	8.000.000,00				23	8.000.000,00

1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	72	6.000.000,00											6.000.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	72	50.000,00											50.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	1	4.200.000,00											50.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tetapan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Gedangsari II, Gedangsari)	18	4.200.000,00											4.200.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025						
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16							
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.045.027.500,00					2.123.759.500,00						
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.045.027.500,00					2.123.759.500,00						
1.02.01		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	1.275.306.000,00					1.359.938.000,00						
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	1	1.275.306.000,00					1.359.938.000,00						
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.275.306.000,00					1.359.938.000,00						

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	1	1	769.721.500,00			1	1.359.938.000,00
		Persentase Faskes Pemerintah yang Terakreditasi dengan Jenjang Paripurna (Persentase)		3,03		763.821.500,00				763.821.500,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	1		5.900.000,00				-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)				5.900.000,00				-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	25		763.821.500,00			25	763.821.500,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	169		93.912.500,00			169	93.912.500,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	169		1.500.000,00			169	1.500.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					35.390.000,00				35.390.000,00

1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	928	928					35.390.000,00
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	2412	2412				7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	11277	11277				16.600.000,00	16.600.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	3163	3163				3.750.000,00	3.750.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	1303	1303				35.632.000,00	35.632.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	43	43				3.900.000,00	3.900.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	57	57				5.100.000,00	5.100.000,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	194	194				-	-
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk								3.400.000,00	3.400.000,00

1.02.02.2.02.14	pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	1					1	3.400.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	1					1	1.500.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	4					4	254.601.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	2					2	30.950.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	2					2	4.600.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	6					6	66.225.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	4					4	11.750.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									2.500.000,00
										1.500.000,00
										254.601.000,00
										254.601.000,00
										30.950.000,00
										30.950.000,00
										4.600.000,00
										4.600.000,00
										66.225.000,00
										66.225.000,00
										11.750.000,00
										11.750.000,00
										2.500.000,00

1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	300					300	17.100.000,00				300	17.100.000,00 17.100.000,00	2.500.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	9					9	147.961.000,00				4	147.961.000,00	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	4					4	12.500.000,00				50	12.500.000,00	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	50					50	2.850.000,00				5	2.850.000,00	
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	5					5	-				1	-	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	1					1	1.450.000,00				2	1.450.000,00	
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	2					2	3.150.000,00				7	3.150.000,00	
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatapan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Patuk I, Patuk)	7					7							

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	10	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				8	9	11		14	15
1		4							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.493.618.400,00					1.764.163.179,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100	1.493.618.400,00					1.764.163.179,00
				855.087.400,00					1.125.632.179,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	1	855.087.400,00				1	1.125.632.179,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	855.087.400,00				1	1.125.632.179,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)	3,03	638.531.000,00					638.531.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Capaian Sub Kegiatan dari Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Untuk UKM dan UKP (Data)	1	5.800.000,00				1	5.800.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.800.000,00					5.800.000,00

		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	21				21			5.800.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	24				24			632.731.000,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	121.00				121.00			80.430.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	119.00				119.00			500.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	953.00				953.00			7.284.600,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	2126.00				2126.00			14.250.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	10201.00				10201.00			500.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	3011.00				3011.00			7.600.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										12.600.000,00

1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	1613.00	12.600.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	42.00	9.000.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	92.00	3.000.000,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	131	3.000.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	6	2.500.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	16	211.312.400,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	6	19.560.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	2	2.500.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				70.225.000,00

1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	1					1	70.225.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	9					9	8.150.000,00 8.150.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	22					22	2.200.000,00 2.200.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	18					18	28.200.000,00 28.200.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	12					12	125.569.000,00 125.569.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	200					200	18.000.000,00 18.000.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	38.00					38.00	2.000.000,00 2.000.000,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	131					131	2.000.000,00 2.000.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									750.000,00

1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	3	3	1.600.000,00				3	750.000,00
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Patuk II, Patuk)	10.00	10.00					10.00	1.600.000,00 1.600.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16		
1					2.620.505.612,00						2.620.556.612,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.620.505.612,00						2.620.556.612,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TERLAKSANA DENGAN BAIK (%)		100							1.707.975.112,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH PENYELENGGARA BLUD (Faskes)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	1				1			1.707.975.112,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	1				1			1.707.975.112,00 1.707.975.112,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASKES PEMERINTAH YANG TERAKREDITASI DENGAN JENJANG PARIPIURNA (Persentase)		3,03	912.581.500,00						912.581.500,00

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	1	5.900.000,00				1	5.900.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	25	5.900.000,00				25	5.900.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				906.681.500,00					906.681.500,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	277	66.850.000,00				277	66.850.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	212.00	2.975.000,00				212.00	2.975.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	1127.00	17.870.000,00				1127.00	17.870.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	1985.00	13.400.000,00				1985.00	13.400.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	16018.00	3.200.000,00				16018.00	3.200.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				3.200.000,00					3.200.000,00

1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	3039.00	13.500.000,00	3039.00	3.200.000,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	2667.00	13.500.000,00	2667.00	13.500.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	48.00	4.800.000,00	48.00	4.800.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	113.00	3.000.000,00	113.00	3.000.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	25.00	1.250.000,00	25.00	1.250.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	6.00	315.205.000,00	6.00	315.205.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	6.00	176.445.000,00	6.00	176.445.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	20.00	1.000.000,00	20.00	1.000.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				8.360.000,00		8.360.000,00

1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	3	17.750.000,00				3	8.360.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	2	79.674.500,00				2	17.750.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	5.00	174.102.000,00				5.00	79.674.500,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	2	3.300.000,00				2	174.102.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	66	800.000,00				66	3.300.000,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS GIRISUBO, Girisubo)	16					16	800.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16	
1					1.800.193.000,00				1.800.193.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.800.193.000,00				1.800.193.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.050.144.000,00				1.050.144.000,00	

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100						1.050.144.000,00	1	1.050.144.000,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggaraan BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Ponjong II, Ponjong)	1						1.050.144.000,00	1	1.050.144.000,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)		3,03						750.049.000,00		750.049.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Ponjong II, Ponjong)	1						5.900.000,00	1	5.900.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Ponjong II, Ponjong)	1						5.900.000,00	1	5.900.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Ponjong II, Ponjong)	1						744.149.000,00	1	744.149.000,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									77.010.000,00		77.010.000,00

1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	150.00				150.00	77.010.000,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	150.00				150.00	4.275.000,00 4.275.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	780.00				780.00	13.740.000,00 13.740.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	1724				1724	9.500.000,00 9.500.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	10642				10642	14.600.000,00 14.600.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	3736				3736	37.600.000,00 37.600.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	1537				1537	26.500.000,00 26.500.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	60				60	10.000.000,00 10.000.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								2.500.000,00

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	79,00	3.000.000,00	79,00	2.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	7		7	3.000.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	18	250.420.000,00	18	250.420.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	5	20.900.000,00	5	20.900.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	12	9.250.000,00	12	9.250.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	3	54.195.000,00	3	54.195.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	10	13.150.000,00	10	13.150.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Porjong II, Porjong)	60	4.750.000,00	60	4.750.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				30.100.000,00		30.100.000,00

1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ponjong II, Ponjong)	16	16						144.624.000,00	1	16	30.100.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ponjong II, Ponjong)	1	1						144.624.000,00	1		144.624.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Ponjong II, Ponjong)	200	200						5.000.000,00	200		5.000.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ponjong II, Ponjong)	79	79						5.500.000,00	79		5.500.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Ponjong II, Ponjong)	5	5						2.500.000,00	5		2.500.000,00
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Ponjong II, Ponjong)	6	6						5.035.000,00	6		5.035.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16					
1					2.839.243.400,00						2.741.922.596,00			
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.839.243.400,00						2.741.922.596,00			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.914.544.500,00						1.823.023.696,00			

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100					1.823.023.696,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	1				1	1.823.023.696,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	1				1	1.823.023.696,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)		3,03					918.898.900,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	1				1	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)							918.898.900,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	25				25	51.150.000,00

1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Kec. Wonosari)	300					300	51.150.000,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	294					294	1.000.000,00 1.000.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	1675					1675	53.975.000,00 53.975.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	2892					2892	13.200.000,00 13.200.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	10376					10376	9.850.000,00 9.850.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	891					891	1.200.000,00 1.200.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	1292					1292	18.000.000,00 18.000.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	72					72	11.800.000,00 11.800.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									8.850.000,00

1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	192				192				8.850.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	101				101				4.500.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	2				2				1.000.000,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	3				3				5.000.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	7				7				302.199.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	2				2				13.500.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	7				7				11.500.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	6				6				60.335.000,00
												60.335.000,00

1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Promosi Kesehatan (Dokumen)	Wonosari I, Wonosari)	3	69.750.000,00				3	69.750.000,00 69.750.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	3	1.950.000,00				3	1.950.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	7	34.600.000,00				7	34.600.000,00 34.600.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	4	176.412.000,00				4	176.412.000,00 176.412.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	478	49.000.000,00				478	49.000.000,00 49.000.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	48	10.050.000,00				48	10.050.000,00 10.050.000,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	13	4.500.000,00				13	4.500.000,00 4.500.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				5.577.900,00					5.577.900,00

		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Wonosari I, Wonosari)	1						1	5.577.900,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.420.283.926,00					2.258.450.626,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.420.283.926,00					2.258.450.626,00	
1.02.01		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	2.408.113.426,00					2.258.450.626,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Wonosari II, Wonosari)	1	2.408.113.426,00			1		2.258.450.626,00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Wonosari II, Wonosari)	1	2.408.113.426,00			1		2.258.450.626,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)		3.03	1.012.170.500,00					0,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Wonosari II, Wonosari)	1	5.800.000,00			1		-	

1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)					5.800.000,00			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Wonosari II, Wonosari)	20			1.006.370.500,00		20	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					58.518.000,00			
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					750.000,00			
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					47.800.000,00			
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					46.870.000,00			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					5.050.000,00			
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					2.000.000,00			

1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)								32.242.500,00							
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)								36.075.000,00							
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)								750.000,00							
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)								1.400.000,00							
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)								3.000.000,00							
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)								354.759.000,00							
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)								11.900.000,00							
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)								8.100.000,00							

1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	39.065.000,00																	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	10.500.000,00																	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	111.135.000,00																	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	192.956.000,00																	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	40.500.000,00																	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	3.000.000,00																	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	10	8	9	11	14	15	16	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025								
1			2.186.731.726,00			2.186.731.726,00						2.991.179.660,00								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		2.186.731.726,00			2.186.731.726,00						2.991.179.660,00								
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.436.204.226,00			1.436.204.226,00						2.240.652.160,00								

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	1	100	1.436.204.226,00			1	2.240.652.160,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	1	1	1.436.204.226,00			1	2.240.652.160,00 2.240.652.160,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes Pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)	(UPT PUSEKSMAS KARANGMOJO II, Karangmojo)	3,03		750.527.500,00				750.527.500,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	1		5.800.000,00			1	5.800.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	1		5.800.000,00			1	5.800.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	1		744.727.500,00			1	744.727.500,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					75.220.500,00				75.220.500,00

1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	196				196	75.220.500,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	196			1.000.000,00	196	1.000.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	1053			8.880.000,00	1053	8.880.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	2150			19.200.000,00	2150	19.200.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	7637			7.200.000,00	7637	7.200.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	1230			29.230.000,00	1230	29.230.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	606			1.650.000,00	606	1.650.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	62			8.000.000,00	62	8.000.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.000.000,00		1.000.000,00

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	38	1.200.000,00			38	1.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	3				3	1.200.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	12	247.472.000,00			12	247.472.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	12	58.470.000,00			12	58.470.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	12	2.950.000,00			12	2.950.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	12	65.895.000,00			12	65.895.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	12	6.200.000,00			12	6.200.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	37	8.510.000,00			37	8.510.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				19.700.000,00				19.700.000,00

1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	12	12					12	19.700.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	12	12					12	144.685.000,00 144.685.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	120	120					120	33.000.000,00 33.000.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	20	20					20	1.500.000,00 1.500.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	2	2					2	3.600.000,00 3.600.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Karangmojo II, Karangmojo)	41	41					41	165.000,00 165.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
2	3	4	10	8	11	14	15	16			
1											1.533.620.950,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1.533.620.950,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										898.918.950,00

		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah kabupaten terlaksana dengan baik (%)		100							
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Panggang I, Panggang)	1				884.518.950,00		1	898.918.950,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Panggang I, Panggang)	1.00				884.518.950,00		1.00	898.918.950,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (%)		3,03				634.702.000,00			634.702.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKP dan UKM (Data)	(UPT Puskesmas Panggang I, Panggang)	1				5.800.000,00		1	5.800.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		0.00				5.800.000,00		0.00	5.800.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							628.902.000,00			628.902.000,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		0.00				34.190.000,00		0.00	34.190.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							1.000.000,00			1.000.000,00

1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	120					1.000.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	649				14.000.000,00	14.000.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	967				8.500.000,00	8.500.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS, Panggang)	2904,00				9.650.000,00	9.650.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	2771				2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	1546				35.100.000,00	35.100.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	17				3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	20				13.600.000,00	13.600.000,00

1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	2.00	200.000,00				2.00	200.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang I, Panggang)	12	206.896.000,00				12	206.896.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	12	18.850.000,00				12	18.850.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	12	4.350.000,00				12	4.350.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	12	68.750.000,00				12	68.750.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	12	14.300.000,00				12	14.300.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	12	30.000.000,00				12	30.000.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	12.00	124.916.000,00				12.00	124.916.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				30.000.000,00					30.000.000,00

1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	200	200				200	30.000.000,00	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	11					11	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	1					1	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tetapan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukannya aktifitas merokok (Tetapan)	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	7					7	1.000.000,00	
										1.000.000,00	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	(UPT PUSKESMAS PANGGANG I, Panggang)	8	10	4	9	11	14	15	16
1				2.285.221.880,00			2.285.221.880,00				2.321.655.431,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.285.221.880,00				2.321.655.431,00
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100			1.559.752.080,00				1.600.085.631,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	1			1.559.752.080,00			1	1.600.085.631,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.559.752.080,00				1.600.085.631,00

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	1	725.469.800,00			1	1.600.065.631,00
	Persentase faskes pemerintah yang teakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)			3,03					721.569.800,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	1	5.900.000,00				-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)			5.900.000,00				-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	25	719.569.800,00			25	721.569.800,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	189.00	68.710.000,00			189.00	68.710.000,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	189	1.000.000,00			189	1.000.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				1.500.000,00				1.500.000,00

1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	170				170	1.500.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	701				701	5.920.000,00 5.920.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	1601.00				1601.00	10.250.000,00 10.250.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	10373				10373	1.000.000,00 1.000.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	4019				4019	40.000.000,00 40.000.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	1779.00				1779.00	10.700.000,00 10.700.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	59				59	2.500.000,00 2.500.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	77				77	2.500.000,00 2.500.000,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								1.000.000,00

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	223	223	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	5	5	750.000,00	750.000,00	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	10	10	237.560.000,00	237.560.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	5	5	66.670.000,00	66.670.000,00	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	1	1	6.050.000,00	6.050.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	2	2	51.175.000,00	51.175.000,00	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	4	4	13.500.000,00	13.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	59	59	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)			31.450.000,00	31.450.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	4	4	13.500.000,00	13.500.000,00	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	4	4	13.500.000,00	13.500.000,00	
		Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	59	59	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)			31.450.000,00	31.450.000,00	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)			31.450.000,00	31.450.000,00	

1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	13					13	31.450.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	16	139.409.000,00				16	140.409.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	200	20.000.000,00				200	20.000.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	10	4.500.000,00				10	4.500.000,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	3	1.000.000,00				3	1.000.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	5	1.000.000,00				5	1.000.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Panggang II, Panggang)	3	925.800,00				3	925.800,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16	
1					2.177.993.100,00					2.177.005.040,00

1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.177.993.100,00				2.177.005.040,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100			1.490.110.300,00				1.489.122.240,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		1	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	1.490.110.300,00			1	1.489.122.240,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1	(UPT Puskesmas Purwosari)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.490.110.300,00			1	1.489.122.240,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		3,03			687.882.800,00				687.882.800,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1	(UPT Puskesmas Purwosari)	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	5.800.000,00			1	5.800.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		20	(UPT Puskesmas Purwosari)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	5.800.000,00			20	5.800.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					682.082.800,00				682.082.800,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					74.750.000,00				74.750.000,00

1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	273				273	74.750.000,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	205			500.000,00	205	500.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	933			8.926.800,00	933	8.926.800,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	1950			4.250.000,00	1950	4.250.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	5934			3.250.000,00	5934	3.250.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	2116			13.010.000,00	2116	13.010.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	11			1.500.000,00	11	1.500.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	130			5.000.000,00	130	5.000.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						200.000,00		200.000,00

1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	2				2	200.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	11			225.920.000,00	11	225.920.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	15			36.250.000,00	15	36.250.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	2.00			5.300.000,00	2.00	5.300.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	10			103.400.000,00	10	103.400.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(Purwosari)	2			8.500.000,00	2	8.500.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	2			29.030.000,00	2	29.030.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	19			133.996.000,00	19	133.996.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	100			18.600.000,00	100	18.600.000,00

1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	30	7.500.000,00					30	7.500.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	1	250.000,00					1	250.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukannya aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Purwosari, Purwosari)	5	1.950.000,00					5	1.950.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16		
1					2.128.513.600,00				1.992.361.953,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.128.513.600,00				1.992.361.953,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	1.388.056.100,00				1.251.904.453,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1	1.388.056.100,00			1	1.251.904.453,00		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1	1.388.056.100,00			1	1.251.904.453,00		

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes Pemerintah yang Terakreditasi Dengan Jenjang Paripurna (Persentase)		3,03	740.457.500,00				740.457.500,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1	5.800.000,00		1		5.800.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1	5.800.000,00		1		5.800.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				734.657.500,00				734.657.500,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	221	67.515.000,00		221		67.515.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	202	2.500.000,00		202		2.500.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	975	7.485.000,00		975		7.485.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1640	5.000.000,00		1640		5.000.000,00

1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	14570	20.500.000,00				14570	20.500.000,00	20.500.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	5180	520.000,00				5180	520.000,00	520.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	2440.00	15.938.000,00				2440.00	15.938.000,00	15.938.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1.00	2.750.000,00				1.00	2.750.000,00	2.750.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1	500.000,00				1	500.000,00	500.000,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1	1.228.500,00				1	1.228.500,00	1.228.500,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				243.856.000,00					243.856.000,00	243.856.000,00

1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	5.00				5.00	243.856.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	4			21.850.000,00	4	21.850.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tepus II)	2			6.100.000,00	2	6.100.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	4			98.800.000,00	4	98.800.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	8			6.800.000,00	8	6.800.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	53			950.000,00	53	950.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	14			69.153.000,00	14	69.153.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1			142.849.000,00	1	142.849.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	192			19.200.000,00	192	19.200.000,00

1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	2.00	800.000,00					2.00	800.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1	150.000,00					1	150.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Tepus II, Tepus)	1	213.000,00					1	213.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16		
1					2.619.363.000,00				2.941.859.676,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.619.363.000,00				2.941.859.676,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	1.793.056.400,00				1.996.903.076,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Tanjung Sari, Tanjung Sari)	1	1.793.056.400,00			1	1.996.903.076,00		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Tanjung Sari, Tanjung Sari)	1	1.793.056.400,00			1	1.996.903.076,00		

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes Pemerintah Yang ter Akreditasi Dengan Jenjang Paripurna (Persentase)		3,03	826.306.600,00					944.956.600,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	1	5.800.000,00				1	5.800.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpilih Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	27	5.800.000,00				27	5.800.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	23	820.506.600,00				23	939.156.600,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	240,00	122.500.000,00				240,00	122.500.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	217	1.350.000,00				217	120.000.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	1249	7.775.000,00				1249	7.775.000,00

1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	2495	5.750.000,00					2495	5.750.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	17919	23.055.600,00					17919	23.055.600,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	4998	11.520.000,00					4998	11.520.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	3006	1.815.000,00					3006	1.815.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	36	7.500.000,00					36	7.500.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	576	1.500.000,00					400	1.500.000,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	337	8.021.000,00					337	8.021.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				500.000,00						500.000,00

1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	1					1	500.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	13					13	270.315.000,00 270.315.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	4					4	63.020.000,00 63.020.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	13					13	7.500.000,00 7.500.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	12					12	61.530.000,00 61.530.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	9					9	18.750.000,00 18.750.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	110					110	2.500.000,00 2.500.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	7					7	14.000.000,00 14.000.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	3					3	150.000.000,00 150.000.000,00

1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	327	30.000.000,00						327	30.000.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	22	2.250.000,00						22	2.250.000,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	27	4.090.000,00						27	4.090.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Tanjungsari, Tanjungsari)	2.00	1.500.000,00						2.00	1.500.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(But no more worries, rest your head and go to sleep, Tanjungsari)	2	3.765.000,00						2	3.765.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025				
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16			
1					3.491.626.973,00					3.441.922.250,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.491.626.973,00					3.441.922.250,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.636.395.973,00					2.586.691.250,00		

1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	321				321	151.474.000,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	312			1.400.000,00	312	1.400.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	1980			12.565.000,00	1980	12.565.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	3865			14.500.000,00	3865	14.500.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	24552			2.600.000,00	24552	2.600.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	7741,00			3.500.000,00	7741,00	3.500.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	2908			2.425.000,00	2908	2.425.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	36,00			4.000.000,00	36,00	4.000.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						750.000,00		750.000,00

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari)	216	216	750.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari)	1	1	250.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari)	4.00	4.00	283.438.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari)	5.00	5.00	19.225.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari)	2.00	2.00	4.100.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari)	8.00	8.00	74.205.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari)	5.00	5.00	19.225.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari)	5.00	5.00	283.438.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari)	8.00	8.00	74.205.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari)	5.00	5.00	16.800.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari)	62.00	62.00	200.000,00
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari)	62.00	62.00	200.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari)	62.00	62.00	200.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					51.200.000,00

1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	9.00	9.00					9.00	51.200.000,00
				16.00	16.00					16.00	163.799.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	1036	1036					1036	32.100.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	54.00	54.00					54.00	7.500.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	1.00	1.00					1.00	1.400.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Saptosari, Saptosari)	2	2					2	2.000.000,00
											2.000.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16		
1					1.853.381.000,00					2.097.331.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.853.381.000,00					2.097.331.000,00	
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.144.450.000,00					1.388.400.000,00	

1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	184	1.000.000,00				184	1.000.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	152	41.380.000,00				152	41.380.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	236	7.000.000,00				236	7.000.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	3126	1.250.000,00				3126	1.250.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	806	2.600.000,00				806	2.600.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	1428	7.517.100,00				1428	7.517.100,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	27	4.500.000,00				27	4.500.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	477	10.000.000,00				477	10.000.000,00

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Biasa (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	6	1.000.000,00				6	1.000.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	12	233.390.500,00				12	233.390.500,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	12	27.750.000,00				12	27.750.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	12	1.800.000,00				12	1.800.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	12	29.680.000,00				12	29.680.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	51	22.100.000,00				51	22.100.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	27	4.500.000,00				27	4.500.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	12	45.550.000,00				12	45.550.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas				137.585.000,00					137.585.000,00

1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	16	16					16	137.585.000,00
		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	260	260	64.400.000,00				260	64.400.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	28	28	1.000.000,00				28	1.000.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	2	2	500.000,00				2	500.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Ngawen I, Ngawen)	4.00	4.00	480.000,00				4.00	480.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
2	3	4	10	8	14	15	11	9		16	
1								1.482.382.500,00			1.611.349.912,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.482.382.500,00			1.611.349.912,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100				957.840.000,00			1.086.107.412,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							957.840.000,00			1.086.107.412,00

1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1	957.840.000,00			1	1.086.107.412,00
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1				1	1.086.107.412,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes pemerintahan yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)		3,03	524.542.500,00				525.242.500,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1	5.800.000,00			1	5.800.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	23,00	5.800.000,00			23,00	5.800.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	20	518.742.500,00			20	519.442.500,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	188	62.900.000,00			188	62.900.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				500.000,00				500.000,00

1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	174				174	500.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	716				0.00	6.660.000,00 6.660.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1640				0.00	5.250.000,00 5.250.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	2588				2588	16.560.000,00 16.560.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1700				1700	7.522.500,00 7.522.500,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	14				14	1.000.000,00 1.000.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	60				60	3.900.000,00 3.900.000,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	88				88	400.000,00 400.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								3.300.000,00

1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1						1	3.300.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1					168.995.000,00	1	169.695.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1					52.700.000,00	1	52.700.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1					5.600.000,00	1	5.600.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1					24.085.000,00	1	24.085.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1					5.950.000,00	1	5.950.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1					10.650.000,00	1	10.650.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	2					106.120.000,00	2	106.120.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	360					36.000.000,00	360	36.000.000,00

1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	2	500.000,00					2	500.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Ngawen II, Ngawen)	1	150.000,00					1	150.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16		
1					3.016.908.962,00				3.022.104.410,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.016.908.962,00				3.022.104.410,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik (%)		100	2.141.729.962,00				2.146.925.410,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Semanu 1, Semanu)	1	2.141.729.962,00			1	2.146.925.410,00		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Semanu 1, Semanu)	1	2.141.729.962,00			1	2.146.925.410,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)		3,03	875.179.000,00				875.179.000,00		

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Semanu 1, Semanu)	1	5.900.000,00				1	5.900.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Semanu 1, Semanu)	31	5.900.000,00				31	5.900.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Semanu 1, Semanu)	23	869.279.000,00				23	869.279.000,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu 1, Semanu)	325	118.035.000,00				325	118.035.000,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu 1, Semanu)	277	-				277	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu 1, Semanu)	328	250.000,00				328	250.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu 1, Semanu)	17772	3.385.000,00				17772	3.385.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				7.250.000,00					7.250.000,00

1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	3753	3753	7.250.000,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	21898	21898	1.400.000,00 1.400.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	6750	6750	36.020.000,00 36.020.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	3509	3509	12.515.000,00 12.515.000,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	617	617	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	40	40	4.100.000,00 4.100.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	344	344	5.000.000,00 5.000.000,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	444	444	-

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	1	2.600.000,00				1	2.600.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	7	287.980.000,00				7	287.980.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	1	20.245.000,00				1	20.245.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	3	9.000.000,00				3	9.000.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	8.00	97.045.000,00				8.00	97.045.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	1	12.200.000,00				1	12.200.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	5	29.250.000,00				5	29.250.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	16	167.204.000,00				16	167.204.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				55.800.000,00					55.800.000,00

1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	630	630					55.800.000,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	10	10					-
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu I, Semanu)	28	28					-
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025				
2	3	4	10	8	14	15	11	9	16	
1								2.116.854.996,00		2.096.429.065,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.116.854.996,00		2.096.429.065,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.499.757.996,00		1.479.332.065,00
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100						
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggaraan BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	1		1		1.499.757.996,00		1.479.332.065,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	1		1		1.499.757.996,00		1.479.332.065,00

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									617.097.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									5.800.000,00
									1	
									(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	
									Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									5.800.000,00
									1	5.800.000,00
									(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	
									Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									611.297.000,00
									1	
									(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	
									Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									66.270.000,00
									189	66.270.000,00
									(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	
									Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									511.000,00
									191	511.000,00
									(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	
									Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									26.280.000,00
									1180	26.280.000,00
									(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	
									Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	

1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	2365	10.250.000,00					10.250.000,00	2365									10.250.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	15533	3.500.000,00					3.500.000,00	15533									3.500.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	5076	3.000.000,00					3.000.000,00	5076									3.000.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	891	6.300.000,00					6.300.000,00	891									6.300.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	88	2.000.000,00					2.000.000,00	88									2.000.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	140	2.500.000,00					2.500.000,00	140									2.500.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	1	500.000,00					500.000,00	1									500.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				200.430.000,00					200.430.000,00										200.430.000,00

1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	3				3	200.430.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	4			48.350.000,00	4	48.350.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	7			4.700.000,00	7	4.700.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	5			49.750.000,00	5	49.750.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	3			12.800.000,00	3	12.800.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	16			1.000.000,00	16	1.000.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	8			5.350.000,00	8	5.350.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	16			121.796.000,00	16	121.796.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	375			40.500.000,00	375	40.500.000,00

1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	4	2.500.000,00					2.500.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	1	400.000,00					400.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Semanu II, Semanu)	15	2.610.000,00					2.610.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16	
1					3.049.788.600,00					3.031.546.400,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.049.788.600,00					3.031.546.400,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.022.230.000,00					2.009.787.800,00
		PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TERLAKSANA DENGAN BAIK (%)		100						
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH PENYELENGGARA BLOOD (Faskes)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen, Kec. Playen)	1	2.022.230.000,00			1		2.009.787.800,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLOOD	Jumlah BLOOD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	1	2.022.230.000,00			1		2.009.787.800,00

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASKES YANG TERAKREDITASI PARIPURNA (Persentase)		3,03	1.027.558.600,00				1.021.758.600,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN, Playen)	1	5.800.000,00			1	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	1	5.800.000,00			1	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	1	1.021.758.600,00			1	1.021.758.600,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	362	75.605.000,00			362	75.605.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	359	1.500.000,00			359	1.500.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	780,00	49.217.600,00			780,00	49.217.600,00

1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	3952	40.500.000,00				3952	40.500.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	21131	6.100.000,00				21131	6.100.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	6256	6.400.000,00				6256	6.400.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	3399	21.960.000,00				3399	21.960.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	127	8.000.000,00				127	8.000.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	70	3.000.000,00				70	3.000.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	4	1.000.000,00				4	1.000.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				338.680.000,00					338.680.000,00

1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	4				4	338.680.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	3			56.325.000,00	3	56.325.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	8			6.650.000,00	8	6.650.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	6			61.425.000,00	6	61.425.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	4			25.000.000,00	4	25.000.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	2289			4.000.000,00	2289	4.000.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	4			35.365.000,00	4	35.365.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	3			195.181.000,00	3	195.181.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	400			77.500.000,00	400	77.500.000,00

1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	60	5.800.000,00					60	5.800.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	3	1.250.000,00					3	1.250.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT PUSKESMAS PLAYEN 1, Playen)	3	1.300.000,00					3	1.300.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16		
1					2.520.695.600,00				2.505.995.600,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.520.695.600,00				2.505.995.600,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	1.719.603.600,00				1.704.903.600,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	1	1.719.603.600,00			1	1.704.903.600,00		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	1	1.719.603.600,00			1	1.704.903.600,00		

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes Pemerintah Yang Terakreditasi Dengan Jenjang Paripurna (Persentase)		3,03	801.092.000,00				801.092.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	1	5.900.000,00			1	5.900.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	23	5.900.000,00			23	5.900.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	25	795.192.000,00			25	795.192.000,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	316	123.210.000,00			316	123.210.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	276	500.000,00			276	500.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	1021	11.770.000,00			1021	11.770.000,00

1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	2611	8.000.000,00				2611	8.000.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	6652	14.950.000,00				6652	14.950.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	2108	5.000.000,00				2108	5.000.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	806	2.500.000,00				806	2.500.000,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	142	16.500.000,00				142	16.500.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	54	5.000.000,00				54	5.000.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	599	900.000,00				599	900.000,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	318	1.500.000,00				318	1.500.000,00

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	1	2.000.000,00				1	2.000.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	4	266.330.000,00				4	266.330.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	1	49.500.000,00				1	49.500.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	2	2.350.000,00				2	2.350.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	8	72.950.000,00				8	72.950.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	3	3.600.000,00				3	3.600.000,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	50	250.000,00				50	250.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	8	15.750.000,00				8	15.750.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas				153.732.000,00					153.732.000,00

1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	4	4	31.500.000,00				4	153.732.000,00
		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	210	210					210	31.500.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	46	46	3.300.000,00				46	3.300.000,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	5	5	500.000,00				5	500.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	1	1	500.000,00				1	500.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Playen II, Playen)	31	31	3.100.000,00				31	3.100.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16		
1						12.095.000.000,00					12.095.000.000,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					12.095.000.000,00					12.095.000.000,00
1.02.01	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.000.000.000,00					12.000.000.000,00

		Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik (%)				100													
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(RSUD Saptosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	12.000.000.000,00	1													12.000.000.000,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(RSUD Saptosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	1.00	12.000.000.000,00	1.00													12.000.000.000,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)		3,03	95.000.000,00														95.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(RSUD Saptosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	95.000.000,00														95.000.000,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	(RSUD Saptosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	1.00	95.000.000,00	1.00													95.000.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN																	
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				280.000.000,00														101.001.500,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Terlaksana dengan baik (%)		100	280.000.000,00														101.001.500,00

1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (%)	(UPT. LABORATORIUM KESEHATAN, Wonosari)	100	280.000.000,00				1	101.001.500,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	(UPT. LABORATORIUM KESEHATAN, Wonosari)	34	280.000.000,00				34	101.001.500,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16	
1					3.200.319.600,00					3.271.462.941,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.200.319.600,00					3.271.462.941,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penjang Usulan Pemerintahan Daerah Dengan Terlaksana Dengan Baik (%)		100	2.201.975.600,00					2.279.018.941,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Ponjong 1, Ponjong)	1	2.201.975.600,00			1		2.279.018.941,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	1	2.201.975.600,00			1		2.279.018.941,00 2.279.018.941,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)		3,03	998.344.000,00					992.444.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				5.900.000,00					-

1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	1	5.900.000,00			1	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)			992.444.000,00				992.444.000,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	385,00	70.215.000,00			385,00	70.215.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	331	1.000.000,00			331	1.000.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	1957	27.990.000,00			1957	27.990.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	4709	9.250.000,00			4709	9.250.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	23329	4.850.000,00			23329	4.850.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	8034	3.300.000,00			8034	3.300.000,00

1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Porjong)	3840	16.050.000,00				3840	16.050.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Porjong)	57	3.000.000,00				57	3.000.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Porjong)	216	2.800.000,00				216	2.800.000,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Porjong)	5	-				5	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Porjong)	12	326.962.000,00				12	326.962.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Porjong)	12	28.755.000,00				12	28.755.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Porjong)	12	1.800.000,00				12	1.800.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Porjong)	12	200.797.000,00				12	200.797.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				16.600.000,00					16.600.000,00

1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	12				12	16.600.000,00
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	15				15	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	12			27.400.000,00	12	27.400.000,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	12			189.775.000,00	12	189.775.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	493			61.300.000,00	493	61.300.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	54			600.000,00	54	600.000,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PONJONG 1, Ponjong)	14			-	14	-
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
2	3	4	10	8	14	15	9	11	16

1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.343.983.300,00				2.545.185.269,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.343.983.300,00				2.545.185.269,00
1.02.01		Presentase Pemenuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)				100	1.539.469.300,00				1.744.971.269,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Semin II, Semin)		1		1.539.469.300,00			1	1.744.971.269,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Semin II, Semin)		1		1.539.469.300,00			1	1.744.971.269,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Faskes Pemerintah yang Terakreditasi dengan Jenjang Paripurna (Persentase)				3,03	804.514.000,00				800.214.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Data)	(UPT Puskesmas Semin II, Semin)		1		5.800.000,00			1	5.800.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Semin II, Semin)		1		5.800.000,00			1	5.800.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						798.714.000,00				794.414.000,00

1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	261.00	107.630.000,00				261.00	107.630.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	252.00	1.000.000,00				225	1.000.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	984.00	6.080.000,00				984	6.080.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	1747	6.250.000,00				1800	6.250.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	8537	4.300.000,00				8540	4.300.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	394	3.600.000,00				399	2.800.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	1145	14.000.000,00				0.00	15.000.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)			4.500.000,00					-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				500.000,00					500.000,00

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	58	250.000,00	58	500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	3		3	250.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	13	265.658.000,00	13	265.658.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	3	54.870.000,00	3	54.870.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	87	4.350.000,00	87	4.350.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	1	50.760.000,00	1	50.760.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	6	23.800.000,00	6	23.800.000,00
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	(UPT Puskesmas Semtin II, Semtin)	435	4.300.000,00	435	4.300.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				16.150.000,00		16.150.000,00

1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semmin II, Semmin)	14					14	16.150.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Semmin II, Semmin)	18					18	154.316.000,00 154.316.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT Puskesmas Semmin II, Semmin)	200					200	66.000.000,00 66.000.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Semmin II, Semmin)	58					58	2.000.000,00 2.000.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Semmin II, Semmin)	15					15	1.500.000,00 1.500.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Semmin II, Semmin)	23					0.00	6.900.000,00 6.900.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	8	10	4	11	14	15	16
1										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									2.577.362.000,00
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2.577.362.000,00 1.756.009.500,00

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	1	1.780.162.048,00	1	1.756.009.500,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	1	1.780.162.048,00	1	1.756.009.500,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	1	821.352.500,00		821.352.500,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes Pemerintah Yang Terakreditasi Dengan Jenjang Paripurna (Persentase)		3,03			
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	1	5.800.000,00	1	5.800.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	21	5.800.000,00	12	5.800.000,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	21	815.552.500,00	21	79.394.800,00

1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	359.00					359	79.394.800,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	304.00					304.00	250.000,00 250.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	1257.00					1257.00	39.075.000,00 39.075.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	6826.00					6826	11.750.000,00 11.750.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	18467					18467	850.000,00 850.000,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	5465					5465	28.800.000,00 28.800.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	4101					4101	16.128.000,00 16.128.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	109					109	3.600.000,00 3.600.000,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									1.200.000,00

1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	64	1.000.000,00			64	1.200.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	355	1.000.000,00			355	1.000.000,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	4	600.000,00			4	600.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	12	269.205.000,00			12	269.205.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	1	400.000,00			1	400.000,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	1	5.700.000,00			1	5.700.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	1	66.770.000,00			1	66.770.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	3	19.700.000,00			3	19.700.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	7.00	26.287.200,00			7.00	26.287.200,00

1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Menular (Dokumen)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	12	157.708.500,00				12	157.708.500,00	157.708.500,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	1500	80.000.000,00				1500	80.000.000,00	80.000.000,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	10.00	4.000.000,00				10.00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	7.00	200.000,00				7.00	200.000,00	200.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	Jumlah tetanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukannya aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	2	100.000,00				2	100.000,00	100.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tetanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukannya aktifitas merokok (Tatanan)		(UPT Puskesmas Karangmojo I, Karangmojo)	5	2.834.000,00				5	2.834.000,00	2.834.000,00
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025							
2	3	4	8	10	11	9	14	15	16			
1			2.876.344.000,00			3.068.241.750,00						

1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									3.068.241.750,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100							2.234.511.750,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	1							2.234.511.750,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD (Faskes)	1						1	2.234.511.750,00
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1						1	2.234.511.750,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes Pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna (Persentase)	3,03							833.730.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	1						1	5.800.000,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1						0,00	5.800.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									827.930.000,00

1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (Data)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	1	72.485.000,00				1	72.485.000,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	331	72.485.000,00				331	72.485.000,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	266	3.370.000,00				266	3.370.000,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	1039,00	29.530.000,00				1039,00	29.530.000,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	3458	21.000.000,00				3458	21.000.000,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	7981	1.900.000,00				7981	1.900.000,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	165	17.500.000,00				165	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	55	500.000,00				55	500.000,00
					5.000.000,00					5.000.000,00

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	84	500.000,00	84	5.000.000,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	3	286.244.000,00	12	286.244.000,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	12	59.505.000,00	12	59.505.000,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	12	124.124.000,00	12	124.124.000,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	12	19.500.000,00	12	19.500.000,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	12	24.900.000,00	12	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	12	167.372.000,00	12	167.372.000,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				30.000.000,00		30.000.000,00

1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	600					600	30.000.000,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	55					55	2.000.000,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	(UPT PUSKESMAS PALIYAN, Paliyan)	12					12	300.000,00
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	(UPT PUSKESMAS, Paliyan)	1					1	4.600.000,00
										4.600.000,00

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

A. Catatan Penting

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan telah melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang maupun pelaksanaan forum gabungan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

C. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang

berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan urusan kesehatan, sebagai langkah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Pembangunan Derajat Kesehatan manusia merupakan syarat untuk berhasilnya pembangunan. Rencana Kerja merupakan salah satu arah untuk pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS KESEHATAN

DEWI IRAWATY

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan yang baik oleh masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan harus memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta mempertahankan dan meningkatkan prestasi pembangunan yang telah dicapai di daerah. Karena itu, perencanaan tersebut harus disusun berpedoman pada RPJMD dan rencana strategis Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja ini disusun berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2021-2024 serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Rancangan renja ini juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan politik dan pemerintahan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan RKPD 2024 yang bersifat indikatif. Selain itu Renja ini disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 serta mengacu kepada RKPD Tahun 2024, yang memuat kebijakan, program dari Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Penyusunan Renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Polisi Pamong Praja DIY dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Realisasi dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2024 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua a atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 15) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
- 16) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
- 17) Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran tentang prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu satu tahun ke depan, baik yang bersumber dari biaya APBN, APBD Propinsi DIY maupun APBD Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang dinamis.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
2. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA PD, RAPBD serta APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam waktu satu tahun;
4. Memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan semua personil dalam melaksanakan tugas;
5. Menjadi alat koordinasi dan kerangka acuan dalam rangka rencana pengembangan dan peningkatan kinerja dan

profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;

6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
9. Memberikan informasi kepada Dinas/ Instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATPOL PP

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten dan Renja PD Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.218.263.728,00.

Anggaran ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Penataan Organisasi
 - 1) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - 1) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - 4) Kerjasa antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota

Evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2022 berdasarkan kinerja Renja PD Tahun 2022 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan e-Monev Tahun 2022 sampai dengan triwulan III adalah sebagai berikut:

 1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - b) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - c) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Penataan Organisasi
 - a) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - a) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Mebel
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - b) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - b) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - c) Penganganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
- c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 - 1) Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
 - a) Pembinaan Jagawarga
- 3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - 1) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program dan kegiatan yaitu :
 - 1) Jumlah personil dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan.
 - 2) Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja keluaran program dan kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia.
- 4. Faktor-faktor penghambat yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Banyaknya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memasuki masa purna tugas sehingga mengurangi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan belum adanya pengadaan personil baik PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL).
- 5. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
 - a. Lebih cermat dalam melakukan perencanaan kinerja;

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan ikut serta pada kegiatan diklat dan bimtek.

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi i (%)		Perkiraan Realisasi Capaian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
1.05.1.05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja; Jumlah Renja Perubahan; Jumlah Forum PD; Jumlah Dokumen Reviu Renstra	10 Dokumen		1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 kali; 1 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 kali; 1 Dokumen	100%	3 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA; Jumlah Dokumen Perjanjian DPA; Jumlah Dokumen ROPK	8 Dokumen		1 Dokumen; 1 Dokumen; 0 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen; 0 Dokumen	100%	2 Dokumen		

1	2	3	4	5	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.01.05	Perubahan Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan; Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	8 Dokumen		1 Dokumen; 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	2 Dokumen			
1.05.1.05.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	72 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	100%	18 Laporan			
1.05.1.05.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP; Jumlah Dokumen SPM; Jumlah Laporan Emonev; Jumlah Laporan TEPR	12 Laporan		1 Dokumen; 1 Dokumen; 4 Dokumen; 12 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen 4 Dokumen; 12 Dokumen	100%	18 Laporan			
1.05.1.05.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1.05.1.05.01.01.2.02.01	Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terasiliasi Gaji dan Tunjangan ASN	1960 Orang		14 Bulan	14 Bulan	100%	490 Orang			
1.05.1.05.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	4 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan			
1.05.1.05.01.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ; Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	52 Laporan		12 Dokumen; 1 Dokumen	12 Dokumen; 1 Dokumen	100%	13 Laporan			
1.05.1.05.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
1.05.1.05.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	408 paket		100 stel	100 stel	100%	101 paket			
1.05.1.05.01.01.2.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN Tertangani	16 Dokumen		48 ASN	48 ASN	100%	4 Dokumen			

1	2	3	4	5	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Dikirim Mengikuti Diklat; Jumlah Upacara HUT Sat Pol PP	8 orang		0 ASN; 1 Kegiatan	0 ASN; 1 Kegiatan	0 ASN; 1 Kegiatan	100%	2 Orang		
1.05.1.05.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1.05.1.05.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	5 paket		1 Paket Pembelian	1 Paket Pembelian	1 Paket Pembelian	100%	1 paket		
1.05.1.05.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	27 paket		5 Paket Pembelian	5 Paket Pembelian	5 Paket Pembelian	100%	6 paket		
1.05.1.05.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Dan Peralatan Kebersihan Kantor	5 paket		1 Paket Pembelian	1 Paket Pembelian	1 Paket Pembelian	100%	1 paket		
1.05.1.05.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak; Jumlah Foto copy	26 peket		6 Jenis; 50000 Lembar	6 Jenis; 9399 Lembar	6 Jenis; 9399 Lembar	19%	5 paket		
1.05.1.05.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Referensi dan Surat Kabar (1 Surat Kabar x 12 Bulan)	2920 dokumen		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	730 dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Minuman dan Snack Tersedia Untuk Rapat dan Tamu	60 laporan		550 Orang	550 Orang	550 Orang	100%	10 Laporan		
1.05.1.05.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Pada Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	110 laporan		61 Orang	61 Orang	61 Orang	100%	36 Laporan		
1.05.1.05.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)							
1.05.1.05.01.01.2.07.05	Penggadaan Mebel	Pengadaan Kursi Putar;	97 Unit		0 Buah;	0 Buah;	100%	71 Unit									
		Pengadaan Meja Setengah Biro;			0 Buah;	0 Buah;											
		Pengadaan Kursi Rapat;			48 Buah;	48 Buah;											
		Pengadaan Kursi Dengan Tangan;			0 Buah;	0 Buah;											
		Pengadaan Meja Kursi Tamu;			0 Set;	0 Set;											
		Pengadaan Kursi Kayu;			0 Buah;	0 Buah;											
		Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon II			0 Set	0 Set											
		Pengadaan Filling Besi;			0 Buah;	0 Buah;											
		Pengadaan Lemari Besi;			0 Buah;	0 Buah;											
		Pengadaan Mesin Ketik;			0 Buah;	0 Buah;											
1.05.1.05.01.01.2.07.06	Penggadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan PC Unit;	41 Unit		0 Unit;	0 Unit;	100%	17 Unit									
		Pengadaan Printer;			2 Unit;	2 Unit;											
		Pengadaan Proyektor;			0 Buah;	0 Buah;											
		Pengadaan Camera Video;			0 Buah;	0 Buah;											
		Pengadaan Alat Deteksi Cukai;			0 Buah;	0 Buah;											
		Pengadaan Layar Overhead;			0 Buah;	0 Buah;											
		Pengadaan Wireless TOA;			0 Unit;	0 Unit;											
		Pengadaan Laptop			2 Unit	2 Unit;											
		1.05.1.05.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		1.05.1.05.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan						200 Surat	262 Surat	131%	4 Laporan		

1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telephone Yang Dibayar (1 Rekening x 12 Bulan)	180 Laporan		12 Rekening;	12 Rekening;	100%	36 Laporan	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jasa Yang Diterima Atas Pemanfaatan Listrik (3 Rekening x 12 Bulan)		36 Rekening;	36 Rekening;					
		Jumlah Tagihan Air Yang Dibayar (1 Rekening x 12 Bulan)		0 Rekening	0 Rekening					
1.05.1.05.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pengendalian Perorangan Dinas atau Kedaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Dinas Yang Terbayar Pajaknya;	1355 Unit		11 Unit;	11 Unit;	100%	258 Unit	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Mobil Dinas Yang Terpelihara;		22 Paket;	22 Paket;					
		Jumlah Motor Dinas Yang Terbayar Pajaknya;		7 Unit;	7 Unit;					
		Jumlah Motor Dinas yang Terpelihara			14 Paket	14 Paket				
1.05.1.05.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jet Sky Yang Terpelihara;	NA		1 Unit;	1 Unit;	100%	0	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Speed Boat Yang Terpelihara		1 Unit	1 Unit					
		Jumlah Pemeliharaan Mebelair;		40 Set;	40 Set;					
1.05.1.05.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rak Buku Kayu	210 Unit		2 Buah	2 Buah	100%	42 Unit		

1	2	3	4	5	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah HT Yang Terfasilitasi Pemeliharannya;	115 Unit	5 Unit;	5 Unit;	5 Unit;	5 Unit;	100%	24 Unit		
		Jumlah Laptop Yag Terfasilitasi Pemeliharannya;		5 Unit;	5 Unit;	5 Unit;					
		Jumlah Mesin Ketik Yang Terfasilitasi Pemeliharannya;		5 Unit;	5 Unit;	5 Unit;					
1.05.1.05.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah Personal Komputer Yang Terfasilitasi Pemeliharannya;	10 Unit	5 Unit;	5 Unit;	5 Unit;	5 Unit;	100%	2 Unit		
		Jumlah Pritter Yang Terasilitasi Pemeliharannya		3 Unit	3 Unit	3 Unit					
1.05.1.05.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah AC Yang Terpelihara		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit				
1.05.1.05.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi SOP;	NA	1 Dokumen;	1 Dokumen;	1 Dokumen;	1 Dokumen;	100%	0		
		Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan SKM;		1 Dokumen;	1 Dokumen;	1 Dokumen;					
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian SPIP		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Ketentrangan Dan Ketertiban Umum										
1.05.1.05.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentrangan dan ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										

1	2	3	4	5	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat Yang Terbina dan Memahami Peran Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (PIWK);	10 Dokumen				4 Angkatan;	100%	63 Dokumen		
		Jumlah Penyuluhan Dampak Aksi Premanisme dan Vandalisme (PIS);					4 Angkatan;				
		Jumlah Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras (PIS)					2 Angkatan				
1.05.1.05.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan Kesamaptaan Bagi Anggota Satpol PP dan Banpol;	11.490 Orang				4 Angkatan;	100%	2148 Orang		
		Jumlah Monev Kegiatan SAR Linmas Wil I dan Wil II (21 Kali/6 Orang);					21 Kali;				
		Jumlah anggota Satlinmas yang handal dan profesional (PIS)					12 Angkatan				
1.05.1.05.01.02.2.01.07	Kejasama Antar Lembaga dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengawasan, Pengamanan Kegiatan Pemerintah dan Tamu Daerah (49 kali/2 orang);	80 Dokumen				550 Kali;	100%	16 Dokumen		
1.05.1.05.01.02.2.01.08	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Jumlah Tenaga Operasional SAR Linmas Yang Terasilitasi (99 orang x 12 bulan);	510 Stel				12 Bulan	100%	6 102 Stel		
1.05.1.05.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Koata Dan Peraturan Bupati/Wali Kota										

1	2	3	4	5	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan Di Bidang Cukai	4			4 Kali	4 Kali	100%	9 Laporan		
1.05.1.05.01.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Monitoring Wilayah Perbatasan dan Daerah-Daerah Rawan Kriminalitas dan Gangguan Ketertiban Umum (1 kali/6 orang);			36 Kali;	36 Kali;	36 Kali;				
		Jumlah Operasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah (1 kali/8 orang);			38 Kali;		308Kali;				
		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan/Merayakan Hari-Hari Besar Keagamaan (1 kali/12 orang);	894 Laporan		26 Kali;		26 Kali;	100%	1.20 Laporan		
		Jumlah Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pelaksanaan Perda Dan Ketertiban Umum (1 kali/ 12 orang)			36 Kali	36 Kali					

1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasi Penertiban Pelajar di Tempat Umum Pada Jam Kerja dan Jam Pelajaran (1 kali/8 orang);	639 Laporan			46 Kali;	100%	72 Laporan		
		Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Operasi Yustisi Pola Terpadu (1 kali/8 orang);				20 Kali;				
		Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal;				27 Kali;				
		Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal				7 Kali				
2.22.1.05.1.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan									
2.22.1.05.1.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya									
2.22.1.05.1.08.2.09.17	Pembinaan Jaga Warga	Jumlah Kelompok Jaga Warga Yang Terbentuk	7.470 Orang			284 Kelompok	100%	1494 Orang		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis PD, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja PD dan Rencana Strategis PD Satuan Polisi Pamong Praja.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di SKPD yang dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Pelayanan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu :

I. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan ini dilaksanakan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, yang bertujuan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, tidak akan pernah lepas dari persoalan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang, dimana potensi permasalahan yang akan timbul adalah penyalahgunaan ruang publik, seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain. Ketenteraman merupakan kondisi aman dan nyaman masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan keindahan merupakan sinergi antara ketertiban dan ketenteraman, dimana wilayah Gunungkidul bisa menjadi daerah yang tertata dan terkelola dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 juga membahas tentang mutu pelayanan dasar sub urusan Tramtibum, kriteria penerima jenis pelayanan dasar sub urusan Tramtibum dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Tramtibum. Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda, harus bisa memberikan pelayanan dengan indikator TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Gunungkidul.

Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

Sesuai dengan indikator diatas, maka kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan SPM dari 1 Januari s/d 31 Desember 2022, secara umum dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari total 4.410 kasus pelanggaran baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat terselesaikan 4.410 kasus, sehingga capaian kerjanya adalah :

$$\frac{4410}{4410} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 1 Januari sampai dengan akhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang publik lainnya;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai;
3. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran K3;
4. Optimalisasi ketugasan PPNS melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan sebelum pelaksanaan tugas dilapangan;
5. Patroli / monitoring wilayah baik internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun patroli terpadu dengan dinas/instansi terkait dan kecamatan, untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran perda yang terjadi; dan
6. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkesinambungan.

II. Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026, maka indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu tujuan dan sasaran utama RPJMD, adalah sebagai berikut :

1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3
2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan
3. Nilai AKIP PD

Untuk lebih jelasnya, Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Angka/ Nilai target/ standard (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	97,5 %	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %	97,5 %	95 %	95,5 %	96 %	96,5 %	
2.	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	97,5 %	96 %	96,5 %	97 %	97,5 %	95 %	95,5 %	95,5 %	96 %	96,5 %	
3.	Nilai AKIP PD	84,56	80,56	81,56	82,56	83,56	84,56	80,56	80,56	81,56	82,56	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

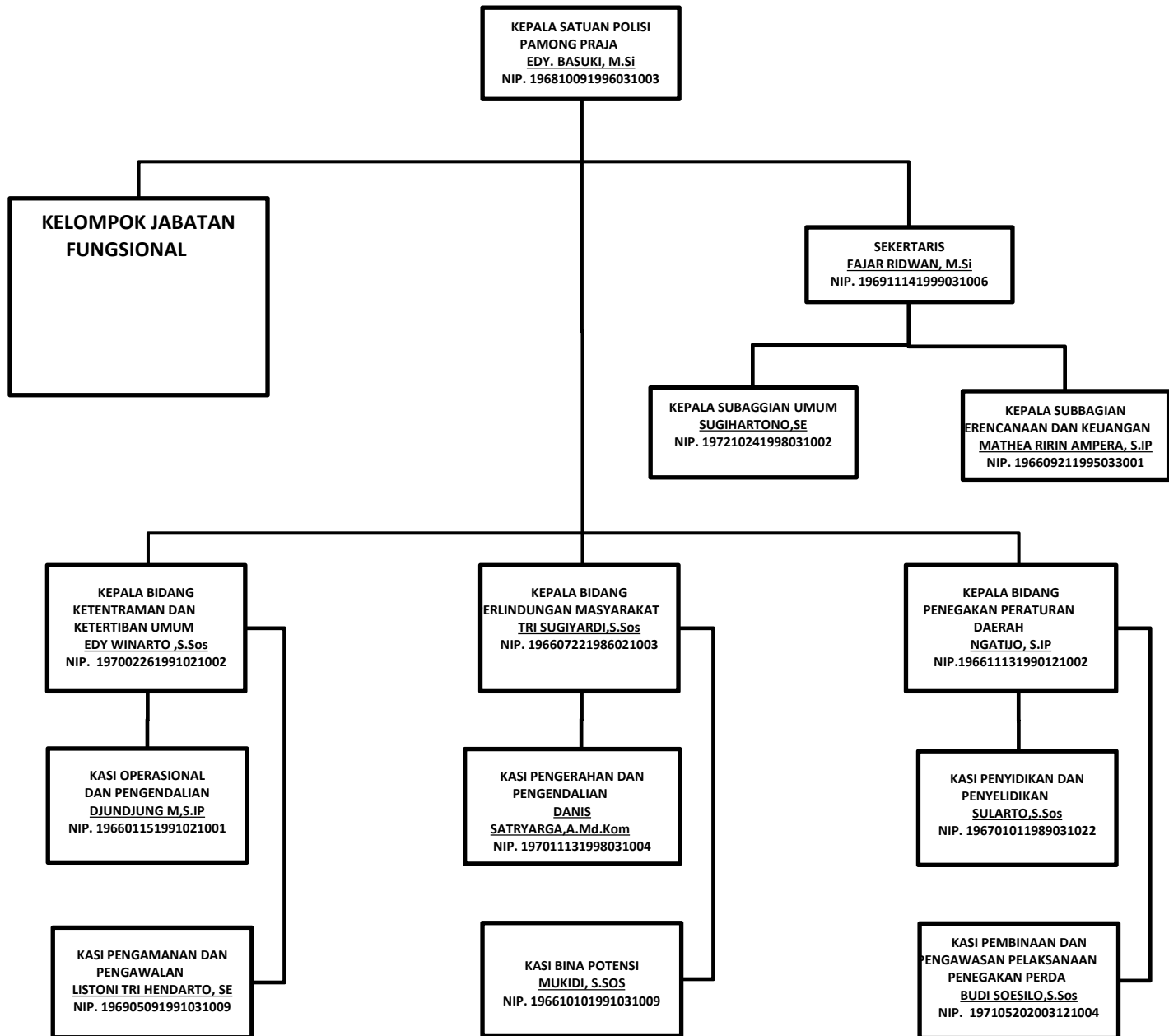
Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
4. Pengekoordinasian penyelenggaraan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
5. Pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
6. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
7. Penyusunan dan penerapan norma, standar dan pedoman dan petunjuk operasional di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat; dan
9. Pengelolaan UPT.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul yaitu:

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Gunungkidul



Tingkat kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja masuk kategori sangat baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi pencapaian kinerja persasaran yang menunjukkan hasil positif. Persentase pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan dan persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan di daerah telah mencapai target yang ditetapkan.

Hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan sesuai dengan tupoksinya;
2. Masih banyaknya tanah SG yang dipakai untuk mendirikan bangunan oleh masyarakat;
3. Wilayah bibir pantai yang masih digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan gazebo;
4. Kurang maksimalnya penanganan laka laut karena kurangnya sarana dan prasarana;
5. Masih adanya PNS dan pelajar yang berkeliaraan pada jam kerja dan jam sekolah; dan
6. Masih beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa.

Isu-isu penting yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, yaitu :

A. Faktor Penghambat

- 1) Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan ketugasan, baik sarana pokok maupun sarana penunjang masih belum memadai;
- 2) Banyak peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu segera disesuaikan;
- 3) Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah;
- 4) Meningkatnya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah masih perlu ditingkatkan;
- 6) Masih banyak peraturan daerah yang belum ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati; dan
- 7) Minimnya informasi masyarakat terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Faktor Pendorong

- 1) Adanya personil / aparat yang siap melaksanakan tugas;
- 2) Adanya anggaran dalam APBD untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
- 3) Adanya regulasi dan payung hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 4) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
- 5) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
- 6) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
- 7) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
- 8) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
- 9) Dukungan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait.

C. Tantangan

- 1) Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor;
- 2) Terjadinya persaingan regional yang semakin ketat;
- 3) Terjadinya perubahan geo politik;
- 4) Kesiapan aparat penegakan hukum untuk melakukan reformasi;
- 5) Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat;
- 6) Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat;
- 7) Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan dan masyarakat;
- 8) Semakin maraknya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- 9) Menurunnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

D. Peluang

- 1) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
- 2) Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif;
- 3) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
- 4) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
- 5) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
- 6) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
- 7) Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

E. Dampak

- 1) Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan wisatawan dapat terwujud;
- 2) Menurunnya kasus pelanggaran perda; dan
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Berdasarkan isu-isu penting di atas, maka dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum serta penegakan peraturan daerah di Kabupaten Gunungkidul, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk :

1. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban wilayah, melalui : penyelenggaraan operasi penertiban, pengawasan, dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum; serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
2. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan produk-produk hukum lainnya, sehingga terwujud masyarakat yang sadar hukum dan menurunnya pelanggaran. Hal ini dilakukan antara lain melalui :
 - a. tahap *Preemptif* (sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar peraturan daerah dipatuhi);
 - b. tahap *Preventif* (pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan daerah melalui teguran lisan maupun tertulis kepada pihak-

- pihak yang melanggar peraturan daerah agar mematuhi peraturan daerah dan tidak melanggar lagi); dan
- c. tahap *Represif* (penegakan dalam hal pelanggaran peraturan daerah sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya sudah ditegur secara lisan maupun tertulis tetap ada pelanggaran peraturan daerah maka dilakukan tindakan penertiban baik secara yustisial maupun non yustisial, dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan aparat penegak hukum).
 3. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan aktifitas pemerintahan, dengan melaksanakan pengawasan terhadap para Pejabat/tamu penting (VIP), penjagaan tempat-tempat vital/penting dan aset-aset daerah (rumah dinas pejabat dan gedung-gedung perkantoran) serta melaksanakan patroli (mengelilingi suatu wilayah tertentu yang bersifat rutin);
 4. Memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ketugasan;
 5. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, wawasan, keterampilan dan profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Peta jalan (*road map*) pembangunan jangka panjang baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota sudah disusun dalam dokumen perencanaan jangka panjang, dalam kerangka untuk memperjelas arah pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (*road map*) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rancangan Awal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap PD. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal PD melalui forum PD/Forum Gabungan PD dan musrenbang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap rancangan awal Rencana Kerja, hasil Forum Gabungan PD dan Musrenbang untuk

usulan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dan perbedaan. Hal tersebut dikarenakan usulan disesuaikan keadaan pasca pandemi covid-19. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 secara lengkap tersaji dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	4.247.600.822	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	3.689.704.313	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100 persen	31.090.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100 persen	32.623.300	
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	11.865.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	12.273.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	575.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.625.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	575.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.625.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.725.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.725.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 laporan	6.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 laporan	5.975.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	3 laporan	8.250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	3 laporan	8.250.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan terfasilitasi	100 persen	3.405.682.072	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan terfasilitasi	100 persen	2.516.971.313	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	490 orang	3.298.432.072	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	490 orang	2.408.346.313	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	4.825.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	13 laporan	101.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	13 laporan	103.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi	100 persen	222.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi	100 persen	254.150.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	102 paket	176.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	102 paket	179.400.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dokumen	11.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dokumen	4.750.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	35.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	70.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum terfasilitasi	100 persen	238.353.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum terfasilitasi	100 persen	311.608.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.494.200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	24.150.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	36.390.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.300.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	23.603.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	19.100.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	730 dokumen	3.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	730 dokumen	3.600.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan dan tamu	12 laporan	21.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan dan tamu	12 laporan	18.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 laporan	157.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 laporan	225.524.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang terlaksana	100 persen	96.250.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang terlaksana	100 persen	142.301.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	82.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	118.010.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	13.750.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	24.191.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi	100 persen	253.825.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi	100 persen	432.050.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	271 unit	202.125.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	258 unit	364.400.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah mebel yang dipelihara	42 unit	2.650.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah mebel yang dipelihara	0 unit	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 unit	16.050.000	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 unit	9.150.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	33.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 unit	58.500.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana	96,5 Persen	2.849.225.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana	96,5 Persen	3.612.783.000	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi	96,5 Persen	2.612.250.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi	96,5 Persen	3.089.963.000	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	20 kasus	17.500.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	4 kasus	5.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	2 dokumen	33.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	21 dokumen	161.120.000	PLS, PTWK
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2298 orang	2.258.750.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2267 orang	2.751.490.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1602 dokume	248.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	20 dokumen	121.623.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah seragam SAR Linmas tersedia	102 stel	55.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah seragam SAR Linmas tersedia	102 stel	50.730.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota terfasilitasi	96,5 Persen	236.975.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Persentase Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota terfasilitasi	96,5 Persen	522.820.000	
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/ Perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha	9 laporan	80.000.000	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	188 laporan	164.975.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	294 laporan	272.820.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	133 laporan	72.000.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	116 laporan	170.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase kelompok jagawarga yang terbina	82 persen	381.955.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase kelompok jagawarga yang terbina	82 persen	548.900.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kelompok jagawarga yang terbentuk	82 persen	381.955.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kelompok jagawarga yang terbentuk	82 persen	548.900.000	
	Pembinaan Jagawarga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang mengikuti pembinaan jagawarga yang dibina	1494 orang	381.955.000	Pembinaan Jagawarga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang mengikuti pembinaan jagawarga yang dibina	1494 orang	548.900.000	
		TOTAL			7.478.780.822					7.851.387.313	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Melalui Musrenbang kecamatan dan Forum Gabungan PD, usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain urgen tidaknya, dana yang tersedia dan kemanfaatannya. Namun demikian tidak seluruh aspirasi masyarakat yang ada dapat terserap dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	samping gedangsari gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
2	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Serut, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	5	8.630.000	43.150.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
3	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	kalurahan ngalang, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
4	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	kedungpoh, nglipar, gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
5	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Komplek Balai Kalurahan Pengkol, Kebonjero RT 001/ RW 006, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
6	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	munggur, 002/002, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kantor Kalurahan Banyusoco, Playen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
8	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Ngleri, Playen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
9	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan watusigar, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
10	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	kalurahan ngalang, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
11	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Bolodukuh Lor, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
12	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Pacarejo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
13	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Nglipar Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	genjahan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
15	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	padangan banjarejo tanjungsari, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
16	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Balai Kalurahan Giripanggung, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
17	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Balai Desa Sambirejo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
18	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kantor Kalurahan Purwodadi, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
19	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	linmas kalurahan bendungan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
20	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	jurangjero, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
22	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan Serut, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
23	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	kantor desa baleharjo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
24	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Pengkok, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
25	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan Semugih, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
26	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
27	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Bototengah RT 02 RW 04 Botodayaan Rongkop Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Belum pernah dilakukan pembinaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	jalan raya paliyan km 15 karangduwet paliyan (balai kalurahan karangduwet), Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
29	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Kalurahan watusigar, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
30	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	kalurahan bendungan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
31	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Pengkok, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
32	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Balai Kalurahan Playen, Playen I, Playen, Playen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
33	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	(PIS) - Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	jalan raya paliyan km 15 karangduwet paliyan (balai kalurahan karangduwet), Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
35	(PIS) - Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	jalan raya paliyan km 15 kalurahan karangduwet (balai kalurahan karangduwet), Kab. Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
36	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Kalurahan wtusigar, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
37	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Kalurahan Sumberwungu kapanewon Tepus, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
38	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Balai Kalurahan Giripanggung, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
39	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Doga Rt 09 Rw 02 Nglangeran, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	jurangjero, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
41	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Balai Kalurahan Gari. Jl. Karangtengah-gading Km 4,5, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.920.000	8.920.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
42	(PIWK) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	jalan raya palyan km 15 karangduwet palyan (balai kalurahan karangduwet), Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.530.000	7.530.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
43	(PIWK) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	kalurahan bendungan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.530.000	7.530.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
44	(PIWK) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	kalurahan Mulusan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.530.000	7.530.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
45	(PIWK) - Penyuluhan dampak miras	jalan raya palyan km 15 karangduwet palyan (balai kalurahan karangduwet), Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.530.000	7.530.000	Belum pernah dilakukan pembinaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	(PIWK) - Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	Getas Rt 27 /05, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.530.000	7.530.000	Belum pernah dilakukan pembinaan
47	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Balai Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
48	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kepuh RT 01 RW 01, Karangawen, Girisubo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
49	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Sidoharjo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
50	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Sumberwungu Kapanewon tepus, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
51	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Grogol, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
52	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Beji, Ngawen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
53	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Serut, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
54	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	samping gedangsari gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
55	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Playen I, Playen, Playen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
56	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Pundungsari, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
57	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Bototengah RT 02 RW 04 Botodayaan Rongkop Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
58	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Tancep, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	8.630.000	8.630.000	Sudah pernah dilakukan pembinaan
59	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	jalan raya palyan km 15 karangduwet, palyan (balai kalurahan karangduwet), Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Pernah dilakukan pembinaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
60	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan watusigar, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Pernah dilakukan pembinaan
61	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	kalurahan bendungan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1	7.780.000	7.780.000	Pernah dilakukan pembinaan
TOTAL						549.580.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu : *“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*. Sejalan dengan tema pembangunan nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 menetapkan tema pembangunan sebagai berikut: *“Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Berkelanjuta Pembangunan Kota Yogyakarta”*

Dengan berpedoman pada tema pembangunan nasional dan tema pembangunan DIY serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan tahun 2023: *“Optimalisasi kondisi perekonomian daerah, taraf hidup masyarakat, infrastruktur dan peningkatan SDM”*.

Selanjutnya tema pembangunan tersebut, dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
2. Peningkatan Ekonomi:
 - a. UMKM Unggulan
 - b. Investasi dan Pariwisata
 - c. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peningkatan SDM;
5. Ketentraman dan Ketertiban;
6. Reformasi Birokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Prioritas daerah, sasaran daerah dan sasaran PD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat kita lihat dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Indeks: 1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan
					Nilai AKIP PD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan hasil penjabaran visi Kabupaten Gunungkidul, maka *tujuan yang ingin dicapai* oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

2. Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan operasional. Kriteria dalam penentuan sasaran antara lain: spesifik, menantang namun dapat dicapai, realistis sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka *sasaran* Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat;
2. Pengembangan ragam budaya berbasis pemerintah masyarakat meningkat.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketentraman, ketertiban serta penegakan Perda dan Perkada;
2. Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD;
3. Meningkatkan kualitas dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan ragam budaya.
4. Pemberdayaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat;

Tabel 3.2
Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1.	Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum	Persentase peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum	96,5%

Tabel 3.3
Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1.	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	96,5%
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	96,5%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	82,56

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong kabupaten Gunungkidul dirumuskan berdasarkan sasaran-sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	I K U	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Penyelesaian Pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada Meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	96,5%
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada terselesaikan	96,5%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi dan misi Bupati, maka prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah yaitu ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.

2. Kebijakan anggaran

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka pada tahun anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada tahun anggaran berkenaan.

Hasil perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 kami sajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program / Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	<p>Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota terfasilitasi <p>Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa. b. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota. c. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia. d. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. e. Pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota <p>Sub kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota c. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota <p>Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>Sub kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD f. Evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Daerah <p>Sub kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <p>Sub kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya b. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian c. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah <p>Sub kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor

		<ul style="list-style-type: none"> d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan f. Fasilitasi kunjungan tamu g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD <ul style="list-style-type: none"> 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan mebel b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya d. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 8. Penataan Organisasi <ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
2	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Program: Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan: 1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Sub kegiatan a. Pembinaan jagawarga

a. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dari tabel 4.1 tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan 3 (tiga) program yang terjabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) program dengan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 2 (dua) program dengan 8 (delapan) sub kegiatan dilakukan untuk mendukung visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Anggaran untuk melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024. Dan untuk 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan bersumber dari Dana Keistimewaan.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan kegiatan utama Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 sebagaimana tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 2 (dua) Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan	Pagu indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	6.048.180.000 271.640.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.623.300 2.516.971.313 184.150.000 313.640.200 142.301.500 262.050.000	
2.	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan : 1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	548.900.000	

b. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan diwujudkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan prioritas juga disusun untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, seperti dapat kita lihat dalam tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD			
				Indikator	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik	Ketertarikan, ketertiban dan keamanan masyarakat meningkat	1. Indeks Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat	1. Penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat	1. 1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3	96,5 Persen	1. Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota	24.960.000		SATPOL-PP			
									2.708.220.000	2.478.439.000	SATPOL-PP			
										3.315.000.000	260.000.000			
										0	18.500.000	SATPOL-PP		
										0	57.500.000			
										80.000.000		SATPOL-PP		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						3.						95.000.000	75.500.000	SATPOL PP
						4.						96.640.000	173.150.000	SATPOL PP
Total												6.319.820.000	3.063.089.000	

Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 melaksanakan 3 program yang terbagi menjadi kegiatan dan sub kegiatan. Terdapat 1 (satu) program utama, 1 (satu) program yang merupakan program pendukung kinerja yang dilaksanakan di sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja juga terdapat 1 (satu) program yang didanai oleh dana keistimewaan. Program dan kegiatan ini sebagian besar telah sesuai dengan dengan rancangan awal RKPD. Sedangkan rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijabarkan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul
Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.771.556.313				7.382.962.438
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100 persen	3.451.736.313				4.285.373.438
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	Sat Pol PP	29 dokumen	32.623.300				35.500.000
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sat Pol PP	2 dokumen	12.273.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 dokumen	12.500.000
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Sat Pol PP	1 dokumen	1.625.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.000.000
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Sat Pol PP	1 dokumen	1.625.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.000.000
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Sat Pol PP	2 dokumen	1.725.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 dokumen	3.000.000
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Sat Pol PP	2 dokumen	1.150.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 dokumen	2.000.000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sat Pol PP	18 laporan	5.975.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		18 dokumen	7.300.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sat Pol PP	3 laporan	8.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 laporan	8.700.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun	Sat Pol PP	504 laporan	2.516.971.313				3.366.580.250
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sat Pol PP	490 orang	2.408.346.313	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		490 orang	3.254.580.250
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sat Pol PP	1 laporan	4.825.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 laporan	6.500.000
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Sat Pol PP	13 laporan	103.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		13 laporan	105.500.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN terfasilitasi	Sat Pol PP	108 ASN	184.150.000				266.720.000
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Sat Pol PP	102 paket	179.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		102 paket	185.220.000
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Sat Pol PP	4 dokumen	4.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 dokumen	11.500.000
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jawa Barat, Luar Wilayah	-	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 orang	70.000.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum tersedia		776 layanan	313.640.200				249.943.188
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Sat Pol PP	1 paket	5.494.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 paket	5.750.000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sat Pol PP	5 paket	28.990.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 paket	25.250.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Sat Pol PP	1 paket	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 paket	3.500.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sat Pol PP	5 paket	28.532.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 paket	24.893.188
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sat Pol PP	730 dokumen	3.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		730 dokumen	3.500.000
1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan dan tamu	Sat Pol PP	12 laporan	18.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 laporan	22.050.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jateng, Jabar, Jatim, Jakarta, Luar Jawa	22 laporan	225.524.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		22 laporan	165.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia		2 kegiatan	142.301.500				101.230.000
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Sat Pol PP	4 laporan	118.110.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 laporan	86.750.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sat Pol PP	36 laporan	24.191.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		36 laporan	14.480.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia		338 kegiatan	262.050.000				265.400.000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Sat Pol PP	258 unit	194.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		271 unit	211.150.000
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Sat Pol PP	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		42 unit	2.700.000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sat Pol PP	45 unit	9.150.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		23 unit	16.850.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sat Pol PP	5 unit	58.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 unit	34.700.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana		96,5 Persen	6.319.820.000				3.097.589.000
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten terfasilitasi		10 kegiatan	6.048.180.000				2.848.939.000
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	Wilayah Kab. GK	3 dokumen	24.960.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 dokumen	34.500.000
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Wilayah Kab. GK	1188 orang	2.708.220.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2298 orang	2.478.439.000
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Wilayah Kab. GK	20 dokumen	3.315.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1602 dokumen	260.000.000
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Wilayah Kab. GK	0 laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 kasus	18.500.000
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	Wilayah Kab. GK	102 unit	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		102 stel	57.500.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati		7 kegiatan	271.640.000				248.650.000
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Wilayah Kab. GK	7 laporan	80.000.000	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		-	-
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	Wilayah Kab. GK	28 laporan	95.000.000	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		139 laporan	75.500.000
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Wilayah Kab. GK	0 laporan	96.640.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		193 laporan	173.150.000
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	Wilayah Kab. GK	28 laporan	95.000.000	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		139 laporan	75.500.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kelompok jagawarga yang terbina		82 persen	548.900.000				400.000.000
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kelompok jagawarga yang terbentuk		249 kelompok	548.900.000				400.000.000
	Pembinaan Jagawarga	Jumlah orang mengikuti pembinaan jagawarga yang dibina	Wilayah Kab. GK	4225 orang	548.900.000	Dana Keistimewaan		1494 orang	400.000.000
		TOTAL			10.320.456.313				7.745.762.438

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan pembuatan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Wonosari,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

EDY BASUKI

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026, sehingga Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD serta Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024 disempurnakan dengan berpedoman pada Rancangan RKPD Tahun 2024, memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang. RKPD DIY, Renja Dinsos DIY serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Program dan Kegiatan yang ada di dalam Renja PD harus tercantum dalam RKPD sedangkan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan harus mengacu pada Renstra yang selanjutnya menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag pada Sekretariat, masing-masing Seksi pada Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta memperhatikan Rencana Kerja Dinas Sosial DIY dan disesuaikan kebutuhan riil yang ada, kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Gunungkidul dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gunungkidul. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran selanjutnya menjadi Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul. Di dalam melaksanakan tugas pokok khususnya dalam menangani masalah sosial, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan anak maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan serta pendidikan, menangani Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan pendekatan humanistik yang bersifat bantuan, jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

Program kegiatan di Bidang Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Gender merupakan hal yang cukup rawan karena secara langsung berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan yang berkembang serta mempunyai korelasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai upaya yang terencana dan terpadu untuk mendorong peran serta yang seluas-luasnya kepada Pilar-pilar Sosial selaku Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun Lembaga masyarakat, Mitra sosial, Dunia Usaha selaku *CSR (Corporate Social Responsibility)* serta masyarakat melalui program dan kegiatan yang memberikan motivasi dan fasilitasi serta peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan, juga beberapa program kegiatan dari Dinas Sosial DIY Tahun 2024. sehingga dapat mendayagunakan semua sumber dana, sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Oleh karena itu semua kebijakan, strategi dan program kegiatan serta sumber daya manusia telah ditinjau dan disesuaikan serta dipertajam dan diatur ulang agar lebih mampu menjadi pedoman pelaksanaan dalam mengatasi permasalahan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Terealisasinya target dalam indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, pencapaian indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. GUNUNGKIDUL

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gunungkidul

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- 4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- 4.3 Rumusan rencana program dan kegiatan;

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan;

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok-pokok materi sebagai berikut:

1. Realisasi Program tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
 - 1.1. (Program Rehabilitasi Sosial) Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial (95,18%);
 - 1.2. (Program Perlindungan Khusus Anak) Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak (71,24).
2. Realisasi Program tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
 - 2.1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (100%);
 - 2.2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (100%);
 - 2.3. Program Pemenuhan Hak Anak (100%)
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program Tahun 2022;
 - 3.1. Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial (95,18%) karena tidak ada lagi laporan kasus yang membutuhkan penanganan sampai dengan akhir tahun anggaran berlangsung;
 - 3.2. Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak (71,24) karena tidak ada lagi kasus yang membutuhkan penanganan dan penjangkauan sampai dengan akhir tahun anggaran berlangsung.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;
 - 4.1. Penanganan Disabilitas dan Lanjut Usia Tidak Potensial diupayakan terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui dukungan dana dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) referral program ASPD dan ASLUT;
 - 4.2. Penanganan PMKS diprioritaskan pada penanganan 5 PMKS yang masuk dalam SPM Bidang Sosial meliputi : Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana melalui program Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan Sosial sehingga semua sasaran SPM dapat terlayani dan terfasilitasi melalui bantuan, jaminan dan

rehabilitasi dan pemberdayaan;

- 4.3. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi perlu ditingkatkan di tahun depan;

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2021 dapat diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**
Kabupaten Gunungkidul
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	91,36 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	291,36	291,36
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	29	27 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	100,00	29	85	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja 2022	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan 2021	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Renstra 2021-2024	NA	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		NA	1	
		Jumlah Forum PD	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah profil PD tahun 2020	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	NA	NA	NA		4	4	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersusun	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	NA	NA	NA		1	1	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA tersusun	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	NA	NA	NA		1	1	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen ROPK	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	NA	NA	NA		2	2	
1.06.01.	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
2.01.05	Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	NA	NA	NA		2	2	
1.06.01.	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Lap. Capaian dan realisasi Kinerja tersusun	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
2.01.06	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	NA	NA	NA		16	16	
1.06.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Laporan e Monev	NA	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		NA	5	
		Jumlah Laporan SPM	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Laporan TEPR	NA	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		NA	13	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	NA	NA	NA		4	4	
1.06.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00
		Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	20	18 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100,00	20	58	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	NA	14 bulan	14 bulan	14 bulan		NA	28	
		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420	NA	NA	NA		420	420	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan pelaksanaan verifikasi keuangan	NA	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		NA	2	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	NA	NA	NA		1	1	
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi keuangan	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	NA	NA	NA		1	1	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	2	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	NA	NA	NA		1	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	NA 1	1 dokumen NA	1 dokumen NA	1 dokumen NA		NA 1	2 1	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan Tribulan	NA NA NA	12 dokumen 1 dokumen 0 dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen		NA NA NA	24 2 4	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	13	NA	NA	NA		13	13	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	NA	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		NA	2	
1.06.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00
		Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	23	23 orang	23 orang	23 orang	100,00	23	69	
1.06.01. 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	NA	21 Orang	23 Orang	23 Orang		NA	44	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	NA	NA	NA		6	6	
1.06.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD terlayani	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	100,00	14	42	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi kelistrikan yang tersedia	NA	6 jenis	6 jenis	6 jenis		NA	12	
		Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	6	NA	NA	NA		6	6	
1.06.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	NA	26 jenis	26 jenis	26 jenis		NA	52	
		Jumlah ATK KT, PSM, TKS, LKKS, WKSBM, Orsos, TAS, LK3, Sakti Peksos	NA	9 paket	9 paket	9 paket		NA	18	
		Jumlah ATK Pendampingan AT, LUT, PD dan Gepeng	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan		NA	24	
		Jumlah ATK Verval Data, DTKS, Jamkes, PKH, BPNT, Tagana, TPP, Pengelolaan Bansos	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan		NA	24	
		Jumlah bendera merah putih dinas tersedia	NA	5 buah	0 -	0 -		NA	5	
		Jumlah printer tersedia	NA	0 buah	2 unit	2 unit		NA	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah jasa administrasi keuangan	NA	12 bulan	0 -	0 -		NA	12	
		Jumlah Jasa Jaminan Kesehatan Posbindu PNS	NA	23 asn	0 -	0 -		NA	23	
		Jumlah logo Kab. Gunungkidul terbeli	NA	0 buah	0 -	0 -		NA	0	
		Jumlah perlengkapan kebersihan tersedia	NA	26 jenis	0 -	0 -		NA	26	
		Jumlah tiang bendera	NA	0 paket	0 -	0 -		NA	0	
		Jumlah Umbul2 dinas tersedia	NA	0 buah	4 unit	4 unit		NA	4	
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yangb disediakan	7	NA	NA	NA		7	7	
1.06.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	NA	5 jenis	5 jenis	5 jenis		NA	10	
		Jumlah Lembar Fotokopi	NA	8000 lembar	3000 lembar	3000 lembar		NA	11000	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	NA	NA	NA		2	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar terbayar tagihan	NA	1 jenis	24 bulan	24 bulan		NA	25	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360	NA	NA	NA		360	360	
1.06.01. 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Minuman dan Snak Tamu yang tersedia (5x10x12)	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	NA	NA	NA		12	12	
1.06.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	NA	36 oh	36 oh	36 oh		NA	72	
		Jumlah makanan dan Minuman Rapat (15 x 2 x 12)	NA	350 or	360 orang	360 orang		NA	710	
		Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia (5x20x12)	NA	1200 or	600 orang	600 orang		NA	1800	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	NA	NA	NA		12	12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		NA	100 persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC terbeli	NA	2 unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kamar mandi disabilitas tersedia	NA	1 unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor (CCTV)	NA	0 set	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah tabung pemadam Kebakaran terbeli	NA	2 unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah tangga besi terbeli	NA	0 unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah wireress terbeli	NA	0 unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	11 layanan	11 layanan	11 layanan	100,00	11	33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat	NA	2500 surat	3784 buah	3784 buah		NA	6284	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	NA	NA	NA		12	12	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa atas pemanfaatan listrik yang di bayar (6 rekening X 12 Bulan)	NA	72 rek	72 bulan	72 bulan		NA	144	
		Jasa tagihan air di bayar (2 rekening X 12 bulan)	NA	24 rek	24 bulan	24 bulan		NA	48	
		Jumlah tagihan telepon dan internet di bayar (3 rekening X 12 Bulan)	NA	36 rek	36 bulan	36 bulan		NA	72	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192	NA	NA	NA		192	192	
1.06.01.2.08.03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	NA	12 bulan	15 jenis	15 jenis		NA	27	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	NA	NA	NA		16	16	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor tersedia	NA	1 termin	3 orang	3 orang		NA	4	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	NA	NA	NA		12	12	
1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	3	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3,00	9	
1.06.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM Umum, Kebencanaan, Penjangkauan dan Rujukan yang tersedia	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan		NA	24	
		Jumlah kendaraan Operasional dinas yang terfasilitasi	NA	15 unit	15 unit	15 unit		NA	30	
		Jumlah Mobil Dinas yang terbayar pajaknya	NA	7 unit	7 unit	7 unit		NA	14	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangko Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangko Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Motor Dinas yang terbayar pajaknya	NA	8 unit	10 unit	10 unit		NA	18	
		Jumlah servis sedang/berat kendaraan operasional dinas	NA	0 unit	1 unit	1 unit		NA	1	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	432	NA	NA	NA		432	432	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	NA	0 unit	6 unit	6 unit		NA	6	
		Jumlah Mebel Yang Dipelihara	6	NA	NA	NA		6	6	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	NA	10 unit	10 unit	10 unit		NA	20	
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	NA	2 unit	2 unit	2 unit		NA	4	
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	NA	8 unit	8 unit	8 unit		NA	16	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	NA	6 unit	8 unit	8 unit		NA	14	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	3	NA	NA	NA		3	3	
1.06.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung dinas terfasilitasi	NA	1 tahun	1 unit	1 unit		NA	2	
		Jumlah pemeliharaan pagar dinas terfasilitasi	NA	1 tahun	336 m2	336 m2		NA	337	
		Jumlah Pemeliharaan taman dinas terfasilitasi	NA	1 tahun	169 m2	169 m2		NA	170	
		Jumlah rehab Ruang pelayanan dinas (kamar mandi umum dan ruang lakstasi)	NA	1 paket	15 m2	15 m2		NA	16	
		Jumlah ruang untuk Bidang P3A tersedia	NA	0 ruang	1 ruang	1 ruang		NA	1	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	NA	NA	NA		1	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC terpelihara	NA	0 unit	2 unit	2 unit	NA	NA	2	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	NA	NA	NA		8	8	
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai IKM	NA	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	NA	NA	NA
1.06.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen IKM, SOP, SPIP	NA	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		NA	6	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina	71	96,63 persen	70,2 persen	70,2 persen	100,00	70,4	237,23	334,13
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	71	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	70,4	270,40	380,85
		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terbina	9	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	100,00	9	27,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan / Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target PD Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.02. 2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pilar-pilar Sosial Berprestasi (PSM, KT, WKSBM, LKS/Orsos, TKSK)	NA	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	8	NA	10	
		Jumlah PSKS yang terfasilitasi (PSM, KT, LKKS, Orsos, WKSBM, TAS, PA, TKSK, Sakti Peksos)	NA	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga		NA	18	
		Jumlah Raperda Lansia yang tersusun	NA	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		NA	1	
		Jumlah Lembaga mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	9	NA	NA	NA		9	9	
1.06.01. 02.2.03. 02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terfasilitasi	NA	0 orang	18 orang	18 orang		NA	18	
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	18	NA	NA	NA		18	18	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.01.02.2.03.03.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang terfasilitasi	NA	0 orang	4 orang	4 orang		NA	4	
		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4	NA	NA	NA		4	4	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sasaran KIE	NA	78 lembaga	78 lembaga	78 lembaga		NA	156	
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (WKSBM)	1	NA	NA	NA		1	1	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang terfasilitasi	NA	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga		NA	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	NA	NA	NA		1		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	92	90,88 persen	70,2 persen	70,2 persen	100,00	90,5	251,58	273,46
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	91	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	90,4	290,40	319,12
		Jumlah PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	4	4 sasaran	4 sasaran	4 sasaran	100,00	4	12,00	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah permakanan Anak Terlantar	NA	50 orang	50 orang	50 orang		NA	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah permakanan Lanjut Usia Terlantar	NA	61 orang	60 orang	60 orang		NA	121	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	NA	NA	NA		100	100	
1.06.02. 2.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu Dengar yang tersedia	NA	123 buah	45 unit	45 unit		NA	168	
		Jumlah alat bantu kruk yang tersedia	NA	14 buah	10 unit	10 unit		NA	24	
		Jumlah Alat Bantu Kursi Roda sesuai yang dibutuhkan	NA	37 buah	79 unit	79 unit		NA	116	
		Jumlah alat bantu walker/Tongkat Kaki Tiga yang tersedia	NA	17 buah	1 unit	1 unit		NA	18	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	108	NA	NA	NA		108	108	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang dilatih ketrampilan	NA	0 orang	10 Orang	10 Orang	NA	NA	10	
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat pembinaan (pendayagunaan disabilitas)	NA	0 orang	50 Orang	50 Orang	NA	NA	50	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90	NA	NA	NA	NA	90	90	
1.06.02.2.03.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah sosialisasi, implementasi dan evaluasi pelaksanaan Perda tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan penyandang Disabilitas	NA	60 kali	0 kali	0 kali	NA	NA	60	
		Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penjangkauan dan layanan kedaruratan PDT, LUT, AT dan Gelandangan dan Pengemis	NA	0 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	NA	NA	12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60	NA	NA	NA		60	60	
1.06.02.2.03.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Kegiatan Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis	NA	12 frekuensi	0 frekuensi	0 frekuensi		NA	12	
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang dilatih ketrampilan	NA	10 orang	0 orang	0 orang		NA	10	
		Jumlah Peserta Pendayagunaan Disabilitas	NA	0 orang	0 orang	0 orang		NA	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	10	NA	NA	NA		10	10	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangko Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangko Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.01.04.2.01.12.	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Layanan Rujukan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	NA	0 dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		NA	5	
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	NA	NA	NA		6	6	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)*	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	1	1 sasaran	1 sasaran	1 sasaran	100,00	1	3	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah dokumen laporan layanan rujukan PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	0	12 kali	0 kali	0 kali		0	12	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91	99,88 persen	90,2 persen	90,2 persen	100,00	90,4	280,48	308,22
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang masuk dalam basis data terpadu mendapatkan bantuan Sosial	91	100 persen	100 persen	100,00	100,00	90,4	290,40	319,12
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin yang masuk dalam basis data terpadu	4	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4	12,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	NA	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		NA	1	
		Jumlah petugas pendataan tingkat Desa	NA	144 orang	144 Orang	144 Orang		NA	288	
		Jumlah petugas pendataan tingkat Dusun	NA	1431 orang	1429 Orang	1429 Orang		NA	2860	
		Jumlah petugas verwal data fakir miskin tingkat Kecamatan (TKSK, Kesos)	NA	36 orang	54 Orang	54 Orang		NA	90	
		Jumlah Verifikasi validasi data Fakir Miskin Cakupan Daerah (SID, BDT, DTKS, SIKS NG)	NA	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		NA	4	
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	583972	NA	NA	NA		583972	583972	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bansos KUBE Disabilitas	NA	5 kelompok	0 kelompok	0 kelompok		NA	5	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Bansos USEP KM (2020)	NA	23 kelompok	0 kelompok	0 kelompok		NA	23	
		Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bimbingan ketrampilan dan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga	NA	69 kelompok	0 kelompok	0 kelompok		NA	69	
		Jumlah Pendampingan BKK DIY (BKK Penumbuhan, KUBE Pengembangan, BKK Pengembangan)	NA	3 keluarga	0 keluarga	0 keluarga		NA	3	
		Jumlah PKH Graduasi yang menerima Bantuan Keuangan Khusus untuk modal usaha	NA	27 kk	0 kk	0 kk		NA	27	
		Jumlah Usaha Sosial Ekonomis Produktif Keluarga Miskin yang meningkat pendapatannya	NA	45 kelompok	0 kelompok	0 kelompok		NA	45	
		Jumlah Verifikasi validasi data Fakir Miskin Cakupan Daerah (SID, BDT, DTKS, SIKS NG)	NA	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		NA	4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah jenis laporan pengelolaan data FM (DTKS, PBP dan BP Pemda, Sembako, PKH)	NA	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		NA	4	
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	213231	NA	NA	NA		213231	213231	
1.06.05. 2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		NA	745806 orang	0 Orang	0 Orang		NA	745806	
		Jumlah KPM PKH Graduasi mandiri yang menerima bantuan BKK UEP PKH Graduasi 2022 (200 Orang x 3.000.000)	NA	0 KPM	200 KPM	200 KPM		NA	200	
		Jumlah KPM PKH Graduasi mandiri yang menerima bantuan pengembangan usaha	NA	0 KPM	32 KPM	32 KPM		NA	32	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra (Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah KPM PKH Graduasi mandiri yang menerima bantuan pengembangan BKK UEP PKH Graduasi 2019 (106 Orang x 3.000.000)	NA	0 KPM	106 KPM	106 KPM		NA	106	
		Jumlah KPM yang menerima pendampingan BKK UEP PKH Graduasi 2019	NA	0 KPM	106 KPM	106 KPM		NA	106	
		Jumlah KPM yang menerima pendampingan BKK UEP PKH Graduasi 2022	NA	0 KPM	200 KPM	200 KPM		NA	200	
		Jumlah KPM yang menerima pendampingan PKH Graduasi	NA	0 KPM	32 KPM	32 KPM		NA	32	
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	279	NA	NA	NA		279	279	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.05.2.02.04.	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan modal usaha KUBE Disabilitas (2 x 20.000.000)	NA	0 Kelompok	Kelompok	2 Kelompok		NA	2	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan modal usaha KUBE FM (19 x 10.000000)	NA	0 Kelompok	Kelompok	19 Kelompok		NA	19	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan modal usaha KUBE (Pokir) (4 x 20.000.000)	NA	0 Kelompok	Kelompok	4 Kelompok		NA	4	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan modal usaha USEP KM (25 x 10.000.000)	NA	0 Kelompok	Kelompok	25 Kelompok		NA	25	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan pengembangan modal usaha BKK UEP KUBE FM	NA	0 Kelompok	Kelompok	10 Kelompok		NA	10	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pengembangan (10 x 23.000000)								
		Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerima pendampingan BKK UEP KUBE FM Pengembangan(100 orang)	NA	0 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok		NA	10	
		Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerima pendampingan KUBE FM (230 orang)	NA	0 Kelompok	23 Kelompok	23 Kelompok		NA	23	
		Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerima pendampingan USEP KM (250 orang)	NA	0 Kelompok	25 Kelompok	25 Kelompok		NA	25	
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3270	NA	NA	NA		3270	3270	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kewenangan Kabupaten/Kota	100	99,91 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	299,91	299,91
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosian Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00
		Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial korban bencana	3	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3	9	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Persediaan Logistik Sembako	NA	9 jenis	9 jenis	9 jenis		NA	18	
		Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150	NA	NA	NA		150	150	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah jenis Penyediaan Sandang Korban Bencana	NA	NA	NA	NA		NA	NA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	NA	NA	NA		100	100	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang tertangani secara khusus	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	80	NA	NA	NA		80	80	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase lembaga terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00
		Jumlah lembaga terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana	2	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100,00	2	6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosial dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi KSB, SSB, Difagana, Lansigana	NA	12 kali	12 dokumen	12 dokumen		NA	24	
		Jumlah Pengurus KSB yang terfasilitasi	NA	70 orang	70 orang	70 orang		NA	140	
		Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	9	NA	NA	NA		9	9	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Alat Komunikasi yang tersedia	NA	0 unit	1 unit	1 unit		NA	1	
		Jumlah Pengurus Harian FK Tagana yang terfasilitasi	NA	2880 orang	2880 orang	2880 orang		NA	5760	
		Jumlah Peserta CB Tagana	NA	140 orang	140 orang	140 orang		NA	280	
		Jumlah Petugas Logistik yang terfasilitasi	NA	2 orang	2 orang	2 orang		NA	4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Rakor Tagana yang terfasilitasi	NA	2 kali	12 dokumen	12 dokumen		NA	14	
		Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2952	NA	NA	NA		2952	2952	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara	100	96,93 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	296,93	296,93
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan TMP dan Monumen yang terlaksana	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00
		Terlaksananya pemeliharaan TMP dan Monumen yang terlaksana	2	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100,00	2	6	
1.06.07.2.01.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP Monumen Radio terpelihara	NA	1 tahun	0 tahun	0 tahun		NA	1	
		Jumlah Monumen Radio yang terpelihara	NA	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		NA	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)*	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terpelihara	NA	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		NA	1	
		Jumlah Makam Yang Terpenuhi Pemeliharaannya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	31	NA	NA	NA		31	31	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase lembaga PUG yang aktif	90	NA	70 persen	70 persen	100,00	75	145,00	161,11
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten kabupaten	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	75	275	275,00
		Jumlah kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00	4	12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan evaluasi P2WKSS	NA	NA	6 kelurahan	6 kelurahan		NA	NA	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	NA	NA	NA		2	2	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kalurahan yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan desa prima	NA	NA	4 kelompok	4 kelompok		NA	NA	
		Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan pengetahuan sadar gender	NA	NA	2 kelompok	2 kelompok		NA	NA	
		Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan ekonomi produktif	NA	NA	7 kelompok	7 kelompok		NA	NA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		bagi kelompok perempuan								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4	NA	NA	NA		4	4	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kalurahan yang mengikuti pelatihan PPRG	NA	NA	144 kalurahan	144 kalurahan		NA	NA	
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pelatihan PPRG	NA	NA	46 perangkat daerah	46 perangkat daerah		NA	NA	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	47	NA	NA	NA		47	47	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan kegiatan seminar hari besar perempuan dan anak	NA	NA	3 dokumen	3 dokumen		NA	NA	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	47	NA	NA	NA		47	47	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	100	NA	100 persen	100 persen	100,00	100	200	200,00
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	2	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2	4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan	NA	NA	10 organisasi perempuan	10 organisasi perempuan		NA	NA	
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	NA	NA	NA		2	2	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta kaum perempuan parlemen yang mendapatkan pendidikan politik perempuan	NA	NA	150 orang	150 orang		NA	NA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	NA	NA	NA		1	1	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	43,75	NA	0 0	0 0		35,42	35,42	
		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	1	3,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.02. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan dan ketrampilan untuk menambah penghasilan keluarga menuju desa yang prima	NA	NA	10 kelompok	10 kelompok		NA	NA	
		Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan dan ketrampilan untuk menambah penghasilan keluarga menuju desa yang prima (pokir)	NA	NA	6 kelompok	6 kelompok		NA	NA	
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	75	NA	NA	NA		75	75	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan	7,14	18,75 persen	18,5 persen	18,5 persen	100,00	5,88	43,13	604,06
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang terpapar peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan	100	70,14 persen	80 persen	80 persen	100,00	85	235,14	
		Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2	6,00	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi UUPA, UUPKDRT, dan UUPTPPO	NA	NA	25 orang	25 orang		NA	NA	
		Jumlah peserta yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Perempuan	NA	NA	50 orang	50 orang		NA	NA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangko Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangko Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan anak dari kekerasan								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	NA	NA	NA		1	1	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta workshop/sosialisasi FPKK	NA	NA	50 orang	50 orang		NA	NA	
		Jumlah Perangko Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	18	NA	NA	NA		18	18	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	300	
		Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1	3	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan tenaga konselor yang terfasilitasi (2 orang x 12 bulan) (UPT)	NA	NA	24 bulan	24 bulan		NA	NA	
		Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pelayanan dan penanganan (UPT)	NA	NA	50 anak/orang	50 anak/orang		NA	NA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangko Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	0	NA	NA	NA		0	NA	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Rakor Berjejaring (20 orang x 10 bulan) (UPT PPA)	NA	NA	10 dokumen	10 dokumen		NA	NA	
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	NA	NA	NA		6	6	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pembangaan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00			
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan rakor FPKK (UPT) (50 orang x 3 kali)	NA	NA	3 dokumen	3 dokumen		NA	NA	
		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	NA	NA	NA		0	0	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase kelembagaan KLA yang aktif	74,81	NA	70,27 persen	70,27 persen	100,00	71,55	141,82	189,57

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)*	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	90	60,35 persen	70 persen	70 persen	100,00	75	205	
		Jumlah kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2	6	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kalurahan sasaran pembinaan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	NA	NA	6 kalurahan	6 kalurahan		NA	NA	
		Jumlah kalurahan yang mendapatkan kegiatan Workshop PATBM dilaksanakan 2 hari	NA	NA	5 kalurahan	5 kalurahan		NA	NA	
		Jumlah peserta perwakilan lembaga yang mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	NA	NA	50 orang	50 orang		NA	NA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7	NA	NA	NA		7	7	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak yang mendapatkan pelatihan pencegahan perkawinan anak	NA	NA	2 forum anak	2 forum anak		NA	NA	
		Jumlah forum anak yang terbentuk di tingkat kalurahan	NA	NA	2 forum anak	2 forum anak		NA	NA	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	NA	NA	NA		1	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)*	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan KLA yang terfasilitasi	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	
		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2	6	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengikuti workshop	NA	NA	30 orang	30 orang		NA	NA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	NA	NA	NA		1	1	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kalurahan yang mendapatkan kegiatan Workshop Desa Layak Anak	NA	NA	6 kalurahan	6 kalurahan		NA	NA	
		Jumlah kapanewon atau kalurahan yang mendapatkan kegiatan sosialisasi KLA/DLA	NA	NA	10 kalurahan	10 kalurahan		NA	NA	
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	41	NA	NA	NA		41	41	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase jenis data gender dan anak yang terkelola	100	NA	100 NA	NA		100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia	100	50 persen	100 persen	100 persen	1,00	100	250	
		Jumlah kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	1	3	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku data pilah gender dan anak yang disusun	NA	NA	0 buku	0 buku		NA	NA	
		Jumlah buku profil KLA yang disusun	NA	NA	0 buku	0 buku		NA	NA	
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	NA	NA	NA		2	2	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase Desa Layak Anak yang terbentuk	87,5	70,14 persen	73,61 persen	73,61 persen	100,00	77,08	220,83	252,38

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300,00	
		Jumlah kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1,00	1	3,00	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mengikuti kongres anak dan jambore anak	NA	NA	150 anak	150 anak	NA	NA	NA	
		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	3	NA	NA	NA	NA	3	3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3.33	-2,27 persen	2,94 persen	2,94 persen	100,00	3,03	3,70	111,11
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang terkoordinir dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300,00	
		Jumlah kegiatan Pencegahan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	1	2,00	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pengembangan Jejaring dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan KtPA/TPPO (DAK NonFisik PPPA)	NA	NA	150 orang	150 orang		NA	NA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap P&A/TPPO melalui FPKK (DAK NonFisik PPPA)	NA	NA	210 orang	210 orang		NA	NA	
		Jumlah Peserta Pengembangan Jejaring Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Pencegahan KTPA/TPPO (DAK Non Fisik PPPA)	360	NA	NA	NA		360	360	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	300	
		Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2	5	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Medical Checkup (DAK NonFisik PPPA)	NA	NA	12 bulan	12 bulan		NA	NA	
		Jumlah Oprasional Pendampingan Korban dan Pendamping (DAK NonFisik PPPA)	NA	NA	12 bulan	12 bulan		NA	NA	
		Jumlah Oprasional Rumah Perlindungan (DAK NonFisik PPPA)	NA	NA	12 bulan	12 bulan		NA	NA	
		Jumlah Tenaga Ahli/Jasa Pendampingan Hukum (DAK NonFisik PPPA)	NA	NA	4 tenaga ahli	4 tenaga ahli		NA	NA	
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	NA	NA	NA		1	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak yang mendapatkan pembinaan perlindungan khusus anak	NA	NA	2 forum anak	2 forum anak		NA	NA	
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	NA	NA	NA		0	0	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	300	
		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	0 persen	1 persen	1 persen	100,00	1	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.07. 2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Sumber Daya Penyedia Layanan Anak	NA	NA	12 bulan	12 bulan		NA	NA	
		Jumlah Pelatihan Penanganan Korban Bagi Jejaring (DAK NonFisik PPPA)	NA	NA	2 kali	2 kali		NA	NA	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	1	NA	NA	NA		1	1	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		100	NA				100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEJISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	100	NA	100 persen	100 persen	100,00	100	200,00	200,00
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang terlaksana	100	NA	100 persen	100 persen	100,00	100	200	
		Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	1	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	1	2	
2.22.08.2.09.23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan penyuluhan sosial melalui media seni tradisional (Wayang Cakruk)	3	NA	3 kalurahan	3 kalurahan		3	6	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membawahi Sekretariat, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan sasaran dan target kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKU maupun IKK melalui langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana.

Dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja maka kemampuan teknis dalam perencanaan perlu lebih ditingkatkan sehingga program pembangunan di bidang sosial yang mawadahi pilar-pilar masyarakat selaku Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga masyarakat serta pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur melalui Pembinaan, Pendidikan dan Bimbingan Pelatihan akan sejalan dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.

Meski demikian Penanganan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Tidak Potensial/Terlantar melalui Jaminan Sosial serta Bantuan Sosial belum memenuhi target SPM 100% karena terbatasnya anggaran APBD. Jumlah sarana sosial seperti panti sosial/panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Demikian juga untuk memenuhi target capaian PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang tercantum dalam sasaran dan indikator sasaran di RKPD Tahun 2023 sudah diupayakan melalui Program Bantuan Permakanan Lanjut Usia Terlantar sejumlah 50 orang, Bantuan Permakanan Anak Terlantar sejumlah 50 orang, pemberian alat bantu disabilitas 108 unit melalui dana APBD Tahun 2023.

Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan terhadap Renstra PD Tahun 2021-2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diuraikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
-1	-2	(IKU, SPM, IKK)	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		
A.	IKU (Indikator Kinerja Utama)												
1	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	90,98	90,2	90,4	90,6	90,98	90,08	90,4	90,6			
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76,70	75,55	75,56	75,57	76,70	77,93	75,56	75,57			
3	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	70,14	73,61	77,08	80,55	70,14	73,07	77,08	80,55			
	SPM (Bidang Sosial)												
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
3	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
-1	(IKU, SPM, IKK)	(IKU, SPM, IKK)	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		
	-2	-3											
	kebutuhan dasarnya di luar panti												
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
1	persentase lembaga PUG yang aktif	Persen	54	70	75	80	54	70	75	80			
2	Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan	Persen	18,75	5.56	5.88	6.25	18,75	5.56	5.88	6.25			
3	persentase kelembagaan KLA yang aktif	Persen	67	70.27	71.55	72.73	67	70.27	71.55	72.73			
4	persentase jenis data gender dan anak yang terkelola	Persen	50	100	100	100	50	100	100	100			
5	Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia	Persen	50	100	100	100	50	100	100	100			
6	persentase Desa Layak Anak yang terbentuk	Persen	70,14	73.61	77.08	80.56	70,14	73.61	77.08	80.56			

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
-1	-2	(IKU, SPM, IKK)	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		
7	Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak	Persen	-27,27	2.94	3.03	3.13	-27,27	2.94	3.03	3.13			
8	Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina	Persen	70	70.2	70.4	70.6	70	70.2	70.4	70.6			
9	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
9	Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
10	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	90	90.2	90.4	90.6	90	90.2	90.4	90.6			
11	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
12	Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
13	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program-program penanganan kemiskinan memerlukan data yang akurat dan valid, perencanaan yang matang, Sumber Daya Manusia yang mumpuni serta adanya kerjasama, dukungan dan sinergi semua pihak baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat maupun Dunia Usaha (CSR). Sementara penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu, hal tersebut berkaitan dengan kurangnya tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana tugas dan fungsi di bidang sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya didukung adanya komitmen dari mitra kerja dan lembaga sosial yang peduli dengan masalah sosial sehingga dapat berjalan secara kondusif.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih banyak kelemahan, antara lain : terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi jumlah dan kemampuan/kompetensi, terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran, serta belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan PMKS.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

Masih cukup tinggi angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul yang berarti masih banyak penduduk miskin yang perlu mendapatkan dukungan berupa bantuan, jaminan, rehabilitasi serta pemberdayaan sosial, khususnya prioritas pelayanan kepada Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, Penyandang Disabilitas di luar panti serta Korban Bencana untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang sosial

Adapun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: Tingginya angka kemiskinan, Belum optimalnya pemberdayaan PPKS, Belum maksimalnya peran PSKS, serta masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum berfungsinya kesetaraan gender;

Namun ada beberapa peluang yang dapat dipergunakan untuk menghadapi tantangan yang ada antara lain : Adanya Undang-undang dan Peraturan, Tersedianya dana dari berbagai sumber, Adanya koordinasi Lintas Sektor/Dinas terkait, Adanya jaringan kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat dan Lembaga (LSM/Organisasi Sosial), Dunia Usaha dan Dunis Pendidikan, Adanya semangat keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan Sosial di masyarakat;

5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Perumusan Program dan Kegiatan harus ditekankan pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan Kabupaten, DIY dan Pusat, penanganan PMKS melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 terhadap analisis kebutuhan dilihat dari Total Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak naik 0,88% dari 11.288.084.049 menjadi 12.839.817.885 karena ada perubahan di program perlindungan dan jaminan sosial pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial ekonomi masyarakat berupa penambahan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

Usulan tambahan kegiatan dilaksanakan setelah selesai desk anggaran pra RKA 2024 dan dianggap sesuai dengan target kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.4
Riviu Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul
Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	3.263.680.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	2.625.305.405	
1.06.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	13.465.000	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	21.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	56.680.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokum en	620.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokum en	1.840.000	
1.06.01.2. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokum en	850.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 dokum en	2.130.000	
1.06.01.2. 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokum en	760.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokum en	2.740.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerjha SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	8.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerjha SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	6.025.000	
1.06.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.000.000	
1.06.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 persen	2.576.300.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 persen	2.170.553.780	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunung kidul	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 orang/bulan	2.563.800.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunung kidul	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 orang/bulan	2.156.728.780	
1.06.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.470.000	
1.06.01.2. 02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	2.500.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1.250.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan /Semesteran SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan /Semesteran SKPD	13 laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan /Semesteran SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan /Semesteran SKPD	13 laporan	11.105.000	
1.06.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunung dul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	4.200.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunung dul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	-	
1.06.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					
				100 persen	236.900.000				100 persen	78.760.797	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran Bangunan Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor Yang disediakan	6 paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran Bangunan Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Peneran Bangunan Kantor Yang disediakan	3 paket	2.500.000	
1.06.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah paket peralatan dan perlengkap an kantor yang disediakan	7 paket	104.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket	59.228.797	
1.06.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.500.000	
1.06.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	360 dokum en	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	360 dokum en	-	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	12 laporan	6.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	12 laporan	-	
1.06.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	103.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12.532.000	
1.06.01.2. 07	Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah		0	-				100 persen	11.214.000	
1.06.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 unit	-		Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	11.214.000	
1.06.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	100.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	69.691.828	
1.06.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	192 laporan	61.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	204 laporan	68.491.828	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	11.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	1.200.000	
1.06.01.2. 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kab. Gunung kidul</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	100 persen	301.300.000	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kab. Gunung kidul</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	100 persen	210.205.000	
1.06.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	432 unit	176.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 unit	133.525.000	
1.06.01.2. 09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunung kidul	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	6 unit	4.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunung kidul	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	20 unit	-	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	3 unit	7.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	24 unit	8.500.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	88.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	5.000.000	
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	8 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	21 unit	63.180.000	
1.06.02.2	PROGRAM PERBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PERBERDAYAAN SOSIAL	70,6 persen	694.683.389	PROGRAM PERBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PERBERDAYAAN SOSIAL	70,6 persen	270.212.500	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	70,6 persen	694.683.389	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	70,6 persen	270.212.500	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.02.2. 03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Lembaga mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	9 lembag a	248.883.389	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Lembaga mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	9 lembag a	52.552.500	
1.06.02.2. 03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasny a Kewenangan Kabupaten/ Kota	18 orang	356.800.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot a	18 orang	198.060.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	47.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	16.780.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota(WKSBM)	1 lembaga	20.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota(WKSBM)	1 lembaga	600.000	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Gunung kidul	Jumlah Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 lembaga	22.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Gunung kidul	Jumlah Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	1 lembaga	2.220.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kewenangan Kabupaten/ Kota					Kabupaten/Kota			
1.06.04.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		91; 100	745.300.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			91; 100	2.378.047.500	
1.06.04.2. 01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>		90,6 persen	745.300.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			90,6 persen	2.378.047.500	
1.06.04.2. 01.01	Penyediaan Perumahan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 orang	167.000.000	Penyediaan Perumahan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	2.257.000.000	
1.06.04.2. 01.03	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatka n Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	108 orang	220.300.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	108 orang	-	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.04.2. 01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gunung kidul	Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	90 orang	122.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kot a	235 orang	19.600.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.04.2. 01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 orang	24.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a	60 orang	-	
1.06.04.2. 01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 orang	186.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kot a	16 orang	98.167.500	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.04.2. 01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang Mendapatka n Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 orang	26.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a	4 orang	3.280.000	
1.06.05.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			90,6 persen	2.543.339.350	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN SOSIAL			90,6 persen	4.053.192.500	
1.06.05.2. 02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>			90,6 persen	2.543.339.350				90,6 persen	4.053.192.500	
1.06.05.2. 02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	583972 orang	342.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	583972 orang	44.347.500	
1.06.05.2. 02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Keluarga yang Mendapatka n Pergentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	213231 keluarga a	200.500.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pergentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota a	213231 keluarga a	14.830.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.05.2. 02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gunung kidul	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatka n Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	279 keluarga	967.839.350	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gunung kidul	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	823 keluarga	541.020.000	
1.06.05.2. 02.04	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang Mendapatka n Bantuan Pembanga an Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	3270 orang	1.033.000.000	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a	2480 orang	3.452.995.000	
1.06.06.2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 persen	431.500.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100 persen	138.465.000	
1.06.06.2. 01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	100 persen	80.000.000				100 persen	32.500.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.06.2. 01.01	Penyediaan Makanan	Kab. Gunung kidul	Jumlah orang yang mendapatka n perumahan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (pengungsia n) Kewenangan Kabupaten/ Kota	150 orang	60.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Gunung kidul	Jumlah orang yang mendapatkan perumahan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kot a	150 orang	30.000.000	
1.06.06.2. 01.02	Penyediaan Sandang	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsia n) dan Pasca Bencana Kewenangan	100 orang	10.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kot a	50 orang	-	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.06.2. 01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatka n Penangan an Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	80 orang	10.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kot a	30 orang	2.500.000	
1.06.06.2. 02	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>			100 persen	351.500.000	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>			100 persen	105.965.000	
1.06.06.2. 02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Gunung kidul	Jumlah Kampung Yang Melaksanak an Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	9 kampung	32.500.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Gunung kidul	Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kot a	12 kampung	2.500.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.06.2. 02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	2952 orang	319.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	2952 orang	103.465.000	
1.06.07.2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100 persen	13.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100 persen	92.621.000	
1.06.07.2. 01	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</i>			100 persen	13.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota			100 persen	92.621.000	
1.06.07.2. 01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Makam Yang Terpenuhi Pemeliharaan nya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	31 makam	13.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Makam Yang Terpenuhi Pemeliharaan nya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	31 makam	92.621.000	
2.08.02.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			80 persen	159.587.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			80 persen	78.803.050	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.08.02.2.01	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					40.613.050	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.422.500		

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.02.2. 01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Gunung kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengaruhstama an Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	47 perang kat daerah	15.570.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Gunung kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengaruhstama an Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	47 perang kat daerah	11.100.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.02.2. 01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Gunung kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengaruhutama an Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	47 perang kat daerah	22.000.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Gunung kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengaruhutama an Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	47 perang kat daerah	4.090.550	
2.08.02.2. 02	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>			100 persen	32.600.000	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>			100 persen	-	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	24.200.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Gunung kidul	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	1 organisasi	8.400.000	Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Gunung kidul	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 organisasi	-	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.02.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	38,19 persen	5.240.000					38.190.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	75 orang	5.240.000	Kab. Gunung Kidul	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	225 orang		38.190.000	
2.08.03.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			6,25 persen	240.000.000		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		6,25 persen	77.875.000	
2.08.03.2.02	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekeerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			100 persen	223.000.000		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekeerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100 persen	77.875.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.03.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 layanan	155.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 layanan	77.875.000	
2.08.04.2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	72,73 persen	146.550.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	72,73 persen	72,73 persen	110.592.550	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	80 persen	76.250.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	80 persen	80 persen	12.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.04.2. 01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 perang kat daerah	72.250.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47 perang kat daerah	12.000.000	
2.08.04.2. 02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100 persen	70.300.000	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100 persen	98.592.550	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41 dokumen	68.300.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	98.592.550	
2.08.05.2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			100 persen	40.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			100 persen	8.056.775	
2.08.05.2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			100 persen	40.000.000	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			100 persen	8.056.775	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	40.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	8.056.775	
2.08.06.2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			80,56 persen	58.900.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			80,56 persen	56.117.500	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.06.2.01	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 organisasi	58.900.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 organisasi	56.117.500	
2.08.07.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
2.08.07.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>					<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>					

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.07.2. 01.03	Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	Kab. Gunung kidul	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 kegiatan	52.230.000	Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	Kab. Gunung kidul	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	3 kegiatan	149.500.000	
2.08.07.2. 02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			100 persen	364.415.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 persen	346.840.000	
2.08.07.2. 02.05	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah AMPK yang Mendapatka n layanan pengaduan	300 orang	360.415.000	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan pengaduan	100 orang	346.840.000	
2.08.07.2. 03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			100 persen	77.321.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 persen	101.660.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.07.2.03.06	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat daerah/kabupaten	Kab. Gunung kidul	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapat sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	45 orang	77.321.000	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat daerah/kabupaten	Kab. Gunung kidul	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapat sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	50 orang	101.660.000	
2.22.08.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100 persen	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100 persen	150.000.000	
2.22.08.2.09	<i>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>			100 persen	150.000.000				100 persen	150.000.000	
2.22.08.2.09.23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3 dokumen	150.000.000	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3 dokumen	150.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan masyarakat melalui mekanisme usulan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dan Pagu Indikatif Sektoran (PIS) serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan data lapangan.

Di program rehabilitasi sosial melalui usulan PIS sebanyak 2.506 bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar dan anak terlantar melalui dana APBD Kabupaten Gunungkidul, sehingga masih perlu dukungan anggaran melalui APBD DIY dan APBN Kementerian Sosial RI.

Di Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD ada 211 kelompok KUBE FM dan USEP KM sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat miskin berupa bantuan sosial dan pelatihan keterampilan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Sementara di dalam Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sebanyak 3 kelompok Pelatihan keterampilan masyarakat perempuan desa prima.

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Cat atan
1	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Katongan, Nglipar)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.260	Orang	37.800.000	
2	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Kedungpoh, Nglipar)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.080	Orang	32.400.000	
3	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Pengkol, Nglipar)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	720	Orang	21.600.000	
4	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan kedungkeris, Kab. Gunungkidul, Nglipar)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	4.500.000	
5	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Nglipar)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	1.800.000	
6	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Bleberan, Kab. Gunungkidul, Playen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.100	Orang	63.000.000	
7	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Gading, Playen, Gunungkidul, Playen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500	Orang	45.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
8	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan logandeng, Kab. Gunungkidul, Playen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	480	Orang	14.400.000	
9	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Banaran, Playen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul, Playen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	390	Orang	11.700.000	
10	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Balai Kalurahan Playen, Kab. Gunungkidul, Playen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330	Orang	9.900.000	
11	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Ngunut, Playen, Kab. Gunungkidul, Playen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180	Orang	5.400.000	
12	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Dengok, Playen Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul, Playen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	
13	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Plembutan, Kab. Gunungkidul, Playen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	
14	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Banyusoco, Playen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul, Playen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	
15	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Dengok, Playen Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul, Playen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
16	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Grogol, Paliyan)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.320	Orang	39.600.000	
17	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Mulusan, Paliyan)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	870	Orang	26.100.000	
18	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Karangduwet, Paliyan)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	18.000.000	
19	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Pampang, Paliyan)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	4.500.000	
20	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Balai Kalurahan Giring, Paliyan)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	1.800.000	
21	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Sodo, Paliyan)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	
22	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Karangasem, Paliyan)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	
23	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(kalurahan candirejo, Semanu)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	18.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Cat atan
24	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Jatiayu, Karangmojo, Karangmojo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.040	Orang	61.200.000	
25	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Karangmojo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	420	Orang	12.600.000	
26	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Ngawis, Karangmojo, Karangmojo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	360	Orang	10.800.000	
27	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Bendungan, Karangmojo, Karangmojo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	4.500.000	
28	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kelor, Karangmojo Gunungkidul, Karangmojo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	
29	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Botodayaan (61), karangwuni (4), Melikan (43), Petir (43) Pringombo (26) Pucanganom (7) semugih (23), Rongkop)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6.210	Orang	186.300.000	
30	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Pundungsari, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Semin)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Orang	3.600.000	
31	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kemejing 2 RT. 036 RW. 09, Kalurahan Kemejing, Kapanewon Semin, Kab. Gunungkidul, Semin)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
32	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Balai Desa Sambirejo, Kab. Gunungkidul, Ngawen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.050	Orang	31.500.000	
33	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Gantiwarno, Kampung, Ngawen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul, Ngawen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900	Orang	27.000.000	
34	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Tancep, Kab. Gunungkidul, Ngawen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	450	Orang	13.500.000	
35	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Jurangjero, Kab. Gunungkidul, Ngawen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	390	Orang	11.700.000	
36	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Beji, Ngawen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul, Ngawen)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180	Orang	5.400.000	
37	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(jl curuk indah nomor 113, Kab. Gunungkidul, Gedangsari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	18.000.000	
38	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Sampang, Kab. Gunungkidul, Gedangsari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	270	Orang	8.100.000	
39	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Watugajah, Gedangsari, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul, Gedangsari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	1.800.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
40	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Serut, Kab. Gunungkidul, Gedangsari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	
41	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Mertelu, Kab. Gunungkidul, Gedangsari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	
42	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Ngalang, Kab. Gunungkidul, Gedangsari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	
43	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Planjan, Saptosari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3.570	Orang	107.100.000	
44	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Jetis, Saptosari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	360	Orang	10.800.000	
45	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kanigoro, Saptosari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330	Orang	9.900.000	
46	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Monggol, Saptosari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	900.000	
47	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Pucung, Girisubo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.830	Orang	54.900.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
48	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Jerukwudel, Girisubo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	570	Orang	17.100.000	
49	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Songbanyu, Girisubo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330	Orang	9.900.000	
50	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Tileng, Girisubo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	9.000.000	
51	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Nglindur, Girisubo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	9.000.000	
52	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Balong, Girisubo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	240	Orang	7.200.000	
53	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Jepitu, Girisubo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	210	Orang	6.300.000	
54	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Karangawen, Girisubo)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180	Orang	5.400.000	
55	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Ngestirejo, Tanjung Sari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.410	Orang	42.300.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
56	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Hargosari, Tanjung Sari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	990	Orang	29.700.000	
57	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Kalurahan Banjarejo, Tanjung Sari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180	Orang	5.400.000	
58	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Purwosari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	840	Orang	25.200.000	
59	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Karangtengah, Giricahyo, Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo, Purwosari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	840	Orang	25.200.000	
60	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Giritirto, Purwosari, Gunungkidul, Purwosari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	18.000.000	
61	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Giriasih, Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Purwosari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	360	Orang	10.800.000	
62	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	(Girijati, Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati, Purwosari)	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	2.700.000	
63	(PIS) - Bantuan Sosial Penyediaan permakanaan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	36.240	Orang	1.087.200.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
64	Bantuan modal KUBE FM	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	61	Kelompok	1.403.000.000	
65	Bantuan modal USEP KM	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Kelompok	1.950.000.000	
66	Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Desa Prima	(Kerjo 2 Trukan, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul, Genjahan, Kec. Ponjong)	Jumlah Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kelompok	12.730.000	
67	Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Desa Prima	(Karangasem, Karangasem, Ponjong, Gunungkidul, Karangasem, Kec. Ponjong)	Jumlah Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kelompok	12.730.000	
68	Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Desa Prima	(Nangkasepet, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul, Sidorejo, Kec. Ponjong)	Jumlah Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kelompok	12.730.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial.
- b. Terwujudnya aksesibilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
- c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran)
- d. Terjaminnya PPKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah.
- e. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
- f. Terjaminnya penyandang disabilitas, lanjut usia non potensial, eks penderita kronis dan penyandang psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak.
- g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
- h. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasar pada visi dan misi Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut:

- a. Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026
“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”
- b. Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026:
 1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis;
 2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Dalam merumuskan tema pembangunan Tahun 2024 juga memperhatikan Tema Pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut:

- a. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2024
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”
- b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2024
“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah: “Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;

4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Insfrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Prioritas	Sasaran Daerah
1	2	3
1	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat Nilai Investasi Meningkat
2	Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting	Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun
3	Ketahanan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat Nilai Investasi Meningkat
4	Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM Meningkat
5	Insfrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan
6	Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Meningkat
7	Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul

Dalam rangka melaksanakan fungsi Dinas Sosial, PPPA sebagai Perumus kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelaksanaan pelayanan dan kegiatan di Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pelaksanaan urusan kesekretariatan, maka diperlukan suatu perencanaan kerja yang baik dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya:

1. Masalah yang bersifat internal
 - a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya.
 - b. Belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan kantor yang berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
 - c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal karena dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas.
2. Masalah yang bersifat eksternal
 - a. Tingginya angka kemiskinan;

- b. Belum optimalnya pemberdayaan PPKS;
 - c. Belum optimalnya peran PSKS;
 - d. Masih terdapatnya masyarakat yang memiliki mental miskin.
3. Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:
- a. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - c. belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan format sebagai berikut:

Prioritas dan sasaran Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
 Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Stunting	Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun	Persentase Kemiskinan	Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Capaian pemberdayaan gender meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				Pemenuhan Hak Anak meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disajikan hubungan antara Tujuan dengan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1	Terwujudnya kesejahteraan sosial	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2026	91
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81
2	Terwujudnya peningkatan capaian pembangunan gender serta pemenuhan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,25
		Persentase Pemenuhan Hak Anak Tahun 2026	87,5

Tabel 3.4.

Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
1	Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	90,6
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	80,21
3	Capaian pemberdayaan gender meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	75,57
4	Pemenuhan Hak Anak meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	80,55

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA PD, mengenai Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan Sosial	90,6%
2	Capaian pemberdayaan gender meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,57 (indeks)
3	Pemenuhan Hak Anak meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	80,55%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Tahun 2021-2026, Kebijakan Umum Bupati, Prioritas Pembangunan, pencapaian SDGs, pengurangan kemiskinan, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Pengembangan wilayah miskin.

Rencana kerja dan pendanaan tersebut diatas mengacu pada Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni: Meningkatnya Kemandirian Masyarakat secara ekonomi dan sosial.

- b. Uraian Garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah”. Oleh sebab itu Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2024 serta sumber dana kegiatan. Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk Tahun 2024 adalah 13 program dan 26 kegiatan;
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan difokuskan pada sasaran PMKS/PPKS, Perempuan dan Anak;
3. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif sektoral (PIS), PIWK, Pokir Dewan, Danais dan BKK total anggaran Rp. 10.637.288.780,00- ;
4. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan dari Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik serta Dana Keistimewaan DIY.

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
 Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
Penanganan Kemiskinan	Angka Penangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun	Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat	Cakupan PMKS/PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	90,6	1.06.02.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	270.212.500	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	270.212.500	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52.552.500	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	198.060.000	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16.780.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	600.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2.220.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.04.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.378.047.500	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.04.2.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	2.378.047.500	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	2.257.000.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	-	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	19.600.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	98.167.500	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	3.280.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.05.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.053.192.500	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.05.2.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	4.053.192.500	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.347.500	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	14.830.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	541.020.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.452.995.000	DINAS SOSIAL PPPA
					38723	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	138.465.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.06.2.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	32.500.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	30.000.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	-	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.500.000	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					1.06.06.2.02	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	105.965.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	2.500.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	103.465.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.07.2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	92.621.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.07.2.01	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	92.621.000	DINAS SOSIAL PPPA
					1.06.07.2.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92.621.000	DINAS SOSIAL PPPA
		Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,57	2.08.02.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	78.803.050	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					2.08.02.2.01	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	40.613.050	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.02.2.01.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25.422.500	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.02.2.01.03	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>	11.100.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.02.2.01.04	<i>Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>	4.090.550	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.02.2.02	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.02.2.02.01	<i>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	-	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.02.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	38.190.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	38.190.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.03.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	77.875.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.03.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.03.2.02	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	77.875.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	77.875.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.04.2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	110.592.550	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	12.000.000	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
						<i>Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		
					2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.04.2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	98.592.550	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	-	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.592.550	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.05.2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.056.775	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.05.2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	8.056.775	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.056.775	DINAS SOSIAL PPPA
		Pemenuhan Hak Anak Meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	80,55	2.08.06.2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	56.117.500	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					2.08.06.2.01	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.</i>	56.117.500	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	56.117.500	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.07.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	598.000.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.07.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.</i>	149.500.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.07.2.01.03	Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak,	149.500.000	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
						Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA		
					2.08.07.2.02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	346.840.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.07.2.02.05	<i>Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	346.840.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.08.07.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	101.660.000	DINAS SOSIAL PPPA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					2.08.07.2.03.06	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat daerah/kabupaten	101.660.000	DINAS SOSIAL PPPA
		Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatkan	Cakupan PMKS/PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	90,6	2.22.08.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	150.000.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.22.08.2.09	<i>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	150.000.000	DINAS SOSIAL PPPA
					2.22.08.2.09.23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000	DINAS SOSIAL PPPA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dapat dilihat di dalam tabel 4.2

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju 2025	SKPD
1	2	3	4	5
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.625.305.405,00	3.473.761.250,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	84.880.000,00	46.560.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.465.000,00	10.000.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	56.680.000,00	23.070.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.840.000,00	630.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.130.000,00	880.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.740.000,00	780.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.025.000,00	9.200.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.170.553.780,00	2.769.501.250,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.156.728.780,00	2.757.001.250,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.470.000,00	2.500.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.250.000,00	2.500.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	11.105.000,00	4.000.000,00	Dinas Sosial PPPA

No	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju 2025	SKPD
1	2	3	4	5
1.06.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.760.797,00	239.900.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	7.000.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.228.797,00	105.000.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.500.000,00	15.000.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	2.400.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	-	6.000.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.532.000,00	104.500.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.214.000,00	-	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel	11.214.000,00	-	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.691.828,00	103.100.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.491.828,00	62.000.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000,00	12.000.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.205.000,00	310.500.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.525.000,00	184.000.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .09.05	Pemeliharaan Mebel	-	4.500.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000,00	8.000.000,00	Dinas Sosial PPPA
1.06.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	89.000.000,00	Dinas Sosial PPPA

No	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju 2025	SKPD
1	2	3	4	5
1.06.01.2 .09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.180.000,00	25.000.000,00	Dinas Sosial PPPA

Hasil perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan prakiraan Maju Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.3. dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul
Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100	2.625.305.405			100	3.473.761.250
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Kabupaten Gunungkidul	29	84.880.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		29	46.560.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	4	13.465.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	10.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	1	56.680.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	23.070.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	1	1.840.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	630.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	2	2.130.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	880.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	2	2.740.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	780.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gunungkidul	16	6.025.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		16	9.200.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	4	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	2.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kabupaten Gunungkidul	20	2.170.553.780	Dana Alokasi Umum (DAU)		20	2.769.501.250
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gunungkidul	448	2.156.728.780	Dana Alokasi Umum (DAU)		420	2.757.001.250
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Gunungkidul	1	1.470.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	2.500.000
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kabupaten Gunungkidul	1	1.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	2.500.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Gunungkidul	13	11.105.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		13	4.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Kabupaten Gunungkidul	23	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		23	4.200.000
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Gunungkidul	6	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		6	4.200.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum PD	Kabupaten Gunungkidul	14	78.760.797	Dana Alokasi Umum (DAU)		14	239.900.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	Kabupaten Gunungkidul	3	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		6	7.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Gunungkidul	7	59.228.797	Dana Alokasi Umum (DAU)		7	105.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	2	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	15.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	360	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		360	2.400.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Gunungkidul	12	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	6.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gunungkidul	12	12.532.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	104.500.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Gunungkidul	1	11.214.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kabupaten Gunungkidul	12	11.214.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Gunungkidul	11	69.691.828	Dana Alokasi Umum (DAU)		11	103.100.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	204	68.491.828	Dana Alokasi Umum (DAU)		192	62.000.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	12	1.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	12.000.000
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"</i>	<i>Kabupaten Gunungkidul</i>	3	<i>210.205.000</i>	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>		3	<i>310.500.000</i>
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Gunungkidul	27	133.525.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		432	184.000.000
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Kabupaten Gunungkidul	20	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		6	4.500.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kabupaten Gunungkidul	24	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	8.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Gunungkidul	1	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	89.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Gunungkidul	21	63.180.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	25.000.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina		70,6	270.212.500			70,8	709.185.309
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terbina	Kabupaten Gunungkidul	9	270.212.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	709.185.309
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Gunungkidul	9	52.552.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	250.786.559

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	18	198.060.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		18	360.500.000
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	3	16.780.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	52.898.750
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota(WKSBM)	Kabupaten Gunungkidul	1	600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	21.000.000
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	2.220.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	24.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya		91; 100	2.378.047.500			91,5; 100	785.300.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	Kabupaten Gunungkidul	4	2.378.047.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	785.300.000
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	100	2.257.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100	178.000.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	108	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		108	230.300.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	235	19.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		90	124.000.000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	60	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		60	29.000.000
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	16	98.167.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		10	192.000.000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	4	3.280.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		6	32.000.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		90,6	4.053.192.500			90,8	2.392.193.945

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin yang masuk dalam basis data terpadu	Kabupaten Gunungkidul	4	4.053.192.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	2.392.193.945
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kabupaten Gunungkidul	583972	44.347.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		583972	354.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	213231	14.830.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		213231	210.000.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	823	541.020.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		279	792.193.945
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	2480	3.452.995.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3270	1.036.000.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	138.465.000			100	453.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.06.2.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</i>	<i>Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial korban bencana</i>	<i>Kabupaten Gunungkidul</i>	3	32.500.000	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>		3	80.000.000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	150	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		150	60.000.000
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	50	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		100	10.000.000
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	30	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		80	10.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.06.2.02	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lembaga terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana</i>	<i>Kabupaten Gunungkidul</i>	2	105.965.000	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>		2	373.000.000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	12	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	34.000.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	2952	103.465.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2952	339.000.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara		100	92.621.000			100	16.000.000
1.06.07.2.01	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</i>	<i>Terlaksananya pemeliharaan TMP dan Monumen yang terlaksana</i>	<i>Kabupaten Gunungkidul</i>	2	92.621.000	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>		2	16.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.07.2.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Yang Terpenuhi Pemeliharaannya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	31	92.621.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		31	16.000.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase lembaga PUG yang aktif		80	78.803.050			85	167.304.350
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Gunungkidul	4	40.613.050	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	127.834.350
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	25.422.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	31.500.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	47	11.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		47	16.348.500
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	47	4.090.550	Dana Alokasi Umum (DAU)		47	23.100.000
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	2	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	34.230.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	25.410.000
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	8.820.000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	38.190.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	5.240.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Gunungkidul	225	38.190.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		75	5.240.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan		6,25	77.875.000			6,67	267.810.000
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	77.875.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	250.000.000
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	77.875.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		6	160.000.000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase kelembagaan KLA yang aktif		72,73	110.592.550			73,81	147.550.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	2	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	76.450.000
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peringkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	47	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		7	72.250.000
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	2	98.592.550	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	71.100.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	98.592.550	Dana Alokasi Umum (DAU)	41		69.000.000
2.08.05.2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase jenis data gender dan anak yang dikelola		100	8.056.775			100	42.000.000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	8.056.775	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	42.000.000
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kabupaten Gunungkidul	1	8.056.775	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	42.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase Desa Layak Anak yang terbentuk		80,56	56.117.500			84,03	61.845.000
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, dan Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	56.117.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	61.845.000
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kabupaten Gunungkidul	1	56.117.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	61.845.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak		3,13	598.000.000			3,23	494.166.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	149.500.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik		1	52.230.000
2.08.07.2.01.03	Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	Kabupaten Gunungkidul	3	149.500.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik		475	52.230.000
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Gunungkidul	2	346.840.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik		2	364.615.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan pengaduan	Kabupaten Gunungkidul	100	346.840.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik		1	360.415.000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1	101.660.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik		1	77.321.000
2.08.07.2.03.06	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat daerah/kabupaten	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapat sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Kabupaten Gunungkidul	50	101.660.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik		45	77.321.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas		100	150.000.000			100	150.000.000
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kabupaten Gunungkidul	1	150.000.000	Dana Keistimewaan		1	150.000.000
2.22.08.2.09.2 3	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kabupaten Gunungkidul	3	150.000.000	Dana Keistimewaan		3	150.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu:

5.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 diharapkan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

- 5.3.1. Melaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan Pendampingan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Pelayanan Perlindungan dan jaminan Sosial;
- 5.3.2. Melaksanakan Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial melalui kegiatan Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Panti Sosial serta Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengarusutamaan Disabilitas.
- 5.3.3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

5.3.4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat serta Mitra kerja sosial baik LSM, Orsos maupun Dunia Usaha terkait program serta anggaran.

5.3.5. Melaksanakan Program dan kegiatan berdasarkan IKU, SPM dan IKK yang telah ditetapkan.

Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing pihak dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan,

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

ASTI WIJAYANTI

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2024
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di bidang administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya berupa data base kependudukan. Data base kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Rancangan akhir rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra 2021-2026, isu-isu strategis yang berkembang dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, serta aturan-aturan di bawahnya yang harus diterapkan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan publik dengan tujuan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sehingga tertib administrasi kependudukan meningkat dengan indikator cakupan penerbitan Kartu Kelurga, KTP – el dan KIA, cakupan kepemilikan akta kelahiran serta cakupan PD yang memanfaatkan data kependudukan.

Selanjutnya agar semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dapat berhasil dengan baik maka perlu disusun perencanaan yang baik dan konsisten dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi situasi dan kondisi yang akan terjadi dengan berbagai dukungan dan potensi yang dimiliki serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor: 052/5969 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor: 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
3. mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
4. mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
5. sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring, dan juga sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik pada bidang kependudukan dan pencatatan Sipil.

1.4. Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2. Uraian garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 target Renja di Tahun 2022 sebesar Rp8.100.975.574,00 dapat direalisasikan Rp7.612.148.036,00 atau sebesar 93,97% sehingga realisasi secara keuangan cukup efisien dengan capaian fisik kegiatan sebesar 101,8%.

Untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan hasil analisis pelaksanaan kegiatan sebagaimana berikut :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, yaitu:
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Kepegawaian, target kinerja 70 pegawai, dengan realisasi 65 pegawai atau 97,06%;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 90.75%
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan;
 - c. Kegiatan Pengelolaan Profil Kependudukan;
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran, yaitu:
 - a. Kegiatan Administrasi Umum sebesar 100,84%;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 103.46%;
 - c. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar 124,51%;
 - d. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar 135.03%;
 - e. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar 167,34%;
 - f. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 105%.
4. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan Tahun 2022 antara lain:
 - a. pergeseran beberapa indikator target kegiatan yang didanai dengan sisa DAK Non Fisik Tahun 2021;
 - b. berkurangnya SDM dikarenakan mutasi dan pensiun;
 - c. pelaksanaan SIAK Terpusat, berimbas pada kegiatan pelayanan keliling terutama kegiatan perekaman KTP penduduk lansia, penyandang disabilitas dan penduduk pemula serta pelayanan KIA diawal tahun, namun dipertengahan dan akhir tahun semua program/kegiatan prioritas dapat berjalan lancar sehingga realisasi target kinerja melebihi dari target perencanaan.

5. Implikasi capaian program Renstra PD diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target kinerja perencanaan, walaupun untuk mencapai kriteria maksimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat kekurangan SDM.
6. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain :
 - a. koordinasi dengan BKPPD terkait kekurangan SDM ;
 - b. melaksanakan dan melanjutkan pelayanan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara luring dan daring yang sudah berjalan baik di dinas, kapanewon maupun MPP sesuai slogan Urus Dewe Gampang Ora mBayar;
 - c. memprioritaskan anggaran yang urgent/penting dan optimalkan serapan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk selanjutnya disampaikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 terhadap pencapaian target dapat dilihat tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output dan Outcome)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik								
2.12.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	100	100	100	100	100	100	100.00
		Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	70 dokumen	14	14	14	100	14	28	40

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Draft Renstra PD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Renstra PD	1 dokumen	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Renja	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah dokumen Renja perubahan	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Penyelenggaraan Forum PD	5 kali	1	1	1	100.00	-	1	20.00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	2	2	25.00
2.12.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	1	1	25.00
2.12.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	1	1	25.00
2.12.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah Dokumen ROPK	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	1	1	12.50
2.12.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	1	1	12.50

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	20	20	20.00
2.12.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Monev Program dan Kegiatan	20 Laporan	4	4	4	100.00	4	8	40.00
		Jumlah dokumen LKJIP	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah laporan serapan DAK Non Fisik Adminlud ke Pusat	10 Laporan	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	5	5	25.00
2.12.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	20 dokumen	4	4	4	100	4	12	60.00
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	70 bulan	14	14	14	100.00	14	28	40.00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,800 orang	-	n/a	n/a	n/a	700	700	25.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	1	1	25.00
2.12.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Bulanan/SPJ	60 dokumen	12	12	12	100.00	12	24	40.00
		Jumlah laporan Semesteran	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	13	13	25.00
2.12.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	350 ASN	70	68	68	97.14	68	68	38.85

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan(Output dan Outcome)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	350 ASN	69	70	65	92.86	70	135	38.57
2.12.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	6	6	25.00
		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / kursus	350 aparatur	25	70	63	90.00	70	133	38.00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	272 orang	-	n/a	n/a	n/a	68	68	25.00
2.12.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan publikasi yang di cetak (banner)	175	20	60	60	100.00	35	95	54.28
		Jumlah bahan publikasi yang di cetak (kalender)	5,000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	20.00
		Jumlah bahan publikasi secara visual (vidiotron)	20 paket	4	1	1	100.00	4	5	25.00
		Jumlah bahan publikasi secara visual (vidio)	30 paket	6	-	-	-	6	6	20.00
		Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (ILM)	10 paket	2	1	1	100.00	2	3	30.00
		Jumlah peserta rakor yang terfasilitasi	OR							

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
			2,730	129	236	236	100.00	546	782	28.64
		Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang adminduk yang disusun	1 Perda	-	-	-	-	-	-	-
2.12.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum terlayani	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Administrasi Umum terlayani	87 Kegiatan		13	13	100.00	22	25	28.73
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli	20 jenis	8	4	4	100.00	13	17	85.00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	-	n/a	n/a	n/a	4	4	25.00
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	150 paket	40	30	30	100.00	30	60	40.00
		Jumlah Laptop dibeli	6 unit	3	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Komputer PC dibeli	20 unit	20	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Printer dibeli	35 unit	20	-	-	-	-	-	-
		Jumlah PrinterKTP dibeli	20 unit	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Komputer Desain Editing	1 unit	-	-	-	-	1	1	100.00
		Jumlah ADM yang dibeli	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Alat Rekam yang dibeli	7 unit	-	1	1	100.00	1	2	28.57
		Jumlah Scanner dibeli	15 unit	18	-	-	-	5	5	33.33
		Jumlah UPS yang dibeli	32 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah AC yang dibeli	12 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah TV Display pelayanan yang dibeli	3 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah LCD Proyektor yang dibeli	2 unit	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Server yang dibeli	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah HDD server yang dibeli	4 unit	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan(Output dan Outcome)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 paket	-	n/a	n/a	n/a	4	4	20.00
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah macam peralatan kebersihan tersedia	20 jenis	14	14	14	100.00	4	18	90.00
		Jumlah bahan dan peralatan rumah tangga yang terbeli	16 paket	-	n/a	n/a	n/a	4	4	25.00
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan tersedia	35 macam	6	4	4	100.00	7	11	31.43
		jumlah penggandaan tersedia	462,000 lembar	14,812	23,000	10,151	44.13	83,000	93,151	20.16
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	32 paket	-	n/a	n/a	n/a	8	8	25.00
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	60 bulan	12	12	12	100.00	12	24	40.00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,460 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	365	365	25.00
2.12.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	12	12	25.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia	4,559 OH	555	1024	1024	100.00	959	1,983	43.49
		Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	1,880	-	-	-	-	30	30	1.60
		Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) terfasilitasi	346 OH	52	30	30	100.00	62	92	26.58
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	53	53	25.00
2.12.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah rakor Go Digital dan inovasi pelayanan terfasilitasi	18 kali	3	3	3	100.00	3	6	33.33
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	3	3	25.00
2.12.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 Persen	100	-	-	-	-	-	100
		Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	5 Kegiatan	1	-	-	-	-	-	-
2.12.1.2.07.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Rolling pack yang dibeli	21 Buah	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Kursi Putar yang dibeli	20	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Papan Informasi yang dibeli	1	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Almari yang dibeli	1	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Almari arsip besi yang dibeli	2	-	-	-	-	2	2	100.00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 paket	-	n/a	n/a	n/a	3	3	25.00
2.12.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Kegiatan	1	7	7	100	7	14	40.00
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	5,470 bulan		1,075	1226	114.00	1,075	2301	42.06
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	12	12	25.00
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar	60 bulan	12	12	12	100.00	12	24	40.00
		Jumlah rekening listrik yang dibayar	60 bulan	12	12	12	100.00	12	24	40.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah rekening telepon yang dibayar	60 bulan	12	12	12	100.00	12	24	40.00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	36	36	25.00
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan dibayar	10 termin	-	2	2	100.00	2	4	40.00
		Jumlah jasa retribusi sampah yang terbayar	60 bulan	12	12	12	100.00	12	24	40.00
		Jumlah jasa Front Office	4,940 orang	-	918	817	89.00	988	1,805	36.53
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	56 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	14	14	25.00
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Kegiatan	11	16	100	100	16	32	40.00
2.12.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	27 unit	27	27	5	100.00	27	54	200.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Operasional atau Lapangan									
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	5 unit	5	5	5	100.00	5	10	200.00
		Jumlah roda 2 yang terpelihara	27 unit	27	27	27	100.00	27	54	200.00
		Jumlah roda 4 yang terpelihara	5 unit	5	5	5	100.00	5	10	200.00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	276 unit	-	n/a	n/a	n/a	69	69	25.00
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang dipelihara	24 unit	5	5	7	140.00	5	12	50.00
		Jumlah LCD yang dipelihara	10 unit	1	2	-	-	2	2	20.00
		Jumlah mesin ketik yang dipelihara	5 unit	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah Notebook yang dipelihara	16 unit	3	3	3	100.00	3	6	37.50
		Jumlah Printer KTP yang dipelihara	1 LS	1	-	-	-	1	1	100.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan(Output dan Outcome)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah printer yang dipelihara	24 unit	10	5	8	160.00	5	13	54,16
		Jumlah UPS yang dipelihara	17 unit	-	4	-	-	4	4	23,53
		Jumlah Mesin Fax yang dipelihara	5 unit	-	1	-	-	1	1	20,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	-	n/a	n/a	n/a	20	20	25,00
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kamar mandi yang terpelihara	60 unit	1	12	10	83.00	12	22	36,66
		Jumlah pemeliharaan/pengecatan Pagar	876	-	292	292	100.00	292	584	66,66
		Jumlah Pemeliharaan lantai	200	-	40	40	100.00	40	80	40,00
		Jumlah Pemeliharaan Ruang Pelayanan	180	-	60	60	100.00	60	120	66,66
		Jumlah Pemeliharaan pintu	20	-	4	3	75.00	4	7	35,00
		Jumlah pemeliharaan/pengecatan dinding	1,800	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	-	n/a	n/a	n/a	1	1	25,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.1.2.09.1.1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	159 unit	20	21	21	100.00	21	42	26.41
2.12.1.2.13.	Penataan Organisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 unit	-	n/a	n/a	n/a	20	20	25.00
2.12.1.2.13.2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	IKM PD	81	81	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	10 dokumen	2	2	2	100.00	2	4	40.00
		Jumlah dokumen RTP/SPIP yang disusun	5 dokumen	-	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah dokumen SOP yang dievaluasi	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah dokumen SP yang dievaluasi	5 dokumen	1	1	1	100.00	1	2	40.00
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan KTP;Cakupan Kepemilikan KK;Cakupan Kepemilikan KIA								
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan dokumen atas Permohonan KTP, KK, KIA	99 Persen	100	100	100	100-	99	99	100.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Jenis Dokumen Kependudukan yang terlayani	5 Jenis	5	5	5	100	5	5	100.00
2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan	Dokumen	29,048	40,000	54,732	137.00	40,000	94,732	47.36
		Jumlah KTP yang diterbitkan	Keping	54,085	45,000	46,556	103.00	45,000	91,556	40.69
		Jumlah KIA yang diterbitkan	Keping	54,983	20,000	18,203	91.00	20,000	203	38.20
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	dokumen	-	n/a	n/a	n/a	05,000	105,000	25.00
2.12.2.2.01.5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pendataan penduduk rentan	8 kali	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah penduduk pindah datang	orang	4,261	6,000	8,122	135.00	6,000	14,122	47.07
		Jumlah penduduk pindah pergi	orang	6,754	5,600	8,662	155.00	5,600	14,262	50.93
		Jumlah perekaman data KTP bagi manula dan difabel	orang	223	500	127	25.00	500	627	25.08

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah perekaman data KTP bagi pemula	6,000 orang	1,015	1,200	2,869	239.00	1,200	4,069	67.81
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	46,400 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	11,600	11,600	25.00
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Catatan Sipil	54 Persen					48		
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan perubahan status anak	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
		Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil Yang terlayani	5 Jenis	5	5	5	100.00	5	5	100.00
2.12.3.2.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang di terbitkan	55,000 akta	12,309	11,000	11,669	106.00	11,000	22,669	41.21
		Jumlah akta kematian yang di terbitkan	40,000 akta	10,776	8,000	9,551	119.00	9,000	18,551	46.37
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	76,000 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	19,000	19,000	25.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	750 akta	172	150	173	115.00	150	323	43.06
		Jumlah pencatatan perceraian yang dilaksanakan	150 akta	36	30	35	117.00	30	65	43.33
		Jumlah pencatatan status anak dan pewarganegaraan	75 akta	32	15	36	153.33	15	51	68.00
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	12 Layanan	-	n/a	n/a	n/a	3	3	25.00
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi Adminduk								
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pelayanan data dan kerjasama pemanfaatan data yang terlayani	100 100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
		Jumlah pelayanan data dan kerjasama pemanfaatan data yang terlayani	34 PKS	5	5	5	100	6	11	32.35
2.12.4.2.01.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen yang diproses secara digital	225,000 berkas	30,000	11,000	22,721	207.00	45,000	67,721	30.09
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	44,000 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	11,000	11,000	25.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.4.2.01.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan Data aadminduk oleh PD/lembaga	46 PKS	-	5	2	40.00	5	7	15.22
		Jumlah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan	85 Kerja sama	46	17	60	353.00	17	77	90.58
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	92 Layanan	-	n/a	n/a	n/a	23	23	25.00
2.12.4.2.01.3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk terlaksana	5 Inovasi	-	1	1	100.00	1	2	40.00
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	4 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	1	1	25.00
2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	25 Kegiatan	5	5	5	100.00	5	10	40.00
2.12.4.2.03.3	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jaringan SIAK yang dipelihara	95 Lokasi	19	19	19	100.00	19	38	40.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah peserta pelatihan SIAK yang terfasilitasi	150 orang	-	30	35	116.67	30	65	43.33
		Jumlah kalurahan yang dievaluasi tertib adminduk	90 kalurahan	-	-	-	-	18	18	20.00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	140 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	35	35	25.00
2.12.4.2.03.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah layanan data yang terselenggara	30 layanan	30	30	32	107.00	30	60	200.00
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	120 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	30	30	25.00
2.12.4.2.03.7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Adminduk yang dilaksanakan	60 kali	-	11	11	100.00	18	29	48.33
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	150 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	72 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	18	18	25.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan(Output dan Outcome)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat								
2.12.5.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyediaan data agregat	100 persen	100	100	100	100.00	100	100	100.00
		Jumlah dokumen data agregat yang tersusun	10 dokumen	2	2	2	100.00	2	4	40.00
2.12.4.2.01.1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor penyusunan data agregat terfasilitasi	20 kali	-	4	4	100.00	4	8	40.00
		Jumlah buku agregat yang dicetak	1,800 buku	334	360	360	100.00	360	720	40.00
		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	8 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	2	2	25.00
2.12.4.2.01.2	Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah rakor penyusunan profil kependudukan terfasilitasi	15 kali	-	3	3	100.00	3	6	40.00
		Jumlah buku profil kependudukan yang dicetak	900 buku	180	180	180	100.00	180	360	40.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	1	1	25.00

Keterangan: *) Berdasarkan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Pada tabel di atas berdasarkan hasil evaluasi Renja PD Tahun Anggaran 2022, dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja secara keseluruhan 101,8% sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan dapat tercapai dengan maksimal.

Sedangkan indikator kinerja tahun 2023 telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dilihat berbeda dengan tahun 2022 dan sudah disesuaikan dengan Perubahan Renstra PD 2021-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berikut gambaran struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:



Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan menggunakan beberapa inovasi Pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, antara lain:

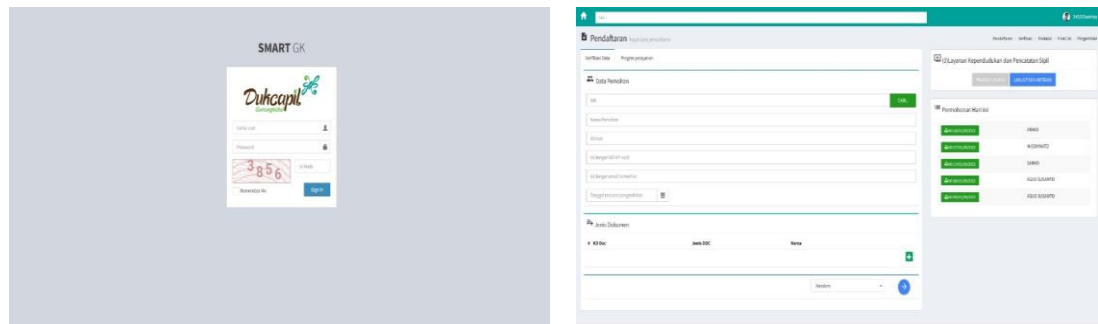
1. SIPANJANG (Sistem Pelayanan Sampai ke Ranjang) Pelayanan yang diperuntukkan bagi Warga Jompo dan Difabel yang tidak bisa datang perekaman di Kapanewon, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatangi rumah penduduk;

2. SIDUKUN SEMEDI (Sistem Integrasi Dokumen Kependudukan Sehari Mesti Jadi);
3. SIBADU (Sistem Isbat Terpadu) Pelayanan ini merupakan Pelayanan Terpadu antara Pengadilan Agama, KUA (Kantor Urusan Agama), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dari Penetapan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah sehingga bisa diterbitkan Akta Nikah oleh KUA dan diterbitkannya Akta Kelahiran bagi anak dari pasangan suami-istri tersebut;
4. PELANDUK (Penilaian Administrasi Kependudukan);
5. PAKET LATIKA (Pelayanan Kelurahan Cepat Lahir Mati, KK, KIA) Dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, penerbitan KK, dan Pembuatan KIA dapat dilakukan di Kelurahan tanpa harus ke Dinas untuk peristiwa tidak lebih dari 5 hari;
6. PEKA LATIKA PRIMA Pelayanan Kapanewon untuk penerbitan akta kelahiran, akta kematian, KK dan KIA menuju Pelayanan PRIMA;
7. PUNTADEWA merupakan inovasi pelayanan berupa Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan WA. Inovasi ini muncul sebagai solusi pelayanan yang lebih aman sesuai protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 karena meminimalisir pelayanan tatap muka).
8. SMART atau Sistem Manajemen Registrasi Terintegrasi adalah pengembangan dari Aplikasi SIMPEL Dukcapil yang terintegrasi dengan Inovasi Peka Latika Prima, Paket Latika di Kelurahan dan Rumah Sakit serta Pengarsipan Digital. Dalam pengembangannya aplikasi ini bertujuan:
 - a. Mendekatkan Pelayanan
Aplikasi SMART dapat memfasilitasi Layanan Pendaftaran adminduk hingga level Kelurahan/Desa.
 - b. Pembagian Tugas
Aplikasi SMART dapat membantu distribusi pekerjaan hingga level Operator Kecamatan, sehingga beban kerja Operator Dinas dapat terbagi secara merata.
 - c. Kontrol dan Pengawasan
Pimpinan dapat melihat beban kerja setiap Operator Dukcapil dan mengetahui progres pengerjaan produk Dukcapil.
 - d. Digitasilsasi Arsip
Setiap permohonan yang diinput pada Aplikasi SMART akan tersampaikan secara digital. Berkas Permohonan tersimpan pada aplikasi ini dalam bentuk PDF.
9. TANDUK RUSA (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Pasca Nikah)
Inovasi ini merupakan sinergitas Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Kantor Kemenag. Kabupaten Gunungkidul dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama di kapanewon se Kabupaten Gunungkidul.
10. PELIPUR HATI (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Habis Terbit Akta Cerai)
Inovasi ini merupakan kerja sama Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca peristiwa perceraian penduduk.

Inovasi pelayanan tersebut di atas telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 19/KPTS/2022, tanggal 28 Juni 2022 tentang : Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

sehingga pelayanan adminduk semakin berkualitas dan dapat membahagiakan masyarakat serta GPS (Gerakan Pambela Sungkawa) yang menjadi gerakan Dukcapil – Kapanewon – Kalurahan – Masyarakat untuk memberikan akta kematian dan atau Kartu Keluarga langsung kepada keluarga sebelum upacara pemberangkatan jenazah atau maksimal 7 (tujuh) hari setelahnya.

Beberapa dokumentasi kegiatan pelayanan adminduk serta implementasi inovasi pelayanan dapat disampaikan sebagai berikut :



Gambar 2.2 Aplikasi SMART Inovasi Pelayanan Admiduk



Gambar 2.3 Pelayanan pencatatan perkawinan di luar kantor



Gambar 2.4 Pelayanan di Mall Pelayanan Publik pada Terminal Dhaksinarga



Gambar 2.5 Pelayanan Sidang Isbat



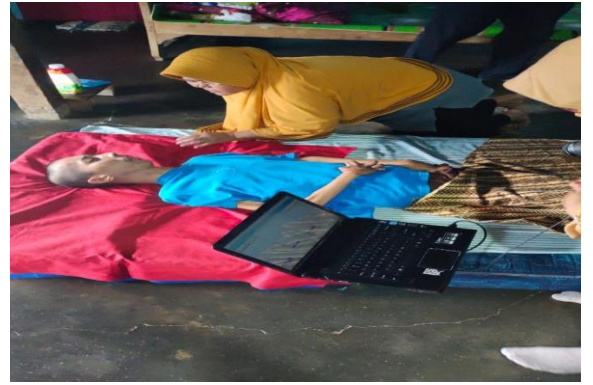
Gambar 2.6 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Puskesmas Paliyan



Gambar 2.7 Pelayanan jemput bola akta catatan sipil



Gambar 2.8 Gerakan Pambela Sungkawa



Gambar 2.9 Perekaman KTP dan KIA Jemput Bola Pemula , Manula dan Difabel



Gambar 2.10 Sosialisasi administrasi kependudukan

Sedangkan kegiatan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi Dinas itu sendiri yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan rancangan akhir rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- I. Kegiatan Kesekretariatan, terdiri dari 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Kegiatan Teknis

Kegiatan teknis berada di bidang terdiri dari 4 program prioritas, yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan
 - a. Pelayanan Pendaftaran penduduk
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
2. Program Pencatatan Sipil dengan Kegiatan
 - a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting;
 - 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - 1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;

- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - a. Penyusunan Profil Kependudukan
 - 1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.

Untuk mengukur kinerja yang akan dicapai diperlukan indikator target yang akan dicapai. Pencapaian target tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul maka Bupati menetapkan Indikator Kinerja Utama yang kemudian ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Program oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai gambaran target dan proyeksi pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama oleh Bupati dan Indikator Kinerja Program Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dapat disampaikan sebagaimana dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA												
1	Indeks tertib administrasi kependudukan tahun 2026	Persen	100%	74%	75,4 %	77,2%	100%	77,16	76%	77,1%		Pertumbuhan ini sangat dipengaruhi indikator penerbitan akta kelahiran yang realisasi capaiannya masih rendah karena merupakan capaian rata-rata
	Persentase penerbitan KTP	Persen	100%	99%	99%	99%	100%	98,53%	99,39%	99,50%		Untuk mencapai angka 100% sangatlah sulit karena dipengaruhi perkembangan usia 17 tahun
	Persentase penerbitan KK	Persen	100%	100%	100%	100%	101%	93,99%	100%	100%		Untuk indikator capaian ini sebenarnya kepemilikan sudah 100% karena KK yang terdaftar pada hasil registrasi pelayanan SIAK dan pasti sudah diterbitkan KKnya, capaian tahun 2022 KK berbarcode
	Persentase penerbitan KIA	Persen	-	60%	65%	70%	-	74,64%	67%	75%		Target ini sudah di atas rata-rata nasional

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
A.	INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase penerbitan akta kelahiran	Persen	-	47%	48%	49,5%	49,51%	50,53%	50%	50,50%	Capaian akta kelahiran untuk semua umur masih rendah	
B.	IKK											
	Kepemilikan KTP	Persen	100%	99%	99%	99%	100%	98,53	99,39%	99,50%	Untuk mencapai angka 100% sangatlah sulit karena dipengaruhi perkembangan usia 17 tahun	
	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk	per 1000 orang		580	590	600	495	505	592	610	Capaian akta kelahiran untuk semua umur masih rendah	
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		
	Nilai AKIP PD	Persen		81	81,2	81,04	80,82	81,85	81,25	81,35		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.3.1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul berupaya menyediakan data pemilih yang akurat serta melaksanakan perekaman wajib KTP bagi penduduk pemula di sekolah setingkat SLTA se Kabupaten Gunungkidul dengan tema *Dukcapil Goes to School*. Sejak tahun 2015 sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan rutin, namun mulai tahun 2022 ini semakin digiatkan, dengan tujuan mendukung Pemilu 2024 dan agar pelajar yang nantinya lulus SLTA sudah memiliki identitas berupa KTP.

1.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Secara umum masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, atau tidak ada hambatan dan kendala, akan tetapi secara teknis ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi diantaranya :

- Perekaman wajib KTP bagi penduduk manula dan disabilitas yang belum rekam terkendala lokasi tempat tinggal sasaran sulit dijangkau terutama sinyal internet karena perekaman harus dilakukan secara online;
- Pengadaan blangko KTP-el terpusat di Kemendagri harus mengambil ke Pusat sendiri;
- Sarana dan prasarana perekaman biometrik KTP elektronik di semua kapanewon dan dinas sejak tahun 2011 belum semua dilakukan peremajaan baru 11 (sebelas) set pengadaan dengan rincian tahun 2019 sejumlah 2 (dua) set, tahun 2020 sejumlah 8 (delapan) set dan tahun 2022 sebanyak 1 (satu) set.
- Kesadaran mencari akta kelahiran masih rendah di kalangan penduduk yang berusia tua hal ini terbukti angka kepemilikan Akta baru % dan total penduduk yang didominasi anak usia 0-18 tahun dengan tingkat kepemilikan % lebih;
- Terbatasnya SDM baik pada bidang pelayanan maupun administrasi, terutama sekali pada bidang pelayanan masyarakat sehingga pada saat adanya pelayanan di luar kantor dinas seperti layanan jemput bola harus mengurangi SDM yang juga melakukan pelayanan. Keadaan seperti ini tentunya akan mengurangi kinerja untuk mencapai target pelayanan yang harus dicapai. Belum lagi apabila ada yang sakit dan cuti ;
- Ruang penyimpanan arsip sudah penuh dan sudah tidak layak.

1.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan pembangunan berkelanjutan

Beberapa hambatan tersebut tentunya akan berpengaruh dengan kinerja pelayanan dinas terkait dengan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan :

- Penduduk wajib KTP belum semuanya memiliki KTP;
- Jumlah personil belum cukup karena pensiun dan mutasi;

- Tuntutan dari masyarakat akan pelayanan cepat dan mudah;
- Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di MPP dan Kapanewon Wonosari belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat.

b. Peluang :

- Dilaksanakan sosialisasi tentang arti pentingnya dokumen kependudukan baik tatap muka, media elektronik, media sosial dan website;
- Guna mendukung pelaksanaan pelayanan online secara penuh, D-Sign, yaitu Dukcapil's Signature Elektronik (Tanda Tangan Elektronik) pada dokumen kependudukan dapat mempercepat proses pelayanan dan pemanfaatan dokumen oleh instansi lain pengguna data kependudukan serta penggunaan file softcopy dokumen kependudukan dalam bentuk PDF yang dikirim langsung ke email penduduk menciptakan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses dari mana saja dan kapan saja;
- Penggunaan kertas putih HVS A4 80 gram untuk semua dokumen administrasi kependudukan selain KTP el dan KIA sangat menghemat anggaran;
- Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), diharapkan dapat menghemat biaya pencetakan KTP;
- Kerja sama pelayanan dan pemanfaatan data dengan PD dan instansi lain.

1.3.5. Formulasi isu-isu penting yang berupa rekomendasi dan catatan strategis

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

- a. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat merupakan reformasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan adminduk secara modern sesuai dengan standart internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) harus disukseskan pelaksanaannya.
- b. Hal penting dan sangat mendesak dalam hal pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul agar diupayakan segera dibangun gedung arsip kantor yang representatif;
- c. Dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024, perlu peningkatan kegiatan perekaman wajib KTP bagi penduduk pemula ke sekolah dan pemenuhan sarana prasarana pencetakan KTP dan penerapan IKD.

2.4 Review terhadap Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

Dari hasil review analisis rancangan Renja PD terhadap RKPD dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dari sisi anggaran RKPD dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.4.096.972.331,00 tidak sama dikarenakan anggaran Tambahan Tunjangan Penghasilan ASN kembali ke BKPPD serta pagu disesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/04391;
- b. Program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sama namun ada pergeseran dan pengurangan sub

kegiatan disesuaikan dengan arahan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pagu baru, yaitu:

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak mendapatkan alokasi anggaran;
 - Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dari Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk yang merupakan alokasi PIWK tidak mendapatkan alokasi anggaran;
 - Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan digabung menjadi Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuptaen/Kota guna mendukung pelaksanaan inovasi dan Smart City;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain dihapus karena indikator output kegiatan sama dengan Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota berupa data kependudukan.
- c. Indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sudah sama terakomodir dalam RKPD, sehingga Rancangan Awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saatnya sudah dapat dilaksanakan karena semua program, kegiatan dan sub kegiatan sudah ada dasar hukumnya.

Hasil pencermatan seperti tersaji dalam tabel 2.3 di bawah ini:

Table 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	8,076,176,305	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	3,836,102,981	
1,1,	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	40,550,000	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	3,550,000	
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,390,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	700,000	
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA dan	2 Dokumen	225,000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	700,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,110,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA dan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA dan Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	700,000	
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	750,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	1,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	425,000	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	29,200,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,500,000	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	5,649,400,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	3,159,686,981	
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/bulan	5,639,104,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/bulan	3,158,697,981	
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,140,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	744,000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	5,156,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	245,000	
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	45,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	3,965,000	
1.3.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	10,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	3,965,000	
1.3.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	35,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68 Orang	0	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum terlayani	100 persen	1,167,982,018	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum terlayani	100 persen	939,702,700	
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,220,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,230,000	
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	976,577,018	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	716,880,500	
1.4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2,800,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2,412,200	
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	44,800,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	20,705,000	
1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 Dokumen	1,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 Dokumen	1,560,000	
1.4.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13,125,000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan	118,485,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan	78,110,000	
1.4.8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	5,600,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3,680,000	
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	360,775,695	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	263,999,350	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	48,373,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40,200,000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	157,202,695	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	151,801,750	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	155,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	71,997,600	
1.7.	Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	298,126,000	Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	322,811,000	
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	139,729,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	220,300,000	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	71,235,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	29,500,000	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	75,162,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	76,011,000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	12,000,000	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan kepemilikan KTP;Cakupan kepemilikan KK; Cakupan kepemilikan KIA	98,19; 100; 62 persen	367,191,000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan kepemilikan KTP;Cakupan kepemilikan KK; Cakupan kepemilikan KIA	98,19; 100; 62 persen	559,070,000	
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase penerbitan dokumen atas permohonan KTP, KK, KIA	98,19; 100; 62 persen	367,191,000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase penerbitan dokumen atas permohonan KTP, KK, KIA	98,19; 100; 62 persen	453,020,000	
2.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	105000 Dokumen	320,704,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	105000 Dokumen	400.600,000	PIS
2.1.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11600 Dokumen	46,487,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11600 Dokumen	52,420,000	PIWK/ PIS

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	106,050,000	PIWK/ PIS
2.2.1						Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	1.050 orang	106,050,000	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			47,9 persen	118,295,000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Cakupan kepemilikan akta catatan sipil	47,9 persen	97,570,000	
3.1.	Pelayanan Pencatatan Sipil			100 persen	118,295,000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan perubahan status anak	100 persen	97,570,000	
3.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19000 Dokumen	30,140,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19000 Dokumen	38,250,000	
3.1.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	88,155,000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	59,320,000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	100 persen	459,371,000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	100 persen	159,945,000	
4.1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase pelayanan data dan kerjasama pemanfaatan data yang terlayani	100 persen	215,796,000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase pelayanan data dan kerjasama pemanfaatan data yang terlayani	100 persen	132,480,000	
4.1.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	45000 Dokumen	138,750,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	45000 Dokumen	94,590,000	
4.1.2.	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	23 Dokumen	74,746,000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	23 Dokumen	37,890,000	
4.2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100 persen	243,575,000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100 persen	27,465,000	
4.2.1.	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35 Laporan	76,771,000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37 Laporan	22,055,000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.2.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30 Dokumen	61,054,000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30 Dokumen	5,410,000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat	100 persen	98,586,000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat	100 persen	74,134,500	
5.1.	Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase penyediaan data agregat	100 persen	98,586,000	Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase penyediaan data agregat	100 persen	74,134,500	
5.1.1.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	61,536,000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	74,134,500	
TOTAL					9,119,619,305					5,529,062,981	

Pada tabel 2.3 disajikan Review Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.529.062.981,00 tidak sesuai dengan pagu anggaran pada Renstra PD. Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan dan sub kegiatan sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang kapanewon dan forum lintas PD tahun 2023, dapat disajikan data usulan kegiatan dari kalurahan dan kapanewon yang terangkum dalam PIWK dan PIS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai PD penanggung jawab. Namun untuk tahun 2024 dikarenakan keterbatasan pagu anggaran, maka usulan PIWK penunjang pengurangan kemiskinan baru dapat dianggarkan pada pelayanan jemput bola akta pencatatan sipil dan perekaman KTP wajib KTP penduduk jompo, penyandang disabilitas dan pemula, dan rekapitulasi usulan disajikan pada tabel 2.4, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan PIWK (Pagu Undikatif Wilayah Kapanewon) dan PIS (Pagu Indikatif Sektoral) tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Pelayanan perekaman data wajib KTP-el secara jemput bola bagi pemula	Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6	420,000	2,520,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
2	(PIWK) - Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kalurahan Watusigar, Kapanewon Ngawen	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	7,575,000	7,575,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
3	(PIWK) - Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kalurahan Karangduwet, Kapanewon Paliyan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	7,575,000	7,575,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
4	(PIWK) - Pelayanan keliling jemput bola akta-akta catatan sipil	Kalurahan Plembutan, Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1	2,310,000	2,310,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
5	(PIWK) - Pelayanan perekaman data penduduk wajib KTP-el secara jemput bola bagi manula dan penyandang disabilitas	Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1	420,000	420,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
6	(PIWK) - Pelayanan Perekaman data wajib KTP-el secara jemput bola bagi pemula	Kalurahan Plembutan, Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1	420,000	420,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
7	(PIWK) - Pelayanan keliling jemput bola akta-akta catatan sipil	Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1	2,310,000	2,310,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
8	(PIWK) - Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kalurahan Wunung, Kapanewon Wonosari	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	7,575,000	7,575,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
9	(PIS) - Pelayanan KIA secara jemput bola	Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1	420,000	420,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
10	(PIS) - Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kalurahan Karangduwet, Kapanewon Paliyan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	7,575,000	7,575,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
11	(PIS) - Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4	7,575,000	7,575,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang Volume menjadi 1 paket
12	(PIS) - Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	7,575,000	7,575,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
13	(PIS) - Pelayanan keliling jemput bola akta-akta catatan sipil	Bolodukuh Lor, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1	2,310,000	2,310,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
14	(PIS) - Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Bedoyo Kidul, Kalurahan Bedoyo, Kapanewon, Ponjong	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	7,575,000	7,575,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
15	(PIS) - Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Bolodukuh Lor, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	7,575,000	7,575,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
16	(PIS) - Pelayanan keliling jemput bola akta-akta catatan sipil	Kalurahan Salam, Kapanewon, Patuk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	24	2,310,000	2,310,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang Volume menjadi 5 paket
17	(PIS) - Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	13	181,800,000	181,800,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
18	(PIS) - Pelayanan perekaman data penduduk wajib KTP-el secara jemput bola bagi manula dan penyandang disabilitas	Kalurahan Serut, Kapanewon, Gedangsari	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1	5,460,000	5,460,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
19	(PIS) - Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kalurahan karangawen, Kapanewon Girisubo	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	7,575,000	7,575,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
JUMLAH						270,135,000	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, rancangan akhir rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 merupakan kelanjutan kegiatan tahun sebelumnya.

Kebijakan nasional masih menjadi fokus kegiatan rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2024, yaitu :

1. Pemutakhiran Data Penduduk;
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerapan KTP elektronik;
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pemutakhiran data penduduk, pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta penerapan KTP el masih berjalan sampai semua wajib KTP el melaksanakan perekaman dan memiliki KTP el dengan giat pelayanan jemput bola bagi penduduk wajib KTP penduduk lansia dan penyandang disabilitas serta usia pemula. Untuk kepemilikan akta kelahiran bagi anak juga masih terus berjalan, dengan sosialisasi dan pelayanan keliling jemput bola bagi penduduk yang belum memiliki akta kelahiran.

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat juga dikembangkan dengan berbagai inovasi serta akses informasi melalui *www:dukcapil.kab.gunungkidul.go.id.*, *email: dukcapil@gunungkidulkab.go.id*, *Facebook: @dukcapilgk*, *twitter: @dukcapilgk*

3.2. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana dimuat dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan penjabaran dari sasaran daerah telah dirumuskan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 dengan sasaran yang akan dicapai. Dengan mengacu pada tema pembangunan tahun 2024 adalah : *"Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia"*. Tahun 2024 dengan tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Insfrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Maka terkait dengan prioritas pembangunan daerah tersebut di atas, sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Prioritas dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcomes)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcomes)
1	2	3	4	5	6
1.	Reformasi birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	Tertib Administrasi Kependudukan meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan (diukur dari 40 persen cakupan KTP. KK dan KIA di tambah 40 persen cakupan kepemilikan akta catatan sipil dan 20 persen cakupan PD yang memanfaatkan data)

Guna tercapainya target sasaran Daerah tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menetapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana disajikan tabel 3.2. dan Tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 3.2.
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1.	2.	3.	4.
1.	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Indeks tertib administrasi kependudukan (diukur dari 40 persen cakupan KTP. KK dan KIA di tambah 40 persen cakupan kepemilikan akta catatan sipil dan 20 persen cakupan PD yang memanfaatkan data)	80%

Tabel 3.3.
Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran Tahun 2024
1.	2.	3.	4.
1.	Tertib administrasi kependudukan meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	77,2%
2.	Akuntabilitas Kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	81,4

Dan untuk lebih memberikan perhatian dalam pencapaian target tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan indikator kinerja dinas yang dipandang telah merepresentasikan kinerja dinas berupa indikator kinerja utama dengan indikator yaitu Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat berupa angka Indeks Tertib Administrasi Kependudukan (diukur dari 40 persen cakupan KTP, KK dan KIA di tambah 40 persen cakupan kepemilikan akta catatan sipil dan 20 persen cakupan PD yang memanfaatkan data) yang dapat kami sajikan pada tabel 3.5. di bawah ini :

Tabel 3.5.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	2.	3.	4.
1.	Tertib administrasi kependudukan meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan (diukur dari 40 persen cakupan ktp kk dan kia di tambah 40 persen cakupan kepemilikan akta catatan sipil dan 20 persen cakupan PD yang memanfaatkan data)	77,2%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

4.1.1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Gunungkidul “*Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026*” dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis;
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah;

Guna mendukung pencapaian misi pertama “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan sasaran daerah sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu “*Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat*”, atas pertimbangan hal tersebut di atas dapat dipakai sebagai acuan dalam penjabaran program dan kegiatan dalam proses penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

4.1.2. Prioritas Pembangunan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2024 akan melaksanakan/memprioritaskan pembangunan yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran yang minimalis, namun dengan harapan pencapaian kinerja yang tinggi, antara lain :

1. Penyelesaian perekaman data KTP-el reguler melalui petugas pelayanan di Kapanewon-Kapanewon setempat;
2. Perekaman data KTP-el wajib KTP pemula ke sekolah-sekolah, dan jemput bola bagi manula dan penyandang disabilitas;
3. Perekaman data KIA dan penerbitan KIA;
4. Penyelesaian target akta kelahiran bagi anak 0-17 Tahun;
5. Peningkatan layanan Gerakan Pambela Sungkawa (GPS);
6. Peningkatan Perjanjian Kerjasama dengan OPD maupun Lembaga;
7. Peningkatan capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD);
8. Penugasan kepada desa/kalurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dengan layanan adminduk di desa/kapanewon;
9. Layanan terintegrasi.

4.1.3. Pengurangan Kemiskinan

Bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya program pengentasan kemiskinan akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan penduduk, terkait dengan hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan perekaman biometrik KTP bagi penduduk jompo dan penyandang disabilitas, serta penerbitan KIA. Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Sidang Isbat Terpadu serta Pemanfaatan data kependudukan dalam rangka penanganan kemiskinan untuk kebutuhan data pembangunan lintas sektor seperti Bappeda, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPJS dan lain-lain.

4.1.4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dijelaskan pada huruf b, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang terkait untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Penyelesaian perekaman data KTP-el melalui petugas pelayanan di dinas dan 18 Kapanewon;
2. Perekaman data KTP-el jemput bola bagi wajib KTP pemula ke sekolah-sekolah, dan bagi manula/sakit dan penyandang disabilitas;
3. Pelayanan terintegrasi di dinas, kapanewon dan MPP dan kegiatan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Sidang isbat terpadu dengan Pengadilan Agama;
5. Gerakan Pambela Sungkawa (GPS) di semua kalurahan;
6. Kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan PD dan atau instansi lain;
7. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada semua penduduk yang mempunyai Handphone;
8. Sosialisasi-sosialisasi;
9. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
10. Penambahan SDM.

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan :

1. Jumlah program pada Tahun Anggaran 2024 sejumlah 5 program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan;
2. Sifat penyebaran program dan kegiatan, program dan kegiatan yang sifatnya kegiatan rutin berlokasi di Dinas Dukcapil dan Mall Pelayanan Publik, sedangkan kegiatan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada Kapanewon dan Kalurahan, sedangkan kegiatan yang sifatnya koordinasi sampai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat;
3. Jumlah kebutuhan dana yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp4.096.972.331,00 (Empat milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) untuk pembiayaan belanja operasi dan modal.
4. Dari 5 program yang terdiri 11 kegiatan dan 35 sub kegiatan tersebut untuk lebih mempertajam tujuan dan sasaran daerah yang terdiri :
 - a. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat;
 - b. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat;
 - c. Derajat Kualitas SDM meningkat;
 - d. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun;
 - e. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat;
 - f. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan;
 - g. Nilai Investasi Meningkat.

Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan dukungan tercapainya sasaran yang ke 1 (satu) yaitu Kapasitas tata kelola pemerintahan. Selanjutnya total anggaran dalam RKPD awal sebesar Rp4.096.972.331,00 (Empat milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang telah dijabarkan ke dalam

program dan kegiatan guna terlaksananya tujuan dan sasaran dinas yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut ditetapkan program dan kegiatan yang terdiri dari 4 program prioritas dengan 5 kegiatan yang terdiri 9 sub kegiatan yang didukung 1 program pendukung dengan 6 kegiatan dengan 26 sub kegiatan. Program prioritas dan program penunjang dimaksud dapat kami sajikan pada tabel 4.1. dan tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1.
Proritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Tertib Administrasi Kependudukan meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan (diukur dari 40 persen cakupan KTP. KK dan KIA di tambah 40 persen cakupan kepemilikan akta catatan sipil dan 20 persen cakupan PD yang memanfaatkan data)	77,2%	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	268.810.000	Dukcapil
					2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	268.810.000	
					2.12.2	Program Pendaftaran Penduduk	132.070.000	
					2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	132.070.000	
					2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	104.270.000	Dukcapil
					2.12.2.2.01.5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	27.800.000	Dukcapil (PIWK)
					2.12.2.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0	
					2.12.2.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	0	Dukcapil (PIWK dan PIS)

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	35.410.000	
					2.12.3.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	35.410.000	
					2.12.3.2.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	28.160.000	Dukcapil (PIWK)
					2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	7.250.000	Dukcapil
					2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	94.430.000	
					2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	80.380.000	
					2.12.4.2.01.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	54.300.000	Dukcapil
					2.12.4.2.01.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	26.080.000	Dukcapil
					2.12.4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.050.000	
					2.12.4.2.03.3	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.300.000	Dukcapil
					2.12.4.2.03.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	750.000	Dukcapil
					2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	6.900.000	
					2.12.5.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	6.900.000	
					2.12.4.2.01.1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	6.900.000	Dukcapil

Tabel 4.2.
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju (2025)	SKPD
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.550.000	42.100.000	Dukcapil
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.159.697.981	5.655.450.000	Dukcapil
1.3.	Administrasi Kepegawaian	3.965.000	50.000.000	Dukcapil
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.878.000	1.567.498.228	Dukcapil
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.889.350	378.400.000	Dukcapil
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.193.000	334.325.000	Dukcapil
	JUMLAH	3.828.162.331	8.496.456.820	Dukcapil

4.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut.

Tabel 4.3.
Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2		4	5	6	7	8	9	10
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	12				4.096.972.331				9,061,484,228
2	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 Persen	4.096.972.331				8,027,773,228
2	12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14 Dokumen	3.550.000			14 Dokumen	42,100,000
2	12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	6,800,000
2	12	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1,300,000
2	12	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	800,000
2	12	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	335.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1,300,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2		4	5	6	7	8	9	10
2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	850,000
2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	1,300,000
2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	5 Dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	29,750,000
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	100 Persen	3.159.686.981			4 :aporan	5,655,450,000
2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	700 Orang/bulan	3.158.697.981	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		700 Orang/bulan	5,646,775,000
2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Laporan	744.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,425,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
										4	5	6	7
1	2												
2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	13 Laporan	245.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Laporan	9	10	6,250,000
2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian		50 Orang	3.965.000			70 orang		50,000,000
2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	6 Dokumen	3.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen			12,500,000
2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul	0 Orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	68 Orang			37,500,000
2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum terlayani		12 Kegiatan	175.878.000			12 Kegiatan		1,567,498,228
2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	1 Paket	735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket			3,500,000
2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Gunungkidul	4 Paket	137.658.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket			1,355,023,228

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
										4	5	6	7
1	2												
2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan rumah tangga yang terbeli (paket)	Kab. Gunungkidul	1 Paket	1.065.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	3,450,000				
2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Gunungkidul	1	3.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Paket	46,725,000				
2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	365 Dokumen	1,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	365 Dokumen	1,750,000				
2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	12 Laporan	5.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	20,000,000				
2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Luar Daerah kabupaten Gunungkidul	5 Laporan	24.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53 Laporan	131,450,000				
2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	5,600,000				
2	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana		3 Kegiatan	247.889.350		3 Kegiatan	378,400,000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
										4	5	6	7
1	2												
2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul	12 Laporan	24.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	52,575,000	
2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	36 Laporan	151.801.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	165,675,000	
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	14 Laporan	71.997.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	160,150,000	
2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kegiatan)		6 Kegiatan	237.193.000			6 Kegiatan	334,325,000	
2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	156.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		69 Unit	148,725,000	
2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul	16 Unit	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	71,675,000	
2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	1 Unit	66.893.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	78,925,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2		4	5	6	7	8	9	10
2	1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	20 Unit	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	35,000,000
2	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			132.070.000		99; 99; 80 persen	489,817,000
2	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Jenis Dokumen Kependudukan yang terlayani	132.070.000		4 Jenis	383,767,000
2	2	2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Gunungkidul	105000 Dokumen	104.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105000 Dokumen	335,225,000
2	2	2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	27.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11600 Dokumen	48,542,000
	2	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0		1 Kegiatan	106.050.000
2	2	2.03	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran penduduk	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran penduduk	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (PIWK dan PIS)	0 orang	106.050.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										4	5	6
1	2											
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta catatan sipil		51 persen	35.410.000			52 persen		121,601,000		
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Dokuemn catatan Sipil yang terlayani		5 jenis	35.410.000			5 jenis		121,601,000		
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Gunungkidul	19000 Dokumen	28.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19000 Dokumen		32,200,000		
2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Kab. Gunungkidul	3 Layanan	7.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Layanan		89,401,000		
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk		100 Persen	94.430.000			100 Persen		359.043.000		
2	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pelayanan data dan kerjasama pemanfaatan data yang terlayani (kerjasama)		7 kerjasama	80.380.000			7 kerjasama		219,606,000		
2	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	Kab. Gunungkidul	5000 Dokumen	54.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11000 Dokumen		140,356,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2		4	5	6	7	8	9	10
2	2.01	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gunungkidul, Luar Daerah kabupaten Gunungkidul	7 Dokumen	26.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Dokumen	79,250,000
2	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Kegiatan	14.050.000			2 Kegiatan	139.437,000
2	2.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Gunungkidul	2 Laporan	13.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 Laporan	77,113,000
2	2.03	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	62,324,000
2	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		100 Persen	6.900.000			100 Persen	102,700,000
2	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan		2 Dokumen	6.900.000			2 Dokumen	63,250,000
2	2.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	6.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	63,250,000
TOTAL						4.096.972.331			9,061.484.228

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun untuk nantinya disempurnakan menjadi Rencana Kerja Tahun 2024. Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 dan berkesinambungan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta RKPD tahun 2024. Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, serta kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta mengacu pada prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

a. Catatan Penting

Proses penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Peran serta *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kapanewon, Forum PD hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

b. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja ini berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi ke depan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti. Didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul).

c. Rencana Tindak lanjut

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul berupaya melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga dapat bermanfaat dan membahagiakan masyarakat serta *stakeholder* yang membutuhkan data kependudukan. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Demikian Rancangan akhir Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

MARKUS TRI MUNARJA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dituangkan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024. Renja disusun dengan berpedoman pada visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2021-2026 serta arah kebijakan pembangunan tahun kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan Review Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026. Selain itu juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Renja Dinas Perhubungan disusun dengan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga terkait dalam hal ini Renja Kementerian Perhubungan, Renja Dinas Perhubungan DIY, serta RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sehingga diharapkan ada keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan PD dengan perencanaan daerah dan provinsi dan kementerian terkait. Rumusan program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan data dan asumsi-asumsi yang tepat dan akurat, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja PD dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang pada Tahun 2023 secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum PD), dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang ada serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2023 sebagai bahan evaluasi kinerja.

Dampak COVID-19 yang masih dirasakan sampai dengan dokumen ini disusun, berimbas pada isi dokumen Renja PD ini yang menjadi landasan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah dalam pelayanan masyarakat dengan mengutamakan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi imbas adanya COVID-19. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen Renja-PD akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD tahun anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2024 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di tuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2024;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- I. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

II. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu- isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023, pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mendapat total alokasi anggaran Rp 20.938.845.697,00 (Dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri dari yang bersumber APBD Kabupaten Gunungkidul, sebesar Rp 19.683.845.697,00 (Sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 18.480.455.693,00 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan belanja modal sebesar Rp788.920.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dijabarkan dalam 2 program dan 16 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Sedangkan yang bersumber dari Dana Keistimewaan sebesar Rp1.255.000.000,00 (Satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dijabarkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 23.883.736.672,00 terdiri dari Belanja Operasi Rp19.388.316.666,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 4.495.420.000,00 dan dijabarkan dalam 3 program dan 15 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,17% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,05%.

Realisasi anggaran dan kinerja tahun lalu/Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian tahun berjalan/Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X-XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X-XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD disusun tepat waktu	150 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	100%	29 dokumen	56 dokumen	37%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X-XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	23 dokumen	NA	NA	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	17%
		Jumlah dokumen Renstra PD tersusun	-	1 dokumen	-	-	-	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen Renja PD tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen Renja Perubahan PD tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen ROPK tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen Profil PD tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen review Rensitra PD tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	25%
		Jumlah dokumen RKA tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	25%
		Jumlah dokumen RKA Perubahan tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	25%
		Jumlah Dokumen DPA tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	25%
		Jumlah Dokumen DPPA tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	72 dokumen	NA	NA	NA	NA	18 dokumen	18 dokumen	25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen LkjiP tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen LPPD PD tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X-XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	NA	NA	NA	NA	3 dokumen	3 dokumen	25%
		Jumlah Dokumen Laporan Tepra tersusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Laporan e-money tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	NA	NA	NA
X-XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	231 dokumen	47 dokumen	46 dokumen	46 dokumen	100%	46 dokumen	93 dokumen	40%
		Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X-XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2296 orang	NA	NA	NA	NA	574 orang	574 orang	25%
		Jumlah bulan penyediaan gaji ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	NA	NA	NA
		Jumlah bulan penyediaan insentif retribusi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	NA	NA	NA
		Jumlah bulan penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	NA	NA	NA
X-XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	25%
		Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tri- wulanan/Semesteran SKPD	52 dokumen	NA	NA	NA	NA	13 dokumen	13 dokumen	25%
		Jumlah Dokumen SPJ Bulanan Tersusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen laporan semesteran tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD tersusun tepat waktu	75 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	15 dokumen	30 dokumen	40%
		Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang teradminis- trasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 03.01	Penyusunan Perencana an Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah PD tersusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
X.XX.01.2. 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsi- liasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 dokumen	NA	NA	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	25%
X.XX.01.2. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 dokumen	NA	NA	NA	NA	12 dokumen	12 dokumen	25%
		Jumlah dokumen penata- usahaan barang milik daerah tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pendapatan disusun tepat waktu	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	40%
		Persentase pendapatan daerah yang teradministrasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	48 dokumen	NA	NA	NA	NA	12 dokumen	12 dokumen	25%
		Jumlah dokumen laporan SPJ pendapatan tersusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	84 dokumen	NA	NA	NA	NA	21 dokumen	21 dokumen	25%
		Jumlah layanan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	32 dokumen	40%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	219 dokumen	NA	NA	NA	NA	57 dokumen	57 dokumen	26%
		Jumlah layanan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	11 layanan	11 layanan	11 layanan	11 layanan	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan	16 dokumen	NA	NA	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	25%
		Jumlah komponen listrik tersedia	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 paket	NA	NA	NA	NA	5 paket	5 paket	45%
		Jumlah laptop	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 paket	NA	NA	NA	NA	4 paket	4 paket	25%
		Jumlah ATK yang tersedia	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	16 paket	NA	NA	NA	NA	4 paket	4 paket	25%
		Jumlah barang cetakan yang dibeli	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1460 dokumen	NA	NA	NA	NA	365 dokumen	365 dokumen	25%
		Jumlah rekening langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	25%
		Jumlah snack dan minum rapat dan tamu	1000 or	1000 or	1157 or	1157 or	100%	1000 or	1000or	100%
		Jumlah sppd dalam daerah	70 oh	-	142 oh	142 oh	100%	NA	NA	NA
		Jumlah sppd luar daerah	22 oh	-	25 oh	25 oh	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16 dokumen	NA	NA	NA	NA	4 paket	4 paket	25%
		Jumlah paket cetak blangko kearsipan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	NA	NA	NA
		Jumlah AC								
X.XX.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	244 laporan	NA	NA	NA	NA	61 laporan	61 laporan	25%
		Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 layanan	10 layanan	10 layanan	10 layanan	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	25%
		Jumlah materai 10.000an terbeli	50 buah	0 buah	70 buah	70 buah	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	148 laporan	NA	NA	NA	NA	37 laporan	37 laporan	25%
		Jumlah tagihan listrik dibayar (6 rekening)	72 rekening	60 bulan	60 rekening	60 rekening	100%	NA	NA	NA
		Jumlah langganan frekuensi radio	1 kali	1 tahun	1 kali	1 kali	100%	NA	NA	NA
		Jumlah tagihan air dibayar (1 rekening)	12 rekening	12 bulan	12 rekening	12 rekening	100%	NA	NA	NA
		Jumlah tagihan telepon dibayar (3 rekening)	36 rekening	36 bulan	36 rekening	36 rekening	100%	NA	NA	NA
		Jumlah penam bahan daya listrik	12500 KWh	-	1 paket	1 paket	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 laporan	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	25%
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4 paket		4 paket	4 paket	100%	NA	NA	NA
		Jumlah penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	591 unit	NA	NA	NA	NA	193 unit	193 unit	32%
		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah	18 layanan	18 layanan	18 layanan	18 layanan	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah pemelihara raan kendaraan roda 4 (1 Unit)	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya)	140 unit	NA	NA	NA	NA	35 unit	35 unit	25%
		Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2 (24 unit)	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	NA	NA	NA
		Jumlah pemelaha raan kendaraan roda 4 (7 unit)	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	NA	NA	NA
		Jumlah pemelaha raan kendaraan roda 6 (4 unit)	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	240 unit	NA	NA	NA	NA	60 unit	60 unit	25%
		Jumlah mebel yang dipelihara	30 buah	30 buah	30 buah	30 buah	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 unit	NA	NA	NA	NA	62 unit	62 unit	25%
		Jumlah Pemelaha raan komputer	7 unit	7 unit	13 unit	13 unit	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pemelaha raan Laptop	6 unit	6 unit	12 unit	12 unit	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pemelaha raan printer	5 unit	5 unit	11 unit	11 unit	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pemelaha raan HT	5 unit	5 unit	10 unit	10 unit	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pemeliharaan mesin ketik	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pemeliharaan repeater	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	NA	NA	NA	NA	1 unit	1 unit	11%
		Jumlah bulan penyediaan Honorarium tenaga kontrak (Petugas Keamanan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99 unit	NA	NA	NA	NA	24 unit	24 unit	24%
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terfasilitasi pemeliharannya (AC)	27 unit	27 unit	26 unit	26 unit	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana tersusun	0 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen evaluasi SOP tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
X.XX.01.2. 13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan TataLaksana	Jumlah Dokumen pelayanan publik dan tata laksana	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	NA	NA	NA
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATARUANG	Persentase penyelesaian keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	100%	NA	20%	20%	100%	20%	40%	40%
1.03.13.2. 02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	3 dokumen	30%
1.03.13.2. 02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	3 dokumen	30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase satuan ruang strategis kasultanan dan kabupaten yang memiliki dokumen pemanfaatan ruang	100%	NA	20%	20%	100%	NA	NA	NA
1.03.13.2.0 2.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	2 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	2 dokumen	100%
		Kajian kebutuhan sarana dan prasarana transportasi di SRS Kars Gunung Sewu	1 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA	NA
		Bus sekolah			2 unit	2 unit	100%	NA	NA	NA
		Bus sekolah difiable			1 unit	1 unit	100%	NA	NA	NA
		Microbus			1 unit	1 unit	100%	NA	NA	NA
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase capaian penyelenggaraan an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas	11,80 persen	4,30 persen	4,30 persen	5,70 persen	132%	4,50 persen	4,50 persen	38%
		Persentase capaian penyelenggaraan an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal	66,58 persen	66,43 persen	66,50 persen	57,07 persen	86%	66,53 persen	66,53 persen	99%
		Persentase capaian penyelenggaraan an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan parkir	75,44 persen	68,49 persen	70,84 persen	72,66 persen	103%	71,41 persen	71,41 persen	94%
		Persentase capaian penyelenggaraan an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian kendaraan bermotor	99,00 persen	98,88 persen	98,00 persen	93,32 persen	99%	98,25 persen	98,25 persen	99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.0 2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	2.128 unit	NA	NA	NA	NA	74 unit	74 unit	3,5%
		Jumlah layanan penyediaan perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	9 layanan	9 layanan	9 layanan	9 layanan	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2083 unit	NA	NA	NA	NA	61 unit	61 unit	3%
		Jumlah tagihan listrik PJU dibayar	16464 rekening	0 rekening	12 rekening	12 rekening	100%	NA	NA	NA
		Jumlah rambu lalu lintas terpasang	10 unit	4295 unit	10 unit	10 unit	100%	NA	NA	NA
		Jumlah guardrail terpasang	248 meter	8895 meter	248 meter	248 meter	100%	NA	NA	NA
		Jumlah warning lamp terpasang	2 unit	33 unit	2 unit	2 unit	100%	NA	NA	NA
		Jumlah cermin tikung terpasang (PIS)	7 unit	80 unit	7 unit	7 unit	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 2.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi	12 paket	NA	NA	NA	NA	3 paket	3 paket	25%
		Jumlah perengkapan lalu lintas (APILL) terpelihara	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pemeliharaan PJU	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi Terminal Tipe C Semrin	42 unit	NA	NA	NA	NA	11 unit	11 unit	26%
		Jumlah layanan pengelolaan terminal tipe C Semrin	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 3.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	12 unit	NA	NA	NA	NA	2 unit	2 unit	17%
		Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan di terminal Semrin	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah karosis retribusi terminal tercetak	10 bendel	bendel	10 unit	10 unit	100%	NA	NA	NA
		Jumlah tanda setor retribusi terminal tercetak	146 bendel	bendel	146 unit	146 unit	100%	NA	NA	NA
		Pengecoran area cuci kendaraan	1 paket	0 dokumen	1 paket	1 paket	100%	NA	NA	NA
		Pengecoran area parkir terminal	1 LS	0 LS	1 LS	1 LS	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 3.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan Dipelihara	29 paket	NA	NA	NA	NA	9 paket	9 paket	31%
		Jumlah Pemeliharaan landasan parkir bus di terminal terlaksana	1 paket	paket	1 paket	1 paket	100%	NA	NA	NA
		Jumlah unit Pemeliharaan los, kios	1 unit	unit	1 paket	1 paket	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pemeliharaan gedung	1 paket	paket	1 paket	1 paket	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen penerbitan ijin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir	78 dokumen	NA	NA	NA	NA	13 dokumen	13 dokumen	17%
		Jumlah layanan penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 4.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	78 dokumen	NA	NA	NA	NA	13 dokumen	13 dokumen	17%
		Jumlah bulan Pengelolaan lokasi parkir	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah karis retribusi parkir tercetak	8000 bendel	8000 bendel	8000 bendel	8000 bendel	100%	NA	NA	NA
		Jumlah blangko setoran dan STS tercetak	175 bendel	175 bendel	175 bendel	175 bendel	100%	NA	NA	NA
		Jumlah unit fasilitas parkir terbangun	0 unit	0 unit	1 paket	1 paket	100%	NA	NA	NA
		Jumlah lokasi fasilitas parkir terpelihara	0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	NA	NA	NA
		Jumlah upah pungut retribusi parkir yang dibayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengem- bangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	51 unit	NA	NA	NA	NA	14 unit	14 unit	28%
		Jumlah layanan pengujian kendaraan bermotor	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 5.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	31322 unit	NA	NA	NA	NA	7697 unit	7697 unit	25%
		Jumlah kendaraan yang diuji	7756 kendaraan	7500 kendaraan	5000 kendaraan	5068 kendaraan	100,95%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 5.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20100 dokumen	NA	NA	NA	NA	4800 dokumen	4800 dokumen	24%
		Jumlah bukti lulus uji	1800 set	1800 set	1800 set	1800 set	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 5.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kenda- raan Bermotor yang Terpelihara	40 unit	NA	NA	NA	NA	10 unit	10 unit	25%
		Jumlah alat uji yang difasilitasi pemeliharannya	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	NA	NA	NA
		Jumlah alat uji PKB yang tersertifikasi kalibrasi	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.0 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	89 dokumen	NA	NA	NA	NA	22 dokumen	22 dokumen	25%
		Jumlah layanan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 6.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	82 dokumen	NA	NA	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	5%
		Jumlah Cetak banner sosialisasi- sasi uji coba lalu lintas	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 6.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten /Kota	56 hari	NA	NA	NA	NA	14 hari	14 hari	25%
		Jumlah Wasdal jalan raya dan KTL terlaksana	240 hari	240 hari	240 hari	293 hari	122%	NA	NA	NA
		Jumlah PAM pengamanan insidentil terlaksanaan	45 kali	45 kali	250 kali	264 kali	106%	NA	NA	NA
		Jumlah Operasi Yustisi pola terpadu terlaksana	15 hari	15 hari	4 hari	9 hari	225%	NA	NA	NA
		Jumlah Wasdal wilayah kecamatan terlaksana	48 hari	48 hari	75 hari	86 hari	115%	NA	NA	NA
		Jumlah hari Pengamanan angkutan lebaran terlaksana	16 hari	16 hari	16 hari	16 hari	100%	NA	NA	NA
		Jumlah hari PAM Natal dan Tahun Baru terlaksana	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Recover balihokeselamatan dan pengumuman lebaran, natal, dan tahun baru tercetak	5 buah	5 buah	7 buah	7 buah	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 6.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9 kali	NA	NA	NA	NA	3 kali	3 kali	30%
		Jumlah Forum Lalu lintas Kabupaten terlaksana	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan angkutan bus sekolah	12 unit	NA	NA	NA	NA	3 unit	3 unit	25%
		Jumlah bulan layanan angkutan bus perintis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.0 9.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 unit	NA	NA	NA	NA	3 unit	3 unit	25%
		Jumlah bulan Layanan angkutan bus perintis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	NA	NA	NA
2.15.02.2.1 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29 laporan	NA	NA	NA	NA	4 laporan	4 laporan	14%
		Jumlah layanan penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.1 4.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21 laporan	NA	NA	NA	NA	2 laporan	2 laporan	10%
		Jumlah moda transportasi terlayani perijinan	250 kendaraan	250 kendaraan	100 kendaraan	95 kendaraan	95%	NA	NA	NA
2.15.02.2.1 4.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	8 laporan	NA	NA	NA	NA	2 laporan	2 laporan	25%
		Jumlah Temu wicara dengan awak kendaraan angkutan umum terselenggara	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	NA	NA	NA
		Jumlah Pemilihan AKUT (awak kendaraan umum teladan) terselenggara	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	NA	NA	NA

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa hampir semua target kinerja sub kegiatan tahun 2022 terlaksana dengan baik. Dari 50 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, sub kegiatan yang capaian kinerja kegiatannya kurang dari 75% sebanyak 0 sub kegiatan, capaian kinerja 75%-99% sebanyak 1 sub kegiatan, capaian kinerja 100% sebanyak 47 sub kegiatan dan capaian kinerja lebih dari 100% sebanyak 2 sub kegiatan.

Kegiatan yang realisasi kinerjanya mencapai lebih dari 100% yaitu:

- Sub Kegiatan 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota terealisasi sebesar 109,65%, hal ini karena:

- Operasi yustisi yang direncanakan 4 kali terlaksana 9 kali
- PAM insidentil yang direncanakan 250 kali terealisasi 264 kali
- Wasdal jalan raya dan KTL yang ditargetkan 240 kali terlaksana 293 kali
- Wasdal wilayah kecamatan ditargetkan 75 kali terealisasi 86 kali

Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan pengamanan baik dari masyarakat maupun instansi yang melaksanakan kegiatan yang memerlukan pengaturan lalu lintas

- Sub Kegiatan 2.15.02.2.05.03 Regristrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor tercapai sebesar 100,95%. Jumlah kendaraan yang diuji ditargetkan 5000 kendaraan terealisasi sebanyak 5068 kendaraan. Capaian ini didukung adanya Bantuan Subsidi BBM untuk angkutan umum yang dalam pencairannya dipersyaratkan telah mendaftarkan uji kendaraannya.

Sedangkan kegiatan yang realisasi target kinerjanya kurang dari 100% yaitu:

- Sub Kegiatan 2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik hanya terealisasi sebesar 95%, hal ini karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin trayek kendaraan angkutannya.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 tersebut, guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja Tahun 2023, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, di antaranya :

- Penetapan indikator keluaran kegiatan pada tahap perencanaan agar lebih cermat lagi, sehingga bisa benar-benar mewakili output dari kegiatan dan bisa tercapai dengan baik;
- Renja perubahan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan beberapa kondisi atau kebijakan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga kinerja kegiatan bisa mencapai 100%;
- Penetapan kinerja kegiatan agar memperhatikan hasil capaian kinerja tahun lalu sehingga pencapaian yang terlalu tinggi (melebihi 100%) dan terlalu rendah (dibawah 90%) dapat dihindari.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, terdapat 3 (tiga) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 368/KPTS/2021 yaitu ***Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan.***

Realisasi pencapaian kinerja Dinas Perhubungan selama periode Renstra baik IKU (indikator kinerja utama), SPM (standar pelayanan minimal), MDGs (*millennium development goals*) dan IKK (indikator kinerja kunci) Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
**Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
 Terhadap Renstra PD Tahun 2021 - 2026**
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/ Nilai target/ Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Catatan Analisa
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)												
1	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	65,05	57,91	59,16	61,68	63,53	65,05	56,28					
B	Indikator Kinerja Program												
1	Persentase SRS Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang	100	20	40	60	80	100	20					
2	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	63,21	59,91	60,17	61,76	62,67	63,21	56,28					
3	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100					
C	IKK (Indikator Kinerja Kunci) Penyelenggaraan Pemerintah daerah Indikator Outcome												
1	Rasio konektivitas kabupaten	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30				Rasio konektivitas didapatkan dari (jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek)/jumlah kebutuhan
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,05	0,05				V/C Ratio didapatkan lewat survey di jalan kabupaten, sehingga tidak bisa dilakukan setiap tahun
	Indikator output												
1	Persentase tersedianya fasilitas penyeleng-garaan terminal penumpang tipe C	89,19	75,68	78,38	81,08	81,69	89,19	86,00					Dihitung dengan jumlah fasilitas penyeleng-garaan terminal penumpang angkutan jalan tipe C tersedia/jumlah fasilitas penye-lenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan
2	Terlaksananya pelayanan pelayanan uji berkala	50,00	46,50	47,00	48,00	49,00	50,00	40,00					Dihitung dengan jumlah kendaraan yang diuji per tahun/jumlah kendaraan wajib uji
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan perdesaan kelas ekonomi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan kota	100	100	100	100	100	100	100					Dihitung dengan jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota : jumlah target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten/ kota

Capaian indikator IKU (indikator kinerja utama) Dinas Perhubungan, Tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 57,91% baru tercapai 56,28%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 pandemi COVID-19 masih belum usai dan berpengaruh pada semua sektor termasuk perhubungan. Beberapa kegiatan dan program yang direncanakan untuk mendukung pencapaian IKU mengalami refocusing anggaran sehingga peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang menjadi faktor utama tercapainya IKU Dinas Perhubungan tidak tercapai.

Sedangkan IKK (indikator kinerja kunci) urusan Perhubungan, pada tahun 2022 capaiannya seperti terlihat pada kolom 9 tabel 2.2. Dari 6 (enam) indikator yang terbagi dalam 2 (dua) IKK outcome dan 4 (empat) IKK output, 4 (empat) indikator realisasinya mencapai target, sedangkan 1 (satu) indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diukur melalui tingkat kinerja pelayanan PD yang dapat dilihat dari capaian target indikator program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dari tabel 2.2 di atas dapat kita ketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan belum maksimal, terlihat dari beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun dari luar dinas yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi

urusan perhubungan, diantaranya adalah :

1. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
2. Terjadi kepadatan dan kemacetan pada ruas-ruas jalan utama menuju obyek wisata;
3. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi teknis di bidang perhubungan, yang berakibat kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
4. Tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh kurangnya fasilitas/kelengkapan jalan juga akibat rendahnya kesadaran pengendara baik pribadi maupun angkutan umum;
5. Berkurangnya jumlah armada angkutan umum akibat *load factor* yang rendah karena menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan semakin maraknya angkutan *online*;
6. Pelayanan infrastruktur penghubung antarobyek wisata belum ada;
7. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal.

Tantangan tersebut tentu saja sangat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Tantangan tersebut menjadi peluang Dinas Perhubungan untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan melalui program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan. Langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan antara lain:

1. Peningkatan dan perluasan akses sarana transportasi. Hal ini sangat penting mengingat Gunungkidul menjadi tujuan wisata yang terkemuka dan belum terdapat angkutan khusus menuju obyek wisata.
2. Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional. Pendidikan dan pelatihan ini

diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

3. Peningkatan pengadaan infrastruktur fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardraill, APILL dll) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa penerangan jalan umum untuk menciptakan dan mewujudkan standar keselamatan jalan.
4. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana transportasi (bus sekolah) untuk mendukung ketersediaan angkutan umum untuk masyarakat dan menekan tingkat kecelakaan di jalan.
5. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas.
6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai upaya mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan transportasi guna mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penjabaran program kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024 serta hasil analisa kebutuhan Dinas Perhubungan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		7.534.189.445	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		4.604.042.668	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD disusun tepat waktu	31 dokumen	70.062.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD disusun tepat waktu	31 dokumen	70.319.500	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	61.105.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	62.812.500	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	907.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	910.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	605.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	585.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	605.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	510.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	605.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	560.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	18 dokumen	4.235.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 dokumen	3.200.000	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	3 dokumen	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	1.742.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	46 dokumen	5.713.911.945	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	46 dokumen	2.798.073.168	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan/Wonosari	574 orang	5.702.053.945	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 orang	2.785.523.168	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	1 dokumen	2.117.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.200.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	13 dokumen	9.740.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 dokumen	11.350.000	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dinas Perhubungan/Wonosari	NA	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	NA	NA	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD tersusun tepat waktu	Dinas Perhubungan/Wonosari	15 dokumen	1.350.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah dokumen administrasi BMD tersusun tepat waktu	15 dokumen	800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah PD tersusun	Dinas Perhubungan/Wonosari	1 dokumen	350.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah PD tersusun	1 dokumen	150.000	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	2 dokumen	150.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	150.000	
1.3.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	12 dokumen	850.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dokumen	500.000	
1.4	Administrasi Pendapat Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pendaptandisusun tepat waktu	Dinas Perhubungan/Wonosari	12 dokumen	6.500.000	Administrasi Pendapat Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah dokumen laporan pendaptandisusun tepat waktu	12 dokumen	1.500.000	
1.4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	12 dokumen	6.500.000,	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	1.500.000	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	21 dokumen	185.340.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	21 dokumen	29.650.000	
1.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Perhubungan/Wonosari	0 paket	87.500.000	-	-	-	-	-	
1.5.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan/Wonosari	16 dokumen	3.025.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 dokumen	1.200.000	
1.5.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Perhubungan/Wonosari	4 dokumen	1.815.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	450.000	
1.5.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jawa tengah, Jawa Barat	25 orang/hari	43.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jawa tengah, Jawa Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang/hari	28.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.5	Sosialisasi Peraturan Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan/Wonosari	94 orang	50.000.000	-	-	-	-	0	
1.6	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Jumlah dokumen administrasi umumperangkat daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	54 dokumen	601.300.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah dokumen administrasi umumperangkat daerah	54 dokumen	300.500.000	
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Listrik/ Penerangan Disediakan	Dinas Perhubungan/Wonosari	4 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Paket Listrik/ Penerangan Disediakan	4 paket	16.000.000	
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan/Wonosari	2 paket	21.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	25000000	
1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	Dinas Perhubungan/Wonosari	0 paket	-	-	-	-	-	-	
1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan/Wonosari	4 paket	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	80.000.000	
1.6.5	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda-an yang disediakan	Dinas Perhubungan/Wonosari	4 paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda-an yang disediakan	4 paket	18.000.000	
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Perhubungan/Wonosari	365 dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - Undangan yang Disediakan	365 dokumen	1.200.000	
1.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan/Wonosari	12 laporan	-	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	9.800.000	
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	12 laporan	369.100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggara - raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000	
1.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	4 dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	500.000	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	0 unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	3 unit	15.000.000	
1.7.1	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 set	-	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 set	5.000.000	
1.7.2	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	-	-	-	-	-	-	
1.7.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	10.000.000	
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	61 laporan	195.760.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	65 laporan	246.400.000	
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	21.040.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	500.000	
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 laporan	135.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 laporan	200.000.000	
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	3.000.000	
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	36.120.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	42.900.000	
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah barang milik daerah peninjauan urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	132 unit	759.965.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah barang milik daerah peninjauan urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	132 unit	1.141.800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perhubungan/Wonosari	NA	NA	-	-	-	-	-	
1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perhubungan/Wonosari	35 unit	530.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	994.000.000	
1.9.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Dinas Perhubungan/Wonosari	60 unit	5.700.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah mebel yang dipelihara	60 unit	3.000.000	
1.9.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perhubungan/Wonosari	62 unit	48.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 unit	24.000.000	
1.9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perhubungan/Wonosari	2 unit	163.255.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	110.000.000	
1.9.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perhubungan/Wonosari	25 unit	12.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit	10.800.000	
1.9.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Dinas Perhubungan/Wonosari	10 unit	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana tersusun	Dinas Perhubungan/Wonosari	NA	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen pelayanan publik dan tata laksana	Dinas Perhubungan/Wonosari	NA	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusantata ruang terlaksana dengan baik		60 persen	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusantata ruang terlaksana dengan baik	60 persen	2.229.568.000	
2.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		21 unit	-	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah dokumen pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	21 unit	0	
2.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Gunungkidul/SRS Gunung Sewu	1 dokumen	-	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Gunungkidul/SRS Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 dokumen	1.851.918.000	
2.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Gunungkidul/SRS Sokoliman	1 dokumen	-	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Gunungkidul/SRS Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	1 dokumen	0	
2.1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Gunungkidul/SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 dokumen	-	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Gunungkidul/SRS Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	1 dokumen	377.650.000	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas		9,50 persen	12.395.303.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas	9,50 persen	14.867.580.000	
		Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal		66,55 persen				Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal	66,55 persen		

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase capaian penyelenggaraan an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran	72,51 persen							
			Persentase capaian penyelenggaraan an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor	98,50 persen							
3.1	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gunungkidul	Jumlah penyedia an perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	720 unit	10.448.053.000	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gunungkidul	Jumlah penyedia an perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	720 unit	497.000.000	
3.1.1	Pembangunan Prasarana Jalandi Jalan Kabupaten/ Kota	Gunungkidul	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	7 unit	100.000.000	-	-	-	-	-	
3.1.2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gunungkidul	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	708 unit	10.128.000.000	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gunungkidul	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	708 unit	12.117.000.000	
3.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan an Prasarana Jalan	Gunungkidul	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 unit	25.000.000	-	-	-	-	-	
3.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Gunungkidul	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi	3 unit	195.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan an Perengkapan Jalan	Gunungkidul	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi	3 unit	380.000.000	
3.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Semin	Jumlah pembangunan, pengembangan danrehabilitasi Terminal Tipe C Semin	13 unit	328.250.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Semin	Jumlah pembangunan, pengembangan danrehabilitasi Terminal Tipe C Semin	13 unit	55.000.000	
3.2.1	Pembangunan Gedung Terminal	Semin	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0 unit	-	-	-	-	-	-	
3.2.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Semin	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	5 unit	58.250.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Semin	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	5 unit	35.000.000	
3.2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Semin	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan Dipelihara	8 unit	270.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Semin	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan Dipelihara	8 unit	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen penerbitan ijin penyelenggara an parkir dan pembangunan fasilitas parkir		22 dokumen	655.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah dokumen penerbitan ijin penyelenggara an parkir dan pembangunan fasilitas parkir	22 dokumen	1.010.000.000	
3.3.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan nya Fasilitas Parkir kewenang an Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terinte grasi Secara Elektronik	Dinas Perhubungan/ Wonosari	22 dokumen	655.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenang an Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan nya Fasilitas Parkir kewenang an Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terinte grasi Secara Elektronik	22 dokumen	1.010.000.000	
3.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor		15 unit	425.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	15 unit	405.000.000	
3.4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Dinas Perhubungan/ Wonosari	4 unit	20.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 unit	25.000.000	
3.4.2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Dinas Perhubungan/ Wonosari	7875 unit	230.000.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	7875 unit	200.000.000	
3.4.3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan/ Wonosari	5100 unit	127.500.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5100 unit	140.000.000	
3.4.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Dinas Perhubungan/ Wonosari	10 unit	47.500.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	40.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Gunungkidul	22 dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Gunungkidul	Jumlah dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	22 dokumen	714.000.000	
3.5.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Gunungkidul	2 laporan	-	-	-	-	-	-	
3.5.2	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Gunungkidul	26 dokumen	51.700.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	26 dokumen	31.000.000	
3.5.3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten /Kota	Gunungkidul	14 laporan	326.300.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Gunungkidul	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten /Kota	12 laporan	675.000.000	
3.5.4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan/ Wonosari	2 kali	22.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan/ Wonosari	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 kali	8.000.000	
3.6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyediaan angkutan bus sekolah		3 unit	92.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah penyediaan angkutan bus sekolah	7 unit	137.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dinas Perhubungan/Wonosari	3 unit	92.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 unit	137.000.000	
3.7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		9 laporan	47.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9 laporan	49.580.000	
3.7.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Berusaha Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Berusaha Secara Elektronik	Dinas Perhubungan/Wonosari	7 laporan	37.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Berusaha Secara Elektronik	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Berusaha Secara Elektronik	7 laporan	32.580.000	
3.7.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan/Wonosari	2 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan/Wonosari	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	17.000.000	
JUMLAH TOTAL					19.929.492.445					21.701.190.668	

Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Dinas Perhubungan merencanakan untuk melaksanakan 3 program yang dijabarkan dalam 18 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp19.929.492.445,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah). Pada proses dan tahap penyelarasan dengan kebijakan pemerintah daerah yang terkait penganggaran serta kemampuan pendanaan maka pagu indikatif pada semua PD mengalami penyesuaian. Pagu indikatif Dinas Perhubungan mengalami kenaikan menjadi Rp21.701.190.668,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus satu juta seratus Sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang dijabarkan dalam 3 program, 17 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan adanya tambahan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Satu Kegiatan yang ada di Rancangan RKPD tidak dilaksanakan di Rancangan Renja adalah kegiatan Penataan Organisasi, hal ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi penyusunan Rancangan awal renja perangkat daerah karena sesuai ketentuan kegiatan itu hanya diperuntukkan untuk OPD Sekretariat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan pengumpulan program dan kegiatan dari bidang-bidang dan UPT yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul. Langkah selanjutnya, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat, diadakan musrenbang di semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat kecamatan/desa yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK dan sektoral. Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapitan dibahas lagi pada Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum perangkat daerah tersebut. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan (Rp)	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Cermin Tikung	songbanyu I, rt 02 rw 02 songbanyu, girisubo, gunungkidul bandung, songbanyu, girisubo, gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Terpasangnya cermin tikung	2 unit	6.000.000	12.000.000	Sesuai
2	(PIWK) - Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Ruas Jalan Nomor 1607 Sp. Songbanyu - Paranggupito, songbanyu II, RT 02 RW 03, Songbanyu, girisubo	Terpasangnya pagar pengaman jalan/guadrail	24 meter	1.500.000	36.000.000	Sesuai
3	(PIWK) - Pengadaan dan pemasangan warning light	Ruas Jalan Nomor 1607 Sp. Songbanyu - Paranggupito, songbanyu II, Songbanyu, girisubo	Terpasangnya warning light	1 unit	40.000.000	40.000.000	Sesuai
4	(PIWK) - Pengadaan dan pemasangan warning light	munggur,003/002, Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak	Terpasangnya warning light	1 unit	40.000.000	40.000.000	Sesuai
5	(PIWK) - Cermin Tikung	Betoro Kidul ruas jalan porjiong-karangasem no 1008dan Jati ruas jalan ps bedoyo-sp 4 kenteng, Kab. Gunungkidul	Terpasangnya cermin tikung	1 unit	6.000.000	6.000.000	Sesuai
6	(PIS) - Cermin Tikung	Watusigar, Kab.Gunungkidul. No Ruas :13.14	Terpasangnya cermin tikung	3 unit	6.000.000	18.000.000	Lokasi sesuai (Jl. Kabupaten Ruas Jatiayu-Kailitnyu 0904)
7	(PIS) - Pengadaan dan pemasangan warning light	Kepek	Terpasangnya warning light	3 unit	40.000.000	120.000.000	Lokasi sesuai (Jl. Kabupaten Ruas Tentara Pelajar 0115)
8	(PIS) - Cermin Tikung	Sidoharjo	Terpasangnya cermin tikung	5 unit	6.000.000	30.000.000	Lokasi sesuai (Jl. Kabupaten Ruas Pulegundes-Krakal 0703)
9	(PIS) - Pemasangan Deliniator	Sidoharjo	Terpasangnya Deliniator	20 unit	750.000	15.000.000	Lokasi sesuai (Jl. Kabupaten Ruas Pulegundes-Krakal 0703 & Jl. Bintaos-Sumberwungu)
10	(PIS) - Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Wonosobo 2 Banjarejo, Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Banjarejo	Terpasangnya pagar pengaman jalan/guadrail	20 meter	1.500.000	30.000.000	Lokasi sesuai (Jl. Kabupaten Ruas Banjarejo-P.Drini 1708)
11	(PIS) - Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Padukuhan Dayakan 2,Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Kemiri	Terpasangnya pagar pengaman jalan/guadrail	28 meter	1.500.000	42.000.000	Lokasi sesuai (Jl. Kabupaten Ruas Kemiri-Cabean 1701)
12	(PIS) - Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Sumur Rt 12/03, Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo	Terpasangnya pagar pengaman jalan/guadrail	50 meter	1.500.000	75.000.000	Lokasi sesuai (Jl. Kabupaten Ruas Sp.Panggang-Klampok 0602)
13	(PIS) - Rambu standar	Parangrejo, Kab. Gunungkidul,Purwosari, Girijati	Terpasangnya Rambu Standar	6 unit	1.500.000	9.000.000	Lokasi sesuai (Jl. Kabupaten)

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan (Rp)	Anggaran	Catatan
14	(PIS) - Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Girikarto	Terpasangnya pagar pengaman jalan/guadrail	100 meter	1.500.000	150.000.000	Lokasi sesuai (Jl. Kabupaten Ruas Girikarto-P. Gesing 0601)
15	(PIS) - Cermin Tikung	Serut	Terpasangnya cermin tikung	10 unit	6.000.000	60.000.000	Lokasi kurang detail dan berada di jalan desa
16	(PIS) - Pemasangan Rambu F	Piyaman	Terpasangnya Rambu F	1 unit	6.000.000	6.000.000	Lokasi tidak sesuai (Jl. Nasional Lingkar Utara)
17	(PIS) - Pemasangan RPPJ	Jalan Ploso - panggang, Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto	Terpasangnya RPPJ	3 paket	13.000.000	39.000.000	Lokasi tidak sesuai (Jl. Provinsi Ruas Panggang-Girijati)

Sesuai hasil Musrenbang Kapanewon, terdapat 17 (tujuh belas) usulan yang masuk di program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul. Lima usulan merupakan usulan PIWK dan 12 (dua belas) usulan PIS. Sedangkan dari Pokok Pikiran (POKIR) Dewan Dinas Perhubungan Tahun 2024 tidak menerima usulan.

Dari 17 (tujuh belas) usulan tersebut, setelah melalui verifikasi PD terdapat 14 (empat belas) usulan yang secara teknis memenuhi syarat. Namun demikian meski secara teknis memuni syarat, semua usulan PIS tidak tidak bias diakomodir karena keterbatasan pagu anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024. Daftar usulan yang dapat terakomodir oleh Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagaimana table 2.5 di bawah.

Tabel 2.5
Usulan Kegiatan PIWK Terakomodir Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penyediaan Perleng- kapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Perleng- kapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Terpasangnya cermin tikung	songbanyu I, rt 02 rw 02 songbanyu, girisubo, gunungkidul bandung, songbanyu, girisubo, gunungkidul, Kab. Gunungkidul	2 unit	12.000.000
		Terpasangnya pagar pengaman jalan/guardrail	Ruas Jalan Nomor 1607 Sp. Songbanyu - Paranggupito, songbanyu II, RT 02 RW 03, Songbanyu, girisubo	24 meter	36.000.000
		Terpasangnya warning light	Ruas Jalan Nomor 1607 Sp. Songbanyu - Paranggupito, songbanyu II, Songbanyu, girisubo	1 unit	40.000.000
		Terpasangnya warning light	Munggur,003/002, Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak	1 unit	40.000.000
		Terpasangnya cermin tikung	Betoro Kidul ruas jalan ponjong- karangasem no 1008dan Jati ruas jalan ps bedoyo-sp 4 kenteng, Kab. Gunungkidul	1 unit	6.000.000
JUMLAH					154.000.000

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Kesesuaian indikasi tema pembangunan Nasional, DIY, maupun Gunungkidul sangatlah penting dalam mewujudkan tercapainya pembangunan tahun 2024. Adapun indikasi Tema Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2024 adalah:

”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”

dengan tujuh agenda pembangunan yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskina ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
7. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan umum nasional sektor Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan konektivitas sistem transportasi darat;
2. Keterpaduan antarmoda pendukung logistik nasional;
3. Revitalisasi sistem transportasi perkotaan;
4. Penerapan kebijakan keselamatan LLAJ;
5. Penguatan sistem pengendalian keselamatan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (TSDP);
6. Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat;
7. Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional.

Kemudian berdasarkan isu strategis propinsi, maka indikasi tema pembangunan DIY tahun 2024 adalah "Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan" dengan prioritas:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan antar kelas social dan antar wilayah;
5. Penanggulangan atau penguatan good government pada berbagai tingkatan;
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tentram

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah:

"Optimalisasi ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan taraf hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia"

Yang dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi;
2. Penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim, dan penanganan stunting;
3. Ketahanan pangan;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana;
6. Ketentraman dan ketertiban;
7. Reformasi birokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Sasaran PD dirumuskan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas

pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2024 sebagaimana telah disajikan dalam Rancangan RKPD Tahun 2024.

Dalam prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan tahun 2024, secara langsung Dinas Perhubungan mendukung pencapaian prioritas daerah *Infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana*. Alur prioritas daerah sampai indikator sasaran perangkat daerah yang menjadi sasaran utama Dinas Perhubungan disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH (OUT COME)	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD (OUTCOME)
3	Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks infrastruktur daerah	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Selain sasaran utama perangkat daerah yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat sasaran perangkat daerah lainnya yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dalam tabel 3.2

Tabel 3.2
Prioritas dan Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD (OUTCOME)
2	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD

Tujuan perangkat daerah sampai kedalam indikator tujuan perangkat daerah beserta target kinerjanya pada tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Tujuan Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PD TAHUN 2024
1	Terwujudnya ketersediaan layanan perhubungan tahun 2026	Persentase ketersediaan layanan perhubungan	61,68%

Sedangkan sasaran perangkat daerah, indikator sasaran perangkat daerah beserta target kinerjanya pada tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Sasaran Dinas Perhubungan

NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD TAHUN 2024
1	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	61,68%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,50

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 368/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU Tahun 2024
1	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	61,68%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Hasil proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten, secara implementatif tertuang dalam rumusan rencana program dan kegiatan prioritas. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2024 ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, namun tetap diprioritaskan untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024 serta didorong untuk pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian sasaran dan prioritas daerah, pencapaian IKU (indikator kinerja utama), pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan wilayah miskin serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul termasuk salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah berupa retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal dan pemakaian kekayaan daerah, retribusi ijin trayek serta retribusi perparkiran. Pada tahun 2024 nilai retribusi ditargetkan sebesar Rp2.630.390.000,00 dengan uraian seperti tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Asli daerah Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Target Tahun 2024
4.1.2.01.05	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	326.680.000,00
4.1.2.02.02	Retribusi Terminal	44.500.000,00
4.1.2.02.01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	4.800.000,00
4.1.2.03.03	Retribusi Ijin Trayek	9.660.000,00
4.1.2.20.01	Pendapatan dari kerjasama pemungutan parkir	2.244.750,00
JUMLAH		2.630.390.000,00

Rumusan Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	3. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	1. Indeks Infrastruktur Daerah	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			1. Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	1. Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	61,68 persen	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			12.392.564.200	12.491.983.000	DISHUB
							Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		10.868.344.700	10.491.483.000	
								Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	0	60.000.000	
								Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.675.687.200	10.296.483.000	
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	0	25.000.000	
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	192.657.500	195.000.000	
								Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	37.769.000	348.500.000	DISHUB
								Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	36.796.000	58.500.000	
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	973.000	290.000.000	
								Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	593.410.000	660.000.000	DISHUB
								Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	593.410.000	660.000.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		257.863.000	430.000.000	DISHUB
							Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor		498.000	22.000.000	
							Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		121.455.000	240.000.000	
							Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		113.400.000	127.500.000	
							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		22.510.000,	40.500.000	
							Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		494.340.000	415.000.000	DISHUB
							Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0	0	
							Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0	66.200.000	
							Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		494.340.000	326.800.000	
							Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		0	22.000.000	
							Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		113.090.000	97.000.000	DISHUB
							Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		113.090.000	97.000.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		27.747.500	50.000.000	DISHUB
								Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	690.000	40.000.000	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	27.057.500	10.000.000	
					2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			2.229.568.000	0	DISHUB
							Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		0	0	
							Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul		377.650.000	0	
							Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kars Gunung Sewu		1.851.918.000	0	
Total									14.622.132.200	20.596.860.867	

Sedangkan rumusan program/kegiatan pendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju (2025)	SKPD
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.535.156.225	8,338,984,067	DISHUB
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.412.500	77.198.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.775.597.925	6,295.695.867	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	1,400,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.353.000	6,750,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000	52.824.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.423.000	663.700.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	20,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.074.800	199.420.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.265.000	787,890,000	

Setelah melalui proses dan tahap penyelarasan dengan kebijakan pemerintah daerah yang terkait penganggaran serta kemampuan pendanaan daerah. Pagu indikatif Dinas Perhubungan yang semula direncanakan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 6.771.622.668,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) mengalami penyesuaian. Pagu indikatif Dinas Perhubungan ditetapkan sebesar Rp18.157.288.425,00 (Delapan belas miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang dijabarkan dalam 3 program, 17 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan adanya tambahan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan, sebagaimana diuraikan pada tabel 4.4 di bawah.

Tabel 4.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UJUM DAN PENATAAN RUANG				2.229.568.000,00				0,00
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				2.229.568.000,00				0,00
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik (%)		60					
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				2.229.568.000,00				-
1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				377.650.000,00				-
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	6				0,00	
		Belanja Operasional (Tahun)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	4.250.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Kebutuhan sarana dan prasarana jalan di SRS Pantai Selatan (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	189.400.000,00	Dana Keistimewaan DIY			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rambu Rambu Lalu Lintas (Unit)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	20	30.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Senter Kedip Lalu Lintas (Buah)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	35	7.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Traffic cone (Unit)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	100	72.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Water barrier (Unit)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	50	75.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1.851.918.000,00				-
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	10 dokumen				0.00	
		Belanja Operasional (Tahun)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	24.418.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Cermin tikungan (Unit)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	20	120.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Delimitator (Unit)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	250	120.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Guardrail (Meter)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	300	450.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Kajian kebutuhan sarana prasarana jalan di SRS Kars Gunungsewu lanjutan (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	42.500.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Marka jalan (M2)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	500	100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) (Unit)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	15	195.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Rambu Rambu Lalu Lintas (Unit)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	100	150.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Warning light (Unit)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	10	500.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			
		Water barrier (Buah)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	100	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2					15.927.720.425,00				20.479.817.067,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				15.927.720.425,00				20.479.817.067,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.535.156.225,00				7.987.834.067,00
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100					
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.412.500,00				77.198.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	31				31	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				53.487.500,00				67.215.500,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	6.00				6.00	
		Dokumen Perjanjian Kinerja (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen Perubahan ROPK (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen Renja PD (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen Renja Perubahan PD (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen ROPK (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (S/1 orang) (Hari)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	255		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (SMA/1 orang) (Hari)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	255		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				210.000,00				998.250,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1					
		Dokumen RKA (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				105.000,00				665.500,00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	1				1	
		Dokumen RKA Perubahan (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				310.000,00				665.000,00
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	1				1	
		Dokumen DPA (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				300.000,00				665.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	1				1	
		Dokumen DPPA (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00				4.659.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	18				18	
		Dokumen E monev (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen Laporan Tepra (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen LKjIP (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen LPPD PD (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00				2.329.250,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	3				3	
		Penyusunan SKM, penyusunan/ monev SOP dan SP (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	3		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.775.597.925,00				6.282.652.067,00
		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	46				46	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.763.597.925,00				6.269.608.267,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	574				574	
		Gaji ASN (Orang)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	574		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				650.000,00				2.329.250,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1				1	
		Dokumen laporan akhir tahun (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.350.000,00				10.714.550,00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	13				13	
		Dokumen laporan semesteran (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen SPJ bulanan (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00				1.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah dokumen administrasi BMD tersusun tepat waktu (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	15				15	
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00				400.000,00
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	1				1	
		Usulan RKBMD (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00				150.000,00
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	(Wonosari, Kec. Wonosari)	2				2	
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00				850.000,00
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	12				12	
		Laporan bulanan BMD (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.353.000,00				6.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah dokumen laporan pendapatan disusun tepat waktu (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12				12	
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.353.000,00				6.750.000,00
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12				12	
		Dokumen laporan SPJ pendapatan (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000,00				52.824.000,00
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	21				21	
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				30.000,00				3.327.500,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	16				16	
		Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	16		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00				1.996.500,00
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	2				4.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan SKP awal tahun dan penilaian SKP akhir tahun (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00				47.500.000,00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	0				25	
		Diklat pegawai (Orang)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				94.423.000,00				559.700.000,00
		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	54				54	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				156.000,00				10.000.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	4				4	
		Belanja alat Listrik/Penerangan (Paket)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				82.949.500,00				21.000.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	2				2	
		Alat Tulis Kantor (Bulan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Bahan Komputer (Bulan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Belanja Operasional (Tahun)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Kertas dan Cover (Bulan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Layar Proyektor Dinding Manual ukuran 84 in (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		PC Desktop CPU Tower Type 2 (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Thermohyrometer (Buah)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.257.500,00				80.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	4				4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00				1.200.000,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0				365	
		Langganan surat kabar kedaulatan rakyat (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00				10.000.000,00
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12				12	
		Makan minum snack tamu (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00				432.500.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0				12	
		Makan minum snack rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Musrenbang kecamatan (Orang)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				60.000,00				5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	4				4	
		Laporan Pengelolaan Arsip (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00				20.000.000,00
		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	3				1	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				0,00				10.000.000,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	71.00				1.00	
		Gorden (Buah)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Kursi Rapat (Buah)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Kursi tunggu terminal (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Semin, Kec. Semin)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Meja Rapat (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00				10.000.000,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0				2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan Kamar Mandi UPT PKB (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				229.074.800,00				199.420.000,00
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	65				65	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00				21.040.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0				12	
		Pengiriman surat (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.919.800,00				137.900.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	37				37	
		Langganan frekuensi radio (Tahun)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Tagihan air (1 rekening) (M3)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	2.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Tagihan listrik (5 rekening) (Bulan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tagihan telepon (3 rekening) (Bulan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				28.155.000,00				40.480.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	12				12	
		Peralatan kebersihan dan bahan kebersihan (Paket)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Tagihan retribusi sampah (Bulan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (Pramubakti/1 orang) (Hari)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	312		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				380.265.000,00				787.890.000,00
		Jumlah barnag milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	3				133	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				282.525.000,00				550.360.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	3				35.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2 (19 unit), 4 (10 unit), 6 (7 unit) (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Sopir Outsourcing (Tahun)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (Pengemudi/2 orang) (Hari)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	624		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				0,00				6.525.000,00
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0				60,00	
		Pemeliharaan meja dan kursi (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00				54.300.000,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0				62	
		Pemeliharaan HT, komputer dan laptop, LCD, mesin ketik, printer (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				97.740.000,00				162.955.000,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0				2,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan Eternit dan Atap (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Tenaga Kontrak dan THR (Petugas Keamanan/ 1 orang) (Bulan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (Petugas Keamanan/ 3 orang) (Hari)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	936		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00				13.750.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0				25.00	
		Pemeliharaan AC (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00				-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0				2	
		Pemeliharaan Halaman Dinas Perhubungan (M2)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				12.392.564.200,00				12.491.983.000,00
		Persentase Capaian Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Bidang Lalu Lintas (%)		9,50					
		Persentase Capaian Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Bidang Angkutan Dan Terminal (%)		66,55					
		Persentase Capaian Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Bidang Penerangan Jalan Umum Dan Perparkiran (%)		72,51					
		Persentase Capaian Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (%)		98,50					
2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				10.868.344.700,00				10.491.483.000,00
		Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota (Unit)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	720				667	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				10.675.687.200,00				10.296.483.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	(Kabupaten Gunungkidul, semua kecamatan dan semua keluaran, KAB. GUNUNGKIDUL)	29				708.00	
		Belanja Meterisasi APJ (Paket)	(Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan dan Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Belanja Operasional Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Tahun)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Belanja Operasional Penerangan Jalan Umum (Tahun)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Belanja Tiang Lampu Penerangan Jalan Oktagonal (Unit)	(Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan dan Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Cermin Tikung (Unit)	(Kabupaten Gunungkidul, Girisubo (2 unit PIWK), Pongjong (1 unit PIWK), Ngawen (3 unit PIS), Tepus (5 unit PIS), KAB. GUNUNGKIDUL)	3		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Delinator (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Tepus, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Guardrail (Meter)	(Kabupaten Gunungkidul, Girisubo, KAB. GUNUNGKIDUL)	24		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Tagihan Listrik PJU (Tahun)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Warning Light (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari Kepek (2 unit PIS), Girisubo (1 unit PIWK), dan Karangmojo (1 unit PIWK), KAB. GUNUNGKIDUL)	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekangan Jalan				192.657.500,00				195.000.000,00
		Jumlah Perlekangan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	23				3	
		Belanja Operasional Manajemen Rekaya Lalu Lintas (Tahun)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Belanja Operasional Penerangan Jalan Umum (Tahun)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Pemeliharaan Perlekangan Jalan dan ATCS CCRoom (Paket)	(Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Pemeliharaan PJU (Paket)	(Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (SMA/1Orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	255		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR Penerangan Jalan Umum (SMA/ 4 Orang) (Hari)	(Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	1.248		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				37.769.000,00				348.500.000,00
		Jumlah pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi Terminal Tipe C Semin (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Semin, Semin, Kec. Semin)	13				10	
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				37.769.000,00				58.500.000,00
		Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	(Terminal Tipe C Semin, Semin, Kec. Semin)	4				5.00	
		Alat Pemadam Kebakaran 6 Kg (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Semin, Semin, Kec. Semin)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Karcis Retribusi Terminal (Buku)	(Kab. Gunungkidul, Semin, Semin, Kec. Semin)	407		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Tanda Setor Retribusi Terminal (Buku)	(Kab. Gunungkidul, Semin, Semin, Kec. Semin)	40		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Belanja Operasional Terminal Tipe C Semin (Tahun)	(Terminal Tipe C Semin, KAB. GUNUNGKIDUL)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (SMA / 1 Orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	312		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				973.000,00				290.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara (Unit)	(Terminal Tipe C Semin, Semin)	1				8.00	
		Belanja Operasional Terminal Tipe C Semin (Tahun)	(Terminal Tipe C Semin, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Papan nama terminal (Buah)	(Kab. Gunungkidul, Semin, Semin)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				593.410.000,00				660.000.000,00
		Jumlah dokumen penerbitan ijin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	22				22	
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				593.410.000,00		Upah pungut retribusi parkir belum dinggarkan sepenuhnya		660.000.000,00
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	14				22.00	
		Belanja Operasional Perparkiran (Tahun)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cetak Surat Tanda Setoran (STS) (Buku)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Karcis Retribusi Parkir (Buku)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	4.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Pemeliharaan Lokasi Parkir di Pantai Wediombo (Paket)	(Kab. Gunungkidul, Girisubo, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR Perparkiran (D3 / 1 Orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	255		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR Perparkiran (SMA / 1 Orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	255		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Upah Pungut Retribusi Parkir (Tahun)	(Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan, dan Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				257.863.000,00				430.000.000,00
		Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	15				11	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				498.000,00				22.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	0				4.00	
		Belanja Operasional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (Tahun)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OBD2 Scanner Full 10 Modes functions (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Pakaian Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (Setel)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Tablet Input Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor				121.455.000,00				240.000.000,00
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	5162				7875,00	
		Belanja Operasional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (Tahun)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (D2 / 4 Orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1.020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (Pramubakti / 1 Orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	255		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (S1 / 1 Orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	255		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (SMA / 2 Orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (Tenaga Keamanan / 1 Orang) (Hari)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	312		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	5162	113.400.000,00				127.500.000,00
		Smartcard Hasil Uji Kendaraan Bermotor (Set)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	3.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.00	
		Tenaga Kontrak dan THR (Bulan)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	9	22.510.000,00			10	40.500.000,00
		Beban Jasa Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	9		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Belanja Operasional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (Tahun)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Pemeliharaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor (Tahun)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				494.340.000,00				415.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (Dokumen)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	22				23	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				494.340.000,00				326.800.000,00
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	12.00				12.00	
		Belanja Operasional (Tahun)	(Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan dan Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Makan dan Minum Pam Lebaran, Natal dan Tahun Baru (Kali)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Sepatu Lalu Lintas Laras Panjang khusus Dalops (Buah)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Sewa Tenda Perlengkapan Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru Dalops (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		SPPD Yustisi Penerbitan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Hari)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (SI/1 Orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		THL dan THR (SMA/14 Orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGIDUL)	4.848		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Uang lelah petugas P3K/jaga posko (Kali)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGGIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0,00				66.200.000,00
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGIDUL)	0				26,00	
		Belanja Operasional Dalops (Tahun)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Rakor dan Penerbitan Lintas Kabupaten (Bulan)	(Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan dan Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGGIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Sosialisasi Hibauan Keselamatan LLAJ (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan dan Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGGIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0,00				22.000.000,00
		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	(Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan dan Semua Kalurahan, KAB. GUNUNGGIDUL)	0				2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Forum LLAJ (Kali)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	3	113.090.000,00			3	97.000.000,00
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	113.090.000,00			3.00	97.000.000,00
		Belanja Operasional Angkutan (Tahun)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Kartu Penumpang Bus Sekolah (Buku)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (SMA/4 orang) (Hari)	(Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1.248		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	9	27.747.500,00			8	50.000.000,00
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				690.000,00				10.000.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	2				2	
		Belanja Operasional Angkutan (Tahun)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	1	7.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Souvenir Bus Sekolah (Buah)	(Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan, Wonosari, Kec. Wonosari)	0	9.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				27.057.500,00				40.000.000,00
		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	12				7,00	
		Belanja Operasional (Tahun)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL dan THR (SI/1 Orang) (Hari)	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	255		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		JUMLAH		18.157.288.425,00					20.479.817.067,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap. mental. semangat. kejujuran. disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*). tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan. mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan. dengan target-target tertentu. dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut. diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya. dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan. sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen. konsistensi. disiplin. kerja keras. semangat. dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Perhubungan mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran perangkat daerah tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan. pedoman. dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS PERHUBUNGAN,

RAKHMADIAN WIJAYANTO

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Pasal 201 ayat (7), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 menjabat sampai tahun 2024. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa masa berlaku RPJMD menyesuaikan ketentuan tersebut. Namun, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, disampaikan bahwa periode RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Hal ini tentunya juga berpengaruh dalam penentuan arah kebijakan pembangunan tahunan dalam periode tersebut, yang diawali pada tahun 2022.

Rencana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Dalam RKPD Tahun 2024 diatur tentang arah dan kebijakan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024.

Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan ada keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan PD.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2023 sebagai bahan evaluasi kinerja.

Dampak Pandemi COVID -19 diperkirakan juga masih akan dirasakan pada tahun 2024, sehingga penyusunan Renja-PD juga harus dirancang untuk dapat memastikan pemulihan kondisi daerah pasca pandemi.

Dokumen Renja-PD ini, selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan dalam pelayanan masyarakat tahun 2024, serta menjadi dasar penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2024. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen Renja-PD akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD tahun anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2024 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 052/5969 tanggal 7 November 2022 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di jabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;

3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2024;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah serta Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 052/5969 tanggal 7 November 2022 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu- isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022, pada tahun 2022 dari APBD Kabupaten Gunungkidul, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 21.695.429.084,00 (Dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah), yang dijabarkan dalam 5 program 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Tahun 2024 melanjutkan menggunakan nomenklatur program kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Kominfo mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 16.854.879.755,00 untuk melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 54 sub kegiatan.

Realisasi anggaran dan kinerja tahun lalu/Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian tahun berjalan/Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Sub Kegiatan sd th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
2.16.01	URUSAN WAJIB									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran; Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas; Persentase kesesuaian program dalam renja PD terhadap RKPD dan renstra PD terhadap RPJMD, Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu, Nilai IKM	100 %	81,67%	4.070.000.706	3.128.732.637	76,87 %	100%	100%	100
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	8.610.000	100	8.500.000	98,72	100%	27 Dokumen	100
2.16.01.2.0.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Renja PD tahun 2022; Jumlah Dokumen Renja Perubahan PD tahun 2021; Jumlah Dokumen Perubahan Renstra th 2021-2026; jumlah forum PD;	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 kali	5.360.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 kali	5.250.000	97,95		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 kali	100
2.16.01.2.0.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	100		1 Dokumen	100

2.16.01.2.06.0 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah barang hasil penggandaan/fotocopy	24 bulan	8.400.000	24 bulan	7.860.000	93,57	24 bulan	100
		Jumlah tagihan surat kabar dibayar (2 surat kabar nasional x 12 bulan)	60 bulan		60 bulan			60 bulan	
2.16.01.2.06.0 8	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah belanja jamuan rapat minum dan snack	11	4.460.000	11	4.460.000	100	11	100
		Jumlah belanja jamuan tamu	145		145			145	
2.16.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	102 oh	213.910.000	85 oh	192.659.837	90,07	4 oh 102 oh	100
		Jumlah minum snack tersedia untuk rapat	870 oh		870 oh			870 oh	
		Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	18		18			18 oh	
'2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 jenis						
'2.16.01.2.07, 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Alat Pemadam Api Ringan Terbeli	1 unit	2.800.000	1 unit	2.780.000	99,29	1 unit	100
2.16.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	5 jenis						100
2.16.01.2.08.0 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim lewat pos	0	0	0	0	0	0	100
2.16.01.2.08.0 2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa tagihan pemeliharaan air yang terbayarkan (3 rekening x 12 bulan)	36 bulan	308.379.122	36 bulan	283.473.262	91,92	36 bulan	100
		Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan pemakaian listrik yang terbayarkan (7 rekening x 12 bulan)	84 bulan		84 bulan			84 bulan	
		Jumlah jasa tagihan pemeliharaan telepon yang terbayarkan (2 rekening x 12 bulan)	24 bulan		24 bulan			24 bulan	

2.16.01.2.08.0 4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa kebersihan dibayar	3 termin	116.405.000	3 termin	116.146.500	99,78		3 termin	100
2.16.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	15 jenis	271.250.000	86,95	265.835.291	98,00		15 jenis	100
2.16.01.2.09.0 2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau laporan	Jumlah jasa KIR terbayar Jumlah kendaraan roda 2 yang terbayar pajaknya Jumlah kendaraan roda 4 yang terbayar pajaknya Jumlah mobil dinas yang terpelihara Jumlah motor/dinas yang terpelihara	1 unit 13 unit 6 unit 6 unit 13 unit	161.200.000	1 unit 13 unit 6 unit 6 unit 13 unit	158.302.000	98,20		1 unit 13 unit 6 unit 6 unit 13 unit	100
2.16.01.2.09.0 5	Pemeliharaan mebel	Jumlah meja kantor yang terpelihara Jumlah kursi kantor yang terpelihara Jumlah rak buku yang terpelihara	0 unit 0 unit 0 unit	0	0 unit 0 unit 0 unit	0	0		0 unit 0 unit 0 unit	100
2.16.01.2.09.0 6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Genset pusat Data yang terfasilitasi Jumlah computer yang terfasilitasi Jumlah laptop yang terfasilitasi Jumlah printer yang terfasilitasi Jumlah pemeliharaannya	1 unit 3 unit 3 unit 3 unit	37.800.000	1 unit 3 unit 3 unit 3 unit	36.610.050	96,85		1 unit 3 unit 3 unit 3 unit	100
2.16.01.2.09.0 9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung Pusat Data	1 paket	66.250.000	1 paket	65.922.401	99,51		1 paket	100

2.16.01.2.09.1 0	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharannya	6 unit	6.000.000	6 unit	5.000.000	83,33	6 unit	100
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah layanan Penataan Organisasi	4 jenis	2.000.000	30%	1.940.000	97,00	4 jenis	100
2.16.01.2.13.0 2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monev SOP Jumlah Dokumen Monev Standar Pelayanan Jumlah dokumen Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian/SPIP	1 dokumen 1 dokumen 2 Dokumen 1 dokumen	2.000.000	1 dokumen 1 dokumen 2 Dokumen 1 dokumen	1.940.000	97,00	1 dokumen 1 dokumen 2 Dokumen 1 dokumen	100
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan penyebaran informasi publik	62,21%	6.008.147.500	98,90 %	5.827.987.353	97,00		100
2.16.02.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah Pembuatan konten kreatif sosialisasi kebijakan program pemerintah Jumlah sosialisasi kebijakan dan program pemerintah	1 paket 4 kali	309.020.000	1 paket 4 kali	308.287.400	99,76	1 paket 4 kali	100
2.16.02.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah cetak majalah Dhaksinarga Jumlah Jasa pembuatan video konten Pertunjukan Rakyat Jumlah Jasa Promosi acara Pembuatan konten kreatif dhaksinarga TV Jumlah Sosialisasi live streaming lewat youtube Jumlah penulisan artikel tersusun Jumlah konsultasi penyusunan DED Videotron Jumlah Pengawasan Kontruksi Pemasangan Videotron Pengadaan Videotron Pengadaan Digital Signage Pengadaan konstruksi videotron	1000 eksemplar 1 paket 20 kali 4 kali 6 kali 1 buku 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	3.130.017.500	1000 eksemplar 1 paket 20 kali 4 kali 6 kali 1 buku 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	3.005.795.453	96,03	1000 eksemplar 1 paket 20 kali 4 kali 6 kali 1 buku 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	

					1 paket 1 paket 1 paket 1 paket					1 paket 1 paket 1 paket 1 paket											
2.16.02.01.06	Pelayanan informasi publik		Jumlah Promosi Media Sosial Jumlah Monitoring dan evaluasi keterbukaan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 unit 1 Ls 7 kali	120.670.000				116.970.000	1 Ls 5 kali		96,93			1 Ls 7 kali						100
2.16.02.07	Layanan Hubungan Media		Jumlah iklan media cetak online Jumlah Jasa Konsultasi Perencanaan Branding Pembangunan Daerah Jumlah Jumpa pers terselenggara Jumlah Pengadaan Belanja Jasa Branding Pembangunan Daerah Jumlah Peningkatan Kapasitas Jurnalis Jumlah publikasi melalui media cetak/elektronik Jumlah publikasi melalui spanduk/baliho/media luar ruang	1 Ls 1 paket 6 kali 1 paket 1 Ls 1 Ls	2.448.440.000				2.396.934.500	1 Ls 1 paket 6 kali 1 paket 1 Ls 1 Ls		97,90			1 Ls 1 paket 6 kali 1 paket 1 Ls 1 Ls						100
2.16.03	Program Aplikasi Informatika		Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika	87%	10.552.520.878				10.475.578.952	48,64 %		99,27									
2.16.03.2.01.02	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		Jumlah layanan domain dan sub domain serta pemeliharaan jaringan komunikasi	6 jenis	10.552.520.878				10.475.578.952	48,64 %		99,27			6 jenis						100
	Penataaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota		Perpanjangan domain dan sub domain (144 cesa)	144 Kalurahan	10.000.000				7.920.000	144 Kalurahan		79,20			144 Kalurahan						100

2.16.03.2.01.0 3	Penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah	Aktivasi Tiik Baru wilayah Kapanewon Ponjong Aktivasi Tiik Baru wilayah Kapanewon Girisubo Aktivasi Tiik Baru wilayah Kapanewon Tepus Aktivasi Tiik Baru wilayah Kapanewon Panggang Belanja bandwidth backbone (3 titik, 18 kapanewon, upt area timur 10 titik, upt area utara 8 titik, obyek wisata 6 titik) Belanja Bandwidth Primer Pusat Data Belanja Bandwidth Upt Area barat (18 titik) Belanja secondary pusat data, kamera pemantau jalan, area perbatasan	3 titik 2 titik 2 titik 2 titik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	10.542.520.878	3 titik 2 titik 2 titik 12 bulan	10.467.658.952	99,29	3 titik 2 titik 2 titik 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	6 jenis	827.320.000	92,82%	821.497.550	99,30	6 jenis	100
2.16.03.2.02.0 3	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Jumlah Layanan Zoom Meeting Belanja Lisensi Firewall Belanja UPS Server Lisensi SSL Perawatan PAC Pusat Data	1 tahun 1 tahun 2 unit 1 tahun 2 unit	549.320.000	1 tahun 1 tahun 2 unit 1 tahun 2 unit	545.071.050	99,23	1 tahun 1 tahun 2 unit 1 tahun 2 unit	100
2.16.03.2.02.0 4	Penyelenggaraan system komunikasi intra pemerintah daerah	Monev penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	201 titik	33.000.000	133 titik	31.460.000	95,33	201 titik	100
2.16.03.2.02.0 9	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Rakor Pelaksanaan Smart City	1 Ls	20.000.000	1 Ls	20.000.000	100	1 Ls	100

2.16.03.2.02.1 0	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pelatihan TIK	1 kali		225.000.000	1 kali	224.966.500	99,99		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan	95 %		46.325.000	20%	56.625.000	97,92		
2.20.02	Penyelenggaraan statistic sectoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan Penyelenggaraan statistic sectoral di lingkup daerah kabupaten/kota	6 jenis		60.280.000	104,24 %	56.625.000	97,92	8 jenis	100
'2,20,02,2,01,01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diseminasi Data geospasial Expose data geospasial Expose data statistic sektoral Jumlah diseminasi data statistik sektoral Publikasi Data Statistik dan data geospasial	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali		35.280.000	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali	35.280.000	100	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali	100
'2,20,02,2,01,02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Peningkatan Kapasitas SDM	2 kali		25.000.000	2 kali	21.345.000	94,66		100
'2,21,02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi	75 %		128.960.000	100 %	152.850.525	88,71		100
'2,21,02,2,01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5 jenis		173.3100.000	96,36	18.515.925	74,06	5 jenis	100
'2,21,02,2,01,02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peningkatan kapasitas petugas jaringan pengamanan persandian bagi ASN	1 kali		25.000.000	1 kali	18.515.925	94,83	1 kali	100
'2,21,02,2,01,03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik	Pendampingan pemanfaatan sertifikat elektronik	1 kali		12.000.000	1 kali	11.379.600	94,83	1 kali	100
'2,21,02,2,01,04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Computer Security Insiden Response Team (CSIRT) IT Security Assement	2 kali 2 kali		135.310.000	2 kali 2 kali	122.955.000	90,87	2 kali 2 kali	100

			Operasi siaga kontra penginderaan/counter surveillance/sterilisasi ruang kerja pimpinan daerah Pengamanan Signal Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) relay dan Mail Gateway	2 kali 4 kali 1 kali		2 kali 4 kali 1 kali				2 kali 4 kali 1 kali					
'2,21,02,2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah layanan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 jenis	7.300.000	100%	6.475.000	88,70 %		1 jenis	100				
'2,21,02,2.02	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pertemuan forum komunikasi sandi (FORKOMSANDA)	2 kali	7.300.000	2 kali	6.475.000	88,70 %		2 kali	100				
JUMLAH					21.695.429.084		21.270.204.082	98,04							

Dari tabel 2.1 di atas terlihat capaian tingkat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 mencapai 98,04 %. Sebagian besar target kinerja kegiatan tahun 2022 sudah terlaksana dengan baik. Capaian kinerja kegiatan pada tahun 2022 yang realisasi target kinerjanya sesuai target 100 % ada 3 kegiatan, 10 kegiatan yang belum/ tidak memenuhi target, karena *refocusing* akibat Pandemi COVID 19 dan tidak ada kegiatan yang melebihi target.

Kegiatan yang telah tercapai/sesuai targetnya, yaitu sampai 100 % adalah :

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Penataan Organisasi
3. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan yang realisasinya mencapai target 100% atau memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan keuangan maupun fisik yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan secara berkala sehingga bisa diantisipasi hal-hal yang menghambat pencapaian kinerja.

Kegiatan yang belum memenuhi targetnya :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Penyelenggaraan Statistik Sektorial di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan yang telah melebihi target.

Di Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja dari target kinerja tidak ada.

Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/kegiatan dari target yang direncanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan pada umumnya karena keterbatasan anggaran untuk melakukan inovasi terhadap pelayanan publik;
2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena pada tahun berjalan program/kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Tahun 2024 untuk indikator kinerja dengan menggunakan nomenklatur program kegiatan yang baru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar dinas.

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan.

Langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan untuk pencapaian target kinerja Tahun 2024 antara lain adalah :

1. Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan memaksimalkan keluaran dan hasil (output dan outcome) dengan masukan (input) yang tersedia. Program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk memecahkan isu dan masalah strategis yang dihadapi;
2. Optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Teknik Informatika, pembinaan jaringan komunikasi data dan informatika serta pembinaan dan penyelenggaraan TIK;
3. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarannya;
4. Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi agar semua program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 sebagian besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun 2021, sebagian lagi merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Gunungkidul sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, Dinas Komunikasi dan Informatika diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan PD disampaikan IKU (indikator kinerja utama), SPM (Standar Pelayanan Minimal), MDGs (*millennium development goals*) dan IKK (indikator kinerja kunci) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)												
1	Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika	Persen	83,62	85,84	42,87	55,28	91,80	60	69,26				
B	SPM (Standart Pelayanan Minimal)												
B.1	BIDANG KOMINFO												
	<i>Pelaksanaan Dimensi dan Pendistribusian Informasi Nasional :</i>												
12	a. Media Massa (kali/tahun)	12 x /tahun	-	-	-	-	12	12	-	-	-		
	- Majalah						1	1	1	1	1		
	- Radio						12	12	12	12	12		
	- Televisi												
13	b. Media Website/media Online (hari/tahun)	setiap hari	-	-	-	-	365	365	-	-	-		
14	c. Media Tradisional seperti pertunjukan rakyat (Kali/tahun)	12 x /tahun	-	-	-	-	6	10	-	-	-		
15	d. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12 x /tahun	-	-	-	-	-	4	-	-	-		
16	e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan balibo	12 x /tahun	-	-	-	-	-	14	-	-	-		
17	Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	50%	-	-	-	-	9	10	-	-	-		

	a. Jumlah Kecamatan yang memiliki KIM		-	-	-	-	-	-	10	-	-	
	b. Jumlah Kecamatan di kabupaten		18	18	18	18	18	18	18	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C	IKK (Indikator Kerja Kunci)											
C.1	Kominfo											
1	Website milik Pemerintah Daerah		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	
C.2	Statistik											
1	Penyusunan buku "kabupaten dalam angka"		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	
	Penyusunan buku "PDRB kabupaten"		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	

Dari tabel 2.2 di atas terlihat bahwa target Renstra untuk indikator kinerja pelayanan khususnya SPM (standar pelayanan minimal) kosong (kolom 4-8), karena dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 tidak ditetapkan targetnya. Hal ini dikarenakan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, terdapat perubahan tentang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang terkait dengan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, sedangkan komunikasi dan informatika masuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 tidak ditetapkan targetnya. Namun demikian, karena petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum terbit, sesuai kesepakatan dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah DIY, penyusunan evaluasi pelaksanaan SPM masih mengacu pada undang-undang lama dengan tetap melaporkan 15 bidang urusan SPM termasuk didalamnya bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga capaiannya tetap dievaluasi dan dilaporkan sampai tahun 2018.

Untuk indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) telah berhasil dilaksanakan dengan capaian sampai Tahun 2022 seperti terlihat kolom (12) tabel 2.2 di atas. Tahun 2022 capaian IKU sebesar 91,80 dari target 87,78 atau sebesar 121,44%. Penerimaan tersebut didukung oleh realisasi persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif (230,04%). Dari target 9 OPD terealisasi 47 OPD yang aktif, hal ini disebabkan adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja yang mencantumkan jumlah *posting* (unggah) berita dalam *website* Perangkat Daerah termasuk salah satu unsur untuk penilaian capaian kinerja. serta penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan komunikasi dan informatika telah tersedia dengan baik.

Kinerja tahun 2022 meningkat sebanyak 12,84% dari tahun 2021 yang kinerjanya mencapai 78,96%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 wabah Pandemi COVID - 19 masih terjadi sampai dengan saat ini meskipun sudah mengalami penurunan akan tetapi masih berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah. Pandemi COVID - 19 yang terjadi saat ini yang masih membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat *social distancing* dan *physical distancing*, menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan, diantaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah serta pada pelayanan keamanan informasi. Kondisi tersebut semua membutuhkan internet dan infrastruktur telekomunikasi. Adanya sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses kegiatan seluruh OPD dengan kebiasaan baru tersebut mengakibatkan kinerja Dinas Kominfo pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding 2021.

Sedangkan IKK (indikator kinerja kunci) capaian sampai dengan Tahun 2021 seperti terlihat pada kolom 10 tabel 2.2 di atas.

Dari tabel 2.2 di atas terlihat bahwa target Renstra untuk indikator kinerja pelayanan khususnya SPM (standar pelayanan minimal) kosong (kolom 4-8), karena dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 tidak ditetapkan targetnya. Hal ini dikarenakan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, terdapat perubahan tentang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang

terkait dengan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, sedangkan komunikasi dan informatika masuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 tidak ditetapkan targetnya. Namun demikian, karena petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum terbit, sesuai kesepakatan dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah DIY, penyusunan evaluasi pelaksanaan SPM masih mengacu pada undang-undang lama dengan tetap melaporkan 15 bidang urusan SPM termasuk didalamnya bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga capaiannya tetap dievaluasi dan dilaporkan sampai tahun 2018.

Untuk indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) telah berhasil dilaksanakan dengan capaian sampai Tahun 2022 seperti terlihat kolom (12) tabel 2.2 di atas. Tahun 2022 capaian IKU sebesar 91,80 dari target 87,78 atau sebesar 121,44%. Penerimaan tersebut didukung oleh realisasi persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif (230,04%). Dari target 9 OPD terealisasi 47 OPD yang aktif, hal ini disebabkan adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja yang mencantumkan jumlah *posting* (unggahan) berita dalam *website* Perangkat Daerah termasuk salah satu unsur untuk penilaian capaian kinerja. serta penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan komunikasi dan informatika telah tersedia dengan baik.

Kinerja tahun 2022 meningkat sebanyak 12,84% dari tahun 2021 yang kinerjanya mencapai 78,96%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 wabah Pandemi COVID - 19 masih terjadi sampai dengan saat ini meskipun sudah mengalami penurunan akan tetapi masih berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah. Pandemi COVID - 19 yang terjadi saat ini yang masih membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat *social distancing* dan *physical distancing*, menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan, diantaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah serta pada pelayanan keamanan informasi. Kondisi tersebut semua membutuhkan internet dan infrastruktur telekomunikasi. Adanya sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses kegiatan seluruh OPD dengan kebiasaan baru tersebut mengakibatkan kinerja Dinas Kominfo pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding 2021.

Sedangkan IKK (indikator kinerja kunci) capaian sampai dengan Tahun 2021 seperti terlihat pada kolom 10 tabel 2.2 di atas.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kemudian menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini kemudian diikuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Secara umum, Dinas Kominfo mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Dalam mengemban tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul mempunyai peluang dan tantangan yang terkait faktor eksternal.

Peluang yang ada antara lain: 1. tersedianya media informasi dan komunikasi, 2. Kebutuhan pengembangan e-Government, 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Di samping itu dengan semakin terkenalnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata nasional, membuka peluang untuk terus meningkatkan sarana prasarana akses menuju obyek wisata dengan penyediaan jaringan komunikasi baik berupa konstruksi untuk membangun, meningkatkan pengelolaan maupun pemeliharaan, menambah kekuatan daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi dan informatika.

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang disebabkan antara lain PPID Pembantu belum bersertifikat serta belum adanya sistem elektronik yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik dan menilai kinerja penyelenggara layanan informasi publik;
- 3) Belum optimalnya publikasi dan informasi untuk mengekspos program prioritas pemerintah dan potensi daerah;
- 4) Pemanfaatan media luar ruang masih kurang;
- 5) Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK;
- 6) Masih terbatasnya sumberdaya komunikasi dan informatika; dan
- 7) Masih ada beberapa wilayah blank spot yang memerlukan perhatian khusus agar masyarakat di wilayah tersebut segera mendapatkan akses telekomunikasi

Urusan Statistik

- 1) Belum adanya SDM yang kompeten (sarjana statistik) di Perangkat Daerah;
- 2) Standar data dan metadata belum sepenuhnya dipahami oleh SDM di semua Perangkat Daerah;
- 3) Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral.

Urusan Persandian

- 1) Standar keamanan informasi belum diterapkan di semua Perangkat Daerah;
- 2) Sarana dan prasarana persandian masih terbatas;
- 3) Kepedulian terhadap keamanan informasi di semua Perangkat Daerah masih kurang;
- 4) Keterbatasan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan; dan
- 5) Belum tersedianya sistem pengamanan jaringan.

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada, serta berdasarkan pencapaian selama ini, maka peluang dan tantangan yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika kedepan adalah:

1. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mengembangkan Sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
3. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi
4. Peningkatan jaminan keamanan informasi guna meningkatkan pengamanan

data dan membantu fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi, maka dilaksanakan pengelolaan persandian dan keamanan informasi.

5. Penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, Pemerintah Daerah, dan Instansi Vertikal.

Berdasarkan visi Kepala Daerah yang dirumuskan kedalam visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat.
2. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
3. Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Dari rumusan visi tersebut, kemudian dirumuskan misi pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis 2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah tidak lagi menetapkan Visi dan Misi organisasi. Kedudukan Perangkat Daerah adalah dalam rangka mensukseskan pencapaian Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian misi tersebut adalah secara langsung mendukung misi ke 2, yaitu Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam membangun konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kondisi jalan dan jembatan, sarana prasarana transportasi dan telekomunikasi dalam rangka percepatan pembangunan dan dukungan bagi pengembangan potensi pariwisata, serta penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berupa air bersih, irigasi dan sanitasi yang merata di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan menggunakan nomenklatur program kegiatan yang baru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika merencanakan untuk melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan pagu indikatif

sebesar Rp 16.854.879.755,- (Enam belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang disesuaikan dengan tahun ketiga periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Namun demikian berdasarkan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja PD tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja PD tahun 2023 menyebabkan indikator output beberapa kegiatan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2024 mengalami perubahan. Usulan tersebut selanjutnya akan diselaraskan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Usulan ini kemudian diselaraskan pula dengan usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang lain dalam Forum PD. Selama proses yang berlangsung serta berdasarkan analisis kebutuhan terhadap isu-isu strategis dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dimungkinkan akan terjadi perubahan terhadap rancangan awal rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam perubahan tersebut terjadi penambahan alokasi anggaran ataupun output pada kegiatan yang sudah ada. Penambahan, pengurangan, ataupun penyesuaian anggaran dan target kinerja kegiatan sebagai hasil proses yang dialami dalam penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika hingga selesainya kegiatan Musrenbang Kabupaten.

Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan tahun 2024, beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan antara lain: 1. Penyusunan program kegiatan beserta indikator kinerjanya mengedepankan pada prinsip "*money follow program*" untuk mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target-target RPJMD, kebijakan umum Bupati maupun Renstra PD; 2. Program kegiatan diarahkan pada pencapaian target RPJMD/IKU Daerah dan target Renstra PD/IKU PD pada tahun 2023; 3. Kemampuan anggaran yang terbatas, yang sebagian anggaran akan dialokasikan untuk penanganan COVID - 19.

Pada tahun 2024 semua program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Awal RKPD.

Penjabaran program kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024 serta hasil analisa kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
 Reviu terhadap Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan/ Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	100 persen	5.273.229.755	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	100 persen	2.686.073.994	
1)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			17.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			5.424.000	
(1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33 dokumen	10.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.000.000	
(2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	247.000	
(3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	90.000	

1					5	6	7	8	9	10	11	12
(4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	247.000		
(5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	90.000		
(6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 dokumen	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	1.000.000		
(7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	750.000		
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			3.535.826.755	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			1.871.740.194		
(8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 orang	3.526.251.755	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	446 orang	1.864.540.194		

(9)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.200.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	7.657.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	6.000.000	
3)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			2.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			0	
(11)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	4.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	
4)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			316.600.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			56.602.600	
(12)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	500.000	
(13)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	45.430.600	
(14)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang di	2 paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang di	0 paket	0	

(15)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 dokumen	17.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	9.000.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(16)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	9.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Paket	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 dokumen	8.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	
(17)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen	226.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30,672,000	
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo			56.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo			0	
(18)	Pengadaan Mebel	Dinas Kominfo	Jumlah Pengadaan Mebel	25 unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Kominfo	Jumlah Pengadaan Mebel	0 unit	0	
(19)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	11.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0 unit	0	
(20)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 paket	19.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 paket	0	
6)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo			1.084.555.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo			483.312.500	
(21)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0	

(22)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	156 laporan	923.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	156 laporan	410.500.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(23)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	161.255.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	72.812.500	
7)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo			225.248.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo			239.994.700	
(24)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Dinas Kominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 unit	115.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Dinas Kominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	121.000.000	
(25)	Pemeliharaan Mebel	Dinas Kominfo	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 unit	5.548.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Kominfo	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 unit	0	
(25)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	51.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	118.994.700	
(26)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	46.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	
(27)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik				1.123.160.000	Program Informasi dan Komunikasi Publik				475.826.200	

9)	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			1.123.160.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					475.826.200	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(28)	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten Gunungkidul , semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	16 dokumen	162.220.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten Gunungkidul, semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0 dokumen	0	
(29)	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	33 dokumen	522.480.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 dokumen	237.909.700	
(30)	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	9 dokumen	149.500.000	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	93.25.500	
(31)	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Gunungkidul , semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah Layanan Hubungan Media	72 layanan	288.960.000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Gunungkidul, semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 layanan	143.994.000	
3.	Program Aplikasi Informatika				10.021.000.000	Program Aplikasi Informatika				8.043.450.000	
10)	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				9.283.000.000	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				7.593.450.000	
(32)	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	1 dokumen	10.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	1 dokumen	100.000	

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3	4	5	6	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7	8	9	10	11	12
1		2		5	6							
(29)	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7 unit	20.052.400.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7 unit	7.593.350.000	
11)	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ KotaKepegawaian Perangkat Daerah				738.000.000	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ KotaKepegawaian Perangkat Daerah					450.000.000	
(30)	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 unit	520.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	450.000.000	
(31)	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Gunungkidul, DIY, Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	58.000.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Gunungkidul, DIY, Jakarta		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0	
(32)	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	DIY	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	110.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	DIY		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	0 Dokumen	0	
(33)	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Tehnologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	DIY	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Tehnologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Tehnologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	DIY		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Tehnologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				143.080.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				29.857.500	
12)	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota				118.080.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota				29.857.500	
(34)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengola han, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	7 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengola han, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	29.857.500	
(35)	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Dinas Kominfo	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	70 orang	52.875.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Dinas Kominfo	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0 orang	0	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				230.410.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				132.400.000	
13)	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				223.110.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				132.400.000	

1	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
(36)	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	50.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.400.000									
(37)	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	15.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	0									
(38)	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	49 Perangkat Daerah	158.110.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	49 Perangkat Daerah	107.000.000									
14)	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota				7.300.000	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota													
(39)	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Gunungkidul, semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	7.300.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Gunungkidul, semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	0 Perangkat Daerah	0									

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah. Selain itu program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahap selanjutnya diadakan musyawarah perencanaan pembangunan/musrenbang di semua kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat Kapanewon/Kalurahan yang terkait langsung dengan pelayanan PD, diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK, sektoral/PIS dan Pokir DPRD. Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan usulan dibahas lagi pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kapanewon sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang kapanewon, ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum PD tersebut. Pada Tahun 2024 ini tidak ada usulan kegiatan PIWK, demikian pula dengan usulan kegiatan PIS maupun Pokir DPRD untuk Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 sebagaimana tabel 2.5 beriku.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024
 Dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

No	PIS/PIWK /POKIR	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Kelurah an	Pagu Kalurahan (Rp.)	Volume Kapanewon	Pagu Kapanewon (Rp.)	Urutan Prioritas Kelurahan	Urutan Prioritas Kapanewon	Status Verifikasi Kapanewon	Catatan Verifikasi Kapanewon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada **Siaran Pers No.78/HM/KOMINFO/06/2020 Senin, 22 Juni 2020 Tentang Percepatan Digitalisasi Nasional, Kominfo Siapkan 5 Program Prioritas Tahun 2021** mengumumkan persiapan lima program prioritas guna mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, sehingga mendorong masyarakat Tanah Air menjadi masyarakat digital.

Kelima program tersebut terdiri dari Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik. Pandemi COVID -19 mendorong percepatan transformasi digital Indonesia. Untuk mendukung percepatan transformasi ini perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga. Untuk menunjang kelancaran dalam penerapan teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, mulai tahun 2017 telah dilaksanakan pemasangan Jaringan Fiber Optik untuk melayani komunikasi berbasis internet maupun intranet di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam penyebaran informasi di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tantangan tersendiri. Belum semua Kalurahan terjangkau sarana informasi yang memadai. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke Kalurahan-Kalurahan dilakukan dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diantaranya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan group seni Pertunjukan Rakyat (Pertunra). Keberadaan KIM dan kelompok seni Pertunra adalah sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berperan sebagai penyebar (*disseminator*) informasi kepada masyarakat. Dikarenakan melalui kedua media ini, masyarakat akan lebih mudah menerima dan menyerap informasi.

Terkait dengan penyebaran informasi, maka Dinas Kominfo juga telah mempunyai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Dhaksinarga FM pada frekuensi 89,90 MHz dengan Izin Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 826 Tahun 2017 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Harian LPPL Radio Swara Dhaksinarga.

Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Mengacu visi Gubernur DIY periode 2022-2027 “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Pancamulia sebagai Visi RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Pasal 5 yang memberikan amanah Pengaturan Keistimewaan DIY.

Ada tiga hal utama yang saling mengkait dan menjadi prioritas perhatian dari Visi dan Misi Gubernur DIY 2022-2027. Ketiga hal tersebut adalah : Kawasan Selatan, Reformasi Kalurahan dan Teknologi Informasi.

Jika dijabarkan ke dalam proposisi lengkap, maka visi Calon Gubernur DIY 2022-2027 adalah “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan,

Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi.” Perinciannya sebagai berikut:

1. Kawasan Selatan

Kawasan Selatan mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial.

2. Reformasi Kalurahan

Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi

Teknologi digunakan sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa, sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

Sedangkan Misi Gubernur DIY 2022-2027 adalah :

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni :

- 1) Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan.
- 2) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan: dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat.
- 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi.
- 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Sasaran pembangunan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan DIY adalah “Meningkatnya penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Meningkatnya keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan”. Sedangkan arah kebijakan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut adalah 1) Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 2) Meningkatnya indicator layanan pemerintahan daerah yang berbasis elektronik 3) Pengembangan Integrasi Sistem Informasi; 4) Ketersediaan Big Data Pemda DIY; 5) Pengembangan suprastruktur dan infrasruktur Pemerintah Daerah; dan 6) Penerapan Sistem manajemen keamanan informasi; 7) Pemberdayaan PPID di setiap Badan Publik; 8) Menggiatkan forum Komunikasi PPID DIY; dan 9) Pemberdayaan Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Sasaran PD dirumuskan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2024. Tema Pembangunan Tahun 2024 adalah Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2024. Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024 telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD DIY Tahun 2024 yang diubah sebagai respon terhadap Pandemic COVID-19. Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas

Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 berikut:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH (OUT COME)	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD (OUTCOME)
1	Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	1. Persentase pelayanan komunikasi dan informatika 2. Persentase penerapan metadata sesuai standar 3. Persentase Layanan Keamanan Informasi
				Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	1. Nilai AKIP PD)

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN 2024
1	Meningkatkan akses layanan komunikasi dan informatika	Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika daerah	69,26

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2024
1	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika daerah meningkat	Persentase pelayanan komunikasi dan informatika	87,78
		Persentase penerapan metadata sesuai standar	50
		Persentase Layanan Keamanan Informasi	60

2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD)	80,50 (A)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU Tahun 2024
1	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah meningkat	Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika daerah	69,26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan rencana program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 guna mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dengan menggunakan nomenklatur program kegiatan yang baru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika merencanakan untuk melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 19 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp16.295.266.725,00 (Enam belas milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain terhadap :

- 1) pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 2) pencapaian prioritas dan sasaran daerah;
- 3) pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama);
- 4) pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan
- 5) sinkronisasi dengan kebijakan pemerinah pusat serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi 2 RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah dan mendukung prioritas daerah tahun 2022 yaitu Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dan Reformasi dan Birokrasi

Dari prioritas daerah tersebut, rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung sasaran daerah yaitu Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan Pengaliran dari prioritas daerah, sasaran daerah sampai dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 Pada tahun 2024 berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika merencanakan akan melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Sebelumnya, jumlah program yang diusulkan adalah 5 program dengan 12 kegiatan dan 53 sub kegiatan, karena ada penambahan Program Penyelenggaraan Keistimewaa Yogyakarta Urusan Tata Ruang Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang. Dalam Bab III telah diuraikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah mempunyai satu sasaran. Berdasarkan satu sasaran PD tersebut kemudian dialirkan kedalam program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024. Pengaliran sasaran PD kedalam 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 54 sub kegiatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika daerah meningkat	Persentase kepuasan layanan informatika	100	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		9.493.000.000	10.021.000.000	DISKOMINFO
									8.760.000.000	9.283.000.000	
								Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	10.000.000	10.000.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
								Daerah Kabupaten/Kota			
								Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.750.000.000	9.273.000.000	
				Persentase kualitas pembangunan informatika pemerintah	95,85		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		733.000.000	738.000.000	
								Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	520.000.000	520.000.000	
								Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	58.000.000	58.000.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
								Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	105.000.000	110.000.000	
								Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	
					55	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1,123,160,000	1.123.160.000	DISKOMINFO
							Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1,123,160,000	1.123.160.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
								Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	162.220.000	162.220.000	
								Pengelolaan Media Komunikasi Publik	522.480.000	522.480.000	
								Pelayanan Informasi Publik	149.500.000	149.500.000	
								Layanan Hubungan Media	288.960.000	288.960.000	
				Persentase penerapan metadata sesuai standar	20	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			143.080.000	143.080.000	DISKOMINFO
								Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	143.080.000	143.080.000	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	118.080.000	118.080.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
								Diseminasi Data Statistik Sektoral			
								Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	25.000.000	25.000.000	
				25		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			230.410.000	230.410.000	DISKOMINFO
								Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	223.110.000	228.110.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
								Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	
								Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	15.000.000	2.000.000	
								Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	158.110.000	158.110.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		7.300.000	7.300.000	
								Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.300.000	7.300.000	

Tabel 4.2
 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 TAHUN 2024

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju (2024)	SKPD
	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,954,344,325	5,129,681,755	DISKOMINFO
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,990,000	17,000,000	DISKOMINFO
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,500,000	10,500,000	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	498,000	500.000	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	248,000	250.000	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	498,000	500.000	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	248,000	250.000	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	DISKOMINFO
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.998.000	2.000.000	DISKOMINFO
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,543,647,525	3,535,826,755	DISKOMINFO
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,534,622,525	3,526,251,755	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,625,000	1,900.000	DISKOMINFO

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju (2024)	SKPD
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7,400,000	7,675,000	DISKOMINFO
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.600.000	2.000.000	DISKOMINFO
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.600.000	2.000.000	DISKOMINFO
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446,065,300	316,600,000	DISKOMINFO
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000	1,500,000	DISKOMINFO
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,335,000	50,000,000	DISKOMINFO
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	3,000,000	DISKOMINFO
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,644,800	17,500,000	DISKOMINFO
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.320.000	9.600.000	DISKOMINFO
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,750,000	8,750,000	DISKOMINFO
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365,515,000	226,250,000	DISKOMINFO
(5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	56.000.000	DISKOMINFO
	Pengadaan Mebel	0	9,600,000	DISKOMINFO
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	8,750,000	DISKOMINFO

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju (2024)	SKPD
1	2	3	4	5
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	226.250,000	DISKOMINFO
(6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670,677,000	1,084,555,000	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	300,000	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	527,475,000	923,000,000	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143,202,000	161,255,000	DISKOMINFO
(7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276,364,500	173,700,000	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141,400,000	115,750,000	DISKOMINFO
	Pemeliharaan Mebel	0	5,548,000	DISKOMINFO
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000	51,950,000	DISKOMINFO
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109,964,500	6,000,000	DISKOMINFO

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.08.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang berkualitas		33.33				66,67	100.000.000
2.22.08.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Budaya (Set)		1 layanan				1 Layanan	100.000.000
2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Yang Dibangun (Obyek)	Kab. Gunungkidul	100	840.000.000	Dana Alokasi Umum		33,33	100.000.000
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Kab. Gunungkidul	100 Persen	2.686.073.994	Dana Alokasi Umum		100	5.427.973.743
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Kab. Gunungkidul	33 Dokumen	5.424.000			33 Dokumen	17.000.000

2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	3.000.000	Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	10,500,000
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	247.000	Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	500,000
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	90.000	Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	250,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	247.000	Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-KPD (Dokumen)	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	90.000	Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	250,000
	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Gunungkidul	17 Dokumen	1.000.000	Dana Alokasi Umum	17 Dokumen	3.000,000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kab. Gunungkidul	17 Dokumen	750.000	Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	2.000.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		14 Layanan	1.871.740.194		14 Dokumen	3.740.118.743
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kab. Gunungkidul	378 Orang	1.864.540.194	Dana Alokasi Umum	446 Orang	3.730.543,743
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kab. Gunungkidul	1 Laporan	1.200,000	Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.900,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Kab. Gunungkidul	13 Laporan	6,000,000	Dana Alokasi Umum	13 Dokumen	7,675,000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)		6 Dokumen			6 Dokumen	2.000.000
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kab. Gunungkidul	0 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	2.000,000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Gunungkidul	12 Dokumen	56.602.600	Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	379.600.000
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Gunungkidul	1 Paket	500,000	Dana Alokasi Umum	1 Paket	1,500,000

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Gunungkidul	3 Paket	45.430.600	Dana Alokasi Umum	8 Paket	113,000,000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Gunungkidul	0 Paket	0	Dana Alokasi Umum	2 Paket	3,000,000
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	Kab. Gunungkidul	12 Paket	9.000.000	Dana Alokasi Umum	12 Paket	17,500,000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Kab. Gunungkidul	0 Dokumen	0,00	Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	9,600,000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Kab. Gunungkidul	0 Laporan	0,00	Dana Alokasi Umum	12 Laporan	226,250,000
2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	Kab. Gunungkidul	3 layanan	0		0 Dokumen	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Gunungkidul	0 Paket	0,00	Dana Alokasi Umum	0 Paket	0
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pkate Mebel yang disediakan	Kab. Gunungkidul	0 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum	0 Unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Gunungkidul	0 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum	0 Unit	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Gunungkidul	0 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum	0 Unit	0
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5 Layanan	483.312.500		5 Dokumen	1.084.555.000

2.16.01.2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul	0 Laporan	0	Dana Alokasi Umum	12 Laporan	300,000
2.16.01.2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Gunungkidul	156 Laporan	410.500.000,00	Dana Alokasi Umum	156 Laporan	923.000,000
2.16.01.2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Kebersihan dibayarkan	Kab. Gunungkidul	12 Laporan	72.812.500,00	Dana Alokasi Umum	3 Laporan	161,255,000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20 Layanan	239.994.700,00			204.700.000
2.16.01. 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Gunungkidul	11 Unit	121.000.000,00	Dana Alokasi Umum	17 Unit	115,750,000
2.16.01. 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kab. Gunungkidul	0 Unit	0	Dana Alokasi Umum	0 Unit	0
2.16.01. 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Gunungkidul	17 Unit	118.994.700,00	Dana Alokasi Umum	17 Unit	11,950,000
2.16.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Kab. Gunungkidul	0 Unit	0	Dana Alokasi Umum	11 Unit	51.000.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			65 persen	475.826.200		75	1.123.160.000

2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			18 Layanan	475.826.200			18	1.123.160.000
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Gunungkidul	16 Dokumen	0			16 Dokumen	162.220.000
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	237,909,700			33 Dokumen	522,480,000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	93.922.500			9 Dokumen	149,500,000
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Gunungkidul	12 Layanan	143,994,000			72 Dokumen	288,960,000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			99,17	8.043.450.000			99,59	10.686.000.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5 Layanan	7.593.450.000			5 Layanan	9.680.000.000
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	100,000			1 Dokumen	10.000.000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul	7 Unit	7,593,350,000			7 Unit	9,850,000,000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							9 layanan	808.000.000

	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola	Kab. Gunungkidul	2 Unit	450,000,000	Dana Alokasi Umum		2 Unit	540,000,000
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	0 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	58,000,000
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Kab. Gunungkidul	0 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	160,000,000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul	0 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50,000,000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			60 persen	29.857.500			80	143.080.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			7 Layanan	29.857.500			7 Layanan	143.080.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Gunungkidul	7 Dokumen	29,857,500	Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	118,080,000
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Gunungkidul	0 orang	0	Dana Alokasi Umum		70 Orang	25,000,000

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				60 persen	132.400.000			80 Persen	235.410.000
2.22.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8 Layanan	132.400.000			8 Layanan	228.110.000
2.22.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	1 Laporan	1 Laporan	132,400,000		Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50,000,000
2.22.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Analisis Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Gunungkidul	1 Laporan	1 Laporan	25,400,000		Dana Alokasi Umum	1 Laporan	20,000,000
2.22.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Gunungkidul	0 Perangkat Daerah	0	0		Dana Alokasi Umum	49 Perangkat Daerah	158,110,000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	Kab. Gunungkidul	0 Perangkat Daerah	0	0		Dana Alokasi Umum	1 Perangkat Daerah	7.300.000
	Jumlah					12.207.607.694				17.697.623.743

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) serta Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan PD yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Renja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024.

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan dan selanjutnya di proses dalam Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten serta Musrenbang DIY.

Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi dan Informatika mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,

Plt. DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,

KELIK YUNIANTORO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD)

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan tentang perlunya suatu perencanaan yang strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Perangkat Daerah juga menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi Program dan Kegiatan yang disertai pendanaan untuk mencapai sasaran.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, penyebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diubah menjadi Perangkat Daerah (PD) sehingga Rencana Kerja SKPD selanjutnya akan disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renja PD merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, merupakan perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Rencana kerja merupakan instrumen penting bagi PD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja PD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan

pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing PD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyempurnaan rancangan awal Renja PD dilakukan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat melalui musrenbang desa dan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Langkah yang dilakukan dalam penyempurnaan rancangan Renja PD adalah menyajikan hasil penggabungan daftar kegiatan prioritas dari semua kecamatan, berdasarkan pada program dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab PD yang bersangkutan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

b. Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul.

Dalam penyusunan Renja PD memperhatikan dan mengacu pada RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan dan rencana program kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan landasan serta pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dalam RKA Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan dan mencapai target dalam tahun 2022. Garis besar proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul dilakukan setelah diterimanya Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebelum rancangan Awal RKPD diterima, atau sebelum RAPBD tahun 2024 disahkan menjadi APBD.

Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup melakukan identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun renja Perangkat Daerah (PD), penyiapan kelembagaan forum Perangkat Daerah (PD), pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan renja Perangkat Daerah (PD).

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra Perangkat Daerah (PD), kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD), meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda

3) Tahap Kegiatan penyusunan Rancangan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan dilaksanakan simultan dengan penyusunan RKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda.

c. Keterkaitan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 serta RKPD 2026. Penyusunan renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan DIY dengan maksud mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Realisasi perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2024 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2024.

Dalam tahun 2024 ini Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul telah merencanakan 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan rencana alokasi dana APBD dan Dana Keistimewaan sebesar Rp22.991.148.090,00 (dua puluh dua milyar Sembilan artus Sembilan puluh satu juta serratus empat [uluh delapan ribu sembilan puluh rupiah).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di tuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2024;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
- 2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

BAB 1V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN)

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Dinas Kebudayaan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan kebudayaan. Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan program kegiatan dari Dinas Kebudayaan. Pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada pasal 3 huruf d nomor 7 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) tahun 2024 ini memuat kajian (*review*) terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-2/Tahun 2022), mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dalam penyusunannya mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang disampaikan melalui aplikasi E-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian Target-target RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.

Berdasarkan APBD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPA/A.I/2.22.0.00.0.00.01.00/ 001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun Anggaran 2022, Dinas Kebudayaan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp21.844.441.545,00 dengan perincian belanja operasi sebesar Rp21.048.816.545 dan belanja modal sebesar Rp795.625.000,00 untuk melaksanakan 2 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 42 subkegiatan.

Antara jumlah program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2022 dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 sudah sesuai.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kebudayaan sampai dengan Triwulan ke empat tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian program 100% dengan penyerapan keuangan sebesar 97.39% atau realisasi keuangan sebesar Rp21.755.747.502,00 dari target anggaran belanja langsung yang direncanakan sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp22.339.154.649,00.

Adapun tingkat capaian program Dinas Kebudayaan Tahun 2022 (s.d Desember) adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 98.84%;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97.02%;

Evaluasi pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022 berdasarkan kinerja Renja dinas Kebudayaan Tahun 2022 sebagaimana

laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan e-Monev Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah nihil karena semua memenuhi target kinerja keluaran.
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 7) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 10) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 11) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 13) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 14) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 15) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 16) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 17) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 18) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 19) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 20) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 22) Pemeliharaan Mebel
 - 23) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 24) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 25) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - B. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
 - 2) Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - 3) Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
 - 4) Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
 - 5) Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
 - 7) Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
 - 8) Pembinaan Lembaga Penggiat Seni

- 9) Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
 - 10) Penghargaan Seniman dan Budayawan
 - 11) Festival Kebudayaan Yogyakarta
 - 12) Gelar Budaya Jogja
 - 13) Publikasi Seni dan Budaya Daerah
 - 14) Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
 - 15) Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
 - 16) Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
 - 17) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
3. Realisasi kegiatan tahun 2021 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah nihil karena semua memenuhi target kinerja keluaran.
 4. Faktor penyebab terpenuhinya realisasi program dan kegiatan target kinerja program dan kegiatan tahun 2021 yaitu adanya keiapan pelaksanaan kegiatan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.
 5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ada untuk mengelola Dinas Kebudayaan dan Taman Budaya Gunungkidul
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tersebut adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Realisasi anggaran dan kinerja tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023) dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul
Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.22.01										
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	140	27	28	23	82	28	51	36
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum PD	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen Profil PD	1	0	1	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen Renja	1	1	1	1	100	0	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran , Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah dokumen Renja perubahan	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	0	0	0	0	4	4	25
2.22.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen ROPK	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	0	0	0	0	1	1	20
2.22.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	0	0	0	0	1	1	25
2.22.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	0	0	0	0	2	2	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	0	0	0	0	2	2	25
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	0	0	0	0	17	17	25
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan e-Monev	4	4	4	3	75	0	3	75
		Jumlah Dokumen Laporan TEPR	12	12	12	9	75	0	9	75
		Jumlah Dokumen LKJIP	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	0	0	0	0	4	4	25
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	70	14	14	11	79	14	25	36
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	14	11	79	0	11	79
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1680 1	0 1	0 1	0 1	0 100	420 0	420 1	25 100
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	4 12 1	0 12 1	0 12 1	0 9 1	0 75 100	1 0 0	1 9 1	25 75 100
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi	110	22	22	22	100	22	44	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		kepegawaian								
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.05.0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengelolaan data ASN	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16	0	0	0	0	4	4	25
2.22.01.2.05.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	0	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	0	0	0	0	1	1	25
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum terlayani	35	7	7	7	100	7	14	40
		Persentase Administrasi Umum terlayani	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli	30	30	30	30	100	0	30	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	16	0	0	0	0	4	4	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target kegiatan Renja PD tahun 2023 / program	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Bangunan Kantor yang Disediakan								
2.22.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	200	200	200	179	90	0	179	90
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	0	0	0	0	4	4	25
2.22.01.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan rumah tangga yang dibeli	120	120	120	100	83	0	100	83
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	0	0	0	0	4	4	25
2.22.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4	4	4	4	100	0	4	100
		Jumlah penggandaan yang tersedia	12	12	12	12	100	0	12	100
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48	0	0	0	0	12	12	25
2.22.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar dibayar	349	700	349	262	75	0	262	75
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1372	0	0	0	0	343	343	25
2.22.01.2.06.0 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jamuan tamu yang tersedia	20	20	20	20	100	0	20	100
		Jumlah Laporan Fasilitas	48	0	0	0	0	12	12	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka T Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Kunjungan Tamu								
2.22.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan koordinasi	24	72	24	18	75	0	18	75
		Jumlah minum dan makan rapat yang tersedia	20	20	20	15	75	0	15	75
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208	0	0	0	0	52	52	25
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	10	2	2	2	100	2	4	40
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	700	200	700	500	71	0	500	71
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	0	0	0	0	12	12	25
2.22.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air dibayar	1	12	1	0	0	0	0	0
		Jumlah tagihan listrik dibayar	1	36	1	1	100	0	1	100
		Jumlah tagihan telepon dibayar	1	12	1	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	0	0	0	0	2	2	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	0	0	0	0	12	12	25
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30	5	6	6	100	6	12	40
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	12	6	12	9	75	0	9	75
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	15	3	3	3	100	0	3	20
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	792	0	0	0	0	198	198	25
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10	0	10	0	0	0	0	0
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	0	0	0	0	10	10	25
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	4	4	3	75	0	3	75
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	3	3	3	3	100	0	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	5	5	5	4	80	0	4	80
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	0	0	0	0	12	12	25
2.22.01.2.09.0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Gamelan dipelihara	5	0	1	0	0	1	1	20
2.22.01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0	1	1	100
2.22.01.2.09.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara	2	5	2	0	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	0	0	0	0	2	2	25
2.22.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	4	4	4	4	100	0	4	100
		Nilai IKM Perangkat Daerah	80,25	80,25	80	80	100	0	80	100
2.22.01.2.13.0	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pengukuran IKM	2	2	2	1	50	0	1	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka T Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	1	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan (SP)	1	1	1	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen SPIP	1	1	1	0	0	0	0	0
2.22.08.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase ragam budaya yang dikembangkan	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseum	Jumlah dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dalam bahasa Jawa	43	19	19		0	6	6	14
		Persentase dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dalam bahasa Jawa	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjaraan	Cerdas Cermat Sejarah	1	0	1	1	100	0	1	100
		Kajian Sejarah Lokal	25	25	25	0	0	0	0	0
		Lawatan Sejarah	8	6	8	0	0	0	0	0
		Peringatan Peristiwa Bersejarah	4	1	4	4	100	0	4	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjaraan	12	0	0	0	0	3	3	25
2.22.08.2.01.0	Pembinaan, Pengembangan	Kompetisi Bahasa dan Sastra	8	6	8	6	75	0	6	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	Bahasa dan Sastra									
		Pergelaran Macapat	30	1	30	30	100	0	30	100
		Publikasi Bahasa dan Sastra	4	0	4	1	25	0	1	25
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman Lawatan Museum	24	0	0	0	0	6	6	25
2.22.08.2.01.0	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman		1	1	1	1	100	0	1	100
3			6	2	6	4	67	0	4	67
		Publikasi Literasi Museum	1	0	1	0	0	0	0	0
		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	1200	0	0	0	0	300	300	25
2.22.08.2.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya	100	20	20	16	80	20	36	36
		Persentase obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.04.0	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kajian TACB yang direkomendasikan	20	20	20	16	80	0	16	80
		Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya	2	0	2	0	0	0	0	0
		Studi Kelayakan	1	4	1	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka T Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Studi Teknis	1	0	1	0	0	0	0	0
		Wajib Kunjung Situs	2	10	2	0	0	0	0	0
		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	16	0	0	0	0	4	4	25
2.22.08.2.05	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah even seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul	95	0	19	3	16	19	22	23
		Persentase even seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul	100	0	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.05.0	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan pengelolaan TBG	12	0	12	6	50	0	6	50
		Gelar seni kolosal	1	0	1	1	100	0	1	100
		Pentas seni di TBG	12	0	12	3	25	0	3	25
		Pentas seni untuk anak	6	0	6	0	0	0	0	0
		Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	4	0	0	0	0	1	1	25
2.22.08.2.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budaya	5	0	1	0	0	1	1	20
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budaya	100	0	100	0	0	100	50	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka T Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.22.08.2.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Pengadaan sarana dan prasarana budaya	1	0	1	0	0	0	0	0
2.22.08.2.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan yang disusun	4 35	0 0	0 7	0 0	0 0	1 7	1 7	25 20
2.22.08.2.07.01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Persentase dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan yang disusun Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan kebudayaan Gunungkidul	100 3	0 0	100 3	0 0	0 0	100 0	50 0	50 0
2.22.08.2.07.02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan Dokumen laporan pelaksanaan keistimewaan kebudayaan Gunungkidul	12 4	0 0	0 4	0 0	0 0	3 0	3 0	25 0
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Jumlah nilai adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang	16 50	0 0	0 10	0 10	0 100	4 10	4 20	25 40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka T Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		dilestarikan								
		Persentase nilai adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	100	0	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.09.0 2	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya	24	22	24	30	125	0	30	125
		Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	12	0	0	0	0	3	3	25
2.22.08.2.09.0 3	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Pembinaan Seni Perfilman di Gunungkidul	1	0	1	0	0	0	0	0
		Seleksi Lomba Lukis DIY-Kyoto	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	8	0	0	0	0	2	2	25
2.22.08.2.09.0 4	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Promosi Budaya Ke luar DIY	3	0	3	2	67	0	2	67
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	12	0	0	0	0	3	3	25
2.22.08.2.09.0 5	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan untuk pelestari seni dan budaya (Seniman dan Budayawan) Kategori Dewasa	10	15	10	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		dan Anak								
		Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	40	0	0	0	0	10	10	25
2.22.08.2.09.0 6	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Dukungan untuk FKY DIY	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	4	0	0	0	0	1	1	25
2.22.08.2.09.0 7	Gelar Budaya Jogja	Pengiriman tim festival langen carita tingkat DIY	1	0	1	1	100	0	1	100
		Pengiriman tim festival kethoprak tingkat DIY	1	0	1	1	100	0	1	100
		Pengiriman tim festival sendratari tingkat DIY	1	1	1	1	100	0	1	100
		Pengiriman tim festival teater tradisi tingkat DIY	1	0	1	1	100	0	1	100
		Pengiriman tim festival reog dan jathilan tingkat DIY	1	0	1	0	0	0	0	0
		Festival langen carita tingkat Gunungkidul	1	0	1	1	100	0	1	100
		Festival kethoprak tingkat Gunungkidul	1	1	1	1	100	0	1	100
		Festival sendratari tingkat Gunungkidul	1	0	1	1	100	0	1	100
		Festival teater tradisi tingkat	1	1	1	1	100	0	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka T Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Gunungkidul								
		Festival reog dan jathilan tingkat Gunungkidul	1	1	1	1	100	0	1	100
		Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	0	1	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	48	0	0	0	0	12	12	25
2.22.08.2.09.08	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi seni dan budaya melalui website dan media sejenisnya	12	0	12	9	75	0	9	75
		Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	48	0	0	0	0	12	12	25
2.22.08.2.09.09	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Fasilitasi Kegiatan MLKI	3	1	3	3	100	0	3	100
		Sarasehan dan Jamasan Tosan Aji	20	1	20	9	45	0	9	45
		Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	360	0	0	0	0	90	90	25
2.22.08.2.09.10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Kajian WBTB	1	0	1	0	0	0	0	0
		Bimtek Tata Nilai Budaya	12	1	12	9	75	0	9	75
		Festival Permainan Tradisional	1	0	1	1	100	0	1	100
		Pembinaan Pedalangan	4	12	4	1	25	0	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka T Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Pentas ketoprak	4	10	4	1	25	0	1	25
		Penguatan Dewan Kebudayaan	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	44	0	0	0	0	11	11	25
2.22.08.2.09.1	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Gelar Seni Budaya Hari Jadi Gunungkidul	1	0	1	1	100	0	1	100
		Gelar Seni Tradisi	25	35	25	14	56	0	14	56
		Jogedan Mataram	10	0	10	7	70	0	7	70
		Karawitan Jumat Legi	10	10	10	7	70	0	7	70
		Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	12	0	0	0	0	3	3	25
2.22.08.2.09.1	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Fasilitasi Upacara Adat	25	24	25	18	72	0	18	72
		Sarasehan Kebudayaan	2	0	2	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	16	0	0	0	0	4	4	25

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 sebagian besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun 2021, sebagian lagi merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan serta penugasan urusan keistimewaan kebudayaan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mempunyai beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu adanya SDM yang secara kualitatif dan kuantitatif belum memenuhi standar, anggaran yang tersedia belum mencukupi terutama di sekretariat, dan sarana prasarana belum memadai.

Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan PD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 253/KPTS/2017 yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah ragam budaya yang dikembangkan/difasilitasi. disampaikan IKU (indikator kinerja utama) dan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2, serta pencapaian kinerja terhadap Renstra PD Tahun 2022-2026 dapat sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul
Terhadap Renstra PD Tahun 2022-2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM,IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Proyeksi Capaian Target Renstra PD					Catatan Analisis	
			Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)													
	Indeks Pelestarian Budaya Tahun 2026	indeks	84.49	84.86	85.23	85.61	85.98	84.49	84.86	85.23	85.61	85.98		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

Peran dan posisi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan kebudayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan Perangkat Daerah dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Peninggalan warisan budaya belum semua ditangani secara optimal, Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat tradisi lokal, ragam seni budaya dan warisan budaya belum optimal, Aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya masih relatif rendah, Kapasitas dan pengetahuan pemilik/pengelola atas pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang dimiliki masih rendah, Keterbatasan jumlah SDM pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan, Kebudayaan lokal belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan peran masyarakat terhadap budaya dan sejarah lokal, Sinergi pengembangan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum dikelola secara optimal, Perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik benda maupun tak benda belum optimal, Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengumpulkan, merawat dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya, Penggalan, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal, Mewujudkan ketahanan budaya melalui percepatan penambahan desa budaya yang jumlahnya masih sangat terbatas, perlunya penulisan sejarah lisan dan cerita rakyat sebagai bukti adanya keaneka ragaman budaya, dan Perlu peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan disemua aspek budaya termasuk penggunaan bahasa serta kebudayaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mngoptimalkan potensi pendapatan.

Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan misi tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat pencapaiannya. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya masih rendah
- 2) Pengembangan potensi budaya masih terbatas
- 3) Penggalan, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal
- 4) Sinergi pengembangan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum dikelola secara optimal;

- 5) Kurangnya event tingkat nasional/internasional dan kontinuitas penganggarannya;

Permasalahan dan hambatan tersebut diatas maka akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah diantaranya peningkatan tat kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, serta dapat berdampak pada capaian program nasional/internasional khususnya tentang penyelenggaraan *event* budaya di tingkat nasional maupu internasional.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah (PD). Analisis strategi dalam rangka menentukan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) perlu diperhatikan, karena akan menentukan tindak lanjut pembangunan pada tahun yang akan datang. Lingkungan eksternal terdiri dari peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*). Peluang yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar.

Peluang:

- 1) Kebudayaan suatu daerah mencerminkan citra suatu daerah
- 2) Lestari dan berkembangnya seni budaya;
- 3) Meningkatnya aktivitas seni budaya;
- 4) Meningkatnya semangat volunteer dan pelaku seni dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya
- 5) Terbukanya potensi budaya lokal untuk bersaing di kancah internasional.

Ancaman:

Faktor-faktor di luar Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul yang membahayakan atau mengancam eksistensi organisasi yaitu:

Meningkatnya pengaruh budaya asing, modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli.

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 antara lain:

1. Peninggalan warisan budaya belum semua dikelola secara optimal.
2. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat tradisi lokal, ragam seni budaya dan warisan budaya belum optimal.
3. Kapasitas dan pengetahuan pemilik/pengelola atas pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang dimiliki masih rendah.
4. Keterbatasan jumlah SDM pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
5. Kebudayaan lokal belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan peran masyarakat terhadap budaya dan sejarah lokal.
6. Sinergi pengembangan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum dikelola secara optimal.
7. Perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik benda maupun tak benda belum optimal.
8. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengumpulkan, merawat dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya.
9. Penggalan, reaktualiasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal.

10. Kebudayaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pendapatan

2.4 Reviu Terhadap RKPD

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan. Berdasarkan rancangan awal RKPD pada Tahun 2022 semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dalam RKPD.

RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap organisasi Perangkat Daerah. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan serta adanya penyederhanaan beberapa program dan kegiatan. Mulai Tahun 2019 rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul juga dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini akan berlanjut setiap tahun.

RKPD dibuat melalui perencanaan dari bawah dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain SDM, dana, kebutuhan masyarakat, dan faktor lain yang terkait. Oleh sebab itu perencanaan dibuat berdasarkan skala prioritas, sehingga apa yang direncanakan tidak akan berbeda jauh dengan hasil analisis kebutuhan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) direncanakan sebesar Rp31.639.254.509,00 (tiga puluh satumilyar enamratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan rupiah) terdiri 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 6 (enam) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yaitu: .
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan :
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 6 (enam) sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta meliputi 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yaitu:
- A. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
 - 2) Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - 3) Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
 - B. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
 - 1) Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
 - C. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota
 - D. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
 - E. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan, dengan 2 (dua) sub kegiatan :
 - 1) Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan

- 2) Monitoring dan evaluasi Program dan Kegiatan urusan Kebudayaan
- F. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, dengan 11 (sebelas) sub kegiatan :
- 1) Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya;
 - 2) Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
 - 3) Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
 - 4) Penghargaan Seniman dan Budayawan
 - 5) Festival Kebudayaan Yogyakarta
 - 6) Gelar Budaya Jogja
 - 7) Publikasi Seni dan Budaya Daerah
 - 8) Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
 - 9) Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
 - 10) Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
 - 11) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

Berikut adalah hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				31.559.552.009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				31.015.552.009	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.544.052.009	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	3.000.052.009	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	30	100.977.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	30	78.157.500	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu (Dokumen)					Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu (Dokumen)			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	91.547.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	75.157.500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	300.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				300.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1			(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Siyono Wetan, Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	980.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Siyono Wetan, Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	750.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2	650.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2	450.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)					Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	900.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	550.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	300.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(Laporan)					(Laporan)			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	14	2.146.669.509	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	14	2.139.319.509	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	420	2.058.842.009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	420	2.058.842.009	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	2.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	600.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD (Laporan)					SKPD (Laporan)			
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	85.377.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	79.877.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian (Orang)	30	980.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian (Orang)	30	300.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	980.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	300.000	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah jenis Administrasi Umum terlayani (Jenis)	7	185.440.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah jenis Administrasi Umum terlayani (Jenis)	7	25.090.000	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				2.710.000	Penyediaan Komponen Instalasi				-	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2 Bangunan Kantor	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4			(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	17.452.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5.330.000	
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	6.138.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	2.700.000	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.300.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12			(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	343	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	343	1.200.000	
18	Fasilitas Kunjungan Tamu	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	9.800.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3	2.100.000	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				142.140.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.460.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Gunungkidul, DIY, Daerah, Luar Wilayah)	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	52			(Gunungkidul, DIY, Daerah, Luar Wilayah)	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	17		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana (Jenis)	3	869.847.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana (Jenis)	3	562.747.500	
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	24.447.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Logandeng, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	23.447.500	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1			(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	746.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	449.300.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jenis)	6	240.137.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jenis)	6	194.437.500	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	224	149.725.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	224	140.425.000	
24	Pemeliharaan Mebel	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	100	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	-	
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	29.947.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	25.047.500	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	20.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	-	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	28.965.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	1	28.965.000	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	16	6.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Loganden g, Kec. Playen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	0	-	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3	4	5	6 28.015.500.000	7 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	8	9	10	11 28.015.500.000	12
			Persentase Ragam Budaya Yang Dikembangkan (%)	100				Persentase Ragam Budaya Yang Dikembangkan (%)	100		
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah dokumen sejarah, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dalam bahasa jawa (Dokumen)	6	2.370.000.000	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah dokumen sejarah, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dalam bahasa jawa (Dokumen)	6	2.370.000.000	
29	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjarahan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjarahan	4	840.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjarahan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjarahan	4	840.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4 (Dokumen)	5	6	7	8	9 (Dokumen)	10	11	12
30	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra(Laporan)	3	1.130.000.000	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra(Laporan)	3	1.130.000.000	
31	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola (Unit)	0	400.000.000	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola (Unit)	0	400.000.000	
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya (Rekomendasi)	20	2.800.000.000	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya (Rekomendasi)	20	2.800.000.000	
32	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				2.800.000.000	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				2.800.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan (Objek)	10			(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan (Objek)	10		
	Pengelolaan Taman Budaya	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah even seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul (Event)	19	3.500.000.000	Pengelolaan Taman Budaya	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah even seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul (Event)	19	3.500.000.000	
33	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	1	3.500.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	1	3.500.000.000	
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				500.000.000	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				500.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budaya (Set)	5			(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budaya (Set)	5		
34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)	5	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)	5	500.000.000	
	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan yang disusun (Dokumen)	7	357.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan yang disusun (Dokumen)	7	357.000.000	
35	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir	3	123.000.000	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir	3	123.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan Kebudayaan(Dokumen)					r Urusan Kebudayaan(Dokumen)			
36	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan (Laporan)	4	234.000.000	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan (Laporan)	4	234.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah nilai adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan (Nilai)	10	18.488.500.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah nilai adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan (Nilai)	10	18.488.500.000	
37	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong	3	1.329.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong	3	1.329.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina (Lembaga)	2	882.000.000	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina (Lembaga)	2	882.000.000	
39	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya (Laporan)	3	2.500.000.000	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya (Laporan)	3	2.500.000.000	
40	Penghargaan Seniman dan Budayawan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan (Orang)	10	300.000.000	Penghargaan Seniman dan Budayawan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan (Orang)	10	300.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Festival Kebudayaan Yogyakarta	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta (Laporan)	1	500.000.000	Festival Kebudayaan Yogyakarta	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta (Laporan)	1	500.000.000	
42	Gelar Budaya Jogja	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	14	5.804.000.000	Gelar Budaya Jogja	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	14	5.804.000.000	
43	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)	12	300.000.000	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)	12	300.000.000	
44	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina (Orang)	40	320.000.000	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina (Orang)	40	320.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Laporan)	9	2.126.500.000	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Laporan)	9	2.126.500.000	
46	Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Even Pnggiat Seni (Laporan)	3	1.500.000.000	Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Even Pnggiat Seni (Laporan)	3	1.500.000.000	
47	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Laporan)	4	2.927.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Laporan)	4	2.927.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya diadakan musrenbang di semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat kecamatan/desa yang terkait langsung dengan pelayanan PD, diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK dan sektoral. Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum PD tersebut. Pada Tahun 2024 ini tidak ada usulan kegiatan PIWK, dan usulan melalui Pagu Indikatif Sektoral untuk Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dari masyarakat di Urusan Kebudayaan akan dibiayai dari dana keistimewaan Pemerintah DIY melalui Bantuan Keuangan Khusus.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

No	PIS/PIWK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa (Rp.)	Pagu Desa (Rp.)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp.)	Urutan Prioritas Desa	Urutan Prioritas Kec	Status Verifikasi Kec	Catatan Verifikasi Kec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah																
										0						

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) masuk dalam prioritas 5 yaitu Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata dengan Sasaran Daerah Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2024 sebagaimana telah disajikan dalam rancangan RKPD tahun 2024.

Selanjutnya rumusan rumusan tujuan dan sasaran tersebut telah disempurnakan dan disajikan dalam Rencana Kerja berikut.

Tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dirumuskan dalam 2 (dua) tujuan yaitu pengembangan ragam budaya berbasis masyarakat meningkat;

Sasaran PD yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) tahun 2024 adalah sebagaimana telah terumuskan dalam perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Pengembangan ragam budaya berbasis masyarakat meningkat
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata;	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan	Indeks Pelestarian Budaya

Selanjutnya hubungan antara tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dengan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagaimana dalam tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pelestarian Budaya Tahun 2026	84,86

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
1	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya Tahun 2026	84,86
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.92

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dan dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dengan Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya	84,86

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sejumlah 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan baik dalam fungsi kesekretariatan maupun fungsi urusan kebudayaan. Mengingat bahwa Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan lebih banyak kepada fungsi penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan kesekretariatan yang bersifat fasilitasi dan administrasi berlokasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul atau instansi terkait seperti Paniradya Kaistimewan Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan dilingkungan Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kemenyeraian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang mendukung fungsi penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah dilaksanakan di semua kapanewon di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dan wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta kegiatan penyelenggaraan misi kesenian (kebudayaan) yang direncanakan di wilayah pulau Jawa dan di luar pulau Jawa.

Program/kegiatan dalam Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dibiayai dengan anggaran sebesar Rp22.991.148.090,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dana Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut adalah hasil perumusan program dan kegiatan prioritas disajikan dalam tabel 4.1, rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.2. Tabel sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggungjawab
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dn Perekonomian Masyarakat Meningkat	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya	85,23	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	31.015.552.009	
					2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	28.015.500.000	
					2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseum	2.370.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	840.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.08.5.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.130.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseum	400.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.800.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.08.5.02.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.800.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	3.500.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.08.5.03.01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	3.500.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	500.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.08.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	500.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.08.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Urusan	357.000.000	Kundha Kabudayan

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggungjawab
						Kebudayaan		
					2.22.08.5.05.01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	123.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.05.02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	234.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	18.488.500.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.329.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.02	Pembinaan Lembaga Pnggiat Seni	882.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	2.500.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	300.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	5.804.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	300.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	320.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	2.126.500.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.10	Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni	1.500.000.000	Kundha Kabupaten
					2.22.08.5.07.11	Pembinaan Kelembagaan	2.927.000.000	Kundha Kabupaten

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggungjawab
Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,94		Adat dan Tradisi		Kabudayan
					2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.000.052.009	Kabudayan
					2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.157.500	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.157.500	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	300.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	450.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.139.319.509	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.058.842.009	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000	Kundha Kabudayan

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggungjawab
					2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	79.877.500	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.090.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.330.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.700.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.300.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.100.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.460.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.747.500	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat	23.447.500	Kundha

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggungjawab
						Menyurat		Kabudayan
					2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	449.300.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.437.500	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.425.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	-	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.047.500	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.965.000	Kundha Kabudayan
					2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Kundha Kabudayan

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				31.015.552.009				22.750.616.649
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.000.052.009				3.927.939.447
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100					
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				78.157.500				32.942.500
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat	(Loganden g, Kec. Playen)	30				28	

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		waktu (Dokumen)							
2.22.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.157.500				25.542.500
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(Loganden g, Kec. Playen)	3		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4	
2.22.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				300.000				1.000.000
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(Loganden g, Kec. Playen)	1		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	
2.22.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				300.000				300.000
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Loganden g, Kec. Playen)	1		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		1	

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3 (Dokumen)	4	5	6	8	9	10	
2.22.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				750.000			1.000.000	
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(Siyono Wetan, Logandeng , Kec. Playen)	2			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	
2.22.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				450.000			300.000	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD(Dokumen)	(Loganden g, Kec. Playen)	2			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2	
2.22.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				900.000			3.800.000	

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Logandeng, Kec. Playen)	17			17		
2.22.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000			1.000.000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Logandeng, Kec. Playen)	4			4		
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.139.319.509			2.877.480.447	
		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	(Logandeng, Kec. Playen)	14			14		
2.22.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.058.842.009			2.830.095.447	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(Logandeng, Kec. Playen)	420			420		
2.22.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan				600.000			700.000	

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	4	5	6	8	9	10	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Loganden g, Kec. Playen)	1			1		
2.22.01.2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				79.877.500			46.685.000	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	(Loganden g, Kec. Playen)	13			13		
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000			2.000.000	
		Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian (Orang)	(Loganden g, Kec. Playen)	30			22		
2.22.01.2.05.0 003	Pendataan dan Pengolahan				300.000			1.000.000	

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2 Administrasi Kepegawaian	3	4	5	6	8	9	10	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen)	(Loganden g, Kec. Playen)	4			4		
2.22.01.2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-			1.000.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	(Loganden g, Kec. Playen)	0			1		
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				25.090.000			82.106.500	
		Jumlah jenis Administrasi Umum terlayani (Jenis)	(Loganden g, Kec. Playen)	7			7		
2.22.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-			3.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Loganden g, Kec. Playen)	0			4		

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.330.000				10.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Loganden g, Kec. Playen)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	
2.22.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.700.000				6.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(Loganden g, Kec. Playen)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	
2.22.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.300.000				5.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(Loganden g, Kec. Playen)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	
2.22.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000				1.200.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Loganden g, Kec. Playen)	343			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	343	
2.22.01.2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.100.000				10.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	(Loganden g, Kec. Playen)	3			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12	
2.22.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.460.000				46.906.500
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	(Gunungki dul, DIY, dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	17			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	52	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				562.747.500				772.367.500
		Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana (Jenis)	(Loganden g, Kec. Playen)	3				2	

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				23.447.500				21.042.500
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(Loganden g, Kec. Playen)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	
2.22.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000				100.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(Loganden g, Kec. Playen)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	
2.22.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				449.300.000				651.325.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	(Loganden g, Kec. Playen)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.437.500				161.042.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jenis)	(Loganden g, Kec. Playen)	6				6	
2.22.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.425.000				80.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	(Loganden g, Kec. Playen)	224		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		198	
2.22.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel				-				5.000.000
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	(Loganden g, Kec. Playen)	0				10	
2.22.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.047.500				30.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(Loganden g, Kec. Playen)	17		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.01.2.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-				20.000.000
2.22.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(Logandeng, Kec. Playen)	0				1	
					28.965.000				21.042.500
2.22.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Logandeng, Kec. Playen)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	
									5.000.000
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Logandeng, Kec. Playen)	0				2	
					28.015.500.000				18.822.677.202

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Ragam Budaya Yang Dikembangkan (%)		100					
2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman				2.370.000.000				2.161.278.000
		Jumlah dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dalam bahasa jawa (Dokumen)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	6				6	
2.22.08.5.01.001	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjaraan				840.000.000				756.447.300
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjaraan (Dokumen)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	4		Dana Keistimewaan DIY		3	
2.22.08.5.01.002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra				1.130.000.000				1.080.639.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra (Laporan)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	3		Dana Keistimewaan DIY		6	
2.22.08.5.01.003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				400.000.000				324.191.700

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Permuseum yang Dibina dan Dikelola (Unit)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	0		Dana Keistime waan DIY		0	
2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya				2.800.000.000				1.620.958.500
		Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya(Rekomendasi)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	20				20	
2.22.08.5.02.0 002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				2.800.000.000				1.620.958.500
		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan (Objek)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	10		Dana Keistime waan DIY		4	
2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya				3.500.000.000				3.868.687.620
		Jumlah even seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul (Event)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	19				19	
2.22.08.5.03.0 001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota				3.500.000.000				3.868.687.620

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
		Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	1			Dana Keistime waan DIY	1	
2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				500.000.000				-
		Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budaya (Set)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	5				1	
2.22.08.5.04.0 001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya				500.000.000				-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)		5			Dana Keistime waan DIY	0	
2.22.08.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan				357.000.000				237.847.680
		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan yang disusun (Dokumen)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	7				7	
2.22.08.5.05.0 001	Perencanaan Program dan				123.000.000				129.676.680

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2 Kegiatan Urusan Kebudayaan	3	4	5	6	8	9	10	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan (Dokumen)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	3			Dana Keistimewaan DIY	3	
2.22.08.5.05.002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan				234.000.000				108.171.000
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan (Laporan)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	4			Dana Keistimewaan DIY	4	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				18.488.500.000				10.933.905.402
		Jumlah nilai adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan (Nilai)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	10				10	
2.22.08.5.07.001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				1.329.000.000				1.121.703.282
		Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya (Laporan)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	3			Dana Keistimewaan DIY	3	

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.08.5.07.0 002	Pembinaan Lembaga Pnggiat Seni				882.000.000				572.738.670
2.22.08.5.07.0 003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Lembaga Pnggiat Seni yang Dibina (Lembaga)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	2		Dana Keistime waan DIY		2	
					2.500.000.000				918.543.200
2.22.08.5.07.0 004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya (Laporan)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	3		Dana Keistime waan DIY		3	
					300.000.000				302.578.920
2.22.08.5.07.0 005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan (Orang)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	10		Dana Keistime waan DIY		10	
					500.000.000				540.319.500
		Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta (Laporan)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	1		Dana Keistime waan DIY		1	

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja				5.804.000.000			3.533.689.530	
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	14			Dana Keistimewaan DIY	12	
2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah				300.000.000			108.063.900	
		Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	12			Dana Keistimewaan DIY	12	
2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi				320.000.000			486.287.500	
		Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina(Orang)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	40			Dana Keistimewaan DIY	90	
2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				2.126.500.000			1.620.958.500	
		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Laporan)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	9			Dana Keistimewaan DIY	11	
2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni				1.500.000.000			1.080.639.000	

Kode	Urusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Even Pegiat Seni (Laporan)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	3		Dana Keistime waan DIY		3	
2.22.08.5.07.0 011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				2.927.000.000				648.383.400
		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Laporan)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	4		Dana Keistime waan DIY		4	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS KEBUDAYAAN,

CHAIRUL AGUS MANTARA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 86 Tahun 2017, setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat (RENJA) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan segera melakukan penyempurnaan RENJA sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk diverifikasi dan diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkan melalui keputusan kepala PD.

A. Pengertian

Renja Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Kabupaten Gunungkidul adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Renja DPK Kabupaten Gunungkidul merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) DPK yang mengacu pada RKPD. Renja DPK Kabupaten Gunungkidul memberikan gambaran tentang program dan Kegiatan yang akan dikerjakan oleh DPK Kabupaten Gunungkidul dalam satu tahun anggaran.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPK Kabupaten Gunungkidul, evaluasi pelaksanaan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi pelaksanaan Renstra DPK Kabupaten Gunungkidul.

B. Tahap penyusunan Renja PD

Tahap penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul meliputi :

1. Persiapan penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul.
2. Penyusunan Rancangan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul, yang terdiri:

- a. Perumusan Rancangan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul
- b. Penyajian Rancangan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul
- 3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- 4. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

5. Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) adalah :

- 1. RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD;
- 2. Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta, prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD;
- 3. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan Renja PD tahun-tahun sebelumnya;
- 4. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD; dan
- 5. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

6. Keterkaitan dokumen perencanaan

1. Renja PD dengan RKPD

RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disesuaikan dengan program prioritas Perangkat Daerah

2. Renja PD dengan PD

Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.

3. Renja PD dengan Renja Kementrian/Lembaga dan PD Provinsi

Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD Provinsi

1.2. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul (DPK GK) adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Gunungkidul untuk periode satu tahun yaitu tahun 2024. Disamping hal tersebut penyusunan Renja DPK tahun 2024 juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi DPK dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyesuaikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah;
2. Penajaman Indikator dan Target Kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul; dan
4. Penyesuaian pendanaan program prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab yang meliputi :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja DPK Kabupaten Gunungkidul, proses penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul, keterkaitan antara Renja DPK Kabupaten Gunungkidul dengan dokumen Rencana Strategis DPK, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah, provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPK dan Capaian Renstra DPK

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPK

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPK

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

b. Tujuan dan sasaran Renja DPK

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap capaian kinerja Tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Sehingga pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

2.1.1 Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 .

1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN /KOTA

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.620.000,00 terealisasi sebesar Rp 7.420.000 atau 97,38% dan masih ada sisa anggaran sebesar Rp.200.000 atau 2,62%,

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.575.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 15.075,000 atau 81,16% dan masih ada sisa anggaran sebesar Rp.3.500.000,00 atau 18,84%.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 650.000,00 sampai terealisasi 100 %

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 649.000,00 sampai terealisasi 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 660.000,00 sampai terealisasi 100%

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.200.000,00 terealisasi 100%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.285.297.416,00 terealisasi sebesar Rp. 2.948.884.605,00 atau 92,28 %, masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 246.628.630,00 atau 7,72%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.000.000,00, terealisasi sebesar 100%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan sebesar Rp.26.057.600,00 sampai terealisasi sebesar Rp.25.972.600,00 atau 99,67% , masih ada sisa anggaran sebesar Rp.85.000,00 atau 0,33%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan :
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.620.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.620.000,00 atau 100%
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.6.000.000,00 terealisasi sebesar 100%.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu anggaran pada sub kegiatan Rp.61.500.000,00 terealisasi Rp.73.800.000,00 atau 99,80%. Masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 150.000,00 atau 0,20%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.000.000,00 terealisasi 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.42.730.000,00 terealisasi sebesar Rp.34.503.311,00 atau 80,75% , Masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 8.226.689,00 atau 19,25%.
 - Penatausahaan Arsip Dinamis
Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.500.000,00 terelaisasi 100%.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.18.190.000,00 terealisasi sebesar Rp.17.662.000,00 atau 97,10%., Masih ada sisa anggaran sebesar Rp.528.000,00 atau 2,90%.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 321.984.000,00 terealisasi sebesar Rp. 259.182.307,00 atau 80,50%. Masih ada sisa sebesar Rp.62.801.693,00 atau 19,50%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 273.200.000,00 terealisasi Rp.272.959.010,00 atau 99,91% .Masih ada sisa anggaran sebesar Rp.240.990,00 atau 0,09%
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.88.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.86.600.000,00 atau 100 % .
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.11.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.11.697.400,00 atau 99,98%. Masih ada sisa sebesar Rp. 2.600,00 atau 0,02%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.140.504.000,00 terealisasi sebesar Rp. 139.529.000,00 atau 99,31%. Masih ada sisa sebesar Rp.975.000,00 atau 0,69%
- g. Penataan Organisasi

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Pagu anggaran pada sub kegiatan Rp. 1.775.000,00, sampai terealisasi sebesar 100%

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan :

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.760.000,00 terealisasi 100 %.

- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.644.636.700,00 terealisasi sebesar Rp 604.936.590,00 atau 93,84%. Masih ada sisa sebesar Rp. 39.700.110,00 atau 6,16%.

- Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.000.000,00, terealisasi 100%

- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.

98.947.800,00 terealisasi sebesar Rp.91.122.800,00 atau

92,09% .Masih ada sisa sebesar Rp. 7.825.000,00 atau 7,91%

- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Pagu anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.

77.406.000,00 terealisasi sebesar Rp. 77,256.000 atau 99,81%.

Masih ada sisa sebesar Rp. 150.000,00 atau 0,19%

- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.7.000.000,00 terealisasi sebesar 100%.

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kgiatan :

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Pagu anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 22.550.000,00 terealisasi sebesar 100%

- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada Sub kegiatan ini sebesar Rp. 31.401.425,00 terealisasi 100%.

- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

Pagu anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,00 terealisasi 100%

- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Pagu anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 20.884.500,00 terealisasi 100%.

3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
 - Sub Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didyagunakan.
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.500.000,00 sampai terealisasi 100%.
4. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
 - Kegiatan :
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
Pagu Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.87.776.000,00 terealisasi sebesar Rp.87.306.000,00 atau 99,46%. Masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 470.000,00 atau 0,54%.
 - b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Pagu anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 85.881.800 terealisasi sebesar Rp. 78.121.800,00 atau 90,96% . Masih ada sisa sebesar Rp, 7.760.000,00 atau 9,04%
 - c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Informasi ,Akses dan Layanan Kerasipan
Pagu anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.76.893.000,00 terealisasi sebesar Rp. 72.433.000,00 atau 94,20%. Masih ada sisa sebesar Rp. 4.460.000,00 atau 5,80%.

Secara umum, berdasarkan penjabaran Anggaran dan Kegiatan untuk TA. 2022 Realisasi anggara dari semua Program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan total angaran sebesar Rp.5.444.190.960,00 terealisasi sebesar Rp.5.060.487.248 atau 92,95% dengan sisa anggaran Rp.383.703.712,00

- 2.1.2 Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;

Untuk Program dan kegiatan TA. 2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatannya tidak ada Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja, namun secara umum kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan baik.

- 2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022;

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk TA. 2022 berdasarkan target kinerja keluaran Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dapat terlaksana dengan baik. Walaupun capaiannya tidak tepat seperti yang telah direncanakan.

Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang belum maksimal pencapaiannya dan pencapaian target masih deviasi diatas 10% antara lain :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan :

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
 Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 81,16%, terjadi deviasi sebesar 18,84%. Sisa merupakan belanja gaji THL. Penyebab tidak terealisasinya gaji THL karena THL perencanaan cuti melahirkan.
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Realisasi Anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan hanya tercapai 80,75% , terdapat deviasi sebesar 19,25%. Sisa yang tidak terelisasi merupakan sisa belanja tiket, uang taksi dan penginapan.
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 80,05% dari yang ditargetkan sebesar 80,20%, terdapat deviasi sebesar 19,95%, hal ini disebabkan karena Pada waktu menyusun anggaran, belanja jasa listrik , air dan telp dianggarkan untuk belanja 3 unit gedung, yaitu gedung kantor, gedung depo arsip dan gedung layanan perpustakaan umum. Dengan adanya kebijakan bupati bahwa untuk kantor menjadi 1 di gedung layanan perpustakaan umum. dan yang semula gedung kantor di pakai Dinas Pemuda dan Olahraga. Pada waktu perubahan Anggaran (ABT) sebagai sudah di geser ke kegiatan Lain dan Tolok Ukur Kegiatan sudah disesuaikan akan tetapi capaian belum maksimal karena karena jaringan listrik pada gedung layanan perpustakaan baru terpasang mulai bulan november, sebelumnya masih memakai jaringan dari Depo arsip. Jadi beban belanja listrik dari Januari sampai november baru membayar 1 rekening.

2.1.4 Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2022

Dengan adanya wabah pandemic covid-19 dan masih berdampak sampai tahun 2022 berlakukannya PPKM baru dicabut pada akhir tahun 2022 maka kegiatan belum bisa dilaksanakan dengan maksimal Sehingga dalam pencapaian target kinerja TA. 2022 menjadi terhambat.

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang perlu ditempuh untuk mencapai target kinerja di TA. 2022 adalah dengan mengedepankan skala prioritas terutama untuk program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Program kegiatan Utama harus diberikan prioritas lebih dibandingkan dengan Program dan Kegiatan pendukung, sehingga target kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai.

Untuk mengetahui penjabaran Anggaran dan kegiatan pada TA. 2022 yang telah dilaksanakan maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan
Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2022			Target program/kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2		Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renja PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program/kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu								
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			Jumlah Dokumen Renja		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			Jumlah Dokumen Renja Perubahan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100	9	10	11=(10/4) *100	
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Forum PD	3	1	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD	1	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	23	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	23	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	23	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
						Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
						Jumlah Dokumen ROPK	1	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	23	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	3	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2	23	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
						Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	1	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100	9	10	11=(10/4) *100											
2	23	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4	2 Dokumen	5	1 Dokumen	4	2 Dokumen	9	2 Dokumen	10	2 Dokumen	11	100		
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sKPD	17 Laporan	4	17 Laporan	5	1 Dokumen	6	4 Dokumen	7	4 Dokumen	8	4 Dokumen	9	17 Laporan	10	100
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Jumlah Dokumen LKJIP	1 Dokumen	4	1 Dokumen	5	1 Dokumen	6	4 Dokumen	7	4 Dokumen	8	4 Dokumen	9	17 Laporan	10	100
							Jumlah Laporan E monev	4 Dokumen	4	4 Dokumen	5	4 Dokumen	6	4 Dokumen	7	4 Dokumen	8	4 Dokumen	9	17 Laporan	10	100
							Jumlah Laporan TEPR	12 Dokumen	12	12 Dokumen	5	12 Dokumen	6	12 Dokumen	7	12 Dokumen	8	12 Dokumen	9	17 Laporan	10	100
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	4	5 laporan	5	5 laporan	6	5 laporan	7	5 laporan	8	5 laporan	9	5 laporan	10	100
2	23	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14	14 Bulan	5	14 Bulan	6	14 Bulan	7	12 bulan	8	85,7	9	378 orang/bulan	10	100
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	378 orang/bulan	378	378 orang/bulan	5	378 orang/bulan	6	378 orang/bulan	7	378 orang/bulan	8	378 orang/bulan	9	378 orang/bulan	10	100
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1	1 Dokumen	5	1 Dokumen	6	1 Dokumen	7	1 Dokumen	8	100	9	1 Dokumen	10	100
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1 Laporan	5	1 Laporan	6	1 Laporan	7	1 Laporan	8	100	9	1 Laporan	10	100
2	23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan (SPJ)	12 Dokumen	12	12 Dokumen	5	12 Dokumen	6	12 Dokumen	7	12 Dokumen	8	75	9	12 Dokumen	10	100

	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100	9	10	11=(10/4) *100
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
2	23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	100
2	23	001	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani					
2	23	1	2.05	3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani		30 Orang	30 Orang	30 Orang	100
2	23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan			1 Orang	1 Orang	100
2	23	001	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket		6 Pake2t	6 Paket	100
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia		1891 Unit	1891 Unit	1891 Unit	92,46
						Jumlah Komputer yang di beli		1 Unit	1 Unit	1 Unit	100
						Jumlah Laptop yang dibeli		3 Unit	3 Unit	3 Unit	100
						Jumlah bendera merah putih yang dibeli		2 unit	2 unit	2 unit	100

	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100	9	10	11=(10/4) *100
			Jumlah Printer yang dibeli		2 unit	2 unit	2 unit	0			
			Jumlah trolley buku yang dibeli		1 unit	1 unit	1 unit	100			
			Jumlah umbul-umbul yang dibeli		20 unit	20 unit	20 unit	100			
2	23	1	2.06	2	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket			6 paket	6 paket	100
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (SPPD, BKP, Amplop, Disposisi, Voucher BBM, Stopmap),	348 Dokumen	348 Dokumen	100			
			Jumlah Dekorasi/cetak banner		12 m	12 m	12 m	100			
			Jumlah Fotocopy		10.000 lembar	10.000 lembar	10.000 lembar	100			
			Jumlah Jilid Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100			
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket			4 Paket	4 Paket	100
2	23	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		6 Kali	80			
2	23	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan			8 Laporan	8 Laporan	100
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Kali	58,58			
			Jumlah Minum dan Snak yang tersedia untuk rapat		12 Kali	12 Kali	8 Kali	58,58			
			Jumlah perjalanan dinas Luar daerah dalam pulau Jawa		6 Kali	6 Kali	5 Kali	83			
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan			13 Laporan	13 laporan	100
2	23	1	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		250 Dokumen	98			

2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa ckening servis yang terbayar	3	4	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	75	9	10	$11 = (10/4) * 100$
		1			2	3	4	5	6	7	8 = $(7/6) * 100$	4 laporan	4 laporan	4 Laporan	100
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan								100
2	23	001	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terfasilitasi pemeliharaannya									100
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	6 Unit	86,87				
						Jumlah mobil dinas yang terpelihara	7 Unit	7 Unit	7 Unit	6 Unit	86,87				
						Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	7 Unit	86,87				100
						Jumlah motor dinas yang terpelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	7 Unit	86,87				100
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	82 Unit					82 Unit		82 Unit	100
2	23	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara							60 Unit	60 Unit	100
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah CCTV yang terfasilitasi pemeliharaannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100				
						Jumlah Komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100				
						Jumlah Laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100				
						Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100				
						Jumlah Printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100				

2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit												35 Unit	35 Unit	100	
		1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100	9	10	11=(10/4)* 100								
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharannya		20 Unit	20 Unit	20 Unit	100											
						Jumlah Gedung kantor yang dipetbaiki																
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit					1 Unit	1 Unit								100	
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	34 Unit					34 Unit	34 Unit								100	
2	23	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	1 Unit					1 Unit	1 Unit								100	
2	23	001	2.1		Penataan Organisasi																	
2	23	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi SOP		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100											
						Jumlah Dokumen Evaluasi SP		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100											
						Jumlah Dokumen RTP/ SPIP		1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100											
						Jumlah Dokumen Evaluasi SOP		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100											
						Jumlah Dokumen Standar Pelayanan (SP)		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100											
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat																

2	23	002	2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan Perpustakaan terlaksana	8 Layanan	0 Kali	60 Kali	60 Kali	100	9	10	11=(10/4)*100
2	23	2	2.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Sosialisasi e-pusda yang terlaksana	60 Kali	0 Kali	60 Kali	60 Kali	100	9	10	11=(10/4)*100
		1		2	3	6	5	7	7	8=(7/6)*100	1 layanan	1 Layanan	100
2	23	2	2.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000(ITSM : Informasi Teknologi Service Manajemen)		1 layanan						
2	23	2	2.01	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi/Komunitas Bidang Perpustakaan yang terfasilitasi	2 Komunitas	2 Komunitas	2 Komunitas	2 Komunitas	100			
					Jumlah pengadaan perabot layanan perpustakaan umum	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100			
					Jumlah Perpustakaan sekolah, madrasah, desa yang akan di akreditasi yang mendapatkan pendampingan	12 Perpustakaan	12 Perpustakaan	12 Perpustakaan	12 Perpustakaan	100			
					Jumlah perpustakaan sekolah, madrasah, desa yang mendapatkan pendampingan dan monitoring	30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	100			
					Jumlah peserta pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dan desa yang akan di Bimtek	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang				
					Jumlah Raperda Perpustakaan yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
2	23	2	2.01	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan		10 Perpustakaan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	100

2	23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi baru konten lokal hasil penyusunan dan penerbitan Dispusip Gunungkidul	0	50 exemplar	50 exemplar	100								
		1			2	3	Jumlah koleksi baru konten lokal hasil penyusunan dan penerbitan Dispusip Gunungkidul	0	50 exemplar	50 exemplar	100							
2	23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4	40 Exemplar	40 Exemplar	8=(7/6)*100	9	40 Exsemplar	40 Exsemplar	10	11=(10/4)*100			
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Layanan perpustakaan Keliling untuk Masyarakat Pinggiran	0 Lokasi	42 Lokasi	42 Lokasi	100								
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka layanan Kunjung Peperustakaan dari sekolah	0 pemustaka	412 pemustaka	412 pemustaka	100								
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	2 layanan											
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bibliografi daerah Kabupaten Gunungkidul yang di terbitkan	5 Buku	5 Buku	5 Buku	100								
						Jumlah Judul pengadaan terbitan berkala	14 Judul	14 Judul	14 Judul	100								
						Jumlah penambahan koleksi perpustakaan digital/e-book yang terbeli	1 paket	1 paket	1 paket	100								
						Jumlah Pengadaan buku	100 Exemplar	100 Exemplar	100 Exemplar	100								
						Jumlah penyediaan koleksi hibah buku , sosialisasi dan distribusi program sedekah buku SAJISAKA	500 buku	500 buku	500 buku	100								
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Pustaka yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan.	2522 Exemplar	2522 Exemplar	2522 Exemplar	100	2522 Exemplar	2522 Exemplar	2522 Exemplar	100				

2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buletin perpustakaan yang tersedia .	4	5	6	7	50 buletin	50	8=(7/6)*100	9	105 Dokumen	10	11=(10/4)*100
		1			2	3	4	5	6	7	100 buletin	50	8=(7/6)*100	9	105 Dokumen	10	11=(10/4)*100
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105 Dokumen							105 Dokumen	105 Dokumen		100
2	23	002	2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca terlaksana											
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah nominasi lomba bercerita tingkat kabupaten (pelajar dan umum/ pustakawan)		10 nominasi	10 nominasi	10 nominasi	10 nominasi	100					
						Jumlah perpustakaan sekolah/madrasah dan desa (SD/MI, SMP/MTs dan Perpusdes) yang di evaluasi/lomba stimulasi		..perpustakaan	11 perpustakaan	11 perpustakaan	100						
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan Pendidikan dasar	16 Locus							16 Locus	16 Locus		100
2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung layanan perpustakaan umum yang dibangun		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100		-	-		-

2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah kado pintar bagi pengunjung atau anggota perpustakaan	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	100	360 paket	360 paket	9	10	11=(10/4)*100
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/Kota	2	360 paket								360 Orang	360 Orang	100
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan yang memahami program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	4			1 Perpudes(WK)	1 Perpudes(PIWK)	100	100					
						Jumlah perpustakaan yang mendapatkan pendampingan lomba tingkat provinsi			0 perpustakaan	2 perpustakaan	2 perpustakaan	100	100					
						Jumlah Perpustakaan Desa yang mengikuti Fasilitas kegiatan pelibatan masyarakat bagi Perpudes			0 perpudes	15 perpudes	15perpudes	100	100					
						Jumlah peserta strategi pengembangan perpustakaan bagi perpudes replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial			0 orang	25 orang	25 orang	100	100					
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi social di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4	68 Perpustakaan								68 Perpustakaan	68 Perpustakaan	100
2	23	2	2.02	5	Pemilihan duta baca tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	5	5 Orang								5 Orang	5 Orang	100
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar Jumlah naskah kuno yang dialih media dan dialih aksara												

2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	200 Pengguna					200 Pengguna	200 Pengguna	100
---	----	---	------	---	--	---	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	-----

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Gunungkidul merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPK Kabupaten Gunungkidul dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan DPK Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya berusaha seoptimal mungkin dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun indikator pencapaian kinerja pelayanan DPK Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan Literasi Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan target yang ditetapkan . Pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 22,1138 tahun 2023 sebesar 22.6038 Tahun 2024 sebesar 23,1050% dan tahun 2025 sebesar 23,6038 dan 2026 sebesar 24,1678%
2. Terwujudnya Kearsipan yang berkualitas dengan Indikator Kinerja Utamanya persentase pengelolaan arsip secara baku. Pada Tahun 2022 sebesar target 78,26%, tahun 2023 sebesar 80,43%, Tahun 2024 sebesar 82,61%, Tahun 2025 sebesar 84,78% dan di tahun 2026 sebesar 86,95% .
3. Realisasi keuangan Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul mencapai 92,95 %. Sedangkan untuk pencapaian kinerja Utama Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 baik untuk bidang perpustakaan maupun bidang kearsipan capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 22,1138 dengan capaian kinerja 55,02 sedangkan untuk bidang Kearsipan dari target 78,26% tercapai 78,72%. selengkapnya tersaji pada tabel 2.2 .

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU ,SPM, IKK)	Satuan (IKU,SPM,IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INDIKATOR KINERJA UTAMADAN INDIKATOR KINERJA KUNCI										
1	Persentase Peningkatan Pemustaka	Persen	14,59	-	-	-	(6,84)				Bidang Perpustakaan
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	22,113 8	22,6038	23,1050		55,02	22,6038	23,1050	Bidang Perpustakaan
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	80	-	-		82,60				Bidang Kearsipan
	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	-	78,26	80,43	82,61		78,72	80,43	82,61	Bidang Kearsipan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul adalah kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 120 tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, kedudukan dan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, terdiri atas :

- 1). Kepala Dinas;
- 2). Sekretariat terdiri atas
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum.
- 3). Bidang Perpustakaan terdiri atas :
 - a) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengembangan
 - b) Kelompok Substansi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian bahan Perpustakaan
 - c) Kelompok Substansi layanan dan informasi Perpustakaan.
- 4). Bidang Kearsipan terdiri dari :
 - a) Kelompok Substansi Arsip Dinamis;
 - b) Kelompok Substansi Arsip Statis;
 - c) Kelompok Substansi Layanan dan Informasi Kearsipan.
- 5). UPT dan
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan organisasi yang sudah ditetapkan tersebut, DPK Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh pejabat Kepala Dinas (level eselon II) Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan dengan melibatkan peran aktif para pejabat fungsional terutama pejabat fungsional pustakawan, pejabat fungsional arsiparis secara efektif. Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi DPK Gunungkidul saat ini adalah keterbatasan jumlah para pejabat fungsional yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya sangat terbatas. Akibat dari kondisi tersebut, tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memacu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Permasalahan pelaksanaan Program Pengembangan Kearsipan adalah :

1. Belum tertibnya implementasi penyusutan arsip oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah belum optimal;
2. Keberadaan records centre sebagai tempat yang menjadi pusat penyimpanan arsip inaktif pada masing-masing perangkat daerah belum optimal sehingga masih sering terjadi arsip bertumpuk tidak tertib pada berbagai unit kerja;
3. Apresiasi terhadap penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai kesejarahan masih rendah;
4. Perangkat daerah sebagai pencipta arsip belum mengadakan sarana dan prasarana kearsipan secara efektif;
5. Pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap kearsipan masih rendah.

Sedangkan permasalahan Program Pembinaan Perpustakaan adalah :

1. Masih minimnya kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan Perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan di daerah;
2. Kurangnya dukungan teknis berupa Penganggaran serta Sarana dan prasarana dari pengambil kebijakan untuk pengembangan perpustakaan termasuk pengembangan jabatan fungsional pustakawan;
3. Kesadaran masyarakat akan minat dan budaya baca masih kurang.

2.3.2. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan Renstra melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program. Dalam Kedudukannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Gunungkidul serta adanya Renstra tersebut, telah membuka peluang untuk melakukan perannya berkaitan dengan isu strategis bidang perpustakaan yaitu pemberdayaan perpustakaan dalam mencerdaskan masyarakat, dan bidang kearsipan yaitu arsip sebagai pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Menurut tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang

harus dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul terkait visi Bupati Periode 2021-2026 "Terwujudnya peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang bermartabat Tahun 2026" program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 program prioritas yang dilaksanakan DPK di bidang perpustakaan adalah mengimplementasikan :

1. Misi kesatu RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yaitu *Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis*, dengan sasaran daerah adalah : *Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat*, melalui strategi *Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel*, dan arah kebijakan daerah: *Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah*, dengan sasaran PD : *Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku* melalui prioritas PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP serta indikator kinerja program: *Persentase Pengelolaan Arsip secara baku*
2. Misi kedua RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026

Yaitu "Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah " melalui strategi *Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan* dan arah kebijakan

daerah *Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan formal serta pendidikan dasar* dengan sasaran PD *Peningkatkan Nilai Indeks pembangunan literasi Masyarakat* melalui prioritas PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN dengan indikator kinerja program *Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO* dengan indikator kinerja *Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar*

Dibidang kearsipan, program prioritas DPK dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yakni misi kesatu RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 yaitu *Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis* dengan sasaran daerah adalah : *Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat*, melalui strategi *Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel*, dan arah kebijakan daerah: *Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah*, dengan sasaran PD : *Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku* melalui prioritas PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP serta indikator kinerja program: *Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* dengan indikator kinerja program

Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik .

Program di bidang Kearsipan tersebut dilaksanakan melalui tiga kegiatan utama, yakni 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dan 3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota. Tiga kegiatan utama tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam sub-sub kegiatan, diantaranya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN dan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

Program prioritas bidang perpustakaan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuni , dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yakni Misi kedua RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 *Yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas* dengan sasaran daerah adalah *Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia meningkat* melalui strategi *Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan* dan arah kebijakan daerah *Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan formal serta pendidikan dasar* denganyang dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yakni 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan Kegiatan Pelestarian Naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota .

Program pembinaan perpustakaan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota , Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat, Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca , Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan serta Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan Kegiatan Pelestarian Naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota

dijabarkan dalam sub kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk di lestarikan dan didayagunakan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.

Tantangan dan Peluang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

- a. Peluang di Bidang Perpustakaan sangat berkaitan secara langsung dengan bidang pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang mesti mendapatkan pelayanan secara optimal. Bidang pendidikan tentu akan berkembang maju apabila didukung oleh perpustakaan yang modern, dan dapat diandalkan. Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya tingkat pendidikan yang berkualitas dengan unsur pendukungnya yaitu perpustakaan. Oleh karena itu penyelenggaraan perpustakaan dapat terus berkembang seiring dengan dinamika pengembangan pendidikan;
- b. Peluang di Bidang Kearsipan sebagai bahan utama yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Informasi yang berupa arsip tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan data untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaporan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat terjadi apabila didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang tertib oleh masing masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip.
- c. Tantangan bidang perpustakaan dan kearsipan untuk masa depan adalah kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat mestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan pelayanan perpustakaan.
- d. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 , bahwa Visi-nya adalah *“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang bermartabat Tahun 2026 ”* Visi tersebut disertai dengan penetapan Misi-nya sebagai berikut :
 1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
 2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah .

Berkaitan dengan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan tersebut, untuk mencapai pembangunann daerah telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran pembangunan menurut Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan termasuk urusan wajib

yang semestinya mampu memberikan kontribusi atau dampak terhadap Visi dan Misi tersebut.

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

a. Bidang Perpustakaan mengimplementasikan MISI KEDUA RPJMD Gunungkidul, *adalah* : Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

1. Meningkatkan minat baca masyarakat.

2. Mengembangkan perpustakaan sesuai standar nasional.

3. Mengembangkan perpustakaan berbasis IT

4. Mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Kebijakan /tindaklanjut dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu;

a. Mengadakan kegiatan terkait minat baca : bedah buku, pembentukan klub baca, dan lomba-lomba terkait literasi.

b. Pendampingan perpustakaan sekolah/madrasah dan desa

c. Pemasyarakatan E-pusda dan perpustakaan dengan berbasis IT

d. Mengembangkan program transformasi perpustakaan daerah

a. dan desa/kelurahan

b. Bidang Kearsipan mengimplementasikan MISI KESATU yakni: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis

1. Peningkatkan pengelolaan arsip Perangkat Daerah

2. Peningkatan tertib arsip dan administrasi

3. Peningkatan khasanah arsip LKD

4. Peningkatan sumber daya kearsipan.

Kebijakan /tindaklanjut dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:

a. Melaksanakan pengawasan kearsipan bagi Perangkat daerah

b. Melaksanakan pendampingan penataan arsip pada Perangkat Daerah

c. Melaksanakan penelusuran dan akuisisi arsip

d. Menyelenggarakan pelatihan dan forum kearsipan.

2.4. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan perencanaan dari bawah dengan berbagai pertimbangan diantaranya ketersediaan SDM, dana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan faktor – faktor lain yang terkait, berdasarkan skala prioritas sehingga diharapkan perencanaan yang disusun akan mampu menjawab kebutuhan.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul kami sajikan dalam tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kab. Gunungkidul, Semual, Kecamatan, Semual, Kelurahan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	4.219.605.274,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kab. Gunungkidul, Semual, Kecamatan, Semual, Kelurahan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	2.579.377.178,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semual, Kecamatan, Semual, Kelurahan	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,143	47.137.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semual, Kecamatan, Semual, Kelurahan	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,143	26.411.100,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.025.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	800.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	20.947.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	23.897.500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	305.400,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	450.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	450.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	6.615.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	508.200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semuran, Kecamatan, Semuran, Kelurahan	Jumlah Laporan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88 Laporan	448.450.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semuran, Kecamatan, Semuran, Kelurahan	Jumlah Laporan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		601.758.790,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.150.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	46.895.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	249.300.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	288.719.190,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	175.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	266.144.600,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semuran, Kecamatan, Semuran, Kelurahan	Jumlah barang milik daerah yang terfasilitasi pemeliharannya.	213	245.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semuran, Kecamatan, Semuran, Kelurahan	Jumlah barang milik daerah yang terfasilitasi pemeliharannya.	213	65.350.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82 Unit	125.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	62.400.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Nilai Tingkat Kegemarann Membaca		386.940.475,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Nilai Tingkat Kegemarann Membaca		172.777.500,00	
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semuata Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		294.670.000,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semuata Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		172.777.500,00	
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	6.350.000,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	0,00	
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	46.000.000,00	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	24.682.500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	40 Exemplar	5.250.000,00	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Exemplar	0,00	
4	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2 Layanan	125.000.000,00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2 Layanan	98.730.000,00	
5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2522 Exemplar	104.700.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Exemplar	49.365.000,00	
6	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan		Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	100 Dokumen	7.370.000,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan		Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	0 Dokumen	0,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semuran, Semuran, Kelurahan	Indeks Pembudayaan Gemar Membaca Terlaksana	110,5	92.270.475,00	dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semuran, Semuran, Kelurahan	Indeks Pembudayaan Gemar Membaca Terlaksana	110,5	0,00	
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	16 Lokus	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	27.066.375,00	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0 Orang	0,00		
2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	360 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	11.025.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0 Orang	0,00			
3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	68 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	44.849.700,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Perpustakaan	0,00		

4	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	5 Orang	9.329.400,00	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	0,00			
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialihme dia dan terdaftar	3	11.025.000,00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah exemplar pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota	3 eksemplar	11.025.000,00	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah exemplar pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota	3 eksemplar	0,00	
1	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan difayagunakan	3 eksemplar	11.025.000,00	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan difayagunakan	0 eksemplar	0,00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan arsip secara baku	82,61	259.025.700,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan arsip secara baku	82,61	145.625.000,00	

1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semarang, Semua Kelurahan	Indeks Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1002	55.819.000,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semarang, Semua Kelurahan	Indeks Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1002	23.447.500	Indeks Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1002	23.447.500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	45.766.200,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	23.447.500			
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semarang, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	20	109.494.700,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semarang, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	20				
1	Akuisisi, Pengolahan, dan Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	20 Arsip	109.494.700,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	2 Arsip	48.130.000,00			
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semarang, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1	93.712.000,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semarang, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		74.047.500,00			

1	Penyediaan Informasi, Akses Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN dan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	200 Pengguna	16.995.000,00	Penyediaan Informasi, Akses Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	74.047.500,00
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	76.717.000,00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		
		TOTAL		4.876.596.449,00				2.897.779.678,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Sesuai Tupoksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan usulan Program dan Kegiatan Prioritas

1. Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Dinamis
 - Pendampingan Pengelolaan arsip kalurahan
2. Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca
 - Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Desa berbasis inklusi sosial
 - Fasilitasi Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Desa

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari para pemangku kepentingan ada 19 usulan . Usulan yang terakomodir ada 8 Usulan, 2 usulan PIWK Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Desa berbasis inklusi sosial dan 6 usulan PIS Pendampingan Pengelolaan arsip kalurahan.

Mendasar pada Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.122/04391, Tanggal 21 Juni 2023, bahwa lampiran poin 4 Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kabupaten , baik melalui pendanaan PIS dan PIWK tahun 2024 dirasionalisasi . Dijelaskan pada lampiran poin 4 bahwa Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kabupaten , baik melalui pendanaan PIS dan PIWK yang mengalami rasionalisasi ditahun 2023 dan 2024 akan menjadi prioritas dalam perencanaan tahun 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Dalam menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan harus sesuai dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (RKP 2023) merupakan RKP Tahun kedua RPJMN 2020-2024. Tema prioritas pembangunan Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah juga memperhatikan arah kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut :

a. Isu Strategis Nasional

- Percepatan penghapusan kemiskinan
- Penanganan Stunting
- Pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19
- Middle income trap riset, alokasi sumberdaya dan human capital
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Pengurangan resiko bencana
- Pasokan energi dan pangan
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Reformasi Birokrasi
- Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024
- Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045

b. Isu Strategi provinsi

- Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024
- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19
- Penanganan Stunting
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pasokan energi dan pangan
- Perencanaan Pembangunan jangka Panjang 2025-204

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah *"Optimalisasai Ketahanan Ekonomi Daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan Infrastruktur , Investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia"*

sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2024 adalah :

1. Peningkatan Ekonomi:

- a. Investasi Pariwisata

- b. Pengembangan Sektor Unggulan
- 2. Penurunan angka kemiskinan, Kemiskinan Ekstim dan Penanganan Stunting;
- 3. Peningkatan Pangan;
- 4. Peningkatan kualitas SDM;
- 5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- 6. Ketentraman dan Ketertiban;
- 7. Reformasi Birokrasi.

Demi tercapainya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selaras dengan Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterjemahkan ke dalam Sasaran Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul diantaranya kapasitas sumber daya manusia meningkat sesuai dan sejalan dengan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsinya turut serta mendukung prioritas pembangunan yaitu :

- 4. Peningkatan kualitas SDM;
- 7. Reformasi Birokrasi

Program prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijabarkan kembali dalam program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul didasari atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPK yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA DPK. Untuk sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dirumuskan dengan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Rancangan RKPD Tahun 2024 Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan disempurnakan dalam proses verifikasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 yang disajikan dalam tabel dibawah dibawah ini

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1.	Terwujudnya Kearsipan yang berkualitas	Tingkat pengelolaan arsip secara baku Tahun 2026	82,61
2.	Terwujudnya Peningkatan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat Tahun 2026	23.1050

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran PD	Indikator sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
1.	Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	82,61%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,07
3	Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat.	23,1050

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	$\frac{\sum \text{PD yang menerapkan pengelolaan arsip scr baku}}{\sum \text{Total PD}} \times 100$	82,61%
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat.	<p>Jumlah total hasil perhitungan UPLM 1 s/d UPLM 7 X 100</p> <p>Indikator IPLM dapat diukur dari 7 (tujuh) Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang mencakup :</p> <p>1) UPLM1 = Pemerataan layanan perpustakaan Rumus : $\frac{\text{Jumlah Perpustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$</p> <p>2) UPLM2 = Ketercukupan koleksi Rumus : $\frac{\text{Jumlah Koleksi}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$</p> <p>3) UPLM3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan</p>	23,1050

		<p>Ketersediaan tenaga perpustakaan</p> <p>Rumus : $\frac{X}{100}$</p> <p>Jumlah Penduduk</p>	
		<p>4) UPLM4 = Tingkat kunjungan masyarakat per hari</p> <p>Jumlah kunjungan pemustaka</p> <p>Rumus : $\frac{X}{100}$</p> <p>Jumlah Penduduk</p>	
		<p>5) UPLM5 = Jumlah perpustakaan ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan)</p> <p>Jumlah Perpustakaan ber-SNP</p> <p>Rumus : $\frac{X}{100}$</p> <p>Jumlah Perpustakaan</p>	
		<p>6) UPLM6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi</p> <p>Keterlibatan masyarakat dlm kegiatan sosialisasi dan promosi di wilayah binaan</p> <p>Rumus : $\frac{X}{100}$</p> <p>Jumlah Penduduk</p>	
		<p>7) UPLM7 = Jumlah anggota perpustakaan.</p> <p>Jumlah anggota perpustakaan di Perpusda dan wilayah binaan</p> <p>Rumus : $\frac{X}{100}$</p> <p>Jumlah Penduduk</p>	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan.

Menurut tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang harus dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul terkait visi, misi dan program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026, program prioritas yang akan dilaksanakan DPK untuk lima tahun mendatang di bidang perpustakaan adalah mengimplementasikan **misi kesatu dan kedua RPJMD** Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yaitu :

- **Misi kesatu RPJMD** Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yaitu ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis***, dengan sasaran daerah adalah : *Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat, melalui strategi Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel, dan arah kebijakan daerah: Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah, dengan sasaran PD : Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP serta indikator kinerja program: Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku dengan 3 kegiatan:*

- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Misi kedua RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026

Yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan sasaran daerah adalah Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia meningkat melalui strategi Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan arah kebijakan daerah Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan formal serta pendidikan dasar dengan sasaran PD Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat melalui prioritas PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN dengan indikator kinerja program Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO dengan indikator kinerja Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar dan

dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai tugas pokok dan fungsi DPK di bidang perpustakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut.

- a. Pengetahuan yang pesat berkembang dan informasi yang ditulis dan arsip yang diciptakan semakin banyak sehingga menuntut pengembangan perpustakaan dan kearsipan
- b. Peluang memanfaatkan pelimpahan urusan yang cukup luas di bidang perpustakaan dan kearsipan
- c. Dukungan program kegiatan yang sinkron dari Perpunas, ANRI dan BPAD DIY
- d. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan lembaga untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan
- e. Adanya animo masyarakat untuk menambah dan memanfaatkan layanan perpustakaan di luar jam kerja
- f. Adanya dukungan tambahan personil melalui tenaga harian lepas
- g. Peluang kerjasama mengikuti diklat dan bimtek di Pusat dan Provinsi
- h. Berkembangnya peluang kerjasama dengan banyak pihak untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan

4.2 Anggaran Belanja

Sesuai dengan RKPD kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD. Pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.897.779.923,00 termasuk didalamnya Belanja Pegawai / Belanja gaji sebesar Rp.1.836.332.288,00

Tahun Anggaran 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan 4 Program, 13 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan .

Program dan kegiatan di kelompokkan dalam dua jenis yaitu Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan,

Indikator Kinerja Utamanya adalah Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Total kebutuhan dana sebesar Rp.172.777.500,00 yang terdiri dari 2 (Kegiatan) kegiatan yaitu:

- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.172.777.500,00

Sub Kegiatan :

- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
- Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

- b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran Rp. 0

Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Indikator kinerja program tersebut adalah Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar, dengan total kebutuhan dana sebesar Rp.0 dan target kinerja program sebesar 100 %. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terdiri dari satu Kegiatan yaitu : Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip mempunyai indikator program Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku dengan total pagu anggaran di Tahun 2024 sebesar Rp. 145.625.000,00 terdiri dari tiga (3) kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan : Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
- c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan : Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIK dan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

Program dan kegiatan prioritas disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
**Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan
 Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2022**

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia meningkat	Peningkatkan Nilai Indeks pembangunan literasi Masyarakat	Nilai Indeks pembangunan literasi masyarakat.	23,1050	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	172.777.500,00	DPK
					2.23.02.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	172.777.500,00	
					2.23.02.02.01.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	
					2.23.02.02.01.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.682.500,00	
					2.23.02.02.01.3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	
					2.23.02.02.01.7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	98.730.000,00	

					2.23.02.02.01.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	49.365.000,00	
					2.23.02.02.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.23.02.02.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	DPK
					2.23.02.02.02.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	0,00	
					2.23.02.02.02.02	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0,00	
					2.23.02.02.02.03	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	0,00	
					2.23.02.02.02.04	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	DPK
					2.23.03.2.02	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	0,00	DPK

					2.23.03.2.02.02				Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	0,00	DPK
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	82,61	2.24.02.201			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	145.625.000,00	DPK	
					2.24.02.201.			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	23.447.500,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					2.24.02.201.03			Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	23.447.500,00		
					2.24.02.202			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	23.447.500,00		
					2.24.02.202.02			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	23.447.500,00		
					2.24.02.203			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	48.130.000,00		
					2.24.02.203.02			Penyediaan Informasi dan Akses Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	48.130.000,00		
					2.24.02.203.02			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			

4. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada satu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu penunjang Bidang Perpustakaan dan Kearsipan . Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik . Program Penunjang pada Urusan Bidang Perpustakaan tersebut terdiri dari 7 kegiatan dengan pagu indikatif Rp.2.579.377.178,00 dan target program 100% Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul TA. 2024 berdasarkan rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinetja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Kinerj a	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catata n Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2		URUSAN PEMERINTAHAN Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	2,579,377,17 8.00			100	4.287.176.829, 00	
2	23	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,143	26,411,100.0 0		5,143	47.601.250,00	

2	23	1	1	2.01	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	800,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	11,576.250,00
2	23	1	1	2.01	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	23,897,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	21.995,00
2	23	1	1	2.01	3	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	305,00.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	800.000,00
2	23	1	1	2.01	4	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	450,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	800.000,00
2	23	1	1	2.01	5	2.01	5	Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	450,000.00	Dana Transfer Umum-Dana	100 Persen	800.000,00

2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	508,200.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	7.000.0000,00		
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.630.000,00		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	23	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		130,667	1,867,609,788.00				3,103.138.829,00
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	378 Orang/bulan	1,836,332,288.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	3.069.078.829,00	

2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	525,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	2,310,000,00
2	23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	30,752,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	31.750.000,00
2	23	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4	0,00			13.000.000,00
2	23	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4,400,000,00
		1										10

2	23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	8,600,000,00
2	23	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah		65,2	18,247,500.00			206.977.000,00
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	15,000,000,00
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	5,051,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	98,952,000,00
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	3,100,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	8,500,000,00
2	23	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4,300,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	7.875.000,00

	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,646,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	72.150.000,00
2	23	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Dokumen	2,150,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	4,500,000,00
2	23	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana		0 Unit	0,00				85,000,000,00
2	23	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	40.000.000,00
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Gedung Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	45.000.000,00
2	23	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Gunungkidul	88 Laporan	601,758.790.00				471.265,000,00

2	23	2	23	2	23	02	201	201	1	2	23	2	2.01	1	Pengembangan Perustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Per pustakaan	24,682,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48.300.000,00		
2	23	2	23	02	201	201	201	201	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (TSM : Information Technology Service Management)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Layanan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.667.000,00							
2	23	2	23	02	201	201	201	201	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (TSM : Information Technology Service Management)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Per pustakaan	24,682,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48.300.000,00							

2	23	2	2.01	'03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Exemplar	0.00					5,512,500.00
		1					3	4	5	6	7	8	9	10	
2	23	02	201	02	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Layananan	98,730,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				131.250.000,00	
2	23	02	201	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Eksemplar	49,365,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				109.935.000,00	

2	23	2	201	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7.738.000,00
2	23	02	202		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembudayaan Gemar Membaca Terlaksana		110,5	0,00					96.418.049,00
2	23	02	202	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Lokus	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28.149.000,00
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	23	2	202	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.576.250,00

2	23	02	202	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Perpustakaan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					47.095.000,00
2	23	02	202	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keempatnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.597.799,00
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia dan terdaftar		0 Naskah	0,00				3 Naskah	11.576.250,00	
2	23	03	201		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah exemplar pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota		0 Naskah	0,00					11.576.250,00	
2	23	03	201	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan difayagunakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Naskah	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.576.250,00
						2	3	5	6	7	8	9	10		

2	24					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku		82,61 Persen			84,78 Persen	271.978.000,00
2	24	02				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	145,625.000,00			58.611.000,00
2	24	02	201	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semual, Kecamatan, Semual Kelurahan	1 Laporan	23,447,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		58.661.000,00
2	24	2	202			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		2 Arsip	48,130,000.00			114.969.000,00
2	24	2	202	,02	Akuisasi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Kab. Gunungkidul, Semual, Kecamatan, Semual Kelurahan	2 Arsip	48,130,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		114.969.000,00
2	24	2	203			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		100 Pengguna	74,047,500.00			98,398.000,00

2	24	02	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kab. Gunungkidul, Semarang, Semua Kecamatan, Kelurahan	100 Pengguna	74,047,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.505.000,00
		1		2	3	4	5	6	7	10
2	24	2	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semarang, Semua Kecamatan, Kelurahan	Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80.893.000,00
TOTAL										4.976.551.628,00
									2.897.779.678,00	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

KISWORO

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala OPD untuk menyiapkan Rencana Kerja OPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra OPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja OPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja OPD. Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja OPD.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sehingga Renja Dinas Pertanian dan Pangan yang disusun tahun 2024 merupakan terjemahan dari Renstra tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan tahun 2024 dengan evaluasi tahun 2023 sebagai dasar pemikiran untuk menentukan target dan indikator baru untuk tahun 2024. Renja tahun 2024 juga mengacu kepada visi misi Bupati Gunungkidul tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 serta untuk mensinergikan pembangunan tahun 2023 dengan mengikuti Renja Kementrian Pertanian Republik Indonesia tahun 2022.

Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tiga urusan yaitu pangan, pertanian dan kebudayaan. Urusan Pangan merupakan urusan wajib karena harus ada di setiap pemerintahan daerah yang di wakili oleh bidang ketahanan pangan. Urusan Pertanian merupakan urusan pilihan karena tidak semua daerah memiliki daerah pertanian dimana Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah pertanian yang memiliki potensi tanamanan pangan, perkebunan dan hortikultura yang masih dapat dikembangkan. Sedangkan urusan kebudayaan tahun 2024 digunakan untuk melaksanakan dan melestarikan kegiatan lumbung mataraman berbasis pekarangan, dengan filosofi Nandur Sing Dipangan, Mangan Opo Sing Ditandur, hal ini dilaksanakan secara berkelanjutan. Tujuan utama dari kegiatan lumbung mataraman adalah mengentaskan kemiskinan, dampak dari kegiatan adalah meningkatkan gisi keluarga hingga meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. kegiatan lumbung mataraman diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan pangan

local berbasis kearifan lokal.

Rencana Strategis menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan Pangan dalam menyusun Rencana Kerja PD dalam kurun waktu 5 tahun. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gunungkidul, sedangkan bagi Dinas Pertanian dan Pangan, RKPD ini akan dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pertanian dan Pangan menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaan kegiatan di urusan pertanian, pangan, dan kebudayaan. Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis (Rentra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Surat Edaran Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 adalah agar pelaksanaan pembangunan urusan pertanian dan pangan lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat maupun Provinsi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 :

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana daerah wajib menyusun RKPd yang didasari pada penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan urusan pertanian dan pangan.
3. Menggambarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang menyangkut urusan pertanian, pangan, dan kebudayaan dari berbagai sumber pendanaan.
4. Sebagai bahan dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara Dinas Pertanian dan Pangan
5. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan pertanian dan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
6. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.

7. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan
- 2.4. *Review* terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dievaluasi dengan parameter indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026. Dengan mengevaluasi capaian indikator tersebut diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi pengembangan kedepannya.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 yang telah disepakati. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi sasaran.

Untuk hasil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Tahun 2023 dengan rincian seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan
Sampai Dengan Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+(10/4)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	99,74 Persen	99,74	100 Persen	100 Persen	100
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	13 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	100	13 jenis	13 jenis	100
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	225 ASN	171 ASN	225 ASN	225 ASN	100	225 ASN	225 ASN	100
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	10 layanan	10 layanan	10 layanan	10 layanan	100	10 layanan	10 layanan	100
		Persentase Administrasi Umum terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	5 jenis	0 jenis	5 jenis	5 jenis	100	0 jenis	0 jenis	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100	3 layanan	3 layanan	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100	4 layanan	4 layanan	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2,09										
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Layanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100	100 persen	100 persen	100
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terlaksana	3 jenis	3 jenis	100 Persen	100 Persen	100	0	0	0
		Persentase layanan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penurunan konsumsi beras/kapita/tahun	72 Kg	83 Kg	80 Kg	80 Kg	100	76 Kg	76 Kg	100
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka ketersediaan kalori penduduk perkapita	3025 kkal/kap/hari	3005 kkal/kap/hari	3012 kkal/kap/hari	3012 kkal/kap/hari	100	3018 kkal/kap/hari	3018 kkal/kap/hari	100
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Ketersediaan Pangan (Beras) Angka konsumsi kalori penduduk perkapita	125424 ton	123868 ton	124177 ton	124177 ton	100	124177 ton	124177 ton	100
		Persentase layanan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.04.2.02	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Keunungan Kabupaten/ Kota</i>	<i>jumlah dokumen analisis kerawanan pangan yang tersusun</i>	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1 jenis	100
		<i>persentase desa rawan pangan yang terfasilitasi</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman	93 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	100	90 Persen	90 Persen	100
2.09.05.2.01	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana</i>	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
		<i>Persentase Pengawasan keamanan pangan</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
2.09.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
2.22.08.	<i>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</i>	<i>Jumlah kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana</i>	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1 jenis	100
		<i>Persentase pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana</i>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan	1679379,12 Ton	1524133,97 Ton	1553666,25 Ton	1553666,25 Ton	100	1615281,46 Ton	1615281,46 Ton	100
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang terlaksana	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
		Persentase pengawasan sarana pertanian yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keunenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi benih padi tersertifikasi	12000 kg	11000 kg	11000 kg	11000 kg	100	11000 kg	11000 kg	100
		Persentase pemenuhan produksi benih padi tersertifikasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	100 Persen	100 Persen	99,79 Persen	99,79 Persen	99,79	100 Persen	100 Persen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
		Persentase pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100	10 jenis	10 jenis	100
		Persentase layanan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase bencana pertanian yang tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	98 Persen	98	100 Persen	100 Persen	100
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	7 jenis	100
		Persentase luas puso/ gagal panen yang tertanggulangi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	126 kelompok	116 kelompok	118 kelompok	118 kelompok	100	122 kelompok	122 kelompok	100
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang terlaksana	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
		Persentase layanan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	100,28 persen	100,28	100,28	100 persen	100 persen	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Pengukuran target kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul ditetapkan berdasar sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja yang ditetapkan dengan melihat bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Beberapa hasil komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan sebagai indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan telah di evaluasi untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pencapaian sasaran strategis yang dicerminkan dalam pencapaian Indikator Kinerja. Pencapaian kinerja oleh Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	pendapatan per capita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian:Jumlah penduduk di sektor pertanian)											
	Pendapatan sektor pertanian	(dalam juta)										
	padi	Rp/ha	20,77				26,34					
	jagung	Rp/ha	16,75				24,62					
	kedelai	Rp/ha	8,5				22,21					
	kakao	Rp/ha	28,08				15,69					
	kelapa	Rp/ha	67,14				23,30					
	mete (biji)	Rp/ha	23,15				4,00					
	tembakau	Rp/ha	76,58				56,72					
	bawang merah	Rp/ha	175,03				147,28					
	cabe besar	Rp/ha	67,14				76,53					
	Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu	kelompok	117				117					
2	Pertumbuhan Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:											
	1) Ketersediaan Pangan (Beras)	ton	125.111,00				162.167					

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2) ketersediaan data dan informasi harga pasar											
	Beras IR I	Rp	10.815				11.400					
	Beras IR II	Rp	9.810				9.259					
	Jagung Pipil Kering	Rp	5.250				6.645					
	Kedelai Lokal	Rp	8.400				11.941					
	3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)		89,2				88,2					
	4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)		91				84,9					
3	Tingkat produksi komoditas unggulan tanaman pangan											
	Padi	ton	292.486				301.161					
	Jagung	ton	209.500				275.914					
	Kedelai	ton	7.500				4.394					
	Ubi Kayu	ton	891.737				829.556					
4	Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan:											
	Kakao	Kg	520.000				555.147					
	Mete	Kg	634.600				453.545					
	Tembakau	Kg	541.950				169.700					
	Kelapa	butir	25.158.062				30.218.226					
	Bawang Merah	ton	484,78				1.738,11					
	Cabe	ton	502,01				576,34					
5	Produksi tanaman Pangan, tanaman											

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat											
	Produksi Tanaman Pangan	Ton	-	1.519.823,91	1.550.220,39	1581224,78	-	1.585.700,01	1.550.220,39	1581224,78		
	Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Ton	-	33.842,34	33.949,10	34056,68	-	24.170,12	33.949,10	34056,68		
6	Ketahanan Pangan meningkat											
	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	-	89,8	89,9	90	-	91,3	89,9	90		
7	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD											
	Nilai AKIP PD	Kategori/ nilai	-	A (80,10)	A (80,20)	A (80,30)	-	80,6	A (80,20)	A (80,30)		

Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Berdasar indikator kinerja program yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, beberapa hasil komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura telah di evaluasi untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas Pertanian dan Pangan.

Produksi padi antara tahun 2018-2026 meningkat rata-rata 1,21% per tahun. Peningkatan produksi padi didukung karena peningkatan luas panen sebesar 2,41 ha, walaupun luas tanam mengalami penurunan sekitar -4,25% per tahun dan produktivitas juga menurun -0,06 ku/ha. Peningkatan produksi ini dapat dilakukan dengan penanganan pertanian yang intensif, yaitu peningkatan produksi pangan dengan cara-cara yang intensif pada lahan yang sudah ada, antara lain dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta pemberian air irigasi yang efektif dan efisien.

Komoditas padi capaian target produksinya didukung oleh padi sawah dan padi ladang. Produktivitas dari padi ladang banyak ditentukan oleh intensitas curah hujan. Sepanjang Tahun 2022 hari hujan rata-rata sebesar 15,20 hari dengan curah hujan rata-rata sebesar 278,92 mm. Peningkatan produksi dipengaruhi karena saat fase vegetatif rata-rata curah hujan tinggi (300-500 mm) dan saat memasuki panen padi rata-rata curah hujan sedang (100-300 mm). Musim tanam I pada bulan Oktober-November hampir semua kapanewon mempunyai rata-rata curah hujan sangat tinggi sekitar 595,47 mm dan pada musim panen bulan Januari-Februari rata-rata curah hujan sedang sekitar 220,50 mm. Sehingga selama tahun 2022 produksi gabah dapat maksimal dan mencapai target yang ditetapkan

Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai penggerak dan pengembangan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida, alsintan dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi. Penggunaan alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan hasil (*losses*).

Persentase peningkatan produksi jagung dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan dari luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas yang mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena petani lebih memilih menanam jagung karena lebih tahan serangan hama. Selain itu jagung tidak terlalu butuh pengairan tinggi dibanding padi dan bantuan benih jagung bermutu tinggi sehingga meningkatkan produksi jagung. Luas tanam jagung tahun 2022 sebesar 56.429 ha meningkat 495 ha dibandingkan tahun 2021. Luas panen jagung tahun 2022 meningkat (454 ha) dibanding tahun 2021. Untuk angka provitas secara rerata terjadi peningkatan selama 5 tahun terakhir tetapi bila dibandingkan tahun 2021 menurun -0.38 ku/ha ada di angka 49,73 ku/ha. Kegiatan peningkatan produksi jagung didukung dari dengan pengawalan yang intensif sampai tingkat lapang dan peningkatan produksi jagung tidak terlepas dari peran luas tanam dan luas panen yang bertambah.

Dengan luas areal tanam jagung 56.429 ha, kegiatan penguatan perlindungan tanaman jagung juga dilakukan dengan gerakan pengendalian OPT. Penanganan pascapanen jagung juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil dan penuruanan susut. Pada tahun 2022 disalurkan bantuan sarana untuk mendukung pengembangan komoditas tanaman jagung berupa corn sheller 51 unit dari dana APBN dan 3 unit dari APBD Provinsi.

Produksi kedelai memiliki pola yang sama dengan luas panen, yang menunjukkan bahwa penurunan produksi dipengaruhi oleh penurunan luas panen. Penyebab utama tidak maksimalnya produksi kedelai tahun

sebelumnya karena areal tanam yang disebabkan oleh kurangnya gairah petani menanam kedelai karena harga kedelai ditingkatkan petani yang sering tidak seimbang dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan dan adanya kedelai impor dengan harga yang lebih murah.

Rekomendasi sebagai rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja peningkatan produksi kedelai yang ditawarkan tahun yang akan datang antara lain : mengalokasikan bantuan saprodi budidaya kedelai, peningkatan perlindungan dari serangan OPT, peningkatan fasilitasi sarana pasca panen kedelai serta penguatan agroekosistem oleh para penyuluh dan diharapkan petani melakukan monitoring dan evaluasi pertanaman sejak dini guna mengantisipasi gangguan dan kerusakan akibat hama dan penyakit. Untuk mendukung pencapaian target di tahun 2022, Pemerintah Pusat melakukan Gerakan penambahan luas tanam kedelai sebanyak 3.008 ha, dan petani juga diberikan subsidi 45 kg benih kedelai varietas grobogan yang memiliki beberapa keunggulan antara lain berumur genjah, dan memiliki biji besar.

Dengan rata-rata pertumbuhan luas panen kedelai 9,32% menunjukkan bahwa petani dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat kembali berminat untuk menanam komoditas kedelai yang pada tahun 2022 produksi meningkat sebesar 673 ton dari produksi tahun 2021 sebesar 4.394 ton menjadi 5.067 ton di tahun 2022. Untuk itu perlunya penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani serta melakukan edukasi dan promosi serta pengembangan olahan kedelai perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan minat petani menanam kedelai di tahun-tahun mendatang.

Upaya untuk peningkatan produktifitas ubi kayu sebagai upaya tindak lanjut diantaranya dengan penggunaan benih unggul, ubikayu diusahakan secara tumpang sari dengan komoditas lain, umur panen ubi kayu tergantung harga pasar jika harga murah maka umur panen panjang, pemanenan menunggu harga tinggi.

Peningkatan produksi dari ubi kayu terlihat pada luas tanam dan produktivitas. Tahun 2022 dengan rata-rata tingkat curah hujan sedang 278,92 mm (antara 100-300 mm) juga mempengaruhi pertumbuhan dari ubi kayu, dimana curah hujan tersebut cocok untuk fase vegetative. Sedangkan memasuki panen curah hujan rendah (0-100 mm) sehingga dapat diperoleh produksi ubi kayu dengan berat maksimal. Rata-rata pertumbuhan produksi ubi kayu dari tahun ke tahun tercatat meningkat (37,73%), produktivitas juga meningkat 114 ku/ha dari 118,43 ku/ha di tahun 2021 menjadi 232,83 ku/ha di tahun 2022.

Konsumsi ubi kayu dibedakan dalam bentuk konsumsi langsung sebagai bahan makanan dan dalam bentuk pakan dan diolah untuk makanan. Konsumsi ubi kayu yang diolah menjadi makanan semakin lama mempunyai pasar yang besar dan mempunyai porsi yang hampir mendekati konsumsi sebagai pakan, hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan ubi kayu semakin berkembang.

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian baik tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi ditujukan untuk peningkatan produksi pertanian dan pengalokasian yang cukup sesuai kebutuhan telah ditetapkan dengan SK Bupati Gunungkidul Nomor 446/KPTS/2021 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Urea 17.139 ton; NPK 8.020 ton; SP-36 1.056 ton; ZA 807 ton; pupuk organik granul 1.062 ton dan pupuk organik cair 244 liter.

Berdasar SK Bupati Gunungkidul dan menindaklanjuti Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15503 Tahun 2022 tentang Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, maka diterbitkan SK Kepala

dinas untuk mengatur jumlah alokasi pupuk per jenis per kapanewon dengan beberapa perubahan.

Perubahan pertama sesuai SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Urea 17.139 ton; NPK 8.020 ton; SP-36 269 ton; ZA 190 ton; pupuk organik granul 60 ton dan pupuk organik cair 150 liter. Perubahan kedua sesuai SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 78 Tahun 2022 tanggal 27 September 2022 tentang Perubahan Kedua Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Urea 17.139 ton; NPK 8.020 ton; SP-36 257 ton; ZA 188 ton; pupuk organik granul 58 ton dan pupuk organik cair 150 liter.

Perubahan ketiga sesuai SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 85 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Perubahan Ketiga Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Urea 15.247 ton; NPK 8.924 ton; SP-36 257 ton; ZA 188 ton; pupuk organik granul 58 ton dan pupuk organik cair 150 liter.

Komoditas Perkebunan dan Hortikultura, pada komoditas tembakau Untuk Tahun 2022 capaian realisasi tembakau sangat rendah dimana produksi turun selain karena adanya penurunan luas panen dari 51,60 ha ditahun 2021 menjadi 23,50 ha di tahun 2022. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) memperkirakan produksi tembakau turun sekitar 30% karena cuaca buruk dan curah hujan tinggi yang mempengaruhi output, sehingga banyak tembakau yang secara kualitas tidak memenuhi standart. Produksi tembakau juga mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. keterbatasan modal, teknik pertanian tradisional yang tidak efisien, kurangnya dukungan teknis dan infrastruktur pertanian, serta minimnya akses pasar secara langsung oleh petani sehingga keuntungan berkurang.

Upaya-upaya yang ditempuh dalam pengembangan komoditas unggulan melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pasca panen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas. Tahun 2022 produksi kakao mencapai 466,91 kg yang berarti menurun dibanding total produksi tahun 2021 (773,93 kg).

Jambu mete merupakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, harganya cukup stabil dan prospek pasarnya baik. Penyebab fluktuasi produksi jambu mete disebabkan oleh ketidakterpaduan dan tidak adanya pola sinergisme dalam pengelolaan tanaman dan lahan serta keberadaan dan kinerja usaha tani tidak didukung oleh keberadaan dan kinerja usaha-usaha terkait, baik di segmen rantai hulu yakni bidang usaha pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana usahatani; atau di segmen rantai hilir, yakni bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil usahatani; maupun di segmen rantai sisi, yakni bidang usaha jasa fasilitator, misalnya usaha pembiayaan dan infrastruktur penunjang. Peningkatan produksi ini tidak terpengaruh oleh penurunan luas tanam sebesar -5.486,57 ha dari luas tanam tahun 2021 5.833 ha menjadi 5.544,90 ha di tahun 2022. Capaian produksi 2022 ada pada angka 734 ton yang berarti ada peningkatan sebesar 280,45 ton

Fluktuasi produksi kelapa sangat dimungkinkan mendapat pengaruh dari luas areal kelapa yang berkurang/bertambah atau dari jumlah tanaman yang menghasilkan. Pengembangan kawasan kelapa yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa di tahun-tahun mendatang. Kegiatan untuk meningkatkan produksi kelapa antara lain:

Peremajaan Tanaman Kelapa, pendampingan, dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kelompok petani kelapa, serta pemberdayaan kelembagaan. Target sebesar 5.586 ton kelapa di tahun 2022 terealisasi sebesar 8.093 ton atau 79,91%. Bila dibandingkan tahun 2021 ada peningkatan produksi sebesar 2.049 ton.

Produksi hortikultura tahun 2022 yang masuk indikator ini terdiri dari bawang merah dan cabe, serta komoditas buah-buahan yang terdiri dari pisang, alpukat dan durian. Capaian produksi hortikultura terlihat dari realisasi bawang merah pada tahun 2022 sebesar 441,53 ton dari target 700 ton atau sekitar 63%. Realisasi produksi cabe tahun 2022 sebesar 501,27 ton atau terealisasi 84% dari target 2022.

Sedangkan untuk komoditas hortikultura pada buah-buahan realisasi tahun 2022, untuk komoditas pisang realisasi 17.700,48 ton dari target 25.438,50 ton atau sebesar 53,86%; komoditas alpukat terealisasi 481,92 ton dan komoditas durian tahun 2022 produksinya sebesar 247,10 ton. Petani di Gunungkidul mulai beralih dari tanaman palawija ke hortikultura, dengan alasan keuntungan yang didapat dengan bertani tanaman hortikultura, seperti bawang merah memang cukup menjanjikan dan harga jualnya juga tinggi. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Peningkatan ketahanan pangan
3. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
4. Pengelolaan kualitas sumber daya pertanian

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan.
2. Pengembangan lumbung cadangan pangan dan desa mandiri pangan
3. Pengawasan distribusi dan harga bahan pangan.
4. Peningkatan nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan.
5. Mewujudkan sentra agribisnis komoditas unggulan
6. Tersedianya akses permodalan bagi petani
7. Penumbuhan, pengembangan dan evaluasi klasifikasi kelompok usaha pertanian
8. Pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian

Sedangkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor pencapaian tahun 2023 dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan, program kerja yang ditetapkan, prioritas yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2. Menentukan dan mengklarifikasi prioritas dan isu-isu kritis yang akan diselesaikan.
3. Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai respon dari masalah atau isu-isu kritis.

4. Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran.
5. Identifikasi akar penyebab konflik, menganalisis perekat dan pemecah serta penggunaan SWOT untuk membuat pilihan strategi identifikasi, penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindarkan ancaman

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang sangat tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika biokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam struktur organisasi perangkat daerah baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan sub sektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani sub sektor tanaman pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura menangani sub sektor perkebunan dan sub sektor hortikultura. Bidang Ketahanan Pangan menangani urusan ketahanan pangan dan Bidang Penyuluhan menangani penyuluhan. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.

Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Permasalahan pembangunan di Dinas Pertanian dan Pangan dengan 2 kewenangan yang dimiliki meliputi permasalahan ketahanan pangan dan pertanian.

Ketahanan Pangan

- a. Belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan;
- b. Ketersediaan pangan sudah mencukupi secara agregat, namun masih kurang beragam dan mayoritas tersedia hanya saat musim panen
Ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan energi mencapai 3.049 kkal/kap/hari dari standart sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 87,40 gram/kap/hari dari standart sebesar 63 gram/kap/hari.
- c. Keterjangkauan Pangan dan belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di tingkat daerah;

- Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat. Untuk itu dikembangkan program pemerataan pasokan pangan dengan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gappoktan) sebagai pelakunya melalui penumbuhan kegiatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Selain itu juga ditumbuhkan kembali gerakan menyimpan hasil panen melalui kelompok lumbung pangan.
- d. Konsumsi Pangan dan belum optimalnya penerapan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di masyarakat; Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Gunungkidul adalah protein hewani serta sayur dan buah. Untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak di pekarangannya sebagai sumber pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan keluarga.
 - e. Masih terdapatnya produk pangan yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Sosialisasi dari *stakeholders* terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Apalagi Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, dalam rangka menjamin pangan yang beredar di Kabupaten Gunungkidul memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis pangan.
 - f. Kerawanan Pangan adalah kondisi masyarakat, daerah atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat bersifat kronis (*cronical*) dan mendadak/ sementara (*transien*). Kerawanan pangan kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan kemiskinan. Sedangkan, kerawanan *transien* adalah kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya.
 - g. Ketergantungan Konsumsi Pangan Masyarakat terhadap Pangan Beras masih sekitar 89,40 kg/kapita/tahun. Diversifikasi pangan perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, gembili, suweg, ganyong dan garut, karena capaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

Pertanian

- a. Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani;
- b. Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
- c. Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
- d. Alih Fungsi Lahan. Secara umum, produksi komoditas pertanian khususnya dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sangat bergantung pada kondisi iklim/cuaca karena mayoritas lahan pertanian merupakan lahan kering yang tidak beririgasi. Selain itu, laju alih fungsi lahan pertanian juga cukup berperan terhadap capaian produksi pertanian. Berdasarkan data BPS selama periode 2009-2019 (10 tahun), terdapat pengurangan jumlah lahan sawah sebanyak 2 hektar dan lahan tegalan/ kebun sebanyak 2.663 hektar. Berdasar Surat keputusan Bupati Gunungkidul nomor 388/KPTS/2021 Tentang Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan tanggal 6 Desember 2021 ditetapkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2021 dengan luasan 22.234,17 (dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma tujuh belas) Ha terdiri dari : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 21.576,24 (dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam koma dua puluh empat) Hektar, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 657,92 (Enam ratus lima puluh tujuh koma Sembilan puluh dua) Hektar.

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini membutuhkan upaya keras untuk mempertahankannya, mengingat mayoritas berada di lahan kering serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor lainnya.

Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjaga agar KP2B tersebut tidak beralih fungsi dan dapat berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani

- e. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Provinsi DI Yogyakarta oleh BPS tahun 2018, jumlah rumah tangga usaha pertanian dan kelompok umur kepala rumah tangga merupakan tenaga kerja yang berusia ≥ 65 tahun sebanyak 49.320, kelompok usia 45-54 tahun sebanyak 42.476, kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 42.456, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 25.816, kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 8.815 dan disusul tenaga kerja kelompok usia < 25 tahun sebanyak 398. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan

- strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (*vocational training*), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru
- f. Pemanfaatan Teknologi merupakan salah satu kunci dari perubahan sektor pertanian di era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani. BPS (2018) menyatakan bahwa potensi internet di tingkat petani dan perdesaan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 93,9%. Sebagian besar pengguna internet melakukan akses internet melalui telepon seluler. Jumlah Petani yang menggunakan Internet selama setahun yang lalu menurut data Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Provinsi DI Yogyakarta oleh BPS tahun 2018 sebanyak 35.292 orang. Sedangkan jumlah petani yang tidak menggunakan internet selama setahun yang lalu sebanyak 196.425 orang.
- Dari data terlihat bahwa masih lambatnya aplikasi teknologi tepat guna dimanfaatkan oleh petani di sektor pertanian. Baru sekitar 15,23% yang memanfaatkannya. Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal 2G, 3G dan 4G. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian.
- g. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 memiliki penyuluh PNS 60 orang, Penyuluh P3K sebanyak 47 orang dan penyuluh swadaya sebanyak 144 orang. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran BPP (Balai penyuluh Pertanian) berkembang tidak hanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi diupayakan sebagai tempat untuk mengenalkan model-model usaha tani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitas informasi, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi musyawarah, dll) dan pelaksanaan program penyuluhan. Oleh sebab itu, guna menghasilkan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat mencapai target pembangunan pertanian, penyelenggara penyuluhan di lapangan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana terstandarisasi dan tepat guna.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Gunungkidul dapat diidentifikasi beberapa hal tantangan dan peluang sebagai berikut:

- a. Petani di Kabupaten Gunungkidul sangat apresiatif terhadap pelayanan Dinas, sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan;
- b. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitasi dari Dinas;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses langsung data dan informasi Dinas;
- d. Terjalannya kerjasama dengan Dinas Komunikasi, dan Informatika dalam hal pengembangan sistem informasi (siaran radio, WEB);
- e. Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk dengan akademisi dan aparaturnya penelitian dan pengembangan (LIPI, BPTP, Perguruan Tinggi);
- f. Tersedianya program beasiswa untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas;
- g. Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan berbagai ekspo;
- h. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan DAK dan Tugas Pembantuan APBN;

Dari faktor pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan baik secara internal dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani Dinas Pertanian dan Pangan tahun antara lain:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta belum terlaksananya Standar Pelayanan dengan baik. Di sisi lain pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien. Reformasi birokrasi ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.

- b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dalam aspek pendidikan serta kesehatan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu segera disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terpadu lintas bidang. Dinas Pertanian dan Pangan melalui kegiatan peningkatan produksi pertanian, peningkatan kualitas petani, peningkatan hasil olahan serta pemasaran dilaksanakan sebagai rencana strategis dan rencana aksi untuk ikut serta menanggulangi kemiskinan.

- c. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan

layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan lahan kritis dan sumber daya alam.

2.4. Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Dalam RKPD di informasikan rencana kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap PD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap PD dalam menyiapkan rancangan Renja PD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. RKPD dibuat dengan mengacu RPJMD Kabupaten Gunungkidul, serta menyesuaikan dengan RKPD DIY dan RKP, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan dari hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang muncul.

Terhadap hasil Reviu antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan dalam rancangan akhir renja 2023 Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan catatan hasil Reviu Inspektorat Daerah diperoleh catatan hasil Reviu sebagai berikut :

1. menyesuaikan Sasaran Perangkat Daerah dan Prioritas Daerah dalam Rancangan Akhir Renja-PD dengan RKPD
2. menyesuaikan Pagu Dana Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan PD dalam Rancangan Akhir Renja PD dengan Rumusan Kerangka Pendanaan dalam RKPD.
3. Indikator dan Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja PD dengan RKPD.
4. Rekapitulasi Hasil Evaluasi belum sesuai dengan Surat Edaran Pedoman Penyusunan Renja PD 2023
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah belum sesuai dengan Surat Edaran Pedoman Penyusunan Renja PD 2023

Hasil Reviu terhadap program/kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 dan rekapitulasi perbandingan usulan melalui mekanisme Musrenbang dan pagu anggaran dalam rancangan awal Renja Dinas Pertanian dan Pangan di sajikan melalui Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat daerah : Dinas Pertanian dan Pangan		RKPD										
		Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2.106.136.447	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
1,1		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				1.000.000.000						
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1.000.000.000						

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia (unit)	4	1.000.000.000						
1,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Penurunan Konsumsi Beras/Kapita/Tahun (Kg)	76	1.070.526.147	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Penurunan Konsumsi Beras/Kapita/Tahun (Kg)	76	46.471.500,00	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Angka ketersediaan kalori penduduk perkapita	3018kkal /kap/ hari	17.604.804	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan				11.289.000,00	
								Angka ketersediaan kalori penduduk perkapita Kkal/Kapita/Hari)	3018		

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Pangan yang Dikembangkan (unit)	6	10.648.000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				5.289.000,00	
								Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	4		
								Jumlah Pelatihan dan Pendampingan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) (Angkatan)	1	1.204.750,00	
								Jumlah Pelatihan Manajemen Lumbing Pangan Desa (Angkatan)	1	1.274.750,00	
								Jumlah Pelatihan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) (Angkatan)	1	1.404.750,00	
								Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (Angkatan)	1	1.404.750,00	
								Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan		1.950.000,00	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (laporan)	13	6.956.804			Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)	12,00		

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Jumlah laporan informasi harga tingkat produsen dan konsumen (Laporan)</i>	12	1.950.000,00		
							Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				4.050.000,00	
								<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)</i>	1,			
								<i>Jumlah dokumen Neraca Bahan Pangan (NBM) (Laporan)</i>	1	4.050.000,00		
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				35.182.500,00	
								<i>Angka konsumsi kalori penduduk perkapita (Kkal/ Kapita/ Hari)</i>	1,894			
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota				60.000.000							

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
	<i>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (ton)</i>	6	60.000.000							
	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>		<i>Angka konsumsi kalori penduduk perkapita (kkal/ kapita/ hari)</i>	1894	992.921.343							
	<i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>	<i>Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)</i>	1	2.662.000	<i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>				2.350.000,00		
								<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)</i>	1			
								<i>Analisis Pola Konsumsi Pangan (PPH) (Dokumen)</i>	1	2.350.000,00		

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman berbasis sumber daya lokal (laporan)	10	990.259.343	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				32.832.500,00	
								Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1		
								Bibit tanaman untuk pengembangan pangan perkotaan (Paket)	0		
								Gaji THL dan THR THL 1 org (247hari) (Orang)	1	24.682.500,00	
								Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Paket)	1	4.350.000,00	
								Penyelenggaraan B2SA (Laporan)	1	3.800.000,00	
1,3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan (persen)	100	5.324.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan (%)	100	4.740.000,00	

No	RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah dokumen analisis kerawanan pangan yang tersusun (jenis)	1	5.324.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				4.740.000,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (laporan)	8	5.324.000			Jumlah Dokumen Analisis Kerawanan Pangan yang Tersusun (Jenis)	1			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				4.740.000,00		
								Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota (Laporan)	2,00			
								Laporan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan FSVA (Laporan)	2	1.740.000,00		
								Laporan Pelatihan Desa Mandiri Pangan (Laporan)	1	3.000.000,00		

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1,4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pangan Segar Aman (persen)	90	30.286.300	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pangan Segar Aman (%)	90	8.535.000,00	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana (jenis)	2	30.286.300	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				8.535.000,00	
								Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Terlaksana (Jenis)	2		
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				4.200.000,00	
	Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	3	9.958.300			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1		
								Pengujian Bahan Pangan Segar (Paket)	1	4.200.000,00	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)</i>	3	20.328.000	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				4.335.000,00		
								<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota (Dokumen)</i>	2,00			
								<i>Fasilitasi Registrasi PSAT PDUK (Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil) (Paket)</i>	1	4.085.000,00		
								<i>Sosialisasi keamanan Pangan (Kali)</i>	1	250.000,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				452.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				300.000.000,00		

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
2,1	PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKARTA A URUSAN KEBUDAYAA N		Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik (persen)	100	452.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terlaksana Dengan Baik (%)	100	300.000.000,00		
	Pengembang an Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Jumlah kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana (jenis)	1	452.000.000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				300.000.000,00		
	Pengembang an Lumbung Mataraman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (DAIS) (Laporan)	10	452.000.000			Jumlah kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana (Jenis)	1			
						Pengembangan Lumbung Mataraman				300.000.000,00		
								Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (Laporan)	6			
								Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (DAIS) (Laporan)	6	300.000.000,00		
	URUSAN PEMERINTA HAN PILIHAN									13.398.969.466,00		

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				28.118.730.558	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				13.398.969.466,00		
3,1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (persen)	100	24.584.584.259	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.722.712.966,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun (jenis)	13	52.320.400			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	28.011.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				170.179.900,00		
								Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun (Jenis)	13			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				155.224.900,00		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4			

No	RKP						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
									2	49.365.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	665.500			Jumlah dokumen Action Plan (Rencana Aksi Pengembangan Produk Agribisnis Unggulan-Daerah untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul 2024) (Dokumen)	1	95.000.000,00	
									2	5.199.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	665.500			Jumlah Renstra yang disusun (Dokumen)	1	5.660.000,00	
										1.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	665.500			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		

No	RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Jumlah dokumen RKA yang tersusun (Dokumen)</i>	<i>1</i>	<i>1.000.000,00</i>	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				<i>1.498.000,00</i>	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	<i>Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)</i>	<i>2</i>	<i>665.500</i>			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	<i>1</i>		
								<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	<i>1</i>	<i>1.498.000,00</i>	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				<i>1.249.000,00</i>	

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	17	9.680.000			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		
								Jumlah dokumen DPA yang tersusun (Dokumen)	1	1.075.000,00	
								Perjalanan Kinerja yang tersusun (Dokumen)	1	174.000,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				748.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	11.966.900			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2		
								Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun (Dokumen)	1	675.000,00	
								Perubahan perjanjian kinerja yang tersusun (Dokumen)	1	73.000,00	

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.900.000,00	
								<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	17,00		
								<i>Jumlah Laporan evaluasi LKJIP (Dokumen)</i>	1	4.850.000,00	
								<i>Jumlah laporan monev (Laporan)</i>	4	2.865.000,00	
								<i>Jumlah laporan TEPPRA (Laporan)</i>	12	185.000,00	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.560.000,00	
								<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	9,00		
								<i>Dokumen SKM OPD (Laporan)</i>	2	190.000,00	
								<i>Dokumen SKM UPT (Laporan)</i>	4	2.000.000,00	

No	RKKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Jumlah Dokumen Review SOP OPD (Laporan)</i>	<i>1</i>	<i>370.000,00</i>	
								<i>Jumlah Dokumen RTP yang tersusun (Laporan)</i>	<i>0</i>		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan tersusun (jenis)	3	22.722.730.052	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.015.123.966,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	2184	22.663.440.052			Jumlah laporan keuangan tersusun (Jenis)	3		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.946.778.966,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	3.630.000			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	2184		
								<i>Insentif PAD (Paket)</i>	<i>1</i>	<i>3.092.460,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	13	55.660.000			Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (Bulan)	14	8.943.686.506,00	

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
			<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>									
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.600.000,00		
								<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1			
								<i>Jumlah dokumen laporan akhir tahun (Dokumen)</i>	1	3.600.000,00		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				64.745.000,00		
								<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan</i>	13			

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
								<i>Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan n/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>				
								<i>Gaji THL + THR 247 hari (2 orang) (Orang)</i>	2	49.365.000,00		
								<i>Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran (Dok)</i>	13	15.380.000,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi (ASN)	147	20.708.030	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.403.000,00		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	6	4.896.480			<i>Jumlah ASN yang terfasilitasi (Orang)</i>	225			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.403.000,00		
								<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	4,00			

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11	15.811.550			Jumlah ASN terfasilitasi (Bulan)	12	2.403.000,00	
								Pelatihan dan Pengembangan Pegawai (Orang)	0	0	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11,00		
								Jumlah ASN yang terfasilitasi pelatihan sesuai tugas fungsinya (Orang)	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia (layanan)	10	206.834.980	Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.623.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan (paket)	1	7.744.000	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia (Layanan)	10	3.957.500,00	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	2	93.046.580	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	7.744.000			Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia (Jenis)	7	3.957.500,00		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.800.000,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	33.033.000			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1			
								Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (Paket)	1	20.800.000,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	296	2.178.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.326.000,00		

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
								<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>	<i>1</i>			
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	<i>12</i>	<i>2.700.000</i>			<i>Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli (Paket)</i>	<i>1</i>	<i>2.326.000,00</i>		
						<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>				<i>5.060.000,00</i>		
								<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	<i>2,00</i>			
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	<i>19</i>	<i>60.389.400</i>			<i>Jumlah cetak blanko disposisi, BKP, Amplop, Map, Kotak Arsip dan SPPD (Jenis)</i>	<i>6</i>	<i>5.060.000,00</i>		
						<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>				<i>1.200.000,00</i>		
								<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	<i>356</i>			

No	RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (Bulan)</i>	12	1.200.000,00	
						Fasilitas Kunjungan Tamu				6.000.000,00	
								<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	4,00		
								<i>Jumlah Tamu Dinas Pertanian dan Pangan (orang) (Orang)</i>	150	4.500.000,00	
								<i>Jumlah Tamu UPT TTP Nglangeran (orang) (Orang)</i>	50	1500000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.280.000,00	
								<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	4,00		
								<i>Jumlah ASN terfasilitasi koordinasi dan konsultasi (orang) (Orang)</i>	30	20.280.000,00	
								<i>Jumlah minum dan snack tersedia untuk rapat (Orang)</i>	1,200	12.000.000,00	
+											

No	RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terlaksana (jenis)	3	41.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.000.000,00	
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	30	13.000.000			Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terlaksana (Jenis)	3		
						Pengadaan Mebel				-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	10.000.000			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,		
								Pengadaan meja kursi tamu (Unit)	0		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000,00	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		
								Jumlah belanja AC (1,5 PK dan 2 PK) (Unit)	3	17.000.000,00	
								Jumlah belanja Filling Cabinet Arsip (unit)	0	0	

No	RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								Jumlah belanja laptop (perencanaan) (unit)	1	10.000.000,00	
								Jumlah belanja Lemari besi arsip (Unit)	0	0	
								Jumlah belanja PC (Unit)	0	0	
								Jumlah belanja Printer (Unit)	0	0	
								Jumlah belanja Printer (Wb) (Unit)	1	6.000.000,00	
								Jumlah belanja Soundsystem Ruangan type 4 (Set)	1	22.000.000,00	
								Jumlah belanja Tangga Lipat (Unit)	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gumunghidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	4	18.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7,00		

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
								<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)</i>	0			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia (layanan)	3	1.340.130.797	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.174.882.600,00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4.235.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia (Layanan)</i>	3			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000,00		
								<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	4			
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	924	1.335.295.797			<i>Jumlah Materai (Subbag Keuangan) (Lembar)</i>	120 26	1.200.000,00		
								Jumlah paket/pengiriman (kali) (Kali)	26	500.000,00		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.172.582.600,00		

No	RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
								<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	4,00			
								<i>Banner (Meter)</i>	32	800.000,00		
								<i>Gaji THL + THR 247 hari (Orang)</i>	34	947.800.000,00		
								<i>Jaringan PAM (Unit)</i>	0			
								<i>Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Surat Kabar/Media Online (tayang) (Kali)</i>	2	1.500.000,00		
								<i>Jumlah rekening air yang dibayar (16rek x 12 bulan) (Meter kubik)</i>	1,186	30.000.000,00		
								<i>Jumlah rekening listrik yang dibayar (57rek x 12 bulan) (Kuh/ Jiwa)</i>	188,412	190.082.600,00		
								<i>Jumlah rekening telepon yang dibayar (2 rek x 12 bulan) (Unit)</i>	24	2.400.000,00		
								<i>Papan Informasi DPP (Unit)</i>	0			
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	4	600.000	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>				600.000,00		

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
								<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	4			
								<i>Retribusi Sampah (Kali)</i>	12	600.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia (layanan)	4	200.860.000					233.500.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	396	176.660.000			<i>Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia (Layanan)</i>	4			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				172.500.000,00		

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	202		
								<i>Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda dua (Unit)</i>	30	30.000.000,00	
								<i>Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda empat (perbaikan sedang - berat) 9unit)</i>	0		
					6.050.000			<i>Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda empat (perbaikan sedang - berat) 9unit)</i>	5	142.500.000,00	
								<i>Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan BBM (unit)</i>		1.500.000,00	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
								<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	5		
								<i>Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi (printer) (Unit)</i>	5	1.500.000,00	

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	4	12.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				53.500.000,00	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1		
								Bangunan Gedung Sederhana rehab gedung ruang rapat I DPP (Paket)	0		
								Bangunan Gedung Sederhana rehab gedung UPT benih (Paket)	0		
								Belanja Partisi / Sketsel DPP dan UPT TTP Nglanggeran (Unit)	0		
								Rehab Gedung RR 2 DPP (Paket)	0		
								Rehab kamar mandi dinas (Paket)	0		
								rehab paving block (Paket)	1	53.500.000,00	
								Rehab Taman Dinas (Unit)	0		
								Sewa Peralatan Pekerjaan Konstruksi Excavator 80-140 Hp (Jam)	0		

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	4	6.050.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000,00		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6			
								Jumlah AC yang dipelihara (Unit)	6	6.000.000,00		
3,2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Dan Tanaman Perkebunan (Ton)	1615281,46	1.622.163.937	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.824.976.700,00		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang terlaksana (jenis)	3	1.427.038.248			Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Dan Tanaman Perkebunan (Ton)	1615281,46			

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	29.662.500							
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			3	1.534.662.100,00		
								Jumlah kegiatan pengawasan sarana pertanian yang terlaksana (Jenis)				
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				300.235.000,00		
								Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3,00			

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
								<i>Belanja mesin pemotong rumput (Unit)</i>	0	162.445.000,00 7.790.000,00 130.000.000,00		
								Gaji THL dan THR THL 6 orang (Orang)	6			
								Kegiatan Pelatihan Integrasi kakao kambing etawa, minuman coklat 3 in 1, dan dodol coklat (Laporan)	3			
								Papan Nama Instansi (Unit)	0			
								Pendampingan P2L (DAK NF) (Kelompok)	2			
								Sosialisasi Sertifikasi MD dari BPOM (UPT TTP NGlangeran) (Kali)	0			
								Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1.234.427.100,00		
				21	1.397.375.748			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)</i>	6,00			
	<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	<i>Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>						<i>Jumlah Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)</i>				
								<i>Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)</i>				

No	RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								Bimbingan teknis budidaya bawang merah (PIS)(Angkatan)	0		
								Bimbingan teknis budidaya cabe (PIS)(Angkatan)	0		
								Cultivator WB (unit)	10	150.000.000,00	
								Demplo Almond (Paket)	0		
								Demplo Shorgum (Paket)	0		
								Ekstensifikasi kelapa (paket) (WB)	11	110.000.000,00	
								Gaji THL dan THR THL 2 orang (247 hari x 2)	2	50.600.000,00	
								Handsprayer (unit) (PIS)	0		
								Handtraktor WB (unit)	10	220.000.000,00	
								Intensifikasi jambu mete (paket)	1	7.000.000,00	
								JUT WB (unit)	1	95.000.000,00	
								Monev budidaya jagung (Kali)	5	1.050.000,00	
								Monev budidaya mete (Kali)	6	1.190.000,00	
								Monev budidaya padi (Kali)	5	1.050.000,00	

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Paddy mower (unit)</i> (PIS)	0		
								<i>Pelatihan jamur tiram (PIS) (angkatan)</i>	0		
								<i>Pelatihan jamur tiram (PIWK)(Angkatan)</i>	0		
								<i>Pelatihan pengembangan budidaya jagung (Angkatan) PIS</i>	0		
								<i>Pelatihan pengembangan budidaya kedelai (PIS)(Angkatan)</i>	0		
								<i>Pendampingan banpern (kapanewon) (kali)</i>	14	3.300.000,00	
								<i>Pengadaan Alsintan (Pokir) (paket)</i>	31	322.027.000,00	
								<i>Penyusunan data statistik perkebunan dan hortikultura (dokumen)</i>	1	3.100.000,00	
								<i>Penyusunan data statistik tanaman pangan : data LTT, data ubinan, laporan, penyusunan ARAM dan ATAP (Dokumen)</i>	2	5.470.000,00	
								<i>Powerthreaser Multiguna WB (unit)</i>	10	250.000.000,00	

No	RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>RDKK, Pengawasan Pupuk dan evaluasi alsintan (laporan)</i>	2	4.190.000,00	
								<i>Sarana Pendukung WB (paket)</i>	1	9.000.100,00	
								<i>Sarana TP (paket)</i>	1	1.450.000,00	
								<i>Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) (unit)</i>	0		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah produksi benih padi tersertifikasi (kg)	12.000	195.125.689	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				290.314.600,00	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	2	195.125.689			Jumlah produksi benih padi tersertifikasi (Kg)	12000		
						Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				290.314.600,00	

No	RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Jumlah SDG tanaman yang ditanam dan dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))</i>	2		
								<i>Belanja sarana produksi pertanian (Paket (Paket))</i>	1	118.919.600,00	
								<i>Gaji THL dan THR 4 orang (Orang)</i>	4	111.805.000,00	
								<i>Pengadaan benih padi (benih dasar) (Kg)</i>	1	55.000.000,00	
								<i>Pengadaan benih padi lulus sertifikasi(Kg)</i>	1	4.590.000,00	
3,3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Prasarana Pertanian Yang Digunakan (persen)	100	1.286.483.212	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Persentase Prasarana Pertanian Yang Digunakan (%)</i>	100	281.210.000,00	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana (jenis)	2	574.212.000	Pengembangan Prasarana Pertanian				281.210.000,00	

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
								<i>Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana (Jenis)</i>	2			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				250.000.000,00		
								<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)</i>	2,00			
								<i>Cultivator (dbhcht) (Unit)</i>	5	94.422.000,00		
								<i>Jumlah pengembangan sumber air (DBHCHT) (Unit)</i>	1	155.578.000,00		

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (dokumen)	35	24.442.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				31.210.000,00		
								Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	36,00			
								Cetak Peta LP2B Tingkat Kalurahan (lembar) (Lembar)	36	1.800.000,00		
								Upah Tenaga Fasilitator Kegiatan Pertanian (1 Orang) (Orang / Bulan)	10	25.000.000,00		
								updating data LP2B tingkat kalurahan (kalurahan) (Dokumen)	36	4.410.000,00		

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3	549.770.000						
	Pembangunan Prasarana Pertanian				712.271.212	Pembangunan Prasarana Pertanian				-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (unit)	4	512.271.212			Jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana (Jenis)	10		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara (unit)	1	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				-	
								Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0,		
								Pembangunan UV Dryer (Unit)	0		

No	RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
3,4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Bencana Pertanian Yang Tertangani (persen)	100	49.119.950	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		<i>Persentase Bencana Pertanian yang tertangani (Persentase)</i>	100	42.097.500,00	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana (jenis)	7	49.119.950	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				42.097.500,00	
								<i>Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana (Jenis)</i>	7		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	9	49.119.950	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				42.097.500,00	

No	RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)</i>	9		
								<i>Bimbingan teknis RPT (Regu Pengendali Tanaman) (Angkatan)</i>	1	2.250.000,00	
								<i>Drone Sprayer (Pengendali Hama) (unit)</i>	0		
								<i>Gaji THL dan THR THL 1 orang (248 hari)</i>	1	24.682.500,00	
								<i>Gerakan pengendalian OPT bawang merah (klp)</i>	1	2.605.000,00	
								<i>Gerakan pengendalian OPT cabe (Klp)</i>	1	2.375.000,00	
								<i>Gerakan pengendalian OPT Perkebunan (Klp)</i>	1	2.550.000,00	
								<i>Gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan (Klp)</i>	5	2.570.000,00	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Paket Bantuan Tyto Alba (Pengendalian OPT Tikus) (paket)</i>	0		
								<i>Pelatihan agensia hayati (Klp)</i>	1	2.605.000,00	
								<i>Pengadaan pestisida (paket)</i>	1	2.460.000,00	
3.5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis (kelompok)	122	576.379.200	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		<i>Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis (Kelompok)</i>	122	527.972.300,00	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang terlaksana (jenis)	3	576.379.200	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				527.972.300,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	35	295.240.000			<i>Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang terlaksana (Jenis)</i>	3		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	31	61.613.200	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				212.500.000,00	

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)</i>	18,00		
								<i>Bahan Kimia (DAK NF) (Paket)</i>	1	27.900.000,00	
								<i>Belanja Internet Paket Data Admin BPP Spesifikasi : Paket Data Admin BPP (DAK NF) (Paket)</i>	18	54.000.000,00	
								<i>Jumlah tenaga Fungsional yang dinilai (Kali)</i>	2		
								<i>Monitoring Sistem Kerja Latihan dan Kurjungan (LAKU) (Kecamatan)</i>	18		
								<i>Pelatihan Geospasial Lahan Pertanian (DAK NF) (Angkatan)</i>	18	75.240.000,00	
								<i>Pelatihan kepenyuluhan BPP (Angkatan)</i>	0		
								<i>Pelatihan Petani Milenial (Angkatan)</i>	0		
								<i>Pendampingan Penyuluh Swadaya (Angkatan)</i>	0		

No	RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Penilaian Lomba Aparatur dan Non Aparatur (Kategori)</i>	7	5.500.000,00	
								<i>Sosialisasi dan Pelatihan Tematik (DAK NF) (Angkatan)</i>	18	49.860.000,00	
	<i>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)</i>	43	219.526.000	<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</i>				259.362.500,00	
								<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)</i>	2,00		
								<i>Bimtek Olahraga Ketela (Pokir) (Paket)</i>	1	17.990.000,00	
								<i>Fasilitasi pendampingan PUAP dan LKM (Kecamatan)</i>	0		
								<i>Gaji THL dan THR THL 10 orang (10x248hari) (Orang)</i>	10	234.475.000,00	
								<i>Jumlah kelompok yang dilatih P4S (Angkatan)</i>	0		
								<i>Pemberdayaan KWT (Angkatan)</i>	1	1.700.000,00	

No	RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								Pembinaan Asosiasi Tembaku (DBHCHT), asosiasi pupuk, cabe (Asosiasi)	0		
								Pembuatan Keripik (PIS) (Paket)	0		
								Pembuatan Keripik (PIWK) (Angkatan)	0		
								Pendampingan kelas kelompok tani madya dan utama (Kelompok)	4		
								Penilaian kelompok tani (Kecamatan)	18	2.160.000,00	
								Sarana Kelembagaan (Paket)	1	523.000,00	
								Validasi data kelompok (Dokumen)	1	2.514.500,00	
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				56.109.800,00	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5,00		

No	RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
								<i>Belanja bahan praktek Dempplot dan kajiterap Pembelian bibit.obat- obatan, bahan kimia/pupuk dan monev demplot (Paket)</i>	0		
								<i>Gaji THL + THR 2 Org (Orang)</i>	2	51.835.000,00	
								<i>Jumlah Dempplot Bawang Merah (PIS) (Paket)</i>	0		
								<i>Jumlah Dempplot Kedelai (PIS) (Paket)</i>	0		
								<i>Jumlah Dempplot Kedelai (PIWK) (Paket)</i>	0		
								<i>Jumlah program penyuluh tingkat desa, kecamatan dan kabupaten (Dokumen)</i>	3	4.274.800,00	
								<i>Kaji terap (Unit)</i>	0		
								<i>Temu Teknis (Kali)</i>	1		
					30.676.867.005					13.758.715.966,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan selain bersifat top down juga harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan juga mengakomodir usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan untuk usulan 2024. Gambaran selama ini menunjukkan bahwa implementasi program pembangunan pertanian relatif menjadi ranahnya para pemangku kepentingan utama yang secara signifikan berpengaruh atau memiliki posisi penting atas keberlangsungan kegiatannya.

Dalam konteks sektor pertanian, secara organisasi pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas, yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas. Secara perorangan atau kelompok, pemangku kepentingan mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional hingga lokal), peneliti, penyuluh, petani (kontak tani, pemilik, penggarap, buruh tani), pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (alsintan dan transportasi), dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Kebijakan pengembangan pangan lokal dan pelaksanaannya merupakan sinergi dari para pemangku kepentingan, yakni petani dan penentu kebijakan. Penentu kebijakan yang dimaksud adalah Dinas Pertanian dan Pangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga legislatif. Secara umum para pemangku kepentingan menunjukkan adanya kerjasama.

Dinas Pertanian dan Pangan dalam mengkaji dan menyeleksi program dan kegiatan usulan masyarakat tersebut berdasarkan pada sasaran daerah dengan memperhatikan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan Meningkat, difokuskan pada strategi peningkatan ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan bagi masyarakat dengan indikator kegiatan:
 - a. Jumlah Ketersediaan Pangan (Beras)
 - b. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) – Beras
 - c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat;
 - d. Persentase layanan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang terlaksana
 - e. persentase desa rawan pangan yang terfasilitasi
 - f. Persentase layanan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana
 - g. Persentase Pengawasan keamanan pangan
2. Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat, difokuskan pada strategi Penguatan kelembagaan

petani dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dengan indikator kegiatan:

- a. Persentase layanan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang terfasilitasi
- b. Peningkatan IP (Indeks Pertanaman)
- c. Jumlah produksi benih padi tersertifikasi
- d. Jumlah desa yang terverifikasi luasan KP2B
- e. Persentase layanan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana
- f. Jumlah luasan puso /gagal panen karena organisme pengganggu tanaman (OPT)

Dalam Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini para pemangku kepentingan menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, sasaran daerah, keselarasan program kegiatan pembangunan daerah, menyelaraskan program kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan D.I. Yogyakarta. Menyelaraskan program kegiatan OPD ini ditujukan untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Selanjutnya usulan-usulan program dan kegiatan hasil sidang pleno yang disimpulkan disesuaikan dalam Rancangan RKPD.

Pada perencanaan tahun 2024 ini selain mengakomodir program prioritas pembangunan daerah, juga mengakomodir pokok pikiran dewan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat bersinergi dengan program kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui meningkatkan pendapatan petani.

Untuk hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pertanian dan Pangan disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Usulan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
1	Bantuan Traktor Capung	Kelompok Tani & Sedyo Makmur & Padukuhan Glodogan, Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari	Jumlah Capung kepada Kelompok Tani	1	Rp14.000.000	Rp14.000.000	
2	Bantuan power sprayer	KT. Ngudi Tani, Sriten, Pilangrejo, Nglipar	Jumlah Power Sprayer kepada kelompok tani	1	Rp1.000.000	Rp1.000.000	
3	Bantuan power sprayer	KT. Mekar Sari, Mundon, Tancep, Ngawen	Jumlah Power Sprayer kepada kelompok tani	1	Rp1.000.000	Rp1.000.000	
4	Bantuan Traktor	Kelompok Tani Maju Lestari, Ngimbang, Watusigar, Ngawen	Jumlah Traktor Kepada Kelompok Tani	1	Rp22.000.000	Rp22.000.000	
5	Bantuan traktor capung	KT. Ngudi Lestari, Gambarsari, Jurangjero, Ngawen	Jumlah Capung kepada Kelompok Tani	1	Rp14.000.000	Rp14.000.000	Berdasarkan database kelompok tani, nama kelompok yang teregister adalah KT Ngudi Rejeki
6	Pemberian bantuan Paddy Mower	KWT Lumintu, Natah Kulon, Natah, Nglipar	Jumlah Paddy Mower kepada kelompok tani	2	Rp3.000.000	Rp6.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
7	Pemberian bantuan Paddy Mower	KWT Ngudi Rejeki, Blembeman 1, Natah, Nglipar	Jumlah Paddy Mower kepada kelompok tani	1	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Berdasarkan database kelompok tani, nama kelompok yang teregrister adalah KT Ngudi Iestari
8	Pemberian bantuan Paddy Mower	Kelompok Tani Tani Maju, Kaliwaru, Kampung, Ngawen	Jumlah Paddy Mower kepada kelompok tani	1	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
9	Pemberian bantuan Paddy Mower	Kelompok Tani Amrih Subur, Pagerjurang, Kampung, Ngawen	Jumlah Paddy Mower kepada kelompok tani	1	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
10	Pemberian bantuan cultivator	Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Ds. Gedangan 2, RT 03/ RW 04, Gedangrejo, Karangmojo, gunungkidul	Jumlah Cultivator kepada kelompok tani	1	Rp17.000.000	Rp17.000.000	Berdasarkan database kelompok tani, nama kelompok yang teregrister adalah KT Lumbang Rejeki
11	Bantuan power sprayer	Kelompok Tani Gotong Royong, Gebang, Pengkol, Nglipar	Jumlah Power Sprayer kepada kelompok tani	1	Rp1.000.000	Rp1.000.000	
12	Pemberian bantuan Paddy Mower	Kelompok Tani Gotong Royong, Gebang Pengkol, Nglipar	Jumlah Paddy Mower kepada kelompok tani	1	Rp3.000.000	Rp3.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
13	Pemberian bantuan Paddy Mower	Kelompok Tani Marsudi Tani, Bendo, Beji, Ngawen	Jumlah Paddy Mower kepada kelompok tani	1	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
14	Pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan	Satu Padukuhan, Genjahan, Ponjong	Jumlah pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan (pembuatan kripik) yang terlaksana	1	Rp10.052.000	Rp10.052.000	Berdasarkan database kelompok tani, nama kelompok yang teregister adalah KWT Putri Mandiri
15	Pemberian bantuan cultivator	Kelompok Tani SANDYA TANI, Mulusan, Paliyan	Jumlah Cultivator kepada kelompok tani	1	Rp17.000.000	Rp17.000.000	
16	Pemberian bantuan Paddy Mower	Kelompok Tani Tunas Harapan, Beji, Beji, Ngawen	Jumlah Paddy Mower kepada kelompok tani	1	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
17	Pemberian bantuan Paddy Mower	Kelompok Tani Ngudi Lestari, Grojogan, Beji, Ngawen	Jumlah Paddy Mower kepada kelompok tani	1	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
18	Pemberian bantuan Paddy Mower	Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Banaran, Beji, Ngawen	Jumlah Paddy Mower kepada kelompok tani	1	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
19	Pelatihan budidaya bawang merah	Kelompok Tani Dusun Kebohan lor, Gombang, Ponjong	Jumlah pelatihan budidaya bawang merah yang terlaksana	1	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Berdasarkan database kelompok tani, nama kelompok yang teregister

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
							adalah KT Ngulir Budi, Kebowan Lor, Gombang, Ponjong
20	Bantuan traktor capung	Kelompok Tani Trisnowono, mengger Nglipar	Jumlah Capung kepada kelompok tani	1	Rp14.000.000	Rp14.000.000	
21	Bantuan traktor	Kelompok Tani Padukuhan Gagan, Kalurahan Pengkol Kapanewon Nglipar	Jumlah Traktor kepada kelompok tani	1	Rp22.000.000	Rp22.000.000	
22	Pelatihan budidaya bawang merah	Kelompok Tani Hortikultura Maju Makmur, Karangmojo	Jumlah Pelatihan budidaya bawang merah yang terlaksana	1	Rp20.000.000	Rp20.000.000	
23	Pelatihan budidaya bawang merah	Kelompok Tani Lumbung Rejeki dusun Gedangan 2 RT 03/ RW 04, Kelurahan Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul	Jumlah Pelatihan budidaya bawang merah yang terlaksana	1	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Terdapat 2 usulan dalam satu kelompok di Tahun Anggaran yang sama
24	Pelatihan budidaya bawang merah	Kelompok Tani Sido Maju, dusun Kalangan 1, Kelurahan Ngipak, Karangmojo	Jumlah Pelatihan budidaya bawang merah yang terlaksana	1	Rp20.000.000	Rp20.000.000	
25	Pelatihan budidaya bawang merah	Kelompok Tani Mulyo dusun Karangnongko, Kelurahan Wiladeg, Karangmojo	Jumlah Pelatihan budidaya bawang merah yang terlaksana	1	Rp20.000.000	Rp20.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
26	Bantuan Traktor	Kelompok Tani Sumber Rukun, Pengkok, Patuk	Jumlah Traktor kepada kelompok tani	1	Rp22.000.000	Rp22.000.000	
27	Bantuan Traktor	Kelompok Tani Tani Makaryo, Trenggulun , Giripanggung, Tepus	Jumlah Traktor kepada kelompok tani	1	Rp22.000.000	Rp22.000.000	
28	Bantuan Traktor	Kelompok Tani Sido Makmur, Kalangan 2, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul	Jumlah Traktor kepada kelompok tani	1	Rp22.000.000	Rp22.000.000	
29	Bantuan Traktor	Kelompok Tani Mekarsari, Bedoyo Lor, 01/04, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul	Jumlah Traktor kepada kelompok tani	1	Rp22.000.000	Rp22.000.000	
30	Bantuan Traktor	Kelompok Tani Ngudi Lestari, Jatisari, Playen, Playen, Gunungkidul	Jumlah Traktor kepada kelompok tani	1	Rp22.000.000	Rp22.000.000	
31	Bantuan Traktor	Kelompok Tani Sumber Usaha, Gedali, Beji, Patuk	Jumlah Traktor kepada kelompok tani	1	Rp22.000.000	Rp22.000.000	
32	Bantuan Traktor	Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Ngaglik, Ngeposari	Jumlah Traktor kepada kelompok tani	1	Rp22.000.000	Rp22.000.000	

Aspirasi dan usulan tahun 2024 tersebut diterima oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dan kemudian dilakukan kajian lebih lanjut mengenai keterkaitan usulan kegiatan dengan arah pembangunan pertanian serta keterkaitan dengan isu-isu penting pembangunan pertanian di Kabupaten Gunungkidul.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melakukan hubungan kerja dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia khususnya lingkup sektor Pertanian. Hubungan kerja ini didasari atas kesamaan program dan kegiatan melalui Eselon I terkait. Pembangunan Pertanian secara nasional di Indonesia kewenangannya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Arah kebijakan pembangunan pertanian tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian setiap kurun waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja akan mengacu pada Rencana Strategis Dinas sebagai penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 berkedudukan sebagai kerangka dasar manajemen pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul yang mencerminkan aspirasi masyarakat pertanian, dipadukan dengan *top down policy* dari Pemerintah Pusat, dan penjabaran dari amanat RPJM dan RPJP Kabupaten Gunungkidul. Di dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan pangan telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY tahun 2005-2025
3. Rencana Strategis Kementrian Pertanian Tahun 2020-2024

Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 adalah Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Adapun Misi Kementerian Pertanian dalam mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing untuk kurun waktu 2020 – 2024 yaitu :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025, berisikan visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah: “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”, dengan 4 misi untuk mewujudkannya yaitu: (1) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal, (2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian

dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, (3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, dan (4) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan urusan pangan, dalam Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul pada sasaran Ketahanan Pangan Meningkat. Salah satu indikatornya adalah skor PPH. Dari sini dapat terlihat bahwa Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian.

Sehingga dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan, dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian dan Pangan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disamping sebagai rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (APBN), Dana Alokasi Khusus serta sumber-sumber dana lainnya.

3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan

Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, dan dengan visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”. Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara menyeluruh, adapun tujuan dari sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul adalah terwujudnya Pembangunan pertanian yang optimal dengan indikator Nilai PDRB sub kategori pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan.

Untuk tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan disajikan dalam tabel 3.1 dan 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan PD	Satuan	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1	Terwujudnya Pembangunan pertanian yang optimal	Nilai PDRB sub kategori pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan	Juta rupiah	2.347.755,88

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran PD Tahun 2024
1	Produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.581.224,78
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Ton	34.056,68
2	Ketahanan Pangan meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	90
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Kategori/ nilai	A (80,30)

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 363/KPTS/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Tanggal 26 November 2021, bahwa IKU Dinas Pertanian dan Pangan pada tabel 3.3 di bawah ini digunakan untuk :

- a) perencanaan tahunan
- b) perencanaan jangka menengah
- c) penyusunan dokumen perjanjian kinerja
- d) pelaporan akuntabilitas kinerja
- e) evaluasi kinerja dan
- f) pementauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Dinas Pertanian dan Pangan

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Satuan	Target Kinerja IKU Tahun 2024
1	Produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.581.224,78
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Ton	34.056,68
2	Ketahanan Pangan meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	90

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau merupakan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya manusia yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan program yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian

Rekapulasi program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 7 (tujuh) indikasi prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Ekonomi, meliputi investasi dan pariwisata, dan pengembangan sektor unggulan
2. Penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan kualitas SDM
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
6. Ketentraman dan Ketertiban
7. Reformasi Birokrasi

Dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan 2024, disampaikan program, kegiatan dan anggaran tahun 2024. Program, kegiatan tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan yang dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ketahanan Pangan	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	90, 2	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	359.746.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
					2,09	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	46.471.500,00	
					2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	11.289.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
					2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	5.289.000,00	
					2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	1.950.000,00	
					2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4.050.000,00	
					2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	35.182.500,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ketahanan Pangan	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	BB (80,30)	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.350.000,00	
					2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	32.832.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.740.000,00	
					2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.740.000,00	
					2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	4.740.000,00	
					2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8.535.000,00	
					2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	8.535.000,00	
					2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000,00	
					2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.335.000,00	
					2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	300.000.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	300.000.000,00	
					2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	300.000.000,00	
					2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	300.000.000,00	
					3		13.398.969.466,00	
					3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.398.969.466,00	
					3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.722.712.966,00	
					3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.179.900,00	
					3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.224.900,00	
					3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	
					3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.498.000,00	
					3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.249.000,00	
					3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	748.000,00	
					3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.900.000,00	
					3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.560.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.015.123.966,00	
					3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.946.778.966,00	
					3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.600.000,00	
					3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	64.745.000,00	
					3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.403.000,00	
					3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.403.000,00	
					3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	
					3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.623.500,00	
					3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.957.500,00	
					3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.800.000,00	
					3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.326.000,00	
					3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.060.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	
					3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
					3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.280.000,00	
					3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	
					3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	
					3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000,00	
					3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
					3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.174.882.600,00	
					3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.172.582.600,00	
					3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	
					3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.500.000,00	
					3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.500.000,00	
					3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
					3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.500.000,00	
					3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	
Ketahanan Pangan	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat	Produksi Tanaman Pangan	1.581.224,78	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.824.976.700,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produksi perkebunan dan hortikultura	34.056,68	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.534.662.100,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	300.235.000,00	
					3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.234.427.100,00	
					3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	290.314.600,00	
					3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	290.314.600,00	
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	281.210.000,00	
					3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	281.210.000,00	
					3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	250.000.000,00	
					3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	31.210.000,00	
					3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	
					3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	-	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	42.097.500,00	
					3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	42.097.500,00	
					3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	42.097.500,00	
					3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	527.972.300,00	
					3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	527.972.300,00	
					3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	212.500.000,00	
					3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	259.362.500,00	
					3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	56.109.800,00	
					J U M L A H		13.758.715.966,00	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH			TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2								359.746.500,00							1.636.995.962,00	
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						59.746.500,00							1.184.995.962,00	
1.	2.09.03	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					76	46.471.500,00				Ketahanan Pangan			1.156.778.762,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyuluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						11.289.000,00				Ketahanan Pangan			19.365.285,00	Dinas Pertanian dan Pangan
							3018		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari)					3.022		
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						5.289.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketahanan Pangan			11.712.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6.00	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)					4		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					6.00		
			Jumlah Pelatihan dan Pendampingan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) (Angkatan)				1	1.204.750,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul			
			Jumlah Pelatihan Manajemen Lumbung Pangan Desa (Angkatan)				1	1.274.750,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul			
			Jumlah Pelatihan Usaha Pangan Masyarakat (PUFM) (Angkatan)				1	1.404.750,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul			
			Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDFM) (Angkatan)				1	1.404.750,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul			
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan							1.950.000,00			Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul		7.652.485,00	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/IBDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)	13.00	13.00	13.00	12.00		(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul	13.00		
			Jumlah laporan informasi harga tingkat produsen dan konsumen (Laporan)				12	1.950.000,00	(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul			
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)					4.050.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul			Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah dokumen Neraca Bahan Pangan (NBM) (Laporan)		0.00	0.00	1.						Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul	0.00		
			Angka konsumsi kalori penduduk perkapita (Kkal/Kapita/Hari)				1	4.050.000,00	(Dinas Pangan Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						35.182.500,00							1.137.413.477,00	Dinas Pertanian dan Pangan
							1.894		(JALAN TAMAN BHAKTI NO.02, WONOSARI, GUNUNGKIDUL, KAB. GUNUNG KIDUL, WONOSARI, D.I. YOGYAKARTA A.					1.947		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									INDONESIA 55812, Wonosari, Kec. Wonosari)							
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penelepan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						2.350.000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi			2.928.197.00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	1	1		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					1		
			Analisis Pola Konsumsi Pangan (PPH) (Dokumen)				1	2.350.000.00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						32.832.500.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas SDM			1.134.485.280.00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)		10.00	10.00	1		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					3.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bibit tanaman untuk pengembangan pangan perkotaan (Paket)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Gaji THL dan THR THL 1 org (247hari) (Orang)			1	1	24.682.500,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			THL			
			Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Paket)			1	1	4.350.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Penyelenggaraan B2SA (Laporan)			1	1	3.800.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					100	4.740.000,00							5.856.400,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan (%)					4.740.000,00					ASN, THL, Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Analisis Kerawanan Pangan yang Tersusun (Jenis)			1	1		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					1		Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	2.09.04.2.02.0003	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						4.740.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kelurahan Pangan			5.856.400,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)		3.00	3.00	2.00		(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					3.00			
			Laporan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan FSVA (Laporan)				2	1.740.000,00	(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL Masyarakat				
			Laporan Pelatihan Desa Mandiri Pangan (Laporan)				1	3.000.000,00	(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL Masyarakat				
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						8.535.000,00							22.360.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
			Persentase Pangan Segar Alami (%)				90						ASN, THL Masyarakat				
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Terlaksana (Jenis)				2	8.535.000,00	(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					2	22.360.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	KODE	URUSAN/IBDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						4.200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi			-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	1		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					1		
			Pengujian Bahan Pangan Segar (Paket)				1	4.200.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						4.335.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi			22.360.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)		3.00	3.00	2.00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					4.00		
			Fasilitas Registrasi PSAT PDUK (Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil) (Paket)				1	4.085.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Sosialisasi keamanan Pangan (Kali)				1	250.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						300.000.000,00							452.000.000,00	
1.	2.22.08							300.000.000,00							452.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Persentase Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terlaksana Dengan Baik (%)	100									ASN, THL			
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana (Jenis)	1				300.000.000,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					1	452.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (Laporan)		10	10	6	300.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi			452.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
									(Sidoarjo, Jepus, Karangasem, Paliyan, Ngjeri , Playen, Pengkol, Ngilbar, Bendung, Samin, Ngeposari, Semaru, Wonosari, Kec. Wonosari)				10			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (DAIS) (Laporan)				6	300.000.000,00	(Sidoarjo, Jepus, Karangasem, Paliyan, Ngleri , Playen, Pengkol, Ngilpar, Bendung, Semlin, Ngeposari, Semanu, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Keistimewaa n DIY			ASN, THL, Masyarakat			
3								13.398.969.466,00							26.411.672.011,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG						13.398.969.466,00							26.411.672.011,00	
1.	3.27.01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.722.712.966,00				Peningkatan Ekonomi			24.773.584.508,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100									ASN, THL, Masyarakat			
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						170.179.900,00				Peningkatan Ekonomi			56.820.390,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun (Jenis)	13					(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					13		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						155.224.900.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi			30.812.650.00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		3.00	3.00	4		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					3.00		
			Gaji THL + THR 247 hari (2 orang) (Orang)				2	49.365.000.00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			THL			
			Jumlah dokumen Action Plan (Rencana Aksi Pembangunan Produk Agribisnis Unggulan-Daerah untuk Percepatan Pengerjaan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul 2024) (Dokumen)				1	95.000.000.00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Jumlah renja dan renja perubahan (Dokumen)				2	5.660.000.00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Jumlah Renstra yang disusun (Dokumen)				1	5.199.900.00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH												
1	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Dinas Pertanian dan Pangan
					1	1	1	1.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	ASN, THL, Masyarakat		732.050,00		
			Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	1		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL, Masyarakat	1			
			Jumlah dokumen RKA yang tersusun (Dokumen)			1	1	1.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	ASN, THL		-		Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0,00	0,00	1						ASN, THL	0,00			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)				1	1.498.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH						
1	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								1.249.000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	ASN, THL		732.050.00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		2	2	2		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	2		
			Jumlah dokumen DPA yang tersusun (Dokumen)				1	1.075.000.00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Perjanjian Kinerja yang tersusun (Dokumen)				1	174.000.00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						748.000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	ASN, THL		732.050.00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		2	2	2		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun (Dokumen)				1	675.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Perubahan perjanjian kinerja yang tersusun (Dokumen)			1		73.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.900.000,00			Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	ASN, THL		10.648.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		0	17	17,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	17,00		
			Jumlah Laporan evaluasi LK/JIP (Dokumen)				1	4.850.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Jumlah laporan monev (Laporan)				4	2.865.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		PRIORITAS	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan TEPPRA (Laporan)				12	185.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.560.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	ASN, THL		13.163.590,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		17,00	6,00	9,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	6,00		
			Dokumen SKM OPD (Laporan)				2	190.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Dokumen SKM UPT (Laporan)				4	2.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Review SOP OPD (Laporan)				1	370.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen RTP yang tersusun (Laporan)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.015.123.966.00								22.728.659.052,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah laporan keuangan tersusun (Jenis)				3		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					3			
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.946.778.966.00									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		2184,00	2184,00	2184		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					2184,00			
			Inentif PAD (Paket)				1	3.092.460,00	(DPP, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN				
			Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (Bulan)				14	8.943.686.506,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN				
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.600.000,00					ASN		3.993.000,00		Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	1		(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)			ASN		1		
			Jumlah dokumen laporan akhir tahun (Dokumen)			1	1	3.600.000,00	(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						64.745.000,00					ASN, THL		61.226.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		13	13	13		(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	13		
			Gaji THL + THR 247 hari (2 orang) (Orang)				2	49.365.000,00	(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			THL			
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran (Dokumen)				13	15.380.000,00	(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah						2.403.000,00							20.915.110,00	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang terfasilitasi (Orang)				225		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					225		
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.403.000,00							4.945.445,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		6.00	6.00	4.00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					6.00		
			Jumlah ASN terfasilitasi (Bulan)				12	2.403.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN			
			Pelatihan dan Pembinaan Pegawai (Orang)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN , THL			
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						-							15.969.665,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		2.00	2	11.00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN , THL	12.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah ASN yang terfasilitasi pelatihan sesuai tugas fungsinya (Orang)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN					
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					10	71.623.500,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					10	227.000.078,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.957.500,00									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		0,99	1	1		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					1			
			Jumlah komponen kelengkapan yang tersedia (Jenis)				7	3.957.500,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN, THL					
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor						20.800.000,00									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	1		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)			ASN, THL		1	102.351.238,00	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (Paket)				1	20.800.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	1	1	2.326.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	1		8.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli (Paket)				1	2.326.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		12.00	12.00	2.00	5.060.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL			36.336.300,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah cetak blanko disposisi BKP, Amplop, Map, Kotak Arsip dan SPPD (Jenis)				6	5.060.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL		2.395.800,00		Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disiapkan (Dokumen)		296.00	296.00	356		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	296.00		
			Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (Bulan)				12	1.200.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.000.000,00					ASN, THL		2.700.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12.00	12.00	4.00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	12.00		
			Jumlah Tamu Dinas Pertanian dan Pangan (orang) (Orang)				150	4.500.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Jumlah Tamu UPT TTP Nglangeran (orang) (Orang)				50	1.500.000,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						32.280.000,00					ASN, THL, Masyarakat		66.698.340,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		19.00	19.00	4.00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL, Masyarakat	20.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN terfasilitasi koordinasi dan konsultasi (orang) (Orang)				30	20.280.000,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Jumlah minum dan snack tersedia untuk rapat (Orang)				1.200	12.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terlaksana (Jenis)				3	55.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					3	45.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0,00	25,00	0	-	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					30,00	15.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pengadaan meja kursi tamu (Unit)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL		11.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		8.00	4.00	6		(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL			
			Jumlah belanja AC (1,5 PK dan 2 PK) (Unit)				3	17.000.000,00	(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Jumlah belanja Filling Cabinet Arsip (Unit)				0		(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Jumlah belanja laptop (perencanaan) (Unit)				1	10.000.000,00	(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Jumlah belanja Lemari besi arsip (Unit)				0		(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Jumlah belanja PC (Unit)				0		(Dinas Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			

NO	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah belanja Printer (Unit)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Jumlah belanja Printer (Wb) (Unit)				1	6.000.000,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Jumlah belanja Soundsystem Ruangan type 4 (Set)				1	22.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Jumlah belanja Tangga Lipat (Unit)				0		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0,00	2,00	7,00	-	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL		19.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL	4,00		
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penjangkuran Pemerintahan Daerah						1.174.882.600,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)						1.474.243.878,00	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan jasa perunjeng yang tersedia (Layanan)				3		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					3		
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.700.000,00							4.658.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		4	4	4		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					4		
			Jumlah Materi (Subbag Keuangan) (Lembar)				120	1.200.000,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Jumlah paket/pengiriman (kali) (kali)				26	500.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.172.582.600,00							1.468.985.378,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		924,00	924,00	4,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	924,00		
			Banner (Meter)				32	800.000,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Gaji THL + THR 247 hari (Orang)				34	947.800.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			THL				
			Jaringan PAM (Unit)			0			(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
			Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Surat Kabar/Media Online (tayang) (Kali)			2	1.500.000,00		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat				
			Jumlah rekening air yang dibayar (10rek x 12 bulan) (Meter kubik)			1.186	30.000.000,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
			Jumlah rekening listrik yang dibayar (57rek x 12 bulan) (Kwh/Jiwa)			188.412	190.082.600,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
			Jumlah rekening telepon yang dibayar (2 rek x 12 bulan) (Unit)			24	2.400.000,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
			Papan Informasi DPP (Unit)			0			(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	4	600.000.000	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	11	12	13	14	15	16	17	Dinas Pertanian dan Pangan	
			Retribusi Sampah (Kali)			12	600.000.000	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat					
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia (Layanan)			4	233.500.000.000	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					4				Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)		396.00	202	172.500.000.000	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)							396.00		Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda dua (Unit)			30	30.000.000.000	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Wonosari, Kec. Wonosari)							
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda empat (perbaikan sedang - berat) (Unit)			0			(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN			
			Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan BBM (Unit)			5		142.500.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN			
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00					ASN		6.655.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		12.00	15.00	5		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN	20.00		
			Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi (printer) (Unit)				5	1.500.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						53.500.000,00					ASN, THL		13.310.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		5.00	4.00	1		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	5.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kec. Wonosari)							
			Bangunan Gedung Sederhana rehab gedung ruang rapat DPP (Paket)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Bangunan Gedung Sederhana rehab gedung UPT benih (Paket)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Belanja Partisi / Sketsel DPP dan UPT TTP Nglanggeran (Unit)				0		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Rehab Gedung RR 2 DPP (Paket)				0		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Rehab kamar mandi dinas (Paket)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			rehab paving block (Paket)				1	53.500.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Rehab Taman Dinas (Unit)				0		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
			Sewa Peralatan Pekerjaan Konstruksi Excavator 80-140 Hp (Jam)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.000.000,00					ASN, THL		6.655.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihar/Direhabilitasi (Unit)		10.00	10.00	6		(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL	4.00			
			Jumlah AC yang dipelihara (Unit)				6	6.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL				
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Horikultura, Dan Tanaman Perkebunan (Ton)				1615281 ,46	1.824.976.700,00							244.300.758,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						1.534.662.100,00					ASN, THL			29.662.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang terlaksana (Jenis)				3		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					3		
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					3.00	300.235.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi			29.662.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)		2.00	4.00			(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					4.00		
			Belanja mesin pemotong rumput (Unit)				0		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			
			Gaji THL dan THR THL 6 orang (Orang)				6	162.445.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			THL			
			Kegiatan Pelatihan Integrasi kakao kambing etawa, minuman cokelat 3 in 1, dan dodol cokelat (Laporan)				3	7.790.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Papan Nama Instansi (Unit)				0		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendampingan P2L (DAK NIF) (Kelompok)				2	130.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKID UL)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			ASN, THL, Masyarakat			
			Sosialisasi Sertifikasi MD dari BPOM (UPT TTP NGIanggan) (Kali)				0		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		0,00	0,00	6,00	1.234.427.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	ASN, THL, Masyarakat			Dinas Pertanian dan Pangan
			Bimbingan teknis budidaya bawang merah (PIS)(Angkatan) (Angkatan)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat	0,00		
			Bimbingan teknis budidaya cabe (PIS)(Angkatan) (Angkatan)				0		(Kab Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Cultivator WB (unit) (Unit)				10	150.000.000,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat			
			Dempul Almond (Paket) (Paket)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Demplo ^t Shorgum (Paket) (Paket)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Eksensifikasi kelapa (paket) (WB) (Paket)			11		110.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Gaji THL dan THR THL 2 orang (2x7 hari x 2) (Orang)			2		50.600.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			THL			
			Handspayer (unit)			0			(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat			
			Handtraktor WB (unit) (Unit)			10		220.000.000,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat			
			Intensifikasi jambu mele (paket) (Paket)			1		7.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			JUT WB (Unit)			1		95.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Poktan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	12	13	DAERAH			14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Monev budidaya jagung (kali)				5	1.050.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Monev budidaya mele (kali)				6	1.190.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Monev budidaya padi (kali)				5	1.050.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Paddy mower (unit) (Unit)				0		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat			
			Pelatihan jamur tiram (PIS) (Angkatan)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pelatihan jamur tiram (PIWK) (Angkatan)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pelatihan pengembangan budidaya jagung (Angkatan) PIS (Angkatan)				0		(Kab. Gunungkidul, Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelatihan pengembangan budidaya kedelai (PIS)(Angkatan) (Angkatan)			0			(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pendampingan Banperm (kepanewon) (Kali)			14	3.300.000,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pengadaan Aksinan (Pokir) (Pakei)			31	322.027.000,00		(Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKID UL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani			
			Penyusunan data statistik perkebunan dan hortikultura (Dokumen)			1	3.100.000,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Penyusunan data statistik tanaman pangan : data LTT, data ubinan, laporan, penyusunan ARAM dan ATAP (Dokumen)			2	5.470.000,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Powertheaser Multiguna WB (Unit) (Unit)			10	250.000.000,00		(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat			
			RDKK Pengawasan Pupuk dan evaluasi alsinan (laporan) (Laporan)			2	4.190.000,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sarana Pendukung WB (paket) (Paket)				1	9.000.100,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Sarana TP (Paket)				1	1.450.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) (Unit)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						290.314.600,00							214.638.258,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah produksi benih padi tersertifikasi (Kg)				12000		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					12.000		
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman						290.314.600,00							214.638.258,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))		2	2	2		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja sarana produksi pertanian (Paket) (Paket)				1	118.919.600,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Gaji THL dan THR 4 orang (Orang)				4	111.805.000,00	(Inas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			THL			
			Pengadaan benih padi (benih dasar) (Kg) (Kg)				1	55.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pengadaan benih padi lulus sertifikasi(Kg) (Kg)				1	4.590.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Yang Digunakan (%)				100	281.210.000,00							776.656.200,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						281.210.000,00							576.656.200,00	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana (Jenis)				2		(Jl. Taman Bakti No.43, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813, Wonosari, Kec. Wonosari)					2		
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi			549.770.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		4.00	3.00	2.00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					3.00		
			Cultivator (dbicht)				5	94.422.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)			ASN, THL, Masyarakat			
			Jumlah pengembangan sumber air (DBHCHT)				1	155.578.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)			ASN, THL, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	12	13	14	15	16	17							
1	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	5	34.00	35.00	36.00	31.210.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	11	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	14	ASN, THL, Masyarakat	15	26.886.200,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Cetak Peta LP2B Tingkat Kalurahan (lembar) (Lembar)				36	1.800.000,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN, THL, Masyarakat				
			Upah Tenaga Fasilitator Kegiatan Pertanian (1 Orang) (Orang / Bulan)				10	25.000.000,00	(Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat				
			updating data LP2B tingkat kalurahan (kalurahan) (Dokumen)				36	4.410.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN, THL, Masyarakat				
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana (Jenis)				10	-	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					10	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	KODE	URUSAN/IBDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH								
1	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	2,00	1,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pembangunan UV Dyer (Unit)			0	0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat	1,00			
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang terterangi (Persentase)				100	42.097.500,00							54.031.945,00		Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana (Jenis)				7	42.097.500,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					10			Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						42.097.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				54.031.945,00		Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		6	9	9		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)					10			
			Bimbingan teknis RPT (Regu Pengendali Tanaman) (Angkatan)				1	2.250.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat				
			Drone Sprayer (Pengendali Hama) (Unit)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat				
			Gaji THL dan THR THL 1 orang (248 hari) (Orang)				1	24.682.500,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			THL				
			Gerakan pengendalian OPT bawang merah (Kelompok)				1	2.605.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat				
			Gerakan pengendalian OPT cabe (Kelompok)				1	2.375.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Gerakan pengendalian OPT Perkebunan (Kelompok)				1	2.550.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat				
			Gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan (Kelompok)			5		2.570.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat				
			Paket Bantuan Tyto Alba (Pengendalian OPT Tikus) (Paket)			0			(Bendung, Semini, Rejosari, Semini, Candirejo, Semini, Jurangjero, Ngawen, Kampung, Ngawen, Genjahan, Ponjong, Karangmojo Karangmojo; Sumberegiri, Ponjong; Pilangrejo, Ngilbar, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat				
			Pelatihan agensia hayati (Kelompok)			1		2.605.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat				
			Pengadaan pestisida (Paket)			1		2.460.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kec. Wonosari)							
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis (Kelompok)				122	527.972.300,00					ASN, THL, Masyarakat		563.098.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang terlaksana (Jenis)				3	527.972.300,00				Peningkatan Ekonomi			563.098.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelompok Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		20.00	35.00		212.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			37.00	285.400.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Bahan Kimia (DAK NF (Paket)				1	27.900.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			ASN, THL, Masyarakat			
			Belanja Internet Paket Data Admin BPP Spesifikasi : Paket Data Admin				18	54.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi			ASN, TH			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			BPP (DAK NF) (Paket)						Kec. Wonosari)	Khusus Non Fisik						
			Jumlah tenaga Fungsional yang dinilai (Kali)			2			(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN			
			Monitoring Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) (Kecamatan)			18			(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pelatihan Geospasial Lahan Pertanian (DAK NF) (Angkatan)			18	75.240.000,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			ASN, THL, Masyarakat			
			Pelatihan Keperuluhan BPP (Angkatan)			0			(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pelatihan Petani Milenial (Angkatan)			0			(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pendampingan Penyuluh Swadaya (Angkatan)			0			(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penilaian Lomba Aparatur dan Non Aparatur (Kategori)				7	5.500.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Sosialisasi dan Pelatihan Tematik (DAK MF) (Angkatan)				18	49.860.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			ASN, THL, Masyarakat			
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelemabatan Petani di Kecamatan dan Desa						259.362.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	ASN, THL, Masyarakat		36.220.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		22.00	31.00	2.00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL, Masyarakat	33.00		
			Bimtek Olahhan Ketela (Pokir) (Paket)				1	17.990.000,00	(Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani			
			Fasilitasi pendampingan PUAP dan LKM (Kecamatan)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Gaji THL dan THR THL 10 orang (10x2.48hrari) (Orang)				10	234.475.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			THL			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kec. Wonosari)							
			Jumlah kelompok yang dilatih P4S (Angkatan)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pemberdayaan KWT (Angkatan)				1	1.700.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pembinaan Asosiasi Tembaku (DBHCHT), asosiasi pupuk, cabe (Asosiasi)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pembuatan Keripik (PIS) (Paiket)				0		(Hargosari, Tanjungsari; Ponjong, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pembuatan Keripik (PIWK) (Angkatan)				0		(Piyaman, Wonosari; Ngjoro, Saprosari; Sambirejo, Ngawen, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Pendampingan kelas kelompok tani madya dan utama (kelompok)				4		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penilaian kelompok tani (Kecamatan)				18	2.160.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Sarana Kelembagaan (Paket)				1	523.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Validasi data kelompok (Dokumen)				1	2.514.500,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemantauan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						56.109.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	ASN, THL, Masyarakat		241.478.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)		20,00	43,00	5,00		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)				ASN, THL, Masyarakat	45,00		
			Belanja bahan praktik, Demplot dan Kaji terap Pembelian bibit, obat-obatan, bahan kimia/pupuk				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			ASN, THL Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan monev demplot (Paket)						Kec. Wonosari)							
			Gaji THL + THR 2 Orang (Orang)				2	51.835.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			THL			
			Jumlah Demplot Bawang Merah (PIS) (Paket)				0		(Girisuko, Panggang; Karangasem; Duwet,Wonosari; Sidoharjo; Karangmojo, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Jumlah Demplot Kedelai (PIS) (Paket)				0		(Ganduli Karangmojo, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Jumlah Demplot Kedelai (PIWK) (Paket)				0		(Dengok, Playen; Ganduli, Karangmojo, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Jumlah program penyuluh tingkat desa, kecamatan dan kabupaten (Dokumen)				3	4.274.800,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
			Kaji terap (Unit)				0		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Temu Teknis (Kali)				1		(Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, THL, Masyarakat			
J U M L A H								13.758.715.966.00							28.048.667.973.00	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN,

RISMIYADI

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah membuat Surat Edaran nomor 000.7.6.1/1013 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Strategis menjadi pedoman bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja tahun 2024 merupakan terjemahan dari Rencana Strategis tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan tahun 2024 dengan evaluasi tahun 2022 sebagai dasar pemikiran untuk menentukan target dan indikator baru untuk tahun 2024. Rencana Kerja tahun 2024 juga mengacu kepada visi misi Bupati Gunungkidul tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 serta untuk mensinergikan pembangunan tahun 2024 dengan mengikuti Rencana Kerja Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang telah terlaksana dalam satu tahun sebelumnya dan sejauh mana capaian kinerja terhadap target-target yang telah tertuang pada RPJMD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun berikutnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tanggal 07 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/04391 tanggal 21 Juni 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 antara lain :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
5. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.4. Review terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- 4.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 4.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Gunungkidul memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi sektor pertanian khususnya penyediaan pangan asal ternak, yaitu daging, dan telur. Karena itu produksi pangan asal ternak menjadi sasaran utama dalam program pembangunan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.

Capaian realisasi populasi ternak sapi potong pada tahun 2022 adalah sebesar 149.014 ekor turun 12.641 ekor dari tahun 2021 (161.655 ekor) atau mengalami penurunan sebesar 7,8 persen. Penurunan dikarenakan adanya kasus penyakit PMK yaitu penyakit mulut dan kuku yang mengakibatkan peternak tidak melakukan *replacemen* karena adanya ketakutan dan kekhawatiran dengan penyakit PMK. Penurunan juga disebabkan jumlah ternak masuk dari daerah luar Gunungkidul berkurang. Capaian populasi kambing tahun 2022 sebesar 218.411 ekor atau 105,6 persen naik 11.622 ekor dari tahun 2021 (206.789 ekor) atau mengalami kenaikan sebesar 5,6 persen. Sedangkan populasi ayam buras tahun 2022 sebesar 1.129.283 ekor atau tercapai 94,36 persen turun 67.522 ekor dari tahun 2021 (1.196.808 ekor) atau mengalami penurunan sebesar 5,64 persen. Sedangkan untuk ternak domba tahun 2022 sebesar 12.629 ekor atau 104,6 persen naik 4,6 persen ekor dari tahun 2021 jumlah populasi sebesar 12.075 ekor.

Untuk populasi ayam petelur tahun 2022 sebesar 346.379 ekor dengan jumlah peternak 230 orang dengan rata-rata kepemilikan per peternak sebesar 1.506 ekor. Untuk ayam pedaging sebesar 3.957.100 ekor dengan jumlah peternak 380 orang dengan rata-rata kepemilikan 2.976 ekor per peternak. Untuk itik pedaging sebesar 3.500 ekor dengan jumlah peternak 1 (satu) orang dengan rata-rata kepemilikan 3.500 ekor per peternak. Untuk itik petelur sebesar 16.869 ekor dengan jumlah peternak 10 orang dengan rata-rata kepemilikan 1.689 ekor per peternak. Sedangkan untuk puyuh pedaging tahun 2022 jumlahnya ada 1.595.472 ekor dan puyuh petelur sebesar 183.508 ekor.

Meningkatnya produksi ternak selain ditentukan oleh jumlah pemotongan tentunya juga dipengaruhi jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Naik turunnya populasi ternak seperti sapi potong, kambing, domba, dan unggas juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti jumlah kelahiran ternak, kematian ternak, pemotongan ternak, serta jumlah ternak masuk dan ternak keluar dan juga penyakit ternak. Sedangkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan tingkat populasi adalah pemotongan ternak dan Inseminasi Buatan. Program SIKOMANDAN yang merupakan kelanjutan dari Program UPSUS SIWAB dari anggaran APBN juga ikut berperan dalam peningkatan populasi ternak. Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 juga mendapat kembali kegiatan tersebut dengan jumlah akseptor sebesar 34.200 ekor sedang

pada tahun 2021 sebanyak 39.895 ekor. Target dan realisasi dari program SIKOMANDAN adalah IB, PKB dan kelahiran sampai dengan tahun 2022 capaiannya adalah jumlah IB dari target 34.200 dosis terealisasi sebesar 47.959 dosis atau tercapai 140,23 persen. Pemeriksaan Kebuntingan tercapai 10.021 ekor atau 51,92 persen dari target 19.300 ekor. Sedangkan Kelahiran dari target 18.800 ekor terealisasi 21.793 ekor atau tercapai 115,92 persen.

Indikator kinerja untuk produksi daging tahun 2022 tercapai sebesar 6.942,077 kg naik 2.584.647 kg dari 4.357.430 kg di tahun 2021 atau tercapai 193,16 persen dari target pada tahun 2022 yaitu 3.594.200 kg. Perhitungan produksi daging diperoleh dari penjumlahan hasil pemotongan beberapa komoditas ternak mulai ternak besar (sapi), ternak kecil (kambing, domba, kelinci) dan unggas (ayam pedaging, ayam buras, ayam petelur afkir, puyuh dan itik). Jumlah pemotongan dari semua komoditas ternak ini baik yang merupakan pemotongan ternak tercatat atau tidak tercatat memberikan kontribusi terhadap realisasi capaian produksi daging. Peningkatan produksi daging dikarenakan produksi daging puyuh yang meningkat dengan adanya rumah potong unggas di Kapanewon Patuk dan pemotong puyuh di Kapanewon Gedangsari dan juga elemen sumber data pemotongan bertambah.

Produksi telur tahun 2022 tercapai sebesar 6.143.340 kg atau 171,55 persen dari target pada tahun 2022 yaitu 3.581.890 kg. Produksi telur di atas terdiri atas produksi telur ayam buras sebesar 720.822 kg, ayam ras sebesar 5.043.425 kg, itik 85.644 kg dan puyuh sebesar 293.400 kg. Populasi unggas berpengaruh terhadap produksi telur karena dengan semakin besarnya populasi maka angka betina produktif sebagai penghasil telur juga akan semakin besar. Sebagai parameter perhitungan produksi telur digunakan angka persentase betina produktif untuk ayam buras sebesar 35% dari keseluruhan populasi ayam buras, ras petelur sebesar 60%, itik sebesar 60% dan puyuh memiliki parameter betina produktif sebesar 60%.

Tempat pemotongan hewan yang ada di Kabupaten Gunungkidul untuk TPH ternak besar khususnya sapi ada 22 lokasi. Sedangkan untuk tempat pemotongan sekaligus pedagang ternak kecil khususnya kambing ada 23 lokasi. Untuk unggas tempat pemotongan yang ada sekitar 324 lokasi. Pemotongan unggas meliputi pemotongan ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Hasil pemotongan Tahun 2022 jumlah pemotongan sapi tercatat ada 6.397 ekor, kambing 32.211 ekor, domba 2.051 ekor. Sedangkan jumlah pemotongan ayam buras sebanyak 264.838 ekor, ayam pedaging sebanyak 3.845.111 ekor, ayam petelur 4.140 ekor, itik pedaging sebanyak 24.542 ekor dan puyuh pedaging sebanyak 3.018.556 ekor.

Jumlah ternak yang dilayani atau mendapat fasilitas kesehatan hewan tahun 2022 adalah sejumlah 4.607 ekor atau tercapai 146,58 persen dari target pada tahun 2022 yaitu sebesar 3.143 ekor. Ternak yang mendapat pelayanan di atas adalah ternak sapi. Adapun ternak lain yang juga bisa mendapat pelayanan kesehatan hewan selain ternak sapi antara lain kerbau, kambing, domba dan unggas. Ternak-ternak tersebut bisa mendapatkan pelayanan pengobatan dan vaksinasi.

Sejak adanya kasus PMK pada awal Tahun 2022 dampak utama pada pengiriman ternak dan pemasaran hasil produksi ternak (daging sapi), dimana jumlah perdagangan ternak keluar daerah menurun dan pada awal pasca kasus jumlah penjualan daging di pasar omzetnya

menurun, namun saat ini keadaan sudah mulai kembali normal. Adapun dampak positif dari kasus PMK dan kasus antraks pada akhir tahun 2019 kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kematian ternak menjadi meningkat.

Untuk pengendalian PMK di Gunungkidul terus dilaksanakan vaksinasi pemberian antibiotik dan vitamin dan khusus untuk kasus antraks pengendalian sampai dengan sepuluh tahun ke depan sejak terjangkitnya wabah pada ternak-ternak di daerah yang terserang dan sekitarnya. Pelaksanaan pengendalian lain yang dilakukan adalah pengawasan lalu lintas serta penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, khususnya antara kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat dengan pendekatan *one health* mengingat PMK dan antraks merupakan zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Dengan pengendalian yang sudah dilakukan, kasus PMK dan antraks tidak mengganggu pariwisata yang merupakan primadona baru di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan pengiriman ternak keluar daerah dari zona lain yang tidak terdampak antraks dapat tetap terlaksana karena adanya prosedur bahwa setiap ternak yang dikirim ke luar daerah harus disertai bukti SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang.

Untuk mengurangi dampak sosial dari kasus PMK dan antraks ini, juga dilakukan dengan cara fokus pada upaya penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi terus menerus kepada masyarakat, pengawasan lalu lintas antar wilayah, penutupan desa tertular agar ternak sakit tidak keluar, serta pembangunan rumah potong hewan.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan produksi peternakan
2. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan
3. Pengelolaan kualitas sumber daya peternakan

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Peningkatan produksi hasil peternakan dari daging dan telur.
2. Peningkatan populasi sapi potong, kambing dan ayam buras
3. Peningkatan nilai tambah produk pangan asal hewan
4. Pencegahan penyakit *zoonosis*
5. Mewujudkan sentra agribisnis komoditas unggulan peternakan
6. Menyediakan akses permodalan bagi peternak
7. Pengembangan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kegiatan Kesejahteraan Hewan
8. Fasilitasi perizinan usaha peternakan

Sedangkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor pencapaian tahun 2024 dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan, program kerja yang ditetapkan, prioritas yang

berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2. Menentukan dan mengklarifikasi prioritas dan isu-isu kritis yang akan diselesaikan.
3. Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai respon dari masalah atau isu-isu kritis.
4. Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokkan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) tahun 2022 tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
s.d Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Peternakan _ Ton	7192,15	8011,57	7176,18	13.085,44	182,34	7180,72	28.277,72	706943
3.27.02	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang terlaksana _ jenis	2							
		Persentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang terlaksana _ persen	100							
3.27.02	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Uji performans sapi potong _ kali	10	10	5	5	100		15	150
		Pembinaan gabungan kelompok perbibitan/gapokbit ternak _ kali	3	4	3	3	66,66		7	230
		Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil _ laporan	22					15	15	68,18

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak yang terlaksana _ jenis	3							
			100							
3.27.02	2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak	39778700					39778700	39778700	100
3.27.02	2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1	0	1	1	100		1	100
		Bimbingan teknis penanaman hijauan pakan ternak _ angkatan	2	2	2	2	100		4	200
		Bimbingan teknis pengelolaan pakan ternak alternatif _ angkatan	2	3	2	2	100		5	250

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Bimbingan teknis pengelolaan pupuk kandang _ angkatan	2	3	2	2	100		5	250
		Pelatihan petugas data peternakan _ angkatan	2	4	2	2	100		6	300
		pembinaan asosiasi pengolah pakan ternak _ kali	4	4	3	3	100		7	175
		Pembinaan asosiasi pengolah pupuk kandang _ kali	4	4	3	3	100		7	175
		Pengadaan bibit hijauan pakan ternak (HPT) _ paket	4	2	2	2	100		4	100
		Pengadaan N2 cair _ liter	5000	5000	820	820	0		5820	116,4
		bimtek penanaman hijauan pakan ternak (PIS) _ angkatan	1	0	0	0	0		0	0
		Pengadaan plastik sheet _ lembar	8250	8250	0	0	0		8250	100
		Bimtek Pengolahan Pupuk Kandang/ Organik (PIWK _ angkatan	6	0	6	6	100		6	100
		Jumlah barang/jasa terakumulasi dan hijauan pakan ternak yang tersedia _ ton	30,92					30,92	30,92	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lulu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan_ laporan	8					4	4	50
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan yang digunakan _ Persen	100	100	100	100	59,21	100	300	300
3.27.03	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana _ jenis	1							
		Persentase layanan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana _ persen	100							
3.27.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi Puskesmas dan sarana pendukungnya _ unit	5	0	6	6	100		6	120
		Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara _ unit	1					2	2	200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah populasi ternak _ ekor	1575203	1477899	1545936	1496708	96,82	1553365	4527972	113199300
3.27.04	2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peta penyakit hewan menular strategis _ dokumen	1							
3.27.04	2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase penanganan penyakit hewan menular strategis _ persen	100							
3.27.04	2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pemantauan wilayah pasca vaksinasi antrax _ padukuhan	20	20	20	20	100		40	200
3.27.04	2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengawasan obat hewan _ dokumen	1	1	1	1	100		12	200
3.27.04	2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Sosialisasi PHMS Tingkat Kabupaten _ angkatan	6	1	6	6	100		7	116
3.27.04	2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan kapasitas petugas medis peternakan _ angkatan	1	1	1	1	100		2	200
3.27.04	2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan pengalangan penyakit hewan _ laporan	10					10	10	100
3.27.04	2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan hewan yang terfasilitasi _ unit	13							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lulu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase fasilitas kesehatan hewan yang terfasilitasi _ persen	100							
3.27.04	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Evaluasi vaksinasi AI/ND/Rabies _ sampel	90	90	90	93	103		183	203
		Kalibrasi peralatan laboratorium _ kali	1	1	1	1	100		2	200
		Monitoring dan surveilans PHMS untuk brucellosis dan antrax _ sampel	390	390	390	412	105,64		1192	305,64
		Monitoring dan surveilans PHMS untuk endoparasit pada ternak _ sampel	410	410	410	412	100,49		1232	300,49
		Pengawasan kualitas pangan asal hewan _ sampel	150	150	150	164	109,33		464	309,33
		Pelatihan	1	0	3	3	100		2	200
		Akreditasi dan Evaluasi lab Keswan _ paket	0	0	0	0	0		0	0
		Pengadaan peralatan pengujian spesimen babi _ paket	0	0	0	0	0		0	0
		Pengadaan peralatan hematologi analiser dan kimia darah _ paket	0	0	0	0	0		0	0
		Pengembangan ruang laboratorium _ unit	0	0	0	0	0		0	0
		Jumlah peyanaan jsa laboratorium_ laporan	44					44	44	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.04	2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan TPKH (Tempat Pelaksanaan Kesehatan Hewan) _ ekor	4320	3960	4320	3686	160,60		12646	290,71
		pendataan dan penanganan PHMS (12 laporan bulanan x 6 UPT) _ laporan	72	72	72	72	100		144	200
		pengadaan obat ternak _ paket	1	1	1	1	100		2	200
		pengadaan peralatan medis pakai habis _ paket	1	1	1	1	100		2	200
		Sosialisasi apresiasi kurban _ angkatan	12	12	12	12	100		24	200
		Sosialisasi Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (6 angkatan X 3 kecamatan X 6 UPT) _ kali	108	108	108	108	100		216	200
		Bimtek Peternakan (manajemen pemeliharaan dan keswan ayam buras) _ angkatan	12	0	0	0	0		0	0
		Sosialisasi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) untuk Anak TK / SD (PIWK) _ angkatan	4	2	4	4	100		8	200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUHH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (PTWK) _ angkatan	1	17	1	1	100		18	1800
		Bimtek penanganan hewan dan daging qurban (PTWK) _ angkatan	3	0	3	3	100		3	100
		Jumlah penerapan jasa medik veteriner _ laporan	55					55	55	100
3.27.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terlaksana _ jenis	4							
		Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terlaksana _ persen	100							
3.27.04	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai _ kali	2	2	2	2	100		4	200
		Pengawasan praktik pelayanan jasa medik veteriner _ dokumen	1	1	1	1	100		2	200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sosialisasi daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) tingkat kabupaten _ angkatan	4	2	4	4	100	6	6	150
		Sosialisasi RPH _ kali	6	6	0	0	0	6	6	100
		Penyusunan perda layanan kesehatan hewan _ dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0
		Penyusunan perda RPH _ dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0
		Peneruban persyaratan teknis yang ditetapkan _ laporan	13					13	13	100
3.27.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terlaksana _ jenis	3							
		Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terlaksana _ persen	100							
3.27.04	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Bimtek penerapan NKV (Nomor Kontrol Veteriner) _ angkatan	1	1	1	1	100		2	200
		Monitoring pasar ternak _ kali	9	8	9	9	100		17	188,88
		Pemantauan pemotongan hewan kurban _ kali	1	1	1	1	100		2	200
		Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner 1 dok;	1	1	1	1	100		2	200
		Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan _ laporan	6					6	6	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lulu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Usaha Pertanian/Peternakan sesuai SOP _persen	100		100	100	100	100	300	300
3.27.06	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha peternakan yang terdaftar izin usahanya _ unit	10							
		Persentase usaha peternakan yang terdaftar izin usahanya _ persen	100							
3.27.06	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Penyusunan naskah akademik perda penyelenggaraan peternakan dan keswan _ dokumen	1	0	1	1	100		1	100
		Sosialisasi Perda perizinan berbasis resiko _ kali	18	0	18	18	100		18	100
		Pembinaan perizinan usaha pertanian		0	1	1	100		1	100
		Jumlah izin usaha peternakan yang diterbitkan _ liputan	8					3	3	37,5
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik _ Persen	100		100	100	100	100	300	300
3.27.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun _ jenis	13							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			100							
3.27.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu _ persen	1	1	0	0	0		1	100
		Jumlah draft Renstra 2021- 2024 _ dokumen	1	1	1	1	100		2	200
		Jumlah Forum PD yang terlaksana _ kali	2	2	2	2	100		4	200
		Jumlah renja dan renja perubahan _ dokumen			1	1	100		1	100
		Jumlah draft Review Renstra 2021-2026 _ dokumen	3					3	3	100
		Jumlah pengawasan mubandh/hibat tak/bahan paku/pakan/terumbu sialkad _ dokumen								
3.27.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA _ dokumen	1	1	1	1	100		2	200
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil penyusunan dokumen RKA- SKPD _ dokumen	1					1	1	100
3.27.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan _ dokumen	1	1	1	1	100		2	200
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD _ dokumen	1					1	1	100
3.27.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA _ dokumen	1	1	1	1	100		2	200
		Perjanjian kinerja yang tersusun _ dokumen	1	1	1	1	100		2	200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		ROPK yang tersusun _ dokumen	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD-dokumen	2					2	2	100
3.27.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA _ dokumen	1	1	1	1	100		2	200
		Perubahan Perjanjian Kinerja yang tersusun _ dokumen	1	1	1	1	100		2	200
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD _ dokumen	2					2	2	100
3.27.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD _ laporan	17					17	17	100
3.27.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJP _ dokumen	1	1	1	0	0		1	100
		Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD _ laporan	12	12	12	12	100		24	200
		Jumlah laporan evaluasi RKPDP _ laporan	4	4	4	4	100		8	200
		Jumlah laporan realisasi kinerja perangkat daerah _ laporan	18						18	100
3.27.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun _ jenis	3							
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu _ persen	100							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN - bulan	14	14	14	14	100		28	200
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang/bulan	840					840	840	100
3.27.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun_ dokume	1	1	0	0	0		1	100
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil kondisi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD - laporan	1					1	1	100
3.27.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran_ laporan	14	14	14	14	100		28	200
		Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil kondisi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD_ laporan	13					13	13	100
3.27.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi _ ASN	80							
		Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian _ persen	100							
3.27.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi _ ASN	80		80	80	100		80	100
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian_ dokumen	5					5	5	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01	2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang dikirim diklat _ ASN	8		2	2	100		2	25
		Jumlah pegawai bantukan tugas langsung yang mengikutidibekand,peatihan_orag	10					2	2	20
3.27.01	2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia _ layanan	10							
		Persentase Administrasi Umum terlayani _ persen	100							
3.27.01	2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia _ jenis	10		10	10	100		10	100
		Jumlah paket komponen listrik tsaki/pencangan bangunan kantoryangdisediakan_paket	5					1	1	20
3.27.01	2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia _ jenis	28		27	27	100		27	96,43
		Jumlah paket komponen listrik tsaki/pencangan bangunan kantoryangdisediakan_paket	16					14	16	87,5
3.27.01	2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia _ jenis	13		14	14	100		14	107,69
		Jumlah paket peralatan rumah tanggayangdisediakan_paket	2					1	1	50

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target PD Renja Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01	2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak blanko disposisi, bkp, amplop, map, spped _jenis	5		5	5	100		5	100
		Cetak blanko KUASI _jenis	1		1	1	100		1	100
		Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan _paket	2					2	2	100
3.27.01	2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar _bulan	12		12	12	100		12	100
3.27.01	2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minum snack tamu _ orang	100		100	100	100		100	100
		Jumlah lipan fasilitas kunjungan tamu _lipuan	12					12	12	100
3.27.01	2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi luar daerah _ OH	18		18	18	100		18	100
		Jumlah koordinasi dalam daerah _ OH	24		24	24	100		24	100
		Jumlah minum snack rapat _ orang	840		840	840	100		840	100
		Jumlah lipan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD _lipuan	47					12	12	25,53
3.27.01	2.07 Pegadaian Barang Milik Daerah/Rumah Tinggal Utusan Pemertintah Daerah	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat dan pengabdian masyarakat _jenis	2							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Persentase pengaduan dan keluhan masyarakat yang ditangani</i>	100							
3.27.01	Pengadaan Ruang dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lain yang disediakan_ unit	3					3	3	100
3.27.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia _ layanan	3							
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana _ persen	100							
3.27.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim dan jasa iklan _ buah	70		75	75	100		75	107,14
3.27.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar (16rek x 12 bulan) _ rekening	192		108	108	100		108	56,25
		Jumlah rekening listrik yang dibayar (39 rek x 12 bulan) _ rekening	468		144	144	100		144	30,77
		Jumlah rekening telepon yang dibayar (6 rek x 12 bulan) _ rekening	72		12	12	100		12	16,66
		Jumlah tanah kas desa yang terbayar sewanya (UPT Wonosari) _ lokasi	1		1	1	100		1	100
		Pemasangan PDAM _ lokasi	1		0	0	0		0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan_ laporan	207					50	50	24,15

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Retribusi sampah _ kali	12		12	12	100		12	100
		Jumlah layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan _ lapuan	12					12	12	100
3.27.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia _ layanan	4							
		Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana _ persen	100							
3.27.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya _ unit	60		60	60	100		60	100
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya _ unit	2		2	2	100		2	100
		Jumlah kendaraan roda dua yang terpelihara (servis dan BEM) _ unit	35		36	36	100		36	102,86
		Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara (servis dan BEM) _ unit	2		2	2	100		2	100
		Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizannya _ unit	35					29	29	82,86

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01	2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi (printer, mesin fax, LCD Proyektor, dll) _ unit	25		13	10	76,92		10	40
		Jumlah peralatan dan mesin lain yang dipelihara _ unit	12					12	12	100
3.27.01	2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor _ unit	1		1	1	100		1	100
		Jumlah gedung/kantor dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi _ unit	1					1	1	100
3.27.01	2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terfasilitasi (AC, kipas angin, pompa air, LED monitor, dll) Dimas dan UPT _ unit	20		20	20	100		20	100
		dan prasarana gedung/kantor dan bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi _ unit	28					28	28	100
3.27.01	2.13 Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun _ jenis	4							
		Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah _ skor	80,1			81,390		81,422		
3.27.01	2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Review SOP OPD _ dokumen	1		1	1	100		1	100
		Dokumen RTP (SPP) _ dokumen	1		1	1	100		1	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dokumen SKM OPD_ dokumen	2		2	2	100		2	100
		Dokumen SKM UPT Lab Keswan_ dokumen	2		2	2	100		2	100
		Dokumen SKM UPT Puskesmas_ dokumen	12		12	12	100		12	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dievaluasi dengan parameter indikator yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi pengembangan kedepannya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Produksi Daging	Ton	4618,75	3.594,20	3.596,17	3.598,15	4.357,43	6942,07	3.596,17	3.598,15		
	Produksi Telur	Ton	3385,23	3.581,98	3.584,55	3.587,14	3.654,14	6143,34	3.584,55	3.587,14		
2	Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas kesehatan hewan	Ekor	NA	3.143	3.286	3.486	NA	6407	3.286	3.486		
3	Nilai AKIPDPKH	Kategori / Nilai	NA	A (80,10)	A (80,20)	A (80,30)	NA	A (80,30)	A (80,20)	A (80,30)		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang sangat tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika biokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Permasalahan pembangunan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada urusan pertanian adalah:

1. Mayoritas peternak masih mengandalkan pola peternakan konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan peternak;
2. Predikat Gunungkidul sebagai gudang ternak belum sepenuhnya dioptimalkan untuk integrasi budidaya pertanian dan peternakan;
3. Belum optimalnya penerapan industri pertanian/peternakan yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian/peternakan yang berdaya saing tinggi;
4. Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian/peternakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Gunungkidul dapat diidentifikasi beberapa hal tantangan dan peluang sebagai berikut:

- a. Peternak di Kabupaten Gunungkidul sangat apresiatif terhadap pelayanan dinas sehingga proses pemandirian peternak lebih mudah dilaksanakan;
- b. Peternak mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitas dari dinas;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses langsung data dan informasi dari dinas;
- d. Terjalannya kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal pengembangan sistem informasi (DATA INFORMASI, WEB);
- e. Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk dengan akademisi dan aparatur penelitian dan pengembangan (LIPI, BPTP, Perguruan Tinggi);
- f. Tersedianya program beasiswa untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas;
- g. Tersedianya banyak peluang promosi produk peternakan melalui pameran dan berbagai ekspo;
- h. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan DAK dan APBN;

Dari faktor pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan baik secara internal dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 antara lain:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - Reformasi birokrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta belum terlaksananya Standar Pelayanan dengan baik. Di sisi lain pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.
 - Reformasi birokrasi ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.
- b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
 - Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dalam aspek pendidikan serta kesehatan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu segera disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terpadu lintas bidang. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui kegiatan peningkatan produksi peternakan, peningkatan kesehatan hewan, peningkatan hasil olahan serta pemasaran dilaksanakan sebagai rencana strategis dan rencana aksi untuk ikut serta menanggulangi kemiskinan.
- c. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 - Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.
 - Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang Terbuka

Hijau (RTH), masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan lahan kritis dan sumber daya alam.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Dalam RKPD di informasikan rencana kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan pagu indikatif untuk setiap PD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap PD dalam menyiapkan Renja PD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. RKPD dibuat dengan melalui proses bottom up melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil renstra Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY dan Pusat kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan dari hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang muncul.

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara lain :

1. Menyajikan penjelasan terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran anggarannya berbeda.
2. Beberapa hasil dari proses sinkronisasi program kegiatan berdasar pada Permendagri No 90 Tahun 2019 dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Tahun 2024 akan ada 6 program 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Beberapa tolok ukur kegiatan juga mengalami penyesuaian sebagai tindak lanjut sinkronisasi Permendagri No 90 Tahun 2019 dan adanya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai OPD baru hasil pemisahan dari Dinas Pertanian dan Pangan.
4. Mapping penyesuaian tolok ukur program, kegiatan dan tolok ukur kegiatan juga telah dilakukan dengan menampilkan catatan penting terhadap program dan kegiatan yang selama ini dijalankan di Dinas Pertanian dan Pangan akan dijalankan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai OPD baru hasil pemisahan dari Dinas Pertanian dan Pangan.

5. Beberapa kegiatan baru juga ada yang disesuaikan untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti penggabungan TUK.
6. Besaran pagu juga berbeda untuk beberapa usulan RKPd dikarenakan adanya sumber dana dari PIS, PIWK, DAK Non Fisik, Dana Keistimewaan (DAIS) dan juga kebutuhan dari masing-masing bidang dan subbagian Dinas Peternakan Kesehatan Hewan.

Hasil review terhadap program/kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 dan rekapitulasi perbandingan usulan melalui mekanisme Musrenbang dan pagu anggaran dalam Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 di sajikan melalui Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				-					1.089.997.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				-					1.089.997.000	
	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN				-					1.089.997.000	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	1.089.997.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan						
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.585.000	Penyusunan Dokumen Daerah	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.585.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	904.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	904.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	904.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	904.500	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	9,680,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	27.197.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	11,918,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43 Laporan	26.657.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,699,065,184	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.871.706.116,40	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gunungkidul	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/Bulan	6,683,335,184	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gunungkidul	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/Bulan	3.864.036.116,40	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,630,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	12,100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	6.170.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.616.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.900.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1.936.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1.900.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	9.680.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				137.501.980	Administrasi Umum Perangkat Daerah				465.099.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gunungkidul	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	5 Paket	7.744.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gunungkidul	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	1 Paket	1.765.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16 Paket	32.546.580	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	33.853.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Gunungkidul	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	7.744.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Gunungkidul	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	2.755.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	2 Paket	26.378.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	2 Paket	10.571.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.210.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Lparan	500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	61.879.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	415.655.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				43,859,200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	43,859,200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	4.800.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				566,132,050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	207 Laporan	565,406,050	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	37 Laporan	109.013.813	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	726,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	25 Laporan	70.512.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108,900,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	84,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	65.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6,050,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,100,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	6,050,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	8.400.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					106,232,071	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					7,054,300	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Gunungkidul	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	22 Laporan	7,054,300	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Gunungkidul	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	16 Laporan	20.087.000	Ada perubahan nomenklatur pada kode rekening sub kegiatan
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					99,177,771	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Gunungkidul	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	8 Lporan	33,059,257	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Gunungkidul	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	16 Laporan	34.551.500	Ada perubahan nomenklatur pada kode rekening sub kegiatan
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Gunungkidul	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	39778700 Ekor	33,059,257	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Gunungkidul	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	8 Laporan	15.800.000	Ada perubahan nomenklatur pada kode rekening dan satuan indikator sub kegiatan
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Gunungkidul	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	30,92 Ton	33,059,257	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Gunungkidul	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	3 Laporan	11.160.600	Ada perubahan nomenklatur pada kode rekening dan satuan indikator sub kegiatan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1,000,000,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Pembangunan Prasarana Pertanian					1,000,000,000	Pembangunan Prasarana Pertanian				

Rencana Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan			
No	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	1.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	Ada perubahan nomenklatur pada kode rekening sub kegiatan		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												
					564,952,584					815.088.287			
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				73,205,000					45.394.000			
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Gunungkidul	Jumlah dan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	10 Laporan	73,205,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gunungkidul	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	21 Laporan		Ada perubahan nomenklatur pada nama, kode rekening dan indikator sub kegiatan		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												
					437,532,104					745.919.287			
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota												
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Gunungkidul	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	44 Laporan	60,517,279	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Gunungkidul	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	20 Laporan	60.525.400	Ada perubahan nomenklatur pada kode rekening sub kegiatan		
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Gunungkidul	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	55 Laporan	377,014,825	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Gunungkidul	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	77 Laporan	685.393.887	Ada perubahan nomenklatur pada kode rekening sub kegiatan		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				39,915,480					11.075.000			
	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Gunungkidul	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	13 Laporan	39,915,480	Pemenuhan Persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Gunungkidul	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	11 Unit Usaha	11.075.000	Ada perubahan nomenklatur pada nama dan kode rekening sub kegiatan, indikator dan satuan indikator sub kegiatan		

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan							
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan					14,300,000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan					12.700.000	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Gunungkidul	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	6 Laporan	14,300,000	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Gunungkidul	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	5 Unit	12.700.000	Ada perubahan nomenklatur pada nama dan kode rekening sub kegiatan, indikator dan satuan indikator sub kegiatan		
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					52,246,832	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					4.595.000	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					52,246,832	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.595.000	
	Pembinaan dan Pengawasan ' Penerapan Izin Usaha Pertanian	Gunungkidul	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	3 Laporan	52,246,832	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Gunungkidul	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	3 Laporan	4.595.000	Ada perubahan nomenklatur pada nama dan kode rekening sub kegiatan		
	TOTAL					9,327,047,901	TOTAL					6.652.860.616,40	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan mengakomodir usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan yang sebelumnya dituangkan dalam kamus usulan program dan kegiatan pembangunan di mana masyarakat dapat mengakses untuk selanjutnya dapat diusulkan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan. Gambaran selama ini menunjukkan bahwa implementasi program pembangunan pertanian/peternakan relatif menjadi ranahnya para pemangku kepentingan utama yang secara signifikan berpengaruh atau memiliki posisi penting atas keberlangsungan kegiatannya.

Dalam konteks sektor pertanian secara organisasi pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas. Secara perorangan atau kelompok, pemangku kepentingan mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional hingga lokal), peneliti, penyuluh, petani/peternak (kontak tani, pemilik, penggarap, buruh tani), pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (alsintan dan transportasi), dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mengkaji dan menyeleksi program dan kegiatan usulan masyarakat tersebut berdasarkan pada sasaran daerah dengan memperhatikan indikator yang telah ditetapkan yaitu :

Produksi peternakan meningkat, difokuskan pada strategi penguatan kelembagaan petani dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dengan indikator kegiatan antara lain :

- a. Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang terlaksana
- b. Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak yang terlaksana
- c. Jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana
- d. Jumlah peta penyakit hewan menular strategis
- e. Jumlah fasilitas kesehatan hewan yang terfasilitasi
- f. Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terlaksana
- g. Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terlaksana
- h. Jumlah usaha peternakan yang terdaftar izin usahanya

Dalam Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini para pemangku kepentingan menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, sasaran daerah, keselarasan program kegiatan pembangunan daerah, menyelaraskan program kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dituangkan dalam kamus usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 menjadi prioritas pada tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/04391 tanggal 21 Juni 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul

NO	USULAN	ALAMAT	INDIKATOR KINERJA	KOEFISIEN / VOLUME	HARGA SATUAN	ANGGARAN	CATATAN
1.	(PIWK) - Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Piyaman, Wonosari	Jumlah Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1 Angkatan	2.800.000	2.800.000	Prioritas 2025
2.	(PIWK) - Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Karangduwet, Paliyan	Jumlah Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1 Angkatan	2.800.000	2.800.000	Prioritas 2025
3.	(PIWK)- Sosialisasi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, sehat, utuh, halal) untuk Anak TK / SD	Sodo, Paliyan	Jumlah Sosialisasi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, sehat, utuh, halal) untuk Anak TK / SD	1 Angkatan	2.200.000	2.200.000	Prioritas 2025
4.	(PIS) - Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Jetis, Saptosari	Jumlah Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1 Angkatan	2.800.000	2.800.000	Prioritas 2025
5.	(PIS) - Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Monggol, Saptosari	Jumlah Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1 Angkatan	2.800.000	2.800.000	Prioritas 2025

6.	(PIS) - Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Giricahyo, Purwosari	Jumlah Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1 Angkatan	2.800.000	2.800.000	Prioritas 2025
7.	(PIS) - Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Beji, Ngawen	Jumlah Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1 Angkatan	2.800.000	2.800.000	Prioritas 2025
8.	(PIS) - Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	Watusigar, Ngawen	Jumlah Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	1 Angkatan	2.200.000	2.200.000	Prioritas 2025
9.	(PIS) - Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	Monggol, Saptosari	Jumlah Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	1 Angkatan	2.200.000	2.200.000	Prioritas 2025
10.	(PIS) - Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	Nglanggeran, Patuk	Jumlah Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	1 Angkatan	2.200.000	2.200.000	Prioritas 2025
11.	(PIS) - Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	Pacarejo, Semanu	Jumlah Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	1 Angkatan	2.200.000	2.200.000	Prioritas 2025
12.	(PIS) - Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	Pundungsari, Semin	Jumlah Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	1 Angkatan	2.200.000	2.200.000	Prioritas 2025
13.	(PIS) - Sosialisasi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) untuk Anak TK / SD	Tileng, Girisubo	Jumlah Sosialisasi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) untuk Anak TK / SD	2 Angkatan	2.200.000	4.400.000	Prioritas 2025
14.	(PIS) - Bimtek Penanaman Hijauan Pakan Ternak	Getas, Playen	Jumlah Bimtek Penanaman Hijauan Pakan Ternak	2 Angkatan	5.225.000	10.450.000	Prioritas 2025

15.	(PIS) - Bimtek Penanaman Hijauan Pakan Ternak	Wiladeg, Karangmojo	Jumlah Bimtek Penanaman Hijauan Pakan Ternak	1 Angkatan	5.225.000	5.225.000	Prioritas 2025
16.	(PIS) - Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif	Plembutan, Playen	Jumlah Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif	1 Angkatan	2.225.000	2.225.000	Prioritas 2025
17.	(PIS) - Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif	Sumberwungu, Tepus	Jumlah Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif	1 Angkatan	2.225.000	2.225.000	Prioritas 2025
18.	(PIS) - Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif	Bulurejo, Semin	Jumlah Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif	1 Angkatan	2.225.000	2.225.000	Prioritas 2025
19.	(PIS) - Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif	Putat, Patuk	Jumlah Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif	1 Angkatan	2.225.000	2.225.000	Prioritas 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul melakukan hubungan kerja dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia khususnya lingkup sektor Peternakan. Hubungan kerja ini didasari atas kesamaan program dan kegiatan melalui Eselon I terkait. Pembangunan Pertanian secara nasional di Indonesia kewenangannya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Arah kebijakan pembangunan pertanian tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian setiap kurun waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang.

Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 adalah Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Adapun Misi Kementerian Pertanian dalam mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing untuk kurun waktu 2020 – 2024 yaitu :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Selaras dengan visi di atas, Ditjen PKH sebagai salah satu Eselon I di bawah Kementan merumuskan visi sebagai berikut: “Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”. Upaya strategis dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dirumuskan melalui misi organisasi yang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan
3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing
6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.

Tujuan penting dari pembangunan Ditjen PKH selama 2020-2024 mencakup :

1. Tersedianya benih/bibit ternak yang berkualitas
2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan
3. Meningkatnya kesehatan hewan
4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional
5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing.
6. Terwujudnya reformasi birokrasi Ditjen PKH.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sasaran Renja merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul, dan dengan visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”. Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara menyeluruh, adapun tujuan dari sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul adalah terwujudnya Pembangunan pertanian yang optimal dengan indikator Nilai PDRB sub kategori peternakan.

Untuk gambaran prioritas utama dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul seperti tertera pada tabel 3.1. dan 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Ketahanan Pangan	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Produksi peternakan meningkat	Produksi daging Produksi telur
				Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas kesehatan hewan
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPKH	Nilai AKIP DPKH

Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul, dan dengan visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara menyeluruh, adapun tujuan dari sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Tujuan PD : Terwujudnya Pembangunan peternakan yang optimal
Indikator tujuan : Nilai PDRB sub kategori peretanian peternakan

2. Sasaran PD :

a) Produksi peternakan meningkat

Indikator Sasaran:

- Produksi daging
- Produksi telur

b) Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan

- Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas kesehatan hewan

c) Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPKH

- Nilai AKIP DPKH

Tujuan dan sasaran sebagaimana yang akan dicapai dengan penentuan-penentuan sasaran dan kebijakan dan telah dijabarkan dan disusun dalam program-program yang implementatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Dari uraian di atas, Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disampaikan pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1	Terwujudnya pembangunan peternakan yang optimal	Nilai PDRB sub kategori pertanian peternakan	771,593,64

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1	Produksi peternakan meningkat	Produksi Daging	3.598,15 ton
		Produksi Telur	3.587,14 ton
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas kesehatan hewan	3.486 ekor
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPKH	Nilai AKIP DPKH	A (80,30) Kategori/Nilai

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan beberapa Indikator Kinerja. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta target capaian kinerja yang masih bergabung dengan IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 364/KPTS/2021 tanggal 26 November 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, seperti pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Produksi peternakan meningkat	Produksi Daging	3.598,15 ton
		Produksi Telur	3.587,14 ton
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas kesehatan hewan	3.486 ekor

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau merupakan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya manusia yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan program yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Program Perizinan Usaha Pertanian

Dalam Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2024, disampaikan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2024. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang merupakan program baru pada tahun 2024 di mana anggaran berasal dari dana keistimewaan. Adapun kegiatannya ada satu yaitu Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan disajikan dalam tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					1	URUSAN PEMERINTAHAN		
					1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.089.997.000	DPKH
					1.3.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.089.997.000	DPKH
					1.3.13.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.089.997.000	DPKH
					1.3.13.2.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.089.997.000	DPKH
Ketahanan Pangan	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Produksi peternakan meningkat	Produksi daging	3.598,15 ton	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5.562.863.616,40	DPKH
					3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.661.581.229,40	DPKH
		Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas kesehatan hewan	3.486 ekor	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.649.000	DPKH
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPKH	Nilai AKIP DPKH	A(80,30) Kategori/Nilai	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.585.000	DPKH
					3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	700.000	DPKH
					3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700.000	DPKH
					3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	904.500	DPKH
					3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	904.500	DPKH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.197.500	DPKH
					3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.657.500	DPKH
					3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.871.706.116,40	DPKH
					3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.864.036.116,40	DPKH
					3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	DPKH
					3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.170.000	DPKH
					3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.900.000	DPKH
					3.27.01.2.02.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.900.000	DPKH
					3.27.01.2.02.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	DPKH
					3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	465.099.800	DPKH
					3.27.01.2.02.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.765.000	DPKH
					3.27.01.2.02.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	33.853.800	DPKH
					3.27.01.2.02.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.755.000	DPKH
					3.27.01.2.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.571.000	DPKH
					3.27.01.2.02.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500.000	DPKH
					3.27.01.2.02.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.655.000	DPKH
					3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.800.000	DPKH
					3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.800.000	DPKH
					3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.526.313	DPKH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.013.813	DPKH
					3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.512.500	DPKH
					3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.900.000	DPKH
					3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	DPKH
					3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	DPKH
					3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	DPKH
					3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.400.000	DPKH
					3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	81.599.100	DPKH
					3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.087.000	DPKH
					3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	20.087.000	DPKH
					3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	61.512.100	DPKH
					3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	34.551.500	DPKH
					3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	15.800.000	DPKH
					3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	11.160.600	DPKH
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	DPKH
					3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	0	DPKH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	0	DPKH
					3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	815.088.287	DPKH
					3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	45.394.000	DPKH
					3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	45.394.000	DPKH
					3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	745.919.287	DPKH
					3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	60.525.400	DPKH
					3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	685.393.887	DPKH
					3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	11.075.000	DPKH
					3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan Persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	11.075.000	DPKH
					3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	12.700.000	DPKH
					3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	12.700.000	DPKH
					3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	4.595.000	DPKH
					3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.595.000	DPKH
					3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	4.595.000	DPKH
						TOTAL	6.652.860.616,40	

4.2 Uraian garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Kegiatan instansi merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberika dukungan pada pencapaian visi dan misi daerah. Dengan melaksanakan program dan kegiatan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan secara profesional terhadap tugas dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul dan mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan daftar program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti yang tersebut di atas maka jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 adalah 6 (enam) Program 16 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Dikarenakan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/04391 tanggal 21 Juni 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 maka jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 menjadi 5 (lima) Program 15 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Dari sejumlah program kegiatan dan sub kegiatan sudah mengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026. Berikut kami sajikan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025

PD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1									
1	URUSAN PEMERINTAHAN								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.089.997.000				1.089.997.000	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana		100 persen	1.089.997.000			100 persen	1.089.997.000
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana	Kab. Gunungkidul, Nglangeran Patuk	1 Jenis	1.089.997.000	Dana Keistimewaan		1 Jenis	1.089.997.000
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Kab. Gunungkidul, Nglangeran Patuk	1 dokumen	1.089.997.000	Dana Keistimewaan		1 dokumen	1.089.997.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			5.562.863.616,40					9.455.221.087
3	27 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	4.661.581.229,40				100 persen	7.660.876.452
3	27 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	17 jenis	61.649.000				17 Jenis	40.196.200
3	27 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	4.585.000				100 persen	13.509.650

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
3 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, DPKH	1 dokumen	700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	732.050		
3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul, DPKH	1 dokumen	700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	732.050		
3 27 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, DPKH	2 dokumen	904.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	732.050		
3 27 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, DPKH	2 dokumen	904.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	732.050		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
3	06 2.01 01 27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, DPKH	30 laporan	27.197.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	10.648.000
3	07 2.01 01 27	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Gunungkidul, DPKH	43 laporan	26.657.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	13.110.350
3	02 2.02 01 27	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun	Kab. Gunungkidul, DPKH	3 Jenis	3.871.706.116,40	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	6.665.870.099
3	01 2.02 01 27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, DPKH	840 orang/bulan	3.864.036.116,40	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	6.648.567.099

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, DPKH	1 laporan	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	3.993.000	
3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SK dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuan bulanan/triwulanan/semes SKPD	Kab. Gunungkidul, DPKH	13 laporan	6.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	13.310.000	
3 27 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Kab. Gunungkidul, DPKH	80 Orang	1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 Orang	12.777.600	
3 27 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Gunungkidul, DPKH	5 dokumen	1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	2.129.600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lokasi Output Kegiatan			
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Gunungkidul, DPKH	0 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	10.648.000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	Kab. Gunungkidul, DPKH	10 Layanan	465.099.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Layanan	151.252.178
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Gunungkidul, DPKH	1 paket	1.765.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	8.518.400
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Gunungkidul, DPKH	4 paket	33.853.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	35.801.238

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lokasi Output Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Gunungkidul, DPKH	1 paket	2.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	8.518.400
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Gunungkidul, DPKH	2 paket	10.571.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	29.015.800
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Gunungkidul, DPKH	12 laporan	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	1.331.000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, DPKH	25 laporan	415.655.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	68.067.340

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan				
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Kab. Gunungkidul, DPKH	2 Jenis	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Jenis	48.245.120
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Gunungkidul, DPKH	4 unit	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	48.245.120
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Kab. Gunungkidul, DPKH	3 Layanan	179.526.313	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Layanan	622.745.255
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Gunungkidul, DPKH	37 laporan	109.013.813	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	621.946.655

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lokasi Output Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Gunungkidul, DPKH	25 laporan	70.512.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	798.600
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Kab. Gunungkidul, DPKH	4 Layanan	76.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Layanan	119.790.000
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Gunungkidul, DPKH	10 unit	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	93.170.000
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Gunungkidul, DPKH	7 unit	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	6.655.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, DPKH	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	13.310.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, DPKH	28 unit	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	6.655.000	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas peternakan		7185.3 ton	81.599.100		7185.3 ton	116.855.278	
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang terlaksana	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	2 Jenis	20.087.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Jenis	7.759.730	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lokasi Output Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan
3	0001 2.03 02 27	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	16 laporan	20.087.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	7.759.730
3	0005 2.05 02 27	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak yang terlaksana	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	3 Jenis	61.599.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Jenis	109.095.548
3	0006 2.05 02 27	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	16 laporan	34.551.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	36.365.182
3	0008 2.05 02 27	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	8 laporan	15.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	36.365.183

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lokasi Output Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	3 laporan	11.160.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	36.365.183
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan yang digunakan		100 persen	0		100 persen	1.000.000.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana	Kab. Gunungkidul, UPT Puskesmas	1 Jenis	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Jenis	1.000.000.000
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, dirhabilitasi dan dipelihara	Kab. Gunungkidul, UPT Puskesmas	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	1.000.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah populasi ternak		1561433 ekor	815.088.287		1561433 ekor	620.017.842

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lokasi Output Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan		
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peta penyakit hewan menular strategis	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	45.394.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	80.525.500
3	27	04	2.01	0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	21 laporan	45.394.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	80.525.500
3	27	04	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan hewan yang terfasilitasi	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	13 Unit	745.919.287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK NF	13 Unit	481.285.314
3	27	04	2.03	0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	20 laporan	60.525.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	66.569.007

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK NF		Lokasi Output Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	77 laporan	685.393.887	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK NF	100 persen	414.716.307
3	27	04	2.04	0004	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terlaksana	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	4 Jenis	11.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Jenis	43.907.028
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	11 Unit Usaha	11.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	43.907.028
3	27	04	2.05	0005	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terlaksana	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	3 Jenis	12.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Jenis	14.300.000
3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	5 Unit	12.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	14.300.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Usaha Pertanian/Peternakan sesuai SOP		100 persen	4.595.000		100 persen	57.471.515	
3 27 06	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha peternakan yang terdaftar izin usahanya	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	10 Unit	4.595.000		10 Unit	57.471.515	
3 27 06	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standart dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kab. Gunungkidul, Wilayah Kab. Gunungkidul	3 laporan	4.595.000		100 persen	57.471.515	
TOTAL								6.652.860.616.40	10.543.218.087

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

WIBAWANTI WULANDARI

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Disamping menjabarkan Renstra, dalam menyusun Renja PD juga harus mengacu pada RPJMD dan RKPD Kabupaten dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 – 2026 serta berpedoman pada visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2021 – 2026. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RPJMD dan Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 harus disusun dan dirancang agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan dan target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dinas Pendidikan harus mampu menyusun Renja Tahun 2024 yang lebih baik, komprehensif, dan aplikatif dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya serta memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses musrenbang serta pemulihan pasca COVID-19. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pemangku kepentingan, yang menitikberatkan pada pembahasan sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi penjabaran visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang

dimuat dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 mengacu program prioritas RKPD. Disamping berpedoman pada RKPD, Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024 juga berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 untuk menyusun tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD, arah kebijakan pembangunan Lima Tahun Keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, serta memperhatikan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan adalah :

1. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan;
2. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas; dan
3. sebagai referensi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dalam proses awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
- 2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022;
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2023; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hal ini dapat terlihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun 2022 serta pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan seperti dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan
Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (%)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	97,35	100 Persen	27 Persen	96,61	100 Persen	100 Persen	96,61
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen	84,98	25 Persen	25 Persen	95,55	100 Persen	100 Persen	95,55
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi; - Jumlah Dokumen penyusunan Rancangan awal Renja, Rancangan renja, Rancangan akhir renja, renja penetapan PD; - Jumlah dokumen Renja PD yang terselesaikan; - Jumlah dokumen Renja perubahan PD yang terselesaikan		86,64	1 Dokumen; 0 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	88,9	3 Dokumen	3 Dokumen	88,9
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA yang terselesaikan		12,63	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	- Jumlah dokumen RKA Perubahan yang terselesaikan		0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terselesaikan; - Jumlah dokumen perpanjangan kinerja yang terselesaikan; - Jumlah dokumen ROPK yang terselesaikan		91,15	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	99,9	2 Dokumen	2 Dokumen	99,9
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang terselesaikan; - Jumlah dokumen perjanjian kinerja perubahan yang terselesaikan; - Jumlah dokumen perubahan ROPK yang terselesaikan		60,18	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen LKJP yang terselesaikan		98,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen evaluasi RKPD yang terselesaikan; - Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi renja (evaluasi hasil RKPD); - Jumlah dokumen monev capaian SPM bidang pendidikan yang terselesaikan; - Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; - Jumlah dokumen hasil Monitoring dan evaluasi, terkait Implementasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; Jumlah jasa publikasi bidang pendidikan yang terfasilitasi		85,72	4 Dokumen; 4 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 paket	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 paket	97,05	9 Laporan	9 Laporan	97,05

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu	100 Persen	97,51	25 Persen	25 Persen	96,65	100 Pesen	100 Pesen	96,65
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya; - Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya; - Jumlah bulan terfasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN; - Jumlah PTT UPT TK & SD/Korwil (1 orang x 13 bulan); - Jumlah PTT database SD (21 orang x 13 bulan); - Jumlah PTT database TK (2 orang x 13 bulan); - Jumlah GTT database TK (4 orang x 13 bulan); - Jumlah GTT database SD (6 orang x 13 bulan); - Jumlah Insentif GTT/PTT Kategori II (49 orang x 13 bulan); - Jumlah GTT database sebagai guru pengganti (GTT SD 776 orang + SMP 58 orang x 13 bulan); - Jumlah Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (686 orang x 12 bulan) APBD Kabupaten; - Jumlah THR PTT Korwil Kecamatan; - Jumlah THR PTT SD; - Jumlah THR PTT TK; - Jumlah THR GTT TK; - Jumlah THR GTT SD; - Jumlah THR Insentif GTT/PTT Kategori II; - Jumlah THR data base sebagai GP (guru pengganti) 	2 Orang; 14 Orang; 3 Bulan; 3 OB; 39 OB; 6 OB; 28 OB; 48 OB; 48 OB; 97,51 300 OB; 2940 OB; 5964 OB; 1 Orang; 19 Orang; 2 Orang; 4 Orang; 4 Orang; 25 Orang; 245 Orang	25 Persen	2 Orang; 14 Orang; 3 Bulan; 3 OB; 39 OB; 6 OB; 28 OB; 48 OB; 48 OB; 735 OB; 149 OB; Orang; Orang; Orang; Orang; Orang; Orang; Orang; Orang;	96,65	4743 Orang/Bulan	4743 Orang/Bulan	96,65	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terselesaikan; - Jumlah dokumen personal file kepegawaian ASN Dinas yang terkelola 		100,00	1 Dokumen; 331 Dokumen	Dokumen; Dokumen	100	332 Dokumen	332 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terverifikasi 		0,00	4 Dokumen	3 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang terselesaikan; - Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun dan CALK yang terselesaikan 		0,00	7 Dokumen	6 Dokumen	100	24 Dokumen	24 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang terselesaikan 		100,00	49 Dokumen; 0 Dokumen	Dokumen	100	4 Laporan	4 Laporan	100
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang terselesaikan 		100,00	3 Dokumen	2 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Target Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (%)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang terselesaikan; - Jumlah dokumen laporan Keuangan Bulanan/SPJ yang terselesaikan		100,00	1 Dokumen; 11 Dokumen	Dokumen; Dokumen	100	13 Laporan	13 Laporan	100
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran yang terselesaikan		100,00	12 Dokumen	1 Dokumen	100			100
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu	100 Persen	0,00	25 Persen	25 Persen	92,71	100 Persen	100 Persen	92,71
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun dengan baik		0,00	1 Dokumen	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pinjam pakai Barang Milik Daerah SKPD		0,00	1 Dokumen	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah peserta rakor dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0,00	120 Orang	120 Orang	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah peserta mengikuti workshop Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	1000 Orang	Orang	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang terselesaikan		0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	91,86	1 Laporan	1 Laporan	91,86
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah dokumen BHP yang disusun; - Jumlah dokumen aset yang disusun		0,00	1 Dokumen; 1 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen	100	2 Laporan	2 Laporan	100
X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	91,51	10 Persen	10 Persen	88,54	100 Persen	100 Persen	88,54
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terfasilitasi		0,00	1 unit	unit	100	1 Unit	1 Unit	100
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0,00	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Jumlah sekolah sasaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0,00	20 Sekolah	20 Sekolah	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	- Jumlah kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar dan pejabat fungsional lainnya yang mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji		0,00	100 Orang	100 Orang	76	100 Orang	100 Orang	76

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					4	5	6		7	8=(7/6)
1			3							
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan; - Jumlah Sosialisasi Geopark bagi guru dan pelajar; - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidikan; - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah		0,00	125 Orang	125 Orang	72	125 Orang	10=5+7+9 125 Orang	72
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			91,51	150 orang; 200 Orang; 500 Peserta; 587 Peserta	150 orang; Orang; 500 Peserta; 587 Peserta	99,01	1279 Orang	1279 Orang	99,01
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen raperbub tentang PPDB		0,00	1 Dokumen	Dokumen	95,6	32 Orang	32 Orang	95,6
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum terlayani	101 Persen	72,46	17 Persen	17 Persen	94,39	100 Persen	100 Persen	94,39
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen keistrian yang tersedia		100,00	48 Paket pembelian	20 Paket pembelian	100	48 Paket	48 Paket	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan; - Jumlah perlengkapan komputer yang dibeli ; - Jumlah Laptop yang dibeli ; - Jumlah UPS yang dibeli - Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli		72,66	246 Jenis; 1 paket ; 3 Unit ; 3 Unit	38 Jenis; paket; 3 unit; 3 unit	94,27	172 Paket	172 Paket	94,27
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00	123 Jenis	25 Jenis	99,37	124 Paket	124 Paket	99,37
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah barang habis pakai yang tersedia		0,00	1 Paket	1 Paket	99,76	4 Paket	4 Paket	99,76
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan; Jumlah lembar fotocopy		100,00	59 Buah; 171198 Lembar	0 Buah; 121192 Lembar	99,42	53 Paket	53 Paket	99,42
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (12 Bulan)		83,33	12 Bulan	3 Bulan	85,71	1733 Dokumen	1733 Dokumen	85,71
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu; Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu; Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		39,60	6320 Orang; 10050 Orang; 245 Orang Hari	5073 Orang; 5845 Orang; 41 Orang Hari	86,15	300 Laporan	300 Laporan	86,15
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah pengembangan dan atau update modul sistem pemerintahan berbasis elektronik Dinas Pendidikan yang terfasilitasi; - Jumlah dokumen profil pendidikan		0,00	4 modul; 1 Dokumen	modul; 1 Dokumen	96,88	9 Dokumen	9 Dokumen	96,88
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 Persen	99,78	0 Persen	0 Persen	99	100 Persen	100 Persen	99

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					6	7	8=(7/6)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	- Jumlah dan jenis kursi kerja (kursi putar/eksekutif) dibeli; - Jumlah dan jenis rak yang dibeli; - Jumlah pengadaan meja rapat (RR sasana among karsa, sasana pramudya, handayani) yang dibeli; - Jumlah kursi tunggu 4 set ruang unit layanan terpadu yang dibeli; - Jumlah alat permainan anak ruang unit layanan terpadu yang dibeli; - Jumlah lemari arsip dorong (mobile file) yang dibeli		0,00	7 Unit; 2 Unit; 50 Buah; 3 Buah; 1 Paket; 0 Unit	7 Unit; 2 Unit; Buah; 3 Buah; 1 Paket	98,53	16 Unit	16 Unit	98,53
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah AC yang terbeli; - Jumlah kipas angin yang terbeli; - Jumlah CCTV yang terbeli		0,00	1 Unit; 2 Unit; 3 Unit	0 Unit; 0 Unit; 0 Unit	100	6 Unit	6 Unit	100
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah korden yang terbeli		0,00	100 Meter	0 Meter	100	2 Unit	2 Unit	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	100 Persen	73,57	25 Persen	25 Persen	79,99	100 Persen	100 Persen	79,99
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (20 rekening X 12 Bulan); Jumlah tagihan air yang dibayar (18 rekening X 12 Bulan); - Jumlah sarana jasa telephon/kawat/faxmille yang terbayar (2 rekening x 12 Bulan)		64,60	180 Rekening; 180 Rekening; 24 Rekening	45 Rekening; 45 Rekening; 6 Rekening	74,6	106 Laporan	106 Laporan	74,6
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa lisensi perangkat server (fortigate dll) dan jasa perangkat lunak yang dibayar		99,83	1 Tahun	1 Tahun	96,34	1 Laporan	1 Laporan	96,34
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah sewa tanah Korwil (6 lokasi) Stadion Handayani dan Gedung Kesenian yang terbayarkan (2 lokasi)		93,00	6 Lokasi	6 Lokasi	96,46	40 Laporan	40 Laporan	96,46
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi pemeliharaannya	101 Persen	59,19	17 Persen	17 Persen	94,33	100 Persen	100 Persen	94,33
X.XX.01.2.09.02	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas (roda empat) yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya; Jumlah dan jenis kendaraan dinas (roda dua) yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya; Jumlah motor roda 3 yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya		76,79	5 Unit; 69 Unit; 1 Unit	3 Unit; 25 Unit; Unit	83,85			83,85
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara		0,00	7 Buah	3 Buah	100	17 Unit	17 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang dipelihara; Jumlah Mesin ketik yang dipelihara; Jumlah printer yang dipelihara; Jumlah sound system yang terpelihara; Jumlah peralatan studio musik yang terpelihara; Jumlah kamera yang terpelihara; - Jumlah kunci pintu digital yang terfasilitasi pemeliharannya; - Jumlah gensek yang terfasilitasi pemeliharannya		48,30	25 Unit; 1 Buah; 22 Buah; 6 Unit; 1 Paket; 2 Buah; 5 Buah; 1 Buah	5 Unit; Buah; 3 Buah; 3 Unit; Paket; 2 Buah; 3 Buah; 1 Buah	98,96	52 Unit	52 Unit	98,96
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	\\- Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor (atap, pintu dan jendela, lantai, kamar kecil, pengecatan) korwil kecamatan yang dipelihara; - Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor (atap, pintu dan jendela, lantai, kamar kecil, pengecatan) yang dipelihara; - Jumlah sanitasi air bersih, tampungan air terfokus beserta saringan air bersih yg terpelihara		0,00	18 Unit; 1 Paket; 1 Unit	18 Unit; Paket; Unit	99,45	22 Unit	22 Unit	99,45
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara; Jumlah jaringan internet yang dipelihara; - Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor (AC) yang dipelihara; - Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor (CCTV) yang dipelihara; - Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor (jaringan internet, jaringan telf, dll) yang dipelihara -Jumlah pemeliharaan gedung PAUD		100,00	27 Buah; 1 paket; 27 Buah; 5 Buah; 1 Paket ; 1 Unit	5 Buah; 1 paket; 5 Buah; Buah; 1 Paket; 1 unit	99,97	16 Unit	16 Unit	99,97
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah - Jumlah dokumen Pengukuran IKM; - Jumlah dokumen SOP yang direvisi; - Jumlah dokumen RTP; - Jumlah dokumen SPIP; - Jumlah Forum Konsultasi Publik yang terlaksana; - Jumlah petunjuk/banner/pengumuman yang dicetak; - Jumlah buletin pendidikan yang diterbitkan	82.03 Nilai	100,00	83.34 Nilai	83.34 Nilai	96,65	0 Nilai	0 Nilai	96,65
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			100,00	100 Orang; 15 Buah; 1800 eksemplar	1 Dokumen; 5 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; Orang; 10 Buah	96,65			96,65

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar;; Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama;; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	90.95 Persen ; 93.84 Persen ; 99.61 Persen ; 41.65 Persen ; 56.40 Persen ; 91.73 Persen ; 99.20 Persen	90.54 90.95 Persen; 93.84 Persen; 99.05 Persen; 61.89 Persen; 56.40 Persen; 91.73 Persen; 99.20 Persen	90.95 Persen; 93.84 Persen; 99.61 Persen; 41.65 Persen; 56.40 Persen; 91.73 Persen; 99.20 Persen	86.85 Persen; 92.39 Persen; 99.05 Persen; 61.89 Persen; 155 Persen; 89.87 Persen; 99.30 Persen	89,37; 93,6; 107,07; 21,6; 55,4; 91,28; 102,25 Perse n	89,37; 93,6; 107,07; 21,6; 55,4; 91,28; 102,25 Perse n	89,37; 93,6; 107,07; 21,6; 55,4; 91,28; 102,25 Perse n	90,98
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang terakreditasi A	64,96 Persen	93,82	61,16 Persen	61,16 Persen	93,94	66,03 Persen	66,03 Persen	93,94
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun dari dana DAK		0,00	1 Ruang	0 Ruang	92,89	1 Ruang	1 Ruang	92,89
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun dari dana DAK		99,22	3 Ruang	0 Ruang	89,16	1 Ruang	1 Ruang	89,16
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya dari dana DAK - Jumlah luasan Pagar yang selesai dibangun		98,59	0 Ruang 105 Meter	105 meter	99,32	2 Unit	2 Unit	99,32
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	- Jumlah ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab dari dana DAK; - Jumlah ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab dari dana DAU		87,84	40 Ruang; 12 Ruang	0 Ruang; 12 Ruang	86,46	1 Ruang	1 Ruang	86,46
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	- Jumlah ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang yang direhab dari dana DAK		99,05	1 Ruang	0 Ruang	77,65	1 Ruang	1 Ruang	77,65
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya dari dana DAK Jumlah mebel pembangunan ruang guru yang diadakan; Jumlah mebel pembangunan ruang perpustakaan yang diadakan;		97,51	3 Ruang	0 Ruang	97,78	1 Unit	1 Unit	97,78
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel pembangunan ruang laboratorium komputer yang diadakan; Jumlah mebel rehab ruang kelas yang diadakan; Jumlah mebel rehab ruang perpustakaan yang diadakan		96,93	1 Paket; 3 paket; 2 paket; 16 paket; 1 paket	1 Paket; 3 paket; 2 paket; 4 paket; 1 paket	80,74	1 Paket	1 Paket	80,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa miskin yang mendapatkan perlengkapan dasar, jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan Alat tulis (Buku tulis, Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan) siswa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SD (SD Negeri); Jumlah siswa miskin yang mendapatkan perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan Alat tulis (Buku tulis, Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan) siswa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SD (SD Swasta); Jumlah siswa miskin retrieval jenjang SD yang mendapatkan perlengkapan sekolah berupa Sepatu, Tas, Seragam, Dasi, Ikat pinggang Sekolah; Jumlah siswa miskin retrieval jenjang SD yang mendapat beasiswa kurang mampu di Kec. Wonosari, Ponjong dan Karangmojo dari RESES		0,00	500 Siswa; 200 Siswa; 100 Siswa; 105 siswa	0 Siswa; 0 Siswa; 100 Siswa; 0 Siswa	95,7	44.794 Unit	44.794 Unit	95,7
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang memperoleh beasiswa bakat prestasi; Jumlah siswa retrieval ATS penerima Beasiswa miskin (Gunungkidulcerdas) yang tersedia dalam rangka peningkatan IPM		100,00	205 Siswa; 600 Siswa	0 Siswa; 0 Siswa	100	805 Peserta Didik	805 Peserta Didik	100
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dari dana DAK; - Jumlah pengadaan media pendidikan dari dana DAK		95,73	176 Paket; 5 Paket	0 Paket; 0 Paket	99,08	11 Paket	11 Paket	99,08
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah peserta try out uji kompetensi SD menggunakan aplikasi CBT"; Jumlah sekolah peserta uji kompetensi sekolah SD menggunakan aplikasi CBT"; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal try out uji kompetensi dan Uji kompetensi Sekolah; Jumlah buku induk yang tercetak"; Jumlah kalender pendidikan yang tercetak"; Jumlah cetak Pedoman PPDB; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal pengendali mutu SD; Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM); Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Jumlah modul Aplikasi ASPD yang terselesaikan		89,61	465 Sekolah; 465 Sekolah; 24 Orang; 490 Buku; 550 Eksemplar; 550 Sekolah; 150 Orang; 465 Orang; 0 Orang; 1 Modul	0 Sekolah; 0 Sekolah; 0 Orang; 25 Buku; 1 Eksemplar; 0 Sekolah; 0 Orang; 0 Orang; 1 modul	99,76	468 Satuan Pendidikan	468 Satuan Pendidikan	99,76
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang mengikuti workshop akreditasi SD		0,00	298 Sekolah	148 Sekolah	100	150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba pengembangan, minat, bakat istimewa Tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional; Jumlah siswa yang mengikuti KSN Tingkat Kabupaten; Jumlah Pembina KSN SD yang mengikuti pembinaan		200 Siswa; 180 Siswa; 360 Siswa; 100 Orang 70,56	Siswa; Siswa; Siswa; Orang	1120 Peserta Didik	100	1120 Peserta Didik	1120 Peserta Didik	100
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru dan pengawas jenjang SD yang terfasilitasi sertifikasinya; Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG jenjang SD"; Jumlah peserta yang mengikuti dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec"; Jumlah peserta yang mengikuti rakor kinerja guru dan kepala sekolah"; Jumlah peserta yang mengikuti dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru PKB melalui PKP"; Jumlah peserta yang mengikuti dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru PKB melalui PKP; Jumlah peserta mengikuti diklat PTK guru SD		82,88 3500 Orang; 8 Guru; 50 Orang; 50 Orang; 60 Guru; 100 Guru; 60 guru	Orang; 8 Guru; Guru; 50 Orang; 60 Guru; 100 Guru; 60 guru	12653 Orang	76,54	12653 Orang	12653 Orang	76,54
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Evaluasi Diri Sekolah menuju 8 SNP menggunakan aplikasi EDS; Jumlah peserta yang mengikuti diklat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); Jumlah sekolah yang mengikuti diklat sekolah penggerak; jumlah sekolah yang mengikuti penjurangan untuk menuju sekolah penggerak		94,10 478 Sekolah; 300 Orang; 15 Sekolah; 478 Sekolah	13 Sekolah; 300 Orang; Sekolah; 478 sekolah	468 Satuan Pendidikan	99,86	468 Satuan Pendidikan	468 Satuan Pendidikan	99,86
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah / BOS PUSAT (BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Jenjang SD		0,00	Sekolah	468 Satuan Pendidikan	92,92	468 Satuan Pendidikan	468 Satuan Pendidikan	92,92
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah peserta workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam penyusunan Kertas Kerja dan RKAS; Jumlah peserta workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam penyusunan Penatausahaan; Jumlah peserta workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam penyusunan perubahan kertas kerja dan RKAS; Jumlah peserta workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam penyusunan Penatausahaan perubahan; Jumlah peserta workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam penyusunan Kertas Kerja dan RKAS tahun N+1		0,00 465 Orang; 465 Orang; 465 Orang; 465 Orang; 465 Orang	Orang; Orang; 465 Orang; 465 Orang; 465 Orang	25 Orang	90,81	25 Orang	25 Orang	90,81
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium komputer beserta yang - dibangun dari dana DAK		0,00	2 ruang	2 ruang	88,33			88,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang terakreditasi A	88,5 Persen	84,70	65,45 Persen	65,45 Persen	85,7	90,27 Persen	90,27 Persen	85,7
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang selesai dibangun dari DAU		0,00	5 Ruang	5 Ruang	88,57	1 Unit	1 Unit	88,57
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang selesai dibangun		0,00	1 Ruang	1 Ruang	79,27	1 Ruang	1 Ruang	79,27
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	-Jumlah ruang Lab. Komputer sekolah negeri dan swasta yang dibangun		0,00	5 Ruang	5 Ruang	86,83	4 Ruang	4 Ruang	86,83
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya sekolah negeri swasta yang dibangun		0,00	1 Ruang	1 Ruang	87,53	1 Unit	1 Unit	87,53
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah swasta yang selesai direhab dari dana DAK; Jumlah Ruang kelas sekolah negeri yang direhab dari dana DAK		84,75	6 Ruang; 114 Ruang	6 Ruang; 114 Ruang	86,34	2 Ruang	2 Ruang	86,34
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi ruang guru sekolah negeri dari dana DAK; Jumlah Rehabilitasi ruang kepala sekolah sekolah negeri dari dana DAK; Jumlah Rehabilitasi ruang TU sekolah negeri dari dana DAK; Jumlah Rehabilitasi ruang TU sekolah swasta dari dana DAK		82,48	10 Ruang; 0 Ruang; 0 Ruang	10 Ruang	83,98	6 Ruang	6 Ruang	83,98
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan sekolah Negeri yang selesai direhab dari dana DAK; Jumlah ruang Unit Kesehatan sekolah Swasta yang selesai direhab dari dana DAK		0,00	9 ruang; 2 ruang	9 ruang; 2 ruang	84,88	1 Ruang	1 Ruang	84,88
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah swasta yang direhab dari dana DAK; Jumlah perpustakaan sekolah negeri yang direhab dari dana DAK		84,36	2 Ruang; 14 Ruang	2 Ruang; 14 Ruang	84,41	2 Ruang	2 Ruang	84,41
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium ilmu pengetahuan Alam (IPA) sekolah swasta yang direhab dari dana DAK; Jumlah ruang laboratorium komputer sekolah negeri yang direhab dari dana DAK; Jumlah ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah negeri yang direhab dari dana DAK; Jumlah ruang laboratorium komputer sekolah swasta yang direhab dari dana DAK		8,35	1 Ruang; 12 Ruang; 12 Ruang; 1 Ruang	1 Ruang; 12 Ruang; 12 Ruang; 1 Ruang	86,3	3 Ruang	3 Ruang	86,3
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban Siswa/Guru sekolah negeri yang selesai direhab dari dana DAK; Jumlah Jamban Siswa/Guru sekolah Swasta yang selesai direhab dari dana DAK; Jumlah ruang ibadah sekolah yang selesai direhab dari dana DAK		84,00	42 Ruang; 8 ruang; 1 ruang	42 Ruang; 8 ruang; 1 ruang	86,6	21 Unit	21 Unit	86,6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Target Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel ruang kelas SMP Swasta yang diadakan dari dana DAK; Jumlah mebel ruang laboratorium ilmu Pengetahuan alam (IPA) SMP Swasta yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah Mebel ruang laboratorium komputer SMP Swasta yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah mebel ruang perpustakaan SMP swasta yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah mebel ruang UKS SMP Swasta yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah ruang Tata Usaha SMP Swasta yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah Mebel ruang guru SMP Negeri yang diadakan dari dana DAK; Jumlah mebel ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) SMP Negeri yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah mebel ruang laboratorium komputer SMP Negeri yang diadakan dari dana DAK; Jumlah mebel ruang perpustakaan SMP negeri yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah mebel ruang Tata Usaha SMP negeri yang diadakan dari dana DAK; Jumlah mebel ruang UKS SMP Negeri yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah mebel ruang kelas SMP Negeri yang diad		70,54	3 paket; 1 paket; 1 paket; 2 paket; 2 paket; 1 paket; 10 paket; 12 paket; 17 paket; 14 paket; 15 paket; 10 paket; 22 paket	1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 12 paket; 17 paket; 14 paket; 15 paket; 15 paket; 1 paket; 22 paket	76,73	22 Paket	22 Paket	76,73

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Target Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan Alat tulis (Buku tulis, Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan, Tipe X, Cat Air) siswa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP (SMP Negeri); Jumlah siswa miskin retrieval jenjang SMP yang mendapatkan perlengkapan sekolah berupa Sepatu, Tas, Seragam, Dasi, Ikat pinggang Sekolah; Jumlah siswa miskin retrieval jenjang SMP yang mendapatkan perlengkapan sekolah berupa Sepatu, Tas, Seragam, Dasi, Ikat pinggang Sekolah dari PIS; Jumlah siswa miskin retrieval jenjang SMP yang mendapatkan perlengkapan sekolah berupa Sepatu, Tas, Seragam, Dasi, Ikat pinggang Sekolah SMP yang mendapatkan perlengkapan sekolah berupa Sepatu, Tas, Seragam, Dasi, Ikat pinggang Sekolah dari RESES; Jumlah siswa miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan Alat tulis (Buku tulis, Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan, Tipe X, Cat Air) siswa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		0,00	8840 Siswa; 461 Siswa; 50 Paket; 31 Paket; 1709 Siswa	8840 Siswa; 461 Siswa; 50 Paket; 31 Paket; 1709 Siswa	95,29	19585 Paket	19585 Paket	95,29
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa penerima Beasiswa bakat dan prestasi SMP (@ Rp. 500.000); Jumlah penerima Beasiswa miskin (Gunungkidulcerdas) siswa Retrieval Anak Tidak Sekolah kembali sekolah SMP miskin yang tersedia dalam rangka peningkatan IPM		100,00	250 Siswa; 461 Siswa	Siswa; Siswa	100	761 Peserta Didik	761 Peserta Didik	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah komputer client sekolah menengah pertama Negeri yang diadakan dari dana DAU untuk mendukung pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM); -Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika sekolah swasta dari dana DAK; Jumlah komputer server sekolah menengah pertama Negeri yang diadakan dari dana DAU untuk mendukung pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak dan AKM); Jumlah Peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika sekolah Negeri dari dana DAK; Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi sekolah swasta yang diadakan dari dana DAK; Jumlah pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sekolah negeri dari dana DAK; Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi sekolah negeri yang diadakan dari dana DAK; Jumlah komputer client sekolah menengah pertama Swasta yang diadakan dari dana DAU untuk mendukung pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM); Jumlah komputer		95,58 45 Unit; 2 Paket; 3 Unit; 16 Paket; 2 Paket; 1 Paket; 14 Paket; 45 unit; 3 unit		7	8=(7/6) 97,09	9	10=(5+7+9) 141 Paket	11=(10/4) 97,09
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri; Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Swasta; Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan kurikulum"; Jumlah peserta yang mengikuti Penilaian harian, tengah semester, akhir semester sekolah menengah pertama; Jumlah cetak kalender pendidikan; Jumlah cetak pedoman PPDB; Jumlah cetak sampul raport sekolah negeri; Jumlah cetak buku induk; Jumlah peserta yang mengikuti Workshop CBT; Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Pendampingan Strategi Pemenuhan SNP; Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM); Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		97,96 2931 siswa; 1274 siswa; 75 Orang; 24000 siswa; 200 Exemplar; 200 Exemplar; 6600 Exemplar; 350 Exemplar; 226 Orang; 113 Orang; 112 Orang; 90 Orang			93,75	24482 Peserta Didik	24482 Peserta Didik	93,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (%)
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi akreditasi; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tindak lanjut akreditasi		0,00	113 Sekolah; 113 Sekolah	Sekolah; 113 Sekolah	100	111 Satuan Pendidikan	111 Satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-Jumlah peserta yang mengikuti Gala Siswa; -Jumlah peserta GSI tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional; -Jumlah peserta lomba video edukasi guru dan siswa tingkat kabupaten, propinsi dan nasional; - Jumlah siswa peserta kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten, propinsi, kabupaten dan nasional; - Jumlah peserta yang mengikuti lomba FLSN tingkat kabupaten, propinsi dan nasional; - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kuis KIHAJAR tingkat kabupaten, propinsi dan nasional; - Jumlah peserta yang mengikuti workshop gender; - Jumlah peserta yang mengikuti diklat OSIS; - Jumlah peserta yang mengikuti Gladi kawruh; - Jumlah peserta yang mengikuti Jambore Pendidikan Karakter; - Jumlah peserta yang mengikuti OPSI		67,70	100 Siswa; 15 klub; 400 Orang; 470 Siswa; 160 Siswa; 350 Siswa; 50 Orang; 240 Siswa; 30 Siswa; 30 Siswa; 100 Siswa	100 Siswa; 15 klub; 400 Orang; 470 Siswa; 160 Siswa; 350 Siswa; 50 Orang; 240 Siswa; 30 Siswa; 30 Siswa; 100 Siswa	79,7	4857 Peserta Didik	4857 Peserta Didik	79,7
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Jumlah Guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasinya; - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg; - Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK dengan menggunakan aplikasi simpeg; "- Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG jenjang SMP"; "- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan kinerja guru/Kepala Sekolah "- "- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kinerja kepala sekolah"; "- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Pelatihan Lesson Study; "- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah bagi Guru SMP;		95,05	2560 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 0 Guru; 61 Guru; 45 Orang; 60 Guru; 61 Guru; 5 Guru	Orang; 6 Guru; Guru; Orang; Guru; 61 Guru; Guru	65,79	15377 Orang	15377 Orang	65,79

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					6	7	8=(7/6)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Evaluasi Diri Sekolah dalam rangka pemenuhan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan"; ; Jumlah peserta yang mengikuti review Evaluasi Diri Sekolah dalam rangka pemenuhan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan".		83,85	60 Sekolah; 60 Sekolah	60 Sekolah; 60 Sekolah	100	336 Satuan Pendidikan	336 Satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS PUSAT) jenjang SMP		0,00	112 Sekolah	Sekolah	84,97	111 Satuan Pendidikan	111 Satuan Pendidikan	84,97
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dalam penyusunan kertas kerja, RKAS, Kertas kerja perubahan, penatausahaan dan penatausahaan perubahan serta penyusunan kertas kerja tahun N+1		0,00	113 Orang	Orang	99,73	1674 Orang	1674 Orang	99,73
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU			0,00	16 ruang	16 ruang	85,41			85,41
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah			0,00	12 ruang	12 ruang	85,08			85,08
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang terakreditasi	59,78 Persen	92,93	83.18 Persen	83.18 Persen	99,62	61.88 Persen	61.88 Persen	99,62
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah area bermain beserta APE luar ruang lembaga PAUD yang selesai dibangun untuk 1. Mrico TK PKK PUTRA PERTIWI, Ngestrejo Tangjursari. 2. Jl. Yogyakarta- Wonosari Km.23, Putat, Patuk, Gunungkidul. 3. gading, playen, gunungkidul. 4. Getas, Playen, Gunungkidul dari PIS; Jumlah area bermain beserta APE luar ruang Lembaga PAUD yang selesai dibangun dari dana DAK; Jumlah area bermain beserta APE luar ruang lembaga PAUD yang selesai dibangun untuk SPS Amanah Insan Mandiri, BLIMBING, KARANGREJEK		99,32	4 Ruang; 2 Paket; 1 Unit	Ruang; Paket; Unit	98,31	5 Unit	5 Unit	98,31
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah rehabilitasi ruang kelas PAUD dari PIS; Jumlah rehabilitasi ruang kelas PAUD dari RESES		98,88	4 Ruang; 4 Ruang	4 Ruang; 4 Ruang	98,4	3 Unit	3 Unit	98,4
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gebyar paud kecamatan, kabupaten dan propinsi; Jumlah peserta yang mengikuti gebyar paud kabupaten; Jumlah peserta kegiatan porseni siswa TK tingkat kabupaten, propinsi dan nasional Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PPDB		100,00	0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 586 orang	0 Orang; 0 Orang; 586 orang	68,73	14376 Peserta Didik	14376 Peserta Didik	68,73

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Target Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pengadaan APE Lembaga paud yang terbeli dari PIS; Jumlah pengadaan alat permainan Edukatif (APE) PAUD yang terbeli dari RESES; Jumlah pengadaan LCD Proyektor untuk mendukung KBM K-13 dan untuk mendukung Sekolah penggerak; Jumlah pengadaan Laptop untuk mendukung KBM K-13 dan untuk mendukung Sekolah penggerak; Jumlah pengadaan alat permainan Edukatif (APE) PAUD yang terbeli dari DAK Jumlah Pengadaan APE luar Lembaga PAUD yang terbeli dari dana PIS		99,18	46 Paket; 3 Paket; 7 Unit; 7 Unit; 7 Paket; 5 paket	46 Paket; 3 Paket; 7 Unit; 7 Unit; 7 Paket; 5 paket	97,6	1334 Paket	1334 Paket	97,6
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah pendidik PAUD Eks Bank Dunia yang mendapatkan stimulan dari Kabupaten; Jumlah THR Stimulan Pendidik PAUD Eks Bank Dunia; Jumlah Kalender Pendidikan yang dicetak umlah buku induk taman kanak-kanak yang dicetak Jumlah Guru dan pengawas jenjang TK yang terfasilitasi sertifikasinya; Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg; Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK menggunakan aplikasi simpeg; Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop seni musik; Jumlah peserta yang mengikuti diklat mahir jenjang PAUD; Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru jenjang PAUD; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penilaian kinerja Guru/Kepala Sekolah		99,88	656 Orang; 656 Orang; 1252 Lembaga; 1156 buku	656 Orang; 656 Orang; 1252 Lembaga; 1156 buku	99,98	1331 Peserta Didik	1331 Peserta Didik	99,98
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru dan pengawas jenjang TK yang terfasilitasi sertifikasinya; Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg; Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK menggunakan aplikasi simpeg; Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop seni musik; Jumlah peserta yang mengikuti diklat mahir jenjang PAUD; Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru jenjang PAUD; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penilaian kinerja Guru/Kepala Sekolah		77,37	705 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 140 Pendidik; 140 Pendidik; 5 Pendidik; 30 sekolah	705 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 140 Pendidik; 140 Pendidik; 5 Pendidik; 30 sekolah	100	4210 Orang	4210 Orang	100
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah satuan pendidikan penerima BOP/DAK Non Fisik PAUD		93,55	1199 Satuan Pendidikan	1199 Satuan Pendidikan	99,88	1198 Satuan Pendidikan	1198 Satuan Pendidikan	99,88
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelolaan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD; Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan RAPBS dana BOP/DAK Non Fisik PAUD; Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan laporan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD		0,00	1206 Orang; 1205 Orang; 1206 Orang	1206 Orang; 1205 Orang; 1206 Orang	100	2532 Orang	2532 Orang	100
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	21.82 Persen	96,66	85,71 Persen	85,71 Persen	93,42	28,61 Persen	28,61 Persen	93,42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Target Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Ruang Praktik Sanggar Kegiatan Belajar yang selesai dibangun dari dana DAK		0,00	0 Ruang	0 ruang		1 Unit	1 Unit	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			0,00	1 ruang	1 ruang	78,22	4 Unit	4 Unit	78,22
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah mebelair ruang praktik Sanggar Kegiatan Belajar yang terfasilitasi dari dana DAK		0,00	1 Paket	1 Paket	99,23	37 Paket	37 Paket	99,23
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta/Warga masyarakat yang mengikuti kursus -kursus di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)		100,00	80 Warga Belajar	100 Warga Belajar	100	80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	100
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dan jenis alat praktik dan peraga siswa SKB dalam rangka mendukung MERDEKA BELAJAR (Sekolah Pengerak, AKM); Jumlah pengadaan peralatan praktik peserta kursus dan pelatihan (LKP); Jumlah pengadaan peralatan keterampilan SKB yang tersedia dari dana DAK		0,00	1 paket; 7 Paket; 0 Paket	1 paket; 4 Paket	95,48	395 Paket	395 Paket	95,48

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	-Jumlah warga belajar (non bop paket C) yang mengikuti paket C; -Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH); - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus Boga; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus coding; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus Bahasa Inggris; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus Bim Bel; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus Menulis Kreatif; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus tata Kecantikan; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus Video Editing; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus SENI BUDAYA JAWA; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus SENI VOKAL; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus BARISTA; -Jumlah peserta yang mengikuti kursus INSTRUMEN MUSIK; -Jumlah peserta yang mengikuti UK PAUD; -Jumlah peserta yang mengikuti UK TATA BOGA; -Jumlah peserta yang mengikuti UK KURSUS KOMPUTER; -JUMLAH program s/b yang tersosialisasikan; -Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket A Setara SD; -Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket B setara SMP; -Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket C setara SM		95,61	80 warga belajar; 0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 0 Orang; 10 ORang; 0 ORang; 18 program; ; 380 Warga Belajar; 2342 Warga Belajar;	80 warga belajar; 0 Orang; 0 Orang; 18 program; 80 Warga Belajar; 380 Warga Belajar; 2342 Warga Belajar	91,78	2598 Peserta Didik	2598 Peserta Didik	91,78
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta akreditasi pendidikan nonformal/kesetaraan yang selesai dilaksanakan; Jumlah peserta akreditasi pendidikan nonformal/kesetaraan yang selesai dilaksanakan		0,00	1 Program; 15 Lembaga	1 Program; 15 Lembaga	25	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	25
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta workshop Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terbina		0,00	1317 Orang	568 Orang	77,9	29 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan	77,9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Target Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					6	7	8=(7/6)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket A; Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket B; Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket C		97,07	108 Warga Belajar; 390 Warga Belajar; 2036 Warga Belajar	Warga Belajar; Warga Belajar; Warga Belajar	100	29 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta workshop Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		0,00	25 Lembaga	Lembaga	99,52	29 Orang	29 Orang	99,52
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100 Persen	0,00	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100 Persen	0,00	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan SD yang terfasilitasi; Jumlah peserta workshop mulok batik; Jumlah dokumen KD muatan lokal pendidikan dasar yang tersusun		0,00	120 ORANG; 120 ORANG; 1 Dokumen	ORANG; ORANG; Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan SD yang terfasilitasi; Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan SMP yang terfasilitasi; Jumlah dokumen Silabus muatan lokal pendidikan dasar yang tersusun		0,00	120 ORANG; 111 Orang; 0 Dokumen	ORANG; 111 Orang	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	100 Persen	0,00	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun		0,00	1 Dokumen	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	49,22 Persen	56,00	49,22 Persen	23.55 Persen	81,12	100 Persen	100 Persen	81,12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;; Persentase Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;; Persentase Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;; Persentase Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;; Persentase Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;; Persentase Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;;	73.07 Persen 27.37 Persen 61.37 Persen 85.47 Persen 71.79 Persen 80.53 Persen	56,00	69.22 Persen; 6.49 Persen; 57.09 Persen; 91.05 Persen; 66.31 Persen; 87.62 Persen	69.22 Persen; 6.49 Persen; 57.09 Persen; 91.05 Persen; 66.31 Persen; 87.62 Persen	81,12 81,12	75,03; 37,54; 63,93; 86,54; 75,7; 84,96 Persen	75,03; 37,54; 63,93; 86,54; 75,7; 84,96 Persen	81,12
1.01.04.2.01.02	Penataan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional dengan aplikasi Simpeg;; Jumlah Pelaksanaan Penyebaran Tim Penilaian Angka Kredit dengan Aplikasi Simpeg	1 kali; 1 kali	56,00	1 kali; 1 kali	1 kali; 1 kali	81,12 81,12	4 Laporan	4 Laporan	81,12
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan	100 Persen	0,00	100 Persen	25 Persen	80,13	100 Persen	100 Persen	80,13
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat terlayani	100 Persen	0,00	100 Persen	100 Persen	74	100 Persen	100 Persen	74
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi; Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi		0,00	30 Orang; 0 Orang	10 Orang	66	1 Dokumen	1 Dokumen	66
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi; Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30 Orang; 10 Sekolah; 0 Orang; 0 Sekolah	0,00	0 Orang; 0 Sekolah	0 Orang; 0 Sekolah	82	10 Dokumen	10 Dokumen	82

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Outcome/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani	100 Persen	0,00	100 Persen	100 Persen	83,2	100 Persen	100 Persen	83,2
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi		0,00	20 Orang	Orang	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi; Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		0,00	80 Orang; 40 Sekolah	80 Orang; 40 Sekolah	76	10 Dokumen	10 Dokumen	76
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Jumlah peserta workshop Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi		0,00	1255 Orang	1255 Orang	78,4	1 Dokumen	1 Dokumen	78,4
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya; Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya; Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya	12,59 Persen ; 13,12 Persen ; 100 Persen	99,75	12,59 Persen; 13,12 Persen; 100 Persen	12,59 Persen; 13,12 Persen; 100 Persen	99,92	0: 7,74; 100 Persen	0: 7,74; 100 Persen	99,92
2.22.08.2.10	Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase Pendidikan Berbasis Budaya yang terpenuhi	41,9 persen	99,75	51,50 persen	51,50 persen	99,92	45,1	45,1	99,92
2.22.08.2.10.01	Pembinaan Muatan Lokal	Siswa SD yang dilatih membuat; Guru SD yang dilatih membuat; Guru SMP yang terbantu dalam mengimplementasikan muatan lokal membuat; Siswa SMP yang dilatih membuat; Pendidik PAUD Formal dan Non Formal yang dilatih Gamelan dalam pengasuhan peserta didik berbasis budaya; Tersedianya kostum tari		99,75	1800 Siswa; 60 Orang; 30 Guru; 30 Siswa; 150 Pendidik PAUD; 1 Sekolah	Siswa; Orang; 30 Guru; 30 Siswa; 150 Pendidik PAUD; 1 Sekolah	99,92	3 Laporan	3 Laporan	99,92
Jumlah								95,16	95,16	95,16

Berdasarkan APBD tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul TA 2022, dan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 28 Oktober 2022, Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi belanja langsung sebesar Rp 744.477.014.149,- untuk melaksanakan 118 sub kegiatan, dan 19 kegiatan dari 6 program yang ada.

Sampai dengan bulan Desember 2022, tingkat penyerapan keuangan adalah sebesar 95.16 % atau Rp 708.444.643.966,00 dari jumlah anggaran seluruhnya dengan capaian fisik rata-rata sebesar 99.98 %. Tingkat penyerapan keuangan sampai dengan triwulan keempat tidak mencapai 100%, namun capaian pekerjaan fisik dilapangan sudah mencapai 100%, dimana sisa dana merupakan Sisa kontrak yang disetor kembali ke kasda.

Tingkat penyerapan keuangan atas pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 ini telah berjalan dengan baik.

Dari tabel evaluasi pelaksanaan Renja PD seperti dalam tabel 2.1 di atas dapat kita lihat bahwa belum semua program yang telah direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 terealisasi. Dari tabel dapat kita lihat bahwa rata-rata capaian program/kegiatan sebesar 95.16% karena ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan fisiknya sudah 100% namun penyerapan anggaran tidak 100% karena sisa kontrak, sehingga disetor ke kasda.

Capaian pada program/kegiatan tahun 2022 sampai dengan triwulan keempat (sampai dengan bulan Desember) yang kurang dari 100% sebanyak 80 sub kegiatan 17 Kegiatan 5 program. Capaian pada program/kegiatan tahun 2022 sampai dengan triwulan keempat (sampai dengan bulan Desember) mencapai 100% sebanyak 38 sub kegiatan 2 Kegiatan 1 program

Realisasi capaian program/kegiatan tahun 2022 sampai dengan triwulan keempat, yang dapat dilihat pada table 2.1. menunjukkan angka 0% sampai dengan 100%. Angka 0% menunjukkan bahwa kegiatan yang tercantum dalam Renja tahun 2022 belum dapat dilaksanakan sampai dengan triwulan keempat. Sedangkan angka 100% menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang belum memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 56.125.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2022 realisasi anggaran sebesar Rp. 49.892.500,- atau 88.90%.
 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

- Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 10.460.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 10.450.000,- atau 99.90%.
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 148.057.500,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 143.682.500,- atau 97.05%.
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 547.506.373.126,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 529.156.188.742,- atau 96.65%.
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 706.375.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 648.860.000,- atau 91.86%.
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
1. Pemindahan Tugas ASN.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 11.400.000,- atau 76.00%.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 73.320.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 52.790.000,- atau 72.00%.
 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 102.400.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 101.390.000,- atau 99.01%.
 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 14.340.000,- atau 95.60%.
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 513.120.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 483.719.000,- atau 94.27%.
 2. Penyediaan peralatan Rumah Tangga.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 207.498.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 206.180.500,- atau 99.37%.
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 4.988.100,- atau 99.76%.

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 81.900.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 81.427.000,- atau 99.42%.
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.780.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 3.240.000,- atau 81.71%.
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 336.102.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 289.536.976,- atau 86.15%.
 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 436.755.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 423.125.000,- atau 96.88%.
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1. Pengadaan mebel.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 69.392.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 68.369.500,- atau 98.63%.
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 641.610.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 478.642.204,- atau 74.60%.
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 206.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 198.468.000,- atau 96.34%
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.650.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 5.450.000,- atau 96.46%
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 205.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 172.312.200,- atau 83.85%.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 67.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 66.300.000,- atau 98.96%.

3. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 274.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 272.988.000,- atau 99.45%.
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 60.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 60.483.000,- atau 99.97%.
- I. Penataan Organisasi
1. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 32.875.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 31.775.000,- atau 96.65%
2. Program Pengelolaan Pendidikan.
- A. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
1. Pembangunan Ruang Guru /Kepala Sekolah/TU.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 196.109.800,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 182.157.200,- atau 92.82%.
 2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 551.595.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 491.820.500,- atau 89.19%.
 3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 219.443.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 217.957.150,- atau 99.32%.
 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 7.676.018.600,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 6.636.410.700,- atau 86.46%.
 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 111.720.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 86.748.600,- atau 77.65%.
 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 29.448.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 28.792.900,- atau 97.78%.
 7. Pengadaan Mebel Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 530.519.400,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 428.315.700,- atau 80.74%.

8. Pengadaan Perlengkapan Siswa.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 278.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 266.538.400,- atau 95.70%.
 9. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 22.225.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 22.021.167.300,- atau 99.08%.
 10. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 664.040.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 662.466.500,- atau 99.76%.
 11. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 141.101.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 107.996.000,- atau 76.54%.
 12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 233.391.900,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 233.061.900,- atau 99.86%.
 13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 49.963.801.506,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 46.426.207.073,- atau 92.99%.
 14. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 130.770.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 118.750.000,- atau 90.81%.
 15. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 426.890.200,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 377.058.600,- atau 88.33%.
- B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.506.241.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 1.334.074.800,- atau 88.57%.
 2. Pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 144.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 114.144.100,- atau 79.27%.
 3. Pembangunan Laboratorium.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.160.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember

- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.875.545.300,- atau 86.83%.
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 157.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 137.852.600,- atau 87.53%.
 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 17.481.779.150,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 15.093.481.000,- atau 86.34%.
 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.623.845.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 2.203.593.100,- atau 83.98%.
 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 749.004.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 635.763.800,- atau 84.88%.
 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.268.440.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 2.758.866.400,- atau 84.41%.
 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.318.839.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 4.590.028.200,- atau 86.30%.
 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3,691.402.450,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 3.196.758.450,- atau 86.60%.
 11. Pengadaan Mebel Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.631.303.400,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 2.019.013.100,- atau 76.73%.
 12. Pengadaan Perlengkapan Siswa.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 438.340.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 417.696.222,- atau 95.29%.
 13. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.936.542.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 1.880.115.900,- atau 97.09%.

14. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 700.014.800,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 656.245.888,- atau 93.75%.
 15. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 184.870.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 147.335.000,- atau 79.70%.
 16. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 137.360.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 90.370.000,- atau 65.79%.
 17. Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 34.131.893.777,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 29.003.100.951,- atau 84.97%.
 18. Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 128.150.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 127.800.000,- atau 99.73%.
 19. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.952.918.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 3.376.115.600,- atau 81.41%.
 20. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.157.016.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 984.348.500,- atau 85.08%.
- C. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 647.129.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 636.195.050,- atau 98.31%.
 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 655.200.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 644.744.950,- atau 98.40%.
 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 43.860.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 30.145.500,- atau 68.73%.

4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 977.683.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 954.262.920,- atau 97.60%.
 5. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 900.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 899.800.000,- atau 99.98%.
 6. Pengelolaan Dana BOP PAUD.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 17.614.080.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 17.593.605.000,- atau 99.88%.
- D. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 0,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%.
 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 599.961.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 469.298.900,- atau 78.22%.
 3. Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 49.617.000,- atau 99.23%.
 4. Penggandaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 734.656.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 701.463.750,- atau 95.48%.
 5. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 815.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 748.046.000,- atau 91.78%.
 6. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000,- atau 25.00%.
 7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 11.685.000,- atau 77.90%.
 8. Peningkatan Kapasitas Pengolahan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 83.650.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 83.248.400,- atau 99.52%.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - A. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
 1. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 88.564.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 71.839.000,- atau 81.12%
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
 - A. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
 1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 1.650.000,- atau 66.00%.
 2. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 2.050.000,- atau 82.00%.
 - B. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
 1. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 1.900.000,- atau 76.00%.
 2. Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 3.920.000,- atau 78.40%.
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
 - A. Pendidikan Berbasis Budaya
 1. Pembinaan Muatan Lokal.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 497.778.640,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 497.373.940,- atau 99.92%.

Sedangkan realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan sampai dengan Triwulan ke empat antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.525.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 6.525.000,- atau 100%.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.750.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 2.750.000,- atau 100%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 8.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 8.500.000,- atau 100%.

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.400.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 6.400.000,- atau 100%.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.050.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 4.050.000,- atau 100%.

2. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 35.080.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 35.080.000,- atau 100%.

4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 182.700.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 182.700.000,- atau 100%.

6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100%.

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- atau 100%.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.

3. Koordinasi dan Penilaian Barang milik Daerah SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 35.585.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 35.585.000,- atau 100%.

4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 19.440.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 19.440.000,- atau 100%.

6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.

2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 9.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 9.500.000,- atau 100%.

3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 53.240.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 53.240.000,- atau 100%.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%.

2. Penggandaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 18.200.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 18.200.000,- atau 100%.

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Pemeliharaan Mebel.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 16.800.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- atau 100%.

2. Program Pengelolaan Pendidikan.

A. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 402.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 402.500.000,- atau 100%.

2. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 45.225.600,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 45.225.600,- atau 100%.

3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 149.935.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 149.935.000,- atau 100%.

B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 375.750.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 375.750.000,- atau 100%.

2. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 12.359.800,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 12.359.800,- atau 100%.

3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 24.887.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 24.887.000,- atau 100%.
- C. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 128.175.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 128.175.000,- atau 100%.
 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Paud.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.
- D. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/kesetaraan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 245.650.500,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 245.650.500,- atau 100%.
 2. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.078.600.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 1.078.600.000,- atau 100%.
3. Program Pengembangan Kurikulum.
 - A. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.
 1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%.
 2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%.
 - B. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
 1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%.
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
 - A. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

1. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- atau 100%.

Sedangkan realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan sampai dengan Triwulan ke empat tidak ada.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan yang direncanakan sampai dengan triwulan ke empat adalah rata-rata dikarenakan nilai kontrak yang terdapat sisa dan sisa anggaran disetor kembali ke kasda.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang direncanakan sampai dengan triwulan ke empat adalah rata-rata berkat pekerjaan fisik dilapangan yang bisa mencapai 100%, termasuk realisasi keuangannya juga mencapai 100% dikarenakan pada saat perubahan dilakukan efisiensi disesuaikan dengan kebutuhan riil dilapangan.

Sampai dengan triwulan ke empat tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target.

Sehingga rata-rata pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sesuai dengan target capaian program yang ada di Renstra.

Dari kondisi tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan, maka Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil adalah selalu meningkatkan koordinasi antar Bidang dan Subbag serta SKB dalam mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mencapai target program Renstra yang telah ditetapkan. Jika pekerjaan fisik dilapangan sudah mencapai 100% namun terdapat sisa dana, maka pada saat pelaksanaan perubahan anggaran dilakukan efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil dilapangan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, maka kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum dibidang pendidikan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pendidikan;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;
5. Pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

6. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal;
7. Penyusunan dan pengembangan kurikulum;
8. Pembinaan administrasi sekolah;
9. Peningkatan manajemen mutu pendidikan;
10. Pengkoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Dinas;
11. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pendidikan;
12. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pendidikan;
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan; dan
14. Pengelolaan UPT.

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah dicapai, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama. Secara rinci hasil analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 seperti dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Terhadap Renstra PD Tahun 2021-2026
Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian Target Renstra PD		Catatan Analisis
			Tahun 2021 (4)	Tahun 2022 (5)	Tahun 2023 (6)	Tahun 2024 (7)	Tahun 2021 2021 (8)	Tahun 2022 2022 (9)	Tahun 2023 (10)	Tahun 2024 (11)		
(1)		(3)									(12)	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	0	90,95	92,63	94,21	85,7	87,75	92,63	94,21	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	0	93,84	94,16	94,49	89,34	95,77	95,78	95,79	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7 - 12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%	

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian Target Renstra PD		Catatan Analisis
			Tahun 2021 (4)	Tahun 2022 (5)	Tahun 2023 (6)	Tahun 2024 (7)	Tahun 2021 (8)	Tahun 2022 (9)	Tahun 2023 (10)	Tahun 2024 (11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	0	99,61	99,63	99,64	99,03	97,84	99,63	99,64	Jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13 - 15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0	41,65	56,69	71,73	3	48,90	56,69	71,73	Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar dipendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian Target Renstra PD		Catatan Analisis
			Tahun 2021 (4)	Tahun 2022 (5)	Tahun 2023 (6)	Tahun 2024 (7)	Tahun 2021 (8)	Tahun 2022 (9)	Tahun 2023 (10)	Tahun 2024 (11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	0	56,40	56,90	57,40	154,90	156,83	156,83	156,83	Jumlah siswa PAUD dibagi jumlah penduduk usia 0-6 tahun X 100 persen	
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	0	91,73	91,96	92,19	89,54	93,54	93,54	93,54	Jumlah siswa SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun X 100 persen	
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	0	99,20	99,23	99,27	98,84	99,36	99,36	99,36	Jumlah siswa SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun X 100 persen	
8	Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	0	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Jumlah sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan dibagi jumlah sekolah keseluruhan jenjang pendidikan tertentu dikali 100 persen	

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian Target Renstra PD		Catatan Analisis
			Tahun 2021 (4)	Tahun 2022 (5)	Tahun 2023 (6)	Tahun 2024 (7)	Tahun 2021 (8)	Tahun 2022 (9)	Tahun 2023 (10)	Tahun 2024 (11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
9	Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	0	49,22	50,11	51,00	48,33	23,55	50,11	51,00	Jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu yang telah terpenuhi PTKnya dibagi jumlah sekolah keseluruhan jenjang pendidikan tertentu dikali 100 persen	
10	Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan	Persen	0	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Jumlah permohonan penerbitan izin pendirian sekolah swasta yang terlayani/Jumlah pengajuan permohonan penerbitan izin pendirian sekolah swasta kali 100%	
11	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	Persen	0	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00		

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian Target Renstra PD		Catatan Analisis
			Tahun 2021 (4)	Tahun 2022 (5)	Tahun 2023 (6)	Tahun 2024 (7)	Tahun 2021 (8)	Tahun 2022 (9)	Tahun 2023 (10)	Tahun 2024 (11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
12	Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis budaya	Persen	0	13,12	18,49	23,87	7,74	51,50	51,51	51,52	Dihitung berdasarkan jumlah Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal membuat dibagi jumlah Sekolah Dasar pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%	
13	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis budaya	Persen	0	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Dihitung berdasarkan jumlah Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kurikulum muatan lokal membuat dibagi jumlah Sekolah Menengah Pertama pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%	
14	Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya	Persen	0	12,59	16,79	20,99	0	12,59	16,79	20,99	Dihitung berdasarkan Jumlah lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya dibagi Jumlah lembaga PAUD pada Kabupaten yang bersangkutan x 100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, selama tahun 2022 Dinas Pendidikan menghadapi hambatan dan permasalahan antara lain :

- a. belum adanya kebiasaan berpikir untuk memberikan pemikiran terobosan guna peningkatan mutu dan layanan pendidikan;
- b. Penerapan kurikulum merdeka belum dapat maksimal dikarenakan kurang minatnya guru untuk mengikuti program guru penggerak;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komputerisasi;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan dan penggunaan Dapodik pada jenjang PAUD-PNF dan pendidikan dasar sebagai pusat data tunggal penyelenggaraan layanan pendidikan;
- e. Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum memadai dan merata;
- f. Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan belum optimal;
- g. Kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- h. Potensi anak putus sekolah dikarenakan pengaruh lingkungan sosial dan kemudahan akses informasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi ketiga kepala daerah terpilih 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah, maka rekomendasi dan catatan strategis pada tahun 2024 untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- a. Upaya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan;
- b. Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembelajaran, dan sistem manajemen sekolah;
- d. optimalisasi biaya pendidikan;
- e. optimalisasi potensi lingkungan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

2.3.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2022

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pendidikan pada tahun 2022 ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut, diantaranya adalah :

- a. Mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK karena Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan turun agak terlambat sehingga kegiatan belum dapat dimulai serta adanya kebijakan nomenklatur baru dimana ketika dokumen perencanaan sudah terlanjur dibuat namun tiba-tiba ada kebijakan baru

- terkait nomenklatur sehingga harus dilakukan perubahan.
- b. Adanya keterlambatan pihak ke-3 dalam melengkapi persyaratan dokumen kontrak kegiatan.
- 2.3.2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian target kinerja
Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :
- a. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2022.
 - b. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.
 - c. Efisiensi alokasi belanja.
 - d. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak ke-3 secara intens terkait penyelesaian kewajiban dan tanggungjawabnya.
- 2.3.3. Dampak pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional
Dampak yang ditimbulkan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah antara lain :
- a. Peningkatan kapasitas Aparatur Perangkat Daerah dalam pemberian layanan pendidikan.
 - b. Peningkatan mutu layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
 - c. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
- 2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Pendidikan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

Tabel. 2.3
Tantangan dan Peluang

No	Tantangan	Peluang
1	Arus reformasi birokrasi mengarah pada harapan perbaikan kinerja birokrasi yang bermuara pada meningkatnya kinerja hasil pembangunan di seluruh sektor, termasuk terkait dengan sektor pendidikan. Pemenuhan jumlah tenaga	Paradigma pembangunan partisipatif yang mengedepankan prinsip keterlibatan multi sektor dan stakeholders merupakan peluang yang mendorong perbaikan tata kelola infrastruktur pendidikan di

	<p>pendidik dan layanan pendidikan yang berkualitas saat ini menjadi tuntutan yang besar yang memerlukan berbagai pembenahan baik yang menyangkut kinerja internal maupun eksternal. Paradigma tolok ukur kinerja pembangunan yang terkonsentrasi pada output mulai bergeser pada kinerja outcomes bahkan impact and benefit. Paradigma pembangunan saat ini tidak hanya sebatas pemenuhan infrastruktur tapi harus diimbangi dengan percepatan layanan administrasi dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha.</p>	<p>daerah.</p>
2	<p>Integrasi (keterpaduan) yang berbasis teknologi informasi dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian lintas sektoral sudah tidak hanya dalam satu daerah saja melainkan sudah lintas wilayah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).</p>	<p>Era desentralisasi yang ditandai oleh kewenangan setiap daerah dalam mengelola sumber daya produktif untuk tata kelola pemerintahan yang baik, memungkinkan bagi setiap daerah untuk mengembangkan kerja sama sinergis lintas wilayah, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan</p>
3	<p>Pengembangan prasarana/sarana di lingkungan Dinas Pendidikan terutama dalam mendekatkan pelayanan dan proses pengajaran, dan kebijakan daerah baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Juga koordinasi lintas sektoral merupakan tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan akses informasi yang aktual dan transparan.</p>	<p>Agenda perbaikan kualitas pendidikan selalu didengungkan oleh masyarakat maupun LSM juga secara nasional menjadi tuntutan dan cita-cita semua lembaga negara. Persoalan tata kelola pemerintahan tidak lagi menjadi masalah internal lembaga melainkan menjadi perhatian masyarakat luas sebagai wujud kepedulian akan adanya pendidikan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.</p>

a. Tantangan

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui

kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Dengan asumsi bahwa dalam kondisi yang normal, rata-rata lama sekolah di suatu wilayah tidak akan turun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini dimana Kabupaten Gunungkidul berada di urutan paling rendah.

Tabel. 2.4

No	Kabupaten/ Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
		2019	2020	2021	2022
1	Kulonprogo	8.66	8.86	9.02	9.17
2	Bantul	9.54	9.55	9.57	9.59
3	Gunungkidul	7.13	7.21	7.30	7.31
4	Sleman	10.67	10.91	10.92	10.94
5	Yogyakarta	11.45	11.46	11.72	11.89

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

2) Angka Partisipasi sekolah

Sebagai aspek dasar dalam pembentukan SDM berkualitas, Pemerintah kemudian menetapkan program wajib belajar 12 tahun yang membutuhkan kerjasama dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan program tersebut. Keikutsertaan masyarakat ditinjau melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase dan terdiri dari 2 unsur yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM merupakan persentase penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sedangkan, APK merupakan persentase penduduk yang masih sekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Secara rinci tersaji dalam tabel berikut.

Tabel. 2.5
Angka Partisipasi Sekolah

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (Persen)							
	APM				APK			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
SD/MI	99.59	99.59	99.42	99.02	104.00	105.25	103.62	104.54
SMP/MTs	93.20	93.20	93.70	90.93	107.90	105.95	108.11	101.01

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul-Gunungkidul dalam angka 2023

3) Disrupsi teknologi

Kemajuan sains dan teknologi, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya pola belajar dan bermain anak yang sangat berpengaruh terhadap implementasi pendidikan karakter bagi mereka.

4) Semakin meningkatnya usia penduduk sekolah maka perlu diimbangi dengan infrastruktur sebagai salah satu upaya meningkatkan daya serap pendidikan.

5) Semakin meningkatnya layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Swasta atau Yayasan Pendidikan maka perlu ditingkatkan kualitas dalam pengelolaan pendidikan.

6) Kesenjangan dalam hal pemerataan guru yang berkualitas serta tata kelola pendidikan.

7) Penguasaan dan penerapan teknologi sebagai penunjang dalam pelaksanaan program layanan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas.

b. Peluang

1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut memiliki dampak terhadap peningkatan daya serap pendidikan.

2) Bidang Pendidikan masuk kedalam salah satu prioritas pembangunan, implikasinya bahwa pendidikan menjadi salah satu program yang bersifat strategis.

3) Seiring dengan meningkatnya kelompok usia sekolah maka meningkat pula lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola secara mandiri oleh swasta atau Yayasan Pendidikan.

4) Dengan adanya arus globalisasi memberikan dampak positif bagi pengelolaan layanan pendidikan baik dalam hal riset, kerjasama peningkatan mutu tenaga pendidik maupun pertukaran pelajar.

5) Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisien dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran baik

melalui riset model pembelajaran maupun pengenalan teknologi dalam pembelajaran.

- 6) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengembangan program layanan pendidikan.
- 7) Program Sekolah Penggerak yang memberikan dampak positif terhadap paradigma para pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- 8) Program Guru Penggerak yang memberikan dampak positif terhadap pembelajaran paradigma baru untuk meningkatkan mutu pendidikan.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan Tahun 2024. Hasil rewiu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 disajikan pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Dinas Pendidikan

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	577.590.663.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	726.412.315.927,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	3	1.376.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	3	222.565.400,00
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100					100	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdik, korwil, SKB dan Sekolah	- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi - Jumlah Dokumen penyusunan Rancangan awal Renja, Rancangan renja, Rancangan akhir renja, renja penetapan PD	N/A	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	-Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi	N/A	0
		Dinas Pendidikan		N/A	0					0
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Renja PD yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Renja PD yang terselesaikan	N/A	0
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Renja yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Renja perubahan PD yang terselesaikan	N/A	0
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen draf renstra PD 2026-2031 yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen draf renstra PD 2026-2031 yang terselesaikan	N/A	0
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen renstra PD 2026-2031 yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen renstra PD 2026-2031 yang terselesaikan	N/A	0
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	525.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	42.662.500,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Korwil 18 kecamatan	Jumlah Dokumen RKA yang terselesaikan	N/A	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMP negeri 61 Sekolah	Jumlah Dokumen RKA yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80	86.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.430.000,00	
X-XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Korwil 18 Kecamatan	- Jumlah dokumen RKA Perubahan yang terselesaikan	N/A	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0	
		SMP negeri 61 Sekolah	- Jumlah dokumen RKA Perubahan yang terselesaikan	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen RKA Perubahan yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen RKA Perubahan yang terselesaikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80	86.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	3.230.000,00	
X-XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Korwil 18 Kecamatan	- Jumlah Dokumen DPA yang terselesaikan	N/A	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0	
		SMP negeri 61 Sekolah	- Jumlah Dokumen DPA yang terselesaikan	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terselesaikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen perpanjangan kinerja yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen perpanjangan kinerja yang terselesaikan	N/A	0	
		Korwil 18 kecamatan	Jumlah dokumen ROPK yang terselesaikan	N/A	0					0	
		SMP negeri 61 Sekolah	Jumlah dokumen ROPK yang terselesaikan	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen ROPK yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen ROPK yang terselesaikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	161	86.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	5.710.000,00	
X-XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Korwil 18 Kecamatan	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang terselesaikan	N/A	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMP negeri 61 Sekolah	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang terselesaikan		0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen perpanjangan kinerja perubahan yang terselesaikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen perubahan yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen perpanjangan kinerja perubahan yang terselesaikan	N/A	0	
		Korwil 18 Kecamatan	- Jumlah dokumen perubahan ROPK yang terselesaikan	N/A	0					0	
		SMP negeri 61 Sekolah	- Jumlah dokumen perubahan ROPK yang terselesaikan	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen perubahan ROPK yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen perubahan ROPK yang terselesaikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, Korwil 18 Kecamatan, SMP N 61 Sekolah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	161	86.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.750.000,00	2
X-XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen LKJIP yang terselesaikan	N/A	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen LKJIP yang terselesaikan	N/A	0	
							Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen evaluasi RKP yang terselesaikan	N/A		
							Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi renja (evaluasi hasil RKP)	N/A		
							Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen monev capaian SPM bidang pendidikan yang terselesaikan	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
							Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Monitoring, evaluasi, dan publikasi terkait Implementasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	N/A				
							Dinas Pendidikan, Sekolah, Korwil dan SKB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	324.000.000,00	6	65.109.900,00	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen evaluasi RKPD yang terselesaikan	N/A	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen pengukuran IKM	N/A			0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi renja (evaluasi hasil RKPD)	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen SOP yang direvisi	N/A			0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen money capaian SPM bidang pendidikan yang terselesaikan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen RTP	N/A			0	
		Dinas Pendidikan, sekolah, korwil dan SKB	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen SPIP	N/A			0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Monitoring, evaluasi, dan publikasi terkait Implementasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah Forum Konsultasi Publik yang terlaksana	N/A			0	
							Dinas Pendidikan	- Jumlah petunjuk/banner/pengumuman yang dicetak	N/A				
							Dinas Pendidikan	- Jumlah workshop/sosialisasi pelayanan publik yang terlaksana	N/A				
							Dinas Pendidikan	- Jumlah workshop peningkatan kapasitas SDM (capacity building)	N/A				

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan, Sekolah, korwil dan SKB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	183.750.000,00		Dinas Pendidikan	- Jumlah buletin pendidikan, pemuda dan olahraga yang diterbitkan	N/A		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu	8	568.334.069.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu	8	722.564.619.560,00	
			Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu	100				Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu	100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SMPN 3 Panggang	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0	
		SMPN 3 Panggang	Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 4 Ngawen	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 4 Ngawen	Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 1 Semin	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 1 Rongkop	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 1 Purwosari	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 3 Karangmojo	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 2 Paliyan	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 2 Ponjong	Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 1 Ngawen	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 1 Ngawen	Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 3 Playen	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 1 Tepus	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 2 Saptosari	Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
		SMPN 1 Saptosari	Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	SMPN 2 Wonosari		Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
	SMPN 2 Wonosari		Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
	SMPN 1 Wonosari		Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan, Sekolah, Korwil dan SKB		- Jumlah bulan terfasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah PTT UPT TK & SD/Korwil (1 orang x 13 bulan)	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah PTT database SD (21 orang x 13 bulan)	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah PTT database TK (2 orang x 13 bulan)	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah GTT database TK (4 orang x 13 bulan)	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah GTT database SD (6 orang x 13 bulan)	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah Insentif GTT/PTT Kategori II (49 orang x 13 bulan)	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah GTT database sebagai guru pengganti (GTT SD 776 orang + SMP 58 orang x 13 bulan)	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (686 orang x 12 bulan) APBD Kabupaten	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah THR PTT Korwil Kecamatan	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah THR PTT SD	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah THR PTT TK	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah THR GTT TK	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah THR GTT SD	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		- Jumlah THR Insentif GTT/PTT Kategori II	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		Jumlah THR data base sebagai GP (guru pengganti)	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4743	568.010.359.000,00		Dinas Pendidikan, Sekolah, Korwil dan SKB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66.402	722.398.165.360,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
X-XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terselesaikan	N/A	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terselesaikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen personal file kepegawaian ASN Dinas yang dikelola	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen kepegawaian ASN Dinas yang dikelola	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	332	5.810.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4	1.000.000,00
X-XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terverifikasi	N/A	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terverifikasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	10.810.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	2.295.000,00
X-XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi yang terfasilitasi	N/A	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi yang terfasilitasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	25.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	10.000.000,00
X-XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SMP negeri 61 Sekolah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang terselesaikan	N/A	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK yang terselesaikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	35.100.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4	19.999.200,00
X-XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang terselesaikan	N/A	0	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang terselesaikan	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	5.000.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3		1.200.000,00	
X-XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pendidikan	-Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang terselesaikan	N/A	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang terselesaikan	N/A		0	
		Dinas Pendidikan	-Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/SPJ yang terselesaikan	N/A	0		-Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/SPJ yang terselesaikan	N/A		0	
		Dinas Pendidikan	Peningkatan Kualitas SDM	N/A	0		Peningkatan Kualitas SDM	N/A		0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	241.990.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13		131.960.000,00	
X-XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran yang terselesaikan	N/A	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran yang terselesaikan	N/A		0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	0		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A		0	
X-XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu	7	861.085.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu	7		734.550.000,00	
		Korwil 18 Kecamatan, SMPN 61 Sekolah, SKB dan Dinas Pendidikan	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu	100			Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu	100			
X-XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun dengan baik	N/A	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun dengan baik	N/A		0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
X-XX.01.2.03.02	Korwil 18 Kecamatan, SMPN 61 Sekolah, SKB dan Dinas Pendidikan	Korwil 18 Kecamatan, SMPN 61 Sekolah, SKB dan Dinas Pendidikan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	2.500.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen pinjam pakai Barang Milik Daerah SKPD	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen pinjam pakai Barang Milik Daerah SKPD	N/A	0	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	5.000.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0,00	
X-XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta rakor dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta rakor dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	0	
X-XX.01.2.03.04	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	41.585.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4	11.140.000,00	
			Jumlah peserta mengikuti workshop Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta mengikuti workshop Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	0	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	20.000.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	10.600.000,00	
X-XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang terselesaikan	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang terselesaikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	750.000.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	695.840.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
X-XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Korwil 18 Kecamatan, SMPN 61 Sekolah, SKB dan Dinas Pendidikan Korwil 18	- Jumlah dokumen BHP yang disusun	N/A	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen BHP yang disusun	N/A	0	0
		Kecamatan, SMPN 61 Sekolah, SKB dan Dinas Pendidikan Korwil 18	- Jumlah dokumen aset yang disusun	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen aset yang disusun	N/A	0	0
		Korwil 18 Kecamatan, SMPN 61 Sekolah, SKB dan Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	32.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	15.470.000,00	
X-XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Korwil 18 Kecamatan, SMPN 61 Sekolah, SKB dan Dinas Pendidikan Korwil 18	"Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD"	N/A	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Pendidikan	"Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD"	N/A	0	0
		Kecamatan, SMPN 61 Sekolah, SKB dan Dinas Pendidikan Korwil 18	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	0,00	
X-XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5977	361.310.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5977	94.047.500,00	
			Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100				Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100		
X-XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terfasilitasi	N/A	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terfasilitasi	N/A	0	0
		Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	5.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
X-XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	0	
X-XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta workshop Sistem Informasi Kepegawaian yang terfasilitasi	N/A	20.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta workshop Sistem Informasi Kepegawaian yang terfasilitasi	N/A	17	34.982.500,00
X-XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Pendidikan	Jumlah sekolah sasaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	90.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Pendidikan	Jumlah sekolah sasaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	0	0,00
X-XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Dinas Pendidikan	Jumlah kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar dan pejabat fungsional lainnya yang mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji	N/A	5.000.000,00	Pemindahan Tugas ASN	Dinas Pendidikan	Jumlah kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar dan pejabat fungsional lainnya yang mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji	N/A	1	3.400.000,00
X-XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan	Jumlah ASN yang dipindah tugas dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	N/A	15.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan	Jumlah ASN yang dipindah tugas dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	N/A	100	14.925.000,00
X-XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	75.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	0	0,00
			- Jumlah Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan	N/A				- Jumlah Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan	N/A		0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
		Dinas Pendidikan	- Jumlah Sosialisasi Geopark bagi guru dan pelajar	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah Sosialisasi Geopark bagi guru dan pelajar	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidika	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidika	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1297	106.310.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	40.740.000,00	
X-XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen raperub tentang PPDB	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen raperub tentang PPDB	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen raperub tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen raperub tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen raperub tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif)	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen raperub tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32	45.000.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	
X-XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Administrasi Umum terlayani	8	4.301.888.000,00	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Administrasi Umum terlayani	8	1.087.841.500,00	
			Persentase Administrasi Umum terlayani	100			Persentase Administrasi Umum terlayani	100		
X-XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Korwil kecamatan Karangmojo	Korwil kecamatan Karangmojo	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Karangmojo	Korwil kecamatan Karangmojo	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Ngawen	Korwil kecamatan Ngawen	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Ngawen	Korwil kecamatan Ngawen	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Nglipar	Korwil kecamatan Nglipar	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Nglipar	Korwil kecamatan Nglipar	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Paliyan	Korwil kecamatan Paliyan	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Paliyan	Korwil kecamatan Paliyan	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Panggang	Korwil kecamatan Panggang	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Panggang	Korwil kecamatan Panggang	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Patuk	Korwil kecamatan Patuk	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Patuk	Korwil kecamatan Patuk	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Playen	Korwil kecamatan Playen	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Playen	Korwil kecamatan Playen	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Ponjong	Korwil kecamatan Ponjong	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Ponjong	Korwil kecamatan Ponjong	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Purwosari	Korwil kecamatan Purwosari	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Purwosari	Korwil kecamatan Purwosari	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Rongkop	Korwil kecamatan Rongkop	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Rongkop	Korwil kecamatan Rongkop	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Saptosari	Korwil kecamatan Saptosari	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Saptosari	Korwil kecamatan Saptosari	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Semanu	Korwil kecamatan Semanu	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Semanu	Korwil kecamatan Semanu	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Semin	Korwil kecamatan Semin	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil kecamatan Semin	Korwil kecamatan Semin	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil Kecamatan Tanjung Sari	Korwil Kecamatan Tanjung Sari	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil Kecamatan Tanjung Sari	Korwil Kecamatan Tanjung Sari	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil Kecamatan Tepus	Korwil Kecamatan Tepus	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil Kecamatan Tepus	Korwil Kecamatan Tepus	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	Korwil Kecamatan Wonosari	Korwil Kecamatan Wonosari	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	Korwil Kecamatan Wonosari	Korwil Kecamatan Wonosari	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0
	SKB	SKB	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	SKB	SKB	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	N/A	0	0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	- Jumlah komponen keistrikan yang tersedia	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah komponen keistrikan yang tersedia	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	104	54.240.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	19.611.000,00	
X-XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Korwil Kecamatan Gedangsari	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Korwil Kecamatan Gedangsari	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Girisubo	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil Kecamatan Girisubo	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan karangmojo	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan karangmojo	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan ngawen	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan ngawen	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan nglipar	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan nglipar	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan palyan	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan palyan	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan panggung	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan panggung	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan patuk	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan patuk	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan playen	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan playen	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan Ponjong	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan Ponjong	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan Purwosari	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan Purwosari	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan Rogkop	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan Rogkop	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan saptosari	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan saptosari	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil Kecamatan semanu	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil Kecamatan semanu	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil kecamatan semin	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan semin	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Tanjungarsi	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil Kecamatan Tanjungarsi	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil kecamatan tepus	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil kecamatan tepus	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Wonosari	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		Korwil Kecamatan Wonosari	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		SKB	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0		SKB	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan (Sekretariat dan Bidang)	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan (Sekretariat dan Bidang)	N/A	0	
		SKB	Jumlah komputer yang dibeli	N/A	0		SKB	Jumlah komputer yang dibeli	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah laptop yang dibeli	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah laptop yang dibeli	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah komputer / PC yang dibeli	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah komputer / PC yang dibeli	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah LCD projector yang dibeli	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah LCD projector yang dibeli	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah layar proyektor beserta tripodnya 84' yang dibeli	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah layar proyektor beserta tripodnya 84' yang dibeli	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah drone kamera untuk peliputan kegiatan olahraga dan lapangan yang dibeli	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah drone kamera untuk peliputan kegiatan olahraga dan lapangan yang dibeli	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah sound system lengkap (amplifier, speaker, microphone) untuk ruang rapat sasana among karsa	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah sound system lengkap (amplifier, speaker, microphone) untuk ruang rapat sasana among karsa	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis server dan peralatan serta perlengkapan server yang dibeli (UPS, AVR/Automatic Voltage Regulator dll)	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis server dan peralatan serta perlengkapan server yang dibeli (UPS, AVR/Automatic Voltage Regulator dll)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	438	1.618.773.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	132	430.188.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
X-XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Karangmojo	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Karangmojo	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Ngawan	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Ngawan	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Nglipar	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Nglipar	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Paliyan	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Paliyan	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Panggang	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Panggang	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Patuk	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Patuk	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Playen	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Playen	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Ponjong	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Ponjong	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Purwosari	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Purwosari	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Rongkop	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Rongkop	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Saptosari	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Saptosari	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Semanu	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Semanu	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Semin	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Semin	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Tanjung Sari	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Tanjung Sari	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Tepus	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		Korwil Kecamatan Tepus	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Korwil Wonosari	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	Korwil Wonosari	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		
		SKB	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	SKB	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		
		Dinas Pendidikan	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	N/A	0		
		Dinas Pendidikan, Korwil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	213	209.053.000,00	Dinas Pendidikan, Korwil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22	190.634.000,00		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Dinas Pendidikan	- Jumlah barang habis pakai yang tersedia	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah barang habis pakai yang tersedia	N/A	0		
		Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	50.000.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0,00		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah barang cetakan	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah barang cetakan	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Karangmojo	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil Kecamatan Karangmojo	Jumlah barang cetakan	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Karangmojo	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil Kecamatan Karangmojo	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Ngawen	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil Kecamatan Ngawen	Jumlah barang cetakan	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Ngawen	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil Kecamatan Ngawen	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Nglipar	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil Kecamatan Nglipar	Jumlah barang cetakan	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Nglipar	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil Kecamatan Nglipar	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		
		Korwil Kecamatan Paliyan	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil Kecamatan Paliyan	Jumlah barang cetakan	N/A	0		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Korwil kecamatan Paliyan	Korwil kecamatan Paliyan	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil kecamatan Paliyan	Korwil kecamatan Paliyan	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	0
	Korwil kecamatan panggang	Korwil kecamatan panggang	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil kecamatan panggang	Korwil kecamatan panggang	Jumlah barang cetakan	N/A	0	0
	Korwil kecamatan panggang	Korwil kecamatan panggang	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil kecamatan panggang	Korwil kecamatan panggang	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	0
	Korwil kecamatan patuk	Korwil kecamatan patuk	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil kecamatan patuk	Korwil kecamatan patuk	Jumlah barang cetakan	N/A	0	0
	Korwil kecamatan patuk	Korwil kecamatan patuk	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil kecamatan patuk	Korwil kecamatan patuk	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	0
	Korwil kecamatan playen	Korwil kecamatan playen	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil kecamatan playen	Korwil kecamatan playen	Jumlah barang cetakan	N/A	0	0
	Korwil kecamatan playen	Korwil kecamatan playen	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil kecamatan playen	Korwil kecamatan playen	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	0
	Korwil kecamatan ponjong	Korwil kecamatan ponjong	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil kecamatan ponjong	Korwil kecamatan ponjong	Jumlah barang cetakan	N/A	0	0
	Korwil kecamatan ponjong	Korwil kecamatan ponjong	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil kecamatan ponjong	Korwil kecamatan ponjong	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Purwosari	Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil kecamatan Purwosari	Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah barang cetakan	N/A	0	0
	Korwil kecamatan Purwosari	Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil kecamatan Purwosari	Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	0
	Korwil kecamatan rongkop	Korwil kecamatan rongkop	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil kecamatan rongkop	Korwil kecamatan rongkop	Jumlah barang cetakan	N/A	0	0
	Korwil kecamatan rongkop	Korwil kecamatan rongkop	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil kecamatan rongkop	Korwil kecamatan rongkop	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	0
	Korwil kecamatan saptosari	Korwil kecamatan saptosari	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil kecamatan saptosari	Korwil kecamatan saptosari	Jumlah barang cetakan	N/A	0	0
	Korwil kecamatan saptosari	Korwil kecamatan saptosari	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil kecamatan saptosari	Korwil kecamatan saptosari	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	0
	Korwil kecamatan semanu	Korwil kecamatan semanu	Jumlah barang cetakan	N/A	0	Korwil kecamatan semanu	Korwil kecamatan semanu	Jumlah barang cetakan	N/A	0	0
	Korwil kecamatan semanu	Korwil kecamatan semanu	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	Korwil kecamatan semanu	Korwil kecamatan semanu	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil kecamatan semin	Jumlah barang cetakan	N/A	0		Korwil kecamatan semin	Jumlah barang cetakan	N/A	0	
		Korwil kecamatan semin	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		Korwil kecamatan semin	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Tanjungarsi	Jumlah barang cetakan	N/A	0		Korwil Kecamatan Tanjungarsi	Jumlah barang cetakan	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Tanjungarsi	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		Korwil Kecamatan Tanjungarsi	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	
		Korwil Kecamatan tepus	Jumlah barang cetakan	N/A	0		Korwil Kecamatan tepus	Jumlah barang cetakan	N/A	0	
		Korwil Kecamatan tepus	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		Korwil Kecamatan tepus	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Wonosari	Jumlah barang cetakan	N/A	0		Korwil Kecamatan Wonosari	Jumlah barang cetakan	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Wonosari	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		Korwil Kecamatan Wonosari	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	
		SKB	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		SKB	Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	
		SKB	Jumlah barang cetakan	N/A	0		SKB	Jumlah barang cetakan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah barang cetakan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah barang cetakan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah lembar fotocopy	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah lembar fotocopy	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah jilidan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah jilidan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, Korwil dan SKB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	59	96.650.000,00		Dinas Pendidikan, Korwil dan SKB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22	70.960.000,00	
X-XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pendidikan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (2 surat kabar X 12 Bulan)	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (2 surat kabar X 12 Bulan)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	733	3.816.000,00		Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	34	2.760.000,00	
X-XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	51.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6.510.000,00	
X-XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat	N/A	0		Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Korwil Kecamatan Gedangsari	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Gedangsari	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Girisubo	Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Girisubo	Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Girisubo	Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Girisubo	Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Karangmojo	Korwil Kecamatan Karangmojo	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Karangmojo	Korwil Kecamatan Karangmojo	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Karangmojo	Korwil Kecamatan Karangmojo	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Karangmojo	Korwil Kecamatan Karangmojo	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Ngawen	Korwil Kecamatan Ngawen	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Ngawen	Korwil Kecamatan Ngawen	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Ngawen	Korwil Kecamatan Ngawen	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Ngawen	Korwil Kecamatan Ngawen	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Nglipar	Korwil Kecamatan Nglipar	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Nglipar	Korwil Kecamatan Nglipar	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Nglipar	Korwil Kecamatan Nglipar	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Nglipar	Korwil Kecamatan Nglipar	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Paliyan	Korwil Kecamatan Paliyan	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Paliyan	Korwil Kecamatan Paliyan	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Paliyan	Korwil Kecamatan Paliyan	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Paliyan	Korwil Kecamatan Paliyan	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Panggang	Korwil Kecamatan Panggang	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Panggang	Korwil Kecamatan Panggang	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Panggang	Korwil Kecamatan Panggang	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Panggang	Korwil Kecamatan Panggang	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Patuk	Korwil Kecamatan Patuk	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat	N/A	0	Korwil Kecamatan Patuk	Korwil Kecamatan Patuk	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Patuk	Korwil Kecamatan Patuk	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Patuk	Korwil Kecamatan Patuk	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Playen	Korwil Kecamatan Playen	Jumlah minuman dan snack yang tersedia untuk rapat	N/A	0	Korwil Kecamatan Playen	Korwil Kecamatan Playen	Jumlah minuman dan snack yang tersedia untuk rapat	N/A	0	
	Korwil Kecamatan Playen	Korwil Kecamatan Playen	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	Korwil Kecamatan Playen	Korwil Kecamatan Playen	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Rongkop	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Rongkop	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Rongkop	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Rongkop	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Saptosari	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Saptosari	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Saptosari	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Saptosari	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan semanu	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan semanu	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Semin	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Semin	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Semin	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Semin	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Tanjungarsi	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Tanjungarsi	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Tanjungarsi	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Tanjungarsi	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan tepus	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan tepus	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan tepus	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan tepus	Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Wonosari	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Wonosari	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Korwil kecamatan Wonosari	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		Korwil kecamatan Wonosari	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SKB	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0		SKB	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk tamu	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk tamu	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan karangmojo	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan karangmojo	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan ngawen	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan ngawen	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan Nglipar	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan Nglipar	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan Paliyan	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan Paliyan	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan panggang	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan panggang	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan patuk	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan patuk	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan playen	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan playen	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil kecamatan Ponjong	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan Ponjong	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan rongkop	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan rongkop	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan Saptosari	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan Saptosari	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan semanu	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan semanu	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan Semin	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan Semin	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan Tanjung Sari	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan Tanjung Sari	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan Tepus	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan Tepus	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		Korwil kecamatan Wonosari	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		Korwil kecamatan Wonosari	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		SKB	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0		SKB	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	N/A	0	
		SKB	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi luar Daerah	N/A	0		SKB	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi luar Daerah	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta rapat koordinasi	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta rapat koordinasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, Korwil dan SKB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	700.520.000,00		Dinas Pendidikan, Korwil dan SKB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	108.296.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Pendidikan	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tersedia	N/A	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Pendidikan	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tersedia	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen profil perangkat daerah	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen profil perangkat daerah	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen				Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen			
		Dinas Pendidikan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	1.517.836.000,00		Dinas Pendidikan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	258.882.500,00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	3	208.390.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	3	430.042.500,00	
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas Pendidikan	Jumlah meja kerja 1,5 biro yang dibeli	N/A	0	Pengadaan Mebel	Dinas Pendidikan	Jumlah backdrop ruang rapat yang dibeli	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah dan jenis kursi kerja (kursi putar/eksekutif) dibeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah dan jenis rak yang dibeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah pengadaan meja rapat (RR sasana among karsa, sasana pramudya, handayani) yang dibeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah pengadaan kursi rapat (kursi sidang RR sasana among karsa, sasana pramudya, handayani) yang dibeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah almari kaca yang dibeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah filling kabinet yang dibeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah kursi tunggu 4 set ruang unit layanan terpadu yang dibeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah alat permainan anak ruang unit layanan terpadu yang dibeli	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	- Jumlah lemari arsip dorong (mobile file) yang dibeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	174	148.390.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	28.742.500,00	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	- Jumlah AC yang terbeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah kipas angin yang terbeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah CCTV yang terbeli	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah CCTV yang terbeli	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	30.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	401.300.000,00	
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	- Jumlah korden yang terbeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah tralis yang terbeli	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	30.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0,00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	3	1.261.871.000,00					909.533.467,00	
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	100					100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0		Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0		Korwil Kecamatan Girisubo	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil kecamatan Karangmojo	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan Karangmojo	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan Karangmojo	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan Karangmojo	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan ngawen	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan ngawen	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan ngawen	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan ngawen	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan nglipar	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan nglipar	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan nglipar	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan nglipar	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan palyan	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan palyan	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan palyan	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan palyan	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan panggang	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan panggang	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan panggang	Jumlah jasa diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan panggang	Jumlah jasa diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan patuk	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan patuk	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan patuk	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan patuk	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan playen	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan playen	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan playen	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan playen	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah jasa atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah jasa atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah tagihan air yang dibayarkan (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah tagihan air yang dibayarkan (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan Rongkop	Jumlah jasanya yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekeningx12bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan Rongkop	Jumlah jasanya yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekeningx12bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan Rongkop	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan Rongkop	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil Kecamatan saptosari	Jumlah Jasa Yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x12bulan)	N/A	0		Korwil Kecamatan saptosari	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x12bulan)	N/A	0	
		Korwil Kecamatan saptosari	Jumlah Jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil Kecamatan saptosari	Jumlah Jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan semanu	Jumlah jasa tagihan air yang terbayarkan (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan semanu	Jumlah jasa tagihan air yang terbayarkan (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan semanu	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan semanu	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan Semin	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan Semin	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan Semin	Jumlah Jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan Semin	Jumlah Jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan tanjungsari	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan tanjungsari	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil kecamatan tanjungsari	Jumlah jasa tagihan air yang dibayarkan (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil kecamatan tanjungsari	Jumlah jasa tagihan air yang dibayarkan (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil Kecamatan Tepus	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil Kecamatan Tepus	Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Tepus	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0		Korwil Kecamatan Tepus	Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Wonosari	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0		Korwil Kecamatan Wonosari	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0	
		SKB	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0		SKB	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0	
		SKB	Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0		SKB	Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0	
		SKB	Jumlah Jasa tagihan telephone yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0		SKB	Jumlah Jasa tagihan telephone yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah sarana jasa telephon/kawat/faximile yang terbayar	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah sarana jasa telephon/kawat/faximile yang terbayar	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah sarana jasa air yang terbayar	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah sarana jasa air yang terbayar	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah sarana jasa listrik yang terbayar	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah sarana jasa listrik yang terbayar	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, Korwil dan SKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	698.710.000,00		Dinas Pendidikan, Korwil dan SKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	576	530.048.467,00	
X-XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Korwil kecamatan Gedangsari	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0	
		Korwil kecamatan Gedangsari	Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Gedangsari	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Gedangsari	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Girisubo	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil kecamatan Girisubo	Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Girisubo	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Girisubo	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Karangmojo	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Karangmojo	Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Karangmojo	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Karangmojo	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Ngawen	Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Ngawen	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Ngawen	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Nglipar	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Nglipar	Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Nglipar	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Nglipar	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Paliyan	Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Paliyan	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil kecamatan pallyan	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan panggang	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan panggang	Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan panggang	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan panggang	Jumlah personal LCD yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan patuk	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan patuk	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan playen	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan playen	Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan playen	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan ponjong	Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan purwosari	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil kecamatan purwosari	Jumlah personal laptop yang terfasilitasipemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan purwosari	Jumlah personal printer yang terfasilitasipemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan rongkop	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan rongkop	Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan rongkop	Jumlah personal wireles yang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan rongkop	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan saptosari	Jumlah personal Laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan saptosari	Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan saptosari	Jumlah jaringan internetyang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan semanu	Jumlah personal labtop yang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan semanu	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan semanu	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan semanu	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Tanjung Sari	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	N/A	0					0	
		Korwil kecamatan Tepus	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil Kecamatan Wonosari	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		Korwil Kecamatan Wonosari	Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0					0	
		SKB	- Jumlah pengadaan jaringan internet k untuk mendukung KBM K-13	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah Jasa lisensi perangkat server (fortigate dll) dan jasa perangkat lunak yang dibayar	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah jasa lisensi perangkat server (fortigate dll) dan jasa perangkat lunak yang dibayar	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan, Korwil dan SKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	525.461.000,00		Dinas Pendidikan, Korwil dan SKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	322.000.000,00	
X-XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah Sewa tanah yang terfasilitasi	N/A	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Korwil Kecamatan Gedangsari	Jumlah Sewa tanah yang terfasilitasi	N/A	0	
		Korwil kecamatan patuk	Jumlah sewa tanah yang dibayarkan	N/A	0		Korwil kecamatan patuk	Jumlah sewa tanah yang dibayarkan	N/A	0	
		Korwil kecamatan Ponjong	Jumlah sewa tanah yang dibayar	N/A	0		Korwil kecamatan Ponjong	Jumlah sewa tanah yang dibayar	N/A	0	
		Korwil kecamatan semin	Jumlah sewa tanah yang terbayarkan	N/A	0		Korwil kecamatan semin	Jumlah sewa tanah yang terbayarkan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah sewa tanah Stadion Handayani dan Gedung Kesenian yang terbayarkan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah sewa tanah Stadion Handayani dan Gedung Kesenian yang terbayarkan	N/A	0	
		Disdik, Korwil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	37.700.000,00		Disdik, Korwil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9	57.485.000,00	
X-XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi pemeliharannya	5	885.300.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi pemeliharannya	5	369.116.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
			<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi pemeliharannya</i>	100				<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi pemeliharannya</i>	100	
X-XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKB	Jumlah mobil dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	N/A	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKB	Jumlah mobil dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	N/A	0
		SKB	Jumlah motor roda 3 yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	N/A	0		SKB	Jumlah motor roda 3 yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	N/A	0
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis kendaraan dinas (roda empat) yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis kendaraan dinas (roda empat) yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya	N/A	0
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis kendaraan dinas (roda dua) yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis kendaraan dinas (roda dua) yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya	N/A	0
		Dinas Pendidikan, skb	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95	295.900.000,00		Dinas Pendidikan, skb	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	203.500.000,00
X-XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	SKB	- Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara	N/A	0					0
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara	N/A	0
		Dinas Pendidikan, skb	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	75.000.000,00		Dinas Pendidikan, skb	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	5.000.000,00
X-XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKB	Jumlah komputer yang dipelihara	N/A	0					0
		SKB	Jumlah Mesin ketik yang dipelihara	N/A	0					0
		SKB	Jumlah printer yang dipelihara	N/A	0					0
		SKB	Jumlah sound system yang dipelihara	N/A	0					0
		SKB	Jumlah peralatan studio musik yang terpelihara	N/A	0					0
		SKB	Jumlah kamera yang terpelihara	N/A	0					0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	- Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah sound sistem yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah sound sistem yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah kunci pintu digital yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah LCD Proyektor yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah genset yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah genset yang terfasilitasi pemeliharannya	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	88.900.000,00		Dinas Pendidikan & Skb	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	52.016.000,00	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Korwil kecamatan Gedangsari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Korwil kecamatan Gedangsari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Girisubo	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Girisubo	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Karangmojo	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Karangmojo	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Ngawen	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Ngawen	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Nglipar	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Nglipar	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Paliyan	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Paliyan	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Panggang	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Panggang	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Patuk	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Patuk	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Playen	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Playen	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Ponjong	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Ponjong	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Purwosari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Korwil kecamatan Rongkop	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Rongkop	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Saptosari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Saptosari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan semanu	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan semanu	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Semin	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Semin	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Tanjung Sari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Tanjung Sari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil kecamatan Tepus	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil kecamatan Tepus	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		Korwil Kecamatan Wonosari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0		Korwil Kecamatan Wonosari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	N/A	0	
		SKB	Jumlah pengecatan gedung kantor	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor (atap, pintu dan jendela, lantai, kamar kecil, pengecatan) yang dipelihara	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor (atap, pintu dan jendela, lantai, kamar kecil, pengecatan) yang dipelihara	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah pengecatan gedung kantor	N/A	0		Dinas Pendidikan	-Jumlah pengecatan gedung kantor	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah sanitasi air bersih, tampungan air terfokus beserta saringan air bersih yg terpelihara	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah sanitasi air bersih, tampungan air terfokus beserta saringan air bersih yg terpelihara	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, Korwil dan SKB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	302.000.000,00		Dinas Pendidikan, Korwil dan SKB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	84.100.000,00	
X-XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKB	Jumlah AC yang dipelihara	N/A	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKB	Jumlah AC yang dipelihara	N/A	0	
		SKB	Jumlah jaringan internet yang dipelihara	N/A	0		SKB	Jumlah jaringan internet yang dipelihara	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor (AC) yang dipelihara	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor (AC) yang dipelihara	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor (CCTV) yang dipelihara	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor (CCTV) yang dipelihara	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor (jaringan internet, jaringan telf, dll) yang dipelihara	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor (jaringan internet, jaringan telf, dll) yang dipelihara	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	123.500.000,00		Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38	24.500.000,00	
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	0	0	Penataan Organisasi	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	0	0	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0	0			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0	0	
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen Pengukuran IKM	N/A	0	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen SOP yang direvisi	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen RTP	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen SPIP	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah Forum Konsultasi Publik yang terlaksana	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah petunjuk/banner/pengumuman yang dicetak	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah workshop/sosialisasi pelayanan publik yang terlaksana	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah workshop peningkatan kapasitas SDM (capacity building)	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah buletin pendidikan, pemuda dan olahraga yang diterbitkan	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	N/A	0	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;	94.21	185.372.437.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;	94.21	111.457.026.933,00	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar;	94.49	0			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar;	94.49	0	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama;	99.64	0			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama;	99.64	0	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan	71.73	0			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan	71.73	0	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;	57.40	0			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;	57.40	0	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;	92.19	0			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;	92.19	0	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	99.27	0			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	99.27	0	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A	314	83.473.455.000,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A	314	45.905.132.184,00	
			Persentase SD yang terakreditasi A	67.09				Persentase SD yang terakreditasi A	67.09		
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah Unit sekolah baru yang di bangun	N/A	0	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T (SPM)	1	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	150.000.000,00	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (SPM)	0	0,00	
		SD MUHAMMADIYAH BOGOR PLAYEN	Jumlah ruang kelas baru (RXB) yang dibangun	N/A	0	SD MUHAMMADIYAH BOGOR PLAYEN	Jumlah Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T (SPM)	3	0	
		SDN SENDOWO II NGLIPAR	Jumlah Pembangunan ruang laboratorium komputer	N/A	0				0	
		SDN NGALANG I GEDANGSARI	Jumlah ruang pusat sumber pendidikan inklusif yang dibangun	N/A	0				0	
		SD MUHAMMADIYAH BOGOR PLAYEN, SDN SENDOWO II NGLIPAR, SDN NGALANG I GEDANGSARI	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	150.000.000,00	SD MUHAMMADIYAH BOGOR PLAYEN, SDN SENDOWO II NGLIPAR, SDN NGALANG I GEDANGSARI	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (SPM)	0	0,00	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah Pembangunan ruang guru yang selesai	N/A	0	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah Pembangunan ruang guru yang selesai	N/A	0	
		SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	1	648.264.000,00	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah Ruang Sekolah/TU yang selesai dibangun	0	0,00	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	SDN BARAN 1	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun	N/A	0	SDN BARAN 1	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun	N/A	0	
		SDN BARAN 1	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	1	79.033.000,00	SDN BARAN 1	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	0	0,00	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun	N/A	0	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun	N/A	0	
		SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Dibangun	1	618.849.000,00	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Dibangun	0	0,00	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah toilet (jamban) beserta sanitasinya yang dibangun	N/A	0	SDN SAWAH PANGGANG	Jumlah toilet (jamban) beserta sanitasinya yang dibangun	N/A	0	
		SDN WONOSARI II WONOSARI	Jumlah Pagar sekolah yang selesai dibangun	N/A	0	SDN WONOSARI II WONOSARI	Jumlah Pagar sekolah yang selesai dibangun		0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	SDN SAWAH PANGGANG, SDN WONOSARI II WONOSARI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	1.261.317.000,00	SDN SAWAH PANGGANG, SDN WONOSARI II WONOSARI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0	0,00	
		Disdik	- Jumlah rumah dinas sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun	N/A	0	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Penjaga Sekolah			0	
		Disdik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	150.000.000,00	Disdik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0	0,00	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	SDN SAWAH SAPTOSARI	Jumlah ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T (SPM)	N/A	0	
		SD N Gatak dan SD Mendang	Jumlah ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab (SD N Gatak dan SD Mendang) dari PIS	N/A	0				0	
		SDN SAWAH SAPTOSARI	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	9.915.449.000,00	20402393 SDN JASEM SEMANU, 20402374 SDN KARANGNONGKO III PURWOSARI, 20402504 SDN CANDIBARU I KARANGMOJO	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat (SPM)	0	0,00	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	SDN BLEBERAN PLAYEN	Jumlah ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab	N/A	0	
		20402546-SDN GEDANGKLUTU K SAPTOSARI	Jumlah ruang kepala sekolah dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab	N/A	0	20402546-SDN GEDANGKLUTUK SAPTOSARI	Jumlah ruang kepala sekolah dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab	N/A	0	
		20402496-SDN BLEBERAN PLAYEN	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang kesehatan sekolah yang di rehab	2	259.306.000,00	20402546-SDN GEDANGKLUTUK SAPTOSARI	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang kesehatan sekolah yang di rehab	0	0,00	
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	20402496-SDN BLEBERAN PLAYEN	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	1	94.840.000,00	20402496-SDN BLEBERAN PLAYEN	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	0	0,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	SDN GETAS I PLAYEN	Jumlah ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang/berat, yang direhab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	SDN GETAS I PLAYEN	Jumlah ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang/berat, yang direhab	N/A	0	0
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN KARANGNONGKO O III PURWOSARI	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN KARANGNONGKO O III PURWOSARI	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	N/A	0	0,00
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	SDN KARANGNONGKO O III PURWOSARI	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang selesai direhab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	SDN KARANGNONGKO O III PURWOSARI	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang selesai direhab	N/A	0	0,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	SDN PIYAMAN I WONOSARI	- Jumlah pengadaan mebelair ruang kelas dari dana DAU dalam rangka pemenuhan SNP	N/A	0	Pengadaan Mebel Sekolah	SDN PIYAMAN I WONOSARI	- Jumlah pengadaan mebelair ruang kelas dari dana DAU dalam rangka pemenuhan SNP	N/A	0	0
1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	SD N 410 Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	N/A	0	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	SD N 410 Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0	0	0,00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	SD Negeri Kec. Gedangsari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Giripanggung Tepus	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0	0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SD Negeri Kec. Girisubo	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Girisubo	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Karangmojo	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Karangmojo	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Ngawen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Ngawen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Nglipar	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Nglipar	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SD Negeri Kec. Paliyan	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Paliyan	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Panggang	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Panggang	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Patuk	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Patuk	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Playen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Playen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SD Negeri Kec. Ponjong	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Ponjong	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Purwosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Rongkop	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Rongkop	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Saptosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Saptosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Semanu	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SD Negeri Kec. Semin	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Semin	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Tanjungarsi	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Tanjungarsi	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Tepus	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Tepus	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Wonosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri)	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Wonosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta)	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
		Siswa retrieval ATS Miskin Se Kab Gunungkidul	- Jumlah perlengkapan (Sepatu, Tas, Seragam, Dasi, Ikat pinggang dll setahun sekali) siswa retrieval Anak Tidak Sekolah miskin usia sekolah kembali sekolah SD 505 orang yang tersedia dalam rangka pemenuhan SPM dan peningkatan IPM	N/A	0		Siswa retrieval ATS Miskin Se Kab Gunungkidul	- Jumlah perlengkapan (Sepatu, Tas, Seragam, Dasi, Ikat pinggang dll setahun sekali) siswa retrieval Anak Tidak Sekolah miskin usia sekolah kembali sekolah SD 505 orang yang tersedia dalam rangka pemenuhan SPM dan peningkatan IPM dan Jumlah Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus.	N/A	0		
							Siswa berkebutuhan khusus dan siswa miskin	Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus.	N/A			
							Siswa	Jumlah Pengadaan buku teks (kurikulum merdeka dan antikorupsi) dan non teks (SPM) 47.443	N/A			
		SD Negeri , SD Swasta, Siswa retrieval ATS Miskin Se Kab Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	48421	5.432.900.000,00		SD Negeri , SD Swasta, Siswa retrieval ATS Miskin Se Kab Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia (SPM)	0	0,00		
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	SD N 410 Sekolah	- Jumlah bangunan gedung dan ruangan yang terpelihara	N/A	0	Pemeliharaan Rutin dan ruangan Gedung dan Ruang				0		
		SD N 410 Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	409	45.000.000,00		SD N 410 Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0,00		
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SD N 410 Sekolah	- Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terpelihara	N/A	0	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		
		SD N 410 Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	409	45.000.000,00		SD N 410 Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0,00		
1.01.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan	- Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang di pelihara	N/A	0	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				0		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	25.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0,00	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa SD yang memperoleh beasiswa bakat prestasi (@500.000)	N/A	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa SD yang memperoleh beasiswa bakat prestasi (@500.000)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah siswa retrieval ATS penerima Beasiswa miskin (Gunungkidulcerdas) 505 orang @500.000 yang tersedia dalam rangka peningkatan IPM	N/A	0		Kalurahan Salam Patuk	Jumlah siswa retrieval ATS penerima Beasiswa miskin (Gunungkidulcerdas) 505 orang @500.000 yang tersedia dalam rangka peningkatan IPM (PIS 6 siswa)	N/A	0	
							Dinas Pendidikan	- Jumlah Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus (SPM)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	805	402.500.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (SPM)	1178	589.000.000,00	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SDN WONOSARI I WONOSARI	Jumlah Pengadaan jaringan listrik serta internet dalam rangka pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM)	N/A	0	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				0	
		SDN WONOSARI I WONOSARI	Jumlah Pengadaan server serta internet dalam rangka pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM)	N/A	0					0	
		SD CUWELU II SEMANU	Jumlah Komputer/PC dalam rangka pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM)	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	SD MUHAMMADIYAH SIDOREJO SEMIN		Jumlah pengadaan buku koleksi perpustakaan	N/A	0					0	
	SD TAMBAKROMO II, POJONG		Jumlah pengadaan Alat kesenian tradisional	N/A	0					0	
	SD PANGGANG I, PANGGANG		Jumlah pengadaan peralatan Seni Budaya	N/A	0					0	
	SD WILOSO II, PANGGANG		Jumlah Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	N/A	0					0	
	SDN MUH SIRAMAN WONOSARI, SD IT BINA INSANI PANGGANG, SD MUH KEMADANG TANJUNGSARI, SDN DAYAKAN II SEMANU, SDN KARANGASEM POJONG		Jumlah pengadaan Alat Kesenian Tradisional dari dana DAU	N/A	0					0	
	SDN WONOSARI II, WONOSARI		Jumlah pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi	N/A	0		Jetis Saptosari	Jumlah pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (PIS 1 Paket)	N/A	0	
	Dinas Pendidikan		Jumlah pengadaan media pendidikan	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	SDN PIYAMAN III WONOSARI,SDN NGEPOSARI II SEMANU,SDN TANCEP II NGAWEN,SDN PALIYAN II PALIYAN,SDN GIRIKARTO PANGGANG,SD N KAMAL WONOSARI,SDN SAMBENG 1 NGAWEN,SDN PANGGANG II PANGGANG,SD N KROPAK RONGKOP,SDN BARAN I RONGKOP,SDN TANCEP I NGAWEN,SDN BANJARHARIO TANJUNGSARI		- Jumlah belanja modal alat drumband dari dana DAU	N/A	0					0	
							Dinas Pendidikan	Jumlah Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan (SPM)	0		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SDN PIYAMAN III WONOSARI,SDN NGEPOSARI II SEMANU,SDN TANCEP II NGAWEN,SDN PALIYAN II PALIYAN,SDN GIRIKARTO PANGGANG,SD N KAMIAL WONOSARI,SDN SAMBENG 1 NGAWEN,SDN PANGGANG II PANGGANG,SD N KROPAK RONGKOP,SDN BARAN I RONGKOP,SDN TANCEP I NGAWEN,SDN BANJARHARIO TANJUNGSARI	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	11	13.007.120.000,00		Jetis Saptosari	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (SPM)	6	731.963.844,00	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	SD Negeri Kec. Gedangsari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				0	
		SD Negeri Kec. Girisubo	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Girisubo	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Karangmojo	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Karangmojo	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SD Negeri Kec. Ngawen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Ngawen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Nglipar	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Nglipar	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Paliyan	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Paliyan	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Panggang	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Panggang	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Patuk	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Patuk	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SD Negeri Kec. Playen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Playen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Ponjong	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Ponjong	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Purwosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Rongkop	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Rongkop	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Saptosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Saptosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Semanu	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SD Negeri Kec. Semin	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Semin	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Tanjungarsi	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Tanjungarsi	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri Kec. Tepus	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Tepus	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		SD Negeri kec. Wonosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri	N/A	0					0	
		SD Swasta Kec. Wonosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah peserta try out uji kompetensi SD menggunakan aplikasi CBT"	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah peserta try out uji kompetensi SD menggunakan aplikasi CBT"	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah peserta uji kompetensi sekolah SD menggunakan aplikasi CBT"	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah peserta uji kompetensi sekolah SD menggunakan aplikasi CBT"	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pembuatan soal try out uji kompetensi dan Uji kompetensi Sekolah	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pembuatan soal try out uji kompetensi dan Uji kompetensi Sekolah	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal try out uji kompetensi dan Uji kompetensi Sekolah	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal try out uji kompetensi dan Uji kompetensi Sekolah	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah buku induk yang tercetak"	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah buku induk yang tercetak"	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah raport kelas I yang tercetak	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah raport kelas I yang tercetak	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum SD"	N/A	0		Dinas Pendidikan	mengikuti workshop penyusunan Kurikulum Merdeka dan Implementasinya di Jember, ST "	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah kalender pendidikan yang tercetak"	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah kalender pendidikan yang tercetak"	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah yang melaksanakan PPDB Online"	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah yang melaksanakan PPDB Online"	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan soal dan pengembang soal Uji kompetensi Sekolah	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan soal dan pengembang soal Uji kompetensi Sekolah	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal pengendali mutu SD	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal pengendali mutu SD	N/A	0	
		Sekolah SD Negeri	- Jumlah biaya operasional pendidikan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah (43.453 Siswa x 25.000)	N/A	0		Sekolah SD Negeri	- Jumlah biaya operasional pendidikan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah (43.453 Siswa x 25.000)	N/A	0	
		Sekolah SD Negeri/swasta	- Jumlah blangko ijazah SD	N/A	0		Sekolah SD Negeri/swasta	- Jumlah blangko ijazah SD	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah SKHU SD	N/A	0		Dinas Pendidikan	- jumlah SKHU SD	N/A	0	
		MI gunungkidul	- Jumlah siswa MI yang mengikuti pelaksanaan ASPD	N/A	0		MI gunungkidul	-Jumlah siswa MI yang mengikuti pelaksanaan ASPD	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian/asesmen sekolah dasar	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian/asesmen sekolah dasar	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti ujian/asesmen akhir tahun kelas VI	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti ujian/asesmen akhir tahun kelas VI	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM)	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	150	4.900.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	0,00	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	- Jumlah sekolah yang mengikuti workshop akreditasi SD	N/A	0	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	- Jumlah Sekolah yang mengikuti workshop akreditasi SD	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	150	55.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0,00	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa yang mengikuti Kuis KIHAJAR kabupaten, propinsi dan nasional Jenjang SD	N/A	0	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa yang mengikuti Kuis KIHAJAR kabupaten, propinsi dan nasional Jenjang SD	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa yang mengikuti FLSN Tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa yang mengikuti FLSN Tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi PIP SD	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi PIP SD	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
		Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa yang mengikuti lomba pengembangan, minat, bakat istimewa Tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa yang mengikuti lomba pengembangan, minat, bakat istimewa Tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Jambore Karakter	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Jambore Karakter	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa yang mengikuti KSN Tingkat Kabupaten	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa yang mengikuti KSN Tingkat Kabupaten	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah yang Pelatihan Pembekalan Pembina FLSSN SD	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah yang Pelatihan Pembekalan Pembina FLSSN SD	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa SD yang mengikuti pembinaan karakter	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa SD yang mengikuti pembinaan karakter	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah Pembina KSN SD yang mengikuti pembinaan	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah Pembina KSN SD yang mengikuti pembinaan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1120	328.305.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1120	317.575.000,00	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Pramu Bakti Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 300 orang yang terfasilitasi	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Pramu Bakti Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 300 orang yang terfasilitasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Guru Agama Islam Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 300 orang yang terfasilitasi	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru Agama Islam Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 300 orang yang terfasilitasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Guru Penjaskes Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 300 orang yang terfasilitasi	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru Penjaskes Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 300 orang yang terfasilitasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Guru Kelas Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 1800 orang yang terfasilitasi	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru Kelas Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 1800 orang yang terfasilitasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Pengajaran formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SPM)			Dinas Pendidikan	Jumlah Pengajaran formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SPM)	600		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif (SPM)	15			
		Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	825	15.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SPM)	200	1.300.000,00		
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	- Jumlah Guru dan pengawas jenjang SD yang terfasilitasi sertifikasinya	N/A	0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SPM)	25	0		
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SPM)	5	0		
		Dinas Pendidikan	- Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK dengan aplikasi simpeg	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK dengan aplikasi simpeg	N/A	0		
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru menggunakan aplikasi UKG"	N/A	0					0		
		Dinas Pendidikan	- Jumlah Guru yang mengikuti diklat Kompetensi pendidik kelas atas dengan aplikasi UKG"	N/A	0					0		
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG jenjang SD"	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG jenjang SD"	N/A	0		
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec"	N/A	0					0		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan petugas perpustakaan"	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti SARASEHAN PANCASILA BAGI GURU (Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan) dan Publikasi Ilmiah Karya Inovatif Bagi Guru	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah Peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan PAKEM"	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah Peserta yang mengikuti dalam pelatihan PAKEM"	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan pengembangan guru IPA"	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan SPPI"	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan pengembangan bahasa Indonesia "	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti rakor kinerja guru dan kepala sekolah"	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti rakor kinerja guru dan kepala sekolah"	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kompetensi Pengawas"	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kompetensi pengawas"	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta mengikuti diklat PTK guru SD"	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta mengikuti diklat PTK SD"	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti seleksi guru, kepala sekolah dan Pengawas"	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti dalam kegiatan Pelatihan guru pengembang matematika"	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah guru yang mengikuti bimtek guru menulis"	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi FIG	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan SPPI	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru PKB melalui PKP	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta yang mengikuti kinerja kepala sekolah,	N/A	0		Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta yang mengikuti kinerja kepala sekolah,	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Bimtek PKKS	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat CPAK	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12653	774.109.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (SPM)	640	448.320.000,00	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Evaluasi Diri Sekolah menuju 8 SNP menggunakan aplikasi EDS	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Evaluasi Diri Sekolah dengan Rapor Pendidikan dalam rangka persiapan akreditasi sekolah	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti diklat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti Fasilitas Sekolah SD menjadi Sekolah penggerak	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta yang mengikuti lomba gugus	N/A	0		Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta yang mengikuti lomba gugus	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	-Jumlah sekolah yang mengikuti lomba budaya mutu	N/A	0		Dinas Pendidikan	-Jumlah sekolah yang mengikuti lomba budaya mutu	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Pembinaan Ketenagaan dan Kelembagaan SD	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah sekolah yang mengikuti diklat sekolah penggerak	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah sekolah yang mengikuti Workshop Sekolah Penggerak	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah dan manajemen sekolah - Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS PUSAT) Lenjang SD	468	263.030.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah - Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS PUSAT) Lenjang SD	468	145.240.000,00	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS - Jumlah tim manajemen BOS Tingkat Kecamatan - Jumlah peserta workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	N/A	43.876.150.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS - Jumlah tim manajemen BOS Tingkat Kecamatan	N/A	41.408.309.140,00	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	25	125.000.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	468	183.523.500,00	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0	0,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0	0,00	
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0,00	
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0,00	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop penggunaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan pendukung Implementasi Kurikulum Merdeka	N/A		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.01.02.2.01.36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	0,00	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop penyusunan media pembelajaran jenjang SD pendukung Implementasi Kurikulum Merdeka untuk konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah peserta	N/A	150	10.350.000,00	
1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Workshop penggunaan aplikasi-aplikasi bidang pendidikan jenjang SD (vervalpd, vervalisp, dapodik, survei lingkungan belajar, Program Mandiri) Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	N/A	72	156.374.900,00	
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SD)	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SD)	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah (SPM) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SPM)	238	450	82.578.000,00	
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM)	N/A	1	50.890.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
								Jumlah Sosialisasi dan advokasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan	N/A		
								Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (SPM)	0	0,00	
1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop Literasi dan Numerasi (Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan	N/A		
								Jumlah Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak (SPM)	N/A		
								Jumlah Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SPM)	N/A		
								Jumlah Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	N/A		
								Jumlah Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	N/A		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan (SPM)	0	0,00	
1.01.02.2.01.41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi (SPM)	1	9.500.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.01.43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan advokasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (SPM)	2	21.000.000,00	
1.01.02.2.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Giripanggung Tepus	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) (PIS 32 paket)	N/A		0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Siswa retrieval ATS Miskin Se Kab Gunungkidul	- Jumlah perlengkapan (Sepatu,Tas,Seragam, Dasi, Ikat pinggang dll setahun sekali) siswa retrieval Anak Tidak Sekolah miskin usia sekolah kembali sekolah SD 505 orang yang tersedia dalam rangka pemenuhan SPM dan peningkatan IPM	N/A		0	
							Siswa berkebutuhan khusus dan siswa miskin	Jumlah Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus (SPM) 2.355 warga	N/A			
							Siswa	Jumlah Pengadaan buku teks (kurikulum merdeka dan antikorupsi) dan non teks (SPM) 47.443	N/A			
							SD Negeri , SD Swasta, Siswa retrieval ATS Miskin Se Kab Gunungkidul	Jumlah Perlangkapan Peserta Didik yang tersedia (SPM)	1180		350.000.000,00	
1.01.02.2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop Literasi dan Numerasi (Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan) (SPM)	N/A			
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitas kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak (SPM)	N/A			

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan (SPM)	675	237.000.000,00	
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						Dinas Pendidikan	"1. Jumlah sekolah peserta try out uji kompetensi SD menggunakan aplikasi CBT"	N/A	0	
							Dinas Pendidikan	"2. Jumlah sekolah peserta uji kompetensi sekolah SD menggunakan aplikasi CBT"	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pembuatan soal try out uji kompetensi dan Uji kompetensi Sekolah	N/A		0	
						Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal try out uji kompetensi dan Uji kompetensi Sekolah	N/A		0	
						Dinas Pendidikan	"- Jumlah buku induk yang tercetak"	N/A		0	
						Dinas Pendidikan	- Jumlah raport kelas I yang tercetak	N/A		0	
						Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan Kurikulum Merdeka dan implementasinya jenjang SD "	N/A		0	
						Dinas Pendidikan	"- Jumlah kalender pendidikan yang tercetak"	N/A		0	
						Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah yang melaksanakan PPDB Online"	N/A		0	
						Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan soal dan pengembang soal Uji kompetensi Sekolah	N/A		0	
						Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal pengendali mutu SD	N/A		0	
						Sekolah SD Negeri	- Jumlah biaya operasional pendidikan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah (43.453 Siswa x 25.000)	N/A		0	
						Sekolah SD Negeri/swasta Dinas Pendidikan	- jumlah blangko ijazah SD	N/A		0	
						Dinas Pendidikan	- jumlah SKHU SD	N/A		0	
						MI gunungkidul	-Jumlah siswa MI yang mengikuti pelaksanaan ASPD	N/A		0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Dinas Pendidikan	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian/asesmen sekolah dasar	N/A		0	
							Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti ujian/asesmen akhrit tahun kelas VI	N/A		0	
							Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM)	N/A		0	
							Dinas Pendidikan	Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	N/A		0	
							Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		468	564.860.000,00	
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						20402504 SDN CANDIBARU I KARANGMOJO, 20400880 SDN Wonosari I	Jumlah Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T (SPM)	N/A		0	
							20402504 SDN CANDIBARU I KARANGMOJO, 20400880 SDN Wonosari I	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat (SPM)		4	597.347.800,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi A	104	69.681.381.000,00		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi A	104		40.172.104.411,00	
								Persentase SMP yang terakreditasi A	92,04			
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	SMP N 5 Panggang	- Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang selesai dibangun	N/A			SMP N 5 Panggang	- Jumlah Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T (SPM)	N/A		0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
		SMP N 5 Panggang	- Jumlah Pembangunan Halaman, Pagur DLL	N/A	0		SMP N 5 Panggang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (SPM)	0	0
		SMP N 5 Panggang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0	0		SMP N 5 Panggang	- Jumlah Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T (SPM)	1	0,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Playen	- Jumlah Ruang Kelas Baru sekolah negeri dan swasta yang selesai dibangun	N/A	0		SMP N 5 Panggang	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	0
		SMP Muh 2 Tepus	- Jumlah Ruang pusat sumber pendidikan inlusi sekolah negeri dan swasta yang selesai dibangun	N/A	0					0
		SMP Muh 2 Tepus, SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Playen	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	300.000.000,00		SMP N 5 Panggang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (SPM)	0	0,00
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	SMP N 2 Patuk	- Jumlah ruang guru, kepala sekolah dan TU yang selesai dibangun	N/A	0		SMP N 2 Patuk	- Jumlah ruang guru, kepala sekolah dan TU yang selesai dibangun	N/A	0
		SMP N 2 Patuk	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	150.000.000,00		SMP N 2 Patuk	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	SMP N 2 Semin	- Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang selesai dibangun	N/A	0		SMP N 2 Semin	- Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang selesai dibangun	N/A	0
		SMP N 2 Semin	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	466.694.000,00		SMP N 2 Semin	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0,00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	SMP Negeri 2 Tanjungsari	- Jumlah Ruang Perpustakaan sekolah negeri dan swasta yang dibangun	N/A	0		SMP Negeri 2 Tanjungsari	- Jumlah Ruang Perpustakaan sekolah negeri dan swasta yang dibangun	N/A	0
		SMP Negeri 2 Tanjungsari	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	2.432.400.000,00		SMP Negeri 2 Tanjungsari	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	SMP N 3 Saptosari	- Jumlah Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sekolah Negeri dan swasta yang dibangun	N/A	0		SMP N 3 Saptosari	- Jumlah Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sekolah Negeri dan swasta yang dibangun	N/A	0
		SMP NEGERI 4 PONJONG	- Jumlah ruang Lab. Komputer sekolah negeri dan swasta yang dibangun	N/A	0		SMP NEGERI 4 PONJONG	- Jumlah ruang Lab. Komputer sekolah negeri dan swasta yang dibangun	N/A	0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	SMP NEGERI 4 PONJONG, SMP N 3 Saptosari	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	3.830.448.000,00	SMP NEGERI 4 PONJONG, SMP N 3 Saptosari	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	0,00	
		SMP Negeri 4 Wonosari	-Jumlah Ruang AULA sekolah Negeri yang selesai dibangun dari dana DAU	N/A	0	SMP Negeri 4 Wonosari	-Jumlah Ruang AULA sekolah Negeri yang selesai dibangun dari dana DAU	N/A	0	
		SMP Negeri 4 Wonosari	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0	150.000.000,00	SMP Negeri 4 Wonosari	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0	0,00	
1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah	Muhammadiyah- AI Mujahidin Playen SMP	- Jumlah asrama sekolah yang selesai dibangun	N/A	0	SMP Muhammadiyah AI Mujahidin Playen	- Jumlah asrama sekolah yang selesai dibangun	N/A	0	
		Muhammadiyah AI Mujahidin Playen	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1	50.000.000,00	SMP Muhammadiyah AI Mujahidin Playen	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0	0,00	
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	SMPN 1 Girisubo	- Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang selesai dibangun	N/A	0	SMPN 1 Girisubo	- Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang selesai dibangun	N/A	0	
		SMPN 2 Rongkop	- Jumlah rumah dinas guru yang selesai dibangun	N/A	0	SMPN 2 Rongkop	- Jumlah rumah dinas guru yang selesai dibangun	N/A	0	
		SMPN 3 Girisubo	-Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang selesai dibangun	N/A	0	SMPN 3 Girisubo	- Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang selesai dibangun	N/A	0	
		SMPN 3 Girisubo, SMPN 2 Rongkop, SMPN 1 Girisubo	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3	50.000.000,00	SMPN 3 Girisubo, SMPN 2 Rongkop, SMPN 1 Girisubo	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0	0,00	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMP Negeri 1 Tepus	- Jumlah Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya sekolah negeri swasta yang dibangun	N/A	0	SMP Negeri 1 Tepus	- Jumlah Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya sekolah negeri swasta yang dibangun	N/A	0	
		SMP Negeri 1 Tepus	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	1.029.966.000,00	SMP Negeri 1 Tepus	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0	0,00	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	SMPN 3 Girisubo	- Jumlah rehabilitasi gedung sekolah	N/A	0	SMPN 3 Girisubo	- Jumlah rehabilitasi gedung sekolah	N/A	0	
		SMPN 3 Girisubo	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	85.233.000,00	SMPN 3 Girisubo	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SMP Muhammadiyah 1 Wonosari	-Jumlah Ruang kelas sekolah swasta yang selesai direhab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SMP Negeri 2 Playen, SMP Muhammadiyah 1 Wonosari	- Jumlah Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T (SPM)	0	0	0
		SMP Negeri 2 Playen	-Jumlah Ruang kelas sekolah negeri yang direhab	N/A	0						0
		SMP Negeri 2 Playen, SMP Muhammadiyah 1 Wonosari	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	1.575.504.000,00		SMP Negeri 2 Playen, SMP Muhammadiyah 1 Wonosari	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (SPM)	0	0,00	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	SMP Negeri 3 Karangmojo	- Jumlah Rehabilitasi ruang guru sekolah sekolah negeri	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	SMP Negeri 3 Karangmojo	- Jumlah Rehabilitasi ruang guru sekolah sekolah negeri	N/A	0	0
		SMP Negeri 3 Karangmojo	- Jumlah Rehabilitasi ruang kepala sekolah sekolah negeri	N/A	0		SMP Negeri 3 Karangmojo	- Jumlah Rehabilitasi ruang kepala sekolah sekolah negeri	N/A	0	0
		SMP Muhammadiyah 2 Paliyan	- Jumlah Rehabilitasi ruang guru sekolah sekolah swasta	N/A	0		SMP Muhammadiyah 2 Paliyan	- Jumlah Rehabilitasi ruang guru sekolah sekolah swasta	N/A	0	0
		SMP Muhammadiyah 2 Paliyan	- Jumlah Rehabilitasi ruang kepala sekolah sekolah swasta	N/A	0		SMP Muhammadiyah 2 Paliyan	- Jumlah Rehabilitasi ruang kepala sekolah sekolah swasta	N/A	0	0
		SMP Negeri 3 Karangmojo	- Jumlah Rehabilitasi ruang TU sekolah negeri	N/A	0		SMP Negeri 3 Karangmojo	- Jumlah Rehabilitasi ruang TU sekolah negeri	N/A	0	0
		SMP Muhammadiyah Playen	- Jumlah Rehabilitasi ruang TU sekolah swasta	N/A	0		SMP Muhammadiyah Playen	- Jumlah Rehabilitasi ruang TU sekolah swasta	N/A	0	0
		Muhammadiyah Playen, SMP Negeri 3 Karangmojo, SMP Muhammadiyah 2 Paliyan	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	3.212.631.000,00		SMP Muhammadiyah Playen, SMP Negeri 3 Karangmojo, SMP Muhammadiyah 2 Paliyan	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0,00	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	SMP Muhammadiyah Ponjong	- Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang selesai direhab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	SMP Muhammadiyah Ponjong	- Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang selesai direhab	N/A	0	0
		SMP Muhammadiyah Ponjong	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	791.939.000,00		SMP Muhammadiyah Ponjong	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0,00	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	SMP Muhammadiyah Ponjong	Jumlah perpustakaan sekolah swasta yang direhab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	SMP Muhammadiyah Ponjong	Jumlah perpustakaan sekolah swasta yang direhab	N/A	0	0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMP Negeri 1 Girisubo	Jumlah perpustakaan sekolah negeri yang direhab	N/A	0		SMP Negeri 1 Girisubo	Jumlah perpustakaan sekolah negeri yang direhab	N/A	0	
		SMP Negeri 1 Girisubo, SMP Muhammadiyah Ponjong	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat "- Jumlah ruang laboratorium ilmu pengetahuan Alam (IPA) sekolah swasta yang direhab "	2	2.917.690.000,00		SMP Muhammadiyah Ponjong	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat "- Jumlah ruang laboratorium ilmu pengetahuan Alam (IPA) sekolah swasta yang direhab "	0	0,00	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	SMP MUHAMMADIYAH PLAYEN	laboratorium ilmu pengetahuan Alam (IPA) sekolah swasta yang direhab "	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	SMP MUHAMMADIYAH PLAYEN	laboratorium ilmu pengetahuan Alam (IPA) sekolah swasta yang direhab "	N/A	0	
		SMP Negeri 2 Playen	"- Jumlah ruang laboratorium komputer sekolah negeri yang direhab"	N/A	0		SMP Negeri 2 Playen	"- Jumlah ruang laboratorium komputer sekolah negeri yang direhab"	N/A	0	
		SMP Negeri 2 Playen	"- Jumlah ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah negeri yang direhab "	N/A	0		SMP Negeri 2 Playen	"- Jumlah ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah negeri yang direhab "	N/A	0	
		SMP Negeri 3 Gedangsari	"- Jumlah ruang laboratorium Bahasa sekolah negeri yang direhab "	N/A	0		SMP Negeri 3 Gedangsari	"- Jumlah ruang laboratorium Bahasa sekolah negeri yang direhab "	N/A	0	
		SMP Negeri 3, SMP Negeri 2 Playen, SMP Muhammadiyah Playen	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	1.969.362.000,00		SMP Negeri 3, SMP Negeri 2 Playen, SMP MUHAMMADIYAH PLAYEN	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0,00	
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	SMP Negeri 2 Ponjong	"- Jumlah ruang serba guna/aula yang selesai direhab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	SMP Negeri 2 Ponjong	"- Jumlah ruang serba guna/aula yang selesai direhab	N/A	0	
		SMP Negeri 2 Ponjong	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1	0		SMP Negeri 2 Ponjong	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0	0	
1.01.02.2.02.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	SMPN 1 Girisubo	"- Jumlah asrama sekolah yang selesai direhab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	SMPN 1 Girisubo	"- Jumlah asrama sekolah yang selesai direhab	N/A	0	
		SMPN 1 Girisubo	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0		SMPN 1 Girisubo	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	SMPN 1 Girisubo	"- Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang selesai di rehab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	SMPN 1 Girisubo	"- Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang selesai di rehab	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMPN 1 Girisubo	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0		SMPN 1 Girisubo	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
		SMP Negeri 1 Tepus	- Jumlah Jamban Siswa/Guru sekolah Negeri yang direhab	N/A	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMP Negeri 1 Tepus	- Jumlah lamban Siswa/Guru sekolah Negeri yang direhab	N/A	0	
		SMP Muhammadiyah 1 Wonosari	- Jumlah Jamban Siswa/Guru sekolah Swasta yang direhab	N/A	0		SMP Muhammadiyah 1 Wonosari	- Jumlah Jamban Siswa/Guru sekolah Swasta yang direhab	N/A	0	
		Tanjungsari, SMP Negeri 3 Nglipar, SMP Negeri 3 Wonosari, SMP Negeri 4 Negeri 4 Wonosari, SMP Negeri 4 Playen, SMP Negeri 3 Patuk, SMP Karangmojo, SMP Negeri 3 Semanu	-Jumlah lapangan upacara sekolah negeri/swasta yang direhab dari dana DAU	N/A	0		SMP Negeri 2 Tanjungsari, SMP Negeri 3 Nglipar, SMP Negeri 3 Wonosari, SMP Negeri 4 Negeri 4 Wonosari, SMP Negeri 4 Playen, SMP Negeri 3 Patuk, SMP Negeri 3 Karangmojo, SMP Negeri 3 Semanu	-Jumlah lapangan upacara sekolah negeri/swasta yang direhab dari dana DAU	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	SMP Negeri 3 Semanu, SMP Negeri 3 Tanjungarsi, SMP Negeri 3 Ponjong, SMP Negeri 1 Purwosari, SMP Negeri 3 Tepus, SMP Negeri 3 Girisubo, SMP Negeri 4 Nglipar, SMP Negeri 1 Girisubo, SMP Negeri 4 Wonosari, SMP Negeri 4 Ponjong, SMP Negeri 1 Saptosari, SMP Negeri 1 Nglipar, SMP Negeri 1 Gedangsari	SMP Negeri 3 Semanu, SMP Negeri 3 Tanjungarsi, SMP Negeri 3 Ponjong, SMP Negeri 1 Purwosari, SMP Negeri 3 Tepus, SMP Negeri 3 Girisubo, SMP Negeri 4 Wonosari, SMP Negeri 4 Ponjong, SMP Negeri 1 Saptosari, SMP Negeri 1 Nglipar, SMP Negeri 1 Gedangsari	-Jumlah pagar sekolah negeri/swasta yang direhab N/A dari dana DAU	0	0			-Jumlah pagar sekolah negeri/swasta yang direhab dari dana DAU	N/A	0	
	SMP Negeri 3 Semanu, SMP Negeri 3 Tanjungarsi, SMP Negeri 3 Ponjong, SMP Negeri 1 Purwosari, SMP Negeri 3 Tepus, SMP Negeri 3 Girisubo, SMP Negeri 4 Wonosari, SMP Negeri 4 Ponjong, SMP Negeri 1 Saptosari, SMP Negeri 1 Nglipar, SMP Negeri 1 Gedangsari	SMP Negeri 3 Semanu, SMP Negeri 3 Tanjungarsi, SMP Negeri 3 Ponjong, SMP Negeri 1 Purwosari, SMP Negeri 3 Tepus, SMP Negeri 3 Girisubo, SMP Negeri 4 Wonosari, SMP Negeri 4 Ponjong, SMP Negeri 1 Saptosari, SMP Negeri 1 Nglipar, SMP Negeri 1 Gedangsari	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19	992.464.000,00			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	1.810.509.188,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	SMP Negeri 3 Wonosari, SMP Negeri 1 Paliyan, SMP Negeri 1 Panggang, SMP Negeri 3 Panggang, SMP Negeri 4 Panggang, SMP Negeri 2 Purwosari, SMP Negeri 1 Paliyan, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 3 Playen, SMP Negeri 3 Patuk	-Jumlah Mebeler sekolah Negeri dan Swasta yang diadakan	N/A	0	Pengadaan Mebel Sekolah	SMP Negeri 3 Wonosari, SMP Negeri 1 Paliyan, SMP Negeri 1 Panggang, SMP Negeri 3 Panggang, SMP Negeri 4 Panggang, SMP Negeri 2 Purwosari, SMP Negeri 1 Paliyan, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 3 Playen, SMP Negeri 3 Patuk	-Jumlah Mebeler sekolah Negeri dan Swasta yang diadakan	N/A	0	
		SMP Negeri 3 Wonosari, SMP Negeri 1 Paliyan, SMP Negeri 1 Panggang, SMP Negeri 3 Panggang, SMP Negeri 4 Panggang, SMP Negeri 2 Purwosari, SMP Negeri 1 Paliyan, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 3 Playen, SMP Negeri 3 Patuk	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	16	2.058.263.000,00		SMP Negeri 3 Wonosari, SMP Negeri 1 Paliyan, SMP Negeri 1 Panggang, SMP Negeri 3 Panggang, SMP Negeri 4 Panggang, SMP Negeri 2 Purwosari, SMP Negeri 1 Paliyan, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 3 Playen, SMP Negeri 3 Patuk	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0	0,00	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	SMPN 3 Tanjung Sari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Serut Gedangsari	Jumlah Siswa miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 2 Rongkop	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus (SPM)	N/A	0	
		SMPN 4 Nglipar	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Girisubo	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 5 Patuk	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 5 Ngawen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 4 Semin	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Girisubo	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Purwosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 4 Panggang	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Panggang	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Saptosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar Jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 4 Ngawen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Nglipar	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Nglipar	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Nglipar	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Semin	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 2 Semin	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Semin	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Semanu	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Semanu	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Semanu	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Girisubo	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 5 Panggang	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Rongkop	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 1 Purwosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Panggang	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Panggang	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar Jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Karangmojo	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Karangmojo	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Karangmojo	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Paliyan	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Paliyan	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 4 Pongjone	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Pongjone	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Pongjone	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Pongjone	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Gedangsari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Gedangsari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Gedangsari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Ngawene	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 1 Ngawen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 4 Playen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Playen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar Jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Playen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Playen	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Tanjung Sari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Tanjung Sari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Tepus	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 2 Tepus	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Tepus	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Saptosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar Jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Saptosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 4 Patuk	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Patuk	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Patuk	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Patuk	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 4 Wonosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 3 Wonosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 2 Wonosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar Jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		SMPN 1 Wonosari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis	N/A	0					0	
		Siswa Retrieval ATS bersekolah Se Kab Gunungkidul	- Jumlah bantuan perlengkapan (Sepatu, Tas, Seragam, Dasi, Ikat pinggang dll setahun sekali) Siswa Retrieval Anak Tidak Sekolah miskin usia sekolah SMP 461 orang yang kembali sekolah dalam rangka pemenuhan SPM	N/A	0					0	
		SMP N Gunungkidul, Siswa Retrieval ATS bersekolah Se Kab Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	19585	5.011.500.000,00		SMP N Gunungkidul, Siswa Retrieval ATS bersekolah Se Kab Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (SPM)		0	0,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa penerima Beasiswa bakat dan prestasi SMP (@ Rp. 500.000)	N/A	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kalurahan salam patuk	Jumlah siswa penerima Beasiswa bakat dan prestasi SMP (@ Rp. 500.000) (PIS 6 siswa)	N/A		0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
		Dinas Pendidikan	Jumlah penerima Beasiswa miskin (Gunungkidulcerdas) siswa Retrieval Anak Tidak Sekolah kembali sekolah SMP miskin 461 orang @ 500.000 yang tersedia dalam rangka peningkatan IPM	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus (SPM)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	811	1.459.800.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (SPM)	933	469.300.000,00	
1.01.02.2.02.34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					Dinas Pendidikan	Jumlah Pengadaan buku teks (kurikulum merdeka dan antikorupsi) dan non teks (SPM)	0		
						Dinas Pendidikan	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (SPM)	0	0,00	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	- Dinas Pendidikan	-Jumlah pengadaan komputer client untuk sekolah swasta dari dana DAU untuk mendukung MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak dan AKM)	N/A	0	- Dinas Pendidikan	Jumlah Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan (SPM)	N/A	0	
		- Dinas Pendidikan	-Jumlah pengadaan server untuk sekolah swasta dari dana DAU untuk mendukung MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM)	N/A	0				0	
		- Dinas Pendidikan	"-jumlah jaringan komputer sekolah swasta yang diadakan dari dana DAU"	N/A	0				0	
		- Dinas Pendidikan	"-jumlah jaringan komputer sekolah negeri yang diadakan dari dana DAU"	N/A	0				0	
		SMP Muhammadiyah 1 Wonosari	"-jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika sekolah swasta "	N/A	0				0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	SMP Muhammadiyah 1 Wonosari		"-Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi sekolah swasta "	N/A	0					0	
	SMP Muhammadiyah 1 Wonosari		"- Jumlah pengadaan peralatan laboratorium komputer sekolah swasta "	N/A	0					0	
	SMP Muhammadiyah 1 Wonosari		"-Jumlah media pendidikan yang diadakan sekolah swasta "	N/A	0					0	
	- Dinas Pendidikan		-Jumlah komputer server sekolah negeri yang diadakan dari dana DAU untuk mendukung pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak dan AKM)	N/A	0					0	
	- Dinas Pendidikan		-Jumlah komputer client sekolah negeri yang diadakan dari dana DAU untuk mendukung pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM)	N/A	0					0	
	- Dinas Pendidikan		-Jumlah pengadaan gamelan sekolah negeri dan swasta dari dana DAU	N/A	0					0	
	SMP Negeri 2 Playen		"-Jumlah Peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika sekolah Negeri "	N/A	0					0	
	SMP Negeri 2 Playen		"- Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi sekolah negeri yang diadakan"	N/A	0					0	
	SMP Negeri 2 Playen		"-Jumlah pengadaan peralatan laboratorium komputer sekolah negeri "	N/A	0					0	
	SMP Negeri 2 Playen		"-Jumlah sarana seni budaya yang diadakan sekolah negeri dan swasta "	N/A	0					0	
	SMP Negeri 2 Playen		"-Jumlah media pendidikan yang diadakan sekolah negeri"	N/A	0					0	
	- Dinas Pendidikan		-Jumlah Peralatan Drumband sekolah Negeri/Swasta yang diadakan dari dana DAU	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	- Dinas Pendidikan		-Jumlah Alat Musik sekolah Negeri/Swasta yang diadakan dari dana DAU	N/A	0					0	
	Dinas Pendidikan		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	46	3.562.840.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (SPM)	1		115.327.000,00	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	SMPN 3 Tanjung Sari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				0	
	SMPN 2 Rongkop		Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
	SMPN 4 Nglipar		Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
	SMPN 2 Girisubo		Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
	SMPN 5 Patuk		Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
	SMPN 5 Ngawen		Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
	SMPN 4 Semin		Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 3 Girisubo	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
		SMPN 2 Purwosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
		SMPN 4 Panggang	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
		SMPN 3 Panggang	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
		SMPN 3 Saptosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
		SMPN 4 Ngawen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
		SMPN 3 Nglipar	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	
		SMPN 2 Nglipar	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 1 Nglipar	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 3 Semin	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Semin	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Semin	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 3 Semanu	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Semanu	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Semanu	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Girisubo	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 5 Panggang	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Rongkop	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Purwosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Panggang	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Panggang	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 3 Karangmojo	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Karangmojo	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Karangmojo	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 2 Paliyan	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Paliyan	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 4 Pongjong	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 3 Pongjong	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Pongjong	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Pongjong	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 3 Gedangsari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Gedangsari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 1 Gedangsari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 3 Ngawen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Ngawen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 4 Playen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 3 Playen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Playen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Playen	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Tanjungsari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 1 Tarjungsari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 3 Tepus	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Tepus	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Tepus	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Saptosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Saptosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 4 Patuk	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 3 Patuk	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SMPN 2 Patuk	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Patuk	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 4 Wonosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 3 Wonosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 2 Wonosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		SMPN 1 Wonosari	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri.	N/A	0					0	
		Sekolah	- Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Swasta	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah guru & tenaga kependidikan yang mengikuti lomba Aplikasi Mobile tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti workshop pembelajaran gasing (matematika dan fisika)"	N/A	0		Dinas Pendidikan	"-Jumlah peserta yang mengikuti workshop Penyusunan Kurikulum Merdeka dan implementasinya"	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"-Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan kurikulum"	N/A	0		Dinas Pendidikan	"-Jumlah peserta yang mengikuti workshop Implementasi Kurikulum Merdeka dan implementasinya"	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi GNPWB"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti TOT"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi evaluasi akhir peserta didik"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tes pengendali mutu"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti Penilaian harian, tengah semester, akhir semester sekolah menengah pertama"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimtek batik"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek TOT Pembelajaran dan penilaian berbasis IT"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penyusunan kisi-kisi mengacu Penilaian Instrumen Terstandar"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penyusunan soal mengacu Penilaian Instrumen Terstandar"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek analisis telaah soal mengacu Penilaian Instrumen Terstandar"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
	Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti workshop PPDB jenjang SMP"	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti workshop PPDB jenjang SMP"	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	"- Jumlah cetak kalender pendidikan"	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah cetak kalender pendidikan"	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	"- Jumlah cetak pedoman PPDB"	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah cetak pedoman PPDB"	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	"- Jumlah cetak sampel raport sekolah negeri dan swasta"	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah cetak sampel raport sekolah negeri dan swasta"	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	"- Jumlah cetak buku induk"	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah cetak buku induk siswa"	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop CBT	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop CBT	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bedah Asesment	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop Bedah Asesment	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengelolaan Penilaian Online	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop Pengelolaan Penilaian Online	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengelolaan Lingkungan Belajar yang kondusif	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop Pengelolaan Lingkungan Belajar yang kondusif	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Pendampingan Strategi Pemenuhan SNP	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop Pendampingan Strategi Pemenuhan SNP	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pembuatan Aplikasi Mobile	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop Pembuatan Aplikasi Mobile	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM)"	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM)"	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	Jumlah Kepala sekolah/guru yang meningkatkan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	N/A	0		
	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian.	24482	9.512.655.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian.	0	0,00		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SMP Se-Kab. Gunungkidul	-Jumlah jenis barang dan jasa pemenuhan 7 Standar Nasional Pendidikan jenjang SMP "- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi akreditasi	N/A	0	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi akreditasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tindak lanjut akreditasi	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	111	45.200.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		0,00	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta yang mengikuti Gala Siswa	N/A	0	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta yang mengikuti Gala Siswa	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta GSI tingkat nasional	N/A	0		Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta GSI tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta lomba video edukasi guru dan siswa tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0		Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta lomba video edukasi guru dan siswa tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa peserta kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten, propinsi, kabupaten dan nasional	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah siswa peserta kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten, propinsi, kabupaten dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti lomba FLSSN tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti lomba FLSSN tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kuis KIHAIJAR tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kuis KIHAIJAR tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti workshop gender	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti workshop gender	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti diklat OSIS	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti diklat OSIS	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti Gladi kawruh	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti Gladi kawruh	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti Jambore Pendidikan Karakter	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti Jambore Pendidikan Karakter	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti OPSI	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti OPSI	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan KKO	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan KKO	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4857	1.031.383.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.347	169.035.000,00	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	"- Jumlah ASN Pramu Bakti Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mendasar anjab yang telah ditetapkan	N/A	0	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengajaran formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SPM)	13	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah ASN Pengadministrasi Umum Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mendasar anjab yang telah ditetapkan	N/A	0	Dinas Pendidikan	Jumlah Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif (SPMI)	111	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah ASN Pengadministrasi Keuangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mendasar anjab yang telah ditetapkan	N/A	0	Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah ASN Petugas Keamanan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mendasar anjab yang telah ditetapkan	N/A	0	Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah ASN Pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mendasar anjab yang telah ditetapkan	N/A	0	Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	235	200.000.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SPMI)	50	1.300.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-Dinas Pendidikan	- Jumlah guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasinya	N/A		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-Dinas Pendidikan	Jumlah Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SPM)	10	0
		-Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg	N/A			-Dinas Pendidikan	Jumlah Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SPM)	5	0
		-Dinas Pendidikan	- Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK dengan menggunakan aplikasi simpeg	N/A			-Dinas Pendidikan	- Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK dengan menggunakan aplikasi simpeg		0
		-Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta kegiatan diklat peningkatan Kompetensi pendidik Guru jenjang SMP dengan aplikasi UKG	N/A			-Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti SARASEHAN PANCASILA BAGI GURU (Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan)		0
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG jenjang SMP"	N/A			-Dinas Pendidikan	- Jumlah Guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasinya dengan mengikuti pendidikan PPG jenjang SMP"		0
		-Dinas Pendidikan	- Jumlah guru yang mengikuti seleksi Olimpiade Guru tingkat kabupaten, propinsi dan nasional jenjang SMP	N/A						0
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti diklat penguatan pengawas jenjang SMP "	N/A			-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti diklat penguatan pengawas jenjang SMP "		0
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimtek guru 4 Mapel UN"	N/A						0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan PK/PLK sekolah penyelenggaraan inklusi"	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek petugas perpustakaan"	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan kinerja guru/Kepala Sekolah "	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"-Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kinerja kepala sekolah"	N/A	0		-Dinas Pendidikan	"-Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kinerja kepala sekolah"	N/A	0	
		-Dinas Pendidikan	"-Jumlah peserta yang mengikuti workshop MGMP"	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat kabupaten, propinsi dan nasional"	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti seleksi forum ilmiah guru tingkat kabupaten, propinsi dan nasional"	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan juara hasil seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi"	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti diklat guru pengembangan keprofesian berkelanjutan"	N/A	0		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti diklat guru pengembangan keprofesian berkelanjutan"	N/A	0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan profesi guru"	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang meningkatkan kompetensi pengawas "	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah guru yang mengikuti seleksi Olimpiade guru nasional jenjang SMP"	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan WOMS;	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Pelatihan Lesson Study;	N/A	0					0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah bagi Guru SMP;	N/A	0		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah bagi Guru SMP;	N/A	0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah bagi Kepala Sekolah;	N/A	0		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah bagi Kepala Sekolah;	N/A	0	
		-Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG PAJ jenjang SMP"	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5537	693.094.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (SPM)	433	305.255.000,00	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Evaluasi Diri Sekolah dalam rangka pemenuhan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan";	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Evaluasi Diri Sekolah Menggunakan aplikasi Rapor Pendidikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti review Evaluasi Diri Sekolah dalam rangka pemenuhan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan";	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Fasilitas Sekolah SMP menjadi Sekolah penggerak	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah yang mengikuti diklat sekolah penggerak	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah sekolah yang mengikuti diklat sekolah penggerak	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	336	306.642.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	100	109.668.500,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	- Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS PUSAT) jenjang SMP	N/A	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	- Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP Reguler dan Kinerja) jenjang SMP	N/A	0
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	N/A	0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	110	35.677.620.860,00
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0,00
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0,00
1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0,00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop penggunaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan pendukung Merdeka Belajar	N/A	
1.01.02.2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	0,00	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	110	18.300.000,00
								Jumlah Workshop penyusunan media pembelajaran jenjang SMP pendukung Program Merdeka Belajar		
								Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	72	13.450.000,00

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop penggunaan aplikasi-aplikasi bidang pendidikan jenjang SMP (vervalpd, vervalssp, dapodik, survei lingkungan belajar, Program Mandiri)	N/A		
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	0	0,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SPM)	110 N/A	18.850.000,00	
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM) 111 sekolah	N/A	4.500.000,00	
							Dinas Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan advokasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama,	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (SPM)	0	0,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop Literasi dan Numerasi (Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitas Kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak (SPM) 1492 guru	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitas pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SPM) 111 kepesek	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitas pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM) 111 orang	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SPM)	N/A		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.02.54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						Dinas Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan (SPM)	0	0,00	
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut (SPM) 111 orang	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas terlibat aktif dalam komunitas tersebut (SPM) 111 orang	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM) 111 orang	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	1	12.300.000,00	
1.01.02.2.02.55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, dan intoleransi					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, dan intoleransi	Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM) 111 sekolah	N/A		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Dinas Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan advokasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran (SPM) 111 sekolah	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (SPM)	3	18.600.000,00	
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						Dinas Pendidikan	"Jumlah peserta yang mengikuti workshop Penusunan Kurikulum Merdeka dan implementasinya"	N/A		0
							Dinas Pendidikan	"Jumlah peserta yang mengikuti workshop Implementasi Kurikulum Merdeka dan implementasinya"	N/A		0
							Dinas Pendidikan	"Jumlah peserta yang mengikuti workshop PPDB jenjang SMP"	N/A		0
							Dinas Pendidikan	"Jumlah cetak kalender pendidikan"	N/A		0
							Dinas Pendidikan	"Jumlah cetak pedoman PPDB"	N/A		0
							Dinas Pendidikan	"Jumlah cetak sampel raport sekolah negeri dan swasta"	N/A		0
							Dinas Pendidikan	"Jumlah cetak buku induk siswa"	N/A		0
							Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop CBT	N/A		0
							Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop Bedah Asesment	N/A		0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Dinas Pendidikan	Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	N/A	0	
							Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	24482	469.212.500,00	
1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru					Pembangunan Ruang Kelas Baru	SMP N 5 Panggang	- Jumlah Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T (SPM)	1	0	
							SMP N 5 Panggang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (SPM)	2	687.341.363,00	
1.01.02.2.02.60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop (Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan) (SPM) 1492 guru	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitas Kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak (SPM) 1492 guru	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitas pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SPM) 111 kepssek	N/A		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Dinas Pendidikan	Jumlah Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut (SPM) 111 orang	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut (SPM) 111 orang	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM) 111 orang	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan (SPM).	110	12.300.000,00	
1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						Serut Gedangsari	Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (PIS 20 Paket)	N/A		0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
								Jumlah Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus (SPM)	N/A	0	
								Jumlah Perengkapan Siswa yang Tersedia (SPM)	777	156.800.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi	762	23.605.936.000,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi	762	21.029.636.669,00	
								Persentase PAUD yang terakreditasi	63,98		
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Panggang	- Jumlah ruang kelas baru (RKB) yang selesai dibangun	N/A	0	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Panggang	- Jumlah penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini setiap desa	0	0	
								- Jumlah pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung di wilayah Kabupaten Gunungkidul	0	0	
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	- Jumlah Ruang Kelas Baru Lembaga swasta yang selesai dibangun dari dana DAU	N/A	0						
		Panggang	- Jumlah Ruang Kelas Baru TK Negeri yang terbangun.	N/A	0						

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	4	768.992.000,00		Panggang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun (SPM)	0	0,00	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Panggang	- Jumlah pembangunan toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya paud yang selesai dibangun	N/A	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Panggang	- Jumlah penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia	0	0	
		Panggang	- Jumlah area bermain beserta APE luar ruang lembaga PAUD yang selesai dibangun	N/A	0		Panggang	- Jumlah Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung/di wilayah 3T (SPM)	0	0	
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	- Jumlah area bermain beserta APE luar ruang Lembaga PAUD yang selesai dibangun dari dana DAU	N/A	0						
		Panggang	- Jumlah Toilet (Jamban) Lembaga PAUD yang selesai dibangun	N/A	0						

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	- Jumlah Pembangunan Pagar Lembaga PAUD yang terbangun dari dana DAU N/A	0	0						
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5	1.459.778.000,00		Panggang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (SPM)	0		0,00

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah rehabilitasi ruang kelas PAUD formal dan NON FORMAL dari DAU	N/A		Rehabilitasi Sedang/Berat 0 Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Semua Sekolah Paud	Jumlah Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (SPM)	N/A	0	
		Panggung	- Jumlah rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	N/A	0		Ponjong, Playen	Jumlah rehabilitasi ruang kelas PAUD dari DAU (SPM) (PIS bolodukuh ponjong 2 ruang, Getas playen 1 ruang. Total 3 ruang)	N/A	0	
		Panggung	- Jumlah bangunan penunjang yang selesai di rehab	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	1.010.047.000,00		Ponjong, Playen	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (SPM)	7	827.605.669,00	
								- Jumlah Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (SPM)	0	0	
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi	1	67.409.000,00	
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	Jumlah toilet (jamban) TK Negeri dan Swasta yang selesai direhabilitasi	N/A			Panggang	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi	1	139.066.000,00	
								Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
								- Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang terpelihara	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	- Jumlah Gedung yang terpelihara	N/A	0		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	- Jumlah Gedung yang terpelihara	N/A	0	
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	403	0		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan mebelair Lembaga swasta yang terbeli	N/A	0	0 Pengadaan Mebel PAUD	Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan mebelair Lembaga swasta yang terbeli	N/A	0	
		Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu	- Jumlah pengadaan mebelair TK Negeri yang terbeli	N/A	0	0	Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu	- Jumlah pengadaan mebelair TK Negeri yang terbeli	N/A	0	
		Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	7	497.712.000,00	0	Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0	0,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah alat rumah tangga sekolah yang tersedia	N/A	0	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah alat rumah tangga sekolah yang tersedia	N/A	0	
		Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	91	0		Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	0	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	- Jumlah pengadaan jaringan internet dan listrik untuk mendukung KBM K-13	N/A	0	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	- Jumlah pengadaan jaringan internet dan listrik untuk mendukung KBM K-13	N/A	0	
		Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1	35.000.000,00		Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjungsari, Patuk	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0	0,00	
		TK Negeri Kec. Gedangsari	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	TK negeri, Swasta Gunungkidul	Jumlah Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM)	1038	0	
		TK Swasta Kec. Gedangsari	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		TK Negeri Kec. Girisubo	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Girisubo	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri kec. Karangmojo	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Karangmojo	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri kec. Ngawen	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta kec. Ngawen	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri kec. Nglipar	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Nglipar	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Paliyan	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Paliyan	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		TK Negeri Kec. Panggang	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Panggang	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Patuk	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Patuk	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Playen	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Playen	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Ponjong	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Ponjong	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Purwosari	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Purwosari	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		TK Negeri Kec. Rongkop	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Rongkop	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Saptosari	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Saptosari	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Semanu	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Semanu	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Semin	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Semin	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Tanjung Sari	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Tanjung Sari	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		TK Negeri Kec. Tepus	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Tepus	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK Negeri kec. Wonosari	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri)	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Wonosari	Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta)	N/A	0					0	
		TK negeri, Swasta Gunungkidul	Jumlah Peringkat Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4452	0		TK negeri, Swasta Gunungkidul	Jumlah Peringkat Peserta Didik PAUD yang Tersedia (SPM)		0	0,00
1.01.02.2.03.1.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gebyar paud kecamatan, kabupaten dan propinsi nasional	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat iayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM)		0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti gebyar paud kabupaten	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta sarasehan pelajar pancasila	N/A		0
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta kegiatan porseni siswa TK tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15040	204.250.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (SPM)	144		21.600.000,00

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan APE Lembaga paud yang terbeli dari dana DAU	N/A	0	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan APE Lembaga paud yang terbeli dari dana DAU	N/A	0	
		Panggang	- Jumlah pengadaan alat permainan Edukatif (APE) PAUD	N/A	0		Panggang	- Jumlah pengadaan alat permainan Edukatif (APE) PAUD	N/A	0	
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan LCD Proyektor untuk mendukung KBM K-13	N/A	0		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan LCD Proyektor untuk mendukung KBM K-13 Merdeka Belajar	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan Laptop untuk mendukung KBM K-13	N/A	0		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan Laptop untuk mendukung KBM K-13 Merdeka Belajar	N/A	0	
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah komputer TK yang dibeli dari dana DAU untuk mendukung Sekolah Penggerak	N/A	0		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah Alat TIK TK yang dibeli dari dana DAU untuk mendukung Sekolah Penggerak	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan Drum Band Lembaga PAUD yang terbeli dari dana DAU	N/A	0		Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan Drum Band Lembaga PAUD yang terbeli dari dana DAU	N/A	0	
		Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan Seragam Drum Band Lembaga PAUD yang terbeli dari dana DAU	N/A	0		Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	- Jumlah pengadaan Seragam Drum Band Lembaga PAUD yang terbeli dari dana DAU	N/A	0	
		Panggang	Jumlah buku koleksi PAUD yang diadakan	N/A	0		Panggang	Jumlah buku koleksi PAUD yang diadakan	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tangjungsari, Patuk	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1402	692.000.000,00		Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tangjungsari, Patuk	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	49	387.500.000,00	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	TK Negeri Kec. Gedangsari	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				0	
		TK Swasta Kec. Gedangsari	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri kec. Girisubo	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Girisubo	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Karangmojo	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Karangmojo	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri kec. Ngawen	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta kec. Ngawen	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		TK Negeri Kec. Nglipar	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Nglipar	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Paliyan	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Paliyan	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Panggang	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Panggang	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Patuk	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Patuk	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Playen	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Playen	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Ponjong	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Ponjong	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		TK Negeri Kec. Purwosari	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Purwosari	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Rongkop	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Rongkop	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Saptosari	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Saptosari	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Semanu	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Semanu	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Semin	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Semin	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Tanjung Sari	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Tanjung Sari	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		TK Negeri Kec. Tepus	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Tepus	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Negeri Kec. Wonosari	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		TK Swasta Kec. Wonosari	Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta penilaian portofolio lomba bunda paud tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta penilaian portofolio lomba bunda paud tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta dalam workshop pendidik PAUD	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta dalam workshop pendidik PAUD	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta dalam workshop kurikulum	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta dalam workshop Penyusunan Kurikulum Merdeka dan implementasinya	N/A	0	
		Dinas pendidikan	- Workshop Pembuatan penilaian harian, tengah semester dan akhir semester	N/A	0		Dinas pendidikan	- Workshop Pembuatan penilaian harian, tengah semester dan akhir semester	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Workshop Media Pembelajaran	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Workshop Media Pembelajaran	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Workshop PPDB	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Workshop PPDB	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti workshop himpaudi, forum paud, IGTKI, GOPTKI kabupaten	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti workshop himpaudi, forum paud, IGTKI, GOPTKI kabupaten	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah pendidik PAUD Eks Bank Dunia yang mendapatkan stimulan dari Kabupaten	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah pendidik PAUD Eks Bank Dunia yang mendapatkan stimulan dari Kabupaten	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta kegiatan porsenitas IGTK tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta kegiatan porsenitas IGTK tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta kegiatan porsenitas TK tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta kegiatan porsenitas TK tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta kegiatan porsenitas Himpaudi tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta kegiatan porsenitas Himpaudi tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta kegiatan porsenitas KB,SPS dan TPA tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta kegiatan porsenitas KB,SPS dan TPA tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah THR Stimulan Pendidik PAUD Eks Bank Dunia	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah THR Stimulan Pendidik PAUD Eks Bank Dunia	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Cetak Raport	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Cetak Raport	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Cetak Kalender Pendidikan	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Cetak Kalender Pendidikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Cetak Pedoman PPDB	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Cetak Pedoman PPDB	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM)	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, TK Negeri Dan Swasta	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4534	900.000.000,00	Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2226	1.516.915.000,00	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang melaksanakan akreditasi	N/A	0	Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang melaksanakan akreditasi	N/A	0	
		Lembaga PKBM	Jumlah Lembaga PKBM yang melaksanakan akreditasi	N/A	0	Lembaga PKBM	Jumlah Lembaga PKBM yang melaksanakan akreditasi	N/A	0	
		Lembaga LKP	Jumlah Lembaga LKP yang melaksanakan akreditasi	N/A	0	Lembaga LKP	Jumlah Lembaga LKP yang melaksanakan akreditasi	N/A	0	
		Lembaga PAUD, PKBM, LKP	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	129	39.000.000,00	Lembaga PAUD, PKBM, LKP	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	TK Negeri	Jumlah Pramu Bakti Taman Kanak-Kanak Negeri 18 Orang mendasar anjab yang telah ditetapkan	N/A	0	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	TK Negeri	- Jumlah Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	18	0
							TK Negeri	- Jumlah Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung/di wilayah 3T (SPM)	18	
		TK Negeri	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0	15.000.000,00		TK Negeri	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (SPM)	18	1.100.000,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru dan pengawas jenjang TK yang terfasilitasi sertifikasinya	N/A	0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru dan pengawas jenjang TK yang terfasilitasi sertifikasinya	N/A	0
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg	N/A	0
		Dinas Pendidikan	Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK menggunakan aplikasi simpeg	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK menggunakan aplikasi simpeg	N/A	0
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat tingkat lanjut jenjang PAUD*	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat guru penggerak	N/A	0
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta mengikuti dalam diklat pengembangan keprofesian berkelanjutan"	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta mengikuti dalam diklat pengembangan keprofesian berkelanjutan"	N/A	0
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop penyusunan pembelajaran jenjang PAUD "	N/A	0					0
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop peningkatan kompetensi bercerita dan mendongeng jenjang PAUD*	N/A	0					0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop seni musik"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop peningkatan mutu mengambar jenjang PAUD"	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelaksanaan apresiasi	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat mahir jenjang PAUD	N/A	0		Dinas Pendidikan			0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru jenjang PAUD	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru jenjang PAUD	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi penilik	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi penilik	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi pamong belajar	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi pamong belajar	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam jenjang PAUD	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam jenjang PAUD	N/A	0	
								Jumlah Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SPM)	N/A		
		Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	4210	898.221.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	520	282.480.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga yang melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah menuju 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan)	N/A	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM) 2 kali jumlah lembaga yang melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah dengan Rapor Pendidikan dalam rangka pembinaan kelembagaan pendidikan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta workshop Pengelola PAUD	N/A	0		Dinas Pendidikan		N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta workshop PAUD unggulan	N/A	0					0	
		Panggang, Pallyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tanjung Sari, Patuk	Jumlah peserta workshop parenting tingkat desa (114 desa x 2 kegiatan)	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Purwosari, Girisubo, Tangjungsari, Patuk	Jumlah peserta workshop parenting tingkat kecamatan (18 kecamatan x 2 kegiatan)	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta workshop parenting tingkat kabupaten (114 desa + 18 kec)	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta lomba gugus tingkat kecamatan PAUD	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta lomba gugus tingkat kabupaten PAUD	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta lomba gugus tingkat propinsi PAUD	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta lomba gugus tingkat nasional PAUD	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah yang mengikuti diklat sekolah penggerak	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah yang mengikuti diklat sekolah penggerak	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1198	474.870.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (SPM)	72	50.557.500,00	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan penerima BOP/DAK Non Fisik PAUD	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelolaan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan RAPBS dana BOP/DAK Non Fisik PAUD	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan laporan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1198	16.386.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1198	17.599.110.000,00	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelolaan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD	N/A	0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelolaan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan RAPBS dana BOP/DAK Non Fisik PAUD	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan RAPBS dana BOP/DAK Non Fisik PAUD	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	2790	86.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1198	64.317.500,00	
1.01.02.2.03.22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0,00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop penggunaan TIK untuk pendidikan jenjang PAUD pendukung Implementasi Kurikulum Merdeka	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30	14.208.000,00	
1.01.02.2.03.23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	0,00	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop penyusunan media pembelajaran jenjang PAUD pendukung Implementasi Kurikulum Merdeka	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5	14.250.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.03.24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop penggunaan aplikasi-aplikasi bidang pendidikan jenjang SMP (vervalpd, vervalps, dapodik, survei lingkungan belajar dll) dan Program Mandiri Mengajar (PMM). Rapor	N/A		
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30	14.250.000,00	
1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun (SPM)	N/A	4.808.000,00	
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SPM)	1		
								Jumlah Sosialisasi kepada satuan pendidikan paling sedikit mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi penting proses pembelajaran dan pengelolaan yang	N/A		
								Jumlah peserta Sosialisasi dan advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (mencegah perundungan kekerasan) dan (pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, cacat)	N/A		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Literasi dan Numerasi (Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan	3256	4.808.000,00	
								Jumlah Fasilitas Kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak (SPM)	3256		
								Jumlah Fasilitas kepala sekolah/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SPM)	3256		
								Jumlah Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas/penilik sekolah terlibat aktif dalam	3256		
								Jumlah Fasilitas pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM)	6512		
								Jumlah Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik	N/A		
								Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan (SPM)	0	0,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.01.02.2.03.29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan					Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	180	20.400.000,00	
1.01.02.2.03.39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta Workshop Literasi dan Numerasi (Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan) (SPM)	3256		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitas Kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak (SPM)	3256		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitas pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SPM)	3256		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas/penilik sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut Platform Mandiri Mengajar (SPM)	3256		
							Dinas Pendidikan	Jumlah Fasilitas pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM)	6512		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.03.41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						Dinas Pendidikan	Jumlah Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SPM)	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan (SPM)	72	24.918.000,00	
							TK negeri, Swasta Gunungkidul	Jumlah Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (SPM)	1038		0
							TK negeri, Swasta Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia (SPM)	2268	113.400.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	3	8.611.665.000,00		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	3	4.350.153.669,00	
				41,17				Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	41,17		
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	SKB	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (Lapak Buku) yang dibangun	N/A			SKB	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (Lapak Buku) yang dibangun	N/A		0
				N/A			SKB	Jumlah ruang penunjang (ruang kepala) di lantai 2 yang dibangun	N/A		0
				N/A			SKB	Jumlah ruang penunjang (Aula) 2 lantai	N/A		0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
		SKB	- Jenis dan luasan yang dibangun Cafe Buku (lantai bawah) dan Ruang TBM (lantai bawah) Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN	N/A	0	SKB	- Jenis dan luasan yang dibangun Cafe Buku (lantai bawah) dan Ruang TBM (lantai bawah) Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN	N/A	0	
		SKB	- Jenis dan luasan yang dibangun Ruang Kelas Baru (Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN	N/A	0	SKB	- Jenis dan luasan yang dibangun Ruang Kelas Baru (Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN	N/A	0	
		SKB	- Jenis dan luasan yang dibangun Ruang Praktik (Ruang musik/vokal, Ruang Tata Boga, Ruang Pamong, Ruang Umum, Ruang UNBK, Pustaka, Tata Busana, Ruang Kecantikan, Lab Bahasa Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN	N/A	0	SKB	- Jenis dan luasan yang dibangun Ruang Praktik (Ruang musik/vokal, Ruang Tata Boga, Ruang Pamong, gudang Umum, Ruang UNBK, Pustaka, Tata Busana, Ruang Kecantikan, Lab Bahasa Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jenis dan luasan yang dibangun Halaman, tempat parkir, minim amphitheater, student plaza Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jenis dan luasan yang dibangun Halaman, tempat parkir, minim amphitheater, student plaza Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0	2.531.769.000,00	Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0	0,00	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	SKB	Jumlah pagar dan lantai/halaman yang dibangun	N/A	0	SKB	Jumlah pagar dan lantai/halaman yang dibangun	N/A	0	
		SKB	Jumlah gasebo skb yang dibangun	N/A	0	SKB	Jumlah gasebo skb yang dibangun	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah, jenis dan luasan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang selesai dibangun	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah, jenis dan luasan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang selesai dibangun	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2	0	Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	SKB	- Jenis dan luasan yang direhab Pendopo dan back stage Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN	N/A		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	SKB	- Jenis dan luasan yang direhab Pendopo dan back stage Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN - Jumlah, jenis dan luasan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang selesai direhab	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah, jenis dan luasan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang selesai direhab	N/A			Dinas Pendidikan		N/A	0	
		Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1			Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	- Jumlah mebelair pendidikan nonformal/kesetaraan yang terfasilitasi	N/A		Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	- Jumlah mebelair pendidikan nonformal/kesetaraan yang terfasilitasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	37	902.720.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	0	0,00	
1.01.02.2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	SKB	- Jumlah dan jenis alat rumah tangga pendidikan nonformal/kesetaraan yang diadakan	N/A		Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	SKB	- Jumlah dan jenis alat rumah tangga pendidikan nonformal/kesetaraan yang diadakan	N/A	0	
		SKB	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1	1.000.000,00		SKB	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	0	0,00	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	- Jumlah buku tulis dan Alat Tulis (Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan, Tipe X, Cat Air) siswa/warga belajar yang tersedia dalam rangka pemenuhan SPM dan peningkatan IPM (@ Rp. 250.000)	N/A		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	- Jumlah buku tulis dan Alat Tulis (Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan, Tipe X, Cat Air) siswa/warga belajar yang tersedia dalam rangka pemenuhan SPM dan peningkatan IPM (@ Rp. 250.000)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	29	800.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	0	0,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta/Warga masyarakat yang mengikuti kursus-kursus"	N/A	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi Warga Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah penerima Beasiswa Miskin Bagi Warga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	N/A	0	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	80	330.151.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300	406.650.000,00	
		SKB	- Jumlah dan jenis alat praktik dan peraga siswa SKB dalam rangka mendukung MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM)	N/A	0	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	SKB	- Jumlah dan jenis alat praktik dan peraga siswa SKB dalam rangka mendukung MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM)	N/A	0	
		SKB	Jumlah dan jenis alat praktik pkh di SKB	N/A	0		SKB	Jumlah dan jenis alat praktik pkh di SKB	N/A	0	
		SKB	Jumlah dan jenis alat tuk paud yang tersedia	N/A	0		SKB	Jumlah dan jenis alat tuk paud yang tersedia	N/A	0	
		SKB	Jumlah dan jenis alat tuk kursus boga yang tersedia	N/A	0		SKB	Jumlah dan jenis alat tuk kursus boga yang tersedia	N/A	0	
		skb	Jumlah dan jenis alat tuk kursus komputer yang tersedia	N/A	0		skb	Jumlah dan jenis alat tuk kursus komputer yang tersedia	N/A	0	
		PKBM	- Jumlah komputer PKBM untuk mendukung kegiatan mendukung MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM)	N/A	0		PKBM	- Jumlah komputer PKBM untuk mendukung kegiatan mendukung MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM)	N/A	0	
		LKP Bayu Utama, LKP Nusa Indah, LKP Hiska, LKP Gama Teknika, LKP Bina Mulia, LKP Bu Yati, LKP Marine Cruise, LKP Rizqi Education, LKP Lidi	- Jumlah pengadaan peralatan praktik peserta kursus dan pelatihan (LKP)	N/A	0		LKP Bayu Utama, LKP Nusa Indah, LKP Hiska, LKP Gama Teknika, LKP Bina Mulia, LKP Bu Yati, LKP Marine Cruise, LKP Rizqi Education, LKP Lidi	- Jumlah pengadaan peralatan praktik peserta kursus dan pelatihan (LKP)	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	SKB,PKBM, LKP Gunungkidul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	397	200.000.000,00	SKB,PKBM, LKP Gunungkidul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	0	0,00		
		SKB	Jumlah warga belajar (non bop paket C) yang mengikuti paket C	N/A	0		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus Boga	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus coding	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus Bahasa Inggris	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus Bim Bel	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus Menulis Kreatif	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus tata Kecantikan	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus Video Editing	N/A	0					0	
			Jumlah peserta yang mengikuti kursus TEKNIISI HP	N/A	0					0	
			Jumlah peserta yang mengikuti kursus FOTOGRAFI	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus SENI BUDAYA JAWA	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus SENI VOKAL	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus BAKRISTA	N/A	0					0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti kursus INSTRUMEN MUSIK	N/A	0					0	
			Jumlah peserta yang mengikuti kursus Tata Busana	N/A	0					0	
			Jumlah peserta yang mengikuti kursus Hidropnik	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti UK PAUD	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti UK TATA BOGA	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah peserta yang mengikuti UK KURSUS KOMPUTER	N/A	0					0	
		SKB	JUMLAH program skb yang tersosialisasikan	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah dosen yang terbina / mendapatkan pelatihan	N/A	0					0	
		SKB	Jumlah cafe baca yang diselenggara	N/A	0					0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket A Setara SD	N/A	0		Dinas Pendidikan	"- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket A Setara SD	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket B setara SMP	N/A	0		Karangasem Paliyan	yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket B setara SMP (PIS Karangasem Paliyan 23	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket C setara SM	N/A	0		Paliyan, rongkop, Ponjong, Nglipar, Ngawen	yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket C setara SM (PIS 1. Karangduwet paliyan 100 WB 2. Karangasem Paliyan 137 WB. 3. PKBM Sido makmur meikan rongkop 13 WB. 4. Gombang Ponjong 60 WB. 5. Kebonjero Nglipar 10 WB 6. Natah Wetan RT 01/05 Nglipar 10 WB. 7. Daguran Lor RT002/RW006 Beji	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan Keaksaraan di masyarakat untuk peningkatan IPM"	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan Keaksaraan di masyarakat untuk peningkatan IPM"	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah warga belajar pendidikan Ketrampilan	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah warga belajar pendidikan Ketrampilan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta PPDB nonformal/kesetaraan PKBM	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta PPDB nonformal/kesetaraan PKBM	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah warga belajar pendidikan Kursus LKP di masyarakat"	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah warga belajar pendidikan Kursus LKP di masyarakat"	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM)	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM)	N/A		
		Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2660	1.390.000.000,00	Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0	0,00	
1.01.02.2.04.13	Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	SKB	"- Jumlah peserta akreditasi pendidikan nonformal/kesetaraan yang selesai dilaksanakan	N/A	0	SKB	"- Jumlah peserta akreditasi pendidikan nonformal/kesetaraan yang selesai dilaksanakan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta akreditasi pendidikan nonformal/kesetaraan yang selesai dilaksanakan	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta akreditasi pendidikan nonformal/kesetaraan yang selesai dilaksanakan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	10	15.000.000,00	Dinas Pendidikan, SKB	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0,00	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	"- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang terfasilitasi	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang terfasilitasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah Pamong Belajar ASN 8 Orang mendasar anjab yang telah ditetapkan	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah Pamong Belajar ASN 8 Orang mendasar anjab yang telah ditetapkan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah Tenaga mendasar anjab yang telah ditetapkan	N/A	0	Dinas Pendidikan	"- Jumlah Tenaga mendasar anjab yang telah ditetapkan	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
1.01.02.2.04.15	Pembangunan Kairir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12	15.000.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	10	999.900,00	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan nonformal/kesetaraan yang terfasilitasi pengembangan kompetensinya	N/A	0	Pengembangan Kairir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan nonformal/kesetaraan yang terfasilitasi pengembangan kompetensinya	N/A	0
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125	121.525.000,00	Dinas pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	17	6.210.000,00	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terbina	N/A	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terbina	N/A	0
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	29	185.300.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	29	27.900.000,00	
		SKB	Jumlah warga belajar yang mendapatkan DAK Non Fisik Paket (BOP Kesetaraan)	N/A	0	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	SKB	Jumlah warga belajar yang mendapatkan DAK Non Fisik Paket (BOP Kesetaraan)	N/A	0
		SKB	-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/kesetaraan	N/A	0					

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Dinas Pendidikan	"Jumlah peserta workshop Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan"	N/A	0		Dinas Pendidikan	"Jumlah peserta workshop Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan"	N/A	0	
		PKBM	-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket A	N/A	0		PKBM	-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket A	N/A	0	
		PKBM	-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket B	N/A	0		PKBM	-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket B	N/A	0	
		PKBM	-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket C	N/A	0		PKBM	-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket C	N/A	0	
		Dinas Pendidikan, PKBM	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	29	2.033.200.000,00		Dinas Pendidikan, PKBM	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30	1.579.980.000,00	
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	29	86.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	60	5.450.000,00	
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	0	0,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	0		
1.01.02.2.04.24	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30	4.790.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.01.02.2.04.25	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	PEMBELAJARAN JENJANG Nonformal/Kesetaraan	0	0,00	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan	PEMBELAJARAN JENJANG	N/A		
		Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	0,00		Dinas Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5	14.190.000,00	
1.01.02.2.04.26	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30	14.160.000,00	
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Pendataan warga negara usia 21-40 tahun yang tidak bersekolah	N/A		
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	4.460.000,00	
1.01.02.2.04.28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	N/A		
								Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	N/A		
		Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	22.790.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.02.2.04.29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	N/A		
								Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak			
								Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru pembentuk			
								komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut			
								Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut			
								Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan			
								Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	0,00	0,00

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1.01.02.2.04.40	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	- Jumlah buku tulis dan Alat Tulis (Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan, Tipe X, Cat Air) siswa/warga belajar yang tersedia dalam rangka pemenuhan SPM dan peningkatan IPM (@ Rp. 250.000)	N/A		0	
							Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	250	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.42	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	N/A			
							Dinas Pendidikan	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	N/A			
							Dinas Pendidikan	Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Pembentukan	N/A			
							Dinas Pendidikan	komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	N/A			
							Dinas Pendidikan	Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	N/A			

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Dinas Pendidikan	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan.	30	14.160.000,00	
1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	"- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket A setara SD	N/A		0
							Karangasem Paliyan	"- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket B setara SMP (PIS Karangasem Paliyan 23 WB x 1.160.000)	N/A		0
							Paliyan, rongkop, Ponjong, Nglipar, Ngawen	"- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket C setara SM (PIS 1. Karangduwet paliyan 100 WB 2. Karangasem Paliyan 137 WB. 3. PKBM Sido makmur melikan rongkop 13 WB. 4. Gombang Ponjong 60 WB. 5. Kebonjero Nglipar 10 WB 6. Natah Wetan RT 01/05 Nglipar 10 WB. 7. Daguran Lor RT002/RW006 Beji Ngawen 50 WB. total 380 WB x 1.690.000)	N/A		0
							Dinas Pendidikan	"- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan Keaksaraan di masyarakat untuk peningkatan IPM"	N/A		0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Dinas Pendidikan	"- Jumlah warga belajar pendidikan Ketrampilan - Jumlah peserta PPDB nonformal/kesetaraan PKBM "- Jumlah warga belajar pendidikan Kursus LKP di masyarakat" - Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM). Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar	N/A	0	
							Dinas Pendidikan		N/A	0	
							Dinas Pendidikan		N/A	0	
							Dinas Pendidikan		N/A		
							Dinas Pendidikan, SKB			2.198.413.769,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	256.375.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			100	241.510.000,00	0,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah sekolah jenjang SD dan SMP yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan	578	164.100.000,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah sekolah jenjang SD dan SMP yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan	578	133.000.000,00	0,00
			Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100				Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100		
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan SD yang terfasilitasi	N/A	0	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	- jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal (pendidikan anti korupsi) pendidikan SD yang terfasilitasi - jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan SMP yang terfasilitasi	N/A	0	
			-Jumlah peserta workshop mulok batik	N/A	0		Dinas Pendidikan	- jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan SMP yang terfasilitasi	N/A		
			- Jumlah dokumen KD muatan lokal pendidikan dasar yang tersusun	N/A	0		Dinas Pendidikan	-Jumlah peserta workshop mulok batik - Jumlah dokumen KD muatan lokal pendidikan dasar yang tersusun (pendidikan anti korupsi)	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan SD yang terfasilitasi	N/A	0	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	workshop penyusunan silabus muatan lokal (pendidikan anti korupsi) pendidikan SD yang terfasilitasi	N/A	0	0,00
		Dinas Pendidikan	"Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun"	1	74.550.000,00		Dinas Pendidikan	"Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun"		0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan SMP yang terfasilitasi	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan SMP yang terfasilitasi	N/A		
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen silabus muatan lokal pendidikan dasar yang tersusun	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen silabus muatan lokal pendidikan dasar (pendidikan anti korupsi) yang tersusun	N/A		0
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan SD yang diadakan	N/A	0	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal (pendidikan anti korupsi) pendidikan SD yang diadakan	N/A		14.600.000,00
		Dinas Pendidikan	"Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun"	1	74.550.000,00		Dinas Pendidikan	"Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun"		1	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan SMP yang diadakan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal (pendidikan anti korupsi) pendidikan SMP yang diadakan	N/A		
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan SMP yang diadakan	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal (pendidikan anti korupsi) pendidikan SMP yang diadakan	N/A		0
		Dinas Pendidikan	Jumlah Pengadaan buku koleksi perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik)	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Pengadaan buku koleksi perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik)	N/A		0
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	"Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia"	360	15.000.000,00		Dinas Pendidikan	"Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia"		566	60.000.000,00
								Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal (pendidikan anti korupsi) Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		42	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
1.01.03.2.01.05	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar					Dinas Pendidikan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	42	14.600.000,00	
						Dinas Pendidikan	Jumlah buku teks muatan lokal (pendidikan anti korupsi) Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	1		
1.01.03.2.01.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar					Dinas Pendidikan	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	1	14.600.000,00	
						Dinas Pendidikan	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1	14.600.000,00	
1.01.03.2.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal (pendidikan anti korupsi) pendidikan SD yang terfasilitasi	N/A	0	
						Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan SMP yang terfasilitasi	N/A		
						Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop mulok batik	N/A	0	
						Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen KD muatan lokal pendidikan dasar yang tersusun (pendidikan anti korupsi)	N/A	0	
						Dinas Pendidikan	"Jumlah kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun"	1	14.600.000,00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	1216	92.275.000,00	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	1216	108.510.000,00	0,00

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	100		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	100	
			- Jumlah peserta workshop penyusunan dasar muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang terfasilitasi	N/A				- Jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal (pendidikan anti korupsi) pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Nonformal yang terfasilitasi	N/A	0
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen KD muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen KD muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun	N/A	0
		Dinas Pendidikan	"Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun"	1	40.000.000,00		Dinas Pendidikan	"Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun"	0	0,00
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	N/A		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	N/A	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang terfasilitasi	N/A	0			- Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang terfasilitasi	N/A	0
		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun	N/A	0
		Dinas Pendidikan	"Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun"	1	37.275.000,00		Dinas Pendidikan	"Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun"	2	22.150.000,00

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diadakan	N/A	0	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	- Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal (pendidikan anti korupsi) pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diadakan "Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia"	N/A	0	
1.01.03.2.02.04	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	"Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia"	36	15.000.000,00		Dinas Pendidikan	"Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia" Jumlah buku teks muatan lokal (pendidikan anti korupsi) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1227	36.810.000,00	
1.01.03.2.02.05	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						Dinas Pendidikan	Jumlah buku teks muatan lokal (pendidikan anti korupsi) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2	13.700.000,00	
1.01.03.2.02.06	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal (pendidikan anti korupsi) pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang terfasilitasi - Jumlah dokumen KD muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun	2	13.700.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Dinas Pendidikan	"Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun"	2	22.150.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	51	235.000.000,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	51	6.525.274.000,00	0,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik	691	235.000.000,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik	691	6.525.274.000,00	0,00
			Persentase Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;	76,98				Persentase Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;	76,98		
		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	272	0		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	272	0	
			Persentase Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;	47,72				Persentase Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;	47,72		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kab. Gunungkidul. Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik	2341	0	Jumlah Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik	Kab. Gunungkidul. Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik	2341	0		
		Persentase Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;	66,49		Persentase Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;			66,49			
	Kab. Gunungkidul. Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendididkan dan pelatihan calon kepala sekolah	410	0	Jumlah Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendididkan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kab. Gunungkidul. Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendididkan dan pelatihan calon kepala sekolah	410	0		
		Persentase Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendididkan dan pelatihan calon kepala sekolah;	87,61		Persentase Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendididkan dan pelatihan calon kepala sekolah;			87,61			
	Kab. Gunungkidul. Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik	1222	0	Jumlah Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik	Kab. Gunungkidul. Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik	1222	0		
		Persentase Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;	79,61		Persentase Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;			79,61			
	Kab. Gunungkidul. Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendididkan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	0	Jumlah Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendididkan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kab. Gunungkidul. Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendididkan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	0		

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			<i>Persentase Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pelatihan calon kepala sekolah;</i>	88,5				<i>Persentase Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pelatihan calon kepala sekolah;</i>	88,5		
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terfasilitasi	N/A	0	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	penataan penempatan untuk pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	0	0
			<i>Jumlah dokumen perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan SD yang terfasilitasi (kebutuhan sejumlah 262 Pramubakti dan 600 Guru)</i>	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan (SPM)	2	0	0
			<i>Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan SMP yang terfasilitasi (kebutuhan sejumlah Pramu Bakti 26 orang, Pengadministrasi Umum 13 orang, Pengadministrasi Keuangan 7 orang, Petugas Keamanan 25 oran</i>	N/A	0						0
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	3	35.000.000,00		Dinas Pendidikan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	2	1.120.000,00	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti seleksi dan diklat calon pengawas TK"	N/A	0	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SPM)	4	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah guru yang mengikuti dalam seleksi akademik calon kepala sekolah jenjang TK	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SPM)	4	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah guru yang mengikuti dalam diklat calon kepala sekolah jenjang TK	N/A	0		Dinas Pendidikan	Jumlah GTT & PTT database yang terfasilitasi gajinya	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta yang mengikuti seleksi dan diklat calon pengawas SD"	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah PTT UPT TK & SD/Korwil (1 orang x 13 bulan)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah guru yang mengikuti dalam seleksi akademik calon kepala sekolah jenjang SD	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah PTT database SD (21 orang x 13 bulan)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah guru yang mengikuti dalam diklat calon kepala sekolah jenjang SD	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah PTT database TK (2 orang x 13 bulan)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"- Jumlah peserta mengikuti seleksi calon pengawas SMP"	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah GTT database TK (4 orang x 13 bulan)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"-Jumlah peserta yang mengikuti diklat calon pengawas jenjang SMP"	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah GTT database SD (6 orang x 13 bulan)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah guru yang mengikuti dalam seleksi akademik calon kepala sekolah jenjang SMP	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah insentif GTT/PTT Kategori II (49 orang x 13 bulan)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah guru yang mengikuti dalam diklat calon kepala sekolah jenjang SMP	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah GTT database sebagai guru pengganti (GTT SD 776 orang + SMP 58 orang x 13 bulan)	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah guru yang mengikuti dalam diklat calon kepala sekolah jenjang SMP	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah insentif GTT/PTT/GTY/PTY (686 orang x 12 bulan) APBD Kabupaten	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah guru yang mengikuti dalam diklat calon kepala sekolah jenjang SMP	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah THR PTT Korwil Kecamatan	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Dinas Pendidikan	- Jumlah THR PTT SD - Jumlah THR PTT TK - Jumlah THR GTT TK - Jumlah THR GTT SD - Jumlah THR Insentif GTT/PTT Kategori II	N/A N/A N/A N/A		
							Dinas Pendidikan	Jumlah THR data base sebagai GP (guru pengganti) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	N/A		
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan	100	589.600.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan	100	43.285.000,00	0,00
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terlayani	1	25.000.000,00	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terlayani	1	8.340.000,00	0,00
								Persentase permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat terlayani	100		
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi	N/A	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi	N/A	0	
							Dinas Pendidikan	Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi	N/A		0

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian
		Dinas Pendidikan	"Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat"	1	10.000.000,00	Dinas Pendidikan	"Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat"	1	2.670.000,00	
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi - Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	N/A	0	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Jumlah peserta rakor pengelola (yayasan) Pendidikan SD dan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi - Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi - Jumlah peserta rakor Pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	- Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	N/A	0	Dinas Pendidikan	- Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10	15.000.000,00	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10	5.670.000,00	
1.01.05.2.02	Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani	2	564.600.000,00	Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani	2	34.945.000,00	0,00

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			<i>Persentase permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani</i>	100				<i>Persentase permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani</i>	100		
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi	N/A	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi	N/A		0
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	75.000.000,00		Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1		4.725.000,00
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi	N/A	0	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta rakor pengendalian dan pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi	N/A		0
			- Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	N/A	0		Dinas Pendidikan	- Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	N/A		0
			"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat"	10	75.000.000,00		Dinas Pendidikan	"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat"	1		5.100.000,00

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi	N/A	0	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	- Jumlah peserta workshop pengelola (yayasan) PAUD dan pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi	N/A	0	
		Dinas Pendidikan	"Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat"	1	414.600.000,00		Dinas Pendidikan	"Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat"	2	25.120.000,00	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya	20.99	500.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya	20.99	277.465.000,00	0,00
			Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya	23.87	0			Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya	23.87	0	0
			Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya	100	0			Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya	100	0	0
2.22.08.2.10	Pendidikan Berbasis Budaya	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah PAUD, SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan Berbasis Budaya	474	500.000.000,00	Pendidikan Berbasis Budaya	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah PAUD, SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan Berbasis Budaya	474	277.465.000,00	
			Persentase Pendidikan Berbasis Budaya yang terpenuhi	48.29				Persentase Pendidikan Berbasis Budaya yang terpenuhi	48.29		
2.22.08.2.10.01	Pembinaan Muatan Lokal	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Siswa SD yang dilatih membuat	N/A	0	Pembinaan Muatan Lokal	Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Siswa SD yang mengikuti pelajaran muatan lokal pendidikan budaya Yogyakarta	N/A	0	

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Guru SD yang dilatih membuat	N/A	0		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Guru SD yang mengikuti pelajaran muatan lokal pendidikan budaya yogyakarta	N/A	0	
		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Guru SMP yang dilatih membuat	N/A	0		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelajaran muatan lokal pendidikan budaya yogyakarta	N/A	0	
		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Siswa SMP yang dilatih membuat	N/A	0		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti pelajaran muatan lokal pendidikan budaya yogyakarta	N/A	0	
		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Pendidik PAUD Formal dan Non Formal yang dilatih Gamelan dalam pengasuhan peserta didik berbasis budaya	N/A	0		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Pendidik PAUD Formal dan Non Formal yang mengikuti pelajaran muatan lokal pendidikan budaya yogyakarta	N/A	0	
		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	3	500.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Baleharjo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	3	277.465.000,00	
					764.544.075.000,00					844.956.876.860,00	0,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Pendidikan mengakomodir hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang Kalurahan maupun Kapanewon.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum Perangkat Daerah. Forum ini dilakukan untuk menyelaraskan usulan kegiatan, lokasi serta sasaran penerima dalam Renja Dinas Pendidikan. Namun berdasarkan surat edaran Bupati Gunungkidul nomor 900.1.2.2/04391 tentang tindak lanjut hasil fasilitasi rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, dilakukan rasionalisasi kegiatan, output dan anggaran untuk mematuhi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.07/2022. Hal ini berakibat pada penyesuaian/rasionalisasi pagu perangkat daerah, aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kabupaten baik yang melalui pendanaan PIS dan PIWK tidak bisa dianggarkan pada tahun 2024 dan akan menjadi prioritas perencanaan di tahun 2025 (tabel 2.7a). Demikian pula dengan rekapitulasi usulan belanja langsung kegiatan kunjungan kerja anggota dprd kabupaten gunungkidul masa reses tahun 2024 tidak bisa terakomodir seluruhnya.

Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang tertuang sebagaimana tabel 2.7a dan tabel 2.7b berikut ini :

Tabel 2.7a
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Aspirasi/PIS

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
1	Inputor Usulan Kecamatan Ponjong MUSRENCAM 34:03:10 Ponjong	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Minggu, 19/02/20 23 14:45			
2	Inputor Usulan Kecamatan Panggang MUSRENCAM 34:03:06 Panggang	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Minggu, 19/02/20 23 11:51			
3	Inputor Usulan Kecamatan Ponjong MUSRENCAM 34:03:10 Ponjong	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	2,00 / Ruang	243.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Minggu, 19/02/20 23 07:23			
4	Inputor Usulan Kecamatan Ponjong MUSRENCAM 34:03:10 Ponjong	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	10,00 / Paket	150.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Minggu, 19/02/20 23 07:20			
5	Inputor Usulan Kecamatan Ponjong MUSRENCAM 34:03:10 Ponjong	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	2,00 / Ruang	243.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Minggu, 19/02/20 23 07:11			

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
6	Inputor Usulan Kecamatan Ponjong MUSRENCAM 34:03:10	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	10,00 / Paket	150.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Minggu, 19/02/20 23 06:51			
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
7	Inputor Usulan Kecamatan Ponjong MUSRENCAM 34:03:10	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	1,00 / Orang	1.690.000,00	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Minggu, 19/02/20 23 06:42			
	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan								
8	Inputor Usulan Kecamatan Karangmojo MUSRENCAM 34:03:09	(PIS) - Pembangunan pagar sekolah	1,00 / Unit	137.500.000,00	1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 20:50			
	1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan								
9	Inputor Usulan Kecamatan Ngawen MUSRENCAM 34:03:13	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	50,00 / Orang	84.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Sabtu, 18/02/20 23 14:01			
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
10	Inputor Usulan Kecamatan Ngawen MUSRENCAM 34:03:13	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	3,00 / Paket	45.000.000,00	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan	Sabtu, 18/02/20 23 13:58			
	1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan								
11	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34:03:15	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Sabtu, 18/02/20 23 13:57			
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
12	Inputor Usulan Kecamatan Ngawen MUSRENCAM 34:03:13 Ngawen	(P/S) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 13:57			
13	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34:03:15 Saptosari	(P/S) - Rehabilitasi aula / pendopo	1,00 / Unit	162.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.06 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 13:53			
14	Inputor Usulan Kecamatan Tepus MUSRENCAM 34:03:07 Tepus	(P/S) - Pengadaan mebelair PAUD	7,00 / Paket	105.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sabtu, 18/02/20 23 11:52			
15	Inputor Usulan Kecamatan Tepus MUSRENCAM 34:03:07 Tepus	(P/S) - Pengadaan APE PAUD	7,00 / Paket	105.000.000,00	1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sabtu, 18/02/20 23 11:48			
16	Inputor Usulan Kecamatan Tepus MUSRENCAM 34:03:07 Tepus	(P/S) - Pengadaan mebelair PAUD	7,00 / Paket	105.000.000,00	1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sabtu, 18/02/20 23 11:47			
17	Inputor Usulan Kecamatan Tepus MUSRENCAM 34:03:07 Tepus	(P/S) - Pengadaan alat tulis siswa Siswa Miskin jenjang SD	32,00 / Paket	9.600.000,00	1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.17 - Pengadaan Perlengkapan Siswa	Sabtu, 18/02/20 23 11:34			

	Sumber Usulan	Usulan	Volume/ Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
18	Inputor Usulan Kecamatan Tepus MUSRENCAM 34:03:07 Tepus	(PIS) - Pembangunan pagar sekolah	2,00 / Unit	275.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 11:29			
19	Inputor Usulan Kecamatan Tepus MUSRENCAM 34:03:07 Tepus	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	7,00 / Paket	105.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 11:28			
20	Inputor Usulan Kecamatan Tepus MUSRENCAM 34:03:07 Tepus	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 11:23			
21	Inputor Usulan Kecamatan Tepus MUSRENCAM 34:03:07 Tepus	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	4,00 / Paket	60.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 11:15			
22	Inputor Usulan Kecamatan Tepus MUSRENCAM 34:03:07 Tepus	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 11:12			
23	Inputor Usulan Kecamatan Tepus MUSRENCAM 34:03:07 Tepus	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	4,00 / Ruang	486.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 11:09			

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
24	Inputor Usulan Kecamatan Purwosari MUSRENCAM 34:03:18 Purwosari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 10:19			
25	Inputor Usulan Kecamatan Purwosari MUSRENCAM 34:03:18 Purwosari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 09:55			
26	Inputor Usulan Kecamatan Playen MUSRENCAM 34:03:03 Playen	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 07:58			
27	Inputor Usulan Kecamatan Playen MUSRENCAM 34:03:03 Playen	(PIS) - Pembangunan pagar sekolah	1,00 / Unit	137.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 07:55			
28	Inputor Usulan Kecamatan Playen MUSRENCAM 34:03:03 Playen	(PIS) - Rehabilitasi ruang toilet/jamban PAUD	1,00 / Unit	48.600.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.06 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 07:51			
	Inputor Usulan Kecamatan Playen MUSRENCAM				1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume/ Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
29	Playen 34:03:03	(PIS) - Rehabilitasi ruang toilet/jamban PAUD	1,00 / Unit	48.600.000,00	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.06 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 07:51			
30	Inputor Usulan Kecamatan Playen MUSRENCAM 34:03:03 Playen	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 07:32			
31	Inputor Usulan Kecamatan Playen MUSRENCAM 34:03:03 Playen	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 07:29			
32	Inputor Usulan Kecamatan Playen MUSRENCAM 34:03:03 Playen	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	5,00 / Paket	75.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 06:54			
33	Inputor Usulan Kecamatan Playen MUSRENCAM 34:03:03 Playen	(PIS) - Pembangunan ruang toilet/jamban PAUD	2,00 / Ruang	216.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 06:53			
34	Inputor Usulan Kecamatan Paliyan MUSRENCAM 34:03:05 Paliyan	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 03:45			
	Inputor Usulan Kecamatan Paliyan				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume/ Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
35	MUSRENCAM 34:03:05 Paliyan	(PIS) - Rehabilitasi ruang toilet/jamban PAUD	1,00 / Unit	48.600.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.06 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 03:39			
36	Inputor Usulan Kecamatan Paliyan MUSRENCAM 34:03:05 Paliyan	(PIS) - Penyelenggaraan Paket B setara SMP	23,00 / Orang	26.680.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar	Sabtu, 18/02/20 23 03:37			
37	Inputor Usulan Kecamatan Paliyan MUSRENCAM 34:03:05 Paliyan	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	137,00 / Orang	231.530.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar	Sabtu, 18/02/20 23 03:31			
38	Inputor Usulan Kecamatan Gedangsari MUSRENCAM 34:03:14 Gedangsari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 02:05			
39	Inputor Usulan Kecamatan Gedangsari MUSRENCAM 34:03:14 Gedangsari	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 02:04			
40	Inputor Usulan Kecamatan Gedangsari MUSRENCAM 34:03:14 Gedangsari	(PIS) - Pengadaan alat tulis siswa Siswa Miskin jenjang SMP	1,00 / Paket	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sabtu, 18/02/20 23 02:02			

	Sumber Usulan	Usulan	Volume/ Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
41	Inputor Usulan Kecamatan Gedangsari MUSRENCAM 34:03:14 Gedangsari	(PIS) - Rehabilitasi ruang toilet/jamban PAUD	1,00 / Unit	48.600.000,00	1.01.02.2.02.28 - Pengadaan Perlengkapan Siswa 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.06 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sabtu, 18/02/20 23 01:50			
42	Inputor Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34:03:01 Wonosari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 17:42			
43	Inputor Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34:03:01 Wonosari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 17:40			
44	Inputor Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34:03:01 Wonosari	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	3,00 / Paket	45.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumat, 17/02/20 23 17:29			
45	Inputor Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34:03:01 Wonosari	(PIS) - Pembangunan pagar sekolah	1,00 / Unit	137.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumat, 17/02/20 23 17:26			

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
46	Inputor: Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34-03:01 Wonosari	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumat, 17/02/20 23 17:20			
47	Inputor: Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34-03:01 Wonosari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 16:58			
48	Inputor: Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34-03:01 Wonosari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 16:53			
49	Inputor: Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34-03:01 Wonosari	(PIS) - Pengadaan alat tulis siswa Siswa Miskin jenjang SD	50,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.17 - Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumat, 17/02/20 23 16:34			
50	Inputor: Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34-03:01 Wonosari	(PIS) - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	1,00 / Paket	220.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.22 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumat, 17/02/20 23 16:23			
51	Inputor: Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34-03:01	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumat, 17/02/20			

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
	Wonosari				1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	23 16:08			
52	Inputor Usulan Kecamatan Nglipar MUSRENCAM 34:03:02 Nglipar	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumat, 17/02/20 23 15:22			
53	Inputor Usulan Kecamatan Nglipar MUSRENCAM 34:03:02 Nglipar	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	10,00 / Orang	16.900.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumat, 17/02/20 23 15:21			
54	Inputor Usulan Kecamatan Paliyan MUSRENCAM 34:03:05 Paliyan	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumat, 17/02/20 23 15:17			
55	Inputor Usulan Kecamatan Nglipar MUSRENCAM 34:03:02 Nglipar	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	10,00 / Orang	16.900.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumat, 17/02/20 23 15:17			
56	Inputor Usulan Kecamatan Wonosari MUSRENCAM 34:03:01 Wonosari	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumat, 17/02/20 23 15:07			
	Inputor Usulan Kecamatan Patuk				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
57	MUSRENCAM 34:03:04 Patuk	(PIS) - Beasiswa bakat dan prestasi jenjang SMP	6,00 / Siswa	3.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumat, 17/02/20 23 14:52			
58	Inputor Usulan Kecamatan Patuk MUSRENCAM 34:03:04 Patuk	(PIS) - Beasiswa bakat dan prestasi jenjang SD	6,00 / Siswa	3.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumat, 17/02/20 23 14:51			
59	Inputor Usulan Kecamatan Patuk MUSRENCAM 34:03:04 Patuk	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumat, 17/02/20 23 14:50			
60	Inputor Usulan Kecamatan Patuk MUSRENCAM 34:03:04 Patuk	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 14:35			
61	Inputor Usulan Kecamatan Patuk MUSRENCAM 34:03:04 Patuk	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumat, 17/02/20 23 14:25			
62	Inputor Usulan Kecamatan Patuk MUSRENCAM 34:03:04 Patuk	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 14:21			
	Inputor Usulan Kecamatan Paliyan				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
63	MUSRENCAM 34:03:05 Paliyan	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	100,00 / Orang	169.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumat, 17/02/20 23 14:12			
64	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34:03:15 Saptosari	(PIS) - Rehabilitasi aula / pendopo	1,00 / Unit	162.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.06 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumat, 17/02/20 23 13:23			
65	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34:03:15 Saptosari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 13:22			
66	Inputor Usulan Kecamatan Purwosari MUSRENCAM 34:03:18 Purwosari	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumat, 17/02/20 23 13:22			
67	Inputor Usulan Kecamatan Semanu MUSRENCAM 34:03:08 Semanu	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	13,00 / Paket	195.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 13:17			
68	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34:03:15 Saptosari	(PIS) - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	1,00 / Paket	220.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.22 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumat, 17/02/20 23 13:11			

	Sumber Usulan	Usulan	Volume/ Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
69	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34:03:15 Saptosari	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumat, 17/02/20 23 13:09			
70	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34:03:15 Saptosari	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumat, 17/02/20 23 13:05			
71	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34:03:15 Saptosari	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumat, 17/02/20 23 13:02			
72	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34:03:15 Saptosari	(PIS) - Rehabilitasi pagar sekolah	1,00 / Unit	61.875.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.06 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumat, 17/02/20 23 13:00			
73	Inputor Usulan Kecamatan Semanu MUSRENCAM 34:03:08 Semanu	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	8,00 / Paket	120.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 12:59			
74	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34:03:15 Saptosari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	7,00 / Paket	105.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 12:59			

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
75	Inputor Usulan Kecamatan Karangmojo MUSRENCAM 34-03:09 Karangmojo	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumat, 17/02/20 23 12:58			
76	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34-03:15 Saptosari	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumat, 17/02/20 23 12:54			
77	Inputor Usulan Kecamatan Karangmojo MUSRENCAM 34-03:09 Karangmojo	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	2,00 / Ruang	243.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumat, 17/02/20 23 12:53			
78	Inputor Usulan Kecamatan Saptosari MUSRENCAM 34-03:15 Saptosari	(PIS) - Pembangunan ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	288.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.01 - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumat, 17/02/20 23 12:53			
79	Inputor Usulan Kecamatan Karangmojo MUSRENCAM 34-03:09 Karangmojo	(PIS) - Pembangunan pagar sekolah	2,00 / Unit	275.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumat, 17/02/20 23 12:51			
	Inputor Usulan Kecamatan Girisubo MUSRENCAM 34-03:16		1,00 /		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumat,			

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
80	Girisubo	(PIS) - Pembangunan pagar sekolah	1,00 / Unit	137.500.000,00	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	17/02/20 23 12:46			
81	Inputor Usulan Kecamatan Tanjungsari MUSRENCAM 34:03:17 Tanjungsari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 12:44			
82	Inputor Usulan Kecamatan Girisubo MUSRENCAM 34:03:16 Girisubo	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 12:44			
83	Inputor Usulan Kecamatan Karangmojo MUSRENCAM 34:03:09 Karangmojo	(PIS) - Pembangunan pagar sekolah	1,00 / Unit	137.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumat, 17/02/20 23 11:39			
84	Inputor Usulan Kecamatan Girisubo MUSRENCAM 34:03:16 Girisubo	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumat, 17/02/20 23 11:36			
85	Inputor Usulan Kecamatan Girisubo MUSRENCAM 34:03:16 Girisubo	(PIS) - Pembangunan ruang toilet/jamban PAUD	1,00 / Ruang	108.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumat, 17/02/20 23 11:28			

	Sumber Usulan	Usulan	Volume/ Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
86	Inputor Usulan Kecamatan Girisubo MUSRENCAM 34:03:16 Girisubo	(PIS) - Pembangunan ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	288.000.000,00	1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.01 - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru, PAUD	Jumat, 17/02/20 23 11:19			
87	Inputor Usulan Kecamatan Rongkop MUSRENCAM 34:03:11 Rongkop	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 17/02/20 23 11:07			
88	Inputor Usulan Kecamatan Rongkop MUSRENCAM 34:03:11 Rongkop	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	13,00 / Orang	21.970.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumat, 17/02/20 23 10:49			
89	Inputor Usulan Kecamatan Panggang MUSRENCAM 34:03:06 Panggang	(PIS) - Pengadaan perlengkapan pendidikan warga belajar Miskin jenjang pendidikan nonformal/kesetaraan	2,00 / Orang	1.500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal / Kesetaraan	Kamis, 16/02/20 23 16:27			
Total Pagu				8.384.045.000,00					

Tabel 2.7b
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Reses/Pokir

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
1	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.00.00.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 21:20	dibutuhkan biasanya siswa miskin jenjang SD	Dilanjutkan	
	USLANSKPDTELAAH								
	34.03.09.2001 Bejiharjo								
2	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 17:06	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
	USLANSKPDTELAAH								
	34.03.07.2001 Giripanggung								
3	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 17:02	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USLANSKPDTELAAH								
	34.03.09.2001 Bejiharjo								
4	Dinas Pendidikan	Pengadaan perlengkapan sekolah Siswa Miskin jenjang SMP	1,00 / Paket	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 16:46	Kurang nya perlengkapan sekolah anak	Dilanjutkan	
	USLANSKPDTELAAH								
	34.03.13.2005 Beji								
5	Dinas Pendidikan	Perbaikan ringan ruang kelas Sekolah Dasar (SD)	1,00 / Unit	150.000.000,00	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 16:43	Perbaikan SD yang rusak.	Dilanjutkan	
	USLANSKPDTELAAH								
	34.03.03.2005 Dengok								
6	Dinas Pendidikan	Perbaikan ringan ruang kelas Sekolah Dasar (SD)	1,00 / Unit	150.000.000,00	1.01.02.2.01 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:42	Perbaikan ruang sekolah yang rusak.	Dilanjutkan	
	USLANSKPDTELAAH								
	34.03.15.2007 Planjan								
7	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 16:37	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USLANSKPDTELAAH								
	34.03.09 Karangmojo								
8	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 16:36	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USLANSKPDTELAAH								
	34.03.09 Karangmojo								

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
9	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:36	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09 Karangmojo								
10	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 16:35	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09 Karangmojo								
11	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 16:35	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09 Karangmojo								
12	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 16:34	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09 Karangmojo								
13	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 16:33	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09 Karangmojo								
14	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 16:32	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09 Karangmojo								
15	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 16:32	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09 Karangmojo								
16	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 16:31	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09 Karangmojo								
17	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 16:30	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan (Gunungkidul Cerdas)	Status	Aksi
18	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:30	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.09				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
19	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:29	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
20	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:28	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
21	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:27	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
22	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:26	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
23	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:25	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
24	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:25	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
25	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:23	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:23	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
26	34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 16:22	Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
27	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:21	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
28	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:20	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
29	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:20	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
30	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:19	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
31	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:18	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
32	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:17	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
33	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:16	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
34	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 16:16	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023		Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
35	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	16:15 15/03/2023 16:14	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
36	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	16:13 15/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
37	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	16:12 15/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
38	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	16:03 15/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
39	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	16:02 15/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
40	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	16:03 15/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
41	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	16:02 15/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
42	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	16:01 15/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
43	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	16:00 15/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
44	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:59	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
45	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:58	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
46	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:57	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
47	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:55	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
48	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:54	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
49	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:53	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
50	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:52	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
51	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:49	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
52	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:48	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
53	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:47	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
54	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 15:45	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
55	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 15:43	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
56	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 15:42	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
57	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 15:41	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
58	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 15:40	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
59	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 15:39	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
60	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 15:37	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
61	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 15:36	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan (Gunungkidul Cerdas)	Status	Aksi
62	Karangmojo				1.01.022.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.022.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:35		Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
63	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.022.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:32		Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.022.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:31		Dilanjutkan	
64	USULANSKPDTELAHAH			500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.022.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:30		Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		
65	34.03.09 Karangmojo				1.01.022.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Dinas Pendidikan				1.01.022.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:29		Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
66	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.022.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:29		Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.022.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:26		Dilanjutkan	
67	USULANSKPDTELAHAH			500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.022.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:25		Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		
68	34.03.09 Karangmojo				1.01.022.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Dinas Pendidikan				1.01.022.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:25		Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
69	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.022.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:23		Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.022.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:22		Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)		

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
70	34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 15:15	Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
71	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:13	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
72	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:10	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
73	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 15:06	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
74	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 14:55	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
75	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 14:53	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
76	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09.2006 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 14:49	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
77	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 14:47	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
78	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
79	USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:45	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
80	USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:44	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
81	USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:41	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
82	USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:31	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
83	USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:27	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
84	USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:22	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
85	USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:20	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
86	USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:17	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
87	USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:15	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
88	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:09	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
89	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:08	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
90	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 14:07	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
91	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 13:24	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
92	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 13:20	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
93	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 13:17	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
94	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 13:15	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
95	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 13:15	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
96	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 13:13	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
97	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 13:13	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
98	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 13:12	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
99	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 13:11	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
100	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 13:11	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
101	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 13:09	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
102	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 13:08	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
103	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 13:06	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
104	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 13:05	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
105	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 13:05	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan (Gunungkidul Cerdas)	Status	Aksi
106	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 13:04	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.09				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
107	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 13:03	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.09				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
108	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 13:02	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.09				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
109	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 13:02	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.09				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
110	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 13:01	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.09				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
111	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 13:00	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.09				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
112	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:59	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.09				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
113	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:56	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.09				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:55	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
					1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
123	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	12:44 Rabu, 15/03/2023 12:43	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
124	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:42	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
125	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:41	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
126	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:40	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
127	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:37	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
128	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:36	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
129	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:33	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
130	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:32	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
131	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 12:32	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
132	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 12:29	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
133	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 12:28	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
134	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 12:26	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
135	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 12:24	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
136	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 12:23	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
137	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 12:20	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
138	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 12:02	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
139	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 11:34	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
140	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 11:31	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
141	Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 11:30	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								
	Karangmojo								
142	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 11:27	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
143	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 11:24	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
144	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 11:20	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
145	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 11:16	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
146	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 11:14	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
147	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 11:09	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
148	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 11:03	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
149	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 10:59	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
150	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 10:57	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
151	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 09:46	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
152	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 09:45	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
153	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 09:41	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
154	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 09:40	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
155	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 09:39	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
156	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 09:36	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 09:34	Perlu nya Beasiswa Siswa	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
166	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 09:20	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
167	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 09:19	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
168	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 09:19	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
169	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 09:17	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
170	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 08:16	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
171	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 09:14	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
172	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 08:11	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
173	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 09:06	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023		Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
174	USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	08:53 Rabu, 15/03/2023 08:52	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
175	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 08:47	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
176	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 08:45	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
177	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 08:35	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
178	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 06:09	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
179	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 06:08	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
180	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 06:07	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
181	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 06:05	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
182	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
183	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 06:04	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
184	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 06:03	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
185	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 06:00	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
186	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 05:59	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
187	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 05:58	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
188	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 05:57	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
189	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 05:56	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
190	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 05:55	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
191	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 05:54	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
192	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 05:53	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
193	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 05:52	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
194	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 05:52	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
195	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 05:51	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
196	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 05:50	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
197	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 05:49	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
198	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 05:48	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
199	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 01:14	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
200	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 01:13	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.09								
	Karangmojo								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan (Gunungkidul Cerdas)	Status	Aksi
201	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 01:12		Dilanjutkan	
	34.03.09 Karangmojo				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)
202	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 01:11			Dilanjutkan
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)
	Dinas Pendidikan				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 01:10			Dilanjutkan
203	USULANSKPDTELAHAH			500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)
	Dinas Pendidikan				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 01:10			Dilanjutkan
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 01:10			Dilanjutkan
204	Karangmojo			500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Dinas Pendidikan				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 01:10			Dilanjutkan
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 01:10			Dilanjutkan
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)
205	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 01:09			Dilanjutkan
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)
	Dinas Pendidikan				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 01:08			Dilanjutkan
206	USULANSKPDTELAHAH			500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)
	Dinas Pendidikan				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 01:08			Dilanjutkan
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 01:08			Dilanjutkan
207	Karangmojo			500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	Dinas Pendidikan				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 01:07			Dilanjutkan
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 01:07			Dilanjutkan
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)
208	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 01:07			Dilanjutkan
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)
	Dinas Pendidikan				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 01:07			Dilanjutkan
209	USULANSKPDTELAHAH			500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09 Karangmojo				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)
	Dinas Pendidikan				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 01:07			Dilanjutkan
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rabu, 15/03/2023 01:07			Dilanjutkan

Volume / Satuan	Usulan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
218	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	01:00	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
219	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:59	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
220	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:58	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
221	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:58	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
222	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:57	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
223	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:56	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
224	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:56	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
225	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:55	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
226	USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:54	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
227	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:53	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				
228	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:53	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				
229	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:52	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				
230	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:51	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				
231	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:51	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				
232	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:50	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
233	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:49	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
234	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:49	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.09				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Karangmojo				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:48	Perlu nya Beasiswa Siswa	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
235	34.03.09 Karangmojo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:47	Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
236	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:46	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
237	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:46	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
238	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:45	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
239	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09 Karangmojo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:44	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
240	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09.2001 Bejiharjo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:43	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
241	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09.2001 Bejiharjo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:43	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
242	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09.2001 Bejiharjo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:42	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
243	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.09.2001 Bejiharjo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:42	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
244	USULANSKPDTELAAH 34.03.09.2001 Bejiharjo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	00:41 Rabu, 15/03/2023 00:40	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
245	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09.2001 Bejiharjo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 00:40	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
246	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09.2001 Bejiharjo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rabu, 15/03/2023 00:40	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
247	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.17 Tanjungsari	Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Rabu, 15/03/2023 00:38	Kurangnya Alat Peraga Edukatif PAUD	Dilanjutkan	
248	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.07.2001 Giripanggung	Pengadaan perlengkapan sekolah Siswa Miskin jenjang SD	1,00 / Paket	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.17 - Pengadaan Perlengkapan Siswa	Rabu, 15/03/2023 00:36	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
249	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.07.2001 Giripanggung	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:35	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
250	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.07.2001 Giripanggung	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:34	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
251	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.07.2002 Sumberwungu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:33	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
252	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.07.2002 Sumberwungu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:32	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
253	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.07.2002 Sumberwungu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:32	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
254	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.07.2002 Sumberwungu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:31	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
255	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.07.2002 Sumberwungu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:30	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
256	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.07.2002 Sumberwungu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:29	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
257	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.07.2002 Sumberwungu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:28	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
258	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.07.2002 Sumberwungu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:27	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
259	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.07.2002 Sumberwungu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:26	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
260	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.11.2003 Bobodayaan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:26	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
261	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.11.2003 Bobodayaan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:26	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
262	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.11.2003 Botodayan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:24	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
263	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.11.2003 Botodayan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:24	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
264	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.11.2003 Botodayan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:23	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
265	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.08.2004 Candirejo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:22	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
266	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.08.2003 Pacarejo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:21	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
267	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.08.2004 Candirejo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:21	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
268	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.08.2004 Candirejo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:20	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
269	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.08.2004 Candirejo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:19	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
270	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.08.2004	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:18	MASH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
271	Candirejo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:18	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.07.2001				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
272	Giripanggung	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:17	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.08.2002				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
273	Semanu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:16	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.08.2002				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
274	Semanu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:15	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.08.2002				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
275	Semanu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:14	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.11.2003				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
276	Botobaya	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:14	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.11.2003				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
277	Botobaya	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:13	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.11.2003				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
278	Botobaya	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:12	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.11.2003				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Botobaya	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rabu, 15/03/2023 00:11	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
	34.03.11.2003				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
279	34.03.11.2003 Bobodayaan Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:10	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
280	34.03.11.2003 Bobodayaan Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:09	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
281	34.03.11.2003 Bobodayaan Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:08	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
282	34.03.11.2003 Bobodayaan Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:07	MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN	Dilanjutkan	
283	34.03.11.2003 Bobodayaan Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Rabu, 15/03/2023 00:06	perlu nya biasiswa siswa miskin jenjang SD	Dilanjutkan	
284	34.03.09.2001 Bejharjo Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:52	Kurang nya Ape PAUD	Dilanjutkan	
285	34.03.16.2002 Tileng Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:48	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
286	34.03.16.2002 Jepitu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:44	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
287	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023		Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
288	USULANSKPDTELAAH 34.03.16.2002 Jeplitu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:44	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
289	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.16.2002 Jeplitu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:43	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
290	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.16.2003 Karangawen	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:42	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
291	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.16.2003 Karangawen	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:41	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
292	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.16.2002 Jeplitu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:40	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
293	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.16.2002 Jeplitu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:39	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
294	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.16.2003 Karangawen	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:38	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
295	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.16.2004 Nglimur	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:38	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
296	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.16.2004 Nglimur	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:37	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
297	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2008 Songbanyu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:36	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
298	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2008 Songbanyu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:32	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
299	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2008 Songbanyu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:31	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
300	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2008 Songbanyu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:31	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
301	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2008 Songbanyu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:30	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
302	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2008 Tileng	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:29	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
303	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2008 Tileng	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:28	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
304	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2008 Tileng	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:28	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
305	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2008 Tileng	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:27	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
306	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 23:26	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.16.2006								
	Tileng								
	Dinas Pendidikan								
307	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 23:26	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.16.2006								
	Tileng								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
308	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 23:25	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.16.2006								
	Tileng								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
309	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 23:24	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.16.2006								
	Tileng								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
310	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 23:23	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.16.2006								
	Tileng								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
311	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 23:22	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.16.2006								
	Tileng								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
312	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 23:21	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.16.2007								
	Pucung								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
313	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 23:20	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.16.2006								
	Tileng								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
314	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 23:19	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.16.2006								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
	USULANSKPDTELAHAH								

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan (Gunungkidul Cerdas)	Status	Aksi
315	Tileng				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USLANSKPDTELAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:18		Dilanjutkan	
	34.03.16.2006				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Tileng				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
316	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USLANSKPDTELAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:17		Dilanjutkan	
	34.03.16.2006				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Tileng				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
317	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USLANSKPDTELAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:17		Dilanjutkan	
	34.03.16.2006				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Tileng				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
318	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USLANSKPDTELAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:16		Dilanjutkan	
	34.03.16.2006				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Tileng				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
319	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USLANSKPDTELAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:15		Dilanjutkan	
	34.03.16.2006				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Tileng				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
320	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USLANSKPDTELAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:14		Dilanjutkan	
	34.03.16.2006				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Tileng				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
321	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USLANSKPDTELAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:13		Dilanjutkan	
	34.03.16.2006				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Tileng				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
322	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USLANSKPDTELAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:12		Dilanjutkan	
	34.03.16.2006				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Tileng				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Dinas Pendidikan			500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USLANSKPDTELAH				1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:08		Dilanjutkan	
	34.03.16.2006				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Tileng				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
323	34.03.16.2002 Jepitu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:07	Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
324	34.03.16.2003 Karangawen Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:06	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
325	34.03.16.2002 Jepitu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:04	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
326	34.03.16.2003 Karangawen Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:03	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
327	34.03.16.2002 Jepitu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:02	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
328	34.03.11.2006 Nglingdur Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:01	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
329	34.03.16.2002 Semugh Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 23:00	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
330	34.03.16.2002 Jepitu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:58	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
331	34.03.16.2007 Pucung Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 14/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
332	USULANSKPDTELAHAH 34.03.11.2003 Bodoyayan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:57	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
333	USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2004 Ngjindur	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:55	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
334	USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2002 Jepitu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:54	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
335	USULANSKPDTELAHAH 34.03.11.2002 Plimbombo	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:53	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
336	USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2006 Tileng	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:52	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
337	USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2006 Tileng	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:51	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
338	USULANSKPDTELAHAH 34.03.16.2002 Jepitu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:50	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
339	USULANSKPDTELAHAH 34.03.05.2004 Karangduwet	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:49	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
340	USULANSKPDTELAHAH 34.03.01.2008 Siraman	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:49	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	Siswa berasal dari Keluarga tidak mampu

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
341	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:48	Siswa berasal dari Keluarga tidak mampu	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	34.03.01.2008			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Siraman			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
				1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					
342	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMP (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:46	Siswa berasal dari Keluarga tidak mampu	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	34.03.01.2008			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Siraman			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
				1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					
343	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:46	Siswa berasal dari Keluarga tidak mampu	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	34.03.01.2012			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Mulo			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
344	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:45	Siswa berasal dari Keluarga tidak mampu	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	34.03.01.2008			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Siraman			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
345	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:44	Siswa berasal dari Keluarga tidak mampu	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	34.03.01.2008			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Siraman			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
346	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:18	Siswa berasal dari Keluarga tidak mampu	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	34.03.01.2008			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Siraman			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
347	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:16	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	34.03.08.2003			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pacarejo			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
348	Dinas Pendidikan	Perbaikan ruang ruang kelas Sekolah Dasar (SD)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:15	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	34.03.08.2005			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Dadapayu			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
349	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 22:13	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAAH			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	34.03.08.2005			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Dadapayu			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
350	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 22:13	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.08.2005								
	Dadapayu								
	Dinas Pendidikan								
351	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 22:12	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.08.2005								
	Dadapayu								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
352	Dinas Pendidikan	Perbaikan ringan ruang kelas Sekdiah Dasar (SD)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 22:11	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.08.2005								
	Dadapayu								
	Dinas Pendidikan								
353	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 22:09	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.08.2005								
	Dadapayu								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
354	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 22:08	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.08.2005								
	Dadapayu								
	Dinas Pendidikan								
355	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 22:07	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.08.2005								
	Dadapayu								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
356	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 22:06	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.08.2005								
	Dadapayu								
	Dinas Pendidikan								
357	USULANSKPDTELAHAH	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Selasa, 14/03/2023 22:05	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.08.2005								
	Dadapayu								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								
358	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 22:04	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH								
	34.03.08.2005								
	Dinas Pendidikan								
	USULANSKPDTELAHAH								

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan (Gunungkidul Cerdas)	Status	Aksi
359	Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 22:03	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	Dinas Pendidikan				1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
360	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 22:02	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.08.2005 Dadapayu				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
361	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 22:01	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.08.2005 Dadapayu				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
362	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 22:00	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.08.2005 Dadapayu				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
363	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 22:00	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.08.2005 Dadapayu				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
364	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:59	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.08.2005 Dadapayu				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
365	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:58	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.08.2005 Dadapayu				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
366	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:57	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	34.03.08.2005 Dadapayu				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:56	Dilanjutkan	Dilanjutkan	
	USULANSKPDTELAHAH				1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
					1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
367	34.03.08.2005 Dinas Pendidikan Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:55	Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
368	34.03.08.2005 Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:53	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
369	34.03.08.2005 Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:50	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
370	34.03.08.2005 Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:49	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
371	34.03.08.2005 Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:48	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
372	34.03.08.2005 Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:47	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
373	34.03.08.2005 Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:46	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
374	34.03.08.2005 Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:45	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
375	34.03.08.2005 Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023 21:44	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
	34.03.08.2005 Dinas Pendidikan	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Selasa, 14/03/2023	Perlu nya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
376	USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 21:45	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
377	USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 21:44	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
378	USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 21:43	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
379	USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 21:42	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
380	USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 21:40	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
381	USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 21:39	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
382	USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 21:36	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
383	USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 21:35	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	
384	USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAHAH 34.03.08.2005 Dadapayu	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	1,00 / Siswa	500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Selasa, 14/03/2023 21:18	Perlunya Beasiswa Siswa Miskin jenjang SD (Gunungkidul Cerdas)	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
394	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.10 Ponjoring	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Sabtu, 11/03/2023 05:56	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	Dilanjutkan	
395	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.07 Tepus	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD	Sabtu, 11/03/2023 05:50	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	Dilanjutkan	
396	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.07 Tepus	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 11/03/2023 05:47	(PIS) - Pengadaan mebelair PAUD	Dilanjutkan	
397	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.06 Sragen	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 11/03/2023 05:33	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	Dilanjutkan	
398	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.10 Ponjoring	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 11/03/2023 05:07	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	Dilanjutkan	
399	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.07 Tepus	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 11/03/2023 05:00	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	Dilanjutkan	
400	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.07 Tepus	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 11/03/2023 04:52	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	Dilanjutkan	
401	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.13 Ngawen	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 11/03/2023 04:45	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	Dilanjutkan	
402	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.07 Tepus	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 11/03/2023 04:41	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	Dilanjutkan	
403	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.03 Prawan	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 11/03/2023 04:24	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	Dilanjutkan	
404	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Semaru	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	2,00 / Paket	30.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sabtu, 11/03/2023 04:20	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	Dilanjutkan	
405	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.09 Karangreja	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	1,00 / Ruang	121.500.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Seding Berat GeoungRuang kelasRuang Guru PAUD	Jumat, 10/03/2023 18:10	(PIS) - Rehabilitasi ruang kelas PAUD	Dilanjutkan	
406	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.15 Saptosari	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	1,00 / Paket	15.000.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumat, 10/03/2023 17:57	(PIS) - Pengadaan APE PAUD	Dilanjutkan	
407	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34.03.05 Paliyan	(PIS) - Penyelenggaraan Paket B setara SMP	10,00 / Orang	11.600.000,00	1.01.0.0.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumat, 10/03/2023 17:12	(PIS) - Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Dilanjutkan	

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
408	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34/03/02 Ngaliyar	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	1,00 / Orang	1.690.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nontomal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nontomal/Kesetaraan	Jumat 10/03/2023 17:11	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Dilanjutkan	
409	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34/03/05 Palyan	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	25,00 / Orang	42.250.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nontomal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nontomal/Kesetaraan	Jumat 10/03/2023 16:56	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Dilanjutkan	
410	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34/03/02 Ngaliyar	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	2,00 / Orang	3.380.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nontomal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nontomal/Kesetaraan	Jumat 10/03/2023 16:42	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Dilanjutkan	
411	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34/03/11 Rongkop	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	10,00 / Orang	16.900.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nontomal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nontomal/Kesetaraan	Jumat 10/03/2023 16:20	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Dilanjutkan	
412	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34/03/10 Pongor	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	12,00 / Orang	20.280.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nontomal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nontomal/Kesetaraan	Jumat 10/03/2023 16:11	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Dilanjutkan	
413	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34/03/14 Gejangari	(PIS) - Pengadaan alat tulis siswa Siswa Miskin jenjang SMP	20,00 / Paket	10.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.28 - Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumat 10/03/2023 16:06	(PIS) - Pengadaan alat tulis siswa Siswa Miskin jenjang SMP	Dilanjutkan	
414	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34/03/05 Palyan	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	32,00 / Orang	54.080.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nontomal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nontomal/Kesetaraan	Jumat 10/03/2023 15:35	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Dilanjutkan	
415	Dinas Pendidikan USULANSKPDTELAAH 34/03/13 Ngawen	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	63,00 / Orang	106.470.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nontomal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nontomal/Kesetaraan	Jumat 10/03/2023 15:31	(PIS) - Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Dilanjutkan	
Total Pagu				1.242.650.000,00					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Tema Pembangunan Nasional dalam RKP tahun 2024 adalah "peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Arah kebijakan pembangunan Provinsi DIY tahun 2024 adalah mengatasi ketimpangan wilayah, mengatasi ketimpangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas pengembangan kawasan wilayah utara dan Geopark Gunungsewu serta pendekatan tematik DIY meliputi penurunan kemiskinan, ketimpangan wilayah dan peningkatan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 yaitu "Optimalisasi ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan taraf hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia". Tema tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan ekonomi :
 - a. Investasi dan pariwisata
 - b. Pengembangan sektor unggulan
2. Penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim, dan penanggulangan stunting;
3. Ketahanan pangan;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Infrastruktur, lingkungan, hidup, dan pengelolaan bencana;

6. Ketentraman dan ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selanjutnya menjadi acuan bagi PD dalam penentuan perencanaan program kegiatan tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul

Penyusunan Renja tahun 2024 mengacu pada tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Secara langsung Dinas Pendidikan mendukung pencapaian prioritas daerah keempat yaitu peningkatan kualitas SDM dengan sasaran daerah derajat kualitas SDM meningkat. Rencana Kerja ini dijabarkan dalam program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD serta memperhatikan rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Pengaliran prioritas daerah sampai pada indikator sasaran PD disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
3.	Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM meningkat	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat	1. Rata-rata lama sekolah
				Akuntabilitas kinerja PD	2. Harapan lama sekolah Nilai AKIP PD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, ditetapkan satu tujuan Dinas Pendidikan yaitu Meningkatnya Derajat Pendidikan Penduduk dengan indikator tujuan rata-rata lama sekolah tahun 2026 dan harapan lama sekolah tahun 2026. Tujuan ini dijabarkan dalam dua sasaran Dinas Pendidikan yaitu

- a. Aksesibitas dan kualitas pendidikan meningkat dengan dua indikator sasaran yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
- b. Akuntabilitas kinerja PD meningkat dengan indikator sasaran nilai AKIP PD.

Pengaliran hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD disajikan dalam tabel 3.2 dan 3.3.

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Pendidikan

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Penduduk	1. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2026 2. Harapan Lama Sekolah Tahun 2026	1. 7,86 2. 13,02

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Pendidikan

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1	Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	7,60 13,00
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	80,07

Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah ditetapkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, dan penyelarasan dengan RPJMD dan Renstra 2021-2026, disajikan rumusan IKU tahun 2024 dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2024

NO	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat	1. Rata-rata lama sekolah	7,60
		2. Harapan lama sekolah	13.00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Kebijakan Umum Bupati;
3. Prioritas Pembangunan;
4. Pencapaian SDGs;
5. Pengurangan Kemiskinan;
6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
8. Pencapaian IKU;
9. Pengentasan warga buta aksara;
10. Pengentasan Anak Tidak Sekolah;
11. Kebijakan Merdeka Belajar

Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2024 terdiri atas 6 program yang dijabarkan dalam 18 kegiatan dan 138 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana / pagu indikatif senilai Rp. 844.956.876.860,-, dengan lokasi pelaksanaan di seluruh Gunungkidul. Namun berdasarkan hasil fasilitasi RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 oleh Bappeda D.I Yogyakarta, Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2024 terdiri atas 6 program 18 kegiatan dan 130 subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.832.583.876.927. Hasil perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.1.

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1								831.957.143.827,00						15	749.784.141.000,00	
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						831.957.143.827,00							749.784.141.000,00	
1.1	1.01.01	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penuh Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100			100	724.621.467.827,00				Peningkatan Kualitas SDM			577.903.390.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, disusun tepat waktu (Dokumen)	3			3	166.172.500,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGKIDUL)				3	1.547.950.000,00		Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.00	3		3.00	33.772.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq			4.00	600.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1		1.00	3.430.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq			1.00	103.800.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1		1.00	3.230.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq			1.00	103.800.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.00	3		2.00	6.635.100,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq			2.00	103.800.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	IV-2			IV-2	5.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq			1.00	103.800.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					RENYA TAHUN 2022	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	1.00	1.00	1.00	16		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petugas Aset Sekolah, THL Dinas Pendidikan	1.00	800.000.000,00	
1.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	2.00	2.00	4		6.600.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		2.00	32.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Orang)			5977		25.922.500,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM		5.977	146.310.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.00	5.00	14		25.482.500,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		5.00	20.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.00	1	1.00		440.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	5.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05.0008		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahkan/tugaskan (Orang)	100.00	100.00	0			(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		100.00	15.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1437.00	1437.00	0			(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1297.00	106.310.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum terlayani (Paket)			8		443.708.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM		8	4.609.015.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	48.00	48.00	2		3.000.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		104.00	54.240.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.763.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			1.618.773.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	253.00	172.00	18			(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan	438.00	1.618.773.000,00	
1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	123.00	124.00	10	122.936.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan, Korwil, THL, Dinas Pendidikan	214.00	209.053.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	59.00	53.00	22	8.750.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Korwil, Dinas Pendidikan	59.00	96.650.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.00	3.00	0	600.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)				Dinas Pendidikan	733.00	3.816.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	39	12	25.176.000,00		(Dinas Pendidikan, Balahejo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan	1	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.00	300.00	25	217.482.500,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Korwil Dan Dinas Pendidikan	25.00	700.520.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.00	4.00	2			(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan, THL, Dinas Pendidikan	11.00	1.875.963.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terleksana (Paket)	9.00	10.00	0	IV-6		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)				Dinas Pendidikan	3	178.390.000,00	Dinas Pendidikan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)						(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)				Dinas Pendidikan	174.00	148.390.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					REKOR TAHUN 2022	REKOR TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	1.01.01.2.07.0010	2	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							6.00	3.00	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	3.00	30.000.000,00	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	5	6.00	3.00	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi (Paket)	Peningkatan Kualitas SDM	3	1.261.871.000,00	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	5	384	106.00	576.00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM	576.00	698.710.000,00	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	5			1.00	322.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		525.461.000,00	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	5	1	1.00	1.00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM	7.00	525.461.000,00	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	5	6	9.00	9.00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM	9.00	37.700.000,00	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi pemeliharannya	4	5			5	203.316.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	5	885.300.000,00	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	5	75	80.00	65.00	175.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	95.00	295.900.000,00	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	5	7.00	114.00	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	15.00	75.000.000,00	Dinas Pendidikan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RENYA RENJA OPD TAHUN 2022	RENYA RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	1.01.02.2.01.0035	3 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0.00	39.00	150	10.350.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Sekolah SD	467.00	12.790.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)		0.00	6.00	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		72.00	404.750.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		0.00	39.00	140	51.020.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Guru SD	39.00	12.790.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		0.00	1	1	27.494.100,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	warga negara usia 7- 15 tahun yang tidak bersekolah	1	4.365.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0041	fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)		0.00	0.00	1.00	9.500.000,00	(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	PTK Jarijang SD	1.00	12.300.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satu pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satu pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)		0.00	1.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	60.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		905.00	1090.00	1	500.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Siswa Sekolah Dasar	4842.100	5.432.900.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapastias Bidang Pendidikan									Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		700.000.000,00	700.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENAJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN RENAJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0.00	39.00	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)						3556.00	700.000.000,00	
1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1460.00	468.00	466	93.205.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Sekolah Jenjang SMP, Sekolah SD	468.00	7.550.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	52.00	4.00	2	250.000.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Sekolah Dasar	1.00	9.915.449.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi A (Sekolah)	7.00	7.00	0	36.187.388.860,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM	106	49.624.471.000,00	49.624.471.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0032		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	7.00	7.00	0	115.800.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM	19.00	992.464.000,00	992.464.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	711.00	916.00	226			(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Peserta didik SMP, Siswa Miskin	811.00	1.459.800.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	131.00	269.00	0			(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM		554.00	3.562.840.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0039		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	2330.00	642.00	0	1.300.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM		4657.00	1.531.383.000,00	Dinas Pendidikan
							1.300.000,00								200.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	0.00	0.00	0.00	50		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	PTK jenjang SMP	235.00	200.000.000,00	
1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakal Pangkat/Colongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2798	433.00	433.00	433.00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Guru SMP, PTK, PTK SMP, Tim Penilai	5537.00	693.094.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	120.00	392.00	110	110	123.000.500,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Sekolah Penggerak, THL Dinas Pendidikan	336.00	306.642.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	112	113.00	110.00	110.00	35.677.620.860,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	DAK Non Fisik- BOS Kinerja, DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Sekolah Menengah Pertama	111.00	25.670.673.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0043		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	113.00	113.00	110	110	64.735.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Pengelola BOSP Sekolah Menengah Pertama, THL Dinas Pendidikan	1674.00	125.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0048		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0.00	12.00	0	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		110.00	9.820.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0049		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0.00	11.00	0	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		72.00	9.820.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0050		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					IV-12				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			9.820.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					REKOR TAHUN 2022	REKOR TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGKIDUL)					1710.00	9.820.000,00	
1.01.02.2.02.0051		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0.00	12.00	0	0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	3.420.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0054		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0.00	1.00	0	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGKIDUL)					110	12.300.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0055		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk peningkatan perundangan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0.00	0.00	1	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3.00	3.420.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk peningkatan perundangan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0.00	1.00	0	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGKIDUL)					3.00	3.420.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0059		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	28821	24482.00	24482.00	24482.00	122.917.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.4482.00	9.712.655.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0060		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0.00	12.00	0	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGKIDUL)					2.00	300.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0062		Pengadaan Perangkat Peserta Didik	Jumlah Perangkat Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	11091.00	819.00	1	1	750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19665.00	5.011.500.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					REKOR OPD TAHUN 2022	REKOR RENJA TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	1.01.02.2.03	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0003	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang terekreditasi (setuan PAUD)				762	19.067.981.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM		767	20.637.541.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0,00	0,00	0	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)					1,00	16.100.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0,00	0,00	0	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)					1,00	16.100.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0012	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	980,00	586,00	144	21.600.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15739,00	204.250.000,00	Siswa PAUD kurang mampu
	1.01.02.2.03.0013	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)	0,00	0,00	2	30.000.000,00		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				49,00	204.250.000,00	Lembaga PAUD
	1.01.02.2.03.0015	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	26942,00	1312,00	1256	1.215.150.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4534,00	1.900.000.000,00	Bunda PAUD, Mitra PAUD, Pendidik, Pendidik PAUD
	1.01.02.2.03.0016	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	0,00	0,00	18	1.100.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18	15.000.000,00	Pendidik PAUD
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	520,00	990	520,00	60.620.000,00		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4210,00	1.098.221.000,00	Pendidik PAUD, PTK, Tim Penilai

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI	PRAKIRAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					RENTJA TAHUN 2022	RENTJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	1.01.02.2.03.0017	2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	3 Jumlah PAUD yang Dileksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	4 105.00	5 0.00	6 199	7 198.00	8 198.00	9 198.00	10 101	11 101	12 101	13 101	14 101	15 101	16 101	17 101
	1.01.02.2.03.0018	3 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	4 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	5 3617	6 0.00	7 198.00	8 198.00	9 198.00	10 198.00	11 198.00	12 198.00	13 198.00	14 198.00	15 198.00	16 198.00	17 198.00	18 198.00
	1.01.02.2.03.0019	3 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	4 Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	5 0.00	6 3617	7 198.00	8 198.00	9 198.00	10 198.00	11 198.00	12 198.00	13 198.00	14 198.00	15 198.00	16 198.00	17 198.00	18 198.00
	1.01.02.2.03.0022	3 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	5 0.00	6 3617	7 198.00	8 198.00	9 198.00	10 198.00	11 198.00	12 198.00	13 198.00	14 198.00	15 198.00	16 198.00	17 198.00	18 198.00
	1.01.02.2.03.0023	3 Peningkatan konten digital untuk pendidikan	4 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5 0.00	6 3617	7 198.00	8 198.00	9 198.00	10 198.00	11 198.00	12 198.00	13 198.00	14 198.00	15 198.00	16 198.00	17 198.00	18 198.00
	1.01.02.2.03.0024	3 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	4 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5 0.00	6 3617	7 198.00	8 198.00	9 198.00	10 198.00	11 198.00	12 198.00	13 198.00	14 198.00	15 198.00	16 198.00	17 198.00	18 198.00
	1.01.02.2.03.0025	3 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5 0.00	6 3617	7 198.00	8 198.00	9 198.00	10 198.00	11 198.00	12 198.00	13 198.00	14 198.00	15 198.00	16 198.00	17 198.00	18 198.00
	1.01.02.2.03.0026	3 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	4 Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Dokumen)	5 0.00	6 3617	7 198.00	8 198.00	9 198.00	10 198.00	11 198.00	12 198.00	13 198.00	14 198.00	15 198.00	16 198.00	17 198.00	18 198.00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN ANSUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RENYA TAHUN 2022	RENYA TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.00	0.00	1.00	1		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pendidik PAUD	1.00	4.225.000,00	
1.01.02.2.03.0029		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0.00	0.00	0.00	4	10.100.000,00	(Dinas Pendidikan, Balahejo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Pendidik PAUD	180.00	12.350.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0039		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0.00	0.00	35.00	0		(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		3256.00	12.350.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0041		Pengadaan Peringkat Peserta Didik	Jumlah Peringkat Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	50.00	0.00	50.00	360	14.400.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Siswa miskin	4452.00	16.100.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi (Lembaga)				3	3.186.336.400,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM		2	8.172.216.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	80.00	0.00	120.00	38	19.000.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Warga Belajar	500.00	830.151.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0014		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0.00	0.00	0.00	10	999.900,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	PTK	12.00	15.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0015		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0.00	0.00	0.00	17	6.210.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	SKB	19.00	121.525.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI	RENCANA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RENCANA RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	1.01.02.2.04.0016	2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dileksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					25	0.00	29.00	10.950.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	SKB dan PKBM	29.00	185.300.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		25.00	23.00	30	1.579.980.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	DAK Non Fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	PKBM dan SKB	30	2.033.200.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)		25	60.00	60.00	6.350.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	SKB dan PKBM	60.00	86.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		0.00	25.00	0	-	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		65.00	5.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)		0.00	3.00	0	-	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		15.00	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		0.00	25.00	0	4.460.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		30.00	16.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		0.00	1	1	4.490.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Warga Gumungktul	1	5.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					IV-17	4.490.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			3.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					PRAKIRAAN CAPAIAN RENJAT TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01.02.2.04.0030		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.00	0.00	1.00	1.00		(Dinas Pendidikan, Kab. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKB dan PKBM	2.00	3.000.000,00	
1.01.02.2.04.0040		Pengadaan Perengkapan Sekolah	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0.00	0.00	0.00	2	4.550.000,00	(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	Peningkatan Kualitas SDM	Pendidik Kesetaraan	2	4.550.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0042		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0.00	0.00	120.00	50.00	10.000.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	Peningkatan Kualitas SDM	Warga Belajar	1000.00	800.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	2882	25.00	2832.00	0	1.539.346.500,00	(Dinas Pendidikan, KAB. GUNUNGGKIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	Peningkatan Kualitas SDM		180.00	20.000.000,00	Dinas Pendidikan
3.1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal (Persentase)				100	8.310.000,00				Peningkatan Kualitas SDM			304.465.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah jenjang SD dan SMP yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan (Sekolah)				578		(Baleharjo, Kec. Wonosari)			Peningkatan Kualitas SDM		578	124.530.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01.0002		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2.00	1.00	1.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	30.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01.0003		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	0.00	0.00	0.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	Peningkatan Kualitas SDM		566.00	16.980.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					REKOR RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	1.01.03.2.01.0004	2 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	4 Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	5	6 0.00	7 0.00	8 0	9	10 (Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	11	12 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	13 Peningkatan Kualitas SDM	14	15 42.00	16 15.850.000,00	17 Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)		0.00	0.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	15.850.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)		0.00	0.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	15.850.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)		0.00	0.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	30.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal (Sekolah)			8.310.000,00	1216		(Baleharjo, Kec. Wonosari)			Peningkatan Kualitas SDM		1.216	179.935.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)		1.00	1.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	37.275.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)		0.00	0.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1227.00	36.810.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah (Buku)		0.00	0.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	16.300.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					REKOR TAHUN 2022	REKOR TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	0.00	0.00	0.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)					1.00	16.300.000,00		
1.01.03.2.02.0005		Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	0.00	0.00	0.00	1.00	8.310.000,00	(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	15.000.000,00	Dinas Pendidikan	
1.01.03.2.02.0006		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	0	6.525.274.000,00	(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	74.550.000,00	Dinas Pendidikan	
4.1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (%)				51					Peningkatan Kualitas SDM			7.705.000.000,00	Dinas Pendidikan	
1.01.04.2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik (Orang) Jumlah Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Orang) Jumlah Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Orang) Jumlah Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik (Orang) Jumlah Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Orang) Jumlah Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik (Orang)	691	100	272	2341	410	1222	691	100	272	2.341	410	1.222	7.705.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.04.2.01.0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1.120.000,00	(KAB. GUNUNGKIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			5.000.000,00	Dinas Pendidikan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					REKOR TAHUN 2022	REKOR TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Satuannya Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2	2	2	2		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pendidik dan tenaga kependidikan	3	5.000.000,00	
1.01.04.2.01.0002		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	2	4.00	4.00	4.00	6.524.154.000,00	(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	GTT dan PTT, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), THL Dinas Pendidikan	4.00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00
5.1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah/Lembaga Yang Telah Memiliki Perizinan (%)				100	3.710.000,00				Peningkatan Kualitas SDM			117.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.05.2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terlayani			1	1		(KAB. GUNUNGKIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM		1	57.500.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.05.2.01.0001		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	2.500.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.05.2.01.0002		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	2.00	10.00	10.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		10.00	55.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.05.2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani (Laporan / Dokumen)			2	2	3.710.000,00	(KAB. GUNUNGKIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM		2	59.500.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.05.2.02.0001		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1.00	2.500.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	RENCANA RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	1.01.05.2.02.0002	3 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5	6 2.00	7 10.00	8 1	9 3.710.000,00	10 (Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	11 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	13 Peningkatan Kualitas SDM	14 Dinas Pendidikan	15 10.00	16 2.000.000,00	17 Dinas Pendidikan
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		1.00	1.00	0		(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Pendidikan	1.00	55.000.000,00	Dinas Pendidikan
2								277.465.000,00							500.000.000,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						277.465.000,00							500.000.000,00	
1.1.2.22.08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						277.465.000,00							500.000.000,00	Dinas Pendidikan
			Persentase Lembaga PAUD Yang Menerapkan Pengawasan Peserta Didik Berbasis Budaya (%) Persentase Sekolah Dasar (SD) Yang Menerapkan Muatan Lokal Berbasis Budaya (%) Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Menerapkan Muatan Lokal Berbasis Budaya (%)				20.99 23.87 100					Peningkatan Kualitas SDM				
2.22.08.5.08		Pendidikan Berbasis Budaya	Jumlah PAUD, SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan Berbasis Budaya (Sekolah)				474	277.465.000,00	(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)			Peningkatan Kualitas SDM		474	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
2.22.08.5.08.0001		Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal (Laporan)		0.00	0.00	3	277.465.000,00	(Dinas Pendidikan, Baleharjo, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		3	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
			J U M L A H					832.234.608.827,00							750.284.141.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RENTJA TAHUN 2022	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	1				(Sanggar Kegiatan Belajar, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sanggar Kegiatan Belajar	1	12.000.000,00	
1.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlektasna (Paket)	0.00	4				(SKB, Baleharjo, Kec. Wonosari)			Peningkatan Kualitas SDM		4	10.300.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar
1.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0				(SKB, Baleharjo, Kec. Wonosari)			Peningkatan Kualitas SDM		4.00	10.300.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar
1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi (Paket)		3	65.685.600,00			(Baleharjo, Kec. Wonosari)			Peningkatan Kualitas SDM		3	61.200.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar
1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	36	65.685.600,00			(Sanggar Kegiatan Belajar, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM	Sanggar Kegiatan Belajar	36	61.200.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar
1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi pemeliharaannya		5	36.400.000,00			(Baleharjo, Kec. Wonosari)			Peningkatan Kualitas SDM		5	46.850.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar
1.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	0.00	1	28.500.000,00			(Sanggar Kegiatan Belajar, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM	Sanggar Kegiatan Belajar	1	28.500.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar
1.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	13	4.900.000,00			(Sanggar Kegiatan Belajar, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM	Sanggar Kegiatan Belajar	13	14.850.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar
1.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	10	3.000.000,00			(Sanggar Kegiatan Belajar, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM	Sanggar Kegiatan Belajar	10	3.500.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar
2.1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				212.618.000,00									642.100.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target Akhir Periode Rencana OPD	RENCANA TAHUN 2022	RENCANA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Di PAUD (%) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Di Sekolah Dasar (%) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Di Sekolah Menengah Pertama (%) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Di Pendidikan Kesetaraan (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (%)				94.21	12.600.000,00	(Baleharjo, Kec. Wonosari)				Peningkatan Kualitas SDM		762	12.600.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar
1.01.02.2.03.0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	0.00		0	30	12.600.000,00	(Sanggar Kegiatan Belajar, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Sanggar Kegiatan Belajar	30	12.600.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar	
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi (Lembaga)				3	200.018.000,00	(Baleharjo, Kec. Wonosari)				Peningkatan Kualitas SDM	3	629.500.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar	
1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	0.00		30	30	200.018.000,00	(Sanggar Kegiatan Belajar, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Sanggar Kegiatan Belajar, THL Sanggar Kegiatan Belajar, Tutor Sanggar Kegiatan Belajar	30	629.500.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar	
			J U M L A H					349.268.100,00							810.950.000,00		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun. Disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2021-2026.

Pada bab penutup Rencana Kerja tahun 2024 ini mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Rencana Kerja tahun 2024 disusun dengan memperhatikan isu strategis, sumber daya dan potensi yang dimiliki serta melibatkan peran dari pemangku kepentingan atau *stakeholder* terkait melalui aspirasi masyarakat maupun usulan dewan. Hal ini dilaksanakan melalui proses Musrenbang tingkat Kapanewon hingga Kabupaten. Namun demikian, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah belum semua usulan bisa terakomodir di tahun 2024.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan merencanakan untuk melaksanakan 6 program dengan 18 kegiatan dan 130 sub kegiatan. Dimana di dalamnya terdapat sub kegiatan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan ini menjadi acuan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Tahun 2024, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam pengendalian tersebut, dapat terlihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan. Apabila dari hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2024.

Wonosari,
DINAS PENDIDIKAN,

NUNUK SETYOWATI

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rancangan Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Disamping menjabarkan Renstra, dalam menyusun Rancangan Awal Renja PD juga harus mengacu pada RPJMD dan RKPD Kabupaten dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 – 2026 serta berpedoman pada visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2021 – 2026. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan tahun ketiga, disusun dengan memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RPJMD dan Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rancangan Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 merupakan tahun ketiga, sehingga disusun dan dirancang agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan dan target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus mampu menyusun Renja Tahun 2024 yang lebih baik, komprehensif, dan aplikatif dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rancangan Awal Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya serta mengakomodir belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses musrenbang. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Renja PD juga diintegrasikan dengan

prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, Rancangan Awal Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rancangan Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi penjabaran visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 mengacu program prioritas RKPD. Disamping perpedoman pada RKPD, Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 juga berpedoman pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 untuk menyusun tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD, arah kebijakan pembangunan Lima Tahun Kelima RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Lebih lanjut penyusunan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah :

1. mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
2. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas; dan

3. sebagai referensi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dalam proses awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. tujuan yang dikehendaki;
3. sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; dan
5. pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan IV berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun lalu 2022			Target program/kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022*	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100 Persen	100 Persen	100%			
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%					100%	100%	100%
2.19.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	123 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	30 Dokumen	30 Dokumen	100%

		Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu												
2.19.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi		4 Dokumen	4 Dokumen	100%								
		Jumlah dokumen penyusunan Rancangan awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan akhir Renja, Renja penetapan PD		4 Dokumen	4 Dokumen	100%								
		Jumlah dokumen Renja PD yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%								
		Jumlah dokumen Renja perubahan PD yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen						2 Dokumen	2 Dokumen				100%
2.19.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen							1 Dokumen				100%
2.19.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen										1 Dokumen	100%
2.19.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%								
		Jumlah dokumen perpanjangan kinerja yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%								
		Jumlah dokumen ROPK yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen							2 Dokumen				100%

2.19.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perpanjangan kinerja perubahan yang terselesaikan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang terselesaikan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah dokumen perubahan ROPK yang terselesaikan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.19.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP yang terselesaikan			0 Dokumen	0 Dokumen	0%			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Dokumen					6 Laporan	6 Laporan	100%
2.19.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi RKPDP yang terselesaikan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi renja (evaluasi hasil RKPDP)			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan					15 Laporan	15 Laporan	100%
2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tersusun	64 Laporan					14 Laporan	14 Laporan	100%
2.19.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	14 Bulan	100%			
		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1344 Orang/Bulan					336 orang/bulan	336 Orang/Bulan	100%
2.19.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terselesaikan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

2.19.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terverifikasi		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.19.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi yang terfasilitasi		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.19.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	100%
2.19.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.19.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan Bulanan/SPJ yang terselesaikan		12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
		Jumlah dokumen laporan keuangan semester yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	52 Laporan				13 Laporan	13 Laporan	100%
2.19.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.19.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang terfasilitasi	26 Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2.19.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun dengan baik		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen							1 Dokumen	100%
2.19.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pinjam pakai Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
2.19.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah peserta rakor dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD		15 orang	15 orang	100%					
2.19.01.2.03.04.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan						1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah peserta mengikuti workshop Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		30 orang	30 orang	100%					
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan						1 Laporan	1 Laporan	100%
2.19.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
2.19.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen aset yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
		Jumlah dokumen BHP yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan						2 Laporan	2 Laporan	100%
2.19.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
2.19.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani	4 Laporan						1 Laporan	1 Laporan	100%
2.19.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (SKP, KP4, Cuti, Berkala, KP)		4 Dokumen	4 Dokumen	100%					
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen						1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.19.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah sasaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		25 orang/dokumen	25 orang/dokumen	100%		24 Dokumen	24 Dokumen	100%
2.19.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	96 Dokumen					24 Dokumen	24 Dokumen	100%
2.19.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan	100 Orang					25 Orang	25 Orang	100%
2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah raperda tentang kepemudaan yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
2.19.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Umum Peringkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Kegiatan 8 Paket	5 paket	5 paket	100%		6 Kegiatan 2 Paket	6 Kegiatan 2 Paket	100%
2.19.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia		1 Unit	1 unit	100%				
		Jumlah alat pemadam kebakaran yang terbeli		246 jenis	246 jenis	100%				
		Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan		5 unit	5 unit	100%				
		Jumlah Komputer yang terbeli		5 unit	5 unit	100%				
		Jumlah Laptop yang dibeli		1 unit	1 unit	100%				
		Jumlah layar proyektor beserta tripodnya		1 unit	1 unit	100%				
		Jumlah LCD yang dibeli		6 Unit	6 Unit	100%				
		Jumlah printer yang dibeli		1 unit	1 unit	100%				
		Jumlah sound system lengkap (amplifier, speaker, microphone) untuk Ruang Rapat								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket					1 Paket	1 Paket	100%
2.19.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli		1 paket	1 paket	100%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket					1 Paket	1 Paket	100%

2.19.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah barang habis pakai yang tersedia		1 Paket	1 Paket	100%			
2.19.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan		59 buah	59 buah	100%			
		Jumlah lembar fotocopy		10000 lembar	10000 lembar	100%			
2.19.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	48 Paket				12 Paket	12 Paket	100%
		Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (12 Bulan)		12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1180 Dokumen				295 Dokumen	295 Dokumen	100%
2.19.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan				12 Laporan	12 Laporan	100%
2.19.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu		200 orang	200 orang	100%			
		Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu		200 orang	200 orang	100%			
		Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		50 orang	50 orang	100%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan				90 Laporan	90 Laporan	100%
2.19.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pengembangan dan atau update modul sistem pemerintahan berbasis elektronik Dinas Pendidikan yang terfasilitasi		25 modul	25 modul	100%			
2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Paket				1 Paket	1 Paket	100%
2.19.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis kursi kerja (kursi putar / eksekutif) yang dibeli		11 unit	11 unit	100%			
		Jumlah dan Jenis rak yang dibeli							
		Jumlah kursi tunggu yang dibeli							

			Jumlah lemari arsip dorong (mobile file) yang dibeli																	
			Jumlah pengadaan meja rapat yang dibeli					12 Unit												
			Jumlah pengadaan kursi rapat yang dibeli					35 unit												
			Jumlah Meja Kerja yang dibeli					11 unit												
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan					4 Paket												
2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa						21 Layanan											100%	
2.19.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan) Jumlah sarana jasa telephon/kawat/faximile yang terbayar (1 rekening x 12 Bulan) Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)						12 Rekening 12 Rekening 12 Rekening											100% 100% 100%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan						144 Laporan												100%
2.19.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah personal komputer yang difasilitasi pemeliharannya Jumlah personal laptop yang difasilitasi pemeliharannya Jumlah personal printer yang difasilitasi pemeliharannya Jumlah personal wireles yang difasilitasi pemeliharannya						5 unit 2 Unit 2 unit 1 unit												100% 100% 100% 100%
2.19.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sewa tanah Stadion Handayani dan Gedung Kesenian yang terbayarkan (2 lokasi)						2 lokasi												100%
2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terfasilitasi pemeliharannya						25 Unit												100%

2.19.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit				14 Unit	14 Unit	100%
2.19.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit				5 Unit	5 Unit	100%
2.19.01.2.13	Penataan Organisasi								
2.19.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Pengukuran IKM				2 Dokumen			100%
		Jumlah dokumen RTP				2 Dokumen			100%
		Jumlah dokumen SOP yang direvisi				10 Dokumen			100%
		Jumlah dokumen SPIP				1 Dokumen			100%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,24 Persen				3 Persen	3 Persen	100%
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kab/kota, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader kab/kota	8 Kali				4 Kali	4 Kali	100%
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda terfasilitasi mengikuti kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Kabupaten, Antar Provinsi, Tingkat Nasional				3 Orang			100%
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti kegiatan PEMUDA PELOPOR				275 orang			100%
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)		120 orang		120 Orang			100%
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota				90 Orang			100%

2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	100 orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100%		
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti sarasehan satgas anti narkoba		100 Orang	100 Orang	100%				
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti workshop Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan		50 Orang	50 Orang	100%				
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah naskah akademik raperda tentang kepemudaan/keolahragaan pendidikan yang terselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti workshop penyusunan rencana Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi rencana Aksi Daerah/Rad tingkat kabupaten		100 Orang	100 Orang	100%				
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah megaphone yang dibeli		2 Buah	2 Buah	100%				
		Jumlah sound system yang dibeli		1 set	1 set	100%				

2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan penghargaan atas jasa dan atau prestasinya (Gunungkidul Cerdas)	210 organisasi	210 organisasi	210 organisasi	100%	200 Orang	200 Orang	100%
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan penghargaan atas jasa dan atau prestasinya (Gunungkidul Cerdas)	210 pemuda	210 pemuda	210 pemuda	100%	80 Orang	80 Orang	100%
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1120 Orang	80 Orang	80 Orang	100%	160 orang	200 Orang	100%
2.19.02.2.02.01	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan	320 Orang	80 Orang	80 Orang	100%	80 orang	80 Orang	100%
2.19.02.2.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan diberikan pelatihan	44 Kali	100 Orang	100 Orang	100%	38 Kali	38 Kali	100%
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti pelatihan kelompok usaha pemuda produktif (KUPP)	4 Dokumen	100 Orang	100 Orang	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah jasa tenaga harian lepas (THL) yang terbayarkan	247 OH	247 OH	247 OH	100%			

				Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti jambore pemuda daerah (JPD)				180 orang	180 orang	100%				
				Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Lomba Baris Berbaris (LBB)				60 Sekolah	60 Sekolah	100%				
				Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti lomba MITQ tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional				150 orang	150 orang	100%				
				Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti LSS/PHBS dan DOKCIL				9 Sekolah	9 Sekolah	100%				
				Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti seminar POSPEDA (Bidang Seni)				150 orang	150 orang	100%				
				Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti upacara Sumpah Pemuda				200 orang	200 orang	100%				
				Jumlah yang menerima jasa THR THL				1 orang	1 orang	100%				
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Jumlah Prestasi Olahraga berdasar nomor pertandingan di tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional							231 Nomor Pertandingan	231 Nomor Pertandingan		100%
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten terlaksana							5 Kali	5 Kali		100%
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti lomba O2SN SD tingkat, kabupaten, propinsi dan nasional		70 orang		170 orang	170 orang	100%				
				Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti lomba O2SN SMP tingkat ,kabupaten, propinsi dan nasional		60 orang		150 orang	150 orang	100%				

2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Olahraga yang terpelihara		2 unit	2 unit	100%			
		Jumlah Perengkapan Kid's Atletik terbeli		5 set	5 set	100%			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	4100 unit					2 Unit	100%
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	18 Kali					15 Kali	100%
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan hibah uang (KONI)		1 Lembaga	1 Lembaga	100%			
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen					1 Dokumen	100%
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan hibah uang (NPC)	1 lembaga						
		Jumlah Atlet berkebutuhan khusus yang mendapatkan fasilitas pelatihan	300 orang	55 Atlet	100 Orang	100%			
		Jumlah Jasa tenaga harian lepas yang terbayarkan		494 OH	494 OH	100%			
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti invitasi catur tingkat kabupaten	300 orang	300 orang	300 orang	100%			
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti invitasi voli pasir tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	260 orang	45 orang	45 orang	100%			
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Liga Pendidikan Indonesia (LPI)		20 Tim	20 Tim	100%			

		Jumlah Peserta terfasilitasi mengikuti Lomba Lari 5 K dalam rangka HARDIKNAS		500 orang	500 orang	100%						
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Lomba Lari BARON 10 K dalam rangka HAORNAS		3000 orang	3000 orang	100%						
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti lomba POPDA DIY		400 orang	400 orang	100%						
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti lomba POPDA Kabupaten		390 orang	390 orang	100%						
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Lomba Senam Hardiknas		40 orang	40 orang	100%						
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren Antar Daerah (POSPEDA)		100 orang	100 orang	100%						
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren (POSPENAS)		50 orang	50 orang	100%						
		Jumlah Peserta terfasilitasi mengikuti POR Guru dan POR Pegawai		500 orang	500 orang	100%						
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti tri lomba juang tingkat kabupaten, propinsi dan nasional		60 orang	60 orang	100%						
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Upacara HAORNAS		300 orang	300 orang	100%						
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Upacara HARDIKNAS		300 orang	300 orang	100%						
		Jumlah yang menerima jasa THR		2 orang	2 orang	100%						
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	44 Dokumen							1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta terfasilitasi berpartisipasi dan ikut serta dalam Penyelenggaraan Kejuaraan tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	100%
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	800 Orang	5 Kali	100%	200 Orang	4 Kali	100%
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi tingkat kabupaten	380 orang	380 orang	100%	380 orang	380 orang	100%
		Jumlah Peserta terfasilitasi mengikuti PPLP-D	380 orang	380 orang	100%	380 orang	380 orang	100%
		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	3040 Orang	3040 Orang	100%	760 orang	760 orang	100%
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi yang terlaksana	6 Organisasi	6 Organisasi	100%	3 Organisasi	3 Organisasi	100%
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Senam Masal dan jalan sehat dalam rangka HAORNAS	1000 orang	1000 orang	100%	1000 orang	1000 orang	100%
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Senam Masal dan Jalan Sehat Hari Jadi Gunungkidul	1000 orang	1000 orang	100%	1000 orang	1000 orang	100%
		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Senam Minggu Pagi di Alun-alun Wonosari	500 orang	500 orang	100%	500 orang	500 orang	100%

		Jumlah peserta terfasilitasi mengikuti Senam Minggu Sehat (SMS) di 18 Kecamatan			500 orang	500 orang		100%			
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka	31,48%						23,39%	23,39%	100%
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan terlaksana	1 Organisasi						1 Organisasi	1 Organisasi	100%
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah dokumen laporan movev dana hibah organisasi kepramukaan yang terfasilitasi		1 Dokumen	1 Lembaga	1 Lembaga		100%			
		Jumlah lembaga yang mendapatkan Bantuan Hibah uang (Pramuka)		1 lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga		100%			
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	1 Organisasi						1 Organisasi	1 Organisasi	100%

Pada Tahun 2022, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.15.523.415.946,00 dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp.15.272.685.070,00 atau 99,61%.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2022 menetapkan 4 program yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 57 sub kegiatan, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp 2.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.500.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Dokumen Hasil Forum PD, Dokumen Penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Renja PD, Renja Perubahan PD.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan alokasi anggaran Rp 2.497.500,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.497.500,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen RKA.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp 2.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.500.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen RKA Perubahan.

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp 2.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.500.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen DPA, Dokumen Perjanjian Kinerja dan Dokumen ROPK.

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp 3.050.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 3.050.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen DPA Perubahan, Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan dan Dokumen ROPK Perubahan.

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp 2.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 capaian kinerja keuangan 0% dan capaian kinerja fisik 0%. Rencana akan dialihkan di Sub Kegiatan lain karena pada tahun 2022 LKjIP masih menjadi satu dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp 4.450.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 4.450.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen DPA, Dokumen Evaluasi RKPD.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp 2.403.147.746,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.375.691.702,00 capaian kinerja keuangan 98,86 % dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa terbayarkan Gaji ASN.

1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi anggaran Rp 480.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 480.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen pelaksanaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN.

1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran Rp 2.480.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.480.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.

1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran Rp 2.488.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.488.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen pelaksanaan akuntansi.

1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran Rp 4.976.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 4.976.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Draft laporan keuangan akhir tahun dan CALK.

1.2.6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan alokasi anggaran Rp 2.495.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.245.000,00 capaian kinerja keuangan 89,98% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen bahan tanggapan pemeriksaan.

1.2.7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran Rp 21.940.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 21.310.000,00 capaian kinerja keuangan 97,13% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ dan dokumen laporan keuangan semesteran.

1.2.8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 2.485.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.485.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp 1.449.800,00 realisasi keuangan sebesar Rp 1.449.800,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah (RKBMD).

1.3.2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp 14.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 13.540.000,00 capaian kinerja keuangan 96,71% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Laporan Barang Milik Daerah yang terfasilitasi pengamaannya.

1.3.3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp 2.490.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.490.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Peserta rakor dan penilaian barang milik daerah SKPD.

1.3.4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp 5.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 5.000.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa peserta mengikuti workshop pembinaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.3.5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp 1.750.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 0%.

1.3.6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp 3.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 3.440.000,00 capaian kinerja keuangan 98,29 % dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen Aset dan Dokumen BHP.

1.750.000 1.3.7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp 1.750.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 1.750.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%.

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp 10.099.500,00 realisasi keuangan sebesar Rp 8.829.500,00 capaian kinerja keuangan 87,43% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

1.4.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan alokasi anggaran Rp 500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 500.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

- 1.4.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran Rp 1.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 1.000.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa sosialisasi Penyusunan SKP. Rencana sebagian besar anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain.
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran Rp 3.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 3.297.500,00 capaian kinerja keuangan 94,21% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa komponen kelistrikan terpenuhi.
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp 214.100.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 212.741.300,00 capaian kinerja keuangan 99,37% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Alat pemadam kebakaran, Alat Tulis Kantor, Komputer, Laptop, Layar Proyektor, LCD, Printer, Sound system.
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran Rp 25.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 25.000.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa bahan dan peralatan kebersihan.
 - 1.5.4. Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran Rp 2.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.500.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa barang habis pakai.
 - 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp 8.495.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 8.495.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa barang cetak dan foto copy.
 - 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran Rp 1.908.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 1.800.000,00 capaian kinerja keuangan 94,34% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Surat Kabar.
 - 1.5.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp 142.666.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 131.087.935,00 capaian kinerja keuangan 91,88% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, rapat dan jamuan tamu.
 - 1.5.10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp 106.140.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 105.720.000,00 capaian kinerja keuangan 99,60 % dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Gaji THL terpenuhi.

- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.021.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 68.730.530,00 capaian kinerja keuangan 99,58% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Meja Kerja, Kursi kerja, meja rapat, kursi rapat.
 - 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 70.670.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 62.478.516,00 capaian kinerja keuangan 88,41 % dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Langganan listrik, langganan telepon dan langganan air.
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 10.150.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 10.150.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Komputer, Laptop, printer dan wireless yang terfasilitasi pemeliharannya.
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran Rp 17.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 17.500.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan Sewa tanah stadion dan gedung kesenian.
 - 1.8. Penataan Organisasi
 - 1.8.1. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan anggaran Rp 5.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 5.000.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2.1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor dengan alokasi anggaran Rp 82.375.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 71.290.000,00 capaian kinerja keuangan 86,54% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 25 orang mengikuti kegiatan pemuda pelopor.
 - 2.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dengan alokasi anggaran Rp 17.337.500,00 realisasi keuangan sebesar Rp 17.337.500,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 120 orang peserta yang mengikuti Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda.
 - 2.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp

- 19.135.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 19.135.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 90 orang peserta yang mengikuti Pembinaan
- 2.1.4. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan dengan alokasi anggaran Rp41.335.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 41.335.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 100 peserta yang mengikuti penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN); 100 peserta yang mengikuti sarasehan satgas anti narkoba ; 150 peserta yang mengikuti workshop Pemenuhan Hak setiap Pemuda.
- 2.1.5. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp 37.650.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 37.650.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 100 orang peserta yang mengikuti workshop penyusunan rencana strategis lintas.
- 2.1.6. Perencanaan, Pengadaan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp 5.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 5.000.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa megaphone dan sound system.
- 2.1.7. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi yang berjasa dan/atau berprestasi dengan alokasi anggaran Rp 355.310.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 355.310.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%.
- 2.1.8. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dengan alokasi anggaran Rp18.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 17.500.000,00 capaian kinerja keuangan 97,22 % dan capaian kinerja fisik 100% .
- 2.1.9. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan alokasi anggaran Rp 868.365.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 865.809.800,00 capaian kinerja keuangan 99,71% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 80 orang peserta Paskibraka.
- 2.2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan

melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha dengan alokasi anggaran Rp 150.485.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 149.975.900,00 capaian kinerja keuangan 99,66% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 100 peserta yang mengikuti pelatihan kelompok usaha pemuda produktif (KUPP).

2.2.2.Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp 524.750.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 523.132.536,00 capaian kinerja keuangan 99,69 % dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 9 sekolah mengikuti lomba LSS/PHBS dan DOKCIL, 150 orang mengikuti POSPEDA.

3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

3.1.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran Rp 479.360.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 479.360.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 170 orang peserta yang mengikuti lomba O2SN SD tingkat kabupaten, propinsi dan nasional; 150 orang peserta yang mengikuti lomba O2SN SMP tingkat , kabupaten, propinsi dan nasional.

3.1.2.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 298.950.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 295.487.341,00 capaian kinerja keuangan 98,8% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Gedung Kesenian terpelihara.

3.2.Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1.Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.4.000.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp.4.000.000.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Bantuan Hibah kepada 1 organisasi KONI Kabupaten Gunungkidul.

3.2.2.Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp1.782.174.400,00 realisasi keuangan sebesar Rp 1.616.767.010,00 capaian kinerja keuangan 90,72% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 55 Atlet berkebutuhan khusus mendapat fasilitas pelatihan, 300 peserta mengikuti invitasi catur tingkat provinsi, 45 peserta mengikuti invitasi voli pasir tingkat kabupaten, 500 peserta mengikuti lomba lari 5 K, 400 orang mengikuti lomba POPDA DIY, 390 orang mengikuti POPDA Kabupaten, 350 orang mengikuti POSPEDA, 84 Tim mengikuti Sirnas Volly Pantai.

- 3.2.3. Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dengan alokasi anggaran Rp 2.335.210.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 2.331.455.000,00 capaian kinerja keuangan 99,84 % dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 200 orang terfasilitasi berpartisipasi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional.
- 3.3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- 3.3.1. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp 600.300.500,00 realisasi keuangan sebesar Rp 592.236.700,00 capaian kinerja keuangan 98,66% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 380 orang terfasilitasi mengikuti PPLPD.
- 3.4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- 3.4.1. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dengan alokasi anggaran Rp 232.750.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 231.000.000,00 capaian kinerja keuangan 99,25 % dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa 500 orang terfasilitasi mengikuti Senam Minggu Pagi di Alun-alun Wonosari dan 500 orang terfasilitasi mengikuti Senam Minggu Sehat di 18 Kecamatan.
- 4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 4.1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- 4.1.1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp 500.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 500.500.000,00 capaian kinerja keuangan 100% dan capaian kinerja fisik 100%. Output kegiatan berupa Bantuan Hibah kepada 1 organisasi Pramuka Kabupaten Gunungkidul.
- Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul antara lain :
- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor serapan keuangan 86,54%, terdapat sisa anggaran dikarenakan Hadiah Lomba Juara II dan III Pemuda Pelopor tidak ada.
 - 2) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota serapan keuangan 90,72%, terdapat sisa anggaran karena :
 - a. Juara X Lomba Lari 5K HARDIKNAS tidak ada
 - b. Juara Pemecah rekor nasional National Paraympic Committe (NPC) tidak ada
 - c. Sisa Reward Pelatih dan Atlet Peraih Medali POPDA DIY peraih emas, perak dan perunggu.
- Guna mengatasi permasalahan yang ada di bidang kepemudaan dan olahraga telah ditempuh langkah dengan:
- 1) Terdapat sisa anggaran dikembalikan ke Kas Daerah

Dari tabel evaluasi pelaksanaan Renja PD seperti dalam tabel 2.1 di atas dapat kita lihat bahwa semua program yang telah direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 terealisasi.

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 disamping memperhatikan evaluasi renja Tahun 2022 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan Tahun 2024;
2. memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
3. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 mengacu pada RKPD Tahun 2022 dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun Keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, rincian program indikatif tahun 2022 ada 4 program dengan kegiatan indikatif sebanyak 14 kegiatan dan 57 sub kegiatan.

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah SDM di Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dengan ikut serta pada kegiatan diklat dan bimtek.
- b. Lebih cermat dalam melakukan perencanaan kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sesuai dengan matrik indikator dan target kinerja sasaran RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga masih menjadi bagian dari perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang tercantum dalam misi empat dan enam dari tujuh misi yang ada. Adapun indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional, regional dan internasional
2. Jumlah Kepemudaan yang berprestasi non akademik di tingkat provinsi, nasional, regional dan internasional.

Hal ini dapat terlihat dari hasil analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang masih menjadi bagian dari perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 seperti dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda	Persen	3 orang	27,27	14,29	9,38	3 orang	3 orang	14,29	9,38	
2	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	10 orang	13,16	7,44	5,63	10 orang	10 orang	7,44	5,63	
3	Nilai AKIP PD		-	80,2	80,3	80,05	-	82,1	80,3	80,05	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga masuk kategori sangat baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi pencapaian kinerja persasaran yang menunjukkan hasil positif. Persentase prestasi pemuda dan olahraga telah mencapai target yang ditetapkan.

Hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan sesuai dengan tupoksinya;
2. Keterbatasan sumber dana dari Pemerintah Daerah dan pihak swasta (Sponsor) untuk mensuport kegiatan untuk meraih prestasi baik di tingkat Propinsi, Nasional maupun Internasional
3. Keterbatasan sarana prasarana olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sehingga pembinaan olahraga belum bisa dilaksanakan secara optimal.
4. Jumlah Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas

Isu-isu penting yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, yaitu :

A. Faktor Penghambat

- 1) Belum mempunyai data base yang memadai terkait peta potensi dan prestasi pemuda dan olahraga di wilayah Kabupaten Gunungkidul
- 2) Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan ketugasan, baik sarana pokok maupun sarana penunjang masih belum memadai;
- 3) Sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan sesuai dengan tupoksinya belum memadai;
- 4) Sumber dana baik dari Pemerintah Daerah maupun pihak swasta (Sponsor) untuk mensuport kegiatan kepemudaan dan olahraga masih terbatas;
- 5) Sarana prasarana olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sangat terbatas
- 6) Penghargaan yang belum layak bagi pemuda inovatif dan atlet-atlet yang berprestasi;
- 7) Jejaring dan networking yang masih terbatas
- 8) Anggaran yang masih minim belum bisa memenuhi semua kegiatan

B. Faktor Pendorong

- 1) Adanya personil / aparat yang siap melaksanakan tugas;
- 2) Adanya regulasi dan payung hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 3) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
- 4) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
- 5) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
- 6) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
- 7) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
- 8) Dukungan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait;
- 9) Minat dan bakat atlet olahraga yang cukup baik.

C. Tantangan

- 1) Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor;
- 2) Terjadinya persaingan regional yang semakin ketat;
- 3) Terjadinya perubahan geo politik;
- 4) Kesiapan aparat penegakan hukum untuk melakukan reformasi;

- 5) Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat;
- 6) Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan dan masyarakat;
- 7) Banyaknya peluang untuk peningkatan Sumber Daya Manusia;
- 8) Semakin tinggi persaingan global di semua aspek;
- 9) Persiapan sebagai tuan rumah PORDA 2025.

D. Peluang

- 1) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
- 2) Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif;
- 3) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
- 4) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
- 5) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
- 6) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi;
- 7) Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- 8) Meningkatnya prestasi atlet olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional;
- 9) Meningkatnya minat dan semangat masyarakat untuk berolahraga.

E. Dampak

- 1) Terjadinya bonus demografi yang signifikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2) Peningkatan Indeks IPM;
- 3) Kreatifitas dan inovatif pemuda di berbagai karya akan semakin tumbuh berkembang dan mempunyai daya saing diberbagai tingkat baik propinsi, nasional maupun internasional;
- 4) Prestasi atlet-atlet diberbagai cabang olahraga akan semakin muncul diberbagai tingkat baik propinsi, nasional maupun internasional;
- 5) Meningkatnya minat masyarakat berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran;
- 6) Meningkatkan kunjungan wisata ke gunungkidul dengan adanya event PORDA yang diselenggarakan di gunungkidul tahun 2025.

Berdasarkan isu-isu penting di atas, maka dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran Derajat Kualitas SDM meningkat di Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berupaya untuk :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan;
2. Meningkatkan prestasi pemuda dan prestasi olahraga kabupaten Gunungkidul di level Nasional bahkan Internasional;
3. Berinovasi dalam program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. Dan pengembangan organisasi kepemudaan agar lebih kreatif;
4. Dalam pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda di Gunungkidul, kita mengacu pada upaya peningkatan kapasitas pemuda melalui 5 bidang kepeloporan pemuda sebagaimana program kemenpora, kepeloporan di bidang pendidikan, dan sebagainya;
5. Metode yg digunakan melalui peningkatan peran dan fungsi Wadah pembinaan pemuda (KNPI, Pramuka, dll) dgn cara memberikan Dana Hibah dan perlunya pengadaan sekretariat bersama antar OKP dan perlu wadah pembinaan serta anggaran rutin kepada OKP dalam bentuk hibah agar program kegiatan kepemudaan dapat terprogram dengan maksimal;

6. Metode yg digunakan melalui peningkatan peran dan fungsi Wadah pembinaan Cabang-cabang Olahraga dgn cara memberikan Dana Hibah melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan perlu wadah pembinaan kepada Cabang Olahraga (Cabor) dalam bentuk hibah agar program kegiatan Olahraga dapat terprogram dengan maksimal;
7. Dalam rangka upaya untuk menjaring bibit-bibit unggul, Dispora melaksanakan kegiatan Kompetisi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Paralimpic, Peparpeda maupun Pospeda yang diharapkan bisa menemukan atlet-atlet baru untuk kompetisi di tingkat propinsi, Nasional maupun Internasional;
8. Perlu perencanaan yang lebih baik dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Melalui sosialisasi cabang olahraga baru, peningkatan minat berolahraga dan peningkatan kualitas dan kuantitas atlet berprestasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peta jalan (*road map*) pembangunan jangka panjang baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota sudah disusun dalam dokumen perencanaan jangka panjang, dalam kerangka untuk memperjelas arah pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (*road map*) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2020, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rancangan Awal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap PD. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal PD melalui forum PD/Forum Gabungan PD dan musrenbang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Rancangan Kerja, hasil Forum Gabungan PD dan Musrenbang untuk usulan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dan perbedaan. Hal tersebut dikarenakan usulan disesuaikan keadaan pasca pandemi covid-19. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 secara lengkap tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Terlaksana	100 Persen	658.470.000	
	-	-	-	-	-	<i>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>		<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>658.470.000</i>	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	2.500.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	2.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tersusun</i>	14 Laporan	883.184.576	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tersusun</i>	14 Laporan	1.713.515.964
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/Bulan	853.934.576	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/Bulan	1.692.281.664
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	13 Laporan	23.500.000	13 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	13 Laporan	18.234.300
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	14.000.000	5 Dokumen	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang terfasilitasi	5 Dokumen	10.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.500.000

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.500.000	Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	3.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani	25 Orang	12.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani	25 Orang	4.500.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000

Monitoring, dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Monitoring, dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	2.500.000	Monitoring, dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Monitoring, dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	2.500.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang	3.500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum perangkat daerah	6 Kegiatan	351.408.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum perangkat daerah	6 Kegiatan	76.040.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	-

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.570.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	4.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	4.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	295 Dokumen	1.908.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	295 Dokumen	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.970.000

Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari , Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	131.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunung kidul, Wonosari , Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	3.500.000
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana</i>	<i>1 Paket</i>	<i>70.000.000</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana</i>	<i>1 Paket</i>	<i>-</i>
Pengadaan Mebel	Kab. Gunung kidul, Wonosari , Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	70.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Gunung kidul, Wonosari , Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah layanan Penyediaan Jasa</i>	<i>4 Layanan</i>	<i>22.650.000</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah layanan Penyediaan Jasa</i>	<i>4 Layanan</i>	<i>254.485.700</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunung kidul, Wonosari , Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunung kidul, Wonosari , Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	70.385.700
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunung kidul, Wonosari , Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	19.650.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunung kidul, Wonosari , Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	184.100.000

	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah yang terfasilitasi Pemeliharaannya</i> <i>a</i>	5 Unit	38.500.000	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	<i>Jumlah barang milik daerah yang terfasilitasi Pemeliharaannya</i> <i>a</i>	5 Unit	64.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	64.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	5 Unit	3.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	5 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperihara	5 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.000.000	3,09 Persen	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kab/kota, wirausaha muda pemula dan pemula kader kab/kota terlaksana	6 Kali	25.000.000	499.167.500	-
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5 Unit	2.313.855.000	3,09 Persen	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	6 Kali	1.552.645.000		

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Gunung Kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	28 Orang	96.075.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Gunung Kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	28 Orang	25.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Kab. Gunung Kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 orang	35.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Kab. Gunung Kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 orang	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Gunung Kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	15.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Gunung Kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	-

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	350 Orang	350 Orang	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	350 Orang	350 Orang	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	350 Orang	65.000.000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	350 Orang	35.000.000	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota

Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	15.000.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	-	
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	230 Orang	421.570.000	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	230 Orang	-	
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	280 Orang	10.000.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	280 Orang	-	

Penyelenggara n Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Gunung kidul, Wonosari , Wonosari	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kot a yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	80 Orang	860.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Gunung kidul, Wonosari , Wonosari	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kot a yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	80 Orang	-	
<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah pemberdayaan dan Pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah/ Kabupa ten/ kota terlaksana</i>	40 Kali	761.210.000	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah pemberdayaan dan Pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah/ Kabupa ten/ kota terlaksana</i>	40 Kali	474.167.500	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	100 Orang	220.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	100 Orang	176.037.500	

	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	541.210.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	298.130.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN		Jumlah Prestasi Olahraga berdasar nomor pertandingan di tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional	244 Nomor Pertandingan	2.359.845.340	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN		10.045.500.000	
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten terlaksana</i>	<i>5 Kali</i>	<i>1.211.405.340</i>	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>6.030.250.000</i>	

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Kab. Gunung Kidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	3 Unit	15.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Kab. Gunung Kidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	3 Unit	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Gunung Kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	414.360.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Gunung Kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Gunung Kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	1025 Unit	782.045.340	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Gunung Kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	1025 Unit	6.030.250.000

<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi terlaksana</i>	4 Kali	925.190.000	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi terlaksana</i>	4 Kali	148.095.000	
<i>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan</i>	760 Orang	775.190.000	<i>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota</i>	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	760 Orang	148.095.000	
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan</i>	1 Dokumen	150.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga</i>	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	-	
<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi yang terlaksana</i>	4 Kali	223.250.000	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi yang terlaksana</i>	4 Kali	90.000.000	
<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	4 Laporan	223.250.000	<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 Laporan	90.000.000	

	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	47 Unit	-	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	47 Unit	-
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase kelem bagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka	26,09 Persen	500.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase kelem bagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka	26,09 Persen	200.000.000
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>		<i>Jumlah pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan terlaksana</i>	1 Organisasi	500.500.000	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>		<i>Jumlah pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan terlaksana</i>	1 Organisasi	200.000.000
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Baleharjo	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkatkan kapasitasnya	1 Organisasi	500.500.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Gunung kidul, Wonosari, Baleharjo	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkatkan kapasitasnya	1 Organisasi	200.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Rancangan Kerja Tahun 2024, Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum mengakomodir hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dikarenakan tidak ada usulan sebagaimana tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien /Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Ponjong		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
2	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Ponjong		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
3	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Ponjong		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
4	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Karangmojo		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
5	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Karangmojo		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
6	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Karangmojo		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
7	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Karangmojo		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
8	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Karangmojo		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
9	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Karangmojo		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
10	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Ngawen		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran

11	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Saptosari		4,00 / Paket	30.000.000	30.000.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
12	Pengadaan sarpras Senam Minggu Sehat Kapanewon (speaker)	Kecamatan Tepus		1,00 / Unit	12.000.000	12.000.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
13	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Tepus		19,00 / Paket	142.500.000	142.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
14	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Tepus		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
15	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Tepus		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
16	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Tepus		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
17	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Tepus		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
18	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Tepus		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
19	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Tepus		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
20	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Tepus		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
21	Pengadaan sarpras Senam Minggu Sehat Kapanewon (speaker)	Kecamatan Tepus		1,00 / Unit	12.000.000	12.000.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
22	Pengadaan sarpras Senam Minggu Sehat Kapanewon (speaker)	Kecamatan Tepus		1,00 / Unit	12.000.000	12.000.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
23	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Tepus		19,00 / Paket	160.550.000	160.550.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran

24	Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) Budidaya Jamur Tiram	Kecamatan Purwosari		1,00 / Paket	98.441.500	98.441.500	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
25	Pengadaan sarpras Senam Minggu Sehat Kapanewon (speaker)	Kecamatan Purwosari		1,00 / Unit	12.000.000	12.000.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
26	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Purwosari		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
27	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Purwosari		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
28	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Playen		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
29	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Playen		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
30	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Playen		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
31	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Playen		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
32	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Playen		2,00 / Paket	16.900.000	16.900.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
33	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Playen		2,00 / Paket	15.000.000	15.000.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
34	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Playen		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
35	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Playen		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
36	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Playen		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran

37	Pengadaan sarpras Senam Minggu Sehat Kapanewon (speaker)	Kecamatan Playen		3,00 / Unit	36.000.000	36.000.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
38	Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) Budidaya Ayam Kampung	Kecamatan Playen		2,00 / Paket	152.075.000	152.075.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
39	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Paliyan		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
40	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Paliyan		2,00 / Paket	17.000.000	17.000.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
41	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Gedangsari		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
42	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Wonosari		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
43	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Wonosari		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
44	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Wonosari		2,00 / Paket	16.900.000	16.900.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
45	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Wonosari		2,00 / Paket	15.000.000	15.000.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
46	Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) Budidaya Ayam Kampung	Kecamatan Nglipar		1,00 / Paket	76.037.500	76.037.500	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
47	Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) Teknologi Pakan Ternak	Kecamatan Nglipar		1,00 / Paket	69.747.500	69.747.500	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
48	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Panggang		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran
49	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Patuk		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terlasasana karena terbatasnya anggaran

50	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Patuk		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
51	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Patuk		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
52	Pengadaan sarpras Senam Minggu Sehat Kapanewon (speaker)	Kecamatan Paliyan		1,00 / Unit	12.000.000	12.000.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
53	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Paliyan		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
54	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Paliyan		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
55	Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) Budidaya Jamur Tiram	Kecamatan Wonosari		1,00 / Paket	98.441.500	98.441.500	PWIK/ Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
56	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Tanjungsari		6,00 / Paket	50.700.000	50.700.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
57	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Semin		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
58	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Semin		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
59	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Semin		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
60	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Girisubo		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
61	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Girisubo		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran
62	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Girisubo		2,00 / Paket	16.900.000	16.900.000	PIS/Tidak Terbatasana karena terbatasnya anggaran

63	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Rongkop		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
64	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Rongkop		2,00 / Paket	17.000.000	17.000.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
65	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola (gawang, jaring gawang,, dan bola)	Kecamatan Rongkop		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
66	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Rongkop		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
67	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Rongkop		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
68	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kecamatan Rongkop		13,00 / Paket	109.850.000	109.850.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
69	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja (Meja Pingpong, Bet, Net, dan Bola)	Kecamatan Rongkop		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	PIS/Tidak Terlaksana karena terbatasnya anggaran
70	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Club bola voli Pervok padukuhan Karanggebang		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
71	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Club Bola Voli Putra Manunggal Padukuhan Toboyo		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
72	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Kelompok Pemuda GANA BIMANTARA, Sambirejo, Watusigar, Ngawen		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
73	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Karang Taruna Koneg Sukorejo, Sambirejo, Ngawen		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
74	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola	kelompok masyarakat		1,00 / Paket	8.500.000	8.500.000	POKIR
75	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja	Karang Taruna Pendowo (Muda-Mudi) padukuhan Pendowo		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	POKIR

76	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja	Wareng, Ngalang, Gedangsari		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	POKIR
77	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Wareng, Ngalang, Gedangsari		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
78	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja	Ngasem, Ngalang, Gedangsari		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	POKIR
79	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Ngasem, Ngalang, Gedangsari		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
80	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja	Bulu rt 03 rw 06, Hargomulyo, Gedangsari		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	POKIR
81	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	Bulu rt 03 rw 06, Hargomulyo, Gedangsari		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
82	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja	KARANGTARUNA PADUKUHAN REGEDEG		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	POKIR
83	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja	KARANGTARUNA PADUKUHAN TRENGGULUN		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	POKIR
84	Pengadaan Sarpras Olahraga Tennis Meja	KARANGTARUNA PADUKUHAN KLAPALORO 2		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	POKIR
85	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	KARANGTARUNA PADUKUHAN KLAPALORO 1		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
86	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	KARANGTARUNA PADUKUHAN PRINGAPUS		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
87	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	KARANGTARUNA PADUKUHAN GUNUNGBUTAK		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
88	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	KARANTARUNA PADUKUHAN WERU		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
89	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	KARANG TARUNA Kalurahan Kelor		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
90	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	KARANG TARUNA Padukuhan Bulu		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
91	Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) Budidaya Ayam Kampung	Kelompok pemuda di padukuhan		1,00 / Paket	76.037.500	76.037.500	POKIR

92	Pengadaan Sarpras Olahraga Tenis Meja	Warga Padukuhan Surulanang Kalurahan Karangduwet Paliyan		1,00 / Paket	7.500.000	7.500.000	POKIR
93	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	LAPANGAN BOLA VOLI PADUKUHAN KARANGGEDE		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
94	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	LAPANGAN BOLA VOLI PADUKUHAN BALONG		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR
95	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor (tiang net, net, dan bola)	KARANG TARUNA CABE		1,00 / Paket	8.450.000	8.450.000	POKIR

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rancangan Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah DIY, serta bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Pemerintah Daerah DIY, seperti RPJP Pemerintah Daerah DIY, RPJM Pemerintah DIY, RKPD Pemerintah Daerah DIY; dan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Rancangan Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala daerah terpilih yaitu :

1. Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 :
"Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026"
2. Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 :
 - a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis.
 - b. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga berdasarkan Tema Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2024 adalah:

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"

- a. Arah kebijakan Nasional
 - Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
 - Penguatan daya saing usaha;
 - Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
 - Pelaksanaan Pemilu 2024.

Kemudian berdasarkan isu strategis provinsi, maka indikasi tema pembangunan DIY tahun 2024 adalah *"Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan"* dengan prioritas:

- a. Arah kebijakan Provinsi
 - Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 - Penurunan ketimpangan antar kelas social dan antar wilayah;
 - Penanggulangan atau penguatan good government pada berbagai tingkatan;
 - Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tentram.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah:

"Optimalisasi ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan taraf hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia".

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Sekretariat, Bidang Kepemudaan, dan Bidang Olahraga), karena memuat seluruh kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) selama satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Sedangkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 mengacu pada RKPD Tahun 2024 dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD serta memperhatikan rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Untuk Sasaran PD dirumuskan dengan berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD Tahun 2024 sebagaimana telah disajikan dalam Rancangan RKPD Tahun 2024. Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran PD akan disempurnakan dalam proses verifikasi Renja PD Tahun 2024 serta Renstra PD Tahun 2021-2026. Dalam bagian ini disajikan penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD seperti pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Prestasi pemuda meningkat	Persentase peningkatan prestasi pemuda
				Prestasi olahraga meningkat	Persentase peningkatan prestasi olahraga
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024

1	Meningkatnya daya saing Kepemudaan dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	15,01 %
---	---	---	---------

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1	Prestasi pemuda meningkat	Persentase peningkatan prestasi pemuda	9,38%
2	Prestasi olahraga meningkat	Persentase peningkatan prestasi olahraga	5,63%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,05

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Prestasi pemuda meningkat	Persentase peningkatan prestasi pemuda	9,38%
2	Prestasi olahraga meningkat	Persentase peningkatan prestasi olahraga	5,63%

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditempuh berbagai kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan pembinaan Kepemudaan pelopor, wirausaha muda pemula dan Kepemudaan kader;
2. Pemberdayaan organisasi Kepemudaan ;
3. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, organisasi olahraga serta olahraga rekreasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari

pencapaian sasaran yang lebih terukur. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Kebijakan Umum Bupati;
3. Prioritas Pembangunan;
4. Pencapaian SDGs;
5. Pengurangan Kemiskinan;
6. Pencapaian IKU;
7. Meningkatkan pembinaan Kepemudaan pelopor, wirausaha muda pemula dan Kepemudaan kader;
8. Pemberdayaan organisasi Kepemudaan;
9. Pengembangan wilayah miskin;
10. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, organisasi olahraga serta olahraga rekreasi.

Hasil perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Sasaran PD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Prestasi pemuda meningkat	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</p> <p>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dan Kepemudaan Terhadap pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pelopor 2. Pemenuhan Hak Setiap Kepemudaan melalui Perlindungan Kepemudaan, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Kepemudaan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan <p>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kepemudaan atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 2. Peningkatan Kapasitas pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

2	Prestasi olahraga meningkat	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota <p>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 3. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
---	------------------------------------	--

Program Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 terdiri dari program pendukung tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta program prioritas Kepemudaan dan Olahraga. Program pendukung tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan program yang ada di setiap PD. Untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga, program ini hanya satu yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dijabarkan dalam 7 kegiatan dan 31 sub kegiatan;

Sedangkan program prioritas Kepemudaan dan olahraga merupakan program yang hanya dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Untuk rencana Tahun 2024 program ini meliputi :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dijabarkan dalam 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dijabarkan dalam 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan;

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024 sebanyak 5 program yang dijabarkan dalam 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 13.543.179.164,00 dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten. Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yakni :

1. Ketentraman dan Ketertiban;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Pendidikan dan Kesehatan;

4. Ketahanan Pangan;
 5. Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata;
 6. Penanggulangan Kemiskinan;
 7. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
- Prioritas pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga masuk nomor 3 (tiga) Pendidikan dan Kesehatan disajikan dalam tabel 4.2, serta program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi PD disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 1 (satu) Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan	Pagu indikatif	Ket.
			(Rp)	
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	658.470.000	
		Kegiatan : 1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	658.470.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	499.167.500	
		Kegiatan : 1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	25.000.000	
		2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	474.167.500	

		<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p> <p>Kegiatan</p> <p>1.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>4.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p>	<p>10.045.500.000</p> <p>6.030.250.000</p> <p>3.777.155.000</p> <p>148.095.000</p> <p>90.000.000</p>	
		<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</p> <p>Kegiatan :</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p>	<p>200.000.000</p> <p>200.000.000</p>	
		<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>2.140.041.664</p> <p>17.500.000</p> <p>1.713.515.964</p>	

	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.040.000	
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.485.700	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.000.000	

Tabel 4.3
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM meningkat	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Prestasi pemuda meningkat	Persentase peningkatan prestasi pemuda	9,38	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	25.000.000	96.075.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
								Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan	-	65.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

													Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	877.155.000	1.199.215.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
													Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	148.095.000	944.684.467	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
													Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
													Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	90.000.000	223.250.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
													Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
													Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000	500.500.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
													Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
													PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
												9,38	Persentase peningkatan prestasi pemuda			
													Prestasi pemuda meningkat			
													Indek Pembangunan Manusia (IPM)			
													Derajat Kualitas SDM meningkat			
Total													10.744.667.500	8.722.729.806		

Tabel 4.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju (2025)
1					2	3	4
1	03	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	658.470.000	-
1	03	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	658.470.000	-
1	03	13	5.02	03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	658.470.000	-
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.140.041.664	1.129.992.576
2	19	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000	22.500.000
2	19	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.750.000
2	19	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.750.000
2	19	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.750.000
2	19	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.750.000
2	19	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000	2.750.000
2	19	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	6.750.000
2	19	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.000.000
2	19	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.713.515.964	875.684.576
2	19	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.692.281.664	852.934.576
2	19	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	5.250.000
2	19	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.234.300	17.500.000
2	19	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	14.000.000
2	19	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	2.000.000
2	19	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000	2.500.000
2	19	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000	3.500.000
2	19	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000	3.000.000
2	19	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000	3.000.000
2	19	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	3.500.000

2	19	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.000.000	500.000
2	19	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000	500.000
2	19	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.500.000	2.500.000
2	19	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.040.000	158.158.000
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	3.250.000
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	-
2	19	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.570.000	4.000.000
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.000	4.000.000
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000	5.000.000
2	19	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	1.908.000
2	19	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.970.000	4.000.000
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	136.000.000
2	19	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	254.485.700	22.650.000
2	19	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.385.700	3.000.000
2	19	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.100.000	19.650.000
2	19	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.000.000	33.500.000
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000	25.000.000
2	19	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	-	3.500.000
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	5.000.000

Secara detail rumusan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 yang tercantum dalam Dokumen Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.5 dihalaman berikut.

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Rencana Strategis OPD	REALISASI CAPAIAN TARJEN RENTAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARJEN RENTAN TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1								658.470.000,00							0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						658.470.000,00							0,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	<i>Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Kasultanan dan Kadipaten (Persentase)</i>				100	658.470.000,00				Peningkatan Kualitas SDM			0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Kasultanan dan Kadipaten						658.470.000,00				Peningkatan Kualitas SDM			-		Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Kasultanan dan Kadipaten						658.470.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			-		Dinas Pemuda dan Olahraga

2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0.00	1.00	1.00	2.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1.00	2.750.000,00	2.750.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				2.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2.750.000,00	2.750.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1.00	1.00	2.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1.00	2.750.000,00	2.750.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	2	2.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	2	2.750.000,00	2.750.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0.00	6.00	6.00	2.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	6.00	6.750.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0.00	15.00	15.00	1.713.515.964,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM		Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	15.00	2.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tersusun (Laporan)	0.00	336	336	1.692.281.664,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	336	852.934.576,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)				3.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			5.250.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGGKID UL)	DANA UMUM		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1.00	5.250.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGGKID UL)	DANA UMUM	18.234.300,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	13	17.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGGKID UL)	DANA UMUM	10.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	5	10.500.001,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGGKID UL)	DANA UMUM	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1.00	2.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGGKID UL)	DANA UMUM	2.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora		2.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

2.19.01.2.03.0004	Pembinaan, dan Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dana Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	2.500.000,00	1	1	0.00	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	2.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1	2.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	1	0.00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					1					
2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dana Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	2.500.000,00	1.00	1.00	0.00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.00	2.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1.00	3.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	2.00	2.00	0.00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					2.00					
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dana Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	4.500.000,00	25	25	0.00	Jumlah ASN yang terlayani (Orang)	25	4.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	25	3.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	2.00	2.00	0.00	Jumlah ASN yang terlayani (Orang)					2.00					

2.19.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0.00	1	1	1.000.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1	500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0.00	1	1	1.000.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1	500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0.00	24	24	2.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	24	2.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum perangkat daerah (Kegiatan)			6	76.040.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)			Peningkatan Kualitas SDM			158.158.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	2.00	0.00	-	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	2.00	3.250.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	1	55.000.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	0.00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0.00	1	1	4.570.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1	4.000.000,00 4.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	1	1	3.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1	4.000.000,00 4.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	12	12	4.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	12	5.000.000,00 5.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0.00	295.00	0.00	-	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	295.00	1.908.000,00 1.908.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

2.19.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0.00	12	12	4.970.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	12	4.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	90	90	3.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	90	136.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa (Layanan)		4	4	254.485.700,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)			Peningkatan Kualitas SDM		4	22.650.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	36	36	70.385.700,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	36	3.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	1	1	184.100.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	1	19.650.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terfasilitasi pemeliharaannya (Unit)	5	64.000.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)					Peningkatan Kualitas SDM		5	33.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	64.000.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)	DANA UMUM	14	0.00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dispora	14	25.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0.00	-	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)	DANA UMUM	5.00	0.00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dispora	5.00	3.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	-	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)	DANA UMUM	5.00	0.00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dispora	5.00	5.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			499.167.500,00						Peningkatan Kualitas SDM			1.041.779.467,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	0.00	350.00	0.00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora	350.00	65.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahragra
		<i>Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan (Orang)</i>				(Wonosari, Wonosari, KAB, GUNUNGKID UL)	DAWA UMUM						65.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahragra
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						474.167.500,00					880.704.467,00	Dinas Pemuda dan Olahragra
		<i>Jumlah pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah/ Kabupaten /kota terlaksana (Kali)</i>						40				42	880.704.467,00	Dinas Pemuda dan Olahragra

2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	<i>Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha (Orang)</i>	0.00	100	100	176.037.500,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Kalurahan Baleharjo (Kapanewonon (Wonosari), Kelompok Mitra Handayani Padukuhan Gunungkrambil, Sidorejo, Porjong, KUPP	100	220.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					298.130.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			660.704.467,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Jumlah Prestasi Olahraga Berdasar Nomor Pertandingan Di Tingkat Provinsi, Regional, Nasional Dan Internasional (Cabang Olahraga (Caborg))</i>				10.045.500.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM		Peningkatan Kualitas SDM	Kegiatan Sumpah Pemuda, P4 GN dan SAN GK, Organisasi / Lembaga KNPI, THL, THR D3 dan SMA	1	660.704.467,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
3.	2.19.03												3.180.450.339,00	

2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kali)</i>					5	6.030.250.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		5	813.300.872,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termayfaatkan (Unit)</i>	0.00	1025	1025		1025	6.030.250.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1025	813.300.872,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana (Kali)</i>					16	3.777.155.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		17	1.199.215.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							2.900.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			-	Dinas Pemuda dan Olahraga

	<p data-bbox="332 1956 446 2130">Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p data-bbox="381 2155 479 2330">2.19.03.2.02.0002</p>	<p data-bbox="609 1744 673 1918">Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota (Dokumen)</p>	<p data-bbox="706 1594 738 1644">0</p> <p data-bbox="706 1507 738 1557">0</p>	<p data-bbox="771 1420 803 1470">11</p> <p data-bbox="771 1333 803 1383">11</p>	<p data-bbox="917 1183 950 1333">877.155.000,00</p> <p data-bbox="1015 1059 1047 1158"><i>(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)</i></p>	<p data-bbox="1079 934 1112 1009">DANA UMUM</p> <p data-bbox="1144 760 1209 909">Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</p> <p data-bbox="1226 635 1258 710">Peningkatan Kualitas SDM</p> <p data-bbox="1291 485 1356 585">Organisasi NPC Gunungkidul, POPDA DIY, POSPEKAB THL,THR S1 dan SMA/ SMK</p>	<p data-bbox="1242 411 1274 461">11</p> <p data-bbox="1242 211 1274 361">1.199.215.000,00</p>	<p data-bbox="1323 211 1356 361">1.199.215.000,00</p>	<p data-bbox="1388 211 1421 361">Dinas Pemuda dan Olahraga</p>
<p data-bbox="738 2205 771 2330">2.19.03.2.03</p>	<p data-bbox="950 1744 1015 1918">Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p data-bbox="1079 1731 1144 1906">Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi terlaksana (Kali)</p>	<p data-bbox="1242 1420 1274 1470">4</p> <p data-bbox="1242 1333 1274 1383">4</p>	<p data-bbox="1323 1183 1356 1333">148.095.000,00</p> <p data-bbox="1388 1059 1421 1158"><i>(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)</i></p>	<p data-bbox="1404 934 1437 1009">DANA UMUM</p> <p data-bbox="1469 760 1534 909">Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</p> <p data-bbox="1550 635 1583 710">Peningkatan Kualitas SDM</p> <p data-bbox="1615 485 1624 585">THL,THR S1 dan SMA/ SMK</p>	<p data-bbox="1485 411 1518 461">5</p> <p data-bbox="1485 211 1518 361">944.684.467,00</p>	<p data-bbox="1550 211 1583 361">944.684.467,00</p>	<p data-bbox="1588 211 1620 361">Dinas Pemuda dan Olahraga</p>	
<p data-bbox="982 2155 1015 2330">2.19.03.2.03.0003</p>	<p data-bbox="1079 1744 1144 1918">Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota</p>	<p data-bbox="1242 1731 1307 1906">Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)</p>	<p data-bbox="1323 1420 1356 1470">760</p> <p data-bbox="1323 1333 1356 1383">760</p>	<p data-bbox="1404 1183 1437 1333">148.095.000,00</p> <p data-bbox="1469 1059 1502 1158"><i>(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)</i></p>	<p data-bbox="1485 934 1518 1009">DANA UMUM</p> <p data-bbox="1550 760 1615 909">Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</p> <p data-bbox="1632 635 1624 710">Peningkatan Kualitas SDM</p> <p data-bbox="1697 485 1624 585">THL,THR S1 dan SMA/ SMK</p>	<p data-bbox="1567 411 1599 461">760</p> <p data-bbox="1567 211 1599 361">944.684.467,00</p>	<p data-bbox="1648 211 1624 361">944.684.467,00</p>	<p data-bbox="1685 211 1624 361">Dinas Pemuda dan Olahraga</p>	
<p data-bbox="1112 2205 1144 2330">2.19.03.2.05</p>	<p data-bbox="1242 1744 1307 1918">Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p>	<p data-bbox="1429 1731 1494 1906">Jumlah Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi yang terlaksana (Organisasi)</p>	<p data-bbox="1510 1420 1542 1470">4</p> <p data-bbox="1510 1333 1542 1383">4</p>	<p data-bbox="1591 1183 1624 1333">90.000.000,00</p> <p data-bbox="1656 1059 1624 1158"><i>(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKID UL)</i></p>	<p data-bbox="1672 934 1624 1009">DANA UMUM</p> <p data-bbox="1737 760 1624 909">Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</p> <p data-bbox="1818 635 1624 710">Peningkatan Kualitas SDM</p>	<p data-bbox="1753 411 1624 461">5</p> <p data-bbox="1753 211 1624 361">223.250.000,00</p>	<p data-bbox="1831 211 1624 361">223.250.000,00</p>	<p data-bbox="1875 211 1624 361">Dinas Pemuda dan Olahraga</p>	

2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	0.00	4	4	90.000.000,00	(Wonosari, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dispora, Lembaga/ Organisasi KORMI Gunungkidul	4	223.250.000,00	223.250.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai (Unit)	0	0	0	-		DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	2 Desa		-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
4. 2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kelembagaan Dan Keanggotaan Yang Mencapai Ketuntasan Pembinaan Dan Pengembangan Sesuai Tata Aturan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (%)				200.000.000,00				Peningkatan Kualitas SDM			500.500.000,00	500.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					200.000.000,00							500.500.000,00	500.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan	0.00	1.00	1.00	200.000.000,00	(Wonosari, Wonosari,	DANA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Lembaga/ Organisasi	1.00	500.500.000,00	500.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

<i>Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)</i>											
J U M L A H									13.543.179.164,00	5.849.222.383,00	
										KAB. GUNUNGKID ULJ)	ai KWARCAB GUNUNGKI DUL

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

SUPRIYANTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 7 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politis dan;
- d. Atas-bawah dan bawah-atas.

Sedangkan dalam pasal 9 disebutkan, Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. Holistik-tematik;
- b. Integratif; dan
- c. Spasial.

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 perlu dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut berfokus pada dua hal yaitu Ketahanan Ekonomi dan Kualitas Pertumbuhannya. Ketahanan Ekonomi dapat diterjemahkan bahwa Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Untuk merealisasikan Tema Pembangunan Nasional maka ditentukan arah kebijakan meliputi :

- 1) Pembangunan 10 destinasi wisata prioritas;
- 2) Industri 4.0 di 6 (enam) sektor prioritas : makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi, dan alat kesehatan;
- 3) Pembangunan science techno park;
- 4) Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting;
- 5) Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh/ MP Perlinsos;
- 6) Transformasi digital.

Pemerintah DIY menetapkan tema pembangunan Tahun 2022 adalah “Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja difokuskan pada Pemberdayaan SDM baik kualitas (sehat dan berpendidikan) maupun derajat ekonomi masyarakatnya. Peningkatan Infrastruktur difokuskan pada infrastruktur layanan dasar yang pendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dicapai melalui sektor-sektor unggulan dan potensial : jasa (informasi dan komunikasi, kesehatan), pertanian, wisata, dan industri kreatif. Pembangunan yang Merata dimaksudkan selaras dan lestari untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Sehubungan dengan berakhirnya periode RPJMD Pemerintah DIY pada tahun 2022 sedangkan rencana tahun 2023 belum dipublikasikan kepada publik maka data tahun 2022 tetap dijadikan rujukan. Arah kebijakan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan :

- 1) Mengatasi ketimpangan wilayah;
- 2) Mengatasi ketimpangan pendapatan;
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema Pembangunan Tahun 2024 dengan rumusan “*Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia*”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi;
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.1
Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Prioritas	Sasaran Daerah
1	2	3
1.	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan

No	Prioritas	Sasaran Daerah
1	2	3
2.	Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting	Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun
3.	Ketahanan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat Nilai Investasi Meningkat
4.	Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM Meningkat
5.	Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan
6.	Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat
7.	Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 126 sampai dengan pasal 130 menyebutkan bahwa :

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
- (7) Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (8) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

- (9) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Selain itu sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 disebutkan bahwa setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan. Rencana Kerja PD (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi rencana program dan kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Proses penyusunan Renja PD dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi: persiapan penyusunan Renja PD, penyusunan rancangan Renja PD, pelaksanaan forum PD, dan penetapan Renja PD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025, serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD DIY, mengingat Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan maka Rencana Kerja ini telah disinkronkan dengan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut, dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Secara rinci proses penyusunan Rencana Kerja disusun dengan proses sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun rancangan Rencana Kerja;
- b. Mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui forum musrenbang, forum PD, dan usulan-usulan masyarakat;
- c. Dinas Pekerjaan Umum menyusun rancangan akhir Rencana Kerja;
- d. Rencana Kerja disahkan.

Dokumen Renja PD memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain. Keterkaitan dokumen Renja PD dengan dokumen RKPD adalah dokumen RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif Renja PD disesuaikan dengan Program Prioritas RKPD. Keterkaitan dokumen Renja PD dengan indikasi tema dan prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD. Keterkaitan dokumen Renja PD dengan dokumen Renja Kementerian/ Lembaga dan PD Provinsi adalah Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja Kementerian/Lembaga dan PD Provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja PD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 Kewenangan Kabupaten-Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Nomor 139 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

21. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/04391 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul ini adalah:

1. Untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan sinergi program dan kegiatan.
2. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan dan penganggaran program dan kegiatan PD.
3. Sebagai acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran-gambaran umum dalam penyusunan Renja PD agar substansi yang dibahas pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa subbab meliputi:

- 1.1 Latar Belakang. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L, dan Renja PD provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. (sesuai landasan hukum pada rancangan RKPD 2022).
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja PD.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/ Tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2022), mengacu pada APBD tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pada tahun berjalan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
 2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
 3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022;
 5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2023;
 6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKU (Indikator Kinerja Utama), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dalam bab ini juga memuat indikator kinerja dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Renja PD Tahun 2021. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD. Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Isu-isu penting tersebut mencakup:
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Kerja Pemerintah Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
 Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kalurahan maupun Kapanewon. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.
 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan PD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan nasional dikaitkan dengan 7 prioritas nasional, sedangkan telaahan kebijakan provinsi dapat dikaitkan dengan prioritas pengembangan kawasan Wilayah Utara dan Geopark Gunungsewu serta pendekatan tematik pembangunan DIY meliputi, Penurunan kemiskinan, Ketimpangan wilayah, dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD. Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD.
- 3.3 Program dan Kegiatan. Berisi penjelasan mengenai berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam rumusan program dan kegiatan, seperti visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan, capaian SPM, dan seterusnya, serta uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, baik lokasi, distribusi lokasi, dan pendanaannya, dengan mendasarkan pada empat strategi pembangunan: *pro poor*, *pro growth*, *pro job*, dan *pro environment*.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.
- 5.3 Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja PD dan Capaian Renstra PD

Pada bagian ini akan diuraikan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, dengan melihat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun lalu. Dari program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun lalu, terdapat Penambahan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan termasuk di dalamnya muncul item baru yaitu Sub Kegiatan. Di dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, dengan nomor DPA 1.03.1.03.01.00.00.04 direncanakan sebanyak 15 program dan 26 kegiatan serta 96 Sub Kegiatan, dengan anggaran mencapai Rp. 134.330.967.793,-, Belanja ini terdiri dari belanja operasi senilai Rp. 37.165.454.168,- dan belanja modal senilai Rp. 97.165.513.625,-

Adapun beberapa sub kegiatan tahun 2022 yang capaiannya di bawah 95% antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Dalam Satu Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat.
- Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.
- Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.

Kegiatan yang memenuhi target kinerja tahun 2022 antara lain :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Sedangkan program kegiatan 2021 yang melebihi target meliputi :

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2021:

- Regulasi
- Implementasi di lapangan
- Pandemi COVID 19

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi pencapaian target 2022:

- Sumber Dana
- SDM (Sumber Daya Manusia)
- Lokasi Pekerjaan
- Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Sebagai review (kajian) terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023) ditampilkan pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	95.01 %	100 Persen	67,02	67,02	100 Persen	100 Persen	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1 1	100 %	1 Dokumen	75,28	75,28	100 Persen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja; Jumlah dokumen draft Renstra; Jumlah dokumen Renja perubahan, Jumlah dokumen Renstra; Jumlah Forum PD; Jmlah Frekuensi rapat, konsultasi, koordinasi internal PD dan antar PD		1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 250 OR; 1 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Kali; 250 OR	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Kali; 188 OR	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 75,2%	7 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Kali; 250 OR	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja; Jumlah dokumen ROPK; Jumlah dokumen DPAD		1 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	100%; 100%; 100%	3 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja; Jumlah dokumen perubahan DPA		1 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen	0 Dokumen; 0 Dokumen	0%; 0%	2 Dokumen	1 Dokumen; 1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan e Monev; Jumlah Laporan Tepra; Jumlah dokumen LKJIP		12 Dokumen; 1 Dokumen	12 Dokumen; 12 Dokumen; 1 Dokumen	9 Dokumen; 9 Dokumen; 1 Dokumen	75%; 75%; 100%	15 Laporan	12 Dokumen; 12 Dokumen; 1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN		100 %	14 Bulan	47,62	47,62	100 Persen	14 Bulan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN		14 Bulan;100 persen	14 Bulan	10 Bulan	71%;	1330 Orang /bulan	14 Bulan	100%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen;100 persen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Laporan	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran;Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj		12 Dokumen;2 Dokumen	2 Dokumen;12 Dokumen	1 Dokumen;9 Dokumen	50%;75%	14 Laporan	2 Dokumen;12 Dokumen	100%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas khusus Operatif alat berat dan mekanik mesin rigasi		100 %	32 Stel	59,09	59,09	100 Persen	32 Stel	100%
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas khusus Operator Alat berat dan mekanik mesin irigasi tersedia		0	32 Stel	32 Stel	100%	1 Paket	32 Stel	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN;Jumlah tenaga jabtung dinilai	83 Orang; 5 Orang	88 ASN;4 ASN	83 Orang; 5 Orang	63 Orang; 5 Orang	76%; 100%	5 Dokumen	83 Orang; 5 Orang	100%
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah asn yang dikirim mengikuti diklat fungsional khusus	5 Orang	5 ASN	5 Orang	0 Orang	0%	89 Orang	5 Orang	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah alat tulis kantor (Sekretariat dan seluruh bidang)	1 Tahun	79.56 %	1 Tahun	64,16	64,16	100 Persen	1 Tahun	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	12 Paket	12 Bulan;2 Jaringan	12 Paket	6 Paket	50%	1 Paket	12 Paket	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kegiatan Program/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (Sekretariat dan Seluruh Bidang serta UPT);Jumlah Rak Arsip Tersedia;Jumlah aspal sprayer untuk Swakelola Binamarga Tersedia;Jumlah Alat Fogging UPT PALAMRUSUN tersedia;Jumlah jaringan komputer Dinas PUPRKP (mikrotik) tersedia;Jumlah Radio HT untuk survey dan monitoring tersedia;Jumlah GPS Tracker \ "Garmin Oregon \ " tersedia;Jumlah hammer test beton digital \ "Schmidt hammer HT-225W \ ";Jumlah meteran sorong \ "Prohex \ " tersedia;Jumlah Asphalt Cutter untuk swakelola Binamarga tersedia;Jumlah LCD proyektor tersedia;Jumlah mesin ketik manual tersedia;Jumlah alat ukur pemeliharaan rutin jalan tersedia	1 Unit;1 Tahun	1 Tahun; 3 Unit; 1 Unit; 1 Unit; 1 Jaringan; 4 Unit; 2 Unit; 1 Buah; 2 Buah; 1 Unit; 2 Buah; 8 Buah; 3 Buah	1 Tahun; 3 Unit; 0 Unit; 1 Unit; 1 Jaringan; 4 Unit; 2 Unit; 0 Buah; 2 Buah; 0 Unit; 2 Buah; 8 Buah; 0 Buah	8 = (7/6) 100%; 100%; 0%; 100%; 100%; 100%; 0%; 100%; 0%; 100%; 100%; 0%	1 Paket	1 Tahun; 3 Unit; 1 Unit; 1 Unit; 1 Jaringan; 4 Unit; 2 Unit; 1 Buah; 2 Buah; 1 Unit; 2 Buah; 8 Buah; 3 Buah		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan form bendahara;Jumlah barang cetakan form surat kendali;Jumlah lembar penggandaan	5 Bendel;5 Lembar	5 Dokumen; 5 Dokumen; 75000 Lembar	3 Dokumen; 3 Dokumen; 56250 Lembar	100%; 60%; 75%	12 Paket	5 Dokumen; 5 Dokumen; 75000 Lembar		100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku pustaka teknik tersedia;Jumlah Tagihan surat kabar 1 jenis x 12 bulanterbayar		12 Bulan;2 eksp	5 Ekslempar; 12 Bulan	3 Ekslempar; 9 Bulan	60%;r; 75%	372 Dokumen	5 Ekslempar; 12 Bulan	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi konsultasi dan koordinasi dalam daerah Kabupaten;Jumlah frekuensi konsultasi dan koordinasi Ke Provinsi;Jumlah frekuensi konsultasi dan koordinasi Ke Jakarta;Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu		2 Orang;2 OH	80 OH; 24 OH; 109 OH; 240 OR	43 OH; 18 OH; 28 OH; 180 OR	54%; 75%; 26%; 75%	12 Laporan	80 OH; 24 OH; 109 OH; 240 OR	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pengelolaan Arsip PD		96.67 %	3400 Berkas	1700 Berkas	50%	12 Laporan	3400 Berkas	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana		45 Buah	100 Persen	72,9	72,9	12 Dokumen	100 Persen	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim;Jumlah hari terfasilitasnya pengadministrasian surat menyurat		96.67 %	50 Buah; 260 Hari	18 Buah; 195 Hari	36%; 75%	100 Persen	50 Buah; 260 Hari	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan Air di bayar (2 rekening x 12 bin);Jumlah Rekening Tagihan Listrik Terbayar (4 rekening x 12 bulan);Jumlah Rekening Tagihan Telephone di bayar (2 rekening x 12 bin)	4	45 Buah	24 Bulan; 48 Bulan; 24 Bulan	18 Bulan; 36 Bulan; 18 Bulan	75%; 75%; 75%	12 Laporan	24 Bulan; 48 Bulan; 24 Bulan	100%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan di Bayar (non thl);Jumlah Jasa Keamanan Kantor Tersedia		48 Rekening;24 Rekening;24 Rekening	12 Bulan; 12 Bulan	9 Bulan; 9 Bulan	75%; 75%	96 Laporan	12 Bulan; 12 Bulan	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat Terkirim		12 Bulan	50 Buah	73,42	73,42	2 Laporan	50 Buah	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM Kendaraan Dinas Roda Dua, Roda Empat Dan Roda Enam serta Genset terpenuhi;Jumlah Mobil Dinas yang dipelihara;Jumlah Mobil Dinas yang terbayar pajaknya;Jumlah Sepeda Motor Dinas yang terbayar pajaknya;Jumlah Sepeda Motor yang dipelihara		98.5 %	7380 Liter; 6 Unit; 6 Unit; 23 Unit; 23 Unit	535 Liter; 4 Unit; 4 Unit; 12 Unit; 12 Unit	75%; 66,66%; 66,66%; 52%; 52%.	100 Persen	7380 Liter; 6 Unit; 6 Unit; 23 Unit; 23 Unit	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kegiatan Program/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1										
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Suku Cadang Alat Berat;Jumlah Alat Laboratorium Bahan Bangunan Dipelihara;Jumlah Ekskavator Terfasilitasi;Pemeliharaan;Jumlah Stom Walls Terfasilitasi;Pemeliharaan;Jumlah Truck Self Loader Terfasilitasi Pemeliharaan;Upah pegawai Kontrak /tidak tetap Operator Alat Besar 11 orang x 13 bulan;Upah Tenaga Jaga Malam 2 orang x 365 hari;THR Tenaga Jaga Malam 2 orang dan tenaga Kontrak Operator Alat 11 Orang	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
				6 Unit;23 Unit;6 Unit;23 Unit;7380 Liter	20 Unit;3 Unit;1 Unit;20 Unit;1 Unit;143 OB;730 OH;13 OTA	10 Unit;2 Unit;1 Unit;10 Unit;1 Unit;107 OB;547 OH;13 OTA	50%;66,66%;100%;50%;100%;75%;75%;100%	29 Unit	20 Unit;3 Unit;1 Unit;20 Unit;1 Unit;143 OB;730 OH;13 OTA	100%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah printer dipelihara; Jumlah Mesin Ketik terfasilitasi pemeliharannya; Jumlah Personal Komputer terfasilitasi pemeliharannya; Jumlah LCD proyektor terfasilitasi pemeliharannya;Jumlah Wireless TOA dipelihara		1 Paket;18 Unit;1 Unit;1 Unit;143 OB;11 Orang;730 OH;2 OTA	18 Unit;8 Unit;18 Unit;1 Unit;1 Unit	5 Unit;2 Unit;11 Unit;1 Unit;1 Unit	28%;25%;61%;100%;100%	23 Unit	18 Unit;8 Unit;18 Unit;1 Unit;1 Unit	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor;Jumlah Halaman, Pagar Dan taman Terpelihara;Tengah THL (SMA) Jaga Kantor 1 orang x 313 hari;THR Tenaga THL (SMA) Jaga Kantor	19 Unit;12 Unit;6 Unit;0 Unit	19 Unit;12 Unit;6 Unit;0 Unit	2 Unit;2 Unit;313 OH;1 OTA	1 Unit;1 Unit;234 OH;1 OTA	8 = (7/6) 50%; 50%; 75%; 100%	63 Unit	2 Unit; 2 Unit; 313 OH; 1 OTA	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC terfasilitasi pemeliharannya	6 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	5 Unit	2 Unit	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik	80 Persen	98.21 %	27,87 persen	92,65	92,65	29,2 Persen	27,87 persen	100%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA wilayah sungai dikelola dengan baik		93.75 %	100 Persen	88,89	88,89	27.87 Persen	100 Persen	100%
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung yang di rehab		0 unit;13 OB;1 OTA	2 Unit	2 Unit	100%	2 unit	2 Unit	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahunan Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Target PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Panjang tanggul sungai direhab		8 Kelompok	200 Meter	200 Meter	100%	0.1 KM	200 Meter	
1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Kualitas Air Baku di Wilayah Daerah Irigasi dan Sumber Air Bersih		100 %	20 Unit	20 Unit	100%	3 dokumen	20 Unit	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kinerja Organisasi P3A dalam kondisi baik dalam mendukung Hari Air Dunia;Pemberdayaan Konstruksi Organisasi P3A dalam mendukung Kinerja irigasi		17 Daerah Irigasi	80 Kelompok; 9 kelompok	80 Kelompok; 9 Kelompok	100%; 100%	80 orang	80 Kelompok; 9 Kelompok	100%
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sidang Komisi Irigasi Per tahun Terlaksana		5 Daerah Irigasi	3 Kali	2 Kali	66,66%	28 orang	3 Kali	100%
1.03.02.2.01.64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Prasarana dan sarana Danau dalam kondisi baik		5 Daerah Irigasi	3 Lokasi	2 Lokasi	66,66%	5 unit	3 Lokasi	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu		10 Daerah Irigasi	82 Persen	94,7	94,7	27,87 persen	82 Persen	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis Konstruksi Irigasi dan Rawa tersusun		57 Unit	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 dokumen	2 Dokumen	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Jaringan irigasi Permukaan Dibangun;Jumlah Panjang Jaringan irigasi Permukaan Dibangun (DAK)		98.21 %	500 Meter; 1000 Meter	0 Meter; 1000 Meter	0%; 100%	0,5 km	500 Meter; 1000 Meter	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Jaringan irigasi Permukaan Ditingkatkan		93.75 %	2339 Meter	2339 Meter	100%	1,5 km	2339 Meter	
1.03.02.2.02.13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Panjang Jaringan irigasi Air Tanah Ditingkatkan		0 unit;13 OB;1 OTA	500 Meter	500 Meter	100%	0,4 km	500 Meter	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Jaringan irigasi permukaan Direhabilitasi		8 Kelompok	500 Meter	500 Meter	100%	0,4 km	500 Meter	100%
1.03.02.2.02.19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Panjang Jaringan irigasi Air Tanah Direhabilitasi		100 %	500 Meter	500 Meter	100%	0.4 KM	500 Meter	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Penambahan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Dalam Kondisi Baik		17 Daerah Irigasi	200 Meter	200 Meter	100%	0.2 KM	200 Meter	
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bangunan Bendung Bebas Sedimen		5 Daerah Irigasi	5 Buah	5 Buah	100%	5 Bendung	5 Buah	
1.03.02.2.02.25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Air Tanah Dalam Kondisi Baik		5 Daerah Irigasi	57 Unit	57 Unit	100%	43 titik	57 Unit	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.02.2.02.26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Penambahan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam Kondisi Baik		10 Daerah Irigasi	2000 Meter	2000 Meter	100%	0.2 KM	2000 Meter	
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah unit pengelola irigasi beroperasi baik		57 Unit	44 Unit	33 Unit	75%	12 unit	44 Unit	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kepala keluarga berakses air minum layak	100 Persen	100 %	81,95 persen	61,67	61,67	83,21 Persen	81,95 persen	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Spandes yang memiliki sistem mantap		100 %	83 Persen	61,67	61,67	83,21 Persen	83 Persen	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM		18 Kecamatan	6 Wilayah	4 Wilayah	66,66%	6 Dokumen	6 Wilayah	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Target PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Dibangun		12 Lokasi	2 Unit	2 Unit	100%	200 SR	2 Unit	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Ditingkatkan;Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Ditingkatkan (DAK)		1 Lokasi	6 Unit; 6 Unit	5 Unit; 2 Unit	83,33%; 33,33%	6 ltr/dt	6 Unit; 6 Unit	
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Pengelola SPAM dalam kondisi mantap		18 Kelompok	300 Kelompok	250 Kelompok	83,33%	300 kelompok	300 Kelompok	
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penunjang Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan tersedia		N/A	12 Bulan	0 Bulan	0%	3 unit	12 Bulan	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan SARPRAS PERSAMPAHAN	45 Persen	100 %	40 Persen	100	100	45 Persen	40 Persen	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPS3R Dibangun		100 %	1 Unit	100	100	45 Porsen	1 Unit	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS3R Dibangun;Jumlah TPS3R Dibangun (DAK)		1 unit	1 Unit; 4 Unit	1 Unit; 4 Unit	100%; 100%	100 Rumah Tangga	1 Unit; 4 Unit	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	80 porsen	100 %	84,16 porsen	64,29	64,29	85,398 Porsen	84,16 porsen	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kepala keluarga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik		100 %	73 Porsen	64,29	64,29	95 Porsen	73 Porsen	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah tangki septic individu dibangun; Jumlah tangki septic individu dibangun (DAK Sanitasi)		200 unit	200 Unit; 200 Unit	200 Unit; 200 Unit	100%; 100%	150 Rumah Tangga	200 Unit; 200 Unit	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di bina	N/A	N/A	70 Kelompok	50 Kelompok	147 Orang	70 Kelompok		
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Penunjang Operasi dan Pemeliharaan SPALD tersedia		1 unit	2 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	2 unit	2 Unit/Tahun		
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Dibangun; Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Dibangun (DAK)		N/A	1 Unit; 4 Unit	1 Unit; 4 Unit	50 rumah tangga	1 Unit; 4 Unit		
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT Ditingkatkan/ Diperluas		N/A	1 Unit	0 Unit	25 M ³ /Hari	1 Unit		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik	60 Persen	100 %	45 Persen	100	48 Persen	45 Persen		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahunan Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang memiliki akses sistem pengelolaan drainase lingkungan		100 %	1500 KK	100	100	48 Persen	1500 KK	
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Panjang Sistem Drainase Lingkungan Dibangun		2 Jaringan	1340 Meter	1340 Meter	100%	492 M	1340 Meter	
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jumlah Panjang Sistem Drainase Lingkungan Direhabilitasi		N/A	2053 Meter	2053 Meter	100%	395 M	2053 Meter	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan	60 Persen	100 %	20 Persen	100	100	40 Persen	20 Persen	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur yang dibangun berbasis masyarakat di kawasan permukiman strategis Kabupaten		100 %	1 Kawasan	100	100	40 Persen	1 Kawasan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1										
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman	4	5 2 Kawasan	6 1 Kawasan	7 1 Kawasan	8 = (7/6) 100%	9 2 Sistem Jaringan	10 1 Kawasan	11
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Keandalan gedung Pemerintah	83 Persen	100 %	69,38 Persen	80,56	80,56	73,46 Persen	69,38 Persen	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan		100 %	87 Persen	80,56	80,56	87 Persen	87 Persen	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pendirian, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung		12 Dokumen;18 Kecamatan	12 Dokumen	9 Dokumen	75%	12 Dokumen	12 Dokumen	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan Pemerintah (Gedung DPRD);Penyusunan DED pematangan lahan kawasan perkantoran di Siraman.;Jumlah Pelaksanaan Rehab/Renovasi RS Bedoyo		100 Persentase;100 Persentase;100 Persentase;4 Unit	1 Unit;1 Dokumen;1 Unit	0 Unit;1 Dokumen;1 Unit	0%;100%;100%	2 Dokumen	1 Unit;1 Dokumen;1 Unit	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Unit	N/A	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	60 Persen	99.43 %	63 Persen	47.03	47,03	68,2 Persen	63 Persen	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten		99.43 %	47 Persen	47,03	47,03	45 Persen	47 Persen	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Yang Memiliki Data Ledger		5 Dokumen	10 Kilometer	0 Kilometer	0%	1 Dokumen	10 Kilometer	100%
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan/ Jembatan Tersusun		2 Dok	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dibangun;Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dibangun (Pokir);Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dibangun (PIS)		34 Ruas	2 Ruas; 16 ruas; 5 ruas	0 Ruas; 1 ruas; 3 ruas	0%; 6,25%; 60%	3.2 KM	2 Ruas; 16 ruas; 5 ruas	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Panjang Ruas Jalan Kabupaten Diperlebar sesuai standar (IKU Bupati);Jumlah Panjang Ruas Jalan Kabupaten Diperlebar sesuai standar (PIS)		2 Ruas	1 Ruas; 9 Ruas	1 Ruas; 9 Ruas	100%; 100%	2.5 KM	1 Ruas; 9 Ruas	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dilakukan Rekonstruksi Lapis Perkerasan sesuai standar (IKU Bupati);Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Direkonstruksi sesuai standar (PIS);Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Direkonstruksi sesuai standar (DAK)		2 ruas	1 Ruas; 16 Ruas; 5 Ruas	0 Ruas; 13 Ruas; 5 Ruas	0%; 81%; 100%	8.7 KM	1 Ruas; 16 Ruas; 5 Ruas	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Direhabilitasi;Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Direhabilitasi (Pokir);Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Direhabilitasi (PIS)		21 Ruas	2 Ruas; 8 ruas; 6 ruas	0 Ruas; 5 ruas; 4 ruas	0%; 62,50%; 66,66%	2.5 KM	2 Ruas; 8 ruas; 6 ruas	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dipelihara Berkala; Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dipelihara Berkala (DAK)		N/A	1 Ruas; 3 ruas	1 Ruas; 0 ruas	100%; 0%	1.3 KM	1 Ruas; 3 ruas	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dipelihara rutin		N/A	20 Ruas	20 Ruas	100%	10.5 KM	20 Ruas	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten dibangun		1 Buah	1 Buah	1 Buah	100%	1 Buah	1 Buah	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten diganti		N/A	1 Buah	1 Buah	100%	63 M	1 Buah	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten direhabilitasi (Pokir)		N/A	1 Buah	0 Buah	0%	115 M	1 Buah	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Peringkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten dipelihara rutin		N/A	1 Buah	1 Buah	100%	627 M	1 Buah	
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten dipelihara rutin		N/A	1 Buah	0 Buah	0%	232 M	1 Buah	100%
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Persentase pelayanan penanganan pengaduan masyarakat		N/A	100 Persen	25 Persen	25%	1 Dokumen	100 Persen	100%
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Kinerja Jalan Dan Jembatan		11 kali; 10 Ruas	3 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	100 Persen	100 persen	25 persen	69	69	30 Persen	25 persen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kegiatan Program/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		100 persen	30 Persen	50	50	30 Persen	30 Persen	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		10 Orang; 18 Kecamatan	72 Orang	72 Orang	100%	90 Orang	72 Orang	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang Bersertifikat		N/A	72 Orang	0 Orang	0%	90 Orang	72 Orang	100%
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan teknologi konstruksi		N/A	50 Persen	100	100	30 Persen	50 Persen	100%
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di DPUPRKP		N/A	25 Persen	25 Persen	100%	1 Laporan	25 Persen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Target PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	4	N/A	100 Persen	75	75	0	100 Persen	100%
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Laporan fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional		N/A	12 Dokumen	9 Dokumen	75%	0	12 Dokumen	100%
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi		N/A	100 Persen	70	70	30 Persen	100 Persen	100%
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi		N/A	10 Dokumen	7 Dokumen	70%	12 Laporan	10 Dokumen	100%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	10 Persen	100 %	10 Persen	30,56	30,56	15 Persen	10 Persen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah terdata		100 %	30 Persen	50	50	30 Persen	30 Persen	100%
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		N/A	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Peserta PSU terlaksana		N/A	5 Porsen	0	0%	5 Porsen	5 Porsen	100%
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Direhabilitasi		N/A	10 Unit	0 Unit	0%	10 Unit Rumah	10 Unit	100%
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Luas untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Disediakan		N/A	1 Hektar	0 Hektar	0%	1 Ha	1 Hektar	100%
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Dibangun		N/A	10 Unit	0 Unit	0%	10 Unit Rumah	10 Unit	100%
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Dibangun		N/A	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit Rumah	1 Unit	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahunan Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4	100 %	75 Persen	75	75	15 persen	75 Persen	100%
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Penurunan Persentase Humian Rumah Susun	4	100 Persentase	80 Persen	60 Persen	60 Persen	1 dokumen	80 Persen	100%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman	100 Persen	100 %	21,97 persen	50	50	26.01 Perse n	21,97 persen	100%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditata		100 %	20 Persen	0	0%	20 Persen	20 Persen	100%
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditingkatkan		100 %	20 Persen	100	100	20 Persen	20 Persen	100%
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh (PIWK);Jumlah Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh (POKIR)		591 Unit	365 Unit; 35 Unit	365 Unit; 35 Unit	100%; 100%	1 Dokumen	365 Unit; 35 Unit	100%
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh	40 Persen	N/A	12,50 persen	0	0	14.29 Perse n	12,50 persen	100%
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditangani		N/A	6 Persen	0	0%	6 Persen	6 Persen	100%
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh		N/A	20 Unit	0 Unit	0%	325 Unit Rumah	20 Unit	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kegiatan Program/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	40 persen	75 %	20 persen	100	100	40 persen	20 persen	100%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan Formal		75 %	40 Persen	100	100	10 lokasi	40 Persen	100%
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan PSU di kawasan Perumahan		15 Lokasi;0 setifi kat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Humian	Jumlah Perumahan yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU		8 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	100%	5 lokasi	3 Kawasan	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU	100 Persen	100 %	15 persen	100	100	30 Persen	15 persen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangka Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi Perencanaan Rumah Dan PSU	80 Persen	100 %	100	100	100	40 persen	80 Persen	
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil disertifikasi	3 Pengembang	10 Dokumen	3 Pengembang	3 Pengembang	100%	1 laporan	3 Pengembang	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan PD diukur dari beberapa indikator, yaitu indikator capaian kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*), capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), capaian sasaran pembangunan milenium (SDGs) dan capaian standar pelayanan minimal (SPM). Indikator capaian kinerja (*output* dan *outcome*) program dan kegiatan, sebagaimana termuat dalam dokumen DPA, digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tahun anggaran 2022 terdiri atas 15 program dan 27 kegiatan serta 96 Sub kegiatan. Jumlah anggaran untuk membiayai program dan kegiatan tersebut mencapai Rp129.546.528.483,- dari pagu DPA Rp.134.330.967.793,- (96,59%)

2. Capaian Kinerja Pelayanan Berdasar SDGs

Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur air bersih diupayakan untuk memenuhi kecukupan air bersih bagi penduduk. Target ini dicapai melalui program penyediaan dan pengelolaan air baku dengan kegiatan peningkatan partisipasi 100% masyarakat dalam pengelolaan air yang dilaksanakan dalam bentuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) secara berkelanjutan. Kegiatan pembangunan SPAM dilaksanakan di 26 (dua puluh enam) lokasi di wilayah Kapanewon (Ngawen, Semin, Nglipar, Gedangsari, Patuk, Panggang, Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong, Tepus, dan Girisubo, Rongkop, Purwosari) dengan pemasangan sambungan rumah (SR) dari sistem perpipaan baik sistem PDAM maupun Non PDAM.

Kondisi rawan air minum masih terjadi di 13 Kapanewon (IKK), meliputi Kapanewon, Gedangsari, Girisubo, Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Semin, Tanjungsari, Tepus dan kondisi rawan air bersih dengan katagori rendah masih terjadi di 26 Kalurahan (11,66%) dari 144 Kalurahan meliputi: Gedangsari, Hargomulyo, Sampang, Tegalrejo, Girisubo, Balong, Pucung, Karangmojo, Karangmojo, Nglipar, Pengkol, Paliyan, Pampang, Panggang, Giriharjo, Girikarto, Playen, Getas, Ngunut, Plembutan, Ponjong, , Genjahan, Gombang, Sawahan, Umbulrejo, Purwosari, Giriasih, Giricahyo, Giripurwo, Giritirto, Rongkop, Melikan, Semin, Bulurejo, Kemejing, Semin, Tanjungsari, Kemandang, Tepus, Sidoharjo.

Pelayanan drainase sebagian besar masih terpusat di kota Wonosari dan wilayah-wilayah di ibukota Kapanewon (IKK), dengan jaringan berupa saluran alami dan buatan, serta kondisi ada yang terbuka dan yang tertutup, dengan tingkat kandungan sedimentasi yang cukup tinggi. Sedangkan sanitasi masyarakat, cakupan pelayanan air limbah masih rendah. Namun demikian, untuk pelayanan persampahan sistem 3R (Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (daur ulang)) sudah dalam kategori cukup.

Peningkatan penyediaan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat melalui program lingkungan sehat perumahan, dengan kegiatan Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di 5 (lima) lokasi (Kalurahan/Kapanewon), antara lain yaitu Playen, Nglipar, Paliyan, Mulusan, Panggang, Girikarto, Semanu, Candirejo, Semin, Semin.

Kondisi pelayanan infrastruktur jalan sudah dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, meskipun belum semua ruas jalan dalam kondisi baik. Fokus penanganan jalan diarahkan pada peningkatan akses jalan di wilayah perbatasan dan perdesaan. Untuk mencapai kinerja pelayanan yang lebih baik, pelayanan infrastruktur jalan dibedakan antara jalan kabupaten dan jalan poros kalurahan. Untuk ruas jalan kabupaten di antaranya ditangani melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, dan kegiatan rehabilitasi jalan, serta kegiatan penanganan mendesak jalan dan jembatan. Sedangkan untuk jalan perdesaan ditangani melalui kegiatan pembangunan/peningkatan dari sumber dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) kalurahan.

Untuk jalan kabupaten, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, pada Tahun 2021 dapat mewujudkan jalan dalam kondisi baik mencapai 804,675 km atau 69,54 %, dari total panjang jalan 1.157,16 km. Namun demikian, jalan dengan kondisi rusak masih cukup besar, yaitu 144,64 km (12,50 %) kondisi rusak ringan dan 207,85 km (17,96 %) kondisi rusak berat. Kondisi ini masih menjadi beban dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, terutama bila mengingat tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas yang semakin meningkat.

3. *Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)*

Kinerja pelayanan di bidang penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum hingga akhir Desember 2021, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pencapaian sasaran Sentra produksi memiliki infrastruktur air yang memadai, kinerja pelayanan masih belum sesuai dengan target. Penyediaan air untuk lahan pertanian secara berkelanjutan baru mencapai 70,45%. Hal ini memiliki keterkaitan dengan jumlah pemanfaatan air untuk irigasi dan sumur pompa yang belum optimal. Penambahan jaringan irigasi untuk pertanian juga masih dalam tahap konstruksi, meskipun di beberapa lokasi kegiatan konstruksi sudah selesai dilaksanakan. Penyediaan sumber air baku bagi kebutuhan air minum masyarakat juga masih belum menunjukkan penambahan yang berarti.
- 2) Dalam pencapaian sasaran sentra produksi memiliki infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai, kinerja pelayanan juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Meskipun kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten sebagian sudah selesai dilaksanakan, tetapi diproyeksikan baru 55,80% sentra produksi yang memiliki jalan kabupaten yang memadai. Ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 69,54 % dari total 1.157,16 km panjang jalan kabupaten. Penyediaan jembatan yang memadai bertambah 3 (tiga) unit. Penyediaan jalan dan jembatan untuk pengembangan kawasan perbatasan juga meningkat menjadi 80%. Dalam mendukung pengembangan obyek wisata, dilakukan kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalur jalan menuju obyek wisata, seperti Tepus-Poktunggal, Jepitu-Pantai Jungwok, Nglanggeran (Anggaran DPUPESDM DIY), Goa Pindul dan Sri Gethuk, hingga mencapai 50%. Sementara untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) dari panjang 76 km sudah mencapai 64,00 km. Upaya peningkatan jalan terus diupayakan dalam rangka mendukung dibukanya Bandara Internasional Yogyakarta yang mencakup pelayanan Yogyakarta, Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Timur bagian barat yang berorientasi

untuk mendukung tujuan wisata di Yogyakarta khususnya Kabupaten Gunungkidul.

- 3) Dalam mencapai sasaran kawasan permukiman dan kawasan strategis memiliki infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi yang memadai, penyediaan infrastruktur air bersih di kawasan sentra produksi maupun kawasan permukiman mencapai 88,34%. Penyediaan infrastruktur sanitasi pengelolaan limbah di kawasan sentra produksi mencapai 88,79 infrastruktur sanitasi mencapai 88,22%, dan infrastruktur drainase yang memadai mencapai 81,46%. Untuk kawasan permukiman yang memiliki infrastruktur sanitasi pengelolaan air limbah sebesar 61,91%. Di kawasan obyek wisata, ketersediaan air bersih mencapai 100%, sanitasi pengelolaan limbah 88,22%, jumlah bangunan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mencapai 34,50%, dan rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) 70,69%.
- 4) Dalam mencapai sasaran penyelenggaraan infrastruktur dan industri jasa konstruksi lebih baik, upaya pembinaan pelaku jasa konstruksi berkapasitas dan berkompeten melalui fasilitasi pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) mencapai 100%.
- 5) Dalam mencapai sasaran kinerja pelayanan dinas pekerjaan umum meningkat, peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan infrastruktur mencapai 83%, pelaksanaan pelaporan secara benar dan tepat waktu mencapai 100%, peningkatan kinerja aparatur mencapai 59%, dan peningkatan kinerja akuntabilitas publik penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum mencapai 83%.

4. *Capaian Kinerja Pelayanan Berdasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)*

Kinerja pelayanan di bidang penyediaan infrastruktur diukur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya air, dengan prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum sehari-hari bagi masyarakat gunungkidul diupayakan untuk terus ditingkatkan hingga 90% melalui pemanfaatan sumber air yang ada dan pencarian sumber air baru untuk dieksplorasi. Upaya penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada ditargetkan mencapai 88,23%, ditempuh melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, baik dalam bentuk kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada maupun melalui kegiatan perkuatan irigasi partisipatif.
- 2) Jalan, yaitu dengan target tersedianya jaringan dan ruas jalan. Dari aspek aksesibilitas, ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/ kota sudah dapat terpenuhi. Dari aspek mobilitas, ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan diupayakan peningkatan, meskipun kondisi secara geografis menjadi tantangan yang berat. Untuk memudahkan mobilitas masyarakat, pembangunan jalan dilakukan mulai dari jalan di kawasan permukiman hingga jalan-jalan akses menuju pusat-pusat kegiatan. Dari aspek keselamatan, ketersediaan jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat juga diupayakan untuk dapat dipenuhi. Dari aspek kondisi jalan, diupayakan ketersediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Dari aspek kecepatan, diupayakan ketersediaan jalan yang menjamin perjalanan

dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana sesuai dengan kondisi daerah.

- 3) Air minum, dengan kluster pelayanan yaitu tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. Upaya pemenuhan kebutuhan air minum dilakukan secara terus menerus dengan memaksimalkan sumber air yang ada.
- 4) Penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), diupayakan penyediaan pelayanan untuk air limbah permukiman. Pelayanan air limbah permukiman, berupa ketersediaan sistem air limbah setempat yang memadai, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota dilakukan melalui peningkatan penyediaan fasilitas sanitasi bagi masyarakat.
- 5) Penanganan permukiman kumuh di perkotaan dilakukan dengan mengupayakan berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ada. Untuk penanganan yang lebih terarah, diperlukan adanya penetapan luasan kawasan permukiman kumuh.
- 6) Penataan bangunan dan lingkungan, melalui pelayanan masyarakat dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara online melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) dan penyediaan pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN). Kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB yang masih rendah diupayakan dan didorong melalui kegiatan sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
- 7) Jasa konstruksi, sudah dilakukan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. Yang masih perlu diupayakan adalah dalam hal peningkatan kinerja jasa konstruksi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja penyediaan infrastruktur. Ketersediaan sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun juga semakin ditingkatkan, sehingga kebutuhan informasi jasa konstruksi dapat terpenuhi dengan baik.
- 8) Perumahan. Dalam upaya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau, baik cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, kondisi saat ini relatif cukup memadai, meskipun untuk pelayanan mendatang akan semakin perlu peningkatan seiring dengan perkembangan kota. Untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman, kondisi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) juga perlu disiapkan.

5. *Capaian Kinerja Pelayanan Berdasar Indikator Kinerja Kunci (IKK)*

Kinerja pelayanan di bidang penyediaan infrastruktur diukur dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencakup 2 (dua) bidang, yaitu:

- 1) Wilayah dan Lingkungan, mencakup:
 - Kondisi infrastruktur sanitasi untuk rumah tinggal mengalami peningkatan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat. Hampir 88,22% rumah tinggal memiliki sanitasi, meskipun sanitasinya masih bersifat individual dan kondisinya belum memenuhi persyaratan teknis. Persoalan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur sanitasi komunal adalah kondisi geografis dengan lokasi tempat tinggal yang jarang, di samping ketersediaan air bersih yang kurang. Sehingga pekerjaan yang

paling tepat untuk mencapai target sanitasi adalah pembangunan tangki septik individu.

- Kondisi rumah tinggal di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa jumlah rumah tinggal mencapai 187.671 unit. Melalui program penanganan rumah tinggal layak huni yang didanai melalui APBN, jumlah rumah tinggal layak huni mencapai 96,56% atau 181.223 unit; Rasio permukiman layak huni mencapai 97,90%.

2) Pelayanan di bidang infrastruktur penunjang, mencakup:

- Penyediaan infrastruktur pengairan berupa penyediaan jaringan irigasi di 6 (enam) wilayah kepengamatan, yaitu Wonosari, Ponjong, Semin, Playen, Nglipar dan Patuk, untuk mengairi lahan pertanian seluas ±10.610,10 ha. Hingga Tahun 2021, capaian rasio jaringan irigasi adalah 91,43%.
- Penyediaan infrastruktur jalan dengan Ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 69,54 % dari total 1.157,16 km.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian		Catatan analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)											
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	N/A	58.64	63.08	67.56	57,94	70,11	63.08	67.56		
2	Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Perumahan Dan Permukiman	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	N/A	15.89	25.06	35.34	26,27	32.44	25.06	35.34		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	N/A	81.5	82	82.5	A	A (85,4)	82	82.5		
B	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)											
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok	Persentase Pencapaian Mutu	100	100	100	100	100	100	100	100		

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Air Minum Sehari-hari	Minimal Layanan Dasar (%)										
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100		
4	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Di dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Tugas (pasal 3): Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
2. Fungsi (pasal 4): untuk dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan pembinaan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
 - f. pelaksanaan pembinaan bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
 - g. pengendalian teknis bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
 - h. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - i. pelaksanaan kerja sama bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
 - k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; dan pengelolaan UPT.

Dari rincian fungsi tersebut, secara garis besar Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi pelayanan penyediaan infrastruktur yang mencakup:

- a. Infrastruktur pengairan meliputi penyediaan jaringan irigasi (saluran sekunder), dan pemanfaatan sumber air;
- b. Infrastruktur bina marga meliputi penyediaan jaringan jalan dan jembatan, dan pengelolaan laboratorium dan alat-alat berat;
- c. Infrastruktur cipta karya meliputi infrastruktur permukiman yang berupa jalan lingkungan dan jalan poros kalurahan, sistem penyediaan air minum, sanitasi, pembinaan jasa konstruksi, dan pembinaan perumahan.
- d. Infrastruktur perumahan dan permukiman meliputi infrastruktur rumah swadaya, perumahan formal dan penanganan kawasan kumuh.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul diarahkan kepada pencapaian target-target RPJMD (IKU), SPM, dan IKK. Tingkat kinerja pelayanan baik di bidang pengairan, bina marga, cipta karya dan perumahan, diukur dengan target-target tersebut. Pencapaian target RPJMD, SPM dan IKK, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab

di depan, menjadi fokus bagi penyelenggaraan pelayanan. Tingkat kinerja pelayanan PD hingga tahun anggaran 2020 menunjukkan kondisi yang masih jauh dari target-target yang telah ditetapkan terutama pada sanitasi, air minum, kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni . Di satu sisi, target-target pelayanan yang harus dicapai yang termuat dalam dokumen perencanaan (khususnya RPJMD) adalah kondisi ideal yang harus diwujudkan. Di sisi lain, ketersediaan anggaran yang tidak memadai untuk pencapaian target-target tahunan relatif terbatas. Dengan kondisi tersebut, program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat sepenuhnya mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian terutama program dan kegiatan yang terkait penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, air minum, infrastruktur permukiman, dan infrastruktur irigasi, yang memiliki peran penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan akses di wilayah kalurahan dan perbatasan, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat di sentra-sentra produksi maupun untuk destinasi wisata.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, adalah:

- a. Ketersediaan peralatan terbatas. Pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum akan sangat bergantung pada dukungan peralatan yang ada. Kebutuhan peralatan, baik peralatan ringan hingga peralatan berat diperlukan untuk mendukung kegiatan. Beberapa peralatan penting yang masih kurang antara lain, alat GPS (*global positioning system*), *buldozer*, *mini excavator* dan *tandem roller*. Meskipun sudah dilakukan penambahan peralatan, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan. Kurangnya peralatan ini menjadikan kinerja penyelenggaraan infrastruktur menjadi tidak maksimal.
- b. Kemampuan/ kapasitas teknis sumber daya manusia yang tidak merata. Kekurangan sumber daya manusia dari sisi ini akan memunculkan adanya kesenjangan dan perbedaan pemahaman yang berbeda antara personil satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap suatu aturan. Dalam jangka pendek, kebutuhan akan adanya pendidikan dan pelatihan teknis penting untuk mengatasi kelemahan ini. Dalam jangka panjang, permasalahan ini akan memerlukan penanganan yang memadai dari sisi sistem penerimaan pegawai.
- c. Dukungan data yang valid dan *up to date* masih kurang. Pelaksanaan setiap program dan kegiatan idealnya dimulai dari data. Sehingga ketiadaan data yang valid dan *up to date* akan menjadi kendala, terlebih bila dikaitkan dengan pemenuhan target yang harus dicapai. Data yang tidak valid dan *up to date* dapat membawa kepada hasil kegiatan yang bias dan salah sasaran. Sehingga diperlukan upaya - *updating* data yang mampu mendukung kegiatan perencanaan yang baik.
- d. Keberadaan peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan juga masih belum lengkap. Beberapa peraturan daerah yang menjadi acuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini. Meskipun beberapa peraturan daerah sudah ditetapkan, akan tetapi keberadaan produk hukum sebagai acuan pelaksanaan kegiatan ke depan perlu dilengkapi dan disempurnakan. Pelayanan terhadap masyarakat juga belum dilaksanakan dengan prosedur operasi standar (SOP) secara memadai. Upaya untuk penyusunan SOP yang sudah dilakukan belum mencakup semua kegiatan pelayanan, sehingga masih diperlukan waktu untuk terwujudnya SOP yang lebih lengkap.

e. Terjadinya pandemi COVID-19 secara global dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Kondisi permasalahan dan hambatan tersebut memiliki dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/ internasional (SPM, SDGs). Sehingga pembinaan dan peningkatan terhadap kondisi-kondisi tersebut akan menjadi kunci bagi keberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dan dalam penyelenggaraan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum secara lebih baik.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. Untuk dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, baik dalam visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional (standar pelayanan minimal, dan *millenium development goals*), perlu dipecahkan keempat kendala dan hambatan utama tersebut.

Strategi pencapaian target RKPD tahun 2023 perlu dirumuskan dengan lebih detail mengingat keterbatasan anggaran. Untuk penanganan jalan dan jembatan kabupaten perlu ditempuh upaya pengusulan jalan strategis ke tingkat Pemerintah DIY ataupun Pemerintah Pusat baik yang sifatnya tugas pembantuan dari satker ataupun dana DAK. Untuk pencapaian target air minum dan sanitasi perlu dilakukan pemetaan untuk kawasan yang memerlukan dana besar didorong untuk dapat diakomodasi oleh Pemerintah Pusat melalui Satker Air Bersih dan Sanitasi, kawasan yang memerlukan dana sedang ditangani DAK dan penanganan ringan dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul. Bidang irigasi juga perlu untuk berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai agar penyediaan air baku dan jaringan irigasi baru dapat direalisasikan dari dana APBN.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja PD

Pada bagian ini akan dibandingkan antara rancangan awal Renja PD dengan rancangan akhir Renja PD Tahun 2022. Rancangan awal Rencana Kerja PD dengan rancangan akhir Rencana Kerja PD perlu dibandingkan untuk melihat adanya perbedaan di antara keduanya. Perbedaan ini terjadi sebagai dinamika dalam proses penyusunan rencana kerja yang berisi susunan program dan kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Adanya peran dari banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses perencanaan, dapat diartikan dengan banyak aspirasi, masukan dan usulan, baik berupa program, kegiatan, maupun lokasi, yang harus diakomodasi dalam perencanaan. Sehingga perbandingan ini akan menunjukkan adanya dinamika di dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja PD.

Adanya perbedaan antara rancangan awal Rencana Kerja PD dengan rancangan akhir Rencana Kerja PD dapat mencerminkan peran para pemangku kepentingan di dalam proses penyusunan rencana kerja. Banyaknya usulan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan sebagai wujud banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi dalam perencanaan. Perubahan yang terjadi pada rancangan awal Rencana Kerja PD antara lain sebagai bentuk akomodasi terhadap aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh para pemangku kepentingan. Banyak atau sedikitnya perubahan juga merupakan usaha PD dalam membaca kebutuhan masyarakat dan merumuskannya ke dalam perencanaan, dengan memperhatikan kondisi dari berbagai faktor yang melingkupi. Adapun rencana kerja Tahun 2024 mencakup 14 program dan 25 kegiatan, dan 84 Sub Kegiatan meliputi :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3	Administrasi		

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
			Kepegawaian Perangkat Daerah		
				10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				16	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
			Pemerintahan Daerah		
				22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
		7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				27	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
				28	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
				29	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
				30	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
				31	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
				32	Rehabilitasi Tanggul Sungai
		8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a		
				33	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
				34	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				35	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
				36	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				37	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
				38	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
		9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kot a		
				39	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				40	Peningkatan

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				41	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				42	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
		10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kot a		
				43	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
				44	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				45	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				46	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				47	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
		11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				48	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
				49	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
		12	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
				50	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				51	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				52	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
		13	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kot a		
				53	Pengelolaan Leger Jalan
				54	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
				55	Penggantian Jembatan
				56	Pembangunan Jalan
				57	Rekonstruksi Jalan
				58	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
				59	Pelebaran Jalan Menuju Standar
				60	Pemeliharaan Rutin Jembatan
				61	Rehabilitasi Jembatan
				62	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
				63	Rehabilitasi Jalan
				64	Pemeliharaan Rutin Jalan
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
		14	Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
				65	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
				66	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Operator, Teknisi atau Analis
		15	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
				67	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
				68	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
		16	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
				69	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
		17	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		
				70	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
				71	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
				72	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
		18	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi		

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
			Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
				73	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
				74	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		19	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
				75	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
				76	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
				77	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		20	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
				78	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
		21	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
				79	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
		22	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
				80	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
12	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
		23	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kot a		
				81	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
		24	Urusan Penyelenggara n PSU Perumahan		
				82	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
				83	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
14	PROGRAM PENINGKATAN				

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
	PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		25	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		
				84	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Renja DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Kalurahan maupun Tingkat Kecamatan. Dilanjutkan dengan diselenggarakannya Forum PD untuk menyepakati hasil Musrenbang yang sudah masuk guna penyusunan rencana kerja tahun 2024, sehingga menghasilkan usulan yang lebih spesifik dan terarah sesuai dengan kesepakatan bersama dalam Forum PD. Penyusunan Renja mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Review terhadap rancangan awal Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3	4	5	6 6,558,812,930.00	7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8	9	10	11 6,508,315,545.00	12
			<i>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)</i>	100				<i>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)</i>	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.052.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.380.000,00	
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan disusun</i>	15				<i>Jumlah Dokumen Perencanaan disusun</i>	15	12.380.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)	(Dokumen)		15.252.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)	(Dokumen)		3.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			750.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			750.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2 RKA-SKPD	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1		RKA-SKPD		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			1.750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(KAB. GUNUN GKIDUL)			1.920.000,00	
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD(Dokum en)</i>	3				<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD(Dokum en)</i>	3		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			1.250.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	(KAB. GUNUN GKIDUL)			1.560.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2 DPA- SKPD	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	2		DPA- SKPD		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	2		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			12.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			4.360.000,00	
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>	1				<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>	15		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan)</i>					<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan)</i>			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)			4.967.980.430,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(KAB. GUNUNG GKIDUL)			4.960.977.710,00	
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)</i>	16				<i>Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)</i>	16	4.960.977.710,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(KAB. GUNUNG KIDUL)			4.949.300.430,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(KAB. GUNUNG GKIDUL)			4.939.967.710,00	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	1330				<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	1330		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD(Lapora n)	1				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD(Lapora n)	1		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			16.680.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			19.010.000,00	
			Jumlah Laporan	14				Jumlah Laporan	14		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>					<i>Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)			12.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)			6.000.000,00	
			<i>Jumlah PNS dilayanidalam pengelolaan administrasi kepegawaian (Orang)</i>	95				<i>Jumlah PNS dilayanidalam pengelolaan administrasi kepegawaian (Orang)</i>	95		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(KAB. GUNUNG KIDUL)			5.000.000,00						
			<i>Jumlah Paket</i>	1							

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)</i>								
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(KAB. GUNUNG KIDUL)			2.500.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(KAB. GUNUNG KIDUL)			2.000.000,00	
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	5				<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	5		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(KAB. GUNUNG KIDUL)			5.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(KAB. GUNUNG KIDUL)			4.000.000,00	
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	89				<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	1.00		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)			103.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(KAB. GUNUN GKIDUL)			182.015.000,00	
			<i>Jumlah kegiatan dilayani dalam pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah (Kegiatan)</i>	6				<i>Jumlah kegiatan dilayani dalam pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah (Kegiatan)</i>	6	182.015.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	(KAB. GUNUNG KIDUL)			5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	(KAB. GUNUN GKIDUL)			17.000.000,00	
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1				<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	2		
	Penyediaan	(KAB.			25.000.000,00	Penyediaan	(KAB.			45.000.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	GUNUNG KIDUL)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	GUNUNG KIDUL)		2		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			19.675.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	12					12		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			1.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	372					365		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>					<i>Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(KAB. GUNUNG KIDUL)			3.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(KAB. GUNUNG KIDUL)			3.500.000,00	
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12				<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			50.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			95.000.000,00	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12.00				<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12.00		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			3.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(KAB. GUNUNG KIDUL)			640.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	<i>12</i>				<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	<i>12</i>		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)			580.100.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)			532.290.000,00	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</i>	<i>14</i>				<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</i>	<i>14</i>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(KAB. GUNUNG KIDUL)			100.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(KAB. GUNUNG KIDUL)			100.000,00	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	<i>12</i>				<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	<i>12</i>		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(KAB. GUNUNG KIDUL)			200.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(KAB. GUNUNG GKIDUL)			148.200.000,00	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(L aporan)</i>	96				<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(L aporan)</i>	96		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(KAB. GUNUNG KIDUL)			380.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(KAB. GUNUNG GKIDUL)			383.990.000,00	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	2				<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	2		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	(KAB. GUNUNG KIDUL)			863.180.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	(KAB. GUNUNG GKIDUL)			814.652.835,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah					
			<i>Jumlah Barang milik daerah dipelihara (Unit)</i>	114				<i>Jumlah Barang milik daerah dipelihara (Unit)</i>	114	814.652.835,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			215.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(KAB. GUNUN GKIDUL)			248.000.000,00	
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(</i>	29				<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(</i>	28		
			<i>Unit)</i>					<i>Unit)</i>			

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	(KAB. GUNUNG KIDUL)			365.175.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	(KAB. GUNUN GKIDUL)			345.175.000,00	
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)</i>	23.00				<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)</i>	20		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(KAB. GUNUNG KIDUL)			15.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(KAB. GUNUN GKIDUL)			3.200.000,00	
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	63				<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	8		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(KAB. GUNUNG KIDUL)			264.505.500,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(KAB. GUNUN GKIDUL)			217.377.835,00	
			<i>Jumlah</i>	5				<i>Jumlah</i>	2		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi(U nit)</i>					<i>Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi(U nit)</i>			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(KAB. GUNUNG KIDUL)			3.000.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(KAB. GUNUNG KIDUL)			900.000,00	
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi (Unit)</i>	5				<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi (Unit)</i>	3		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				2,251,800,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	(KAB. GUNUNG KIDUL)			1,123,400,000.00	
			<i>Persentase Daerah</i>	30,53				<i>Persentase Daerah</i>	30,53		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)	<i>Irigasi (DI) Dalam Kondisi Baik (%)</i>		140.565.000,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		<i>Irigasi (DI) Dalam Kondisi Baik (%)</i>		417.540.000,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>Jumlah bangunan pengaman sungai dikelola (Unit)</i>	8	126.850.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>Jumlah bangunan pengaman sungai dikelola (Lokasi)</i>	8	417.540.000,00	
			<i>Jumlah Lembaga</i>	80				<i>Jumlah Lembaga</i>	9		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)</i>					<i>Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)</i>			
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/ Kota				350.000,00	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/ Kota					
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/ Kota(Dokumen)</i>	3				<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/ Kota(Dokumen)</i>	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			11.265.000,00						

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SDA Kewenangan Provinsi										
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasny a melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)</i>	28							
	Operasi dan Pemeliharaan Danau	(KAB. GUNUNG KIDUL)			350.000,00						
			<i>Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara (Danau)</i>	5							
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	(KAB. GUNUNG KIDUL)			350.000,00	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				-	
			<i>Jumlah Embung dan Penampungan</i>	2				<i>Jumlah Embung dan Penampungan</i>	0		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit)</i>					<i>Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit)</i>			
	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	(KAB. GUNUNG KIDUL)			350.000,00	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku				66.350.000,00	
			<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi (Titik)</i>	3				<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi (Titik)</i>	1		
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	(KAB. GUNUNG KIDUL)			350.000,00						
			<i>Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)</i>	0.1							
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	(KAB. GUNUNG KIDUL)			350.000,00	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				194.300.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)</i>	<i>1</i>				<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)</i>	<i>1</i>		
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	(KAB. GUNUNG KIDUL)		<i>0.1</i>	350.000,00	Rehabilitasi Tanggul Sungai				131.600.000,00	
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi(KM)</i>					<i>Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi(KM)</i>	<i>0.04</i>		
	Pengembang n dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	(KAB. GUNUNG KIDUL)			2.111.235.000,00	Pengembang n dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta				705.860.000,00	
			<i>Jumlah Sistem Irigasi Primer dan</i>	<i>22</i>				<i>Jumlah Sistem Irigasi Primer dan</i>	<i>22</i>		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting				
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<i>Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dikelola (DI (Daerah Irigasi))</i>					<i>Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dikelola (DI (Daerah Irigasi))</i>				
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			350.000,00							
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)</i>	0.5								
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			169.845.000,00							
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)</i>	1.5								
	Peningkatan Jaringan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			169.900.000,00	Peningkatan Jaringan				103.150.000,00		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Irigasi Air Tanah	KIDUL)				Irigasi Air Tanah					
			Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan (KM)	0.4				Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan (KM)	0.08		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			509.700.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				129.700.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0.4				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0.08		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	(KAB. GUNUNG KIDUL)			169.900.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah				126.100.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi (KM)	0.5				Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi (KM)	0.08		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			405.600.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan				260.780.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Irigasi Permukaan					Irigasi Permukaan					
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara(K M)</i>	0.2				<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara(K M)</i>	0.55		
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	(KAB. GUNUNG KIDUL)			61.400.000,00						
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung)</i>	5							
	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	(KAB. GUNUNG KIDUL)			350.000,00						
			<i>Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air</i>	43							

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)</i>								
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	(KAB. GUNUNG KIDUL)		0.4	492.000.000,00						
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)</i>								
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	(KAB. GUNUNG KIDUL)			30.640.000,00	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				36.000.000,00	
			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)</i>	12				<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)</i>	12		
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen	(KAB. GUNUNG KIDUL)			101.550.000,00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen				50.130.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)</i>	2				<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)</i>	1		
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1,163,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				442,500,000.00	
			<i>Persentase Kepala Keluarga Berakses Air Minum Layak (%)</i>	85,19				<i>Persentase Kepala Keluarga Berakses Air Minum Layak (%)</i>	85,19		
	Pengelolaan dan	(KAB. GUNUNG			1.163.000.000,00	Pengelolaan dan				442.500.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	KIDUL)				Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Unit Spandes yang memiliki sistem mantap (Unit)</i>	211				<i>Jumlah Unit Spandes yang memiliki sistem mantap (Unit)</i>	211	442.500.000,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	(KAB. GUNUNG KIDUL)			10.400.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				45.500.000,00	
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan</i>	6				<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan</i>	280		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>dan</i> <i>Pengembangan</i> <i>Sistem</i> <i>Penyediaan</i> <i>Air Minum</i> <i>(SPAM)</i> <i>(Orang)</i>					<i>dan</i> <i>Pengembangan</i> <i>Sistem</i> <i>Penyediaan</i> <i>Air Minum</i> <i>(SPAM)</i> <i>(Orang)</i>			
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	(KAB. GUNUNG KIDUL)			22.600.000,00						
			<i>Jumlah Desa</i> <i>yang Dibina</i> <i>dalam</i> <i>Pengelolaan</i> <i>dan</i> <i>Pengembangan</i> <i>Sistem</i> <i>Penyediaan</i> <i>Air Minum</i> <i>(SPAM)</i> <i>(Desa)</i>	300							
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			750.000.000,00						

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/ SPAM Berbasis Masyarakat (SR)</i>	200							
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)		6	275.000.000,00						
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	(KAB. GUNUNG KIDUL)		3	105.000.000,00						
			<i>Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan (Unit)</i>								

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-	
								<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/ Detik)</i>	0		
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				397.000.000,00	
								<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/ Detik)</i>	0.06		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				-	
								<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)</i>	0		
4	PROGRAM PENGEMBAN GAN SISTEM DAN PENGELOLAA N PERSAMPAHA N REGIONAL				570,000,000.00						
			<i>Persentase Ketersediaan Sarpras Persampahan (%)</i>	50							
	Pengembang an Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah	(KAB. GUNUNG KIDUL)			570.000.000,00						

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2 Kabupaten/ Kota	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Sarana dan prasarana persampahan dibangun (Unit)</i>	9							
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	(KAB. GUNUNG KIDUL)			570.000.000,00						
			<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun(Ton / hari)</i>	100							
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	(KAB. GUNUNG KIDUL)			1,062,600,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				569,500,000.00	
			<i>Persentase Cakupan Kepala Keluarga Yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah</i>	87,34				<i>Persentase Cakupan Kepala Keluarga Yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah</i>	87,34		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Layak (%)</i>					<i>Layak (%)</i>			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)			1.062.600.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				569.500.000,00	
			<i>Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak (KK)</i>	500				<i>Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak (KK)</i>	500		
						Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				-	
								<i>Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan</i>	0		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		<i>MA³/Hari</i>		446.500.000,00	
								<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MA³/Hari)</i>	50		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(KAB. GUNUNG KIDUL)			22.600.000,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				23.000.000,00	
			<i>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara</i>	147				<i>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara</i>	8		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>a Sistem Pengeloaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya(Penyelenggara)</i>					<i>a Sistem Pengeloaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya(Penyelenggara)</i>			
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengeloaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(KAB. GUNUNG KIDUL)			50.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengeloaan Air Limbah Domestik (SPALD)				100.000.000,00	
			<i>Jumlah Sistem Pengeloaan Air Limbah Domestik Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)</i>	2				<i>Jumlah Sistem Pengeloaan Air Limbah Domestik Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)</i>	2		
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	(KAB. GUNUNG KIDUL)			420.000.000,00	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik					-

RENCANA RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)
1	2 (SPALD) Setempat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar(Rumah Tangga)</i>	150		(SPALD) Setempat		<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar(Rumah Tangga)</i>	0		
	Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	(KAB. GUNUNG KIDUL)			570.000.000,00						
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Rumah Tangga)</i>	50							

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2 Rehabilitasi/Peningkatan/Pe rluasan Sarana dan Prasarana IPLT	3 (KAB. GUNUNG KIDUL)	4 -	5 -	6 -	7	8	9	10	11	12
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Kapasitas IPLT yang Di optimalisas i (M ³ ,A ³ /Hari)	25	550.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				90.000.000,00	
			Persentase Kawasan Perkotaan Yang Memiliki Sistem Drainase Baik(%)	50				Persentase Kawasan Perkotaan Yang Memiliki Sistem Drainase Baik(%)	50		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	(KAB. GUNUNG KIDUL)			550.000.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	(KAB. GUNUNG KIDUL)			90.000.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan (KK)	1.500				Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan (KK)	1.500		
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			250.000.000,00	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	(Trimulyo Kepek, KAB. GUNUNG KIDUL)			90.000.000,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	492				Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	50		
	Optimalisasi Sistem Drainase	(KAB. GUNUNG KIDUL)			300.000.000,00	Optimalisasi Sistem Drainase	(Wonosari, KAB. KIDUL)			-	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lingkungan					Lingkungan	GUNUNG KIDUL				
			<i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Di optimalisas i(M)</i>	395				<i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Di optimalisas i(M)</i>	0		
7	PROGRAM PENGEMBAN GAN PERMUKIMAN				442,000,000.00						
			<i>Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan (%)</i>	60							
	Penyelenggara an Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta	(KAB. GUNUNG KIDUL)			442.000.000,00						
			<i>Jumlah</i>	7							

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Ibukota Kapanewon yang dibangun Infrastruktur Permukiman (Kecamatan)</i>								
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)			442.000.000,00						
			<i>Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota(Sistem</i>	2							

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jaringan</i>								
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				900,995,000.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				685,000,000.00	
			<i>Persentase Keandalan Gedung Pemerintah (%)</i>	77,55				<i>Persentase Keandalan Gedung Pemerintah (%)</i>	77,55		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	(KAB. GUNUNG KIDUL)			900.995.000,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	(KAB. GUNUNG KIDUL)			685.000.000,00	
			<i>Jumlah Gedung Pemerintah Kabupaten ditata (Unit)</i>	5				<i>Jumlah Gedung Pemerintah Kabupaten ditata (Unit)</i>	5	685.000.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuain (Bangunan Gedung)	1	250.995.000,00	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuain (Bangunan Gedung)	1	385.000.000,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuain (Bangunan Gedung)		500.000.000,00	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)			-	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ta					ta					
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota(Dokumen)</i>	2				<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota(Dokumen)</i>	0		
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis	(KAB. GUNUNG KIDUL)			150.000.000,00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis	(KAB. GUNUNG KIDUL)			300.000.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2 Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	3	4	5	6	7 Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	8	9	10	11	12
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli	12				Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli	12		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG(Dokumen)					(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG(Dokumen)			
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				7,918,200,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				5,670,000,000.00	
			Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	72,522				Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	72,522		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)			7.918.200.000,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)			5.670.000.000,00	
			Jumlah panjang jalan kewenangan kabupaten dengan kondisi baik (Km)	22				Jumlah panjang jalan kewenangan kabupaten dengan kondisi baik (Km)	22		
	Pengelolaan Leger Jalan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			102.000.000,00	Pengelolaan Leger Jalan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			-	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)</i>	1.00				<i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)</i>	0		
	Pengawasan Penyelenggara an Jalan Kewenangan Kabupaten/Ko ta dan Desa	(KAB. GUNUNG KIDUL)			250.000.000,00	Pengawasan Penyelenggara an Jalan Kewenangan Kabupaten/Ko ta dan Desa	(KAB. GUNUN GKIDUL)			-	
			<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ K ota dan Desa yang Diaawasi Penyelenggar aannya (KM)</i>	1				<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ K ota dan Desa yang Diaawasi Penyelenggar aannya (KM)</i>	0		
	Penggantian Jembatan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			250.000.000,00	Penggantian Jembatan	(KAB. GUNUN GKIDUL)			-	
			<i>Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)</i>	63				<i>Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)</i>	1.00		
	Pembangunan Jalan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			1.000.000.000,00	Pembangunan Jalan	(KAB. GUNUN GKIDUL)			170.600.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun (KM)</i>	3.20				<i>Panjang Jalan yang Dibangun (KM)</i>	0.02		
	Rekonstruksi Jalan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			1.250.000.000,00	Rekonstruksi Jalan	(KAB. GUNUN GKIDUL			102.700.000,00	
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruk si (KM)</i>	8.70				<i>Panjang Jalan yang Direkonstruk si (KM)</i>	0.7		
	Pemeliharaan Berkala Jalan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			600.000.000,00						
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)</i>	1.30							
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggara an Jalan Kewenangan Kabupaten/Ko ta dan Desa	(KAB. GUNUNG KIDUL)			200.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggara an Jalan Kewenangan Kabupaten/Ko ta dan Desa	(KAB. GUNUN GKIDUL			-	
			<i>Panjang Jalan</i>	1				<i>Panjang Jalan</i>	0		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelesaiannya (KM)</i>					<i>Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelesaiannya (KM)</i>			
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	(KAB. GUNUNG KIDUL)			775.000.000,00	Pelebaran Jalan Menuju Standar	(KAB. GUNUNG GKIDUL)			3.081.300.000,00	
			<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)</i>	2.50				<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)</i>	0.59		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			75.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Jembatan	(KAB. GUNUNG GKIDUL)			-	
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)</i>	232.00				<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)</i>	0		
	Rehabilitasi Jembatan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			100.000.000,00	Rehabilitasi Jembatan	(KAB. GUNUNG GKIDUL)			-	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	115				Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	0		
	Pembangunan Jembatan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			-						
			Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	0							
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			100.000.000,00						
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Jembatan)	232.00							
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			205.000.000,00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			151.050.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey	2				Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey	1159.00		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Kondisinya (KM)</i>					<i>Kondisinya (KM)</i>			
	Rehabilitasi Jalan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)</i>	2.50	1.000.000.000,00	Rehabilitasi Jalan	(KAB. GUNUN GKIDUL)			1.158.050.000,00	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	(KAB. GUNUNG KIDUL)	<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)</i>		2.011.200.000,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	(KAB. GUNUN GKIDUL)		0.34	1.006.300.000,00	
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)</i>	10.50				<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)</i>	0.75		
10	PROGRAM PENGEMBAN GAN JASA KONSTRUKSI				259,235,000.00	PROGRAM PENGEMBAN GAN JASA KONSTRUKSI				200,000,000.00	
			<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Bidang Konstruksi Yang Kompeten Dan Profesional</i>	35				<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Bidang Konstruksi Yang Kompeten Dan Profesional</i>	35		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	(KAB. GUNUNG KIDUL)	(%)		206.115.000,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	(KAB. GUNUNG KIDUL)	(%)		109.820.000,00	
			<i>Jumlah SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (Orang)</i>	90				<i>Jumlah SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (Orang)</i>	90	109.820.000,00	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	(KAB. GUNUNG KIDUL)			115.595.000,00	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	(KAB. GUNUNG KIDUL)			70.000.000,00	
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi</i>	90				<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi</i>	40		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Sertifikasi(Orang)</i>					<i>Sertifikasi(Orang)</i>			
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis	(KAB. GUNUNG KIDUL)			90.520.000,00	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis	(KAB. GUNUN GKIDUL)			39.820.000,00	
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis yang Dilatih (Orang)</i>	90				<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis yang Dilatih (Orang)</i>	40		
	Penyelenggara an Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	(KAB. GUNUNG KIDUL)			15.740.000,00	Penyelenggara an Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	(KAB. GUNUN GKIDUL)			49.520.000,00	
			<i>Jumlah aplikasi sistem informasi</i>	1				<i>Jumlah aplikasi sistem informasi</i>	1		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>data kinerja Jasa Konstruksi dikelola (Buah)</i>					<i>data kinerja Jasa Konstruksi dikelola (Buah)</i>			
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	(KAB. GUNUNG KIDUL)			10.000.000,00	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				20.000.000,00	
			<i>Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)</i>	1				<i>Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)</i>	1.00		
	Operasionalisa si Layanan Informasi Jasa Konstruksi	(KAB. GUNUNG KIDUL)			5.740.000,00	Operasionalisa si Layanan Informasi Jasa Konstruksi				29.520.000,00	
			<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang</i>	1				<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang</i>	1.00		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Dioperasikan (Layanan Informasi)</i>					<i>Dioperasikan (Layanan Informasi)</i>			
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	(KAB. GUNUNG KIDUL)			37.380.000,00	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	(KAB. GUNUNG KIDUL)			40.660.000,00	
			<i>Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi(Perusahaan)</i>	84				<i>Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi(Perusahaan)</i>	84		
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)			37.380.000,00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				40.660.000,00	
			<i>Jumlah</i>	12				<i>Jumlah</i>	12		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)</i>					<i>Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)</i>			
11	PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				0.00	PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				17,610,013,000.0 0	
			<i>Persentase Penyelenggan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik(%)</i>	60				<i>Persentase Penyelenggan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik(%)</i>	60		
	Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis	(KAB. GUNUNG KIDUL)			-	Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis	(KAB. GUNUNG KIDUL)			17.610.013.000,0 0	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kasultanan dan Kadipaten					Kasultanan dan Kadipaten					
			<i>Jumlah Dokumen Pendukung Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul (Dokumen)</i>	<i>1</i>				<i>Jumlah Dokumen Pendukung Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)</i>	<i>1</i>		
						Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	<i>(Pangga ng, Girikart o, Girikart o, Kec. Pangga ng)</i>			16.350.253.000,00	
								<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (Dokumen)</i>	<i>1</i>		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	(Panggang dan Rongkop, KAB. GUNUNG KIDUL)			1.259.760.000,00	
								Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu(Dokumen)	1		
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	(KAB. GUNUNG KIDUL)			-	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	(Panggang, Girikartono, Girikartono, Kec. Panggang)			-	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang	2				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang	1		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Strategis Pantai Selatan Gunungkidul (Dokumen)</i>					<i>Strategis Pantai Selatan Gunungkidul (Dokumen)</i>			
12	PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN				1,695,115,000.00	PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN				1,756,354,665.00	
			<i>Persentase Peningkatan Penyediaan Akses Perumahan Yang Layak, Aman, Dan Terjangkau (%)</i>	20				<i>Persentase Peningkatan Penyediaan Akses Perumahan Yang Layak, Aman, Dan Terjangkau (%)</i>	20		
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko ta	(KAB. GUNUNG KIDUL)			100.000.000,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko ta	(KAB. GUNUN GKIDUL)			60.000.000,00	
			<i>Jumlah Rumah KorbanBenca</i>	500				<i>Jumlah Rumah KorbanBenca</i>	500		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>na atau Relokasi Program Kabupaten/Kotadidatata (Unit Rumah)</i>					<i>na atau Relokasi Program Kabupaten/Kotadidatata (Unit Rumah)</i>			
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			20.000.000,00						
			<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)</i>	2							
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	(KAB. GUNUNG KIDUL)			20.000.000,00	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	(KAB. GUNUNG KIDUL)			30.000.000,00	
			<i>Jumlah</i>	2.00				<i>Jumlah</i>	1		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani(D okumen)</i>					<i>Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani(D okumen)</i>			
						Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	(KAB. GUNUN GKIDUL)			30.000.000,00	
								<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	1		
	Identifikasi	(KAB.			40.000.000,00						

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	GUNUNG KIDUL)									
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2.00							
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)			20.000.000,00						
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ K	2.00							

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>ota yang Terverifikasi (Dokumen)</i>								
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko ta	(KAB. GUNUNG KIDUL)		20	452.255.000,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko ta	(KAB. GUNUN GKIDUL)		20	680.000.000,00	
			<i>Jumlah Rumah KorbanBenca na atau RelokasiProgr am Kabupaten/ K otaDibangun / Direhabilitasi (Unit Rumah)</i>					<i>Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ K ota Dibangun/ Direhabilitasi (Unit Rumah)</i>			
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	(KAB. GUNUNG KIDUL)			50.000.000,00	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	(KAB. GUNUN GKIDUL)			30.000.000,00	
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana</i>	10.00				<i>Jumlah Rumah Korban Bencana</i>	1		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)</i>					<i>Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)</i>			
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	(Karangejek, Kec. Wonosari)			100.000.000,00	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	(KAB. GUNUNGKIDUL)			50.000.000,00	
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)</i>	10.00				<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)</i>	1		
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNGKIDUL)			150.000.000,00	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNGKIDUL)			600.000.000,00	
			<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	1.00				<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	1.00		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>ota (Unit Rumah)</i>					<i>ota (Unit Rumah)</i>			
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	(KAB. GUNUNG KIDUL)			152.255.000,00						
			<i>Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/ Kota (Ha)</i>	1.00							
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	(Karang rejek, Kec. Wonosari)			1.142.860.000,00	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	(Karang rejek, Kec. Wonosari)			1.016.354.665,00	
			<i>Penurunan Persentase Hunian Rumah Susun (%)</i>	65				<i>Penurunan Persentase Hunian Rumah Susun (%)</i>	60		
	Penatausahaan	(Karangr			1.142.860.000,00	Penatausahaan	(Karang			1.016.354.665,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2 n Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3 ejek, Kec. Wonosari)	4 4	5 5	6 6	7 n Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	8 rejek, Kec. Wonosa ri)	9 9	10 10	11 11	12 12
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)</i>	1.00				<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)</i>	1.00		
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				434,900,000.00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				0.00	
			<i>Persentase Penanganan PSU Kawasan Permukiman(%)</i>	30,04				<i>Persentase Penanganan PSU Kawasan Permukiman(%)</i>	30,04		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	(KAB. GUNUNG KIDUL)			102.450.000,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	(KAB. GUNUNG GKIDUL)			-	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2 (Sepuluh) Ha	3	4	5	6	7 (Sepuluh) Ha	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang memiliki dokumen penataan dan peningkatan (Kawasan)</i>	2				<i>Jumlah Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang memiliki dokumen penataan dan peningkatan (Kawasan)</i>	2		
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Perumahan Kumuh	(KAB. GUNUNG KIDUL)	<i>Jumlah Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang memiliki dokumen penataan dan peningkatan (Kawasan)</i>		102.450.000,00						
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas</i>	2							

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh(Doku men)</i>								
						Penyusunan/ Review/Legalis asi Kebijakan Bidang PKP	(KAB. GUNUN GKIDUL)		0		-
								<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Ter eview/ Terleg alisasi (Dokumen)</i>			
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(KAB. GUNUNG KIDUL)			332.450.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(KAB. GUNUN GKIDUL)				-
			<i>Jumlah Kepala Keluarga diKawasan Permukiman Kumuh</i>	20				<i>Jumlah Kepala Keluarga di Kawasan Permukiman Kumuh</i>	20		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Hameneri peningkatan kualitas (Kepala Keluarga)					dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Hameneri peningkatan kualitas (Kepala Keluarga)			
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	(KAB. GUNUNG KIDUL)			332.450.000,00	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	(KAB. GUNUNG KIDUL)			-	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0		
14	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				299,325,000.00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				4,208,000,000.00	
			Persentase Penanganan PSU Dalam Rangka	16,67				Persentase Penanganan PSU Dalam Rangka	16,67		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pencegahan Tumbuhnya Kawasan Permukiman Kumuh (%)</i>					<i>Pencegahan Tumbuhnya Kawasan Permukiman Kumuh (%)</i>			
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)			299.325.000,00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. GUNUNG KIDUL)			4.208.000.000,00	
			<i>Jumlah KapanewonPenerima programPencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada DaerahKabupaten/Kota (Kecamatan)</i>	6				<i>Jumlah Kapanewon Penerima program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan)</i>	6		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk	(KAB. GUNUNG KIDUL)			299.325.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk	(KAB. GUNUNG KIDUL)			4.208.000.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2 Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3	4	5	6	7 Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki(Un	200				202			

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>it Rumah</i>					<i>it Rumah</i>			
15	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				174,040,000.00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				989,820,000.00	
			<i>Persentase Perumahan Formal Yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU (%)</i>	60				<i>Persentase Perumahan Formal Yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU (%)</i>	60		
	Urusan Penyelenggaraan Perumahan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			174.040.000,00	Urusan Penyelenggaraan Perumahan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			989.820.000,00	
			<i>Jumlah Perumahan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lokasi)</i>	15				<i>Jumlah Perumahan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lokasi)</i>	15		
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			2.400.000,00	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	(KAB. GUNUNG KIDUL)			920.000,00	
			<i>Jumlah</i>	1				<i>Jumlah</i>	1		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)</i>					<i>Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)</i>			
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	(KAB. GUNUNG KIDUL)			171.640.000,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	(KAB. GUNUN GKIDUL)			988.900.000,00	
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)</i>	5				<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)</i>	3		
16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,				3,380,000.00	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,				1,180,000.00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
			<i>Persentase Penerbitan Sertifikat Bagi Perancang Dan Perencana Rumah Dan PSU (%)</i>	50				<i>Persentase Penerbitan Sertifikat Bagi Perancang Dan Perencana Rumah Dan PSU (%)</i>	50		
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	(KAB. GUNUNG KIDUL)			3.380.000,00	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	(KAB. GUNUN GKIDUL)			1.180.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PSU Tingkat Kemampuan Kecil					PSU Tingkat Kemampuan Kecil					
			<i>Jumlah Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil di sertifikasi(Lo kasi)</i>	20				<i>Jumlah Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil di sertifikasi(Lo kasi)</i>	20		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	(KAB. GUNUNG KIDUL)			3.380.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	(KAB. GUNUN GKIDUL)			1.180.000,00	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi</i>	1.00				<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi</i>	1.00		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)</i>					<i>Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)</i>			
J U M L A H										39.854.083.210,00	
						24.283.402.930,00					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan pengumpulan program dan kegiatan dari bidang-bidang dan UPT yang ada di lingkungan DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul. Langkah selanjutnya, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat, diadakan musrenbang di semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat kecamatan/desa yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK dan sectoral (PIS). Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Pada forum ini disampaikan data rekapitulasi hasil musrenbang, dan kemudian disepakati bersama hasil forum perangkat daerah tersebut. Namun, usulan-usulan tersebut tidak seluruhnya dapat terakomodir karena keterbatasan anggaran. Adapun rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

Usulan PIWK (Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan)

NO	Usulan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	OPD Penanggung jawab
1	Kapanewon	(PIWK) - Perbaikan RTLH (diluar Kawasan Kumuh)	Gunungkidul	Dibangun RTLH	192	unit	20.000.000	3.480.000.000	DPUPRKP

Usulan POKIR DPRD

NO	Usulan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	OPD Penanggung jawab
1	Dewan	(PIWK) - Perbaikan RTLH (diluar Kawasan Kumuh)	Semin, Semanu	Dibangun RTLH	10	unit	20.000.000	200.000.000	DPUPRKP
2	Dewan	POKIR-Rehabilitasi Jalan	Semanu, Pakel, Semin	Rehabilitasi Jalan	4	ruas	-	670.000.000	DPUPRKP

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pengembangan pelayanan infrastruktur 5 tahun ke depan, merupakan hasil dari pengaruh-pengaruh oleh perkembangan kebijakan dan kondisi yang terjadi di lingkungan global, nasional, dan lokal. Untuk memprediksikan kemungkinan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan PD, berikut tinjauan singkat mengenai arah kebijakan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum di tingkat nasional, provinsi, dan kebijakan kabupaten.

Kebijakan nasional pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman 2020-2024 mengacu kepada *new deal* pembangunan ekonomi Indonesia, yang secara prinsip memuat *triple track strategy*, yaitu *pro growth* (dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan ekspor dan investasi), *pro job* (menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja), dan *pro poor* (merevitalisasi sektor pertanian, kelautan, kehutanan, dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan). Dalam kerangka strategi ini, peran infrastruktur pekerjaan umum dalam pembangunan nasional adalah sebagai pendukung bagi berhasilnya *new deal* tersebut, yaitu tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pada tingkat nasional, dalam RPJM Nasional 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum perumahan rakyat dengan prioritas utama pada kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel, makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) di semua tingkatan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan tingkat kesenjangan, meningkatnya daya saing perekonomian melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, pengembangan sumber daya air, dan infrastruktur perumahan dan permukiman, dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan melalui konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan ruang. Arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat nasional adalah:

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan
 - (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya;
 - (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
 - (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Di tingkat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tema pembangunan Tahun 2023 yaitu “ Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor ekonomi Unggulan “. Sedangkan untuk mencapai tema tersebut disusun arah kebijakan pembangunan 2023, meliputi:

1. Upaya pencapaian visi DIY Tahun 2025; DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera;
2. Akselerasi pencapaian indikator kinerja sasaran daerah yang belum tercapai;
3. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan (koridor pemerataan di wilayah selatan);
4. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;

5. Mendorong terwujudnya kawasan industri dan kawasan peruntukan industri yang termanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha industri;
6. Meningkatkan kinerja daerah irigasi
7. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY
8. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi
9. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
10. Meningkatkan cakupan pelayanan energi
11. Meningkatkan kegiatan pengusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang

Tujuan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang ingin mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat wisata, pendidikan dan budaya. Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, dukungan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan air baku, peningkatan kondisi lingkungan dan permukiman, dan peningkatan pemanfaatan ruang. Secara umum aksesibilitas wilayah di Provinsi DIY cukup baik, meskipun daya dukung jalan yang masih rendah. Dengan pengembangan infrastruktur jalan, mobilitas perekonomian wilayah akan semakin meningkat. Untuk meningkatkan kondisi lingkungan, diperlukan pengembangan permukiman secara lintas sektor, penyediaan air bersih, pengelolaan dan penanganan air limbah dan sanitasi, pengelolaan dan pelayanan persampahan, drainase, juga penyelenggaraan tata bangunan dan lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berdasarkan pada isu-isu yang berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, dan dengan melihat kondisi yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Rencana Kerja PD, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran DPUPRKP

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
2.	Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas PD Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan	Nilai AKIP PD Persentase ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
				produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.	
				Peningkatan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Persentase Pemenuhan Pembiayaan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang legal, efisien dan efektif
				peningkatan akses air minum layak dan aman	Persentase Rumah terlayani air minum layak
				Peningkatan kontribusi pemenuhan akses drainase	Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan
				Peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman	Persentase Kawasan yang memiliki infrastruktur Permukiman yang layak
					Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU
				peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan	Persentase Keandalan gedung Pemerintah

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
				bangunan	
				Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik Daerah yang lebih efisien dan penguatan daya saing.	persentase pusat kegiatan dan simpul strategis Daerah yang diakses jalan Kabupaten
				Peningkatan pembinaan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
				Peningkatkan dukungan layanan tanggap bencana bidang permukiman	Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah
				Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota Beserta PSU terlaksana
				Penurunan luas permukiman kumuh	Persentase luas Penanganan Kawasan permukiman kumuh
				Peningkatan akses masyarakat	Persentase peningkatan penyediaan

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
				untuk mencegah terbentuknya permukiman kumuh	akses kawasan permukiman Kumuh menjadi layak, aman

Tujuan.

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2021-2026, tujuan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mengintegrasikan wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumber daya air untuk mendukung pembangunan pertanian dan perekonomian secara keseluruhan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kawasan strategis melalui penyediaan pelayanan air bersih, sanitasi, dan penataan bangunan.
4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan infrastruktur dan industri konstruksi.
5. Meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan akuntabilitas kelembagaan.

Sasaran.

Sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat adalah: Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan.

Hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah tabel sebagai berikut:

TABEL 3.2
TUJUAN DPUPRKP

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD (Outcome)	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	69,61

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran adalah menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan didukung jasa usaha konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran yang sifatnya strategis, yaitu melalui meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan dan meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan Penganggaran serta meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi.

Selanjutnya adalah menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi daerah dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya dukungan kedaulatan pangan, energi, meningkatnya ketahanan air meningkatkan akses konektivitas, produktivitas, efisiensi, dan pelayanan pada sentra produksi daerah, serta meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan formal.

TABEL 3.3
SASARAN DPUPRKP

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)	Target Sasaran Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	67,56
2	Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	Nilai infrastruktur perumahan dan permukiman	35,34
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	82,50

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja utama, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja utama menunjukkan tingkat sasaran kinerja *spesifik* yang akan dicapai oleh DPUPRKP yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja utama baik tingkat kegiatan, program maupun Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja utama. Penetapan target *relevan* dengan indikator kinerjanya, *logis* dan berdasarkan *baseline* data yang jelas. Dalam hal ini *baseline* capaian pada tahun 2021 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2016-2021.

TABEL 3.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA DPUPRKP

SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Rumus: $\frac{\sum \text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\sum \text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$ Tipologi data: komulatif	72,52	Laporan Tahunan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah (Akses sistem air limbah yang layak adalah yang permanen dan komunal)	Rumus: $\frac{\sum \text{rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah}}{\sum \text{rumah tangga}} \times 100\%$ Tipologi data: komulatif	87,34	Laporan Tahunan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase terlayani air minum layak (Termasuk dengan PDAM dan SPAMDES)	Rumus: $\frac{\sum \text{rumah tangga yang terlayani air minum layak}}{\sum \text{rumah tangga}} \times 100\%$ Tipologi data: komulatif	85,19	Laporan Tahunan

SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh (Luas kawasan kumuh dibawah 10Ha yang menjadi kewenangan kabupaten)	Rumus: $\frac{\sum \text{luas kawasan kumuh} - \sum \text{luas kawasan yang tertangani}}{\sum \text{luas kawasan kumuh}} \times 100\%$ Tipologi data: komulatif	16,67	Laporan Tahunan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan PSU Kawasan permukiman (Kawasan permukiman formal kewenangan kabupaten)	Rumus: $\frac{\text{Jumlah luasan rencana pembangunan PSU}}{\sum \text{luas PSU}} \times 100\%$ Tipologi data: komulatif	30,04	Laporan Tahunan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak (Kawasan permukiman formal kewenangan kabupaten)	Rumus: $\frac{\text{Jumlah aksesibilitas kawasan perumahan tertangani}}{\sum \text{luas kawasan permukiman formal}} \times 100\%$ Tipologi data: komulatif	20,00	Laporan Tahunan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan sertifikat bagi perancang dan	Rumus: $\frac{\text{Jumlah sertifikat diterbitkan}}{\sum \text{target sertifikat yang}}$	50,00	Laporan Tahunan

SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
Pekerjaan Umum		perencana rumah dan PSU (Kawasan permukiman formal kewenangan kabupaten)	diterbitkan Tipologi data: kumulatif		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase tertangani infrastruktur irigasi (Daerah Irigasi)	Rumus: $\frac{\sum \text{infrastruktur irigasi (DI) berfungsi dalam kondisi baik}}{\sum \text{infrastruktur irigasi (DI)}} \times 100\%$	30,53	Laporan Tahunan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan (Bangunan yang dibangun oleh DPUPRKP)	Rumus: $\frac{\sum \text{bangunan gedung pemerintahan yang andal}}{\sum \text{organisasi pemerintahan daerah}} \times 100\%$ Tipologi data: kumulatif	77,55	Laporan Tahunan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	$\frac{\sum \text{laporan keuangan yang disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yang disusun}}$ x 100%	100	Laporan bulanan, semesteran, tahunan

SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Tipologi data: Non kumulatif \sum Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD $\times 100\%$ \sum Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	100	RPJMD RKPD Renja PD
		Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	\sum Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD $\times 100\%$ \sum Program dalam RPJMD		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemuenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Tipologi data: Non kumulatif \sum realisasi pemuenuhan administrasi perkantoran $\times 100\%$ \sum administrasi perkantoran yang dibutuhkan	100	Laporan bulanan, semesteran, tahunan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemuenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Tipologi data: Non kumulatif \sum realisasi pemuenuhan sarana dan prasarana $\times 100\%$ \sum sarana dan prasarana yang direncanakan	100	Laporan bulanan, semesteran, tahunan
			Tipologi data: Non kumulatif		

SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan	$\frac{\sum \text{ASN PD yang taat aturan}}{\sum \text{ASN PD}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif	100	Laporan bulanan, semesteran, tahunan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

A. Visi dan Misi

Dengan berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih H. Sunaryanta dan Hery Susanto S.Kom. M.Si, dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2023, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis.
- 2) Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

B. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis

Tujuan : Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Sasaran : Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Program- program pembangunan pada misi 1 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi

Sasaran : Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan

Program- program Pembangunan pada Misi 2 adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung

8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Pengembangan Perumahan
11. Program Kawasan Permukiman
12. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
14. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

4.2. Prioritas Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026, merumuskan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah: *“Optimalisasi Kondisi Perekonomian Daerah Taraf Hidup Masyarakat Infrastruktur dan Peningkatan Sumber Daya manusia”*.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
2. Peningkatan Ekonomi
 - a. UMKM Unggulan
 - b. Investasi dan Pariwisata
 - c. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Ketentraman dan Ketertiban
6. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 yang telah ditetapkan tersebut mengamanatkan adanya dukungan pelayanan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, yaitu:

1. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan sebagai pendukung dan penyedia layanan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, antara lain infrastruktur air, sanitasi, dan jaringan jalan, untuk sentra-sentra produksi, kawasan permukiman, destinasi wisata, maupun kawasan ekonomi lainnya.

4.3. Pencapaian SDGs

1. Tujuan SDGs:
 - a. Tanpa Kemiskinan
 - b. Tanpa Kelaparan
 - c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - d. Pendidikan Berkualitas
 - e. Kesetaraan Gender
 - f. Air Bersih dan Sanitasi Layak
 - g. Energi Bersih dan Terjangkau
 - h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
 - j. Berkurangnya Kesenjangan
 - k. Kota dan Komunitas Berkelanjutan
 - l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
 - m. Penanganan Perubahan Iklim
 - n. Ekosistem Laut

- o. Ekosistem Daratan
 - p. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
 - q. Kemitraan Untuk Mecapai Tujuan
2. Sasaran SDGs:
- a. Menurunkan hingga setengahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%.
 - b. Mengurangi jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya.
 - c. Pada 2018, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
 - d. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia.
 - e. Mengurangi hingga dua per tiga-nya tingkat kematian anak di bawah 5 tahun.
 - f. Mengurangi hingga tiga per empat-nya tingkat kematian ibu di Indonesia.
 - g. Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia.
 - h. Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran malaria dan penyakit menular lain di Indonesia.
 - i. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serta mengembalikan sumber daya yang hilang.
 - j. Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.
 - k. Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh.
 - l. Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.
 - m. Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tarif dan bebas kuota untuk produk ekspor mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan bantuan pembangunan resmi (*official development assistance - ODA*) yang lebih besar kepada negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.
 - n. Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecil.
 - o. Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.
 - p. Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda.
 - q. Bekerja sama dengan perusahaan farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang.
 - r. Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk pencapaian target SDGs, secara umum, peran Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pendukung dalam penyediaan infrastruktur dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk mencapai tujuan satu, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, diselenggarakan pelayanan dan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang dapat mendukung peningkatan akses bagi masyarakat miskin. Secara khusus, peran Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman fokus pada tujuan ke-7 dan sasaran ke-10 yaitu, mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, yang ditempuh dengan kegiatan di bidang ke-cipta karya-an. Indikator untuk pencapaian target ini adalah:

1. Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total, perdesaan dan perkotaan) (%).
2. Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK – kepala keluarga).
3. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total, perdesaan, dan perkotaan) (%).

Kemajuan SDGs yang telah dicapai Kabupaten Gunungkidul dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum adalah:

1. Penyediaan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan penduduk perbatasan, melalui pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan perdesaan.
2. Penyediaan air minum, baik melalui air perpipaan, air dengan sumber terlindungi, dan air dengan sumber tidak terlindungi.
3. Pelayanan sanitasi dasar, yaitu air limbah dan persampahan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).

Kondisi pelayanan infrastruktur jalan sudah dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, meskipun diakui bahwa belum semua ruas jalan dalam kondisi baik. Fokus penanganan jalan diarahkan pada peningkatan akses jalan di wilayah perbatasan dan perdesaan. Untuk mencapai kinerja yang baik, pelayanan infrastruktur jalan dibedakan antara jalan kabupaten dan jalan perdesaan (atau jalan poros desa).

Untuk jalan kabupaten di antaranya ditangani melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, dan kegiatan rehabilitasi jalan. Sedangkan untuk jalan perdesaan ditangani melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jalan perdesaan.

Untuk jalan kabupaten, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2018 dapat mewujudkan jalan dalam kondisi baik, yaitu mencapai 412,32 km atau 60,10% dari total panjang jalan 686 km. Namun demikian, jalan dengan kondisi rusak masih cukup besar, yaitu 99,92 km (14,57%) kondisi rusak ringan dan 105,30 km (15,35%) kondisi rusak berat.

4.4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat. Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (SPM) memberikan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

Ada 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang ditetapkan dalam target standar minimal pelayanan yang harus diberikan, yaitu:

- a. Sumber daya air, dengan prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat, yaitu:
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum sehari-hari (100% di Tahun 2021); dan,
- b. Air minum, dengan kluster pelayanan yaitu tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari, dengan target kluster pelayanan sangat buruk (40%), buruk (50%), sedang (70%), baik (80%), dan sangat baik (100%). Target Capaian tahun 2021 sebesar 100%
- c. Penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan), meliputi pelayanan:
 - 1). Air limbah permukiman: tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota (100% target di tahun 2021).
 - 2). Drainase: tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun (95% di tahun 2021).

Sedangkan di bidang perumahan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, Standar Pelayanan Minimal mencakup dua jenis pelayanan dasar, yaitu:

- a. Rumah layak huni dan terjangkau, dengan indikator:
 - 1). Cakupan ketersediaan rumah layak huni (100% di tahun 2025); dan target tahun 2022 sebesar 58,04 %
 - 2). Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (70% di tahun 2025), target tahun 2022 sebesar 100 %

4.5. Pencapaian IKU

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas berkaitan dengan IKU sampai dengan pada tahun 2022 telah mencapai sebagai berikut :

- 1) Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum meningkat sebesar : 70.11%
- 2) Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman meningkat sebesar : 32.44%
- 3) Nilai Akip PD meningkat sebesar: 85,4% (A)

Tugas pokok dan fungsi DPUPRKP termasuk dalam prioritas pembangunan “Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana” dengan sasaran daerah “Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan”, dimana pelaksanaannya berupa penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat Tahun 2024 dirumuskan menjadi 14 program dan 25 kegiatan serta 84 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 38.984.083.210,00

Tabel 4.1
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Akip PD	82.5	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		DPUPRKP
					1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,508,315,545.00	DPUPRKP
					1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.380.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.040.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan	750.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					02	Dokumen RKA-SKPD		
					1.03.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.920.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.560.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.360.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.960.977.710,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.939.967.710,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	2.000.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
						Kuangan Akhir Tahun SKPD		
					1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.010.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.015.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	17.000.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
						Kantor		
					1.03.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.675.000,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.06.00 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.500.000,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	640.000,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.290.000,00	DPUPRKP
					1.03.01.	Penyediaan Jasa	100.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					2.08.00 01	Surat Menyurat		
					1.03.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.200.000,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	383.990.000,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.652.835,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.09.00 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	345.175.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
						Perizinan Alat Besar		
					1.03.01. 2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.200.000,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	217.377.835,00	DPUPRKP
					1.03.01. 2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000,00	DPUPRKP
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	67.56	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1,123,400,000.00	DPUPRKP
					1.03.02. 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	417.540.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	25.290.000,00	DPUPRKP
					1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DPUPRKP
					1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-	DPUPRKP
					1.03.02.2.01.0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	66.350.000,00	DPUPRKP
					1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	194.300.000,00	DPUPRKP
					1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	131.600.000,00	DPUPRKP
					1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada	705.860.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
						Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					1.03.02.2.02.0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	103.150.000,00	DPUPRKP
					1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	129.700.000,00	DPUPRKP
					1.03.02.2.02.0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	126.100.000,00	DPUPRKP
					1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	260.780.000,00	DPUPRKP
					1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	36.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	50.130.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	442,500,000.00	DPUPRKP
					1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	442.500.000,00	DPUPRKP
					1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	45.500.000,00	DPUPRKP
					1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	DPUPRKP
					1.03.03.	Pembangunan	397.000.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					2.01.00 28	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
					1.03.03. 2.01.00 29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	DPUPRKP
					1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	569,500,000.00	DPUPRKP
					1.03.05. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	569.500.000,00	DPUPRKP
					1.03.05. 2.01.00 21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	-	DPUPRKP
					1.03.05. 2.01.00	Pembangunan Sistem	446.500.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					22	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		
					1.03.05.2.01.00.35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	23.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.05.2.01.00.38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.05.2.01.00.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	-	DPUPRKP
					1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	90,000,000.00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	90.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	-	DPUPRKP
					1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	685.000.000.00	DPUPRKP
					1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	685.000.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	385.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	DPUPRKP
					1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan	300.000.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
						Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
					1.03.10	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	5,670,000,000.00	DPUPRKP
					1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	5.670.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.28	Pengelolaan Leger Jalan	-	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.30	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	-	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.31	Penggantian Jembatan	-	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.32	Pembangunan Jalan	170.600.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					1.03.10.2.01.00.33	Rekonstruksi Jalan	102.700.000,00	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.36	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	-	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.37	Pelebaran Jalan Menuju Standar	3.081.300.000,00	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.39	Rehabilitasi Jembatan	-	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	151.050.000,00	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.44	Rehabilitasi Jalan	1.158.050.000,00	DPUPRKP
					1.03.10.2.01.00.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.006.300.000,00	DPUPRKP
					1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA	200,000,000.00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
						KONSTRUKSI		
					1.03.11. 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	109.820.000,00	DPUPRKP
					1.03.11. 2.01.00 10	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis	70.000.000,00	DPUPRKP
					1.03.11. 2.01.00 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis	39.820.000,00	DPUPRKP
					1.03.11. 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.520.000,00	DPUPRKP
					1.03.11. 2.02.00 12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	20.000.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	29.520.000,00	DPUPRKP
					1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	40.660.000,00	DPUPRKP
					1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	40.660.000,00	DPUPRKP
					1.03.13	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	17,610,013,000.00	DPUPRKP
					1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	17.610.013.000,00	DPUPRKP
					1.03.13.	Pemanfaatan	16.350.253.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					5.02.00 02	Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan		
					1.03.13. 5.02.00 03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.259.760.000,00	DPUPRKP
					1.03.13. 5.02.00 18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	-	DPUPRKP
		Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	Nilai infrastruktur Perumahan Dan Permukiman	35.34	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		DPUPRKP
					1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,756,354,665.00	DPUPRKP
					1.04.02. 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	60.000.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
					1.04.02.2.01.0003	Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	30.000.000,00	DPUPRKP
					1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000,00	DPUPRKP
					1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	680.000.000,00	DPUPRKP
					1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	30.000.000,00	DPUPRKP
					1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000,00	DPUPRKP
					1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi	600.000.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
						Korban Bencana Kabupaten/Kota		
					1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.016.354.665,00	DPUPRKP
					1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.016.354.665,00	DPUPRKP
					1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0.00	DPUPRKP
					1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	DPUPRKP
					1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	-	DPUPRKP
					1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	-	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
						Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
					1.04.03. 2.03.00 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-	DPUPRKP
					1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4,208,000,000.00	DPUPRKP
					1.04.04. 2.01	Pencegahan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.208.000.000,00	DPUPRKP
					1.04.04. 2.01.00 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	4.208.000.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
						Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	989,820,000.00	DPUPRKP
					1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	989.820.000,00	DPUPRKP
					1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	920.000,00	DPUPRKP
					1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	988.900.000,00	DPUPRKP
					1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,	1,180,000.00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	OPD Penanggung Jawab
						DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	1.180.000,00	DPUPRKP
					1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1.180.000,00	DPUPRKP
					J U M L A H		39.854.083.210,00	DPUPRKP

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					39,854,083,210.00				57,804,029,962.00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				32,898,728,545.00				52,546,529,962.00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,508,315,545.00				7,402,733,000.00
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100					
1.03.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan				12.380.000,00				26.200.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Perencanaan disusun(Doku men)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	15	12.380.000,00			15	
1.03.01. 2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.040.000,00				7.000.000,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	4		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7.00	7.000.000,00
1.03.01. 2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				750.000,00				750.000,00
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	1.00		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1.00	750.000,00
1.03.01. 2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan				750.000,00				750.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Dokumen Perubahan RKA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD(Dokume n)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	1		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	750.000,00
1.03.01. 2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				1.920.000,00				750.000,00
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	3		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3	750.000,00
1.03.01. 2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.560.000,00				750.000,00
		Jumlah	(KAB. IDUL)	2		Dana		2	750.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	GUNUNGK IDUL)			Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
1.03.01. 2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.360.000,00				16.200.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	(KAB. GUNUNGK IDUL)	15		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1.00	16.200.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Kinerja SKPD (Laporan)</i>							
1.03.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.960.977.710,00				5.117.389.000,00
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	16	4.960.977.710,00			16	
1.03.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.939.967.710,00				5.105.389.000,00
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	1330		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1330	5.105.389.000,00
1.03.01. 2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000,00				3.000.000,00
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	1		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	3.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>							
1.03.01. 2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				19.010.000,00				9.000.000,00
		<i>Jumlah Laporan Keuangan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	14		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		14.00	9.000.000,00
1.03.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000,00				28.000.000,00
		<i>Jumlah PNS dilayani dalam</i>	(KAB. GUNUNGGK)	95				95	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>pengelolaan administrasi kepegawaian (Orang)</i>	<i>IDUL</i>						
1.03.01. 2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.000.000,00				3.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	<i>(KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	5		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		5	3.000.000,00
1.03.01. 2.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				4.000.000,00				25.000.000,00
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	<i>(Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	1.00		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		89.00	25.000.000,00
1.03.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				182.015.000,00				523.944.000,00
		<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>(KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	6	182.015.000,00			6	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>dilayani dalam pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah(Kegiatannya)</i>	<i>IDUL</i>						
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.000.000,00				5.000.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	5.000.000,00
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000,00				20.000.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	20.000.000,00
1.03.01.	Penyediaan Barang				19.675.000,00				34.750.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.000 5	Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Pa ket)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	12		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12	34.750.000,00
1.03.01. 2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000,00				2.700.000,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	365		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		372.00	2.700.000,00
1.03.01. 2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.500.000,00				66.170.000,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tam (Laporan)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	12		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12	66.170.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.000.000,00				393.324.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	12.00		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12.00	393.324.000,00
1.03.01. 2.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				640.000,00				2.000.000,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Dinamis pada SKPD (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	12		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12	2.000.000,00
1.03.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				532.290.000,00				676.500.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	14				14	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Pemerintahan Daerah (Laporan)</i>							
1.03.01. 2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.000,00				100.000,00
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	12		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		12	<i>100.000,00</i>
1.03.01. 2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.200.000,00				80.400.000,00
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	96		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		96	<i>80.400.000,00</i>
1.03.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				383.990.000,00				596.000.000,00
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	2		<i>Dana Transfer Umum-</i>		2	<i>596.000.000,00</i>

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>				<i>Dana Alokasi Umum</i>			
1.03.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				814.652.835,00				1.030.700.000,00
		<i>Jumlah Barang milik daerah dipelihara (Unit)</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	114	814.652.835,00			114	
1.03.01. 2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				248.000.000,00				169.800.000,00
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(U</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	28		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		29.00	<i>169.800.000,00</i>

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01. 2.09.000 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	nit)			345.175.000,00				670.600.000,00
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	20		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		23.00	670.600.000,00
1.03.01. 2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.200.000,00				52.500.000,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	8		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		63.00	52.500.000,00
1.03.01. 2.09.000 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				217.377.835,00				131.800.000,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dir ehabilitasi(Unit)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	2		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5.00	131.800.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01. 2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				900.000,00				6.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara./ Dir ehabilitasi (Unit)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	3		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5.00	6.000.000,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				1,123,400,000.00				2,948,150,000.00
		Persentase Daerah Irigasi (DI) Dalam Kondisi Baik (%)		30,53					
1.03.02. 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				417.540.000,00				1.325.000.000,00
		Jumlah bangunan	(KAB. GUNUNGKIDUL)	8	417.540.000,00			8	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>pengaman sungai dikelola(Lokasi)</i>	<i>IDUL</i>						
1.03.02. 2.01.007 5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				25.290.000,00				375.000.000,00
		<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)</i>	<i>(KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	9		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		9	375.000.000,00
1.03.02. 2.01.007 7	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota				-				75.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan</i>	<i>(KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	0		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		3.00	75.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kabupaten/ Kota (Dokumen)							
1.03.02. 2.01.011 4	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				-				200.000.000,00
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi(U nit)	(Saptosari, Jetis, KAB. GUNUNGK IDUL)	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2.00	200.000.000,00
1.03.02. 2.01.011 6	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku				66.350.000,00				275.000.000,00
		Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi (Titik)	(Karangrej ek, Blimbing, KAB. GUNUNGK IDUL)	1		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3.00	275.000.000,00
1.03.02. 2.01.011 9	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				194.300.000,00				200.000.000,00
		Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	1		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	200.000.000,00
1.03.02.	Rehabilitasi Tanggul				131.600.000,00				200.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.012 6	Sungai								
		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	0.04		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0.10	200.000.000,00
1.03.02. 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				705.860.000,00				1.623.150.000,00
		Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dikelola (DI (Daerah Irigasi))	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	22				22	
1.03.02. 2.02.001 3	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah				103.150.000,00				375.000.000,00
		Panjang Jaringan	(Kelor, Karangmoj)	0.08		Dana Transfer		0.40	375.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan (KM)</i>	<i>o, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>			<i>Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			0.08	129.700.000,00			0.40	375.000.000,00
		<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)</i>	<i>(KAB. GUNUNGKIDUL)</i>			<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			<i>375.000.000,00</i>
1.03.02.2.02.0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah				126.100.000,00				375.000.000,00
		<i>Panjang Jaringan Irigasi Tanah yang Direhabilitasi (KM)</i>	<i>(Karangmojo dan Playen, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	0.08		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		0.50	<i>375.000.000,00</i>
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				260.780.000,00				200.000.000,00
		<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang</i>	<i>(KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	0.55		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi</i>		0.20	<i>200.000.000,00</i>

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Dioperasikan dan Dipelihara (KM)</i>				<i>Umum</i>			
1.03.02. 2.02.003 4	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				36.000.000,00				98.150.000,00
		<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)</i>	<i>(KAB. GUNUNGGK IDUL)</i>	12		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		12	98.150.000,00
1.03.02. 2.02.003 5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				50.130.000,00				200.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun(Doku men)</i>	<i>(KAB. GUNUNGGK IDUL)</i>	1		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		2.00	200.000.000,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN				442,500,000.00				2,075,000,000.00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3							
				85,19					
1.03.03. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga Berakses Air Minum Layak (%)			442.500.000,00				2.075.000.000,00
			(KAB. GUNUNGK IDUL)	211	442.500.000,00			211	
1.03.03. 2.01.002 4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Unit Spamdes yang memiliki sistem mantap (Unit)			45.500.000,00				25.000.000,00
		Jumlah Masyarakat yang dibina dan	(KAB. GUNUNGK IDUL)	280				6.00	25.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)				Alokasi Umum			
1.03.03. 2.01.002 6	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-				800.000.000,00
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	(Panggung, Purwosari, Nglipar, KAB. GUNUNGKIDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.00	800.000.000,00
1.03.03. 2.01.002 8	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				397.000.000,00				1.000.000.000,00
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	(Giricahyo, Kedungkeris, KAB. GUNUNGKIDUL)	0.06		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200.00	1.000.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>yang dibangun(Liter /Detik)</i>							
1.03.03. 2.01.002 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				-				250.000.000,00
		<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	0		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		3.00	250.000.000,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				569,500,000.00				1,350,000,000.00
		<i>Persentase Cakupan Kepala Keluarga Yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Layak (%)</i>		87,34					
1.03.05. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				569.500.000,00				1.350.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak (KK)</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	500				500	
1.03.05. 2.01.002 1	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				-				100.000.000,00
		<i>Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M³/Hari)</i>	(Wukirsari, Baleharjo, Kec. Wonosari)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25.00	100.000.000,00
1.03.05. 2.01.002 2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perumahan				446.500.000,00				100.000.000,00
		<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	50		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50	100.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MA³/Hari)</i>							
1.03.05. 2.01.003 5	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				23.000.000,00				50.000.000,00
		<i>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya (Penyelenggara)</i>	(KAB. GUNUNGK IDUL)	8		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		147.00	50.000.000,00
1.03.05. 2.01.003 8	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				100.000.000,00				100.000.000,00
		<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang</i>	(KAB. GUNUNGK IDUL)	2		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi</i>		2	100.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)</i>				<i>Umum</i>			
1.03.05. 2.01.003 9	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				-				1.000.000.000,00
		<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar(Rumah Tangga)</i>	<i>(Ngalang Gedangsari, Ngunut Playen, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	0		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		150.00	1.000.000.000,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				90,000,000.00				500,000,000.00
		<i>Persentase Kawasan Perkotaan Yang Memiliki Sistem Drainase Baik (%)</i>		50					
1.03.06. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan				90.000.000,00				500.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2 Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan (KK)</i>	<i>(KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	<i>1.500</i>				<i>1.500</i>	
1.03.06. 2.01.001 2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				90.000.000,00				250.000.000,00
		<i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)</i>	<i>(Trimulyo Kepek, KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	<i>50</i>		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		<i>492.00</i>	<i>250.000.000,00</i>
1.03.06. 2.01.002 0	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan				-				250.000.000,00
		<i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)</i>	<i>(Wonosari, KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	<i>0</i>		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		<i>395.00</i>	<i>250.000.000,00</i>
1.03.08	PROGRAM				685.000.000,00				12.360.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Keandalan Gedung Pemerintah (%)		77,55					
1.03.08. 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				685.000.000,00				12.360.000.000,00
		Jumlah Gedung Pemerintah Kabupaten ditata(Unit)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	5	685.000.000,00			5	
1.03.08. 2.01.001 7	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				385.000.000,00				3.000.000.000,00
		Jumlah Bangunan Gedung untuk	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	1		Dana Transfer Umum-		1	3.000.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Diubahsuaiakan (Bangunan Gedung)</i>				<i>Dana Alokasi Umum</i>			
1.03.08. 2.01.002 1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				-				9.000.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	<i>(KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	0		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		2.00	9.000.000.000,00
1.03.08. 2.01.002	Penyelenggaraan Penerbitan				300.000.000,00				360.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	12		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12	360.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG(Dokumen)</i>							
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				5,670,000,000.00				25,131,396,962.00
		<i>Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)</i>		72,522					
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				5.670.000.000,00				25.131.396.962,00
		<i>Jumlah panjang jalan kewenangan kabupaten dengan kondisi baik(Km)</i>	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	22				22	
1.03.10.2.01.002	Pengelolaan Leger Jalan				-				100.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1 8	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	0		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		1.00	100.000.000,00
1.03.10. 2.01.003 0	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				-				300.000.000,00
		<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (KM)</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	0		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		1157.16	300.000.000,00
1.03.10. 2.01.003 1	Penggantian Jembatan				-				3.000.000.000,00
		<i>Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	1.00		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		10	3.000.000.000,00
1.03.10. 2.01.003 2	Pembangunan Jalan				170.600.000,00				3.000.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	0.02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.20	3.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan				102.700.000,00				5.000.000.000,00
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	0.7		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.70	5.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				-				125.000.000,00
		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1157.16	125.000.000,00
1.03.10.2.01.003	Pelebaran Jalan Menuju Standar				3.081.300.000,00				3.000.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7									
		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	0.59		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.50	3.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan				-				250.000.000,00
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	250.000.000,00
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan				-				750.000.000,00
		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.00	750.000.000,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				151.050.000,00				79.800.000,00
		Panjang Jalan/Jembatan an yang Disurvey		1159.00		Dana Transfer Umum-Dana		1159.00	79.800.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Kondisinya (KM)</i>				<i>Alokasi Umum</i>			
1.03.10. 2.01.004 4	Rehabilitasi Jalan				1.158.050.000,00				1.000.000.000,00
		<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi(K M)</i>	<i>(KAB. GUNUNGGK IDUL)</i>	0.34		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		2.50	1.000.000.000,00
1.03.10. 2.01.004 6	Pemeliharaan Rutin Jalan				1.006.300.000,00				8.526.596.962,00
		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)</i>	<i>(KAB. GUNUNGGK IDUL)</i>	0.75		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		10.50	8.526.596.962,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				200,000,000.00				779,250,000.00
		<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Bidang Konstruksi Yang Kompeten Dan Profesional (%)</i>		35					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11. 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				109.820.000,00				454.250.000,00
		<i>Jumlah SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (Orang)</i>	<i>(KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	90	<i>109.820.000,00</i>			90	
1.03.11. 2.01.001 0	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				70.000.000,00				29.250.000,00
		<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)</i>	<i>(KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	40		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		90,00	<i>29.250.000,00</i>
1.03.11. 2.01.001 6	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				39.820.000,00				425.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	40		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		90.00	425.000.000,00
1.03.11. 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				49.520.000,00				300.000.000,00
		<i>Jumlah aplikasi sistem informasi data kinerja Jasa Konstruksi dikelola(Buah)</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	1				1	
1.03.11. 2.02.001 2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				20.000.000,00				50.000.000,00
		<i>Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi</i>	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	1.00		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		1.00	50.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>yang Disediakan (Perangkat Pendukung)</i>							
1.03.11. 2.02.001 5	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				29.520.000,00				250.000.000,00
		<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)</i>	<i>(KAB. GUNUNGGK IDUL)</i>	1.00		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		1.00	250.000.000,00
1.03.11. 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				40.660.000,00				25.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi(Per</i>	<i>(KAB. GUNUNGGK IDUL)</i>	84				84	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11. 2.04.000 7	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	<i>usaha</i>)			40.660.000,00				25.000.000,00
		<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diaawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)</i>	(KAB. GUNUNGK IDUL)	12		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		12	25.000.000,00
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				17,610,013,000.00				0.00
		<i>Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik(%)</i>		60					
1.03.13.	Pemanfaatan Ruang				17.610.013.000,00				-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								
		Jumlah Dokumen Pendukung Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)	(KAB. GUNUNGK IDUL)	1				0	
1.03.13. 5.02.000 2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				16.350.253.000,00				-
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (Dokumen)	(Panggung , Girikarto, Girikarto, Kec. Panggung)	1		Dana Keistime waan, Dana Keistime waan DIY		0.00	
1.03.13. 5.02.000 3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1.259.760.000,00				-
		Jumlah Dokumen	(Panggung dan	1		Dana Keistime		0.00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (Dokumen)	Rongkop, KAB. GUNUNGKIDUL)			waan, Dana Keistimewaan DIY			
1.03.13.5.02.0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul				-				-
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul (Dokumen)	(Panggang, Girikarto, Girikarto, Kec. Panggang)	1		Dana Keistimewaan DIY		0.00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6,955,354,665.00				5,257,500,000.00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1,756,354,665.00				2,050,000,000.00
		Persentase Peningkatan		20					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3							
		Penyediaan Akses Perumahan Yang Layak, Aman, Dan Terjangkau(%)							
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				60.000.000,00				400.000.000,00
		Jumlah Rumah KorbanBencana atau RelokasiProgram Kabupaten/ Kota tadidata (Unit Rumah)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	500				500	
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				30.000.000,00				200.000.000,00
		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian	(KAB. GUNUNGKIDUL)	1				2.00	200.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)</i>							
1.04.02. 2.01.000 7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000,00				200.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota ta (Dokumen)</i>	(KAB. GUNUNGK IDUL)	1		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		2.00	200.000.000,00
1.04.02. 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				680.000.000,00				650.000.000,00
		<i>Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program</i>	(KAB. GUNUNGK IDUL)	20	650.000.000,00			20	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Kabupaten/ Kota Dibangun/ Direhabilitasi (Unit Rumah)</i>							
1.04.02. 2.03.000 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				30.000.000,00				150.000.000,00
		<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)</i>	<i>(Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	1		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		10	150.000.000,00
1.04.02. 2.03.000 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				50.000.000,00				300.000.000,00
		<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun (Unit Rumah)</i>	<i>(KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	1		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		10.00	300.000.000,00
1.04.02. 2.03.001 2	Pembangunan Rumah Khusus berserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				600.000.000,00				200.000.000,00
		<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU</i>	<i>(KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	1.00		<i>Dana Transfer Umum-</i>		1	200.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota (Unit Rumah)</i>				<i>Dana Alokasi Umum</i>			
1.04.02. 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus				1.016.354.665,00				1.000.000.000,00
		<i>Penurunan Persentase Hunian Rumah Susun(%)</i>	<i>(Karangrej ek, Kec. Wonosari)</i>	60	1.016.354.665,00			65	
1.04.02. 2.05.000 2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus				1.016.354.665,00				1.000.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus (Dokumen)</i>	<i>(Karangrej ek, Kec. Wonosari)</i>	1.00		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		1.00	1.000.000.000,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				0.00				400,000,000.00
		<i>Persentase Penanganan</i>		30,04					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>PSU Kawasan Permukiman (%)</i>							
1.04.03. 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				-				200.000.000,00
		<i>Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang memiliki dokumen penataan dan peningkatan(Kawasan)</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	2				2	
1.04.03. 2.02.000 8	Penyusunan/ Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				-				200.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tere</i>	(KAB. GUNUNGKIDUL)	0		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,</i>		2.00	200.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3 <i>view/ Terlegali sasi (Dokumen)</i>	4	5	6	7 <i>Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil</i>	8	9	10
1.04.03. 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				-				200.000.000,00
		<i>Jumlah Kepala Keluarga di Kawasan Permukiman Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha menerima peningkatan kualitas(Kepal a Keluarga)</i>	<i>(KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	20				20	
1.04.03. 2.03.000 3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				-				200.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam</i>	<i>(KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	0		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi</i>		1.00	<i>200.000.000,00</i>

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)</i>				<i>Umum</i>			
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				4,208,000,000.00				2,000,000,000.00
		<i>Persentase Penanganan PSU Dalam Rangka Pencegahan Tumbuhnya Kawasan Permukiman Kumuh(%)</i>		16,67					
1.04.04. 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				4.208.000.000,00				2.000.000.000,00
		<i>Jumlah Kapanewon Penerima program Pencegahan Perumahan</i>	(KAB. GUNUNGK IDUL)	6				6	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota (Kecamatan)</i>							
1.04.04. 2.01.000 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				4.208.000.000,00				2.000.000.000,00
		<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah</i>	<i>(KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	202		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		200.00	2.000.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)							
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				989,820,000.00				800,000,000.00
		Persentase Perumahan Formal Yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU(%)		60					
1.04.05. 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				989.820.000,00				800.000.000,00
		Jumlah Perumahan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lokasi)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	15				15	
1.04.05. 2.01.000 1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				920.000,00				200.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	1		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	200.000.000,00
1.04.05. 2.01.000 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				988.900.000,00				600.000.000,00
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian(Lokasi)	(KAB. GUNUNGGK IDUL)	3		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5.00	600.000.000,00
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG				1,180,000.00				7,500,000.00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Persentase Penerbitan Sertifikat Bagi Perancang Dan Perencana Rumah Dan PSU (%)</i>		50					
1.04.06. 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				1.180.000,00				7.500.000,00
		<i>Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil di sertifikasi (Lokasi)</i>	(KAB. GUNUNGK IDUL)	20				20	
1.04.06.	Koordinasi dan				1.180.000,00				7.500.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.000 1	Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil(Laporan)</i>	<i>(KAB. GUNUNGK IDUL)</i>	<i>1.00</i>		<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>		<i>1</i>	<i>7.500.000,00</i>
J U M L A H						39.854.083.210,00			57.804.029.962,00

BABV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN,

IRAWAN JATMIKO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri No. 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No. 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025.
13. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/4969 tentang Penyusunan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026.

Renja (Rencana Kerja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul dalam mengoperasionalkan RKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1. Latar Belakang |
| | 1.2. Landasan Hukum |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | 1.4. Sistematika Penulisan |
| BAB II | HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
PERTANAHAN DAN TATA RUANG |
| | 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)
dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang |
| | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) |
| | 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti
Mandala Sarta Tata Sasana</i>) |
| | 2.4. Rencana Kerja RKPD |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA
RUANG |
| | 3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja sasarannya. Pada tahun 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah melaksanakan 8 program 18 kegiatan yang diimplementasikan ke dalam 41 sub kegiatan. Capaian anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 13.319.469.709,00 atau 79,11%. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.517.509.959.00. atau 20,89%. Sedangkan untuk tahun 2023 belum terealisasi karena masih tahun berjalan penyusunan dokumen ini. Selain itu, sebagai gambaran pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dapat dilihat pada capaian kinerja tahun 2022. Analisis dari capaian tahun 2022 dapat dilihat pada data evaluasi RKPD yang telah dilakukan secara online melalui aplikasi e-monev SIPANDA. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul menarasikan capaian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 99,64 %.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja sebesar 99,64% disebabkan terdapat target yang bersifat persediaan yaitu untuk kegiatan Linsek yang mana untuk kegiatan linsek tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada undangan dari kementerian ATR/BPN.

- b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dengan capaian kinerja sebesar 99.33%.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan terdapat 1 (satu) kegiatan yang dijabarkan dalam 5 (lima) Sub Kegiatan yang berkontribusi dalam capaian kinerja ini. Capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 99.33%. Adapun analisis capaian kinerja adalah sebagai berikut: pada sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdapat TUK yang tidak terealisasi 100% yaitu Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa dari target 2.136 sertifikat terealisasi sebesar 2.034 sertifikat yang disebabkan 99 sertifikat belum di validasi BPN sedangkan 3 gagal dikarenakan beda luasanya.

2.1.2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan antara lain:

- a. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota.
- b. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang dengan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.

- c. Program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Program Penatagunaan Tanah dengan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.1.3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran sesuai yang direncanakan Tahun 2022.
- a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan capaian kinerja sebesar 118.15%.
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terdiri dari Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian target kinerja sebesar 118,15%, disebabkan untuk Target kinerja Jumlah Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) yang diterbitkan dan Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan melebihi dari target yang ditetapkan.
- 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Adanya target yang capaiannya melibatkan pihak terkait sehingga untuk mencapai target tergantung dari kinerja pihak terkait.
 - b. Terpenuhinya target berkat upaya keras Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan pihak terkait.
 - a. Realisasi yang melebihi dari target dikarenakan penentuan tolak ukur kinerja sulit untuk diukur sehingga Realisasi jauh melebihi dari Target.
 - b. Terdapat TUK yang bersifat persediaan yaitu Jumlah Dokumen Keterangan Rencana Kabupaten (KRK), Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang sedangkan realisasi tergantung dari permohonan yang masuk.
- 2.1.5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024 antara lain:
- a. Kurangnya personil yang menangani.
 - b. Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa yang tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum dapat ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa.
 - c. Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - d. Pencapaian Tolok Ukur Kinerja yang melibatkan /tergantung instansi lain.
- 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
- a. Lebih mengoptimalkan SDM yang tersedia serta komunikasi dan koordinasi antar bidang lebih ditingkatkan.

- b. Melalui mekanisme perubahan anggaran untuk merevisi target kinerja
- c. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) s.d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul Dinas Pertanian Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9) 11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100%	100%	20.00%	20.00%	100.00%	40.00%	40.00%
1	3	2	100%	100 persen	20.00%	20.00%	100.00%	40.00%	40.00%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota									
1 3 9 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	5 DOKUMEN	1 peraturan	1 Dokumen	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	2 dokumen	
1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		100%	100 persen	36.91%	25.08%	67.96%	54.97 persen	54.97%	54.97 %
1 3 12 2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan		100%	100 persen	56.67%	0.00%	0.00%	66.33 persen	54.97%	54.97 %

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota									
1 3 12 2.01 2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	7 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0.00%	0.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	
1 3 12 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	100 persen	23.85%	23.85%	100.00%	45.38 persen	45.83%	45.83 %

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 12 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100%	161.22 %	36.33%	37.74%	103.88%	54.33 persen	54.33%	54.33 %
1 3 12 2.04 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	10 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen ; 1 dokumen	0 dokumen; 1 dokumen	50.00%	3 Dokumen	3 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 12 2.04 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 dokumen	430 dokumen; 24 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 laporan; 7 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen; 225 dok; 1 laporan; 5 dokumen	0 laporan; 1 dokumen; 1 dokumen; 252 dok; 1 laporan; 224 dokumen	1.5776	3 Dokumen	3 Dokumen	
1 3 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		100%	97.26 %	3.40%	3.40%	100.00%	28.89 persen	28.89%	28.89 %

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 13 5	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		100%	0%	6.70%	6.70%	100.00%	32.78 persen	32.78%	32.78 %
1 3 13 5.01 2	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	5 DOKUMEN	-	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	2 Dokumen	2 Dokumen	
1 3 13 5.01 6	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	4 kali	-	0.00%	0.00%	0.00%	1 laporan	1 laporan	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)		
1					4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %	100.00%	77.22%	77.22%	100 persen	100 %	100.00 %
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	100.00%	79.41%	79.41%	100 persen	100 %	100.00 %

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)		
1					4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 DOKUMEN	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Kali	-; 1 dok; 1 dok; 1 dok; 1 kali	1 kali; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	29.02%	0 Dokumen 3 Dokumen				
2 10 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5 DOKUMEN	1 Dokumen; 1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen				

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan
					Target PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 DOKUMEN	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	
2 10 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 DOKUMEN	1 Dokumen ; 1 Dokumen	1 dok; 1 dok; 1 dok	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	2 Dokumen	
2 10 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 DOKUMEN	1 Dokumen ; 1 Dokumen	1 dok; 1 dok	0 Dokumen; 0 Dokumen	0.00%	2 Dokumen	2 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 LAPORAN	12 Dokumen; 4 Dokumen; 1 Dokumen	4 Dokumen; 1 Dokumen; 12 Dokumen	9 Dokumen; 1 Dokumen; 3 Dokumen	76.47%	6 Laporan	6 Laporan	
2 10 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	100.00%		85.16%	100 persen	100.00%	100.00 %
2 10 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5 ORANG	14 Bulan	14 bulan	11 Bulan	78.57%	406 Orang/bulan	406 Orang/bulan	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 LAPORAN	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Laporan	1 Laporan	
2 10 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 LAPORAN	12 Dokumen; 1 Dokumen	12 dok; 1 dok	9 Dokumen; 1 Dokumen	76.92%	13 Laporan	13 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	100.00%		100.00%	100 persen	100.00%	100.00 %
2 10 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 DOKUMEN	30 Oran g	32 ASN	32 ASN	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	
2 10 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	93.06 %	100.00%	63.62%	63.62%	100 persen	100.00%	100.00 %
2 10 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 PAKET	8 jenis	4 Paket	2 paket	50.00%	4 Paket	4 Paket	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 1	2.06 2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 PAKET	630 Buah; 29 jenis	4 paket; 30 Buah	4 paket; 400 Buah	57.39%	7 Paket	7 Paket	
2 10 1	2.06 3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 PAKET	4 jenis	4 paket	3 paket	75.00%	4 Paket	4 Paket	
2 10 1	2.06 5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 PAKET	6 Dokumen; 100 Lembar; 12000 Lembar	248 Bendel; 10000 lbr; 12000 Lbr	157 Bendel; 6330 Lembar; 7596 Lembar	63.30%	11 Paket	11 Paket	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 1	2.06 6	6	5 DOKUMEN	12 Bulan	12 rekening	9 Rekening	75.00%	365 Dokumen	365 Dokumen	
2 10 1	2.06 8	8	5 LAPORAN	0	0.00%	0.00%	0.00%	12 Laporan	12 Laporan	
2 10 1	2.06 9	9	5 LAPORAN	200 Op; 48 op;8 op;557 o p;70 Op	159 OP;4 OP;600 OR;294 OR;150 OR	16 OP;0 OP;380 OR;200 OR;62 OR	61.04%	106 Laporan	106 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	100.00%	100.00%	100.00%	100 persen	100 %	100.00 %
2 10 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 UNIT	1 unit	2 Unit;2 Unit;1 Unit	2 Unit;1 Unit	100.00%	1 Unit	1 Unit	
2 10 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	170.1 %	100.00%	69.00%	69.00%	100 persen	100 %	100.00 %
2 10 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 LAPORAN	1201 Surat	100 kali	63 kali	63.00%	12 Laporan	12 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	2.08	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 LAPORAN	48 Bulan; 12 Bulan; 12 Bulan	12 Rekening; 48 Rekening; 12 Rekening	36 Rekening; 9 Rekening; 9 Rekening	75.00%	72 Laporan	72 Laporan	
2	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100.00%	85.93%	85.93%	100 persen	100 %	100.00 %

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 1	2.09 2	5	5 KENDARAAN	5 unit; 1 5 unit; 5 unit; 15 unit	5 Unit; 5 Unit; 15 Unit; 15 Unit	2 Unit; 5 Unit; 10 Unit; 15 Unit	80.00%	260 Unit	260 Unit	
2 10 1	2.09 6	5	5 PERALATAN	10 unit; 10 unit; 2 unit; 5 unit	10 Unit; 16 Unit	7 Unit; 7 Unit	77.78%	0 Unit; 29 Unit	0 Unit; 29 Unit	
2 10 1	2.09 9	5	5 GEDUNG	400 m2	545 m2; 1 Unit	545 m2; 1 Unit	100.00%	1 Unit	1 Unit	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 SARANA	0	0.00%	0.00%	0.00%	17 Unit	17 Unit	
2 10 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	100 %	20.00%	20.00%	100.00%	40 persen	40.00%	40.00 %

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)		
1					4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 4 2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	6 berita acara	6 dokumen; 6 berita acara	40.00 %
2 10 4 2.01 2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 BERITA	6 dokumen	6 dokumen	6 kali	100.00%	6 Berita Acara	6 dokumen; 6 Berita Acara	40 persen	40 persen	
2 10 5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN			100 %	100 %	20.00%	19.76%	98.81%				

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)		
1					4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN											
2 10 5 2	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				100 %	122.92 %	20.00%	19.76%	98.81%	40 persen	40 persen	40 persen

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 5 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 DOKUMEN	1 dokumen; 1 dokumen; 208 berkas	1 dokumen; 3 dokumen; 1060 bidang	0 dokumen; 1 dokumen; 40 berkas	97.62%	4 Dokumen	4 Dokumen	
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		100 %	100 %	20.00%	10.00%	50.00%	40 persen	40.00%	40.00 %
2 10 10 2	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	20.00%	10.00%	50.00%	2 dokumen	7 dokumen	40.00 %

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 10 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan alih fungsi lahan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupate/kota yang tersusun	5 LAPORAN	5 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	50.00%	2 Laporan	7 dokumen	
2 10 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			99.82 %	10.65%	82.20%	82.20%	54.94 persen	54.94 persen	
2 10 11 5	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			99.82 %	10.65%	82.20%	82.20%	35,57 Persen	35,57 Persen	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10 11 5.01 1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	5 DOKUMEN	1000 bidang; 431 bidang; 2018 sertifikat; 49 sertifikat; 5300 buah; 500 bidang; 500 sertifikat	10800 Patok; 2000 Sertifikat; 750 Bidang; 500 Bidang; 1000 Bidang	10800 Patok; 992 bidang; 796 sertifikat; 330 bidang	88.78%	46,6 Persen	46,6 Persen	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 11 5.01 4	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	5 DOKUMEN	0		20 Desa	80.00%	25 Dokumen	25 Dokumen	
2 10 11 5.01 6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	5 LAPORAN	0		0.00%	0.00%	12 Laporan	12 Laporan	
2 10 11 5	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			0	0.00%		80.00%	54.94 persen	54.94 persen	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target PD tahun 2022	Realisasi PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 10 11 5.02 1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	5 DOKUMEN	30 Reko mendasi	30 rekomendasi	24 Reko mendasi	80.00%	30 Dokumen	30 Dokumen	
2 10 11 5.02 2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	5 BERITA	8 Desa	144 desa; 5 desa	4 Desa	80.00%	6 Berita cara	6 BeritaAcara	
2 10 11 5	Sarana dan Prasarana Keistimewaan		100%			0.00%	0.00%	54.94 persen	54.94%	54.94 %

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/kegiatan Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan					
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)				
1					4	3	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	5	4	3	2	1	0.00%	0.00%	10 Unit	10 Unit	
5.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanian)	5 SARANA	1 Kompiler;1 Printer	1 Unit;2 Unit;2 Unit;2 Unit	1 Unit;2 Unit;2 Unit;2 Unit	0.00%	0.00%	0.00%	10 Unit	10 Unit	10 Unit		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) yang telah ditetapkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Tahun 2022, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan dari Target 19,07% terealisasi 19,06% dengan capaian 99,95% dengan katagori sangat tinggi.
2. IKU Meningkatnya Akuntabilitas PD dengan indikator Nilai AKIP PD target 81 sedangkan realisasi 78.60 dengan tingkat capaian kinerja 97.03% dengan kategori sangat tinggi.
3. IKU Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang dari target 29,32% terealisasi 31,95% atau 108,97% dengan kategori sangat tinggi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2021 – 2024 Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standard (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah luasan lahan untuk kepentingan Publik)*	Persen	60.000 m ²	NA	NA	NA	5462 m ²	NA	NA	NA	Realisasi pengadaaan tanah dalam tiap tahunnya fluktuatif, Disebabkan banyak faktor antara lain keterbatasan Anggaran, adanya usulan dari pemangku kepentingan dll.
	Tata Kelola Administrasi Pertanahan meningkat)**	Persentase tata kelola administrasi pertanahan	NA	19,07 %	41,49 %	61,57 %	NA	31,95 %	41,49	61.57	
2	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA))*	Jumlah	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Proses untuk Penetapan menjadi Perda sangat panjang dan Kompleks, serta melibatkan banyak pihak yang terkait

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standard (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				RERALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya Akuntabilitas PD)**	Nilai AKIP PD		81	81,5	81,5	80.10	78.60	81,5	81.5	
3	Nilai Kinerja PengaturanPembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang)* Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang meningkat)**	Persen Presentase penyelenggaraan administrasi penataan ruang	78	NA	NA	NA	72	NA	NA	NA	
				29,32 %	48,43 %	66,87 %	NA	31,95 %	48,43 %	66.87 %	

Keterangan :)* IKU DPTR Tahun 2017-2021
)** IKU DPTR Tahun 2021-2026

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

2.3.1. Bidang Pertanahan

- a) Masih banyaknya perangkat desa/masyarakat yang belum/kurang memahami kebijakan administrasi di bidang pertanahan, sehingga kegiatan penyuluhan hukum/sosialisasi kebijakan pertanahan perlu terus dilaksanakan;
- b) Perlunya data tentang pertanahan yang valid baik tanah desa (yang semula TKD) maupun tanah kasultanan (SG) sehingga perlu dilakukan pendaftaran Tanah dan persertifikatan dalam rangka memberikan kepastian data pertanahan;
- c) Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan;
- d) Fasilitas pemberian Izin Gubernur kepada desa, berkaitan dengan tertib administrasi pertanahan dan pengoptimalan pemanfaatan tanah desa;
- e) Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- f) Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa yang tidak disertai dengan tata pendukung, sehingga belum dapat ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa.

2.3.2. Bidang Tata Ruang

- a) Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang yang lebih operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk peraturan yang lebih rinci;
- b) Pentingnya peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Tata Ruang;
- c) Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif;
- d) Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam

perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;

- e) Perlunya peningkatan kesesuaian kawasan lindung, khususnya perencanaan tata ruang di kawasan lindung terutama di kawasan lindung setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung geologi;
- f) Perlunya pengendalian pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesesuaian terhadap rencana tata ruang; serta
- g) Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian produktif.

2.3.3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pertanahan dan urusan Tata Ruang. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2022, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 3 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya pengendalian dan penggunaan tanah desa	Masih banyaknya pemanfaatan Tanah Desa yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
Belum optimalnya pengawasan pelanggaran Tata Ruang	Belum adanya personel PPNS Tata Ruang
	Aturan teknis penegakan Perda Tata Ruang belum ada
	belum punya RDTR
	Peran serta masyarakat masih Rendah dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Masih tingginya jumlah bidang tanah Pemda yang belum memiliki sertipikat	Rendahnya tertib administrasi Pertanahan tanah Pemda sebelum Tahun 2017
Belum memiliki sistem pertanahan	Keterbatasan anggaran
Tingginya permasalahan tukar menukar tanah Desa dengan tanah	Belum adanya kebijakan penyelesaian tukar menukar dari Keraton terhadap

masyarakat yang belum mendapat kepastian hukum	penyelesaian tukar menukar tanah Desa dengan tanah masyarakat
--	---

2.3.4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah capaian capaian program nasional/ internasional, SPM dan MDGs.

- a) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peratanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai;
- b) Tenaga fungsional masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peratanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul;
- c) Tidak tersedianya PPNS dalam upaya penegakan Hukum.
- d) Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

2.3.5. Tantangan, Peluang dan Rekomendasi Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

Selama Tahun 2022, Dinas Peratanahan dan Tata Ruang juga menghadapi beberapa tantangan dan peluang yaitu:

2.3.5.1. Tantangan

Tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Peratanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) adalah:

- a) Inkosistensi kebijakan pemerintah pusat di bidang pertanahan.
- b) Tingginya alih fungsi lahan oleh berbagai pihak kepentingan.
- c) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
- d) Spekulasi tanah yang selalu bergerak untuk mempercepat perubahan penggunaan tanah.
- e) Perlindungan Aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengawasan dan pengendalian pertanahan dan pemanfaatan ruang belum jelas.

2.3.5.2. Peluang

Peluang pelayanan Dinas Peratanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul dalam rangka peningkatan pelayanan adalah :

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal.
- b) Penyediaan data dan sistem informasi yang handal, meliputi data *base* Peratanahan Tata Ruang dan kajian sektor lainnya

sebagai pendukung perencanaan pengendalian pertanahan dan tata ruang.

- c) Peningkatan antara *Stakeholders* di bidang pertanahan melalui Forum Komunikasi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
- d) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Upaya Dinas Pertanahan dan tata ruang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a) Tersedianya petunjuk teknis dan SOP pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang.
- b) Terwujudnya data pendukung pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah dan tata ruang.
- c) Terwujudnya database peta pertanahan
- d) Terkelolanya data dan integrasi pertanahan.
- e) Meningkatnya kesadaran pelaku pembangunan terhadap pemanfaatan tanah dan pengendalian tata ruang.
- f) terselesaikannya proses pelepasan, perubahan dan sewa menyewa tanah desa.
- g) Teradministrasinya penggunaan tanah SG yang dipakai Pemda.
- h) Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pertanahan dan tata ruang yang diproses melalui Pemerintah Kabupaten.
- i) Digitalisasi pemanfaatan tanah desa agar tanah desa dapat teradministrasi lebih baik.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengendalian pertanahan dan tata ruang tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal.
- b) Tersedianya data dan sitem informasi yang handal, meliputi data *base* Pertanahan dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan pengendalian pertanahan dan tata ruang.
- c) Koordinasi dengan *stakeholders* di bidang pertanahan melalui Forum Komunikasi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan pemanfaatan tanah.
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi

2.3.6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti adalah sebagai berikut:

- 2.3.6.1. Program penataan bangunan dan lingkungannya
 - a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- 2.3.6.2. Program penyelenggaraan penataan ruang:
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.3.6.3. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang
 - a. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
- 2.3.6.4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- 2.3.6.5. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan Tata Ruang:
 - a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten.
 - b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.
 - c. Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang.
 - d. Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis.
 - e. Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 2.3.6.6. Program penyelesaian sengketa tanah garapan:
 - a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.3.6.7. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan:
 - a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.3.6.8. Program penatagunaan tanah

- a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.3.6.9. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan:
- a. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
 - b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul dengan partisipasi dari berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah yang ada.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) pada Ranwal RKPD 2024 merencanakan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh) program utama, di antaranya; Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Penatagunaan Tanah, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

Untuk tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) merancang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator rencana kinerja tahunan 2024. Berikut disampaikan secara singkat *review* program yang ada di dokumen Rencana Kerja RKPD 2024 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*), dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.3 Rencana Kerja RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

RENCANA RENCANA KERJA RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.038.169.089,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.038.169.089,00	
1	3				13.038.169.089,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				13.038.169.089,00	
1	3			60%	16,998,000.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA		Persentase Kawasan Memiliki Dokumen RTBL	60%	16,998,000.00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.9.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Peraturan Bupati RTBL yang tersusun	1 Dokumen	16,998,000.00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang RTBL yang tersusun	16,998,000.00	750,000,000.00	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten/Kota	(Wilayah Perkotaan Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	16,998,000.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	750,000,000.00	
1.3.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	72,38 %	174,936,500.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		174,936,500.00	72,38 %	1,102,050,000.00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 3 12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	(RDTR Perkotaan Wonosari (Kapanewon Playen Wonosari Karangmojo Semanu) dan RDTR Pansela Tengah (Paliyan Saptosari Tanjung Sari Tepus), KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.277.500,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.277.500,00	
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	(RDTR Perkotaan Wonosari (Playen Wonosari Semanu Karangmojo) RDTR Perkotaan Pansela Tengah (Paliyan	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.277.500,00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	(RDTR Perkotaan Wonosari (Playen Wonosari Semanu Karangmojo) RDTR Perkotaan Pansela Tengah (Paliyan	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.277.500,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Saptosari Tanjungsari Tepus), KAB. GUNUNGKIDUL)									
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	67.444.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	67.444.000,00	
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	((a) Sosialisasi Penataan Ruang ((1) Kapanewon Karangmojo kalurahan Ngipak, (2) Kapanewon Paliyan kalurahan duwet dan (3) Kalurahan Grogol, (4) Kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan Tanggungjawab Masyarakat	2 Dokumen	67.444.000,00	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	((a) Sosialisasi Penataan Ruang ((1) Kapanewon Karangmojo kalurahan Ngipak, (2) Kapanewon Paliyan kalurahan duwet dan (3) Kalurahan Grogol, (4) Kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan Tanggungjawab Masyarakat	2 Dokumen	67.444.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Playen Kalurahan Bandung, dan (5) Kapanewon Gedangsari Kalurahan Serut(b) Papan Informasi Tata Ruang di (1) Embung Gunungpang gung; (2) Telaga Jonge; (3) Telaga Namberan; (4) Kali Oyo Getas; dan (5) Kali Oyo Ngalang. KAB. GUNUNGKID UL)					Kapanewon Playen Kalurahan Bandung, dan (5) Kapanewon Gedangsari Kalurahan Serut(b) Papan Informasi Tata Ruang di (1) Embung Gunungpang gung; (2) Telaga Jonge; (3) Telaga Namberan; (4) Kali Oyo Getas; dan (5) Kali Oyo Ngalang, KAB. GUNUNGKI DUL)				

RENCANA RENCANA KERJA RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.782.500,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.782.500,00	
1.03.12.2.03.0006	Sistem Informasi Penataan Ruang	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	30.782.500,00	Sistem Informasi Penataan Ruang	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	30.782.500,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	41.432.500,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	41.432.500,00	

RENCANA RENCANA KERJA RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penataan Ruang	3 Dokumen	32.182.500,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penataan Ruang	3 Dokumen	32.182.500,00	
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1 kasus	9.250.000,00	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1 kasus	9.250.000,00	
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				3.005.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				3.005.000.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.13.2.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				2.715.000.000,00	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				2.715.000.000,00	
1.03.13.2.01.02	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	1 Dokumen	380.000.000,00	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	1 Dokumen	380.000.000,00	
1.03.13.2.01.05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Nglipar, Patuk, Paliyan, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, Panggang, Purwosari,	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	7 dokumen	2.300.000.000,00	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Nglipar, Patuk, Paliyan, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, Panggang, Purwosari,	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	7 dokumen	2.300.000.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.13.2.01.06	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	1 Laporan	35.000.000,00	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	1 Laporan	35.000.000,00	
1.03.13.2.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Strategis				290.000.000,00	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Strategis				290.000.000,00	
1.03.13.2.03.01	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen	290.000.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen	290.000.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kalurahan					Semua Kalurahan				
		Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kalurahan					Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kalurahan				
		Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kalurahan					Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kalurahan				
		Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kalurahan					Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kalurahan				
		Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kalurahan					Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kalurahan				
							Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kalurahan				

RENCANA RENCANA KERJA RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kalurahan					Semua Kalurahan				
		Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kalurahan					Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kalurahan				
		Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kalurahan					Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kalurahan				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN				2.668.218.589,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN				10.316.605.578,00	

RENCANA RENCANA KERJA RPKD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PELAYANAN DASAR					PELAYANAN DASAR					
2 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				9,841,234,589.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				9,841,234,589.00	
2 10 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	100%	2,419,124,089.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	100%	2,419,124,089.00	
2 10 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100%	40.444.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100%	40.444.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 10 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	34.067.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	34.067.500,00	
2 10 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	725.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	725.000,00	
2 10 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	725.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	725.000,00	
2 10 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	875.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	875.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 10 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	
2 10 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	1.551.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	1.551.500,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 10 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Playen,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Playen,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.500.000,00	
2 10 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	1.945.562.089,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	1.945.562.089,00	
2 10 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang /b	1.909.566.089,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang /b	1.909.566.089,00	
2 10 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.853.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.853.500,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 10 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 Laporan	34.142.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 Laporan	34.142.500,00	
2 10 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4.480.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4.480.000,00	
2 10 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	14.480.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	14.480.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 10 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Terlayani	100%	141.268.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Terlayani	100%	141.268.000,00	
2 10 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.193.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.193.000,00	
2 10 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	40.453.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	40.453.000,00	
2 10 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.926.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.926.000,00	
2 10 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11.338.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11.338.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 10 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 Dokumen	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 Dokumen	1.200.000,00	
2 10 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	
2 10 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 Laporan	74.158.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 Laporan	74.158.000,00	
2 10 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	3 unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	3 unit	0	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 10 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah paket mebel yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah paket mebel yang Disediakan	2 Unit	0	
2 10 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	84 Laporan	84.634.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	84 Laporan	84.634.500,00	
2 10 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.047.500,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.047.500,00	
2 10 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	60.587.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	60.587.000,00	
2 10 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	288 unit	202.735.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	288 unit	202.735.500,00	

RENCANA RENCANA KERJA RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah			
2 10 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	247 Unit	129.718.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	247 Unit	129.718.500,00	
2 10 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Playen,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	9.800.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Playen,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	9.800.000,00	
2 10 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61.117.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61.117.000,00	
2 10 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17 Unit	2.100.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17 Unit	2.100.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RPKD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	, Playen, Logandeng	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ul, Playen, Logandeng	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penyelesaian Administrasi Sengketa Tanah Tertangani	60 %	6.850.000,00	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penyelesaian Administrasi Sengketa Tanah Tertangani	60 %	9.850.000,00	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Berita Acara	6.850.000,00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Berita Acara	9.850.000,00	
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu)	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kanigoro	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik	6 Berita Acara	6.850.000,00	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu)	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kanigoro	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik	6 Berita Acara	9.850.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Kabupaten/Kota		Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota		Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	60%	1.750.600.000,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	60%	1.750.600.000,00	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	1.750.600.000,00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	1.750.600.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.750.600.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.750.600.000,00	
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNA AN TANAH		Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani	60%	94,932,500.00	PROGRAM PENATAGUNA AN TANAH		Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani	60%	94,932,500.00	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	2 Dokumen	94,932,500.00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	2 Dokumen	94,932,500.00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 10 10 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Gunungkidul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah laporan alih fungsi lahan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota yang tersusun	2 Dokumen	94,932,500.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Gunungkidul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah laporan alih fungsi lahan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota yang tersusun	2 Dokumen	94,932,500.00	
2 10 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEJISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				5.569.728.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEJISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				0	
2 10 11 5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				4.734.040.000,00	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				4.734.040.000,00	
2 10 11 5.01 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	6 Dokumen	4.534.040.000,00	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	6Dokumen	4.534.040.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kalurahan	Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kalurahan	dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat			
		Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kalurahan					Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kalurahan				
		Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kalurahan					Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kalurahan				
		Kab. Gunungkidul, Girisubo,					Kab. Gunungkidul				

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Semua Kalurahan Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kalurahan					ul, Girisubo, Semua Kalurahan Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kalurahan					
210115.0104	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman, Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglangeran	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	25 Dokumen	200.000.000,00	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman, Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	25 Dokumen	200.000.000,00		

RENCANA RENCANA KERJA RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		, Semanu Dadapayu Kab. Gunungkidul, Karangmojo Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo Kelor Kab. Gunungkidul, Ponjong Genjahan Kab. Gunungkidul, Rongkop Botodayakan Kab. Gunungkidul, Semin Kalitekuk Kab. Gunungkidul					Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu Dadapayu Kab. Gunungkidul, Karangmojo Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo Kelor Kab. Gunungkidul, Ponjong Genjahan Kab. Gunungkidul, Rongkop					

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, Semin karangsari Kab. Gunungkidul, Semin Sumberejo Kab. Gunungkidul, Gedangsari Ngalang Kab. Gunungkidul, Saptosari Ngloro Kab. Gunungkidul, Saptosari Kepek Kab. Gunungkidul, Girisubo Jepitu Kab. Gunungkidul					Botodayakan Kab. Gunungkidul, Semin Kalitekuk Kab. Gunungkidul, Semin karangsari Kab. Gunungkidul, Semin Sumberejo Kab. Gunungkidul, Gedangsari Ngalang Kab. Gunungkidul, Saptosari Ngloro Kab. Gunungkidul				

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, Girisubo Songbanyu Kab. Gunungkidul, tanjugsari Hargosari Kab. Gunungkidul, Tanjungsari Ngestirejo					ul, Saptosari Kepek Kab. Gunungkidul, Girisubo Jepitu Kab. Gunungkidul, Girisubo Songbanyu Kab. Gunungkidul, tanjugsari Hargosari Kab. Gunungkidul, Tanjungsari Ngestirejo				
2 10 11 5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan				595.688.000,00	Pemanfaatan Tanah Kasultanan				0	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Tanah Kadipaten					dan Tanah Kadipaten					
2 10 11 5.02 01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	50 Dokumen	239.153.000,00	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	50 Dokumen	239.153.000,00	
2 10 11 5.02 02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Pringombo, Kab. Gunungkidul, Rongkop, Botodayakan, Kab. Gunungkidul, Rongkop, Pucanganom, Kab. Gunungkidul	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	10 Berita Acara	356.535.000,00	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Pringombo, Kab. Gunungkidul, Rongkop, Botodayakan, Kab. Gunungkidul, Rongkop, Pucanganom	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	10 Berita Acara	356.535.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, Rongkop Semugih Kab. Gunungkidul, Rongkop Melikan					Kab. Gunungkidul, Rongkop Semugih Kab. Gunungkidul, Rongkop Melikan				
2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan				240.000.000,00	Sarana dan Prasarana Keistimewaan				240.000.000,00	
2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian	Kab. Gunungkidul, Kalurahan Kanigoro Kapanewon Saptosari, Sidoharjo Kapanewon Tepus, Siraman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	3 Unit	240.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian	Kab. Gunungkidul, Kalurahan Kanigoro Kapanewon Saptosari, Sidoharjo Kapanewon Tepus, Siraman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	3 Unit	240.000.000,00	

RENCANA RENCANA KERJA RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kapanewon Wonosari					Kapanewon Wonosari				
					13.038.169.089,00					13.038.169.089,00	

Catatan :

- Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara Rencana Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada baris yang sama

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mendapatkan kesesuaian program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul di bidang Tata Ruang, telah diselenggarakan berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan baik yang dilaksanakan secara umum melalui Musrenbang Kapanewon maupun yang dilaksanakan secara khusus melalui Forum PD Bidang Pertanahan dan Tata Ruang. Musrenbang Kabupaten melibatkan beberapa pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait, LSM, Perguruan Tinggi di Gunungkidul, dan Perangkat Daerah terkait. Dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang tersebut didapati berbagai usulan kegiatan dari masyarakat di tahun 2024. Usulan tersebut terdiri dari PIWK dan PIS.

Pada Rencana Kerja Renja 2024 ini terjadi rasionalisasi sehingga anggaran di hilangkan. Adapun usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 adalah seperti tersebut pada tabel 2.5. berikut

Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1.	Sosialisasi peraturan bidang tata ruang	Grogol	Jumlah Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang	1 Kali	0	0	PIS
2.	Sosialisasi peraturan bidang tata ruang	Ngipak	Jumlah Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang	1 Kali	0	0	PIS
3.	Sosialisasi peraturan bidang tata ruang	Bandung	Jumlah Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang	1 Kali	0	0	PIS
4.	Sosialisasi peraturan bidang tata ruang	Serut	Jumlah Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang	1 Kali	0	0	PIS
5.	Sosialisasi peraturan bidang tata ruang	Karangduwet	Jumlah Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang	1 Kali	0	0	PIWK
6.	Sosialisasi peraturan bidang tata ruang	Ngunut	Jumlah Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang	1 Kali	0	0	PIWK
7.	Sosialisasi peraturan bidang tata ruang	Karangawen	Jumlah Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang	1 Kali	0	0	PIWK

BAB III
 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
 (*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*). Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara Perencanaan Nasional dan Daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan Nasional maupun Provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun; dan
- c. Menciptakan kepastian kebijakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
- b. Menjadikan acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara seksi-seksi di lingkup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran.

Perumusan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (PD) didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Renja ini merupakan pelaksanaan tahun kedua Renstra Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*). Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagaimana tertera pada Tabel 3.1 dan 3.2 berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Tatakelola Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Kualitas Pengelolaan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%

Tabel 3.2. Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

NO	Sasaran	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata kelola administrasi pertanahan meningkat	Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan	61,57
2	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	81,5
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	66,87

3.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul adalah:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	66,87 persen
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	81 ,5 persen
3	Tata Kelola Administrasi pertanahan meningkat	Persentase Tata kelola administrasi pertanahan	61,57 persen

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) diantaranya pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul kedalam rencana kegiatan untuk setiap program.

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan catatan untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul namun juga oleh sumber pendanaan lainnya.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021-2026 yang memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja.

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3,196,934,500.00	
Infrasatruktur, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana	Nilai Investasi Meningkatkan	Tata kelola administrasi pertanahan meningkat	Peresentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	39,44	1.3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3,196,934,500.00	
					1 03 09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	16,998,000.00	DPTR
					1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	16,998,000.00	

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	16,998,000.00	
					1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	174,936,500.00	DPTR
					1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	35.277.500,00	
					1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	35.277.500,00	
					1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	67.444.000,00	
					1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	67.444.000,00	

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	30.782.500,00	
					1.03.2.10.01.12 .2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	30.782.500,00	
					1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	41.432.500,00	
					1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	32.182.500,00	
					1 03 12 2.04 04	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	9.250.000,00	
					1 03 13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	3.005.000.000,00	DPTR
					1 03 13 5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2.715.000.000,00	

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.03.13.2.01.02	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	380.000.000,00	
					1 03 13 5.01 05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	2.300.000.000,00	
					1.03.13.2.01.06	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	35.000.000,00	
					1 03 13 5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	290.000.000,00	
					1 03 13 5.03 01	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	290.000.000,00	
					2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9,841,234,589.00	
					2.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9,841,234,589.00	

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	81,5	2 10 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,419,124,089,00	DPTR
					2 10 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.444.000,00	DPTR
					2 10 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	34.067.500,00	
					2 10 01 2.01 02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	725.000,00	
					2 10 01 2.01 03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	725.000,00	
					2 10 01 2.01 04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	875.000,00	
					2 10 01 2.01 05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	1.000.000,00	

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2 10 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.551.500,00	
					2 10 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah	1.500.000,00	
					2 10 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.945.562.089,00	DPTR
					2 10 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.909.566.089,00	
					2 10 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.853.500,00	
					2 10 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	34.142.500,00	

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2 10 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.480.000,00	DPTR
					2 10 01 2.05 03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	4.480.000,00	
					2 10 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.268.000,00	DPTR
					2 10 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	6.193.000,00	
					2 10 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.453.000,00	
					2 10 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.926.000,00	
					2 10 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.338.000,00	
					2 10 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2 10 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	
					2 10 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.158.000,00	
					2 10 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	DPTR
					2 10 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	0	
					2 10 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.634.500,00	DPTR
					2 10 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.047.500,00	
					2 10 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.587.000,00	
					2 10 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.735.500,00	DPTR

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2 10 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.718.500,00	
					2 10 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.800.000,00	
					2 10 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.117.000,00	
					2 10 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.100.000,00	
Infrasatruktur, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana	Nilai Investasi Meningkatkan	Tata kelola administrasi pertanian meningkatkan	Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanian	41,49	2 10 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	9.850.000,00	DPTR
					2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.850.000,00	

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.850.000,00	
					2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1,750,600,000.00	DPTR
					2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,750,600,000.00	DPTR
					2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,750,600,000.00	
					2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	94,932,500.00	DPTR

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	94,932,500.00	
					2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	94,932,500.00	
					2 10 11	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	5.569.728.000,00	DPTR
					2 10 11 5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	4.734.040.000,00	DPTR
					2 10 11 5.01 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	4.534.040.000,00	
					2 10 11 5.01 04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	200.000.000,00	
					2 10 11 5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	595.688.000,00	

prioritas	sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2 10 11 5.02 01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Tanah Kasultanan dan Kadipaten	239.153.000,00	
					2 10 11 5.02 02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanian Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	356.535.000,00	
					2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	240.000.000,00	
					2 10 11 5.03 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Urusan Pertanian	240.000.000,00	
JUMLAH							13.038.169.089,00	

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merencanakan melaksanakan 8 Program, 20 Kegiatan yang dijabarkan dalam 45 sub. Kegiatan pada tahun 2024.
2. Lokasi pelaksanaan program berada di seluruh Kabupaten Gunungkidul dan luar daerah. Kegiatan yang menysasar di seluruh kawasan Gunungkidul antara lain Pendaftaran Tanah, Pengendalian Pertanahan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengadaan Tanah, dan survey kepuasan masyarakat. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan di luar Gunungkidul antara lain konsultasi ke kementerian, studi banding dan lain sebagainya.
3. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp 13.038.169.089,00
4. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan berasal dari APBD dan DANA KEISTIMEWAAN.

Program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat dikelompokkan berdasarkan 2 (dua) prioritas pembangunan yakni:

1. Reformasi Birokrasi.
2. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan maju tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Danan/pagu indikatif	SUMBER DANA	CATAN PENTING	TARGET	Kebutuhan Danan/pagu u indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						3,196,934,500.00				3,817,050,000.00
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				3,196,934,500.00				3,817,050,000.00
1.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			60	16,998,000.00				750,000,000.00
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan	<i>Persentase Kawasan Memiliki Dokumen RTBL (%)</i>			16.998.000,00				750.000.000, 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang RTBL yang tersusun (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Playen)	1				1	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				16.998.000,00				750.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	(Wilayah Perkotaan Kapanewon Semanu, Semanu)	1.00				1.00	
		Terlaksananya penyusunan peraturan bupati tentang RTBL Kawasan Perkotaan Kapanewon Playen (Dokumen)	(Wilayah Perkotaan Kapanewon Semanu, Semanu, Semanu)	1	16.998.000,00				
									Dana Transfer Umum-Dau

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			174,936,500.00				1,102,050,000.00
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	72.38	35.277.500,00				250.000.000,00
			Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2				1	
			(RDTR Perkotaan Wonosari (Kapanewon Playen Wonosari Karangmojo Semanu) dan RDTR Pansela Tengah (Paliyan Saptosari Tanjung Sari Tepus), KAB. GUNUNGKIDUL)						
	1.03.12.2.01.006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota			35.277.500,00				250.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota (Dokumen)	(RDTR Perkotaan Wonosari (Playen Wonosari Semanu Karangmojo)RDTR Perkotaan Pansela Tengah (Paliyan Saptosari Tanjungsari Tepus), KAB. GUNUNGKIDUL)	1				1.00	
		Draft Raperbup RDTR Perkotaan Wonosari (Dokumen)	(Kapanewon Paliyan Saptosari Tanjungsari Tepus Wonosari Playen Semanu Karangmojo, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	35.277.500,00	Dana Transfer Umum-Dau			
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo Paliyan Playen dan Gedangsari, KAB. GUNUNGKIDUL)	2	67.444.000,00			2	242.550.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.12.2.02.003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Dokumen)	<p>((a) Sosialisasi Penataan Ruang ((1) Kapanewon Karangmojo kalurahan Ngipak, (2) Kapanewon Paliyan kalurahan duwet dan (3) Kalurahan Grogol, (4) Kapanewon Playen Kalurahan Bandung, dan (5) Kapanewon Gedangsari Kalurahan Serut(b) Papan Informasi Tata Ruang di (1) Embung Gunungpangung; (2) Telaga Jonge; (3) Telaga Namberan; (4) Kali Oyo Getas; dan (5) Kali Oyo Ngalang, KAB. GUNUNGKIDUL)</p>	1	67.444.000,00			2.00	242.550.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sosialisasi informasi penataan ruang (Dokumen)	(Kalurahan Logandeng Kapanewon Piyaman Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari, Kalurahan Semoyo Kapanewon Patuk, Pokdarwis Kalisuci, Pokdarwis Kampung Mas, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	67.444.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				30.782.500,00				350.000.000,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, KAB. GUNUNGKIDUL)	1				1	
1.03.12.2.03.006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata	1.00	30.782.500,00			1.00	350.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sasana), KAB. GUNUNGKIDUL)						
		Pengelolaan data Geospasial Kabupaten Gunungkidul (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), KAB. GUNUNGKIDUL)	1	30.782.500,00	Dana Transfer Umum- Dau			
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				41.432.500,00				259.500.000, 00
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, KAB. GUNUNGKIDUL)	6				6	
1.03.12.2.04.0 004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				32.182.500,00				59.500.000,0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1				3.00	
		Penerbitan kajian PKKPR, KRK, dan KKR (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	32.182.500,00	Dana Transfer Umum-Dau			
	1.03.12.2.04.007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR			9.250.000,00				200.000.000,00
		Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), KAB. GUNUNGKIDUL)	1				3.00	
		Laporan Pengawasan Penataan Ruang (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	9.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			3,005,000,000 .00				1,965,000,00 0.00
		Persentase SRS Kasultanan Dan Kadipaten Yang Memiliki Dokumen Rencana Tata Ruang (%)		48.89					
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			2.715.000.000 ,00				1.495.000.00 0,00
		Persentase layanan Perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (Persentase)	(Pansela (Gesing dan Sundak - PulangsAkhir); Baturagung Barat (Nglipar - Gedangsari), KAB. GUNUNGGKIDUL) (Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	47.77				73	
		Persentase Layanan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Persentase)		47.77				73.89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.13.5.01.005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				2.300.000.000,00				1.000.000.000,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	7.00				1.00	
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Pantai Selatan Bagian Barat Gunungkidul (Panggang-Purwosari) (Dokumen)	(Pantai Selatan Bagian Barat Gunungkidul (Panggang-Purwosari), KAB. GUNUNGKIDUL)	1	300.000.000,00	DAIS			
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Raperkada dan Dokumen Pra Loket RDTR Pantai Selatan Bagian Barat Gunungkidul (Panggang-Purwosari) (Dokumen)	(Pantai Selatan Bagian Barat Gunungkidul (Panggang-Purwosari), KAB. GUNUNGKIDUL)	2	500.000.000,00	DAIS			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya penyusunan kelengkapan Dokumen Pra Loket RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah Gunungkidul (Paliyan-Saptosari-Tanjung Sari-Tepus) (Dokumen)	(Pantai Selatan Bagian Tengah Gunungkidul (Paliyan-Saptosari-Tanjung Sari-Tepus), KAB. GUNUNGKIDUL)	1	300.000.000,00	DAIS			
		Tersusunnya Dokumen Materi Teknis, KLHS, Raperkada dan Persub RDTR Kawasan Baturagung Barat (Dokumen)	(Baturagung Barat (Nglipar, Gedangsari, Patuk), KAB. GUNUNGKIDUL)	3	1.200.000.000,00	DAIS			
1.03.13.5.01.006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang (Laporan)	(-, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	35.000.000,00			1	45.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang (Laporan)</i>	<i>(SRS Kawasan Pantai Selatan (Katurahan Sidoharjo), KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	<i>1</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>DAIS</i>			
1.03.13.5.01.0 007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	<i>Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten (Dokumen)</i>	<i>(SRS Pantai Selatan (Pantai Sundak - PulangsAkhir), KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	<i>1</i>	<i>380.000.000,0 0</i>			<i>1</i>	<i>450.000.000, 00</i>
		<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen RTBL SRS Pantai Selatan (Pantai Sundak - PulangsAkhir) (Dokumen)</i>	<i>(SRS Pantai Selatan (Pantai Sundak - PulangsAkhir), KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	<i>1</i>	<i>380.000.000,0 0</i>	<i>DAIS</i>			
1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis				<i>290.000.000,0 0</i>				<i>470.000.000, 00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis (Dokumen)	(Pantai Selatan, Karst Gunungsewu, KAB. GUNUNGKIDUL)	1				1	
1.03.13.5.03.001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang		(SRS Pantai Selatan, SRS Gunungsewu, KAB. GUNUNGKIDUL)	2	290.000.000,0				470.000.000,00
		Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Dokumen)	(Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	145.000.000,0	DAIS			
		Dokumen Audit Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu (Dokumen)	(Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	145.000.000,0	DAIS			
2					9,841,234,589.00				9,239,428,801.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				9,841,234,589 .00				9,239,428,80 1.00
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	2,419,124,089 .00				3,857,862,99 6.00
2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.444.000,00				94.535.000,0 0
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu (%)	(Playen, KAB. GUNUNGKIDUL)	100				100	
2.10.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				34.067.500,00				36.850.000,0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	2.00				3.00	
		Dokumen RENJA (Honor THL) (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	30.612.500,00	Dana Transfer Umum-Dau			
		Dokumen RENJA Perubahan (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	3.455.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
	2.10.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1.00	725.000,00			1.00	865.000,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	725.000,00	Dana Transfer			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)			Umum-Dau			
2.10.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1.00	725.000,00			1.00	732.000,00
		Dokumen Perubahan RKA (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	725.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
2.10.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	2.00	875.000,00			2.00	2.029.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumen DPA (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	725.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
		Dokumen Perjanjian Kinerja (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	150.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
	2.10.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.000.000,00				732.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	2.00				2.00	
		Dokumen Perubahan DPA dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	600.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	400.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
2.10.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.551.500,00				4.432.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	17				17	
		Dokumen E Monev (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	4	360.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
		Dokumen LKJiP (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	800.000,00	Dana Transfer			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Umum-Dau			
		Dokumen TEPPRA (Laporan)	(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen) (Dinas Pertanian dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	12	391.500,00	Dana Transfer Umum- Dau			
	2.10.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500.000,00				48.895.000,0 0
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Dinas Pertanian dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	6.00				6.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumen evaluasi SOP 1 Dokumen, Dokumen evaluasi standar pelayanan 1 Dokumen, Dokumen pengukuran survey kepuasan masyarakat (IKM) 2 Dokumen, Dokumen rencana tindak pengendalian SPIP 2 Dokumen (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	6	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu (%)	(Playen, KAB. GUNUNGKIDUL)	100	1.945.562.089,00			100	2.636.275.996,00
2.10.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	406.00	1.909.566.089,00			406.00	2.600.847.996,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gaji PNS (Orang / Bulan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	406	1.909.566.089, 00	Dana Transfer Umum- Dau			
2.10.01.2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.00	1.853.500,00			1.00	2.928.000,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1.00					
		Laporan keuangan akhir tahun SKPD (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	1.853.500,00	Dana Transfer Umum- Dau			
2.10.01.2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				34.142.500,00				32.500.000,0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	13.00				13.00	
		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	13	34.142.500,00	Dana Transfer Umum-Dau			
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.480.000,00				8.492.000,00
		Jumlah Dokumen PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Playen)	4				4	
	2.10.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			4.480.000,00				8.492.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Playen)	4.00				4.00	
		Dokumen KP4, Dokumen SKP, Dokumen Perjanjian Kerja THL, Dokumen DUK dan Nominatif (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Playen)	4	4.480.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			141.268.000,00				540.257.000,00
		Persentase Administrasi Umum Terlayani (%)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	100				100	
	2.10.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.193.000,00				14.641.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	4				4	
		alat-alat listrik (Paket)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	4	6.193.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
2.10.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	5.00	40.453.000,00			5.00	129.684.000,00
		Alat Tulis Kantor (Paket)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	5	40.453.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
2.10.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.926.000,00				11.713.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	4.00				4.00	
		Peralatan kebersihan (Paket)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	4	7.926.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
2.10.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	11.00	11.338.000,00			11.00	21.962.000,00
		Barang cetakan dan fotocopy (Paket)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	11	11.338.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000,00				1.757.000,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	365.00				365.00	
		Langganan Surat Kabar (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	365	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
2.10.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				-				10.500.000,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	0				12.00	
2.10.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.158.000,00				350.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	48				106.00	
		Perjalanan Dinas, FPRD (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	48	74.158.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-			6	23.000.000,00
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Playen)	3					
	2.10.01.2.07.005	Pengadaan Mebel			-				-
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)							
	2.10.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-				23.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Playen)	0				6.00	
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Playen)	84	84.634.500,00			84	108.699.000,00
2.10.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Playen)	12.00	24.047.500,00			12.00	28.096.000,00
		expidisi surat keluar (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kab. Gunungkidul, Playen)	12	24.047.500,00	Dana Transfer Umum-Dau			
2.10.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.587.000,00				80.603.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kab. Gunungkidul, Playen)	72.00				72.00	
		(1) jumlah tagihan listrik dibayar (4 rekening X 12 bulan);(2) Jumlah tagihan air dibayar (1 rekening X 12 bulan);(3) Jumlah tagihan telepon dibayar (1 rekening X 12 bulan) (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kab. Gunungkidul, Playen)	72	60.587.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			202.735.500,00				446.604.000,00
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, Playen)	288				290	
	2.10.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya			129.718.500,00				120.585.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	247.00				247.00	
		Motor 15 unit, mobil 4 unit (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	247	129.718.500,00	Dana Transfer Umum-Dau			
2.10.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	13	9.800.000,00			12.00	15.405.000,00
		Pemeliharaan Laptop/ PC/ Printer (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	13	9.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Sasana), Logandeng, Kec. Playen)		61.117.000,00				300.064.000,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1				1.00	
		Pengecatan Gedung (THL 57.775.000) (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	1	61.117.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
2.10.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.100.000,00				10.550.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	7				17.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan AC (Unit)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Logandeng, Kec. Playen)	7	2.100.000,00	Dana Transfer Umum- Dau			
2.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		60	6.850.000,00				10.000.000,0 0
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.850.000,00				10.000.000,0 0
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Acara)	(Pringombo, botodayakan, pucanganom, petir, semugih, KAB. GUNUNGKIDUL)	6				6	
	2.10.04.2.01.0 002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			6.850.000,00				10.000.000,0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Acara)	(Pringombo Botodayakan Petir Semugih Pucanganom, KAB. GUNUNGKIDUL)	6.00				6.00	
		6 kalurahan di Kapanewon Rongkop (Berita Acara)	(-, KAB. GUNUNGKIDUL)	6	6.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
3.	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. (%)		60	1.750.600.000,00				1.326.000,000,00
	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan				1.750.600.000,00				1.326.000,000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	<i>(KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	7				7	
					1.750.600.000,00				1.326.000.000,00
2.10.05.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	<i>(KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	4				7.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengadaan tanah SD Sawah; dokumen perencanaan pengadaan tanah; dokumen kajian pemanfaatan tanah; dan dokumen pendaftaran tanah penda di BPN (Dokumen)	(Pengadaan tanah SD Sawah, KAB. GUNUNGKIDUL)	4	1.750.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dau			
4.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		60	94.932.500,00				200.194.000,00
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	(Dinas Pertanian dan Tata Ruang, KAB. GUNUNGKIDUL)	2	94.932.500,00			2	200.194.000,00
		Jumlah laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ Kota yang tersusun (Dokumen)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.10.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				94.932.500,00				200.194.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota (Laporan)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, KAB. GUNUNGKIDUL)	2.00				2.00	
		keluaran berupa :(1) Dokumen evaluasi pengendalian alih fungsi lahan yang tersusun(2) Dokumen permohonan kecacingan tanah kasultanan yang tersusun (Dokumen)	(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, KAB. GUNUNGKIDUL)	2	94.932.500,00	Dana Transfer Umum-Dau			
5.	2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				5,569,728,000.00				3,845,371,805.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				75.72					
		<i>Persentase Bidang SG Dan Tanah Desa Yang Memiliki Kepastian Hukum (%)</i>							
2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				4.734.040.000,00				3.375.371.805,00
		<i>Persentase layanan pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten (%)</i>	<i>(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	64.42				81.21	
2.10.11.5.01.001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				4.534.040.000,00				3.275.371.805,00
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat (Dokumen)</i>	<i>(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	6				4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembuatan dan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah Kalurahan 6000 Patok (Patok)	(-, KAB. GUNUNGGKIDUL)	6.000	854.072.000,00	DAIS			
		Pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertifikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Sertifikat)	(-, KAB. GUNUNGGKIDUL)	245	84.084.000,00	DAIS			
		Pendaftaran Pengukuran Tanah Kalurahan (Bidang Tanah)	(-, KAB. GUNUNGGKIDUL)	750	1.681.514.000,00	DAIS			
		Pendaftaran Pengukuran Tanah Kasultanan (Bidang Tanah)	(-, KAB. GUNUNGGKIDUL)	107	497.210.000,00	DAIS			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pendaftaran Sertipikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Bidang Tanah) Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertifikat (Bidang Tanah)	(-, KAB. GUNUNGKIDUL)	500	1.110.672.000,00	DAIS			
			(-, KAB. GUNUNGKIDUL)	1.000	306.488.000,00	DAIS			
2.10.11.5.01.004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				200.000.000,00				100.000.000,00
		Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	50				25	
		Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di Kabupaten	(-, KAB. GUNUNGKIDUL)	50	200.000.000,00	DAIS			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Gunungkidul (Desa/ Kelurahan)</i>							
2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase layanan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terlayani dengan baik (%)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	64.08	595.688.000,00			82.04	455.000.000,00
2.10.11.5.02.001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				239.153.000,00				155.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)</i>	(-, KAB. GUNUNGKIDUL)	30				30	
		<i>Fasilitasi Rekomendasi Bupati/ Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan</i>	(-, KAB. GUNUNGKIDUL)	30	239.153.000,00	DAIS			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Tanah Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul 30 Rekomendasi Fasilitasi pendampingan rintisan Kalurahan Reforma Agraria 3 Kalurahan (Dokumen)</i>						
2.10.11.5.02.002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				356.535.000,00				300.000.000,00
		<i>Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (Berita Acara)</i>	<i>(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	<i>10</i>				<i>7</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi rekomendasi Bupati/Kepala DPTR untuk penanganan Tanah Kalurahan 10 Rekomendasi di 10 Kalurahan (Berita Acara)	(-, KAB. GUNUNGGKIDUL)	10	356.535.000,00	DAIS			
2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan		(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	4	240.000.000,00			2	15.000.000,00
2.10.11.5.03.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian	Jumlah unit sarana dan prasarana keistimewaan tersedia (Unit)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)		240.000.000,00				15.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanian) (Unit)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	3				2	
		Penyediaan Sarana Prasarana	(Kalurahan Kanigoro, Kalurahan	3	240.000.000,00	DAIS			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pendukung Pemeliharaan Dokumen Pertanahan di Kalurahan (3 Kalurahan (Kanigoro, Sidoharjo, Siraman)) (Unit)	Sidoharjo, Kalurahan Siraman, KAB. GUNUNGKIDUL)						
					13.038.169.08 9,00				
	J U M L A H								13.056.478.8 01,00

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Perangkat daerah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. dan program kegiatan pembangunan Tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah 2024 berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

Guna memperoleh optimalisasi keterpaduan pencapaian hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan berupa Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yang kemudian diturunkan dalam rangka kerja tahunan berupa Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 14.390.271.578,00 (*Empat belas Milyard tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dengan Rincian sebagai berikut:

- a. Program Pendukung:
 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp 2.752.652.578,00
- b. Program Utama:
 1. Program penataan bangunan dan lingkungannya Rp 245.191.000,00,-
 2. Program penyelenggaraan penataan ruang Rp 823.475.000,00
 3. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan pertanahan Rp 5.569.728.000,00
 4. Program penyelesaian sengketa tanah garapan Rp 9.850.000,00,-
 5. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Rp 1.850.600.000,00

6. Program penatagunaan tanah Rp 133.775.000,00
7. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang Rp 3.005.000.000,00

Apabila ketersediaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak mencukupi dalam pengalokasian Anggaran Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam RENJA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul, maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap Program dan Kegiatan yang telah direncanakan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
Plt. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

SITI ISNAINI DEKONINGRUM NURHANDAYANI

BUPATI GUNUNGGKIDUL

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Pada penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 perlu dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tema Pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :

- a. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2024 “Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim “
- b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) tahun 2024 “Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tentram “

Sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berintegritas.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun menyesuaikan dengan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 yaitu: “Optimalisasi Ketahanan ekonomi Daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Dalam hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada prioritas ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dengan sasaran daerah kualitas lingkungan hidup meningkat. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

Proses penyusunan Renja PD dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi: persiapan penyusunan Renja PD, penyusunan rancangan Renja PD, pelaksanaan forum PD, dan penetapan Renja PD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Mengingat Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan maka Rencana Kerja ini telah disinkronkan dengan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut, dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai arah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan kebutuhan pendanaan. Dengan disusunnya Renja ini diharapkan memudahkan dalam pengukuran kinerja Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 ini didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bisa sesuai dengan peraturan di tingkat pusat maupun daerah. Adapun dasar hukum untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 mengacu pada pencapaian indikator sasaran program yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 terdapat 10 program 16 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja pada tahun 2024. Adapun capaian target Renja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Beberapa kegiatan yang didanai dari sumber dana APBD Tahun 2022 yang belum memenuhi target yang direncanakan meliputi program/kegiatan :

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:
 - 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (89,01);
 - 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (99,33);
 - 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (98,34)
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (95,17)
 - 4. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan peralatan dan mesin lainnya (94,13)
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (99,57);
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (71,05);
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (99,80);
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (99,99); dan
 - 7. Penataan Organisasi pada sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (99,99).
- B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupate/Kota (92,35)
- C. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (97,55); dan

2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (91,76).
 - D. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 1. Pengelolaan taman keanekaragam hayati di luar Kawasan hutan (97,41);
 2. Pengelolaan kebun raya (99,55); dan
 3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (86,10).
 - E. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (97,92);
 2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (99,89); dan
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan rencana PPLH (99,76).
 - F. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (99,76).
 - I. Program pengelolaan persampahan
Kegiatan Pengelolaan Sampah
 1. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (97,97);
 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (99,55); dan
 3. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA kabupaten/kota (99,94).
2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 yang memenuhi target kinerja yang direncanakan.
- A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
Kegiatan Pemantuan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten pada Sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Stategis Karst Gunung Sewu (100).
 - B. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(100)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (100)
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (100)
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (100)
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (100)
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100)

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (100)
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (100)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100)
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100)
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (100)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan pengadaan mebel (100)
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100)
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya (100)
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100)
- C. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota (100)
- D. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada sub Kegiatan pada sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (100)
- E. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati lainnya (100)
 Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup (100)
- F. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (100)
- G. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota (100)

- H. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH pada sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (100)
 - I. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (100)
8. Realisasi Program/Kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan :
- Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 tidak ada yang melebihi target kinerja keluaran.
9. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022
- Faktor belum tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan di tahun 2022 sebagai berikut :
- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:
 - 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (89,01)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (99,33)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (98,34)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (95,17)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - 4. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan peralatan dan mesin lainnya (94,13)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (99,57)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (71,05)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (99,80)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (99,99)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - 7. Penataan Organisasi pada sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (99,99)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.

- G. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (92,35)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- H. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (97,55)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (91,76)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- I. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
1. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan (97,41)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 2. Pengelolaan kebun raya (99,55)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (86,10)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- J. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (97,92)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (99,89)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan rencana PPLH (99,76)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- K. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (99,76)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- J. Program pengelolaan persampahan
Kegiatan Pengelolaan Sampah
1. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (97,97)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (99,55)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.

3. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA kabupaten/kota (99,94)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024
 - a. Timbulan Sampah yang Semakin Banyak
Jumlah penduduk yang semakin bertambah, jumlah pengunjung wisata yang semakin meningkat, semakin meningkatnya kemampuan ekonomi, produk akibatkan timbulan sampah semakin banyak. Di sisi lain peran aktifitas dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat akan peran serta masyarakat dan pengusaha dalam upaya meminimalisasi sampah masih rendah.
 - b. Kapasitas pelayanan yang terbatas
Kapasitas pelayanan persampahan yang masih terbatas karena :
 - 1) Paradigma lama pengelolaan sampah yang mengandalkan proses (kumpul-angkut-buang), dan
 - 2) Prioritas pendanaan dan pemenuhan sumber daya manusia yang belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan
 - c. Perkembangan Teknologi Informasi
Perkembangan teknologi informasi khususnya media sosial juga berdampak negatif pada simpang siurnya kebenaran informasi program pemerintah yang diterima oleh masyarakat, diantaranya :
 - 1) Program sering dianggap bukan program pemerintah, namun program yang diadakan secara swadaya oleh organisasi non pemerintah. Sehingga masyarakat sering salah mengerti, akhirnya partisipasi masyarakat menjadi minim dan imbasnya pada program. Program pengelolaan sampah menjadi terkendala dan gagal.
 - 2) Sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam menghadapi perubahan. Masyarakat pedesaan sering dihadapkan pada perubahan yang tidak mereka mau. Untuk membiasakan diri buang sampah tidak di sembarang tempat misalnya, merupakan hal yang sulit.
 - d. Sikap Masyarakat
Kendala terbesar untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah masih adanya rasa ketergantungan terhadap orang lain untuk menjaga lingkungan. Membuang sampah sembarangan dengan anggapan ada tukang sampah yang akan membersihkan sampah yang mereka buang. Sikap ketergantungan tersebut akan membuat banyak orang menjadi lebih malas dan tak punya kesadaran untuk cinta pada lingkungan.
 - e. Masalah Persetujuan Lingkungan
Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai persetujuan lingkungan hidup harus sesuai dengan UUPPLH yang merupakan perangkat hukum terutama terkait hal yang bersifat preventif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan persetujuan. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha merupakan solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan. Semangat Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020,

khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini salah satunya adalah menyederhanakan hal-hal yang selama ini dinilai relatif rumit, agar kemanfaatannya lebih efisien dan efektif. Misalnya, tentang izin lingkungan, bahwa Izin Lingkungan tidak dihilangkan, namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha. Selain itu, pengintegrasian kembali izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, memperkuat posisi perlindungan terhadap lingkungan hidup. Persyaratan dan kewajiban lingkungan tetap dapat di-enforce, karena termuat (terintegrasikan) dalam perizinan berusaha.

“Terkait AMDAL, dalam pengaturan tata laksana uji kelayakan lingkungan, yang dulunya bernama Komisi Penilai Amdal (KPA) diganti dengan “Lembaga Uji Kelayakan” yang terdiri dari “Tim Uji Kelayakan” yang ada di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta *Adhoc* yang penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, juga dalam penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, namun tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM pembina masyarakat terkena dampak tersebut. Hal tersebut dilakukan agar fungsinya dapat lebih efektif dan optimal.

Faktor penghambat dalam penerbitan persetujuan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah :

- 1) Tidak ada aturan yang jelas tentang biaya.
Ketidakjelasan biaya yang dikeluarkan dalam proses persetujuan dan penilaian dokumen lingkungan untuk syarat penerbitan persetujuan lingkungan ini karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas berapa tarif yang harus dikeluarkan oleh pemrakarsa dalam proses pengurusan persetujuan lingkungan tersebut. Tidak adanya tarif yang jelas untuk pembuatan dan proses mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan untuk AMDAL dan/ atau rekomendasi UKL-UPL, mengakibatkan Pemrakarsa menganggap membuat dokumen lingkungan itu sulit dan mahal.
- 2) Minimnya Konsultan Penyusun Dokumen AMDAL di Kabupaten Gunungkidul. Untuk penerbitan persetujuan lingkungan harus didahului dengan Proses persetujuan dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Hal ini tentunya pemrakarsa harus menyusun dokumen tersebut. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tim penyusun dokumen AMDAL harus mempunyai kualifikasi atau sertikat kompetensi sebagai penyusun dokumen AMDAL.

Di Kabupaten Gunungkidul tim penyusun yang mempunyai sertifikat kompetensi belum ada sehingga pemrakarsa kesulitan dalam penyusunan. Sehingga pemrakarsa harus mencari tim penyusun keluar daerah, hal inilah yang membuat proses atau tahapan pemrakarsa untuk melakukan permohonan akan terhambat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul sudah mengantisipasi menyesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Kabupaten. Penilaian dan penerbitan Persetujuan Lingkungan pun juga selalu berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait OSS RBA, termasuk kegiatan pengawasan usaha dan atau kegiatan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengedepankan skala prioritas terutama untuk program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Program kegiatan utama harus diberikan prioritas lebih dibandingkan dengan program dan kegiatan pendukung, sehingga target kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai serta fokus pada target capaian kinerja yang telah dibuat dan mencari terobosan dana agar tidak hanya mengandalkan APBD saja.
Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Program Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Outcome Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100 persen	100
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	output Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100	28	28 dokumen	100
		Perentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen	100 persen	28 dokumen	28 dokumen	100	28	28 dokumen	28
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Forum PD	1 Kali	1 kali	1 kali	1 dokumen	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen Profil	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1	1	
2.11.0 1.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	1	
2.11.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1	1	
2.11.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen ROPK	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	
2.11.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan						1	1	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						17	17	100
2.11.0 1.2.01. 06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	100
		Jumlah Laporan Monev	4 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4	4	100
		Jumlah Laporan TEPPA	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12	12	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4	4	
2.11.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Layanan	3 layanan	3 layanan	9 layanan	300	3	3 layanan	100
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 Persen	100 persen	100 persen		0,00	100	100 persen	100
2.11.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	14	14 bulan	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						644	644 orang	
2.11.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1 dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1	1 laporan	
2.11.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen Laporan semesteran	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1 dokumen	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12	12 dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						13	13	
2.11.0 1.2.05	Administrasi/Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani	46 Orang	50 orang	50 orang	50 Orang	100	50	50 orang	109
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100 persen	100
2.11.0 1.2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	43 Orang	50 orang	48 orang	48 orang	100	48	48 orang	111,63
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						6	6 Dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						44	44 Orang	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.11.0 1.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	3 Orang	orang	4 orang	4 orang	100	2	2 orang	66,67
2.11.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	layanan	5 layanan	5 layanan	0,00	5	5 layanan	100
		Persentasi administrasi umum terlayani	100 Persen	persen	100 persen	100 persen	0,00	100	100 persen	100
2.11.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik tersedia	4 Paket	jenis	4 paket	4 paket	100	4	4 paket	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						4	4	
2.11.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	12 Paket	jenis	12 paket	12 paket	100	12	12 paket	100
		Jumlah Scanner Digital yang terbeli	0 Unit	unit	1 unit	1 unit	100	1	1 unit	0,00
		Jumlah laptop yang terbeli	2 Unit	unit	4 unit	4 unit	100	2	2 unit	100
		Jumlah mesin fax	0 Unit	unit	1 unit	1 unit	100	1	1 unit	0,00
		Jumlah komputer yang terbeli	2 Unit	unit	2 unit	2 unit	100	2	2 unit	100
		Jumlah printer yang terbeli	1 Unit	unit	1 unit	1 unit	100	-	0 unit	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						13	13	13	
2.11.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah cetak	160 Bendel	163 bendel	160 bendel	160 bendel	100	160	160	160	100
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan						5	5	5	
		Jumlah fotocopy	15000 Lembar	15.000 lembar	150 lembar 00	150 lembar 00	100	15000	15000	15000	100
2.11.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rekening langganan surat kabar	12 Bulan	12	12 bulan	12 bulan	100	12	12	12	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan						365	365	365	
2.11.0 1.2.06. 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						12	12	12	
2.11.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam daerah	30 OH	30	161 OH	161 OH	100	30	30	30	100
		Jumlah Makan dan Minum Tamu	76 OR	76 OR	76 OR	76 OR	100	76	76	76	100
		Jumlah snack dan minum rapat	600 OR	450	671 OR	671 OR	100	600	600	600	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12	12	Laporan	
2.11.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	0	-	3		0,00	3	3	unit	0,00
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	0 Persen	-	100 persen	-	0,00	100	100	persen	0,00
2.11.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel										
2.11.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Audio Visual yang terbeli	0 Unit	-	unit	unit	0,00	-	0	unit	0,00
		Jumlah CCTV yang terbeli	0 Unit	-	unit	unit	0	0	0	unit	0,00
		Jumlah kamera yang terbeli	0 Unit	-	unit	unit	0	-	0	unit	0,00
		Jumlah GPS Handheld terbeli	0 Unit	-	unit	unit	0	0	0	unit	0,00
		Jumlah Drone terbeli	0 Unit	-	unit	unit	0	0	0	unit	0,00
		Jumlah Kursi Kerja yang terbeli			16	16	100				

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Meja Kerja yang terbeli			8	8	100			
		Jumlah Televisi yang terbeli			1	1	100			
		Jumlah Speaker Mic yang terbeli			1	1	100			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						10	10	
		Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan						10	10	
2.11.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100	3	3 layanan	100
		Persentasi penyediaan jasa penunjang terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100 persen	100
2.11.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkelola	2000 Surat	2 surat	200 kali 0	221 kali 1	110.55	2000	2000 surat	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						24	24	
2.11.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon	12 Rekening	1 rekening	12 rekening	12 rekening	100	12	12 rekening	100
		Jumlah Rekening Air	12 Rekening	1 rekening	12 rekening	12 rekening	100	12	12 rekening	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Rekening listrik	24 Rekening	2	24 rekening	24 rekening	100	24	24	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,						48	48	
2.11.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa kebersihan cleaning service	3 Termin	3 termin	3 termin	3 termin	100	3	3	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						3	3	
2.11.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61 Unit	61 unit	61 unit	61 unit	0,00	61	61	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terfasilitasi	100 Persen	persen persen	100 persen	100 persen	100	100	100	100
2.11.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	4 Unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	4	4	100
		Jumlah mobil yang terpelihara	4 Unit	5 unit	4 unit	4 unit	100	4	4	100
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	10 Unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10	10	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah motor yang terpelihara	10 Unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10	10 unit	100
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						14	14	
2.11.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer terfasilitasi pemeliharannya	15 Unit	7 unit	15 unit	9 unit	60	15	15 unit	100
		Jumlah laptop terfasilitasi pemeliharannya	5 Unit	5 unit	5 unit	2 unit	40	5	5 unit	100
		Jumlah mesin ketik terfasilitasi pemeliharannya	4 Unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	4	4 unit	100
		Jumlah printer terfasilitasi pemeliharannya	10 Unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10	10 unit	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang						38	38	
2.11.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terfasilitasi pemeliharannya	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1	1 unit	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.11.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC terfasilitasi pemeliharannya	12 Unit	10 unit	12 unit	12 unit	100	12	12 unit	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						18	18	
2.11.0 1.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen Penataan Organisasi	5 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	0	5	5 dokumen	100
		Persentase Penataan Organisasi terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100 persen	100
2.11.0 1.2.13. 02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2	2 dokumen	100
		Jumlah Dokumen SOP	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1 dokumen	100
		Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2	2 dokumen	100
1.03.1 3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	25 persen	100 persen	400	25	25 persen	25

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.03.1 3.2.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah layanan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 Layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100	1	1 layanan	100
		Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten terlaksana dengan baik	100 Persen	- persen	100 persen		0,00	100	100 persen	100
1.03.1 3.2.02. 03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Terbangunnya Talud	1412,39 m3	- m3	141 m3 2,3 9	141 2	100	1412,39	1412,39 m3	100
		Terbangunnya Jalan Setapak	990,4 m2	- m2	990 m2	990	100	990,4	990,4 m2	100
		Terbangunnya Drainase dan Pemipaan Penyiraman	403 M	- m	403 m	403	100	403	403 m	100
		Terbangunnya Kolam dan Instalasi	78 m2	- m2	78 m2	78	100	78	78 m2	100
		Terbangunnya Etalase Batu Geopark Gunung Sewu	28 Unit	- unit	28 unit	28	100	28	28 unit	100
		Terbangunnya Taman Parkir	339,1 m2	- m2	339 m2	339	100	339,1	339,1 m2	100
		Terbangunnya Pagar Pengaman Tanaman	560 m2	- m2	560 m2	560	100	560	560 m2	100
		Penanaman Vegetasi	1195 m2	- m2	119 m2 5	1.19 5	100	1195	1195 m2	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Tersedianya Penerangan	14 Unit	unit	14 unit	14	100	14	14 unit	100
		Tersedianya Gazebo	5 Unit	unit	5 unit	5	100	5	5 unit	100
		Tersedianya Toilet	1 Unit	unit	1 unit	1	100	1	1 unit	100
		Tersedianya Septictank Biofil	1 Unit	unit	1 unit	1	100	1	1 unit	100
		Tersedianya CCTV	3 Unit	unit	3 unit	3	100	3	3 unit	100
		Tersedianya Peresapan	1 Unit	unit	1 unit	1	100	1	1 unit	100
		Tersedianya Tempat Sampah	15 Unit	unit	15 unit	15	100	15	15 unit	100
		Tersedianya Tempat Cuci Tangan	8 Unit	unit	8 unit	8	100	8	8 unit	100
		Tersedianya Ramp	64,8 m2	m2	64,8 m2	64,8	100	64,8	64,8 m2	100
		Tersedianya Tangga	315 m2	m2	315 m2	315	100	315	315 m2	100
2.11.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran	70 Persen	30 persen	50 persen		0,00	50	50 persen	71,43

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.11.0 3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2 Layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	100	2	2 layanan	100
		Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100 persen	100
2.11.0 3.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah buku laporan pemantauan kualitas lingkungan yang tersusun	1 Dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1 dokumen	100
		Jumlah Gerakan Kali Bersih	10 Kali	- kali	4	4	100	4	4	40
		Jumlah Forum Komunikasi Pemerhati Kali	2 Kali	- kali	2	2	100	2	2	100
		Jumlah bangunan IPAL Komunal di Industri UMKM	- Unit	- unit	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						1	1	Dokumen

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.11.0 3.2.01. 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek Laboratorium terlaksana	2 Kali	-	1 kali	1 kali	100	2	2 kali	100
		Jumlah bahan kimia terbeli	1 Paket	1	1 paket	1 paket	100	1	1 paket	100
		Jumlah peralatan gelas (glassware) dan perlengkapan laboratorium terbeli	1 Paket	1	1 paket	1 paket	100	1	1 paket	100
		Jumlah alat laboratorium terpelihara	10 Unit	1	10 unit	7 unit	70	10	10 unit	100
		Jumlah alat laboratorium terbeli	1 Paket	1	1 paket	1 paket	100	1	1 paket	100
		Jumlah pengolahan limbah	1 Paket	2	1 s	1 paket	100	1	1 paket	100
		Jumlah rapat koordinasi terlaksana	3 Kali	3	3 kali	3 kali	75	3	3 kali	100
		Jumlah Uji Profisiensi terlaksana	3 Kali		2 kali	2 kali	100	3	3 kali	100
		Jumlah akreditasi/Surveilan laboratorium terlaksana	1 Kali	-	0 kali	kali	0	1	1 kali	100
		Jumlah alat laboratorium terbeli (DAK)	0 Paket	-	1 paket	1 paket	100	1	1 paket	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan						1	1	
2.11.0 3.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	0,00	2	2 layanan	100
		Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	0,00	100	100 persen	100
		Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						2	2 Laporan	
2.11.0 3.2.02. 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen IKPLHD tersusun	2	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2	2 dokumen	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	20 Sampel	-	0 sampel	-	0,00	2	2	
2.11.0 3.2.02. 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemantauan kualitas lingkungan untuk penanganan antrax	20 Sampel	-	0 sampel	-	0,00	0	0	0
		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan						20	20	
2.11.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	58 Persen	50 persen	52 persen		0,00	52	52	89,65517241
2.11.0 4.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5 Layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	1,00	5	5	100
		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten terlaksana dengan baik	0 Persen	-	0,6 persen		0,00	0,6	0,6	0,00
2.11.0 4.2.01. 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah lokasi penanaman Pohon di Sumber Mata Air	1 Lokasi	-	-	-	0,00	-	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah lokasi penanaman Pohon di tepi Jalan	1 Lokasi	- lokasi	- lokasi	- lokasi	0,00	-	0 lokasi	0,00
		Jumlah lokasi Penanaman Pohon di Sempadan Pantai	1 Lokasi	- lokasi	- lokasi	- lokasi	0,00	-	0 lokasi	0,00
		Jumlah lokasi Penanaman Pohon di Sempadan Sungai	1 Lokasi	- lokasi	- lokasi	- lokasi	0,00	-	0 lokasi	0,00
		Jumlah lokasi Penghijauan Lingkungan	1 Lokasi	- lokasi	7 lokasi	7 lokasi	100	7	7 lokasi	700
		Jumlah lokasi penanaman Pohon di Geosite	1 Lokasi	- lokasi	- lokasi	- lokasi	0,00	-	0 lokasi	0,00
		Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						10	10 ha	
2.11.0 4.2.01. 03	Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah paket Pembangunan di Hutan Kota Tawarsari, Wonosari	1 Lokasi	- lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100	1	1 lokasi	100
		Jumlah Pembangunan shelter bibit di Taman Hutan Kota	1 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	0 paket	0,00
		Jumlah pengelolaan hutan kota terpelihara	1 Unit	- unit	- unit	- unit	0,00	-	0 unit	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah pengelolaan shelter bibit di Taman Hutan Kota	12 Lokasi	- lokasi	- lokasi	-	0,00	-	0 lokasi	0,00
		Terbangunnya Fasilitas di Taman Hutan Kota	0 Bulan	- bulan	- lokasi	lokasi	0	-	0 bulan	0,00
		Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						9	9 ha	
2.11.0 4.2.01. 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah mobil dinas operasional pemeliharaan taman yang terpelihara	3 Unit	2 unit	3 unit	3 unit	100	3	3 unit	100
		Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	2 Unit	2 unit	2 unit	2	100	2	2 unit	100
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	6 Unit	4 unit	6 unit	6 unit	100	6	6 unit	100
		Jumlah motor dinas operasional pemeliharaan taman yang terpelihara	6 Unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	6	6 unit	100
		Jumlah pakaian petugas keamanan terbeli	4 Stell	- stell	4 stell	4	100	4	4 stell	100
		Jumlah pakaian petugas taman terbeli	22 Stell	- stell	22 stell	22	100	22	22 stell	100
		Jumlah taman terpelihara	16 Taman	16 taman	16 taman	16 taman	100	16	16 taman	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah skylift truck terbeli	0 Unit	unit	-	-	0,00	-	0 unit	0,00
		Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Playen tersusun	0 Dok	dok	1 dok	-	0,00	1	1 dok	0,00
		Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Nglipar tersusun	0 Dok	dok	1 dok	1 dok	100	1	1 dok	0,00
		Jumlah dokumen Redesign DED RTH Taman Kota tersusun	0 Dok	dok	1 dok	1 dok	100	1	1 dok	0,00
		Jumlah dokumen Redesign DED wajah kota Tugu Siyono sampai dengan Alun-alun tersusun	0 Dok	dok	1 dok	1 dok	100	1	1 dok	0,00
		Jumlah dokumen Redesign DED Taman Parkir tersusun	0 Dok	dok	-	-	0,00	-	-	0,00
		Pengembangan Taman Edukasi Wukirsari, Wonosari	1 Lokasi	lokasi	0 lokasi	- lokasi	0,00	1	1 lokasi	100
		Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Ponjong tersusun	0 Dok	dok	-	-	0,00	-	-	0,00
		Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Saptosari tersusun	0 Dok	dok	-	-	0,00	-	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah dokumen DED RTH Batas Kota Rongkop tersusun	0 Dok	- dok	- dok	- dok	0,00	- -	dok	0,00
		Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Semanu tersusun	0 Dok	- dok	- dok	- dok	0,00	- -	dok	0,00
		Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Karangmojo tersusun	0 Dok	- dok	- dok	- dok	0,00	- -	dok	0,00
		Pembangunan RTH Kapanewon Playen	0 Paket	- paket	1 paket	- paket	0,00	1	1 paket	0,00
		Pembangunan RTH Kapanewon Nglipar	0 Paket	- paket	1 paket	1 paket	100	1	1 paket	0,00
		Pembangunan RTH wajah kota Tugu Siyono sempat dengan Alun-Alun	0 Paket	- paket	1 paket	1 paket	100	1	1 paket	0,00
		Pembangunan RTH Pengembangan Taman Kota	0 Paket	- paket	1 paket	1 paket	100	1	1 paket	0,00
		Pembangunan RTH taman Parkir	0 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	- paket	0,00
		Jumlah dokumen DED Batas kota Purwosari	0 Dok	- dok	- dok	- dok	0,00	-	- dok	0,00
		Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon	0 Dok	- dok	- dok	- dok	0,00	-	- dok	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Tepus	0 Dok	- dok	- dok	- dok	0,00	-	dok	0,00
		Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Tanjungsari	0 Dok	- dok	- dok	- dok	0,00	-	dok	0,00
		Pembangunan RTH batas kota Rongkop	0 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	paket	0,00
		Pembangunan RTH Kapanewon Saptosari	0 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	paket	0,00
		Pembangunan RTH Kapanewon Pongjong	0 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	paket	0,00
		Pembangunan RTH Kapanewon Semanu	0 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	paket	0,00
		Pembangunan RTH Kapanewon Karangmojo	0 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	paket	0,00
		Pembangunan RTH Kapanewon Girisubo	0 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	paket	0,00
		Pembangunan RTH Kapanewon Tepus	0 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	paket	0,00
		Pembangunan RTH batas kota Purwosari	0 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	paket	0,00
		Pembangunan RTH Kapanewon Tanjungsari	0 Paket	- paket	- paket	- paket	0,00	-	paket	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Papan Rambu Lingkungan Hidup	10 Unit	unit	20 unit	20 unit	100	20	20 unit	0,00
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						1,02	1,02 ha	
2.11.0 4.2.01. 05	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Taman KEHATI dikelola dengan baik	3 Lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100	3	3 lokasi	0,00
		Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						15	15 ha	
2.11.0 4.2.01. 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah Alat Biopori yang tersedia	0 Unit	unit	0 unit	- unit	0,00	32	32 unit	0,00
2.11.0 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	82 Persen	32 persen	42 persen	- persen	0,00	42	42 persen	51,22
2.11.0 8.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	0,00	3	3 layanan	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		<i>Jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten</i>	<i>1 Layanan</i>		<i>100 layanan</i>	<i>100 layanan</i>	0,00	100	<i>1 layanan</i>	100
2.11.0 8.2.01. 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelatihan manajemen bank sampah terlaksana	2 Kali	- kali	2 kali	kali	0,00	2	2 kali	100
		Jumlah pelatihan pengolahan sampah anorganik terlaksana	2 Kali	2 kali	- kali	- kali	0,00	2	2 kali	100
		Jumlah pelatihan pengolahan sampah organik terlaksana	2 Kali	- kali	- kali	- kali	0,00	2	2 kali	100
		Jumlah Pelatihan pemilahan sampah terlaksana	1 Kali	- kali	- kali	- kali	0,00	1	1 kali	100
		Jumlah Kemah bakti, rekrutmen anggota saka baru, sosialisasi saka kalpataru, pembinaan saka kalpataru terlaksana	1 Kali	- kali	- kali	- kali	0,00	0	0 kali	0
		Jumlah pelaku usaha yang menerima sosialisasi	0 Kali	- kali	- kali	- kali	0,00	1	1 kali	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 Dok	2 dok	2 dok	2 dokumen	100	2	2 dok	100
2.11.0 8.2.01. 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen laporan hasil monitoring Adipura dan Jakstrada tersusun	2 Dok	2 dok	2 dok	2 dokumen	100	2	2 dok	100
		Frekuensi monitoring Adipura dan Jakstrada	2 Periode	2 periode	2 periode	2 periode	100	2	2 periode	100
		Jumlah kelengkapan Adipura yang tersusun	2 Dok	2 dok	2 dok	2 dokumen	100	2	2 dok	100
		Jumlah Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten	12 Sekolah	16 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	100	12	12 sekolah	100
		Jumlah Sekolah yang dibina dan dievaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup	40 Sekolah	12 sekolah	12 sekolah	40 sekolah	333.33	40	40 sekolah	100
		Jumlah sekolah yang didampingi untuk menjadi sekolah Adiwiyata TK DIY dan Nasional serta mandiri	28 Sekolah	sekolah	16 sekolah	28 sekolah	175.00	28	28 sekolah	100
		Jumlah sosialisasi pengeloaaan sampah	10 Kali	10 kali	- kali	- kali	0.00	10	10 kali	100
		Jumlah pertemuan JPSM terlaksana	4 Kali	4 kali	4 kali	4 kali	100	4	4 kali	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah rumah sampah terbangun	1 Paket	1 paket	- paket	- kali	0,00	1	1 paket	100
		Jumlah Workshop JPSM terlaksana	1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1	1 kali	100
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan						2	2 dokumen	
2.11.0 8.2.01. 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah peringatan hari peduli sampah dan hari lingkungan hidup terlaksana	2	-	2	2	100	2	2 kali	100
		Jumlah penyuluhan Proklim terlaksana	3	-	3 lokasi	3 lokasi	100	3	3 lokasi	100
		Jumlah penyuluhan KEHATI terlaksana	3	-	3 lokasi	3 lokasi	100	3	3 lokasi	100
		Jumlah penyuluhan Ekowisata terlaksana	1	-	1 orang	1 orang	100	1	1 lokasi	100
		Jumlah Sosialisasi Pokdarwis (PIWK)			1 kali	1 kali	100			
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat						250	250 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.11.0 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup	70 Persen	15 persen	18 persen		0,00	18	18 persen	25,71
2.11.0 9.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Kali	- kali	4		0,00	4	4 kali	57,14
		Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	100		0,00	100	100 persen	100
2.11.0 9.2.01. 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Proklm	2 Kali	2 kali	0 kali	kali	0,00	0	0 kali	0,00
		Jumlah penghargaan KEHATI	1 Kali	1 kali	- kali	- kali	0,00	0	- kali	0
		Jumlah Evaluasi kalpataru 4 kategori	1 Kali	- kali	1 kali	1 kali	100	1	1 kali	100
		Jumlah Evaluasi bank sampah	1 Kali	- kali	1 kali	1 kali	100	1	1 kali	100
		Jumlah Evaluasi TPS3R	1 Kali	- kali	1 kali	1 kali	100	1	1 kali	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Evaluasi prokash	1 Kali	- kali	1 kali	1 kali	100	1	1 kali	100
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH						6	6 entitas	
2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah dikelola	30,5 Persen	24 persen	24,5 persen		0,00	24,5	24,5 persen	80,33
2.11.1 1.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah layanan Pengelolaan Sampah	3 Layanan	3 layanan	3 layanan		0,00	3	3 layanan	100
		Persentase Pengelolaan Sampah terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen		0,00	100	100 persen	100
2.11.1 1.2.01. 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Buldoser yang dipelihara	2 Unit	- unit	2 unit		100	2	2 unit	100
		Jumlah Exavator yang dipelihara	2 Unit	2 unit	2 unit		100	2	2 unit	100
		Jumlah karis retribusi persampahan/kebersihan	13968 Buku	6.134 buku	997 buku		100	9971	9971 buku	71,38

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah mobil dinas persampahan yang terbayarkan pajaknya	23 Unit	23 unit	23 unit	23 unit	100	23	23 unit	100
		Jumlah mobil yang dipelihara	23 Unit	23 unit	23 unit	23 unit	100	23	23 unit	100
		Jumlah motor dinas persampahan yang terbayarkan pajaknya	9 Unit	9 unit	9 unit	9 unit	100	9	9 unit	100
		Jumlah motor yang dipelihara	9 Unit	9 unit	9 unit	9 unit	100	9	9 unit	100
		Jumlah Pengadaan APD bagi petugas TPA	180 Stell	180 stell	180 stell	180 stell	100	180	180 stell	100
		Jumlah Pengadaan APD bagi petugas pungut dan petugas kebersihan	12 Stell	12 stell	12 stell	12 stell	100	12	12 stell	100
		Jumlah pengecekan kesehatan	1 Kali	- kali	1 kali	1 kali	100	1	1 kali	100
		Jumlah pakaian kerja dan kelengkapannya yang terbeli	142 Stell	142 stell	142 stell	142 stell	100	142	142 stell	100
		Jumlah pengelolaan TPA	1 Lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100	1	1 lokasi	100
		Jumlah rapat koordinasi terlaksana	12 Kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	12	12 kali	100
		Jumlah Sampah yang Dipliah, Dikumpulkan,						16.961,50	16.961,50 ton	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.11.1 1.2.01. 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah tersedianya alat pencacah sampah organik	3 Unit	3 unit	0 unit	unit	0,00	5	5 unit	166,67
		Jumlah mesin pengayah sampah	1 Unit	1 unit	- unit	- unit	0,00	-	unit	0,00
		Jumlah sosialisasi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan	4 Kali	4 kali	- kali	- kali	0,00	-	kali	0,00
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	50 Indeks	indeks	40 indeks	indeks	100	40	40 indeks	80
		Jumlah Gerobak Sampah yang tersedia	10 Unit	unit	72 unit	72	100	72	72 unit	720
		Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	3 Kali	kali	7 kali	7	100	9	9 kali	300
		Jumlah Motor Roda 3 dan Gerobak Pilah yang terbeli (DAK)			10 unit	10 unit	100			
		Jumlah Mesin Press Hidrolik yang terbeli (DAK)			1 unit	1 unit	100			
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat						180	180 kelompok	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.11.1 1.2.01. 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah terdopo untuk menampung sampah dari kecamatan	1 Unit	- unit	-	-	0,00	-	-	0,00
		Jumlah sarpras pengolah sampah organik dengan konsep integrated farm pada TPS 3R	2 Lokasi	- lokasi	- unit	-	0,00	-	- unit	0,00
		Jumlah TPS 3R terbangun	1 Lokasi	- lokasi	- lokasi	-	0,00	-	- lokasi	0,00
		Jumlah armada roda 3 untuk lembaga pengelola sampah tersedia	3 Unit	- unit	- lokasi	-	0,00	-	- lokasi	0,00
		Jumlah alat pelindung diri tersedia	1 Paket	- paket	- unit	-	0,00	-	- unit	0,00
		Jumlah Alat Pencacah sampah tersedia	1 Unit	- unit	- paket	-	0,00	-	- paket	0,00
		Jumlah Alat Pres sampah tersedia	1 Unit	- unit	- unit	-	0,00	-	- unit	0,00
		Jumlah Tempat sampah terpilah, wheelbin, komposter tersedia	1 Paket	- paket	0 unit	-	0,00	1	1 unit	100
		Jumlah timbangan TPS 3R tersedia	4 Unit	- unit	0 paket	-	0,00	4	4 paket	100
		Jumlah Timbangan Digital tersedia	4 Unit	- unit	- unit	-	0,00	-	- unit	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah APD terbeli	5 Paket	- paket	0 unit	-	0,00	1	1 unit	20
		Jumlah Tas Pemilahan sampah tersedia	3 Paket	- paket	0 paket	-	0,00	1	1 paket	33,33
		Jumlah Buku tabungan dan buku administrasi tersedia	200 Buku	- buku	0 paket	-	0,00	200	200 paket	100
		Jumlah getset terbeli	0 Unit	- unit	- buku	-	0,00	-	- buku	0,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan terbeli (DAK)	0 Unit	- unit	0 unit	-	0,00	2	2 unit	0,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yang Tersedia						14	14 unit	
2.11.1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta	2 Unit	- unit	2 unit		0,00	2	2 unit	100
1.2.03		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta terlasana dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen		0,00	100	100 persen	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.11.1 1.2.03. 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Monitoring & Penyusunan Laporan Jakstrada (Adipura)	2 Kali	- kali	2 kali	1	0,00	2	2	100
		Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja						1	1	unit
2.11.0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	20 persen	100 persen	0,00	20	100	100 persen
2.11.0 2.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2 Layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	0,00	2	2	2 layanan
		Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	0,00	100	100	100 persen
2.11.0 2.2.01. 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen inventarisasi potensi dan permasalahan SDA Kab Gunungkidul tersusun	0 Dokumen	- dokumen	1 dokumen	-	0,00	1	1	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Andalalin TPA Wukirsari	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100			

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersusun	0 Dokumen	- dokumen	- dokumen	-	0,00	-	- dokumen	0,00
		Jumlah dokumen RPPLH tersusun	0 Dokumen	- dokumen	- dokumen	-	0,00	-	- dokumen	0,00
		Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun						1	1 dokumen	
2.11.0 2.2.01. 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek peningkatan kinerja PLH terlaksana	1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1	1 kali	100
		Jumlah Bimtek penyusunan laporan pelaksanaan dokumen lingkungan terlaksana	1 Kali	- kali	1 kali	1 kali	100	1	1 kali	100
		Jumlah rapat koordinasi PPLH terlaksana	5 Kali	10 kali	5 kali	5 kali	100	5	5 kali	100
		Jumlah Sosialisasi kebijakan dan peraturan PPLH terlaksana	2 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	100	2	2 kali	100
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/hKota						30	30 dokumen	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.11.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	60 Persen	20 persen	20 persen	20 persen	100	20	20 persen	33,33
2.11.0 6.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	4 Layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100,00	4	4 layanan	100
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100	100 persen	100
2.11.0 6.2.01. 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketertuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah operasional Pemeriksaan UKL-UPL dan Verifikasi/Registrasi SPPL	12 Bulan	- bulan	12	12	100	12	12	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah operasional penyelenggaraan Tim uji pelayanan lingkungan hidup kabupaten	10 Bulan	- bulan	10	10	100	10	10	100
2.11.0 6.2.01. 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pelatihan dan bimbingan teknis petugas pengawas LH terlaksana	1 Kali	- kali	1	1	100	1	1	100
2.11.0 6.2.01. 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 usaha dan/kegiatan	- usaha dan/kegiatan	60 usaha dan/kegiatan	60 usaha dan/kegiatan	100	40	40	66,67
		Jumlah bimtek peningkatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan usaha dan/atau kegiatan terlaksana	1 Kali	- kali	0 kali	- kali	0,00	1	1	100
		Jumlah bimtek pembuatan laporan pelaksanaan UKL-UPL / RKL-RPL terlaksana	2 Kali	- kali	0 kali	- kali	0,00	2	2	100
		Jumlah Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan bidang LH terlaksana	2 Kali	- kali	0 kali	- kali	0,00	2	2	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah	100 Persen	100 persen	100 persen			63	63 laporan	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen		0,00	100	100 persen	100
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di bidang lingkungan hidup	7 Aduan	7 aduan	100 persen		0,00	100	100 persen	100
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	100 persen	100 persen		0,00	100	100 persen	100
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang terselesaikan	7 Aduan	100 persen	7 Aduan	7	100	100	100 persen	100
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani						1	1 dokumen	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung dan mencapai tujuan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan alat untuk mencapai kinerja pelayanan sesuai tupoksi yang dimandatkan ke Dinas Lingkungan Hidup

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta indikator kinerja RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Tolok ukur dan indikator kinerja SPM mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Menurut peraturan tersebut ada 4 jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan Kabupaten/Kota yaitu :

1. Pencegahan pencemaran air dengan indikatornya adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air yang merupakan hasil pembagian dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pecemaran air dengan jumlah usaha dan / atau kegiatan yang diawasi dikalikan 100%.
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikatornya adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara yang merupakan hasil pembagian dari jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventaris dikalikan 100%.
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa dengan indikatornya adalah persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya yang merupakan hasil pembagian dari luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dengan luasan lahan yang diperuntukan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dikalikan 100%.
4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikatornya adalah prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti yang merupakan hasil pembagian dari jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dengan

jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 tahun dikalikan 100%.

Tolok ukur dan indikator kinerja IKK didasarkan pada format IKK untuk kabupaten dalam tataran pelaksanaan kebijakan aspek capaian kinerja urusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang meliputi beberapa indikator berikut:

1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL diukur dengan perbandingan antara jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi dibagi jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL dikalikan 100%.
2. Pengelolaan limbah B3 diukur dengan membandingkan antara jumlah ijin yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan yang wajib memiliki ijin dikalikan 1.000.
3. Pengelolaan limbah B3 yang diawasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pengawasan terhadap pengelolaan B3 dibanding jumlah data kegiatan yang memiliki ijin dikalikan 1.000.
4. Penegakan hukum lingkungan diukur dengan membandingkan antara jumlah kasus lingkungan yang ditangani dibagi jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani dikalikan 1.000.
5. Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air) diukur dengan membandingkan antara pelaksanaan penetapan status mutu air diukur dengan membandingkan antara jumlah sungai dan/atau danau yang telah ditetapkan statusnya dibagi jumlah sungai dan/atau danau dikalikan 1.000.

Pengendalian potensi sumber pencemaran air diukur dengan membandingkan antara jumlah beban pencemaran air yang telah dikendalikan dibagi jumlah beban pencemaran air yang dihasilkan dikalikan 1.000. Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/atau danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau diukur dengan membandingkan antara jumlah titik pengambilan sampling dibagi jumlah titik pemantauan rutin yang ditetapkan dikalikan 1000.

Tolok ukur dan indikator kinerja didasarkan pada perhitungan teknis, selanjutnya hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan(IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	nilai	n/a	34,6	38,35	46,25	73,86	74,88	38,35	46,25		
2	Nilai AKIP PD	nilai	74,53	80,05	80,07	80,09	79,48	80,15	80,07	80,09		
3	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	43	50	54	58	100	100	54	58		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif (Widodo, 2001:75). Terkait dengan hal tersebut maka tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan sedangkan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah koordinasi dan sinergisitas dengan dinas instansi terkait yang mempunyai hubungan dalam mewujudkan pemberdayaan pengelolaan lingkungan, pemantauan dan pengawasan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ditemui beberapa permasalahan dan hambatan seperti kurangnya sumber pendanaan, keterbatasan sarana dan prasarana kerja, lemahnya kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta belum adanya tenaga fungsional bidang lingkungan hidup. Permasalahan dan hambatan tersebut diusahakan untuk dapat diatasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga tidak berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap pencapaian program nasional seperti SPM bidang Lingkungan Hidup dan MDGs

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah bahwa isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi padahal saat ini masalah lingkungan merupakan isu global sehingga mau tidak mau masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu pusat perhatian karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*).

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain :

A. TIMBULAN SAMPAH YANG SEMAKIN MENINGKAT.

1. Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan sampah secara lebih profesional dengan dukungan SDM yang memadai serta dimungkinkannya kerjasama dengan masyarakat dan swasta untuk melaksanakan penanganan sampah.
2. Penggalan sumber dana untuk investasi terutama dari pihak swasta yang harus sinergi dengan penerapan pola pemulihan biaya (*cost recovery*) secara bertahap.
3. Kondisi TPA yang dioperasikan secara *sanitary landfill* memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dan sumber-sumber air dapat diminimalkan. Perlunya komitmen pihak eksekutif dan legislatif dalam alokasi biaya untuk rehabilitasi TPA dan penyiapan lokasi TPA baru di Desa Banjarejo Kapanewon Tanjungsari.
4. Program 3 R harus dilaksanakan melalui Pendidikan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Sentuhan teknologi sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan TPA terutama berkaitan dengan pemanfaatan gas *landfill*, insinerator ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah lainnya.
6. *Social enforcement* sebagai solusi lemahnya penegakan perda atas pelanggaran pembuangan sampah.

B. BERKURANGNYA PERAN PEMERINTAH DAERAH AKIBAT PENYEDERHANAAN IJIN LINGKUNGAN

1. Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul menghendaki penerapan perencanaan tata ruang (*spatial planning*) yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan adanya standar lingkungan seperti standar ambien untuk air permukaan, air bawah tanah, dan udara sebagai ambang batas baku mutu kegiatan industri sehingga kualitas lingkungan akan bisa lebih terjaga.
2. Penerapan ijin lingkungan dalam setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar setiap usaha atau kegiatan layak secara ekonomis, teknologi dan lingkungan.
3. Ijin lingkungan dalam UU *Omnibus Law* Cipta Kerja disederhanakan sebagai bentuk penyederhanaan ijin untuk memudahkan investasi. Ijin lingkungan hanya berdasarkan komitmen dimana pelaku usaha dapat mendapatkan izin usaha dan ijin lingkungan dengan komitmen akan melengkapi persyaratan lainnya kemudian. Artinya pelaku usaha dapat melangsungkan kegiatan usahanya dengan melengkapi izin di kemudian hari.
4. Ijin lingkungan berfungsi sebagai instrument pencegahan yang dapat membendung dampak negatif pembangunan ekonomi terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. UU *Omnibus Law* diharapkan dapat menyederhanakan ijin usaha dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup, sehingga diperlukan sebuah kajian yang lebih komprehensif yang mengidentifikasi hambatan berusaha untuk menemukan factor penghambat investasi apakah di aspek substansi perijinan atau di aspek proses perijinan.
6. Kemudahan berusaha dengan menyederhanakan ijin lingkungan seperti dalam UU Cipta Kerja justru menempatkan pelaku usaha dalam kondisi ketidakpastian hukum dan menghilangkan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
7. Penyederhanaan ijin lingkungan juga dilakukan oleh KLHK dengan PermenLHK nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
8. AMDAL dan RDTR tidak bisa untuk disetarakan. RDTR berorientasi pada sebuah kebijakan publik, sementara AMDAL berorientasi pada proyek/kegiatan tertentu. AMDAL adalah instrumen pengendalian dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan dalam skala tapak proyek, sementara RDTR adalah

instrumen pengendalian ruang berdasarkan tata guna lahan peruntukan.

9. RDTR hanya mengatur soal zonasi atau peruntukan kawasan dan tidak spesifik mengatur mengenai detail suatu proyek dan tidak mengatur kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti dalam AMDAL. RDTR tidak bisa menggantikan fungsi AMDAL sebagai rangkaian dari izin lingkungan.

C. BELUM ADA KEBIJAKAN TENTANG PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum menata dan menyediakan berbagai bentuk Ruang Terbuka Hijau berdasarkan klasifikasinya dan berdasar pada peraturan yang ada.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih ada ketidaksesuaian dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan.
3. RTH Kabupaten Gunungkidul belum mencapai ketentuan yaitu minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan perencanaan dari bawah dengan berbagai pertimbangan diantaranya ketersediaan SDM, dana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan faktor – faktor lain yang terkait, berdasarkan skala prioritas sehingga diharapkan perencanaan yang disusun akan mampu menjawab kebutuhan.

Hasil analisis kebutuhan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui forum Musrenbang dengan mempertimbangkan berbagai masukan terhadap rencana program , Kegiatan dan Sub kegiatan dari sisi ketersediaan anggaran, lokasi sasaran, target indikator keluaran dan hasil maka sesuai kondisi pada tahun berjalan dan proyeksi tahun yang akan datang terdapat penyesuaian kegiatan.

Penjelasan temuan – temuan setelah proses pembandingan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, dilaksanakan dengan mengkaji terhadap perbedaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program , Kegiatan dan Sub kegiatan yang sama tetapi besaran biaya dan ruang lingkup kegiatannya berbeda

Perbandingan data antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik	100 persen	4.761.541.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik	50 persen	4.837.296.000		
	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah Laporan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3 Laporan	90.880.000	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah Laporan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3 Laporan	411.610.000		
	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang		Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	3 Laporan	90.880.000	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang		Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	0 Laporan	0		
						Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang		Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1 Dokumen	411.610.000		DAIS

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
-1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
			Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3 dokumen	4.670.661.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3 dokumen	4.425.686.000		
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	2 dokumen	2.518.670.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	0 dokumen	0		
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 dokumen	2.151.991.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 dokumen	4.425.686.000		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	5.077.604.758	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	3.153.397.180		

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,286 indeks	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,286 indeks	34.052.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
-1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	-7	Dinas Lingkungan Hidup	-8	-9	-10	-11	-12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	-7	Dinas Lingkungan Hidup	-8	-9	-10	600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	17 laporan	30.000.000	-7	Dinas Lingkungan Hidup	-8	-9	-10	28.352.500	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
-1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	600.000	-11	-12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	219,333 indeks	4.515.904.758	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	219,33 indeks	2.690.770.624		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	644 orang/bulan	4.483.904.758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 orang/bulan	2.658.743.124		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.100.000		

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
-1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 laporan	30.927.500	-11 -12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 indeks	48.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 indeks		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 orang	46.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
-1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	69 indeks	153.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	69 indeks	89.808.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	23.504.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.050.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 dokumen		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 laporan	1.500.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
								Kunjungan Tamu			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	61.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	50.754.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	20 unit		
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	10 unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	11 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63 laporan	185.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75 laporan	192.730.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	47.095.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	55.110.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	90.525.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71 unit	105.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71 unit	146.036.056	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 laporan	75.000.000	-7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	-11 95.500.000	-12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	9.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	35.436.056	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	6.000.000	
3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	100 persen	215.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	60 persen	29.097.500	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	31 dokumen	215.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	31 dokumen	29.097.500		
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	200.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengkomodir arahan RPPLH Provinsi	30 dokumen	29.097.500	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	30 dokumen	15.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0 dokumen		

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN		Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik	10 persen	600.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN		Persentase Pengendalian Pencemaran	60 persen	352.106.000	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penceemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2 dokumen	540.000.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penceemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2 dokumen	348.131.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	74.380.000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 dokumen	340.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3 dokumen	273.751.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-3	-4 Indeks Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-5 11 indeks	-6 60.000.000	-7 Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-8	-9 Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-10 2 laporan	-11 3.975.000	-12
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	30.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	3.975.000	
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	20 titik	30.000.000						
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase RTLH Publik Dalam Kondisi baik	100 persen	4.090.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)		Persentase RTLH Publik Dalam Kondisi baik	54 persen	874.794.300	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting							
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
-1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-3	Jumlah luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-5	35,02 Ha	-6	4.090.000.000	-7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-8	-9	35,02 ha	-10	874.794.300	-11	-12
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Gunungkidul	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 ha	500.000.000											
	Pengelolaan Kebun Raya	Kab. Gunungkidul	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	9 ha	800.000.000				Pengelolaan Kebun Raya	Kapanewon Ngawen, Kapanewon Tepus	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	9 ha		11.990.000		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Gunungkidul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,02 ha	2.745.000.000				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	kab. Gunungkidul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,02 ha		838.864.300		
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Gunungkidul, Ngawen, Beji	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15 ha	45.000.000				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	Kapanewon Ngawen, Kapanewon Tepus	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 unit		23.940.000		

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	kab. Gunungkidul	Unit Taman Kehati diluar kawasan hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 unit		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	40 persen	355.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	40 persen	8.250.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31,5 indek	355.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	31,5 indek	8.250.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah operasional penyelenggaraan Tim uji pelayananan lingkungan hidup kabupaten	10 laporan	260.000.000			Kabupaten/Kota				
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63 laporan	60.000.000							

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
-1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	-5 1 dokumen	-6 35.000.000	-2 -3 -4 -5 -6 -7	-8	-9	-10	-11	-12	
						Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	65 Badan Usaha	8.250.000		

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat Yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup (%)	62 persen	505.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat Yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup (%)	62 persen	48.950.000		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85,667 indeks	505.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88,67 indeks	48.950.000		
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	5 lembaga	50.000.000							

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
-1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	405.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	27.150.000	-11	-12
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	175 orang	50.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	175 orang			
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat	Kab. Gunungkidul	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 lembaga	21.800.000		
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat terlaksana dengan baik	42 persen	160.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat terlaksana dengan baik	42 persen	0		

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
-1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-3	Jumlah entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-5 6 entitas	-6 160.000.000	-7 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-8	-9 Jumlah entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-10 6 entitas	-11 -	-12 -
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 entitas	160.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas		
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	100 persen	55.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	100 persen	1.240.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
-1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di	Jumlah dokumen Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1 dokumen	55.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	12 pengaduan	1.240.000			
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 dokumen	55.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti /Ditangani	12 pengaduan	1.240.000		
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Gunungkidul	Persentase Sampah Dikelola	27,5persen	4.861.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Gunungkidul	Persentase Sampah Dikelola	27,5 persen	4.229.430.000		
	Pengelolaan Sampah	Kab. Gunungkidul	Indeks Pengelolaan Sampah	5.718,383 indeks	4.855.500.000	Pengelolaan Sampah	Kab. Gunungkidul	Indeks Pengelolaan Sampah	5.718,383 indeks	4.229.430.000		

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	180 kelompok	100.000.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-10	-11	-12
	Penanganan Sampah dengan melakukan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Gunungkidul	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	16.961,15 ton	4.240.000.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	191819,5 ton	4.229.430.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 unit	615.500.000				0 unit		

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)						
-1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-3	Jumlah unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta	1 unit	6.000.000	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		Jumlah unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta	0 unit				Jumlah unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta	0 unit							
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1 unit	6.000.000		Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0 unit							
	JUMLAH				20.680.645.758			JUMLAH							13.534.560.980	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mendapatkan kesesuaian program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul di bidang lingkungan, telah diselenggarakan berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan baik yang dilaksanakan secara umum melalui Musrenbang Kecamatan maupun yang dilaksanakan secara khusus melalui Forum PD Bidang Lingkungan Hidup. Musrenbang Kabupaten melibatkan beberapa pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait pelayanan bidang lingkungan hidup, LSM, Perguruan Tinggi di Gunungkidul, dan PD terkait. Dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang tersebut didapati berbagai usulan yang sebagian besar sangat terkait dengan isu strategis dan prioritas pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.07/2022 tentang batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, batas maksimal Defisit APBD dan batas Masimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun 2023 sebesar 2,2%. sehingga penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul melakukan penyesuaian pagu perangkat daerah tahun 2024 berdasarkan batas defisit. Maka usulan program dan kegiatan dari masyarakat di tahun 2024 belum dapat diakomodir.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Renja ini memuat informasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan rencana tingkat capaian (target) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan kebijakan baik tingkat Nasional maupun Provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Secara nasional prioritas tugas dari bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah : (1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan , pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan dan kehutanan; (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan

dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (5) pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (6) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (8) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan “ sasaran umum pembangunan yang ingin dicapai adalah lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam secara lestari untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, penegakan aturan hukum lingkungan, pemulihan lingkungan hidup dan meningkatkan pencegahan, mitigasi bencana dan kehatanan masyarakat terhadap bencana. Secara khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH);
2. Peningkatan efektivitas dan kinerja pengelolaan persampahan;
3. ingkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
6. Fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan hidup

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Lingkungan Hidup lima tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran ini didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan target Renstra 2021-2026, rumusan tujuan dan sasaran PD merupakan penjabaran dari sasaran daerah yang ditetapkan dengan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Tujuan Dinas Lingkungan Hidup	Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026
1.	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Nilai peningkatan tata kelola lingkungan hidup	62,05
2.	Meningkatnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan-undangan	65

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

NO	Sasaran Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup	Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
1	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup	Nilai Peningkatan tata kelola lingkungan hidup	46,25
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,09
3	Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	58

Perangkat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 336/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama IKU	Target Kinerja IKU
1.	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	46,25
2.	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program merupakan kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sehingga kerangka anggaran dapat menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota maka jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah kabupaten adalah:

- a) Pelayanan Pencegahan pencemaran air;
- b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- d) Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah “Optimalisasi Ketahanan ekonomi Daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan indikator prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi;
 - a. Investasi dan pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstra, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Teformasi Birokrasi.

Berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam prioritas pembangunan ketujuh yaitu Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Adapun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk pembangunan daerah terincian dalam program / kegiatan /sub kegiatan tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
Infrastruktur, Lingkungan hidup dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Terwujudnya tata Kelola lingkungan hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	46,25	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	352.106.000	DLH
					2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	348.131.000	
					2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	74.380.000	
					2.11.03.2.01.02	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	273.751.000	
					2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.975.000	
					2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	3.975.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.1.1.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	874.794.300	
					2.1.1.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	874.794.300	
					2.1.1.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	11.990.000	
					2.1.1.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	838.864.300	
					2.1.1.04.2.01.08	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	23.940.000	
					2.1.1.04.2.01.09	Pengelolaan Taman Keanekaragaman di Luar Kawasan Hutan		
					2.1.1.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	48.950.000	
					2.1.1.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.950.000	
					2.1.1.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	27.150.000	
					2.1.1.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.08.2.01.06	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	21.800.000	
					2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	
					2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	
					2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.229.430.000	
					2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.229.430.000	
					2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.1.1.11.2.01.20	Penanganan Sampah dengan melakukan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	4.229.430.000	
					2.1.1.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		
					2.1.1.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah		
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,07	2.1.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.153.397.180	
					2.1.1.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.052.500	
					2.1.1.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
					2.1.1.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	300.000	
					2.1.1.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300.000	
					2.1.1.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	900.000	
					2.1.1.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.1.1.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.352.500	
					2.1.1.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000	
					2.1.1.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.690.770.624	
					2.1.1.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.658.743.124	
					2.1.1.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.000	
					2.1.1.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.927.500	
					2.1.1.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	
					2.1.1.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
					2.1.1.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
					2.1.1.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.808.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.1.1.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	
					2.1.1.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.504.000	
					2.1.1.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.050.000	
					2.1.1.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
					2.1.1.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.500.000	
					2.1.1.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.754.000	
					2.1.1.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
					2.1.1.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		
					2.1.1.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
					2.1.1.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.730.000	
					2.1.1.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.095.000	
					2.1.1.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.110.000	
					2.1.1.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.525.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.036.056	
					2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.500.000	
					2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.100.000	
					2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.436.056	
					2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	
					1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	4.837.296.000	
					1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	411.610.000	
					1.03.13.5.01.05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	411.610.000	
					1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	4.425.686.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	4.425.686.000	
		Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	58	2.1.1.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	29.097.500	
					2.1.1.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	29.097.500	
					2.1.1.02.2.01.01	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	29.097.500	
					2.1.1.02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota		
					2.1.1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	8.250.000	
					2.1.1.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.250.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.250.000	
					2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1.240.000	
					2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1.240.000	
					2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	1.240.000	
Jumlah							13.534.560.980	

Tabel 4.2
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024
 Dan Prakiraan Maju tahun 2025
 Kabupaten Gunungkidul

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					4.837.296.000,00				2.151.991.000,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				4.837.296.000,00				2.151.991.000,00
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik		50 Persen	4.837.296.000,00			75 Persen	2.151.991.000,00
1.03.13 .5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Laporan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		3 Laporan	411.610.000,00			3 Laporan	-
1.03.13 .5.01.0 005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	411.610.000,00	Dais		-	-
1.03.13 .5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		3 Dokumen	4.425.686.000,00			3 Dokumen	2.151.991.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.13 .5.02.0 003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	4.425.686.000,00	Dais		1 Dokumen	2.151.991.000,00
2					8.697.264.980,00				15.474.217.673,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				8.697.264.980,00				15.474.217.673,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik		100 persen	3.153.397.180,00			100 Persen	5.164.217.673,00
2.11.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4,286 indeks	34.052.500,00			4,286 inde ks	55.000.000,00
2.11.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	4 Dokumen	3.000.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		3 Dokumen	8.000.000,00
2.11.01 .2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	300.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	2.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01 .2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	300.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	1 Dokumen		2.000.000,00
2.11.01 .2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	900.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	3 Dokumen		3.000.000,00
2.11.01 .2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	600.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	2 Dokumen		2.000.000,00
2.11.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	17 Laporan	28.352.500,00	Dana Transfer Umum- DAU	17 Laporan		35.000.000,00
2.11.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	4 Laporan	600.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	4 Laporan		3.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01 .2.02.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)		219,33 indeks	2.690.770.624,00			219,33 Indeks	4.521.517.673,00
2.11.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	574 Orang/ bulan	2.658.743.124,00	Dana Dana Transfer Umum- DAU		644 Orang/ Bulan	4.484.517.673,00
2.11.01 .2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	1 Laporan	1.100.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		1 Laporan	2.000.000,00
2.11.01 .2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	13 Laporan	30.927.500,00	Dana Transfer Umum- DAU		13 Laporan	35.000.000,00
2.11.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25 indeks	-			25 Indeks	49.500.000,00
2.11.01 .2.05.0 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	0 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- DAU		6 Dokumen	3.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01 .2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	0 Orang	-	Dana Transfer Umum- DAU		44 Orang	46.500.000,00
2.11.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah		69 indeks	89.808.000,00			69 Indeks	163.200.000,00
2.11.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	4 Paket	4.000.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		4 Paket	2.000.000,00
2.11.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	12 Paket	23.504.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		13 Paket	75.000.000,00
2.11.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	5 Paket	10.050.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		5 Paket	10.000.000,00
2.11.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	0 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- DAU		365 Dokumen	1.200.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	12 Laporan	1.500.000,00	Dana Dana Transfer Umum- DAU	12 Laporan	Laporan	3.500.000,00
2.11.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	12 Laporan	50.754.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	12 Laporan	Laporan	71.500.000,00
2.11.01 .2.07 005	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 unit	-			20 Unit	60.000.000,00
2.11.01 .2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	0 unit	-	Dana Transfer Umum- DAU		10 Unit	30.000.000,00
2.11.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	0 unit	-	Dana Transfer Umum- DAU		10 Unit	30.000.000,00
				75 Laporan	192.730.000,00			75 Laporan	190.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	12 Laporan	47.095.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	24 Laporan	45.000.000,00	
2.11.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	36 Laporan	55.110.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	48 Laporan	65.000.000,00	
2.11.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	3 Laporan	90.525.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	4 Laporan	80.000.000,00	
2.11.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		71 unit	146.036.056,00		71 Unit	125.000.000,00	
2.11.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	13 Unit	95.500.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	14 Unit	90.000.000,00	
2.11.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	22 Unit	9.100.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	38 Unit	10.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	1 Unit	35.436.056,00	Dana Transfer Umum- DAU		1 Unit	15.000.000,00
2.11.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	20 Unit	6.000.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		18 Unit	10.000.000,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup Terlaksana Dengan Baik		60 Persen	29.097.500,00			80 Persen	15.000.000,00
2.11.02 .2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		31 dokumen	29.097.500,00			31 Dokumen	15.000.000,00
2.11.02 .2.01.0 002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	30 Dokumen	29.097.500,00	Dana Transfer Umum- DAU		30 Dokumen	15.000.000,00
2.11.02 .2.01.0 006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	0 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran		60 Persen	352.106.000,00			65 Persen	580.000.000,00
2.11.03 .2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		2 dokumen	348.131.000,00			2 Dokumen	550.000.000,00
2.11.03 .2.01.0 001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	74.380.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	200.000.000,00
2.11.03 .2.01.0 015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	273.751.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	350.000.000,00
2.11.03 .2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		11 Indeks	3.975.000,00			11 Indeks	30.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03 .2.02.0 001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gunungkidul	2 Laporan	3.975.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		2 Laporan	30.000.000,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik Dalam Kondisi Baik		54 Persen	874.794.300,00			56 Persen	4.200.000.000,00
2.11.04 .2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah luas Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		35,02 Ha	874.794.300,00			35,02 Ha	4.200.000.000,00
2.11.04 .2.01.0 003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Taman Hutan Kota, Kab. Gunungkidul	9 Ha	11.990.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		9 Ha	300.000.000,00
2.11.04 .2.01.0 004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1,02 Ha	838.864.300,00	Dana Transfer Umum- DAU		1,02 Ha	3.355.000.000,00
2.11.04 .2.01.0 008	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kapanewon Ngawen, Kapanewon Tepus, Kab. Gunungkidul	3 Unit	23.940.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		15 Ha	45.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.04 .2.01.0 009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	0 Unit	-	Dana Transfer Umum- DAU	10 Ha	500.000.000,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Terlaksana Dengan Baik		40 Persen	8.250.000,00		50 Persen	60.000.000,00	
2.11.06 .2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		31,5 Indeks	8.250.000,00		31,5 Indeks	60.000.000,00	
2.11.06 .2.01.0 005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kabupaten Gunungkidul	65 Badan Usaha	8.250.000,00	Dana Transfer Umum- DAU	63 Laporan	60.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga/ Kelompok Masyarakat Yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup	4	62 Persen	48.950.000,00			72 Persen	515.000.000,00
2.11.08 .2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85,67 Indeks	48.950.000,00			85,67 Indeks	515.000.000,00
2.11.08 .2.01.0 002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kabupaten Gunungkidul	4 Dokumen	27.150.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		2 Dokumen	415.000.000,00
2.11.08 .2.01.0 003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kabupaten Gunungkidul	0 Orang	-	Dana Transfer Umum- DAU		250 Orang	50.000.000,00
2.11.08 .2.01.0 005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kabupaten Gunungkidul	2 Lembaga	21.800.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		5 Lembaga	50.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Lomba Lingkungan Hidup		42 persen	0,00			56 Persen	170.000.000,00
2.11.09 .2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6 entitas	-			6 Entitas	170.000.000,00
2.11.09 .2.01.0 001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kabupaten Gunungkidul	0 Entitas	-	Dana Transfer Umum- DAU		6 Entitas	170.000.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Berjalan Dengan Baik		100 Persen	1.240.000,00			100 Persen	65.000.000,00
2.11.10 .2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani		1 Dokumen	1.240.000,00			1 Dokumen	65.000.000,00
2.11.10 .2.01.0 004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kabupaten Gunungkidul	12 Pengaduan	1.240.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		1 Dokumen	65.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Dikelola		27,5 Persen	4.229.430.000,00			29 Persen	4.705.000.000,00
2.11.11 .2.01	Pengelolaan Sampah	Indeks Pengelolaan Sampah		5.718,38 Indeks	4.229.430.000,00			5.718,38 Indeks	4.695.000.000,00
2.11.11 .2.01.0 004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kabupaten Gunungkidul	0 Kelompok	-	Dana Transfer Umum- DAU		180 Kelompok	200.000.000,00
2.11.11 .2.01.0 020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kabupaten Gunungkidul	19.819,5 Ton	4.229.430.000,00	Dana Transfer Umum- DAU		16.961,15 Ton	4.495.000.000,00
2.11.11 .2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta		1 Unit	-			1 Unit	10.000.000,00
2.11.11 .2.03.0 002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelom- pok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Kabupaten Gunungkidul	0 Unit	-	Dana Transfer Umum- DAU		1 Unit	10.000.000,00
		JUMLAH			13.534.560.980,00				17.626.208.673,00

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

ANTONIUS HARY SUKMONO

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kewajiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Tahapan selanjutnya setelah Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan tersebut kemudian harus ditindaklanjuti penyusunan perencanaan pada Perangkat Daerah (Perangkat Daerah). Kewajiban adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (RENJA).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul juga berkewajiban menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja ini harus berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah memuat beberapa tahapan, antara lain :

1. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
 - d. Penetapan Renja Perangkat Daerah.
2. Keterkaitan dokumen perencanaan
 - a. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD;
RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Perangkat Daerah disesuaikan dengan Program Prioritas RKPD.

- b. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas Perangkat Daerah.
 - c. Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian Dan Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi.
Renja Perangkat Daerah memperhatikan program dan kegiatan Renja Kementerian Dan Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi.
3. Tindak lanjut proses penyusunan RAPBD
Setelah Renja Perangkat Daerah ini terbentuk kemudian dapat diolah lagi untuk penentuan pagu indikatif dalam penyusunan RAPBD kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018/ tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Sebagai pedoman untuk merealisasikan sasaran RPJMD Perangkat Daerah terutama terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui penentuan target kinerja serta prioritas program dan kegiatan jangka 1 (satu) tahun;
- b. Sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD pada tahun 2024 dengan susunan organisasi perangkat daerah yang baru; dan
- c. Sebagai salah satu dasar pembinaan dan pengendalian program/kegiatan Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan periode 1 (satu) tahun organisasi perangkat daerah yang baru agar selaras dengan kaidah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- b. Mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan.
- c. Mempermudah pengendalian dan pembinaan program/kegiatan jangka menengah serta program/kegiatan tahunan organisasi perangkat daerah yang baru.
- d. Untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyesuaikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

II.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Keberhasilan suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik dan keuangan. Semakin tinggi realisasi capaian fisik dan keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila program/kegiatan/sub kegiatan yang penyerapannya keuangan dan fisiknya 100% atau sesuai target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil. Untuk saat ini disamping pencapaian fisik dan keuangan juga dilihat sejauhmana tingkat manfaat dari program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun, sehingga sesuai dengan harapan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai komitmen untuk berusaha mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan begitu pula dengan capaian target di Renstra.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 melaksanakan 8 program, 18 kegiatan, dan 64 sub kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
 - a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian keuangan 98.65% dan capaian kinerja 100%
 - 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian keuangan 99.55% dan capaian kinerja 94.44%
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian keuangan 88.86% dan capaian kinerja 100%
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian keuangan 99.91% dan capaian kinerja 100%
 - b. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan capaian keuangan 96.91% dan capaian kinerja 100%
 - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian keuangan 99.07% dan capaian kinerja 100%

- d. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan capaian keuangan 96.06% dan capaian kinerja 100%
 - 2) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian keuangan 87.80% dan capaian kinerja 100%
 - e. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan capaian keuangan 97.92% dan capaian kinerja 99.33%
 - f. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
 - 1) Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan capaian keuangan 91.58% dan capaian kinerja 100%
2. Program dan Kegiatan tahun 2022 yang memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian keuangan 100% dan capaian kinerja 100%
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian keuangan 100% dan capaian kinerja 100%
 - 3) Kegiatan Penataan Organisasi dengan capaian keuangan 100% dan capaian kinerja 100%
 - b. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
 - 1) Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan capaian keuangan 100% dan capaian kinerja 100%
 - c. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
 - 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan capaian keuangan 100% dan capaian kinerja 100%
 - 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian keuangan 100% dan capaian kinerja 100%
 - d. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 - 1) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan capaian keuangan 100% dan capaian kinerja 100%
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan capaian keuangan 100% dan capaian kinerja 100%

3. Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Selama tahun 2022, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak ada yang capaiannya melebihi target yang ditentukan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2022, masih ada beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Keterbatasan personil sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana. Tahun 2022 masih ada 2 jabatan fungsional (kasi) yang masih kosong belum terisi pejabat.
2. Keterbatasan anggaran sebagai akibat pandemi covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan pelatihan, sosialisasi tidak bisa diberi anggaran makan dan minum sehingga pelaksanaannya kurang maksimal

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024 adalah:

1. Keterbatasan anggaran sebagai akibat pandemi covid-19 sehingga belum mampu membeli sarana prasarana baru untuk meningkatkan kinerja pegawai.
2. Keterbatasan jumlah personil sumber daya manusia (SDM) yang ada, pegawai yang pensiun tahun 2023 sejumlah 3 (tiga) orang dan tahun 2024 sejumlah 3 (tiga) orang.

Adapun Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah

1. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada semaksimal mungkin sehingga semua pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik.
2. Mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada agar seluruh pekerjaan dapat terselesaikan sesuai target yang direncanakan

Untuk mengukur capaian target di tahun 2022 dilaksanakan dengan melihat dari laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah melalui aplikasi E-Monev (sipanda).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.13.2.13.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
2.13.2.13.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	100	27 dokumen	27 dokumen	100
2.13.2.13.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan forum PD	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
		Jumlah Renja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	100	1 dokumen	1	100
		Jumlah Renja Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100	
2.13.2.13.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100	
2.13.2.13.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA;	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100	
2.13.2.13.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perjanjian kinerja;	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100	
		Jumlah dokumen ROPK	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100	
2.13.2.13.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA perubahan	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100	
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100	
2.13.2.13.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100	
		Jumlah dokumen TEPPRA	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100	100	
		Jumlah laporan e money	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	14 laporan	14 laporan	100	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100	
2.13.2.13.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	100	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	
2.13.2.13.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	
2.13.2.13.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	12 dokumen 1 dokumen	12 dokumen 1 dokumen	100 100	12 dokumen 1 dokumen	12 dokumen 1 dokumen	12 dokumen 1 dokumen	100 100	
2.13.2.13.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	54 orang	54 orang	100	54 orang	54 orang	54 orang	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01 .01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi dengan baik	54 orang	54 orang	100	54 orang	54 orang	54 orang	100	
2.13.2.13.01 .01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Berdasarakan	Jumlah pegawai yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2 orang	2 orang	100	2 orang	2 orang	2 orang	100	
2.13.2.13.01 .01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani	10 kegiatan	10 kegiatan	95,97	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100	
2.13.2.13.01 .01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	8 jenis	8 jenis	100	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100	
2.13.2.13.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	20 jenis	20 jenis	100	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100	
		Jumlah komputer yang tersedia	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	3 unit	100	
		Jumlah printer scanner yang terbeli	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	3 unit	100	
2.13.2.13.01 .01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli	18 jenis	18 jenis	100	18 jenis	18 jenis	18 jenis	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (SPPD, Kop Garuda, Penggandaan/ Fotocopy)	6 jenis 28000 lembar	6 jenis 28000 lembar	6 jenis 28000 lembar	100 100	6 jenis 28000 lembar	6 jenis 28000 lembar	100 100	
2.13.2.13.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Referensi/Surat Kabar (2 x 12 bulan)	24 bulan	24 bulan	18 bulan	75	24 bulan	24 bulan	100	
2.13.2.13.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah yang terbiayai untuk kegiatan rapat	21 orang 240 orang	21 orang 240 orang	21 orang 240 orang	100 100	21 orang 240 orang	21 orang 240 orang	100 100	
2.13.2.13.01 .01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	6 kegiatan 4000 buah	6 kegiatan 4000 buah	6 kegiatan 4000 buah	100 100	6 kegiatan 4000 buah	6 kegiatan 4000 buah	100 100	
2.13.2.13.01 .01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	4000 buah	4000 buah	4000 buah	100	4000 buah	4000 buah	100	
2.13.2.13.01 .01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang diterima atas pemanfaatan jasa air (1	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100	12 rekening	12 rekening	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Jumlah bulan yang diterima atas	12 rekening	12 rekening	100	12 rekening	12 rekening	100	
			Jumlah bulan yang diterima atas	24 rekening	24 rekening	100	24 rekening	24 rekening	100	
2.13.2.13.01	Penyediaan Jasa	Jumlah jasa kebersihan kantor dibayar (2 orang x 12 bulan)	24 bulan	24 bulan	100	24 bulan	24 bulan	24 bulan	100	
.01.2.08.04	Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	
		Jumlah retribusi sampah terbayarkan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	
2.13.2.13.01	Pemeliharaan Barang	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 kegiatan	18 kegiatan	100	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	100	
.01.2.09	Urusan Pemerintahan Daerah		18 kegiatan	18 kegiatan	100	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	100	
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayar	8 unit	8 unit	100	8 unit	8 unit	8 unit	100	
2.13.2.13.01	Penyediaan Jasa	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar	142 unit	142 unit	100	142 unit	142 unit	142 unit	100	
.01.2.09.02	Pemeliharaan Biaya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya (motor)								

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (mobil/ motor)	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100	17 unit	17 unit	100
2.13.2.13.01 .01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah faximile yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah kamera yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah LCD yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	1 unit 2 unit 64 unit 5 unit 2 unit 4 unit	1 unit 2 unit 64 unit 5 unit 2 unit 4 unit	17 unit	17 unit	100 100 100 100 100 100	1 unit 2 unit 64 unit 5 unit 2 unit 4 unit	1 unit 2 unit 64 unit 5 unit 2 unit 4 unit	100 100 100 100 100 100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			25 unit	25 unit	100	25 unit	25 unit	25 unit	100	
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	1 unit	100	
		Jumlah telepon yang terfasilitasi pemeliharannya	4 unit	4 unit	100	4 unit	4 unit	4 unit	100	
		Jumlah wireless yang terfasilitasi pemeliharannya	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	1 unit	100	
2.13.2.13.01	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitas ruang laktasi tersedia	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	1 unit	100	
.01.2.09.09		luas canopy yang dipasang	270 meter persegi	270 meter persegi	100	270 meter persegi	270 meter persegi	270 meter persegi	100	
		Luas dinding gedung yang terfasilitasi	2500 meter persegi	2500 meter persegi	100	2500 meter persegi	2500 meter persegi	2500 meter persegi	100	
2.13.2.13.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terpelihara	18 unit	18 unit	100	18 unit	18 unit	18 unit	100	
.01.2.09.10										

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen Pelayanan Publik dan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100	
2.13.2.13.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen hasil evaluasi SOP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	
		Jumlah dokumen hasil evaluasi Standar Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	
		Jumlah Dokumen pengukuran survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian/ SPIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	
2.13.2.13.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	
2.13.2.13.01.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kegiatan Kerja sama antar Desa yang terfasilitasi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	100	
2.13.2.13.01.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam	jumlah laporan koordinasi fasilitasi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah RAPERBUP tentang Tatacara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	100	
		Jumlah UPK BKAD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	18 UPK BKAD	18 UPK BKAD	18 UPK BKAD	18 UPK BKAD	18 UPK BKAD	100	100	
2.13.2.13.01.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu	100 persen	93.06 persen	97.22 persen	97.22 persen	99 persen	100	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01 .04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana	20 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	100	14 kegiatan	100	
2.13.2.13.01 .04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah bulan terfasilitasi iuran jaminan kesehatan perangkat desa jumlah kalurahan yang mendapatkan pembinaan administrasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	100	
2.13.2.13.01 .04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah lurah baru yang terfasilitasi bimtek Jumlah Raperbup yang dirancang	62 orang	62 orang	62 orang	62 orang	100	62 orang	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	jumlah kalurahan terfasilitasi penyusunan RKPKal jumlah kebijakan terkait pedoman penyusunan RKPKal	144 kalurahan 1 dokumen	144 kalurahan 1 dokumen	100 100	144 kalurahan 1 dokumen	144 kalurahan	144 kalurahan	100 100	
2.13.2.13.01.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kalurahan termonev Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan kalurahan jumlah kalurahan yang mendapatkan bimtek/ pembinaan pengelolaan keuangan kalurahan Jumlah Raperbup mengenai Dana Desa Jumlah Raperbup tentang pedoman penyusunan APBKal	36 kalurahan 144 kalurahan 1 dokumen	36 kalurahan 144 kalurahan 1 dokumen	100 100 100	36 kalurahan 144 kalurahan 1 dokumen	36 kalurahan 144 kalurahan	36 kalurahan 144 kalurahan	100 100 100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01 .04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BKM yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	24 BKM	24 BKM	100	24 BKM	24 BKM	24 BKM	100	
		Jumlah pengelola BUMDES yang mendapatkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan manajemen	225 pengelola BUMDES	225 pengelola BUMDES	100	225 pengelola BUMDES	225 pengelola BUMDES	225 pengelola BUMDES	100	
		Jumlah pengurus BUMDES yang mendapatkan pelatihan (16 angkatan x 25 orang)	16 angkatan	16 angkatan	100	16 angkatan	16 angkatan	16 angkatan	100	
		Jumlah pengurus BUMDES yang mendapatkan pelatihan (pokir) (2 angkatan x 25 orang)	2 angkatan	2 angkatan	100	2 angkatan	2 angkatan	2 angkatan	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Angkatan Sosialisasi bagi pamong kalurahan (5 angkatan x 15 orang)	5 angkatan	5 angkatan	5 angkatan	5 angkatan	100	5 angkatan	100	
2.13.2.13.01.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitas penyusunan profil kalurahan/ update data SID	18 kalurahan	18 kalurahan	18 kalurahan	18 kalurahan	100	18 kalurahan	100	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kalurahan termonev pengelolaan aset kalurahan Jumlah Kaur Tata Laksana yang memperoleh bimtek pengelolaan aset kalurahan (144 kalurahan)	36 kalurahan	36 kalurahan	36 kalurahan	36 kalurahan	100	36 kalurahan	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01 .04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi tingkat kemajuan kalurahan Jumlah kalurahan yang mendapatkan evaluasi dalam perlombaan desa (1 kapanewon 1 kalurahan) jumlah kalurahan yang mendapatkan pelatihan epdeskel (Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan)	1 dokumen 18 kalurahan 144 kalurahan	1 dokumen 18 kalurahan 144 kalurahan	100 100 100	1 dokumen 18 kalurahan 144 kalurahan	1 dokumen 18 kalurahan 144 kalurahan	100 100 100	100 100 100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 persen	70 persen	80 persen	80 persen	100	85 persen	100	
2.13.2.13.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan kalurahan yang terlaksana	4 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100	4 kegiatan	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.2.13.01 .05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah kalurahan yang mendapat pembinaan kelembagaan kalurahan	144 kalurahan	144 kalurahan	144 KPM	144 KPM	144 kalurahan	144 KPM	144 KPM	100
		Jumlah KPM yang mendapatkan pelatihan	144 KPM	144 KPM	144 KPM	144 KPM	144 KPM	144 KPM	144 KPM	100
		jumlah tim penggerak PKK kapanewon yang mendapatkan fasilitas pembinaan	18 TPPKK	18 TPPKK	18 TPPKK	18 TPPKK	18 TPPKK	18 TPPKK	18 TPPKK	100
2.13.2.13.01 .05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah laporan koordinasi/ fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah kalurahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah lomba TTG (Teknologi Tepat Guna) tingkat kabupaten yang terfasilitasi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
2.13.2.13.01.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan Keterbacaan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Frekuensi pencanangan BBGRM tingkat kabupaten di kalurahan berprestasi Jumlah kalurahan yang terfasilitasi Karya Bakti TNI Jumlah kalurahan yang terfasilitasi TMMD Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun	1 kali 4 kalurahan 3 kalurahan 23.02 tahun	1 kali 4 kalurahan 3 kalurahan 22.2 tahun	1 kali 4 kalurahan 3 kalurahan 22.5 tahun	1 kali 4 kalurahan 3 kalurahan 22.5 tahun	100 100 100 100	1 kali 4 kalurahan 3 kalurahan 22.7 tahun	1 kali 4 kalurahan 3 kalurahan 22.7 tahun	100 100 100 100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.2.13.01.02.		Jumlah kegiatan terkait pengendalian penduduk yang diimplementasikan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	100	11 kegiatan	11 kegiatan	100	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan wawasan kependudukan	2 orang	2 orang	2 orang	100	2 orang	2 orang	100	
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah sekolah siaga kependudukan dan sarana pendukungnya yang terbentuk	2 sekolah siaga kepend	2 sekolah siaga kepend	2 sekolah siaga kepend	100	2 sekolah siaga kepend	2 sekolah siaga kepend	100	
		Jumlah siswa yang terpapar wawasan kependudukan	200 siswa	200 siswa	200 siswa	100	200 siswa	200 siswa	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Jumlah kader yang mendapatkan pelatihan wawasan kependudukan	5 orang	5 orang	5 orang	100	5 orang	5 orang	100
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah kelompok Remaja Peduli Kependudukan dan sarana pendukungnya yang terbentuk	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	100	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	100
		Jumlah remaja yang terpapar wawasan kependudukan	30 remaja	30 remaja	30 remaja	100	30 remaja	30 remaja	30 remaja	100
		Jumlah sekolah jenjang pendidikan SLTP/MTs yang memperoleh advokasi	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	100	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	jumlah stakeholder yang terpapar wawasan kependudukan	4 OPD	4 OPD	4 OPD	4 OPD	4 OPD	4 OPD	100	100
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	jumlah laporan pelaksanaan sarasehan pemutakhiran data keluarga di kalurahan	144 laporan	144 laporan	144 laporan	144 laporan	144 laporan	144 laporan	100	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	jumlah laporan rakor pengendalian program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100	100	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten yang terlaksana	10 kegiatan	10 kegiatan	100	10 kegiatan	10 kegiatan	100	100	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah buku Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disusun	1 buku	1 buku	100	1 buku	1 buku	100	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen pemetaan kependudukan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen kajian dampak kependudukan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah peserta mendapat sosialisasi pemutakhiran data kependudukan	40 OPD/ Kapanewon	40 OPD/ Kapanewon	100	40 OPD/ Kapanewon	100	40 OPD/ Kapanewon	100	
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah laporan pemutakhiran data keluarga	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	100	2 laporan	100	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah kader kalurahan yang mendapat pelatihan dalam pencatatan dan pengumpulan data keluarga	144 orang	144 orang	100	144 orang	100	144 orang	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan Pelayanan KB	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan Pengendalian Lapangan Jumlah laporan money pencatatan dan pelaporan program KKBPk (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100
			1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBP	Jumlah laporan pembinaan pencatatan dan pelaporan program KKBP (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	100	1 laporan	100	
2.14.2.13.01.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi	8.10 persen	8.39 persen	100	8.30 persen	100	8.25 persen	100	
			10 kegiatan	10 kegiatan	100	10 kegiatan	100	10 kegiatan	100	
2.14.2.13.01.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kalurahan yang mendapatkan KIE melalui media luar ruangan, cetak dan elektronik (BOKB)	144 kalurahan	144 kalurahan	100	144 kalurahan	100	144 kalurahan	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.2.13.01 .03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	Jumlah koordinasi kapanewon (BOKB) Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi BOKB (BOKB) Jumlah pengendalian program tingkat kabupaten (BOKB) Jumlah pertemuan tri komponen (BOKB) Jumlah orientasi lini lapangan PPKDB dan Sub PPKDB (BOKB)	4 kali 600 orang 4 kali 4 kali 1 kali	4 kali 600 orang 4 kali 4 kali 1 kali	100 100 100 100 100	4 kali 600 orang 4 kali 4 kali 1 kali	4 kali 600 orang 4 kali 4 kali 1 kali	4 kali 600 orang 4 kali 4 kali 1 kali	100 100 100 100 100	
2.14.2.13.01 .03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah pertemuan IMP (BOKB) Jumlah pertemuan pengelolaan data SIGA (BOKB) Jumlah kegiatan Pendayagunaan Tenaga	2 kali 2 kali 1 kegiatan	2 kali 2 kali 1 kegiatan	100 100 100	2 kali 2 kali 1 kegiatan	2 kali 2 kali 1 kegiatan	2 kali 2 kali 1 kegiatan	100 100 100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.2.13.01 .03.2.02		Jumlah penggerak kader IMP	8 kali	8 kali	8 kali	100	8 kali	8 kali	100	
2.14.2.13.01 .03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten yang terlaksana	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	100	11 kegiatan	11 kegiatan	100	
2.14.2.13.01 .03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes yang menerima alat dan obat kontrasepsi (BOKB)	45 faskes	45 faskes	45 faskes	100	45 faskes	45 faskes	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.2.13.01 .03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Visitasi dan registrasi pada fasilitas kesehatan sebagai pelayanan KB (BOKB)	45 kali	45 kali	100	45 kali	45 kali	100	45 kali	100
2.14.2.13.01 .03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan kontrasepsi IUD, implant, MOP, dan MOW (BOKB)	1655 aseptor	1655 aseptor	100	1655 aseptor	1655 aseptor	100	1655 aseptor	100
2.14.2.13.01 .03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah balai penyuluhan KB yang terfasilitasi kelengkapan balai (DAK Fisik)	7 balai penyuluhan KB	7 balai penyuluhan KB	100	7 balai penyuluhan KB	7 balai penyuluhan KB	100	7 balai penyuluhan KB	100
		Jumlah balai penyuluhan KB yang terfasilitasi rehab balai (DAK Fisik)	11 balai penyuluhan KB	11 balai penyuluhan KB	100	11 balai penyuluhan KB	11 balai penyuluhan KB	100	11 balai penyuluhan KB	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Jumlah kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mendapat Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	144 kader	144 kader	144 kader	100	144 kader	144 kader	100
2.14.2.13.01 .03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah warga yang mendapatkan layanan Pemasangan IUD dan Implant	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	100	160 orang	160 orang	100
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.2.13.01 .03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kelompok yang Kelompok Bina Keluarga Balitanya dibina (BOKB)	72 kelompok	72 kelompok	100	72 kelompok	72 kelompok	72 kelompok	100	
2.14.2.13.01 .03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kelompok yang Kelompok Bina Keluarga Lansianya dibina (BOKB) Jumlah kelompok yang Kelompok Bina Keluarga Remajanya dibina (BOKB)	50 kelompok 45 kelompok	50 kelompok 45 kelompok	100 100	50 kelompok 45 kelompok	50 kelompok 45 kelompok	50 kelompok 45 kelompok	100 100	
		Jumlah kelompok yang Kelompok Kampung KB (BOKB)	36 kampung KB	36 kampung KB	100	36 kampung KB	36 kampung KB	36 kampung KB	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah kelompok yang Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remajanya dibina (BOKB)	36 kelompok	36 kelompok	36 kelompok	100	36 kelompok	36 kelompok	100	
		Jumlah kelompok yang kelompok UPPKS nya dibina (BOKB)	56 kelompok	56 kelompok	56 kelompok	100	56 kelompok	56 kelompok	100	
		persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	82 persen	75 persen	75 persen	100	77 persen	77 persen	100	
2.14.2.13.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Jumlah kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	95,56	10 kegiatan	10 kegiatan	100	
2.14.2.13.01.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah kelompok yang mendapatkan BKB Kit Stunting (DAK Fisik)	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	100	20 kelompok	20 kelompok	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.2.13.01.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang mendapatkan kit siap nikah (DAK Fisik) Jumlah calon calon pengantin yang mendapatkan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting 1000 HPK (BOKB)	2 kelompok 1620 kelompok	2 kelompok 1620 kelompok	2 kelompok 1620 kelompok	100 100	2 kelompok 1620 kelompok	2 kelompok 1620 kelompok	100 100	
2.14.2.13.01.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pemahaman kesehatan reproduksi (BOKB) Jumlah kelompok yang Kelompok Bina Keluarga Balitanya dibina (BOKB)	1620 kelompok 72 kelompok	1620 kelompok 72 kelompok	1620 kelompok 72 kelompok	100 100	1620 kelompok 72 kelompok	1620 kelompok 72 kelompok	100 100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah kelompok yang Kelompok Bina Keluarga Lansianya dibina (BOKB)	50 kelompok	50 kelompok	50 kelompok	100	50 kelompok	50 kelompok	100	
		Jumlah kelompok yang Kelompok Bina Keluarga Remajanya dibina (BOKB)	45 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	100	45 kelompok	45 kelompok	100	
		Jumlah kelompok yang Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remajanya dibina (BOKB)	36 kelompok	36 kelompok	36 kelompok	100	36 kelompok	36 kelompok	100	
		Jumlah kelompok yang kelompok UPPKS nya dibina (BOKB)	56 kelompok	56 kelompok	56 kelompok	100	56 kelompok	56 kelompok	100	
		Jumlah keluarga yang tereduksi pengasuhan 1000 HPK (BOKB)	9720 kelompok	9720 kelompok	8544 kelompok	87,90	9720 kelompok	9720 kelompok	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah penyuluhan KB tingkat kapanewon (BOKB)	6 kali	6 kali	100	6 kali	6 kali	6 kali	100	
		Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	100 persen	0 persen	100	35 persen	70 persen	70 persen	100	
4.01.2.13.01.04.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah kegiatan Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1 kegiatan	0 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
4.01.2.13.01.04.2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan pemerintah	1 dokumen	0 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	
4.01.2.13.01.04.2.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Jumlah Lurah dan Pamong Kalurahan yang diberikan peningkatan kapasitas	432 lurah/ pamong kal	0 lurah/ pamong kal	100	432 lurah/ pamong kal	432 lurah/ pamong kal	432 lurah/ pamong kal	100	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah lurah yang dikukuhkan sebagai pemangku keistimewaan	60 lurah	0 lurah	60 lurah	60 lurah	100	60 lurah	100	
		Perbup disiplin pamong kalurahan	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal di bidang Keluarga Berencana terdiri dari 3 jenis Standar Pelayanan Minimal dan 9 indikatornya yaitu:

1. Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dengan indikator : Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) yang isterinya dibawah usia 20 tahun. Juga indikator Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) dengan penjelasan bahwa pengertian yang masih aktif adalah PUS yang masih menstruasi walaupun umurnya 49 tahun. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB, Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB). Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).
2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dengan indikator : Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun.
3. Penyediaan informasi data mikro, dengan indikator : Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahunnya.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM)	Satuan (IKU, SPM)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)											
1	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	persen	75,00%	80%	85%	90%	75,00%	80,00%	80%	85%	Jumlah kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu : Jumlah seluruh kalurahan x 100%	
2	persentase desa mandiri	persen	13,89%	17,36%	20,83%	24,31%	13,89%	29,16%	17,36%	20,83%	Jumlah desa mandiri : jumlah seluruh desa x 100%	
3	Nilai AKIP PD	persen	76,11	78,11	80,11	82,11	77,11	75,17	78,11	80,11	diambil dari data e-sakip kab. Gunungkidul	
4	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	persen	78,08%	78,10%	78,12%	78,14%	78,08%	99,07%	78,10%	78,12%	jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi modern : .Jumlah PUS x 100%	
B	SPM Bidang Keluarga Berencana											
1	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	persen	78,24%	78,50%	78,60%	78,70%	78,24%	67,58%	78,50%	78,60%	jumlah PA : jumlah PUS x 100%	
2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (persen	8,39%	8,33%	8,30%	8,25%	8,35%	22,00%	8,33%	8,30%	jumlah Unmet Need : jumlah PUS x 100%	
3	Cakupan Anggota Bina keluarga Balita (BKB)	persen	75,20%	75,22%	75,24%	75,26%	75,20%	9,10%	75,22%	75,24%	jumlah anggota : jumlah sasaran x 100%	

No	Indikator (IKU, SPM)	Satuan (IKU, SPM)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
4	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	persen	67,70%	67,80%	67,90%	68,00%	67,70%	69,02%	67,80%	67,90%	jumlah peserta KB : jumlah anggota x 100%	
5	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKP)	rasio	0,40	0,38	0,38	0,39	0,40	0,33	0,38	0,38	jumlah PLKB : jumlah desa	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 antara lain :

- a. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² merupakan kabupaten terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kondisi geomorfologi yang bervariasi memberikan peluang investasi yang bervariasi pula sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing.
- b. Penambahan jumlah Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun ke tahun menunjukkan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- c. Masih belum optimalnya pedoman dari Pusat dalam penyusunan perencanaan sehingga masih banyak terjadi perubahan di tengah-tengah pelaksanaan program.
- d. Kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
- e. Semakin baik peran serta masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan.
- f. Alokasi dana yang langsung ke Desa sudah semakin besar.
- g. DAK Bidang KB terlaksana dengan baik tetapi masih banyak kendala terutama karena penjabaran juknis yang terbatas pada kegiatan tertentu, sehingga tidak optimal dalam penyerapan anggaran.

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan analisis diatas dan kondisi riil saat ini dapat disimpulkan faktor- faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Peluang.
 1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
 2. Pelaksanaan otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi desa yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat
 4. Adanya program-program terpadu dari pusat dan provinsi secara lintas sektor.

5. Wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau 46 % dari total wilayah Provinsi DIY sehingga mempunyai potensi kekurangan untuk pengembangan wilayah yang memadai.
6. Adanya budaya gotong royong di masyarakat sehingga menunjang pemberdayaan dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelestarian hasil pembangunan di desa.
7. Masih banyak potensi yang ada di masyarakat sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Potensi dukungan penduduk perempuan dalam upaya pencapaian sasaran penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan sex ratio penduduk Kabupaten Gunungkidul adalah 93,69 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 6,31 persen lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
9. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan capaian peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat secara signifikan, sehingga kesejahteraan anak, perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih terus untuk diupayakan.
10. Proporsi perempuan pada jabatan struktural, jabatan publik, anggota legislatif hingga pengusaha skala besar sudah meningkat, namun demikian kompetensi dan rasio perbandingan perempuan terhadap laki-laki masih perlu dioptimalkan.
11. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional.
12. Telah terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Teknis Operasionalnya.
13. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung program KB Nasional
14. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga

b. Ancaman

1. Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan yang semakin besar kepada pemerintah pusat
2. Sarana dan prasarana daerah yang belum dapat berkompetisi dalam lingkup regional.
3. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa, longsor dan angin puting beliung. Juga masih belum teratasinya permasalahan kekeringan di musim kemarau.
4. Persaingan antar daerah yang semakin meningkat.
5. Pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial yang tidak terbatas.
6. Pemahaman keyakinan yang mempengaruhi ketidakikutsertaan ber-keluarga berencana.
7. Dana Desa yang sudah besar dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan optimal.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas, kemudian diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

a. Kekuatan.

1. Aparatur pemerintah yang cukup memadai baik dari aspek kualitas dan menguasai bidang tugasnya.
2. Suasana interaksi lingkungan kerja kondusif.
3. Adanya Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Semangat kerja yang cukup baik.
5. Adanya komitmen dari aparat/pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akan menguatkan etos kerja.
6. Kondisi gedung kantor yang sudah semakin representatif.
7. Sudah adanya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
8. Sudah tersusunnya Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk Tahun 2020.
9. Prestasi-prestasi yang diraih oleh desa atau kelompok di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Terbentuknya Desa Layak Anak di Kabupaten Gunungkidul.

b. Kelemahan

1. Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal.
2. Belum adanya regenerasi aparatur pemerintah akibat kebijakan moratorium PNS.
3. Belum optimalnya penataan personil sesuai kompetensi yang dimiliki.
4. Sarana dan prasarana belum memadai, terutama parkir kendaraan.
5. Keterlambatan terbitnya Permendes, PDT & Transmigrasi beserta Permenkeu (PMK) sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dana desa.
6. Perubahan rincian dan perubahan tahapan penyaluran Dana Desa yang mengakibatkan terlambatnya penyusunan Peraturan Bupati tentang Dana Desa.

Berdasarkan analisa tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pelestarian hasil pembangunan di desa belum Optimal sehingga masih perlu ditingkatkan.
2. Potensi masyarakat belum digali dan dikelola secara Optimal, sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara signifikan.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana sudah baik, namun masih perlu dioptimalkan
4. Akses dan kualitas pelayanan KB perlu ditingkatkan

5. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah dalam rangka *good governance*.
6. Masih perlu kerja keras dari para pelaksana kegiatan terkait dana desa untuk dapat melaksanakan Undang-Undang Desa sebagaimana yang diharapkan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya :

1. Kemandirian masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan serta pelestarian hasil pembangunan di desa masih rendah.
2. Belum tercapainya upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat.
3. Akses dan kualitas pelayanan KB belum optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian pembangunan serta pelestarian hasil pembangunan di desa masih rendah.
2. Turunnya Permendes PDT & Transmigrasi yang terkait petunjuk teknis Dana Desa perlu pemahaman di tingkat daerah dan desa.
3. Potensi ekonomi masyarakat belum digali dan dikelola secara maksimal.
4. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan capaian peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat secara signifikan.
5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana kurang maksimal dan perlu komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang berkelanjutan.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional (Standar Pelayanan Minimal) Untuk mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul terkait dengan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berikut dijabarkan secara rinci kedua hal tersebut yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, bidang pemberdayaan perempuan, bidang keluarga berencana, dan bidang pemerintahan. Gambaran kondisi dan permasalahan ini selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan, strategi, dan program kegiatan.

a. Kondisi Saat Ini

1. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
2. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
3. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
5. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.

6. Kondisi sebagian jalan masih belum sempurna khususnya jalan kabupaten dan desa.
7. Belum seluruh kecamatan terjangkau trayek angkutan umum.
8. Masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan.
9. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur daerah.
10. Belum efektifnya pengawasan melekat.
11. Kecenderungan dari tahun ke tahun meningkat dalam pelanggaran disiplin aparatur daerah.
12. Masih tingginya angka kelahiran oleh perempuan dibawah usia 20 tahun.
13. Perlunya pengetahuan terkait dampak kependudukan dan Keluarga Berencana.

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
2. Masih tingginya angka Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
3. Tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan.
4. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
5. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai.
6. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
7. Kualitas sumber daya manusia Pemerintah belum merata, hal ini dilihat dari jenjang pendidikan yang ada tingkat SLTA masih mendominasi.
8. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal.
9. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.
10. Kesadaran terhadap norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera belum optimal

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut telah dirumuskan misi, tujuan (*grand strategy*) dan sasaran pembangunan jangka panjang yang sekaligus merupakan tujuan dan sasaran yang harus diemban dan diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 – 2026, antara lain:

c. Misi

1. Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
2. Misi 2 : Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

d. Grand Strategy.

1. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat
2. Peningkatan koordinasi penunjang urusan Perangkat Daerah
3. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan peningkatan keluarga sejahtera
4. Peningkatan pengendalian penduduk dengan menurunkan laju pertumbuhan penduduk

e. Sasaran.

1. Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat
2. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat
3. PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan.

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan program KB terutama di tingkat kabupaten/kota.
2. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas KB (PPLKB) di tingkat kecamatan dan petugas lapangan KB (PLKB) di tingkat kelurahan/desa.
3. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan anggaran program KB di kabupaten/kota yang kurang memadai.
4. Meningkatkan pembinaan institusi KB yang berada di lini lapangan.
5. Meningkatkan sinergi kebijakan dalam pembangunan kependudukan dan KB baik di pusat maupun di daerah.
6. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa

b. Peluang.

1. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional
2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten /Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Pusat dan Kabupaten/Kota.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung program KB Nasional.
5. Telah terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Teknis Operasionalnya.
6. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun reuiu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul, kami sajikan dalam table berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
Rencana Rancangan Awal RKPD											
Hasil Analisis Kebutuhan											
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.267.706.204	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.576.776.670	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.128.998.304	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	5.744.180.270	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100	2.765.132.704	
	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	82.925.098	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)	4.433	32.259.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	59.175.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	27.394.900	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	530.000	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	530.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	890.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	890.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17 laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	11 1.125.000	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	32 laporan	4.250.098	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	900.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	4.885.930.172	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (Laporan)	14	2.244.607.704	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 orang bulan	4.872.930.172	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	434	2.216.187.704	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10	11	900.000	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13		27.520.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	4.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)	6		1.200.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	4.600.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	1.200.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum terlayani	100 persen	212.035.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani (Kegiatan)	10	105.291.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1.100.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	55.235.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	33.327.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 paket	18.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(DPMKP2KB, Wonosari)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	2.400.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	22.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	2.400.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	496 dokumen	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	247	1.200.000	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	3.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 laporan	95.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	38	37.244.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	26.620.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	37.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Unit)	17	-	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah paket mebel yang disediakan	14 unit	22.000.000	Pengadaan Mebel	8 (DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	193.690.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana (Kegiatan)	6	105.348.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	20.320.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	150.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	135.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	104.598.500	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	38.370.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	328.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Unit)	438	276.425.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	242 unit	174.370.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya (unit)	242	207.650.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah mebel yang dipelihara	62 unit	4.630.000	Pemeliharaan Mebel	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	28 unit	22.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	1.500.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	1 unit	115.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	65.275.000	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	12.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	1.500.000		
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan	100 persen	10.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase Perjanjian Kerjasama Desa Yang Diimplementasikan (%)	100	2.110.000		
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		persentase kerja sama antar desa yang terfasilitasi	100 persen	10.000.000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		Jumlah Fasilitasi Kerja sama antar Desa (Dokumen)	18	2.110.000		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	18 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	18	2.110.000		

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu	3	99 persen	3.589.596.400	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8	9	11	3.266.560.600	12
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase kalurahan sasaran pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan kalurahan	100	100 persen	3.589.596.400	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana (Kegiatan)	14	3.266.560.600	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	13	dokumen	2.749.436.400	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	5.999.900	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	3	dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	3	6.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	145 dokumen	30.900.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	146	6.000.000	12
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	580 dokumen	97.430.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	721	36.020.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	90 orang	10.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	90	29.220.000	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	2 dokumen	10.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2	1.500.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	2 dokumen	79.500.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	18	11.020.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1 laporan	310.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	10	11	18.000.000	12
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 dokumen	8.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	13	2.993.565.600		
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Desa	19 dokumen	18.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	18	600.000		
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen hasil pengelolaan aset	290 dokumen	81.330.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	288	36.020.000		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	432 orang	10.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Dokumen)	432	2.500.000		

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	144 laporan	10.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	10	11	12
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kalurahan	3 dokumen	160.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	118.115.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	90 persen	233.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan (%)	90	95.195.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan kalurahan yang terlaksana	100 persen	233.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 4	11 95.195.000	12
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kalurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	162 lembaga	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	153	87.290.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen hasil fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 dokumen	3.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Delapan)	1	2.865.000	12
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	30.000.000						
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen hasil fasilitas penyelenggaraan ketertarikan, dan perlindungan masyarakat desa	5 dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Perlindungan Masyarakat Desa	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	5.040.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.930.426.800	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.841.146.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		3 Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun	5 22,8 tahun	6 596.484.800	7 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	8	9 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25 - 49 Tahun (Tahun)	10 22.8	11 28.420.000	12
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		persentase kebijakan daerah terkait pengendalian penduduk yang diimplementasikan	100 persen	196.992.800	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (Satuan	10	1.200.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatukan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS jalur non formal dan informal	10 satuan pendidikan	196.992.800	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	10 1	11 1.200.000	12
	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		persentase ketersediaan jenis data dan informasi terkait pendendalian penduduk	76 persen	399.492.000	Pemetaan Perkiraan Pendendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Pemetaan Perkiraan Pendendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	27.220.000	
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	1 dokumen	399.492.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	1	27.220.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,20 persen	4.719.190.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10	11	12
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		persentase PUS yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	82 persen	1.490.730.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	18	650.100.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	18 laporan	1.490.730.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	18	650.100.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	100 persen	691.200.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (Orang)	1573	542.400.000	12
	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pengerakan kader IMP	1573 orang	691.200.000	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1573	542.400.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		persentase terfasilitasinya alat dan obat kontrasepsi serta sarana pelayanan KB pada fasilitas kesehatan	100 persen	2.387.500.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten yang terlaksana (Kegiatan)	4	2.040.926.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	55 laporan	131.385.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	10	11 80.259.000	12
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	3000 orang	925.200.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3000	1.719.880.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	18 balai penyuluh KB	1.072.815.000						

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak- Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah warga yang mendapatkan pelayanan konseling KB	160 orang	258.100.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya (Laporan)	1	213.567.000	
						Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	1	27.220.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB		3 persentase kampung KB yang terbina	5 100 persen	6 149.760.000	7 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	8 (DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKIDUL)	9 Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Kampung)	10 38	11 582.500.000	12
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (Kampung)	38 kampung	149.760.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKIDUL)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	38	582.500.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	79 persen	1.614.752.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	8	9 Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Aktif (%)	10 79	11 2.996.800.000	12
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina	79 persen	1.614.752.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok)	1021	2.996.800.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	1021 kelompok	1.614.752.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	1053	2.996.800.000	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.118.058.200	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH				1.118.058.200	SEKRETARIAT DAERAH				493.870.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEJISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	80 persen	1.118.058.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEJISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	8	Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan (Persentase)	80 persen	493.870.000	12
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Persentase kalurahan melaksanakan Penataan Kelembagaan sesuai dengan regulasi	100 persen	1.118.058.200	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Lembaga)	144	493.870.000	
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan	144 lembaga	1.118.058.200						
						Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	2	493.870.000	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				624.188.200						

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jumlah Lurah dan Pamong Kalurahan yang diberikan peningkatan kapasitas	5 1861 lura h/ pamong kal.	6 624.188.200	7	8	9	10	11	12

2.4. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Melalui usulan dari bawah lewat musrendus, musrendes, musrebang kecamatan dan musrenbang kabupaten.
2. Melalui proposal dari masyarakat/organisasi kemasyarakatan, PKK yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Berdasarkan usulan dari dinas terkait.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024.

Adapun tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki usulan program dan kegiatan pembangunan dari pemangku kepentingan Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Tidak ada usulan						
JUMLAH							
				-	-	-	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 8 (delapan) program strategis terbagi atas 7 (tujuh) program utama dan 1 (satu) program penunjang, meliputi:

a. Program Utama

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5. Program Pengendalian Penduduk
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

b. Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

a. Potensi BKKBN :

1. Reputasi dan pengalaman dalam pengendalian penduduk melalui program KB.
2. Keberadaan Pusdiklat dan penelitian pembangunan kependudukan dan KB yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dan mitra kerja.
3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai
4. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah serta non pemerintah.
5. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB yang mengharuskan menerapkan manajemen pelayanan prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
6. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum optimal.

b. Permasalahan.

1. Kesenjangan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur BKKBN.
2. Sarana dan prasarana operasional penggerakan masyarakat yang kurang memadai.
3. Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat kepada kabupaten /kota dalam pelaksanaan program KB tidak optimal.

c. Tantangan.

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan program KB terutama di tingkat kabupaten/kota.

2. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas KB (PPLKB) di tingkat kecamatan dan petugas lapangan KB (PLKB) di tingkat kelurahan/desa.
 3. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga lapangan merata.
 4. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan anggaran program KB di kabupaten/kota yang kurang memadai.
 5. Meningkatkan pembinaan institusi KB yang berada di lini lapangan.
 6. Meningkatkan sinergi kebijakan dalam pembangunan kependudukan dan KB baik di pusat maupun di daerah.
- d. Peluang
1. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional.
 2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten /Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Pusat dan Kabupaten/Kota.
 4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung program KB Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan. Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2025 dan Rencana Stratgis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik, meliputi 2 sasaran :
 - a) akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat.
 - b) Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat
2. Terwujudnya pengendalian angka kelahiran, meliputi 1 sasaran :
 - a) PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat

Berikut disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu tahun 2026	100%
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2026	31.25%
2	Terwujudnya pengendalian angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	1.91

TABEL 3.2
SASARAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1	akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	90%
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	24.31%
2	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	Nilai AKIP PD	82.5
3	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	78.14%

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	IKU	Indikator IKU	Target Kinerja IKU
1	akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	90%
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	24.31%
2	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	78.14%

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program prioritas RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pihak yang menerima terdiri dari masyarakat meliputi kelompok masyarakat, keluarga, perempuan, anak serta lembaga desa. Sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul kedalam rencana kegiatan untuk setiap program.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Dalam implementasi misi sebagai upaya terwujudnya visi Kabupaten Gunungkidul diarahkan pada sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM.
2. Reformasi Birokrasi.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumlah program dan kegiatan selalu mengacu sesuai yang dijabarkan lewat Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, jumlah program ada 8, jumlah kegiatan ada 18, dan jumlah sub kegiatan ada 59.

Program lintas Perangkat Daerah merupakan program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melibatkan Perangkat Daerah lain. Pada rencana tahun 2024 program ini meliputi :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Pengendalian Penduduk
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sasaran dan program/kegiatan/ sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 berdasarkan pengelompokan 6 (enam) prioritas pembangunana disajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat				2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.128.998.304	DPMKP2KB
		Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	Nilai AKIP PD	82,5	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.765.132.704	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.259.900	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.394.900	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	530.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	530.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	890.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	890.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.125.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.244.607.704	DPMKP2KB
					2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.216.187.704	DPMKP2KB
					2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	900.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.520.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	1.200.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.05.0003	Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.200.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06	Administrasi Umum	105.291.600	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0001	Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.100.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.327.600	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	
					2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.400.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.244.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.620.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	-	DPMKP2KB
					2.13.01.2.07.0005	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	DPMKP2KB
					2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Mebel	-	DPMKP2KB
					2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	DPMKP2KB
					2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.348.500	DPMKP2KB
					2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.598.500	DPMKP2KB
					2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	600.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.425.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.650.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	500.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.275.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000	DPMKP2KB
		akuntabilitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	24,31%	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.110.000	DPMKP2KB
					2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	2.110.000	DPMKP2KB
					2.13.03.2.01.0001	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2.110.000	DPMKP2KB
					2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	95.195.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	95.195.000	DPMKP2KB
					2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	87.290.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.865.000	DPMKP2KB
					2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5.040.000	DPMKP2KB
		akuntabilitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	90,00%	3. 2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.266.560.600	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.266.560.600	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.999.900	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	6.000.000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	6.000.000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	36.020.000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	29.220.000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1.500.000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	11.020.000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	18.000.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.993.565.600	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	600.000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	36.020.000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	2.500.000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2.000.100	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	118.115.000	DPMKP2KB
				4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	493.870.000	DPMKP2KB
				4.01		SEKRETARIAT	493.870.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEJISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	493.870.000	DPMKP2KB
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	493.870.000	DPMKP2KB
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	493.870.000	DPMKP2KB
Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM meningkat				2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.841.146.000	DPMKP2KB
		PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	78,14%	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	28.420.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.200.000	DPMKP2KB
					2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1.200.000	DPMKP2KB
					2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	27.220.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	27.220.000	DPMKP2KB
					2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.815.926.000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	650.100.000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa	650.100.000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	542.400.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	542.400.000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.040.926.000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	80.259.000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.719.880.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	213.567.000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	27.220.000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	582.500.000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	582.500.000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.996.800.000	DPMKP2KB
					2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.996.800.000	DPMKP2KB
					2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.996.800.000	DPMKP2KB

Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, kami sajikan dalam tabel:

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten gunungkidul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	2.765.132.704				5.583.860.533
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah (Indeks)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	4.433	32.259.900			4.433	87.070.754
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	4	27.394.900	Dana Transfer Umum-Dana		3	62.133.250
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		1	1.575.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.13.01. 2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKID UL)	1	530.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	1.575.000	
2.13.01. 2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKID UL)	2	890.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	2	2.625.000	
2.13.01. 2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKID UL)	2	890.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2	2.100.000	
2.13.01. 2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKID UL)	17	1.125.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	17	12.600.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.13.01. 2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	4	900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4	4.462.504	
2.13.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	14	2.244.607.704		14	4.678.625.279	
2.13.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	434	2.216.187.704	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	448	4.664.625.279	
2.13.01. 2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	5.500.000	
2.13.01. 2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	13	27.520.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13	8.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
2.13.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	6	1.200.000		6	4.600.000		
2.13.01. 2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	6	1.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	6	4.600.000		
2.13.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani (Kegiatan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	10	105.291.600		10	226.640.000		
2.13.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	12	1.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12	12.650.000		
2.13.01. 2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	12	33.327.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12	60.235.000		
2.13.01. 2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(DPMKP2KB, WONOSARI)	12	2.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12	18.900.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.13.01. 2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	12	2.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12	23.200.000	
2.13.01. 2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	247	1.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	365	1.890.000	
2.13.01. 2.06.000 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	12	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12	3.000.000	
2.13.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	38	37.244.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	45	101.765.000	
2.13.01. 2.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	4	26.620.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4	5.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.13.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Unit)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	17	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		17	37.000.000
2.13.01. 2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	0	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		14	22.000.000
2.13.01. 2.07.001 0	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	0	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3	15.000.000
2.13.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana (Kegiatan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	6	105.348.500			6	203.374.500
2.13.01. 2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	12	150.000	Dana Transfer Umum- Dana		12	21.336.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.13.01. 2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	48	104.598.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	48	141.750.000	
2.13.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	12	600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	12	40.288.500	
2.13.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Unit)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	438	276.425.000		438	346.550.000	
2.13.01. 2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	242	207.650.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	242	184.170.000	
2.13.01. 2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	10	500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	62	4.630.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.13.01. 2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	3	1.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	29	25.000.000	
2.13.01. 2.09.000 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	65.275.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	120.000.000	
2.13.01. 2.09.001 0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	5	1.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	15	12.750.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Perjanjian Kerjasama Desa Yang Diimplementasikan (%)		100	2.110.000			10.500.000	
2.13.03. 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerja sama antar Desa (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	18	2.110.000		18	10.500.000	
2.13.03. 2.01.000 1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	18	2.110.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	18	10.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kalurahan Yang Menetapkan APBKal Tepat Waktu (%)		99	3.266.560.600					4.031.764.720
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana (Kegiatan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	14	3.266.560.600			14		4.031.764.720
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	5.999.900					2.860.658.220
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	3	6.000.000				3	20.000.000
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	146	6.000.000				145	15.390.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.13.04. 2.01.000 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	721	36.020.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	580	113.520.000	
2.13.04. 2.01.000 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	90	29.220.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	90	10.000.000	
2.13.04. 2.01.000 7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	2	1.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2	10.000.000	
2.13.04. 2.01.000 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	18	11.020.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2	79.500.000	
2.13.04. 2.01.000 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Peningkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Peningkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	18.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	610.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.13.04. 2.01.001 0	Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	13	2.993.565.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	8.400.000	
2.13.04. 2.01.001 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	18	600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	18	18.900.000	
2.13.04. 2.01.001 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	288	36.020.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	290.00	85.396.500	
2.13.04. 2.01.001 4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	144	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	432	10.000.000	
2.13.04. 2.01.001 6	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	144	2.000.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	144	10.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
2.13.04. 2.01.001 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	118.115.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3	180.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Keterlibatan Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan (%)		90	95.195.000			213.150.000
2.13.05. 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	4	95.195.000		4	213.150.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.13.05. 2.01.000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	153	87.290.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	162	52.500.000	
2.13.05. 2.01.000 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	2.865.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	3.150.000	
2.13.05. 2.01.000 8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	5.040.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5	157.500.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.841.146.000			5.645.113.450	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25 - 49 Tahun (Tahun)		22.8	28.420.000				642.086.450
2.14.02. 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (Satuan Pendidikan) Kuantitas Penduduk	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (Satuan Pendidikan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	10	1.200.000			10	219.621.450
2.14.02. 2.01.000 9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	1.200.000			10	219.621.450

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.14.02. 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	27.220.000		1	422.465.000	
2.14.02. 2.02.002 0	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	27.220.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1	422.465.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)		8.20	3.815.926.000			3.388.275.000	
2.14.03. 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	18	650.100.000		18	1.490.730.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.14.03. 2.01.001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKID UL)	18	650.100.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	18	1.490.730.000	
2.14.03. 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (Orang)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKID UL)	1573	542.400.000		1.573	691.200.000	
2.14.03. 2.02.000 4	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKID UL)	1573	542.400.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	1573	691.200.000	
2.14.03. 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten yang terlaksana (Kegiatan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGGKID UL)	4	2.040.926.000		4	1.056.585.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.14.03. 2.03.000 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	55	80.259.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	55	131.385.000	
2.14.03. 2.03.000 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	3000	1.719.880.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	3000	925.200.000	
2.14.03. 2.03.000 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	213.567.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	18	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.14.03. 2.03.001 1	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	1	27.220.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	-	
2.14.03. 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Kampung)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	38	582.500.000		38	149.760.000	
2.14.03. 2.04.000 6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	38	582.500.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	38	149.760.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Aktif (%)		79	2.996.800.000				1.614.752.000
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	1.021	2.996.800.000			1.021	1.614.752.000
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKIDUL)	1053	2.996.800.000			1021	1.614.752.000
4	UNSUR PENDUKUNG				493.870.000				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				493.870.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan (Persentase)		80	493.870.000		80	-	
4.01.04. 5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Lembaga)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	144	493.870.000		144	-	
4.01.04. 5.01.000 7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/Kelurah an	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	(DPMKP2KB, KAB. GUNUNGKID UL)	2	493.870.000	Dana Keistimewa an DIY	0	-	
			TOTAL		13.464.014.304			15.484.388.703	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

1. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan, Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Forum Perangkat Daerah

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,

SUJARWO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepastian investasi disertai dengan iklim usaha yang kondusif dan berkomitmen dari pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama dalam rangka mendorong dan memperkuat stabilitas perekonomian daerah demi terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan serta peningkatan investasi di Kabupaten Gunungkidul. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu senantiasa berusaha meningkatkan pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul serta kualitas pelayanan terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan implementasi dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki demi terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, diperlukan adanya sebuah rumusan perencanaan yang sistematis baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya sebuah perencanaan strategis ditingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah.

Selanjutnya, berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman

perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang memuat perencanaan program dan kegiatan disertai dengan struktur pendanaan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah untuk perencanaan satu tahun yang akan datang. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rencana program dan kegiatan prioritas maupun non prioritas dalam rangka mendukung proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah juga menyajikan tentang kebijakan, permasalahan serta program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan serta dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan saling bersinergi dengan program/kegiatan Perangkat Daerah lain.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan selama periode satu tahun. Dokumen Renja ini juga merupakan landasan serta pedoman dalam proses penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.

Mengingat dokumen Renja merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan maupun penyesuaian dengan situasi dan kondisi terkini pada tahun berjalan. Oleh sebab itu, perubahan maupun penyesuaian tersebut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 052/5969 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
 18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan, keselarasan serta konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengawasan program/kegiatan Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Kerja ini melaksanakan fungsi manajerial sebagai *planner*, *organizer* dan juga *controller* terhadap program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah :

- a. Menciptakan keselarasan, keserasian dan kesinergian antar program dan kegiatan Perangkat Daerah
- b. Sebagai acuan dan pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

- c. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi antara proses perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 dengan bidang urusan serta susunan Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPMPTSP

- Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra DPMPTSP
- Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
- Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

- Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

- Rencana Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra DPMPTSP

Berlandaskan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan perubahan struktur dan susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban amanat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Substansi Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Kelompok Substansi Promosi
 2. Kelompok Substansi Investasi
- d. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, terdiri dari :
 1. Kelompok Substansi Pelayanan
 2. Kelompok Substansi Data
- e. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, terdiri dari :
 1. Kelompok Substansi Pengaduan dan Advokasi
 2. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu senantiasa melaksanakan program/kegiatan guna mendorong peningkatan iklim investasi serta kegiatan berusaha di Kabupaten Gunungkidul dan peningkatan kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat.

Evaluasi pencapaian target kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 disusun berdasarkan target dan realisasi kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2022 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam e-monev Bappeda triwulan IV tahun 2022 sesuai pada saat Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun. Hasil evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada triwulan IV tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja sebesar 102,64 % dengan penyerapan keuangan sebesar 98.07 % atau sebesar Rp. 4.635.824.864 dari target anggaran belanja sebesar Rp. 4.727.138.795 sesuai yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022 nomor DPPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,71 % atau Rp. 60.738.200
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,71 % atau Rp. 31.583.500
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,62 % atau Rp. 21.895.000
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 780.000
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,99% atau Rp. 2.499.800
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 2.480.000
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,99% atau Rp. 1.499.900
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 98,54% atau Rp. 2.329.490.445
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 98,54% atau Rp. 2.323.136.645
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 1.490.000
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 4.863.800
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 240.000
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 120.000
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 120.000
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 500.000

- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100% atau Rp. 500.000
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 500.000
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 300.000
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 200.000
 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,06 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,77 % atau Rp. 456.808.490
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 41.755.000
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,63 % atau Rp. 275.446.275
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 12.770.000
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,15 % atau Rp. 2.796.000
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 6.720.000
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,99 % atau Rp. 117.171.215
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 150.000
 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 97,75 % atau Rp. 161.782.483
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar 97,75% atau Rp.161.782.483
 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 98,52 % atau Rp. 306.246.819
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80 % serta penyerapan keuangan sebesar 72 % atau Rp.144.000
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 97,52 % atau Rp. 165.863.709

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,74 % atau Rp. 140.239.110
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,37% serta penyerapan keuangan sebesar 99,19 % atau Rp.212.893.727
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,15 % serta penyerapan keuangan sebesar 98,44 % atau Rp. 105.209.427
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90,32 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 7.050.000
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,91 % atau Rp. 85.654.300
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,74 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 14.980.000
 10. Penataan Organisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 1.095.600
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 1.095.600
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 82,46 % atau Rp. 42.319.400
 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 82,46 % atau Rp. 42.319.400
 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,92 % atau Rp. 148.418.000
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,92 % atau Rp. 148.418.000
- c. Program Promosi Penanaman Modal
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,41 % atau Rp. 82.110.450

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,41 % atau Rp. 82.110.450

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 122,85 % serta penyerapan keuangan sebesar 99,81 % atau Rp. 229.908.800
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 147,25% serta penyerapan keuangan sebesar 99,80 % atau Rp.218.218.800
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 100 % atau Rp. 11.690.000

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % serta penyerapan keuangan sebesar 92,5% Rp. 354.492.750
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar 93,36 % atau Rp.335.747.000
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar 79,43 % atau Rp.18.745.750

f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 166,37 % serta penyerapan keuangan sebesar 97,33 % atau Rp. 248.279.700
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 166,37 % serta penyerapan keuangan sebesar 97,33 % atau Rp. 248.279.700

2.1.1 Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapai serta terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan dan pergeseran anggaran disesuaikan dengan situasi serta kondisi terkini yang menyebabkan program kegiatan belum bisa dilaksanakan.
- b. Penyebab terpenuhinya beberapa program kegiatan sampai pada tahun 2022 karena sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tanpa menemui suatu permasalahan dan kendala yang berarti dalam proses pelaksanaannya. *Positioning* positif atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan, serta pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan melalui koordinasi internal serta eksternal sudah berjalan cukup baik.
- c. Penyebab melebihinya pencapaian target kinerja pada tahun 2022 diantaranya adalah karena antusias masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan meningkat secara signifikan. Dari target sejumlah 5.000 permohonan perizinan dan non perizinan pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 8.466, sementara itu jumlah izin terbit ditargetkan sebesar 5.000 izin, terealisasi sebanyak 8.321 izin sepanjang tahun 2022.

2.1.2 Faktor-faktor yang Diperkirakan Akan Mempengaruhi Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang sudah mencapai target dalam pelaksanaannya diharapkan akan mampu memberikan tren positif terhadap peningkatan iklim berusaha serta minat investasi di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan juga tidak luput menjadi indikator yang senantiasa akan berusaha ditingkatkan dari waktu ke waktu, salah satunya melalui optimalisasi keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Tahun 2022 merupakan periode waktu *recovery* dari masa pandemi Covid-19, semua sektor termasuk peningkatan stabilitas perekonomian yang menjadi urat nadi berbagai sektor lain sedang memasuki masa pemulihan. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai penyikapan atas dampak pandemi, yang selanjutnya akan diikuti dengan implementasi kebijakan ditingkat Pemerintah Daerah akan turut mempengaruhi target pencapaian kinerja ditahun 2022. Meskipun demikian, menyikapi dinamika yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berusaha untuk meningkatkan kinerja atas *core business* termasuk strategi kebijakan dan penyikapan yang cepat atas dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan sektor investasi, penyesuaian atas pandemi yang belum sepenuhnya berakhir akan membantu mencapai kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Beberapa strategi dan inovasi dapat dilakukan antara lain dengan melakukan audiensi serta koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian, dalam hal ini baik Kementerian Investasi, Kementerian PanRB, maupun Kementerian Perhubungan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Terminal Tipe A Dhaksinarga Wonosari sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul. Optimalisasi keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul termasuk didalamnya pengembangan sarana dan prasarana pendukung harus menjadi perhatian dalam kaitannya mendukung pencapaian target kinerja menuju kualitas pelayanan prima yang lebih baik serta pengembangan iklim berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul.

2.1.3 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Dilaksanakan

Proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling terintegrasi. Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam rangka mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya sebuah target yang telah ditetapkan diantaranya adalah dengan menggunakan pendekatan kinerja dalam prinsip penganggaran, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja baik itu *output* maupun *outcome* dari perencanaan alokasi input yang ditetapkan. Kebijakan pemberian kemudahan atau insentif terhadap kegiatan berusaha perlu ditindaklanjuti serta disinergikan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Investasi. Selain itu, penguatan tim kerja di Internal Perangkat Daerah untuk saling bekerja sama mewujudkan kinerja dalam keterbatasan jumlah sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang ada.

Adanya sistem plafonisasi anggaran menyebabkan ruang lingkup inovasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik menjadi terbatas. Namun demikian, dukungan kebijakan umum Bupati diharapkan mampu untuk memberi ruang gerak perencanaan dan penganggaran yang lebih memadai dari sisi pendanaan, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya pengembangan dan pengoptimalan pelayanan online serta implementasi dari aplikasi *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* untuk memperluas pasar investasi tentunya membutuhkan dukungan baik sarana prasarana, promosi, serta fasilitas lainnya yang akan berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran.

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi lintas instansi, sinergitas program dan kegiatan sejenis dengan lintas instansi, serta melakukan audiensi kepada para *stakeholders* tentang kondisi yang ada merupakan cara lain untuk mengatasi keterbatasan agar pelayanan tetap berjalan. Kedepannya, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu cerminan pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul bisa mendapatkan porsi anggaran yang memadai sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai.

Mengingat misi Bupati Gunungkidul tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan pembangunan manusia dengan keunggulan potensi daerah maka sebagai Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian misi tersebut, kebijakan yang dapat diambil diantaranya adalah dengan mendorong percepatan regulasi peraturan ditingkat Kabupaten yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini, review dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan efektifitas tim teknis lintas instansi, serta peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumberdaya manusia khususnya percepatan pemahaman atas kebijakan dari Pemerintah Pusat yang implementasinya harus segera diselaraskan oleh Pemerintah Daerah. Optimalisasi kinerja baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan public maupun peningkatan iklim investasi perlu adanya pengawalan serta penguatan dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai.

Perjanjian kerjasama pinjam pakai Terminal Tipe A Dhaksinarga Wonosari dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak tahun 2020 yang dimanfaatkan menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kawasan Kabupaten Gunungkidul. Keberadaan Mal Pelayanan Publik ini merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal, sekaligus menjadi *growth pole* baru perekonomian daerah. Pengembangan Mal Pelayanan Publik baik dari segi kelengkapan sarana prasarana pendukung maupun penambahan instansi-instansi vertikal masih terus dilakukan sampai saat ini. Sejalan dengan kondisi yang ada, prioritas pendanaan dengan efisiensi dan inovasi atas pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara simultan dan dinamis demi mendukung keberhasilan pelaksanaan amanat pembangunan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	67,44 Persen	100 Persen	99,89 Persen	99,89 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen Renja perubahan, Jumlah dokumen Renstra; Jumlah dokumen profil PD; Jumlah Forum PD	5; 5; 1; 5	2 dokumen; 1 dokumen; 1 kali	1 dokumen; 1 dokumen; 1 kali	1 dokumen; 1 dokumen; 1 kali	100 Persen	4 dokumen	4 dokumen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	5	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA; Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja; Jumlah dokumen ROPK	5; 5; 5	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA; Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	5; 5	0 dokumen; 0 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP PD; Jumlah dokumen Laporan E Monev; Jumlah dokumen TEPPRA	5; 20; 60	9 dokumen; 3 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 4 dokumen; 12 dokumen	1 dokumen; 4 dokumen; 12 dokumen	100 Persen	14 Laporan	14 Laporan	100 Persen
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 Persen	83,33 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	70	11 bulan	14 bulan	14 bulan	100 Persen	686 orang/bulan	686 orang/bulan	100 Persen
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK	5	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ; Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran	60; 10	9 dokumen; 1 dokumen	12 dokumen; 2 dokumen	12 dokumen; 2 dokumen	100 Persen	13 laporan	13 laporan	100 Persen
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada perangkat daerah yang teradministrasi dengan baik	100 Persen	-	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	5	-	1 dokumen	2 dokumen	200 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen KIB	5	-	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	-	-	-
2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan daerah yang teradministrasi dengan baik	100 Persen	-	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi IMB	60	-	12 dokumen	12 dokumen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	77,73 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	49	41 orang	38 orang	38 orang	100 Persen	6 dokumen	6 dokumen	100 Persen
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN lulus diklat dan bimtek	19	-	3 orang	2 orang	66,67 Persen	3 orang	3 orang	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	100 Persen	73,73 Persen	100 Persen	99,06 Persen	99,06 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia; Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik	40; 1	6 jenis; 1 paket	8 jenis; 1 paket	8 jenis; 1 paket	100 Persen	4 paket	4 paket	100 Persen
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC; Jumlah Alat Tulis Kantor; Jumlah Furniture Mal Pelayanan Publik (MPP); Jumlah Kamera; Jumlah Sofa Tamu; Jumlah Komputer; Jumlah Laptop; Jumlah Printer; Jumlah smart T; Jumlah Soundsystem Ruang rapat; Jumlah Kitchen Set; Jumlah Kursi Rapat; Jumlah Rak Arsip	40; 24; 4; 2; 8; 18; 8; 12; 7; 5; 1; 48; 6; 24; 2; 2; 50; 0	0 Paket; 19 Jenis; 14 Unit; 7 Unit; 1 Paket; 20 Unit; 1 Unit	0 unit; 24 paket; 0 unit; 2 unit; 0 unit; 3 unit; 0 unit; 4 unit; 3 paket; 1 unit; 1 unit; 0 unit; 1 unit; 0 unit	18 jenis; 3 paket; 2 unit; 1 unit; 1 paket	100 Persen	2 paket	2 paket	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan BKP; Jumlah barang cetakan Lembar Disposisi; Jumlah barang cetakan SPDP; Jumlah barang cetakan stopmap berkop; Jumlah barang cetakan Box arsip; Jumlah lembar penggandaan/fotokopi	60; 65; 75; 13250; 150; 60200	2650 lembar; 12 buku; 12 buku; 13 buku; 92 lembar	12 buku; 13 buku; 15 buku; 2650 lembar; 30 box; 12040 lembar	12 buku; 14 buku; 12 buku; 2000 lembar; 30 box; 13000 lembar; 100 buah	100 Persen	2 paket	2 paket	100 Persen
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Referensi dan Surat kabar (1 Rekening X12 Bulan)	60	0	12 bulan	18 bulan	100 Persen	730 dokumen	730 dokumen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Air Mineral Galon untuk Tamu Jumlah Air Mineral Gelas untuk Tamu Jumlah Permen untuk Tamu Jumlah Snack dan Minum untuk Tamu	510; 180; 180; 990	44 OP; 206 OR; 47 galon; 6 dus; 0 pak	170 galon; 36 dus; 36 pak; 190 OR	170 galon; 36 dus; 36 pak; 190 OR	100 Persen	4 laporan	4 laporan	100 Persen
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi Luar Daerah; Jumlah snack dan minum tersedia untuk rapat; Extrafooding MPP	326; 2000; 2400	44 OP; 206 OR; 47 galon; 6 dus; 0 pak	46 OP; 400 OR; 0	46 OP; 400 OR	100 Persen	24 laporan	24 laporan	100 Persen
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis terkelola	6600	-	1200 arsip	1200 arsip	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Interior Mal Pelayanan Publik (MPP); Jumlah Taman Terbangun (Lampu Hias); Jumlah Parkir dan Selasar kantor terbangun	5; 12; 6	0 paket	1 paket; 12 buah; 600 m2	1 paket	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	100 Persen	42.47 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	50	6 surat	10 surat	8 surat	80 Persen	4 laporan	4 laporan	100 Persen
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang diterima atas pemanfaatan jasa air (1 rekening x 12 bulan) Jumlah Bulan yang diterima atas pemanfaatan jasa listrik	60; 60; 240	9 bulan; 9 bulan	12 bulan; 12 bulan; 48 bulan	12 bulan; 12 bulan; 48 bulan	100 Persen	72 laporan	72 laporan	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(1 rekening x 12 Bulan) Jumlah yang diterima atas pemanfaatan jasa telepon (4 rekening x 12 Bulan)	20; 60	2 termin; 9 bulan	4 termin; 12 bulan	4 termin; 12 bulan	100 Persen	14 laporan	14 laporan	100 Persen
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	83,04 Persen	100 Persen	97,37 Persen	97,37 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Dinas yang di pelihara; Jumlah Mobil Dinas yang terbayarkan pajaknya; Jumlah Motor dinas yang di Pelihara; Jumlah Motor Dinas yang terbayarkan pajaknya	15; 15; 40; 40	5 unit; 3 unit; 6 unit; 3 unit	3 unit; 3 unit; 8 unit; 8 unit	3 unit; 3 unit; 8 unit; 11 unit	98 Persen	195 unit	195 unit	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	40	-	6 unit	-	-	6 unit	6 unit	100 Persen
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer terfasilitasi, Jumlah Laptop terfasilitasi, Jumlah Pemeliharaannya; Jumlah Mesin Ketik terfasilitasi, Jumlah Pemeliharaannya; Jumlah Printer terfasilitasi, Jumlah Pemeliharaannya	60; 25; 10; 60	11 unit; 7 unit; 2 unit; 8 unit	12 unit; 5 unit; 2 unit; 12 unit	10 unit; 6 unit; 2 unit; 10 unit	90,32 Persen	31 unit	31 unit	100 Persen
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara, Jumlah Gedung yang dipelihara (Pemeliharaan Pintu Kaca), Jumlah unit Gedung yang di pelihara	5; 1; 1	8 unit kamar mandi; 5 m ² ; 1 paket	5 m ² ; 1 unit	5 m ²	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah AC yang dipelihara	60	8 unit	12 unit	12 unit	100 Persen	18 unit	18 unit	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84, 3 Indeks	20 Persen	84,22 Persen	100 Persen	100 Persen	-	-	-
2.18.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen SKM; Jumlah Dokumen RTP (SPIP); Jumlah Standar Pelayanan (SP)	10; 5; 5	1 dokumen; 0 dokumen; 0 dokumen; 0 dokumen	2 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	100 Persen	-	-	-
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perundangan yang diterbitkan	1	-	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	-	-	-
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Perbup pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1	-	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	-	-	-
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang tarfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 persen
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	1	-	0 dokumen	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul; Jumlah media pengembangan investasi; Jumlah workshop pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul	5; 5; 5	1 dokumen; 1 jenis	1 dokumen; 1 jenis; 1 kali	1 dokumen; 1 jenis; 1 kali	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	61,96 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis promosi penanaman modal daerah terlaksana	100 Persen	61,96 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah materi promosi investasi yang tersedia; Jumlah pengusaha yang terfasilitasi dalam temu bisnis; Jumlah promosi/pameran/investasi yang diikuti; Jumlah media promosi investasi yang tersedia	500; 200; 14; 15	0 pengusaha; 1 event; 100 eksemplar	100 eksemplar; 40 pengusaha; 1 event; 2 unit	100 eksemplar; 40 peserta; 1 event; 2 unit	100 Persen	4 dokumen	4 dokumen	100 Persen
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	92,88 Persen	100 Persen	122,85 Persen	122,85 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 Persen	92,88 Persen	100 Persen	122,85 Persen	122,85 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang dilayani; Jumlah barang cetakan blangko perizinan; Jumlah barang cetakan leaflet; Jumlah in house training SDM pelayanan terlaksana; Jumlah sosialisasi perizinan dan non perizinan terlaksana	13450; 50000; 15000; 5; 15	3582 permohonan; 0 kali; 3000 lembar; 100 lembar; 0 kali	2200 permohonan; 10000 lembar; 3000 lembar; 1 kali; 2 kali	8466 permohonan; 31 buku; 2303 lembar; 1 kali; 1 event	147,25 Persen	2250 Pelaku Usaha	2250 Pelaku Usaha	100 Persen
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah sosialisasi perizinan dan mekanisme pengaduan; Jumlah dokumen pengaduan masyarakat	15; 20	3 dokumen; 3 kali	3 dokumen; 4 kali	4 kali; 3 dokumen	100 Persen	50 orang	50 orang	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 Persen	45,40 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang terfasilitasi	100 Persen	45,40 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah profil perusahaan yang terpantau	250	42 dokumen; 1 kali	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimtek OSS Jumlah CSR Award Jumlah Pembinaan CSR Jumlah Publikasi Laporan LKPM Jumlah sosialisasi dan bimtek LKPM Jumlah Sosialisasi Kebijakan PM Jumlah Sosialisasi Kemitraan Usaha	35; 5; 5; 15; 15; 5; 5	0 kali; 0 kali; 16 kali; 2 kali; 1 kali; 0 dokumen; 2 kali; 0 kali; 2 kali	15 kali; 1 kali; 1 kali; 3 kali; 3 kali; 1 dokumen; 1 kali	21 kali; 1 kali; 0 kali; 0 kali	100 Persen	750 Pelaku Usaha	750 Pelaku Usaha	100 Persen
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah profil perusahaan yang diawasi	130	1 kali; 5 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100 Persen	14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	100 Persen
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik	100 Persen	210,60 Persen	100 Persen	166,37 Persen	166,37 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang tersedia	100 Persen	210,60 Persen	100 Persen	166,37 Persen	166,37 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/6)
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan; Jumlah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pelayanan; Jumlah data perizinan dan penanaman modal yang dikelola	13450; 5; 5	2200 sertifikat; 1 aplikasi; 1 paket data	2200 sertifikat; 1 aplikasi; 1 paket data	8321 sertifikat; 1 aplikasi; 1 paket data; 2 dokumen	166,37 Persen	2250 dokumen	2250 dokumen	100 Persen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghadapi beberapa permasalahan serta kendala diantaranya adalah sumberdaya manusia yang secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi standar, alokasi dari anggaran belanja yang tersedia belum mencukupi, pelaksanaan prosedur yang belum konsisten serta masih minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, terdapat 2 (dua) tolok ukur kinerja pelayanan, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 370/KPTS/2021 yang terdiri dari dua Indikator yaitu Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani dan Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menitikberatkan fokus pada strategi percepatan investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung Kabupaten Gunungkidul sebagai destinasi tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya. Melalui perbaikan kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka seluruh proses perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten diharapkan akan lebih cepat terlayani dan dapat dengan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan disektor investasi.

Persentase layanan penanaman modal yang tertangani terealisasi sebesar 98,28% dari target yang ditetapkan sebesar 91% ditahun 2022. Sepanjang tahun 2022 jumlah permohonan perizinan dan non perizinan mencapai angka 8.466 dari target yang ditetapkan sebanyak 5.000 permohonan. Sementara itu, jumlah izin terbit mencapai angka 8.321 izin dari target yang telah ditetapkan sebanyak 5.000 izin terbit.

Disisi lain, persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha juga menunjukkan kenaikan angka yang signifikan. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 31,10 % terealisasi pada tahun 2022 sebesar 68,07 % atau realisasi investasi pada tahun 2022 sejumlah Rp. 475.350.674.950

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	Persen	-	91	92	93	-	98,28	92	93	
2	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persen	-	31,10	31,16	31,22	-	68,07	31,16	31,22	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Indeks	-	A (80,46)	A (81,71)	A (82,96)	84,25	82,10	A (81,71)	A (82,96)	

Disamping berusaha untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh program-program prioritas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul juga melaksanakan program penunjang atau pendukung dalam rangka mencapai hasil pelayanan terbaik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memiliki tren meningkat setiap tahunnya, laporan keuangan yang disusun tepat waktu, maupun seluruh dokumen perencanaan disusun sesuai dengan dokumen-dokumen yang mendasari penyusunannya.

Pada tahun 2022, diharapkan realisasi capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Adapun proyeksi capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang telah tercantum dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.2.1
 Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Terhadap Renstra PD Tahun 2021-2026
 Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah					Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	persen	91	92	93	94	95	91	92	93	94	95	
2.	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	persen	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	indeks	A (80,46)	A (81,71)	A (82,96)	A (84,21)	A (85,46)	A (80,46)	A (81,71)	A (82,96)	A (84,21)	A (85,46)	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senantiasa bersifat dinamis sesuai dengan perubahan regulasi maupun iklim dan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ada sejumlah 73 jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani. Namun seiring perubahan kebijakan pusat dengan ditiadakannya ijin prinsip, berikut konsekuensinya pada perizinan yang berkesesuaian, maka pada saat ini terdapat 57 jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal menjadi dasar pula dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada level nasional telah terbit pula kebijakan tentang pelayanan perizinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti. Perubahan yang dinamis atas aplikasi *Online Single Submission (OSS)* yang diperbarui harus pula diikuti dengan cepat dan berkesinambungan. Dasar hukum dari Pemerintah Pusat terus berkembang, seiring terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, berikut rencana Implementasi *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* yang harus disikapi dengan penyesuaian di daerah. Kemudahan berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk saat ini.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan sebuah inovasi dan terobosan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan MPP ini menjadi isu penting terutama dalam pemenuhan sarana prasarana, penguatan sistem, SDM, maupun fasilitas untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan terstandar.

Sektor investasi merupakan salah satu program unggulan dari Bupati, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal menjadi penting sebagai upaya peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Gunungkidul. Demikian pula pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan perundang-undangan yang sinergis dengan keseluruhan tugas dan fungsi lainnya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mengejawantahkan kinerja terbaik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentu saja tidak terlepas dari masalah dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar beberapa masalah dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Kompetensi petugas pemberi pelayanan perlu ditingkatkan baik berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku termasuk pemahaman atas implementasi teknis terhadap regulasi yang dinamis;
2. Jumlah sumberdaya yang masih terbatas;

3. Keterbatasan dan permasalahan teknis dalam implementasi *Online Single Submission* sebagaimana kebijakan pemerintah pusat yang terus berkembang dan mengalami penyesuaian;
4. Masih minimnya penataan ruang dan fasilitas sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan publik diantaranya seperti belum adanya ruang bermain anak, kantin, ruang pengaduan, garasi, penataan tempat parkir, penataan selasar, dan kendaraan untuk mobilisasi pelayanan terutama di Mal Pelayanan Publik;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kinerja ASN;
6. Keterbatasan alokasi anggaran.

Peluang daerah menarik investor untuk bersedia menanamkan modalnya di daerah sangat terbuka. Upaya pertama untuk dapat menjadi daerah tujuan investasi adalah daya tarik daerah bagi investor. Penerapan sistem pelayanan online diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong terealisasinya visi Kepala Daerah tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026 dengan misi Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menerapkan mekanisme pembuatan kuitansi pada pelanggan agar pembayaran biaya retribusi perizinan langsung ditunaikan ke Bank BPD DIY dan masuk ke rekening Kasda Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, dampak terhadap program nasional, sistem pelayanan *online* dan digital diharapkan mampu menaikkan apresiasi publik dan penilaian pelayanan publik baik dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia, BPKP, maupun Instansi lainnya.

Berdasarkan kondisi dan isu penting yang dihadapi tersebut, terdapat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

- a. Semakin banyaknya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.
- b. Peluang kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah alur proses perizinan, telah dilakukan peningkatan pelayanan terpadu dengan manajemen perizinan yang terintegrasi secara elektronik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara online terus ditingkatkan. Implementasi pelayanan senantiasa dilakukan dengan penyesuaian dan respon cepat atas dinamika regulasi dan kebijakan dari pusat.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 antara lain :

- a. Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berikut implementasinya;
- b. Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP);
- c. Peningkatan kompetensi petugas pemberi pelayanan;
- d. Percepatan regulasi terkait dengan perizinan yang diberikan;

- e. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik dan untuk pelaksanaan tugas fungsi menarik investasi;
- f. Penyesuaian strategi dalam perumusan dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan prioritas karena dampak masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 maupun dinamika kebijakan tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penelaahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah, terkait dengan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan pada RKPD. Review terhadap RKPD meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator program kegiatan, tolok ukur kinerja atau target sasaran program kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merencanakan untuk melaksanakan 6 program yang terdiri dari 5 program prioritas didukung 1 program penunjang yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.830.135.344 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*). Pada tahapan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah daerah yang terkait penganggaran serta kemampuan pendanaan maka pagu indikatif semua Perangkat Daerah nantinya dapat mengalami penyesuaian, demikian pula dimungkinkan ada perubahan pada tahapan selanjutnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pencermatan kembali terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan mengikuti arah kebijakan umum Bupati Gunungkidul. Rasionalisasi anggaran biasanya dilakukan dengan tanpa merubah output dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.3
 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	2,138,977,344	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	2,138,977,344	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	3,718 Indeks	50,521,233	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	3,718 Indeks	50,521,233	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	26,473,733	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	26,473,733	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23,547,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23,547,500	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	100,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	100,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	100,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	100,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	100,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	100,000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	100,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	100,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Indeks Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	233,1 Indeks	1,462,436,844	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Indeks Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	233,1 Indeks	1,497,647,844	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang/bulan	1,462,147,844	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang/bulan	1,462,147,844	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100,000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	189,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	189,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP	Indeks BMD pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	1 Indeks	100,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP	Indeks BMD pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	1 Indeks	100,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100,000	
	Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Pendapatan Daerah yang teradministrasi dengan baik	12 Laporan	100,000	Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Pendapatan Daerah yang teradministrasi dengan baik	12 Laporan	100,000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	100,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	100,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Indeks PNS yang terlayani dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3,663 Indeks	100,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Indeks PNS yang terlayani dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3,663 Indeks	100,000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPPTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPPTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPPTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPPTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	109,681 Indeks	162,217,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	109,681 Indeks	162,217,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	154,325,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	154,325,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	DPMPPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	1,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	DPMPPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	1,000,000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	250,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	250,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	6,442,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	6,442,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	1 Unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	1 Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	90 Laporan	358,720,767	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	90 Laporan	358,720,767	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	-	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	258,095,967	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	258,095,967	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	100,624,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	100,624,800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	258 Unit	104,781,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	258 Unit	104,781,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	195 Unit	47,006,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	195 Unit	47,006,500	
	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	57,775,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	57,775,000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	3,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	3,000,000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Layanan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	4 Layanan	3,000,000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Layanan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	4 Layanan	3,000,000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3,000,000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3,000,000	
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	28,917,500	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	28,917,500	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Jenis Promosi Penanaman Modal Daerah terlaksana	4 Jenis	28,917,500	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Jenis Promosi Penanaman Modal Daerah terlaksana	4 Jenis	28,917,500	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28,917,500	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28,917,500	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	153,565,000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	153,565,000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Indeks Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	765,9 Indeks	153,565,000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Indeks Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	765,9 Indeks	153,565,000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	2250 Pelaku Usaha	127,647,500	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	2250 Pelaku Usaha	127,647,500	
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	25,917,500	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	25,917,500	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 Persen	399,500,000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 Persen	399,500,000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Indeks Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	274,392 Indeks	399,500,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Indeks Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	274,392 Indeks	399,500,000	
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	750 Pelaku Usaha	376,820,000	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	750 Pelaku Usaha	376,820,000	
	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha, Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha	14 Kegiatan Usaha	22,680,000	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha, Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	14 Kegiatan Usaha	22,680,000	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola dengan baik	100 Persen	106,175,500	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola dengan baik	100 Persen	106,175,500	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang tersedia	2250 Dokumen	106,175,500	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang tersedia	2250 Dokumen	106,175,500	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2250 Dokumen	106,175,500	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2250 Dokumen	106,175,500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu berkaitan dengan pelayanan perizinan *online* melalui OSS-RBA, penataan selasar dan lahan parkir, pengadaan fasilitas tempat ibadah, penataan ruang arsip, ketersediaan ruang pengaduan masyarakat serta tentunya pengembangan Mal Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung percepatan investasi daerah, pelaksanaan *Investor Gathering* maupun Temu Bisnis dengan para pengusaha berbasis tematik serta kegiatan pameran potensi investasi sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih agar dapat dikemas sedemikian rupa dalam rencana kerja kedepan.

Usulan program dan kegiatan dari stakeholders khususnya pelaksanaan dispensasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah muncul sejak tahun 2018 memerlukan telaah kebijakan yang lebih detail dan strategis, termasuk dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga belum sepenuhnya bisa diakomodir. Berkaitan dengan pemberian Persetujuan Bangunan gedung (PBG) terdapat pula usulan tentang perubahan besaran retribusi yang diberlakukan.

Selanjutnya, usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Mal Pelayanan Publik telah ditindaklanjuti melalui kerjasama dan koordinasi khususnya dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PanRB Republik Indonesia. Proses pengembangan Mal Pelayanan Publik ini masih terus dilaksanakan sejalan dengan Rekomendasi hasil visitasi dari Kementerian terkait dengan tetap mempertimbangkan alokasi anggaran yang ada. Sedangkan untuk usulan Pagu Indikatif Sektor (PIS), Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (PIWK) dan Pokok Pikiran (Pokir) tidak ada yang dialokasikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Rencana Kerja tahun 2024 ini.

Tabel 2.4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Satuan Harga	Anggaran	Catatan
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
dst.	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berikut rencana implementasi OSS-RBA merupakan seperangkat kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam kaitannya mendorong stabilitas perekonomian khususnya dari sektor investasi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan berbagai persiapan dan antisipasi untuk menyikapinya, terutama berkenaan dengan paket kebijakan kemudahan izin berusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menindaklanjuti dengan inisiasi percepatan perumusan regulasi tentang pelimpahan wewenang, pelayanan *online* dan *offline* serta penandatanganan digital. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang dan Tanggungjawab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah ditetapkan, regulasi ini akan segera direview serta disesuaikan dalam kerangka mewujudkan sinergitas dengan mengikuti dinamika dari Pemerintah Pusat. Sedangkan dengan mulai beroperasinya secara penuh Yogyakarta International Airport (YIA) sejak tahun 2020 lalu serta terus dikembangkannya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) diharapkan mampu mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul melalui peningkatan daya tarik investasi.

Agenda kebijakan nasional yang selaras dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Prioritas pembangunan yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pembangunan manusia unggul dengan sasaran meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, tema pembangunan yang diangkat oleh Kabupaten Gunungkidul adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan prioritas pembangunan yang didukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Ekonomi melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Investasi dan Pariwisata dengan sasaran daerah yang hendak dicapai adalah meningkatnya nilai investasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 berpedoman pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan termasuk didalamnya kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan daerah yang terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran Perangkat Daerah, sehingga akan terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga.

Tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan yang termuat dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 adalah terwujudnya peningkatan investasi berbasis potensi unggulan daerah. Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat pencapaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman modal yang tertangani	91	92	93	94	95
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,46	81,71	82,96	84,21	85,46

Pengaliran tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai kedalam indikator sasaran Perangkat Daerah beserta target kinerjanya pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

No.	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Target Akhir Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	TUJUAN : Terwujudnya peningkatan investasi berbasis potensi unggulan daerah	Nilai realisasi investasi kegiatan berusaha	31,16%

Selain tiga sasaran perangkat daerah yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat satu tujuan perangkat daerah lainnya yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dalam tabel 3.2 yaitu Meningkatnya Investasi berbasis potensi unggulan daerah.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal Yang Tertangani	93 (%)
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	31,22 (%)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,96 (Skor)

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dicapai dengan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan suatu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terukur untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan dalam jangka waktu tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang didukung oleh beberapa sub kegiatan dibawahnya sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih detail dan terukur. Program Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 mengacu pada RKPD tahun 2024. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain adalah :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Pencapaian Prioritas dan Sasaran Daerah
3. Prioritas Pembangunan
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*
5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
7. Sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tahun 2024 terdiri dari 5 program prioritas dan 1 program penunjang yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dengan 38 sub kegiatan yang telah disesuaikan sebagaimana review Rencana Strategis dan Penyandingan sesuai dengan Kepmendagri nomor 050/5889 tahun 2021. Program dan Kegiatan tersebut dibiayai dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan total perkiraan anggaran belanja sebesar Rp. 2.830.135.344. Rekapitulasi program kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
Peningkatan Ekonomi	Nilai Investasi Meningkat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	93 %	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	153,565,000	DPMPTSP
					2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	153,565,000	DPMPTSP
					2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	127,647,500	DPMPTSP
					2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	25,917,500	DPMPTSP
					2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	106,175,500	DPMPTSP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106,175,500	DPMPTSP
					2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	106,175,500	DPMPTSP
		Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	31,22%	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	3,000,000	DPMPTSP
					2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3,000,000	DPMPTSP
					2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3,000,000	DPMPTSP
					2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	28,917,500	DPMPTSP
					2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28,917,500	DPMPTSP
					2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	28,917,500	DPMPTSP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	399,500,000	DPMPTSP
					2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	399,500,000	DPMPTSP
					2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	376,820,000	DPMPTSP
					2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	22,680,000	DPMPTSP
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,65 (A)	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,138,977,344	DPMPTSP
					2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,521,233	DPMPTSP
					2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26,473,733	DPMPTSP
					2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23,547,500	DPMPTSP
					2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	100,000	DPMPTSP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100,000	DPMPPTSP
					2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100,000	DPMPPTSP
					2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000	DPMPPTSP
					2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000	DPMPPTSP
					2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,462,436,844	DPMPPTSP
					2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,462,147,844	DPMPPTSP
					2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,000	DPMPPTSP
					2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	189,000	DPMPPTSP
					2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,000	DPMPPTSP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	100,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	DPMPTSP
					2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	DPMPTSP
					2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162,217,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,000	DPMPTSP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154,325,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,000,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	DPMPTSP
					2.18.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	250,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,442,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	DPMPTSP
					2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	DPMPTSP
					2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358,720,767	DPMPTSP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	DPMPTSP
					2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258,095,967	DPMPTSP
					2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,624,800	DPMPTSP
					2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104,781,500	DPMPTSP
					2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47,006,500	DPMPTSP
					2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	DPMPTSP
					2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	DPMPTSP
					2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57,775,000	DPMPTSP
					2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	DPMPTSP

Kelima program prioritas yang direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 didukung oleh satu program penunjang dan sembilan kegiatan penunjang tugas dan fungsi pokok dinas. Rumusan rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025 secara terperinci dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL		DPMPPTSP		2,830,135,344	DAU-DAK			5.717.422.371
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	DPMPPTSP	100 Persen	2,138,977,344	DAU		100 Persen	4.499.247.871
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	DPMPPTSP	3,718 Indeks	50,521,233	DAU		3,718 Indeks	66.810.000
2.18.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPPTSP	5 Dokumen	26,473,733	DAU		5 Dokumen	40.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPPTSP	1 Dokumen	23,547,500	DAU		1 Dokumen	20.250.000
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPPTSP	1 Dokumen	100,000	DAU		1 Dokumen	800.000
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPPTSP	3 Dokumen	100,000	DAU		3 Dokumen	2.500.000
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMPPTSP	2 Dokumen	100,000	DAU		2 Dokumen	760.000
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPPTSP	4 Laporan	100,000	DAU		4 Laporan	500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTSP	17 Laporan	100,000	DAU		17 Laporan	1.500.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	DPMPPTSP	233,1 Indeks	1,462,436,844	DAU		233,1 Indeks	2.537.459.871
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPPTSP	686 Orang/bulan	1,462,147,844	DAU		686 Orang/bulan	2.531.959.871
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPPTSP	1 Laporan	100,000	DAU		1 Laporan	1.500.000
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPPTSP	13 Laporan	189,000	DAU		13 Laporan	4.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks BMD pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	DPMPPTSP	1 Indeks	100,000	DAU		1 Indeks	200.000
2.18.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPPTSP	1 Dokumen	100,000	DAU		1 Dokumen	200.000
2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang teradministrasi dengan baik	DPMPPTSP	12 Laporan	100,000	DAU		12 Laporan	500.000
2.18.01.2.04.007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DPMPPTSP	12 Laporan	100,000	DAU		12 Laporan	500.000
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks PNS yang terlayani dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	DPMPPTSP	3,66 Indeks	100,000	DAU		3,99 Indeks	20.250.000
2.18.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPPTSP	0 Paket	-	DAU		1 Paket	18.000.000
2.18.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPPTSP	1 Dokumen	100,000	DAU		1 Dokumen	250.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.05.00.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPMPPTSP	0 Orang	-	DAU		5 Orang	2.000.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	DPMPPTSP	109,68 Indeks	162,217,000	DAU		109,68 Indeks	1.021.378.000
2.18.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP	1 Paket	100,000	DAU		1 Paket	49.500.000
2.18.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP	2 Paket	154,325,000	DAU		2 Paket	650.000.000
2.18.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPPTSP	2 Paket	1,000,000	DAU		2 Paket	15.188.000
2.18.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	DPMPPTSP	0 Dokumen	-	DAU		730 Dokumen	2.400.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.06.00.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DPMPPTSP	4 Laporan	250,000	DAU		4 Laporan	6.950.000
2.18.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPPTSP	24 Laporan	6,442,000	DAU		24 Laporan	296.840.000
2.18.01.2.06.00.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPPTSP	1 Dokumen	100,000	DAU		1 Dokumen	500.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	DPMPPTSP	1 Unit	-	DAU		1 Unit	325.000.000
2.18.01.2.07.00.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMPPTSP	0 Unit	-	DAU		1 Unit	325.000.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	DPMPPTSP	90 Laporan	358,720,767	DAU		90 Laporan	330.850.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPPTSP	4 Laporan	-	DAU		4 Laporan	250.000
2.18.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPPTSP	72 Laporan	258,095,967	DAU		72 Laporan	190.000.000
2.18.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP	14 Laporan	100,624,800	DAU		14 Laporan	140.600.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	DPMPPTSP	257 Unit	104,781,500	DAU		257 Unit	196.800.000
2.18.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPMPPTSP	195 Unit	47,006,500	DAU		195 Unit	129.800.000
2.18.01.2.09.00.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DPMPPTSP	0 Unit	-	DAU		6 Unit	1.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPPTSP	0 Unit	-	DAU		31 Unit	6.000.000
2.18.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPPTSP	1 Unit	57,775,000	DAU		1 Unit	49.000.000
2.18.01.2.09.00.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPPTSP	0 Unit	-	DAU		18 Unit	10.500.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terfasilitasi	DPMPPTSP	100 Persen	3,000,000	DAU		100 Persen	150.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	DPMPPTSP	4 Layanan	3,000,000	DAU		3 Layanan	150.000.000
2.18.02.2.02.00.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	1 Dokumen	3,000,000	DAU		6 Dokumen	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi	DPMP/TSP	100 Persen	28,917,500	DAU		100 Persen	150.000.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Promosi Penanaman Modal Daerah terlaksana	DPMP/TSP	4 Jenis	28,917,500	DAU		4 Jenis	150.000.000
2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMP/TSP	1 Dokumen	28,917,500	DAU		4 Dokumen	150.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	DPMP/TSP	100 Persen	153,565,000	DAU		100 Persen	235.000.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	DPMP/TSP	765,9 Indeks	153,565,000	DAU		765,9 Indeks	235.000.000
2.18.04.2.01.006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	DPMP/TSP	2250 Pelaku Usaha	127,647,500	DAU		2250 Pelaku Usaha	220.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPPTSP	50 Pelaku Usaha	25,917,500	DAU		50 Pelaku Usaha	15.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	DPMPPTSP	100 Persen	399,500,000	DAU - DAK		100 Persen	408.174.500
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	DPMPPTSP	274,39 Indeks	399,500,000	DAU - DAK		274,39 Indeks	408.174.500
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPPTSP	750 Pelaku Usaha	376,820,000	DAU - DAK		750 Pelaku Usaha	365.374.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.05.2.01.00.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha, Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	DPMPPTSP	14 Kegiatan Usaha	22.680,000	DAU - DAK		14 Kegiatan Usaha	42.800.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terkelola dengan baik	DPMPPTSP	100 Persen	106,175,500	DAU		100 Persen	275.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang tersedia	DPMPPTSP	2250 Dokumen	106,175,500	DAU		2250 Dokumen	275.000.000
2.18.06.2.01.00.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPPTSP	2250 Dokumen	106,175,500	DAU		2250 Dokumen	275.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk kurun waktu perencanaan satu tahun kedepan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjadi bahan untuk proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

Pada bagian akhir dari penutup Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 mencakup tiga pokok bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah dan akan selalu melibatkan para *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang hingga Forum Gabungan Perangkat Daerah ditingkat Kabupaten. Dalam proses penyusunannya, Rencana Kerja ini juga memperhatikan keselarasan dan sinergitas dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Disamping itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga selalu mengadakan evaluasi terhadap hasil kinerja selama ini untuk memberikan hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan adalah sebuah kunci sukses pembangunan daerah. Artinya, kualitas perencanaan dapat mendukung keberhasilan serta kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen, konsistensi dan integritas yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, semangat, kejujuran, dan disiplin dari para pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang harus senantiasa dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang, dengan memanfaatkan dan mengelola seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin dan memastikan agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen Pengendalian yang berfungsi untuk

memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan. Adanya instrument pengendalian tersebut telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program kegiatan tersebut oleh masing-masing pelaksana teknis kegiatan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan akan melaksanakan 5 (lima) program prioritas dengan 1 (satu) program penunjang. Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan mampu digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan program kegiatan serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Apabila didalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahun 2024 terdapat keterbatasan dalam hal alokasi anggaran, maka program kegiatan yang akan disusun dalam RKA didasarkan pada pertimbangan skala prioritas. Sedangkan untuk program kegiatan yang tidak bisa terakomodir ditahun 2024, akan dianggarkan ditahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 merupakan arah kebijakan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ditahun 2024. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing pihak dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses pembangunan daerah. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,

Plt. DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

IRAWAN JATMIKO

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD memuat kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Renstra PD. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Dokumen Renja PD selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pelayanan masyarakat tahun 2024. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam Dokumen Renja PD akan tercermin pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD tahun anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Perda Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026; dan

15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul 000.7.6.1/1013 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sebagai acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga akan tercapai target yang sudah ditetapkan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah untuk :

- 1) Acuan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2024;
- 2) Dasar pokok pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Renstra Perangkat Daerah (PD);
- 3) Bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah; dan
- 4) Dasar penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
- BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Substansi pada bagian ini memuat tentang kajian/reviu terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2/Tahun 2022) dan perkiraan capaian target tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Jumlah kegiatan di tahun anggaran 2022, yaitu 16 kegiatan. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan utama dan penunjang. Kegiatan utama berjumlah 8 kegiatan dan kegiatan penunjang berjumlah 8 kegiatan. Pagu anggaran belanja di tahun anggaran 2022, yaitu Rp7.217.031.804,00. Realisasi belanja tahun anggaran 2022, yaitu Rp6.976.935.712,00. Sisa anggaran belanja sebesar Rp240.096.092,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 96,67%.

Realisasi anggaran kegiatan penunjang tahun anggaran 2022 tidak sepenuhnya memenuhi target. Beberapa catatan capaian anggaran yang tidak memenuhi target, yaitu :

- a. Biaya beban/tagihan listrik tahun 2022 khususnya pabrik es mengalami efisiensi namun tidak mengganggu pelayanan penjualan es balok.
- b. Terdapat THL cuti melahirkan.

Sedangkan realisasi anggaran kegiatan utama tahun anggaran 2022 terdapat beberapa catatan yang tidak memenuhi target, yaitu :

- a. Selisih pagu anggaran dan nilai kontrak paket tender maupun non tender.
- b. Pembayaran honor THL sesuai jumlah hari masuk kerja.

Berdasarkan catatan capaian kinerja kegiatan tahun anggaran 2022 masih diperlukan kebijakan/tindakan antisipasi dalam proses perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2024, yaitu :

- a. Meningkatkan pemantauan terhadap operasionalisasi unit pelayanan publik.
- b. Meningkatkan pendampingan/pembinaan pelaku usaha perikanan.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan.

Gambaran evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
 Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.01	PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNIKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik	100 %	100 %	100 %	116.43 %	116%	100 %	316.43 %	316%
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	84 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%	17 Jenis	47 Jenis	56%
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perubahan renja	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	300%
		Jumlah dokumen renja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah dokumen renstra	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	NA Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah laporan data sistem informasi kelautan perikanan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	NA Dokumen	1 Dokumen	200%
		Jumlah forum perangkat daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen draf renstra	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	NA Dokumen	0 Dokumen	0%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	17%
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah dokumen ROPK	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	NA Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	17%
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68 Laporan	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	-	17 Laporan	17 Laporan	25%

Kode	Usuan/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja) PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1										
3.25.01.2.01.07	2	3	4	5	6	7	8-7/6	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah laporan hasil evaluasi renja/RKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	NA Dokumen	8 Dokumen	200%
		Jumlah laporan hasil move dan pengendalian	NA NA	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	NA Dokumen	7 Dokumen	-
		Jumlah laporan TEPR/ penyerapan dan realisasi anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	NA Dokumen	24 Dokumen	200%
		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	25%
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun	20 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	12 Jenis	60%
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	300%
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	NA Bulan	28 Bulan	200%
		Penyediaan insentif PAD untuk ASN dan non ASN	NA NA	1 Tahun	NA Tahun	NA Tahun	-	NA Tahun	1 Tahun	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1946 Orang/Bulan	NA Orang/Bulan	NA Orang/Bulan	NA Orang/Bulan	-	462 Orang/Bulan	462 Orang/Bulan	24%
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan CALK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25%
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/SP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	NA Dokumen	24 Dokumen	200%
		Jumlah laporan keuangan semesteran OPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	NA Dokumen	3 Dokumen	300%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	52 Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA Laporan	-	13 Laporan	13 Laporan	25%
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi (ASN)	37 ASN	31 ASN	33 ASN	33 ASN	100%	32 ASN	96 ASN	259%
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	300%
3.25.01.2.05.03	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	NA Paket	NA Paket	NA Paket	-	1 Paket	1 Paket	25%
3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	100%	NA Orang	64 Orang	206%
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	25%
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman peserta bimtek, kursus, penataran, orientasi	2 Orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	NA Orang	2 Orang	100%
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	NA Orang	NA Orang	NA Orang	-	2 Orang	2 Orang	11%
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	35 Layanan	6 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	100%	7 Layanan	7 Layanan	20%
		Persentase Administrasi Umum Terlayani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	94%	100 Persen	283,76 Persen	294%
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia (8 unit gedung IPI; 3 unit gedung DKP; 1 unit gedung Poskandur; 1 unit gedung BB)	NA LS	1 LS	NA LS	NA LS	-	NA LS	1 LS	-
		Jumlah komponen listrik bangunan kantor yang tersedia	12 Jenis	NA Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	NA Jenis	12 Jenis	100%
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	NA Paket	NA Paket	NA Paket	-	12 Paket	12 Paket	25%
		Jumlah ATK	45 Jenis	12 Paket	78 Jenis	78 Jenis	100%	NA Jenis	90 Jenis	200%
		Jumlah pengadaan PC komputer	1 Paket	NA Paket	1 Paket	1 Paket	100%	NA Paket	1 Paket	100%
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68 Paket	NA Paket	NA Paket	NA Paket	-	15 Paket	15 Paket	22%
		Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	22 Jenis	4 Paket	22 Jenis	22 Jenis	100%	NA Jenis	26 Jenis	118%
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48 Paket	NA Paket	NA Paket	NA Paket	-	12 Paket	12 Paket	25%
		Jumlah barang cetakan	14 Jenis	4 Paket	14 Jenis	14 Jenis	100%	NA Jenis	18 Jenis	129%
		Jumlah lembar penggandaan	14.000 Lembar	25.616 Lembar	9.850 Lembar	9.850 Lembar	100%	NA Lembar	35.466 Lembar	253%
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	48 Paket	NA Paket	NA Paket	NA Paket	-	12 Paket	12 Paket	25%
		Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	12 Bulan	1 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	100%	NA Bulan	13 Bulan	108%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1.461 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	-	365 Dokumen	365 Dokumen	25%

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja) PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah minum dan snack untuk tamu	250 Orang	NA Orang	175 Orang	92 Orang	53%	NA Orang	92 Orang	37%
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan, Tamu Jumlah makan, minum dan snack tersedia untuk rapat Jumlah konsultasi dan koordinasi (LD) Jumlah minum dan snack untuk tamu	16 Laporan 385 Orang 6 Kali	NA Laporan 557 Orang 2 OP	NA Laporan 250 Orang 4 Kali	NA Laporan 243 Orang 4 Kali	- 97% 100%	4 Laporan NA Orang NA Kali	4 Laporan 800 Orang 6 Kali	25% 208% 100%
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	89 Laporan 14 Layanan 100 Persen	NA Laporan NA Layanan 100 Persen	NA Laporan 2 Layanan 100 Persen	NA Laporan 2 Layanan 100 Persen	- 100% 100%	16 Laporan 3 Layanan 100 Persen	16 Laporan 5 Layanan 300 Persen	18% 36% 300%
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	NA Unit	NA Unit	NA Unit	-	25 Unit	25 Unit	313%
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan LCD proyektor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit 28 Unit	NA Unit NA Unit	NA Unit NA Unit	NA Unit NA Unit	- -	NA Unit 5 Unit	NA Unit 5 Unit	- 18%
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan AC split Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket 11 Unit	NA Paket NA Unit	1 Paket NA Unit	1 Paket NA Unit	100% -	NA Paket 4 Unit	1 Paket 4 Unit	100% 36%
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	15 Layanan 100 Persen	2 Layanan 100 Persen	3 Layanan 100 Persen	3 Layanan 160,48 Persen	100% 160%	3 Layanan 100 Persen	8 Layanan 360,48 Persen	53% 360%
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	550 Surat	483 Surat	550 Surat	1.658 Surat	301%	NA Surat	2.141 Surat	389%
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah rekening listrik yang terbayar Jumlah rekening air yang terbayar Jumlah rekening telepon dan faximile yang terbayar Jumlah rekening telepon dan faximile yang terbayar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Laporan 204 Bulan 72 Bulan 24 Bulan 1.200 Laporan	NA Laporan 108 Bulan 36 Bulan 24 Bulan NA Laporan	NA Laporan 204 Bulan 72 Bulan 24 Bulan NA Laporan	NA Laporan 204 Bulan 72 Bulan 24 Bulan NA Laporan	- 100% 100% 100% -	4 Laporan NA Bulan NA Bulan NA Bulan 192 Laporan	4 Laporan 312 Bulan 108 Bulan 48 Bulan 192 Laporan	25% 153% 150% 200% 16%
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pebyaran Umum Kantor	Jumlah layanan sampah yang terbayar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 48 Laporan	NA Bulan NA Laporan	12 Bulan NA Laporan	12 Bulan NA Laporan	100% -	NA Bulan 24 Laporan	12 Bulan 24 Laporan	100% 50%
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Layanan 100 Persen	4 Layanan 100 Persen	4 Layanan 100 Persen	4 Layanan 96,43 Persen	100% 96%	4 Layanan 100 Persen	12 Layanan 296,43 Persen	60% 296%
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang terbayar pajaknya Jumlah kendaraan dinas (roda dua) yang terbayar pajaknya Jumlah kendaraan dinas (roda tiga) yang terbayar pajaknya Jumlah sepeda motor roda 2 yang dipelihara Jumlah sepeda motor roda 3 yang dipelihara Jumlah mobil dinas yang dipelihara Jumlah excavator yang dipelihara Jumlah BBM untuk sosialisasi perda yang terlaksana Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit 42 Unit 1 Unit 42 Unit 1 Unit 12 Unit 1 Unit NA OP 2.864 Unit	12 Unit 42 Unit 1 Unit 42 Unit 1 Unit 12 Unit 1 Unit 60 OP NA Unit	12 Unit 42 Unit 1 Unit 42 Unit 1 Unit 12 Unit 1 Unit NA OP NA Unit	12 Unit 42 Unit 1 Unit 42 Unit 1 Unit 12 Unit 1 Unit NA OP NA Unit	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -	NA Unit NA Unit NA Unit NA Unit NA Unit NA Unit NA Unit NA OP 708 Unit	24 Unit 84 Unit 2 Unit 84 Unit 2 Unit 24 Unit 2 Unit 60 OP 708 Unit	200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% -

Kode	Usunan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja) PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1										
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor terpelihara (laptop, komputer, printer, mesin tik, dll) Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah PC/Komputer yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah telepon dan mesin faxmilite yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah Perabalan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah luas dan jenis bangunan gedung yang terpelihara Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perengkapan gedung/kantor terpelihara AC, kipas angin, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan internet Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah genset yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perengkapan gedung/kantor terpelihara AC, kipas angin, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan internet Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah genset yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah meningkat	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	NA Jenis	6 Jenis	200%
3.25.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen tersusunya SKM OPD Jumlah dokumen tersusunya SKM UPT BBI Jumlah dokumen tersusunya SKM UPT TPI Jumlah dokumen RTP (SIP) Jumlah dokumen revisi SOP Jumlah dokumen SKM OPD (DKP, UPT BBI, UPT TPI)	86,2 Skor	80,37 Skor	86,2 Skor	81,17 Skor	94%	NA Skor	161,54 Skor	187%
3.25.03	PENGLOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Nilai pendapatan nelayan	34.576.493,25 Rupiah	25.240.357,29 Rupiah	31.776.354,87 Rupiah	34.589.132,00 Rupiah	109%	32.084.514,01 Rupiah	92.514.003,30 Rupiah	288%
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB yang dibina dan terfasilitasi Persentase KUB yang terfasilitasi	96 Kelompok 223 Persen	43 Kelompok NA Persen	12 Kelompok 28 Persen	19 Kelompok 44 Persen	158%	12 Kelompok 28 Persen	74 Kelompok 72 Persen	77%
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah pelatihan kaderisasi nelayan Jumlah bimbingan analisis penyusunan rencana usaha perikanan tangkap Jumlah sosialisasi implementasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan Jumlah orang yang terampil P3K di laut	NA Angkatan NA Angkatan NA Kali	1 Angkatan 1 Angkatan 60 Kali	NA Angkatan NA Angkatan NA Kali	NA Angkatan NA Angkatan NA Kali	-	NA Angkatan NA Angkatan NA Kali	1 Angkatan 1 Angkatan 60 Kali	-
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah TPI yang beroperasi Persentase TPI yang beroperasi	20 Orang 20 Orang 1.310 Orang 8 TPI 100 Persen	NA Orang NA Orang NA Orang 8 TPI 100 Persen	20 Orang 20 Orang NA Orang 8 TPI 100 Persen	20 Orang 20 Orang NA Orang 8 TPI 100 Persen	100%	NA Orang NA Orang 105 Orang 8 TPI 100 Persen	20 Orang 20 Orang 105 Orang 24 TPI 300 Persen	100%
3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah konsultasi dan koordinasi perubahan perda TPI	NA Kali	NA Kali	2 Kali	2 Kali	100%	NA Kali	2 Kali	-

Kode	Usuan/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja) PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah bulan operasionalisasi dan pengelolaan UPT TPI Anghamnia	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	NA Bulan	24 Bulan	200%
		Jumlah pengadaan timbangan dujukan 500 kg	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	NA Unit	2 Unit	200%
		Jumlah pengadaan timbangan dujukan 300 kg	3 Unit	8 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	NA Unit	11 Unit	367%
		Jumlah pengadaan timbangan bebek 25 kg	3 Unit	8 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	NA Unit	11 Unit	367%
		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	60 Layanan	NA Layanan	NA Layanan	NA Layanan	-	14 Layanan	14 Layanan	23%
3.25.04	PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai pendapatan pembudidaya ikan	4.588.755,32 Rupiah	5.279.834,96 Rupiah	4.534.103,00 Rupiah	5.424.234,00 Rupiah	120%	4.235.295,87 Rupiah	14.939.364,83 Rupiah	328%
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang dibina dan terfasilitasi	352 Kelompok	72 Kelompok	25 Kelompok	10 Kelompok	40%	60 Kelompok	142 Kelompok	40%
		Persentase pokdakan yang terfasilitasi	79,46 Persen	NA Persen	5,64 Persen	2,26 Persen	40%	79,46 Persen	81,72 Persen	103%
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah bimtek budidaya	NA Angkatan	8 Angkatan	NA Angkatan	NA Angkatan	-	NA Angkatan	8 Angkatan	-
		Jumlah paket budidaya lele kolam bundar	NA Paket	5 Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	5 Paket	-
		Jumlah paket budidaya lele kolam bundar terintegrasi sayuran (pasca covid)	NA Paket	7 Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	7 Paket	-
		Jumlah paket budidaya lele kolam bundar terintegrasi sayuran (pasca covid)	NA Paket	4 Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	4 Paket	-
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah orang yang terampil budidaya ikan air tawar	10 Angkatan	1 Angkatan	5 Angkatan	5 Angkatan	100%	NA Angkatan	6 Angkatan	60%
		Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang terbina	5 Kelompok	NA Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	100%	NA Kelompok	5 Kelompok	100%
		Jumlah orang yang terampil budidaya di telaga	50 Orang	9 Angkatan	- Orang	- Orang	-	NA Orang	9 Orang	18%
		Jumlah teraksananya pelatihan budidaya lele ramah lingkungan	NA Angkatan	38 Angkatan	NA Angkatan	NA Angkatan	-	NA Angkatan	38 Angkatan	-
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	327 Kelompok	NA Kelompok	NA Kelompok	NA Kelompok	-	60 Kelompok	60 Kelompok	18%
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat rekomendasi/tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil	25 Rekomendasi	NA Rekomendasi	25 Rekomendasi	- Rekomendasi	0%	NA Rekomendasi	NA Rekomendasi	-
		Persentase pokdakan yang telah mendapatkan surat rekomendasi/ tanda daftar	2,26 Persen	NA Persen	5,64 Persen	- Persen	0%	NA Persen	NA Persen	-
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil	10 Angkatan	NA Angkatan	1 Angkatan	1 Angkatan	100%	NA Angkatan	1 Angkatan	10%
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarpras pembudidayaan ikan yang difasilitasi	8 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	8 Jenis	13 Jenis	163%
		Jumlah produksi perikanan budidaya	11.426 Ton	12.182 Ton	10.311 Ton	12.348 Ton	120%	10.579 Ton	35.109 Ton	307%
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan sumur bor air tawar untuk hatchery/unit pembenihan (DAK)	NA Paket	1 Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	1 Paket	-
		Jumlah rehabilitasi bangunan panti benih/ bangsal hatchery (DAK)	NA Paket	1 Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	1 Paket	-
		Jumlah rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/larva/london (DAK)	NA Paket	1 Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	1 Paket	-
		Jumlah rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) (DAK)	NA Paket	1 Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	1 Paket	-
		Jumlah bulan operasionalisasi dan pengelolaan UPT BBI Mine Kencana	12 Bulan	NA Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	NA Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah pengadaan pakan ikan	1 Paket	NA Paket	1 Paket	1 Paket	100%	NA Paket	1 Paket	100%
		Jumlah pengadaan induk ikan unggul	1 Paket	NA Paket	1 Paket	1 Paket	100%	NA Paket	1 Paket	100%
		Jumlah sarpras pembenihan	1 Paket	NA Paket	1 Paket	1 Paket	100%	NA Paket	1 Paket	100%
		Jumlah Sarpras Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64 Unit	NA Unit	NA Unit	NA Unit	-	15 Unit	15 Unit	23%

Kode	Usuan/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja) PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pengadaan pakan ikan	NA LS	1 LS	NA LS	NA LS	NA LS	-	NA LS	1 LS	-
		Jumlah penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul (DAK)	NA Paket	1 Paket	NA Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	1 Paket	-
		Jumlah sarpras perbenihan	NA LS	1 LS	NA LS	NA LS	NA LS	-	NA LS	1 LS	-
		Operasionalisasi UPT BBI Mira Kencana	2 Paket	5 Paket	NA Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	5 Paket	250%
		Jumlah paket budidaya lele kolam bundar	100 Paket	NA Paket	96 Paket	96 Paket	96 Paket	100%	NA Paket	96 Paket	96%
		Jumlah paket budidaya ikan lele higienis terintegrasi sayuran organik	- Paket	4 Paket	NA Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	- Paket	-
		Jumlah paket percontohan budidaya ikan hias	2 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	NA Paket	2 Paket	100%
		Jumlah paket budidaya minipadi	152 Unit	NA Unit	NA Unit	NA Unit	NA Unit	-	NA Unit	48 Unit	32%
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit	25 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	100%	NA Unit	70 Unit	140%
		Jumlah tersedianya obat-obatan untuk Pasikandu	140 Orang	1 Angkatan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	NA Orang	21 Orang	15%
		Jumlah orang yang terampil pengendalian hama penyakit ikan dan vaksinasi	18 Lokasi	NA Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	100%	NA Lokasi	10 Lokasi	56%
		Jumlah lokasi pengawasan peredaran OKB	24 Lokasi	NA Lokasi	11 Lokasi	11 Lokasi	11 Lokasi	100%	NA Lokasi	11 Lokasi	46%
		Jumlah lokasi pengawasan hama penyakit ikan	- Paket	1 Paket	NA Paket	NA Paket	NA Paket	-	NA Paket	1 Paket	-
		Jumlah paket peralatan dan bahan laboratorium posikandu	NA Angkatan	1 Angkatan	NA Angkatan	NA Angkatan	NA Angkatan	-	NA Angkatan	1 Angkatan	-
		Jumlah sekolah lapang pengendalian hama penyakit ikan	24 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	25%
		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	300%
		PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	60 Lokasi	NA Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	100%	12 Lokasi	24 Lokasi	40%
		Persentase perairan umum daratan yang diawasi	16,30 Persen	NA Persen	3,26 Persen	3,26 Persen	3,26 Persen	100%	3,26 Persen	6,52 Persen	40%
		Jumlah pembinaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)	4 Kelompok	3 Angkatan	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	NA Kelompok	6 Kelompok	150%
		Jumlah penebaran benih ikan untuk pengkayaan di perairan umum daratan	25 Lokasi	10 Lokasi	36 Lokasi	36 Lokasi	36 Lokasi	100%	NA Lokasi	46 Lokasi	184%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	16 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	19%
		Angka Konsumsi Ikan	29,50 Kilogram/Kapita	27,69 Kilogram/Kapita	27,50 Kilogram/Kapita	27,50 Kilogram/Kapita	NA Kilogram/Kapita	-	28,00 Kilogram/Kapita	27,69 Kilogram/Kapita	94%
		Jumlah poklhas yang dibina dan difasilitasi	74 Kelompok	8 Kelompok	11 Kelompok	11 Kelompok	29 Kelompok	264%	12 Kelompok	12 Kelompok	16%
		Persentase poklhas terfasilitasi	113,85 Persen	NA Persen	16,92 Persen	16,92 Persen	44,62 Persen	264%	18,46 Persen	63,08 Persen	55%
		Jumlah pameran produk perikanan	2 Kali	NA Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	NA Kali	2 Kali	100%
		Jumlah orang yang terampil membuat kerajinan hasil laut	60 Orang	60 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	-	NA Orang	60 Orang	100%
		Jumlah orang yang terampil membuat olahan hasil perikanan	50 Orang	60 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	NA Orang	100 Orang	200%
		Jumlah kelompok pengolah dan pemasar (poklhas) yang terbina	9 Kelompok	2 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	100%	NA Kelompok	10 Kelompok	111%
		Jumlah pelayanan pengawasan mutu hasil perikanan	- Kali	2 Kali	NA Kali	NA Kali	NA Kali	-	NA Kali	2 Kali	-
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Peningkatan Penyerapan Perizinan Benusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Stala Usaha dan Risiko	63 Unit Usaha	NA Unit Usaha	NA Unit Usaha	NA Unit Usaha	NA Unit Usaha	-	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	19%

Kode	Usuan/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja) PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia Angka ketersediaan ikan	49 Jenis 30,27 Kilogram/ Kapita	2 Jenis 28,78 Kilogram/ Kapita	2 Jenis 28,27 Kilogram/ Kapita	2 Jenis 28,78 Kilogram/ Kapita	100%	12 Jenis 28,88 Kilogram/ Kapita	12 Jenis 86,43 Kilogram/ Kapita	24%
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kampanye makan ikan PAUD, TK, SD, Posyandu, Lansia dan PKK Jumlah terpeliharanya mesin pabrik es Jumlah terpeliharanya operasional pengolahan pabrik es Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah bulan operasionalisasi dan pengelolaan pabrik es	10 Lokasi NA Unit NA LS 2.337 Ton 12 Bulan	NA Lokasi NA Unit 1 LS NA Ton 12 Bulan	10 Lokasi NA Unit NA LS NA Ton 12 Bulan	9 Lokasi NA Unit NA LS NA Ton 12 Bulan	90%	NA Lokasi NA Unit NA LS 655,49 Ton NA Bulan	9 Lokasi 1 Unit 1 LS 655,49 Ton 24 Bulan	90%
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	890 Pelaku Usaha	NA Pelaku Usaha	NA Pelaku Usaha	NA Pelaku Usaha	-	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	34%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa jenis layanan kepada masyarakat, yaitu:

- a. Pelayanan pemberian obat/vaksin ikan.
- b. Pelayanan penjualan es balok.
- c. Pelayanan surat rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan.
- d. Pelayanan konsultasi dan data perikanan.
- e. Pelayanan penjualan benih ikan di UPT BBI Mina Kencana.
- f. Pelayanan pelelangan ikan di UPT TPI Arghamina.

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2024, yaitu :

- a. Kenaikan harga pakan ikan.
- b. Cuaca/iklim/musim ikan.
- c. Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing.

Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan dalam hal pengambilan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor yang dalam rangka diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024, yaitu :

- a. Pemberian pelatihan/bantuan sarana prasarana kepada masyarakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
- b. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan/sub kegiatan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Pengoptimalan operasionalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A IKU												
1	Produksi perikanan budidaya	Kg/ Tahun	13.090.200	10.311.097	10.579.185	10.854.244	12.181.679	12.348.024	12.254.879	10.854.244		
2	Nilai pendapatan perikanan tangkap	Rp/ Tahun	27.003.629	31.776.355	32.684.514	33.455.006	31.015.626	34.589.132	32.681.191	33.455.006		
3	Nilai pendapatan pembudidaya ikan	Rp/Tahun	4.534.103	4.156.864	4.235.296	4.315.207	4.769.242	5.424.234	4.929.465	4.315.207		
4	Produksi perikanan tangkap	Kg/ tahun	5.209.000	3.724.144	3.910.351	4.105.869	3.984.158	3.941.281	3.910.000	4.105.869		
B IKK OUTCOME												
1.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Kg/ Tahun	18.299.200	14.035.241	14.489.536	14.960.113	16.165.837	16.289.305	16.164.879	14.960.113		
C IKK OUTPUT												
1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP					16	4	4	4		
2.	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	Persen					100	100	100	100		
3.	Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Surat					0	40	50	60		Perusahaan/ Perorangan yang telah memiliki Nomor Perizinan Berusaha (NIB)
4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	Kelompok					84	114	58	18		
5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	1.000 Ekor					28.344	20.263.224	21.276.385	22.340.204		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai peran strategis dalam pemenuhan prioritas ketahanan pangan. Isu-isu strategis pembangunan lingkup kelautan dan perikanan tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan;
2. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
3. Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing;
4. Penataan kawasan Krakal meliputi operasional parkir terpadu Krakal, penataan pedagang dan rehabilitasi gedung P3HP serta kios pemasaran;
5. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia lingkup kelautan dan perikanan;
6. Peningkatan kualitas kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
7. Peningkatan ketersediaan sarana produksi perikanan;
8. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
9. Peningkatan akses permodalan lingkup kelautan dan perikanan;
10. Peningkatan akses pemasaran hasil olahan perikanan;
11. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
12. Pengembangan pola kemitraan;
13. Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan; dan
14. Pelestarian potensi sumberdaya hayati kelautan dan perikanan yang terkendali.

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, *stakeholder* dan pemerintah sendiri. Rancangan RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan RKPD menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah.

Rancangan RKPD yang sudah diadaptasikan dengan kondisi pemulihan Covid-19 berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Selain itu, rancangan RKPD dibuat dengan melalui proses *bottom up* melalui mekanisme musrenbang dan penjaringan pokok pikiran dewan yang disesuaikan dengan hasil renstra Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY dan Pusat kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target.

Berdasarkan analisis kebutuhan serta melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang muncul, beberapa faktor penentu keberhasilan di tahun 2024 antara lain :

1. Pendampingan, pembinaan, pelatihan dan penyuluhan pada kelompok pelaku usaha perikanan secara intensif.
2. Peremajaan infrastruktur utama produksi benih ikan, produksi es balok, tempat pelelangan ikan dan gedung P3HP.
3. Memberikan bantuan stimulan berupa barang kepada pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan.
4. Meningkatkan kegiatan pelatihan pengolahan hasil perikanan.

5. Meningkatkan kegiatan kampanye makan ikan untuk ibu hamil/balita sebagai upaya penurunan angka *stunting*.

Reviu program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dan penunjang serta kebutuhan dana terhadap rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 tersaji pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik	100 Persen	7.001.729.633	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Gunungkidul	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik	100 Persen	3.628.241.227			
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	17 Jenis	54.380.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	17 Jenis	26.327.500	Jumlah dokumen renja = 1 dokumen Jumlah laporan data sistem informasi kelautan dan perikanan = 1 dokumen Jumlah dokumen forum perangkat daerah = 1 dokumen Jumlah dokumen draf renstra = 1 dokumen		
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	47.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.212.500	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) = 1 dokumen		
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	550.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	165.000	Jumlah dokumen perubahan RKA = 1 dokumen		
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	165.000	Jumlah dokumen perubahan RKA = 1 dokumen		
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	195.000	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) = 1 dokumen		
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	195.000	Jumlah dokumen perubahan DPA = 1 dokumen Jumlah dokumen perjanjian kinerja = 1 dokumen		
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	128.000	Jumlah dokumen LKJP = 1 laporan Jumlah laporan TEPPRA/Peperangan dan realisasi anggaran = 1 laporan x 12 bulan Jumlah laporan hasil evaluasi renja (evaluasi hasil RKPD) = 1 laporan x 4 triwulan		
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.280.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	267.000	Jumlah dokumen SKM OPD (OKP, UPT BBL, UPT TP) = 3 laporan Jumlah dokumen RTP (SPIP) = 1 laporan Jumlah dokumen revisi SOP = 1 laporan		
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah laporan keuangan tersusun	4 Jenis	3.136.195.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah laporan keuangan tersusun	4 Jenis	2.186.913.727			
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476 Orang/Bulan	3.107.800.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/Bulan	2.156.541.227	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN = 33 orang x14 bulan		
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	425.000	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun = 1 laporan		
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	26.895.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	29.947.500	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ = 12 laporan		
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah ASN yang terfasilitasi	34 ASN	19.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah ASN yang terfasilitasi	34 Orang	23.621.500	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran = 1 laporan		
1)	Pengadaan Pakiaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Pakiaan Dinas beserta Atribut	1 Paket	7.500.000	Pengadaan Pakiaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Pakiaan Dinas beserta Atribut	0 Paket	0	Jumlah pengadaan pakaian dinas = 0 paket		
2)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	23.621.500	Jumlah dokumen KPA = 1 dokumen Jumlah dokumen SKP = 1 dokumen Jumlah dokumen Penilaian SKP = 1 dokumen Jumlah dokumen Naik Pangkat = 1 dokumen Jumlah dokumen KCB = 1 dokumen Jumlah dokumen Pensiun = 1 dokumen		
3)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Jumlah ASN mengikuti bimbingan, kursus, penataran, orientasi = 0 orang		
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Luar Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	7 Layanan	207.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Luar Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	7 Layanan	19.100.000			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting		
1	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Kab. Gunungkidul	4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 12 Paket	6 7.500.000	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Kab. Gunungkidul	9 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 12 Paket	11 2.400.000	12 Jumlah paket komponen instalasi listrik = 12 bulan x 1 paket		
	2) Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	86.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.000.000	Jumlah paket ATK = 12 bulan x 1 paket		
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	2.400.000	Jumlah paket kebersihan = 12 paket x 1 bulan		
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.000.000	Jumlah paket barang cetakan = 12 paket x 1 bulan		
	5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	366 Dokumen	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	0 Dokumen	0	Jumlah surat kabar = 0 dokumen		
	6) Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	2.500.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	800.000	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu = 1 laporan x 4 triwulan		
	7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Luar DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	86.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Luar DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.500.000	Jumlah laporan rapat koordinasi = 12 bulan x 1 laporan		
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	3 Layanan	61.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	3 Layanan	0			
	1) Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	9.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Jumlah pengadaan lemari kayu = 0 unit		
	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	32.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Jumlah pengadaan scanner = 0 unit		
	3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Jumlah pengadaan AC = 0 unit		
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	339.687.803	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	220.783.500			
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	826.736	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	120.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat = 1 laporan x 12 bulan		
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300 Laporan	338.261.067	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300 Laporan	219.463.500	Jumlah tagihan air = 6 rekening x 1 laporan x 12 bulan Jumlah tagihan listrik = 17 rekening x 1 laporan x 12 bulan Jumlah tagihan telepon/faximile = 2 rekening x 1 laporan x 12 bulan		
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000	Jumlah laporan jasa persampahan = 1 laporan x 12 bulan		
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	4 Layanan	376.892.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	4 Layanan	151.177.500			
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	716 Unit	203.197.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	351 Unit	69.612.500	Jumlah pemeliharaan mobil/truk = 1 unit x (12 bulan pemeliharaan + 1 pajak) = 13 unit Jumlah pemeliharaan motor roda 2 = 26 unit x (12 bulan pemeliharaan + 1 pajak) = 338 unit Jumlah pemeliharaan motor roda 3 = 0 unit x (1 bulan pemeliharaan + 1 pajak) = 0 unit		
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	23.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.600.000	Jumlah pemeliharaan gedung DKP = 1 unit Jumlah pemeliharaan jaringan internet = 0 unit Jumlah pemeliharaan laptop = 2 unit Jumlah pemeliharaan mesh ketik = 0 unit Jumlah pemeliharaan PC = 2 unit Jumlah pemeliharaan printer = 2 unit		
	3) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	140.445.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	6.635.000	Jumlah pemeliharaan gedung pertemuan = 0 unit Jumlah pemeliharaan gedung poskandu = 0 unit Jumlah pemeliharaan gedung poshulu = 0 unit		
	4) Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	72.330.000	Jumlah pemeliharaan AC = 1 unit		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Kab. Gunungkidul	Nilai pendapatan nelayan	Rp33.455.005,76	730.845.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Kab. Gunungkidul	Nilai pendapatan nelayan	Rp33.455.005,76	529.915.000			
A	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah KUB yang dibina dan terfasilitasi	20 Kelompok	59.945.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah KUB yang dibina dan terfasilitasi	20 Kelompok	150.105.000			
	1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	310 Orang	59.945.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	150.105.000	Jumlah pembinaan KUB = 1 angkatan x 20 orang		
B	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	Jumlah TPI yang beroperasi	8 TPI	670.900.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	Jumlah TPI yang beroperasi	8 TPI	379.810.000			
	1) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	15 Layanan	670.900.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	13 Layanan	379.810.000	Jumlah bulan operasionalisasi TPI = 1 layanan x 12 bulan Jumlah pengadaanimbangan (500 kg, 300 kg, 30 kg) = 1 layanan		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Gunungkidul	Nilai pendapatan pembudidaya ikan	Rp4.315.207,11	1.319.790.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Gunungkidul	Nilai pendapatan pembudidaya ikan	Rp4.315.207,11	368.597.500			
A	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah pokdakan yang dibina dan terfasilitasi	74 Kelompok	77.445.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah pokdakan yang dibina dan terfasilitasi	74 Kelompok	35.682.500	Jumlah pembinaan pokdakan = 10 kelompok		
1)	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	74 Kelompok	77.445.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	35.682.500	Jumlah pembinaan pokdakan = 10 kelompok		
B	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Gunungkidul	Jumlah sarpras pembudidayaan ikan yang difasilitasi	8 Jenis	1.242.345.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Gunungkidul	Jumlah sarpras pembudidayaan ikan yang difasilitasi	8 Jenis	332.915.000			
1)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Unit	431.270.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Unit	265.100.000	Jumlah unit operasionalisasi BBI = 12 unit Jumlah paket pembelian bahan penyediaan benih ikan = 1 unit		
2)	Penjambihan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33 Unit	655.900.000	Penjambihan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	35.917.500	Jumlah pengadaan pakan ikan = 1 unit Jumlah pengadaan sarpras perbenihan = 1 unit Jumlah paket pembelian obat-obatan ikan = 1 unit		
3)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengabdian Kesehatan Ikan	6 Dokumen	155.175.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengabdian Kesehatan Ikan	1 Dokumen	31.897.500	Jumlah dokumen bintek pengendalian HPI dan vaksinas = 1 dokumen		
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Gunungkidul	Persentase kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan	100 Persen	171.265.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Gunungkidul	Persentase kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan	100 Persen	6.970.000	Potensi luas lahan budidaya ikan dalam kajian rencana aksi = 0 Ha		
A	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah perairan umum daratan yang diawasi	12 Lokasi	171.265.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah perairan umum daratan yang diawasi	12 Lokasi	6.970.000	Jumlah dokumen kegiatan pembinaan pembinaan pokmaswas = 1 dokumen		
1)	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	171.265.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.970.000	Jumlah dokumen kegiatan pembinaan pembinaan pokmaswas = 1 dokumen		
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Angka konsumsi ikan	28.50 Kilogram/Kapita	585.074.830	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Angka konsumsi ikan	28.50 Kilogram/Kapita	94.835.000			
A	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah poklhasr yang dibina dan terfasilitasi	15 Kelompok	29.044.340	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah poklhasr yang dibina dan terfasilitasi	15 Kelompok	3.000.000			
1)	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan PERSYARATAN atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	29.044.340	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan PERSYARATAN atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	3.000.000	Jumlah pembinaan poklhasr = 1 unit usaha		
B	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Jumlah layanan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia	11 Layanan	556.030.490	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Jumlah layanan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia	11 Jenis	91.835.000			
1)	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	382.441 Ton	400.030.400	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	382.441 Ton	91.835.000	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan (operasionalisasi pabrik es) = 382,441 Ton		
2)	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	235 Pelaku Usaha	156.000.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	0 Pelaku Usaha	0	Jumlah anjangan karya olahan hasil perikanan = 0 pelaku usaha Jumlah pelaku usaha mengikuti pameran hasil perikanan = 0 pelaku usaha Jumlah pelatihan olahan hasil perikanan = 0 pelaku usaha		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan pengumpulan program dan kegiatan dari sekretariat, bidang-bidang teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 2 (dua) UPT, yaitu UPT Balai Benih Ikan (BBI) Mina Kencana dan UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arghamina. Langkah selanjutnya, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat, diadakan Musrenbang di semua kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pada kegiatan musrenbang para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari masyarakat kapanewon/kalurahan yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah (PD), diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan dalam kamus usulan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, secara organisasi pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas, yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas. Secara perorangan atau kelompok, pemangku kepentingan mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional hingga lokal), peneliti, penyuluh, pengawas perikanan, pembudidaya, nelayan, pengepul, pengolah dan pemasar, masyarakat penagwas, petani garam, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu (1) teknokratis; (2) partisipatif; (3) politis; serta (4) *top down* dan *bottom up*. Konsekuensi logis terhadap 4 (empat) pendekatan perencanaan tersebut adalah pentingnya sinergitas dan integritas serta potensi dana yang ada harus diarahkan secara bijak untuk mendanai program pembangunan tersebut.

Musrenbang kapanewon merupakan bentuk nyata dari salah satu pendekatan perencanaan yaitu pendekatan partisipatif. Mekanisme musrenbang juga dipergunakan sebagai wahana untuk mempertemukan dan mensinergikan beberapa pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*).

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK (Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan) dan PIS (Pagu Indikatif Sektoral). Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Organisasi Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk dapat mendapat penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kapanewon sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran, serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum OPD tersebut.

Kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul juga dijadikan sarana untuk menjembatani usulan program/kegiatan tahun 2024. Semua komponen tersebut dikompilasi dan dianalisa kesesuaiannya dengan dokumen rencana strategis serta dokumen RKPD. Sehingga nantinya rencana program dan kegiatan mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dapat terwujud. Usulan yang sudah disetujui dan memenuhi persyaratan dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
A	PIWK						
1	(PIWK) - Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	PAUD AL AMIN PADUKUHAN SELANG, PAUD AL HIDAYAH PADUKUHAN WATUDALANG, TK ABA PADUKUHAN SELANG, TK KUNCUP MELATI PADUKUHAN WATUDALANG, Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
2	(PIWK) - Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	paud kampoja, kalangan 2, Karangmojo, Ngipak	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
3	(PIWK) - Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	Purwodadi (bina mandala donggolo, paud al uswah brongko), Tepus Purwodadi (TK brongkol, dan pelita bangsa 2 pringsanggar), Tepus Purwodadi (pelita bangsa 1 sureng, bina buana gesing satu), Tepus	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	6 angkatan	3.100.000	18.600.000	Diterima
4	(PIWK) - Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	Piyaman, Wonosari	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	8 angkatan	3.100.000	24.800.000	Diterima
JUMLAH A						49.600.000	
B	POKIR						
1	Pelatihan budidaya ikan air tawar	Kelompok Muda Karya, Bundelan, Tancep, Ngawen	Jumlah pelatihan budidaya ikan air tawar	1 angkatan	11.000.000	11.000.000	Diterima
2	Pelatihan budidaya ikan air tawar	Kelompok Mina Maju, Pudak, Terbah, Patuk	Jumlah pelatihan budidaya ikan air tawar	1 Angkatan	11.000.000	11.000.000	Diterima
3	Pelatihan budidaya ikan air tawar	Kelompok Budidaya Ikan Sentosa, Tapansari, Watusigar, Ngawen	Jumlah pelatihan budidaya ikan air tawar	1 Angkatan	11.000.000	11.000.000	Diterima
4	Pelatihan budidaya ikan air tawar	Kelompok Berkah Mina, Gantiwarno, Kampung, Ngawen	Jumlah pelatihan budidaya ikan air tawar	1 angkatan	11.000.000	11.000.000	Diterima
5	Pelatihan budidaya ikan air tawar	Kelompok Budidaya Perikanan MINA MANDIRI SEJAHTERA, Tegalrejo, Beji, Ngawen	Jumlah pelatihan budidaya ikan air tawar	1 Angkatan	11.000.000	11.000.000	Diterima
6	Pelatihan budidaya ikan air tawar	Kelompok Budidaya Ikan Mina Songo Siji, Sambirejo, Watusigar, Ngawen	Jumlah pelatihan budidaya ikan air tawar	1 Angkatan	11.000.000	11.000.000	Diterima

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
7	Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	TK Masyithoh Blarangan, Blarangan, Sidorejo, Ponjong	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 Angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
8	Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	TK Masyithoh Trenggono lor, Trenggono lor, Sidorejo, Ponjong	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 Angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
9	Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	TK Masyithoh Sawahan, Sawahan, Ponjong	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 Angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
10	Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	TK Masyithoh Ngampel, Ngampel, Sidorejo, Ponjong	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 Angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
11	Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	TK Masyithoh Ngrawan, Ngrawan, Sidorejo, Ponjong	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 Angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
12	Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	TK Masyithoh Grogol, Grogol, Tambakromo, Ponjong	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 Angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
13	Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	RA Koripan I, Koripan I, Sumbergiri, Ponjong	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 Angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
14	Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	PAUD dusun Karangijo kulon, karangijo kulon, Ponjong, Ponjong	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 Angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
15	Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	TK Koripan I, Koripan I, Sumbergiri, Ponjong	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 Angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
16	Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	TK Masyithoh Tengger, Padukuhan tengger, Sawahan, Ponjong	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1 Angkatan	3.100.000	3.100.000	Diterima
					JUMLAH B	97.000.000	
					TOTAL (A+B)	146.600.000	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul juga menselaraskan dengan arah dan kebijakan Kementerian terkait yang termuat dalam Renstra Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar apa yang ditetapkan sebagai arah dan kebijakan Kementerian serta Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diselaraskan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, sehingga perwujudan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta (DKP DIY) dapat dijabarkan dan dijadikan pedoman oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun tujuan dan sasarannya. Sinkronisasi baik visi maupun misi ini sangat penting agar dalam pelaksanaan program kegiatan KKP dan DKP DIY dapat diakses dan dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul karena sudah tercantum dalam Rencana Kerja Dinas.

Telaahan Renja Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul terhadap kebijakan nasional dilaksanakan secara berjenjang/hierarki selaras dengan pencapaian visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai sub sistem perencanaan pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa seluruh target dan sasaran pencapaiannya harus mendukung sasaran dan target pembangunan nasional serta memiliki sinergitas yang harmonis dalam semua strategi kebijakannya.

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan tahun 2024 dirumuskan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

- a. Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026:
“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”
- b. Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026:
 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
 2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2023 juga memperhatikan Arah Kebijakan Nasional dan DIY sebagai berikut :

- a. Arah kebijakan nasional
 - 10 destinasi pariwisata prioritas.
 - Industri 4.0 di 6 sub sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi, dan alat kesehatan.
 - Pembangunan *science techno park*.
 - Percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*.
 - Integrasi bantuan social menuju skema perlindungan sosial menyeluruh/ MP Perlinsos.
 - Transformasi digital.
- b. Arah kebijakan provinsi
 - Mengatasi ketimpangan wilayah.
 - Mengatasi ketimpangan pendapatan.
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah: “Peningkatan kondisi ekonomi daerah dan layanan dasar melalui penguatan UMKM, pengembangan sektor unggulan, investasi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.”

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana;
2. Peningkatan ekonomi;
 - a. UMKM unggulan
 - b. Investasi dan pariwisata
 - c. Pengembangan sektor unggulan
3. Penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Ketentraman dan ketertiban;
6. Reformasi birokrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan

Rumusan tujuan dan sasaran PD disusun berdasarkan prioritas sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1.	Terwujudnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang optimal	Nilai sub kategori perikanan dalam PDRB	249.043,85 (juta Rupiah)

Tabel 3.2.

Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
1.	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Rp37.770.212,88
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	A (80,30)

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Rp37.770.212,88

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah.

Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja dan pendanaan disajikan dalam Tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					3	25	03			
Peningkatan ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Rp37.770.212,88	3	25	03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.774.841.227	DKP
					3	25	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.774.841.227	DKP
					3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	529.915.000	DKP
					3	25	03	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.105.000	DKP
					3	25	03	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	150.105.000	DKP
					3	25	03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	379.810.000	DKP
					3	25	03	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	379.810.000	DKP
					3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	434.597.500	DKP
					3	25	04	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	35.682.500	DKP
					3	25	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35.682.500	DKP
					3	25	04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	398.915.000	DKP
					3	25	04	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.100.000	DKP
					3	25	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.917.500	DKP
					3	25	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.897.500	DKP
					3	25	04	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	0	DKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.970.000	DKP
					3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	6.970.000	DKP
					3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	6.970.000	DKP
					3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	175.435.000	DKP
					3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.000.000	DKP
					3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.000.000	DKP
					3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	172.435.000	DKP
					3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	172.435.000	DKP
					3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	DKP
					3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.627.923.727	DKP
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	A (80,30)	3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.327.500	DKP
					3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.212.500	DKP
					3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	165.000	DKP
					3 25 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	165.000	DKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	195.000	DKP
					3 25 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	195.000	DKP
					3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	128.000	DKP
					3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.000	DKP
					3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.186.913.727	DKP
					3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.156.541.227	DKP
					3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	425.000	DKP
					3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	29.947.500	DKP
					3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.621.500	DKP
					3 25 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	DKP
					3 25 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.621.500	DKP
					3 25 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	DKP
					3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.100.000	DKP
					3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000	DKP
					3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	DKP
					3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	DKP
					3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	DKP
					3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	DKP
					3 25 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	800.000	DKP
					3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000	DKP
					3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	DKP
					3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	0	DKP
					3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	DKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode			Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab			
					3	25	01						
						3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	DKP
						3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.783.500	DKP
						3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.000	DKP
						3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.463.500	DKP
						3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000	DKP
						3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.177.500	DKP
						3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.612.500	DKP
						3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.600.000	DKP
						3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.635.000	DKP
						3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.330.000	DKP

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					3.677.841.227,00				7.141.764.225,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.677.841.227,00				7.141.764.225,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	2.627.923.727,00				4.282.734.629,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun (Jenis)	(DKP, KAB. GUNUNGKIDUL)	17	26.327.500,00			17	57.400.000,00
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGKIDUL)	5	25.212.500,00			4.00	49.450.000,00
		Dokumen draf renstra (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	575.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen laporan data sistem informasi kelautan dan perikanan (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	30.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen perubahan renja 2024 (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Dokumen renja 2025 (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Honor THL dan THR THL (Hari)	(DKP, KAB. GUNUNGKIDUL)	247	23.447.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) Dokumen RKA 2025 (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	165.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	600.000,00
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Dokumen perubahan RKA 2024 (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	165.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	350.000,00
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) Dokumen DPA 2024 (Dokumen) Dokumen perjanjian kinerja 2024 (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	2	195.000,00			3	1.550.000,00
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) Dokumen perubahan DPA 2024 (Dokumen) Dokumen perjanjian kinerja 2024 (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	180.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	700.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			4	5	6	7		8	9
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	17.00	128.000,00			17.00	2.200.000,00
		Laporan hasil evaluasi renja (evaluasi hasil RKP) (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	4	24.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	50.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Laporan realisasi keuangan, fisik dan pengadaan barang/jasa (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	54.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	8	267.000,00			5.00	2.550.000,00
		Laporan revisi SOP (Laporan)	(DKP, Pabrik Es, Posikandu, UPT BBI, UPT TPI, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	45.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Laporan RTP/SPIP (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	30.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Laporan SKM OPD (DKP, UPT BBI, UPT TPI) (Laporan)	(DKP, Pabrik Es, Posikandu, UPT BBI, UPT TPI, KAB. GUNUNGGIDUL)	6	192.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah laporan keuangan tersusun (Jenis)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	4	2.186.913.727,00			4	3.152.790.000,00
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	462	2.156.541.227			504	3.124.395.000
		Penyediaan gaji, tunjangan dan insentif PAD (Orang / Bulan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	462	2.156.541.227,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	425.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	1.500.000,00
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) Honor THL dan THR THL (Hari) Laporan keuangan bulanan/SPJ (Laporan) Laporan keuangan semesteran (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	13	27.152.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13	26.895.000
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi (Orang)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	34	23.621.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36	19.500.000,00
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	0	-			1.00	8.000.000,00
3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) Dokumen kepegawaian (KP4, SKP, penilaian SKP, naik pangkat, KGB, (Dokumen) Honor THL dan THR THL (Hari)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	6	23.621.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.00	1.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	(DIY, KAB. GUNUNGGADUL)	0	-	-		5.00	10.000.000,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia (Layanan)	(DKP, Luar Daerah, KAB. GUNUNGGADUL)	7	19.100.000,00			7	218.100.000,00
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(DKP, Pabrik Es, Posikandu, UPT BBI, UPT TPI, KAB. GUNUNGGADUL)	12	2.400.000,00			12	8.000.000,00
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik (Paket)	(DKP, Pabrik Es, Posikandu, UPT BBI, UPT TPI, KAB. GUNUNGGADUL)	12	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(DKP, UPT BBI, UPT TPI, KAB. GUNUNGGADUL)	12	8.000.000,00			17.00	86.000.000,00
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket ATK (Paket)	(DKP, KAB. GUNUNGGADUL)	12	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket kebersihan (Paket)	(DKP, KAB. GUNUNGGADUL)	12	2.400.000,00			12	5.000.000,00
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(DKP, KAB. GUNUNGGADUL)	12	4.000.000,00				
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	(DKP, KAB. GUNUNGGADUL)	12	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	18.500.000,00
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket barang cetakan (Paket)	(DKP, KAB. GUNUNGGADUL)	12	4.000.000,00				
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGGADUL)	0	-			365.00	1.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	4	800.000,00		4		2.500.000,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	4	800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			96.600.000,00
3.25.01.2.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(DKP, Luar daerah, Luar Wilayah)	12	1.500.000,00		24.00		100.000.000,00
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	9.000.000,00
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Mebel	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia (Layanan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	0	-			2.00	57.000.000,00
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	0	-			8.00	34.000.000,00
3.25.01.2.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	0	-			3.00	350.247.629,00
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	0	-			3	847.629
		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia (Layanan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	3	220.783.500,00			4	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	4	120.000,00			4	
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	4	120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			4	5	6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(DKP, Pabrik Es, Posikandu, UPT BBI, UPT TPI, KAB. GUNUNGGIDUL)	300	219.463.500			300	348.800.000
		Jumlah tagihan air (Laporan)	(DKP, UPT TPI, KAB. GUNUNGGIDUL)	72	8.263.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah tagihan listrik (Laporan)	(DKP, Pabrik Es, Posikandu, UPT BBI, UPT TPI, KAB. GUNUNGGIDUL)	204	210.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah tagihan telepon/faximile (Laporan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	24	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	(DKP, Pabrik Es, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	1.200.000,00			12	600.000,00
		Jumlah laporan jasa persampahan (Laporan)	(DKP, Pabrik Es, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia (Layanan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	4	151.177.500,00			4	384.697.000,00
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau I ananan	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	351	69.612.500			716,00	206.797.000
		Honor THL dan THR THL (Hari)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	247	22.212.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah pemeliharaan mobil/truk (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	13	21.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah pemeliharaan motor roda 2 (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	338	26.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Programi/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	6	2.600.000,00			27.00	25.850.000,00
		Jumlah pemeliharaan laptop (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	2	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah pemeliharaan PC (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	2	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah pemeliharaan printer (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	2	600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banqunan Lainnya	1	(DKP, Posikandu, Posluh, Gedung Pertemuan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	6.635.000,00			4.00	141.050.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Banqunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Gedung DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	6.635.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banqunan Lainnya	1	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	72.330.000			12.00	11.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banqunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	72.330.000				
		Honor tenaga kontrak dan THR (Bulan)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	23.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Honor THL dan THR (Hari)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	612	48.630.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah pemeliharaan AC (Unit)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Pendapatan Nelayan (Rp)		33455005.76	529.915.000,00				522.075.000,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB yang dibina dan terfasilitasi (Kelompok)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGIDUL)	20	150.105.000,00			26	78.425.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang) Honor, THL dan THR : Pengadministrasi umum (Operator pabrik es) = 4 orang (6 hari kerja); Analis kenelayanan = 1 orang (5 hari kerja); Pengadministrasi umum = 1 orang (5 hari kerja) (Hari) Jumlah pembinaan KUB (Orang)	(Kapanewon pesisir, KAB. GUNUNGGIDUL)	20	150.105.000,00			360,00	78.425.000,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang beroperasi (TPI)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	1.682	147.705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Honor, THL dan THR (15 orang) (Hari) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan) Honor, THL dan THR (15 orang) (Hari) Jumlah layanan operasionalisasi TPI (Layanan) Jumlah layanan pengadaan timbangan (500 kg, 300 kg, 30 kg) (Layanan)	(Kapanewon pesisir, KAB. GUNUNGGIDUL)	20	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
			(TPI higienis sadeng, TPI nampu, TPI siung, TPI ngandong, TPI dtini, TPI baron, TPI ngrenehan, TPI Gesing, KAB. GUNUNGGIDUL)	8	379.810.000,00			8	443.650.000,00
			(TPI higienis sadeng, TPI nampu, TPI siung, TPI ngandong, TPI dtini, TPI baron, TPI ngrenehan, TPI gesing, KAB. GUNUNGGIDUL)	13	379.810.000,00			14,00	443.650.000,00
			(TPI higienis sadeng, TPI nampu, TPI siung, TPI ngandong, TPI dtini, TPI baron, TPI ngrenehan, TPI gesing, Kantor UPT TPI GUNUNGGIDUL)	4.224	357.060.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
			(TPI nampu, TPI siung, TPI ngandong, TPI dtini, TPI baron, TPI ngrenehan, TPI gesing, Aighamina, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	14.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
			(TPI nampu, TPI siung, TPI ngandong, TPI dtini, TPI baron, TPI ngrenehan, TPI gesing, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	8.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN BUDIDAYA	Nilai Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp)		4315207,11	434.597.500,00				1.463.446.898,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang dibina dan terfasilitasi (Kelompok)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGIDUL)	74	35.682.500,00			89	89.151.667,00
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Diperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	(KAB. GUNUNGGIDUL)	10	35.682.500,00			89.00	89.151.667,00
		Honor THL dan THR (Hari)	(DKP, KAB. GUNUNGGIDUL)	247	24.682.500,00	Dana Transfer Umum-Dana			
		Jumlah pembinaan pokdakan (Kelompok)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGIDUL)	10	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarpras pembudidayaan ikan yang difasilitasi (Jenis)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGIDUL)	8	398.915.000,00			8	1.374.295.231,00
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	(UPT BBI, KAB. GUNUNGGIDUL)	16	265.100.000,00			16.00	444.000.000,00
		Honor THL dan THR (6 hari) (Hari)	(BBI Beton dan BBI Susukan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1.800	152.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah unit operasionalisasi BBI (Unit)	(BBI Beton dan BBI Susukan, KAB. GUNUNGGIDUL)	12	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah unit paket pembelian bahan penjualan benih ikan (Unit)	(BBI Beton dan BBI Susukan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah unit paket pembelian obat ikan (Unit)	(BBI Beton dan BBI Susukan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah unit paket pengadaan pakan ikan (Unit)	(BBI Beton dan BBI Susukan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah unit paket pengadaan sarpras perbenihan (Unit)	(BBI Beton dan BBI Susukan, KAB. GUNUNGGIDUL)	1	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Programi/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	7	101.917.500,00		43.00		785.900.000,00
		Honor THL dan THR (Hari)	(DKP, KAB. GUNUNGGKIDUL)	247	25.917.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah unit paket budidaya ikan air tawar (POKIR-6 angkatan) (Unit)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	6	66.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah unit paket budidaya patin di kolam (Unit)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	(DKP, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	31.897.500,00		6.00		144.395.231,00
		Honor THL dan THR (Hari)	(DKP, KAB. GUNUNGGKIDUL)	247	25.917.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah dokumen bimtek pengendalian HPI dan vaksinasi (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	5.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (Ha)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0	-		0.00		
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Di Perairan Umum Daratan (%)		100	6.970.000,00				176.340.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Programi/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah perairan umum daratan yang diawasi (Lokasi)	(Perairan umum daratan, KAB. GUNUNGGADUD)	12	6.970.000,00			12	176.340.000,00
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	(Perairan umum daratan, KAB. GUNUNGGADUD)	1	6.970.000,00			4.00	176.340.000,00
		Jumlah dokumen kegiatan pembinaan pokmaswas (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGADUD)	1	6.970.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (kg)		28,50	175.435.000,00				697.167.698,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklahsar yang dibina dan terfasilitasi (Kelompok)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGADUD)	15	3.000.000,00			18	34.853.208,00
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGADUD)	1	3.000.000,00			18.00	34.853.208,00
		Jumlah pembinaan poklahsar (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGADUD)	1	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Programi/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah layanan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia (Jenis)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	11	172.435.000,00			12	662.314.490,00
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	382,44	172.435.000,00			803.57	500.814.490,00
		Honor. THL dan THR (Hari)	(DKP, KAB. GUNUNGKIDUL)	494	51.835.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK (PIWK-16 angkatan)	(Karangmojo, Tepus, Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	16	49.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK (POKIR-10 angkatan)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	10	31.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Jumlah peningkatan ketersediaan ikan (operasionalisasi pabrik es) (Ton)	(Pabrik es sari tirta mina, siraman, wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	382,44	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			161.500.000,00
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	0	-			235.00	
		J U M L A H			3.774.841.227,00				7.141.764.225,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dengan memperhatikan sumber daya, potensi yang dimiliki serta pertimbangan-pertimbangan tema pembangunan. Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat kelautan dan perikanan pada khususnya. Untuk menjamin agar program/kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan. Acuan yang dipakai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan Pembangunan.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing subbag, seksi dan UPT. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan maka tingkat capaian kinerja tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

KRISNA BERLIAN

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD, Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di dalam Renja harus tercantum dalam RKPD sedangkan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan harus mengacu pada Renstra yang selanjutnya menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2-1- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dimaksudkan untuk merumuskan dokumen penjabaran perencanaan yang memuat rencana program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pariwisata selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah :

- a. Sebagai pedoman dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Sebagai pedoman tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
- c. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
- d. Sebagai pedoman penilaian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pelaksanaan kinerja Dinas Pariwisata tugas pokok dan fungsinya Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul berpedoman dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA
BAB V	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan, yang terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembina : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian
- c. Unsur Pelaksana : Bidang-Bidang yang terdiri dari Seksi-Seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 dan sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2021 tersebut susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengalami perubahan. Perubahan ini untuk menyesuaikan kelembagaan yang ada di pusat yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Barekraf) selain itu agar Dinas Pariwisata dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih luas dan lebih berdayaguna. Perubahan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dengan adanya penambahan 1 (satu) Seksi serta beberapa perubahan pada nama jabatan. Adapun Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum;
- c. Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata terdiri dari:
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Informasi dan Kerja Sama Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Destinasi terdiri dari:
 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Sarana Wisata;
 3. Seksi Kelembagaan

- e. Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif;
 - 2. Seksi Industri Pariwisata;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2021 disusun berdasarkan target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2021 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan Emonev Bappeda Tahun 2021, untuk target kinerja PD Tahun 2022 berdasarkan Renja PD Tahun 2021 dan untuk perkiraan realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2022 berdasarkan rancangan reuiu Rencana Strategis PD Tahun 2022-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran (APBD) 2021 dan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp.10.884.011.445,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.9.729.122.445,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.1.154.889.000, untuk melaksanakan sebanyak 6 program, 15 kegiatan serta 42 Sub Kegiatan. Selanjutnya pada perubahan anggaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 dan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp.11.882.333.320,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.9.843.104.320,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.1.979.229000,00 dengan tetap untuk melaksanakan sebanyak 6 program, 15 kegiatan serta 42 Sub Kegiatan.

Rencana kerja (Renja) program, kegiatan, serta Sub Kegiatan serta anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dirinci sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	2.050.045.000,00
1	<i>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>	<i>2.050.045.000,00</i>
a	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	2.050.045.000,00
II.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	250.000.000,00

1	<i>Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</i>	250.000.000,00
a	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	250.000.000,00
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.787.439.750,00
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	82.900.000,00
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.000.000,00
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.255.000,00
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	555.000,00
d	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	635.000,00
e	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	555.000,00
f	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.900.000,00
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.693.101.250,00
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.618.351.250,00
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	71.500.000,00
d	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000,00
3	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	31.900.000,00
a	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.900.000
b	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
4	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	435.660.000,00
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.000.000,00
c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	180.000.000,00
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.500.000,00
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00
f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000,00

5	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	45.000.000,00
a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00
6	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	142.053.500,00
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.553.500,00
7	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	353.825.000,00
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.000.000,00
b	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.825.000,00
d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00
8	<i>Kegiatan Penataan Organisasi</i>	3.000.000,00
a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3.000.000,00
IV	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.515.581.570,00
1	<i>Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</i>	1.291.235.000,00
a	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	1.291.235.000,00
2	<i>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	1.224.346.570,00
a	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	-
b	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	582.491.570,00
c	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	641.855.000,00
V	Program Pemasaran Pariwisata	364.300.000,00
1	<i>Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	364.300.000,00

a	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	105.000.000,00
b	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	124.300.000,00
c	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	75.000.000,00
d	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	60.000.000,00
VI	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	854.967.000,00
1	<i>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	<i>796.045.000,00</i>
a	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	73.440.000,00
b	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	597.525.000,00
c	Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	55.080.000,00
d	Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	70.000.000,00
2	<i>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	<i>58.922.000,00</i>
a	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	35.400.000,00
b	Sub Kegiatan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	23.522.000,00
JUMLAH		11.822.333.320,00

Hasil evaluasi Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan pada akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program sebesar 99,97% dengan penyerapan keuangan sebesar 97,96% atau realisasi keuangan sebesar Rp.11.581.424.390,88 dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 11.822.333.320,00 yang terdiri dari Belanja operasi dengan target sebesar Rp. 9.843.104.320,00 dapat terealisasi Rp.9.607.144.371,43 atau sebesar 97,60% sedangkan untuk Belanja Modal dengan target sebesar Rp.1.979.229.000,00 dapat teralisasi Rp.1.974.280.019,45 atau 99,75%. Target kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata tahun 2022 dapat teralisasi dengan tingkat capaian 97,96% meskipun ada penyesuaian beberapa kegiatan sesuai kondisi teknis operasional.

2.1.1 Realisasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Pada Tahun 2022 seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, sehingga tidak ada program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

2.1.2 Realisasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Pada Tahun 2022 seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

2.1.3 Realisasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.

Rrealisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 tidak ada yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022;

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya serta terpenuhinya target kinerja program/kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 dari target yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perkembangan dinamika level PPKM selama Pandemi COVID 19 di DIY khususnya di Gunungkidul yang fluktuatif atau mengalami keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah
- b. Kenaikan harga BBM yang berdampakn terhadap turunnya tingkat kunjungan wisata
- c. Adanya bencana *hidrometeorologi* yang telah diprediksi sejak awal tahun seperti bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah di Pulau Jawa sebagai penyumbang wisatawan terbesar pada destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul
- d. Bencana tanah longsor di salah satu koridor utama pintu masuk ke destinasi wisata Gunungkidul yang berdampak juga terhadap penurunan jumlah wisatawan.

2.1.5 Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan masa periode waktu yang penuh harapan terhadap pemulihan perekonomian yang mendukung sektor pariwisata seiring dengan meredanya pandemi covid19. Tahun 2024 merupakan tahun politik yang diperkirakan juga akan berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja 2024.

Meski demikian Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan dengan penyusunan strategi kebijakan dan inovasi ditengah kondisi berat yang dihadapi.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah merupakan kegiatan yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas diantaranya adalah sinergitas dengan menggunakan pendekatan kinerja dalam prinsip penganggaran, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Sistem plafonisasi anggaran terhadap masing-masing PD berdampak terbatasnya ruang lingkup inovasi PD dalam pemberian pelayanan sehingga mengakibatkan penurunan kinerja pelayanan bidang kepariwisataan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepariwisataan sangat membutuhkan ameninitas, aksesibilitas dan akomodasi wisata. Update promosi wisata, peningkatan dan pengembangan destinasi wisata serta penguatan industri dan kelembagaan pariwisata membutuhkan peningkatan dukungan anggaran. Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas program/kegiatan lintas PD terkait, presentasi pada pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan memaksimalkan potensi sumberdaya yang ada merupakan salah satu upaya mengatasi keterbatasan yang ada sehingga diharapkan pada waktu yang akan datang Dinas Pariwisata sebagai Kabupaten Gunungkidul mendapatkan porsi anggaran yang memadai sesuai dengan kinerja yang dicapai.

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Sampai dengan Tahun 2023

PD: DINAS PARIWISATA

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 03 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
1 03 13 2.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase layanan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
1 03 13 2.02 03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Pengadaan lahan Penambahan Area Prakir Gunung Api Purba Nglangeran (Danais)	10	0	2000	2000	100	2000	2000	100
		Jumlah Dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas Kawasan Wisata Nglangeran			1	1	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen UKL-UPL Area Parkir Wisata Nglangeran;			1	1	100	1	1	100

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Reviu DED Area Parkir Wisata Nglanggeran			1	1	100	1	1	100
2 22 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
2 22 8	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase layanan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
2 22 8	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Atraksi wisata di Destinasi Wisata	5	3	0	0	0	1	1	100
2 22 8	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase layanan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang terlaksana	100	100	100	100	100	0	100	100
2 22 8	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Persentase Lembaga Wisata Budaya yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	0	100	100
3 26 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
3	26	1	2,01	84	28	28	100	79	100
		<i>Jumlah Dokumen dan buku yang disusun berdasarkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	292						
3	26	1	2,01	3	1	1	100	1	100
		Jumlah Dokumen Renja PD yang disusun	5	3	1	1	100	1	100
		Jumlah Dokumen Renja PD Perubahan yang disusun	5	3	1	1	100	1	100
		Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun	2	0	0	0	100	1	100
		Jumlah Forum PD yang terselenggara	5	3	1	1	100	1	100
3	26	1	2,01	3	1	1	100	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	3	1	1	100	1	100
3	26	1	2,01	3	1	1	100	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3	1	1	100	1	100
3	26	1	2,01	3	1	1	100	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5	3	1	1	100	1	100
3	26	1	2,01	3	1	1	100	1	100
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun	5	3	1	1	100	1	100

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
			5	3	1	1	100	1	100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun							
		Jumlah Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) yang disusun	5	3	1	1	100	1	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun	5	3	1	1	100	1	100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	5	3	1	1	100	1	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun	5	3	1	1	100	1	100
		Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun	5	3	1	1	100	1	100
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun	20	9	4	4	100	4	100
		Jumlah Dokumen Pendalian program /Kegiatan/Sub Kegiatan (TEPRA) yang disusun	60	36	12	12	100	12	100

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
3		Jumlah Penyusunan Buku Profil Pariwisata	150	1	0	0	0	0	0	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	150	90	30	30	30	30	100	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	70	42	14	14	14	14	100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	5	3	1	1	1	1	100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan bulanan yang disusun	60	36	12	12	12	12	100	
3		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	10	6	2	2	2	2	100	
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis yang disusun	5	3	1	1	1	1	100	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang terfasilitasi administrasi kepegawaian	260	153	51	51	51	51	100	

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
3	26	1	2,05	3	147	49	49	49	100
					250	250	250	250	100
3	26	1	2,05	9	6	2	2	2	100
3	26	1	2,06	3	24	8	8	8	100
3	26	1	2,06	1	48	16	16	16	100
3	26	1	2,06	2	135	45	45	45	100
3	26	1	2,06	3	51	17	17	17	100
3	26	1	2,06	5	0	0	0	0	100
3	26	1	2,06	5	36	12	12	12	100
3	26	1	2,06	6	36	12	12	12	100

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
3	2,06	1	9	3450	1150	1150	100	1150	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	651	217	217	100	217	100
3	2,07	1	34	0	0	0	100	6	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Peralatan kantor	0	0	0	100	6	100
3	2,07	06	34	0	0	0	100	6	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer dan printer yang dibeli	12	4	4	100	4	100
3	2,08	1	10	6	2	2	100	2	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terfasilitasinya pengadministrasian surat menyurat	360	120	120	100	120	100
3	2,08	2	600	360	120	120	100	120	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (10 rekening X 12 Bulan)	360	120	120	100	120	100
			Jumlah rekening air yang terbayar (10 rekening X 12 Bulan)	36	12	12	100	12	100
			Jumlah rekening telepon yang terbayar (1 rekening X 12 Bulan)						

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
3 26 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985	591	197	197	100	197	100
3 26 2					5	5	100	5	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas yang terbayarkan pajaknya	25	15	5	5	100	5	100
		Jumlah Motor Dinas yang di pelihara	95	57	19	19	100	19	100
		Jumlah Motor Dinas yang terbayarkan pajaknya	95	57	19	19	100	19	100
3 26 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer terfasilitasi Pemeliharaannya	110	66	22	22	100	22	100
3 26 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100
3 26 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terpelihara	135	81	27	27	100	27	100
3 26 13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen IKM DP	10	6	2	2	100	2	100

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	26	1	2,13	2	6	2	2	100	2	100
					10					
3	26	2			6,780	2,260	2,260	100	2,260	100
3	26	2	2,01		12	4	4	100	4	100
3	26	2	2,01		100	100	100	100	100	100
3	26	2	2,03		6	2	2	100	2	100
3	26	2	2,03		240	80	80	100	80	100
3	26	2	2,03		100	100	100	100	100	100
3	26	2	2,03		1440	480	480	100	480	100

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	
3	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jenis layanan promosi pariwisata yang terlaksana	95	33	11	11	100	11	100	
3	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah layanan promosi yang diselenggarakan	293	147	49	49	100	49	100	
3	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah layanan fasilitasi kegiatan pemasaran yang diselenggarakan	92	36	12	12	100	12	100	
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata yang diselenggarakan	35	9	3	3	100	3	100	
3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah layanan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang di laksanakan	16	3	1	1	100	1	100	

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100	100	100	100	100	100	
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi	1135	675	225	225	225	100	
3 26 5 2,01	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	<i>Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terlaksana</i>	1260	990	330	330	330	100	
3 26 5	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dasar Ekraft	100	100	100	100	100	100	
3 26 5 2,01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi melalui DAK Non Fisik	400	240	80	80	80	100	

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/ outcome/ kegiatan output	Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d Th berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
3	26	5	2.01	3	750	300	100	100	100
3	26	5	2.01	04	190	90	30	30	100
3	26	5	2.02		115	45	15	15	100
3	26	5	2.02	01	90	30	10	10	100
3	26	5	2.02	03	25	15	5	5	100

Hasil kinerja output dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2022 adalah 97,96%. Seluruh output pada masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila dilihat dari pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2022 yang merupakan tahun keempat periode Renstra, tingkat capaian dari masing-masing output kegiatan sangat bervariasi. Karena beberapa output kegiatan yang ditargetkan setiap tahun sehingga target pada akhir periode Renstra merupakan akumulasi dari lima tahun periode Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul merupakan Dinas Tipe B yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, tugas pokok Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan sedangkan fungsi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang pariwisata;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepariwisataan;
- d. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;
- f. Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;
- g. Pembinaan, dan pengembangan industri pariwisata;
- h. Pembinaan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
- i. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepariwisataan;
- j. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepariwisataan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan; dan
- l. Pengelolaan UPT.

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026 mengalami perubahan karena adanya pergantian kepemimpinan daerah yang diikuti dengan perubahan visi dan misi bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2022-2026 yang selanjutnya juga diikuti perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Visi Bupati terpilih yang selanjutnya menjadi visi Kabupaten Gunungkidul yaitu

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026” yang dijabarkan dalam 2 misi yaitu :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis;
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia Dan Keunggulan Potensi Daerah.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul melaksanakan misi daerah khususnya fokus pada misi ke 2 yaitu : *Meningkatkan Pembangunan Manusia Dan Keunggulan Potensi Daerah*. Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 356/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan
2. Nilai Belanja Wisatawan

Realisasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata selama periode Renstra selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Dan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	1.531.675				1.937.635				
2	Lama Tinggal Wisatawan (LOS) Nusantara Dan Wisatawan Mancanegara	Hari	1,61				0.91				
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang		2.450.000	2.800.000	3.100.000		3.106.772		3.500.000	
4	Nilai Belanja Wisatawan	Orang / Rupiah		95.000	110.000	135.000		176.872		190.000	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi. Jumlah pelaku usaha pariwisata juga cukup banyak. Minat masyarakat untuk berwirausaha cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial serta kebudayaan masyarakat yang masih kondusif.

Potensi daya tarik wisata baik berupa alam, budaya dan buatan cukup banyak tersedia di Kabupaten Gunungkidul. Daya tarik wisata alam yang sudah dikembangkan antara lain berupa pantai, bukit, hutan, pegunungan, gua, air terjun/curug, embung, sungai. Daya tarik wisata budaya yang telah dikembangkan baik yang bersifat berwujud (*tangible*), seperti benda cagar budaya, perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas dan museum maupun yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) berupa kesenian. Sedangkan daya tarik wisata buatan yang telah dikembangkan antara lain Kolam Renang dan Wahana Permainan Air, *Flying Fox* dan Embung.

Dinas Pariwisata mempunyai peran dan posisi yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan, Dinas Pariwisata mengemban amanat penting untuk menjadikan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul sebagai suatu lembaga yang maju, mandiri dan mempunyai daya saing.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata senantiasa dinamis sesuai perubahan kondisi dan regulasi maupun iklim dan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang senantiasa harus menyesuaikan dinamika, kreatif, dan inovatif; adanya pelimpahan kewenangan yang membawa konsekuensi pada beberapa aspek dalam internal organisasi tentu saja menjadi tantangan sekaligus permasalahan bagi perangkat daerah.

Adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Pandemi Covid-19 ini, berpengaruh terhadap laju perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata sangat diandalkan bagi Kabupaten Gunungkidul namun dengan adanya Pandemi Covid-19 ini sektor pariwisata pula yang paling merasakan dampaknya karena jumlah wisatawan yang menurun tajam berakibat turunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dan ini berdampak pula bagi para pelaku usaha jasa wisata yang berpengaruh terhadap turunya perekonomian serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Pengaruh yang dirasakan diantaranya menurunnya jumlah wisatawan, yang berdampak terhadap pendapatan masyarakat pada sektor jasa uaha wisata serta berdampak pula terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya antara lain:

- a. Perkembangan dinamika level PPKM selama Pandemi COVID 19 di DIY khususnya di Gunungkidul yang fluktuatif atau mengalami keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah

- b. Kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap turunnya tingkat kunjungan wisata
- c. Adanya bencana hidrometeorologi yang telah diprediksi sejak awal tahun seperti bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah di Pulau Jawa sebagai penyumbang wisatawan terbesar pada destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul
- d. Bencana tanah longsor di salah satu koridor utama pintu masuk ke destinasi wisata Gunungkidul yang berdampak juga terhadap penurunan jumlah wisatawan.

2.4 Reviu Terhadap RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil rewiu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Tantangan dalam mendukung pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- a. Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya
- b. Masih dipengaruhi dan ditentukan atau tergantung oleh agen perjalanan wisata dari luar
- c. Modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- a. Adanya permintaan wisata alam yang cukup tinggi;
- b. Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah kawasan;
- d. Perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kepuasan wisatawan
- e. Terbukanya akses pasar Internasional.
- f. Budaya daerah mendukung perkembangan pariwisata daerah

Penjabaran program kegiatan berdasarkan rewiu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel. 2.3
 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
					9.830.978.297					9.830.978.297	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				9.830.978.297					9.830.978.297	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100	5.041.723.297	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100	5.041.723.297	
	Perencanaan, Penggagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Indeks Perencanaan, Penggagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)	13026	52.630.000	Perencanaan, Penggagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Indeks Perencanaan, Penggagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)	13026	52.630.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.00	36.540.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.00	36.540.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	900.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	800.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	800.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Dinas PARIWISATA, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	800.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Dinas PARIWISATA, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Dinas PARIWISATA, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	18	8.550.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Dinas PARIWISATA, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	18	8.550.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Dinas PARIWISATA, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	3.340.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Dinas PARIWISATA, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	3.340.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Dinas PARIWISATA, Kab. Gunungkidul)	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	7500	3.722.106.297	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Dinas PARIWISATA, Kab. Gunungkidul)	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	7500	3.722.106.297	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Dinas PARIWISATA, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	616	3.657.171.297	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Dinas PARIWISATA, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	616	3.657.171.297	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Dinas PARIWISATA, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Dinas PARIWISATA, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Dinas PARIWISATA, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	14	61.935.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Dinas PARIWISATA, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	14	61.935.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Dinas PARIWISATA, Kab. Gunungkidul)	Jumlah orang yang terfasilitasi administrasi kepegawaian (Orang)	44	47.965.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Dinas PARIWISATA, Kab. Gunungkidul)	Jumlah orang yang terfasilitasi administrasi kepegawaian (Orang)	44	47.965.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Dinas PARIWISATA, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	38.965.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Dinas PARIWISATA, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	38.965.000	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.00	9.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.00	9.000.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>(Dinas Pariwisata, Wonosari)</i>	<i>Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)</i>	245167	557.310.000	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>(Dinas Pariwisata, Wonosari)</i>	<i>Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)</i>	245167	557.310.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	12.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	134.415.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	134.415.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.00	177.570.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.00	177.570.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.00	41.330.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.00	41.330.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	249	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	249	2.400.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	18	9.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	18	9.000.000

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	95	180.595.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	95	180.595.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Dinas Pariwisata, Wonosari)	Jumlah unit Pengadaan Peralatan kantor (Unit)	2	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Dinas Pariwisata, Wonosari)	Jumlah unit Pengadaan Peralatan kantor (Unit)	2	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Dinas Pariwisata, Wonosari)	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indeks)	127000	228.940.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Dinas Pariwisata, Wonosari)	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indeks)	127000	228.940.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12.00	23.940.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12.00	23.940.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kab. Gunungkidul)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	252.00	205.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	252.00	205.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Dinas Pariwisata, Wonosari)	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indeks)	55.75	422.772.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Dinas Pariwisata, Wonosari)	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indeks)	55.75	422.772.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	312	244.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	312	244.650.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42	24.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42	24.200.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1	144.922.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1	144.922.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30	9.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30	9.000.000	
2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Daya Tarik Wisata Dengan Sarana Prasarana Lengkap (Objek Wisata)	3	2.984.861.500	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				2.984.861.500	
			Pelaku Usaha Wisata Yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	480				Daya Tarik Wisata Dengan Sarana Prasarana Lengkap (Objek Wisata)	3		
			Pelaku Usaha Wisata Yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	480				Pelaku Usaha Wisata Yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	480		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Jumlah layanan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota (Layanan)	1	1.586.644.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Jumlah layanan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota (Layanan)	1	1.586.644.000	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	18	1.586.644.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	18	1.586.644.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota (Layanan)	3	1.398.217.500	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota (Layanan)	3	1.398.217.500	
	Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3	1.023.540.000	Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3	1.023.540.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota (Laporan)	2.00	374.677.500	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota (Laporan)	2.00	374.677.500	
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				603.760.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				603.760.000	
			Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata Yang Terlaksana (%)	100				Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata Yang Terlaksana (%)	100		

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>				603.760.000	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>				603.760.000	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4.00	115.730.000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	(Dinas Pariwisata, Kab. Gunungkidul)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4.00	115.730.000	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/ Kota	(Dinas pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)	3	259.831.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/ Kota	(Dinas pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)	3	259.831.000	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	(Dinas pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	126.240.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	(Dinas pariwisata, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	126.240.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	91.564.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	91.564.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	1	10.395.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	1	10.395.000	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah Pelaku Dan Tenaga Kerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	302	1.200.633.500	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah Pelaku Dan Tenaga Kerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	302	1.200.633.500	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang dibina/dilatih (Orang)	360	1.130.633.500	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang dibina/dilatih (Orang)	360	1.130.633.500	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Orang)	60.00	25.879.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Orang)	60.00	25.879.000	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Orang)	160	571.569.500	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Orang)	160	571.569.500	
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataannya bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataannya bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa) (Orang)	120	60.000.000	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataannya bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataannya bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa) (Orang)	120	60.000.000	
	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	50	120.000.000	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	50	120.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	4	210.790.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	4	210.790.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	142.395.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	142.395.000	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah layanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (Layanan)	2	70.000.000	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah layanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (Layanan)	2	70.000.000	
	Pelatihan, Bimbingan dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	10.00	40.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	10.00	40.000.000	
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)	10	30.000.000	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)	10	30.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi serta hasil analisis kebutuhan PD.

Usulan awal PD kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang desa maupun kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dan Pagu Indikatif Sektor (PIS). Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Bupati sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran yang dialokasikan dalam PIWK, maka semua usulan masyarakat yang masuk melalui jalur PIWK sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh PD. Usulan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Data Usulan Program dan Kegiatan PIWK, PIS Dinas Pariwisata Tahun 2024 seperti tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Usulan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
Bidang Ekonomi							
1	Pembinaan Pokdarwis	Sampang, Gedangsari	Belum Optimalnya untuk pembinaan Pokdarwis untuk 1 kali angkatan	1	24.380.000	24.380.000	
2	Pembinaan Pokdarwis	Jeruk wudel, Girisubo	Belum adanya Pembinaan pengelola desa wisata selama ini, sementara desa sudah punya Pokdarwis dan status Desa Wisata berdasarkan SK Bupati Gunungkidul	1	24.380.000	24.380.000	
3	Pembinaan Pelatihan Pengelolaan Teknologi Informasi (Media Sosial) Desa Wisata/Pokdarwis	Kampung, Ngawen	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan Pengelolaan Teknologi Informasi (Media Sosial) Desa Wisata/Pokdarwis	1	24.380.000	24.380.000	
4	Pembinaan Pokdarwis	Beji, Ngawen	SDM Kurang Maksimal. Untuk 1 kali angkatan, sebanyak 30 Orang	1	24.380.000	24.380.000	
5	Pembinaan Pokdarwis	Giring, Paliyan	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti pelatihan Pokdarwis untuk mengembangkan desa wisata. (volume : 1 paket)	1	24.380.000	24.380.000	
6	Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	Giriharjo, Pangggang	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	1	20.000.000	20.000.000	
7	Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	Girimulyo, Pangggang	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	1	20.000.000	20.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
8	Pembinaan Desa Wisata	Girisuko, Panggang	Pembinaan Desa Wisata permasalahannya pengunjungnya masih kurang, sehingga perlu adanya pembinaan terkait	1	17.050.000	102.300.000	
9	Pembinaan Pokdarwis	Girisuko, Panggang	SDM Kurang Maksimal. Untuk 1 kali angkatan, sebanyak 30 Orang	1	20.000.000	20.000.000	
10	Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	Salam, Patuk	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	1	20.000.000	20.000.000	
11	Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	Padukuhan Gluntung, Patuk	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	1	20.000.000	20.000.000	
12	Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	Salam, Patuk	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	1	20.000.000	20.000.000	
13	Pembinaan Pokdarwis	Srumbung, Patuk	SDM Kurang Maksimal. Untuk 1 kali angkatan, sebanyak 30 Orang	1	20.000.000	20.000.000	
14	Pelatihan Pengelolaan Teknologi Informasi (Media Sosial) Desa Wisata/Pokdarwis	Banyusoco, Playen	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan Pengelolaan Teknologi Informasi (Media Sosial) Desa Wisata/Pokdarwis	1	20.000.000	20.000.000	
15	Pembinaan Desa Wisata	Banyusoco, Playen	Belum tersedianya sarana MCK atau Toilet yang memadai	1	20.000.000	20.000.000	
16	Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	Petir, Rongkop	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif	1	20.000.000	20.000.000	

17	Pembinaan Desa Wisata	Tepus, Tepus	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan Pembinaan Desa Wisata	1	20.000.000	20.000.000	
18	Pembinaan Desa Wisata	Sidoharjo, Tepus	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan Pembinaan Desa Wisata	1	20.000.000	20.000.000	
19	Pembinaan Pokdarwis	Tepus, Tepus	SDM Kurang Maksimal. Untuk 1 kali angkatan, sebanyak 30 Orang	1	20.000.000	20.000.000	
20	Pembinaan Desa Wisata	Gari, Wonosari	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan Pembinaan Desa Wisata	1	20.000.000	20.000.000	
21	Pembinaan Desa Wisata	Kepek, Wonosari	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan Pembinaan Desa Wisata	1	20.000.000	20.000.000	
22	Pembinaan Desa Wisata	Karangtengah, Wonosari	Pengurus desa wisata belum pernah mengikuti Pelatihan Pembinaan Desa Wisata	1	20.000.000	20.000.000	
23	Pembinaan Pokdarwis	karangtengah, Wonosari	SDM Kurang Maksimal. Untuk 1 kali angkatan, sebanyak 30 Orang	1	20.000.000	20.000.000	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*. Dalam menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan harus sesuai dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tema Pembangunan Nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah: *"Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan,"*.

Tema Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul selain untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional juga harus sejalan dengan tema Pembangunan DIY. Tema pembangunan DIY berdasarkan RKPD DIY Tahun 2024 adalah "Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah: *"Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia"*.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi;
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, direalisasikan dengan pelaksanaan

pembangunan infrastruktur yang memadai. Pembangunan aksesibilitas jalan yang menghubungkan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat membuka pintu baru bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas desa wisata. Tahun 2022 Desa Wisata Tepus, Kapanewon Tepus mendapat anugerah Terbaik ke 2 Tingkat Nasional Kategori Souvenir dalam ajang Anugerah Desa Wisata Tahun 2022 oleh Kemenparekraf Republika Indonesia. Pembangunan aksesibilitas Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang menghubungkan Jawa di sisi selatan termasuk DIY yang diharapkan akan meningkatkan kunjungan wisata melalui Bandara Internasional Yogyakarta International Airport (YIA) menuju kawasan wisata pantai yang menjadi unggulan destinasi pariwisata Kabupaten Gunungkidul lebih jauh diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mendukung upaya penurunan angka kemiskinan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul melaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat yang masuk kriteria miskin (masuk dalam data BDT) sebagai peserta dalam pelatihan-pelatihan. Dengan kegiatan tersebut diharapkan akan mampu menciptakan wirausaha baru yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Rencana Kerja Dinas Pariwisata tahun 2024 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam perencanaan jangka menengah baik dokumen Renstra di tingkat PD maupun RPJMD di tingkat Kabupaten tahun 2022-2026. Sasaran pembangunan daerah yang terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antarwaktu dan antar lembaga. Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul adalah : “Terwujudnya Daya Saing Pariwisata 2026”. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pariwisata Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Daya saing pariwisata meningkat

Prioritas dan sasaran Dinas Pariwisata disajikan sebagaimana dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunungkidul

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (<i>outcome</i>)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (<i>outcome</i>)
1.	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Daya saing Pariwisata meningkat	Nilai Belanja Wisatawan
					Jumlah kunjungan wisatawan
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Selanjutnya hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.2 saebagai berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Pariwisata

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2026
1	Terwujudnya Daya Saing Pariwisata Meningkat 2026	Nilai Belanja Wisatawan Tahun 2026	200.000
		Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2026	4.000.000

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dari suatu tujuan oleh Dinas Pariwisata dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (5) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran dirancang pula indikator sasaran sesuai tugas dan fungsi PD. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun berjalan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian targetnya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan ditetapkan dalam Rencana Strategis. Sasaran yang akan dicapai Dinas Pariwisata disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Pariwisata

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,03
2	Daya Saing Pariwisata Meningkat	Nilai Belanja Wisatawan	135.000
		Jumlah kunjungan wisatawan	3.100.000.000

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dan dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata seperti tersaji dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Terwujudnya Daya Saing Pariwisata Meningkat	Nilai Belanja Wisatawan	135.000
		Jumlah kunjungan wisatawan	3.100.000.000

BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain adalah : Pencapaian visi dan misi kepala daerah; Kebijakan Umum Bupati; pencapaian prioritas dan sasaran daerah; pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama); pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta dengan berpedoman pada Rancangan RKPD Tahun 2024, memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang serta pemulihan pasca Covid 19.

Penyusunan Renja juga mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2024, pencapaian SDGs, pengurangan kemiskinan, prioritas utama pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Pariwisata, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta pengembangan wilayah miskin. Rencana kerja dan pendanaan tersebut diatas mengacu pada Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yaitu : *“Daya Saing Pariwisata Meningkatkan”*. Program/ kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renja Dinas Pariwisata Tahun 2024 terdapat perubahan yang signifikan sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Pariwisata terdiri dari 6 program, 15 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan sebagaimana Renstra.

Pagu anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2024 sebesar Rp.20.124.019.297,00 (*dua puluh milyar seratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) yang yang bersumber dari Dana Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sebesar Rp. 1.853.026.000,00 (*satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah*), Dana Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Rp. 5.366.255.000,00 (*lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*), Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisata (DAK Non Fisik) sebesar Rp. 836.525.000,00 (*delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*), serta didukung dengan APBD Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 12.058.481.293,00 (*dua belas milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*)

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
Ekonomi : UMKM, Investarsi, dan Pariwisata	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Daya Saing Pariwisata Meningkatkan	Nilai Belanja Wisatawan	110.000,00	1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.366.255.000,00	
			Jumlah kunjungan wisatawan	2.800.000	1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	5.366.255.000,00	Dinas Pariwisata
					1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	5.366.255.000,00	Dinas Pariwisata
					1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	530.135.000,00	Dinas Pariwisata
					1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	4.836.120.000,00	Dinas Pariwisata
				2.22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.853.036.000,00	
				2.22.08		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.853.036.000,00	Dinas Pariwisata

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.635.000.000,00	Dinas Pariwisata
					2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.335.000.000,00	Dinas Pariwisata
					2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	300.000.000,00	Dinas Pariwisata
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	218.036.000,00	Dinas Pariwisata
					2.22.08.5.07.0014	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	218.036.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.783.197.500,00	Dinas Pariwisata
					3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.198.980.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.198.980.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.584.217.500,00	Dinas Pariwisata
					3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.259.540.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	324.677.500,00	Dinas Pariwisata

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	143.580.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	143.580.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	49.780.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1.000.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.000.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	20.000.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	69.800.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	769.419.500,00	Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	743.919.500,00	Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	41.030.000,00	Dinas Pariwisata

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	39.000.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	571.569.500,00	Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	500.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	91.820.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	25.500.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	500.000,00	Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	25.000.000,00	Dinas Pariwisata
					J U M L A H		14.871.938.152,60	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rensstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
										Nasional	Daerah		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
1														1.925.500.000						
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												5.366.255.000,00				1.925.500.000		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG												5.366.255.000,00				1.925.500.000	Dinas Pariwisata	
			Persentase Layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Yang Terlaksana (%)	100																
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten												5.366.255.000,00				1.925.500.000	Dinas Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Nasional	Daerah						
			Persentase layanan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana (Persentase)				100		(Nglangeran, Patuk, Nglangeran, Kec. Patuk)					100			
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan			0		530.135.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi				-	Dinas Pariwisata	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Srrategis Pantai Selatan (Dokumen)		0			Dana Keistimewaan DIY									Masyarakat dan Pelaku Pariwisata
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu					4.836.120.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi				1.925.500.000	Dinas Pariwisata	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Srrategis Karst Gunung Sewu (Dokumen)		1	1		Dana Keistimewaan DIY	(Nglangeran, Patuk, KAB. GUNUNGKIDUL)					1	1.925.500.000		Masyarakat dan pelaku pariwisata, Masyarakat dan Pelaku Pariwisata
	2						1.853.036.000,00								0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiran Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												0		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana (%)	100										0		Dinas Pariwisata
	2.22.08.5. 06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase Layanan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang terlaksana (Persentase)	100										100		Dinas Pariwisata
	2.22.08.5. 06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya													-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan (Objek)	3	2	2								2		Masyarakat dan Pelaku pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (Unit)		0	0	300.000.000,00								-	Dinas Pariwisata
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					218.036.000,00								-	Dinas Pariwisata
	2.22.08.5.07.0014	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya					218.036.000,00								-	Dinas Pariwisata
3			Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan (Lembaga)		0	0	7.652.647.152,60								12.620.828.454	
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					7.652.647.152,60								12.620.828.454	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Teriaksana Dengan Baik (%)	100			3.956.450.152,60								7.029.552.556	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					52.877.500,00								53.500.000	Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan (Indeks)	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)				13026	(Dinas Pariwisata, KAB. GUNUNGKIDUL)					4676			
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					36.447.500,00								35.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	1.00	3.00		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4	35.000.000	ASN Dinas Pariwisata, Tenaga Harian Lepas Dinas Pariwisata	
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.180.000,00								1.900.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1	1.900.000	-	

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	1	1	1.360.000,00					Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi		1.100.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	1	1		(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1	1.100.000	
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.270.000,00						Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi		1.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		3	3	3		(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3	1.000.000	
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					1.280.000,00						Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi		1.000.000	Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Nasional	Daerah								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2			(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2	1.000.000		
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.000.000,00							9.000.000	Dinas Pariwisata	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	18	18	18			(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18	9.000.000		
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.340.000,00							4.500.000	Dinas Pariwisata	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	2	2	2			(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2	4.500.000	ASN Dinas Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah							
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)				7500		3.188.359.757,60						5.777.652.556	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14.00	616.00		40		3.123.424.757,60						5.686.652.556	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		3.000.000,00						4.000.000	Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	14	14	14	61.935.000,00	(Dinas)Pariwisata, Kepek, Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Daerah	14	87.000.000	Dinas Pariwisata	
	3.26.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang terfasilitasi administrasi kepegawaian (Orang)	40			29.020.000,00	(Dinas) Pariwisata, KAB. GUNUNGKIDUL			Peningkatan Ekonomi		40	53.000.000	Dinas Pariwisata	
	3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian					29.020.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			43.000.000	Dinas Pariwisata	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian (Dokumen)	49	6	6		(Dinas) Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6	43.000.000	ASN Dinas Pariwisata, THL Dinas Pariwisata	
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			10.000.000	Dinas Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		2.00	4.00	0	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)				3.00	10.000.000			
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)				245167	(Dinas Pariwisata, Wonosari)				245.333	472.400.000	Dinas Pariwisata		
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		16.00	2.00	1	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14.000.000	ASN Dinas Pariwisata		
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		45.00	3.00	5	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80.000.000	ASN Dinas Pariwisata, THL Dinas Pariwisata		
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1.00	6.00	1	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				170.000.000	Dinas Pariwisata		
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											47.000.000			Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah							
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.00	12.00	2.00	2.00	2.00	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.00	47.000.000		
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00							1.400.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	300	12.00	249.00			(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300	1.400.000	ASN Dinas Pariwisata	
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			0.00	18.00		7.500.000,00							11.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12					(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	11.000.000	Tamu Dinas	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						38.000.000,00							149.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	62.00	106.00			(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10	149.000.000	ASN Dinas Pariwisata	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah						-							20.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah unit Pengadaan Peralatan kantor (Unit)	0					(Dinas Pariwisata, Wonosari)				0		2	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-							20.000.000	Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		7.00	1.00	0		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)				2.00	20.000.000		
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indeks)				127000		(Dinas Pariwisata, Wonosari)				127.000		226.000.000	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						24.940.000,00						55.000.000		Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12.00	12.00	12.00		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12.00	55.000.000	ASN Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		252.00	252.00	252.00	196.047.220,00	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				252.00	171.000.000	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indeks)				55.75	328.318.675,00						427.000.000		Dinas Pariwisata
									(Dinas Pariwisata, Wonosari)				55.7			

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Nasional	Daerah								
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					168.699.175,00	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				221.000.000		Dinas Pariwisata	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	312	312	312						312	221.000.000			
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00						20.000.000		Dinas Pariwisata	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42.00	42.00	42.00		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42.00	20.000.000			
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					144.819.500,00						175.000.000		Dinas Pariwisata	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1	1	1		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	175.000.000			

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		30,00	30,00	16	4.800.000,00	(Dinas Pariwisata, Kepek. Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,00	11.000.000	Dinas Pariwisata	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Dengan Sarana Prasarana Lengkap (Objek Wisata) Pelaku Usaha Wisata Yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)				3	2.783.197.500,00						4.429.275.898	Dinas Pariwisata	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota (Layanan)				1	1.198.980.000,00	(Dinas Pariwisata, KAB. GUNUNGKIDUL)				1	1.520.687.000	Dinas Pariwisata	
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						1.198.980.000,00						1.520.687.000	Dinas Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Nasional	Daerah								
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)		0.00	2.00	12		(Dinas Pariwisata, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	1.520.687.000			
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1.584.217.500,00				Peningkatan Ekonomi			2.908.588.898	Dinas Pariwisata	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Layanan)				2		(Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)						2		
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1.259.540.000,00								2.483.588.898	Dinas Pariwisata
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)		2.00	2.00	27		(Dinas Pariwisata, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.00	2.483.588.898	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						324.677.500,00				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				425.000.000	Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target
								Nasional	Daerah			Pagu Indikatif (Rp)			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)		730.00	2.00	2	(Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			425.000.000	2.00		
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata Yang Terlaksana (%)	100								812.000.000			Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Layanan)	1				(wonosari, Wonosari)				812.000.000		1	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	140.000.000			Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)		4.00	4.00	1		(Dinas pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.00	140.000.000		
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						1.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				80.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)		2.00	2.00	1		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.00	80.000.000		
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata						3.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				42.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)		0.00	0	1		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	42.000.000		
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota						20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				400.000.000	Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)		3.00	3.00	1	(Dinas pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5.00	400.000.000		
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								69.800.000,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			150.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)		39,00	4.00	1	(Dinas Pariwisata, KAB. GUNUNGKIDUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.00	150.000.000	
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								769.419.500,00					350.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Pelaku Dan Tenaga Kerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Parekrat) Yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)				215									
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								743.919.500,00					290.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekrat) yang dibina/ dilatih (Orang)				220								360	

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Nasional	Daerah								
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)		4.00	4.00	1	41.030.000,00	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.00	45.000.000	Dinas Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan Berdasarkan pada SKKNI (Orang)		60.00	60.00	60	39.000.000,00	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			160.00	150.000.000	Dinas Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata (Orang)		200	160	160	571.569.500,00	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Keperawatan			0	-	Dinas Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						500.000,00						50.000.000	Dinas Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)		50.00	50.00	10		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10	50.000.000		
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						91.820.000,00						45.000.000		Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)		1	1	1		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	45.000.000		ASN Dinas Pariwisata, THL
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						25.500.000,00						60.000.000		Dinas Pariwisata
			Jumlah layanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (Layanan)				1		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)						2	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						500.000,00						35.000.000		Dinas Pariwisata
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)		20.00	40.00	10		(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.00	

No	Kode	Urusan/Bidang, Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Nasional	Daerah								
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)		5	10	25.000.000,00	(Dinas Pariwisata, Kepek, Kec. Wonosari)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10	25.000.000	25.000.000	Dinas Pariwisata	
J U M L A H								14.871.938.152,60						14.546.328,454		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Tahun 2024 mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa menyesuaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan ini akan dilaksanakan di tahun 2024 dengan memperhatikan pedoman dan peraturan yang harus dipatuhi. Diharapkan perencanaan tahunan ini bisa tertampung semuanya dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai tindak lanjutnya, dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen saja. Rencana Kerja Pariwisata mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Forum Gabungan Perangkat Daerah.

Beberapa perubahan nomenklatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak pada perubahan yang signifikan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah termasuk Dinas Pariwisata. Demikian pula dengan adanya pergantian kepala daerah di Kabupaten Gunungkidul juga berdampak adanya perubahan visi, misi, prioritas pembangunan serta kebijakan umum kepala daerah.

Pandemi covid-19 masih terasa dampaknya terhadap anggaran yang tersedia. Beberapa kegiatan di Tahun 2023 yang belum/tidak bisa dilaksanakan menjadi prioritas di Tahun 2024 baik dengan dana APBD murni maupun dengan sumber dana yang lain baik antara lain APBD Provinsi maupun dari pusat.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

Pencapaian hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan berupa Rencana Strategis Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2026 yang kemudian diturunkan dalam rangka kerja tahunan berupa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp.9.830.978.297,00 (yang terdiri untuk Belanja Modal dan Belanja Operasi.

a. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,

Plt. DINAS PARIWISATA

A. HARY SUKMONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RANCANGAN RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Tahun 2024 merupakan tahun ke tiga dalam periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun harus berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 serta arah kebijakan pembangunan tahun pertama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Kabupaten Gunungkidul, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisi program dan kegiatan disertai dengan pendanaan indikatif, untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melakukan penyelarasan dengan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024. Tema, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :

Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 :

“Tewujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan Tema Pembangunan Nasional dan DIY.

Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2024 adalah : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan dan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan dan Transformasi Palayanan Publik.

Sedangkan untuk Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2024 adalah : *“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY”*

Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah : *“Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah Dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Bermartabat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi :
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Stunting
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
6. Ketentraman dan Ketertiban 6
7. Reformasi Birokras

Dari ke 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah di atas tugas dan fungsi Dinas Perdagangan adalah Peningkatan Ekonomi : Investasi dan Pariwisata dan Pengembangan Sektor Unggulan dengan Sasaran Daerah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan serta Nilai Investasi Meningkatkan. Dalam penyusunan rencana kerja ini juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, juga disinergikan dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman, dasar dan acuan bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 sebagai implementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) PD yaitu :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perdagangan;
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan
- 2.4. Reviu terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2, tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1, tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan.

1. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 pada Dinas Perdagangan tidak ada yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

2. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 yang memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah :

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, capaian kinerja 100% realisasi keuangan 97,80%, terdiri dari :

- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan capaian kinerja 100% realisasi keuangan 98,56%.

- Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya capaian kinerja 100% realisasi keuangan 90,88%.

b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, capaian kinerja 100% realisasi keuangan 100% terdiri dari:

- Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya capaian kinerja 100%, realisasi keuangan 100%.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja 100 % realisasi keuangan 97,31% terdiri dari :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 99,58%

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 97,93%

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 100%

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 90,03%

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 99,24%.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian 100% realisasi keuangan 91,02%.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 95,87%

- Kegiatan Penataan Organisasi capaian 100% realisasi keuangan 100%.

3. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dari yang direncanakan.
Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah :
 - a. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri capaian kinerja 105,30% realisasi keuangan 99,97% terdiri dari :
 - Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri capaian kinerja 105,30% realisasi keuangan 99,97%.
 - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting capaian kinerja 105% realisasi keuangan 99,37% terdiri dari :
 - Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 100% realisasi keuangan 99,77%.
 - Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota capaian kinerja 100% realisasi keuangan 98,18%.
 - Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 100% realisasi keuangan 99,22%.
 - c. Program Pengembangan Ekspor capaian kinerja 250% realisasi keuangan 97,26% terdiri dari :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 250% realisasi keuangan 97,26%.
 - d. Program Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen capaian kinerja 102,10 % realisasi keuangan 97,89% terdiri dari :
 - Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan capaian kinerja 102,10% realisasi keuangan 97,89%
 - e. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, capaian kinerja 105 %, realisasi keuangan 99% terdiri dari :
 - Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 105% realisasi keuangan 99% .
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022
 - a. Faktor penyebab tidak tercapai target sampai dengan September Tahun 2022 adalah :
 - Sampai dengan Akhir Tahun 2022 tidak ada program/ kegiatan yang tidak memenuhi target.
 - b. Faktor penyebab capaian yang melebihi target sampai dengan akhir Tahun 2022 adalah :
 - Adanya beberapa pergeseran/ perubahan anggaran sehingga jumlah peserta / kegiatan menjadi bertambah jauh melampaui target yang ditentukan.
 - c. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024
Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2023 yaitu keterbatasan

kemampuan pendanaan daerah karena dampak dari covid 19 menyebabkan dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja kurang maksimal.

- d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah fokus pada target capaian kinerja yang telah dibuat dan jadwal yang telah ditentukan serta mencari terobosan dana tidak hanya mengandalkan APBD saja.

Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1

Tabel 2. 1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
 Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*		Target Program/kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d tahu berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)*	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase IKM yang mengikuti pameran								0,00
2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya								0,00
	Pengembangan Industri Kreatif	Gelar potensi 50 IKM Gunungkidul		1						0,00
		Gelar Potensi 100 IKM Gunungkidul dalam even Peringatan Hari Jadi	5		1	1	100			0,00
		Bazar produk lokal di kawasan cagar budaya	5							0,00
		Jumlah even Gelar Potensi Kerajinan melalui Pameran Nasional Apkasi	5							0,00
		Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan	378					100	100	26,46
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik								0,00
3	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu								0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahu berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1	1	1	1	100			0,00
		Jumlah dokumen perubahan Renja	1	1	1	1	100			0,00
		Jumlah dokumen penyelenggaraan Forum PD	1	1	1	1	100			0,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17					4	4	23,53
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	1	1	100			0,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4					1	1	25,00
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1	1	1	1	100			0,00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4					1	1	25,00
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	1	1	1	100			0,00
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1	1	1	1	100			0,00
		Jumlah dokumen ROPK	1	1	1	1	100			0,00
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8					2	2	25,00
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	1	1	1	1	100			0,00
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1	1	1	1	100			0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	5					1	1
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68					17	17	25,00
		Jumlah dokumen LKJIP	1	1	1	1	100			0,00
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan e-Monev (Evaluasi Hasil RKPD)	4	4	4	4	100			0,00
		Jumlah dokumen TEPR	12	12	12	12	100			0,00
3	30	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	20		5	5	25,00
					Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu					
					Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	14	100		0,00
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4928		1190	1190	24,15
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1	1	100		0,00
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4		1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
			12	12	12	12	100	9	0,00	
3	07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	100			0,00
			52					13	13	25,00
3	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99	99	94	94	100			0,00
			24					6	6	25,00
3	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	0	3	0	0			0,00
			10					3	3	30,00
3	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	10	10	10	100			0,00
			10	10	10	10	100			0,00
3	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23					5	5	21,74
			66	75	66	66	100			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Program, Hasil Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*		Target Program/kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (%)			
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)*	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24					6	6	6	25,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15	6	15	15	15				0,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24					6	6	6	25,00
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50000	48265	40000	40000	40000				0,00
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	8	12	8	8	8				0,00
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	144					36	36	36	25,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	12	12	12				0,00
		Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000						250	250	25,00
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	48					12	12	25,00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	18	30	13	13				0,00	
	Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah										
	Jumlah Makan, Minum dan Snack tersedia untuk rapat dan Tamu	200		196	196	196				0,00	
	Jumlah Makan dan Minum tersedia untuk rapat dan tamu	1000		642	642	642				0,00	
	Frekuensi Rapat Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah	200		73	73	73				0,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800						200	200	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (%)			
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
3	2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel	3 Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan terlaksana Jumlah Meja Kerja tersedia Jumlah Kursi kerja tersedia Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah laptop tersedia Jumlah Komputer tersedia Jumlah Wireless TOA tersedia Jumlah Printer tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana Jumlah Surat Dinas yang dikelola dengan baik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)		
			15								0,00	
			15		23	100					0,00	
			67				23		50	50	74,63	
			3		4	4	100				0,00	
			3		5	5	100				0,00	
			2		1	1	100				0,00	
			3		4	4	100				0,00	
			24							6	6	25,00
			10							5	5	50,00
3	01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	2501	1000	2315	232			0,00		
											0,00	
3	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		16					4	4	25,00		
			12	12	12	12	100			0,00		
			12	12	12	12	100			0,00		
			12	12	12	12	100			0,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*		Target Program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)*	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288					60	60	20,83
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494	494	494	494	100			0,00
		Jumlah hari jasa kebersihan kantor yang terpenuhi (2 orang x 247 hari)	48					12	12	25,00
3	09	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
	02	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	9	7	7	100			0,00
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	29	32	29	29	100			0,00
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	7	9	7	7	100			0,00
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara dengan baik	29	32	29	29	100			0,00
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dengan baik	2	2	2	1	50			0,00
		Jumlah kendaraan roda 3 yang terbayar pajaknya	2	1	2	1	50			0,00
		Jumlah kendaraan roda 3 yang terpelihara	1984					496	496	25,00
	05	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	0	10	10	100			0,00
		Jumlah kursi yang terfasilitasi pemeliharannya	8	2	8	8	100			0,00
		Jumlah almari yang terfasilitasi pemeliharannya	10	2	10	10	100			0,00
		Jumlah meja yang terfasilitasi pemeliharannya								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahu berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Filling Kabinet yang terfasilitasi pemeliharannya			2	2	100			0,00
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200					50	50	25,00
		Jumlah Laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	25	3	25	25	100			0,00
		Jumlah LCD yang terfasilitasi pemeliharannya	2	1	2	2	100			0,00
		Jumlah kamera yang terfasilitasi pemeliharannya	4	1	4	4	100			0,00
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharannya	6	1	6	6	100			0,00
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	20	5	20	20	100			0,00
		Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	33	7	33	33	100			0,00
		Jumlah LCD proyektor yang terfasilitasi pemeliharannya	2	1	2	2	100			0,00
		Jumlah Genset yang terfasilitasi pemeliharannya	1		1	1	100			0,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	452						113	113
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1	1	1	100				0,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4					1	1	25,00
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara dengan baik	10	10	10	100				0,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	60					15	15	25,00
3	30 01 2 13	Penataan Organisasi								0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Hasil Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*		Target Program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d tahu berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)*	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2	2	2	2	100			0,00
		Jumlah dokumen RTP/SPIP	1	2	1	1	100			0,00
		Jumlah dokumen Evaluasi SOP yang tersusun	2	1	2	2	100			0,00
3	02	Persentase perusahaan berizin dan terdaftar yang diawasi								0,00
3	02	Persentase Layanan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								0,00
		Jumlah pangkalan SPBE , agen dan pangkalan LPG yang diawasi	50	70	50	50	100			0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)maupun Produsen B2 (P-B2)	52					13	13	25,00
3	03	Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi								0,00
3	03	persentase layanan sarana distribusi perdagangan								0,00
		Jumlah Pasar yang direhabilitasi	5	2	2	2	100			0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Pasar yang terpelihara	38	20	38	38	100			0,00
		Jumlah tanah disewa pasar/ Pemda	8	8	8	8	100			0,00
		Jumlah dokumen AMDAL LALIN	2	1	2	2	100			0,00
		Jumlah dokumen UKL-UPL	1	2	1	1	100			0,00
		Jumlah pasar yang terpasang tempat cuci tangan (pasca covid)		5						0,00
		Jumlah dan jenis bahan kimia yang tersedia untuk kolam dipping		2						0,00
		Jumlah pasar rakyat yang terrevitalisasi	1	0	1	1	100			0,00
		Tersedianya Bangunan tempat parkir pasar		1						0,00
		Tersedianya lokasi pemindahan pedagang ke tempat psr		1						0,00
		Tersusnya dokumen perencanaan		1						0,00
		Terawasinya pekerjaan bangunan tempat parkir pasar		1						0,00
		Jumlah bahan kimia chlorine BKC 20% yang tersedia	49140		49140	49140	100			0,00
		Jumlah Bahan kimia formalin yang tersedia untuk dipping	2268	2	2268	2268	100			0,00
		Jumlah Dokumen DED pasar rakyat	2	1	2	2	100			0,00
		Jumlah tanah yang tersedia untuk perluasan Tempat Parkir di pasar (Legundi, Wotgaleh,Ngalang)	1	1	1	1	100			0,00
		terawasinya pekerjaan tempat parkir pasar		1						
		tersusunnya dokumen perencanaan		1						0,00
		Reviu DED Pasar Rakyat Tematik Wisata	1	1						0,00
	UPT PASAR WILAYAH I	Jumlah Atk yang tersedia	20		20	20	100			0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (%)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah limbah IPAL atau septictank yang terkuras	14	5	14	14	100			0,00
		Jumlah rekening air yang terbayarkan	12		12	12	100			0,00
		Jumlah rekening listrik yang terbayarkan	12		12	12	100			0,00
	UPT PASAR WILAYAH II	Jumlah Atk yang tersedia	20		20	20	100			0,00
		Jumlah limbah IPAL atau septictank yang terkuras	4		4	4	100			0,00
		Jumlah rekening air yang terbayarkan	12		12	12	100			0,00
		Jumlah rekening listrik yang terbayarkan	12		12	12	100			0,00
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	160					40	40	25,00
02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Hari Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	365	17520	365	365	100			0,00
		Jumlah Karcis atau Tiket yang tersedia	130000	109995	130000	130000	100			0,00
		Pengembalian jasa pemungutan retribusi	1	1	1	1,00	100			0,00
		Jumlah tenaga kebersihan yang dicek kesehatannya	37	45	37	37	100			0,00
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	160					40	40	25,00
3	02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								0,00
	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	420	0	420	420	100			0,00
		Pembinaan pedagang PKL di 18 Kecamatan	210		125	125	100			0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peserta Pembinaan Pasar Sehat	75	75	75	100	0,00			
3	4	Jumlah Pembinaan Petugas Keamanan	159		48	48	100			0,00
		Jumlah dokumen hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100					25	25	25,00
3	30 4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting								0,00
3	30 4 2 01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								0,00
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30	30	30	30	100			0,00
		Jumlah distributor barang kebutuhan pokok yang dipantau	4					1	1	25,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30	30	30	30	100			0,00
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4							25,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4					1	1	25,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*		Target Program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)*	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
3	1	2	4	5	6	7	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3							0,00
	01	Jumlah laporan dan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	12	48	12	12			0,00
	02	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	48				12	12	25,00
	02	Jumlah pasar yang menyediakan informasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	3	3	3	3			0,00
	03	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4				1	1	25,00
3	2	03							0,00
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	01	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang dibina	30	30	30	30			0,00
		Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	20				5	5	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*		Target Program/kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)*	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang diawasi	30	30	30	30	100			0,00
3	Pengawasan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	20					5	5	25,00
3	Program Pengembangan Ekspor	IKM yang berorientasi Ekspor								0,00
3	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan penyelenggaraan promosi dagang								0,00
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional (Inacraft, Jakarta Fair, JIFFINA)	3		3	3	100			0,00
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	24					6	6	25,00
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah IKM yang dibina dalam pengembangan orientasi ekspor	20		30	30	100			0,00
		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	80					20	20	25,00
3	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTPP yang ditera/tera ulang								0,00
3	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase layanan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan								0,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pemilik UTPP yang mendapatkan pelayanan tera / tera ulang	500	493	500	646	129			0,00
		Jumlah karcis yang tercetak	120	100	50	50	100			0,00
		Jumlah Rekening Air yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	12		12	12	100			0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Rekening Listrik yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	12	5	12	12	100			0,00
		Jumlah Kendaraan Roda 2 yang terbayar Pajaknya	3		3	3	100			0,00
		Jumlah Kendaraan Roda 2 yang terpelihara dengann baik	3		3	3	100			0,00
		Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terbayar pajaknya	2		2	2	100			0,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang terpelihara dengan baik	2		2	2	100			0,00
		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	1							0,00
		Jumlah AC yang terpelihara dengan Baik	2		2	2	100			0,00
		Jumlah Peralatan Kemetrologian yang terkalibrasi	20		42	42	100			0,00
		Jumlah Peralatan Komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	4		4	4	100			0,00
		Jumlah ATK yang tersedia	8		8	8	100			0,00
		Jumlah Penggandaan/Fotocopy tersedia	4000		4000	4000	100			0,00
		Frekuensi Rapat konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	3		3	3	100			0,00
		Frekuensi rapat Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah	42		42	42	100			0,00
		Jumlah Minum dan Snack tersedia untuk rapat dan tamu	4		4	4	100			0,00
		Jumlah makan dan Minum tersedia untuk rapat dan tamu	4		4	4	100			0,00
		Jumlah ASN yang terfasilitasi Diklat	1							0,00
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang, dan AlatPerengkapan Ditera Ulang	15400					3700	3700	24,03

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Peringkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan kemetrolagian Daerah	4	5	4	4	100			0,00
		Jumlah peserta sosialisasi kemetrolagian daerah	60		80	80	100			0,00
3	7	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	800					200	200	25,00
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang mengikuti promosi produk								0,00
3	7	Persentase layanan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								0,00
	Pelaksanaan Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	240	2				60	60	25,00
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Bazar produk IKM lokal (Kalurahan Gari,Watusigar,Ngoro-oro,Karangasem (Paliyan)	5		4	4	100			0,00
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen review perda No 16 th 2012	1		2	2	100			0,00
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah promosi produk online melalui GERBANG PAK PROBO GUNUNGKIDUL (Gerakan Bangsa Pakai Produk Buatan Gunungkidul)	12	12	12	12	100			0,00
		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	16					4	4	25,00
3	31	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								0,00
3	31	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
3	01	Jumlah dokumen review draft RPIK yang tersusun		1						0,00
3	05	Jumlah Forum IKM yang terbentuk		18						0,00
		jumlah DED IKM yang tersusun		1						
		Jumlah Pembinaan Industri Sehat yang terfasilitasi		9						0,00
		Jumlah Kegiatan Dekranas Kabupaten Gunungkidul yang terfasilitasi		1						0,00
		Jumlah Klinik Konsultasi Kemasan yang terfasilitasi		1						0,00
		jumlah minotoring tembakau iris		11						0,00
		Jumlah pembinaan calon sentra tembakau iris		4						0,00
		jumlah sosialisasi cukai tembakau iris		11						0,00
		Jumlah Takshow TV Cukai tembakau iris		2						0,00
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan RPIK yang tersusun		1						0,00
3	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota								0,00
3	03	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (LUK) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								0,00

Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program/kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
3	31	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
						01	01	01			
3	31	2	Jumlah pengusaha yang dibina dan diawasi legalitas usahanya		60						0,00
			Jumlah peserta sosialisasi ijin usaha		20						0,00
3	31	04									0,00
3	31	04									0,00
3	31	04									0,00
3	31	04			20						0,00
3	31	04	Jumlah pengusaha yang terfasilitasi dan mengikuti sosialisasi SIINAS		1						0,00
3	31	04	Jumlah data informasi industri yang tersedia								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2. dimana ada 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 5% (komulatif)
- 2) Pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai sebesar 25% (komulatif)

Selanjutnya hasil analisis pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, ditampilkan dalam format tabel 2.2

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Satuan (IKU,SPM,IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Industri	Unit	21.152	-	-	-	21.282	-	-	-	-
2	Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Perdagangan										
	- Nilai Ekspor Daerah	Rp.	44.436.090.000	-	-	-	59.061.220.000	-	-	-	-
	- Nilai Perdagangan Daerah	Rp.	28.154.000.000	-	-	-	30.072.000.000	-	-	-	-
1	Persentase pertumbuhan Nilai sektor perdagangan	Persen	-	5	10	15	-	16,69	17,50	18,50	
2	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	Persen	-	25	30	35	-	25	30	35	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

1. Pada tahun 2022, realisasi pencapaian sasaran pertumbuhan sektor perdagangan menunjukkan hasil yang positif. Untuk mencapai target sasaran pertumbuhan sektor perdagangan tersebut dilaksanakan melalui 6 program prioritas yaitu :
 - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Sedangkan hal yang dilakukan untuk mengoptimalkan tingkat kinerja Dinas Perdagangan antara lain : Optimalisasi pendapatan dan keterbatasan lahan, mengintensifkan kegiatan promosi pemasaran produk lokal baik tingkat kabupaten maupun nasional, semakin menggiatkan promosi pasar tradisional di berbagai media dan event-event tertentu, meningkatkan pemantauan dan stabilisasi harga maupun distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan melakukan kegiatan pasar murah di berbagai lokasi serta lebih giat melakukan sosialisasi tentang tera dan tera ulang.

2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :
 - a. Belum optimalnya penyediaan fasilitas pasar rakyat yang memadai;
 - b. Pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya sebarannya tidak merata, sehingga di beberapa wilayah distribusinya kurang merata;
 - c. Hasil produk yang diekspor masih secara tidak langsung melalui eksportir dari luar daerah karena jumlah eksportir di Kabupaten Gunungkidul sangat sedikit;
 - d. Belum semua pedagang paham/sadar bahwa tera/tera ulang timbangan wajib dilakukan setiap tahun sekali.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi tidak menyurutkan langkah Dinas Perdagangan untuk ikut memajukan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah: “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”. Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul menjalankan Misi Bupati yang ke 2 yaitu : “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”, dan sapta karya ke- 5 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun Sentra Industri Pertanian, Sentra Industri Peternakan, dan Perdagangan berbasis masyarakat,”

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian Misi dan Sapta Karya dari Bupati Gunungkidul tersebut Dinas Perdagangan dan melaksanakan 6 (enam) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang, yang salah satu programnya yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan capaian programnya adalah

pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan salah satu sasaran Bupati Gunungkidul yaitu pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai. Yang dimaksud pertumbuhan pasar dengan fasilitas memadai adalah bahwa pasar rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul harus diupayakan untuk pasar bukan hanya dari membangun baru fisik bangunan pasar dari tidak ada menjadi ada, tetapi lebih kepada penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik untuk keberhasilan pencapaian sasaran Bupati dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal ini pengunjung pasar yang mengarah kepada pasar sehat diantaranya pemisahan jenis dagangan yang basah dan kering, penyediaan wastafel, pasar yang sirkulasi udaranya baik, penerangan yang cukup penyediaan air bersih dan kondisi saluran air limbah sesuai aturan dari instansi terkait .

4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah :
 - a. Tantangan
 - 1) Keberadaan dan Pertumbuhan pasar-pasar modern di Kabupaten Gunungkidul;
 - 2) Perlunya ditingkatkan kesadaran pedagang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
 - 3) Lahan untuk pengembangan pasar tidak ada;
 - 4) Permintaan layanan konsumen semakin tinggi.
 - b. Peluang
 - 1) Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata;
 - 2) Potensi sumber daya ekonomi.
5. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
 - a. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas;
 - b. Mewujudkan peningkatan pendapatan pasar;
 - c. Mewujudkan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - d. Mewujudkan pasar sehat yang menyeluruh .

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dan tingkat kinerja yang dicapai Dinas Perdagangan dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Perdagangan dari RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mengacu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi.

RKPD yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan RKPD Kabupaten Tahun 2023, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas serta kinerja kegiatan yang belum tercapai maksimal pada Renstra sebelumnya.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara Renja dengan hasil analisa kebutuhan, secara lengkap reuiu disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase KM yang mengikuti pameran	60 Persen	870.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase KM yang mengikuti pameran	60 Persen	610.000.000	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	100 unit	870.000.000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	104 unit	610.000.000	
			Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	100 Persen				Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	100 Persen		
	Pengembangan Industri Kreatif URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	100 unit	870.000.000	Pengembangan Industri Kreatif URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	104 unit	610.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				12.966.199.022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.018.240.106	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	8.704.949.022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	5.544.654.612	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,576 Indeks	62.700.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,576 Indeks	56.344.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	100 persen				Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	52.840.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	400.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	320.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	240.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	240.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	1.920.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	384.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	410,25 Indeks	7.351.380,022	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	410,25 Indeks	5.101.751.091,53	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1219 Orang/bulan	7.322.180.022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1190 Orang/bulan	5.046.671.091,53	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	896.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	27.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 laporan	54.184.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,5 Indeks	58.869.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,5 indeks	300.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perdagangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	56.119.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perdagangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	53,48 Indeks	194.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	53,48 Indeks	61.654.520,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.719.500,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11 25.121.020,00	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.700.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	17.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	5.944.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	250 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	102.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.170.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	16 unit	120.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	16 unit	0,00	
	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen				Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0 persen		
	Pengadaan Mebel	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perdagangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perdagangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	76 Laporan	486.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	76 laporan	194.005.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Persen	1.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	360.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.210.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.435.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi pemeliharannya	675 unit	431.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi pemeliharannya	675 unit	130.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	496 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	212 Unit	111.100.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perdagangan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	1.500.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perdagangan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	750.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perdagangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	113 Unit	65.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perdagangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 unit	16.950.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Dinas Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	15 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Dinas Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atas Bangunan	6 unit	1.800.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	4 Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 5	6 6	7 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	9 Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 10	11 11	12 12
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi	60 Persen	19.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi	60 persen	5.760.000,00	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	13 Laporan	19.000.000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	13 Laporan	5.760.000,00	
			Persentase Layanan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi	100 persen				Persentase Layanan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi	100 persen		
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	13 Laporan	19.000.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	13 laporan	5.760.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi	60 Persen	3.295.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Gunungkidul	Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi	60 persen	2.989.381.494,47	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Indeks Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	40 Indeks	3.210.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Indeks Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	40 Indeks	2.882.188.994,47	
			Persentase layanan sarana distribusi perdagangan	100 persen				Persentase layanan sarana distribusi perdagangan	100 persen		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	40 Unit	1.300.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	40 unit	454.214.294,47	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 40 Unit	6 1.910.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10 40 unit	11 2.427.974.700,00	12
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah dokumen hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	25 dokumen	85.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	25 dokumen	107.192.500,00	
			Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dilaksanakan	100 persen				Persentase pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang dilaksanakan	100 persen		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25 Dokumen	85.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9 dokumen	107.192.500,00	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	60 Persen	84.500.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	60 persen	147.119.000,00	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/ Kota	2 laporan	54.500.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/ Kota	2 laporan	84.517.500,00	
			Persentase layanan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau dan diawasi	100 persen				Persentase layanan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau dan diawasi	100 persen		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan	1 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan	4 laporan	3.200.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	48.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Ajen dan Pasar Rakyat	4 laporan	81.317.500,00	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	13 Laporan	17.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	13 Laporan	30.284.000,00	
			Persentase layanan ketersediaan data informasi perdagangan	100 Persen				Persentase layanan ketersediaan data informasi dan perdagangan	100 persen		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	6.500.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	25.324.000,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	10.500.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	4.960.000,00	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Indeks	13.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 indeks	32.317.500,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Gunungkidul	Persentase layanan terhadap pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	100 Persen	6.500.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	Persentase layanan terhadap pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	100 persen	29.117.500,00	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	6.500.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5 laporan	3.200.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		IKM yang berorientasi Ekspor	26 Unit	475.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		IKM yang berorientasi Ekspor	22 unit	86.520.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26 Pelaku Usaha	475.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26 pelaku usaha	86.520.000,00	
	Pameran Dagang Nasional	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	465.000.000	Pameran Dagang Nasional	Jawa Tengah	Persentase layanan penyelenggaraan promosi dagang	100 persen	56.520.000,00	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	20 Pelaku Usaha	10.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30 pelaku usaha	30.000.000,00	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	20,00 Persen	262.500.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	20,00 persen	184.170.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3	Indeks Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	5 2000	262.500.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	8	Indeks Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	10 2000 Indeks	11 184.170.000,00	12
	Persentase layanan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan		Persentase layanan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100 persen			-	Persentase layanan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100 persen		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Gunungkidul	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3800 Unit	255.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1216 unit	181.300.000,00	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	7.500.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	25 orang	2.870.000,00	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase IKM yang mengikuti promosi produk	60 Persen	125.250.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase IKM yang mengikuti promosi produk	60 persen	60.635.000,00	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Indeks Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	32 Indeks	125.250.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Indeks Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	32 indeks	60.635.000,00	
			Persentase layanan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 Persen			-	Persentase layanan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 persen		
	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60 UMKM	120.000.000	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	36 umkm	58.635.000,00	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4 Dokumen	5.250.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	2.000.000,00	
					13.836.199.022					9.628.240.106,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan serta mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul mendasarkan pada :

a. Program Dinas berdasar usulan dari data teknis terkait tupoksi dinas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan ,
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ,
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,
5. Program Pengembangan Ekspor,
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri .

b. Usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang

Pada tahun 2024 usulan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Perdagangan sebanyak 12 usulan, tetapi banyak usulan kegiatan yang syarat ketentuannya tidak lengkap hingga batas waktu yang telah diberikan, sehingga hanya 4 usulan yang terakomodir dalam program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024. Tetapi dari ke 4 usulan tersebut pada akhirnya tidak terdanai dikarenakan pagu anggaran PIS tidak tersedia.

c. Usulan dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan

Pada tahun 2024 tidak ada usulan dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan kepada Dinas Perdagangan tetapi program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 diusahakan dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran anggota Dewan.

Secara lengkap dan menyeluruh usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang ditampilkan dalam tabel 2.4

Tabel 2. 4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul	Kegiatan Bazar diwaktu Bersih Kalurahan (rasul) 1 kali	1	15.000.000	15.000.000	Dilanjutkan akan tetapi Tidak Terdanai.
2	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	kantor desa baleharjo, Wonosari, Kab. Gunungkidul	kurangnya sarana pelaku IKM untuk memasarkan hasil produksinya untuk volume 1 angkatan (20 orang)	1	15.000.000	15.000.000	Dilanjutkan akan tetapi Tidak Terdanai
3	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Bototengah RT 02 RW 16, Botodayaan, Rongkop, Kab. Gunungkidul	Produktu lokal kurang dikenal masyarakat umum, Vol 10 orang	1	15.000.000	15.000.000	Dilanjutkan akan tetapi Tidak Terdanai
4	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Doga Rt 09 Rw 02 Nglangeran, Patuk, Kab. Gunungkidul	Jangkauan pemasaran yang masih rendah dan baru sebagian produk yang keluar Volume 1 Kegiatan dalam 1 Tahun (1 hari jumlah IKM 20 kali	1	15.000.000	15.000.000	Dilanjutkan akan tetapi Tidak Terdanai
5	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	kalurahan Mulusan, Paliyan, Kab. Gunungkidul	banyak IKM yang belum bisa memasarkan produksinya, volume 6 kali	6	15.000.000	90.000.000	Ditolak, Sudah dilaksanakan tahun 2023
6	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Kantor Balai Kalurahan Pengkol, Kebonjero, Pengkol, Nglipar, Kab. Gunungkidul	Minimnya pemasaran/promosi produk lokal sehingga produk kurang berkembang sebanyak 20 UMKM	1	15.000.000	15.000.000	Ditolak, Persyaratan tidak lengkap, proposal tidak ada
7	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Kalurahan watusigar, Ngawen, Kab. Gunungkidul	Pengenalan produk Kalurahan watusigar oleh IKM belum max sehingga belum ada pendapatan yang pasti (2 x pelaksanaan di event rasulan dan Ramdhan, dengan 1 kelompok)	1	15.000.000	15.000.000	Ditolak, Persyaratan tidak lengkap, proposal tidak ada
8	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Girisuko, Panggang, Kab. Gunungkidul	IKM perlu fasilitasi promosi pruduk, volume : 1 kali, 20 peserta	1	15.000.000	15.000.000	Ditolak, Persyaratan tidak lengkap, proposal tidak ada

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
9	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	widoro Rt 07/01, Giripurwo, Purwosari, Kab. Gunungkidul	Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran dan Peningkatan produk belum maksimal. IKM dalam pemasaran masih satu desa. Pemasaran keluar belum dilakukan. Proses pemasaran lambat.	1	15.000.000	15.000.000	Ditolak, Persyaratan tidak lengkap, proposal tidak ada
10	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Karangtengah, Giricahyo, Purwosari Kab. Gunungkidul	kurangnya tingkat promosi atau peningkatan produk ikm lokal	1	15.000.000	15.000.000	Ditolak, Persyaratan tidak lengkap, proposal tidak ada, data IKM tidak ada
11	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Balai Kalurahan Playen, Playen, Kab. Gunungkidul	Masyarakat Kalurahan Playen yang memiliki IKM Lokal perlu mengembangkan pemasaran yang lebih luas sehingga sangat di butuhkan pameran/bazar2...agar masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan IKM Lokal sebanyak 1 kali bazar	1	15.000.000	15.000.000	Ditolak, Persyaratan tidak lengkap, tidak ada data dukung
12	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Jurangjero, Ngawen, Kab. Gunungkidul	kurangnya pengetahuan tentang pemasaran produk lokal	1	15.000.000	15.000.000	Ditolak, Persyaratan tidak lengkap, tidak ada data dukung

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Dalam menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan harus sesuai dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP 2024) merupakan RKP Tahun keempat RPJMN 2021-2026. Tema prioritas pembangunan Tahun 2024 disusun dengan merespon dampak yang diakibatkan oleh pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)*, sehingga akan mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2024 adalah: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Untuk mendukung pembangunan nasional tema prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga harus sejalan dengan tema Pembangunan DIY yaitu: “*Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY*”. Prioritas pembangunan DIY sesuai dalam RKPDIY Tahun 2024 yaitu :

- a. Penurunan kemiskinan;
- b. Ketimpangan Wilayah;
- c. Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19;

Berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah “Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah Dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Bermartabat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul akan dilaksanakan dengan 7 Program prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2024 yaitu :

1. Peningkatan Ekonomi : Investasi dan Pariwisata dan Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
6. Ketentraman dan Ketertiban 6
7. Reformasi Birokrasi

Demi tercapainya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka

prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selaras dengan Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterjemahkan ke dalam Sasaran Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul diantaranya pendapatan masyarakat yang meningkat sesuai dan sejalan dengan sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah :

- a. Pertumbuhan sektor Perdagangan meningkat;
- b. Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

Program pembangunan bidang perdagangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Telaah terhadap kondisi perekonomian nasional pada tahun 2024 masih diselaraskan dengan Nawa Cita Presiden dan Wakil Prsiden khususnya dalam mendukung sasaran strategis agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi dengan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama perdagangan internasional meminimalisasi dampak globalisasi dan mengembangkan kapasitas perdagangan nasional atau sembilan agenda nasional khususnya pada meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Regulasi nasional yang berimplikasi langsung pada Dinas Perdagangan adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan kemetrolagian menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Kementerian Perdagangan merumuskan 14 (empat belas) tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/ penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

Sesuai dengan tema pembangunan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menentukan kebijakan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung IKM yang berbasis kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, meningkatkan peran koperasi serta UMKM, mengutamakan pembinaan industri prioritas melalui klaster industri, mengembangkan industri yang merupakan kompetensi inti yang menjadi keunggulan daerah, serta meningkatkan daya saing industri daerah .`

Terkait kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai dengan dibangunnya jembatan yang ada di Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk yang menghubungkan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul akan lebih mudah. Di mana pembangunan ini akan dilanjutkan lagi guna membuka pintu bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul, dan pengembangan kawasan Nglanggeran sebagai wisata alam yang merupakan salah satu geopark gunungsewu yang harus dijaga dan sebagai salah satu potensi wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul, wisata alam Nglanggeran selama ini terus berbenah untuk bisa menjadi lebih baik lagi, diharapkan dengan perkembangan jaman yang maju akan membawa Nglanggeran lebih dikenal masyarakat baik lokal maupun luar negeri sehingga akan mendongkrak ekonomi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di samping itu Kabupaten Gunungkidul juga memiliki wisata pantai yang menjadi unggulan selama ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya memperbaiki fasilitas dan sarana pendukungnya untuk menarik para wisatawan berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul, dengan banyaknya wisatawan akan berdampak kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,

Dengan adanya Pembangunan *New Yogyakarta International Airport (NYIA)* dan Jalan Lintas Selatan akan membawa dampak yang sangat signifikan bagi UMKM Kabupaten/Kota mampu berkembang dan bersaing dengan produk-produk dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta . Sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam pengentasan kemiskinan selama ini ditujukan di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas kecamatan miskin, yaitu Kecamatan Playen, Semin, Nglipar, Tepus, Girisubo, Gedangsari, Saptosari dengan pembangunan yang merata akan meningkatkan akses dan perekonomian. Selama ini yang dilakukan Dinas Perdagangan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang masuk kriteria miskin (masuk dalam data BDT) menjadi peserta dalam pelatihan-pelatihan baik makanan olahan, pelatihan industri kerajinan lainnya. Dengan kegiatan tersebut diharapkan akan mampu menciptakan wirausaha baru yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah : “Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan serta sarana dan prasarana yang memadai”.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat;
2. Sarana dan Prasarana perdagangan yang memadai;

Prioritas dan sasaran Dinas Perdagangan disajikan sebagaimana dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Perdagangan

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
5.	Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata	Perekonomian Masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi 15%	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan
				Sarana dan Prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Perdagangan

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	25 % (komulatif)
		Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	45 % (komulatif)

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dari suatu tujuan oleh Dinas Perdagangan dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (5) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran dirancang pula indikator sasaran sesuai tugas dan fungsi PD. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun berjalan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian targetnya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahun secara berkesinambungan sejalan dengan ditetapkan dalam Rencana Strategis. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan antara lain sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	15 % (komulatif)
2	Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	35 % (komulatif)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.15 (Nilai Kinerja)

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dan dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan seperti tersaji dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	15 % (komulatif)
2	Sarana dan Prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	35 % (komulatif)

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Pendukung Pencapaian IKU Daerah

No	Kinerja Pendukung	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.15 (Nilai Kinerja PD)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Belanja Operasi

Dalam Renja Dinas Perdagangan Tahun 2024 selain melaksanakan program dan kegiatan yang masuk dalam Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa juga melaksanakan Belanja Modal, Belanja Pegawai yaitu anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gaji pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, selama 1 (satu) tahun sebanyak 84 orang, anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 4.958.413.556,00 yang terdiri dari gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus dan pembulatan gaji. Rincian penggunaan anggaran belanja tidak langsung tersebut seperti tersaji dalam tabel berikut :

**Rencana Pembiayaan Aparatur Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Tahun 2024**

REKENING	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.001	Gaji Pokok ASN	1	tahun	3.970.313.283,00	3.970.313.283,00
5.1.1.01.002	Tunjangan Keluarga ASN	1	tahun	393.712.549,00	393.712.549,00
5.1.1.01.003	Tunjangan Jabatan ASN	1	tahun	177.170.000,00	177.170.000,00
5.1.1.01.005	Tunjangan Fungsional Umum ASN	1	tahun	166.670.000,00	166.670.000,00
5.1.1.01.006	Tunjangan Beras ASN	1	tahun	236.234.040,00	236.234.040,00
5.1.1.01.007	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1	tahun	14.259.126,00	14.259.126,00
5.1.1.01.008	Pembulatan Gaji ASN	1	tahun	54.558,00	54.558,00
JUMLAH				4.958.413.556,00	4.958.413.556,00

b. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai format Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024, dan dalam rangka pencapaian visi, misi, Kebijakan Umum Bupati dan mewujudkan prioritas pembangunan. Rumusan rencana program

dan kegiatan yang disusun merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja Tahun 2023 yang lalu, identifikasi isu-isu perdagangan, rewiu atas rencana awal Renja PD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

c. Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2024

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020, Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 akan melaksanakan 8 program, 17 Kegiatan, 47 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota, terdiri dari 7 kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, terdiri dari 1 kegiatan :
 - a. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan :
 - Pengawasan Distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2(P-B2).
 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari 2 kegiatan:
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan
 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, terdiri dari 1 sub kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, terdiri dari 3 kegiatan :
 - a. Kegiatan Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota, terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
 - b. Kegiatan Pengendalian Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Pasar, terdiri dari 2 sub kegiatan :

- Pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- c. Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota, terdiri dari 2 sub kegiatan :
- Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
5. Program Pengembangan Ekspor, terdiri dari 1 kegiatan :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 sub kegiatan :
- Pameran Dagang Nasional
 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari 1 kegiatan:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, terdiri dari 2 sub kegiatan :
- Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
 - Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, terdiri dari 1 kegiatan :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, terdiri dari 2 sub kegiatan :
- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, terdiri dari 1 kegiatan :
- a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi, terdiri dari 1 sub kegiatan :
- Pengembangan Industri Kreatif

Prioritas, Sasaran Daerah Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 tersaji dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat	tumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	15 persen	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	610.000.000,00	
					2.22	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN	610.000.000,00	
					2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	610.000.000,00	
					2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	610.000.000,00	
					2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	610.000.000,00	
					3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
					3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN	3.473.585.494,47	
					3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	5.760.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.760.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya(PA-B2) maupun ProdusenB2(P-B2)	5.760.000,00	Dinas Perdagangan

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting lainnya	147.119.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota	84.517.500,00	Dinas Perdagangan
					3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.200.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	81.317.500,00	Dinas Perdagangan
					3.30.04.2.02	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/kota	30.284.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam satu(1) Kabupaten/Kota	25.324.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4.960.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.317.500,00	Dinas Perdagangan
					3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	29.117.500,00	Dinas Perdagangan
					3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3.200.000,00	Dinas Perdagangan

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	86.520.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota	86.520.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	56.520.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	30.000.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	184.170.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	184.170.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	181.300.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	2.870.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.07	Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	60.635.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	60.635.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	58.635.000,00	Dinas Perdagangan
					3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	2.000.000,00	Dinas Perdagangan
				35 persen	3.30.03	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	2.989.381.494,47	Dinas Perdagangan
		Sarana dan Prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai		3.30.03.2.01	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	2.882.188.994,47	Dinas Perdagangan

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	454.214.294,47	Dinas Perdagangan
					3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.427.974.700,00	Dinas Perdagangan
					3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	107.192.500,00	Dinas Perdagangan
					3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	107.192.500,00	Dinas Perdagangan

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penunjang
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju 2025 (Rp.)	SKPD
1	2	3	4	5
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.544.654.611,53	9.057.729.723,00	
3.30.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.344.000,00	64.460.000,00	
3.30.1.02.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.840.000,00	52.000.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	400.000,00	1.500.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	320.000,00	1.300.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	240.000,00	1.100.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	240.000,00	300.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.920.000,00	7.000.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	384.000,00	1.260.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.101.751.091,53	7.637.613.723,00	
3.30.1.02.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.046.671.091,53	7.605.413.723,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	896.000,00	2.200.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54.184.000,00	30.000.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000,00	64.756.000,00	
3.30.1.02.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300.000,00	3.025.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	61.731.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.654.520,00	213.820.000,00	
3.30.1.02.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.719.500,00	7.150.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.121.020,00	66.000.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.700.000,00	4.500.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.944.000,00	19.350.000,00	Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju 2025 (Rp.)	SKPD
1	2	3	4	5
3.30.1.02.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	1.320.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	3.000.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.06.0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.170.000,00	112.500.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	117.500.000,00	
3.30.1.02.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	23.000.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	0,00	82.500.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	12.000.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.005.000,00	484.930.000,00	
3.30.1.02.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360.000,00	1.430.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	75.210.000,00	445.000.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.435.000,00	38.500.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.600.000,00	474.650.000,00	
3.30.1.02.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.100.000,00	275.000.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.09.0005	Pemeliharaan Mebel	750.000,00	1.650.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.950.000	71.500.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	110.000.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.1.02.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000,00	16.500.000,00	Dinas Perdagangan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 tersebut di atas, akan dilaksanakan dan didanai dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 9.628.240.106 (Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Enam Rupiah) dengan sumber anggaran pendanaan dari APBD Kabupaten Gunungkidul, selengkapnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN								
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase IKM yang mengikuti pameran		60 persen	610.000.000,00			80 persen	895.000.000,00
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	100 unit	610.000.000,00			100unit	895.000.000,00
2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah industri kreatif yang dikembangkan	Kab. Gunungkidul	104 unit	610.000.000,00	Dana Keistimewaan Yogyakarta		100 unit	895.000.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN								
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100 persen	5.544.654.611,53			100 persen	9.057.729.723,00
					9.018.240.106,00				13.539.667.723,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	4,576 Indeks	56.344.000,00			4,576 Indeks	64.460.000,00
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	4 Dokumen	52.840.000,00	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	52.000.000,00
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perdagangan	1 dokumen	400.000,00	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.500.000,00
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perdagangan	1 dokumen	320.000,00	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.300.000,00
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perdagangan	2 dokumen	240.000,00	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	1.100.000,00
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perdagangan	2 dokumen	240.000,00	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	300.000,00
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perdagangan	17 laporan	1.920.000,00	Dana Alokasi Umum		17 laporan	7.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dinas Perdagangan	5 laporan	384.000,00	Dana Alokasi Umum		5 laporan	1.260.000,00
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	410,25 Indeks	5.101.751.091,53			419,58 Indeks	7.637.613.723,00
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perdagangan	1190 Orang/bulan	5.046.671.091,53	Dana Alokasi Umum		1246 Orang/bulan	7.605.413.723,00
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perdagangan	1 laporan	896.000,00	Dana Alokasi Umum		1 laporan	2.200.000,00
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perdagangan	13 laporan	54.184.000,00	Dana Alokasi Umum		13 laporan	30.000.000,00
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	4,5 indeks	300.000,00			4,5 indeks	64.756.000,00
3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perdagangan	7 dokumen	300.000,00	Dana Alokasi Umum		6 dokumen	3.025.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1			4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarakan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perdagangan	0 orang	0,00	Dana Alokasi Umum		3 orang	61.731.000,00
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	53,48 Indeks	61.654.520,00			53,48 Indeks	213.820.000,00
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perdagangan	4 paket	1.719.500,00	Dana Alokasi Umum		6 paket	7.150.000,00
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perdagangan	6 paket	25.121.020,00	Dana Alokasi Umum		6 paket	66.000.000,00
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Perdagangan	5 paket	1.700.000,00	Dana Alokasi Umum		6 paket	4.500.000,00
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perdagangan	36 paket	5.944.000,00	Dana Alokasi Umum		36 paket	19.350.000,00
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Perdagangan	0 Dokumen	0,00	Dana Alokasi Umum		250 Dokumen	1.320.000,00
3.30.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Perdagangan	0 Laporan	0,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.000.000,00
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perdagangan	12 Laporan	27.170.000,00	Dana Alokasi Umum		20 Laporan	112.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Perdagangan	16 unit	0,00	Dana Alokasi Umum		18 unit	117.500.000,00
3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Perdagangan	0 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum		10 Unit	23.000.000,00
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Perdagangan	0 unit	0,00	Dana Alokasi Umum		6 unit	82.500.000,00
3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Perdagangan	0 unit	0,00	Dana Alokasi Umum		2 unit	12.000.000,00
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Dinas Perdagangan	76 laporan	194.005.000,00			76 laporan	484.930.000,00
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perdagangan	4 Laporan	360.000,00	Dana Alokasi Umum		4 Laporan	1.430.000,00
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perdagangan	36 Laporan	75.210.000,00	Dana Alokasi Umum		84 Laporan	445.000.000
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perdagangan	12 Laporan	118.435.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	38.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi pemeliharaannya	Dinas Perdagangan	675 unit	130.600.000,00			675 unit	474.650.000,00
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perdagangan	212 Unit	111.100.000,00	Dana Alokasi Umum		496 Unit	275.000.000,00
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas Perdagangan	5 unit	750.000,00	Dana Alokasi Umum		50 unit	1.650.000,00
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perdagangan	38 unit	16.950.000,00	Dana Alokasi Umum		113 unit	71.500.000,00
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perdagangan	0 unit	0,00	Dana Alokasi Umum		1 unit	110.000.000,00
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atas Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perdagangan	6 unit	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum		15 unit	16.500.000,00
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi		60 persen	5.760.000,00			80 persen	19.950.000,00
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan	Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan		13 Laporan	5.760.000,00			13 Laporan	19.950.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1			4	5	6	7	8	9	10
	Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Gunungkidul	13 laporan	5.760.000,00	Dana Alokasi Umum		13 laporan	19.950.000,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi	Kab. Gunungkidul	60 persen	2.989.381.494,47			80 persen	3.440.000.000,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	40 Indeks	2.882.188.994,47			40 Indeks	3.345.000.000,00
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	40 unit	454.214.294,47	Dana Alokasi Umum		40 unit	1.430.000.000,00
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	40 unit	2.427.974.700,00	Dana Alokasi Umum		40 unit	1.915.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Gunungkidul	25 dokumen	107.192.500,00			25 dokumen	95.000.000,00
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	9 dokumen	107.192.500,00	Dana Alokasi Umum		25 dokumen	95.000.000,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya		60 persen	147.119.000,00			80 persen	88.725.000,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		2 laporan	84.517.500,00			2 laporan	57.225.000,00
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	4 laporan	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum		1 laporan	6.300.000,00
3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	4 laporan	81.317.500,00	Dana Alokasi Umum		1 laporan	50.925.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		13 Laporan	30.284.000,00			13 Laporan	17.850.000,00
3.30.04.20.2.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	4 laporan	25.324.000,00	Dana Alokasi Umum		12 laporan	6.825.000,00
3.30.04.20.2.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	12 laporan	4.960.000,00	Dana Alokasi Umum		1 laporan	11.025.000,00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5 indeks	32.317.500,00			5 indeks	13.650.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	5 dokumen	29.117.500,00	Dana Alokasi Umum		5 dokumen	6.825.000,00
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	5 laporan	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum		5 laporan	6.825.000,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	IKM yang berorientasi Ekspor		22 unit	86.520.000,00			27 unit	533.250.000,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		26 pelaku usaha	86.520.000,00			26 pelaku usaha	533.250.000,00
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jawa Tengah	2 pelaku usaha	56.520.000,00	Dana Alokasi Umum		6 pelaku usaha	488.250.000,00
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	30 pelaku usaha	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum		20 pelaku usaha	45.000.000,00
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera/ tera ulang		20.00 persen	184.170.000,00			20.53 persen	268.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Indeks Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		2000 Indeks	184.170.000,00			2050 Indeks	268.500.000,00
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	1216 unit	181.300.000,00	Dana Alokasi Umum		3900 unit	260.000.000,00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan an Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	25 orang	2.870.000,00	Dana Alokasi Umum		200 orang	8.500.000,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang mengikuti promosi produk		60 persen	60.635.000,00			80 persen	131.513.000,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Indeks Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		32 indeks	60.635.000,00			32 indeks	131.513.000,00
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperolehfasilitasi Promosi Penggunaan ProdukDalam Negeri di TingkatKabupaten/Kota (UMKM)	Kabupaten Gunungkidul	36 umkm	58.635.000,00	Dana Alokasi Umum		60 umkm	126.000.000,00
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kabupaten Gunungkidul	50 UMKM	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum		50 UMKM	5.513.000,00
					9.628.240.106,00				14.434.667.723,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas PD Tahun 2024 mengacu pada rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa menyesuaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan ini akan dilaksanakan di tahun 2024 dengan memperhatikan pedoman, peraturan dan kebijakan yang harus dipatuhi. Diharapkan perencanaan tahunan ini semua program dan kegiatan dapat tertampung dan dilaksanakan, dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Forum Gabungan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan pandemic covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia yang perlu penanganan dari Pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga anggaran banyak terserap untuk kegiatan tersebut. Dampak dari pandemic tersebut akhirnya ada beberapa kegiatan di Tahun 2024 belum/tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
DINAS PERDAGANGAN,

KELIK YUNIANTORO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu (1) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima (5) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renja serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul mempunyai kewajiban menyusun Renja sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Pembangunan Perencanaan yang sistematis dan matang, baik dari perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi Perangkat Daerah. RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah (PD) yang telah tersusun merupakan dasar untuk menyusun perencanaan tahap selanjutnya, yaitu Renja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.

Keterkaitan dokumen perencanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Renja PD dengan RKPD
RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif. Renja PD disesuaikan dengan program prioritas PD.
2. Renja PD dengan Renstra PD
Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L (Kementerian/ Lembaga) dan PD Provinsi
Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD provinsi.

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026. Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Renstra PD Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan memuat arah kebijakan, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme Musrenbang. Selain itu Renja memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja PD juga disinergiskan dengan Renja Kementerian/Lembaga serta Renja Provinsi.

Penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum PD, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Renja. Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun 2024 menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dalam RAPBD tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta memuat rencana program kegiatan sesuai dengan tupoksi PD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan agar penyusunan Renja PD hingga pengamanan alokasinya di RAPBD 2024 dapat berjalan efektif. Langkah-langkah tersebut antara lain :

1. Melanjutkan implementasi *Money Follow Program*;
2. Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat-Daerah;
3. Memperkuat kendali program.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disempurnakan dengan berpedoman pada rancangan RKPD Tahun 2024, memastikan terakomodirnya belanja wajib dan mengikat, kebijakan belanja prioritas,

memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) serta program dan kegiatan yang akan di laksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD Tahun 2024, yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

- Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja;
 18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Pempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2024;
3. Menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. *Review* terhadap Renja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN
TENAGA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Tenaga Kerja dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Tenaga Kerja

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja tahunan tetap berpedoman pada tahap perencanaan sebelumnya. Untuk itu dalam proses penyusunan Renja-SKPD tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan *review* capaian Rencana Strategis (Renstra) PD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2/Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun 2022 dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut :

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 yang mendapatkan alokasi anggaran dalam DPPA adalah sebesar Rp19.622.294.188,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp18.483.924.624,00. Belanja Operasi di bagi menjadi Belanja Pegawai Sebesar Rp5.248.694.695,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp13.235.229.929,00. Jumlah program kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 terdiri dari 16 program, 25 kegiatan, dan 61 sub kegiatan.

Pencapaian Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen		100 Persen	99,70 Persen	100 Persen		
X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Jumlah jenis dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	28 dokumen ; 6 jenis		28 dokumen en; 6 jenis	28 dokum en; 6 jenis	100 Persen		
X.XX.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja; Jumlah dokumen Renja Perubahan;			1 Dokume n; 1 Dokume n;	1 Dokume n; 1 Dokume n;	100		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
		Jumlah Penyelenggaraan Forum PD; Jumlah Dokumen Profil PD			1 kali; 1 Dokume n	1 kali; 1 Dokume n				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4 Dokume n		
X.XX.0 1.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA			1 Dokume n	1 Dokume n	100			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						1 Dokume n		
X.XX.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA			1 Dokume n	1 Dokume n	100			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD						1 Dokume n		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA; Jumlah dokumen perjanjian kinerja; Jumlah dokumen ROPK			1 Dokume n; 1 Dokume n; 1 Dokume n	1 Dokume n; 1 Dokume n; 1 Dokume n	100			
X.XX.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD			1 Dokume n; 1 Dokume n	1 Dokume n; 1 Dokume n	100	2 Dokume n		
X.XX.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA;Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja			1 Dokume n; 1 Dokume n	1 Dokume n; 1 Dokume n		1 Dokume n; 1 Dokume n		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD						2 Dokume n		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						17 Lapora n		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP; Jumlah laporan E Monev; Jumlah laporan TEPPRA			1 Dokume n; 4 Dokume n; 12 Dokum en	7 1 Dokume n; 4 Dokume n; 12 Dokum en	8=(7/6) *100 100		
X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah laporan keuangan yang disusun	14 dokumen		14 dokum en	14 dokum en	100		
X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan terfalitasi gaji dan tunjangan ASN					266 Indeks		
X.XX.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun			14 bulan	14 bulan	100		784 Orang / Bulan
					1 Dokume n	1 Dokume n	100		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ;Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	54 orang		12 Dokum en;1 Doku men	12 Dokum en;1 Doku men	100	13 Lapora n		
X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54 orang		54 orang	54 orang	100	7,500 Inde ks		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pengelolaan BMD						2 Dokume n		
X.XX.0 1.2.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4 Laporan		
X.XX.0 1.2.05. 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani			53 ASN	53 ASN	100			
X.XX.0 1.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN/non ASN yang dikirim mengikuti diklat/bimtek/outbound			0 Orang	0 Orang	0	11 Dokum en		
X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah layanan Administrasi Umum	9 layanan		9 layanan	9 layanan	100	4 Orang		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah komponen listrik yang tersedia			6 jenis	6 jenis	100	59,847 Ind eks		
X.XX.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia;Jumlah komputer yang dibeli;Jumlah laptop yang dibeli;Jumlah printer yang dibeli;Jumlah monitor yang dibeli			8 jenis; 1 unit; 1 unit; 1 unit; 1 unit	8 jenis; 1 unit; 1 unit; 1 unit	100		4 paket	
X.XX.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang dibeli;Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli			14 jenis; 4 jenis	14 jenis; 4 jenis	100		5 paket	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	10=(10/4)
		(piring, gelas, tutup gelas, baki, sendok dll)								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						6 paket		
X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan; Jumlah lembar fotokopi/penggandaan			8 jenis; 25000 lem bar	8 jenis; 25000 lem bar	100			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12 paket		
X.XX.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar			12 bulan	12 bulan	100			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						365 Doku men		
X.XX.0 1.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bendera yang dibeli;Jumlah umbul-umbul yang terbeli			2 buah;18 buah	2 buah;18 buah	100			
X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	makan minum dan snack untuk tamu			140 OR	140 OR	100			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+9)	10=(10/4)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan		
X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat, konsultasi, koordinasi luar daerah;Jumlah makan dan minum tersedia untuk rapat;Jumlah minum dan snack tersedia untuk rapat			96 OP;300 OR;505 OR	96 OP;300 OR;505 OR			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					97 Laporan		
X.XX.0 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola			2 Jenis	2 Jenis			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4 Dokumen		
X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3 layanan		3 layanan	100			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			2 buah;2 buah;2 bu ah;1 buah; 1 buah;1 buah	2 buah;2 buah;2 bu ah;1 buah; 1 buah;1 buah	32 Unit		
		Jumlah kursi rapat;Jumlah meja kerja yang dibeli;Jumlah kursi kerja yang dibeli;Jumlah kursi tamu yang dibeli;Jumlah meja komputer yang dibeli;Jumlah kursi tunggu/pelayanan yang dibeli					25 Unit		
X.XX.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit		
X.XX.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan barang untuk showroom			1 paket	1 paket			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gorden yang terbeli			1 paket	1 paket	100			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						2 Unit		
X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 layanan		3 layanan	3 layanan	100			
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						103 lapora n		
X.XX.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah hari terfasilitasinya pengadministrasian surat menyurat;Jumlah surat terkirim			247 hari;2 jenis	240 hari;2 jenis	99,67			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4 laporan		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang terbayar (1 rekening X 12 Bulan);Jumlah rekening listrik yang terbayar (1 rekening X 12 Bulan);Jumlah rekening telpon yang terbayar (1 rekening X 12 Bulan);Jumlah jaringan telepon tersambung			12 rekening; 12 rekening; 12 rekening; 1 unit	12 rekening; 12 rekening; 12 rekening; 1 unit			
X.XX.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 laporan		
X.XX.0 1.2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah jasa kebersihan			12 bulan	12 bulan			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 laporan		
		Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 layanan		5 layanan	5 layanan			
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					562 unit		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya;Jumlah mobil dinas yang terpelihara;Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya;Jumlah motor dinas yang terpelihara;Jumlah BBM kendaraan dinas roda dua, roda empat terpenuhi			8 unit;8 u nit;30 unit ;30 unit;12 bulan	8 unit;8 u nit;30 unit ;30 unit;1 2 bulan			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					494 unit		
X.XX.0 1.2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang terfasilitasi pemeliharaannya			4 unit	4 unit			
		Jumlah Mebel yang Dipelihara					6 unit		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah genset yang terfasilitasi pemeliharaannya;Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya;Jumlah LCD proyektor yang terfasilitasi pemeliharaannya;Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya;Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya;Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya;Jumlah alat pemadam kebakaran yang terfasilitasi pemeliharaannya			1 unit;15 unit;2 unit ;3 unit;19 unit;24 un it;3 unit	1 unit;15 unit;2 unit ;3 unit;19 unit;24 u nit;3 unit	100			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						36 unit		
X.XX.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara			2 unit	2 unit	100			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 unit		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
X.XX.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC terpelihara			24 unit	24 unit	100			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						24 unit		
X.XX.0 1.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi yang tersusun	5 dokumen		5 dokume n	5 dokume n	100			
X.XX.0 1.2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen evaluasi SOP/SP;Jumlah Dokumen pengukuran survey Kepuasan Masyarakat (SKM);Jumlah Dokumen RTP/SPIP			1 Dokume n;2 Doku men;1 Dok umen	1 Dokume n;2 Doku men;1 Dok umen	100			
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100 persen		100 persen	98,21 pers en	98,21			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.07.03 .2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja, Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja,	100 Persen		100 Persen	98,21 pers en	98,21			
2.07.03 .2.01.0 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah tenaga kerja penjahit yang terlatih dan kompeten (PIWK);jumlah tenaga kerja penjahit yang terlatih dan kompeten (POKER);Jumlah tenaga kerja yang menguasai tehnologi informatika terlatih dan kompeten (PIWK);Jumlah tenaga kerja yang menguasai tehnologi informatika terlatih dan kompeten (POKER);Jumlah tenaga kerja yang menguasai teknik dasar bengkel sepeda motor terlatih dan kompeten (PIWK);Jumlah tenaga kerja yang menguasai teknik dasar pengelasan terlatih dan kompeten (POKER);Jumlah tenaga kerja yang menguasai teknik dasar			1 Angkata n;1 Angkat an;1 Angk atan;1 Ang katan;1 A ngkatan;1 A ngkatan;1 Angkatan;1 Angkatan)	1 Angkata n;1 Angkat an;1 Angk atan;1 Ang katan;1 A ngkatan;1 A ngkatan;1 Angkatan)	100			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	3	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	4	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
			pengelasan terlatih dan kompeten (PIWK)								
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n						80 Orang		
2.07.03 .2.01.0 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		jumlah Bimbingan teknis akreditasi lembaga pelatihan kerja Swasta;Jumlah peserta pelatihan susidi 3 in 1 di LPK dan jumlah pesrta pelatihan scurity			10 LPK;50 Orang	10 LPK;50 Orang	100			
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n						6 lembaga		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	5 persen	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	5 persen		5 persen	5,54 perse n	110,80			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.07.04 .2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase tenaga kerja yang terserap	100 Persen		100 Persen	100 Perse n			
2.07.04 .2.01.0 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Padat Karya Infrastruktur;Jumlah Padat Karya infrastruktur (PMK Nomor 134/PMK.07/2022)			18 Lokasi; 5 lokasi	18 Lokasi; 5 lokasi			
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					2730 Oran g		
2.07.04 .2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penyebararan informasi kerja	100 Persen		100 Persen	100 Perse n			
2.07.04 .2.03.0 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Bimbingan Bursa Kerja Kusus (BKK);Jumlah informasi bursa kerja (BKOL);Jumlah Job Fair;Jumlah Dokumen PTKD Tahun 2021-2026			4 Kali; 18 Lokasi; 1 K ali; 1 doku men	4 Kali; 18 Lokasi; 1 K ali; 1 doku men			
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja					500 Orang		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	100 persen		100 persen	100 perse n	100			
2.07.05 .2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 Persen		100 Persen	100 perse n	100			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	3	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	4	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	4	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	Perkiraan Tingkat capaian (%)
2.07.05 .2.02.0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota peran dewan pengupahan;Jumlah anggota peran sidang tripartit terfasilitasi;Jumlah Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan;Jumlah Money Perusahaan yang melaksanakan THR;Jumlah Money Perusahaan Perusahaan Kesejahteraan Buruh (UMK, PP, PKB, K3);Jumlah Peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday);Jumlah Raker APINDO;Jumlah Rakor AMHI (Asosiasi Mediator Hubungan Induastrial) se DIY;Jumlah Rakor SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);Jumlah Sosialitasi Peraturan Perundang undangan	4	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
2.07.05 .2.02.0 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	Perkiraan Tingkat capaian (%)	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.07.05 .2.02.0 4	Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina						1 Lembaga		
2.17.02	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi yang memiliki NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan/atau pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan	10 koperasi		10 kopersi	100	100			
2.17.02 .2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilyah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	10 koperasi		10 kopersi	100	100			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	3	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	Jumlah koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan NIB	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.17.02 .2.01.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					10 koperasi	10 koperasi	100			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	64 Persen		64 Persen	58,25 Persen	91,02	10 unit usaha	66 Persen	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.17.03 .2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang terbina dan terawasi	100 koperas i		100 koper asi	100 koper asi	100	100 unit usaha		
2.17.03 .2.01.0 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang terbina terawasi			100 koper asi	100 koper asi	100			
		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						100 unit usaha		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	3	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapai (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.17.03 .2.01.0 2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran bedah koperasi				15 koperas i	12 kopera si	80			
		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja							25 unit usaha		
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi dengan predikat sehat		26 koperasi		26 koperas i	21 kopera si	80,77	28 koperas i		
2.17.04 .2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya		60 koperasi		60 koperas i	60 kopera si	100	70 koperas i		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.17.04 .2.01.0 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya;Jumlah peserta sosialisasi penilaian kesehatan koperasi			60 koperas i;30 koper asi	60 kopera si;0 koper asi			
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	76 persen				70 unit usaha		
2.17.05 .2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya	1 layanan		76 persen	88,98 pers en	77 persen		
		Jumlah layanan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 layanan		1 layanan	1 layanan			
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					781 orang		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+9)	10=(10/4)
2.17.05 .2.01.0 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang didampingi pra RAT;Jumlah peserta diklat akuntansi;Jumlah peserta diklat kompetensi marketing;Jumlah peserta diklat penilaian kesehatan koperasi;Jumlah peserta diklat bisnis plan;Jumlah peserta diklat digitalisasi koperasi;Jumlah peserta diklat manajemen usaha koperasi;Jumlah peserta diklat pelayanan prima;Jumlah peserta diklat pemecahan masalah;Jumlah peserta sosialisasi koperasi;Jumlah content e-learning yang ter- posting;Jumlah peserta pelatihan sosialisasi koperasi (PIS) 4x25 orang;Jumlah peserta diklat Kompetensi Juru Tagih;Jumlah peserta diklat Kompetensi Analisis Pinjaman/Pembiayaan			30 koperas i;25 orang; 30 orang;3 0 orang;30 orang;30 orang;30 o rang;30 or ang;30 ora ng;300 ora ng;1 conte nt;100 ora ng;30 oran g;30 orang	7	9	10=(5+7+9)	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	10=(10/4)
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan		1 layanan	1 layanan	100			
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah peserta diklat vocational;Jumlah peserta diklat kewirausahaan;Jumlah peserta diklat manajemen untuk UMKM			27 orang;60 orang;60 orang	27 orang;60 orang;60 orang	100			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase kenaikan aset koperasi	14.9 persen		14.9 persen	14.74 persen	98,67	15 persen		
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 layanan		1 layanan	1 layanan	100	1 layanan		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.17.06 .2.01.0 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang termonitoring dagu;Jumlah partisipasi/event dalam peringatan Harkopda dan Harkopnas;Jumlah peserta pembinaan kemitraan koperasi;Jumlah peserta pembinaan promosi dan pemasaran koperasi;Jumlah koperasi peserta pembinaan usaha koperasi			75 koperas i;1 kali;30 orang;30 orang;12 k operasi	75 kopera si; 1 kali;3 0 orang;30 orang;12 koperasi	100			
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						217 Unit Usaha		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM	20 persen		20 persen	21,45 pers en	107,25	40 persen		
2.17.07 .2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah layanan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5 layanan		5 layanan	5 layanan	100			
2.17.07 .2.01.0 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan UMKM;Jumlah UMKM yang termonitoring data perkembangan usaha			0 Kali;100 UMKM	0 Kali;100 UMKM	100			
		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						2 dokume n		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	3	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.17.07 .2.01.0 2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah peserta yang mengikuti temu usaha;Jumlah Pelayanan konsultasi bisnis UMKM;Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi permodalan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			30 orang;6 jenis;60 UMKM	30 orang;1 jenis;60 UMKM	100			
2.17.07 .2.01.0 3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang terfasilitasi PIRT;Jumlah peserta sosialisasi sertifikasi Halal;Jumlah usaha mikro yang tersosialisasi IUMK	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			30 UMKM; 30 orang;3 0 UMKM	30 UMKM; 30 orang;3 0 UMKM	100	60 unit usaha		
2.17.07 .2.01.0 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta Pelatihan olahan makanan;Jumlah peserta pelatihan pengemasan produk;Jumlah peserta pelatihan batik kayu;Jumlah peserta Pelatihan teknik ecoprint (PIWK) 6X20 orang;Jumlah peserta Pelatihan Wirausaha Pemula	Jumlah peserta Pelatihan olahan makanan;Jumlah peserta pelatihan pengemasan produk;Jumlah peserta pelatihan batik kayu;Jumlah peserta Pelatihan teknik ecoprint (PIWK) 6X20 orang;Jumlah peserta Pelatihan Wirausaha Pemula			20 orang;4 0 orang;20 orang;120 orang;300 orang;20 orang;180 orang;180 orang;140 orang;300	20 orang;4 0 orang;0 orang;120 orang;220 orang;0 or ang;120 or ang;180 or ang;100 or		60 unit usaha		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+9)	10=(10/4)
		bidang kerajinan batik kain (PIWK) 15x20 orang;Jumlah peserta Pelatihan Wirausaha Pemula bidang kerajinan tali kur (PIS) 1x20 orang;Jumlah peserta Pelatihan Wirausaha Pemula bidang makanan olahan (berbahan baku lokal) - (PIWK) 9x20 orang;Jumlah peserta Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM (PIS) 6x30;Jumlah peserta Pelatihan teknik ecoprint (e-RESES) 7x20 orang;Jumlah peserta Pelatihan Wirausaha Pemula bidang makanan olahan (berbahan baku lokal) -(ERESES) 15x20 orang;Jumlah peserta Pelatihan Wirausaha Pemula bidang makanan olahan (berbahan baku lokal) - (Pokir) 11x20 orang			orang;220 orang	ang;220 orang			
2.17.07	Pemberdayaan								
.2.01.04	Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
							100		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	3	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.17.07 .2.01.0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	jumlah Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan UMKM		1 Kali		1 Kali		100	1360 Unit Usaha		
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		20 persen		20 persen	19,75 pers en	98,75	200 orang		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro		20 layanan		1 layanan	1 layanan	100			
2.17.08 .2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah layanan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		1 layanan		1 layanan	1 layanan	100			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
2.17.08 .2.01.0 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaksanaan Pameran dalam daerah;Jumlah event promosi produk Luar daerah yang diikuti;Jumlah peserta pelatihan peningkatan kualitas olahan roti dan kue;Jumlah peserta pelatihan digital marketing;Jumlah peserta pelatihan digital marketing (PIS) 4x30 orang;Jumlah peserta pelatihan peningkatan kualitas olahan roti dan kue (PIWK) 9 x 20 orang;Jumlah peserta pembinaan promosi dan pemasaran (PIS) 7x30 orang;Jumlah peserta pelatihan peningkatan kualitas olahan mocaf dan cassava (PIWK) 1 x 20 orang;Jumlah peserta pelatihan peningkatan kualitas olahan mocaf dan cassava (e-RESES) 13 x 20 orang;Jumlah DED PLUT KUMKM yang tersusun	22 kali; 1 e vent; 40 ora ng; 30 ora ng; 120 ora ng; 180 ora ng; 210 ora ng; 20 oran g; 260 oran g; 1 dokum en	22 kali; 1 event; 40 o rang; 30 or ang; 120 or ang; 180 or ang; 210 or ang; 20 ora ng; 260 ora ng; 1 doku men	8=(7/6) *100 100				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+9)	10=(10/4)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasiliasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20 persen		20 persen	20 persen	370 Unit Usaha		
2.22.08.2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	3 layanan		3 layanan	3 layanan	1 layanan		
2.22.08.2.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Anugerah Cipta Kreasi icon Gunungkidul;Fashion Show In The Cave Gunungkidul Cinta Batik;;Gelar Inovasi Produk Lokal			4 nominasi pemenang; 50 peserta; 1 even (19 sentra,1 forum IKM Gunungkidul)	4 nominasi pemenang; 50 peserta ;1 even (19 sentra,1 forum IKM Gunungkidul)			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
		Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan						100 unit		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan	20 persen		20 persen	20 persen	100	40 persen		
3.31.02 .2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penyusunan dan evaluasi RPIK	100 persen		5 layanan	5 layanan	100	5 layanan		
3.31.02 .2.01.0 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah akademik RPIK Tersusun;Jumlah Perda RPIK tersusun			1 dokume n;1 perda	1 dokume n;1 perda	100			
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri						1 dokume n		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)	
3.31.02 .2.01.0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Fasilitasi Kerjasama Suplay Bahan baku Industri;Bimtek Inovasi produk dan diversifikasi produk kerajinan kayu (mebel dan limbah kayu);Bimtek kerajinan kulit imitasi;Bimtek makanan olahan bahan dasar ketela;Bimtek makanan olahan tahu			0 kali;1 k ali; 1 kali;1 kali; 1 kali	7 0 kali;1 k ali; 1 kali; 1 kali; 1 kali	8=(7/6) *100 100			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					1 dokume n			
3.31.02 .2.01.0 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Fasilitasi Badan Hukum untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB);Mobile klinik konsultasi kemasan (K3)			1 kali;2 k ali	1 kali;2 k ali				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					1 dokume n			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
3.31.02 .2.01.0 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Fasilitasi Peralatan Industri bagi IKM; Gedung Workshop/Showroom IKM terbangun; Jumlah pembinaan Industri Sehat yang terfasilitasi; Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan Dekranas; Pembinaan dan Pendampingan Sentra; Pembinaan dan Pendampingan Calon Sentra; Sosialisasi dan monitoring cukai tembakau iris (DBHCHT); Pembinaan dan pendampingan IKM Tembakau iris (Cukai Iris)(DBHCHT); Pembentukan sentra industri tembakau iris (Cukai Tembakau)(DBHCHT); Talk Show Televisi/Tayang radio (Cukai Tembakau)(DBHCHT); Rapat Kerja Asosiasi Tembakau iris (DBHCHT); Materi baleho cukai tembakau iris dan listrik			23 jenis; 1 unit; 4 kali; 2 kali; 3 k ali; 3 kali; 7 kali; 0 kali ; 0 kali; 1 k ali; 0 kali; 0 lokasi; 1 k ali; 0 kali; 1 8 kali; 1 k ali; 2 kali; 3 kali; 1 kali ; 10 IKM; 10 IKM; 1 kal i; 60 IKM; 1 kali; 1 kali ; 3 kali; 1 k ali; 2 kali; 5 lokasi	23 jenis; 1 unit; 4 kal i; 2 kali; 3 kali; 3 kali; 7 kali; 0 k ali; 0 kali; 1 kali; 0 kal i; 0 lokasi; 1 kali; 0 kal i; 18 kali; 1 kali; 2 kal i; 3 kali; 1 kali; 10 IK M; 10 IKM; 1 kali; 60 I KM; 1 kali; 1 kali; 3 k ali; 1 kali; 2 kali; 5 lok asi	8=(7/6) *100 100	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
		(DBHCHT);Pembinaan dan pendampingan industri garam;Fasilitasi Kemitraan IKM (DBHCHT);Rapat Kerja Forum IKM Kapanewon;Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Usaha (DAK Non Fisik);Pelatihan Pendampingan Inovasi dan Diversifikasi Produk (DAK Non Fisik);Pelatihan Selling, Merchandising, dan Fotografi (DAK Non Fisik);Pelatihan Kemitraan Berori					8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	10=(10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						5 dokumen		
3.31.02 .2.01.0 6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan RPIK yang tersusun	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	20 persen				1 dokume n			
3.31.03 .2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI) Kabupaten/Kota Jumlah IKM yang mempunyai Nomor Induk Berusaha, Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar	100 persen		20 persen	20 persen	40 persen			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)	
3.31.03 .2.01.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah peserta sosialisasi ijin usaha;Jumlah pengusaha yang dibina dan diawasi legalitas usahanya;Jumlah pengusaha yang terfasilitasi untuk IUI			20 pengus aha;15 pe ngusaha;3 IKM	20 pengus aha;15 pe ngusaha;0 IKM	9			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kebutuhan Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS					1 dokume n			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	3	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>) /Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
3.31.03 .2.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		20 persen		20 persen	20 persen	100	1 dokume n		
3.31.04	PROGRAM PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS		20 persen		20 persen	20 persen	100	40 persen		
3.31.04 .2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan terhadap penyediaan informasi industri;Presentase layanan Penyediaan Informasi Industri;Presentase layanan rekomendasi Pemberbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kewenangan Kabupaten / Kota		2 layanan;1 00 persen		2 layanan; 100 persen	2 layanan; 100 perse n	100			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat Tercapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
3.31.04 .2.01.0 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang terfasilitasi dan mengikuti sosialisasi SIINAS			20 Peserta	20 Peserta	100	1 dokume n	10=(5+7+ 9)	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						1 dokume n		
3.31.04 .2.01.0 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah booklet yang tersedia			55 ekspl	55 ekspl	100			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Perkiraan realisasi capaian
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas					1 dokume n		
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi	100 persen		100 persen	100 perse n	100 persen		
3.32.03 .2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaB	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot	100 Persen		100 Persen	100 Perse n	100 persen		
3.32.03 .2.01.0 4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang Kerjasama dengan daerah penempatan Transmigrasi;Jumlah Penempatan Transmigrasi sesuai dengan kesepakatan kerja antar daerah (KSAD)			4 Kabupat en;14 KK	4 Kabupat en;14 KK	10 KK		
		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan					10 KK		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	3	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output dan Outcome) /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6) *100	9	10=(5+7+ 9)	10=(10/4)
3.32.03 .2.01.0 4	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran							10 KK		
3.32.03 .2.01.0 5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah desa yang mendapat sosialisasi penyebaran informasi program transmigrasi;Jumlah KK yang mendaftar sebagai calon transmigran				15 Desa;1 4 KK	15 Desa;1 4 KK	100			
3.32.03 .2.01.1 6	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran							10 KK		
3.32.03 .2.01.1 7	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)							600 I Orang		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya.

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Tenaga Kerja. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama (IKU) PD.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 348/KPTS/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pertumbuhan sektor industri
2. Nilai omset koperasi aktif
3. Persentase pertumbuhan omset UMKM yang dibina
4. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
5. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Indikator (IKU, SPM,IKK)	Satuan (IKU, SPM,IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	IKU (Indikator Kinerja Utama)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Nilai Omset koperasi aktif	Rupiah	NA	46.605.312.000	47.405.312.000	48.305.312.000	NA	97.638.916.350				
2	Persentase Pertumbuhan omset UMKM yang dibina	Persen	NA	9.35	9.46	9.94	NA	15,10				
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	NA	50	55	61	NA	44,50				
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	NA	10.5	12.2	13.9	NA	11,90				
5	Persentase pertumbuhan sektor industri	Persen	NA	3	6	10	NA	3				
1	Indikator Kinerja Pendukung											
1	Nilai AKIP PD	Nilai/Skore	NA	80.05	80.20	80.40	NA	78,59				

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM termasuk industri dan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah tantangan digitalisasi di hampir semua aspek kehidupan, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap setiap pelaku usaha dan tenaga kerja, sehingga mereka harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Peningkatan daya saing, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut, difokuskan pada peningkatan kualitas produksi, teknologi, pembiayaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM.

Peran dan posisi koperasi, UMKM dan kuantitas tenaga kerja sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah, koordinasi dan sinergi program antar Perangkat Daerah dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, dibutuhkan sumber daya manusia yang berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala.

Kualitas SDM pelaku usaha dan tenaga kerja di Kabupaten Gunungkidul masih terbatas. Kebanyakan berpendidikan terbatas dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan masih lemah. Kurangnya inovasi dan kualitas produk menjadikan hambatan untuk mampu bersaing dalam menghadapi pasar global.

Kondisi lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses pelaku usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. UMKM dengan modal besar diharapkan bisa mengembangkan usahanya dan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran dan menurunkan kemiskinan. Kabupaten Gunungkidul juga belum memiliki pusat promosi yang secara khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah.

Pendanaan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar di Kabupaten Gunungkidul.

Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha harus mampu memanfaatkan peluang pasar. Kesempatan untuk promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Pengembangan media pemasaran perlu dilakukan. Media pemasaran online dapat menjadi salah satu media pemasaran yang dilakukan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dukungan dan pendampingan usaha diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar .

Informasi teknologi yang berkembang pesat merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung minat investor selaras dengan program dan kerjasama lintas sektor membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul.

Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi juga menjadi kendala tersendiri dalam upaya pengembangan koperasi. Peraturan-peraturan perkoperasian belum diterapkan secara penuh oleh gerakan koperasi. Kelembagaan koperasi, UMKM dan tenaga kerja perlu diperkuat antara lain dengan updating data koperasi dan UMKM, mempercepat penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), mendorong pemasyarakatan koperasi, serta peningkatan kualitas SDM.

Dari beberapa permasalahan tersebut, beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 4 antara lain:

1. Mengembangkan media pemasaran yang lebih efektif, memperluas dan memperdalam jangkauan pemasaran produk koperasi dan UMKM serta membangun kerjasama dengan platform pemasaran online;
2. Adanya kebijakan untuk membeli produk UMKM lokal;
3. Fasilitasi akses pembiayaan koperasi dan UMKM;
4. Penguatan basis produksi koperasi dan UMKM dengan menggali potensi sumber daya lokal yang produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM serta peningkatan tenaga kerja berkualitas.
6. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan manajemen koperasi dan UMKM sehingga koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya;
7. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM;
8. Perluasan kesempatan kerja;
9. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas program/kegiatan dan pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pelaksanaan isu-isu penting tersebut juga diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian visi misi Bupati. Khususnya pada misi ke dua (2) Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, akses pembiayaan dan jaminan, serta daya saing yang diimbangi dengan pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan segenap potensi yang ada serta dipadukan dengan sinergitas program kegiatan pusat sampai daerah, kerja sama pengusaha besar dan UMKM, peningkatan inovasi daerah diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Gunungkidul. Dampak positif tersebut antara lain :

- Eksistensi koperasi dan UMKM dalam menunjang kemampuan ekonomi daerah
- Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi, UMKM dan tenaga kerja
- Berfungsinya koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia
- Terciptanya UMKM yang unggul dan mampu bersaing
- Penyiapan tenaga kerja yang berkualitas
- Peningkatan taraf hidup masyarakat

Dengan terbatasnya kemampuan pendanaan menyebabkan terbatasnya ruang gerak untuk melaksanakan program kegiatan, sedangkan saat ini diperlukan upaya untuk dapat membantu memulihkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk akibat wabah covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk mengusulkan program/kegiatan yang didanai dengan APBN. Perlu dilakukan langkah-langkah persiapan untuk upaya pengajuan usulan pendanaan program kegiatan ke pusat.

Pelayanan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berhubungan langsung dengan masyarakat terutama hal yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, pelatihan calon tenaga kerja, pelayanan kartu pencari kerja, pelayanan transmigrasi dan lain-lain. Pelayanan tersebut harus tersedia saat dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan bidang tenaga Kerja, ada beberapa tantangan diantaranya :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kabupaten Gunungkidul baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di setiap bidang.
2. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
3. Minimnya kesempatan kerja, Terbatasnya kualitas tenaga kerja dan minimnya informasi bagi pencari kerja.
4. Masih terdapat perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai UU Ketenagakerjaan.
5. Dalam bidang transmigrasi terbatasnya kuota transmigrasi dari pusat dan minimnya minat dari warga untuk mengikuti transmigrasi.

Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya untuk ikut program perlindungan ketenagakerjaan. Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas agar Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul mampu meningkatkan pelayanannya, telah dilakukan langkah-langkah, diantaranya

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan teknis diluar daerah serta mengusulkan tambahan yang mempunyai keahlian di bidang ketugasan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur untuk melaksanakan tugasnya
3. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan (seperti industri, BKK, asosiasi dll.) dalam rangka untuk memperluas kesempatan kerja
4. Melakukan pembinaan pelatihan kerja kepada para pencari kerja sesuai dengan kualitas pendidikan, memberikan informasi kerja melalui Bursa Kerja *On Line*, dan melakukan kerjasama dengan perusahaan.

5. Komunikasi dengan para pemangku dalam rangka pelaksanaan kewajiban sesuai dengan UU Ketenagakerjaan
 6. Melaksanakan penyebaran informasi tentang transmigrasi ke desa dan melaksanakan kerja sama dengan daerah tujuan transmigrasi.
- Permasalahan dan kendala tersebut dapat mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020 berdasar surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 595/9970 Juni 2017 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang pada intinya bahwa agar kabupaten/kota dapat melakukan kerjasama pola sharing anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing kabupaten/kota, maka perlu ditindaklanjuti dengan mengalokasikan dana sesuai dengan kemampuan untuk melaksanakan kerja sama pola sharing.

Pada tahun 2022, realisasi pencapaian sasaran pertumbuhan sektor industri menunjukkan hasil yang positif. Untuk mencapai target sasaran pertumbuhan sektor industri tersebut dilaksanakan melalui program prioritas yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Sedangkan hal yang dilakukan adalah mengintensifkan kegiatan promosi Industri Kecil dan Menengah di berbagai media dan event-event tertentu.

Permasalahan – permasalahan bidang perindustrian yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan kemampuan SDM dan teknologi industri;
- b. Kurangnya daya saing produk IKM;
- c. Kurangnya kesadaran IKM dalam kepemilikan legalitas usaha;
- d. Belum optimalnya pengembangan sentra di Kabupaten Gunungkidul;

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, dengan melihat permasalahan yang dihadapi tidak menyurutkan langkah untuk ikut memajukan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah: “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan bidang perindustrian adalah :

- a. Tantangan

Pengembangan Kawasan peruntukan industri untuk mendukung sektor-sektor unggulan pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata dalam mengembangkan sentra industri kecil pada Kawasan pedesaan harus berpedoman pada KLHS dan RTRW.

- b. Peluang

Terbukanya pasar produk kerajinan, kesempatan promosi, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi karena sebagai daerah tujuan pariwisata

Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan omzet Industri Kecil Menengah (IKM)
3. Mewujudkan peningkatan omzet Usaha Kecil Menengah (UKM)

2.4 *Review* terhadap Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Reviu terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui program kegiatan mana yang memang benar-benar dibutuhkan oleh Perangkat Daerah maupun masyarakat sehingga ada skala prioritas pada program kegiatan terutama untuk mengantisipasi apabila ternyata ketersediaan anggaran tidak mencukupi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan Rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Dengan adanya analisis kebutuhan maka diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Analisis kebutuhan juga dilakukan untuk menyempurnakan rancangan akhir renja sehingga menjadi Rancangan Renja Akhir yang tepat sasaran, program, kegiatan, target, lokasi maupun penganggaran.

Untuk Rancangan Awal Renja 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja dapat disimpulkan bahwa total anggaran adalah sebesar 15.353.703.872,00 yang terdiri dari anggaran PIS murni, DAK Nonfisik, Pokir Dewan, PIWK dan PIS usulan dari kecamatan. Perangkat Daerah harus mengoptimalkan dana yang tersedia untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan prioritas namun tetap mendukung upaya pencapaian IKU Perangkat Daerah dan visi misi Bupati dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada seoptimal mungkin. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja terdiri dari 16 program, 26 kegiatan dan 68 sub kegiatan. Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

No	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.997.528.164	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				182.375.000
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			100 Persen	1.122.278.164	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100 Persen	52.067.500
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			100 Persen	1.122.278.164	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	100 Persen	52.067.500
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192 Orang	588.668.724	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	51.417.500
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	7 Lembaga	533.609.440	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6 Lembaga	650.000

Rencana Rancangan Awal RKKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	6 persen	3.755.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	6 persen	66.315.000	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kerja yang terserap	100 Persen	3.546.920.000			Persentase tenaga kerja yang terserap	100 Persen	150.000	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan kerja	0 Orang	3.546.920.000			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan kerja	600 Orang	150.000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase tenaga kerja yang terserap	100 Persen	208.080.000			Persentase tenaga kerja yang terserap	100 Persen	66.165.000	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	600 Orang	208.080.000			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	700 Orang	66.165.000	
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	100 persen	120.250.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	100 persen	63.992.500	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100 Persen	120.250.000			persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100 Persen	63.992.500	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	81.220.000			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	40.347.500	

Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5.730.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	3.125.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	33.300.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	20.520.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				9.049.000.708	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				5.129.334.647	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	6.763.051.108	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	4.152.771.907	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen	95.600.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen	115.700.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	69.710.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	103.845.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.900.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.245.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.360.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	2.630.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2.860.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.935.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	8.225.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	3.565.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Laporan	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Laporan	825.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 Persen	5.906.171.108	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 Persen	3.498.424.407	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/bulan	5.827.653.608	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/bulan	3.406.271.907	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	3.835.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	2.220.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
		Wonosari Wonosari	Keuangan Akhir Tahun SKPD				Wonosari Wonosari	Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	74.682.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	89.932.500	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan administrasi pengelolaan BMD yang tersusun tepat waktu	100 Persen	1.850.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan administrasi pengelolaan BMD yang tersusun tepat waktu	100 Persen	630.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.850.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	630.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	58.857.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	930.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 dokumen	26.357.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 dokumen	930.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	32.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum terlayani	100 Persen	224.650.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum terlayani	100 Persen	179.260.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	1.938.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	48.633.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	3.542.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	4.860.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 dokumen	0	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	650	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 paket	0	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	2.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104 Laporan	123.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	94.089.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
		Wonosari Wonosari					Wonosari Wonosari				
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	24.997.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	79.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	0	
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	26.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	38.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	187.945.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	116.430.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	25.882.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.000.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	58.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	114.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	103.262.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.430.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	208.977.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	241.397.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	494 unit	93.677.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	455 unit	195.150.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	2.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	2.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	9.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	36.547.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	99.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	

Rencana Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	3.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	7.200.000	
5	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Jumlah koperasi yang memiliki NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan/atau pembukaan kantor cabang cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan	10 koperasi	10.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Jumlah koperasi yang memiliki NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan/atau pembukaan kantor cabang cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan	10 koperasi	1.400.000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	100 Persen	10.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	100 Persen	1.400.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	10.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	1.400.000	
6	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	68 Persen	63.500.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	68 Persen	4.850.000	

Rencana Rancangan Awal RKKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase koperasi yang terbina dan terawasi	100 Persen	63.500.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase koperasi yang terbina dan terawasi	100 Persen	4.850.000	
	Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	110 Unit Usaha	38.000.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10 Unit Usaha	1.400.000	Perubahan Sub Kegiatan Baru
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	25 Unit Usaha	25.500.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	15 Unit Usaha	3.450.000	Perubahan Sub Kegiatan Baru
7	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah koperasi dengan predikat sehat	30 koperasi	25.110.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah koperasi dengan predikat sehat	30 koperasi	3.150.000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penilaian kesehatan koperasi	100 Persen	25.110.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penilaian kesehatan koperasi	100 Persen	3.150.000	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80 Unit Usaha	25.110.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	3.150.000	

Rencana Rancangan Awal RKKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
8	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya	78 persen	623.420.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya	78 persen	284.455.500	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM koperasi peserta diklat yang bersertifikat	100 Persen	424.500.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM koperasi peserta diklat yang bersertifikat	100 Persen	284.455.500	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1592 Orang	424.500.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	550 Orang	284.455.500	
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				198.920.000	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro			0 -	198.920.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro			0 -	-	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase kenaikan aset koperasi	15.5 persen	316.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase kenaikan aset koperasi	15.5 persen	72.430.000	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang mengalami kenaikan volume usaha	38.05 Persen	316.500.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang mengalami kenaikan volume usaha	38.05 Persen	72.430.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Standarasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bermilai Tambah Memiliki Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	237 Unit Usaha	316.500.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	117 Unit Usaha	72.430.000	Perubahan Sub Kegiatan Baru
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM	60 persen	731.892.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM	60 persen	568.929.740	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase layanan pemberdayaan usaha mikro	100 Persen	731.892.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase layanan pemberdayaan usaha mikro	100 Persen	568.929.740	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5 dokumen	207.400.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1 dokumen	600.000	Perubahan Sub Kegiatan Baru
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	240 Unit Usaha	38.940.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	3.220.000	

Rencana Rancangan Awal RKKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	180 Unit Usaha	29.940.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	79.347.740	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	840 Unit Usaha	440.612.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	450 Unit Usaha	317.920.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	240 Orang	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20 Orang	200.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	167.642.000	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro	60 persen	515.527.600	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro	60 persen	41.347.500	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase layanan pengembangan usaha mikro	100 Persen	515.527.600	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase layanan pengembangan usaha mikro	100 Persen	41.347.500	

Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	1332 Unit Usaha	515.527.600	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	70 Unit Usaha	41.347.500	Perubahan Sub Kegiatan Baru
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									290.500.000	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase IKM yang mengikuti even pengembangan kearifan lokal	60 persen	169.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase IKM yang mengikuti even pengembangan kearifan lokal	60 persen	290.500.000	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	100 Persen	139.500.000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	100 Persen	290.500.000	
	Pengembangan Industri Kreatif	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	150 unit	139.500.000	Pengembangan Industri Kreatif	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	100 unit	290.500.000	
	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase layanan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	100 Persen	30.000.000						
	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	1 Laporan	30.000.000						
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				612.675.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				402.347.500	

Rencana Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan	60 persen	424.500.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan	60 persen	293.850.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan pelayanan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 Persen	424.500.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan pelayanan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 Persen	293.850.000	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	7.745.000	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	150.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	810.000	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 dokumen	12.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	770.000	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 dokumen	250.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 dokumen	282.025.000	

Rencana Rancangan Awal RKKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	2.500.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	2.500.000	
14	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI)	60 persen	103.175.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI)	60 persen	32.187.500	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan perizinan industri kecil dan menengah	100 Persen	103.175.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan perizinan industri kecil dan menengah	100 Persen	32.187.500	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI IPIU IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kebutuhan Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	93.175.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi	1 dokumen	31.847.500	Perubahan Sub Kegiatan Baru

Rencana Rancangan Awal RKKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI IPU IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri Perizinan Perluasan Usaha Industri Perizinan Kawasan Industri dan Kawasan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Kelurahan	umlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	340.000	
15	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	60 persen	85.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	60 persen	76.310.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Presentase layanan Penyediaan Informasi Industri	100 Persen	85.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPU IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Presentase layanan Penyediaan Informasi Industri	100 Persen	76.310.000	
	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	1 dokumen	45.000.000	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	1 dokumen	58.130.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	30.000.000	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	17.840.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Lingkungan Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	10.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	340.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				525.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				71.822.500	
16	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi	100 persen	525.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi	100 persen	71.822.500	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	525.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	71.822.500	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	15 Kepala Keluarga	337.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2 Kepala Keluarga	57.407.500	
	Pendaftaran Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	15 KK	21.000.000	Pendaftaran Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	2 KK	3.270.000	

Rencana Rancangan Awal RKKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	15 KK	17.000.000	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	2 KK	1.675.000	
	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	750 Orang	150.000.000	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	90 Orang	9.470.000	
TOTAL					15.353.703.872					6.076.379.647	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan tersebut. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dalam program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan usulan kegiatan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Melalui Musrenbang kecamatan dan Forum Perangkat Daerah, usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain faktor tingkat urgensi, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, pemerataan lokasi dengan mempertimbangkan potensi wilayah dengan harapan berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak.

Untuk usulan dari proses Musrenbang yaitu alokasi PIWK dan sebagian usulan dari PIS kecamatan yang sudah di verifikasi, tidak dapat diakomodir pada Renja Tahun 2024. Hal ini dikarenakan ada Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/04391 pada tanggal 21 Juni 2023 Tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang isinya batas defisit APBD dan batas maksimum Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun 2024 sebesar 2,2%. Yang mengakhibatkan PIS DAN PIWK pada tahun 2024 sementara tidak di akomodir dan hanya mengakomodir Pokir Dewan. Berbagai pertimbangan mengingat kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan untuk dapat mengakomodir semua usulan. Pencermatan dari Instansi Perencanaan Kabupaten yang dilakukan melalui Desk dengan Bappeda juga dilakukan untuk meminimalisir kesalahan demi lebih sempurnanya Renja yang disusun, baik dalam kesesuaian nomenklatur kegiatan, rasionalisasi anggaran maupun ketepatan penentuan indikator kinerja. Secara total sebagaimana yang tercantum dalam Renja tahun 2024, usulan pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan untuk program kegiatan Tahun 2024 dari 22 (dua puluh dua) usulan hanya di akomodir sebanyak 21 (dua puluh satu) usulan dikarenakan keterbatasan anggaran dan kesalahan dalam pemilihan pelatihan dari para Anggota Dewan / Pemangku Kepentingan di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	POKIR-Bimtek Olahahan Ketela	(Kapanewon Rongkop, Kalurahan Semugih, Padukuhan Kemiri. kelompok IKM Dapur Cahaya Rt 05/ Rw 12, Semugih, Kec. Rongkop)		1	Kelompok	-	-	Tidak diakomodir
2	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahahan	(Kelompok baru olahahan makanan dusun Natah Kulon, Kelurahan Natah, Nglipar, Gunungkidul, Natah, Kec. Nglipar)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
3	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahahan	(Kelompok baru olahahan makanan dusun Natah Wetan, Kelurahan Natah, Nglipar, Gunungkidul, Natah, Kec. Nglipar)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
4	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahahan	(Kelompok baru olahahan makanan dusun Pule Kulon, Kelurahan Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul, Sidoharjo, Kec. Tepus)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
5	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahahan	(Kelompok Baru Olahahan Makanan Dusun Klepu, Desa Klepu, Tepus, Gunungkidul, Sidoharjo, Kec. Tepus)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
6	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahahan	(Kelompok baru olahahan makanan dusun Pringsanggar, Kelurahan Purwodadi, Tepus, Gunungkidul, Purwodadi, Kec. Tepus)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Luwengombo, Kelurahan Purwodadi, Tepus, Gunungkidul, Purwodadi, Kec. Tepus)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
8	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Ngricik, Kelurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Wiladeg, Kec. Karangmojo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
9	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Krambilduwur, Kelurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Wiladeg, Kec. Karangmojo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
10	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Kalangan I, Kelurahan Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, Ngipak, Kec. Karangmojo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
11	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Munggur, Kelurahan Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, Ngipak, Kec. Karangmojo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
12	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Padukuhan Ngrombo 2, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul, Karangmojo, Kec. Karangmojo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
13	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Sawahan, Kelurahan Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul, Jatiayu, Kec. Karangmojo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Tegalsari, Kelurahan Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul, Jatiayu, Kec. Karangmojo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
15	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Ngrejek Kulon, Kelurahan Gombang, Ponjong, Gunungkidul, Gombang, Kec. Ponjong)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
16	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Wareng, Kelurahan Kepek, Saptosari, Gunungkidul, Kepek, Kec. Saptosari)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
17	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Ploso, Kelurahan Tileng, Girisubo, Gunungkidul, Tileng, Kec. Girisubo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
18	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Banagung, Kelurahan Tileng, Girisubo, Gunungkidul, Tileng, Kec. Girisubo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
19	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Kandri, Kelurahan Pucung, Girisubo, Gunungkidul, Pucung, Kec. Girisubo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir
20	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Nujo, Kelurahan Pucung, Girisubo, Gunungkidul, Pucung, Kec. Girisubo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	CATATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Salam I, Kelurahan Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul, Songbanyu, Kec. Girisubo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir	
22	POKIR - Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	(Kelompok baru olahan makanan dusun Gabugan, Kelurahan Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul, Songbanyu, Kec. Girisubo)		1	Kelompok	15.000.000	15.000.000	diakomodir	
	TOTAL							315.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Dalam menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan harus sesuai dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergikan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Stabilitas dan pelaksanaan pembangunan secara merata untuk kepentingan rakyat didukung oleh dokumen perencanaan yang mantap dan bersinergi dengan dokumen yang sudah ada.

Telaah terhadap kondisi perekonomian nasional pada tahun 2022 tetap diselaraskan dengan Nawa Cita atau sembilan agenda nasional, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program

"Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Agenda nasional yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja adalah Nawacita ke-5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh).

Program Prioritas nasional juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja di daerah. 7 program prioritas nasional tersebut adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja bernaung pada 4 (empat) kementerian. Program Kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dan mendukung terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kementerian.

3.1.1 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;

2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan *impact investment*, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pada agenda pembangunan ini, salah satu sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun akan datang dan menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Arah kebijakan yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dan Koperasi.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat Pertumbuhan Ke Wilayah (PKW) belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis (IPTEK) kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- 5) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden Tahun 2020-2024, maka Arah Kebijakan Pengembangan

Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*)
2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang).

Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sedangkan Misinya adalah “Mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-Dua, yaitu : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, :“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*;
 - b. UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

3.1.2. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing”. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dijelaskan dalam Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian meliputi :

- 1) meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional,
- 2) meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri,
- 3) meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri,
- 4) meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional,
- 5) meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi,
- 6) meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, dan
- 7) menguatnya struktur industri.

3.1.3. Kementerian Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan semakin memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dicapai oleh negara-negara berkembang pada umumnya terkait erat dengan ketepatan formulasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan investasi serta dukungan infrastruktur yang memadai. Semua aspek ini telah direncanakan secara berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang mengusung visi pembangunan nasional "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Memasuki periode keempat RPJPN tersebut, pembangunan ketenagakerjaan semakin menjadi aspek krusial untuk diprioritaskan. Hal ini terlihat dari salah satu sasaran pokok yang bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdayasaing. RPJPN menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Gambaran umum atas kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang merupakan tantangan strategis bangsa. Jumlah angkatan kerja yang sudah mencapai 133,56 juta orang pada 2019 (Badan Pusat Statistik, Agustus 2019) merupakan potensi yang dapat mengoptimalkan kinerja perekonomian Indonesia. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak. Di masa mendatang, sektor ekonomi semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian digital, mengingat mulai bermunculan gejala transformasi ekonomi ke arah automation

(otomatisasi) atau digital ekonomi. Bagaimana tenaga kerja berpendidikan rendah tersebut mampu menghadapi proses transformasi ekonomi, tentu diperlukan kebijakan untuk mempercepat peningkatan skill SDM agar dinamika sektor ekonomi mampu diimbangi dengan penyediaan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Dalam konteks kesejahteraan, transformasi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang tidak pasti seiring hadirnya digitalisasi tentu membutuhkan penguatan perlindungan sosial.

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- a. mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdayasaing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
- b. mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- c. meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
- e. mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
- f. mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
- g. mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menuangkannya ke dalam sasaran strategis, yakni: Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 39,57 persen (Sakernas Agustus, 2018), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Lebih lanjut, dalam menghadapi pasar kerja yang fleksibel, diperlukan tenaga kerja yang adaptif yang mampu menunjang perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempumaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk menjawab tantangan dan pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran, khususnya dalam

mempersiapkan sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai landasan di dalam upaya pengembangan potensi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah dan peningkatan kesejahteraan pekerja, maka dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan

Sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain investasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, yang didukung oleh sumber daya manusia, agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing lebih baik, adapun agenda prioritas pembangunan nasional terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan, yaitu:

Agenda Prioritas Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja migran, dengan arah kebijakan dan strategi:

1. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan;
2. Memperluas Kerjasama dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan;
3. Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian;
4. Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja melalui pengenalan jasa keuangan;
5. Meningkatkan perlindungan melalui peningkatan pengawasan Agenda Prioritas Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, dengan arah kebijakan dan strategi:

1. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial

Dalam rangka mendukung agenda dan sasaran pembangunan bidang ekonomi, kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk:

- a. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global;
- b. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
- c. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan;
- d. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan yang dilaksanakan;
- e. Memfungsikan pasar tenaga kerja yang dilaksanakan;
- f. Memperluas kerja sama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran yang dilaksanakan;
- g. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan yang dilaksanakan;
- h. Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian yang harmonis

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara, maka dirumuskan 9 agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan Nawa Kerja Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;

3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel

3.1.4. Telaahan Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Tujuan pembangunan nasional berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar provinsi dalam satu pulau dan antar pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua tentang Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada Kegiatan Prioritas Keempat yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi.

Selain adanya mandat dari RPJMN 2020-2024, untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ada mandat peraturan perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal. Paling tidak terdapat tiga aspek penting dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut. Pertama, undang-undang ketransmigrasian mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama diluar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat antara lain dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa. Kedua, undang-undang desa yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan mandat yang cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Aspek materialisme undang-undang desa yaitu keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun desa. Dari cara pandang peluang, dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa.

Namun dari cara pandang tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa selama ini berpotensi menggiring desa pada inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pelaksanaan percepatan pembangunan desa, serta degradasi kultur gotong-royong dan integritas aparat pemerintah desa. Karena itu, pendampingan desa menjadi agenda besar dalam implementasi undang-undang desa, termasuk pemanfaatan

dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan kawasan perdesaan yang merupakan salah satu kawasan strategis nasional memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Ketiga, peraturan pemerintah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menekankan perlunya peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi percepatan pembangunan daerah antara pusat dengan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi adalah mandat yang cukup kuat bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam menggerakkan dan mengintegrasikan Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Mitra pembangunan. Persoalannya, walaupun telah banyak target yang dicapai selama ini, namun berbagai masalah berkenaan dengan upaya percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi masih menyisakan berbagai isu strategis yang harus dihadapi lima tahun kedepan.

Salah satu isu yang harus menjadi landasan pijak bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional adalah isu ketimpangan antar wilayah yang masih cukup tinggi. Hal tersebut ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) tingkat kemiskinan, (2) tingkat rasio gini, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah tertinggal dan non tertinggal. Secara umum penanggulangan kemiskinan di Indonesia dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,44%.

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan
4. penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;

5. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
6. Terentaskannya daerah tertinggal;
7. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam
8. pembangunan perdesaan,
9. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
10. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Berkembangnya status pembangunan desa:

1. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian,
3. Menurunnya angka kemiskinan,
4. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma),
6. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi,
7. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan,
8. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal,
9. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal,
10. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi,
11. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi,
12. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan,
13. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi,
14. Perbaikan *governance*, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan,
15. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian,
16. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mempercepat keterkaitan fungsional intra kawasan dan antar kawasan serta keterkaitan desa-kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agrobisnis untuk mewujudkan satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Pemberlakuan UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, mengharuskan adanya perubahan paradigma (*paradigm shift*) transmigrasi, yaitu; "Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan". Pengembangan wilayah, yang muaranya untuk menghasilkan daya saing daerah, pada dasarnya tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan SDA, tetapi juga faktor letak lokasi kawasan transmigrasi yang dipilih. Oleh karena itu, pemilihan

lokasi dalam perspektif sistem ketatakeruangan, kawasan transmigrasi merujuk pada Rencana Tata Ruang Perdesaan dengan beranjak pada:

1. Penyiapan kawasan transmigrasi yang ada sepanjang memenuhi persyaratan minimal suatu kawasan,
2. Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai PKSN, PKW dan PKL sesuai dengan potensi wilayah masing-masing,
3. Mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai hinterland dari pusat pusat kegiatan yang ada (PKN, PKSN, PKW dan PKLP),
4. Revitalisasi lahan transmigrasi untuk mendukung reformasi agraria 9 juta ha, dengan rincian:
 - a. Redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha terdiri dari tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan
 - b. Legalisasi aset seluas 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi yang belum legalisasi aset (sertifikasi kepemilikan lahan: 334.382 bidang). Untuk tindak lanjut pelaksanaan program transmigrasi tidak hanya mendukung redistribusi tanah tetapi juga melakukan program pembangunan permukiman baru dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh, sesuai amanat RPJMN 2015-2019 dari pelaksanaan Nawa Cita

Adapun kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi adalah:

- a. Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
- b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- c. Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Masyarakat Desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Dan Tenaga Kerja

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2024 sebagaimana telah disajikan dalam RKPD tahun 2024.

Tujuan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Tenaga Kerja adalah :

1. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan UMKM yang mandiri, tangguh dan berdaya saing.
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perindustrian.
3. Terwujudnya tenaga kerja berdaya saing

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
2. Meningkatkan peran dan kinerja UMKM dalam menggerakkan perekonomian masyarakat
3. Pertumbuhan Sektor Industri Meningkat
4. Meningkatnya serapan tenaga kerja

5. Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Prioritas dan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
1	Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata	Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Nilai omset koperasi aktif
				Meningkatkan peran dan kinerja UMKM dalam menggerakkan perekonomian masyarakat	Persentase Pertumbuhan omset UMKM yang dibina
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD
				Pertumbuhan sektor industri meningkat	Persentase pertumbuhan sektor industri
2	Penanggulangan Kemiskinan	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
				Meningkatkannya perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Tujuan dan target kinerja tujuan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja pada tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	2	3	4
1	Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan UMKM yang mandiri, tangguh dan berdaya saing	Jumlah koperasi yang berkembang dan mampu bergerak menjadi koperasi berkualitas	97 koperasi
		Persentase pertumbuhan omset UMKM yang dibina Tahun 2026	10.64%
2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perindustrian	Nilai tambah IKM	57.326.030.493,06
3	Terwujudnya tenaga kerja berdaya saing	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	38.30%

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Nilai omset koperasi aktif	48.305.312.000
2	Meningkatkan peran dan kinerja UMKM dalam menggerakkan perekonomian masyarakat	Persentase Pertumbuhan omset UMKM yang dibina	9.94%
3	Pertumbuhan sektor industri meningkat	Persentase pertumbuhan sektor industri	10%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,40
5	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	61%
6	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	13.9%

Perumusan Indikator Kinerja Utama PD beserta target pencapaian pada Tahun 2024 disajikan dalam tabel 3.4 berikut:

TABEL 3.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA PD

NO	IKU	INDIKATOR KINERJA IKU	TARGET KINERJA IKU
1.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Nilai omset koperasi aktif	48.305.312.000
2.	Meningkatkan peran dan kinerja UMKM dalam menggerakkan perekonomian masyarakat	Persentase Pertumbuhan omset UMKM yang dibina	9.94%
3.	Pertumbuhan sektor industri meningkat	Persentase pertumbuhan sektor industri	10%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.40
5.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	61%
6.	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	13.9%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN
TENAGA KERJA

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berikut pendanaannya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja adalah :

1. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah
2. Prioritas Pembangunan
3. Pengurangan kemiskinan
4. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
5. Pencapaian IKU
6. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Tema, Prioritas, dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :

- a. Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 :

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

- b. Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
 2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah
- Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mendukung misi Kepala Daerah yang ke-2 yaitu: “Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah :

“Optimalisasi ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan ekonomi;
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;

6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi birokrasi;

Dari ke tujuh prioritas pembangunan daerah di atas tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja adalah mendukung prioritas ke 1 dan 2, yaitu Peningkatan Ekonomi dengan Sasaran Daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat dan Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting dengan sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, juga disinergikan dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

UMKM, termasuk di dalamnya industri dan koperasi merupakan salah satu penggerak ekonomi rakyat. UMKM merupakan bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Dengan berkembangnya UMKM yang didukung oleh permodalan diantaranya melalui koperasi, diharapkan dapat membantu program Pemerintah Daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan wilayah.

Program kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja juga diarahkan pada pencapaian IKU yang selaras dengan tupoksi pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yaitu :

1. Nilai omzet koperasi aktif,
2. Persentase pertumbuhan omzet UMKM yang dibina,
3. Presentase pertumbuhan sektor industri,
4. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan,
5. Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2024 hanya terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja operasi untuk membiayai program kegiatan Perangkat Daerah juga diarahkan pada pencapaian IKU yang selaras dengan tupoksi dinas. Hal ini dapat ditempuh melalui pengembangan koperasi dan UMKM, serta penyerapan tenaga kerja dengan memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Mendasar pada nomenklatur yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Tenaga Kerja Tahun 2024 terdiri dari 16 program, 24 Kegiatan, 68 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kewenangannya

Perumusan program kegiatan pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja dikaitkan dengan sasaran PD dan Pagu indikatif total pada Rancangan Akhir Renja yang telah ditetapkan untuk pendanaan program kegiatan pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp6.076.379.647,00 dan prakiraan maju Tahun 2025 sebesar Rp15.341.857.949,00.

Adapun rencana pendanaan program dan kegiatan prioritas, program dan kegiatan pendukung, serta Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 secara rinci masing – masing dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2, dan 4.3.

Tabel 4.1

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran OD	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab	
					2	7	3				
Penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim, dan penanganan stunting	Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	61%	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		DPKUKMTK	
					2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	182.375.000		
					2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	52.067.500		
					2	7	3	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	52.067.500		
					2	7	3	2.0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	51.417.500	
					2	7	3	2.0			
					2	7	3	1			
					2	7	3	2.0	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	650.000	
					2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66.315.000	
					2	7	4	2.0	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	150.000	
					2	7	4	2.0	Perluasan Kesempatan Kerja	150.000	
					2	7	4	2.0	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	66.165.000	
					2	7	4	2.0	Job Fair/Bursa Kerja	66.165.000	
					2	7	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	63.992.500	
2	7	5	2.0	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	63.992.500						

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran OD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab							
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,40 nilai/score	2	7	5	2.0	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.347.500				
					2	7	5	2.0	2						
					2	7	5	2.0	2				3	3.125.000	
					2	7	5	2.0	2				4	20.520.000	
					2	1	7							5.129.334.647	
					2	1	7							4.152.771.907	
					2	1	7							115.700.000	
					2	1	7							103.845.000	
					2	1	7							1.900.000	
					2	1	7							1.000.000	
					2	1	7							2.630.000	
					2	1	7							1.935.000	
					2	1	7							3.565.000	
					2	1	7							825.000	
					2	1	7							3.498.424.407	
					2	1	7							3.406.271.907	
					2	1	7							2.220.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran OD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2 1 1 2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	89.932.500	
					2 1 1 2.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	630.000	
					2 1 1 2.0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	630.000	
					2 1 1 2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	930.000	
					2 1 1 2.0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	930.000	
					2 1 1 2.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	
					2 1 1 2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.260.000	
					2 1 1 2.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.938.000	
					2 1 1 2.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.633.500	
					2 1 1 2.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.542.000	
					2 1 1 2.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.860.000	
					2 1 1 2.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	
					2 1 1 2.0	Penyediaan Bahan/Material	0	
					2 1 1 2.0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000	
					2 1 1 2.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.089.000	
					2 1 1 2.0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.997.500	
					2 1 1 2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
					2 1 1 2.0	Pengadaan Mebel	0	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran OD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2 1 1 2.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
					2 1 1 2.0 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
					2 1 1 2.0 0		116.430.000	
					2 1 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000	
					2 1 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
					2 1 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000	
					2 1 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.430.000	
					2 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.397.500	
					2 1 1 2.0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.150.000	
					2 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	
					2 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.547.500	
					2 1 1 2.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	
					2 1 1 2.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.200.000	
					2 1 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1.400.000	
				48.305.312.000	2 1 1 2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.400.000	
					2 1 1 2.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.400.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran OD	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2	1	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.850.000	
					2	1	3	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.850.000	
					2	1	3	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	1.400.000	
					2	1	3	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	3.450.000	
					2	1	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	3.150.000	
					2	1	4	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.150.000	
					2	1	4	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.150.000	
					2	1	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	284.455.500	
					2	1	5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	284.455.500	
					2	1	5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	284.455.500	
					2	1	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	72.430.000	
					2	1	6	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.430.000	
					2	1	6	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	72.430.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran OD	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2	1	7			
		Meningkatkan peran dan kinerja UMKM dalam menggerakkan perekonomian masyarakat	Persentase Pertumbuhan omset UMKM yang dibina	9,94%	2	1	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	568.929.740	
					2	1	7	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	568.929.740	
					2	1	7	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	600.000	
					2	1	7	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	3.220.000	
					2	1	7	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	79.347.740	
					2	1	7	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	317.920.000	
					2	1	7	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200.000	
								Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	167.642.000	
					2	1	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	41.347.500	
					2	1	8	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	41.347.500	
					2	1	8	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	41.347.500	
					2	2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	290.500.000	
					2	2	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	290.500.000	
					2	2	8	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	290.500.000	
					2	2	8	Pengembangan Industri Kreatif	290.500.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran OD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
		Pertumbuhan sektor industri meningkat	Persentase pertumbuhan sektor industri	10%	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	474.170.000	
					3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	402.347.500	
					3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	293.850.000	
					3	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	293.850.000	
					3	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	7.745.000	
					3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	810.000	
					3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	770.000	
					3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	282.025.000	
					3	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2.500.000	
					3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	32.187.500	
					3	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	32.187.500	
					3	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	31.847.500	
					3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	340.000	
					3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	76.310.000	
					3	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	76.310.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran OD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					3 3 4 1 2.0 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	58.130.000	
					3 3 4 1 2.0 1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	17.840.000	
					3 3 4 1 2.0 1	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	340.000	
					3 3 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	71.822.500	
					3 3 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	71.822.500	
					3 3 2 3 2.0 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.822.500	
					3 3 2 3 2.0 1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.407.500	
					3 3 2 3 2.0 1	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	3.270.000	
					3 3 2 3 2.0 1 6	Cek Kesehatan Calon Transmigran	1.675.000	
					3 3 2 3 2.0 1 7	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	9.470.000	
						TOTAL	6.076.379,647	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					5.602.209.647,00				13.901.241.382,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				182.375.000,00				4.910.816.632,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)		100	52.067.500,00				1.189.810.000,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Layanan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (Layanan)	(Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	2	52.067.500,00			2	1.189.810.000,00
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	16	51.417.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		192.00	600.442.098,00
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	6	650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.00	589.367.902,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)		6	66.315.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.570.756.632,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap (Orang)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	600	150.000,00			700	3.358.515.032,00
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	700	150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00	3.358.515.032,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Layanan)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	66.165.000,00			1	212.241.600,00
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	700	66.165.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		700.00	212.241.600,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Diselesaikan (%)		100	63.992.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.250.000,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Layanan)	(Kab Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	3	63.992.500,00			3	150.250.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	(KABUPATEN GUNUNGKIDUL, KAB. GUNUNGKIDUL)	4.00	40.347.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.00	111.220.000,00
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	(KABUPATEN GUNUNGKIDUL, KAB. GUNUNGKIDUL)	2.00	3.125.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	5.730.000,00
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	(KABUPATEN GUNUNGKIDUL, KAB. GUNUNGKIDUL)	1.00	20.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	33.300.000,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5.129.334.647,00				8.821.974.750,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	4.152.771.907,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.734.470.750,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	4.429	115.700.000,00			4.429	99.125.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	5	103.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM		4	72.700.000,00	
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	(Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	1	1.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	4.200.000,00	
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	(Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	1	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.280.000,00	
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	(Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	3	2.630.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	3.360.000,00	
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	(Wonosari, Wonosari)	2	1.935.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	2.860.000,00	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	(Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	17	3.565.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17	8.225.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	
										4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)								
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Wonosari, Kec. Wonosari)	4	825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	4.500.000,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	(Wonosari, Wonosari)	266.000	3.498.424.407,00			266.000	5.908.525.750,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	784	3.406.271.907,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		784	5.827.653.250,00	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	2.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	3.835.000,00	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	(Wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	13	89.932.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13.00	77.037.500,00	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pengelolaan BMD (Laporan)	(Wonosari, Wonosari)	2	630.000,00			2	2.100.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	2	630.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	2.100.000,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Indeks)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	24	930.000,00			6	33.627.500,00
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	10	930.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11.00	28.127.500,00
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	5.500.000,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	56.222	179.260.000,00			56.000	217.750.000,00
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	2	1.938.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.00	3.250.000,00
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(wonosari, Wonosari)	4	48.633.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5.00	47.500.000,00
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	2	3.542.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.00	11.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	KINERJA
										4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(Wonosari, Kec. Wonosari)	3	4.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.00	20.000.000,00			
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Wonosari, Kec. Wonosari)	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	365.00	3.000.000,00			
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	(wonosari, Wonosari)	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.00	-			
2.17.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	(WONOSARI, Wonosari)	4	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	2.000.000,00			
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(WONOSARI, Wonosari)	48	94.089.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	104.00	128.000.000,00			
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	(WONOSARI, Wonosari)	4	24.997.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	3.000.000,00			
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)	(Wonosari, Wonosari)	16	-		29	59.750.000,00			
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	(Wonosari, Kec. Wonosari)	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21.00	26.750.000,00			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	
										4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.00	24.000.000,00	
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	(Wonosari, Kec. Wonosari)	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	9.000.000,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	91	116.430.000,00			91	194.615.000,00	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	4	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	27.117.500,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(Wonosari, Kec. Wonosari)	72	114.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84.00	60.000.000,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	3	1.430.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.00	107.497.500,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	(Wonosari, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	562	241.397.500,00			561	218.977.500,00	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	(WONOSARI, Kec. Wonosari, Kec. Wonosari)	455	195.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		494	93.677.500,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	(Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	50	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.00	2.500.000,00
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(Wonosari, Wonosari, Kec. Wonosari)	32	36.547.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36.00	9.850.000,00
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(WONOSARI, Wonosari)	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	109.350.000,00
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(WONOSARI, Wonosari, Kec. Wonosari)	24	7.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24.00	3.600.000,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi Yang Memiliki NIB Dan/Atau Ijin Usaha Simpan Pinjam Dan/Atau Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan (Koperasi)		10	1.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam (Koperasi)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	10	1.400.000,00			0	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	(kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	20	1.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	-
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT (%)		68	4.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46.100.000,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang terbina dan terawasi (Koperasi)	(kabupaten gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	110	4.850.000,00			120	46.100.000,00
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	10	1.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120.00	20.000.000,00
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	15	3.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25.00	26.100.000,00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Dengan Predikat Sehat (Koperasi)		30	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.470.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya (Koperasi)	(kabupaten gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	80	3.150.000,00			90	20.470.000,00
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	30	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90	20.470.000,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Peserta Diklat Yang Meningkatkan Pemahamannya (%)		78	284.455.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			436.500.000,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Layanan)	(kabupaten gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	284.455.500,00			1	436.500.000,00
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	550	284.455.500,00	DAK Non Fisik- PK2UMK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1577.00	436.500.000,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Kenaikan Aset Koperasi (%)		15.5	72.430.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			235.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN
								KINERJA	DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Layanan)	(kabupaten gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	10	72.430.000,00			9	235.500.000,00
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	117	72.430.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		240,00	235.500.000,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Terfasilitasi Layanan Pemberdayaan UMKM (%)		60	568.929.740,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			682.959.000,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Mitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah layanan pemberdayaan usaha mikro (Layanan)	(kabupaten gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	6	568.929.740,00			6	682.959.000,00
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Mitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Mitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	30,00	3.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250,00	52.590.000,00
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	60	79.347.740,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		180,00	31.120.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	450	317.920.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		890,00	560.049.000,00
2.17.07.2.01.0005	Kordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	20	200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		240,00	15.000.000,00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	100	600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3,00	24.200.000,00
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	150	167.642.000,00	DAK Non Fisik-PK2UMK		240	-
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro (%)		60	41.347.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			665.975.000,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah layanan pengembangan Usaha Mikro (Layanan)	(kabupaten wonosari, KAB. GUNUNGKIDUL)	4	41.347.500,00			4	665.975.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	70	41.347.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1502.00	665.975.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				290.500.000,00				168.450.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase IKM Yang Mengikuti Even Pengembangan Kearifan Lokal (%)		60	290.500.000,00	Dana Keistimewaan DIY			168.450.000,00
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya (Layanan)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	290.500.000,00			1	168.450.000,00
2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (Unit)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	100	290.500.000,00	Dana Keistimewaan DIY		150.00	168.450.000,00
3					474.170.000,00				1.440.616.567,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				402.347.500,00				666.175.000,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK Sampai Dengan Disosialisasikan (%)		60	293.850.000,00	Dana Keistimewaan DIY			461.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penyusunan dan evaluasi RPIK (Layanan)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	5	293.850.000,00			5	461.500.000,00
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	7.745.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,00
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	810.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	160.000.000,00
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	770.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	14.000.000,00
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	3	282.025.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)		6.00	275.000.000,00
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	2.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM Yang Mendapat Layanan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUJ) Kabupaten/Kota (%)		60	32.187.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			127.175.000,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUJ), Izin Perluasan Usaha Industri (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mempunyai Nomor Induk Berusaha, Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (IKM)	(kabupaten gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	40	32.187.500,00			50	127.175.000,00
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	1	340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	10.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
								5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	1	31.847.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	117.175.000,00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM Yang Terdaftar Di SIINas (%)		60	76.310.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77.500.000,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penyediaan Informasi Industri (Layanan)	(kabupaten gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	3	76.310.000,00			3	77.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	58.130.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	47.500.000,00
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	17.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	20.000.000,00
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	340.000,00			1.00	10.000.000,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				71.822.500,00				774.441.567,00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesesuaian Penempatan Transmigran Pada Lokasi Kawasan Transmigrasi (%)		100	71.822.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			774.441.567,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah	(Kab. Gunungkidul,	4	71.822.500,00			4	774.441.567,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kabupaten/Kota (Layanan)	KAB. GUNUNGGKIDUL						
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	(Luar Jawa, Luar Wilayah)	2	57.407.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15.00	559.441.567,00
3.32.03.2.01.0008	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	3.270.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15.00	22.000.000,00
3.32.03.2.01.0016	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran (KK)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	2	1.675.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15.00	18.000.000,00
3.32.03.2.01.0017	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) (Orang)	(Kab. Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)	90	9.470.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		750.00	175.000.000,00
J U M L A H					6.076.379.647,00				15.341.857.949,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024. Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang selaras dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun 2024 mencakup tiga bahasan, yaitu :

a. Catatan Penting

Kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, namun demikian sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) tetap harus dikedepankan. Adanya perpaduan antara dua hal tersebut dapat dijadikan modal dalam mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dalam proses Murenbang tingkat kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Rencana Kerja ini juga memuat rencana anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan. Namun demikian ketersediaan anggaran juga memegang peranan penting. Untuk mengantisipasi apabila ketersediaan anggaran tidak mencukupi maka ditetapkan skala prioritas mulai dari kebutuhan yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan serta menyangkut kepentingan publik.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan program dan kegiatan dari tahun ke tahun merupakan kesinambungan yang saling berkaitan dan apa yang diperoleh tahun-tahun sebelumnya berpengaruh pada perencanaan tahun berikutnya, sehingga benar-benar diperlukan perencanaan yang matang melalui langkah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya penyempurnaan pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Perencanaan yang baik merupakan dasar pelaksanaan yang menjadi salah satu kunci sukses pembangunan daerah. Perencanaan ini dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi, sikap mental, semangat, kejujuran, dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan menjadi acuan dalam proses selanjutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka diperlukan instrument pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja Tahun 2024 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target dan sasaran tertentu, metode pelaksanaannya maupun hasil yang dicapai sehingga mencerminkan ada tidaknya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya.

Selanjutnya dokumen perencanaan ini merupakan landasan serta pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 nanti terutama kegiatan yang merupakan skala prioritas, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Wonosari,
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN
TENAGA KERJA,

SUPARTONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026". Guna mewujudkan visi tersebut Bupati mempunyai dua misi yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis", dan "Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah".

Perumusan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan dalam isu strategis nasional maupun Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isu Strategis Nasional meliputi percepatan penghapusan kemiskinan, penanganan stunting, pemulihan ekonomi pasca covid 19, percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan resiko bencana, pasokan energi dan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pemilihan presiden dan pilkada serentak, dan perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Isu strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pilpres dan pilkada serentak, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, penanganan stunting, peningkatan kualitas SDM, pasokan energi dan pangan, dan perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah "*Optimalisasi ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan taraf hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia*".

Tema tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa indikasi prioritas dan sasaran daerah. Terdapat dua indikasi prioritas yang sesuai dengan ketugasan BKPPD yaitu Peningkatan Kualitas SDM, dan Reformasi Birokrasi dengan sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkatkan, dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan BKPPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja BKPPD Tahun 2024 disusun berdasarkan kajian terhadap kondisi pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan, evaluasi

pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BKPPD.

Perumusan Renja BKPPD Tahun 2024 dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data;
2. Analisis gambaran pelayanan BKPPD;
3. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
4. Perumusan tujuan dan sasaran;
5. Perumusan kegiatan prioritas;

Renja BKPPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2021-2026, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gunungkidul;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja BKPPD Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran BKPPD Kabupaten Gunungkidul untuk jangka waktu satu tahun, dimulai 01 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja BKPPD Kabupaten Gunungkidul ini yaitu memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4.*Review* Terhadap Rencana Kerja
- 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun anggaran 2022, dan perkiraan capaian tahun 2023 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja 2024 sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Tinjauan terhadap hasil evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program BKPPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari BKPPD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Tinjauan didasarkan atas perkiraan capaian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 Nomor DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022, sebagaimana diubah dengan DPPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/2022.

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pelayanan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 terdapat kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Mutasi dan Promosi ASN
3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan yang belum memenuhi target tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, jumlah fotokopi dari 19.000 lembar yang direncanakan terealisasi 18.782. Sedangkan untuk kunjungan tamu, menyesuaikan dengan jumlah tamu dari luar daerah yang datang ke BKPPD, dari 150 orang yang direncanakan terealisasi 145 orang.

Untuk kegiatan Mutasi dan Promosi, sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, jumlah data ASN yang terverifikasi untuk mutasi, pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan jabatan fungsional dari 700 yang direncanakan terealisasi 390. Jumlah data ASN yang terverifikasi untuk kenaikan pangkat pada verval data kenaikan pangkat, dari 800 ASN

yang direncanakan terealisasi 700. Untuk jumlah nota pertimbangan teknis peninjauan masa kerja dari 30 orang yang direncanakan terealisasi 7. Realisasi tersebut sesuai dengan usulan dari perangkat daerah.

Pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, sub kegiatan pembinaan disiplin ASN beberapa keluaran tidak maksimal antara lain jumlah penerbitan Karis, Karsu Karpeg, dari 700 yang diusulkan terealisasi 625. Jumlah ID card tercetak dari 1000 yang direncanakan terealisasi 866. Jumlah peserta pembinaan ASN dari 170 yang direncanakan terealisasi 113 orang. Kemudian untuk sub kegiatan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, dari perkiraan 15 kasus terlaksana 11 kasus. Untuk kasus pelanggaran disiplin ASN diharapkan jumlahnya semakin sedikit, meskipun dari segi capaian kurang, namun dapat menjadi indikator kedisiplinan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Peningkatan Budaya Pemerintahan;
6. Pengembangan Kompetensi ASN;
7. Pengembangan Kompetensi Teknis.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh adanya dukungan anggaran dan pola koordinasi yang terjalin dengan baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian target kinerja kegiatan terutama pada target kinerja yang tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga.

Selain itu terdapat program dan kegiatan yang terealisasi melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yang meliputi kegiatan :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; dan
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN , pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dari target 1000 orang peserta pemberkasan pegawai, terealisasi 3058. Kondisi ini dipengaruhi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi yang menetapkan kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah surat yang dikirim pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari 1000 surat yang direncanakan terealisasi 1189 surat. Kondisi ini menyesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Faktor-faktor yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2024 antara lain :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan kepegawaian;
2. Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pelayanan kepegawaian;
3. Komitmen pelaksana untuk berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kebijakan yang perlu ditempuh oleh dengan memperhatikan capaian kinerja Renstra untuk tahun 2024 sehingga capaian kinerja dari Renstra sesuai dengan yang ditargetkan yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dengan memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang dapat menghambat pelayanan kepegawaian;
2. Meningkatkan pengetahuan pejabat yang menangani kepegawaian dan PNS dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sehingga dapat mengurangi kendala-kendala yang bersifat administratif dalam penyelesaian proses administrasi kepegawaian;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian.
4. Meningkatkan komitmen pegawai untuk melaksanakan tugas secara maksimal guna memperoleh hasil yang terbaik.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dituangkan dalam Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. 2023
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana	Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dandetatalaksanaan			100 persen	100 persen	100	100 persen		
4.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase ASN yang lulus diklat keistimewaan			100 persen	100 persen	100	100 persen		
4.01.04.2.02.08	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	Jumlah ASN Pemkab Gunungkidul yang mengikuti diklat internalisasi keistimewaan	750 orang	60 orang	90 orang	90 orang	100	150	150	20
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 persen		100 persen	100 persen	100	100 persen		
5.03.01.2.01	Perencanaan,	persentase kesesuaian	100 persen		100 persen	93,33	93,33	28		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan dan pelaporan PD terhadap Perencanaan Pemda				persen		dokumen		
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah dokumen Renja Perubahan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Pelaksanaan forum PD	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	2 kali	40
		Jumlah dokumen profil PD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah draf dokumen profil PD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perjanjian kinerja	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja 2021	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah dokumen laporan TEPPRA	60 laporan	6 laporan	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 dokumen	40
		Jumlah dokumen evaluasi PD (laporan E-Money)	20 laporan	2 laporan	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	40
		Jumlah dokumen LKjIP	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu			100 persen	100 persen	100			
5.03.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan	Jumlah bulan terfasiasi	70 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	14 bulan	28 bulan	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN								
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ	60 dokumen	6 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 dokumen	40
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian			100 persen	98,51 persen	98,51	100 persen		
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	300 ASN	30 ASN	60 ASN	59 ASN	98,33	60 ASN	120 ASN	40
		Jumlah tenaga jabfung	35 ASN	3 ASN	7 ASN	7 ASN	100	7 ASN	14 ASN	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dinilai								
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terlayani			100 persen	98,86 persen	98,86			
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik tersedia	50 jenis	6 jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	10 jenis	20 jenis	40
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	10 jenis	74 jenis	2 paket pembelian	2 paket pembelian	100	2 paket pembelian	4 paket pembelian	40
		Jumlah bahan komputer	60 jenis	8 jenis	12 paket pembelian	12 paket pembelian	100	12 paket pembelian	24 paket pembelian	40
		Jumlah kertas dan cover	10 jenis	13 jenis	2 paket pembelian	2 paket pembelian	100	2 paket pembelian	4 paket pembelian	40
		Jumlah perabot kantor	5 jenis	1 jenis	1 paket pembelian	1 paket pembelian	100	1 paket pembelian	2 paket pembelian	40
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	58 jenis	8 jenis	10 jenis	10 jenis	100	10 jenis	20 jenis	34,48
		Jumlah fotokopi	131.000 lembar	3045 lembar	19.000 lembar	18.782 lembar	98,85	25.000 lembar	43.782 lembar	33,42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar) tersedia (1x12 bulan)	180 bulan	6 bulan	24 bulan	24 bulan	100	36 bulan	60 bulan	33,33
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk tamu	-	-	150 orang	145 orang	96,66	-	-	-
		Jumlah snack tersedia untuk tamu	-	-	150 orang	145 orang	96,66	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 laporan	-	-	-	-	5 laporan	5 laporan	20,83
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi luar daerah	400 oh	4 oh	28 OH	25 OH	89,28	-	-	-
		Jumlah minuman snack tersedia untuk rapat dan tamu	-	162 orang	500 orang	496 orang	99,2	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292 laporan	-	-	-	-	67 laporan	67 laporan	22,94
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa	Persentase penyediaan			100 persen	116 persen	116	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana dengan baik						persen	persen	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	5000 surat	464 surat	1000 surat	1189 surat	118,9	1000 surat	2189 surat	43,78
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon yang terbayar	180 bulan	18 rekening	36 rekening	36 rekening	100	36 rekening	72 rekening	40
		Jumlah tagihan internet yang terbayar	120 bulan	12 rekening	24 rekening	24 rekening	100	24 rekening	48 rekening	40
		Jumlah tagihan air yang terbayar	120 bulan	12 rekening	24 rekening	24 rekening	100	24 rekening	48 rekening	40
		Jumlah tagihan listrik yang terbayar	180 bulan	18 rekening	36 rekening	36 rekening	100	36 rekening	72 rekening	40
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa kebersihan dibayar	30 termin	4 termin	6 termin	6 termin	100	6 termin	12 termin	40
		Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	10 jenis	9 jenis	2 paket pembelian	2 paket pembelian	100	2 paket pembelian	4 paket pembelian	40
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang	persentase barang milik			100 persen	99,82	99,82			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	daerah penunjang urusan pemerintahan dalam kondisi baik				persen				
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang dipelihara	30 unit	2 unit	6 paket pemeliharaan an	6 paket pemeliharaan an	100	6 paket pemeliharaan an	12 paket pemeliharaan an	40
		Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	30 unit	1 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	12 unit	40
		Jumlah motor dinas yang dipelihara	75 unit	6 unit	15 paket pemeliharaan an	15 paket pemeliharaan an	100	15 paket pemeliharaan an	30 paket pemeliharaan an	40
		Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	75 unit	6 Unit	15 unit	15 unit	100	15 unit	30 unit	40
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah CCTV terfasilitasi pemeliharanya	16unit	1 unit	4 unit	4 unit	100	2 unit	6 unit	37,5
		Jumlah komputer dipelihara	69 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	10 unit	15 unit	21,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah laptop dipelihara	76 unit	6 unit	8 unit	7 unit	87,5	10 unit	17 unit	22,36
		Jumlah LCD dipelihara	17 unit	0 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	4 unit	23,52
		Jumlah printer dipelihara	15 unit	0 unit	8 unit	8 unit	100	3 unit	11 unit	73,33
5.03.01.2.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC dipelihara	85 unit	15 unit	15 unit	14 unit	93,33	15 unit	29 unit	34,11
5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen layanan penataan organisasi terlaksana								
5.03.01.2.13.0 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen evaluasi SOP	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah dokumen evaluasi standar pelayanan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SKM	10 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen rencana tindak pengendalian (SPIP)	10 dokumen	1 dokumen	• 2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	40
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	persentase terlaksananya layanan dan fasilitas administrasi kepegawaian			100 persen	98,3 persen	98,31			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu dan tersedianya data yang up to date			100 persen	101,86 persen	101,86			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta pemberkasan pegawai	1500 orang	0 orang	1000 orang	3058 orang	305,8	300 orang		
		Jumlah peserta seleksi pengadaan pegawai	22.500 orang	1604 orang	3000 orang	1338 orang	44,6	4500 orang	5.838orang	25,94
		Jumlah usulan formasi pegawai	20 laporan	2 laporan	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah nota pertimbangan pensiun ASN	2125 orang	316 orang	380 orang	416 orang	138,67	1	1 dokumen	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen analisis kebutuhan tenaga kontrak PD	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2	4 dokumen	40
		Jumlah DUK dan daftar nominatif ASN	1.570 dokumen	314 dokumen	314 dokumen	314 dokumen	100	314	628 dokumen	40
		Jumlah laporan statistik kepegawaian	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4	8 laporan	40
		Jumlah pemeliharaan tata naskah kepegawaian	42.500 file	4151 file	8500 file	8500 file	100	8500	17.000 file	40
		Jumlah pemutakhiran data ASN	40.000 data	1838 data	8000 data	8000 data	100	8000	16.000 data	40
		Jumlah Profil PNS	3000 PNS	174 PNS	2000 PNS	2000 PNS	100	2000	4000 ASN	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Pengisian jabatan struktural dan mutase ASN sesuai formasi serta kenaikan pangkat tepat waktu			100 persen	96,86 persen	96,86			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN alih tugas	1.000 orang	110 orang	200 orang	216 orang	108	200 orang	416 orang	41,6
		Jumlah ASN yang mengajukan mutasi keluar dan masuk wilayah Gunungkidul	100 orang	9 orang	20 orang	19 orang	95	20 orang	39 orang	39
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	1598 orang	0 orang	244 orang	244 Orang	100	248 ASN	492 ASN	30,78
		Jumlah data ASN yang terverifikasi untuk mutasi, pengangkatan/pemberhentian, dan kenaikan jabatan fungsional	3.500 orang	136 orang	700 berkas	390 berkas	55,71	700 berkas	1090 berkas	68,21
		Jumlah data ASN yang terverifikasi untuk kenaikan pangkat dalam crash program/verval data kenaikan pangkat	4.000 orang	979 orang	800 ASN	700 ASN	87,5	800 ASN	1.500 ASN	37,5
		Jumlah nota pertimbangan kenaikan	4.000 orang	853 orang	800 orang	982 orang	122,75	700 berkas	1682berkas	42,05

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pangkat yang diterbitkan								
		Jumlah nota pertimbangan teknis peninjauan masa kerja	150 orang	0 orang	30 orang	7 orang	23,33	30 orang	37 orang	22,66
		Jumlah peserta pengambilan sumpah PNS	1.598 orang	0 Orang	244 orang	244 orang	100	248 orang	492 orang	30,78
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama	10 kali	kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	4 kali	40
		Jumlah pengisian jabatan pengawas dan kepala sekolah	610 orang	orang	50 orang	50 orang	100	100 orang	150 orang	24,59
		Jumlah pertimbangan TPKPJS	20 dokumen	dokumen	6 dokumen	5 dokumen	83,33	4 dokumen	9 dokumen	45
		Jumlah ASN yang dilantik dalam jabatan	1.450 orang	orang	500 orang	626 orang	125,2	300 orang	926 orang	63,86
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat diklat			100 persen	100 persen	100			
5.03.02.2.03.0	Pengelolaan	Jumlah CPNS yang	1.444 orang	orang	92 orang	92 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Target Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	mengikuti diklat dasar CPNS								
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural	653 orang	79 orang	12 orang	12 orang	100			
		Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	220 orang	21 orang	100 orang	100 orang	100			
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN terkirim ijin belajar	1.200 orang	128 orang	200 orang	100 orang	100			
		Jumlah ASN terkirim tugas belajar	75 orang	1 orang	8 orang	8 orang	100			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan ASN yang serta pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan			100 persen	97,70 persen	97,70			
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan peningkatan kinerja	800 orang	160 orang	160 ASN	160 ASN	100	160 orang	320 orang	40
		Jumlah bulan ASN terfasilitasi pengisian		14.526 PNS	12 bulan	12 bulan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		buku kerja								
		Jumlah PNS yang terfasilitasi dalam penyusunan penilaian prestasi kerja	40.000 PNS	8.300 PNS	8.300 PNS	7307	88,03	8.300 PNS		
		Jumlah unit kerja yang terfasilitasi dalam penyusunan penilaian prestasi kerja	785 unit kerja	157 unit kerja	157 unit kerja	157 unit kerja	100	157 unit kerja	314 unit kerja	40
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah dokumen penerbitan kartu Taspen, Taperum, dan cuti PNS	15 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	6 dokumen	40
		Jumlah dokumen hasil perhitungan TPP		12 dokumen	12 dokumen	13 dokumen	108,33	12 dokumen	12 dokumen	
		Jumlah dokumen Perbup TPP	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah fasilitasi penerbitan JKK/JKM	25 orang	1 orang	5 orang	5 orang	100	5 orang	10 orang	40
		Jumlah pemrosesan KP4	785 dokumen	157 dokumen	157 dokumen	157 dokumen	100	157 dokumen	314 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah ASN yang diuji kesehatan	20 orang	3 orang	2 orang	2 orang	100	4 orang	6 orang	30
		Jumlah SK KGB kepala PD	235 SK	SK	47 SK	47 SK	100	47 SK	94 SK	40
		Jumlah SK pemberian tunjangan kesejahteraan ASN	25 SK	1 SK	5 SK	5 SK	100	5 SK	10 SK	40
		Jumlah tanda kehormatan satya lencana karya satya	2.500 dokumen	142 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	100	500 dokumen	1000 dokumen	40
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah CPNS yang mengikuti pembinaan dan orientasi ketugasan	2.000 CPNS	244 CPNS	400 CPNS	400 CPNS	100	400 CPNS	800 CPNS	40
		Jumlah penerbitan Karis, Karsu, Karpeg	3.500 orang	92 orang	700 orang	625 orang	89,28	200 orang	825 orang	23,57
		Jumlah fasilitas pengisian LHKPN	450 orang	90 orang	90 orang	86 orang	95,55	90 orang	176 orang	35,2
		Jumlah ID card tercetak	5.000 buah	394 buah	1000 buah	866 buah	86,6	1000 buah	1866 buah	37,32
		Jumlah peserta pembinaan ASN	850 orang	170 orang	170 orang	113 orang	66,47	170 orang	283 orang	33,29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	850 orang	60 Orang	170 orang	170 orang	100	70 orang	240 orang	28,23
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	75 kasus	kasus	15 kasus	11 kasus	73,33	15 kasus	26 kasus	34,66
		Jumlah penyelesaian kasus perkawinan dan perceraian	125 kasus	10 kasus	25 kasus	24 kasus	96	25 kasus	49 kasus	39,2
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengiriman dilkat sesuai kebutuhan			100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase ASN yang lulus dilkat teknis dan fungsional			100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah peserta yang mengikuti dilkat penelitian tindakan kelas	180 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	60 orang	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2022 dapat diberikan analisis/penjelasan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana

Kegiatan:

Peningkatan Budaya Pemerintahan .

Sub Kegiatan :

1). Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan.

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 100%. Diklat yang direncanakan sebanyak 90 orang terbagi dalam 3 angkatan. dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan rencana. Hal ini didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, UPT Balai Diklat BKPPD, dan Paniradya Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku penanggung jawab teknis pengelolaan Dana Keistimewaan.

2. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan :

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Dari 1000 pemberkasan yang direncanakan terealisasi 1338, dan dari 3000 peserta seleksi yang diprediksi terealisasi 3058 yang keseluruhannya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepegawaian nasional, hal ini menyebabkan realisasi kinerja dapat lebih dari 100 persen.

2) Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini mencapai 109,47 %, karena dari 380 orang yang direncanakan memperoleh nota pertimbangan pensiun, terealisasi sebanyak 416 orang. Besarnya jumlah pensiun ini selain karena telah mencapai batas usia pensiun juga dipengaruhi oleh jumlah pengajuan pensiun dini, peralihan jabatan fungsional ke jabatan pelaksana yang berpengaruh pada batas usia pensiun, dan pensiun karena meninggal dunia.

3) Pengelolaan Data Kepegawaian

Pada tahun ini semua indikator kinerja sub kegiatan ini dari dokumen analisis kebutuhan tenaga kontrak, Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Nominatif, laporan statistic kepegawaian, pemeliharaan tata naskah, profil dan pemutakhiran data ASN dapat terlaksana seluruhnya.

b. Mutasi dan Promosi ASN

Capaian kinerja kegiatan Mutasi dan Promosi mencapai 96,86 %. Untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dapat terealisasi seluruhnya. Sedangkan pada sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN terdapat beberapa keluaran yang realisasinya lebih rendah dari target, yaitu jumlah data ASN yang terverifikasi untuk mutasi, pengangkatan, pemberhentian, pengangkatan, pemberhentian dan kenaikan jabatan fungsional. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pimpinan dan kinerja masing-masing ASN dalam jabatan fungsional serta kebutuhan organisasi.

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, jumlah pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari target 6 kali terealisasi 4 kali. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengembangan Kompetensi ASN

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Capaian kinerja sebesar 100 persen. Dari jumlah 92 CPNS peserta Diklatsar dapat lulus seluruhnya, sedangkan untuk pengiriman diklat structural dari target 12 orang seluruhnya, dan untuk ujian dinas dari 100 yang direncanakan terealisasi semuanya. Demikian juga dengan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan, capaian kinerja untuk Sub Kegiatan ini mencapai 100 persen. Dengan dasar data yang akurat realisasi kegiatan dapat dilaksanakan maksimal sesuai dengan perencanaan.

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Capaian Kinerja kegiatan ini adalah 97,70 persen. Untuk Sub Kegiatan yang indikator kinerjanya dapat terealisasi seluruhnya adalah Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.

Sedangkan untuk Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN beberapa keluaran tidak dapat tercapai maksimal antara lain jumlah penerbitan karis, karsu, karpeg dari 700 yang direncanakan terealisasi 625, jumlah ID *card* dari 1000 yang direncanakan terealisasi 866, Jumlah peserta pembinaan ASN dari 170 yang direncanakan terealisasi 113. Hal ini dipengaruhi dari faktor eksternal yaitu pengajuan dari ASN, dan tingkat kehadiran ASN dalam pembinaan yang diselenggarakan.

Untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN. Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dari 15 yang ditargetkan terealisasi 11, sedangkan untuk jumlah penyelesaian kasus perceraian dari target 25 terealisasi 14. Meskipun capaian kinerja pada kegiatan ini tidak maksimal namun hal tersebut merupakan indikasi bahwa jumlah kasus pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat rendah, dan menunjukkan bahwa tingkat disiplin ASN cukup tinggi.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

Pengembangan Kompetensi Teknis

Sub Kegiatan :

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Capaian kinerja untuk Sub Kegiatan ini sebesar 100 %. Dari target 30 orang dapat terealisasi seluruhnya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	SATUAN (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN			Proyeksi		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	7	8	7	8	12	11	12	14		
1	Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu dibagi dengan jumlah total PNS naik pangkat dan pensiun	
2	Persentase Pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PNS yang memperoleh sertifikat diklat dan tugas belajar dibagi jumlah total PNS yang mengikuti diklat dan tugas belajar	
3	Persentase pelanggaran dan kasus PNS yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah pelanggaran dan kasus PNS yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran dan kasus PNS	
4	Indeks Kepuasan penerima layanan	80	80,00	80,00	80,50	81,75	81,45	81,75	82,50		Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai	

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	SATUAN (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	7	8	7	8	12	11	12	14	penimbang
5	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan keuangan disusun
6	Persentase kesesuaian program dalam Rencana kerja (Renja) PD terhadap program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam rencana kerja PD dibagi dengan jumlah program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
7	Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renstra PD dibagi dengan jumlah program dalam RPJMD
8	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dibagi dengan jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	SATUAN (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN				Proyeksi		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	7	8	7	8	12	11	12	11	12	14	
9	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan	
10	Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah ASN PD yang taat aturan dibagi dengan jumlah ASN PD	

Tabel 2.3
 Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan
 Terhadap Renstra PD Tahun 2021 -2026
 Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA /NILAI TARGET	TARGET RENSTRA PD					PROYEKSI CAPAIAN RENSTRA PD					CATATAN ANALISIS	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

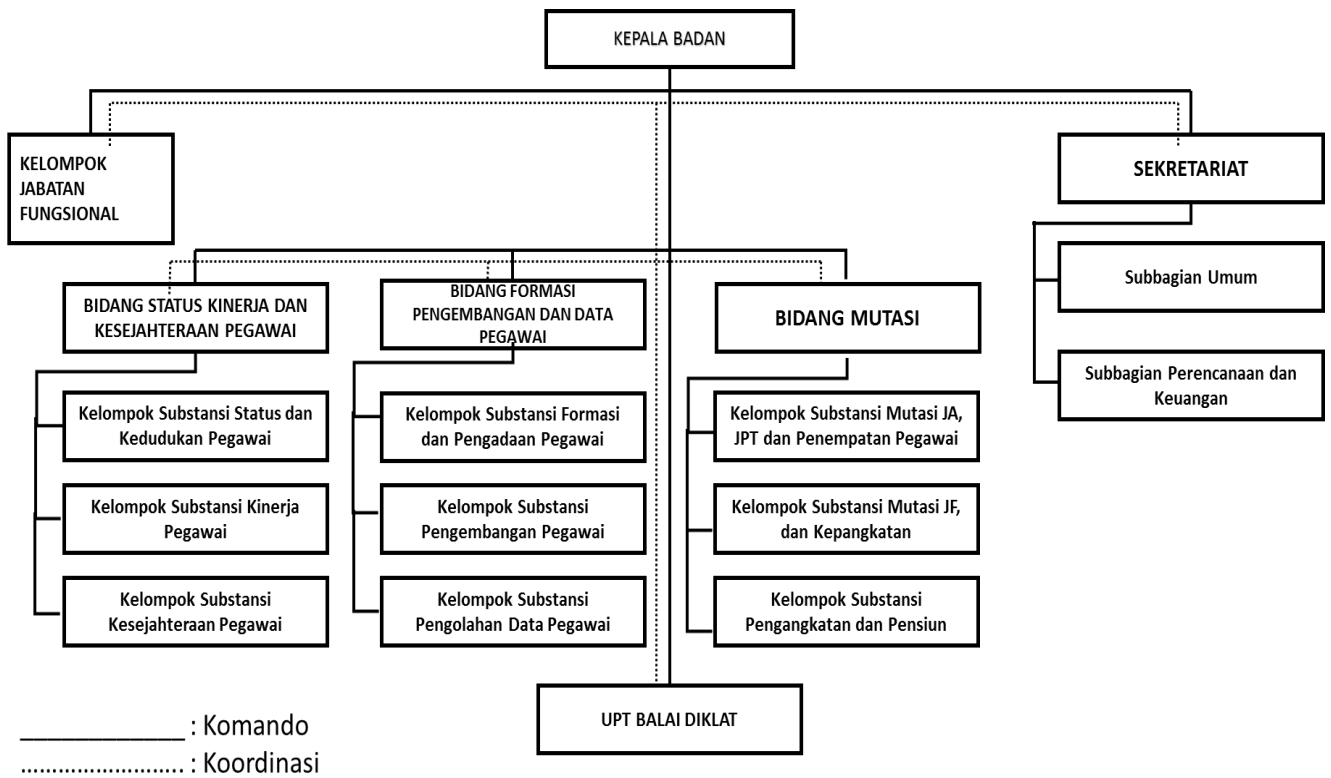
NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA /NILAI TARGET	TARGET RENSTRA PD					PROYEKSI CAPAIAN RENSTRA PD					CATATAN ANALISIS	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Indeks profesionalitas ASN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hasil rata-rata dari : 1. Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pemindahan PNS yang sesuai kompetensi 2. Persentase Pengiriman Peserta Diklat dan Tugas Belajar sesuai kebutuhan 3. Persentase Kasus ASN yang terselesaikan
2	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renja dibagi jumlah program dalam RKPD dan jumlah program dalam Renstra dibagi jumlah program dalam RPJMD
3	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan disusun

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA /NILAI TARGET	TARGET RENSTRA PD					PROYEKSI CAPAIAN RENSTRA PD					CATATAN ANALISIS	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	80,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai penimbang	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan administrasi kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Gunungkidul didelenggarakan mengacu kepada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Adapun bagan struktur organisasi BKPPD berdasarkan peraturan tersebut sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi BKPPD



Pelaksanaan pelayanan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara umum cukup baik. Namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga hasil yang dicapai belum optimal.

Permasalahan dan hambatan tersebut dapat dibagi menjadi permasalahan yaitu eksternal dan internal.

1. Masalah eksternal

Sebagian besar hasil akhir dari program dan kegiatan BKPPD ditentukan oleh stakeholder/pemangku kepentingan di luar perangkat daerah sehingga berpengaruh pada capaian kinerja.

Badan Kepegawaian Negara baik pusat maupun regional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dan yang lainnya merupakan pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKPPD.

2. Permasalahan internal

Permasalahan internal yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia serta pemenuhan persyaratan administratif kepegawaian yang diajukan seringkali belum lengkap sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut.

Tantangan yang dimungkinkan dihadapi oleh BKPPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Dinamika politik lokal dan nasional yang dapat mempengaruhi pola manajemen kepegawaian;
- b. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan teknologi pengelolaan data yang bergerak cepat.
- c. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
- d. Komitmen dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang belum memadai;
- e. Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur.

Peluang yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan dalam mengatasi tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dengan melakukan reformasi birokrasi;
- b. Memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam mewujudkan system informasi kepegawaian yang dapat menjadi sarana pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat.
- c. Adanya lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Diklat;
- d. Kerjasama kemitraan dalam proses pelayanan kepegawaian (Taspen, Askes, Taperum);
- e. Banyaknya penawaran program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti melalui program diklat teknis dan fungsional, beasiswa tugas belajar di dalam dan luar negeri, dan penawaran pendidikan formal atas biaya sendiri;
- f. Adanya permohonan PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- g. Membangun komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan melakukan inovasi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat ASN.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan dan kajian hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi , maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi , dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra .

Dengan melihat tugas pokok dan fungsi BKPPD dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan tuntutan profesionalitas birokrasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengupayakan pembangunan secara keseluruhan serta dalam peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur melalui pengadaan Pegawai baik PNS maupun PPPK;
- b. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- c. Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian;
- e. Peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi.

Isu-isu tersebut menjadi prioritas karena mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung penyediaan sumberdaya aparatur yang kompeten dan professional. Untuk itu ditetapkan beberapa prioritas seperti tersebut diatas, yang pada akhirnya akan mengarah pada pada pencapaian Reformasi Birokrasi dan pada akhirnya memberikan kontribusi untuk “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

2.4. *Review* terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah

Review terhadap Rencana Kerja BKPPD tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100 persen	775.200.000	
A.	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Persentase ASN yang lulus diklat keistimewaan	-	-	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Persentase ASN yang lulus diklat keistimewaan	100 persen	775.200.000	
1.	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Diselenggarakan	-	-	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	BKPPD	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	5 laporan	775.200.000	
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			100 persen	95.875.363.814	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		Persentase Pemenuhan Penunjang	100 persen	4.127.446.014	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik				
A.	Perencanaan, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 persen	6.950.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	100 persen	2.985.000		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPP D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	700.000		
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPP D	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	210.000		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPP D	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	210.000		

		RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPP D	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	400.000		
5	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	BKPP D	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	BKPPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	400.000		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPP D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	17 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	975.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP D	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	90.000		
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 persen	95.090.768.814	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Laporan Keuangan Tersusun	100 persen	3.588.654.814		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPP D	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28297 Orang	95.084.368.814	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28297 Orang	3.584.368.814		
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPP D	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	520.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPP D	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	4.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	3.766.000			
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 persen	70.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Terlayat dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 persen	24.247.500			
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPP D	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	25.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	24.247.500			

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPP D	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Dokumen	45.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-		
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 persen	204.090.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Terlayani	100 persen	109.795.000		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPP D	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.910.000		
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPP D	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	112.560.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	44.986.000		
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPP D	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.170.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.298.000		
4.	Penyediaan Barang Cetak dan	BKPP D		4 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan	BKPPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan	3 Paket	11.700.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			dan Penggandaan		dan Penggandaan yang Disediakan				
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPP D	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Disediakan	698 Dokumen	2.160.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	BKPPD	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan Peraturan-Undangan yang Disediakan	698 Dokumen	2.400.000		
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPP D	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	7.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.125.000		
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPP D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	56.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	37.376.000		
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 persen	37.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksana dengan Baik	0 persen	-		
1.	Pengadaan Mebel	BKPP D	Jumlah Paket Mebel yang	2 Unit	7.500.000	Pengadaan Mebel	BKPPD	Jumlah Paket Mebel yang	0 Paket	-		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
			Disediakan					Disediakan				
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP D	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-		
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPP D	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-		
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	257.040.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana dengan Baik	100 persen	246.448.700		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.540.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan	25.447.500		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	140.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	131.030.000	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	89.971.200	
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPP D		100 persen	209.015.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 persen	155.315.000	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPP D	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	119.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	90.900.000	

		RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP D	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	17.340.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	5.440.000		
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPP D	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	57.775.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	57.775.000		
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPP D	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	4.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.200.000		
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPP D	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-		
III.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPPD		100 persen	1.165.100.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPPD	Percentase Terlaksananya Layanan dan Fasilitas Administrasi Kepegawaian	100 persen	85.492.574.774		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
A.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			100 persen	209.676.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu, dan Tersedianya Data yang <i>Up To Date</i>	100 persen	78.341.000		
1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	7 Dokumen	164.500.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	7 Dokumen	65.515.000		
2.	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	11.500.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1.800.000		
3.	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	33.676.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	11.026.000		
B.	Mutasi dan Promosi			100	324.077.000	Mutasi dan Promosi		Persentase	100	75.980.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	ASN			persen		Promosi		Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN sesuai Formasi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	persen			
1.	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	7.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	1.500.000		
2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPP D	Jumlah Pengelolan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	47.077.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPPD	Jumlah Pengelolan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	27.030.000		
3.	Pengelolaan Promosi ASN	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Promosi ASN	4 Dokumen	270.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Promosi ASN	3 Dokumen	47.450.000		
B.	Pengembangan Kompetensi ASN			100 persen	510.065.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Pengembangan SDM ASN	100 persen	22.300.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting			
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 dokumen	360.550.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen	12.200.000	
2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPP D	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	265 orang	149.515.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPPD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	265 orang	10.100.000	
C.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100 persen	121.282.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD	Persentase Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN serta Pelanggaran Disiplin ASN yang Terselamatkan	100 persen	85.315.953.774	
1.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	20.912.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	10.100.000	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
2.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7 Laporan	7.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Laporan	4.500.000		
3.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPP D	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2635 Orang	9.750.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPPD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	27.625 Orang	85.291.928.774		
4.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2 Dokumen	15.675.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2 Dokumen	8.600.000		
5.	Pembinaan Disiplin ASN	BKPP D	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Laporan	9.980.000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPPD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang	300.000		
6.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPP D	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	56.565.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	525.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
7.	Evaluasi Disiplin ASN	BKPP D	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1.400.000	Evaluasi Disiplin ASN	BKPPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	0 Laporan	-		
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			100 persen	150.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPPD	Persentase ASN yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsionalnya	100 persen	112.000.000		
A.	Pengembangan Kompetensi Teknis			100 persen	150.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPPD	Persentase ASN yang Lulus Diklat Teknis dan Fungsional	100 persen	112.000.000		
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP D	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 orang	150.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPPD	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang	112.000.000		
Total					97.190.463.814					90.507.220.788		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dengan tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara.

Pada Forum Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2023 terdapat masukan yang mempunyai konsekuensi penambahan anggaran dan masukan yang mendorong peningkatan pelayanan kepegawaian namun tidak mempunyai konsekuensi penambahan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengadaan Server	BKPPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	150.000.000	150.000.000	1 unit server terdiri dari satu <i>rackstation</i> dan beberapa <i>network attached storage (NAS) HDD</i> . Digunakan untuk meningkatkan kapasitas <i>back up</i> dan <i>share</i> data untuk manajemen ASN dan <i>paperless</i> terintegrasi dengan SIASN BKN.
2.	Pengembangan Aplikasi Manajemen Talenta	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 paket	95.000.000	95.000.000	Untuk mendukung peningkatan Sistem Merit dengan memanfaatkan sistem informasi.
3.	Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	BKPPD	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	250 orang	1.000.000	250.000.000	Untuk meningkatkan kompetensi sesuai amanat PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
4.	Pengadaan <i>Backdrop</i> untuk 3 Ruang	BKPPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 m ²	1.820.500	109.230.000	Untuk meningkatkan nilai estetika dan kerapian ruang rapat/tamu, sehingga memberikan kesan yang lebih baik untuk Kabupaten Gunungkidul terutama bagi tamu yang datang dari luar Gunungkidul.
5.	Pemeliharaan / Pengecatan Gedung	BKPPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 paket	50.000.000	50.000.000	Untuk menjaga kualitas dan keindahan bangunan. Sejak selesai dibangun belum pernah dilakukan pengecatan ulang. Banyak cat yang sudah usang dan mengelupas.
6.	Pemetaan komprehensif distribusi personel untuk pekerjaan yang wajib ada (misalnya Bendahara Pengeluaran)	BKPPD	-	-	-	-	Strategi untuk mengatasi keterbatasan jumlah ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
7.	Inventarisir THL yang menjadi tulang punggung pekerjaan, agar	BKPPD	-	-	-	-	

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	dipertahankan.						
8.	Mengusahakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Kedinasan untuk menempatkan lulusannya di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul	BKPPD	-	-	-	-	
9.	Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi	BKPPD	-	-	-	-	Untuk mempermudah manajemen dan administrasi kepegawaian
10.	Meningkatkan kepedulian terhadap penghematan anggaran, membuat prioritas, optimalisasi anggaran, dan meningkatkan inovasi pelayanan	PD	-	-	-	-	Strategi untuk mengatasi kapasitas fiscal yang masih rendah, dan sebagai usaha untuk kembali meraih Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat.
11.	Mempersiapkan pelaksanaan Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	BKPPD	-	-	-	-	Agar pada 2024 dapat sepenuhnya dilaksanakan
12.	Terus-menerus mengupayakan penerapan Merit Sistem	BKPPD	-	-	-	-	Meningkatkan indeks Merit Sistem
13.	Mengarahkan program-program Perangkat Daerah agar lebih dekat dengan indikator kunci	PD	-	-	-	-	Agar output dari program-program berhasil meraih indikator kunci
14.	Meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PD	-	-	-	-	Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

RPJM Nasional tahun 2020-2024 ditujukan untuk lebih menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, memantapkan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Tata kelola pemerintahan baik merupakan salah satu agenda dalam pelaksanaan RPJM Nasional 2020-2024, dalam arti bagaimana membangun Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui kinerja secara terpadu, penuh integritas dan akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah daerah yang memadai.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan nasional yaitu dalam mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi birokrasi dan tata kelola di bidang kepegawaian yaitu melalui penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pengembangan, penempatan, promosi dan mutasi PNS.

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan baik kepada PNS maupun kepada masyarakat. Harapannya tingkat kepuasan masyarakat maupun PNS dapat meningkat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maupun pembinaan dan pengembangan aparatur. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Beberapa isu strategis dalam manajemen kepegawaian di tingkat Pemerintah Daerah DIY perlu mendapatkan perhatian di tingkat Kabupaten, di antaranya :

1. Komitmen Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan *Good Governance* dalam

- pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah;
2. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur untuk mengembangkan kompetensi;
 3. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit system. Optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
 4. Pemetaan pegawai dengan manajemen talent untuk mewujudkan manajemen suksesi dalam implementasi merit system sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan instansi-instansi terkait;
 6. Pengembangan sistem *reward and punishment* dengan mengedepankan kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk menyiapkan program dan kegiatan yang selaras dan mampu memenuhi tuntutan pelayanan kepegawaian.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan hasil evaluasi, secara umum masih terdapat permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme birokrasi di antaranya :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana;
- b. Keterbatasan jumlah PNS dan jumlah pensiun yang cukup besar;
- c. Perlunya peningkatan komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam pengelolaan data dan pelayanan kepegawaian.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024 diharapkan dapat mendukung capaian target RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, sebagai unsur pendukung pelaksanaan ketugasan organisasi pemerintah daerah, penguatan kapasitas aparatur melalui pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta pengembangan kapasitas aparatur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelayanan dan upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam sasaran daerah serta kebijakan nasional reformasi birokrasi dan tata kelola yang merupakan prioritas dalam RPJM Nasional 2020-2024 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional”.

Sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 yang hendak dicapai dalam upaya pencapaian target kinerja pelayanan berdasarkan rumusan sasaran dalam Sasaran daerah yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH (OUTCOME)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Nilai AKIP	Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat	Indeks Profesionalitas ASN

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan dengan sasaran Perangkat Daerah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Tahun 2026
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	100

Tabel 3.3
Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024
1	Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat	Indeks profesionalitas ASN	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,45

Selain itu disajikan pula Indikator Kinerja Utama seperti dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat	Indeks Profesionalitas ASN	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 sejumlah 4 program dengan 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan baik dalam fungsi kesekretariatan maupun pelayanan. Mengingat bahwa merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi support staff bukan operating core maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan lebih banyak bersifat fasilitasi dan administratif baik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang bersifat ke lapangan adalah program dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan kepegawaian maupun pendataan pegawai. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang lebih bersifat fasilitasi dan administratif berlokasi pada sendiri atau instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Kepegawaian Negara baik yang ada di Yogyakarta maupun di Jakarta, Sekretariat Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara dan lain sebagainya.

Program/kegiatan dalam Renja tahun 2024 dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 89.732.020.788 yang bersumber dari APBD, sedangkan kegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 775.200.000, sehingga total anggaran sebesar Rp. 90.507.220.788

Program dan kegiatan pada Tahun 2024 disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian. Program dan kegiatan yang disusun meliputi 4 program dengan 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang kesekretariatan serta program, kegiatan dan sub kegiatan utama.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatifnya. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah melalui tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari penyusunan rancangan awal yang kemudian dibahas dalam forum Perangkat Daerah, forum Musrenbang tingkat Kabupaten, penyusunan rancangan akhir hingga ditetapkan melalui Peraturan Bupati sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			775.200.000				350.000.000
4		SEKRETARIAT DAERAH			775.200.000				350.000.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Persentase)		100	775.200.000				350.000.000
4	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota (Laporan)		4	775.200.000				350.000.000
4	5.0 04 2								
4	5.0 04 2	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	Semua Kab/ Kota, Kecamatan, Kalurahan	5 Laporan	775.200.000	Dana Keistimewaan		100 persen	350.000.000
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			89.732.020.788				22.758.179.193
5		KEPEGAWAIAN			89.620.020.788				22.758.179.193
5	5.03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100	4.127.446.014				14.296.179.193

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DAERAH KABUPATEN	Dengan Baik (%)							
5 03 01 1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD Tersusun (Dokumen)		34	2.985.000				27,000,000
5 03 01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	4 Dokumen	700.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	9,000,000
5 03 01 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 Dokumen	210.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	4,000,000
5 03 01 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 Dokumen	210.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	2,500,000
5 03 01 1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Dokumen	400.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	4,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 1	2.0 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Dokumen	400.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	1,500,000
5 03 01 1	2.0 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	17 Laporan	975.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	4,000,000
5 03 01 1	2.0 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	6 Laporan	90.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	2,000,000
5 03 01 2	2.0 01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu (Laporan)		28	3.588.654.814				12,735,079,193
5 03 01 2	2.0 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	672 Orang	3.584.368.814	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	12,726,079,193

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.0 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 Laporan	520.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	2,500,000
5 03 01 2.0 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	13 Laporan	3.766.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	6,500,000
5 03 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terlayani dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Laporan)		5	24.247.500				52,500,000
5 03 01 2.0 5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Dokumen	24.247.500	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	2,500,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.0 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	-	-	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	50,000,000
5 03 01 2.0 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Terpenuhi (Laporan)		187	109.795.000				500,600,000
5 03 01 2.0 06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Paket	5.910.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	11,000,000
5 03 01 2.0 06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Paket	44.986.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	274,000,000
5 03 01 2.0 06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 Paket	1.298.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	20,000,000
5 03 01 2.0 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Paket	11.700.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	35,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.0 06	Penyediaan Bahan dan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	698 Dokumen	2.400.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	3,600,000
5 03 01 2.0 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	4 Laporan	6.125.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	12,000,000
5 03 01 2.0 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	10 Laporan	37.376.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	145,000,000
5 03 01 2.0 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana (Unit)		17	-				185,000,000
5 03 01 2.0 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	0 Paket	-	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	10,000,000
5 03 01 2.0 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	0 Unit	-	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	100,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	0 Unit	-	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	75,000,000
5 03 01 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi (Laporan)		138	246.448.700				356.000.000
5 03 01 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	7 Laporan	25.447.500	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	46,000,000
5 03 01 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	120 Laporan	131.030.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	210,000,000
5 03 01 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	6 Laporan	89.971.200	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	100,000,000
5 03 01 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksana (Unit)		120	155.315.000				440,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.0 02 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	37 Unit	90.900.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	165,000,000
5 03 01 2.0 06 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	13 Unit	5.440.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	25,000,000
5 03 01 2.0 09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Unit	57.775.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	130,000,000
5 03 01 2.0 10 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	4 Unit	1.200.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	50,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	-	-	-		100 persen	70,000,000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Layanan Dan Fasilitas Administrasi Kepegawaian (%)		100	85.492.574.774				7,736,000,000
5 03 02 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Infomasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu dan Tersedianya Data yang Up To Date (Dokumen)		12	78.341.000				1,155,000,000
5 03 02 1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	7 Dokumen	65.515.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	1,050,000,000
5 03 02 1	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 Dokumen	1.800.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	40,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 02 1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Dokumen	11.026.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	65,000,000
5 03 02 2	Mutasi dan Promosi	Jumlah Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN Sesuai Kompetensi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu (Dokumen)		15	75.980.000				397,000,000
5 03 02 2	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 100	30,000,000
5 03 02 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	6 Dokumen	27.030.000	Dana Transfer Umum-DAU			87,000,000
5 03 02 2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Dokumen	47.450.000	Dana Transfer Umum-DAU			280,000,000
5 03 02 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN (Dokumen)		6	22.300.000				3,908,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 02 3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 dokumen	12.200.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	3,388,000,000
5 03 02 3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	265 orang	10.100.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	520,000,000
5 03 02 4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN Serta Kasus ASN yang Terselesaikan (Laporan)		70	85.315.953.774				2,276,000,000
5 03 02 4	Penyusunan Kebijakan dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	8 Dokumen	10.100.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	47,000,000
5 03 02 4	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Laporan	4.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	25,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03 02 4	04	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	27.625 Orang	85.291.928.774	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	2,090,000,000
5	03 02 4	06	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Dokumen	8.600.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	45,000,000
5	03 02 4	07	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	150 Orang	300.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	47,000,000
5	03 02 4	08	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Laporan	525.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	15,000,000
5	03 02 4	10	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	0 Laporan	-	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	7,000,000
5	04				112.000.000				726.000.000
5	04 02			100	112.000.000				726.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 04 02 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Teknis dan Fungsional (Orang)		270	112.000.000				726.000.000
5 04 02 1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	90 orang	112.000.000	Dana Transfer Umum- DA U		100 persen	726.000.000
				TOTAL	90.507.220.788				23,108,179,193

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan arah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang disusun berdasarkan sasaran daerah, dengan memperhatikan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Mengingat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan prioritas kebijakan nasional, agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kebijakan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan komprehensif perlu didukung anggaran yang memadai baik dari APBD maupun APBN.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja BKPPD Tahun 2024 melibatkan peran serta pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan Rencana Kerja yang dapat menampung aspirasi pemangku kepentingan baik masyarakat, maupun Perangkat Daerah lainnya serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan di bidang sumber daya aparatur pada tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pada yang merupakan komitmen untuk memberikan kepastian dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkesinambungan.

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk periode 1(satu) tahun yaitu tahun 2024 yang akan dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan, telah diupayakan dalam pelaksanaannya dapat sinergis dan berjalan dengan

lancar. Komitmen, konsistensi, partisipasi, kerja keras dan semangat dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja ini mutlak diperlukan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
PLH. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

SIGIT PURWANTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan yang ada di Renja PD harus tercantum dalam Renstra PD yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag pada Sekretariat dan Kasubid Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset dan Bidang Akuntansi yang mana telah disesuaikan dengan kebutuhan riil, agar kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul guna dilakukan pencermatan dan penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hasil pencermatan dan penyelarasan tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2021 – 2026 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang anggaran, pendataan dan penetapan pajak daerah, penagihan, pelayanan dan pengendalian, perbendaharaan, aset dan akuntansi, dituntut adanya profesionalisme didalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu proses aktivitas kerja di bidang keuangan yang dimulai dari perencanaan, penggalan, pendataan, pengkoordinasian, penetapan,

pemungutan, pembelanjaan, akuntansi, pembantuan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan, agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud aparatur yang bersih dan terselenggaranya pemerintahan yang dipercaya. Dengan demikian akan terwujud adanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan sekaligus pemerintah yang bersih (*Clean Government*) sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 11 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 052/5969 Tahun 2022 tertanggal 07 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renwal Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatannya.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renwal Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Sebagai pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja BKAD dan Capaian Renstra BKAD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana tindak lanjut

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKAD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD dan Capaian Renstra BKAD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renwal Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel.2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul**

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangandan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2021*			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022*	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	16	16	16	13	81.25	21	21	131.25
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Renja	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Renja perubahan	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Profil BKAD	0	1	1	0	0	0	0	0
		Pelaksanaan forum perangkat daerah	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	0	0	0	0	4	4	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	0	1	1	1	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	0	0	0	1	1	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	0	0	0	1	1	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen ROPK	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen KAK BKAD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0	0	0	1	1	100
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA perubahan	0	1	1	1	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen perubahan perjanjian kerja	0	1	1	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	0	0	0	0	2	2	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjJP	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Tepra	0	12	12	100	0	0	0	0
		Laporan e-monev	0	4	4	100	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	0	0	0	0	5	5	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	14	14	14	100	100	14	14	100
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	0	14	14	14	100	0	0	0
		Jumlah Insentif pemungutan pajak dan retribusi terbayar	0	4	4	4	100	0	0	0
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008	0	0	0	0	1008	1008	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	0	1	1	100
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Jawaban tidak lanjut pemeriksaan	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0	0	0	1	1	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan SPJ bulanan	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen laporan semesteran	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	0	0	0	0	13	13	100
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	80	80	80	80	100	8	8	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN terlayani	0	81	80	80	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	0	0	0	0	8	8	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani	11	11	11	11	100	11	11	100
		Persentase administrasi umum terlayani	100	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik tersedia	0	6	6	6	100	0	0	0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	0	0	0	0	5	5	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	0	22	80	80	100	0	0	0
		Jumlah Printer yang dibeli	0	2	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Roll O Pack Arsip yang dibeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	0	0	0	0	20	20	100
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan dibeli	0	4	4	4	100	0	0	0
		Jumlah tea/cofee warmer yang dibeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah tea set/chinaware yang dibeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Trolley yang dibeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Tangga alumunium yang dibeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	0	0	0	0	4	4	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	0	150	150	190	126.67	0	0	0
		Jumlah lembar fotocopy	0	115344	25260	25260	100.00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24	0	0	0	0	24	24	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat kabar tersedia (2 surat kabar x 12 bulan	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu tersedia	0	567	100	200	200	0	0	0
		Jumlah minum snack tamu tersedia	0	233	500	500	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	0	0	0	0	12	12	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi luar daerah	0	71	90	4	4,44	0	0	0
		Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi dalam daerah	0	92	130	127	97,69	0	0	0
		Jumlah makan minum rapat tersedia	0	500	500	500	100	0	0	0
		Jumlah makan snack rapat tersedia	0	1500	1500	1500	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	0	0	0	0	12	12	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	0	3	3	3	100	3	3	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas roda 2	0	0	2	1	50	0	0	100
		Jumlah Kendaraan dinas roda 4	0	0	1	0	0	0	0	100
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	0	0	0	0	3	3	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Almari Ruang Kepala yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	100
		Jumlah Meja Rapat Kayu yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	100
		Jumlah Kursi Rapat yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	100
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200	0	0	0	0	200	200	100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin antrian yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	100
		Pengadaan smart tv 50' (set: 1 & bid : 4 Akt, perb, aset, pelyn) yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	100
		Vacuum cleaner yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	100
		Pesawat telepon cordless yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	100
		Mesin Fax yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	100
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	0	0	0	4	4	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	6	0	6	6	0	6	6	100
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	0	100	100	100	100	0	0	0
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	0	2970	3500	2632	75.2	0	0	0
		Jumlah paket dokumen terkirim	0	0	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	0	0	0	12	12	100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah 2 rekening air terbayar	0	12	24	24	100	0	0	0
		Jumlah 3 rekening listrik terbayar	0	44	36	36	100	0	0	0
		Jumlah 3 rekening telpon terbayar	0	36	36	36	100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
				0	0	0	0	96	96	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	4	3	3	100	0	0	0
		Jumlah Jasa Kebersihan gedung terbayar								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	0	0	0	0	4	4	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang milik daerah terlaksana	4	4	4	4	100	4	4	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	0		10	12	120	0	0	0
		Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara	0		60	38	63.33	0	0	0
		Jumlah kendaraan roda 4 terbayar pajaknya	0		10	3	30	0	0	0
		Jumlah kendaraan roda 2 terbayar pajaknya	0		60	10	16.67	0	0	0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138	0	0	0	0	138	138	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer / server terfasilitasi pemeliharannya	0		7	7	100	10	0	0
		Jumlah notebook / laptop terfasilitasi pemeliharannya	0		5	8	160	5	0	0
		Porforator terfasilitasi pemeliharannya	0		0	0	0	3	0	0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	0	0	0	0	18	18	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab kamar mandi	0		0	0	0	0	0	0
		Rehab berat atap Gd. Unit II (+desain ulang)	0		0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Rehab Ruang Rapat BKAD (4 ruang)	0		0	0	0	0	0	0
		Rehab Interior Ruang Sekretariat (R. kerja Sek, desk receptionist, pengaduan, R. tunggu tamu) & Ruang Kepala (Ruang tamu & R. kerja)	0		0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan taman	140				0	0	0	0
		Penataan jaringan listrik gedung BKAD	0				0	0	0	0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC terfasilitasi pemeliharaannya	0		20	20	100	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	0	0	0	0	20	20	100
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	3		3	2	66.67	3	3	100
		Nilai IKM PD	80	80	79	79	100	79	79	98.75
X.XX.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen SOP	1		1	1	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen SPIP	1		1	0	0	1	1	100
		Jumlah Dokumen RTP	1		1	0	0	1	1	100
		Jumlah Dokumen survey kepuasan masyarakat	2		2	1	50	2	2	100
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Penetapan APBD Tepat Waktu - Penyelesaian SP2D tepat waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan PD tepat waktu	100		100	100	100	100	100	100
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah layanan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8		8	8	100	8	8	100
		Persentase Penyampaian RAPBD minggu pertama Oktober	100		100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen rancangan KUA/PPAS	0		2	2	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen KUA/PPAS	0		2	2	100	0	0	0
		Jumlah dokumen pemerataan usulan belanja hibah, bansos, bagi hasil dan BKK	0		4	2	50	0	0	0
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8	0	0	0	0	8	8	100
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen rancangan KUA/PPAS Perubahan	0		2	0	0	2	2	100
		Jumlah Dokumen KUA/PPAS Perubahan	0		2	2	100	0	0	0
		Jumlah dokumen pemerataan usulan belanja hibah, bansos, bagi hasil dan BKK Perubahan	0	2	2	2	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6	0	0	0	0	6	6	100
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA hasil desk	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	47	0	0	0	0	47	47	100
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan hasil desk	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	47	0	0	0	0	47	47	100
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	0	47	47	47	100	0	0	0
		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	47	0	0	0	0	47	47	100
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD	0	47	47	47	100	0	0	0
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47	0	0	0	0	47	47	100
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen RAPBD	0	1	1	1	100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Perda APBD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perbup Penjabaran APBD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3	0	0	0	0	3	3	100
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan RAPBD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perbup Perubahan Penjabaran APBD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	0	0	0	0	3	3	100
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Analisis standar belanja	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Standar satuan harga	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Peraturan bupati harga satuan paket kegiatan	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	0	0	0	0	4	4	100
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah kesepakatan perencanaan anggaran belanja daerah	0				100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	0	0	0	0	2	2	100
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah kesepakatan perencanaan anggaran pembiayaan	2				100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	0	0	0	0	2	2	100
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah layanan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terlaksana	0				100	0	0	0
		Persentase Penyelesaian SP2D tepat waktu (2 hari)	100		100	100	100	100	100	100
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas dan Rekonsiliasi Bank	0	12	12	9	75	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24	0	0	0	0	4	4	16.67
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SP2D Non Gaji	0	2663	3250	4504	138.58	0	0	0
		Jumlah Dokumen SP2D Gaji dan Potongan	0	1104	975	975	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen SPD	0	271	300	350	116.67	0	0	0
		Jumlah Dokumen Anggaran Kas	0	2	2	2	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen administrasi gaji yang mengupdate data terkini	0	16	16	16	100	0	0	0
		Jumlah dokumen laporan realisasi belanja pegawai	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah dokumen laporan realisasi SP2D non gaji	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31	0	0	0	0	31	31	100
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi penyertaan modal daerah	0	30	3	3	100	0	0	0
		Jumlah Perbup tentang Penatausahaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3	0	0	0	0	3	3	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Konfirmasi transfer	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dana keistimewaan dan tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan	0	5	5	5	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen laporan DAK fisik, DAK Non fisik, DID dan dana keistimewaan	0	90	90	90	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	105	0	0	0	0	105	105	100
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen laporan potongan IWP	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen laporan potongan taperum	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen laporan PPh ps 21	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen penelitian, klarifikasi dan pelaporan PPh/PPH	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen pemotongan JKK, JKM ASN/DPRD, JKN ASN/DPRD	0	60	60	60	100	0	0	0
		Jumlah Jaminan Kematian terbayar	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Bulan Jaminan Kesehatan Nasional terbayar	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Bulan Jaminan kecelakaan kerja terbayar	0	12	12	12	100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12	0	0	0	0	12	12	100
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dengan bank	0	2	2	2	100	0	0	0
		Jumlah Surat Keputusan Piutang dan Utang Daerah	0	3	3	3	100	0	0	0
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	13	0	0	0	0	13	13	100
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas	0	26	26	26	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	32	0	0	0	0	32	32	100
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen laporan pemakaian benda berharga	0	4	4	4	100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah dokumen Pengesahan pertanggungjawaban pendapatan	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi benda berharga	0	4	4	4	100	0	0	0
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20	0	0	0	0	20	20	100
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengesahan Ganti Uang / Tambah Uang (GU/TU)	0	550	550	550	100	0	0	0
		Jumlah dokumen Surat Keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)	0	477	387	387	100	0	0	0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47	0	0	0	0	47	47	100
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Layanan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terlaksana	0	5	5	5	100	0	0	0
		Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	0	100	100	100	100	0	0	0
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pencatatan pertanggungjawaban pendapatan	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pencatatan pertanggungjawaban belanja dan pembiayaan	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pencatatan pertanggungjawaban aset dan selain aset	0	12	12	12	100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	24	0	0	0	0	24	10	100
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahunan dan Semesteran	0	2	1	1	50	0	0	0
		Jumlah Dokumen Ikhtisar laporan keuangan desa	0	2	1	1	50	0	0	0
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	96	0	0	0	0	96	96	100
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda pertanggungjawaban APBD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	0	0	0	0	2	2	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan akuntansi pemerintah daerah	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Sistem akuntansi pemerintah daerah	0	1	1	1	100	0		
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	0	0	0	0	2	2	100
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Peserta Bimtek penyusunan laporan keuangan	0	2	2	2	100	0	0	0
		Jumlah SKPD Peserta Bimtek penyusunan laporan keuangan	0	48	48	48	100	0	0	0
		Upgrade dan kustemisasi aplikasi SIPKD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	126	0	0	0	0	126	126	100
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyaluran bantuan keuangan yang terfasilitasi	2	2	1	1	100	2	2	100
		Persentase Penyaluran Bantuan Keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah fasilitas pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus infrastruktur	0	2	2	2	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2	0	0	0	0	2	2	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah fasilitasi dana darurat dan mendesak	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	0	0	0	0	12	12	100
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkan ke neraca	100		100	100	100	100	100	100
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah layanan kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	13	12	12	12	100	13	13	100
		Persentase PD yang menyampaikan Laporan BMD dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Perbup SHBJ	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perbup perubahan SHBJ	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	0	0	0	0	2	2	100
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen standart kebutuhan BMD	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	0	0	0	0	1	1	100
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan barang perangkat daerah	0	2	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen analisa kebutuhan BMD	0	2	1	1	100	0	0	0
		Custemisasi aplikasi e-SHBJ / e-RKEMD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4	0	0	0	0	4	4	100
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sim Aset yang up to date	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah laporan BMD semester I	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen laporan BMD audited	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	0	0	0	0	2	2	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan inventarisasi BMD	1	1	1	1	100	1	1	100
		Aplikasi SIM inventarisasi yang up to date	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	0	0	0	0	1	1	100
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pembangunan pagar BMD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Pemeliharaan gudang BKAD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Pemeliharaan gedung siyono	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	0	0	0	0	3	3	3
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen penilaian BMD	0	1	1	0	0	0	0	0
		Jumlah fasilitasi pemantauan kerugian daerah	0	1	1	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	0	0	0	0	1	1	100
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penghapusan BMD	0	20	4	22	550	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	0	0	0	0	1	1	100
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen pemindahtanganan BMD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	0	0	0	0	10	10	100
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen rekonsiliasi laporan penetapan status penggunaan BMD	0	1	1	1	100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen rekonsiliasi penggunaan sementara dan BMD yang dioperasionalkan oleh pihak lain	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen rekonsiliasi alih status BMD	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen rekonsiliasi pengelolaan aset persediaan	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	0	0	0	0	4	4	100
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen rekonsiliasi laporan BMD audited dan unaudited	0	2	2	1	50	0	0	0
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	0	0	0	0	2	2	100
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD peserta bimtek pengurus barang dan pejabat penatausahaan barang	0	48	48	48	100	0	0	0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	151	0	0	0	0	151	151	100
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Capaian target obyektif dan subyektif pajak - Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola	0	100	100	100	100	100	100	100
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah layanan pengelolaan pendapatan daerah terlaksana	0	9	9	9	100	9	9	100
		Persentase capaian target obyektif dan subyektif pajak dan capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola	100	100	100	100	100	100	100	100
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah forum pendapatan se DIY	0	1	1	0	0	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah dokumen standarisasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	0	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	0	0	0	0	1	1	100
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah sosialisasi pengelolaan PBB P2	0	18	18	18	100	0	0	0
		Penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak	0	144	144	144	100	0	0	0
		Monitoring penyampaian SPPTP PBB	0	18	18	18	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Intensifikasi jenis pajak daerah dan tunggakannya	0	10	9	9	90	0	0	0
		Jumlah pemberian Penghargaan Kalurahan lunas PBB P2	0	50	50	50	100	0	0	0
		Jumlah stimulus SPPT terbayar	0	5	585000	585000	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	0	0	0	0	10	10	100
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penghargaan wajib pajak terlaksana	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Sosialisasi pajak daerah terlaksana	0	4	3	3	100.00	0	0	0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	0	0	0	0	1	1	100
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan	0	580000	600000	600000	100	0	0	0
		Jumlah SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah reklame dan air tanah) yang ditetapkan	0	2	2	2	100	0	0	0
		Jumlah Sosialisasi wajib pajak terlaksana	0	2	3	3	100.00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	144	0	0	0	0	144	144	100
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen penerimaan pajak penerangan jalan	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah pendataan obyek dan subyek pajak (9 jenis pajak)	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Pemutakhiran data subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	0	0	0	0	12	12	100
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang konsultasi dan terdampingi	0	13437	9000	9316	103.51	0	0	0
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000	0	0	0	0	12000	12000	100
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan obyek pajak yang dilakukan (self assessment)	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2	0	0	0	0	2	2	100
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	0	0	0	0	12	12	100
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen administrasi pelayanan pajak daerah	0	2	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	0	0	0	0	12	12	100
5.02.04.2.01.14	Peminaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi	0	12	12	12	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Retribusi pemakaian kekayaan daerah	0	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8	0	0	0	0	8	8	100

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kinerja program kegiatan BKAD dapat terlaksana dengan baik. Adapun beberapa kegiatan yang **tidak tercapai sesuai target kinerja** program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, mundurnya jadwal penyusunan RKA 2023 karena reviu baru selesai bulan September ;
2. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan karena biaya perjalanan dinas dalam daerah dan rapat belum dilaksanakan karena ketersediaan dana tersebut untuk memback-up pemeriksaan dari Irda Provinsi;
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu belum semua terserap karena tentatif, tergantung kedatangan tamu ke Badan Keuangan dan Aset Daerah , acara luar daerah dan undangan luar daerah;
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum semua terserap sesuai angkas karena tentatif, tergantung kebutuhan rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
5. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terkait pengadaan bak *arm roll* sudah terealisasi tetapi baru akab di SPJkan di triwulan III (bulan Oktober);
6. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk pemeliharaan kamar mandi fisik sudah selesai tetapi belum diSPJkan;
7. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD anggaran belum terserap karena desk RKA 2023 baru akan dilaksanakan akhir Oktober 2022;
8. Penatausahaan Pembiayaan Daerah anggaran fotokopi dan jilid belum terealisasi karena sisdur pengelolaan keuangan belum dilaksanakan dan baru akan melakukan finalisasi perbup sisdur keuangan setelah perda pengelolaan keuangan selesai;
9. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota belum selesainya pengembangan fitur penatausahaan dalam aplikasi SIKD, jadi belum bisa dibayarkan dan akan diupayakan mendorong vendor agar segera menyelesaikan pekerjaan sehingga aplikasi SIKD bisa segera diujicobakan dan diaplikasikan;
10. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, Perbup kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi menunggu ditetapkannya perda tentang pengelolaan keuangan daerah yang saat ini masih pada tahapan fasilitasi gubernur sehingga pagu anggaran belum bisa direalisasikan;
11. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota pagu anggaran belum terealisasi karena menunggu proses pembuatan aplikasi oleh Tim Global serta menunggu kesiapan narasumber dari kanwil DJPB DIY dan BPKP DIY, rencananya akan dilaksanakan bulan Oktober;
12. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak realisasi program dan kegiatan berdasarkan permohonan penggunaan anggaran BTT dari

SKPD dan SKPD Pengampu BTT tidak segera mencairkan anggaran BTT yang sudah di SK-kan;

13. Penyusunan Standar Harga Perbup SHBJ telah ditetapkan namun penggandaan masih dalam proses sehingga pagu anggaran belum tersealisasi;
14. Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Inventarisasi Barang Milik Daerah untuk pembayaran update aplikasi sim aset belum direalisasikan karena proses update masih dalam proses sampai tanggal 3 Oktober 2022;
15. Pengamanan Barang Milik Daerah untuk Pemeliharaan gedung serbaguna siyono menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan jadwal pemakaian gedung. Untuk pendaftaran pensertifikatan tanah (PNPB) yang direncanakan, telah tercover di DPTR dan proses pendaftaran selanjutnya terkendala dengan belum lengkapnya berkas pengadaan tanah pada masa lalu;
16. Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Adanya perubahan ketentuan terkait pengelolaan retribusi dan belum tertibnya peraturan pelaksanaannya, konsultasi dan koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga perjalanan dinas belum terlaksana secara optimal;
17. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Aplikasi masih dalam proses pengerjaan;
18. Pemberian stimulus dan penghargaan prestasi kerja bagi tim pengelola PBB kalurahan baru akan diselesaikan pada bulan Oktober;
19. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah terkait kajian teknis peninjauan NJOP dan kajian teknis pajak daerah masih dalam proses pengerjaan;
20. Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kegiatan appraisal bangunan, pembuatan aplikasi pemakaian kekayaan daerah, sewa bando/baliho sudah dilaksanakan tinggal proses administrasi untuk pembayaran.

Kegiatan yang **melampaui target** capaian diantaranya Pendapatan Asli Daerah sudah mencapai 236.141.177.475,79 (94%) dari target 251.205.703.887,00, nilai PAD triwulan III sudah hampir setara dengan PAD 2021 pada triwulan IV.

Pada tahun 2022 pasca pandemi *covid-19*, sehingga mengharuskan pemerintah masih fokus pada pemulihan ekonomi. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2022 antara lain :

1. Pergeseran anggaran
2. Penurunan pendapatan
3. Kenaikan belanja tidak terduga
4. Belanja wajib dalam ranagka penanganan dampak inflasi Tahun anggaran 2022.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya

program/kegiatan pada tahun 2021 antara lain Intensifikasi PBB lebih ditingkatkan, jemput bola sampai desa sehingga Wajib Pajak lebih mudah untuk bayar pajaknya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung program prioritas nasional 2024 dalam memperkuat stabilitas politik hukum ketahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik juga mendukung program prioritas Daerah yaitu penguatan *good governance* pada berbagai tingkatan serta Reformasi Birokrasi pada tingkat Kabupaten telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program pembangunan di Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul dapat terlaksana sesuai rencana.

Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga program pembangunan yang mewadahi aspirasi masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tingginya tingkat kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi indikator berhasilnya program pembangunan yang direncanakan. Selain itu terjadinya peningkatan kualitas sumber daya aparatur akan sejalan dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga *good governance* dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 ada tiga target sesuai IKU BKAD yaitu

- Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan,
- Kualitas Penatausahaan Aset Daerah Meningkatkan dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset Daerah
- Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan dengan indikator Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD

Dari 3 target pencapaian kinerja BKAD tersebut secara keseluruhan tercapai dengan baik, dapat di uraikan pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Terhadap Renstra PD Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian			Catatan Analisis	
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan 1. Penetapan APBD tepat waktu; 2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu; 3. Persentase penyampaian Laporan Keuangan PD tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Pengelolaan Aset Daerah 1. Jumlah tanah bersertifikat/jumla h semua tanah BMD 2. Jumlah kendaraan berdokumen lengkap/jumlah kendaraan BMD 3. Jumlah BMD yang dimanfaatkan / jumlah BMD yang seharusnya dapat dimanfaatkan 4. Jumlah BMD yang diamankan/jumla h BMD yang perlu diamankan.	persen	0	95	100	100	0	84	90	100	100	100	
3	Persentase Kenaikan PAD yang dikelola	persen	0	17.73	5.09	3.89	-3.62	21.04	17.73	5.09	3.89		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kabupaten Gunungkidul

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi BKAD dalam pencapaian visi, misi Bupati secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan memperhatikan nilai - nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja BKAD dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan BKAD tetap mendapatkan atau menemui hal kritis dan berbagai macam persoalan atau hambatan.

Isu - isu atau permasalahan yang dihadapi BKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD) pada tahapan penatausahaan dan pelaporan;
2. Perubahan regulasi yang terkait dengan pengelolaan BMD;
3. Belum optimalnya penyampaian data SPPT PBB-P2 khususnya kepada wajib pajak yang berdomisili di luar daerah karena sulit/tidak diketahui alamatnya;
4. Belum tersedianya peta bidang poligon untuk pemutakhiran data PBB-P2;
5. Terdapat ketidaksinkronan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan BMD dengan regulasi yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Dalam pengelolaan pendapatan ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih tinggi sehingga tingkat kemandirian daerah rendah;
7. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah;
8. Belum adanya data objek pajak lintas OPD, seperti menara seluler.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan yang ada di BKAD. Adapun solusi/hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan pelayanan berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan aplikasi secara paralel yaitu aplikasi SIPD Kemendagri dan aplikasi lokal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) serta melakukan konsultasi dengan Kemendagri apabila ada kendala penggunaan aplikasi SIPD;

2. Mempelajari setiap perkembangan regulasi dan menyesuaikan dengan regulasi daerah;
3. Melakukan penelusuran wajib pajak bersama dengan tim kalurahan dan kapanewon;
4. Mengajukan permohonan peta bidang poligon kepada BPN;
5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemda DIY;
6. Melakukan berbagai upaya optimalisasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara ekstensifikasi, intensifikasi dan berbagai kemudahan dalam layanan pembayaran pajak daerah.
7. Mengirimkan aparatur/pegawai untuk mengikuti bimtek, seminar maupun pelatihan baik secara luring maupun daring.
8. Rekonsiliasi data secara rutin dan berkala.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Bupati serta tujuan BKAD pada khususnya.

Kinerja yang telah dicapai BKAD merupakan buah kerja keras seluruh sumber daya aparatur, hasil koordinasi dengan seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1. Mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK dengan dukungan stakeholder terkait untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk ketujuh kali.
2. Meraih Peringkat 3 Penghargaan P2DD (Perluasan Percepatan Digitalisasi Daerah) se-Jawa Bali;
3. Penghargaan Wajib Pajak Instansi Pemerintah atas Kepatuhan Penyampaian SPT Masa tepat waktu selama tahun pajak 2022;
4. Penghargaan terbaik ke-2 SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) dari Dirjen Perbendaharaan
5. Peningkatan jumlah Kalurahan lunas PBB sampai dengan tanggal jatuh tempo.
6. Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terutama pajak daerah, telah berhasil melakukan penambahan pemasangan Tapping Box (alat untuk merekam data transaksi) dari 64 unit menjadi 70 unit.
7. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar Rp67.461.396.870,73 dan realisasinya sebesar Rp77.002.244.359,50 atau 114,14%.
8. Memperoleh penghargaan atas prestasi sebagai Badan Publik yang Informatif kategori OPD Kabupaten/Kota se-DIY.
9. Memperoleh penghargaan atas prestasi sebagai Badan Publik yang Informatif kategori Perangkat Daerah se-Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, BKAD harus bisa menjawab setiap tantangan/permasalahan dan peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pajak daerah serta pelayanan SP2D. BKAD harus bisa memberikan pelayanan yang cepat, transparan serta memberikan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat sesuai standar pelayanan.

Sudah cukup jelas bahwa setiap penyelenggara pelayanan harus mampu memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan transparan. Menjawab tantangan itu BKAD telah melakukan terobosan dengan menyediakan sistem informasi. Dengan begitu tidak lain teknologi informasi berperan besar dalam rangka pemenuhan untuk kecepatan pelayanan.

Hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk dapat menyesuaikan penyelenggaraan pelayanannya kepada masyarakat dalam menghadapi revolusi industri 4.0 saat ini, yaitu dengan menerapkan pelayanan publik yang berbasis Teknologi (digital), sebab dengan teknologi, transparansi, kecepatan, kemudahan yang menjadi kunci pada suatu pelayanan akan terwujud, maka tidak heran pelayanan pajak daerah serta pelayanan SP2D akan lebih baik karena pemanfaatan teknologi yang semakin canggih dalam proses pemberi pelayanannya untuk menjaga kepercayaan.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 terhadap analisis kebutuhan dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	13.048.950.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	10.122.901.125	
5 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	21 Dokumen	50.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	21 Dokumen	50.500.000	
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen			Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	2	1	2.01	1	31.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	31.500.000	
5	2	1	2.01	2	950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	950.000	
5	2	1	2.01	3	950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	950.000	
5	2	1	2.01	4	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000	
5	2	1	2.01	5	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	
5	2	1	2.01	6	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	11.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	4.000.000	4.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	4.000.000
5	2	1	2.02	14	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	14 dokumen	8.470.451.125	8.470.451.125	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	14 dokumen	8.470.451.125
				100		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen			Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008 Orang	8.399.951.000	8.399.951.125	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008 Orang	8.399.951.125
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000
5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemriksaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemriksaan dan Tindak Lanjut Pemriksaan	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemriksaan dan Tindak Lanjut Pemriksaan	1 Dokumen	3.000.000
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	40.500.000	65.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	65.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	2	1	2.05	80 Orang	2.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	80 Orang	2.000.000	
				100 persen			Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen		
5	2	1	2.05	80 Orang	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80 Orang	2.000.000	
5	2	1	2.06	11 kegiatan	740.450.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani	11 kegiatan	694.950.000	
				100 persen			Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase administrasi umum terlayani	100 persen		
5	2	1	2.06	5 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	10.000.000	
5	2	1	2.06	20 paket	347.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	347.800.000	
5	2	1	2.06	4 paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	7.500.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	2	1	2.06	5	24 paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 paket	20.000.000	
5	2	1	2.06	6	720 Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	2.400.000	
5	2	1	2.06	8	12 orang	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 orang	25.000.000	
5	2	1	2.06	9	12 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konkonsultasi SKPD	12 Laporan	282.250.000	
5	2	1	2.06		3 Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	3 Kegiatan	0	
					100 Persen		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	0	
5	2	1	2.07	2	3 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	0	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5	2	1	2.08	2.08	1	6 kegiatan	412.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	6 kegiatan	412.000.000
								Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen		
5	2	1	2.08	2.08	1	12 Laporan	27.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27.000.000
5	2	1	2.08	2.08	2	96 Laporan	235.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	96 Laporan	235.000.000
5	2	1	2.08	2.08	4	150.000.000	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	150.000.000
5	2	1	2.09	2.09	4	1.898.000.000	1.898.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan pemeliharaan Barang milik daerah terlaksana	4 kegiatan	493.000.000
								Persentase pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	2	1	2.09	2	138 unit	356.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	138 unit	256.000.000
5	2	1	2.09	6	18 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	20.000.000
5	2	1	2.09	9	3 unit	1.505.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	3 unit	200.000.000
5	2	1	2.09	10	20 Unit	17.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit	17.000.000
5	2	2			100 persen	45.543.920.626	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		-Penetapan APBD Tepat Waktu - Penyelesaian SP2D Tepat Waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan PD Tepat Waktu	100 persen	1.277.845.000
5	2	2	2.01		8 dokumen	1.305.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah layanan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8 dokumen	675.250.000
					100 persen				Persentase Penyampaian RAPBD minggu pertama Oktober	100 persen	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	2	2	2	2	2	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	8 dokumen	100.000.000	
5	2	2	2	2	2	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	6 dokumen	58.000.000	
5	2	2	2	2	2	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	47 Dokumen	16.100.000	
5	2	2	2	2	2	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi	47 Dokumen	15.000.000	
5	2	2	2	2	2	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	47 Dokumen	40.000.000	
5	2	2	2	2	2	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang diverifikasi	47 dokumen	40.000.000	
5	2	2	2	2	2	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 dokumen	254.500.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	218.650.000	3 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	84.650.000
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	101.000.000	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	61.000.000
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3.000.000	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	3.000.000
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3.000.000	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	3.000.000
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah layanan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terlaksana	43.592.895.626	9 kegiatan	Jumlah layanan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terlaksana	9 kegiatan	301.325.000
							Persentase Penyelesaian SP2D tepat waktu (2 hari)		100 persen	Persentase Penyelesaian SP2D tepat waktu (2 hari)	100 persen	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5	2	2	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen	24.000.000	
5	2	2	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31 Dokumen	90.000.000	
5	2	2	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	31 Dokumen	5.000.000	
5	2	2	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	105 Dokumen	29.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Realisasi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, dan Kelurahan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyelenggaraan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	127.566.000,00		
5	2	2	2.02	8	Koordinasi dan Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	13 Dokumen	3.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	32 Dokumen	15.000.000		
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20 Dokumen	5.000.000		
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang	2.759.000		
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Layanan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terlaksana	5 kegiatan	301.270.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100 persen				Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100 persen		
5	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	24 Dokumen	125.600.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	24 Dokumen	65.000.000	
5	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	96 Laporan	55.470.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	96 Laporan	55.470.000	
5	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	302.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	110.400.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	44.505.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	15.000.000	
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	126 Orang	117.400.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	126 Orang	55.400.000	
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkan ke neraca	100 Persen	1.148.741.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkan ke neraca	100 Persen	910.000.000	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah layanan kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	13 kegiatan	1.148.741.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah layanan kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	13 kegiatan	910.000.000	
							Persentase PD yang menyampaikan Laporan BMD dengan benar dan tepat waktu	100 Persen				Persentase PD yang menyampaikan Laporan BMD dengan benar dan tepat waktu	100 Persen		
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	63.130.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	60.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	2	3	2.01	2	34.740.000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	30.000.000	
5	2	3	2.01	4	52.671.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	4 Dokumen	50.000.000	
5	2	3	2.01	2	166.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	140.000.000	
5	2	3	2.01	1	140.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	140.000.000	
5	2	3	2.01	3	350.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	3 Laporan	200.000.000	
5	2	3	2.01	1	80.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	1 Laporan	72.000.000	
5	2	3	2.01	1	75.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengelolaan barang milik daerah	1 Laporan	73.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	10 Dokumen	25.000.000		
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	4 Laporan	55.000.000		
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	2 Laporan	35.000.000		
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	151 Orang	30.000.000		
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		- Persentase Capaian target obyek dan subyek pajak - Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola		2.573.425.000		
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah layanan pengelolaan pendapatan daerah terlaksana		2.573.425.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase capaian target obyek dan subyek pajak dan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola					Persentase capaian target obyek dan subyek pajak dan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola			
5	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	1 dokumen	20.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	1 dokumen	20.000.000	
5	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	250.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	113.130.000	
5	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	144 unit	355.795.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	144 unit	355.795.000	
5	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, dan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	600.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, dan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	250.000.000	
5	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan	80.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan	75.000.000	
5	2	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	50.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	40.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.700.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.599.500.000	
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	60.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	30.000.000	
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	95.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	90.000.000	
TOTAL										63.952.406.626		14.884.171.125			

Dari tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa rancangan awal RKPD 2024 BKAD telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan sehingga ada beberapa program kegiatan yang digabung dengan kegiatan lain.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah, maka BKAD untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di BKAD karena tugas dan fungsi BKAD lebih pada suporting system untuk mendukung tugas fungsi OPD lain.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 banyak peraturan baru yang terbit sehingga mempengaruhi dinamika perubahan kebijakan sebagai konsekuensi dari diundangkannya peraturan-peraturan baru tersebut. Peraturan baru yang terbit berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengubah proses perencanaan dan penganggaran yang selama ini berfokus pada belanja menjadi berfokus pada kinerja dengan mempertajam tolok ukur kinerja sehingga mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Dalam fungsi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan peraturan ini disusun dalam rangka mengikuti penyesuaian dan perkembangan yang terjadi. Dalam fungsi pertanggungjawaban peraturan ini mengatur tentang laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah setidaknya ada 7 laporan keuangan dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, Pengguna Anggaran menyampaikan laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan. Dalam PP tersebut juga mengatur tentang syarat dan proses pemberian Tambahan Penghasilan PNS Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kemendagri.
- b. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, diterbitkan dalam rangka kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat dan kepada masyarakat.
- c. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diterbitkan guna mengintegrasikan dan menyelaraskan proses perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga diperlukan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- d. Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan tersebut yaitu Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Kemendagri mengeluarkan aplikasi SIKEUDA yang merupakan pengembangan dari SIPKD untuk digunakan oleh pemerintah daerah. Aplikasi tersebut telah terintegrasi dari Perencanaan (*e-planning*) penganggaran (*e-budgetting*), pengelolaan barang dan persediaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban (akuntansi dan pelaporan) sehingga mempermudah daerah dalam proses pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta dalam pengiriman data/laporan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar

dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Untuk menunjang pengelolaan Barang Milik Daerah agar terlaksana dengan baik dan benar maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk itu Pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diikuti peraturan terkait lainnya di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menindaklanjuti penerapan peraturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan BMD diantaranya meliputi proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan BMD baik dari sisi administrasi, penatausahaan maupun dari sisi optimalisasi BMD agar memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

Inventarisasi atas dokumen kepemilikan BMD dilakukan terhadap aset berupa tanah dan kendaraan. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM) Aset terus dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan validitas data BMD. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan proses implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang. Berkenaan dengan proses implementasi tersebut, juga dilakukan proses penyesuaian terhadap kebijakan akuntansinya.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024 pada dasarnya merujuk pada tema pembangunan nasional (RKP) tahun 2024 dan tema pembangunan Pemerintah Daerah DIY (RKPD DIY) tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Tema Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2024
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural “
- b. Tema pembangunan DIY (RKPD DIY) tahun 2024
“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY”

Berdasarkan tema nasional dan provinsi tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah “Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2024”.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”** Rencana Kerja BKAD tahun 2024 disusun dengan mencermati perolehan keberhasilan pembangunan tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil

pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah 2024 dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Ketentraman dan Ketertiban
2. Reformasi Birokrasi
3. Pendidikan dan Kesehatan;
4. Ketahanan Pangan;
5. Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariswisata;
6. Penanggulangan Kemiskinan;
7. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Dalam rangka melaksanakan fungsi BKAD sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pelaksanaan urusan kesekretariatan diperlukan suatu perencanaan kerja yang baik dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
BKAD Tahun 2024

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH (OUTCOME)	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD (OUTCOME)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Opini BPK	Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat	Persentase kenaikan PAD yang dikelola
				Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan
				Kualitas pengelolaan BMD meningkat	Indeks Pengelolaan BMD
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD

Tabel 3.2
Tujuan BKAD Tahun 2024

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi PAD yang dikelola terhadap total PAD	37,23
2	Mewujudkan Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP

Tabel 3.3
Sasaran BKAD Tahun 2024

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat	Persentase kenaikan PAD yang dikelola	3.89
2.1	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan	100
2.2	Kualitas pengelolaan BMD meningkat	Indeks Pengelolaan BMD	100
2.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,20

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama BKAD

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat	Persentase kenaikan PAD yang dikelola	3.89 persen
2	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan	100 persen
3	Kualitas pengelolaan BMD meningkat	Indeks Pengelolaan BMD	100 persen

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menjawab dan mengatasi isu-isu strategis dan melaksanakan tugas fungsinya sebagai PD maupun PPKD serta dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak pasca adanya pandemi *covid-19*, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul merencanakan 4 program 12 kegiatan dan 73 sub kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 4.1

Prioritas, Sasaran Daerah , Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD		URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PD PENANGGUNGJAWAB
				INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Opini BPK	Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat	Persentase kenaikan PAD yang dikelola yang dikelola	3,89 persen	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.035.617.200,00	BKAD
						Pengelolaan pendapatan Daerah	2.035.617.200,00	
						Perencanaan pengelolaan pajak daerah	10.800.000,00	BKAD
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	50.000.000,00	BKAD
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	247.339.900,00	BKAD
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	147.160.900,00	BKAD
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	23.840.000,00	BKAD
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8.000.000,00	BKAD
						Penagihan Pajak Daerah	1.460.077.500,00	BKAD
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	7.116.900,00	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	81.282.000,00	BKAD
			Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Indeks Pengelolaan Keuangan	100 persen	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	353.365.527.552	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	818.033.400,00	
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	161.625.000,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	80.900.000,00	BKAD
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	4.850.000,00	BKAD
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	4.500.000,00	BKAD
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	79.200.000,00	BKAD
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	79.200.000,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	263.898.500,00	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	111.683.900,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30.375.000,00	BKAD
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	900.000,00	BKAD
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	900.000,00	BKAD
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	38.154.665.652,00	BKAD
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	620.000,00	
						Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	68.661.400,00	BKAD
						Penatausahaan Pembiayaan Daerah	500.000,00	BKAD
						Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	27.743.500,00	BKAD

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8								38.048.985.852,00	BKAD
9								959.900,00	BKAD
								4.800.000,00	BKAD

1									
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						800.000,00	BKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						310.196.000,00	BKAD
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						60.305.000,00	BKAD
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						23.850.000,00	BKAD
	8								
	9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	212.841.000,00	BKAD
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.050.000,00	BKAD
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	8.150.000,00	BKAD
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	314.082.632.500,00	BKAD
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	311.082.632.500,00	BKAD
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.000.000.000,00	BKAD
			Kualitas pengelolaan BMD meningkat	Indeks Pengelolaan BMD		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	374.365.000,00	BKAD
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	374.365.000,00	BKAD
						Penyusunan Standar Harga	14.208.000,00	
						Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	28.006.500,00	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	52.185.000,00	BKAD
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	93.427.000,00	BKAD
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	53.074.500,00	BKAD
						Pengamanan Barang Milik Daerah	23.174.000,00	BKAD
						Penilaian Barang Milik Daerah	15.600.000,00	BKAD
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	56.028.000,00	BKAD
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	9.975.000,00	BKAD
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16.500.000,00	BKAD
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	9.555.000,00	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pembinaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	2.632.000,00	BKAD
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	8.250.893.704,80	BKAD
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.893.700,00	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.543.700,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	450.000,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.120.000,00	BKAD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000,00	BKAD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.399.235.303,80	BKAD
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.399.951.125	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	
						Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	64.999.800	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	BKAD
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	693.148.000	BKAD
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	BKAD
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	346.000.000	BKAD
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	BKAD
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	BKAD
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	BKAD
						Fasilitas kunjungan tamu	25.000.000	BKAD
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.248.000	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	BKAD
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	BKAD
						Pengadaan Mebel	0	BKAD
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.001.440	BKAD
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.997.500	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.999.240	BKAD
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.004.700	BKAD
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.480.000	BKAD
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.525.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	BKAD
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.155.000	BKAD
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.800.000	BKAD
							353.528.170.975	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada kegiatan dengan pagu anggaran nol karena penerapan Kepmendagri 050_5889 tahun 2021 sehingga beberapa kegiatan tersebut digabung pada kegiatan lain dengan penambahan tolok ukur kinerja.

Pada bab ini dipaparkan juga rumusan rencana program dan kegiatan BKAD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI- YATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4		8	9	11	12	13	15	16	
5						364.026.403.456,80					63.251.394.759,00	
5.02		KEUANGAN				364.026.403.456,80					63.251.394.759,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	8.250.893.704,80			Reformasi Birokrasi		10.770.550.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	21	36.893.700,00				21	55.500.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	4	28.543.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi		33.000.000,00	
										4.00	33.000.000,00	

5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGADUL)	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	1	1.050.000,00
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGADUL)	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	1	1.050.000,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGADUL)	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	1	1.200.000,00
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGADUL)	2	450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	2	1.200.000,00

5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	17	5.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	17	13.000.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	5	1.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	5	5.000.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	14	7.399.235.304,80				14	9.048.000.000,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1036	7.340.166.204,80	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	1036	9.000.000.000,00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	1	2.500.000,00

5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	1.00	960.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi											3.000.000,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	13	57.309.100,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi											42.500.000,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian (Orang)	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	73	640.000,00																2.000.000,00
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	8	640.000,00																2.000.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani (Kegiatan)	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	11	160.800.000,00																770.050.000,00

5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	5.00	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	15.000.000,00
				5					15.000.000,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	20.00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	345.800.000,00
				20					345.800.000,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	4	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	7.500.000,00
				4					7.500.000,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	12	6.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	20.000.000,00
				12					20.000.000,00

5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	360	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	2.400.000,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	12.00	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	70.500.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	12	39.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	308.850.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana (Kegiatan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	6	432.719.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	467.000.000,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				26.257.500,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	27.000.000,00

						12.00					12.00					27.000.000,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																240.000.000,00
						96.00											240.000.000,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																200.000.000,00
						4.00											200.000.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																428.000.000,00
						4											428.000.000,00
5.02.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																376.000.000,00
						24											376.000.000,00

5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	5	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	20.000.000,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	110.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	15.000.000,00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	10	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	17.000.000,00
2.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu (%) Penyelesaian SP2D Tepat Waktu (%) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan PD Tepat Waktu (%)		100 100 100	353.365.527.552,00			Reformasi Birokrasi	46.890.308.759,00

		Persentase Pengaturan Bantuan Keuangan yang tepat waktu (%)		100												
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah													Reformasi Birokrasi		1.365.950.000,00
		<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun (Dokumen)</i>	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	8										8		
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS															241.100.000,00
		<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)</i>	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	4												241.100.000,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS															123.100.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)</i>	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	4.00												123.100.000,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD															21.100.000,00
		<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)</i>	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	47.00												21.100.000,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD															20.000.000,00
		<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)</i>	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	47.00												20.000.000,00

5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	47.00	79.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				47.00	110.820.000,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	47.00	79.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				47.00	105.680.000,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	4.00	263.898.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4.00	398.500.000,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)	4.00	111.683.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3	228.650.000,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				30.375.000,00						111.000.000,00

					2.00		<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)</i>	<i>(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)</i>												4	111.000.000,00
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)</i>	<i>(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	4	900.000,00														2.00	3.000.000,00
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)</i>	<i>(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	1.00	900.000,00														2	3.000.000,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		<i>Jumlah layanan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terlaksana (Kegiatan)</i>	<i>(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	9	38.154.665.652,00														9	44.877.283.759,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)</i>	<i>(BKAD, KAB. GUNUNGGIDUL)</i>	24	620.000,00														24	25.000.000,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					68.661.400,00															109.453.000,00

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)</i>	<i>(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	19		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			31	109.453.000,00
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah (Dokumen)</i>	<i>(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	3	500.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	3,00	13.000.000,00
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)</i>	<i>(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)</i>	64	27.743.500,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	64	33.915.000,00
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					38.048.985.852,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi		44.659.102.759,00

	44.659.102.759,00	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	12	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PRK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PRK) (Laporan)	Koordiansi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.02.02.2.02.0008
	3.500.000,00		3.500.000,00								
	3.500.000,00	13		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.02.02.2.02.0009
	21.054.000,00		21.054.000,00								
	21.054.000,00	32		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5.02.02.2.02.0010
	9.500.000,00		9.500.000,00								
	9.500.000,00										

					33	(BKAD, KAB GUNUNGKIDUL)	<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)</i>									20	9.500.000,00
5.02.02.2.02.0011			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		49	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)</i>		800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			49	2.759.000,00
5.02.02.2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		5	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	<i>Jumlah layanan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang terlaksana (Kegiatan)</i>		310.196.000,00				Reformasi Birokrasi		5	647.075.000,00	
5.02.02.2.03.0002			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		24	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)</i>		60.305.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi		24	126.600.000,00	
5.02.02.2.03.0004			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		3	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)</i>		23.850.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi		96.00	55.470.000,00	

5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	2	212.841.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	302.100.000,00
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	5.050.000,00				44.505.000,00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	126	8.150.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	118.400.000,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			314.082.632.500,00				-

			Jumlah penyuluran bantuan keuangan yang terfasilitasi (Kegiatan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	2						2	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyuluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyuluran Bantuan Keuangan (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	2.00		311.082.632.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	2		3.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12.00	
3.	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap Dan Persediaan Yang Dilaporkan Ke Neraca (%)		100		374.365.000,00						1.173.741.000,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah tajaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	13		374.365.000,00					13	1.173.741.000,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	2		14.208.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi		2	63.130.000,00
												63.130.000,00

5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGADUDU)	1	28.006.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	1	35.740.000,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGGADUDU)	4	52.185.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	4	52.671.000,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGGADUDU)	2	93.427.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	2	171.500.000,00
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGGADUDU)	1	53.074.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	1	145.000.000,00

5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	3	23.174.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	3	350.000.000,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	15.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	1	80.000.000,00
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	56.028.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	1	75.000.000,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	10	9.975.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	10	34.700.000,00

5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	4	16.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	85.000.000,00
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	2	9.555.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	45.000.000,00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	151	2.632.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	36.000.000,00
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Target Obyek Dan Subyek Pajak (%) Persentase Capaian Target Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Yang Dikelola (%)		100 100	2.035.617.200,00			Reformasi Birokrasi	4.416.795.000,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.035.617.200,00				4.416.795.000,00

5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah tagihan pengelolaan Pendapatan Daerah terlaksana (Kegiatan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	9	10.800.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	21.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.000.000,00
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1	50.000.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	275.000.000,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275.000.000,00
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	144	247.339.900,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	355.795.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	144		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			355.795.000,00
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	12	147.160.900,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	650.000.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			650.000.000,00

5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	12000	23.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	12000	90.000.000,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	2	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2	60.000.000,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	12	1.460.077.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	12	2.800.000.000,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	12	7.116.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	12	65.000.000,00

5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	(BKAD, KAB. GUNUNGKIDUL)	12	81.282.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	12	100.000.000,00
									100.000.000,00
		J U M L A H			364.026.403.456,80				63.251.394.759,00

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Oleh sebab itu Rencana Kerja Badan Keuangan, dan Aset Daerah disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2024 s/d tahun 2025 serta sumber dana kegiatan.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Badan Keuangan, dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun menurut tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang merupakan penjabaran visi misi kepala daerah. Rencana Kerja Badan Keuangan, dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

5.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan, dan Aset Daerah Tahun 2024 telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing sub bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,

Plt.BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

SUJARWO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, penyebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diubah menjadi Perangkat Daerah (PD), sehingga Rencana Kerja SKPD selanjutnya akan disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renja PD merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Renja PD merupakan perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Renja PD merupakan instrumen penting bagi PD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja PD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap penahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing PD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Selanjutnya, dokumen rancangan Renja PD yang telah didiskusikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum PD. Forum PD membahas rancangan Renja PD melalui penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kapanewon, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran, dan penyesuaian pendanaan program, dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja PD, yang difasilitasi oleh PD terkait.

Rancangan Renja PD hasil Forum PD menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD. Penetapan rancangan akhir RKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya RKPD ini menjadi acuan penyempurnaan Renja PD. Renja PD akan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan, dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran APBD.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026, oleh karena itu dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024 harus berpedoman pada visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026 sesuai tema dan prioritas perencanaan tahun 2024. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 juga disusun berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Bappeda mempunyai fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Dengan berpedoman pada visi dan misi kepala daerah baru, Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 mendukung misi 1, yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis, serta mendukung prioritas daerah tahun 2024 yaitu Reformasi Birokrasi. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 mendukung sasaran daerah 1, yaitu Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran prioritas pembangunan daerah yang harus dilaksanakan Bappeda pada tahun 2024. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 juga merupakan kompilasi program kegiatan prioritas hasil Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang terangkum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai pedoman dalam menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2024 dan proses awal penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Capaian Renstra Bappeda
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4. *Review* terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA
- BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Capaian Renstra Bappeda

Tahun 2022 merupakan tahun pertama periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Menurut Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 terdapat 6 program, 17 kegiatan dan 50 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp9.099.543.284,00. Namun berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.00/001/2022, Bappeda mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp8.682.967.824,00 untuk melaksanakan 6 program, 17 kegiatan dan 50 sub kegiatan.

Pada awal tahun 2022 ini masih terjadi dampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Penyebaran Covid-19 masih berdampak pada berbagai aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini, diantaranya adalah *refocusing* anggaran pada beberapa kegiatan.

Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2022 antara lain :

1. Masih adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan koordinasi dan pertemuan pada awal tahun banyak dilakukan secara *daring*;
2. Sarana prasarana dan fasilitas perkantoran yang belum cukup memadai untuk mendukung metode kerja yang baru;
3. Adanya semangat, motivasi kerja dan budaya kerja yang tinggi di internal Bappeda;
4. Komitmen PD mitra dan para pemangku kepentingan yang cukup baik untuk mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
5. Komitmen kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi serta lembaga lainnya yang semakin baik.

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2022 di atas, upaya yang perlu dilakukan agar capaian target kinerja tahun 2022 tetap optimal diantaranya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga dapat menunjang capaian kinerja. Selain itu, pengendalian internal juga perlu dilaksanakan secara berkala dalam rangka menjamin capaian kinerja yang optimal.

Perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022, Bappeda mendapatkan alokasi belanja operasi sebesar Rp8.516.163.673,00 dan belanja modal sebesar Rp1.382.026.000,00 untuk melaksanakan 6 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut, belanja operasi dan belanja modal sampai dengan Bulan September 2022 dapat direalisasikan masing-masing sebesar Rp7.981.917.107 (93,73%) dan Rp1.378.131.862,00 (99,72%).

Berdasarkan capaian kinerja keuangan masing-masing kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, hampir semua kegiatan men-

capai lebih dari 90%. Ada tiga kegiatan yang capaiannya kurang dari 90%, Kegiatan pertama adalah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian keuangan sebesar 33,22%. Hal ini dikarenakan Bimbingan Teknis/Diklat tidak dapat terealisasikan karena tidak ada undangan Bimbingan Teknis/Diklat yang didanai oleh Perangkat Daerah yang mengirimkan pesertanya. Kegiatan kedua Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja keuangan sebesar 81,50%, dikarenakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak terserap secara maksimal karena terbatasnya undangan koordinasi luar daerah. Kegiatan ketiga adalah Penataan Organisasi dikarenakan anggaran rapat tidak bisa terserap, untuk koordinasi dilakukan melalui daring.

Namun demikian, rata-rata capaian realisasi kinerja output dari seluruh program dan kegiatan sampai akhir tahun 2022 adalah 99,28%

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Bappeda Tahun 2022 dan perkiraan realisasi capaian tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik	100 persen	n/a	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
1.03.13.2.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen kajian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang tersusun	7 dokumen	n/a	2 dokumen	4 dokumen	200%	1 dokumen	5 dokumen	71%
			100 persen	n/a	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
1.03.13.2.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Masterplan pengembangan kawasan wisata minat khusus di Kapatewon Rongkop	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	100%
			1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	100%
			4 dokumen	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	25%
4	UNSLUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian program keistimewaan	100 persen	n/a	n/a n/a	n/a	n/a	100 persen	100 persen	100%
4.01.04.2.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Perencanaan dan Tata Ruang	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	2 jenis	n/a	n/a n/a	n/a	n/a	0 jenis	0 jenis	0%
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	100 persen	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	100 persen	100 persen	100%
4.01.04.2.05.01	Penyusunan Rencana Program Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun	4 dokumen	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	25%
4.01.04.2.05.03	Penyusunan Rencana Program Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	4 dokumen	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1											
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	3 Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	4 2 jenis	5 n/a	6 2 jenis	7 2 jenis	8=7/6 100.00%	9 2 jenis	10 2 jenis	11=(10/4) 100%	
		Persentase kesesuaian program keistimewaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 persen	n/a	100 persen	97,41 persen	97,41%	100 persen	98,71 persen	98,71%	
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%	
		Jumlah Rencana Program Keistimewaan Tahun n	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%	
		Jumlah Rencana Program Keistimewaan Tahun n+1	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%	
		Jumlah Rencana Program Keistimewaan Tahun n+2	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%	
		Jumlah Program Keistimewaan yang Disusun	12 dokumen	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	3 dokumen	3 dokumen	25%	
4.01.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY		1 laporan	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	n/a/n/a	1 laporan	100%	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dana keistimewaan akhir tahun	2 laporan	n/a	2 laporan	2 laporan	100%	n/a/n/a	2 laporan	100%	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dana keistimewaan per tahapan	4 laporan	n/a	4 laporan	4 laporan	100%	n/a/n/a	4 laporan	100%	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	28 laporan	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	7 laporan	7 laporan	25%	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01	PERENCANAAN										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 persen	n/a	100 persen	97,39 persen	97,39%	100 persen	50,49 persen	50%	
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	15 jenis	n/a	12 jenis	12 jenis	100,00%	15 jenis	15 jenis	100%	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	n/a	100 persen	100 persen	100%	100 persen	50,50 persen	51%	
		Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	n/a	n/a n/a	1 kali	100%	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen Perubahan Renja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen Profil PD	1 dokumen	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	3 dokumen	4 dokumen	19%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	100%	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4 dokumen	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
1				5							
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	4	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4	n/a	n/a n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	25%	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DFA	1	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen ROPK	1	1 dokumen	0 dokumen	n/a	n/a n/a	0 dokumen	0 dokumen	0%	
		Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA- SKPD	8	n/a	n/a n/a	n/a	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	25%	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DFA Perubahan	1	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		Jumlah Perubahan Perjanjian Kinerja	1	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA- SKPD	8	n/a	n/a n/a	n/a	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	25%	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	
5.01.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan e Money)	4	4 laporan	4 laporan	100%	n/a n/a	4 laporan	4 laporan	100%	
		Jumlah Laporan TEPPA	12	12 laporan	12 laporan	100%	n/a n/a	12 laporan	12 laporan	100%	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	n/a	n/a n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	4 laporan	25%	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun	14	14 dokumen	14 dokumen	100%	n/a n/a	14 dokumen	14 dokumen	100%	
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	n/a	100 persen	100%	n/a n/a	100 persen	50.50 persen	51%	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	14	n/a	14 bulan	100%	n/a n/a	14 bulan	14 bulan	100%	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840	n/a	n/a n/a	n/a	700 orang/bulan	700 orang/bulan	700 orang/bulan	83%	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1 laporan	1 laporan	100%	n/a n/a	1 laporan	1 laporan	100%	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	n/a	n/a n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	1 laporan	25%	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	12	12 dokumen	12 dokumen	100%	n/a n/a	12 dokumen	12 dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	52	n/a	n/a n/a	n/a	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10	11=(10/4)
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	60 ASN	53 ASN	48 ASN	48 ASN	48 ASN	48 ASN	48 ASN	100.00%	98 ASN	48 ASN	80%
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	n/a	92.31 persen	100 persen	92.31 persen	100 persen	100 persen	92.31%	100 persen	50.46 persen	50%
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang Tertangani	53 ASN	51 ASN	48 ASN	48 ASN	48 ASN	n/a n/a	48 ASN	100.00%	n/a n/a	48 ASN	90.57%
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 dokumen	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	4 dokumen	n/a	4 dokumen	4 dokumen	25.00%
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat	4 orang	n/a	2 orang	0 orang	0 orang	0%	n/a n/a	0%	n/a n/a	4 orang	100%
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	7 orang	n/a	7 orang	4 orang	25%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan	100%	7 layanan	100%	7 layanan	7 layanan	100%
		Persentase Administrasi Umum terlayani	100 persen	n/a	99.6 persen	100 persen	99.6 persen	100%	100 persen	100%	100 persen	50.50 persen	50%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik tersedia	18 jenis	17 jenis	18 jenis	18 jenis	18 jenis	100%	18 jenis	100%	n/a n/a	25 jenis	139%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	12 paket	n/a	12 paket	12 paket	100%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	50 unit	47 jenis	50 jenis	50 jenis	50 jenis	100%	50 jenis	100%	n/a n/a	50 jenis	100%
		Jumlah Pengadaan Computer/ PC	6 unit	n/a	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	100%	n/a n/a	6 unit	100%
		Jumlah Pengadaan Printer	6 unit	n/a	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	100%	n/a n/a	6 unit	100%
		Jumlah Pengadaan Notebook/ Laptop	6 unit	n/a	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	100%	n/a n/a	6 unit	100%
		Jumlah Pengadaan UPS/ Stabilizer	6 unit	n/a	6 unit	6 unit	6 unit	n/a	6 unit	n/a	n/a n/a	6 unit	100%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	12 paket	n/a	12 paket	12 paket	100%
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	11 jenis	100%	n/a n/a	11 jenis	100%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	12 paket	n/a	12 paket	12 paket	100%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	4 jenis	5 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	100%	n/a n/a	4 jenis	100%
		Jumlah Fotocopy	28000 lembar	28000 lembar	28000 lembar	28000 lembar	28000 lembar	54%	15000 lembar	54%	n/a n/a	15000 lembar	54%
		Jumlah Penjiwaan	90 buah	100 buah	90 buah	90 buah	90 buah	89%	80 buah	89%	n/a n/a	80 buah	89%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	5 paket	n/a	5 paket	5 paket	100%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tagihan Surat Kabar dibayar (2 rekening X 12 bulan)	24 bulan	24 bulan	24 bulan	24 bulan	24 bulan	100%	24 bulan	100%	n/a n/a	24 bulan	100%
		Jumlah Dokumen	2808 Dokumen	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	702 dokumen	n/a	702 dokumen	702 dokumen	25%
		Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	100 orang	n/a	100 orang	100 orang	100 orang	90%	90 orang	90%	n/a n/a	90 orang	90%
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia Untuk Tamu	250 orang	n/a	250 orang	250 orang	250 orang	100%	250 orang	100%	n/a n/a	250 orang	100%
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu	80 laporan	n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a	10 laporan	n/a	10 laporan	20 laporan	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					5	6	7	9	10	11=(10/4)	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Frekuensi Konsultasi dan Koordinasi dalam DIY	4 120 OH	23	23	80 OH	25 OH	120 OH	25 OH	21%	
					16	25 OH	36 OH	42 OH	36 OH	13%	
					n/a	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	
					n/a	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	100%	
					n/a	n/a n/a	n/a n/a	55 laporan	18 laporan	25%	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	4 layanan	0 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	1 layanan	1 layanan	25%	
					n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8 unit 16 unit	8 unit 16 unit	n/a n/a	6 unit 5 unit	6 unit 5 unit	6 unit 5 unit	n/a n/a n/a n/a	6 unit 5 unit	75% 31%	
					n/a	n/a n/a	n/a n/a	0 unit	0 unit	0%	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit 1 unit	3 unit 1 unit	n/a n/a	2 unit 1 unit	2 unit 1 unit	2 unit 1 unit	n/a n/a n/a n/a	2 unit 1 unit	67% 100%	
					n/a	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	
					n/a	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	
					n/a	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	
					n/a	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	
					n/a	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	
					n/a	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	
					n/a	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	
					n/a	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17 unit 2 unit	17 unit 2 unit	n/a n/a	n/a n/a 2 unit	n/a n/a 2 unit	n/a n/a 2 unit	n/a 2 unit	8 unit 2 unit	47% 100%	
					n/a	2 unit	2 unit	100%	2 unit	100%	
					n/a	n/a n/a	n/a n/a	0 unit	0 unit	0%	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 layanan Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100%	
					100 persen	100 persen	91,84 persen	100 persen	100 persen	100%	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 buah 16 laporan	60 buah 16 laporan	60 buah n/a	60 buah n/a n/a	60 buah n/a n/a	50 buah n/a n/a	n/a n/a 4 laporan	60 buah 4 laporan	100% 25%	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan 36 bulan	12 bulan 36 bulan	12 bulan 36 bulan	12 bulan 36 bulan	12 bulan 36 bulan	12 bulan 36 bulan	n/a n/a n/a n/a	12 bulan 36 bulan	100% 100%	
					24 bulan	24 bulan	24 bulan	n/a n/a	24 bulan	100%	
					n/a	n/a n/a	n/a n/a	72 laporan	72 laporan	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)				
1											
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	4	5	6	7	9	10	11=(10/4)		
	Jasa Kebersihan Kantor Dibayar	3 termin	3 termin	3 termin	3 termin	3 termin	n/a n/a	3 termin	3 termin	100%	100%
	Jumlah tagihan sampah dibayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	n/a n/a	12 bulan	12 bulan	83%	100%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 laporan	n/a	n/a	n/a n/a	n/a n/a	8 laporan	8 laporan	8 laporan	n/a	29%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 layanan	5 layanan	100 persen	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	100%	100%
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	93.6 persen	100 persen	96.80 persen	96.80 persen	94%	97%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	n/a n/a	7 unit	7 unit	100%	100%
	Jumlah Mobil Dinas yang Dipelihara	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	n/a n/a	7 unit	7 unit	100%	100%
	Jumlah Mobil Dinas yang Terbayar	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	n/a n/a	7 unit	7 unit	100%	100%
	Jumlah Motor Dinas yang Dipelihara	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	14 unit	n/a n/a	18 unit	18 unit	78%	100%
	Jumlah Motor Dinas yang Terbayar	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	n/a n/a	18 unit	18 unit	100%	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	325 unit	325 unit	n/a	n/a n/a	n/a n/a	350 unit	350 unit	350 unit	n/a	108%
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	n/a n/a	20 unit	20 unit	100.0%	100%
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	20 unit	20 unit	n/a n/a	n/a n/a	50 unit	50 unit	50 unit	n/a	250%
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit	20 unit	12 unit	15 unit	n/a n/a	12 unit	12 unit	125.0%	100%
	Jumlah Komputer/Notebook Terfasilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	n/a n/a	5 unit	5 unit	100.0%	100%
	Jumlah Mesin Ketik Terfasilitasi	7 unit	7 unit	10 unit	7 unit	7 unit	n/a n/a	7 unit	7 unit	100.0%	100%
	Jumlah Printer Terfasilitasi	1 unit	1 unit	n/a	1 unit	1 unit	n/a n/a	1 unit	1 unit	n/a	100%
	Jumlah Genset Terfasilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	n/a n/a	2 unit	2 unit	100%	100%
	Jumlah Tabung APAR Terfasilitasi	31 unit	31 unit	n/a	n/a n/a	n/a n/a	25 unit	25 unit	25 unit	n/a	81%
	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	n/a n/a	3 unit	3 unit	100%	100%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	n/a	n/a n/a	n/a n/a	1 unit	1 unit	1 unit	n/a	100%
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	15 unit	15 unit	14 unit	15 unit	15 unit	n/a n/a	15 unit	15 unit	100%	100%
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 rekening	1 rekening	n/a	1 rekening	1 rekening	n/a n/a	1 rekening	1 rekening	n/a	100%
	Jumlah tambah daya listrik	2 unit	2 unit	n/a	1 unit	1 unit	n/a n/a	2 unit	2 unit	n/a	100%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	3 jenis	3 jenis	n/a	3 jenis	3 jenis	n/a n/a	3 jenis	3 jenis	100%	100%
5.01.01.2.13	Penataan Organisasi	82.5 skor	82.5 skor	n/a	80.50 skor	82.78 skor	n/a n/a	80.50 skor	80.50 skor	103%	98%
	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Bappeda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	n/a n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
5.01.01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	n/a n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
	Jumlah Dokumen RTP/SP/MP	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	n/a n/a	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%
	Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100 persen	n/a	100 persen	100.8 persen	101%	100 persen	100 persen	100%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	4 jenis	n/a	5 jenis	5 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
		Persentase kesesuaian program dalam : 1. RKPD terhadap RPJMD 2. APBD terhadap RKPDP	100 persen	n/a	100 persen	99.1 persen	99%	100 persen	99.55 persen	100%
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan potensi dan permasalahan daerah	3 kesepakatan	2 kesepakatan	3 kesepakatan	3 kesepakatan	100%	n/a/n/a	3 kesepakatan	100%
		Jumlah pendamping SID yang terlatih	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	100%	n/a/n/a	19 orang	100%
		Jumlah pengembangan aplikasi SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH	2 aplikasi	n/a	2 aplikasi	2 aplikasi	100%	n/a/n/a	2 aplikasi	100%
		Jumlah SDM Kecamatan dan OPD yang paham mengenai SIKAB GUMREGAH	54 orang	n/a	54 orang	54 orang	100%	n/a/n/a	54 orang	100%
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Usulan DAK	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Usulan PIWK	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	8 dokumen	n/a	n/a/n/a	n/a/n/a	n/a	2 dokumen	2 dokumen	25%
5.01.02.2.01.05	Peaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan dalam Musrenbang RRPDP	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%	n/a/n/a	1 kesepakatan	100%
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	n/a	n/a/n/a	n/a/n/a	n/a	1 Berita Acara	1 Berita Acara	25%
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kompilasi Dokumen DURP Tahun 2023 Hasil Musrenbang Kecamatan	1 dokumen	1 kesepakatan	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	72 Usulan	n/a	n/a/n/a	n/a/n/a	n/a	18 Usulan	18 Usulan	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1										
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		4 1 dokumen	5 1 dokumen	6 1 dokumen	7 1 dokumen	8-7/6 100%	9 n/a/n/a	10 1 dokumen	11-10/4 100%
		Jumlah Dokumen Rancangan RKPDP Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Rancangan RKPDP Tahun n+1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen RKPDP Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen RKPDP Tahun n+1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen RKPDP Tahun n+1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah kesepakatan koordinasi perencanaan daerah	4 kesepakatan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	100%	n/a/n/a	4 modul aplikasi	100%
		Jumlah Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 kesepakatan	2 kesepakatan	2 kesepakatan	2 kesepakatan	100%	n/a/n/a	2 kesepakatan	100%
		Jumlah Kastemisasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Diteapkan (RPUJ/RP/MD/RKPD)	2 modul aplikasi 13 dokumen	n/a n/a	1 modul aplikasi n/a/n/a	1 modul aplikasi n/a/n/a	100% n/a	n/a/n/a	2 modul aplikasi 10 dokumen	100% 77%
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		2 jenis	n/a	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
		Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100.00 persen	100%
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Buku informasi pembangunan daerah Kab. Gunungkidul	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Buku informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Gunungkidul	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah kesepakatan koordinasi Forum Data SDI Kab. Gunungkidul	2 kesepakatan	n/a	2 kesepakatan	2 kesepakatan	100%	n/a/n/a	2 kesepakatan	100%
		Jumlah kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan	2 kesepakatan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	50%	n/a/n/a	2 kesepakatan	100%
		Jumlah pembuatan video profil	1 video	n/a	1 video	1 video	100%	n/a/n/a	1 video	100%
		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 masukan	n/a	n/a/n/a	n/a/n/a	n/a	4 masukan	4 masukan	80%
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil/Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		8 buku	n/a	n/a/n/a	n/a/n/a	n/a	2 buku	2 buku	25%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		2 jenis	n/a	6 jenis	6 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
		Persentase capaian program pendukung sasaran pembangunan daerah	100 persen	n/a	100 persen	105 persen	105%	100 persen	100.00 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen pelaporan Bantuan Keuangan Pemerintah DIY	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	n/a/n/a	4 laporan	100%	n/a/n/a	4 laporan	100%
		Jumlah dokumen pelaporan capaian SDGs	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	n/a/n/a	2 laporan	100%	n/a/n/a	2 laporan	100%
		Jumlah Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	n/a/n/a	4 laporan	100%	n/a/n/a	4 laporan	100%
		Jumlah Dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional HAM	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	n/a/n/a	3 laporan	100%	n/a/n/a	3 laporan	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	52 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a/n/a	n/a	13 laporan	13 laporan	25%
5.01.02.2.03.01	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi hasil/ capaian target RPJMD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen evaluasi hasil RKPD dan RKPD Perubahan	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	100%	n/a/n/a	4 dokumen	100%	n/a/n/a	4 dokumen	100%
		Jumlah kasmisasi aplikasi SIPANDA	1 modul aplikasi	n/a	n/a	n/a	100%	n/a/n/a	1 modul aplikasi	100%	n/a/n/a	1 modul aplikasi	100%
		Jumlah kesepakatan dalam rangka pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan hasil capaian target RPJMD	4 kesepakatan	n/a	n/a	n/a	100%	n/a/n/a	4 kesepakatan	100%	n/a/n/a	4 kesepakatan	100%
		Jumlah perwakilan OPD yang memperoleh Bimtek SIPANDA	47 OPD	n/a	n/a	n/a	#DIV/0!	0 OPD	0 OPD	n/a/n/a	n/a/n/a	47 OPD	100%
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	36 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a/n/a	n/a/n/a	n/a	9 laporan	9 laporan	25%
5.01.02	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian program sektoral	100 persen	n/a	n/a	n/a	100%	100 persen	99,84 persen	100%	100 persen	99,92 persen	100%
5.01.03.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	3 jenis	n/a	n/a	n/a	100%	14 kesepakatan	14 kesepakatan	100%	3 jenis	3 jenis	100%
		Persentase Kesesuaian Program Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 persen	n/a	n/a	n/a	100%	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100,00 persen	100%
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Raperub Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a/n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Kesepakatan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 kesepakatan	6 kesepakatan	6 kesepakatan	6 kesepakatan	100%	6 kesepakatan	6 kesepakatan	100%	n/a/n/a	6 kesepakatan	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a/n/a	n/a/n/a	n/a	3 dokumen	3 dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	n/a n/a	n/a n/a	10	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	100%	n/a n/a	4 kesepakatan	100%	
		Jumlah Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	100%	100%	n/a n/a	4 kesepakatan	100%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 dokumen	n/a	n/a n/a	n/a	n/a	4 dokumen	4 dokumen	20%	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	20 laporan	n/a	n/a n/a	n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	20%	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan yang disusun	3 jenis	n/a	10 kesepakatan	10 kesepakatan	100%	3 jenis	3 jenis	100%	
		Persentase Kesesuaian Program Bidang Perencanaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 persen		100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Mijahan	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	100%	
		Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan industri, perdagangan, dan koperasi	3 kesepakatan	4 kesepakatan	3 kesepakatan	3 kesepakatan	100%	n/a n/a	3 kesepakatan	100%	
		Jumlah Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Penanaman Modal	4 kesepakatan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	100%	100%	n/a n/a	4 kesepakatan	100%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan)	28 dokumen	n/a	n/a n/a	n/a	n/a	6 dokumen	6 dokumen	21%	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	24 laporan	n/a	n/a n/a	n/a	n/a	5 laporan	5 laporan	21%	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a n/a	1 dokumen	100%	
		Jumlah Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan	3 kesepakatan	4 kesepakatan	3 kesepakatan	3 kesepakatan	100%	n/a n/a	3 kesepakatan	100%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28 dokumen	n/a	n/a n/a	n/a	n/a	5 dokumen	5 dokumen	18%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	3 jenis	n/a	26 kesepakatan	26 kesepakatan	100%	3 jenis	3 jenis	100%
		Persentase Kesesuaian Program Bidang Fisik dan Prasarana dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 persen		100 persen	99.53 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Review Rencana Aksi Daerah, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a n/a n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Review RISPAM	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a n/a n/a	1 dokumen	100%
		Jumlah kesepakatan perencanaan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman	2 kesepakatan	n/a	2 kesepakatan	1 kesepakatan	n/a	n/a n/a n/a	2 kesepakatan	100%
		Jumlah kesepakatan perencanaan panitia kemitraan	6 kesepakatan	n/a	6 kesepakatan	6 kesepakatan	n/a	n/a n/a n/a	6 kesepakatan	100%
		Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan pekerjaan umum	8 kesepakatan	10 kesepakatan	8 kesepakatan	8 kesepakatan	100%	n/a n/a n/a	8 kesepakatan	100%
		Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman	4 kesepakatan	6 kesepakatan	4 kesepakatan	4 kesepakatan	100%	n/a n/a n/a	4 kesepakatan	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26 dokumen	n/a	n/a n/a n/a	n/a n/a n/a	n/a	6 dokumen	6 dokumen	23%
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sikronisasi Renstra/Renja dengan RRPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	24 laporan	n/a	n/a n/a n/a	n/a n/a n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	17%
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Tata Ruang	6 kesepakatan	6 kesepakatan	6 kesepakatan	6 kesepakatan	100%	n/a n/a n/a	6 kesepakatan	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 dokumen	n/a	n/a n/a n/a	n/a n/a n/a	n/a	2 dokumen	2 dokumen	17%
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang diindaklanjuti	88.89 persen	n/a	50 persen	50 persen	100%	75 persen	50 persen	56%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah kelibangan yang terlaksana	14 buah	n/a	4 buah	4 buah	100%	3 jenis	3 jenis	21%
		Persentase implementasi rencana kelibangan	100 persen	n/a	11.11 persen	11.11 persen	100%	27.78 persen	11.11 persen	11.11%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program / Kegiatan (Rencana Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Rensstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10	11=(10/4)
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Fasilitas Kerja Sama Penelitian	2 penelitian	12 penelitian	2 penelitian	2 penelitian	100%	n/a/n/a	2 penelitian	100%
		Jumlah Forum Jaringan Penelitian	4 kali	n/a	1 kali	1 kali	100%	n/a/n/a	1 kali	25%
		Jumlah OPD Yang Mendapat Pendampingan Inovasi Daerah (Klik Si Indah)	47/OPD	n/a	47/OPD	47/OPD	100%	n/a/n/a	47/OPD	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi dan Inovasi	8 dokumen	n/a	n/a/n/a	n/a/n/a	n/a	3 dokumen	3 dokumen	38%
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Pelaksanaan Forum Pengembangan Inovasi Daerah	4 kali	1	1 kali	1 kali	100%	n/a/n/a	1 kali	25%
		Jumlah Pemberian Penghargaan lomba Karya Ilmiah, Penelitian dan Inovasi Daerah	2 kategori	4 kategori	2 kategori	2 kategori	100%	n/a/n/a	2 kategori	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	8 laporan	n/a	n/a/n/a	n/a/n/a	n/a	2 laporan	2 laporan	25%
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah Desiminasi/seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan daerah dilaksanakan	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	n/a/n/a	1 kali	50%
		Jumlah Lokakarya Pengembangan inovasi daerah dilaksanakan	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	n/a/n/a	1 kali	50%
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	10 laporan	n/a	n/a/n/a	n/a/n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	10%

Faktor – faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain yaitu:

1. Perencanaan

Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dapat dirumuskan beberapa permasalahannya yaitu:

- a. Perubahan regulasi yang cepat berdampak pada perubahan dokumen perencanaan;
- b. Penentuan rumus penghitungan capaian fisik/ kinerja belum mencerminkan sebuah outcome baik pada kegiatan maupun program;
- c. Berkurangnya pendanaan non APBD untuk anggaran kegiatan OPD terkait; dan
- d. Profesionalisme dan kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan.

2. Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indeks inovasi daerah dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

- a. Belum optimalnya dukungan perangkat daerah dan peran masyarakat;
- b. Belum adanya budaya berinovasi dalam diri ASN;
- c. Belum lengkapnya regulasi pendukung pengembangan inovasi daerah; dan
- d. Adanya perubahan parameter kategori penilaian dari Kementerian Dalam Negeri sehingga indeks inovasi daerah belum optimal.

Dengan adanya beberapa permasalahan diatas maka perlu kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, namun secara umum tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian sasaran daerah maupun sasaran PD. Beberapa kebijakan/ tindakan antara lain;

1. Penerapan nomenklatur baru serta aplikasi terintegrasi untuk perencanaan dan penganggaran;
2. Koordinasi secara intensif dengan Pemda DIY dan Kementrian agar tetap ada alokasi Dana Keistimewaan dan DAK Fisik/ Non Fisik untuk OPD terkait (Perlu pencermatan kembali terhadap rumus penghitungan capaian kinerja yang sudah ditetapkan);
3. Perlu adanya diklat dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Perangkat Daerah; dan
4. Perlu adanya Perbup yang mengatur bahwa ASN/ OPD wajib berinovasi minimal satu OPD, Kapanewon satu inovasi setiap tahunnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten gunungkidul tahun 2021-2026, visi Kepala Daerah adalah *Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026*. Misi yang ditetapkan untuk mendukung visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis; dan
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Dari 2 (dua) misi daerah dijabarkan kedalam 7 sasaran daerah yang akan dicapai selama periode 2021-2026, yaitu;

1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat;
2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat;
3. Derajat kualitas SDM meningkat;
4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun;
5. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat;
6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan;
7. Nilai investasi meningkat.

Pada misi pertama telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis, dengan 2 sasaran daerah yaitu;

1. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan;
2. Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkatkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Bappeda mendukung pencapaian dan pelaksanaan misi pertama, yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Dinamis, serta sasaran daerah pertama, yaitu Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan dengan indikator Sasaran Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan hal tersebut, dalam Perubahan RENSTRA Bappeda Tahun 2021-2026, tujuan perangkat daerah yang akan dicapai pada jangka waktu 5 tahun, yaitu *Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel serta inovasi daerah yang berkualitas*, dengan indikator tujuan yakni:

1. Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan; dan
2. Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026.

Dari 2 tujuan Perangkat Daerah tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Dari 2 tujuan tersebut dirumuskan tiga Sasaran Perangkat Daerah, yaitu:

1. Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatnya implementasi inovasi daerah; dan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda.

Sasaran 1, yaitu kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, menggambarkan bahwa tugas Bappeda adalah memastikan keselarasan dokumen perencanaan antar PD dan antar waktu. Sasaran ini akan memastikan bahwa jumlah program yang disusun dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD dan APBD selalu sama untuk setiap tahun perencanaan. Selain itu, konsistensi capaian terhadap target program pendukung sasaran daerah juga menjadi salah satu perhitungan dalam indikator sasaran 1.

Sasaran 2, yaitu meningkatnya implementasi inovasi daerah, menggambarkan nilai indeks inovasi daerah hasil penilaian Kemendagri. Sasaran ini merupakan perwujudan dari kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, yang mengamanahkan implementasi inovasi dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.

Sasaran 3, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda, menggambarkan nilai AKIP Bappeda yang diukur dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja.

Sasaran strategis tersebut kemudian dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda. IKU Bappeda telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 361/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk mendukung capaian IKU, ditetapkan program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda beserta indikator kerjanya. Indikator Kinerja Program Bappeda ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Nomor 002/2022 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja Pelayanan Bappeda terhadap Perubahan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Pada tahun 2023 diharapkan realisasi capaian indikator kinerja pelayanan Bappeda baik target IKU maupun IKP dapat tercapai sesuai

dengan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026.

Semula pengisian indeks inovasi daerah Kemendagri yang kita ikuti mulai 2018-2020 dengan skor dan kategori sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai Inovasi	Kategori
1.	2018	490	Kurang Inovatif
2.	2019	4810	Sangat Inovatif
3.	2020	3717	Sangat Inovatif

Penilaian Kemendagri tersebut menggunakan parameter:

Skor dan Predikat	
0	= Belum Mengisi Data
1-500	= Kurang Inovatif
501-1000	= Inovatif
>1001	= Terinovatif

Nilai inovasi tersebut diatas yang digunakan untuk acuan penyusunan target inovasi daerah, namun pelaksanaan penilaian inovasi tahun 2021 Kemendagri merubah parameter isian serta skor dan kategori menjadi:

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:

- 1) 3 Variabel;
- 2) 15 Indikator; dan
- 3) Jumlah Skor Maksimal Satuan Perangkat Daerah (SPD) senilai 63 (25,20%).

- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:

- 1) 5 Variabel;
- 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan
- 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2022:

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01-100,00
Inovatif	35,00 - 60,00
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Dengan adanya perbedaan parameter yang semula tahun 2018-2020 untuk terinovatif tidak ada batasannya (>1001) sedangkan mulai tahun 2021 ada batasan rentang skor nilai inovasi daerah untuk sangat inovatif (60,01-100,00) sehingga pada tahun 2021-2022 ini skor indeks inovasi daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan perubahan pelaksanaan penilaian tahun 2021 Kemendagri adalah :

No	Tahun	Nilai Inovasi	Kategori
1.	2021	54,24	Inovatif
2.	2022	55,96	Inovatif

Target dan proyeksi capaian kinerja Pelayanan Bappeda terhadap Perubahan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam: 1. RKPD terhadap RPJMD; 2. APBD terhadap RKPD; 3. Renja PD terhadap Renstra PD; 4. APBD terhadap Renja PD	persen	100	n/a	n/a	n/a	102.97	n/a	n/a	n/a	IKU
2	Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	n/a	100	100	100	n/a	99.51	100	100	IKU
3	Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	kebijakan	12	n/a	n/a	n/a	12	n/a	n/a	n/a	IKU
4	Meningkatnya implementasi inovasi daerah Indeks Inovasi Daerah	indeks	n/a	3837	3977	4177	n/a	55.96	3977	4177	IKU
5	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam: 1. Renja PD terhadap RKPD; 2. Renstra PD terhadap RPJMD	persen	100	n/a	n/a	n/a	100.00	n/a	n/a	n/a	IKP
6	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan)	persen	100	n/a	n/a	n/a	100.00	n/a	n/a	n/a	IKP
7	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	skor	80	n/a	n/a	n/a	82.61	n/a	n/a	n/a	IKP
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Nilai AKIP Bappeda	skor	n/a	A 85,66	A 86,54	A 86,97	n/a	A (86,35)	A 86,54	A 86,97	IKP

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

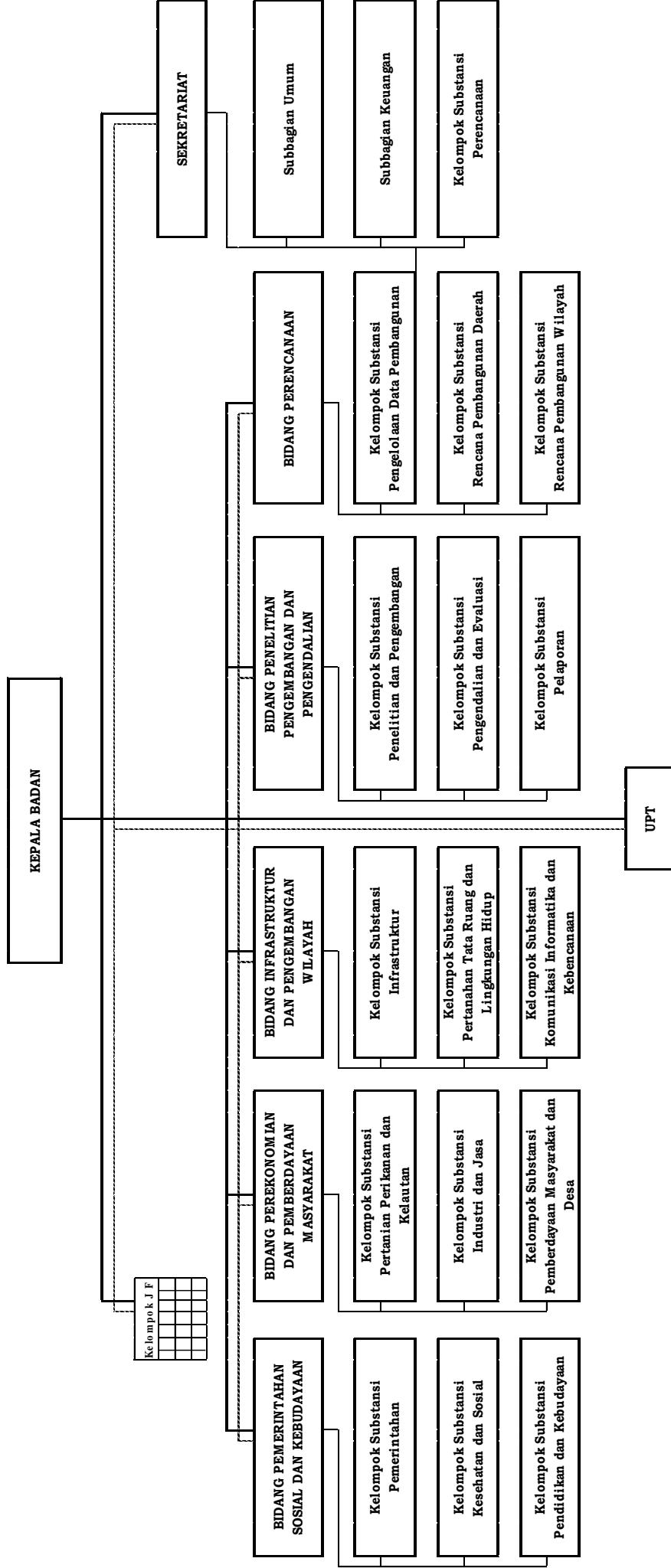
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara umum telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dalam pola *working plan* Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan proses teknokratik, politik, partisipatif, serta proses *bottom-up* maupun *top down*. Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan dapat lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih senjangnya realisasi Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini. Bappeda memiliki peran sangat penting dan utama dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku kepentingan.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kapasitas lembaga perencana dan kemampuan teknis personel perencanaan perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penyusunan usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan yang benar-benar dibutuhkan (berkualitas, efektif dan efisien), bukan berdasarkan pada kegiatan yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan Keistimewaan. Bappeda terbagi menjadi 5 Bidang dengan 15 Kelompok Substansi dan 1 Sekretariat dengan 2 Sub Bagian dan 1 Kelompok Substansi . Adapun Struktur Organisasi Bappeda disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



————— : Komando

- - - - - : Koordinasi

Secara internal, Bappeda menghadapi kendala karena adanya permasalahan antara lain:

1. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana;
2. Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang baik bagi proses dan lembaga perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara reliabel dan akurat;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada; dan
5. Masih terbatasnya jumlah SDM dengan jabatan fungsional perencana.

Permasalahan yang dihadapi Bappeda secara umum tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian Sasaran Daerah dan Sasaran PD, karena Bappeda ditopang oleh ASN yang memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik. Selain itu, dukungan aplikasi yang terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah, cukup membantu mempermudah Bappeda dan seluruh PD dalam menyusun dokumen perencanaan. Dalam mengemban tugasnya, Bappeda mempunyai peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang terkait faktor eksternal. Peluang yang ada antara lain:

1. Adanya regulasi yang memberikan kejelasan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan dari tahap perencanaan sampai penganggaran;
2. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan;
3. Penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
4. Kebijakan dari pemerintah pusat mengenai prioritas pembangunan dengan prinsip berkualitas, efektif dan efisien memberikan pedoman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana menentukan program prioritas beserta pagu anggarannya; dan
5. Dengan penentuan program prioritas yang lebih fokus dan sinkron dengan prioritas nasional dan provinsi, akan memberikan kesempatan untuk meraih anggaran dari APBD DIY dan APBN; dan
6. Adanya anggaran keistimewaan.

Adapun tantangan yang dihadapi Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Pandemi Covid-19 mengubah arah perencanaan pembangunan daerah dan pola kerja Pemerintah Daerah;
2. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
3. Perumusan kebijakan berbasis riset;
4. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat;
5. Penerapan nomenklatur baru serta aplikasi terintegrasi untuk perencanaan dan penganggaran daerah;
6. Pemenuhan persyaratan teknis untuk pengajuan usulan program dan kegiatan ke Pemerintah DIY dan Pemerintah pusat; dan
7. Kualitas aparat perencana belum merata di setiap Perangkat Daerah.

Dengan melihat permasalahan yang ada, serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu-isu penting yang harus dilaksanakan Bappeda adalah:

1. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatkan penelitian dan inovasi daerah sebagai dasar kebijakan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia perencana yang handal untuk memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah;
4. Menyusun dokumen perencanaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan memenuhi persyaratan penganggaran dari Pusat dan DIY; dan
5. Meningkatkan penggunaan dana keistimewaan untuk kegiatan pembangunan daerah.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Bappeda merencanakan untuk melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp6.775.871.266,00 (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pagu anggaran dapat berubah, tahapan cukup penting yang mempengaruhi perubahan yang terjadi adalah adanya kebijakan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan yang disusun, agar memiliki alur pikir yang lebih logis antara prioritas pembangunan daerah, sasaran, indikator sasaran daerah, yang kemudian dialirkan ke dalam sasaran dan indikator sasaran PD, dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan PD. Penambahan, pengurangan, ataupun penyesuaian anggaran dan target kinerja sub kegiatan merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka penyelarasan prioritas pembangunan daerah, mengakomodir kebijakan umum Bupati, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hasil analisis kebutuhan Bappeda yang telah disesuaikan kemudian menjadi bagian dari RKPD dengan beberapa perubahan output dan pagu, sebagaimana disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul
Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Rencana Rancangan Awal RKPD										
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik	100 Persen	250.000.000						
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	2 jenis	250.000.000						
			Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana	100 Persen							
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	250.000.000						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian program keistimewaan	100 Persen	134.097.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian program keistimewaan	100 Persen	650.000.000	
	Perencanaan Rancangan Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	2 jenis	5.000.000						
			Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	100 Persen							
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun	1 Dokumen	2.500.000						

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Rencana Program Keistimewaan dan Kegiatan Urusan Tata Ruang	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	1 Dokumen	2.500.000						
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	2 jenis	129,097,000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	2 jenis	650,000,000	
			Persentase kesesuaian program keistimewaan dalam :	100 Persen				Persentase kesesuaian program keistimewaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen		
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 Dokumen	46.132.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	5 Dokumen	500,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	7 Laporan	82,965,000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	7 Laporan	150,000,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	6,631,430,087	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	4,136,718,798	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	15 jenis	37,720,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	15 jenis	38,855,000	
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen		

Hasil Analisis Kebutuhan											
Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	29,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	31,280,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	300,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	300,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	320,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	325,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	900,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	700,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 dokumen	600,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 dokumen	650,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	4,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	4,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1,900,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1,600,000	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(3)	(4) Jumlah laporan keuangan tersusun persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	(5) 14 dokumen 100 Persen	(6) 5,642,860,087	(7) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(8)	(9) Jumlah laporan keuangan tersusun persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	(10) 14 dokumen 100 Persen	(11) 3,133,751,298	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 orang/bulan	5.611,160,087	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 orang/bulan	3,098,211,298	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,700,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	29,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	33,040,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi	48 ASN	47,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi	48 ASN	62,000,000	
			Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen				Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	7,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	7,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	40,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	55,000,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	(3)	(4) Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	(5) 7 layanan	(6) 370,000,000	(7) Administrasi Umum Perangkat Daerah	(8)	(9) Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	(10) 7 layanan	(11) 308,550,000	(12)
			Administrasi Umum terlayani	100 Persen				Persentase Administrasi Umum terlayani	100 Persen		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	144,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	83,950,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3,600,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	11,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	11,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	702 Dokumen	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	352 Dokumen	1,500,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	20 Laporan	6,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	10 Laporan	7,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	193,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	193,500,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	2 layanan	52.500.000						
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 Persen							
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	7.500.000						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	45.000.000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	210.350.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	207.200.000	
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	123.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 laporan	85.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 laporan	86.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	5 layanan	271.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	5 layanan	386.362.500	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	325 unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	364 unit	282.700.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	4.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	2.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 unit	12.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	90.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	86.662.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	16 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	15 unit	4.500.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	4 jenis	884.775.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	4 jenis	1.160.320.000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	4 jenis	476.925.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	4 jenis	783.500.000	
			Persentase kesesuaian program dalam : 1. RKPD terhadap RPJMD 2. APBD terhadap RKPD	100 Persen				Persentase kesesuaian program dalam : 1. RKPD terhadap RPJMD 2. APBD terhadap RKPD	100 Persen		

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	25,600,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	49,780,000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	35,500,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	30,100,000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	18 Usulan	16,050,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	18 Usulan	27,600,000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	399,775,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 Dokumen	676,020,000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah jenis kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan	2 jenis	260,050,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah jenis kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan	2 jenis	234,780,000	
			Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terlayani	100 Persen				Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terlayani	100 Persen		
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 masukan	100,000,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 masukan	94,780,000	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 buku	160,050,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 buku	140,000,000	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(3)	(4) Jumlah jenis laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun	(5) 2 jenis	(6) 147,800,000	(7) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(8)	(9) Jumlah jenis laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun	(10) 2 jenis	(11) 142,040,000	(12)
			Persentase capaian program pendukung sasaran pembangunan daerah	100 Persen				Persentase capaian program pendukung sasaran pembangunan daerah	100 Persen		
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	13 laporan	53,900,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13 laporan	56,020,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 laporan	93,900,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 laporan	86,020,000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian program sektoral	100 Persen	983,738,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian program sektoral	100 Persen	778,800,000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan yang tersusun	3 jenis	145,738,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan yang tersusun	3 jenis	244,760,000	
			Persentase Kesesuaian Program Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen				Persentase Kesesuaian Program Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RRJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	56,688,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RRJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	82,720,000	

Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(3) Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	(4) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(5) 5 Dokumen	(6) 54,000,000	(7) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(8) Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	(9) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(10) 4 Dokumen	(11) 76,020,000	(12)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 laporan	35,050,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 laporan	86,020,000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	3 jenis	327,200,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	3 jenis	173,020,000	
			Persentase Kesesuaian Program Bidang Perencanaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen				Kesesuaian Program Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	203,100,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	66,020,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	6 Laporan	90,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	5 Laporan	70,000,000	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	34,100,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	37,000,000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang tersusun	3 jenis	510,500,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang tersusun	3 jenis	361,020,000	
			Persentase Kesesuaian Program Bidang Fisik dan Prasarana dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen				Persentase Kesesuaian Program Bidang Fisik dan Prasarana dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	199,400,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	165,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Sikronisasi Renstra/Renja RRPJPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	111,400,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Sikronisasi Renstra/Renja dengan RRPJPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	50,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	200,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	146,020,000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kelibangan yang diindaklanjuti	83.33 Persen	279,200,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kelibangan yang diindaklanjuti	83.33 Persen	469,670,000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah kelibangan yang terlaksana	3 buah	279,200,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah kelibangan yang terlaksana	3 buah	469,670,000	
			Persentase implementasi rencana kelibangan	47.22 Persen				Persentase implementasi rencana kelibangan	47.22 Persen		

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	136,300,000	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	188,220,000	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	127,400,000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	265,950,000	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	15,500,000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	15,500,000	
TOTAL					9,163,240,087					7,195,508,798	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terlebih dahulu telah dilakukan penjarangan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan hasil analisis kebutuhan Bappeda. Namun demikian, di Bappeda tidak ada program dan kegiatan usulan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	PIS/PIWK	Priotas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/ Kelurahan)	Pagu Desa (Rp.)	Volume Desa (Rp.)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp.)	Urutan Prioritas Desa	Usulan Prioritas Kec.	Status Verifikasi Kec.	Catatan Verifikasi Kec.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Berlandaskan RPJPN Tahun 2005-2025 maka agenda pembangunan dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional, yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023, tema pembangunan adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan” dengan prioritas pembangunan :

- 1) Penekanan Pembangunan di wilayah Selatan yang diharmonisasi dengan konsep Renaissance Yogyakarta;
- 2) Penggunaan dan Penerapan Teknologi Informasi yang menjadi platform dalam setiap program/Kegiatan;
- 3) Reformasi Kalurahan yang dikembangkan secara cascading dapat terkoneksi di tingkat provinsi dan kabupaten.

Selaras dengan kedua tema tersebut, maka dirumuskan tema pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 “Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”.

Tema dan prioritas pembangunan daerah ini menjadi dasar bagi Bappeda untuk merumuskan program dan kegiatan Tahun 2024. Selain itu Bappeda juga tetap memperhatikan target dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Kebijakan Umum Bupati, dan target Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 berpedoman dan mengacu pada prioritas

pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam prioritas pembangunan daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pencapaian prioritas daerah ketujuh, yaitu Reformasi Birokrasi dengan Sasaran Daerah: Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan. Sasaran ini digambarkan dengan indikator sasaran daerah: Nilai Akuntabilitjas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan program pembangunan yaitu program sinergitas tata kelola pemerintahan daerah. Pengaliran prioritas daerah sampai kedalam indikator sasaran perangkat daerah yang menjadi sasaran utama Bappeda disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Prioritas dan Sasaran Bappeda

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH (OUTCOMES)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD (OUTCOMES)
7	Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
				Meningkatnya implementasi indeks inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah

Bappeda menetapkan Tujuan Perangkat Daerah yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan alasan strategis yang akan dicapai pada jangka waktu 5 tahun mendatang, yaitu: *Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel serta inovasi daerah yang berkualitas.*

Tabel 3.2.
Tujuan Bappeda

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN PD TAHUN 2026
1	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel serta inovasi daerah yang berkualitas	Nilai AKIP Daerah Komponen Perencanaan	27.2
		Indeks Inovasi Daerah	4807

Tujuan Bappeda ini kemudian dijabarkan dalam tiga sasaran perangkat daerah yaitu :

1. Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatnya implementasi inovasi daerah; dan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda.

Tabel 3.3.
Sasaran Bappeda

NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN TUJUAN PD TAHUN 2024
1	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	86,97
3	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	4177

Dalam perumusan sasaran perangkat daerah, selain mempertimbangkan rumusan tujuan dan sasaran daerah maupun tujuan perangkat daerah, juga mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama adalah alasan hakiki yang melatarbelakangi eksistensi perangkat daerah dalam jajaran kelembagaan di daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda untuk periode tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 361/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.4.
Indeks Kinerja Utama Bappeda

NO	IKU	INDIKATOR KINERJA IKU	TARGET KINERJA IKU TAHUN 2024
1	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%
2	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	4177

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

Dalam Bab III telah diuraikan bahwa Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan, mendukung Misi pertama Bupati, yaitu yaitu “*Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis*” serta Sasaran Daerah *Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat*. Bappeda sebagai Perangkat Daerah mempunyai tiga Sasaran PD dan mendukung Prioritas Daerah ketujuh untuk perencanaan tahun 2024, yaitu Reformasi Birokrasi. Sasaran Bappeda tersebut kemudian dialirkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2024. Pengaliran Sasaran Bappeda ke dalam 5 program yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2024

Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kesesuaian Program Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
Meningkatnya implementasi inovasi daerah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sedangkan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung Sasaran Perangkat Daerah Utama yakni Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.2. Terdapat 4 program dengan 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Perangkat Daerah Utama dengan pagu anggaran Rp1.543.263.700,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Pagu untuk pencapaian Sasaran Perangkat Daerah Utama tersebut adalah 29,48% dari total jumlah pagu keseluruhan.

Tabel 4.2.
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Kesesuaian Program Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	824,189,000	
					4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	824,189,000	Bappeda
					4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	567,640,000	Bappeda
					4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	256,549,000	Bappeda
					5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	401,202,200	
					5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	232,809,700	
					5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	14,000,000	Bappeda
					5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	6,000,000	Bappeda
					5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	720,000	Bappeda
					5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	212,089,700	Bappeda
					5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95,772,500	
					5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75,272,500	Bappeda
					5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	20,500,000	Bappeda
					5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	72,620,000	
					5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	35,502,500	Bappeda
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	37,117,500	Bappeda					

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	244,655,000	
					5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	97,205,000	
					5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39,767,500	Bappeda
					5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15,600,000	Bappeda
					5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41,837,500	Bappeda
					5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	57,207,500	
					5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34,157,500	Bappeda
					5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	14,650,000	Bappeda
					5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,400,000	Bappeda
					5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90,242,500	
					5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48,030,000	Bappeda
					5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	8,060,000	Bappeda
					5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34,152,500	Bappeda

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
		Meningkatnya implementasi inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	4177 indeks	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	73,217,500	
					5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	73,217,500	
					5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	51,777,500	Bappeda
					5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	21,440,000	Bappeda
					5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	Bappeda

Dalam melaksanakan 5 program dengan 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan tersebut dibutuhkan pagu sebesar Rp5.235.427.798,00 (Lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan sumber dana terdiri dari Dana Keistimewaan DIY dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 4.3

Sumber Dana Program Bappeda Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	NAMA PROGRAM	PAGU (Rp)
1	2	3	4
1	Dana Keistimewaan DIY	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	824,189,000
		JUMLAH	824,189,000
2	Dana Alokasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,692,164,098
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	401,202,200
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	244,655,000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	73,217,500
		JUMLAH	4,411,238,798
		JUMLAH	5,235,427,798

Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung tugas dan fungsi Bappeda sejumlah 1 program yang dijabarkan kedalam 6 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang diampu oleh Sekretariat dengan pagu indikatif sebesar Rp3.692.164.098,00 (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 70,52% dari total pagu indikatif yang disajikan dalam tabel 4.4 sebagai program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi.

Berdasarkan penyebaran lokasinya, program Bappeda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu program yang dilaksanakan dalam skala internal Bappeda, dan program yang dilaksanakan secara lintas PD. Program internal Bappeda adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung pelaksanaan operasional Bappeda. Program yang masuk dalam lokalitas internal Bappeda adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Di luar program yang bersifat internal tersebut, terdapat program-program yang bersifat lintas PD, yaitu program yang melibatkan PD lain dalam pelaksanaannya. Program ini terutama untuk mendukung tugas dan fungsi koordinatif Bappeda yang mempunyai fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Program tersebut adalah Program Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 4.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju	PD
1	2	3	4	5
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,692,164,101	6,757,667,893	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,142,500	38,550,000	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26,952,500	29,500,000	Bappeda
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	300,000	350,000	Bappeda
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300,000	350,000	Bappeda
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	570,000	1,000,000	Bappeda
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	540,000	650,000	Bappeda
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000	4,500,000	Bappeda
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	480,000	2,200,000	Bappeda
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,125,118,798	5,756,067,889	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,098,211,298	5,723,367,889	Bappeda
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	790,000	2,700,000	Bappeda
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26,117,500	30,000,000	Bappeda
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550,000	57,000,000	
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	550,000	7,000,000	Bappeda
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	50,000,000	Bappeda
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101,510,703	385,050,004	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,354,000	8,000,000	Bappeda
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,276,000	137,550,000	Bappeda

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju	PD
1	2	3	4	5
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	606,000	4,500,000	Bappeda
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,190,700	12,000,000	Bappeda
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,200,000	3,000,000	Bappeda
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,000,000	8,000,000	Bappeda
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,884,000	212,000,000	Bappeda
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198,467,100	216,000,000	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240,000	2,000,000	Bappeda
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112,627,500	126,000,000	Bappeda
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,599,600	88,000,000	Bappeda
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236,375,000	305,000,000	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148,812,500	115,000,000	Bappeda
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0	6,000,000	Bappeda
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	14,000,000	Bappeda
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86,662,500	150,000,000	Bappeda
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900,000	20,000,000	Bappeda

Selengkapnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Rencana Maju 2025					
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja			
								5	6	7	8
4	UNSUBPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.04	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase kesesuaian program keistimewaan	Kabupaten Gunungkidul	100 Persen	824.189.000	Dana Keistimewaan	100 Persen				108.100.000
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	Kabupaten Gunungkidul	2 jenis	824.189.000	Dana Keistimewaan DIY	2 jenis				108.100.000
4.01.04.5.06.0001	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Kabupaten Gunungkidul	5 Dokumen	567.640.000	Dana Keistimewaan DIY	3 dokumen				37.700.000
4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Kabupaten Gunungkidul	7 Laporan	256.549.000	Dana Keistimewaan DIY	7 laporan				70.400.000
5	UNSUBPUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA										
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik		100 Persen	3.692.164.098		100 Persen				6.757.642.889
5.01.01.2.01.0001	Perencanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	Bappeda Kab. Gunungkidul	15 jenis	30.142.500		15 jenis				38.525.000
5.01.01.2.01.0001	Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	26.952.500		5 dokumen				29.500.000
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	300.000		1 dokumen				350.000
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	300.000		1 dokumen				325.000
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	570.000		2 dokumen				1.000.000
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	540.000		2 dokumen				650.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Rencana Maju 2025					
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappe da Kab. Gunungkidul	17	Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17	laporan	4.500.000
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappe da Kab. Gunungkidul	4	Laporan	480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	laporan	2.200.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun		14	dokumen	3.125.118.798			14	dokumen	5.756.067.889
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappe da Kab. Gunungkidul	672	Orang/bulan	3.098.211.298	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		840	orang/bulan	5.723.367.889
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappe da Kab. Gunungkidul	1	Laporan	790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen	2.700.000
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappe da Kab. Gunungkidul	13	Laporan	26.117.500			13	laporan	30.000.000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi		48	Orang	550.000			62	ASN	57.000.000
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappe da Kab. Gunungkidul	4	Dokumen	550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	dokumen	7.000.000
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bappe da Kab. Gunungkidul	0	Orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	orang	50.000.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia		7	Layanan	101.510.700			7	layanan	385.050.000
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappe da Kab. Gunungkidul	12	Paket	5.354.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	paket	8.000.000
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappe da Kab. Gunungkidul	12	Paket	25.276.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	paket	137.550.000
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bappe da Kab. Gunungkidul	1	Paket	606.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	paket	4.500.000
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappe da Kab. Gunungkidul	5	Paket	6.190.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	paket	12.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Rencana Maju 2025		
				5	6				10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bappe da Kab. Gunungkidul	247	Dokumen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		702	dokumen	3.000.000
S.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Bappe da Kab. Gunungkidul	10	Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20	laporan	8.000.000
S.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappe da Kab. Gunungkidul	24	Laporan	60.884.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18	laporan	212.000.000
S.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia		3	Layanan	198.467.100			3	layanan	216.000.000
S.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappe da Kab. Gunungkidul	4	Laporan	240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	laporan	2.000.000
S.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappe da Kab. Gunungkidul	72	Laporan	112.627.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		72	laporan	126.000.000
S.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappe da Kab. Gunungkidul	8	Laporan	85.599.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	laporan	88.000.000
S.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia		5	layanan	236.375.000			5	layanan	305.000.000
S.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappe da Kab. Gunungkidul	364	Unit	148.812.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		325	unit	115.000.000
S.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bappe da Kab. Gunungkidul	0	Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20	unit	6.000.000
S.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappe da Kab. Gunungkidul	0	Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31	unit	14.000.000
S.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Bappe da Kab. Gunungkidul	1	Unit	86.662.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	unit	150.000.000
S.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappe da Kab. Gunungkidul	3	Unit	900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15	unit	20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Rencana Maju 2025					
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Kabupaten Gunungkidul	100 Persen	401.202.200				100 Persen		906.350.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Kabupaten Gunungkidul	4 Jenis	232.809.700				4 jenis		617.650.000
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Gunungkidul	2 Dokumen	14.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen		26.800.000
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	1 Berita Acara	6.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara		37.200.000
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kabupaten Gunungkidul	18 Usulan	720.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Usulan		16.850.000
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Kabupaten Gunungkidul	7 Dokumen	212.089.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen		536.800.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan		2 jenis	95.772.500				2 jenis		144.000.000
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kabupaten Gunungkidul	3 Dokumen	75.272.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 masukan		50.000.000
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kabupaten Gunungkidul	2 Buku	20.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 buku		94.000.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun		2 jenis	72.620.000				2 jenis		144.700.000
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Gunungkidul	13 Laporan	35.502.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 laporan		53.500.000
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kabupaten Gunungkidul	9 Laporan	37.117.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 laporan		91.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Rencana Maju 2025		
				Target Kinerja	Target Kinerja				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program sektoral		100 Persen		244.655.000			100	Persen	980.687.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan yang tersusun		3 Jenis		97.205.000			3	jenis	155.037.000
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Gunungkidul	3 Dokumen		39.767.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	dokumen	60.700.000
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Gunungkidul	4 Dokumen		15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	dokumen	54.337.000
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Gunungkidul	4 Laporan		41.837.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	laporan	40.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat, adat, wisata, kesehatan		3 Jenis		57.207.500			3	jenis	304.000.000
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Gunungkidul	5 Dokumen		34.157.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	dokumen	202.950.000
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perencanaan	Kabupaten Gunungkidul	5 Laporan		14.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	laporan	60.000.000
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Gunungkidul	6 Dokumen		8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	dokumen	41.050.000

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Rencana Maju 2025				
			Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang tersusun	Kabupaten Gunungkidul	3 Jenis	3 Jenis	90.242.500			3 jenis		521.650.000
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Gunungkidul	4 Dokumen	4 Dokumen	48.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 dokumen		200.900.000
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sikronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kabupaten Gunungkidul	2 Laporan	2 Laporan	8.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 laporan		120.750.000
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Gunungkidul	1 Dokumen	1 Dokumen	34.152.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen		200.000.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti		83.33 Persen	85.71 Persen	73.217.500					293.950.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah kelibangan yang terlaksana		3 Buah	3 Buah	73.217.500			3 buah		293.950.000
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Gunungkidul	1 Dokumen	1 Dokumen	51.777.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen		143.050.000
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Gunungkidul	1 Laporan	1 Laporan	21.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan		134.700.000
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Kabupaten Gunungkidul	0 Laporan	0 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 laporan		16.200.000
			JUMLAH			5.235.427.798					9.046.729.889

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, yang diselaraskan dengan tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan RKPD DIY Tahun 2024. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Bappeda, tema dan prioritas pembangunan daerah, analisis kebutuhan, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran daerah, sasaran Perangkat Daerah, usulan dari para pemangku kepentingan serta pagu indikatif Perangkat Daerah. Pada Rumusan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 memuat 5 program yang terdiri 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp5.235.427.798,00 (Lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur, dan akuntabel yang dijadikan dasar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah. Kualitas rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang tetap harus dikedepankan.

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan Forum PD.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Bappeda sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya. Demikian Rencana Kerja Bappeda ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,

MOHAMAD ARIF ALDIAN

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan yang baik oleh masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan harus memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta mempertahankan dan meningkatkan prestasi pembangunan yang telah dicapai di daerah. Karena itu, perencanaan tersebut harus disusun berpedoman pada RPJMD dan rencana strategis Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhentikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Penyusunan Renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ditingkat nasional

dengan pembangunan daerah. Realisasi dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2024 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor

- 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program-program pembangunan di Kabupaten Gunungkidul;
2. Memberikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana kerja dan rencana kinerja anggaran Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya manusia, sumber dana, dan sarana prasarana dalam organisasi;
5. Meningkatkan produktivitas dan kinerja Perangkat Daerah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV. PENUTUP

5.1. Catatan Penting

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk melihat apakah penyusunan renja telah mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah serta evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2022 ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp5.850.366.874,00 dengan rincian Belanja Pegawai Rp2.473.829.246,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.267.524.870,00, dan Belanja Hibah Rp1.109.012.758,00 meliputi 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan.

Tingkat capaian kinerja program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 92,63% dengan realisasi penyerapan keuangan sebesar Rp5.419.002.771,00.

2.1.1. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Semua Program dan kegiatan telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

2.1.2. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (98,34 %)
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(99,61 %)
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(100%)

- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD(69,21 %)
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD(99,82 %)
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(92,12%)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (98,79 %)
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100%)
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (100,00 %)
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (100,00 %)
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (99,86 %)
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,75%)
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (99,70 %)
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (99,64%)
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (90,00 %)
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (68,91 %)
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (99,63 %)
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (66,46 %)
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (98,42 %)
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (98,89 %)
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100,00 %)
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (99,90 %)
- g. Penataan Organisasi
 - 1) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (99,90 %)
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (91,59 %)
 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (99,35 %)
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (98,12 %)
 4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (98,17 %)
 5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (97,01 %)
 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
-

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (45,08 %)
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (94,33%)

2.1.3. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan

Realisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 tidak terdapat target kinerja keluaran dan hasil yang melebihi target.

2.1.4. Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja tahun 2022

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, atau melebihinya target kinerja program/kegiatan dari target yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan :
 - a. Adanya kebijakan pemerintah, baik propinsi, kabupaten, maupun pusat, sehingga program/kegiatan yang sudah direncanakan belum atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Pelaksanaan program/kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena :
 - a. Adanya komitmen bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan program dan kegiatan.
 - b. Berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan kerja yang direncanakan

2.1.5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024

1. Terbatasnya personil (ASN) yang ada dan berkurang karena pensiun menyebabkan kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
2. Peran dan Fungsi para pemangku kepentingan, lembaga non struktural (FKUB, BNK, FKDM, FPK, PPWK) yang perlu ditingkatkan.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang diambil berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Terbatasnya personil (ASN) yang ada dan berkurang karena pensiun menyebabkan kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hal ini diatasi dengan mengoptimalkan THL yang telah ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penguatan koordinasi, kerjasama dan *networking*/jejaring dengan mitra kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Secara terinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dapat terlihat dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	90,11%	90,11%	100%	100%	100%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	29 Dokumen	28 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	100%	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Renja Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Penyelenggaraan Forum PD	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dokumen	3 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja ROPK	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100% 100% 100%	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100% 100% 100%
		Jumlah Dokumen DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						17 Dokumen	17 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD (Laporan e Money)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen LKjIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen TEpra	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksana	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN tersedia	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						13 Laporan	13 Laporan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian terlaksana	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%
8.01.01.2.02.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	100%	19 orang	19 orang	100%
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						7 Dokumen	7 Dokumen	100%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	8 layanan	8 layanan	8 layanan	8 layanan	100%	8 layanan	8 layanan	100%
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	6 Paket Pembelian	6 Paket Pembelian	6 Paket Pembelian	6 Paket Pembelian	100%	6 Paket Pembelian	6 Paket Pembelian	100%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						6 Paket	6 Paket	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Tersedia (kertas, amplop, bantalan stempel, binderclip, balpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik, Pita Faximile, selotip, lakban)	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	100%	22 Jenis	22 Jenis	100%
		Jumlah Komputer/PC tersedia	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah UPS tersedia	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah printer laserjet tersedia	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laptop/notebook tersedia	3 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket					13 Paket	13 Paket	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1										
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terbeli (pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tisu, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci)	12 paket pembelian	12 paket pembelian	12 paket pembelian	12 paket pembelian	100%	12 paket pembelian	12 paket pembelian	100%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		72 dokumen	18 dokumen	69 dokumen	69 dokumen	100%			
		Jumlah Barang Cetak (Map Berkop, BKP, SPPD, Disposisi, Sekat Folder, Box Arsip)	25400 lembar	12 lembar	25260 lembar	25260 lembar	100%			
		Jumlah Penggandaan/Fotocopy								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						4 paket	4 paket	100%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						350 Dokumen	350 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi luar daerah dalam Pulau Jawa	3 Orang	14 orang	11 orang	11 orang	100%			
		Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi luar daerah luar Pulau Jawa	4 Orang	9 orang	11 orang	11 orang	100%			
		Jumlah Minum Snack untuk Rapat	250 Orang	60 orang	180 orang	180 orang	100%			
		Jumlah Makan Minum untuk rapat	152 Orang	60 orang	180 orang	180 orang	100%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20 Laporan	20 Laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin terlaksana	-	-	-	-	-	16 layanan	16 layanan	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						16 unit	16 unit	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	100%	12 layanan	12 layanan	100%
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Surat terkirim	650 lembar	-	600 lembar	600 lembar	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	100%
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang diterima atas pemanfaatan jasa air 1 rekening x 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah bulan yang diterima atas pemanfaatan jasa listrik 1 rekening x 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah bulan yang diterima atas pemanfaatan jasa telepon 1 rekening x 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						36 laporan	36 laporan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor di bayar	247 hari	247 hari	247 hari	247 hari	100%			
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 layanan	12 layanan				12 Laporan	12 Laporan	100%
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	4 Paket Pemeliharaan	4 Paket Pemeliharaan	4 Paket Pemeliharaan	4 Paket Pemeliharaan	100%			
		Jumlah Mobil Dinas terpelihara 2 unit x 2 kali	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%			
		Jumlah Mobil Dinas yang terbayar pajaknya	6 Paket Pemeliharaan	6 Paket Pemeliharaan	6 Paket Pemeliharaan	6 Paket Pemeliharaan	100%			
		Jumlah Motor Dinas yang terbayar pajaknya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						46 unit	46 unit	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer terfasilitasi pemeliharaannya	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	100%			
		Jumlah Laptop/notebook terfasilitasi pemeliharaannya	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	100%			
		Jumlah mesin ketik terfasilitasi pemeliharaannya	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	100%			
		Jumlah Printer Terfasilitasi Pemeliharaannya	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	100%			
		Jumlah Alat Korsik terfasilitasi pemeliharaannya	1 set	1 set	1 set	1 set	100%			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						22 unit	22 unit	100%
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung terlaksana	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah Gedung Kantor yang terfasilitasi keamanannya	365 hari	365 hari	365 hari	365 hari	100%			
		Jumlah AC terfasilitasi pemeliharaannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	-	-	-	-	20 unit	20 unit	100%
8.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	-	-	-
8.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi SOP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian SPP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	78 persen	-	-	-	-	72 persen	72 persen	100%
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis budaya	1 kali	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.22.08.2.09.10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Sosialisasi Budaya Politik	1 angkatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.22.08.2.09.23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah FGD Kebangsaan bagi OPD	1 angkatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	100%	-	75%	100%	100%	80%	80%	100%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	26 kali	-	48 kali	100%	100%	19 kali	19 kali	100%
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang memahami arti penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, dan bela negara	500 orang	-	1900 orang	100%	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah generasi muda / pelajar yang memahami arti penting wawasan kebangsaan, nasionalisme dan bela negara	400 orang	-	200 orang	200 orang	100%			
		Jumlah Upacara/Peringatan Hari Besar yang diiringi Korps Musik	12 kali	-	8 kali	8 kali	100%			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						150 orang	150 orang	100%
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5%	-	80%	80%	100%	80%	80%	100%
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol	48 orang	48 orang	48 orang	100%	48 orang	48 orang	48 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/4)
		Jumlah parpol yang terfasilitasi bantuan keuangan	8 parpol	-	8 parpol	8 parpol	100%			
		Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri	450 orang	200 orang	50 orang	50 orang	100%			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan								
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Situasi dan Kondisi Sosial Politik Didaerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%			
								300 orang	300 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	76%	68%	68%	68%	100%	70%	70%	100%
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	8 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	400 orang	100 orang	100 orang	100orang	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						150 Orang	150 orang	100%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	100%	-	75%	75%	100%	80%	80%	100%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	9 kali	-	35 kali	35 kali	100%	5 kali	5 kali	100%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama	450 orang	850 orang	1700 orang	1700 orang	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	93%	77%	89%	100%	90%	150 orang	150 orang	100%
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	53 layanan	-	24 layanan	100%	24 layanan	24 layanan	24 layanan	100%
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah masyarakat yang memahami pencegahan dan penanganan konflik sosial	450 orang	75 orang	100 orang	100 orang	100%			
		Jumlah Dokumen RAD dan laporan penanganan konflik sosial	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
		Jumlah Kesepakatan Forkopimda	6 kesepakatan	-	-	-				
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga						150 orang	150 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah masyarakat yang memahami kewaspadaan dini masyarakat terhadap ATHG, terorisme, radikalisme dan Orang Asing	400 orang	100 orang	100 orang	100 orang	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan pelaporan P4GN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kewaspadaan Dini	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen				
		Jumlah masyarakat yang memahami bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	900 orang	100 orang	450 orang	450 orang				

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik						14 Laporan	14 Laporan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>outputs</i>)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 8.01.06.2.01.06	2 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 4	5 5	6 6	7 7	8=(7/6) 8=(7/6)	9 9	10 10	11=(10/4) 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu kepala daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana sudah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

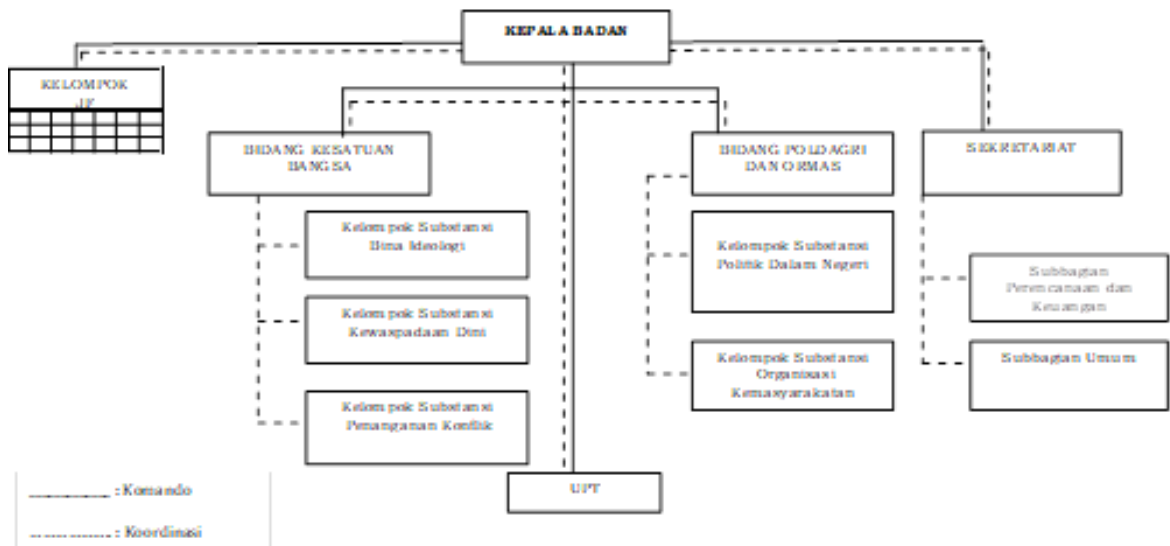
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A. SASARAN IKU												
1.	Persentase konflik Sosial yang tertangani	Persen	88	89	90	91	88	89	90	91		
2.	Nilai AKIP PD	skor	-	80,05	80,10	80,15	-	80,05	80,10	80,15		
B. SASARAN NON IKU												
1.	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	persen	75	80	85	90	75	80	85	90		
2.	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	persen	80	80	80	82,5	80	80	80	82,5		
3.	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	persen	65	68	70	72	65	68	70	72		
4.	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragam	persen	75	80	85	90	75	80	85	90		
5.	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	persen	88	89	90	91	88	89	90	91		
6.	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	persen	-	-	72	74	-	-	72	74		
7.	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	100	100		

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C.	SPM											
	-											
D.	IKK											
	-											

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menciptakan stabilitas kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam) di daerah dengan cukup baik. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni persentase konflik sosial yang tertangani tergolong cukup berhasil. Hal tersebut terlihat dari IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: Persentase konflik sosial yang tertangani (100%)

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya :

1. Belum optimalnya pemahaman kehidupan demokrasi (angka partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan);
2. Adanya potensi konflik berbau SARA di masyarakat;
3. Adanya potensi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai efek dari semakin ramainya kunjungan wisata dan mobilitas penduduk tinggi;
4. Adanya bibit-bibit ormas yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan meresahkan masyarakat.
5. Menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

2.3.3 Dampak

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional :

1. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih rendah
2. Hilangnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat
3. Kenyamanan dan ketertiban terganggu serta meresahkan masyarakat, generasi muda menjadi generasi yang tidak berkualitas baik secara mental maupun fisik.
4. Menjamurnya ormas-ormas yang tidak memiliki ijin, tidak ada kejelasan tentang legalitasnya serta tidak sesuai aturan yang berlaku yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
5. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap Pancasila berdampak pada fenomena menurunnya rasa nasionalisme, kecenderungan perilaku dan kepribadian bangsa semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila, serta kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan stabilitas ideologi politik, ekonomi dan sosial budaya (ipoleksosbud) daerah, antara lain adalah :

1. Masyarakat Gunungkidul yang heterogen;
2. Pertumbuhan penduduk, perumahan baru dan tempat wisata/hiburan yang cukup signifikan;
3. Adanya dinamika budaya politik masyarakat;
4. Pengaruh globalisasi, budaya asing, teknologi informasi, liberalisme, westernisasi dan pasar terbuka;
5. Pengaruh ideologi trans-nasional, isu HAM;
6. Peredaran Narkoba yang meresahkan masyarakat;
7. Munculnya beberapa aksi kenakalan remaja yang mengarah pada penyimpangan moralitas.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan stabilitas ipoleksosbudhankam daerah, antara lain :

1. Partisipasi politik masyarakat Gunungkidul dalam Pemilu rata-rata 80%;
2. Sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi kebudayaan jawa yang adiluhung;
3. Bahwa setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Mengacu agenda pembangunan nasional, indikasi tema pembangunan DIY, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024, akan melaksanakan prioritas tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang kesatuan bangsa, ketahanan dan kewaspadaan nasional;
- 3) Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik;
- 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM);
- 6) Meningkatkan kelembagaan daerah dalam penanganan konflik masyarakat;
- 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

Prioritas tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul dalam bidang kesatuan bangsa, yaitu:

- 1) Perlunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga akan meningkatkan profesionalisme aparat dan meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- 2) Perlunya perhatian terhadap permasalahan di bidang politik, hukum, HAM dan ketertiban, agar mampu mendorong terwujudnya peningkatan kesadaran politik masyarakat;
- 3) Perlunya penguatan organisasi kemasyarakatan/LSM sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;
- 4) Perlunya meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan nasional dan daerah sebagai prasyarat stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- 5) Perlunya penanganan konflik secara simultan dengan mengacu pada tindak lanjut implementasi Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 6) Perlunya membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bela negara dan menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dasar ideologi Pancasila;
- 7) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merencanakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan dengan pagu indikatif Rp5.065.938.916,00

Dalam perkembangannya, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat perlunya rasionalisasi pagu anggaran pada beberapa kegiatan

yang telah direncanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pagu indikatif sebesar Rp48.504.093.587,00 yang dijabarkan dalam 7 (enam) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan antara lain:

Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, adalah sebagai berikut :

- I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan
 - a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
 1. Subkegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya berdasarkan analisis kebutuhan terdapat penambahan menjadi sebesar Rp369.925.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp10.000.000,00
- II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berdasarkan analisis kebutuhan terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebesar Rp48.656.000,00 menjadi Rp25.917.500,00.
 2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp19.250.000,00 menjadi Rp789.950,00.
 3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD sebesar Rp0,00.
 4. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp880,000,00 menjadi Rp0,00.
 5. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp440,000,00 menjadi Rp0,00.
 6. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp2,410,000,00 menjadi sebesar Rp0,00
 7. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp800.000,00 menjadi Rp0,00
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan analisis kebutuhan terdapat rasionalisasi anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp2.317.022.000,00 menjadi Rp1.578.303.879,00 karena Belanja Tambahan Penghasilan di anggarkan di BKPPD.
 2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran terdapat pengurangan dari semula sebesar Rp2,000,000,00 menjadi Rp0,00
 3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terdapat

pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp5,600,000,00 menjadi Rp0,00.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian terdapat rasionalisasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula sebesar Rp1,500,000,00 menjadi Rp0,00
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp3.000.000,00 menjadi Rp0,00
 - 2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat pengurangan anggaran semula sebesar Rp63,119,000,00 menjadi Rp0,00
 - 3. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terdapat penambahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp6.000.000,00 menjadi Rp0,00
 - 4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terdapat pengurangan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula sebesar Rp14,200,000,00 menjadi Rp0,00
 - 5. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp2.880.000,00 menjadi Rp0,00
 - 6. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terdapat penambahan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp77.120.000,00 menjadi Rp0,00
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terdapat penambahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula sebesar Rp20.490.000,00 menjadi Rp24.682.500,00
 - 2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat rasionalisasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp43.900.000,00 menjadi Rp41.339.050,00
 - 3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terdapat penambahan anggaran semula sebesar Rp16.455.000,00 menjadi Rp19.742.500,00
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp65,913,000,00 menjadi Rp22.212.500,00
-

2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berdasarkan analisis kebutuhan terdapat penambahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula sebesar Rp6,660,000,00 menjadi Rp0,00
3. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp34,335,000,00 menjadi Rp128.887.500,00 karena adanya pemeliharaan Gedung kantor.
4. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tetap sebesar sebesar Rp0,00

III. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan semula sebesar Rp865.113.500,00, dan berdasarkan analisis kebutuhan menjadi sebesar Rp975.791.500,00
 2. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terdapat penambahan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp87,400,000,00 menjadi Rp61.117.500,00

IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
 1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp109.044.972,00 menjadi Rp5.405.950,00
 2. Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah terdapat penambahan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp1.142.093.758,00 menjadi

Rp41.306.912.758,00. Karena pada terdapat Hibah KPU dan Bawaslu sebesar Rp40.000.000.000,00.

- V. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah terdapat perubahan anggaran dari RKPD semula Rp41.125.000,00 menjadi Rp55.300.000,00
 - VI. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah terdapat penambahan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp38.400.000,00 menjadi Rp272.160.000,00
 - VII. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1. Subkegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat penurunan semula Rp742.900.000,00 menjadi Rp0,00.
 - 2. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat penurunan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp154.381.000,00 menjadi Rp0,00
 - 3. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat penambahan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp28.900.000,00 menjadi Rp142.482.500,00
 - 4. Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
-

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat perubahan anggaran semula Rp27.850.000,00 menjadi Rp9.975.000,0

5. Subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdapat penurunan anggaran semula Rp142.470.000,00 menjadi Rp73.600.000,00

Untuk lebih jelasnya, hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEJISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	74 %	22.050.000				74 Persen	369.925.000,00	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis	2 Kali		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis	2 Kali		
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Pembanguan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	10.000.000	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Pembanguan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	369.925.000,00	
	SEMUA URUSAN					SEMUA URUSAN					
	PROGRAM:					PROGRAM:					
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100%	2.752.930.158	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%	1.841.875.379	

1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	28 Dokumen	72.736.000	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	29 Dokumen	26.707.450	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	48.656.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.917.500	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	789.950,	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	880.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0	
e.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	440.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.410.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	0	
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 Laporan	800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 Laporan	0	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksana	4 layanan	2.324.622.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksana	4 layanan	1.578.303.879	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	2.317.022.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/bulan	1.578.303.879	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	5.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	0	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	7 dokumen	1.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	0	
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	1.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	0	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	10 layanan	166.319.158	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	10 layanan	0	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	63.119.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.200.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	0	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	730 Dokumen	2.880.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	350 Dokumen	0	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
f											
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	77.120.158	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	0	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	6 layanan	80.845.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	6 layanan	85.764.050	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.425.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.682.500	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	43.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	41.339.050	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	16.520.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.742.500	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 layanan	106.908.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 Layanan	151.100.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	65.738.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	22.212.500	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	6.660.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	0	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	29.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	128.887.500	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	4.570.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	20 Unit	0	
II	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	85%	87.400.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	90%	1.036.909.000	
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	11 Kali	87.400.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	14 Kali	1.036.909.000	
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	47.400.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	975.791.500	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2355 Orang	40.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	61.117.500	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pilpres, Pilkada	80%	1.310.183.758	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pilpres, Pilkada	82,5%	41.312.318.708	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat	26 Layanan	1.310.183.758	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat	41 Layanan	41.312.318.708	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	298 Orang	167.595.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600 Orang	5.405.950	
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	1.142.588.758	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	41.306.912.758	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	72%	42.125.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	72%	55.300.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	10 Kali	42.125.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	4 Kali	55.300.000	
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	42.125.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	55.300.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	90%	45.600.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	90%	272.160.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3 Kali	45.600.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	4 Kali	272.160.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	45.600.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	235 Orang	272.160.000	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	91%	805.650.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	91 %	226.057.500	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	25 Layanan	805.650.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	28 Layanan	226.057.500	
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	27.600.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	0	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	44.700.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	0	
c	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	54.400.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	395 Orang	142.482.500	
d	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13 Laporan	20.700.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	9.975.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)											
e	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	658.250.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	652.300.000	(12)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian dipadukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tercermin dalam program/kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran PIWK dan PIS, yang selengkapnya tersaji dalam tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
 USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pembinaan Ketahanan Masyarakat sbg upaya cegah dini dan deteksi dini ATHG	Gading	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIWK
2.	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	jurangjero, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIWK
3.	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	Bolodukuh Lor, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIWK
4.	Pembinaan Ketahanan Masyarakat sbg upaya cegah dini dan deteksi dini ATHG	Karangduwet	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIWK
5.	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	Karangduwet	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIWK

No (1)	Usulan (2)	Alamat (3)	Indikator Kinerja (4)	Koefisien/ Volume (5)	Harga Satuan (6)	Anggaran (7)	Catatan (8)
1.	Pembinaan Politik Masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan generasi muda	Giripanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Angkatan	7.285.000	7.285.000	PIS
2.	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai upaya Penguatan kapasitas pengurus Ormas dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan masyarakat	Kalurahan Semugih, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Angkatan	7.285.000	7.285.000	PIS
3.	Pembinaan Politik Masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan generasi muda	Kalurahan Semugih, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Angkatan	7.285.000	7.285.000	PIS
4.	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	karangengah, Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS
5.	Penyuluhan P4GN sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Kepek	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	Playen	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIS
7.	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme dan bela negara bagi masyarakat	Plembutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIS
8.	Pembinaan Kerukunan Umat beragama sebagai upaya meningkatkan dan menciptakan kerukunan di masyarakat	Grogol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS
9.	Pembinaan Ketahanan Masyarakat sbg upaya cegah dini dan deteksi dini ATHG	Beji, Ngawen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.850.000	7.850.000	PIS
10.	Pembinaan Kerukunan Umat beragama sebagai upaya meningkatkan dan menciptakan kerukunan di masyarakat	Kalurahan Semugih, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS

No (1)	Usulan (2)	Alamat (3)	Indikator Kinerja (4)	Koefisien/ Volume (5)	Harga Satuan (6)	Anggaran (7)	Catatan (8)
11.	Penyuluhan P4GN sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Bedoyo Kidul RT01 RW06, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, 55892, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS
12.	Penyuluhan P4GN sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Pulutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	8.010.000	8.010.000	PIS
13.	Pembinaan Politik Masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan generasi muda	Pulutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Angkatan	7.285.000	7.285.000	PIS

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu : "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Sejalan dengan tema pembangunan nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 menetapkan tema pembangunan sebagai berikut : "*Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY*"

Dengan berpedoman pada tema pembangunan nasional dan tema pembangunan DIY serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan tahun 2024 : "*Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia* ”.

Selanjutnya tema pembangunan tersebut, dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi :
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 yang dikaitkan dengan kondisi dinamika Ipoleksosbudhankam yang berkembang di daerah.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dijabarkan sebagaimana di bawah ini :

a. Tujuan PD Tahun 2021-2026

Tujuan yang akan dicapai, adalah :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat.

Tabel 3.1
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan Tahun 2026
1.	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Indek Konflik Sosial yang tertangani tahun 2026	73,38%

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra Tahun 2021- 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,15%

Berdasarkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 359/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum dalam tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU tahun 2024
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%

Selanjutnya berdasarkan IKU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan indikator kinerja program dengan keputusan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 13/KPTS/2022 sebagai berikut

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Program Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/Formulasi
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100 \%$ <p>Tipologi data:Non Kumulatif</p>
2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100 \%$ <p>Tipologi data:Non Kumulatif</p>
3.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	$\frac{\sum \text{Jumlah penduduk yang mengikuti pemilu}}{\sum \text{Jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih}} \times 100\%$ <p>Tipologi data : Non Komulatif</p>
3.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	$\frac{\sum \text{Ormas yang aktif dlm kegiatan pemerintahan dan pembangunan}}{\sum \text{Ormas yang terdaftar}} \times 100\%$ <p>Tipologi data : Non Komulatif</p>
4.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100 \%$ <p>Tipologi data:Non Kumulatif</p>
5.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Presentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	$\frac{\sum \text{konflik sosial yang tertangani}}{\sum \text{konflik sosial yang terjadi}} \times 100 \%$ <p>Tipologi data:Non Kumulatif</p>
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten (akumulasi capaian kegiatan)	<p>Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x 100%</p> <p>Tipologi data:Non Kumulatif</p>

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi dan misi Bupati, maka prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah yaitu ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat.

2. Kebijakan anggaran

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas sehingga program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah sesuai pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka pada tahun anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa merencanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan. Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada tahun anggaran berkenaan. Pada tahun 2024 belanja gaji ASN dan hibah/bansos dimasukkan dalam Renja Perangkat Daerah beserta pagu anggarannya sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024

No.	Uraian	Pagu PD (Rp)
1	2	3
1	Gaji Pokok ASN	1.221.732.886,00
2	Tunjangan Keluarga ASN	116.601.193,00
3	Tunjangan Jabatan ASN	126.350.000,00
4	Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.250.000,00
5	Tunjangan Beras ASN	66.916.080,00
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.437.550,00
7	Pembulatan Gaji ASN	16.170,00
	Total	1.578.303.879,00

Tabel 4.2
HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMILU	NILAI BANTUAN PERSUARA	JUMLAH BANTUAN (Rp)	PEMBULATAN BESARNYA BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	107.225	2.506	268.705.850	268.706.000
2	Partai Nasdem	83.469	2.506	209.173.314	209.173.000
3	Partai Amanat Nasional	52.360	2.506	131.214.160	131.214.000
4	Partai Golongan Karya	50.208	2.506	125.821.248	125.821.000
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	42.807	2.506	107.274.342	107.274.000
6	Partai Kebangkitan Bangsa	42.533	2.506	106.587.698	106.588.000
7	Partai Keadilan Sejahtera	38.241	2.506	95.831.946	95.832.000
8	Partai Demokrat	25.700	2.506	64.404.200	64.404.000
			Total	1.109.012.758	1.109.012.000

Hasil perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	I Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		a Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		II Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		2 Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		III Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
IV Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	V Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
		VI Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
		a Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
		1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	VII Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		a Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan /Subkegiatan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		d Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dari tabel 4.3 tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) program difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 6 (enam) program dilakukan untuk mendukung visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Anggaran untuk melaksanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Program / Kegiatan /Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	Ketentraman dan Ketertiban	I Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.036.909.000	
		a Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.036.909.000	
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	975.791.500	
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	61.117.500	
		II Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	41.312.318.708	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	41.312.318.708	
		1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	5.405.950	
		2 Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	41.306.912.758	
		III Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.300.000	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.300.000	
		1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55.300.000	

No	Prioritas Pembangunan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
		IV Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	272.160.00	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	272.160.00	
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	272.160.00	
		V Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	226.057.500	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	226.057.500	
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	
		2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	
		3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	142.482.500	
		4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.975.000	
		5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	73.600.000,	
		VI Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	369.925.000	
		a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	369.925.000	
		1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	369.925.000	
		VII Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.841.875.379,	
		a Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	26.707.450	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.917.500	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	789.950	

No	Prioritas Pembangunan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	
		b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.578.303.879	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.578.303.879	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	
		c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	
		1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	
		d Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	
		e Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.764.050,	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.682.500,	
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.339.050	
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.742.500	
		f Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.100.000	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.212.500	
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.887.500	
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	

b. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2024 akan kami paparkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
 Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketertiban dan Ketertiban	Ketertiban, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	369.925.000	BAKESBANGPOL
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	369.925.000	BAKESBANGPOL
					2.22.08.5.07.18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	369.925.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.036.909.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.036.909.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	975.791.500	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	61.117.500	BAKESBANGPOL
					8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	41.312.318.708	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketertarikan dan Ketertiban	Ketertarikan, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	41.312.318.708	BAKESBANGPOL
					8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	5.405.950	BAKESBANGPOL
					8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	41.306.912.758	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketertarikan dan Ketertiban	Ketertarikan, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.300.000	BAKESBANGPOL
					8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.300.000	BAKESBANGPOL
					8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55.300.000	BAKESBANGPOL
					8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	272.160.000	BAKESBANGPOL
					8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	272.160.000	BAKESBANGPOL
					8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	272.160.000	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketertarikan dan Ketertiban	Ketertarikan, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	226.057.500	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	226.057.500	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	142.482.500	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketertarikan dan Ketertiban	Ketertarikan, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.975.000	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	73.600.000	BAKESBANGPOL

- c. Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut

Tabel 4.7
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Percentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya		72%	369.925.000			72%	30.000.000
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis budaya		3 kali	369.925.000			2 kali	30.000.000
2.22.08.5.07.09	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	369.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	13.000.000
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Percentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100%	44.744.620.587			100%	5.289.235.862
					1.841.875.379				2.792.603.104

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun		29 Dokumen	26.707.450		28 Dokumen		71,974,000
8.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul,	4 dokumen	789.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen		47,714,000
8.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen		19,250,000
8.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen		300,000
8.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen		920,000
8.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen		460,000
8.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Laporan		2,430,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	9	900.000
8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksana		4 layanan	1.578.303.879		100%		2.324.672.000
8.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308 orang/bulan	1.578.303.879	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 bulan		2.317.022.000
8.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen		2.000,000
8.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen		5,650,000
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian terlaksana		1 layanan	0		7 dokumen		1,800,000
8.01.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 dokumen		1,800,000
8.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlaksana		10 layanan	0		100%		189,402,104

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	10
8.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	3,000,000
8.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 paket	69,250,000
8.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	6,000,000
8.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	14,350,000
8.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350 dokumen	2,880,000
8.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 laporan	93,922,104

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana		6 layanan	85.764.050			100%	81,030,000
8.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	24.682.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 laporan	20,675,000
8.01.01.2.08.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 dokumen	41.339.050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		36 dokumen	43,900,000
8.01.01.2.08.01.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	19.742.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	16,455,000
8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 layanan	151.100.000			12 layanan	111,725,000
8.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 unit	22.212.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		46 unit	65,950,000
8.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 unit		0		1 set	10,650,000
8.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	128.887.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	30,125,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 unit	10 unit	5,000,000
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap wawasan kebangsaan		90%	1.036.909.000		85%		84,325,000
8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan		14 kali	1.036.909.000		11 kali		84,325,000
8.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 orang	975.791.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 orang	80 orang	100,500,000
8.01.02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	61.117.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2355 Orang	2355 Orang	50,000,000
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada		82,5%	41.312.318.708		80%		1,289,507,758

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.02.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat		41 layanan	41.312.318.708			26 layanan	1,289,507,758
8.01.03.02.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	5.405.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3050 Orang	146,245,000
8.01.03.02.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 laporan	41.306.912.758	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 laporan	1,143,262,758

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan		72%	55.300.000			70%	69,725,000
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM		4 kali	55.300.000			10 kali	69,725,000
8.01.04.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	55.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		460 Orang	69,725,000
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap kerukunan umat beragama		90%	272.160.000			85%	93,800,000
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		4 kali	272.160.000			3 kali	93,800,000
8.01.05.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235 orang	272.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2080 orang	93,800,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah		91%	226.057.500			90%	893,100,000
8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial		28 layanan	226.057.500			20 layanan	893,100,000
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	55,200,000
8.01.06.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 orang		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 orang	45,200,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	395 orang	142.482.500,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 orang	85,200,000
8.01.06.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 laporan	9.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 laporan	55,200,000
8.01.06.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	73.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	652,300,000
				TOTAL	45.114.545.587				5.241.513.362

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK,

JOHAN EKO SUHARTO

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam rencana strategis perangkat daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, oleh karena itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 harus berpedoman pada visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan, Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul menjabarkan rencana kegiatan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Kerja merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 yang sebelumnya telah disusun, dengan memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang serta pemulihan pasca COVID-19.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 18) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 19) Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- 20) Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/02474 tentang Pedoman Penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Pra RKA PD) Tahun Anggaran 2024;
- 21) Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/04391 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan Rencana Kerja BPBD jangka pendek 1 tahun untuk tahun anggaran 2024.
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan BPBD dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renja BPBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Pedoman bagi seluruh jajaran aparatur BPBD dalam menjalankan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD dalam Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyajian Renja BPBD Tahun 2024 dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD dan Capaian Renstra BPBD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
- 2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

BAB. V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk memantapkan program dan kegiatan tahun 2024 diperlukan evaluasi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses program dan kegiatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD dan Capaian Renstra BPBD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungannya. Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis BPBD Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2022.

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun anggaran 2022, BPBD mendapatkan anggaran sebesar Rp 4.954.422.684,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, anggaran yang terserap sebesar Rp 4.769.048.045,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah) atau 96,28% dari total anggaran pada tahun anggaran 2022. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 184.174.639,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s.d. Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	0		100 Persen		100 Persen		94.83%	100 Persen	100 Persen	100,00%
1	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan baik	5 Dokumen		17 dokumen		100,00%	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%
1	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	5	1			1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kesepakatan 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kesepakatan 1 dokumen	100,00%			
			7 dokumen					7 dokumen	7 dokumen	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 1						1 Dokumen	1 Dokumen	98,86%		
2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA PD								
0 1			2 dokumen						2 dokumen	100,00%
1 0 5 1						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA PD								
0 1			1 dokumen						1 dokumen	100,00%
1 0 5 1						1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100,00%		
2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Jumlah dokumen Jankin								
0 1			2 dokumen						2 dokumen	100,00%
1 0 5 1						1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100,00%		
2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA PD Jumlah perubahan perjanjian kinerja PD								
0 1			1 dokumen						1 dokumen	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 1 0 2.01 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	17 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		17 dokumen	100,00%
1 0 5 1 0 2.01 0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.1.02.02.01.0045 : Kab. Gunungkidul	7 dokumen		12 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	12 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	100,00%			
1 0 5 1 0 2.02 0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan disusun	30 Dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%		7 dokumen	100,00%
1 0 5 1 0 2.02 0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14 bulan		14 Bulan	14 Bulan	100,00%		30 dokumen 14 bulan	100,00%
1 0 5 1 0 2.02 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 orang/bulan		1 Laporan	1 Laporan	100,00%		7 dokumen	100,00%
1 0 5 1 0 2.02 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun PD	1 dokumen		1 Laporan	1 Laporan	100,00%		308 orang/bulan	100,00%
1 0 5 1 0 2.02 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen		1 Laporan	1 Laporan	100,00%		1 dokumen	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 1	0 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 1 Laporan	100%			
1 0 5 1	0 2.05 3	Administrasi Kepegawaian Daerah dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		28 dokumen	22 orang	22 orang	100,00%	12 laporan	100,00%
1 0 5 1	0 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi administrasi kepegawaian		22 orang	22 orang	100,00 %	22 orang	22 orang	100,00%
1 0 5 1	0 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dikirim mengikuti diklat		5 dokumen	5 dokumen	100,00 %	5 dokumen	5 dokumen	100,00%
1 0 5 1	0 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		22 orang	22 orang	100,00 %	20 orang	20 orang	100,00%
1 0 5 1	0 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah tersedia		8 Jenis	8 Jenis	100,00 %	8 jenis	8 jenis	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 1	2.06	0	0	0	1	0	1	0	0	0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik tersedia			6 paket	6 paket	100,00 %		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						4 paket	100,00%
1 0 5 1	2.06	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor tersedia			12 Jenis	12 Jenis	100,00%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						10 paket	100,00%
1 0 5 1	2.06	0	0	0	3	0	0	0	0	0
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor			6 paket	6 paket	100,00%		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						4 paket	100,00%
1 0 5 1	2.06	0	0	0	5	0	0	0	0	0
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan			5 paket 2000 lembar 60 bendel	5 paket 2000 lembar 60 bendel	100,00%		
			Jumlah foto copy dokumen							
			Jumlah penjilidan dokumen						6 paket	100,00%
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							
1 0 5 1	2.06	0	0	0	6	0	0	0	0	0
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rekening surat kabar yang dibayarkan			24 Rekening	24 Rekening	100,00%		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						720 Dokumen	100,00%
1 0 5 1	2.06	0	0	0	8	0	0	0	0	0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 1	2.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan pada rapat konsultasi dan koordinasi di luar daerah Jumlah penyediaan makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	12 laporan	22 OH 800 OR	22 OH 800 OR	100,00%	12 laporan	100,00%
1 0 5 1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pembelian barang milik daerah	127 unit	5 unit	5 unit	100,00%	127 unit	100,00%
1 0 5 1	2.07	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					89 unit	100,00%
1 0 5 1	2.07	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian Laptop Jumlah pembelian Printer dotmatric Jumlah pembelian tangga teleskopik		1 unit 2 unit 1 unit 9 unit	1 unit 2 unit 1 unit 9 unit	100,00%		
1 0 5 1	2.07	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					25 unit	100,00%
1 0 5 1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang administrasi perkantoran tersedia	4 Jenis	3 jenis	3 jenis	120,19%	1 unit 3 jenis	100,00%
1 0 5 1	2.08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	28 laporan	800 surat	1771 surat	221.38%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28 laporan				28 laporan	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 1	2.08 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa rekening air kantor Jumlah jasa sarana telepon kantor		12 rekening 12 rekening	21 rekening 12 rekening	109,38%			
			Jumlah jasa sarana listrik kantor Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		72 rekening	72 rekening		96 rekening	96 rekening	100,00%
1 0 5 1	2.08 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa sewa tanah repiter PB		2 Lokasi	1 Lokasi	50,00%			
1 0 5 1	2.08 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terfasilitasi jasa pelayanan administrasi umum kantor tersedia		12 bulan	12 bulan	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		16 laporan			16 laporan	16 laporan	100,00%
1 0 5 1	2.09 0 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa layanan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran		5 Jenis	5 Jenis	100,00%		5 Jenis	100,00%
1 0 5 1	2.09 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas terbayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan 6 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		28 unit 8 unit 20 unit	28 unit 8 unit 20 unit	100,00%			
			Jumlah pemeliharaan mebelair kantor		26 unit			31 unit	31 unit	100,00%
1 0 5 1	2.09 0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebelair kantor		4 paket	4 paket	100,00%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit				30 unit	30 unit	100,00%	
1	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
0	2.09									
5	1									
		Jumlah Pemeliharaan Komputer Jumlah Pemeliharaan Laptop Jumlah Pemeliharaan Mesin Ketik Jumlah Pemeliharaan Printer Jumlah perbaikan peralatan Repiter PB Jumlah Perbaikan peralatan SAR Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit 3 unit 2 unit 4 unit 2 unit 4 unit							
							46 unit	46 unit	100,00%	
1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
0	2.09									
5	1									
		Jumlah gedung kantor terfasilitasi pemeliharaannya.	2 gedung							
							46 unit			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit							
1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
0	2.09									
5	1									
		Jumlah pemeliharaan AC gedung	4 Unit							
							46 unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit							
1	0	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
0										
5	3									
		Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana	100 Persen							
							100 Persen	100 Persen	100,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 3	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota tersedia	2 jenis		2 Jenis	100,00%	2 jenis	2 jenis	100,00%
1 0 5 3	2.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) semua potensi bencana		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%			
1 0 5 3	2.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah desa tersosialisasi PRB Jumlah bulan jasa spot iklan informasi PRB Jumlah desa tersosialisasi PRB (PIWK)		1 kalurahan 10 bulan	1 kalurahan 10 bulan	100,00%			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai di Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	60 orang				60 orang	60 orang	100,00%
1 0 5 3	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah desa rawan bencana terbentuk menjadi desa tangguh bencana	100 Persen	2 desa	2 desa	103,92%	2 desa	2 desa	100,00%
			Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	24 dokumen				24 dokumen	24 dokumen	100,00%
1 0 5 3	2.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kalurahan yang memiliki relawanan terlatih		2 Desa	2 Desa	100,00%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 0 2.02 0 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	140 orang			30 unit	30 unit	100,00%	140 orang	100,00%
1 0 5 0 2.02 0 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Seragam TRC dan Petugas Kedaruratan				30 stel	30 stel	100.00 %		
1 0 5 0 2.02 0 5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan APD personil (mantol)				4 Kesepakatan 1 Kali	4 Kesepakatan 1 Kali	100.00 %		
1 0 5 0 2.02 0 6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa/kalurahan tangguh bencana terbentuk; Jumlah pembentukan SPAB; Jumlah Kalurahan Tangguh Bencana Terbentuk (Pokir)	5 kawasan			2 kalurahan 3 sekolahan 1 kalurahan	3 kalurahan 3 sekolahan 1 kalurahan	100.00 %	5 kawasan	100,00%
		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							5 kawasan	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 0 2.02 0 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penerima bantuan stimulan penangananan Infrastruktur desa terdampak bencana Jumlah KK penerima bantuan stimulan penangananan /pemberian bantuan individu terdampak bencana Jumlah kesepakatan koordinasi dan pemantauan penilaian pascabencana	5 lokasi 12 KK 0 kesepakatan		5 lokasi 12 KK 4 kesepakatan	123,53%				
1 0 5 0 2.02 0 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitu Pasna) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	15 dokumen				21 dokumen	21 dokumen	100,00%	
1 0 5 0 2.02 0 9	Penyusunan Rencana Kontinjens	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	24 orang				24 orang	24 orang	100,00%	
1 0 5 0 2.02 0 9	Penyusunan Rencana Kontinjens	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100,00%	
1 0 5 0 2.02 1 0	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 orang				300 orang	300 orang	100,00%	
1 0 5 0 2.02 1 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	umlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 0 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penanganan kejadian bencana	100 Persen		200 kejadian	200 kejadian	96,76	200 kejadian	200 kejadian	100,00%
1 0 5 0 2.03	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah lokasi kegiatan penanganan pemakaman korban wabah covid			1 lokasi	1 lokasi	100,00%			
1 0 5 0 2.03	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	12 laporan							
1 0 5 0 2.03	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan air bersih bagi korban terdampak kekeringan			800 tangki	378 tangki	47,25%			
1 0 5 0 2.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100,00%
1 0 5 0 2.03	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan kejadian bencana; Jumlah penyediaan jasa relawan TRC PB			100 lokasi 24 orang	100 lokasi 24 orang	100,00%			
1 0 5 0 2.03	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik bantuan bagi korban bencana Jumlah bahan/peralatan penanganan darurat bencana Jumlah jasa sewa alat evakuasi bencana			200 paket 1 paket 2 jasa	200 paket 1 paket 2 jasa	100,00%			
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 orang					300 orang	300 orang	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 0 2.03 0	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana tersedia	12 Laporan		12 dokumen	16 dokumen	133,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
1 0 5 0 2.03 0	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Jumlah bahan penanganan kejadian darurat bencana wabah			4 paket	4 paket	100,00%			
1 0 5 0 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana tersusun	3 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	100,00%
1 0 5 0 2.04 0	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100,00%
1 0 5 0 2.04 0	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100,00%
1 0 5 0 2.04 0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 laporan					2 laporan	2 laporan	100,00%
1 0 5 0 2.04 0	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 Persen				100,00%	100 Persen	100 Persen	100,00%
1 0 5 0 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Jumlah penanganan kejadian kebakaran			50 lokasi		100,00%	50 lokasi	50 lokasi	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 5 0	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2.01 0 4 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kejadian kebakaran	50 lokasi		50 lokasi	100,00%				
1 0 5 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Gunungkidul Jumlah bulan terfasilitasi layanan pemadaman kebakaran Jumlah air pemadaman api Jumlah pelaporan kejadian kebakaran	1 Dokumen				1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	100,00%
2.01 0 4 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lokasi penanganan kejadian kebakaran/penyelamatan non kebakaran	12 laporan						12 laporan	100,00%
2.01 0 4 4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan /zat pemadam api cair Jumlah pengisian tabung apar	50 lokasi		50 lokasi	100,00%				
2.01 0 4 5	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				50 liter 10 unit	100,00%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
105020106	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah peralatan pemadam kebakaran/pelindung diri Jumlah seragam petugas pemadam kebakaran Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	38 unit		2 unit 28 stel	2 unit 28 stel	100,00%	38 unit	38 unit
105020106	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	24 orang					24 orang	24 orang
105020200	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1 dokumen		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen
105020201	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			1 laporan	1 laporan	100,00%		
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen
105020400	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan	30 orang						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1										
0										
2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	bencana kebakaran setiap tahunnya	30 orang				30 orang	30 orang	100,00%	
0										
4										
5										
1										
0										
2.04										
0										
4										
5										

Tabel 2.2
Realisasi Penyerapan Keuangan Pada Tahun Anggaran 2022

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penyerapan Keuangan				
			Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)
1.0 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.917.885.684	2.917.885.684	100,00	2.793.209.624	95,73	124.676.060
1.0 5 1 2 1	Perencanaan, penangan, dan evaluasi Kinerja PD	35.099.000	35.099.000	100,00	34.942.000	99,55	157.000
1.0 5 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.399.000	29.399.000	100,00	29.292.000	99,64	107.000
1.0 5 1 2 1 2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	-
1.0 5 1 2 1 3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	-
1.0 5 1 2 1 4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-
1.0 5 1 2 1 5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	800.000	800.000	100,00	750.000,00	93,75	50.000
1.0 5 1 2 1 6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	500.000	100,00	500.000	100,00	-
1.0 5 1 2 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	2.600.000	100,00	2.600.000	100,00	-
1.0 5 1 2 2	Admintrasi Keuangan PD	2.338.200.684	2.338.200.684	100,00	2.222.229.797	95,04	115.970.887
1.0 5 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.311.731.684	2.311.731.684	100	2.196.439.797	95,01	115.291.887
1.0 5 1 2 2 5	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	970.000	970.000	100,00	900.000	92,78	70.000
1.0 5 1 2 2 7	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.499.000	25.499.000	100,00	24.890.000	97,61	609.000
1.0 5 1 2 5	Admintrasi Kepegawaian PD	2.350.000	2.350.000	100,00	2.350.000	100,00	-
1.0 5 1 2 5 3	Pendataan dan pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	-
1.0 5 1 2 5 3	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	1.950.000	1.950.000	100,00	1.950.000	100,00	-
1.0 5 1 2 6	Admintrasi Umum PD	88.379.000	88.379.000	100,00	87.561.700	99,08	817.300
1.0 5 1 2 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	100,00	5.997.500	99,96	2.500

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penyerapan Keuangan				
			Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)
1.0 5 1 0 2 6 2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	27.000.000	27.000.000	100,00	27.000.000	100,00	-
1.0 5 1 0 2 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	7.000.000	100,00	6.952.500	99,32	47.500
1.0 5 1 0 2 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	100,00	8.999.600	100,00	400
1.0 5 1 0 2 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	100,00	2.160.000	90,00	240.000
1.0 5 1 0 2 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	36.979.000	36.979.000	100,00	36.452.100	98,58	526.900
1.0 5 1 0 2 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.000.000	19.000.000	100,00	18.315.000	96,39	685.000
1.0 5 1 0 2 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	19.000.000	100,00	18.315.000	96,39	685.000
1.0 5 1 0 2 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.198.000	152.198.000	100,00	146.073.467	96,01	6.074.533
1.0 5 1 0 2 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.629.000	22.629.000	100,00	22.284.000	98,48	345.000
1.0 5 1 0 2 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	70.100.000	70.100.000	100,00	66.447.467	94,79	3.652.533
1.0 5 1 0 2 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	4.000.000	100,00	2.000.000	50,00	2.000.000
1.0 5 1 0 2 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.419.000	55.419.000	100,00	55.342.000	99,86	77.000
1.0 5 1 0 2 9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.809.000	280.809.000	100,00	279.837.660	99,65	971.340
1.0 5 1 0 2 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	216.019.000	216.019.000	100,00	215.850.260	99,92	168.740
1.0 5 1 0 2 9 5	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	-
1.0 5 1 0 2 9 6	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	31.400.000	31.400.000	100,00	30.765.400	97,98	634.600
1.0 5 1 0 2 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	28.390.000	28.390.000	100,00	28.222.000	99,41	168.000
1.0 5 1 0 2 9 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
1.0 5 1 0 2 3	Penataan Organisasi	1.900.000	1.900.000	100,00	1.900.000	100,00	-
1.0 5 1 0 2 3 2	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	1.900.000	1.900.000	100,00	1.900.000	100,00	-
1.0 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.454.537.000	1.454.537.000	100,00	1.396.923.421	96,04	57.613.579

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penyerapan Keuangan				
			Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)
1.0 5 3 2 0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	279.420.000	279.420.000	100,00	279.390.000	99,99	30.000
1.0 5 3 2 0 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	-
1.0 5 3 2 0 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	29.420.000	29.420.000	100,00	29.390.000	99,90	30.000
1.0 5 3 2 0 2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	441.137.000	441.137.000	100,00	440.959.036	99,96	177.964
1.0 5 3 2 0 2	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	8.000.000	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	-
1.0 5 3 2 0 3	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	-
1.0 5 3 2 0 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	-
1.0 5 3 2 0 5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	100,00	34.913.000	99,75	87.000
1.0 5 3 2 0 6	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	218.865.000	218.865.000	100,00	218.815.000	99,98	50.000
1.0 5 3 2 0 7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	161.272.000	161.272.000	100,00	161.231.036	99,97	40.964
1.0 5 3 2 0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	733.980.000	733.980.000	100,00	676.574.385	92,18	57.405.615
1.0 5 3 2 0 0	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-
1.0 5 3 2 0 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	226.200.000	226.200.000	100,00	174.977.560	77,36	51.222.440
1.0 5 3 2 0 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	220.400.000	220.400.000	100,00	216.020.000	98,01	4.380.000
1.0 5 3 2 0 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	147.980.000	147.980.000	100,00	146.176.825	98,78	1.803.175
1.0 5 3 2 0 5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	134.400.000	134.400.000	100,00	134.400.000	100,00	-
1.0 5 3 2 0 6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik /Wabah Penyakit	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	-
1.0 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DANPENYELAMATAN NON KEBAKARAN	580.800.000	580.800.000	100,00	578.915.000	99,68	1.885.000
1.0 5 4 2 0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	578.800.000	578.800.000	100,00	576.985.000	99,69	1.815.000
1.0 5 4 2 0 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	547.600.000	547.600.000	100,00	546.065.000	99,72	1.535.000

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penyerapan Keuangan				
			Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)
1.0 5 4 2 1 3 0	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12.000.000	12.000.000	100,00	11.920.000	99,33	80.000
1.0 5 4 2 1 4 0	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	-
1.0 5 4 2 1 6 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	13.200.000	13.200.000	100,00	13.000.000	98,48	.200.000
1.0 5 4 2 2 0	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	2.000.000	2.000.000	100,00	1.930.000	96,50	70.000
1.0 5 4 2 2 1 0	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2.000.000	2.000.000	100,00	1.930.000	96,50	70.000
	JUMLAH	4.953.222.684	4.953.222.684	100,00	4.769.048.045	96,28	184.174.639

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2022 serapan anggaran sampai dengan Desember 2022 pada semua program dan kegiatan telah dilaksanakan dan sebagian besar telah mencapai target kinerja yang direncanakan.

Sedangkan target yang kegiatan yang tidak terserap secara maksimal adalah pada:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hal ini dikarenakan sewa tanah untuk repeater PB hanya terbayarkan 1 lokasi saja yaitu di Kapanewon Ponjong, sedangkan repeater Gunung Gentong BPBD Kabupaten Gunungkidul tidak perlu membayar sewa tanahnya.
- 2) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini diperuntukan untuk penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, dari target 800 tangki air yang harus didistribusikan kepada masyarakat hanya tersalurkan 368 tangki. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terjadi kemarau basah, dan pada bulan Oktober 2022 sudah memasuki musim hujan, sehingga masyarakat tidak memerlukan bantuan air bersih.

Terhadap kendala serapan dan pencapaian target di atas maka BPBD Gunungkidul berupaya melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal :
 - a. belum optimalnya pelaksanaan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana;
 - b. belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. belum optimalnya implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana;
 - d. belum optimalnya penerapan sistem penanganan bencana pada fasilitas umum;
 - e. belum optimalnya pelayanan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. belum optimalnya pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
 - g. belum terpenuhinya wilayah manajemen kebakaran di Kabupaten Gunungkidul;
 - h. belum optimalnya pendataan, sosialisasi, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran;
 - i. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai;
 - j. kurangnya ketersediaan anggaran operasional, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD belum optimal;
 - k. belum optimalnya keterpaduan dalam manajemen penanggulangan bencana di daerah.
2. Faktor eksternal :
 - a. kondisi geografis dan luas wilayah mengakibatkan sulitnya akses;
 - b. kondisi cuaca dan iklim yang tidak bisa diprediksi;
 - c. masih banyak penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana dan cukup terpencil (bencana tanah longsor);
 - d. kondisi kemampuan ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah;
 - e. masih kurangnya peran serta masyarakat dunia usaha dalam pengurangan resiko bencana;
 - f. kegiatan pembangunan yang belum berwawasan bencana; dan

g. kegiatan masyarakat lebih kepada aspek ekonomi (*profit oriented*).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKU, IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, juga berdasarkan hasil analisis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan Perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana, dan mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanggulangan bencana;
- 4) penetapan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- 5) penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) pelaksanaan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- 7) penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- 8) pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 9) pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 10) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 11) pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 12) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- 13) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penanggulangan bencana;
- 14) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanggulangan bencana;
- 15) pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 16) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan bencana; dan
- 17) pengelolaan UPT.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Ranwal BPBD, adalah sebagai berikut :

- 1) Berpedoman pada SPM, Program Prioritas Pusat (BNPB) Program Prioritas Provinsi, dan Kabupaten .

- 2) Penyusunan Ranwal BPBD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- 3) Rumusan program/kegiatan di dalam Ranwal BPBD didasarkan atas pertimbangan urutan-urutan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan bencana dan kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan indikator kinerja utama pelayanan di bidang penanggulangan bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 369/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat.

Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah kalurahan tangguh bencana terbentuk}}{\text{Jumlah kalurahan}} \times 100\%$

Pada tahun anggaran 2022 melalui APBD Kabupaten Gunungkidul ditargetkan 3 (tiga) kalurahan yang terbentuk menjadi kalurahan tangguh bencana. Realisasinya adalah sebanyak 3 (tiga) kalurahan tangguh bencana terbentuk atau 100%. Yaitu Kalurahan Candirejo (Semanu), Karangasem (Paliyan), dan Kalurahan Pengkok (Patuk).

Sedangkan melalui APBD DIY dalam hal ini BPBD DIY, kalurahan tangguh bencana yang sudah terbentuk pada tahun anggaran 2022 sebanyak 5 kalurahan, antara lain: Kalurahan Gari (Wonosari), Pringombo (Rongkop), Kemiri (Tanjungsari), Kedungkeris (Nglipar), dan Kalurahan Bleberan (Playen). Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana melalui APBDP DIY Tahun Anggaran 2022 antara lain Kalurahan Mulusan (Paliyan), Mulo (Wonosari), dan Kalurahan Gading (Playen).

Sehingga capaian sampai dengan tahun 2022, sebanyak 82 kalurahan telah terbentuk menjadi Kalurahan Tangguh Bencana, atau baru 57% dari total kalurahan di Gunungkidul.

2. Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani

Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah kejadian bencana kebakaran tertangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana kebakaran}} \times 100\%$

Capaian untuk indikator ini adalah 100%. Namun demikian *respon time* terhadap kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran tidak bisa seluruhnya sesuai target yaitu 15 menit. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang luas dan pos pemadam kebakaran hanya 1 yaitu di Kapanewon Wonosari. Diharapkan ada penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran di masing-masing Kapanewon.

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka pemerintah daerah berupaya mewujudkan pelaksanaan penerapan dan pencapaian 15 bidang jenis pelayanan dasar. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah ditetapkan 4 (empat) Indikator Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaiannya target indikator kinerja yang ada dalam SPM dilaksanakan melalui program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam dengan 3 (tiga) jenis kegiatan dari pra bencana, tanggap darurat hingga pascabencana. Sedangkan evaluasi pengukuran penerapan dan pencapaian SPM bidang penanganan kebakaran diukur dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran. Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Indikator Kinerja pada Standar Pelayanan Minimal tersaji dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A.	Indikator Kinerja Utama											
	Prosentase penanganan bencana.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
B.	Indikator SPM											
	Urusan Bencana											
1	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
	layanan penyelamatan dan evakasi korban kebakaran.											
	Urusan Pemadam Kebakaran											
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten	%	35,60	35,60	11,86	11,86	6,73	6,73	11,86	11,86	11,86	
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	80	80	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	18	22	0	5	0	0	0	0	5	
4.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	%	100	100	60	60	57,14	57,14	60	60	60	

Tabel 2.4
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
Triwulan IV Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Kebencanaan	Triwulan IV			Total Pencapaian
		Indikator Capaian / Output			
(1)	(2)	(3)			(4)
Kategori Indeks Pencapaian SPM Kebencanaan					100%
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)				100%
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	2	2	-	100%
	Presentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	1 . Pemetaan Terhadap Lokasi/Daerah Rawan Bencana Melalui Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	-	100%
	2 . Identifikasi Dan Pemetaan Terhadap Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana	1	1	-	100%
	3 . Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	3	3	-	100%
	4 . Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi Dan Papan Informasi Publik Per Jenis Bencana	3	3	-	100%
	5 . Identifikasi Warga Yang Berpotensi Menjadi Korban Bencana	758168	758168	-	100%
2.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	2	2	-	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%
	1 . Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	70	70	-	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Kebencanaan	Triwulan IV			Total Pencapaian
		Indikator Capaian / Output			
	2 . Peningkatan Kapasitas Personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	80	80	-	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	376	376	-	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				100%
	1 . Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12	12	-	100%
	2 . Pendataan Terhadap Warga Yang Terkena/Menjadi Korban Bencana	3573	3573	-	100%
	3 . Melakukan Respon Cepat Klb Dan Respon Cepat Darurat Bencana	376	376	-	100%
	4 . Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit KLB/Wabah Zoonosis Prioritas	54	54	-	100%
	5 . Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	3573	3573	-	100%

Tabel 2.5
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Triwulan IV Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Kebencanaan	Triwulan IV			Total Pencapaian
		Indikator Capaian / Output			
(1)	(2)	(3)			(4)
Kategori Indeks Pencapaian SPM Damkar					73.66 %
1.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)				73.66 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	54.40 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani:	50	34	16	68.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				19.26 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	96.32 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Kebencanaan	Triwulan IV			
		Indikator Capaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak Diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba Di Lokasi	34	29	5	85.29 %
	2 . Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan Dan Evakuasi	2	2	-	100%
	3 . Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Penyelamatan Dan Evakuasi	4	4	-	100%
	4 . Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan/Sumber Daya Manusia	24	24	-	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan data pencapaian kinerja pelayanan BPBD kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang harus ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang. Beberapa isu strategis tersebut adalah:

1. BPBD perlu terus berupaya dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di sekretariat.
2. Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, dan ketentuan lainnya. Hal ini tentunya kedepan menjadi tantangan bagi BPBD dalam upaya pemenuhan pencapaian penerapannya.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul mencapai 73,66% dengan predikat sedang. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang luas, sedangkan WMK yang dimiliki hanya 1, yaitu yang berada di Kapanewon Wonosari (Kantor BPBD). Jarak jangkauan yang menjadi kendala utama ini secara bertahap akan segera ditindak lanjuti, pada tahun 2023 akan dibangun Pos Pembantu Pemadam Kebakaran di Kapanewon Karangmojo, sedangkan sarana prasarannya akan diusulkan selain melalui APBD Kabupaten, juga melalui Dana Keistimewaan ataupun usulan ke pemerintah pusat. Selain itu, diperlukan alokasi penambahan Pos Pembantu PBK yang berlokasi di kecamatan.
4. Dari sisi tingkat waktu tanggap, kemampuan BPBD sudah dapat melampaui target nasional. Prosentase tersebut didasarkan pada data kejadian kebakaran yang terjadi dan yang dapat tertangani. Berdasarkan data-data yang ada, kebakaran yang tidak tertangani akibat dari informasi yang terlambat datang ke pos PBK.

Keterlambatan informasi tersebut mengakibatkan kedatangan personil pemadam bersama kendaraan damkar juga mengalami keterlambatan. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan memberikan gladi/simulasi penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha.

5. Dari sisi jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar jumlah personil pemadam yang mengikuti diklat bersertifikat sebanyak 5 (lima) personil dari 29 personil damkar. Peningkatan kualitas perlu terus dilaksanakan dengan mengikutsertakan Aparatur PBK ke dalam diklat-diklat yang bersertifikasi.
6. Dari sisi peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana, perlu pengendalian dalam penggunaan dana keistimewaan untuk meningkatkan kesesuaian terhadap rencana tata ruang di kawasan rawan bencana.
7. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
8. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian masyarakat dalam bencana sehingga pengurangan risiko bencana dapat terbentuk.
9. Melakukan identifikasi, mengkaji, dan memantau risiko bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal.
10. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan kondisi riil yang ada saat ini, faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi BPBD Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut:

Tantangan:

1. kondisi geografis wilayah dengan beragam ancaman bencana;
2. pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta penyebarannya yang tidak merata di wilayah rawan bencana;
3. perubahan iklim global yang berpengaruh pada cuaca lokal dan mengakibatkan kejadian bencana;
4. kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan risiko bencana;
5. kerentanan masyarakat tentang bencana relatif masih tinggi baik dari sisi kependudukan, ekonomis maupun fisik lingkungan; dan
6. kegiatan pembangunan yang belum berwawasan bencana;

Peluang :

1. adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur khusus urusan penanggulangan bencana;
2. adanya lembaga khusus penanggulangan bencana dari tingkat pusat sampai daerah;
3. adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari penanganan darurat (*emergency response*) menjadi pengurangan resiko bencana (*disaster risk reduction*);
4. urusan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat;
5. partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di lingkungan masing-masing;

6. adanya program-program terpadu secara lintas sektor sebagai wujud tanggung jawab bersama;
7. meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional di bidang penanggulangan bencana;
8. perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi di bidang penanggulangan bencana;
9. tersedianya EWS (*early warning system*); dan
10. partisipasi organisasi masyarakat, perguruan tinggi, komunitas dan relawan dalam penanggulangan bencana cukup tinggi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD mengalami beberapa hambatan dan kendala baik dari internal maupun eksternal. Antara lain:

1. Pandemi covid-19
2. Cakupan pelayanan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang hampir 46% dari luas wilayah DIY dan karena keberagaman ancaman bencana yang ada memerlukan perhatian yang lebih serius dalam upaya penanggulangan bencana.
3. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbukit-bukit dan kerentanan dari sisi fisik, ekonomi yang cukup tinggi serta masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
4. Keterbatasan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) saat ini yang hanya 1 WMK untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Baru pengadaan lahan WMK dan pembangunan pagar di Kapanewon Karangmojo, yang nantinya akan dapat mengampu Kapanewon Semanu, Ponjong, Karangmojo, Semin, dan Kapanewon Ngawen. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan dan barat belum ada WMK.
5. Keterbatasan kuantitas dan kualitas personil yang ada pada BPBD yang masih kurang dari kebutuhan ideal dan belum sesuai dengan analisa jabatan.
6. Kompetensi pelaksana teknis pada UPT PBK belum ada yang memenuhi standar kualifikasi.
7. Belum tersusunnya peraturan bupati tentang bantuan khusus kepada korban bencana.

Terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi BPBD berdampak dalam perwujudan misi dan sasaran pembangunan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul, BPBD berupaya untuk:

- a) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- b) meningkatkan persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini secara efektif dengan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kedaruratan dan logistik dan penanganan pasca bencana;
- c) memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ketugasan;
- d) meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, wawasan, keterampilan dan profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada; dan

- e) menciptakan sistem manajemen penanggulangan bencana yang terpadu dengan melibatkan seluruh unsur.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Kalurahan maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunan Renja mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Review terhadap rancangan awal Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.568.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.424.697.974	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100 persen	2.707.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100 persen	1.733.775.474	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan tersusun (Dokumen)	7 dokumen	43.700.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan tersusun (Dokumen)	7 dokumen	24.682.500	
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	17.400.000	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	24.682.500	THL 1 Orang, Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	800.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	16.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan disusun	30 dokumen	1.988.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan disusun	30 dokumen	1.454.112.974	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 orang	1.917.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 orang	1.403.512.974	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	24.682.500	THL 1 orang, Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	28 dokumen	41.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	28 laporan	25.917.500	THL 1 orang, Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN Terlayani Kepegawaian	22 orang	7.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN Terlayani Kepegawaian	22 orang ASN	23.447.500	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	23.447.500	THL 1 orang, Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah tersedia (Jenis)	8 jenis	210.300.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah tersedia (Jenis)	8 jenis	20.138.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	155 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

No	Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	38.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	7.620.000	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	9.618.500	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.900.000	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	3.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	113.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pembelian barang milik daerah (Jenis)	5 jenis	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pembelian barang milik daerah (Jenis)	127 unit	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
						Pengadaan Mebel	KAB. GUNUNGKIDU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0 Unit	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KAB. GUNUNGKIDU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang administrasi perkantoran tersedia	4 jenis	108.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang administrasi perkantoran tersedia	4 jenis	210.394.000	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. GUNUNGKIDU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. GUNUNGKIDU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	114.345.400	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

No	Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	96.048.600	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa layanan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	5 jenis	350.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa layanan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	5 jenis	1.000.000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	263.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	0 unit	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391		
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	4.000.000	Pemeliharaan Mebel	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	37.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	1.000.000	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	42.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391		

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	4.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana (%)	100 persen	1.174.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana (%)	100 persen	981.572.500	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana mendapat informasi rawan bencana	2 jenis	15.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana mendapat informasi rawan bencana	2 jenis	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	60 orang	15.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sampang, Wonosari, Ngliundur, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	0 orang	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	24 dokumen	310.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	24 dokumen	24.682.500	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)	140 orang	20.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Beji (Ngawen), Plembutan (Playen), Giritirto (Purwosari), Banyusoco (Playen) Kab. Gunungkidul	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)	0 orang		Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang DitingkatkanKapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	5 dokumen	100.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Ngleri, Mertelu, Nglipar, Giripurwo, Kemadang,	Jumlah Kawasan yang DitingkatkanKapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	0 kawasan	24.682.500	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	15 dokumen	85.000.000						Sub kegiatan di pindah ke Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan Nomenklatur dan sistem SIPD
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	24 orang	15.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Siraman, Wonosari	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	0 orang	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	300 orang	40.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kalurahan Tepus Kab. Gunungkidul	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	0 orang	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dokumen)	1 dokumen	50.000.000						Sub kegiatan dilaksanakan di tahun 2023, anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah penanganan kejadian bencana	200 kejadian	797.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah penanganan kejadian bencana	200 kejadian	932.207.500	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	12 laporan	20.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	-		Sub kegiatan dihapus karena pandemi sudah melandai, anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	4 dokumen	217.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	4 dokumen	732.000.000	TRC 24 orang, dropping air, Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	300 orang	400.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	0 orang	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	12 laporan	160.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	12 laporan	200.207.500	THL 7 orang, Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana tersusun	3 dokumen	52.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana tersusun	3 dokumen	24.682.500	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Bencana di Daerah	1 Dokumen	40.000.000						Sub kegiatan dilaksanakan di tahun 2023, anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	4 Dokumen	10.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	KAB. GUNUNGKIDU L	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	3 Dokumen	2.000.000						Sub kegiatan tidak dilaksanakan karena terbatasnya

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
	Bencana Kabupaten/Kota		Penanggulangan Bencana								anggaran, anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	KAB. GUNUNGKIDU	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 laporan	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
						Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	KAB. GUNUNGKIDU	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 kegiatan	24.682.500	Sub kegiatan di pindah dari Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota ke Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan Nomenklatur dan sistem SJPD, THL 1 orang, Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)	100 persen	687.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)	100 persen	709.350.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan (Kegiatan/lokus)	50 lokasi	677.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan (Kegiatan/lokus)	50 kegiatan/lokus	709.350.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12 laporan	628.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12 laporan	709.350.000	THL 24 orang, Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai	40 unit	35.000.000						Karena terbatasnya anggaran, anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
			Standar Teknis Terkait (Unit)								
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	24 orang	10.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0 orang	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	2 dokumen	4.000.000						Karena terbatasnya anggaran, anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Jumlah dokumen hasil inspeksi peralatan pemadam kebakaran	1 Dokumen	5.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Jumlah dokumen hasil inspeksi peralatan pemadam kebakaran	1 Dokumen	-	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Ling yang Dipersyaratkan Ha Memiliki Sistem Proteks Kebakaran	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	KAB. GUNUNGKIDUL	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Ling yang Dipersyaratkan Ha Memiliki Sistem Proteks Kebakaran	0 Dokumen	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 orang	5.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Kebakaran Setiap Tahunnya	0 orang	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 Orang	5.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			Karena terbatasnya anggaran, anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
						Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Semoyo, giricahyo, kenteng, Kemiri	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0 kalurahan	-	Anggaran sub kegiatan disesuaikan dengan SE Bupati No 900.1.2.2/04391

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan dan Musrenbang Kapanewon. Namun demikian dengan adanya Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/04391 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, usulan dari masyarakat tersebut belum bisa diakomodir anggarannya. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagaimana Tabel 2.7 berikut ini

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (PIS dan PIWK)
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)	PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB
				TARGET 2024	PA GU INDIKA TIF (Rp)	LOKASI		
1	2	3	4	8	9	10	12	17
	1						955.053.000,00	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					955.053.000,00	
1	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					688.094.000,00	Badan Penang gulang an Bencan a Daerah
	1.05.03 .2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>(PIS) - Sosialisasi pengurangan risiko bencana</i>	1 Kali		<i>(Nglindur, Girisubo, Gunungkid ul, Girisubo) (Jalan Baron KM 13, Kab. Gunungkid ul, Tanjungsar i, Kemiri, Tanjungsar i)</i>	40.920.000,00 10.560.000,00	Badan Penang gulang an Bencan a Daerah
			<i>(PIS) - Sosialisasi pengurangan risiko bencana</i>	1 Kali		<i>(Kalurahan Wonosari, Wonosari)</i>	10.560.000,00	
			<i>(PIWK) - Sosialisasi pengurangan risiko bencana</i>	1 Kali		<i>(Kalurahan Sampang, Kab. Gunungkid ul, Gedangsar i)</i>	9.900.000,00	
			<i>(PIWK) - Sosialisasi pengurangan risiko bencana</i>	1 Kali			9.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)	PERAN GKAT DAERAH PENAN GGUN G JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
	1.05.03 .2.02	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				647.174.000,00	Badan Penang gulang an Bencan a Daerah	
			(PIS) - Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	1 Kali		(kalurahan kedungkeri s, Kab. Gunungkid ul, Nglipar)	35.486.000,00	
			(PIS) - Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	1 Kali		(Kalurahan Banyusoco , Playen, Gunungkid ul, Kab. Gunungkid ul , Playen)	35.486.000,00	
			(PIS) - Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	1 Kali		(Kalurahan Banyusoco , Playen, Gunungkid ul, Kab. Gunungkid ul , Playen)	35.486.000,00	
			(PIS) - Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	1 Kali		(Jalan Baron KM 13, Kab. Gunungkid ul, Tanjungsar i, Kemiri, Tanjungsar i)	35.486.000,00	
			(PIS) - Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	1 Kali		(widoro Rr 07/01, Kab. Gunungkid ul, Purwosari, Giripurwo , Purwosari)	35.486.000,00	
			(PIS) - Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	1 Kali		(karangten gah, Kab. Gunungkid ul, Purwosari, Girichay)	35.486.000,00	
			(PIWK) - Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	1 Kali		, Purwosari) (Plembutan , Playen)	35.486.000,00	
			(PIWK) - Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	1 Kali		(Daguran Lor RT 002/RW 006, Beji,	35.486.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)	PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
			(PIWK) - Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	1 Kali		Ngawen, Kab. Gunungkidul , Ngawen) (Giritirto, Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto , Purwosari)	35.486.000,00	
			(PIS) - Penyediaan sarana prasarana informasi rawan bencana	1 Paket		(kalurahan nglipar, nglipar, gunungkidul, Kab. Gunungkidul, Nglipar)	10.560.000,00	
			(PIS) - Penyediaan sarana prasarana informasi rawan bencana	1 Paket		(Bedoyo Kidul Rt01 Rw06, Kalurahan Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, Ponjong)	10.560.000,00	
			(PIS) - Penyediaan sarana prasarana informasi rawan bencana	1 Paket		(Kalurahan Mertelu, Kab. Gunungkidul , Gedangsari)	10.560.000,00	
			(PIS) - Penyediaan sarana prasarana informasi rawan bencana	1 Paket		(Kemadang Tanjungsari, Tanjungsari)	10.560.000,00	
			(PIS) - Penyediaan sarana prasarana informasi rawan bencana	1 Paket		(widoro 7/1, Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo , Purwosari)	10.560.000,00	
			(PIS) - Gladi lapang penanggulangan bencana	1 Kali		(desa tepus, Tepus)	55.000.000,00	
			(PIS) - Pembentukan Kaltana	1 Kali		(Kalurahan Tileng, Girisubo)	110.000.000,00	
			(PIWK) - Pembentukan Kaltana	1 Kali		(Ngleri, Playen)	110.000.000,00	
2	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,					266.959.000,00	Badan Penang gulangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)	PERAN GKAT DAERAH PENAN GGUN G JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
		PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						Bencana Daerah
	1.05.04 .2.04	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pembentukan Relawan Kebakaran tingkat Desa</i>	1 Kali		<i>(Nglipar kalurahan kedungkeris, Kab. Gunungkidul, Nglipar)</i>	266.959.000,00 38.137.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			<i>Pembentukan Relawan Kebakaran tingkat Desa</i>	1 Kali		<i>(Kalurahan Karangasem, Paliyan)</i>	38.137.000,00	
			<i>Pembentukan Relawan Kebakaran tingkat Desa</i>	1 Kali		<i>(Kalurahan Kenteng, Ponjong, Gunungkidul, Ponjong)</i>	38.137.000,00	
			<i>Pembentukan Relawan Kebakaran tingkat Desa</i>	1 Kali		<i>(Jalan Baron KM 13, Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Kemiri, Tanjungsari)</i>	38.137.000,00	
			<i>(PIS) - Pembentukan Relawan Kebakaran tingkat Desa</i>	1 Kali		<i>(Kalurahan Wonosari, Wonosari)</i>	38.137.000,00	
			<i>(PIS) - Pembentukan Relawan Kebakaran tingkat Desa</i>	1 Kali		<i>(Kalurahan Semoyo, Patuk)</i>	38.137.000,00	
			<i>(PIS) - Pembentukan Relawan Kebakaran tingkat Desa</i>	1 Kali		<i>(karangtengah, Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo, Purwosari)</i>	38.137.000,00	
J U M L A H							955.053.000,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam dokumen rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan dan pagu indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi pedoman acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada dengan tetap memperhatikan tema, prioritas pembangunan dan kebijakan nasional dengan memperhatikan dan mensinkronkan visi pada RPJMN dan RPJMD DIY.

Dalam penyusunan rencana kerja BPBD Kabupaten Gunungkidul mengacu pada kebijakan nasional dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong –royong”. Adapun Misi BNPB antara lain :

1. Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar Negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Selain memperhatikan kebijakan nasional, rencana kerja BPBD Kabupaten Gunungkidul juga berusaha menyelaraskan kebijakan di tingkat provinsi. Dimana sesuai dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka kebijakan penanggulangan D.I.Yogyakarta difokuskan untuk menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas, mengingat problem utama atau *root of the problem* dalam penanggulangan bencana adalah masih relatif tingginya kerentanan dan masih relatif rendahnya kapasitas, maka penyelenggaraan penanggulangan PB diarahkan pada penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas.

Masing-masing elemen pokok-pokok strategi dalam manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku koordinator, komando dan pelaksana penanggulangan bencana di daerah;
2. Penguatan kesiapsiagaan pada semua tingkatan masyarakat dan dunia usaha;
3. Melakukan Identifikasi dan Kajian Risiko Bencana;
4. Membangun Sistem Peringatan Dini yang handal;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengurangan risiko bencana;
6. Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana dalam rencana pembangunan daerah;
7. Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu dan komprehensif;
8. APBD yang berperspektif pengurangan risiko bencana;
9. Mendayagunakan rencana tata ruang wilayah sebagai untuk mengurangi risiko bencana;
10. Menyusun regulasi penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan daerah;
11. Menyusun mekanisme, standar dan kerangka kerja penanggulangan bencana;
12. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yg memiliki kompetensi dalam penanggulangan bencana;
13. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang handal;
14. Mengembangkan sistem informasi manajemen sumber daya penanggulangan bencana;
15. Melaksanakan penelitian, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
16. Mengkampanyekan budaya sadar bencana;
17. Membentuk dan mengembangkan desa atau kelurahan tangguh bencana;
18. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam program pendidikan;
19. Membentuk forum multipihak dalam penanggulangan bencana;
20. Membangun jejaring dengan lembaga penanggulangan bencana;
21. Mengembangkan Sistem Komando Tanggap Darurat;
22. Melakukan review dan simulasi rencana kontijensi dan darurat bencana secara berkala
23. Pemulihan menjadi sebuah kesempatan membangun dengan lebih baik;

24. Mencari sumber daya, memperkuat aliansi-aliansi, dan memastikan keberlanjutan (*sustainability*) proses pemulihan.

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut:

- a. Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026: “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”
- b. Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026:
 1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis.
 2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY.

Dari sasaran-sasaran daerah kemudian dijadikan landasan penentuan strategi pembangunan dan arah kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan lima tahun pertama sebagaimana digariskan dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul (RPJMD). Dimana RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi jangka Panjang tahun 2005-2025, dengan fokus kebijakan adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 yang mulai terjadi di awal tahun 2020 lalu.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra BPBD Tahun 2021- 2026 sehingga Renja BPBD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD, Renstra BPBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja BPBD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Rencana kerja ini disusun juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang serta pemulihan pasca covid-19, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran. BPBD berusaha untuk tetap konsisten dengan tujuan tugas pokok dan fungsi yang telah direncanakan, tentunya dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada tujuan, sasaran, tema dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah: “Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”.

Sedangkan isu strategis daerah

- Pilpres dan pilkada serentak tahun 2024
- Penanganan stunting
- Perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045

- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- Penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19
- Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 0 (nol) Kemiskinan Ekstrem
- Pengembangan potensi Pariwisata
- Peningkatan Investasi
- Perkembangan Teknologi Informasi
- Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana
- Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah
- Pengembangan inovasi daerah

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi;
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka BPBD mendukung dalam memecahkan isu strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana, serta pencapaian prioritas dan sasaran strategis infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana, dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, jenis bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah gempa bumi, gerakan tanah dan longsor, banjir, angin topan, kekeringan, gelombang pasang dan tsunami.

Tujuan dan sasaran kinerja BPBD adalah dalam rangka pencapaian prioritas infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana, serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Sasaran daerah adalah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat dengan strategi peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan indikator prosentase desa tangguh bencana. Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dari sasaran tersebut dirumuskan tujuan yang ingin dicapai untuk tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari prioritas sasaran daerah yang dilaksanakan melalui program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana dan program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Infrastruktur , Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks Ketahanan Daerah	Sistem penanggulangan bencana yang terencana integratif, dan responsif meningkat	Persentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat
2	Infrastruktur , Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks Ketahanan Daerah	Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani
3	Reformasi Biokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD
4	Infrastruktur , Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah	Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Persentase dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana

Tabel 3.2
Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan BPBD	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan BPBD Akhir Tahun 2026
1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana/kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	65,28
		Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	100
		Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana/kebakaran	83,5
2	Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Persentase dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	100

Tabel 3.3
Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran BPBD	Indikator Sasaran	Target Sasaran BPBD Tahun 2024
1	Sistem Penanggulangan bencana yang terencana integratif dan responsive meningkat	Persentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	58,33
	Peningkatan manajemen pengurangan resiko bencana/kebakaran	Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	82,5
2	Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Persentase dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	50

Dalam rangka pencapaian Tujuan Utama, BPBD telah menetapkan Indikator Tujuan Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 369/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Gunungkidul. Target, rumusan dan indikator kinerja utama pada BPBD tahun 2023 tersaji dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2024

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat	Persentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	100%
2	Peningkatan manajemen pengurangan resiko bencana/kebakaran	Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	100%

Indikator kinerja utama tersebut dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD. Indikator kinerja utama persentase penanganan bencana pencapaiannya diukur dengan membandingkan jumlah kejadian bencana yang tertangani dibagi total jumlah kejadian bencana dalam satu tahun. Tertangani disini adalah bahwa korban bencana terpantau, tercatat, terbantu dalam keadaan darurat hingga ke tahap rehabilitasi rekonstruksi. Salah satu dari komponen di atas ada menunjukkan bahwa korban bencana telah dapat tertangani.

Sedangkan arah kebijakan yang telah ditetapkan melalui rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan BPBD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana /kebakaran	Sistem penanggulangan bencana yang terencana integratif, dan responsif meningkat	1. Optimalisasi penanganan bencana 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana.	1. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana 3. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 4. Menjalin hubungan kerjasama pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lembaga /organisasi pemerhati bencana. 5. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana /kebakaran	Peningkatan pelayanan penanggulangan Bencana /kebakaran	1. Mengurangi potensi resiko bencana 2. Meningkatkan luas cakupan wilayah manajemen kebakaran 3. Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam penanggulangan bencana
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik PD	1. Mengembangkan pelayanan prima PD dalam pelayanan publik 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Peningkatan penyelenggaraan tata ruang keistimewaan berbasis pengurangan risiko bencana di kawasan SRS (Satuan Ruang	Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang di kawasan SRS berbasis pengurangan risiko bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategis)	

3.3 Program dan Kegiatan

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian pembangunan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan Program- program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 3.6
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	

Perumusan kegiatan BPBD Tahun 2024 mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Stándar Pelayanan Minimal Kebencanaan.
- 2) Pencapaian Indikator Kinerja Utama Bupati, yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
- 3) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- 4) Pencapaian tujuan dan sasaran BPBD
- 5) Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPBD
- 6) Pencapaian Perjanjian Kinerja BPBD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Gunungkidul, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Gunungkidul, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Gunungkidul.

4.1. Belanja Tidak Langsung

Selain melaksanakan program kegiatan yang secara langsung mendukung dalam pencapaian prioritas pembangunan, BPBD juga melaksanakan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah pembiayaan gaji dan tunjangan PNS BPBD yang berjumlah 22 orang. Perhitungan berdasarkan kondisi PNS di BPBD tahun anggaran 2023. Secara rinci kebutuhan belanja tidak langsung pembiayaan aparatur BPBD Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Pembiayaan Aparatur Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

REKENING	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.1.01.01.01.0001	Gaji Pokok/Uang Representasi	1	Tahun	1.066.541.213	1.066.541.213
5.1.01.01.02.0001	Tunjangan Keluarga	1	Tahun	109.069.253	109.069.253
5.1.01.01.03.0001	Tunjangan Jabatan	1	Tahun	136.850.000	136.850.000
5.1.01.01.05.0001	Tunjangan Fungsional Umum	1	Tahun	20.370.000	20.370.000
5.1.01.01.05.0001	Tunjangan Beras	1	Tahun	61.846.680	61.846.680
5.1.01.01.07.0001	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1	Tahun	8.823.522	8.823.522
5.1.01.01.08.0001	Pembulatan Gaji	1	Tahun	12.306	12.306
JUMLAH RENCANA PEMBIAYAAN				1.403.512.974	1.403.512.974

4.2 Rumusan Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh BPBD dengan dukungan PD lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Dasar dari rumusan program adalah sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Program juga dirumuskan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program yang dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan adalah upaya BPBD dalam mencapai target-target indikator sesuai dengan arah kebijakan dan tugas pokok fungsi BPBD.

Maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka BPBD termasuk dalam prioritas pembangunan “Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana” dengan sasaran daerah *“Ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat”*

Di samping program prioritas dan sasaran daerah dalam tugas pokok fungsi kelembagaan BPBD juga menjalankan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran dengan 4 (empat) indikator pencapaian target standar yang telah ditetapkan, dan 3 (tiga) Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Bencana. Program Kerja BPBD yang secara langsung mendukung tugas pokok dan fungsi pada tahun 2024 sebanyak 2 program yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan. Setiap program dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPBD. Keterkaitan prioritas, sasaran, tujuan dan program kegiatan yang ada pada BPBD disajikan dalam Tabel 4.2

Tabel 4.2
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
 Kabupaten Gunungkidul pada BPBD
 Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode				Urusan/ Bidang / Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana	Ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif dan responsif meningkat	Persentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	100 persen	1	05	03	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.690.922.500	BPBD
					1	05	03	05	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	981.572.500	BPBD
				1	05	03	01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		BPBD	
				1	05	03	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		BPBD	
				1	05	03	02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	24.682.500	BPBD	
				1	05	03	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		BPBD	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode				Urusan/ Bidang / Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
				1	05	03	2.0 2	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	24.682.500	BPBD
				1	05	03	2.0 2	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		BPBD
				1	05	03	2.0 2	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		BPBD
				1	05	03	2.0 3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	932.207.500	BPBD
				1	05	03	2.0 3	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	732.000.000	BPBD
				1	05	03	2.0 3	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		BPBD
				1	05	03	2.0 3	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	200.207.500	BPBD
				1	05	03	2.0 4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	24.682.500	BPBD

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode				Urusan/ Bidang / Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
				1	05	03	2.0 4	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		BPBD
				1	05	03	2.0 4	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		BPBD
				1	05	03	2.0 4	10	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	24.682.500	
		Respon cepat kejadian bencana/kebakaran	Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	709.350.000	BPBD
				1	05	04	2.0 1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	709.350.000	BPBD
				1	05	04	2.0 1	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	709.350.000	BPBD
				1	05	04	2.0 1	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		BPBD

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode				Urusan/ Bidang / Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
				1	05	04	2.0 2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		BPBD
				1	05	04	2.0 2	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		BPBD
				1	05	04	2.0 4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		BPBD
				1	05	04	2.0 4	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		BPBD

Jumlah program pada penanggulangan bencana pada BPBD tahun 2024 sebanyak 2 (dua) program dan terbagi dalam 7 (tujuh) kegiatan. Sesuai dengan prioritas dalam RPJMD penyebaran lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana diprioritaskan pada daerah rawan bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran tahun 2024 akan dilakukan penambahan Pos Pembantu Pemadam Kebakaran yang berlokasi di Kapanewon Saptosari. Penambahan ini ditujukan untuk penambahan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran yang dilaksanakan secara bertahap guna mendukung pencapaian target indikator amanat SPM. Saat ini WMK wilayah Karangmojo sudah pada tahapan pengadaan tanah dan pagar, sedangkan pembangunan gedung Pos Pembantu diharapkan dapat terlaksana pada tahun 2023 ini. Diharapkan pada tahun 2024 WMK Karangmojo segera berfungsi. Namun demikian, sampai tahun anggaran 2023 ini, sarana prasarana dan SDM pendukung untuk WMK Karangmojo belum ada.

Pada kegiatan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana untuk melaksanakan amanat dari SPM Penanggulangan bencana berupa pelayanan informasi potensi bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pada kegiatan penanganan darurat bencana adalah pelaksanaan dari amanat SPM tentang pelayanan penyelamatan dan evakuasi bencana.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi juga mendapat alokasi program dan kegiatan yang didanai dari APBD DIY melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD DIY, Dana Keistimewaan, maupun dari APBN melalui kegiatan-kegiatan BNPB. Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD DIY dan BNPB sejalan dengan program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana, pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan Sosialisasi pengurangan risiko bencana, serta pengadaan sarana prasarana. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu BPBD dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Selain program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD juga melaksanakan program kegiatan yang secara tidak langsung mendukung pencapaian kinerja. Program Kegiatan ini dilakukan di sekretariat sebagai unsur pendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan administrasi perkantoran. Program-program pendukung itu kemudian dijabarkan dalam kegiatan dalam rangka fasilitasi kelancaran kegiatan melalui penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran, penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, pelaporan keuangan, perencanaan kinerja dan pelaporan sampai dengan evaluasi pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah. Program kegiatan dimaksud seperti tersaji dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi BPBD
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

No.				Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju (2025)	SKPD
1				2	3	4	5
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.733.775.474	2.781.700.000	
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.682.500	56.000.000	BPBD
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.454.112.974	2.016.100.000	BPBD
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.447.500	7.000.000	BPBD
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.138.500	210.600.000	BPBD
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		BPBD
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.394.000	119.000.000	BPBD
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000	373.000.000	BPBD
TOTAL					1.733.775.474	2.781.700.000	

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024, yang dilakukan oleh BPBD adalah dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur dasar dan peningkatan pengelolaan bencana yang kemudian ditetapkan sasaran daerah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat. Sasaran ini diukur dengan pencapaian indikator persentase kalurahan tangguh bencana yang sudah dibentuk. Sasaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif dan responsif meningkat dengan indikator sasaran persentase kejadian bencana tertangani.

Secara keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Rencana Kerja ini untuk tahun anggaran 2024 melaksanakan 3 (tiga) Program yang terbagi dalam 14 (empat belas) kegiatan. Total rencana anggaran belanja operasional program dan kegiatan pada BPBD tahun 2024 sebesar Rp 3.424.697.974,00 dengan perkiraan maju pada tahun 2025 sebesar Rp 4.484.200.000,00. Terdapat 2 program yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yang terbagi dalam 7 kegiatan. Sementara 7 kegiatan merupakan kegiatan pendukung kinerja yang dilaksanakan di sekretariat BPBD. Sumber dana untuk pembiayaan program/kegiatan/sub kegiatan di tahun anggaran 2024 direncanakan berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian

dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/04391 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, beberapa kegiatan termasuk diantaranya untuk menunjang pencapaian SPM serta usulan dari masyarakat tersebut belum bisa diakomodir anggarannya.

Program dan kegiatan ini telah sesuai dengan Rencana Strategis BPBD Tahun 2021-2026. Dengan berkembangnya waktu, nantinya akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan melalui rencana kerja untuk tahun 2024. Dan dimungkinkan terdapat pergeseran, penyesuaian indikator maupun anggaran yang merupakan hasil dari perbandingan dengan peraturan baru tentang nomenklatur, penyederhanaan, dan efisiensi anggaran sebagai upaya dalam efektifitas penggunaan anggaran dan penyesuaian kebutuhan operasional. Penyesuaian juga akan dilakukan atas hasil evaluasi rencana kerja dan kebutuhan agar lebih sederhana dan terukur.

Secara terinci rumusan rancangan awal RKPD Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024				PAGU INDIKATIF (Rp)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	Program/K egiatan	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Kinerja	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	10				9	11		15	16	
1								3.424.697.974,00				4.484.200.000,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.424.697.974,00				4.484.200.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tertaksana Dengan Baik (%)	100 persen			100 persen	1.733.775.474,00				2.781.700.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan tersusun (Dokumen)	7 dokumen			7 dokumen	24.682.500,00			7 dokumen	56.000.000,00	
	1.05.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 dokumen			100 persen	24.682.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7 dokumen	25.500.000,00	
	1.05.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 dokumen			100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 dokumen	1.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
				LOKASI	Target Kinerja			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					Program/K egiatan	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	2	3	4	10			2 dokumen	100 persen	9	11	15	16
1.05.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)							Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.650.000,00
1.05.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)							Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2 dokumen	3.600.000,00
1.05.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)							Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.000.000,00
1.05.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)							Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4 laporan	5.000.000,00
1.05.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)							Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	7 laporan	17.600.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan disusun (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	30 dokumen					1.454.112.974,00		30 dokumen	2.016.100.000,00
1.05.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	308 orang					1.403.512.974,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	308 orang	1.969.500.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	Target Kinerja			PAGU INDIKATIF (Rp)		SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					Program/K egiatan	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	2	3	4	10				10	9	11	15	16
	1.05.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	1 laporan	100 persen	24.682.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24.682.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	1.100.000,00
	1.05.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	28 laporan	100 persen	25.917.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.917.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 laporan	45.500.000,00
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Terlayani Kepegawaian (Orang)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	22 orang	100 persen	23.447.500,00		23.447.500,00		22 orang	7.000.000,00
	1.05.01.2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	1 dokumen	100 persen	23.447.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.447.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 dokumen	2.000.000,00
	1.05.01.2.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 orang	100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 orang	5.000.000,00
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah tersedia (jenis)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	8 jenis	100 persen	20.138.500,00		20.138.500,00		8 jenis	210.600.000,00
	1.05.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 paket	100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	155 paket	6.600.000,00
	1.05.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	3 paket	100 persen	7.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	45.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCAANA TAHUN 2025		
				LOKASI	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					Program/K egiatan	Sub Kegiatan					
1	2	3	4	10			9	11		15	16
1.05.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 paket	100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 paket	11.400.000,00		
1.05.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	12 paket	100 persen	9.618.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	25.000.000,00		
1.05.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	2 dokumen	100 persen	2.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	5.000.000,00		
1.05.01.2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Tamu (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 laporan	100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	4.600.000,00		
1.05.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 laporan	100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	113.000.000,00		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pembelian barang milik daerah (Unit)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	127 unit	100 persen	-		127 unit	-		
1.05.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 unit	100 persen	-		0 unit	-		
1.05.01.2.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 unit	100 persen	-		0 unit	-		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	Target Kinerja			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					Program/K egiatan	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	2	3	4	10	4 jenis	0 laporan	100 persen	9	11	15	16	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang administrasi perkantoran tersedia (Jenis)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	4 jenis		100 persen	210.394.000,00		4 jenis	119.000.000,00	
	1.05.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)		0 laporan	100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	28 laporan	-	
	1.05.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)		96 laporan	100 persen	114.345.400,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	96 laporan	65.000.000,00	
	1.05.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)		12 laporan	100 persen	96.048.600,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	26 laporan	54.000.000,00	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa layanan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (Jenis)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	5 jenis		100 persen	1.000.000,00		5 jenis	373.000.000,00	
	1.05.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)		0 unit	100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	26 unit	283.000.000,00	
	1.05.01.2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)		0 unit	100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	30 unit	4.000.000,00	
	1.05.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)		2 unit	100 persen	1.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	46 unit	37.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025				
				LOKASI	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					Program/K egiatan	Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan
1	2	3	4	10	0 unit	100 persen	9	11	15	16	3 unit	45.000.000,00
	1.05.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 unit	100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
	1.05.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 unit	100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 unit	4.000.000,00
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana (%)		100 persen	100 persen	981.572.500,00					1.021.500.000,00
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota tersedia (jenis)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	2 jenis	100 persen	-				2 jenis	15.000.000,00
	1.05.03.2.01.000 4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 orang	100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60 orang	15.000.000,00
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	24 dokumen	100 persen	24.682.500,00				24 dokumen	211.500.000,00
	1.05.03.2.02.000 6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 kawasan	100 persen	24.682.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 kawasan	176.500.000,00
	1.05.03.2.02.000 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 orang	100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana			24 orang	15.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025				
				LOKASI	Program/K egiatan	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	2	3	4	10				9	11		15	16	
1.05.03.2.02.001 0		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 orang	100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	300 orang	-			
1.05.03.2.02.001 6		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 kawasan	100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	200.000.000,00		2	kawasan	
1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penanganan kejadian bencana (Kejadian)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	200 kejadian	100 persen	932.207.500,00		710.000.000,00		200	kejadian	
1.05.03.2.03.000 2		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	4 dokumen	100 persen	732.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	217.000.000,00		4	dokumen	
1.05.03.2.03.000 9		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	0 orang	100 persen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	320.000.000,00		300 orang		
1.05.03.2.03.001 1		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	12 laporan	100 persen	200.207.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	173.000.000,00		12	laporan	
1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana tersusun (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)	3 dokumen	100 persen	24.682.500,00		85.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024						PRAKIRAAN MAJU RENNCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	Program/K egiatan	Target Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	2	3	4	10		0 dokumen	100 persen	9	11		15	16
	1.05.03.2.04.000 2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)				-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	-
	1.05.03.2.04.000 5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binuwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)		0 laporan	100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	-
	1.05.03.2.04.001 0	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang didelegasikan (Kegiatan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)		1 kegiatan	100 persen	24.682.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 kegiatan	85.000.000,00
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)		100 persen		100 persen	709.350.000,00				681.000.000,00
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kejadian kebakaran (Lokasi)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGGKIDUL)		50 lokasi	100 persen	709.350.000,00				673.000.000,00
	1.05.04.2.01.000 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)		12 laporan	100 persen	709.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	658.000.000,00
	1.05.04.2.01.000 7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	(KAB. GUNUNGGKIDUL)		0 orang	100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 orang	15.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
				LOKASI	Target Kinerja			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					Program/K egiatan	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	2	3	4	10				9	11		15	16
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan inspeksi peralatan proteksi kebakaran (Dokumen)	(Kabupaten Gunungkidul, KAB. GUNUNGKIDUL)	1 dokumen		100 persen	-			1 dokumen	8.000.000,00
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	(KAB. GUNUNGKIDUL)	0 dokumen		100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	8.000.000,00
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya (Orang)	(tanjungsari, Kemiri, Kec. Tanjungsari)	30 orang		100 persen	-			30 orang	-
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/ Kelurahan)		0 kalurahan		100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 kalurahan	-
	J U M L A H							3.424.697.974,00				4.484.200.000,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kapanewon hingga Forum Gabungan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten. Dalam penyusunan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul juga memperhatikan hasil-hasil koordinasi dengan BPBD DIY selaku induk di tingkat provinsi. Di samping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul selalu mengadakan evaluasi terhadap kinerja selama ini untuk memberikan hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang. Namun demikian dengan adanya Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 900.1.2.2/04391 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, beberapa program kegiatan termasuk diantaranya pemenuhan SPM (bencana dan kebakaran) serta usulan dari masyarakat belum bisa diakomodir anggarannya. Namun demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul tetap akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, guna pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Pentingnya untuk selalu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Pendataan titik-titik lokasi bencana hendaknya menjadi dasar untuk pencegahan dan mitigasi, dan program kebencanaan lainnya.
3. Kegiatan pemberdayaan Kalurahan Tangguh Bencana yang menjadi indikator capaiannya merupakan indikator kinerja utama BPBD dalam RPJMD perlu ditingkatkan kualitasnya serta pembinaan secara terus menerus sehingga ketangguhan masyarakat semakin baik.
4. Kegiatan Sekolah Aman Bencana diharapkan agar sarannya adalah sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan bencana sesuai dengan *hazard* masing-masing wilayah.
5. Ketersediaan rambu-rambu kebencanaan, baik EWS tsunami, EWS tanah longsor, EWS banjir, serta rambu-rambu peringatan bencana perlu mendapatkan perhatian.
6. Fasilitas umum yang rusak akibat bencana diharapkan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam penanganannya.
7. Kegiatan dalam rangka pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dan SPM Sub Urusan Kebakaran perlu mendapatkan perhatian yang serius,

mengingat target capaian indikator yang ditetapkan setiap tahunnya semuanya 100%, sehingga dibutuhkan sumber daya yang besar untuk melaksanakannya.

8. Kegiatan dalam pemenuhan Indeks Ketahanan Daerah yang merupakan indikator kinerja utama Bupati Gunungkidul perlu mendapatkan perhatian serius.
9. Pemenuhan sarana-prasarana, khususnya di WMK Karangmojo perlu mendapatkan perhatian serius.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan. Kaidah dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan dengan baik apabila mendapat dukungan dan komitmen penuh dari Pimpinan Daerah dan DPRD Kabupaten Gunungkidul.
2. Seluruh jajaran BPBD Kabupaten Gunungkidul dan pemangku kepentingan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan di dalam RKPD Tahun 2024 yang telah disusun dengan mengacu pada Renstra BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.
3. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan menjamin tercapainya output sesuai dengan yang direncanakan, maka dimungkinkan untuk disesuaikan pada perubahan anggaran pada tahun berjalan.
4. Agar pencapaian kinerja pembangunan di bidang penanggulangan bencana daerah berjalan sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan, maka kinerja setiap program dan kegiatan harus dipublikasikan dan melibatkan aspirasi masyarakat.

c. Rencana Tindak lanjut

Dengan rencana kerja ini diharapkan kepada seluruh Bidang pada BPBD Kabupaten Gunungkidul untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil yang telah disepakati dalam forum Perangkat Daerah, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Selanjutnya Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Wonosari,
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,

PURWONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
KAPANEWON WONOSARI
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Wonosari Tahun 2022-2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Wonosari Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Wonosari tahun 2024 juga tetap memperhatikan Rencana Kerja Kapanewon Wonosari tahun 2023, sebagai bahan pertimbangan

Perubahan Renstra Kecamatan/kapanewon Wonosari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 pada lampiran XXX. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas, maka perlu segera disusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 bagian ketujuh paragraf kedua pasal 126 sampai dengan pasal 130.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Wonosari Tahun 2024 didasarkan kepada Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Wonosari Tahun 2022-2026 dengan berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja kapanewon Wonosari tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tahun 2022 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
16. Peraturan Bupati nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
17. Surat Edaran Bupati Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Dearah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rancangan Akhir Renja kapanewon Wonosari adalah untuk merumuskan rencana kerja Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.
3. Sebagai pedoman dan acuan penyusunan anggaran Kapanewon Wonosari

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Renja Kapanewon Wonosari adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN/KAPANEWON WONOSARI TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosari dan capaian Renstra Kecamatan Wonosari.
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wonosari
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN/KAPANEWON WONOSARI
 - 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wonosari.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN/KAPANEWON WONOSARI
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON WONOSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Capaian Renstra 2024

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Wonosari Tahun 2024 merupakan Renja tahun ketiga yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2026.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2024 telah terakomodasi dalam DPA 2023, sehingga program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Wonosari Tahun 2023 sejumlah 8 program yang terbagi dalam 18 kegiatan.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan pada triwulan empat tahun 2022 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), hal tersebut terlihat dari SDM yang ada sampai dengan tahun ini belum mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. SDM yang ada di Kapanewon Wonosari sangatlah terbatas dan telah diikutsertakan dalam berbagai diklat, namun setelah selesai ilmu yang diperoleh tidak dimanfaatkan secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena keterbatasan kualitas SDM.

Dalam rangka memperbaiki kinerja PD Kapanewon, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan atau menjadi kewenangan kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk PD Kapanewon. Kedepan perlu dirumuskan kembali kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagian tugas dan atau wewenang Bupati kepada Panewu, agar lebih jelas tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kapanewon sebagai PD, apalagi pada tahun 2015 mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka tugas yang diemban oleh Kapanewon akan semakin berat khususnya dalam hal pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada PD Kapanewon.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Wonosari atau realisasi APBD untuk Kapanewon Wonosari yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan dalam hal ini Program dan Kegiatan Kapanewon Wonosari tahun 2022 yaitu :
 - a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN target kinerja dan hasil yang dicapai 100 % dengan realisasi anggaran 95,78 % disebabkan karena adanya ASN yang pensiun dan mutasi.
 - b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target kinerja 100% dan realisasi 66,30% disebabkan karena tagihan listrik dan air yang naik turun setiap bulan.

- c. Sub kegiatan Fasilitasi Percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan target kinerja 100 % dengan realisasi 97,57 % disebabkan karena Belanja Bantuan sosial direalisasikan berdasarkan negosiasi dengan penyedia.
2. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan
 - b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 - c. Program pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan
 - d. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum
 - f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
 3. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan. Tahun 2022 tidak ada Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 adalah faktor pendukung terpenuhinya target adalah kedisiplinan PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan sedangkan faktor tidak tercapainya adalah karena kualitas SDM di kapanewon wonosari yang menguasai teknologi komputerisasi terbatas, sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dan masih terdapat beberapa pegawai yang merangkap beberapa tugas yang mengakibatkan menambah beban pekerjaan pegawai yang bersangkutan
 5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2022 adalah kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan setelah pelaksanaan anggaran ditetapkan, kurang tepatnya anggaran yang dibuat serta kurangnya SDM dan Tenaga kepegawaian yang berkompentensi dibidangnya.
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah penambahan tenaga SDM dan pemberian pendidikan pelatihan kepada pengguna anggaran dan perencanaan kegiatan agar perencanaan yang dilakukan lebih akurat dan akuntabel dan lebih mengoptimalkan koordinasi antara Pengguna Anggaran, PPK dan PPTK

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 Kapanewon Wonosari dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJUA PERANGKAT DAERAH DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON WONOSARI

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022				Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Pertemuan Realisasi Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7-9)	11=(10/4)	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terakhsana dengan baik									
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana	NA	26	26	26	100	NA	NA	NA	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4,286	NA	4,286	4,286	100	4,286	4,286	100	
		Jumlah dokumen Renja	NA	1	1	1	100	NA	NA	NA	
		Jumlah dokumen Renja perubahan	NA	1	1	1	100	NA	NA	NA	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	NA	NA	2	NA	2	2	100	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	NA	1	1	1	100	NA	NA	NA	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	NA	1	1	100	1	1	100	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	NA	1	1	1	100	NA	NA	NA	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	NA	NA	1	NA	1	1	100	

X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah dokumen ROPK	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dokumen	NA	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	3	dokumen	3	dokumen	100
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	2	dokumen	2	dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	17	laporan	NA	laporan	NA	laporan	17	laporan	17	laporan	NA	17	laporan	17	laporan	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah laporan e money	NA	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah Laporan Teppra	NA	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	4	dokumen	4	dokumen	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	NA	dokumen	14	dokumen	14	dokumen	14	dokumen	14	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Indeks administrasi keuangan perangkat daerah	###	Indeks	NA	Indeks	NA	Indeks	NA	Indeks	NA	Indeks	NA	79,333	Indeks	###	Indeks	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	14	bulan	14	bulan	14	bulan	14	bulan	100	14	bulan	14	bulan	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	224	bulan	224	bulan	100

X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	NA	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	13	laporan	13	laporan	100
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	NA	orang	11	orang	11	orang	11	orang	11	orang	11	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah ASN tertangani	NA	orang	11	orang	11	orang	11	orang	11	orang	11	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	6	dokumen	6	dokumen	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum kapareuon terfasilitasi	NA	paket	5	paket	5	paket	5	paket	5	paket	5	paket	100	NA	paket	NA	paket	NA
		Indeks Administrasi Umum Perangkat daerah	###	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	58,83	indeks	###	indeks	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	NA	paket	4	paket	4	paket	4	paket	4	paket	4	paket	100	NA	paket	NA	paket	NA
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	NA	paket	NA	paket	NA	paket	NA	paket	NA	paket	NA	4	paket	4	paket	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	NA	paket	12	paket	12	paket	12	paket	12	paket	12	paket	100	NA	paket	NA	paket	NA
		Jumlah laptop yang terbeli	NA	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100	NA	unit	NA	unit	NA

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13	paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13	paket	NA	NA	NA	NA	100
X:XX:01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	NA	paket	12	NA	12	NA	12	NA	12	NA	12	NA	12	NA	100	NA	NA	12	paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	paket	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100
X:XX:01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	NA	benyel	20	NA	20	NA	20	NA	20	NA	20	NA	20	NA	100	NA	NA	20	benyel	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah lembar penggandaan	NA	lembar	4800	0	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	100	NA	NA	4800	lembar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	paket	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100
X:XX:01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pengundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	NA	bulan	12	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	NA	NA	12	bulan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248	dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	248	dokumen	248	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100
X:XX:01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	laporan	NA	NA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	NA	NA	9	laporan	9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	
X:XX:01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana</i>	NA	<i>jenis</i>	2	<i>jenis</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	NA	NA	2	<i>jenis</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	5	<i>unit</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	<i>unit</i>	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	
X:XX:01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sound system yang terbeli	NA	paket	1	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	NA	NA	1	paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	unit	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	
X:XX:01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terbeli	NA	Unit	0	NA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	NA	NA	5	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	unit	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	
X:XX:01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana</i>	NA	<i>layanan</i>	3	<i>layanan</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	NA	NA	3	<i>layanan</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		<i>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	60	<i>laporan</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	<i>laporan</i>	60	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100

X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah hari terfasilitasinya pengadministrasian surat menyurat	NA	hari	247	hari	247	hari	246	hari	246	hari	100	NA	hari	12	Laporan	NA	hari	100	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	12	Laporan	12	Laporan	NA	hari	100	NA
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (1 Daya Air dan Listrik)	NA	rekening	12	rekening	12	rekening	12	rekening	12	rekening	100	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA
		Jumlah rekening air yang terbayar	NA	rekening	12	rekening	12	rekening	12	rekening	12	rekening	100	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA
		Jumlah rekening telephone yang terbayar	NA	rekening	12	rekening	12	rekening	12	rekening	12	rekening	100	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	36	laporan	36	laporan	NA	hari	100	NA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari terfasilitasinya kebersihan kantor.	NA	hari	247	hari	247	hari	246	hari	246	hari	100	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	12	laporan	12	laporan	NA	hari	100	NA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah terlaksana	NA	laguan	4	laguan	4	laguan	4	laguan	4	laguan	100	NA	laguan	NA	laguan	NA	laguan	NA	NA
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	160	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	160	unit	160	unit	NA	unit	100	100
		Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	NA	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	NA	paket	4	paket	4	paket	4	paket	4	paket	100	NA	paket	NA	paket	NA	paket	NA	NA
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	NA	unit	10	unit	10	unit	10	unit	10	unit	100	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	NA	paket	4	paket	4	paket	4	paket	4	paket	100	NA	paket	NA	paket	NA	paket	NA	NA
		Jumlah BMW Kendaraan dinas roda dua dan roda empat.	NA	liter	250	liter	480	liter	480	liter	480	liter	100	NA	liter	NA	liter	NA	liter	NA	NA
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dpeelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	165	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	165	unit	165	unit	NA	liter	NA	100

X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	NA	unit	4	unit	4	unit	4	unit	4	unit	4	unit	100	NA	unit	NA	unit	NA
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharannya	NA	unit	3	unit	3	unit	3	unit	3	unit	3	unit	100	NA	unit	NA	unit	NA
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	NA	unit	4	unit	4	unit	4	unit	4	unit	4	unit	100	NA	unit	NA	unit	NA
		Jumlah sound system yang terfasilitasi pemeliharannya.	NA	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100	NA	unit	NA	unit	NA
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	12	unit	12	unit	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	NA	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100	NA	paket	NA	paket	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya keamanan gedung kantor.	NA	Hari	365	Hari	365	Hari	365	Hari	365	Hari	365	Hari	100	NA	Hari	NA	Hari	NA
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	1	laporan	1	laporan	100
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang gterfasilitasi pemeliharannya.	NA	unit	4	unit	4	unit	4	unit	4	unit	4	unit	100	NA	unit	NA	unit	NA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	4	unit	4	unit	100
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi tersusun dengan baik	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	1	dokumen	100
X.XX.01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTRP/SPIP	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah dokumen SKM	NA	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah dokumen SOP	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
7.01.02	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana																		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana.	NA	Layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	100	NA	layanan	NA	layanan	NA

			<i>Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	15	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	15	laporan	NA	laporan	15	laporan	100
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	NA	cabor	3	cabor	3	cabor	3	cabor	3	cabor	3	cabor	3	cabor	3	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA
7.01.02.2.01.01			Jumlah cabang olahraga yang dibina	NA																NA						
			Jumlah kesepakatan dan pelestarian pengembangan budaya	NA	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	100	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA
			Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipertaskan	NA	kelompok	5	kelompok	5	kelompok	5	kelompok	5	kelompok	5	kelompok	5	kelompok	5	kelompok	100	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA
			Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	NA	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	100	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	15	laporan	15	laporan	100	
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	NA	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	100	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA
7.01.02.2.02			<i>Jumlah laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	19	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	19	laporan	19	laporan	100	
			Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	NA	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	100	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA
7.01.02.2.02.02			Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	NA	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	100	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA
			Jumlah dokumen hasil moner bidang kesgahiteraan sosial	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
			Jumlah kesepakatan penanganan kemiskinan TKPK	NA	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	100	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA
			Jumlah septik tank untuk kk miskin (PWK)	NA	KK	47	KK	18	KK	18	KK	18	KK	18	KK	18	KK	18	KK	100	KK	NA	KK	NA	KK	NA
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	5	laporan	5	laporan	100	

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	NA	layanan	1500	0	layanan	1500	layanan	1500	100	NA	layanan	NA	layanan	NA
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	NA	orang	10	orang	10	orang	10	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah peserta sosialisasi pengurus jh UMK	NA	orang	10	orang	10	orang	10	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	3	Laporan	3	Laporan	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kabupaten terfasilitasi	NA	layanan	2			2	layanan	2	100	NA	layanan	NA	layanan	NA
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terfasilitasi	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terfasilitasi	NA	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	100	NA	layanan	NA	layanan	NA
		<i>Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	9,5	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	9,5	indeks	9,5	indeks	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan RPJMDesa dan RKPPDes	NA	desa	14	desa	14	desa	14	desa	100	NA	desa	NA	desa	NA
		Dokumen usulan musrenbang	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		jumlah bintek perencanaan pembangunan kabupaten terselenggara (PjWK)	NA	kali	2	kali	2	kali	2	kali	NA	NA	kali	NA	kali	NA
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	15	dokumen	15	dokumen	100
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	orang	14	orang	14	orang	14	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA
7.01.03.2.01.03		Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang meningkat kapasitasnya	NA	orang	14	orang	14	orang	14	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah profil desa dan kecamatan tersusun	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		terlaksananya pembinaan perencanaan pembangunan desa secara aplikasi	NA	orang	14	orang	14	orang	14	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	4	Laporan	4	Laporan	100		
7.01.03.2.03	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapaneuon terfasilitasi</i>	NA	<i>Lembaga</i>	2	<i>Lembaga</i>	2	<i>Lembaga</i>	2	<i>Lembaga</i>	2	NA	100	NA	1,5	<i>Indeks</i>	1,5	<i>Indeks</i>	100
		<i>Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	1,5	<i>Indeks</i>	NA	<i>Indeks</i>	NA	<i>Indeks</i>	NA	<i>Indeks</i>	NA	NA	NA	1,5	<i>Indeks</i>	1,5	<i>Indeks</i>	100	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	NA	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	100	NA	NA	kesepakatan	NA	NA		
		Jumlah kesepakatan penanganan kependudukan dan karang taruna	NA	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	100	NA	NA	kesepakatan	NA	NA		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasiannya	2	Lembaga kemasyarakatan	NA	Lembaga kemasyarakatan	NA	Lembaga kemasyarakatan	NA	Lembaga kemasyarakatan	NA	NA	NA	2	Lembaga kemasyarakatan	2	Lembaga kemasyar akatan	100	
7.01.03.2.03.04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dokumen hasil money bidang pemberdayaan masyarakat	NA	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	100	NA	NA	Dokumen	NA	NA		
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dichkn pada pameran pembangunan	NA	kelompok	2	kelompok	2	kelompok	2	kelompok	2	100	NA	NA	kelompok	NA	NA		
		jumlah industri kecil/ rumah tangga yang meningkatkan pengetahuannya	NA	orang	10	orang	10	orang	10	orang	10	100	NA	NA	orang	NA	NA		
		jumlah laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	NA	NA	3	laporan	3	laporan	100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi																	
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah safari tarawah tingkat Kecamatan yang terlaksana.</i>	NA	<i>kali</i>	1	<i>kali</i>	1	<i>kali</i>	1	<i>kali</i>	1	100	NA	NA	<i>kali</i>	NA	NA		
		<i>Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	1	<i>laporan</i>	NA	<i>laporan</i>	NA	<i>laporan</i>	NA	<i>laporan</i>	NA	NA	NA	1	<i>laporan</i>	1	<i>laporan</i>	100	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah pelaksanaan safari tarawah tingkat kecamatan	NA	kali	1	kali	1	kali	1	kali	1	100	NA	NA	kali	NA	NA		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	NA	NA	1	laporan	1	laporan	100	
7.01.04.2.02	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi.</i>	NA	<i>layanan</i>	1	<i>layanan</i>	1	<i>layanan</i>	1	<i>layanan</i>	1	100	NA	NA	<i>layanan</i>	NA	NA		

			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	1	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	1	laporan	1	laporan	100
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah penyakit masyarakat yang terpacakan	NA	keepakatan	4	keepakatan	4	keepakatan	4	keepakatan	4	keepakatan	100	NA	keepakatan	NA	keepakatan	NA
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	1	laporan	1	laporan	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi																
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemugasan Kepala Daerah</i>		<i>Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi</i>	NA	Layanan	1	Layanan	1	Layanan	1	Layanan	1	Layanan	100	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
			<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemugasan Kepala Daerah</i>	###	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	26,33	indeks	###	indeks	100	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah pasukib kecamatan yang dibentuk dan dilatih	NA	orang	8	orang	70	orang	70	orang	70	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA

	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Peneliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	70	orang	70	orang	100	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan	Jumlah kesepakatan penanganan perempuan dan anak korban KDRT	NA	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	
		Jumlah Laporan Konflik yang Diangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	laporan	NA	laporan	4	laporan	4	laporan	NA	laporan	NA	4	laporan	4	laporan	1,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Koordinasi FORKOPIMKA	NA	kesepakatan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	2	kesepakatan	50	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	
		Jumlah laporan hasil patroli bersama	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	dokumen	NA	5	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	5	dokumen	5	dokumen	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana																
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	NA	Layanan	6	Layanan	6	Layanan	6	Layanan	100	Layanan	NA	45	dokumen	NA	Layanan	NA
		Jumlah Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	45	dokumen	45	dokumen	100
7.01.06.2.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitas pembinaan penyusunan produk hukum desa	NA	kali	10	kali	10	kali	10	kali	100	kali	NA	NA	kali	NA	kali	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	1	dokumen	1	dokumen	100
7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan pemerintahan desa	NA	kali	4	kali	4	kali	4	kali	100	kali	NA	NA	kali	NA	kali	NA

		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	NA	kali	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali	100	NA	kali	NA	kali	NA
		Jumlah monografi kalurahan dan kapanewon yang tersusun	NA	dokumen	30	dokumen	30	dokumen	30	dokumen	30	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	34	dokumen	34	dokumen	100
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	NA	kali	2	kali	2	kali	2	kali	2	kali	100	NA	kali	NA	kali	NA
		Frekuensi money pengelolaan keuangan kalurahan	NA	kali	2	kali	2	kali	2	kali	2	kali	100	NA	kali	NA	kali	NA
		Penyusunan dokumen siklus tahunan desa	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah bintek pengelolaan keuangan desa terselenggara (PWK).	NA	kali	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100	NA	kali	NA	kali	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	5	dokumen	5	dokumen	100
		Jumlah Pamong Kalurahan yang meningkatkan pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	NA	Orang	14	orang	14	orang	14	orang	14	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	14	dokumen	14	dokumen	100
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	dokumen	NA	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	dokumen	2	dokumen	100
		Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keteriban Umum	NA	orang	10	orang	10	orang	10	orang	10	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah satgas siaga bencana yang meningkat kemampuannya	NA	orang	10	orang	10	orang	10	orang	10	orang	100	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keteriban Umum	2	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	2	Dokumen	2	Dokumen	100

2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWUAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan																				
		<i>Jumlah Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	1	laporan	NA	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100	
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan hari keistimewaan DIY.	NA	Event	0	Event	2	Event	2	Event	2	Event	2	Event	2	Event	NA	Event	NA	Event	NA	
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	1	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	1	laporan	1	laporan	100	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWUAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.																				
4.01.04.5.01	<i>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan di Kalurahan yang tersusun.</i>	NA	dokumen	NA	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		<i>Jumlah Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan dikalurahan yang tersusun</i>	2	dokumen	NA	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	dokumen	2	dokumen	100
4.01.04.5.01.07	Penetapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penetapan keistimewaan di kaparewon/kemantren dan kalurahan/kalurahan yang didampingi	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	2	dokumen	2	dokumen	100
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan di Kalurahan, Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kaparewon dan Kalurahan Tahun 2024.	NA	Dokumen	NA	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Wonosari

Capaian kinerja pelayanan Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2022 pada umumnya sudah dapat berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan Kapanewon Wonosari sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Satuan (IKU,SPM,IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahn 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Pelayanan	Indeks	80,00	84,61	84,64	84,67	87,83	86,77	84,64	84,64	
2	Kapanewon Nilai AKIP	Nilai	0	80,05 (A)	80,08 (A)	81,01 (A)	78,50	80,60 (A)	80,08 (A)	81,01 (A)	
3	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	0	2	2	2	0	2	2	2	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon wonosari

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Kapanewon Wonosari dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kapanewon Wonosari

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Panewu Wonosari adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Wonosari, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Wonosari dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Wonosari sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Wonosari hingga tahun 2022 secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan SKCK, HO, Surat Keterangan Miskin, dll.
2. Terselesaikannya pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
3. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
4. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.
5. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
6. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
7. Terlaksananya bantuan sosial berupa jamban sehat untuk Keluarga Miskin.
8. Terlaksanakannya kegiatan safari tarawih.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan desa.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan dll) hingga mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten.
12. Terlaksananya pembuatan buku profil desa, buku profil Kapanewon dan buku monografi.
13. Terfasilitasinya proses dan mekanisme perizinan.

Adapun tingkat kinerja Kapanewon Wonosari yang tidak secara langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya kegiatan pelayanan antara lain :

1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. Tefasilitasinya penyelenggaraan ketatalaksanaan kepegawaian.
4. Terfasilitasinya pengembangan kapasitas aparatur.
5. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LKjIP, Laporan Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan keuangan bulanan.
6. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon, Rencana Strategis Kapanewon, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Wonosari

Untuk mendapatkan potret gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Wonosari, berikut dijabarkan secara rinci yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang pemerintahan.

A. Bidang Sosial Budaya

Permasalahan

- a. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin

- b. Masih tingginya angka putus sekolah pada usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- c. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar.
- e. Belum sinkronnya data-data keluarga miskin dan pengangguran yang ada.
- f. Belum optimalnya penyajian event-event budaya di dalam pengembangan pariwisata
- g. Kurangnya kesadaran menjaga keharmonisan rumah tangga
- h. Kurangnya pemahaman agama

B. Bidang Ekonomi

Permasalahan

- a. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun.
- b. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan baik antar SKPD maupun sumber dana di bidang ekonomi.
- d. Potensi wisata belum dikelola secara profesional oleh pelaku pariwisata.
- e. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
- g. Belum optimalnya kunjungan wisatawan.
- h. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.
- i. Kurangnya jiwa kewirausahaan/ penguasaan pasar untuk produk-produk UMKM

C. Bidang Fisik Prasarana

Permasalahan

- a. Diperlukan jalan dengan 4 jalur dan pembatas jalan untuk memperbaiki geometri jalan.
- b. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai.

D. Bidang Pemerintahan

Permasalahan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
- b. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
- c. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal
- d. Belum sesuai jabatan dengan kompetensi pegawai.
- e. Ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah daerah yang berupa Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyelenggaraan desa
- f. Masih minimnya data-data potensi wilayah rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern
- g. Kurangnya penguasaan teknologi informasi di kalangan aparat.
- h. Kurangnya kepedulian tanggap bencana

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan diatas berdampak pada pencapaian visi kepala daerah tahun 2022-2026 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

Dengan Misi Kepala Daerah Tahun 2022-2026:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis.
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Target SDGs

Target utamanya mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau *social economic development* dan lingkungan yang besar atau *environmental development* berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030)

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

Tujuan 5 - Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

- Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- Tujuan 10-Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- Tujuan 11-Kota dan komunitas berkelanjutan
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- Tujuan 12-Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- Tujuan 13-Penanganan perubahan iklim
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14-Ekosistem laut
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- Tujuan 15- Ekosistem daratan
Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- Tujuan16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan
Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kecamatan/Kapanewon Wonosari

Dalam meningkatkan pelayanan Kapanewon Wonosari, tantangan yang dihadapi meliputi :

1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliung.
2. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi.
3. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi.
4. Penguasaan teknologi masih rendah.
5. Data pembangunan dan kemiskinan belum tersedia secara sistematis dan integratif.
6. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
7. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan.
8. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Sedangkan peluang yang dimiliki Kapanewon Wonosari untuk peningkatan pelayanan meliputi :

1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.
2. Jumlah aparatur pemerintah Kapanewon dan desa yang cukup memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan.
4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan.
5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.
6. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional.
7. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
8. Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

1. Peningkatan kinerja SDM aparatur Kapanewon, desa dan masyarakat baik hardware, software, dan brainware.
2. Pemantapan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga terjaminnya validasi data untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah untuk mendukung kebutuhan dalam dan luar daerah.
4. Peningkatan potensi wisata dan kerajinan.
5. Optimalisasi penggunaan APBD Kabupaten, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan APBN untuk kegiatan pembangunan dan untuk pencegahan/penanggulangan bencana.
6. Optimalisasi peran dan fungsi masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan dan proses pengembangan wilayah.
7. Peningkatan peran aparat dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi wilayah.
8. Peningkatan penyebaran informasi tentang kesempatan kerja.
9. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pembangunan, ekonomi dan sosial.

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dari sisi proses penyusunannya, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 berpedoman pada program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Rancangan RKPD yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja PD termasuk Kapanewon Wonosari disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbangkal), dengan harapan akan mendapatkan berbagai masukan dari forum Musrenbang Kapanewon, Forum (gabungan) PD maupun Musrenbang Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rancangan Awal Renja 2024 Kapanewon Wonosari telah dimutakhirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
 Reviu terhadap Rancangan Awal RKKPD Tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul
 Kapanewon Wonosari

Rencana Rancangan Awal RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatorif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 persen	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Presentase penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 persen	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		<i>Jumlah Adat,Seni,Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	1 laporan	150.000.000	Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Kap. Wonosari	Jumlah adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	1 laporan	100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	1 laporan	150.000.000	Gelar budaya jogja	Kap. Wonosari	Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.	100 persen	36.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	35.000.000	

Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan Keistimewaan		<i>Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kem anten dan kalurahan/ Kelurahan yang didampingi</i>	2 dokumen		Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Kap. Wonosari	Jumlah perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	2 dokumen	35.000.000	
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Wonosari	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/ kemantren dan kalurahan/ kalurahan yang didampingi	2 Dokumen	36.000.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan	Kap. Wonosari	Jumlah Rencana program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	2 dokumen	35.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	1.814.326.691	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	1.133.554.067	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana</i>	4,286 indeks	8.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana</i>	4,286 Indeks	3.300.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	450.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	300.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	300.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	550.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 laporan	1.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Indeks laporan keuangan yang disusun tepat waktu</i>	79,333 indeks	1.565.376.691	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Indeks laporan keuangan yang disusun tepat waktu</i>	79,333 indeks	939.041.567	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.560.676.691	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 orang/bulan	936.791.567	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	3.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	1.750.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Jumlah Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	6 dokumen	2.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Jumlah Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	6 dokumen	1.250.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	2.300.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	1.250.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Indeks Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	58,833 indeks	46.150.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Indeks Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	58,833 indeks	20.882.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kap. Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kap. Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.932.500	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	29.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kap. Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.700.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kap. Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	1.750.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kap. Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.450.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kap. Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2.750.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248 dokumen	1.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	247 dokumen	1.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	6.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1.250.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	5 unit	29.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	0 unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap. Wonosari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	7.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap. Wonosari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	22.300.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	60 laporan	112.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	60 laporan	94.642.500	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	22.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	24.682.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	40.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	49.617.500	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	49.700.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	20.342.500	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	160 unit	49.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	191 unit	74.437.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kap. Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 unit	41.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	167 unit	35.800.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap. Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	4.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.850.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabiltasi	1 unit	2.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabiltasi	13 Unit	34.887.500	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	900.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 persen	113.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 persen	62.747.500	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan</i>	15 laporan	4.800.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan</i>	3 laporan	4.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 laporan	4.800.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	4.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	19 laporan	108.200.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	17 laporan	58.747.500	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	5 laporan	82.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	32.000.000	

			Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan											
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	26.200.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	26.747.500				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 persen	64.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 persen	18.000.000				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	9,5 indeks	53.300.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	2 indeks	11.500.000				
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15 dokumen	41.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 dokumen	4.500.000				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	12.300.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	7.000.000				

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	1,5 <i>Indeks</i>	10.700.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	1,5 <i>Indeks</i>	6.500.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kap. Wonosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga kemasyar akatan	5.300.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kap. Wonosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga kemasya katan	4.500.000	
Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 laporan	5.400.000	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	2.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum terfasilitasi	100 persen	19.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum terfasilitasi	100 persen	5.500.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum</i>	1 laporan	5.900.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum</i>	2 laporan	5.500.000	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	5.900.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	3.500.000	
Koordinasi Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		<i>Jumlah Koordinasi Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	1 laporan	13.100.000						

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	13.100.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal diwilayah kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 persen	95.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 persen	47.250.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	26,333 <i>indeks</i>	95.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	9,324 <i>indeks</i>	47.250.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kap. Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan dan Pemeliharaan	70 orang	82.800.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kap. Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 orang	37.750.000	

		Ketuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 laporan	2.800.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Wonosari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 dokumen	9.400.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 dokumen	8.500.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 persen	37.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 persen	19.500.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	45 dokumen	37.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	69 dokumen	19.500.000	

	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	3.300.000	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	28 dokumen	2.000.000	
	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34 dokumen	5.400.000	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32 dokumen	3.750.000	
	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	17.600.000	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	6.000.000	
	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	2.400.000	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	3.250.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	2.400.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	2.500.000	
	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	5.900.000	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kap. Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	2.000.000	
			TOTAL		2.328.326.691					1.421.551.567	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kapanewon Wonosari telah memasukkan usulan dari masyarakat kedalam Musrenbang Kecamatan PIS dan PIWK.

Pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Sub kegiatan Fasilitas percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, terdapat usulan pembangunan Jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin untuk Kalurahan Gari sebanyak 4 KK dengan anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00. Karena adanya rasionalisasi Tahun 2024, usulan dari masyarakat yang telah disetujui tidak dapat teranggarkan ditahun 2024 dan akan menjadi prioritas di tahun 2025. Usulan tersebut adalah sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negaran Republik Indonesia terdapat usulan Pelatihan perencanaan pembangunan di desa untuk kelurahan Karangtengah dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,00 dan Koordinasi pemetaan wilayah Desa dalam satu Kecamatan yang terindikasi rawan masalah Penyakit Masyarakat (PEKAT) merupakan usulan dari Kalurahan Gari dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,00 Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kalurahan sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan terdapat usulan Pelatihan Perencanaan Pembangunan di Desa dengan volume 1 kali dengan anggaran sebesar Rp. 16.000.000,00, pada Program program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa terdapat usulan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa usulan dari Kalurahan selang dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00.

Adapun kompilasi hasil Musrenbang Kecamatan PIS dan PIWK dijabarkan dalam tabel 2.5 di bawah ini:

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	PIWK - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Kalurahan Gari	Jumlah Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	4 KK	7.000.000,00	28.000.000,00	
2	PIWK - Koordinasi pemetaan wilayah Desa dalam satu Kecamatan yang terindikasi rawan masalah Penyakit Masyarakat (PEKAT).	Kalurahan Gari	Jumlah Koordinasi pemetaan wilayah Desa dalam satu Kecamatan yang terindikasi rawan masalah Penyakit Masyarakat (PEKAT).	1 kali	0	0	
3	PIWK- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Kalurahan Selang	Jumlah Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	1 kali	0	0	
4	(PIWK) - Pelatihan perencanaan pembangunan di desa.	Kalurahan Karangtengah	Jumlah Pelatihan perencanaan pembangunan di desa.	1 kali	0	0	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON WONOSARI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2016, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Kecamatan

Kapanewon Wonosari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan PD setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD. Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Wonosari

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat di tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Kapanewon Wonosari

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kapanewon yang berkualitas.	Indeks kualitas pelayanan kapanewon tahun 2026	84,73
	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan.	2

Sasaran yang akan dicapai Kapanewon Wonosari dalam tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Kapanewon Wonosari

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran PD tahun 2024
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	84,67
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	81,01 (A)

Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai Kapanewon Wonosari dalam tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Wonosari

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	84,67
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	81,01 (A)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON WONOSARI

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

Dengan Misi Kepala Daerah Tahun 2022-2026:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis.
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

b. Kebijakan Umum Bupati

c. Prioritas pembangunan

1. Ketentraman dan Ketertiban
2. Reformasi Birokrasi
3. Pendidikan dan Kesehatan
4. Ketahanan Pangan
5. Ekonomi:UMKM, Investasi, dan Pariwisata
6. Penanggulangan Kemiskinan
7. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

d. Pencapaian SDGs;

e. Pengurangan kemiskinan;

f. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah

g. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);

h. Pencapaian IKU

i. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;

j. Pengembangan wilayah miskin;

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

Rancangan Awal Renja Kapanewon Wonosari tahun 2024 terdiri dari 8 Program dan mencakup 16 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Dari program-program tersebut, 1 program di antaranya merupakan program yang menasar pada internal PD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 7 program merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan kalurahan di wilayah Kapanewon Wonosari. Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 2.328.326.691,00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp 2.374.893.224,00. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kapanewon Wonosari untuk Tahun 2024 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal RKPD khususnya dalam pagu anggaran. Hal ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu

dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun sebelumnya/tahun berjalan. Namun dalam perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai forum yang ada dan RKPD Kabupaten Gunungkidul, rancangan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian. Harapannya penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-aturan yang berlaku.

Prioritas, sasaran daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Wonosari dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6			7	8	9
Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	80,8 (A)	7	01	01	201	1.133.554.067	Kapanewon Wonosari
					7	01				
					7	01	01	201	3.300.000	
					7	01	01	201	450.000	
					7	01	01	201	300.000	
					7	01	01	201	300.000	
					7	01	01	201	300.000	

										7	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	400.000	
										7	01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	300.000	
										7	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	550.000	
										7	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	
										7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	939.041.567	
										7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	936.791.567	
										7	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	
										7	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	1.750.000	
										7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.250.000	
										7	01	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.250.000	
										7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.882.500	

					7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.932.500	
					7	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	
					7	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.750.000	
					7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.750.000	
					7	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
					7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.250.000	
					7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
					7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
					7	01	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
					7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.642.500	
					7	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.682.500	
					7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.617.500	
					7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.342.500	

					7	01	01	209		02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.437.500	Kapanewon Wonosari
					7	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.800.000		
					7	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.850.000		
					7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.887.500		
					7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000		
		Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	84,64	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.747.500	
					7	01	02	201			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000	
					7	01	02	201	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	4.000.000	

												Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
					7	01	02	202				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	58.747.500	
					7	01	02	202	02			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	32.000.000	
					7	01	02	202	03			Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.747.500	
					7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.000.000	Kaparewon Wonosari
					7	01	03	201				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.500.000	
					7	01	03	201	02			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.500.000	
					7	01	03	201	03			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.000.000	

								7	01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	37.750.000	Kaparewom Wonosari
								7	01	05	201	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	
								7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.500.000	
								7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.500.000	
								7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.500.000	
								7	01	06	201	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000	
								7	01	06	201	04	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.750.000	
								7	01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	

					7	01	06	201	05	05	3.250.000	
					7	01	06	201	08	08	2.500.000	
					7	01	06	201	11	11	2.000.000	
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang diestartikan	2	2						100.000.000	
					2	22					100.000.000	
					2	22	08				100.000.000	
					2	22	08	5.07			100.000.000	
					2	22	08	5.07	0006		100.000.000	
					4						35.000.000	

						4	01					SEKRETARIAT DAERAH	35.000.000	
						4	01	04				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
						4	01	04	06			Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	35.000.000	
						4	01	04	06	0001		Penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan	35.000.000	
													1.421.551.567	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode		Kategori	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100.000.000				150.000.000	
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			100.000.000				150.000.000	
2	22	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		100 persen	100.000.000			100 persen	150.000.000	
2	22	Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	1 Laporan	100.000.000			1 laporan	150.000.000	
2	22	Gelar budaya jogja	Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		1 Laporan	150.000.000	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			35.000.000				37.000.000	

4	01			SEKRETARIAT DAERAH			35.000.000							37.000.000
4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan		35.000.000	100 persen				100 persen		37.000.000
4	01	04	06	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Jumlah perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan		35.000.000	2 Dokumen				2 dokumen		37.000.000
4	01	04	06	'0001	Penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan	Jumlah Rencana program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	Kapanewon Wonosari	2 Dokumen	35.000.000		Dana Keistimewaan DIY	2 Dokumen		37.000.000
7				UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01			KECAMATAN ADMINISTRASI			1.286.551.567							2.187.893.224
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik		1.133.554.067	100 persen				100 persen		1.852.893.224
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		3.300.000	4,286 indeks				4,286 indeks		8.900.000
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Wonosari	3 Dokumen	450.000		DAU	2 Dokumen		3.600.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Wonosari	1 Dokumen	300.000		DAU	1 Dokumen		200.000

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Wonosari	1 Dokumen	300.000	DAU	1 Dokumen	200.000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kapanewon Wonosari	2 Dokumen	400.000	DAU	2 Dokumen	600.000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Wonosari	2 Dokumen	300.000	DAU	2 Dokumen	400.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Wonosari	17 Laporan	550.000	DAU	17 Laporan	1.100.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Wonosari	32 Laporan	1.000.000	DAU	32 Laporan	2.800.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks administrasi keuangan perangkat daerah		79,333 indeks	939.041.567	DAU	79,33 indeks	1.600.793.224
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Wonosari	210 Orang/bulan	936.791.567	DAU	210 Orang/bulan	1.596.043.224
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Wonosari	1 Laporan	500.000	DAU	1 Laporan	1.150.000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Wonosari	13 Laporan	1.750.000	DAU	13 Laporan	3.600.000

7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		6 dokumen	1.250.000		6 dokumen	2.700.000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Wonosari	6 Dokumen	1.250.000	DAU	6 Dokumen	2.700.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat daera		58.833 indeks	20.882.500	DAU	58.833 indeks	46.500.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Wonosari	4 Paket	1.932.500	DAU	4 Paket	2.600.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Wonosari	12 Paket	12.000.000	DAU	13 Paket	29.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kapanewon Wonosari	4 Paket	1.750.000	DAU	12 Paket	1.750.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kapanewon Wonosari	2 Paket	2.750.000	DAU	12 Paket	5.500.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kapanewon Wonosari	247 Dokumen	1.200.000	DAU	248 Dokumen	1.350.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Wonosari	5 Laporan	1.250.000	DAU	9 Laporan	6.300.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		5 unit	0	DAU	4 unit	30.400.000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kapanewon Wonosari	0 Unit	0	DAU	1 Unit	8.000.000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kapanewon Wonosari	0 Unit	0	DAU	3 Unit	22.400.000
7	01	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		60 laporan	94.642.500		60 laporan	113.100.000

7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Wonosari	12 Laporan	24.682.500	DAU		12 Laporan	22.600.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kapanewon Wonosari	36 Laporan	49.617.500	DAU		36 Laporan	40.600.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kapanewon Wonosari	12 Laporan	20.342.500	DAU		12 Laporan	49.900.000
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		160 unit	74.437.500	DAU		184 unit	50.500.000
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Kapanewon Wonosari	167 Unit	35.800.000	DAU		167 Unit	42.100.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kapanewon Wonosari	8 Unit	2.850.000	DAU		12 Unit	4.500.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kapanewon Wonosari	13 Unit	34.887.500	DAU		1 Unit	2.600.000
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharar/Direhabilitas	Kapanewon Wonosari	3 Unit	900.000	DAU		4 Unit	1.300.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana		100 persen	62.747.500			100 persen	115.000.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		15 laporan	4.000.000			3 laporan	5.000.000

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Wonosari	3 Laporan	4.000.000	DAU			3 Laporan	5.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		19 laporan	58.747.500				17 laporan	110.000.000
7	01	02	2.02	02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Wonosari	4 Laporan	32.000.000	DAU			4 Laporan	83.000.000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Wonosari	13 Laporan	26.747.500	DAU			13 Laporan	27.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitas		100 persen	18.000.000	DAU			100 persen	66.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		9,5 indeks	11.500.000	DAU			9,5 indeks	53.950.000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Wonosari	3 Dokumen	4.500.000	DAU			4 Dokumen	41.300.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Wonosari	2 Laporan	7.000.000	DAU			2 Laporan	12.650.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1,5 indeks	6.500.000				1,5 indeks	12.050.000

7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kapanewon Wonosari	2 Lembaga Masyarakat	4.500.000	DAU	2 Lembaga Masyarakat	5.600.000
7	01	03	2.03	04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Wonosari	2 Laporan	2.000.000	DAU	2 Laporan	6.450.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMU	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi		100 persen	5.500.000		100 persen	19.500.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Laporan	5.500.000		2 Laporan	19.500.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Wonosari	1 Laporan	2.000.000	DAU	1 Laporan	13.200.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Wonosari	1 Laporan	3.500.000	DAU	1 Laporan	6.300.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMMU	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi		100 persen	47.250.000		100 persen	96.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		26,33 indeks	47.250.000		26,33 indeks	96.000.000

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Wonosari	25 Orang	37.750.000	DAU		75 Orang	84.000.000
7	01	05	2,01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Wonosari	1 Laporan	1.000.000	DAU		1 Laporan	2.800.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Wonosari	2 Dokumen	8.500.000	DAU		2 Dokumen	9.200.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana		100 persen	19.500.000			100 persen	38.500.000
7	01	06	2,01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		45 dokumen	19.500.000			71 dokumen	38.500.000
7	01	06	2,01	01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Wonosari	28 Dokumen	2.000.000	DAU		28 Dokumen	3.750.000
7	01	06	2,01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Wonosari	32 Dokumen	3.750.000	DAU		28 Dokumen	5.600.000
7	01	06	2,01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Wonosari	4 Dokumen	6.000.000	DAU		5 Dokumen	17.800.000
7	01	06	2,01	05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Wonosari	1 Dokumen	3.250.000	DAU		6 Dokumen	2.375.000

7	01	06	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Wonosari	2 Dokumen	2.500.000	DAU	2 Dokumen	2.375.000
7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Wonosari	2 Dokumen	2.000.000	DAU	2 Dokumen	6.600.000
Total									1.421.551.567			2.374.893.224

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan PD satu tahun kedepan, oleh karena itu Rancangan Renja Kapanewon Wonosari Tahun 2024 disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Wonosari.

Rancangan Renja Kapanewon Wonosari disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Renstra Kapanewon Wonosari Tahun 2022 – 2026. Renstra tersebut merupakan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Wonosari yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Wonosari Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Wonosari telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan dalam proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format

pengendalian tersebut.

Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Wonosari sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap keberhasilan suatu program. Demikian Rancangan Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Wonosari,

KAPANEWON WONOSARI,

AGUNG DANARTA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kapanewon Paliyan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Kapanewon Paliyan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Dokumen Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Paliyan, yang disusun berpedoman kepada Renstra Kapanewon Paliyan dan RKPD.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kapanewon Paliyan dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan UUD 1945 pasal 4 ayat 1,

Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Panewu, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kapanewon dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kapanewon maka perencanaan tujuan kapanewon mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangun yang ingin dicapai pemerintah kapanewon bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kapanewon Paliyan memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Paliyan serta kerangka pendanaan daerah, Renja PD kapanewon secara substansial sesuai dengan visi dan misi dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Paliyan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 menyesuaikan urusan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, adalah:

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal renja dengan rentra perangkat daerah.
4. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kapanewon Paliyan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum

	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Paliyan dan Capaian Renstra Kapanewon Paliyan
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Paliyan
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Paliyan
	2.4	Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III		TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V		PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KAPANEWON PALIYAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Paliyan dan Capaian Renstra Kapanewon Paliyan

Rencana Kerja Kapanewon Paliyan tahun 2022 sesuai DPA Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2022 tanggal 6 Januari 2022 telah teranggarkan sebesar Rp. 2.611.400.319 yang terdiri dari delapan program, Tujuh belas kegiatan dan empat puluh tiga subkegiatan. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022 Kapanewon Paliyan mengalami pergeseran anggaran untuk penambahan tunjangan kinerja (TPP) ASN sebesar Rp. 85.644.945 sehingga pagu yang dikelola Kapanewon Paliyan menjadi sebesar Rp. 2.836.345.264.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 Kapanewon Paliyan perlu menyusun perubahan rencana kerja tahun 2022 karena terdapat beberapa kegiatan yang harus disesuaikan dengan program, kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif dan target kinerja yang mengalami perubahan yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah karena masih dalam keadaan pemulihan dari pandemi COVID-19.

Selanjutnya sesuai dengan kebijakan dari Kabupaten Gunungkidul terkait berlakunya PPKM maka terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa diselenggarakan ataupun diselenggarakan dengan sederhana sehingga perlu adanya perubahan penyusunan rencana kerja tahun 2022. Adapun kegiatan yang tidak diselenggarakan/diselenggarakan dengan sederhana yaitu kegiatan safari tarawih, peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul, Pembinaan Lomba Kalurahan, Lomba Pengagungan, dan Pengadaan THL Pramubakti. Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan penyesuaian penambahan maupun pengurangan target kinerja maupun pagu indikatif untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan. Adapun penambahan ini digunakan untuk biaya transport peserta kegiatan Profil Kalurahan, dan digunakan untuk belanja modal personal komputer dan printer untuk peralatan dan perlengkapan kantor, dan pembangunan taman depan papan nama Kapanewon, serta terdapat penambahan pagu untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan sehingga pagu yang dikelola Kapanewon Paliyan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 2.836.345.264 sesuai dengan DPPA Nomor DPPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

Pada tahun anggaran 2022 Kapanewon Paliyan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.836.345.264 telah terealisasi sebesar Rp. 2.789.6277.138 (98.35%). Realisasi anggaran untuk program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022

No	Uraian Program, Kegiatan Dan Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	117.000.000	117.000.000	100,00	100,00

	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	117.000.000	117.000.000	100,00	100,00
	Gelar Budaya Jogja	117.000.000	117.000.000	100,00	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	25.970.000	25.970.000	100,00	100,00
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	25.970.000	100,00	100,00
	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	25.970.000	25.970.000	100,00	100,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.960.459.264	1.914.203.428	97,64	100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.286.000	31.201.000	99,73	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.280.000	2.480.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.320.000	1.320.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	540.000	540.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.505.000	22.420.000	99,62	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	741.000	741.000	100,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.700.000	3.700.000	100,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.637.220.687	1.591.647.925	97,22	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.632.270.687	1.586.697.925	97,21	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	990.000	990.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.960.000	3.960.000	100,00	100,00
	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.111.000	85.036.000	99,91	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.886.000	45.886.000	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.825.000	20.750.000	99,63	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.100.000	3.100.000	100,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.400.000	10.400.000	100,00	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.450.000	7.450.000	100,00	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.450.000	7.450.000	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.624.000	18.556.519	99,64	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.624.000	18.556.519	99,64	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.497.577	92.041.984	99,51	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.400.000	30.320.407	99,73	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.300.000	5.300.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.697.577	54.312.577	99,29	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00
	Penataan Organisasi	85.770.000	85.770.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	85.770.000	85.770.000	100,00	100,00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	410.605.000	410.142.710	99,89	100,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	94.435.000	94.435.000	100,00	100,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	94.435.000	94.435.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	316.170.000	315.707.710	99,85	100,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	307.595.000	307.132.710	99,84	100,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.575.000	8.575.000	100,00	100,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	138.496.000	138.496.000	100,00	100,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.220.000	37.220.000	100,00	100,00

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28.210.000	28.210.000	100,00	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.010.000	9.010.000	100,00	100,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	101.276.000	101.276.000	100,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8.416.000	8.416.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	92.860.000	92.860.000	100,00	100,00
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.480.000	9.480.000	100,00	100,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.820.000	6.820.000	100,00	100,00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.820.000	6.820.000	100,00	100,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.660.000	2.660.000	100,00	100,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.660.000	2.660.000	100,00	100,00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62.320.000	62.320.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	62.320.000	62.320.000	100,00	100,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.980.000	59.980.000	100,00	100,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.340.000	2.340.000	100,00	100,00
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	112.015.000	112.015.000	100,00	100,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.015.000	112.015.000	100,00	100,00

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.050.000	2.050.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.630.000	3.630.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.240.000	10.240.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.425.000	3.425.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	820.000	820.000	100,00	100,00
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.560.000	3.560.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88.290.000	88.290.000	100,00	100,00
	JUMLAH	2.836.345.264	2.789.627.138	98,35	100,00

Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan Kapanewon Paliyan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tidak ada realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
- Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 secara keseluruhan telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
- Tidak ada realiasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.
- Faktor-faktor terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 adalah komitmen dan kerja keras yang dilakukan Kapanewon Paliyan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD antara lain Alokasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan, Adanya regulasi/kebijakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kegiatan harus menyesuaikan kebijakan.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakkor-faktor yang diperkirakan akan memengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 adalah berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten agar pelaksanaan program/kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan, serta berkoordinasi dengan TAPD terakait alokasi anggaran terealisasi sesuai dengan usulan yang ada.

Berdasarkan dokumen DPA Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 4 Januari 2023 telah teranggarkan sebesar Rp. 2.492.160.086,00. Pada tahun anggaran 2023 ini telah dilakukan rasionalisasi DPA SKPD sebagai bentuk tindak lanjut PMK No. 194/PMK.07 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD. Oleh karena itu faktor – faktor yang diperkirakan akan memengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun anggaran 2023 antara lain adanya Alokasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan, Adanya regulasi/kebijakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kegiatan harus menyesuaikan kebijakan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Paliyan Tahun 2022, disajikan dalam tabel. 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Paliyan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluasan kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluasan Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	3	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	11=(10/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemuahan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	26										
X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	26	27	25	25	100,00	NA	dokumen	dokumen	NA	dokumen	
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,28	NA	NA	NA	NA	8,14	indeks	indeks	4,14	indeks	
X.XX.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja	1	1	1	1	100,00	NA	dokumen	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah dokumen perubahan renja	1	1	1	1	100,00	NA	dokumen	dokumen	NA	dokumen	

		Jumlah dokumen Renstra PD	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	0	dokumen	0	dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	2	dokumen	2	dokumen
X.XX.0 1.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	1	dokumen	1	dokumen
X.XX.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	1	dokumen	1	dokumen
X.XX.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen
		Jumlah dokumen ROPK	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	0,00	NA	dokumen	NA	dokumen
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	2	dokumen	2	dokumen

X.XX.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	2	dokumen	2	dokumen	
X.XX.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	17	laporan	17	laporan	
X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan TEpra	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah dokumen LKJIP	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah laporan e money	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	32	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	32	laporan	32	laporan	
X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,33	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	79,33	indeks	79,33	indeks	
		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	14	Dokumen	14	dokumen	4	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	layanan	

X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	14	bulan	14	bulan	14	14	bulan	100,00	NA	bulan	NA	bulan	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	orang/ bulan	NA	orang/ bulan	NA	orang/ bulan	NA	NA	orang/ bulan	NA	224	orang/ bulan	224	orang/ bulan	
X.XX.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	1	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	NA	laporan	NA	1	laporan	1	laporan	
X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	12	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	1	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	NA	laporan	NA	13	laporan	13	laporan	
X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	6	dokumen	6	dokumen	

X.XX.0 1.2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah ASN yang tertangani	16	orang	15	orang	15	orang	15	orang	100,00	NA	orang	NA	orang		layanan			
X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	6	dokumen	6	dokumen		dokumen			
			Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	6	layanan	6	layanan	6	layanan	6	layanan	100,00	NA	layanan	NA	layanan		layanan			
			Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	43,71	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	43,57	indeks	43,57	indeks		indeks			
X.XX.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik yang tersedia	4	paket belanja	14	Jenis	4	paket belanja	4	paket belanja	100,00	NA	paket belanja	NA	paket belanja		paket belanja			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	NA	paket	NA	paket	NA	paket	NA	4	paket	4	paket		paket			
X.XX.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12	paket belanja	38	jenis	12	paket belanja	12	paket belanja	100,00	NA	paket belanja	NA	paket belanja		paket belanja			
			Jumlah laptop yang terbeli	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00	NA	unit	NA	unit		unit			
			Jumlah personal komputer terbeli	1	buah	1	unit	1	unit	1	unit	100,00	NA	buah	NA	buah		buah			
			Jumlah televisi terbeli	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00	NA	unit	NA	unit		unit			
			Jumlah feeling cabinet terbeli	2	buah	0	buah	0	buah	0	buah	0,00	NA	buah	NA	buah		buah			
			Jumlah printer terbeli	0	unit	0	unit	1	unit	1	unit	0,00	NA	unit	NA	unit		unit			

		Jumlah almari besi terbeli	0	paket belanja	0	0	0	0	0	0,00	NA	paket belanja	NA	paket belanja	
		Jumlah LCD Proyektor terbeli	0	paket belanja	0	0	0	0	0	0,00	NA	paket belanja	NA	paket belanja	
		Jumlah mesin ketik terbeli	1	paket belanja	0	0	0	0	0	0,00	NA	paket belanja	NA	paket belanja	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	17	paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16	paket	16	paket	
X.XX.0 1.2.06. 03		Penyediaan Peralatan rumah tangga yang di beli	4	paket belanja	15	2	2	2	2	100,00	NA	paket belanja	NA	paket belanja	
		Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor	2	paket belanja	8	4	4	4	4	100,00	NA	paket belanja	NA	paket belanja	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	paket	6	paket	
X.XX.0 1.2.06. 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	187	bendel	5	182	182	182	182	100,00	NA	bendel	NA	bendel	
		Jumlah lembar penggandaan	4000	lembar	3500	4200	4200	4200	4200	100,00	NA	lembar	NA	lembar	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	paket	2	paket	
X.XX.0 1.2.06. 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibayar	12	rekening	12	12	12	12	12	100,00	NA	rekening	NA	rekening	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	248	dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	248	dokumen	248	dokumen	

X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah tamu yang terfasilitasi minum dan snack	120	orang	0	orang	120	orang	120	orang	120	orang	100,00	NA	orang	NA	orang	orang
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	12	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	12	laporan			
X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat	250	orang	500	orang	250	orang	250	orang	250	orang	100,00	NA	orang	NA	orang	orang
X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi SKPD	184	orang	0	orang	90	orang	90	orang	90	orang	100,00	NA	orang	NA	orang	orang
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	17	laporan			
X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	100,00	NA	layanan	NA	layanan	layanan
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	1	unit			
X.XX.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah meja rapat (kayu) yang dibeli	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00	NA	buah	NA	buah	buah
		Jumlah meja 1/2 biro yang dibeli	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00	NA	lembar	NA	lembar	lembar
		Jumlah kursi rapat yang dibeli	25	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00	NA	lembar	NA	lembar	lembar
		Jumlah kursi tamu yang dibeli	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00	NA	lembar	NA	lembar	lembar
		Jumlah rak kayu terbeli	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00	NA	lembar	NA	lembar	lembar
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	0	unit	0	unit	unit
X.XX.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah wireless terbeli	1	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00	NA	unit	NA	unit	unit

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	0	unit	0	unit	
X.XX.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terbeli	1	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00	unit	NA	unit	NA	unit	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	1	unit		unit	
X.XX.0 1.2.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah selokan terbangun	0	paket pekerjaan	0	paket pekerjaan	0	paket pekerjaan	0	paket pekerjaan	0,00	paket pekerjaan	NA	paket pekerjaan	NA	paket pekerjaan	
		Jumlah bangunan dapur yang terbangun	1	paket pekerjaan	0	paket pekerjaan	0	paket pekerjaan	0	paket pekerjaan	NA	paket pekerjaan	NA	paket pekerjaan	NA	paket pekerjaan	
		Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	0	unit		unit	
X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	100,00	layanan	NA	layanan	NA	layanan	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	73	laporan	73	laporan	
X.XX.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kelengkapan kearsipan yang tersedia	0	jenis	0	jenis	0	jenis	0	jenis	0,00	jenis	NA	jenis	NA	jenis	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	0	laporan	0	laporan	

X.XX.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa tagihan telephone yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	12	rekening	12	rekening	100,00	NA	rekening	NA	rekening	
		Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (2 rekening X 12 Bulan)	24	rekening	24	rekening	100,00	NA	rekening	NA	rekening	
		Jumlah tagihan air yang dibayar (2 rekening X 12 Bulan)	24	rekening	24	rekening	100,00	NA	rekening	NA	rekening	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	NA	laporan	NA	60	laporan	60	laporan	
X.XX.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sewa tanah terbayarkan	1	Tahun	1	tahun	100,00	NA	tahun	NA	tahun	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	laporan	NA	laporan	NA	13	laporan	13	laporan	
X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	layanan	4	layanan	100,00	NA	layanan	NA	layanan	
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174	unit	NA	unit	NA	170	unit	170	unit	
X.XX.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	1	unit	1	unit	100,00	NA	unit	NA	unit	
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	12	paket pemeliharaan	12	paket pemeliharaan	100,00	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	

		Jumlah motor dinas yang terbayar	9	unit	9	unit	9	unit	9	unit	9	unit	100,00	NA	unit	NA	unit	
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	12	paket pemeliharaan	12	unit	12	paket pemeliharaan	12	unit	12	paket pemeliharaan	100,00	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	141	unit	141	unit	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	unit	3	unit	3	unit	3	unit	3	unit	100,00	NA	unit	NA	unit	
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	11	unit	2	unit	9	unit	9	unit	9	unit	100,00	NA	unit	NA	unit	
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	unit	2	unit	2	unit	2	unit	2	unit	100,00	NA	unit	NA	unit	
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	9	unit	7	unit	7	unit	7	unit	7	unit	100,00	NA	unit	NA	unit	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	20	unit	20	unit	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah hari terfasilitasinya jasa keamanan kantor	365	hari	365	hari	365	hari	365	hari	365	hari	100,00	NA	hari	NA	hari	
		Jumah pemeliharaan gedung/kantor	2	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00	NA	unit	NA	unit	
		Jumah pemeliharaan rumah dinas	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00	NA	unit	NA	unit	
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ dirhabilitasi	2	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	2	unit	2	unit	

X.XX.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharannya	7	unit	7	unit	7	unit	100,00	NA	unit	NA	unit
X.XX.0 1.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	7	unit	NA	unit	NA	unit	NA	7	unit	7	unit
X.XX.0 1.2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen
		Jumlah Dokumen SOP	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen
		Jumlah Dokumen SKM	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana											
7.01.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	100,00	NA	layanan	NA	layanan
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	3	laporan	3	laporan

7.01.02 2.01.0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelompok seni yang terbina/bina	7	kelompok	7	kelompok	100,00	NA	kelompok	NA	kelompok	
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan hari jadi Kabupaten Gunungkidul	1	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	
		Jumlah cabang olah raga yang terbina	4	Cabor	4	cabor	100,00	NA	cabor	NA	cabor	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	laporan	NA	laporan	NA	3	laporan	3	laporan	
7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2	layanan	2	layanan	100,00	NA	layanan	NA	layanan	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24	laporan	NA	laporan	NA	20	laporan	20	laporan	

7.01.02 2.02.0 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	2	kesepakatan an	1	kesepakatan an	2	kesepakatan an	2	kesepakatan an	2	kesepakatan an	100,00	NA	kesepakatan an	NA	kesepakatan an	NA	kesepakatan an	NA
		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	2	kesepakatan an	1	kesepakatan an	2	kesepakatan an	2	kesepakatan an	2	kesepakatan an	100,00	NA	kesepakatan an	NA	kesepakatan an	NA	kesepakatan an	NA
		Jumlah dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	2	kesepakatan an	1	kesepakatan an	2	kesepakatan an	2	kesepakatan an	2	kesepakatan an	100,00	NA	kesepakatan an	NA	kesepakatan an	NA	kesepakatan an	NA
		Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat	360	tangki	460	tangki	470	tangki	470	tangki	470	tangki	100,00	NA	tangki	NA	tangki	NA	tangki	NA
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100,00	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jaman sehat (PIWK)	20	KK	51	KK	20	KK	20	KK	20	KK	100,00	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH PIWK)	5	KK	47	KK	5	KK	5	KK	5	KK	100,00	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan septic tank (PIWK)	11	KK	2	KK	11	KK	11	KK	11	KK	100,00	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA
		Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	6	laporan	6	laporan	6	laporan	6
7.01.02 2.02.0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	2500	layanan	9	jenis	2000	layanan	2100	layanan	2100	layanan	105,00	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA

		Jumlah peserta kordinasi IUMK	40	orang	0	orang	40	orang	40	orang	40	orang	100,00	NA	orang	NA	orang	
		Jumlah peserta kordinasi pelayanan terpadu	40	orang	50	orang	40	orang	40	orang	40	orang	100,00	NA	orang	NA	orang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Masyarakat di Wilayah	14	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	14	laporan	14	laporan	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi																
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	100,00	NA	layanan	NA	layanan	
		Jumlah kegiatan kordinasi kegiatan pemberdayaan desa	9,5	indeks	NA	indeks	9,5	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	9,5	indeks	9,5	indeks	
		Jumlah kegiatan kordinasi kegiatan pemberdayaan desa																
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		1	dokumen	8	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKal	7	kalurahan	3	kalurahan	7	kalurahan	7	kalurahan	7	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan yang meningkat kapasitasnya	45	orang	45	orang	45	orang	45	orang	45	orang	100,00	NA	orang	NA	orang	
		Jumlah bimtek perencanaan pembangunan desa (PIWK)	0	orang	0	orang	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100,00	NA	kali	NA	kali	

7.01.03 .2.01.0 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	9	dokumen	dokumen	
7.01.03 .2.01.0 3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kapanewon	4	kali	0	kali	1	kali	1	kali	100,00	NA	kali	
		Jumlah dokumen profil kapanewon dan Kalurahan	1	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100,00	NA	dokumen	
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kabupaten	1	kali	0	kali	4	kali	1	kali	25,00	NA	kali	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	10	laporan	
7.01.0 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	100,00	NA	layanan	
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	3	indeks	
7.01.03 .2.03.0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	12	kesepakatan	12	kesepakatan	12	kesepakatan	12	kesepakatan	100,00	NA	kesepakatan	

		Jumlah kesepakatan penangan kepemudaan dan karang taruna	0	kesepakatan	0	kesepakatan	0	kesepakatan	0	0,00	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	2	kesepakatan	2	kesepakatan	lembaga kemasyarakatan
7.01.03	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1	kesepakatan	1	kesepakatan	1	kesepakatan	1	100,00	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	dokumen
.2.03.04		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	7	kesepakatan	0	kesepakatan	7	kesepakatan	7	100,00	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	kelompok
		Jumlah kesepakatan koordinasi masa tanam, perbenihan, pemupukan, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikanan	1	kesepakatan	1	kesepakatan	1	kesepakatan	1	100,00	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	kesepakatan
		Jumlah pelaku insutri kecil/ rumah tangga yang meningkat pengetahuannya	30	orang	7	kesepakatan	30	kesepakatan	30	0,00	NA	orang	NA	orang	orang
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	NA	4	laporan	4	laporan	laporan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi													

7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	1	layanan	1	layanan	1	layanan	100,00	NA	layanan	NA	layanan
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	2	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	4	laporan	4	laporan
7.01.04 .2.01.0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	2	laporan	2	laporan
7.01.04 .2.01.0 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kapanewon	50	orang	1	kali	2	kali	100,00	NA	kali	NA	kali
		Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat kapanewon	1	kali	0	kali	1	kali	0,00	NA	kali	NA	kali
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	2	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	2	laporan	2	laporan
7.01.0 4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	layanan	1	layanan	1	layanan	100,00	NA	layanan	NA	layanan

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	1	pekat	1	pekat	1	kecepatan	1	dokumen	100,00	NA	kecepatan	NA	dokumen	kecepatan	NA	kecepatan	NA	dokumen
		Jumlah laporan hasil patroli bersama	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	dokumen					
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	2	laporan	2	laporan					
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi																		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	100,00	NA	layanan	NA	layanan	layanan				
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	39,5	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	39,5	indeks	39,5	indeks					

7.01.05 -2.01.0 1	Pembinaan Kawasan Kebudayaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI yang terfasilitasi		1	kali	0	kali	1	kegiatan	1	kegiatan	100,00	NA	kegiatan	NA	kegiatan	
		Jumlah paskib kapanewon yang terbentuk dan dilatih	75	orang	3	orang	75	orang	75	orang	75	orang	100,00	NA	orang	NA	orang
		Jumlah paduan suara kapanewon yang terbentuk dan dilatih		40	orang	15	orang	40	orang	40	orang	100,00	NA	orang	NA	orang	

		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	32	<i>dokumen</i>	NA	<i>dokumen</i>	NA	<i>dokumen</i>	NA	<i>dokumen</i>	NA	<i>dokumen</i>	33	<i>dokumen</i>	NA	<i>dokumen</i>	33	<i>dokumen</i>	NA	<i>dokumen</i>
7.01.06 .2.01.0 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan produk hukum kalurahan	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100,00	NA	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	2	dokumen	2	dokumen	dokumen	2	dokumen	2	dokumen
7.01.06 .2.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen monografi kalurahan dan kapanewon	16	dokumen	16	dokumen	16	dokumen	16	dokumen	100,00	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	2	kesepakatan	0	kesepakatan	1	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan
		Jumlah koordinasi bidang pemerintahan	4	kali	0	kali	2	kali	2	kali	100,00	NA	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	18	dokumen	18	dokumen	dokumen	18	dokumen	18	dokumen
7.01.06 .2.01.0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan APBDes	7	dokumen	7	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	NA	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali
		Jumlah fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa	7	kalurahan	7	Desa	2	kali	2	kali	100,00	NA	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali
		Jumlah pembinaan keuangan desa	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100,00	NA	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali
		Jumlah fasilitasi pendayagunaan aset desa	7	kalurahan	7	Desa	1	dokumen	1	dokumen	100,00	NA	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali

7.01.06	Rekomendasi	Jumlah kalurahan	0	kalurahan	3	kalurahan	3	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
.2.01.0	Pengangkatan dan	yang menyelenggarakan		kalurahan	3	kalurahan	3	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
8	Pemberhentian	pemberhentian dan		kalurahan	3	kalurahan	3	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
	Perangkat Desa	perangkat kalurahan		kalurahan	3	kalurahan	3	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Jumlah Dokumen		kalurahan	NA	kalurahan	NA	kalurahan	NA	NA	kalurahan	3	kalurahan	
		Rekomendasi		kalurahan	NA	kalurahan	NA	kalurahan	NA	NA	kalurahan	3	kalurahan	
		Pengangkatan dan		kalurahan	NA	kalurahan	NA	kalurahan	NA	NA	kalurahan	3	kalurahan	
		Pemberhentian		kalurahan	NA	kalurahan	NA	kalurahan	NA	NA	kalurahan	3	kalurahan	
		Perangkat Desa		kalurahan	NA	kalurahan	NA	kalurahan	NA	NA	kalurahan	3	kalurahan	
7.01.06	Fasilitasi	Jumlah anggota		kalurahan	70	kalurahan	70	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
.2.01.1	Penyelenggaraan	linmas yang		kalurahan	70	kalurahan	70	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
1	Ketenteraman dan	diharapkan meningkat		kalurahan	70	kalurahan	70	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
	Ketertiban Umum	pengetahuannya		kalurahan	70	kalurahan	70	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Jumlah peserta		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		pembinaan		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		pencegahan dan		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		mitigasi bencana		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Jumlah Dokumen		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Fasilitasi dalam rangka		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Penyelenggaraan		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Ketenteraman dan		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Ketertiban Umum		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Persentase program		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		penyelenggaraan		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		keistimewaan		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Yogyakarta urusan		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		kebudayaan		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		terfasilitasi		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Jumlah Laporan Adat,		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Seni, Tradisi dan		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Lembaga Budaya		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Jumlah kegiatan adat,		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		seni dan lembaga		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		budaya		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Gelar seni budaya		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		dalam rangka HUT RI		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		dan Hari Keistimewaan		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		DIY		kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
2.22.08	Gelar Budaya Jogja			kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
.2.09.0				kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
7				kalurahan	0	kalurahan	30	kalurahan	100,00	NA	kalurahan	NA	kalurahan	

2.22.08 2.09.1 6	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA 1	laporan	1	laporan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan													
4.01.04															
4.01.0 4.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	8	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA 2	dokumen	2	dokumen	
		Jumlah kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	100,00 NA	layanan	NA	layanan	
4.01.04 .5.01.0 7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	8	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA 2	dokumen	2	dokumen	
4.01.04 .5.01.1 0	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan Rencana Program kegiatan keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan tahun 2024	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00 NA	laporan	NA	laporan	
			2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00 NA	dokumen	NA	dokumen	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Paliyan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kapanewon Paliyan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, di samping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Paliyan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan setrategis Pemerintah. Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah Kapanewon Paliyan. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui pelayanan satu pintu/pelayanan terpadu di Kapanewon, jenis layanan yg dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan umum
2. Pelayanan BPJS
3. Pelayanan SKTM
4. Pelayanan SKCK
5. Pelayanan waris
6. Pelayanan pinjaman perangkat daerah
7. Pelayanan pengajuan proposal
8. Pelayanan IMB

Indikator kinerja utama kapanewon ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021, salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kapanewon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon tahun 2024. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Paliyan Kabupaten gunungkidul disajikan dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Paliyan
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)										
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	NA	93.21	96.10	96.14	NA	93,54	96.10	96.14	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan/Kapanewon Paliyan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kapanewon Paliyan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Paliyan. Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berisi uraian sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Paliyan antara lain:
 - a. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas
 - b. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi tentang pengentrian data-data terkait data pamong kalurahan/lembaga terkait.
 - c. Pemahaman dan pengendalian SOP pelayanan di kalurahan-kalurahan belum optimal karena masih ada permohonan yang persyaratannya belum lengkap.
 - d. Adanya regulasi/peraturan yang akan memengaruhi proses perencanaan di kapanewon dan kalurahan, pekerjaan dapat terselesaikan tetapi tidak tepat waktu.
 - e. Adanya kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kapanewon tetapi belum dapat dilaksanakan (IMB) karena belum ada pelatihan untuk sumber daya manusia dan belum ada sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan.
 - f. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke kapanewon dan kalurahan
 - g. Angka kemiskinan masih perlu ditangani
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*).

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah *"Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026"*.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yang meliputi :

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
- b. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut:

- a. Isu strategis nasional
 - Percepatan penghapusan kemiskinan
 - Penanganan Stunting
 - Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19
 - Middle income trap riset, alokasi sumber daya, dan human capital
 - Percepatan pembangunan infrastruktur
 - Pengurangan risiko bencana
 - Pasokan energi dan pangan
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Reformasi Birokrasi
 - Pilpres dan Pilkada Serentak tahun 2024
 - Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045
- b. Isu strategis provinsi
 - Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024
 - Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- Pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19
 - Penanganan Stunting
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pasokan Energi dan Pangan
 - Perencanaan Pembangunan jangka Panjang 2025 - 2045
- c. Isu strategis daerah
- Pilpres dan pilkada serentak tahun 2024
 - Penanganan stunting
 - Perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - Penanganan dan pemulihan paska pandemi Covid-19
 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 0 (nol) Kemiskinan Ekstrem
 - Pengembangan potensi Pariwisata
 - Peningkatan Investasi
 - Perkembangan Teknologi Informasi
 - Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana
 - Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah
 - Pengembangan inovasi daerah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah: *“Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”* Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi;
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Paliyan adalah Reformasi Birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat serta prioritas peningkatan ekonomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.

Mendasar tugas pokok Kapanewon Paliyan, fungsi yang diemban oleh Kapanewon Paliyan adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Tugas dan fungsi Kapanewon Paliyan terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Paliyan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan publik.

Pemerintah Kapanewon Paliyan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Paliyan. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Paliyan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Paliyan antara lain:
 - Jumlah sumber daya manusia yang terbatas;

- Kapanewon sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kapanewon hanya sebatas pengelola gaji pegawai dan biaya operasional Kapanewon. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui perangkat daerah terkait.
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal dan tepat waktu.
- Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir tindak dari masyarakat
- Permohonan KK dan KTP di wilayah Kapanewon Paliyan cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya satu (1) orang maka diperlukan kerja ekstra untuk mencukupi target tersebut
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut kapanewon untuk responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Tingginya angka kemiskinan, daerah perbatasan yang rawan konflik
- Infrastruktur Pedesaan yang kurang baik (Jalan, Jembatan, Drainase)
- Kurangnya Akses Teknologi Pertanian, Peternakan, Perindustrian/Kerajinan, Permodalan, dan Pemasaran produk
- Kurangnya Akses Air Bersih, Pendidikan, dan kesehatan

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan Kapanewon Paliyan antara lain:

- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kapanewon, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.
 - Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kapanewon Paliyan dengan Forkompimka, Dinas Instansi, Korwil, lurah dan pamong kalurahan, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi.
 - Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
 - Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
 - Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Paliyan yaitu:

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
- b. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan
- c. Kemampuan keuangan relatif terbatas
- d. Masih banyaknya jumlah masyarakat miskin

- e. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/menengah

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026 maka Kapanewon Paliyan berperan aktif dalam perumusan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Adapun program yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Program Penyelegaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- Program Penyelegaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4. *Review* terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD telah dilakukan melalui musyawarah mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon dan kabupaten dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kapanewon Paliyan berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah pagu pendanaannya.

Dalam reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat point-point sebagai berikut:

1. Proses pertama yang dilakukan adalah membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Total pagu Kapanewon Paliyan pada rancangan awal sebesar Rp 2.483.377.480. Pada tahapan penyempurnaan awal renja ini pagu menjadi sebesar Rp 1.637.667.086. Pagu ini sesuai dengan SE Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja PD TA 2024 Nomor 000.7.6.1/1013. Kemudian pada tahapan rancangan akhir renja ini pagu menjadi sebesar Rp 1.908.817.086,00 Pagu ini sesuai dengan SE Pedoman Penyusunan PRA Rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggran 2024 Nomor 000.1.2.2/02474. Pada Tahapan selanjutnya sesuai dengan SE Nomor 900.1.22 / 04391 tentang tindak lanjut hasil fasilitasi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten gunungkidul tahun 2024 pagu menjadi sebesar Rp. 1.677.817.086,00. Ada beberapa baik program, kegiatan maupun subkegiatan yang mengalami penyesuaian karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan pagu anggaran.
2. Alasan dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan adalah untuk

mengetahui kebutuhan nyata dari Kapanewon Paliyan, salah satunya dengan menyesuaikan Program, Kegiatan, subkegiatan dan indikator subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan pagu anggaran.

3. Proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan menghasilkan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD yaitu untuk program yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta di tahapan ini belum masuk di matrik renja, adanya perbedaan pagu anggaran baik program, kegiatan maupun subkegiatan yang menyesuaikan dengan pagu anggaran dan kebutuhan.

Secara rinci hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	100 persen	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	100 persen	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	150.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 laporan	150.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	100.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	25.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	35.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	2 dokumen	25.970.000	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	4 dokumen	35.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan yang Didampingi	2 dokumen	25.970.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Rencana program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	4 dokumen	35.000.000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	1.852.367.480	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	1.306.687.086	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.14 indeks	41.980.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.14 indeks	33.917.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.510.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	dokumen	2.130.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	dokumen	570.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kapanew on Paliyan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	dokumen	430.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	dokumen	24.770.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	dokumen	27.842.500	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	dokumen	570.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	laporan	5.330.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	laporan	1.955.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanew on Paliyan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	laporan	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanew on Paliyan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	laporan	1.040.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanew on Paliyan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.33	indeks	1.561.795.480	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanew on Paliyan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.33	indeks	1.088.999.586	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanew on Paliyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	orang/bulan	1.556.095.480	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanew on Paliyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	orang/bulan	1.086.919.586	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	820.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	laporan	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanew on Paliyan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	laporan	1.260.000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	dokumen	3.000.000	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	dokumen	1.350.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	3.000.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	1.350.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.343.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.57	indeks	87.343.000	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.57	indeks	43.347.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	paket	3.300.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	4	paket	1.579.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.958.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	paket	36.958.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	13.866.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.825.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6	paket	24.825.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	21.982.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	paket	3.500.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2.820.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	248	dokumen	1.200.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	dokumen	0
Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.400.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	2.400.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.160.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	laporan	15.160.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	laporan	2.500.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.350.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	unit	24.350.000	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	unit	7.000.000
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	4.600.000	Pengadaan Mebel	2	unit	4.600.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	unit	7.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.750.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	4.750.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Paliyan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73	laporan	47.619.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Paliyan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73	laporan	51.807.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	25.224.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	26.125.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	laporan	22.395.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	laporan	25.682.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Paliyan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172	unit	86.280.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Paliyan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172	unit	80.265.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141	unit	37.825.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141	unit	44.700.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	unit	5.505.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	3.400.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	33.850.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	30.965.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7	unit	2.100.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	unit	1.200.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	7.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	unit	0

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	persen	258.395.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	persen	147.540.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	laporan	19.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	laporan	6.830.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	laporan	19.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	laporan	6.830.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24	laporan	239.395.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24	laporan	140.710.000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10	laporan	224.395.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7	laporan	136.915.000
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14	laporan	15.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14	laporan	3.795.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100	persen	70.710.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100	persen	24.185.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.5	indeks	48.210.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.5	indeks	14.135.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	9	dokumen	28.210.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	8	dokumen	3.640.000

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Laporan	20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9	Laporan	10.495.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3	indeks	22.500.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3	indeks	10.050.000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	lembaga kemasyarakatan	9.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	lembaga kemasyarakatan	2.795.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	laporan	13.500.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	laporan	7.255.000
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	persen	21.420.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	persen	4.135.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	laporan	21.420.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	laporan	4.135.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	laporan	8.920.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13	laporan	1.100.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	laporan	12.500.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	laporan	3.035.000
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	persen	60.830.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	persen	48.350.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.5	indeks	60.830.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.5	indeks	48.350.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Paliyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	55.830.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Paliyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	40.400.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	5.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	7.950.000
8 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 persen	43.685.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 persen	11.715.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32 dokumen	43.685.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32 dokumen	11.715.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 dokumen	4.150.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 dokumen	1.010.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 dokumen	7.100.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 dokumen	995.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	11.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	5.030.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	4.125.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	740.000
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	1 dokumen	3.000.000	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	1 dokumen	1.380.000

Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah dokumen fasilitiasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	dokumen	3.000.000	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	dokumen	710.000
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3	dokumen	3.560.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3	dokumen	1.020.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	2	dokumen	7.250.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	1	dokumen	830.000
					2.483.377.480						1.677.612.086

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, bagian ini diuraikan dalam kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun hasil informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon. Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat dusun/lingkungan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum musrenbangkal
2. Di forum musrebangkal menghasilkan skala prioritas usulan tingkat kalurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari kalurahan untuk mengawal usulan tersebut di forum musrenbang tingkat Kapanewon
3. Hasil musrenbang Kapanewon merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu isu penting dari masing masing SKPD yang ada. Kegiatan musrenbang kapanewon yang telah disepakati antara lain dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial berupa jamban dan septictank kepada kk miskin, dalam bidang ekonomi menyelenggarakan bimtek perencanaan pembangunan kalurahan dan bimtek pengelolaan keuangan kalurahan.
4. Kedepan kamus usulan sudah ada sehingga pada saat pelaksanaan musrenbangkal semua usulan program kegiatan yg ada di kalurahan bisa terakomodir sesuai kegiatan yang direncanakan, sehingga terjadi sinkronisasi data antara usulan pemerintah kalurahan, kapanewon dan kabupaten.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisine/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	PIWK – Bantuan PAH Berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan	Kalurahan Mulusan, Kapanewon Paliyan	Terlaksananya kegiatan pembangunan PAH bagi KK miskin	10 KK	8.000.000	80.000.000	Diterima
2	PIWK - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa	Kalurahan Giring, Kapanewon Paliyan	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan.	1 kali	6.000.000	6.000.000	Di Refokusing
3	PIS – Pembangunan jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan	Terlaksananya kegiatan Pembangunan jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	18 KK	7.000.000	126.000.000	Tidak diterima
4	PIS – Pembangunan jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan	Terlaksananya kegiatan Pembangunan jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	10 KK	7.000.000	70.000.000	Tidak diterima
5	PIS – Pelatihan perencanaan pembangunan di desa	Kalurahan Giring, Kapanewon Paliyan	Terlaksananya kegiatan pelatihan perencanaan pembangunan di desa	1 Kali	16.000.000	16.000.000	Tidak diterima

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah sehingga diharapkan program dan kegiatan perangkat daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Kebijakan nasional tentang kapanewon tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Sedangkan Kapanewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Paliyan sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2024 Kapanewon Paliyan juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari

suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional dan kegiatan pokok yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kapanewon Paliyan

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	1. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 2. Meningkatnya Akuntabilitas PD	1. Indeks pelayanan kapanewon 2. Nilai AKIP PD
2	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan Sasaran PD dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut

Tabel 3.2
Tujuan Kapanewon Paliyan

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	96.16
2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	6

Tabel.3.3
Sasaran Kapanewon Paliyan Tahun 2024

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target sasaran PD Tahun 2024
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96.14
2.	Meningkatnya akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	A (82.50)
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	6

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kapanewon dengan tabel sebagai berikut :

Tabel.3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Paliyan Tahun 2024

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96.14

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Paliyan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan;;
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON PALIYAN

Perencanaan Kinerja Kapanewon Paliyan tahun 2024 mendasar pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 yaitu terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat tahun 2026. Oleh karena itu rencana kinerja tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan pembinaan atau fasilitasi kalurahan, kegiatan PIWK, penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan STOP BABS atau jamban sehat dan septictank, evaluasi APBKal dan RKPKal, koordinasi penanggulangan kemiskinan serta koordinasi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan yaitu:
 1. Sebagai konsekuensi untuk merealisasikan program/kegiatan Kapanewon Paliyan dalam rangka mendorong visi dan misi Bupati Kepala Daerah.
 2. Prioritas pembangunan, dalam hal ini prioritas Kapanewon Paliyan adalah reformasi birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat, serta prioritas peningkatan ekonomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.
 3. Pengurangan kemiskinan dengan mengembangkan kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan meningkatkan ketrampilan dalam mengolah hasil bumi/pertanian menjadi produk bernilai tambah dan Peningkatan akses pemasaran melalui promosi produk.
 4. Pencapaian IKU untuk tahun 2022-2026 dengan indikator kinerja utama “Indeks Pelayanan Kapanewon” yang formulasi perhitungannya menggunakan lima komponen yaitu persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, persentase KK miskin yang tertangani, persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, dan nilai indeks kepuasan masyarakat.
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dengan penumbuhan BUMKalurahan yang dapat menumbuhkan iklim usaha kecil yang produktif.
 6. Melakukan program promosi kesehatan, dimana lebih diupayakan untuk membiasakan masyarakat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
 7. Penyuluhan Keluarga Berencana bagi semua warga, kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan usia dini.
 8. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanakan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di Pemerintahan Kalurahan maupun Kapanewon
 9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif.
 10. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan Rancangan Program dan Kegiatan Kapanewon Paliyan Tahun 2024 terdiri dari 8 program , 16 kegiatan dan 49 subkegiatan dimana dalam pelaksanaannya kegiatan untuk difokuskan pada pelayanan masyarakat tersebar di wilayah Paliyan yang terdiri dari 7 kalurahan.

Adapun total pagu Rancangan Awal Renja tahun 2024 sebesar 2.483.377.480, sedangkan untuk perkiraan tahun 2025 sebesar 2.533.045.030. Program dan kegiatan Pembangunan Kapanewon Paliyan Tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program Pembangunan
Kapanewon Paliyan Tahun 2024

NO	Sasaran Kapanewon Paliyan	Nama Program/ Kegiatan
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik <ol style="list-style-type: none"> a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan <ol style="list-style-type: none"> a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum <ol style="list-style-type: none"> a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan <ol style="list-style-type: none"> a) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

	<p>untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan</p>	<p>2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan a) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</p>
--	--	--

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Paliyan	Urusan/ Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 22 08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi		100 persen	100.000.000			100 persen	150.000.000
2 22 08 507		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		1 laporan	100.000.000			1 laporan	150.000.000
2 22 08 507 06		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kapanewon Paliyan	1 laporan	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		1 laporan	150.000.000
4 01 04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan		100 persen	35.000.000			100 persen	25.970.000
4 01 04 506		Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan		4 dokumen	35.000.000			2 dokumen	25.970.000
4 01 04 506 01		Penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	Kapanewon Paliyan	4 dokumen	35.000.000	Dana Keistimewaan DIY		2 dokumen	25.970.000
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100 persen	1.306.687.086			100 persen	1.887.560.030
7 01 01 201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.14 indeks	33.917.500			8.28 indeks	43.220.000
7 01 01 201 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Paliyan	3 dokumen	1.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	5.300.000

1			2		3			4		5		6		7		8		9		10		
7	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen							2.130.000	
7	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen							1.200.000	
7	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kapanewon Paliyan	2	dokumen	27.842.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	dokumen							24.770.000	
7	01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Paliyan	2	dokumen	570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	dokumen							2.000.000	
7	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Paliyan	17	laporan	1.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17	laporan							5.320.000	
7	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Paliyan	32	laporan	1.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32	laporan								2.500.000
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		79.33	indeks	1.088.999.586			79.33	indeks							1.562.495.030	
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Paliyan	238	orang/ bulan	1.086.919.586	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		224	orang/ bulan								1.556.695.030
7	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Paliyan	1	laporan	820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	laporan								1.500.000

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
7	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Paliyan	13	laporan	1.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13	laporan						4.300.000
7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6	dokumen	1.350.000		6	dokumen						3.500.000
7	01	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Paliyan	6	dokumen	1.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6	dokumen						3.500.000
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah		43.57	indeks	43.347.500		43.87	indeks						100.420.000
7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	4	paket	1.579.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	paket						3.500.000
7	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	12	paket	13.866.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18	paket						38.535.000
7	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	4	paket	21.982.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6	paket						27.825.000
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	2	paket	2.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	paket						3.500.000
7	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	0	dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	248	dokumen						1.200.000
7	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Paliyan	12	laporan	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	laporan						2.400.000
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Paliyan	7	laporan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17	laporan						23.460.000

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
7 01 01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	unit	7.000.000								15	unit				43.050.000
7 01 01	207 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7	unit	7.000.000	Kapanewon Paliyan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15	unit				43.050.000
7 01 01	207 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	0	Kapanewon Paliyan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	unit				0
7 01 01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73	laporan	51.807.500								73	laporan				48.395.000
7 01 01	208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	26.125.000	Kapanewon Paliyan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60	laporan				26.000.000
7 01 01	208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	laporan	25.682.500	Kapanewon Paliyan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13	laporan				22.395.000
7 01 01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	172	unit	80.265.000								172	unit				86.480.000
7 01 01	209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141	unit	44.700.000	Kapanewon Paliyan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	141	unit				37.825.000
7 01 01	209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	3.400.000	Kapanewon Paliyan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22	unit				5.705.000
7 01 01	209 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	30.965.000	Kapanewon Paliyan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	unit				33.850.000

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kapanewon Paliyan	4	unit	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7	unit							2.100.000			
7	01	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kapanewon Paliyan	0	unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	unit							7.000.000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana		100	persen	147.540.000			100	persen							258.800.000		
7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3	laporan	6.830.000			3	laporan							18.905.000		
7	01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Paliyan	2	laporan	6.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	laporan								18.905.000	
7	01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		24	laporan	140.710.000			24	laporan								239.895.000	
7	01	02	202	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	7	laporan	136.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	laporan								224.395.000	
7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	14	laporan	3.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14	laporan									15.500.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi		100	persen	24.185.000			100	persen								76.910.000	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
7 01 03 201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				9.5	indeks	14.135.000				9.5	indeks				52.910.000
7 01 03 201 02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Kapanewon Paliyan		8	dokumen	3.640.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9	dokumen				28.210.000
7 01 03 201 03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kapanewon Paliyan		9	Laporan	10.495.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10	Laporan				24.700.000
7 01 03 203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3	indeks	10.050.000				3	indeks				24.000.000
7 01 03 203 02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Kapanewon Paliyan		1	lembaga kemasyarakatan	2.795.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	lembaga kemasyarakatan				9.000.000
7 01 03 203 04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Kapanewon Paliyan		3	laporan	7.255.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	laporan				15.000.000
7 01 04		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum terfasilitasi				100	persen	4.135.000				100	persen				21.920.000
7 01 04 201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum				2	laporan	4.135.000				4	laporan				21.920.000
7 01 04 201 01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kapanewon Paliyan		13	laporan	1.100.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	laporan				8.920.000
7 01 04 201 02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kapanewon Paliyan		2	laporan	3.035.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	laporan				13.000.000
7 01 05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi				100	persen	48.350.000				100	persen				65.200.000

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
7	01	05	201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			39.5	indeks	48.350.000				39.5	indeks				
7	01	05	201	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Tunjail Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Paliyan	75	orang	40.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75	orang				60.200.000
7	01	05	201	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Paliyan	4	dokumen	7.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4	dokumen				5.000.000
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana		100	persen	11.715.000					100	persen				46.685.000
7	01	06	201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		32	dokumen	11.715.000					33	dokumen				46.685.000
7	01	06	201	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Paliyan	2	dokumen	1.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2	dokumen				4.150.000
7	01	06	201	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Paliyan	18	dokumen	995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18	dokumen				7.100.000
7	01	06	201	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Paliyan	4	dokumen	5.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5	dokumen				12.000.000

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
7	01	06	201	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	dokumen							4.625.000
7	01	06	201	06	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	1.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	dokumen							3.000.000
7	01	06	201	07	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	dokumen							3.500.000
7	01	06	201	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	3	dokumen	1.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	dokumen							3.560.000
7	01	06	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	dokumen							8.750.000
										1.677.612.086										2.533.045.030

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Renja Kapanewon Paliyan Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Daerah. Renja Kapanewon Paliyan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Renja Kapanewon Paliyan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD. Renja Kapanewon Paliyan Tahun 2024 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Renja Kapanewon Paliyan telah dan akan selalu melibatkan peran (*stakeholder*) atau pemangku kepentingan. Pelibatan (*stakeholder*) dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2. Kaidah pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Kapanewon Paliyan Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
KAPANEWON PALIYAN,

ttd

DASNO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON PANGGANG
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Rencana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2026 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang merupakan dokumen untuk menerjemahkan dan menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Tahunan Daerah.

Dampak pandemic Covid-19 diperkirakan juga masih dirasakan pada Tahun 2024, baik dari sisi pendapatan maupun prioritas belanja program kegiatan pembangunan daerah. Renja Kapanewon Panggang tahun 2024 juga dirancang untuk membantu pemulihan kondisi pasca pandemi baik pada sektor kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagai tahun ketiga dalam periode perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026, tahun 2023 dalam upaya penyelesaian capaian target pembangunan yang telah diraih pada periode perencanaan pembangunan daerah sebelumnya dan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana diatur dalam RKPD Tahun 2024 merupakan instrumen tentang arah dan kebijakan operasional pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun berjalan yang menjadi panduan dan acuan Bupati bersama DPRD dalam menyusun Kebijakan Umum Belanja Anggaran serta penentuan prioritas dan pagu anggaran sementara yang menjadi dasar Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2024. Dalam hal ini Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan, serta pemulihan pasca covid-19, dengan memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Panggang Tahun 2024 juga dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sudah dilaksanakan pada Bulan Februari 2023. Proses pelaksanaan musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kalurahan, musrenbang kapanewon, dan musrenbang kabupaten termasuk didalamnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk mengawal

usulan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi sampai ditetapkan RKPDP Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara khusus diatur dalam pasal 126 sampai dengan pasal 130.

Sinkronisasi perencanaan merupakan hal utama, Renja Kapanewon Panggang Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renja Kapanewon Panggang dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi berdasarkan data dan asumsi-asumsi yang tepat dan akurat, serta berdasarkan hasil evaluasi Renja Kapanewon Panggang tahun lalu dan tahun berjalan. Semua program kegiatan yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja Kapanewon Panggang Tahun 2024 disusun dengan menyesuaikan adanya dokumen Perubahan Renstra periode 2021-2026 tahun 2022, berdasarkan Permendagri Nomor 050/5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penjabaran dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah tersebut selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Panggang berperiode satu tahun yang merupakan embrio perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran operasional pelaksanaan urusan, program dan kegiatan yang termaktub dalam RPJM Daerah. Seluruh proses dan tahapan penyusunan semua dokumen perencanaan tersebut dibangun dengan berbagai macam pendekatan, baik berupa pendekatan politis, teknokratis, partisipatif maupun *bottom up* dan *top down*. Realisasi dan perencanaan yang pada akhirnya dituangkan dalam dokumen Renja Kapanewon Panggang tahun 2024 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Belanja Kapanewon Panggang tahun 2024 sebagai upaya tindak lanjut sinkronisasi dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 dengan Renja Kapanewon Panggang Tahun 2024.

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan perlu diupayakan terwujudnya hubungan antara Renja Kapanewon Panggang dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

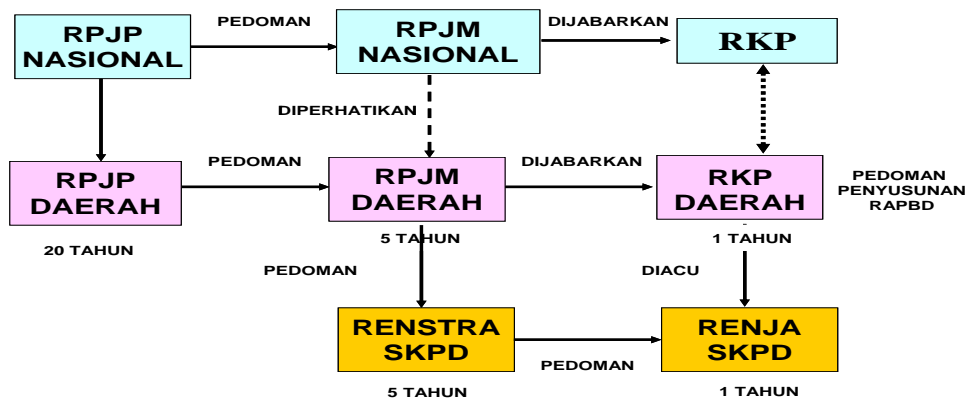
1. Hubungan RKPD dengan RPJMD

Dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan dan rencana program kegiatan prioritas pembangunan daerah.

2. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dokumen RKPD kabupaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan rencana kerja PD. Selanjutnya rencana kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.

3. Hubungan RKPD dan RKPD DIY dan RKP

Dokumen RKPD kabupaten harus mengacu, disinkronkan dan diserasikan dengan dokumen RKPD DIY dan RKP (nasional). Sinkronisasi dilakukan terkait dengan tema, prioritas, sasaran, target kinerja pembangunan dan juga indikasi program-program pembangunan prioritas. Skema hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan PD seperti gambar 1.1 berikut:



Bagan 1: Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, kemudian setelah dikompilasi dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) semua perangkat daerah menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja Kapanewon Panggang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 00.7.6.1/10130/0508 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Kapanewon Panggang Tahun 2024

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Kapanewon Panggang Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kapanewon Panggang
4. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.3.2 Tujuan

Rancangan Renja Kapanewon Panggang disusun untuk menjadi dasar pijakan dan gambaran rencana pembangunan Kapanewon Panggang pada Tahun 2024 yang akan dilaksanakan melalui jawatan dan subbag yang ada di dalamnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, sehingga

pembangunan yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan Renja Kapanewon Panggang Tahun 2024 ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON PANGGANG

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kapanewon Panggang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Panggang
- 2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON PANGGANG

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Panggang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON PANGGANG

- 4.1 Rencana Kerja

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON PANGGANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Kapanewon Panggang

Pada bagian ini memuat tentang evaluasi capaian rencana kerja tahun TA 2022 yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target dalam Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2021-2026. Seperti halnya tahun sebelumnya, yang masih tetap perlu menjadi perhatian terkait dengan upaya pencapaian target kinerja adalah jumlah karyawan Kapanewon Panggang yang dari tahun ke tahun semakin berkurang dan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 hanya terdapat 17 orang PNS. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena pada personil-personil tertentu mesti merangkap beberapa tugas pada unit kerja (seksi/ subbag) yang berbeda.

Upaya Kapanewon Panggang untuk mengatasi kendala akibat dari minimnya jumlah pegawai adalah dengan mengajukan penambahan karyawan Tenaga Harian Lepas (THL). Melalui penambahan pegawai dengan jalur pengangkatan THL sangat berpengaruh terhadap tingkat capaian kinerja Kapanewon Panggang, namun demikian capaian kinerja tetap tidak bisa semua terlaksana dikarenakan ada beberapa faktor eksternal.

- 1). Berikut output kegiatan Kapanewon Panggang Tahun 2022 yang tidak dapat terealisasi sesuai target yang direncanakan:
 - Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam pordes/porkab
- 2). Kegiatan Kapanewon Panggang yang terealisasi sesuai target yang direncanakan:
 - a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - h. Penataan organisasi
 - i. Adat, seni, tradisi dan Lembaga budaya
 - j. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan
 - k. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
 - l. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - m. Koordinasi pemberdayaan desa
 - n. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan
 - o. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - p. Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - q. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 - r. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- 3). Kegiatan Kapanewon Panggang yang terealisasi melebihi target yang direncanakan:

Di Kapanewon Panggang tidak ada kegiatan yang pelaksanaannya melebihi target perencanaan.

- 4). Faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja Kapanewon Panggang adalah dipengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tertentu.

Faktor yang mendukung terealisasinya pelaksanaan program kegiatan sesuai target adalah komitmen, kedisiplinan dan etos kerja PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan.

- 5). Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya program/kegiatan yaitu:

- a. Mengikuti proses dan alur perencanaan anggaran sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Kabupaten Gunungkidul.

- b. Meningkatkan frekuensi koordinasi antara PA, PPK dan PPTK.

Pada Kapanewon Panggang tidak terdapat kegiatan yang terealisasi melebihi target yang direncanakan. Untuk Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Panggang melaksanakan 8 program yang terbagi dalam 18 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Selanjutnya berdasarkan laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Proyeksi Pencapaian Renstra Kapanewon Panggang sampai dengan Tahun 2023 selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.1.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Panggang dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul**

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
	Urusan :									
	Semua urusan pemerintahan umum									
	Program :									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Outcome :								
		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan :	Output :								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perubahan renja	5	5	1	1	100%			100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah dokumen renja	5	5	1	1	100%			100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2	2	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA	5	5	1	1	100%			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	1	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen RKA	5	5	1	1	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1	1	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	5	5	1	1	100%			
		Jumlah dokumen perjanjian Kinerja	5	5	1	1	100%			
		Jumlah dokumen ROPK	5	5	0	0	100%			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi						2	2	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	5	5	1	1	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	5	5	1	1	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	5	1	1	100%	2	2	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	5	5	1	1	100%			
		Jumlah Laporan E-Monev	20	20	4	4	100%			
		Jumlah Laporan Teppa	60	60	12	12	100%			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						17	17	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32						32	32	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
	Kegiatan :	Output :								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	70	70	14	14	100%			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						238	238	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	5	5	1	1	100%			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1	1	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	70	70	12	12	100%			
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	5	5	1	1	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						13	13	100%
		Output :								
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan:								
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	75	75	15	15	100%	15	15	100%
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah						6	6	100%
		Output :								
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan:								

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	40	40	4	4	100%			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						4	4	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	60	60	12	12	100%	0	0	
		Jumlah laptop yang terbeli	9	2	2	2	100%	0	0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						14	14	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	50	50	12	12	100%	12	12	100%
		Jumlah dispenser yang terbeli	0	0	1	1	100%	0	0	100%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						13	13	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak	60	60	7	7	100%	0	0	0
		Jumlah Lembar Penggandaan	28750	28750	5730	5730	100%	5730	5730	100%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan						12	12	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Pengandaan yang Disediakan								
7.01.2.06.06.05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Tagihan surat kabar yang terbayar	60	60	12	12	100%	248	248	100%
7.01.2.06.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi minum dan snacknya	2446	2446	200	200	100%			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12	12	100%
7.01.2.06.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi/konsultasi ke kabupaten	0	0	13	13	100%			
		Jumlah peserta rapat koordinasi internal yang terfasilitasi minum dan snecknya	0	0	300	300	100%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						17	17	100%
		Output :								
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan:								

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi rapat yang terbeli	150	150	20	20	100%	20	20	100%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0	24	24	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						2	2	100%
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1	1	100%
		Output :								
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan:								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Hari terfasilitasinya pengadministrasian surat menyurat	992	992	247	246	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12	12	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang terbayar	60	60	12	12	100%	12	12	100%
		Jumlah rekening listrik yang terbayar (4 rekening x 12 bulan)	240	240	48	48	100%	48	48	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah rekening telepon yang terbayar	60	60	12	12	100%	12	12	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						72	72	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa kebersihan dibayar (non THL)	60	24	12	12	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						24	24	100%
		Output :								
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan:								
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	5	5	1	1	100%	1	1	100%
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	40	40	8	8	100%	8	8	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	5	5	12	12	100%	12	12	100%
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	40	40	12	12	100%	12	12	100%
		Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah						164	164	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah BBM Genset yang tersedia	1	1	120	120	100%	120	120	100%
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	15	15	5	5	100%	5	5	100%
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	10	10	2	2	100%	2	2	100%
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	40	40	9	9	100%	9	9	100%
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	20	20	8	8	100%	8	8	100%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						24	24	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah hari terfasilitasi nya keamanan gedung kantor	0	0	365	365	0%	360	360	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	15	15	5	5	100%	5	5	100%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1	1	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharaannya	30	30	10	10	100%	12	12	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						13	131	100%
		Output:								
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan:								
7.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	10	10	2	2	100%			
		Jumlah dokumen RTP/SPIP	5	5	1	1	100%			
		Program :								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Outcome :								

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan:	Output :								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45	36	9	0	100%			
		Jumlah festival kesenian tingkat kecamatan yang terselenggara	5	4	1	1	100%			
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	45	30	15	15	100%			
		Jumlah kesepakatan dan pelestarian pengembangan budaya	20	18	4	4	100%			
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan hari jadi Kabupaten Gunungkidul	5	5	1	1	100%			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi						5	5	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Output :								
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen hasil money bidang kesejahteraan sosial	60	47	12	12	92%			
		Jumlah kesepakatan forum desa siaga	10	8	2	2	100%			
		Jumlah kesepakatan forum kecamatan sehat	20	18	4	4	100%			
		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	5	4	1	1	100%			
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	10	8	2	2	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah kesepakatan update data SID/ SIKAB	5	4	1	1	100%			
		Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	175	175	15	15	100%			
		Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH) (PIWK)	200	500	33	33	100%			
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	10	10	2	2	100%			
		Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat	3.750	3.750	488	488	100%			
		Jumlah sosialisasi Perda yang terfasilitasi	0	0	9	9	100%			
		Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						33	33	100%
7.01.02.2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	600	600	120	120	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	180	144	32	32	100%			
		Jumlah peserta sosialisasi pengurusan ijin UMK dan perijinan lainnya	150	120	28	28	100%			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						14	14	100%
7.01.03		Outcome :								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Output :								
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan:								

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen usulan rencana kegiatan (DURP)	5	54	1	1	100%			
		Jumlah desa/kalurahan yang pengurus lembaga kemasyarakatannya meningkat kapasitasnya	30	24	6	6	100%			
		Jumlah desa/kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes	30	24	6	6	100%			
		Terlaksananya Bimtek perencanaan pembangunan desa/kalurahan (PIWK)	0	0	1	1	0%			
		Terlaksananya pembinaan perencanaan pembangunan desa secara aplikasi	320	248	60	60	100%			
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						11	11	Dokumen

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Frekuensi monev kegiatan BKAD dan UPK PPM	60	48	2	2	100%			
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah pendampingan pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten	5	4	1	1	100%			
		Jumlah perlombaan desa tingkat kecamatan	5	4	1	1	100%			
		jumlah profil desa dan kecamatan yang tersusun	35	28	7	7	100%			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Output:						9	9	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan:	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan Forum anak	10	8	2	2	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	5	4	1	1	100%			
		Jumlah kesepakatan penanganan pencegahan pernikahan usia anak	5	4	1	1	100%			
		Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	60	51	12	12	100%			
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya						2	2	100%
	Sub Kegiatan:									
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	5	4	1	1	100%			
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	15	9	2	2	0%			
		Jumlah kesepakatan koordinasi masa tanam, perbenihan, pemupukan, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikanan	10	8	1	1	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah Pelaku industri kecil/ rumah tangga yang meningkat pengetahuannya	100	80	20	20	100%			
		Jumlah Sos Perda yang terfasilitasi	0	0	11	11	100%			
		Jumlah rakor monev dana desa	0	0	1	1	100%			
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						4	4	100%
		Program :								
7.01.04		Outcome :								
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan :								
7.01.04.2.01		Output :								
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
	Sub Kegiatan:									
7.01.04.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan hasil patroli bersama	60	48	12	12	100%			
		Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	5	4	1	1	100%			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						13	13	100%
7.01.04.2.01.01	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kesepakatan dialog Umat beragama tingkat kecamatan	200	120	40	40	100%			
		Jumlah pelaksanaan safari tarawih	25	10	0	0	0			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						2	2	100%
	Program :									

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Outcome :								
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Output :								
7.01.05.2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksanaan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan:								
7.01.05.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan HUT yang terfasilitasi pelaksanaannya	55	49	3	3	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah Paskib kecamatan yang dibentuk dan dilatih	375	231	75	75	100%			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						75	75	100%
7.01.05.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kesepakatan penanganan perempuan dan anak korban KDRT	10	8	2	2	100%			
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						1	1	100%
7.01.05.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi FORKOMPIMCA	60	48	12	12	100%			
		Jumlah Tugas Dokumen Forum						12	12	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
	Program :									
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Outcome :								
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan:	Output:								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0		0	0	0	2	2	100%
7.01.06.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi bidang pemerintahan	30	24	6	6	100%			
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	15	12	2	2	100%			
		Jumlah monografi kalurahan dan kapanewon yang tersusun	70	56	14	14	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					100	20	20	100%
7.01.06.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBDes Frekuensi money pengelolaan keuangan kalurahan	80	66	14	14	100%			
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset kalurahan yang terlaksana	30	25	5	5	100%			
		Tertaksananya Bimtek pengelolaan dan pendayagunaan aset desa/kalurahan (PIWK)	0	0	0	0	0%			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						22	22	100%
7.01.06.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Koordinasi dengan lurah dan pamong lainnya	72	60	12	12	100%	12	12	100%
		Jumlah pamong kalurahan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan	0	0	0	0	0%	100	100	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		pemerintahan kalurahan								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						18	18	100%
7.01.06.2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD/BPK yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	500	400	100	100	100%	72	72	100%
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1	1	100%
7.01.06.2.01.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	30	27	3	3	100%			
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1	1	100%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah anggota linmas yang	250	200	50	50	100%			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
	Keterangan dan Ketertiban Umum	diharapkan meningkat pengetahuannya								
		Jumlah sargas siaga bencana yang meningkat kemampuannya	200	155	45	45	100%			
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2	2	100%
	Program :									
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Outcome :								
		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan :									
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Output :								
		Persentase adat, tradisi, dan lembaga budaya yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
	Sub Kegiatan: Gelar Budaya Jogja									
2.22.08.5.07.06		Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY	0	0	1	1	100%			
4.01.04		Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY Outcome:						1	1	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan:	Output :								
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan Sub s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
4.01.01.5.01.06	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di kalurahan	0	0	1	1	0%	1	1	100%
		Rencana program kegiatan keistimewaan pada kapanewon dan kalurahan tahun anggaran 2024	0	0	2	2	0%	2	2	100%
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan						1	1	100%
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025						1	1	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang

Pada bagian ini diuraikan mengenai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Panggang berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kapanewon Panggang sebagai OPD dengan fungsi pelayanan publik, fasilitasi dan koordinasi memiliki tugas yang bersifat intern dan ekstern. Tugas intern berkaitan dengan tugas pokok yang berhubungan dengan administrasi perkantoran sedang tugas ekstern bersifat fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Untuk penentuan tolok ukur kinerja berdasarkan pada target-target yang hendak dicapai sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis Kapanewon Panggang tahun 2021-2026 yakni Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Dari beberapa sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra, ada sasaran yang menjadi indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja Kapanewon Panggang sebagai wujud dukungan terhadap upaya pencapaian target kinerja RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul periode Tahun 2021-2026 secara langsung berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan. Sasaran Kinerja Utama Kapanewon Panggang pada periode 2021-2026 adalah Kualitas penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat dengan Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelayanan Kapanewon. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Panggang memiliki 5 komponen di dalamnya yang terdiri dari:

1. Persentase penyusunan APBKal Tepat Waktu
2. Persentase penyusunan RKPKal tepat waktu
3. Persentase KK miskin yang tertangani
4. Persentase ketentraman dan keteriban umum
5. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kapanewon.

Dengan formulasi perhitungan: $\sum (20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}) + (20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}) + (20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}) + (20\% \times \text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum}) + (20\% \times \text{persentase nilai indeks kepuasan masyarakat})$

Kelima unsur tersebut masing-masing diampu oleh jawatan projo, jawatan kemakmuran, jawatan sosial, jawatan keamanan dan jawatan pelayanan umum, yang kemudian diformulasikan menjadi rumusan indikator pelayanan kapanewon dengan satuan indeks.

Indikator Kinerja Kapanewon Panggang Tahun 2022 diukur dengan 3 sasaran strategis sebagaiberikut.

1. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Kapanewon
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai AKIP
3. Pelestarian Potensi Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dengan indikator kinerja Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan.

Dari ketiga sasaran strategis diatas masing-masing kinerjanya tercapai sesuai target yang ditetapkan. Indeks Pelayanan Kapanewon ditargetkan 94,03 tercapai 94,04, dengan tingkat capaian Kinerja 100,01%. Nilai AKIP dengan target indeks 80. Indikator kinerja sasaran strategis Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan yang ditargetkan 5 dengan jumlah yang tercapai 5, sehingga tingkat capaian mencapai 100% .

Dari analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2022 memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui

intervensi adanya program dan kegiatan pengadaan bantuan sosial kepada masyarakat, pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih, kesetaraan gender, peningkatan kesehatan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya analisis kinerja Kapanewon Panggang terhadap proyeksi capaian kinerja sasaran strategis dan IKU Kapanewon Panggang untuk periode tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 350/KPTS/2021 dengan Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan, dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon untuk Tahun 2024 ditargetkan 94,11. Berikut kami sajikan table 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang Tahun 2021 dan 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBdesa tepat waktu	persen	100	-	-	-	100	-	-	-	Analisis dan evaluasi pencapaian target kinerja dilakukan di akhir tahun anggaran
2	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	-	94,03	94,07	94,011	-	94,04	94,07	94,11	

Selain Indikator Kinerja Utama, Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang Tahun 2021-2026 juga diukur dengan 2 sasaran strategis lainnya yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja sasaran Nilai AKIP dengan target nilai 80,20 pada tahun 2024.
2. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan dengan target 5 potensi budaya pada tahun 2024.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Panggang

Kapanewon Panggang sebagai perangkat daerah mempunyai fungsi sebagai pelayan publik, koordinasi dan fasilitasi. Fungsi pelayanan publik yang paling menonjol dan selalu menjadi tolok ukur masyarakat terhadap kinerja kapanewon adalah pelayanan yang dilakukan oleh unit pelayanan umum, baik perizinan maupun non perizinan. Sehingga menjadi suatu keniscayaan apabila kemudian perlu disusun standar pelayanan sekaligus juga standar operasional dan prosedur sebagai ukuran terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Namun demikian sebelum kedua hal tersebut dilakukan, maka perlu adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas pemberian kewenangan atau pelimpahan kewenangan kepada kapanewon, regulasi yang mengatur dan menjelaskan tatacara dan ketentuan pelayanan yang diberikan, dan juga regulasi yang secara jelas dan tegas menyebutkan unit kerja dan pejabat yang bertanggung jawab menjalankan kewenangan tersebut.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Panggang yang memiliki wilayah kerja berbasis di kalurahan, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang ditemui. Permasalahan dan hambatan tersebut tidak hanya bersifat internal Kapanewon Panggang namun juga mencakup lingkup eksternal yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Penanganan Kemiskinan dan Stunting
 - 1) Angka KK Miskin masih cukup tinggi
 - 2) Angka stunting masih cukup tinggi
2. Sumber Daya Manusia
 - a) Sumber Daya Aparatur
 - 1) Jumlah aparatur yang semakin sedikit mempersulit kinerja institusi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
 - 2) Turunnya motivasi dan etos kerja, karena kecemburuan penghasilan, minimnya keteladanan dan mekanisme penjurangan karier.
 - 3) Kurang keselarasan komitmen di antara para pemimpin
 - 4) Masih adanya sisa-sisa paradigma pangreh praja dan bukannya pamong praja
 - 5) Sebagian pegawai masih gagap teknologi
 - 6) Minimnya penyelenggaraan diklat aparatur
 - 7) Masih kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi diantara pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa, dalam manajemen pemerintahan desa
 - 8) Masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa
 - 9) Kurangnya jumlah pegawai baik ASN maupun THL
 - b) Sumber Daya Masyarakat

Masih tingginya angka kemiskinan di Kapanewon Panggang yang dipengaruhi oleh:

 - 1) Angkatan kerja didominasi lulusan sekolah menengah ke bawah
 - 2) Masih tingginya angka kemiskinan
 - 3) Masih banyaknya anak yang tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi
 - 4) Kurangnya ketrampilan penguasaan teknologi
 - 5) Sebagian besar angkatan kerja muda bekerja sebagai buruh/tenaga konstruksi dan sektor informal lain yang kesinambungan pekerjaannya tidak dapat ditentukan
 - 6) Sebagian besar terakumulasi di daerah asal menjadi pengangguran atau setengah pengangguran
 - 7) Etos merantau yang rendah
3. Regulasi dan Kelembagaan
 - 1) Masih adanya ketidakpaduserasian antara beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 2) Beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum seluruhnya dapat dijabarkan atau diturunkan dalam peraturan daerah
 - 3) Pembagian kewenangan dan ketugasan antar Perangkat Daerah Kabupaten, Kapanewon dan Desa masih perlu diperjelas
 - 4) Struktur organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang gemuk, mengakibatkan APBD banyak terpakai untuk pembiayaan aparatur dan anggaran operasional rutin Perangkat Daerah
 - 5) Kurangnya koordinasi lintas sektor
 - 6) Kurang konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan

- 7) Masih kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi diantara pemerintahan kalurahan dan lembaga-lembaga kalurahan, dalam manajemen pemerintahannya
 - 8) Masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa.
4. Penanganan Pemulihan Pasca Pandemi Covid
Masih belum maksimalnya penanganan terhadap masyarakat yang tidak bekerja akibat dari adanya pandemic covid sehingga menambah angka pengangguran.
 5. Sarana dan Prasarana Infrastruktur
 - 1) Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Gunungkidul dalam membiayai seluruh program dan kegiatan yang dibutuhkan
 - 2) Masih belum memadainya sarana dan prasaran pendukung kegiatan belajar mengajar pada sekolah-sekolah baru
 - 3) Masih belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan masyarakat
 - 4) Rusaknya beberapa drainase dan sanitasi
 - 5) Belum memadainya sarpras dan SDM pengelola persampahan
 6. Ketahanan Pangan
 - 1) Masih adanya kejadian gagal panen atau penurunan produksi akibat adanya salah perhitungan musim tanam, kualitas benih yang kurang memadai atau kurang cocok dengan lahan, dan keterlambatan pemupukan dan serangan Hama Kera Ekor Panjang
 - 2) Masih adanya kesulitan untuk mengangkut hasil panen dari ladang
 - 3) Semakin turunnya minat menjadi petani di kalangan generasi muda
 - 4) Tidak adanya pasar hewan
 - 5) Susahnya mendapatkan pakan ternak di musim kemarau
 - 6) Pada musim kemarau terjadi penjualan ternak dalam eskalasi yang tinggi sehingga mengakibatkan jatuhnya harga ternak
 - 7) Kualitas dan kuantitas kapal nelayan Pantai Gesing yang belum memadai
 - 8) Sebagiaian kapal nelayan Pantai Gesing adalah kepunyaan pemilik modal
 - 9) Belum tersedianya Pangkalan Bahan Bakar Minyak khusus bagi kapal nelayan
 - 10) Budidaya perikanan darat yang ada masih sebatas kegiatan sampingan dan dilakukan oleh perorangan
 - a) Minimnya pendampingan dan bibit ikan untuk perikanan darat
 7. Pilpres dan Pilkada serentak
Anggaran dimungkinkan akan banyak terserap pada kegiatan Pilpres dan Pilkada sehingga sangat berpotensi terjadi efisiensi anggaran pada kegiatan-kegiatan utama dan pendukung.
 8. Pengembangan potensi pariwisata
 - 1). Wisata Alam
 - a) Sebagian besar akses jalan menuju ke pantai dan goa wisata belum dapat dilalui kendaraan roda empat
 - b) Belum ditunjang dengan tersedianya listrik dan air bersih (meskipun di beberapa pantai terdapat sumber air bersih)
 - c) Belum adanya sektor pendukung industri pariwisata seperti warung makan, penginapan, dan telekomunikasi, gazebo dll.
 - 2). Wisata Sejarah dan Budaya
 - a) Pengkultusan dan penyakralan yang masih terjaga menyebabkan tidak semua orang dapat mengakses tempat dan prosesi ritual budaya

- b) Turunnya minat generasi muda dalam mempelajari dan melestarikan tradisi
- c) Promosi dan pemasaran yang minim
- 3). Wisata Minat Khusus
 - a) Untuk penelitian karst biasanya terbatas kalangan akademisi atau lembaga lingkungan hidup
 - b) Untuk wisata kuliner extreme ketersediaan bahan baku sangat terbatas
 - c) Promosi dan pemasaran yang minim
- 9. Keamanan dan Ketertiban
 - 1) Pencegahan dan penanganan terhadap adanya cuaca ekstrim dan bencana
 - 2) Pencegahan dan penanganan terhadap kemungkinan masih adanya penyakit masyarakat
 - 3) Pencegahan terjadinya dampak negative Pilpres dan Pilkada serentak
- 10. Air dan Energi Alternatif
 - 1) Air bersih masih menjadi suatu hal yang mewah
 - 2) Eksplorasi sumber air sungai bawah tanah terkendala biaya yang mahal dan penguasaan teknologi
 - 3) Kemampuan cakupan pelayanan PDAM yang masih sangat minim
 - 4) Masih minimnya penggunaan teknologi tepat guna yang dikembangkan untuk memanfaatkan energi alternatif yang melimpah
 - 5) Mengeringnya beberapa telaga dan mata air
 - 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - 7) Semakin rusaknya lingkungan kawasan sumber air

Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional atau Internasional sesuai Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026". Pada tahapan lima tahun pertama ini pembangunan daerah dititik beratkan pada pemulihan ekonomi daerah dengan menitikberatkan pada 7 sektor pembangunan yaitu: Sektor ketentraman dan ketertiban, Reformasi birokrasi, pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi UMKM, investasi dan sektor pariwisata, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang meliputi :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan Dinamis
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Panggang adalah:

1. Pengkoordinasian kegiatan keamanan dan ketertiban
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Peningkatan perekonomian masyarakat
8. Peningkatan kesejahteraan sosial

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Panggang terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Panggang dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Panggang sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah kecamatan untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Panggang. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Panggang, yang meliputi permasalahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Panggang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Permasalahan tidak selamanya menjadi faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi tetapi jika permasalahan dan potensi tersebut dikelola dengan baik dan bijak maka justru bisa menjadi faktor pendorong dalam pencapaian visi dan misi, melalui beberapa analisis berikut.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian Program Nasional, berdasarkan fungsi utama Kapanewon Panggang yakni penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat/desa, yang paling utama adalah dukungan pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dukungan terhadap hal dimaksud sangat penting, bahkan menjadi pondasi utama yang mesti diperbaiki dan diperkokoh sehingga mampu menjadi penopang yang kuat dalam melaksanakan tugas kewajiban guna mendukung misi-misi yang lain. Bagi Kecamatan Panggang tata kelola pemerintahan yang baik ini diwujudkan dalam bentuk usaha memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan beserta pelaporan dan pertanggungjawaban anggarannya. Upaya perbaikan kualitas juga dilaksanakan pada pelayanan, baik pelayanan administratif, koordinatif maupun fasilitatif.

Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Panggang telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang sebagai dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan yang akan

digunakan untuk acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penjabaran dari kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki Kecamatan Panggang diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal pada bahasan ini mencakup Kapanewon Panggang sebagai satuan kerja dan Kapanewon Panggang sebagai suatu wilayah. Identifikasi lingkungan internal ini bertujuan untuk menemukenali potensi dan kekurangan yang dimiliki, selengkapnya sebagai berikut :

- a. Kekuatan, yakni segala sesuatu/kondisi yang dimiliki, baik berupa sarana dan prasarana ataupun potensi internal yang dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja. Untuk Kapanewon Panggang meliputi :
 - 1) Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - 2) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 - 3) Telah disusunnya tatakala pelaksanaan program dan kegiatan
 - 4) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor kesehatan
 - 5) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor pendidikan
 - 6) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor yang lain
 - 7) Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa dan lembaga desa yang semakin baik
 - 8) Tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
 - 9) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi
 - 10) Kuantitas anggaran pemerintahan desa, lembaga desa dan pembangunan desa yang semakin baik
 - 11) Kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang semakin baik
 - 12) Angkatan kerja yang di dominasi usia produktif
 - 13) Perilaku masyarakat yang ulet dan beretos kerja tinggi dengan semangat gotong royong yang tetap terpelihara
 - 14) Adanya pendidikan keagamaan
 - 15) Penghasil tanaman palawija yang berkualitas
 - 16) Penghasil ternak yang berkualitas
 - 17) Penghasil tanaman keras yang berkualitas
 - 18) Penghasil tanaman perkebunan dengan komoditi utama pisang dan mlinjo yang berpotensi untuk dikembangkan
 - 19) Lahan pertanian yang luas sehingga sangat berpeluang untuk optimalisasi pemanfaatannya
 - 20) Wilayah yang kaya potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata sejarah dan budaya maupun wisata minat khusus
 - 21) Pembangunan Pantai Gesing sebagai tempat pelelangan ikan
 - 22) Ketersediaan air bawah tanah yang cukup
 - 23) Ketersediaan potensi pengembangan energi alternatif
 - 24) Ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan
 - 25) Akses telekomunikasi dan transportasi yang semakin baik
- b. Kelemahan, yakni segala sesuatu/kondisi internal yang dapat menghambat pelaksanaan tupoksi dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja. Untuk Kecamatan Panggang meliputi:
 - 1) Pelimpahan kewenangan dan pembagian tugas bagi kecamatan yang belum memadai
 - 2) Kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan yang belum memadai

- 3) Masih adanya aparaturnya yang gagap teknologi
 - 4) SDM yang tidak kompeten dibidangnya
 - 5) Anggaran yang ada masih sebatas untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat rutin dan belum memberikan ruang yang proporsional untuk pembiayaan program/kegiatan inovatif
 - 6) Kesulitan dalam mengakses informasi kebijakan strategis dari pemerintah dan pemerintah provinsi
 - 7) Koordinasi lintas sektor, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan
 - 8) Pengelolaan data statistik wilayah yang belum memadai
 - 9) Data kemiskinan yang belum *up to date*
 - 10) Angkatan kerja masih di dominasi pendidikan menengah ke bawah
 - 11) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas
 - 12) Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung perekonomian wilayah masih perlu ditingkatkan
 - 13) Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum merata dan memadai
 - 14) Pengolahan pertanian masih dengan cara-cara konvensional
 - 15) Penjualan produk kehutanan dan perkebunan masih dalam bentuk bahan baku sehingga belum ada nilai tambah
 - 16) Minimnya pengetahuan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal pada bahasan ini adalah ruang yang berada di luar Kecamatan Panggang sebagai satuan kerja maupun Kecamatan Panggang sebagai wilayah dan berpengaruh terhadap kinerja dan perkembangan wilayahnya. Identifikasi lingkungan eksternal ini dimaksudkan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang mungkin dimiliki dan dihadapi, selengkapnya sebagai berikut :

- a. Peluang, yakni segala sesuatu/kondisi eksternal yang dapat dioptimalkan guna mendorong tupoksi dalam upaya pencapaian sasaran dan target kinerja. Untuk Kapanewon Panggang meliputi :
 - 1) Regulasi yang memungkinkan kapanewon dan kalurahan diberikan kewenangan yang lebih luas
 - 2) Komitmen pimpinan daerah untuk memberikan pelimpahan kewenangan yang lebih luas kepada kecamatan dan desa
 - 3) Komunikasi dan koordinasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif
 - 4) Pelaksanaan program sektoral dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di wilayah kapanewon
 - 5) Makin semaraknya iklim kepariwisataan
 - 6) Meningkatnya kepedulian pemerintah dalam pelestarian seni budaya
 - 7) Meningkatnya kepedulian dunia usaha dalam pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan
 - 8) Keberadaan perguruan tinggi sebagai narasumber perumusan kebijakan sekaligus sebagai mitra dalam pelaksanaannya
 - 9) Keberadaan NGO sebagai mitra dalam pembangunan
 - 10) Peningkatan kerjasama antar wilayah/daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
 - 11) Meningkatnya akses informasi, diikuti meningkatnya kepedulian lembaga donor dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih

- 12) Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan sektor kelautan dan perikanan
 - 13) Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan
- b. Ancaman, yakni segala sesuatu/kondisi eksternal yang dapat menghambat pelaksanaan tupoksi dalam upaya pencapaian sasaran dan target kinerja. Untuk Kecamatan Panggang meliputi :
- 1) Demokrasi seringkali ditengarai sebagai kebebasan berekspresi tanpa batas
 - 2) Pelaksanaan demokrasi seringkali bias dan hanya berpihak kepada penguasa dan pemilik faktor produksi
 - 3) Pelaksanaan demokrasi seringkali memecah masyarakat dan berbiaya mahal
 - 4) Adanya ketidaksesuaian antar regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 5) Regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan pemda serta tata kelola pemda semakin rigid dan beragam
 - 6) Minimnya keteladanan para pimpinan nasional
 - 7) Ketergantungan pendapatan daerah dari DAU dan DAK
 - 8) Dampak westernisasi, membawa pengaruh penurunan standar moralitas dan gaya hidup
 - 9) Inkonsistensi antara jiwa keagamaan dan penerapannya dalam lingkungan pekerjaan
 - 10) Penyalagunaan teknologi informasi
 - 11) Kerusakan lingkungan dan sampah
 - 12) Kemungkinan terjadinya bencana alam

Dari proses pengamatan dan evaluasi terhadap lingkungan internal dan eksternal sekaligus realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kapanewon Panggang, maka ada beberapa hal yang perlu perhatian dan diprioritaskan yakni :

a. Internal

1. Perlunya penambahan jumlah aparatur di Kapanewon Panggang
2. Perlunya diadakan diklat peningkatan kapasitas aparatur
3. Perlunya disusun regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai kewenangan atau pelimpahan kewenangan kepada Kapanewon
4. Perlunya disusun standar pelayanan
5. Pemberian ketugasan baru melalui program/kegiatan baru hendaknya dikoordinasikan terlebih dahulu, baik dengan Kapanewon, pengampu sektor maupun pengampu fungsi perencanaan dan penganggaran yang disertai dengan pemberian anggaran dengan perhitungan pagu baru.
6. Di masa depan, perlu dipertimbangkan pelimpahan kewenangan/ pemberian tugas bidang kebersihan/ persampahan kepada Kapanewon disertai sarpras, SDM dan anggarannya
7. Peningkatan anggaran untuk perawatan kendaraan dinas operasional.

b. Eksternal

1. Penyediaan air bersih masyarakat
2. Pengembangan perikanan
3. Rehabilitasi hutan dan lahan
4. Rehabilitasi sumber air
5. Perlunya pemberian bantuan pembangunan PAH bagi warga miskin
6. Perlunya pemberian bantuan material jamban bagi warga miskin untuk mendukung STOP BABS.

7. Perlunya kajian dan penerapan teknologi tepat guna dan sederhana untuk mengeksplorasi sumber air bawah tanah untuk pemenuhan kebutuhan secara lokal.
8. Pengembangan ternak dan sarana prasarananya
9. Normalisasi jalur jalan Imogiri-Panggung-Saptosari, mengingat pada tiap liburan selalu ramai dilalui wisatawan yang akan masuk Gunungkidul, sedangkan JJLS pada beberapa ruas terutama ruas Giripurwo-Giricahyo-Girijati-Parangtritis tetap saja sulit dilalui kendaraan bertonase besar
10. Normalisasi jalan jalur Panggang, Gebang, Temuireng yang sampai saat ini belum terealisasi
11. Pembukaan dan promosi obyek wisata baru dan dukungan pembangunan infrastrukturnya

2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Proses perumusan/penyusunan rancangan awal RKPD didahului dengan analisis kebutuhan pada perangkat daerah khususnya satu tahun yang berkenaan. Di Kapanewon Panggang proses itu dilaksanakan dengan menggunakan data dasar hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan untuk tahun berikutnya. Dari evaluasi tersebut diketahui berapa banyak program/kegiatan yang masih dibutuhkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya dan berapa banyak program/kegiatan yang sudah tidak dibutuhkan untuk dilaksanakan lagi karena sudah selesai (tercapai target akhir) atau tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Di samping itu juga dilaksanakan inventarisasi kebutuhan untuk tahun berikutnya yang pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Hasil dari kedua proses tersebut disusun menjadi daftar kebutuhan program/kegiatan tahun berikutnya.

Proses ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan suatu program/kegiatan yang tidak bisa selesai dilaksanakan dalam satu tahun anggaran maupun untuk menilai pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dari sisi capaian indikator, anggaran, dan sebagainya. Disamping itu juga untuk mensinkronkan rencana kebutuhan perangkat daerah yang pada akhirnya akan diketahui kegiatan-kegiatan yang harus ditambahkan pada kegiatan-kegiatan tahun berikutnya.

Apabila dilihat dari usulan-usulan berdasarkan pada kebutuhan maka seharusnya akan mempengaruhi besaran pagu dan akan menyebabkan besaran dana lebih besar dari rancangan awal RKPD. Namun demikian usulan tetap mengacu pada konsistensi dalam setiap tahapan perencanaan dan kebijakan RKPD Pemerintah Daerah.

Tahapan selanjutnya adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD TA 2023 dengan hasil analisis kebutuhan seperti tersebut di atas. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi usulan kebutuhan program dan kegiatan dalam tiap tahapan perencanaan. Pada tahapan reviu terdapat perbedaan antara analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD pada kegiatan Sosial Kemasyarakatan yaitu jumlah usulan bantuan sosial jamban sehat dana PIWK yang lebih sedikit dari rancangan awal disebabkan kondisi riil di lapangan sudah banyak masyarakat miskin yang membuat jamban sehat secara mandiri, namun demikian data di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki penampungan air hujan (PAH) dan penampungan limbah (saptictang). Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang jumlah volume dan besaran anggaran berbeda dengan rancangan awal disebabkan karena menyesuaikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat.

Setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan tahapan selanjutnya adalah menuangkan hasil analisis kebutuhan ke dalam format revidi terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.4.1. berikut :

Tabel 2.4.1
 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Kapanewon Panggang

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah				Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kec.Pgg	Outcome: Penyelenggaraan Upacara Hari Istimewadi Kapanewon	100%	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kec.Pgg	Outcome: Penyelenggaraan Upacara Hari Istimewadi Kapanewon	100%	100.000.000	
1.1	Kegiatan: Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kec.Pgg	Output: Jumlah Laporan Pembinaan Adat dan Tradisi	100%	150.000.000	Kegiatan: Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kec.Pgg	Output: Jumlah Laporan Pembinaan Adat dan Tradisi	100%	100.000.000	
1.1.1	Sub Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kec.Pgg	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 laporan	150.000.000	Sub Kegiatan: Gelar Budaya Jogja	Kec.Pgg	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 laporan	100.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Kec.Pgg	Outcome:	100%	25.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Kec.Pgg	Outcome:	100%	43,120,000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2 KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3	4 Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan ketatalaksanaan terfasilitasi	5	6	7 KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	8	9 Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan ketatalaksanaan terfasilitasi	10	11	12
2.1	Kegiatan: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kec.Pgg	Output: Jumlah dokumen ketatalaksanaan keistimewaan	2 dokumen	25.970.000	Kegiatan: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kec.Pgg	Output: Jumlah dokumen ketatalaksanaan keistimewaan	2 dokumen	43,120,000	
2.1.1	Sub Kegiatan: Perencanaan dan pengendalian urusan kelembagaan	Kec.Pgg	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan pengendalian urusan kelembagaan	2 dokumen	25.970.000	Sub Kegiatan: Perencanaan dan pengendalian urusan kelembagaan	Kec.Pgg	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan pengendalian urusan kelembagaan	2 dokumen	43,120,000	
3	PROGRAM PENUNJANG	Kec.Pgg	Outcome:	100%	1.953.512.208	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kec.Pgg	Outcome:	100%	1.365.745.184	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	4 Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	5	6	7 DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	9 Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	10	11	12
3.1	Kegiatan: Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pgg	Output: Indeks perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4.004 indek	9.460.000	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pgg	Output: Indeks perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4.004 indeks	8.440.000	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.500.000	
3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	880.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	550,000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen RKA-SKPD					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
3.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	660.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	380,000	
3.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	770.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	700,000	
3.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	740.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	500,000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	2.760.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	2.760.000	
3.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.050.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.050.000	
3.2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Pgg	Output: Indeks laporan administrasi keuangan perangkat daerah	83.16 indek	1.546.802.208	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Pgg	Output: Indeks laporan administrasi keuangan perangkat daerah	83.16 indek	1.137.335.184	
3.2.1	Sub Kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima	238 orang/bl	1.540.452.208	Sub Kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji	238 orang/bl	1.133.215.184	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4 Gaji dan Tunjangan ASN	5	6	7	8	9 dan Tunjangan ASN	10	11	12
3.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.000.000	
3.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	5.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	3.120.000	
3.3	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Pgg	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	6 dokumen	1.450.000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Pgg	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	6 dokumen	1.320.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:		perangkat daerah			
3.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	1.450.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	1.320.000	
3.4	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Pgg	Output: Indeks administrasi umum Perangkat Daerah	44.33 indek	96.180.000	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Pgg	Output: Indeks administrasi umum Perangkat Daerah	44.33 indek	47.640.000	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
3.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket belanja	1.650.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket belanja	1.500.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	76.020.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	33.090.000	
3.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	2.500.000	
3.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.450.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.250.000	
3.4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000	
3.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	7.660.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	3.100.000	
3.5	Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec.Pgg	Output: Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	60 unit	76.500.000	Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec.Pgg	Output: Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	60 unit	3.250.000	
3.5.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39 unit	24.500.000	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	0	
3.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	3.250.000	
3.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	32.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	0	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Lainnya yang Disediakan					Lainnya yang Disediakan			
3.6	Kegiatan:	Kec.Pgg	Output:	108 laporan		Kegiatan:	Kec.Pgg	Output:	108 laporan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		72.540.000	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		68.200.000	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
3.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	39.420.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	25.000.000	
3.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	22.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	33.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	10.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	24 laporan	10,200,000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7	Kegiatan:	Kec.Pgg	Output:	164 unit		Kegiatan:	Kec.Pgg	Output:	164 unit		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah		150.580.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah		99.560.000	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
3.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 unit	41.100.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	127 unit	11.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah printer yang terfasilitasi	127 unit	9,500,000	
3.7.2											

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah						Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	83.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		pemeliharaannya	24 unit	44.400.000	
3.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	3.680.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	4.560.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Pgg	Outcome: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100%	645.315.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Pgg	Outcome: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100%	546.902.500	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah				Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan:	Kec.Pgg	Output:	8 laporan		Kegiatan:	Kec.Pgg	Output:	8 laporan		
4.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		36.375.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		16.182.500	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 laporan	36.375.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 laporan	16.182.500	
	Kegiatan:	Kec.Pgg	Output:	40 laporan		Kegiatan:	Kec.Pgg	Output:	40 laporan		
4.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah		608.940.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah		530.720.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang ada di Kecamatan					daerah yang ada di Kecamatan			
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
4.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	30 laporan	128.940.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	33 laporan	503.000.000	
4.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 laporan	32.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 laporan	27.720.000	
7		Kec.Pegg	Outcome:	100%	64.365.000		Kec.Pegg	Outcome:	100%	36.245.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana			
7.1	Kegiatan;	Kec.Pgg	Output:	10 indeks	30.755.000	Kegiatan;	Kec.Pgg	Output:	10 indeks		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							21.890.000	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
7.1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 dokumrn	22.455.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 dokumen	14.395.000	
7.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	9 Laporan	8.300.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	9 Laporan	7.495.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
	Kegiatan:					Kegiatan:					
7.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 indeks	33.610.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 indeks	14.355.000	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
7.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga kemasyarakatan	21.710.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga kemasyarakatan	7.080.000	
7.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	11.900.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	7.275.000	
5	PROGRAM KOORDINASI KENTRANAM DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Pgg	Outcome: Persentase Program Koordinasi Kentranam dan Ketertiban terfasilitasi	100%	16.525.000	PROGRAM KOORDINASI KENTRANAM DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Pgg	Outcome: Persentase Program Koordinasi Kentranam dan Ketertiban	100%	9.880.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Pgg	Output: Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	2 laporan	11.215.000	Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Pgg	Output: Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	2 laporan	5.800.000	
5.1.1	Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	11.215.000	Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	5.800.000	
5.2	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13 laporan	5.310.000	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan	13 laporan	4.080.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:		Peraturan Kepala Daerah			
5.2.1	Koordinasi/Sinergi Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	13 laporan	5.310.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	13 laporan	4.080.000	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Pgg	Outcome: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100%	111.360.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Pgg	Outcome: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100%	55.965.000	
6.1	Kegiatan:	Kec.Pgg	Output:			Kegiatan:	Kec.Pgg	Output:			

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	70.62 indek	111.360.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	70.62 indek	55.965.000	
	Sub Kegiatan;					Sub Kegiatan;					
6.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan	75 Orang	83.400.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	52.195.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 laporan	2.570.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 laporan	1.000.000	
6.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	25.390.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	2.770.000	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana		95.550.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana		34.445.000	
	Kegiatan:					Kegiatan:					
8.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan	63 dokume	95.550.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan	63 dokumen	34.445.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pemerintahan desa					pemerintahan desa			
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
8.1.1	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 dokumen	7.250.000	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 dokumen	1.920.000	
8.1.2	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	57.550.000	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	14.025.000	
8.1.3	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 dokumen	16.750.000	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 dokumen	6.625.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah						Hasil Analisis kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	1.000.000	
8.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	3.750.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	2.690.000	
8.1.5	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	2.750.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	1.000.000	
8.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	7.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	7.185.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah						Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Jumlah				2.605.111.428					2.049.182.684	-	

Dijelaskan diatas pada table reuiu tentang hasil analisis kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Panggang, tetapi berdasar hasil fasilitasi RKPD, pagu Rancangan Akhir Renja dirasionalisasi Kembali menyesuaikan kondisi keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Keseluruhan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dimaksud diperoleh melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kapanewon.

Usulan yang dihasilkan dalam Musrenbang Kapanewon merupakan hasil proses usulan *bottom up*. Pada awalnya di tingkat padukuhan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Padukuhan (Musrenbangdus) yang menghasilkan daftar rencana usulan pembangunan tiap-tiap padukuhan. Usulan dari usulan tiap padukuhan kemudian di bawa ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal). Pada forum musrenbangkal usulan tersebut kemudian dibahas untuk kemudian dibuat skala prioritas rencana pelaksanaannya. Hasil Musrenbangkal kemudian dibawa ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon dan ditindaklanjuti ke forum-forum Musrenbang di tingkat lebih yang tinggi. Pada Musrenbang Kapanewon yang diikuti oleh kalurahan dan Instansi terkait di wilayah Kapanewon Panggang membahas usulan rencana program/kegiatan dari desa dan instansi di Kapanewon Panggang untuk disetujui oleh forum, yang kemudian akan menjadi acuan pelaksanaan Program/ Kegiatan yang akan diusulkan oleh Kapanewon Panggang dalam Musrenbang tingkat Kabupaten.

Pada Tahun 2023 ini, berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas. Maka usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat dikelompokkan menjadi 2, yakni usulan program dan kegiatan dengan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan. 2 pagu ini ditetapkan untuk memberikan ruang dan jaminan agar usulan dari masyarakat lebih terakomodir.

Selanjutnya usulan program/kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 untuk program/kegiatan PIWK dan PIS Kapanewon Panggang TA 2024 sebesar Rp. 390.000.000,- namun dikarenakan ada beberapa kaurahan yang belum bisa menyajikan data Rumah Tangga Sasaran sehingga dan adanya rasionalisasi anggaran sehingga hanya terakomodir sebesar Rp. 323.000.000,-, tersaji dalam tabel 2.5.1. berikut :

Tabel 2.5.1
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Kapanewon Panggang
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan	Giriharjo, Panggang, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan PAH 5000 liter air	5	8.000.000	40.000.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 5 KK Koefisien : 5 KK Anggaran : 40.000.000
2	(PIWK) - Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan	Padukuhan Gebang, Girisuko, Panggang, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan PAH 5000 liter air	5	8.000.000	40.000.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 5 KK Koefisien : 5 KK Anggaran : 40.000.000
3	(PIWK) - Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan	Kalurahan Girimulyo, Panggang, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan PAH 5000 liter air	8	8.000.000	64.000.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 8 KK Koefisien : 8 KK Anggaran : 64.000.000
4	(PIWK) - Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan	Jl Panggang wonosari km 6,5 Girisekar Panggang kodepos 55872, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan PAH 5000 liter air	7	8.000.000	56.000.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 7 KK Koefisien : 7 KK Anggaran : 56.000.000
5	(PIWK) - Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan	Giriwungu, Panggang, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan PAH 5000 liter air	5	8.000.000	40.000.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 5 KK Koefisien : 5 KK Anggaran : 40.000.000
6	(PIWK) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Giriharjo, Panggang, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat	3	7.000.000	21.000.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 3 Koefisien : 3 Anggaran : 21.000.000
7	PIWK) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Kalurahan Girikarto, Panggang, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat	5	7.000.000	35.000.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 7 KK Koefisien : 7 KK Anggaran : 35.000.000
8	(PIWK) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Balai Kalurahan Girimulyo, Panggang, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat	5	7.000.000	35.000.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 7 KK Koefisien : 7 KK Anggaran : 35.000.000

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/vol	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
9	(PIWK) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Jl Panggang wonosari Km 6,5 Girisekar Panggang kodepos 55872, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat	5	7.000.000	35.000.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 7 KK Koefisien : 7 KK Anggaran : 35.000.000
10	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin	Girisuko, Panggang, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan jamban sehat	6	4.000.000	24.000.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 6 KK Koefisien : 6 KK Anggaran : 24.000.000

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON PANGGANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan Rencana Kerja Kapanewon Panggang yang dimuat dalam Rencana Strategis 2021-2026 terhadap kebijakan nasional dilaksanakan secara berjenjang/hirarki selaras dengan pencapaian visi-misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai subsistem perencanaan pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa seluruh target dan sasaran pencapaiannya harus mendukung sasaran dan target pembangunan nasional serta memiliki sinergitas yang harmonis dalam semua strategi kebijakannya. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul selain harus berpedoman pada Rancangan RKPD Tahun 2024 dengan memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas dan memperhatikan masukan dari para Pemangku Kepentingan yang disepakati dalam Musrenbang juga perlu memperhatikan Isu Strategis Nasional Tahun 2024 yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan
2. Penanganan stunting
3. Pemulihan ekonomi pasca pandemic covid
4. *Middle income trap riset* alokasi sumber daya dan *human capital*
5. Percepatan pembangunan infrastruktur
6. Pengurangan resiko bencana
7. Pasokan energi dan pangan Peningkatan kualitas SDM
8. Reformasi birokrasi
9. Pilpres dan Pilkada Tahun 2024
10. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang tahun 2025-2045

Selain memperhatikan Isu Strategis Nasional tahun 2024 juga memperhatikan Isu Strategis DI Yogyakarta yaitu:

1. Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024
2. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
3. Pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19
4. Penanganan stunting
5. Peningkatan kualitas SDM
6. Pasokan energi dan pangan
7. Perencanaan pembangunan jangka Panjang 2025-2045

Merujuk pada isu strategis nasional dan provinsi DIY tahun 2024, Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul adalah "*Optimalisasi ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan taraf hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia*". Tema tersebut kemudian dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi
Investasi dan pariwisata
Pengembangan sector unggulan
2. Penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim, dan penanganan stunting
3. Ketahanan pangan
4. Infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana
5. Ketentraman dan ketertiban
6. Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan uraian dan tema di atas maka rencana kerja Kapanewon Panggang selalu memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan

yang akan diterapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Panggang

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja dalam rentang waktu yang telah direncanakan. Sedang sasaran adalah target yang akan diharapkan dari suatu tujuan yang telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berikut kami sajikan tabel Prioritas dan Sasaran Utama Kapanewon Panggang :

Tabel 3.2.1.
Prioritas dan Sasaran Utama Kapanewon Panggang

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1.	Reformasi birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Indeks pelayanan kapanewon Nilai AKIP
2.	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan

Berikutnya kami sajikan tabel Tujuan dan Sasaran Kapanewon Panggang :

Tabel 3.2.2.
Tujuan Kapanewon Panggang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Kapanewon Panggang Tahun 2026
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas	Indeks pelayanan kapanewon tahun 2026	94,19
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	5

Tabel 3.2.3.
Sasaran Kapanewon Panggang

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Kapanewon Panggang Tahun 2023
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks pelayanan kapanewon	94,11
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP	80,20
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	5

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama dari instansi. Adapun tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kapanewon Panggang adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berpedoman pada definisi tentang Indikator Kinerja Utama seperti tersebut di atas, maka untuk kapanewon Panggang Indikator Kinerja Utama diambil dari salah satu dari 3 sasaran yang telah ditetapkan yang merupakan tupoksi utama dari Perangkat Daerah Kapanewon yang meliputi 5 indikator kinerja utama dari 5 jawatan yang ada di Kapanewon yaitu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan Jawatan Pelayanan Umum, sebagai berikut :

Tabel 3.2.4.
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Panggang

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks pelayanan kapanewon	94,11

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan merupakan syarat mutlak suatu daerah untuk berkembang dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibutuhkan perencanaan yang sistematis dan terpadu. Untuk itu dibutuhkan Rancangan Rencana Kerja dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Periode satu tahun yang memuat kebijakan Rencana Pembiayaan Aparatur Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran serta target-target yang hendak dicapai, sebagai dasar pijakan dan gambaran rencana pembangunan Kapanewon Panggang.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan adalah bentuk tindak lanjut/realisasi dari program yang telah ditentukan sebelumnya. Program kerja dibedakan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu :

1. Program PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh satu PD
2. Program Lintas PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lain
3. Program Kewilayahan PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lain untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

Dari ketiga jenis program kerja tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi dalam perumusannya sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan skala prioritasnya, antara lain:

1. Keterkaitan Program dengan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan renstra kapanewon tidak bisa dilepaskan dengan renstra kabupaten, sehingga dapat dikatakan bahwa renstra kapanewon merupakan produk turunan yang menjabarkan renstra kabupaten disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah. Hal tersebut mengandung maksud dan tujuan bahwa renstra pada setiap PD harus mendukung untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah. Begitu pula dengan Rencana Kerja Kapanewon Panggang harus merujuk kepada RKPD Daerah dalam hal ini RKPD Kabupaten Gunungkidul.
2. Pengentasan Kemiskinan.
Setiap upaya pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Hal tersebut sebagai usaha untuk mengentaskan kemiskinan yang diharapkan setiap tahun mengalami penurunan seiring dengan kemajuan keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya program kegiatan yang disusun oleh Kapanewon Panggang juga diarahkan ke tujuan pengentasan kemiskinan tersebut dan dijadikan sebagai program prioritas.
3. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
Banyak potensi ekonomi yang belum dimaksimalkan sehingga belum banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kapanewon Panggang untuk dapat memformulasikan program kegiatan yang dapat mendayagunakan potensi yang ada di daerah secara maksimal.
4. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan budaya lokal

Pengembangan dan pelestarian budaya lokal memiliki andil dalam meningkatkan pergerakan perekonomian lokal khususnya di Kapanewon Panggang. Penyediaan ruang pentas bagi para pelaku seni budaya diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan perekonomian UMKM.

5. Pengembangan Daerah Terisolir

Pengertian daerah terisolir adalah daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan masih mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti fasilitas ekonomi, pendidikan, komunikasi dikarenakan keterbatasan kualitas sumber daya manusia maupun faktor sarana prasarana yang belum mendukung. Penanganan daerah terisolir tersebut merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga daerah-daerah terisolir dapat terbuka terhadap akses-akses ke dunia luar. Di Kapanewon Panggang sebenarnya tidak ada daerah yang sama sekali terisolir, yang ada hanyalah daerah yang tingkat perkembangan pembangunannya belum maksimal sehingga masuk dalam kategori desa tertinggal. Untuk penanganan desa-desa tertinggal tersebut pada awalnya ada program IDT dari pemerintah pusat yang dilanjutkan dengan program-program pendukung lainnya, seperti program Dana Desa, PISEW dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut Kapanewon Panggang tahun 2024 direncanakan melaksanakan 8 Program, 18 Kegiatan dan 50 Sub kegiatan. 1 Program dan 8 kegiatan merupakan kegiatan kesekretariatan, 7 Program dan 10 Kegiatan yang lain merupakan kegiatan yang menjadi ketugasan utama Kapanewon sekaligus menjadi tolok ukur penilaian IKU Kapanewon. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan tersebar untuk 6 kalurahan yang ada di wilayah Kapanewon Panggang. Adapun total kebutuhan dana guna menjalankan seluruh program dan kegiatan tersebut di atas adalah sebesar Rp2.049.182.684,00 yang keseluruhan kebutuhan dana dimaksud berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul, dan DAU, yang terdiri dari Rp 1.133.215.184,00 adalah alokasi belanja gaji ASN, dan Rp. 915.967.500,00 adalah alokasi belanja pelaksanaan program kegiatan pendukung IKU.

Dilihat dari prioritas pembangunan, Kapanewon Panggang menjalankan dua dari tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut akan dikaitkan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon Panggang. Berikut program dan kegiatan utama Kapanewon Panggang berdasarkan prioritas pembangunan kabupaten dikaitkan dengan prioritas, sasaran daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 tersaji pada tabel 4.1 dan berikut.

Tabel 4.1
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	PD Penanggungjawab
					2	22	8			
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	5	2	22	8	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	100.000.000	Kapanewon Panggang
					2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
					2	22	8	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	
					2	22	8	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100.000.000	
					4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
					4	1		SEKRETARIAT DAERAH		
					4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
					4	1	4	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	35.000.000	
					4	1	4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	35.000.000	
					7			UNSUR KEWILAYAHAN		

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	PD Penanggungjawab
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP	80,20	7	1		KECAMATAN		
					7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.320.348.705	
					7	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.685.000	
					7	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	980.000	
					7	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	380.000	
					7	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	260.000	
					7	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	280.000	
					7	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	270.000	
					7	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.590.000	
					7	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	925.000,00	
					7	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.135.335.184	
					7	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.133.215.184	
					7	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	
					7	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.620.000	
					7	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.020.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	PD Penanggungjawab	
					7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.020.000	
					7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.029.000	
					7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	
					7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.163.000	
					7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	
					7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.516.000	
					7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
					7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	750.000	
					7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.400.000	
					7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.250.000	
					7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	0	
					7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
					7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
					7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.943.500	
					7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.747.500	
					7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.996.000	
					7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.200.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	PD Penanggungjawab	
					7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.336.021	
					7	1	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.800.000	
					7	1	1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	
					7	1	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.176.021	
					7	1	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.860.000	
					7	1	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
		Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Indeks pelayanan kapanewon	94,11	7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	408.596.800	
					7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.182.500	
					7	1	2	2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.670.000	
					7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	406.926.800	
					7	1	2	2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	379.299.300	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	PD Penanggungjawab	
					7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.627.500	
					7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.442.179	
					7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.842.179	
					7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.297.179	
					7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.545.000	
					7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	6.600.000	
					7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	3.420.000	
					7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.180.000	
					7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6422500	
					7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.422.500	
					7	1	4	2.01	1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.447.500	
									2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	975.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	PD Penanggungjawab
					7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39967500	
					7	1	5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.967.500	
					7	1	5 2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.592.500	
					7	1	5 2.01	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	315.000	
					7	1	5 2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.060.000	
					7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.555.000	
					7	1	6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.555.000	
					7	1	6 2.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	310.000	
					7	1	6 2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	740.000	
					7	1	6 2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.685.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	PD Penanggungjawab
					7	1	6	2.01			
					7	1	6	2.01	5	2.770.000	
					7	1	6	2.01	6	200.000	
					7	1	6	2.01	7	1.345.000	
					7	1	6	2.01	8	580.000	
					7	1	6	2.01	11	1.925.000	
									TOTAL	1.942.332.684	

Guna mendukung tercapainya program dan kegiatan utama Kapanewon Panggang, dilaksanakan Program dan Kegiatan Pendukung tugas dan fungsi Kapanewon.

Demi tercapainya visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul dibidang penanganan dan penanggulangan kemiskinan serta mendukung program prioritas sasaran daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, yang diakomodir dana Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) melalui usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 hasil Musrenbang Kapanewon Panggang dan diusulkan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah kegiatan pengadaan Bantuan Sosial Jamban Sehat, Jamban dan pembuangan akhir tinja serta Penampungan Air Hujan (PAH) yang diberikan kepada masyarakat miskin.

Pada hakekatnya rumusan program dan kegiatan Kapanewon Panggang telah mengacu pada RPJMD 2021-2026 dan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik dari jenis program/kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif.

Berikut kami sajikan tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Panggang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana (%)	100 persen	100.000.000		1 Kapanewon	150.000.000
2	22	8	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah adat, seni, tradisi dan lembaga Budaya terlaksana (Laporan)	1 Laporan	100.000.000		2 Laporan	150.000.000
2	22	8	0006 Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1 laporan	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY	2 laporan	150.000.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH			35.000.000			25.970.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang terlaksana (%)		100 persen	35.000.000			100 persen	25.970.000
4	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan (dokumen)		2 Dokumen	35.000.000			100 persen	25.970.000
4	0001 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kelurahan	2 Dokumen	35.000.000	Dana Keistimewaan DIY		1 Dokumen 1 Dokumen	25.970.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7	KECAMATAN								
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100 persen	1.320.348.705			100 persen	1.920.509.153
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		4.004 indek	4.685.000			4.004 indek	9.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0001 12.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.650.000
7	0002 12.01 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	920.000
7	0003 12.01 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	690.000
7	0004 12.01 1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	800.000
7	0005 12.01 1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	270.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	760.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	1.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Laporan	2.880.000
7	1 2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Laporan	925.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32 Laporan	2.100.000
7	1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		83.16 indeks	1.135.335.184		indeks	1.584.594.153
7	1 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	238 orang/bulan	1.133.215.184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	238 orang/bulan	1.577.994.153
7	1 2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1,100,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1 1.2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	1.620.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Laporan	5.500,000
7	1 1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6 dokumen	1.020.000		6 dokumen	1.320.000
7	1 1.2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	1.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 dokumen	1.500,000
7	1 1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		44.04 indek	23.029.000		44.04 indek	121.755.000
7	1 1.2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	2.500,000
7	1 1.2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	12.163.000	Dana Transfer Umum-Dana	14 Paket	86.320,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	1 2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Paket	16.800.000
7	1 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	3.516.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	5.275.000
7	1 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	247 Dokumen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	247 Dokumen	1.200.000
7	1 2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.000.000
7	1 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana	17 Laporan	7.660.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 12.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		47 unit	0	Alokasi Umum		60 unit	20.000,000
7 1 12.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	20.000,000
7 1 12.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		108 laporan	66.943.500			108 laporan	54.540.000
7 1 12.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	23.747.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	21.420.000
7 1 12.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 Laporan	32.996.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		72 Laporan	22.320.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	10.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	10.800.000
7	1 12.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		169 unit	89.336.021			164 unit	128.500.000
7	1 12.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117 Unit	35.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	117 Unit	49.000.000
7	1 12.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	9.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Unit	12.000.000
7	1 12.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	42.176.021	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	64.500.000
7	1 12.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	1.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Unit	3.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana		100 persen	408.596.800	Alokasi Umum		100 persen	180.272.500
7 1 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		8 laporan	1.670.000			8 laporan	16.182.500
7 1 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	1.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	16.182.500
7 1 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan		40 laporan	406.926.800			40 laporan	164.090.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0002	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	379.299.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Laporan	131.590.000
7	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	27.627.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Laporan	32.500.000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 persen	17.442.179		100 persen	66.995.000
7	3.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		10 indeks	10.842.179		10 indeks	32.005.000
7	3.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	4.297.179	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	23.405.000
7	3.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 laporan	6.545.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	8.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 indeks	6.600.000			3 indeks	34.990.000
7	3.2.03	0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Masyarakat	3.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Lembaga Masyarakat	22.590.000
7	3.2.03	0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	12.400.000
7	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	100 persen	6.422.500			100 persen	17.345.000
7	4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	15 laporan	6.422.500			2 laporan	17.345.000
7	4.2.01	0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	5.447.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	11.715.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 4 2.021 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		12 laporan	975.000			13 laporan	5.630,000
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi		100 persen	39.967.500			100 persen	112,560,000
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		70.62 indek	39.967.500			70.62 indek	112,560,000
7 1 5 2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 19945	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Orang	32.592.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 Orang	84,200,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	315.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	2.670.000
7	5.2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	7.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	25.690.000
7	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 persen	14.555.000			100 persen	106.800.000
7	6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		63 dokumen	14.555.000			63 dokumen	106.800.000
7	6.2.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kelurahan	1 Dokumen	310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.000.000
7	6.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	8.750.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Dokumen	6.685.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Dokumen		63.550,000
7	0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 dokumen	2.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 dokumen		18.250,000
7	0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan Girisuko	1 Dokumen	200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7	0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.345.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen		4,000,000
7	0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 dokumen		3,250,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	8.000.000
				TOTAL	1.942.332.684				2.580.451.653

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kapanewon Panggang yang disusun Tahun 2023 ini merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Kapanewon Panggang untuk Tahun 2024 yang akan datang. Dokumen ini berisi Tujuan, Sasaran, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang hendak dicapai oleh Kapanewon Panggang. Sehingga dokumen Renja menjadi acuan atau dasar pelaksanaan semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan.

Pada bab penutup Rencana Kerja Kapanewon Panggang Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu:

a. Catatan Penting

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Panggang selalu melibatkan *stakeholder* dan Para Pemangku Kebijakan melalui kegiatan Musrenbang, sehingga Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan dan meminimalisir terjadinya inkonsistensi perencanaan dan anggaran serta inefisiensi penggunaan anggaran.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik merupakan kunci sukses Pembangunan daerah, untuk itu kualitas perencanaan dituntut dalam upaya mendukung keberhasilan dan kelancaran pembangunan daerah, dengan syarat komitmen dan konsistensi seluruh komponen masyarakat, *stakeholder* dan pemangku kebijakan terhadap dokumen perencanaan yang telah tersusun berdasarkan Visi dan Misi adalah mutlak, serta didukung sikap mental, semangat, kejujuran, disiplin dan etos kerja dari semua unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai suatu kondisi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dalam berbagai aspek pada masa yang akan datang, melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang tersedia.

Untuk menjamin program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan maka diperlukan alat pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan tersebut dengan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata cara Evaluasi Rancanagan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Melalui Tata cara dan pengendalian serta evaluasi tersebut dapat terlihat kesesuaian antara pelaksanaan program kegiatan dengan perencanaan dan target capaiannya terhadap pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing jawatan dan kesekretariatan.

Dokumen Rencana Kerja Kapanewon Panggang Tahun 2024 ini semoga dapat bermanfaat bagi seluruh individu ataupun satuan kerja yang berkepentingan sehingga dapat memaksimalkan semua daya dan upaya guna suksesnya tujuan pembangunan yang hendak dicapai demi kemajuan masyarakat yang lebih baik.

Sebagai penutup bahwanya dokumen Renja ini mutlak diperlukan, agar masing-masing bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kegiatan sesuai rencana, dan dokumen ini kami susun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Wonosari,
KAPANEWON PANGGANG,

WIDYASTUTI

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON TEPUS
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam regulasi tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus di susun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan yang harus di susun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), artinya, Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pada RKPD.

Dalam Renja Perangkat Daerah mengandung strategi yang menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musrenbang.

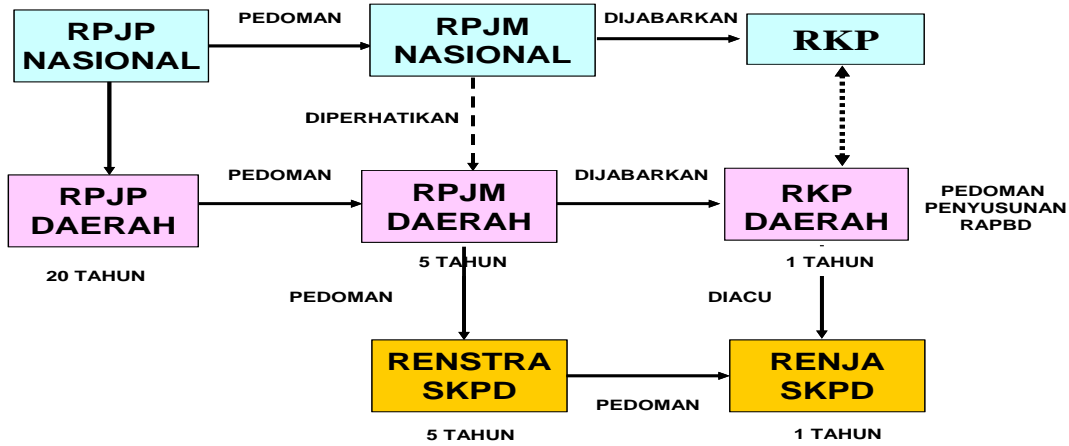
Keterkaitan antara Renja Kapanewon Tepus 2024 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah:

1. Renja PD dengan RKPD

RKPD menjadi acuan dalam perumusan program , kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif. Renja PD disesuaikan dengan program prioritas PD.

2. Renja PD dengan Renstra PD
Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L (Kementrian/ Lembaga) dan PD Provinsi
Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :



Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Kapanewon Tepus Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 menyesuaikan urusan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Kapanewon Tepus.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Kapanewon Tepus Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Tepus

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Tepus dan Capaian Renstra Kapanewon Tepus
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Tepus
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Kapanewon Tepus

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Tepus

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Kapanewon Tepus

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KAPANEWON TEPUS

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kapanewon Tepus

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul disusun mendasar pada prioritas program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu, juga memperhatikan hasil masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat kelurahan, Kapanewon maupun Kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten telah disepakati berbagai program dan kegiatan yang diikuti dengan pendanaan indikatif untuk selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kapanewon Tepus disusun dan ditetapkan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Daerah, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan tahunan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan ditetapkannya RKPD tersebut maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Renja untuk menyesuaikan dengan urusan dan susunan perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik dan keuangan. Semakin tinggi capaian persentase realisasi fisik dan keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila program/kegiatan yang penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil dan tidak ada masalah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilihat sejauh mana tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar seperti yang diharapkan.

Kapanewon Tepus sebagai Perangkat Daerah mempunyai komitmen, berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan.

Secara garis besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Tepus tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

Untuk Program dan kegiatan yang realisasinya tidak memenuhi target kinerja tidak ada. Semua yang ditargetkan sudah memenuhi yang ditargetkan.

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

Kapanewon Tepus pada tahun 2022 mengampu 8 program yaitu:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan

- Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Dari 8 program tersebut telah terpenuhi target kinerja keluaran yang telah direncanakan. Pada tahun 2022 capaian fisik Kapanewon Tepus mencapai 100%. (sumber laporan TEPPRA tahun 2022)

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
Untuk Program dan kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja tidak ada. Semua yang ditargetkan sudah memenuhi yang ditargetkan.
4. Faktor yang mendukung terealisasinya pelaksanaan program kegiatan sesuai target adalah komitmen, kedisiplinan dan kerja keras Kapanewon Tepus dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan memastikan sesuai dengan prioritas pembangunan.
5. Faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja Kapanewon Tepus adalah:
 - kebijakan dan regulasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang selalu berubah- ubah. Seringkali regulasi muncul setelah DPA tersusun.
 - Adanya refocusing anggaran karena keadaan tertentu. Sehingga apa yang sudah ditargetkan terpaksa tidak dilaksanakan karena terbatasnya anggaran.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakkor-faktor yang diperkirakan akan memengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 adalah :
 - Berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten agar pelaksanaan program/kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
 - Berkoordinasi dengan TAPD terakait alokasi anggaran terealisasi sesuai dengan usulan yang ada.
 - Mengikuti alur perencanaan dan penganggaran sesuai regulasi yang ditetapkan.
 - Mengoptimalkan koordinasi internal di Kapanewon Tepus

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan Pencapaian Renstra tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Tepus Tahun 2022 dan
 Pencapaian Renstra Kapanewon Tepus s/d Tahun 2023
 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Tepus

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	26 dokumen	NA NA	26 dokumen	26 dokumen	100,00	NA NA	26 dokumen	1,00
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,25 Indeks	NA NA	NA NA	NA NA	NA	8,11 Indeks	8,11 Indeks	98,30
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen Renja Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	20
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	NA NA	NA dokumen	NA dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	25
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen ROPK	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	25
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,00 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,00 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	17 dokumen	17 dokumen	25
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan money	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4,00 dokumen	100,00	NA dokumen	4,00 dokumen	100
		Jumlah laporan Tepra	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12,00 dokumen	100,00	NA dokumen	12,00 dokumen	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	32 Laporan	32 Laporan	25
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	14 dokumen	NA NA	14 dokumen	14 dokumen	100,00	NA NA	14 dokumen	100,00
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74,67 Indeks	NA NA	NA NA	NA NA	NA	74.6 7 Indeks	74,67 Indeks	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	NA NA	14 bulan	14 bulan	100,00	NA bulan	14 bulan	100,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	210 Orang/bulan	210 Orang/bulan	25
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	25
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan / SPJ bulanan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	NA NA	12 dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA NA	1 dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	52 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	13 Laporan	13 Laporan	25
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 layanan	NA NA	1 layanan	1 layanan	NA	NA NA	1	100
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	6 dokumen	6 dokumen	25
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	100,00	NA orang	15 orang	100
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	6 Dokumen	6 Dokumen	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Kaparewon terfasilitasi	6 layanan	NA NA	6 layanan	6 layanan	100,00	NA NA	6	100
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,15 Indeks	NA NA	NA NA	NA NA	NA	49,2 Indeks	49,15 Indeks	102,08
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	3 paket pembelian	13 jenis	3 paket pembelian	3 paket pembelian	100	NA paket pembelian	3 paket pembelian	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 PAKET	NA NA	NA NA	NA NA	NA	3 PAKET	3 PAKET	25
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor terbeli	3 paket pembelian	32 jenis	3 paket pembelian	3 paket pembelian	100	NA paket pembelian	3 paket pembelian	100
		Jumlah laptop terbeli	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	NA unit	1 unit	100
		Jumlah mesin ketik terbeli	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100	NA unit	1 unit	100
		Jumlah komputer terbeli	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0,00	NA unit	0 unit	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket 3 paket pembelian	NA NA 19 jenis	NA NA 3 paket pembelian	NA NA 3 paket pembelian	NA 100,00	10 Paket NA paket pembelian	10 Paket 3 paket pembelian	43,48 100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket 75 bendel	NA NA 5 dokumen	NA NA 75 bendel	NA NA 75 bendel	NA 100,00	3 Paket NA bendel	3 Paket 75 bendel	25 100
		Jumlah lembar penggandaan	6500 lembar	5580 lembar	6500 lembar	6500 lembar	100,00	NA lembar	6500 lembar	100
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	NA NA	NA NA	NA NA	NA	7 Paket	7 Paket	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar terbayar	12 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100,00	NA rekening	12 rekening	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	992 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	248 Dokumen	248 Dokumen	25
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat terfasilitasi minum dan snacknya	110 orang	360 orang	110 orang	110 orang	100	NA orang	110 orang	100,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	30 kali	0 kali	30 kali	30 kali	100	NA kali	30 kali	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	24 Laporan	24 Laporan	25
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 layanan	NA NA	2 layanan	2 layanan	100,00	NA NA	2 layanan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	6 Unit	6 Unit	33,33
		Jumlah kursi tamu terbeli	0 set	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA set	NA NA	NA
		Jumlah meja rapat pimpinan terbeli	0 buah	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA buah	NA NA	NA
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	9 Unit	9 Unit	128,57
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah UPS yang terbeli	0 unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA unit	NA unit	NA
		Jumlah LCD proyektor terbeli	1 unit	NA NA	1 unit	1 unit	100,00	NA unit	1 unit	100
		Jumlah peralatan sound terbeli	1 set	NA NA	1 set	1 set	100,00	NA set	1 set	100
		Jumlah Genset terbeli	0 unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	NA NA	0
		Jumlah felling cabinet terbeli	0 unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	NA NA	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 Unit	1 Unit	9,09
		Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 layanan	NA NA	2 layanan	2 layanan	100,00	NA NA	2 layanan	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	48 Laporan	48 Laporan	25
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim; Jumlah hari terfasilitasinya jasa surat menyurat	248;4 hari; 0 surat	248 hari	247 hari; surat	246,4 hari; 0 surat	73; 75	NA hari; surat	246,4 hari; surat 0	99,19
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (3 rekening X 12 bulan)	36 rekening	36 rekening	36 rekening	36,00 rekening	100,00	NA rekening	36,00 rekening	100
		Jumlah rekening air yang terbayar	12 rekening	12 rekening	12 rekening	12,00 rekening	100,00	NA rekening	12,00 rekening	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	NA NA	NA Laporan	NA Laporan	NA	48 Laporan	48 Laporan	25
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 layanan	NA NA	4 layanan	4 layanan	100,00	NA NA	4 layanan	100
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552 Unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	141 Unit	141 Unit	25,54
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas terbayar pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0,00	NA unit	0 unit	0
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	12 paket pemeliharaan	1 unit	12 paket pemeliharaan	12,00 paket pemeliharaan	100,00	NA NA	12 paket pemeliharaan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	9 unit	9 unit	9 unit	9,00 unit	100,00	NA NA	9 unit	100,00
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	4 paket pemeliharaan	9 unit	4 paket pemeliharaan	4,00 paket pemeliharaan	100,00	NA NA	4 paket pemeliharaan	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	272 Unit	NA NA	NA Unit	NA NA	NA	68 Unit	68 Unit	25
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	180 Unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	45 Unit	45 Unit	25
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	5 unit	4 unit	5 unit	5 unit	100,00	NA NA	5 unit	100
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100,00	NA NA	2 unit	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	5 unit	4 unit	5 unit	5 unit	100,00	NA NA	5 unit	100
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	5 unit	2 unit	5 unit	5 unit	100,00	NA NA	5 unit	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	21 Unit	21 Unit	29,17
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor; Jumlah hari terfasilitasinya keamanan kantor	3;366 paket pemeliharaan;hari	365; hari; unit 3	3;21 paket pemeliharaan;hari	3 paket pemeliharaan ; hari	100; 100	NA NA	3 paket pemeliharaan ; hari	100; 100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	2 Unit	2 Unit	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	2 unit	NA NA	2 unit	2 unit	100,00	NA unit	2 unit	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	4 NA	4 NA	25
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 Unit	1 Unit	25
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah layanan Penataan Organisasi	1 layanan	NA NA	1 layanan	1 layanan	100,00	NA NA	1 layanan	100
		nilai IKM	80,84 indeks	NA NA	80,84 indeks	80,92 indeks	100,10	NA NA	80,92 indeks	100,10
X.XX.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP/SPIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen SKM	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2,00 Dokumen	100,00	NA Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah dokumen SOP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 layanan	NA NA	1 layanan	1 layanan	100,00	NA NA	1 layanan	100
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	3 Laporan	3 Laporan	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah cabang olahraga yang dibina	3 cabang olahraga	0 cabang olahraga	3 cabang olahraga	3 cabang olahraga	100,00	NA cabang olahraga	3 cabang olahraga	100
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	3 kelompok	0 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	100,00	NA kelompok	3 kelompok	100
		Jumlah keikutsertaan upacra kirab hari jadi Gunungkidul	1 Kali	0 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00	NA Kali	1 Kali	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	3 Laporan	3 Laporan	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2 layanan	NA NA	2 layanan	2 layanan	100,00	NA NA	2 layanan	100
			72 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	18 Laporan	18 Laporan	25
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan forum kapanewon sehat	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100,00	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan katurahan siaga	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100,00	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	100,00	NA Kesepakatan	2 Kesepakatan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kesepakatan update data SID/ SIKAB	1 kesebaka tan	1 kesebaka tan	1 kesebaka tan	1 kesebaka tan	100,00	NA kesebaka tan	1 kesebaka tan	100
		Jumlah layanan dropping air	687 tangki	600 tangki	600 tangki	600 tangki	100,00	NA tangki	600 tangki	87,34
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat	20 KK	26 KK	20 KK	20 KK	100,00	NA KK	20 KK	100
		Jumlah rapat koordinasi jamban sehat	0 kali	2 kesebaka tan	2 kali	2 kali	100,00	2 kali	2 kali	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	NA NA	NA Laporan	NA Laporan	NA	6 Laporan	6 Laporan	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	1200 layanan	100 0 layanan	120 0 layanan	1.200 0 layanan	100,00	NA layanan	1200 layanan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	25
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah layanan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 layanan	NA NA	2 layanan	2 layanan	100,00	NA NA	2 layanan	100
		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6,5 Indeks	NA NA	NA Indeks	NA NA	NA	6,5 Indeks	6,5 Indeks	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen usulan rencana kegiatan (DURP)	1 dokumen	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMkaldan RPKPKal	5 kalurahan	5 kalurahan	5 kalurahan	5 kalurahan	100,00	NA kalurahan	5 kalurahan	100
		Jumlah Bimtek perencanaan pembangunan desa terselenggara (PIWK)	1 kali	NA NA	1 kali	1 kali	100,00	NA kali	1 kali	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	28 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	7 Dokumen	7 Dokumen	25
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perlombaan kalurahan tingkat Kapanewon	1 kali	0 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA kali	1 kali	100
		Jumlah pendampingan lomba kalurahan tingkat Kabupaten	1 kali	NA NA	1 kali	1 kali	100,00	NA kali	1 kali	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen profil katurahan dan profil Kapanewon tersusun	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100,00	NA dokumen	6 dokumen	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	6 Laporan	6 Laporan	25
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 layanan	NA NA	2 layanan	2 layanan	100,00	NA layanan	2 layanan	100
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,5 Indeks	NA NA	NA NA	NA NA	NA	2,5 Indeks	2,5 Indeks	100
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah frekuensi pertemuan PKK	12 kali	9 kali	12 kali	12 kali	100,00	NA kali	12 kali	100
		Jumlah lembaga karang taruna terbina	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100,00	NA lembaga	1 lembaga	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga	NA NA	NA NA	NA NA	NA	2 Lembaga	2 Lembaga	25
		Jumlah dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,00 dokumen	100,00	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah kesepakatan koordinasi masa tanam, perbenihan, pemupukan, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikanan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100,00	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah keikutsertaan pameran industri kecil	1 kali	0 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA kali	1 kali	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	3 Laporan	3 Laporan	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah layanan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 layanan	NA NA	1 layanan	1 layanan	100,00	NA layanan	1 layanan	100
		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	8 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	2 Laporan	2 Laporan	25
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah frekuensi koordinasi FKUB	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA kali	1 kali	100
		Jumlah pelaksanaan safari taraweh tingkat Kapanewon	1 kali	0 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA kali	1 kali	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	2 Laporan	2 Laporan	25
		Jumlah layanan Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 layanan	NA NA	1 layanan	1 layanan	100,00	NA NA	1 layanan	100
		Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	25
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kesepakatan koordinasi PEKAT	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100	NA kesepakan	1 kesepakan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	25
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 layanan	NA NA	2 layanan	2 layanan	NA	NA NA	2 layanan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38 Indeks	NA NA	NA NA	NA NA	NA	38 NA	38 Indeks	100
		Jumlah kegiatan HUT yang terfasilitasi pelaksanaannya	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA kali	1 kali	100
		Jumlah PASKIBRA Kapanewon yang dibentuk dan dilatih	71 orang	71 orang	71 orang	71 orang	100,00	NA orang	71 orang	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	NA NA	NA NA	NA NA	NA	75 Orang	75 Orang	25
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan patroli terpadu bersama Forkompimkap	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100,00	NA NA	12 kali	100
		Jumlah koordinasi forkompimkap	2 kali	NA NA	2 kali	2 kali	100,00	NA NA	2 kali	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	25
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan terlaksana	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 layanan	NA NA	7 layanan	7 layanan	100	NA NA	7 layanan	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	233 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	58 dokumen	58 dokumen	24,89

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan penyusunan produk hukum kalurahan	1 kali	NA NA	1 kali	1 kali	100	NA kali	1 kali	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	40 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	10 Dokumen	10 Dokumen	25
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	1 kesepakan	1 kesepakan	1 kesepakan	1 kesepakan	100,00	NA kesepakan	1 kesepakan	100
		Jumlah dokumen monografi kalurahan dan kapanewon yang tersusun	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00		NA dokumen	6 dokumen	50
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100,00	NA kali	3 kali	100,00
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset kalurahan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA kali	1 kali	100
		Jumlah frekuensi koordinasi bidang administrasi pertanahan dan tanah kas kalurahan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA kali	1 kali	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	108 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	27 Dokumen	27 Dokumen	25
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan Lurah	0 kaluraha n	NA NA	NA NA	NA NA	NA	0 kaluraha n	0 kalurahan	0
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	0 Dokumen	0 Dokumen	0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD/BPK yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	30 orang	NA NA	30 orang	30 orang	100,00	NA orang	30 orang	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan	12 rekomendasi	2 desa	12 rekomendasi	12 rekomendasi	100,00	NA rekomendasi	12 rekomendasi	100,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16 Dokumen	NA	NA	NA	NA	4 Dokumen	4 Dokumen	25
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	50 orang	30 orang	50 orang	50 orang	100,00	NA orang	50 orang	100
		Jumlah kesepakatan koordinasi pembinaan mitigasi bencana alam	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100,00	100,00	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	NA	NA	NA	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	25
02.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi	100 Persen		100 Persen		0,00	100 Persen	100 Persen	100
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah layanan kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 layanan	NA NA	1 layanan	1 layanan	100,00	NA layanan	1 layanan	100
		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	25
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan hari keistimewaan DIY	2 even	NA NA	1 even	1 even	100,00	NA even	1 even	50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	25
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 Persen	NA NA	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah layanan kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terfasilitasi	1 layanan	NA NA	1 layanan	1 layanan	100,00	NA layanan	1 layanan	100
		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	8 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan di Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	8 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	25
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Rencana program kegiatan keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	2 dokumen	NA NA	2 dokumen	2 dokumen	100,00	NA dokumen	2 dokumen	100
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan	1 laporan	NA NA	1 laporan	1 laporan	100,00	NA laporan	1 laporan	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 adalah 100 %. Tabel tersebut menyajikan output dari masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target pada tahun 2022. Data di ambil dari laporan moneyv tahun 2022 .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Tepus

Kapanewon Tepus dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021.

Kapanewon Tepus sebagai salah satu perangkat daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah Kapanewon mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh seksi yang berkaitan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu/ Pelayanan Terpadu di Kapanewon. Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di Kapanewon Tepus terdiri dari :

1. Pelayanan Legalisasi Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga (KK);
3. Pelayanan Dispensasi Nikah;
4. Pelayanan Surat Pindah Datang/Pergi Penduduk;
5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Pelayanan Legalisasi Akta Kelahiran;
7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan/Ho;
8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
9. Pelayan Surat Keterangan Lainnya

Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kapanewon Tepus telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup signifikan terbukti dari hasil quisioner yang disampaikan kepada masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Kapanewon Tepus terhadap pelayanan yang diberikan cukup tinggi.

Di samping itu, berkat adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar instansi tingkat Kapanewon maupun dengan Pemerintah Kelurahan dan lembaga Kelurahan, penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kapanewon Tepus dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya serta terbatasnya prasarana dan sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri di Kapanewon Tepus dalam mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatannya.

Indikator kinerja utama kapanewon ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021, salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kapanewon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon tahun 2024. Kinerja pelayanan Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Tepus
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Kecamatan Tepus				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A.	Indikator Kinerja Utama											
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat											
	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	NA	96,17	96,19	96,22	NA	95,62	96,19	96,22	Untuk tahun 2021 Indikator IKU nya "Persentase Desa yang Menetapkan APBDesa Tepat Waktu" dan Kapanewon Tepus tercapai 100 persen	

Mendasar pada tabel di atas, Kapanewon Tepus menargetkan Realisasi IKU pada periode Renstra 2021 – 2026 sesuai target yang direncanakan.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Tepus

Kapanewon Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari ; 2 orang eselon III.a, 5 orang eselon IV.a, 2 orang eselon IV.b. Aktivitas kinerja Kapanewon Tepus dilaksanakan oleh PNS golongan II: 5 orang, golongan III: 7 orang, dan golongan IV: 2 orang serta THL: 3 orang. Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Tepus dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kapanewon Tepus terinci pada tabel berikut:

No.	Masalah	Penyebab Permasalahan	Akar Masalah
1.	Tugas-tugas belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu	- Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki	- Jumlah Pegawai Terbatas - Kemampuan SDM yang belum optimal
2.	Masih kurangnya motivasi petugas layanan satu pintu	- Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas layanan	- Tidak ada Reward bagi petugas pelayanan
3.	Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan petugas layanan satu pintu	- Belum seluruh petugas layanan mendapatkan kesempatan diklat teknis	- Anggaran untuk Pelatihan sangat terbatas
4.	Masih belum optimalnya pemberian layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan adm. Kependudukan	- Ketergantungan dengan alat (jaringan internet) sangat tinggi - Partisipasi masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan masih kurang	- Jaringan internet belum stabil - Kemampuan SDM masyarakat kurang
5.	Keterbatasan dalam menyusun program dan kegiatan	- Penyerahan kewenangan belum dibarengi dengan alokasi anggaran dari APBD	- Alokasi/ Pagu anggaran terbatas
6.	Pendapatan Asli Kal (PAKal) rendah	- Ketergantungan dari bantuan pemerintah sangat tinggi - sumber pendapatan terbatas	- Sumber daya alam yang dimiliki belum dikelola secara maksimal

No.	Masalah	Penyebab Permasalahan	Akar Masalah
7.	Masih belum optimalnya penanganan masyarakat kekurangan air bersih	- Belum optimalnya pemanfaatan sumber air bersih yang ada	- Sumber air yang ada belum dikelola dengan baik karena terbatasnya SDM
8.	Masyarakat kategori miskin dan pengangguran masih cukup tinggi	- Peluang dan lapangan kerja sangat minim	- Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah
9.	Peluang wirausaha sangat minim	- Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat	- Keahlian yang dimiliki masih sangat terbatas
10.	Minimnya hasil pertanian sedangkan masyarakat di kapanewon Tepus sebagian besar merupakan petani	- Minimnya teknologi pertanian - Partisipasi masyarakat untuk belajar ilmu baru masih rendah - Belum adanya pendampingan pada petani	- Terbatasnya anggaran untuk pelatihan dan pendampingan - Di sebagian wilayah kapanewon terdapat kera ekor panjang
11.	Angka stunting tinggi	- Pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat masih rendah - Tingkat kemiskinan	- SDM yang kurang memadai - Penghasilan yang masih kurang

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon, serta mendasar pada hasil identifikasi faktor permasalahan sebagaimana tersebut pada tabel di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kapanewon Tepus yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan Rencana Strategis Kapanewon Tepus.

1. Faktor penghambat :

- a. Sangat minimnya kesempatan bagi aparatur pemerintah Kapanewon dan Kelurahan untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidangnya;
- b. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan pada alat dan jaringan internet. Partisipasi masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan masih kurang.

- c. Anggaran belanja Kapanewon tergantung pada kemampuan APBD Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas tidak lepas dari faktor pendanaan;
- d. Kebijakan pemerintah (regulasi) yang selalu berubah-ubah, yang berakibat pada kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas mengingat terbatasnya kapasitas SDM aparat dalam memahami berbagai regulasi;
- e. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;
- f. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah;
- g. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan);
- h. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum; dan
- i. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
- j. Belum optimalnya sumber daya yang ada misalnya tanah. Dalam pertanian masih tergantung pada musim hujan. Sehingga masa panen hanya terjadi pada musim hujan saja.
- k. Pemahaman tentang kesehatan di lingkungan masyarakat masih rendah sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti stunting.

2. Faktor pendorong :

- a. Masih kentalnya jiwa gotong royong di masyarakat;
- b. Jumlah sumber daya manusia yang memadai;
- c. Adanya pendampingan/pembinaan kepada perangkat kalurahan dan lembaga-lembaga kelurahan serta mengirimkan perangkat kalurahan dan lembaga kalurahan mengikuti pembekalan/pelatihan;
- d. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya cukup tinggi;
- e. Masih adanya program pemberian/penyaluran bantuan setiap bulan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima;
- f. Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan otonomi daerah;
- g. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha ekonomi produktif;
- h. Banyaknya sumber-sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan air bersih;
- i. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah; dan
- j. Letak Kapanewon Tepus yang cukup strategis dekat dengan rencana Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang mudah diakses dari berbagai arah.

2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Melenium Development Goals).

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah *"Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026"*.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yang meliputi :

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
- b. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan Nasional dan DIY sebagai berikut:

- a. Arah Kebijakan Nasional
 - 10 destinasi pariwisata prioritas
 - Industry 4.0 di 6 sub sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi, dan alat kesehatan
 - Pembangunan science techno park
 - Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting
 - Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh/MP Perlinsos
 - Transformasi digital
- b. Arah Kebijakan Provinsi
 - Mengatasi ketimpangan wilayah
 - Mengatasi ketimpangan pendapatan
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah

“Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi;
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Dari beberapa prioritas di atas yang masuk dalam Kapanewon Tepus adalah reformasi birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Untuk mendukung tugas Kapanewon maka disertai fungsi Kapanewon yaitu:

- Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan

Sebelum menentukan isu-isu penting/strategis, lebih dahulu akan disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini (*present condition*) dan cenderung mudah dikontrol (*controlable*) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (*future condition*) dan cenderung sulit dikontrol (*uncontrolable*).

1. Faktor *Internal*

Faktor *internal* dari lingkungan strategis Kapanewon Tepus dalam satu tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi;
- 2) Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
- 3) Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- 4) Tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas; dan
- 5) Terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki;

- 2) Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme, pengetahuan, dan ketrampilan);
- 3) Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas layanan satu pintu;
- 4) Belum adanya jabatan fungsional layanan;
- 5) Belum efektifnya pengawasan melekat

2. Faktor *Eksternal*

Faktor *eksternal* dari lingkungan strategis Kapanewon Tepus dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- 2) Kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas layanan;
- 3) Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan;
- 4) Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dan perekonomian);
- 5) Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral (UPT, Pemerintah Kalurahan dan Forkompimkap);
- 6) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja;
- 7) Banyaknya kelompok usaha ekonomis produktif;
- 8) Tersedianya obyek wisata pantai yang potensial;
- 9) Tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar kelurahan dan kapanewon;
- 10) Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional;
- 11) Tersedianya sumber-sumber mata air bersih;
- 12) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang pembangunan;
- 13) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang industri dan jasa perdagangan; dan
- 14) Berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.

b. Tantangan (*Threat*)

- 1) Belum semua peraturan-peraturan bersifat operasional, sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum;
- 2) Kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan merata;
- 3) Produktivitas hasil produksi pertanian belum optimal yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;
- 4) kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terkait hal baru masih rendah
- 5) Masih cukup banyak masyarakat Kapanewon Tepus dengan kategori miskin, yang akan memberikan dampak luas.
- 6) Perubahan budaya di lingkungan masyarakat yang cenderung condong ke kebiasaan kurang baik.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan di Kapanewon Tepus serta mendorong dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, yaitu :

- a. Mengingat masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, ke depan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan teknis;
- b. Kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan terutama pada jaringan internet.
- c. Dukungan pendanaan kegiatan di tingkat Kapanewon perlu ditingkatkan;
- d. Banyaknya rakyat miskin dengan tingkat pendapatan yang masih rendah, ke depan perlu didorong dalam pengembangan penciptaan lapangan kerja; dan
- e. Optimalisasi pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/ menengah.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dimusyawarahkan mulai dari tingkat Kelurahan, Kapanewon, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kapanewon Tepus berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.

Pada bab ini merupakan proses membandingkan kebutuhan rancangan awal Renja PD dan analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan program kegiatan yang lebih prioritas pada tahun 2024.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kapanewon Tepus dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.4, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Tepus

No	RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana	100	100.000.000,00	
						Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	100.000.000,00	
						Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	100.000.000,00	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100 persen	35.000.000,00	
						Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	2 dokumen	35.000.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Tepus	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	4 dokumen	35.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	100 persen	1.214.656.982,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	100 persen	1.137.376.982,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.11 indeks	34.092.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.11 indeks	29.762.500,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.447.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	25.037.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	350.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	350.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.045.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	605.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	720.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	440.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.180.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	1.140.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 laporan	3.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 laporan	1.840.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.67 indeks	991.134.482,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.67 indeks	988.594.482,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Tepus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	986.684.482,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Tepus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 orang/bulan	986.684.482,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.450.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	940.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	970.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 dokumen	6.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 dokumen	560.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6.500.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	560.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.15 indeks	62.985.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.32 indeks	43.925.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Tepus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi	Kapanewon Tepus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	2.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Tepus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	19.487.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Tepus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	9.100.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Tepus	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Tepus	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	2.592.500,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Tepus	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	5.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Tepus	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	3.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	247 dokumen	1.200.000,00	12

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	28.797.500,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	23.447.500,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Tepus	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 unit	20.750.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Tepus	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 unit	00.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Tepus	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	20.750.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Tepus	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	00.00	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	00.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 laporan	16.235.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 laporan	16.235.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	16.235.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	16.235.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	6	7	8	9	10	11	12
				94 unit	82.960.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137 unit	58.300.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Tepus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 unit	41.460.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Tepus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 unit	44.700.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Tepus	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	8.900.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Tepus	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	6.300.000,00	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Tepus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Tepus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Tepus	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2unit	600.000,00	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Tepus	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	300.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Kaparewon Tepus	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 1 unit	6 2.000.000,00	7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Kaparewon Tepus	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	11 2.000.000,00	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana	100 persen	92.500.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana	100 persen	215.965.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 laporan	5.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 laporan	3.535.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	3.535.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19 laporan	87.500.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	18 laporan	212.430.000,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7 laporan	76.500.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 laporan	208.530.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	3.900.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	50.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	24.890.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.5 indeks	30.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.5 indeks	13.285.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 7 Dokumen	6 15.000.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10 6 dokumen	11 4.305.000,00	12
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	15.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	8.980.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.5 indeks	20.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.5 indeks	11.605.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	6.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	4.800.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	14.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 laporan	6.805.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi	100 persen	15.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi	100 persen	6.210.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	5 3 laporan	6 15.000.000,00	7 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	9 Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	10 2 laporan	11 6.210.000,00	12
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	4.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1.260.000,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	11.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Tepus	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	4.950.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi	100 persen	80.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi	100 persen	66.595.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38 indeks	80.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38 indeks	66.595.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Tepus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	73.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Tepus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10	59.995.000,00	12
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	7.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	10.600.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan Terlaksana	100 persen	55.147.500,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan Terlaksana	100 persen	35.417.500,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61 dokumen	55.147.500,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58 dokumen	35.417.500,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	6	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10	11	12
	Fasilitasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Tepus	10 Dokumen	10 Dokumen	2.500.000,00	Fasilitasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 dokumen	785.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	1.200.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	490.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dokumen	33.447.500,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 dokumen	28.992.500,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	640.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	660.000,00	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7 dokumen	3.000.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7 dokumen	760.000,00	

RENCANA RANCANGAN AWAL RENJA PD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Kapanewon Tepus	4 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 2 Dokumen	6 7.000.000,00	7 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Kapanewon Tepus	9 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 2 dokumen	11 2.380.000,00	12
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	2.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 dokumen	710.000,00	
				TOTAL	1.507.304.482,00					1.621.454.482,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Idealnya, proses penyusunan program dan kegiatan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Melalui mekanisme yang demikian diharapkan benar-benar aspiratif dan semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan. Mekanisme yang demikian oleh Pemerintah Kapanewon Tepus telah dilakukan, karena setiap kali menyusun program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan lebih dahulu dilakukan musyawarah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat kalurahan maupun tingkat kapanewon. Usulan Program dan kegiatan disusun sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten disesuaikan dengan isu-isu strategis/penting yang ada serta telah disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas dari masing-masing kalurahan dengan sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Harapannya semua usulan yang disusun nantinya dapat direalisasi untuk kepentingan masyarakat umum.

Disamping melalui forum Musrenbang tingkat kabupaten, Pemerintah Kapanewon Tepus melalui kewenangan yang dimiliki mencoba melakukan koordinasi dengan PD terkait, dengan harapan dapat merealisasi apa yang menjadi harapan masyarakat. Walaupun tidak semua yang diusulkan bisa terakomodir dalam RKPD Kabupaten. Adapun usulan Pemangku Kepentingan (Musrenbang Kapanewon) untuk program PIWK sebesar Rp 258.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan di Kaluhan Sidoharjo : 11 KK
- Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin di Kaluhan Giripanggung : 10 KK
- Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin di Kaluhan Sidoharjo : 11 KK
- Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin di kalurahan Sumberwungu : 10 KK
- Pelatihan perencanaan pembangunan di Kalurahan Purwodadi : 1 kali

Usulan program kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
	<p>Program: Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>Kegiatan: Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p> <p>Sub kegiatan : Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan</p>						
1	(PIS) - Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan	Kalurahan sidoharjo	Terlaksananya Pembangunan PAH bagi KK miskin	11 KK	8.000.000	88.000.000	Prioritas
2	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin	Kalurahan giripanggung	Terlaksananya Pembangunan PAH bagi KK miskin	10 KK	4.000.000	40.000.000	Prioritas
3	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin	Kalurahan sidoharjo	Terlaksananya Pembangunan PAH bagi KK miskin	11 KK	4.000.000	44.000.000	Prioritas
4	(PIWK) - Pembangunan jamban dan Pemuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Kalurahan Sumberwungu	Terlaksananya Pembangunan PAH bagi KK miskin	10 KK	7.000.000	70.000.000	Prioritas
	Program :Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan : Koordinasi Kegiatan						

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
	Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						
	(PIWK) - Pelatihan perencanaan pembangunan di desa.	Kalurahan Purwodadi	Terselenggaranya bimtek perencanaan pembangunan	1 kali	16.000.000	16.000.000	Prioritas
Total						258.000.000	

Mendasar pada tabel di atas, usulan program/ kegiatan tahun 2024 dari pemangku kepentingan (lewat Musrenbang) hanya ada 4 usulan PIWK dan 1 PIS yang masuk dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kapanewon Tepus.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON TEPUS

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang Kapanewon tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021. yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pada tahun 2024 Kapanewon Tepus juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Tepus

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu

program atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kapanewon Tepus Tahun 2024

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Reformasi birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	1.Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 2. Meningkatnya Akuntabilitas PD	1.Indeks Pelayanan Kapanewon 2.Nilai AKIP PD
3	Peningkatan ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Kapanewon Tepus Tahun 2024

NO	Tujuan Kapanewon Tepus	Indikator tujuan Kapanewon Tepus	Target kinerja Tujuan Tahun 2024
	Tujuan		
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	96.22
2	Pelestarian potensi ragam budaya local untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	19 Potensi budaya

Tabel 3.3
Sasaran Kapanewon Tepus Tahun 2024

NO	Sasaran Kapanewon Tepus	Indikator Sasaran Kapanewon Tepus	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024
1.	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96.22
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	82,50 / A
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	19 potesi budaya

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kapanewon Tepus Tahun 2024, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Tepus

NO	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target IKU
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	96.22

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan Renja Kapanewon Tepus Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2024;
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
5. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Tepus meliputi :

1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja merupakan kumpulan Program dan kegiatan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kapanewon Tepus dalam menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, yaitu :
 - a. Sebagai konsekuensi untuk merealisasi program/ kegiatan Kapanewon Tepus dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
 - b. Pencapaian IKU Kapanewon yang pada tahun 2021-2026 adalah Indeks Pelayanan Kapanewon.
 - b. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanakan dengan transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, baik di Pemerintahan Kelurahan maupun Kapanewon;
 - c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif;
 - d. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - e. Mengembangkan UMKM yang ada di wilayah Kapanewon Tepus
 - f. Pengurangan angka stunting

Berdasarkan Rancangan Program dan Kegiatan Kapanewon Tepus Tahun 2024 terdiri dari 8 program dan 16 kegiatan dimana dalam pelaksanaannya kegiatan untuk difokuskan pada pelayanan masyarakat tersebar di wilayah Kapanewon Tepus yang terdiri dari 5 kalurahan. Program dan kegiatan Pembangunan Kapanewon Tepus Tahun 2024 seperti pada tabel berikut

Tabel 4.1
Sasaran dan Program Pembangunan
Kapanewon Tepus Tahun 2024

NO	Sasaran Kapanewon Tepus	Nama Program/ Kegiatan
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik <ol style="list-style-type: none"> a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan <ol style="list-style-type: none"> a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum <ol style="list-style-type: none"> a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

		<p>Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</p> <p>a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	<p>1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran</p> <p>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>d. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	<p>1. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan</p> <p>a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</p> <p>2. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan</p> <p>a. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</p>

Selanjutnya program/ kegiatan dan sub kegiatan Kapanewon Tepus tahun 2024 berdasar 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu sesuai tabel berikut:

Tabel 4. 2
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kapanewon Tepus

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawa b
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Keola Pemerintahan Meningkatkan	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,22	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	215.965.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.535.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.535.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	212.430.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	208.530.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.900.000,00	Kapanewon Tepus

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawa b
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.890.000,00	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.285.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.305.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.980.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.605.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.805.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.210.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.210.000,00	Kapanewon Tepus

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.260.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.950.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.595.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	66.595.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.995.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.600.000,00	Kapanewon Tepus

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.417.500,00	Kapanewon Tepus
					7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.417.500,00	Kapanewon Tepus
					7.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	785.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	490.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.992.500,00	Kapanewon Tepus
					7.01.06.2.01.05	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	640.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.06.2.01.07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	660.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	760.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.380.000,00	Kapanewon Tepus
					7.01.06.2.01.14	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	710.000,00	Kapanewon Tepus

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	19	2.22.08.2.	Program Penyelenggaraan Keistiwaraan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00	Kapanewon Tepus
					2.22.08.2.09.	Adat, Seni , Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	Kapanewon Tepus
					2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	Kapanewon Tepus
					4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistiwaraan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00	Kapanewon Tepus
					4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	Kapanewon Tepus
					4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	Kapanewon Tepus

Program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3			
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
Kabupaten Gunungkidul			
Tahun 2024			
No	Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggungjawab
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.137.276.982	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.762.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.037.500	KAPANEWON TEPUS
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	350.000	KAPANEWON TEPUS
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	350.000	KAPANEWON TEPUS
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	605.000	KAPANEWON TEPUS
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	440.000	KAPANEWON TEPUS
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.140.000	KAPANEWON TEPUS
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.840.000	KAPANEWON TEPUS
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	988.494.482	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	986.684.482	KAPANEWON TEPUS
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	940.000	KAPANEWON TEPUS
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	870.000	KAPANEWON TEPUS
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	560.000	KAPANEWON TEPUS
	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560.000	KAPANEWON TEPUS
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.925.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	KAPANEWON TEPUS
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.100.000	KAPANEWON TEPUS
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.592.500	KAPANEWON TEPUS
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.000	KAPANEWON TEPUS
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	KAPANEWON TEPUS
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.532.500	KAPANEWON TEPUS
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	KAPANEWON TEPUS
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.235.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.235.000	KAPANEWON TEPUS
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.300.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	44.700.000	KAPANEWON TEPUS
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000	KAPANEWON TEPUS
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	KAPANEWON TEPUS
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000	KAPANEWON TEPUS
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	KAPANEWON TEPUS

Rumusan rencana program dan kegiatan Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Tepus

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				150.000.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terfasilitasi		100%	100.000.000,00			100%	150.000.000,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		1 laporan	100.000.000,00			1 laporan	150.000.000,00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 laporan	100.000.000,00	Dana Keistimew aan DIY		1 laporan	150.000.000,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan		100%	35.000.000,00			100%	25.970.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		2 dokumen	35.000.000,00			2 dokumen	25.970.000,00	
4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	(Kapanewon Tepas, Tepas)	4 dokumen	35.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		2 dokumen	25.970.000,00	
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.486.454.482,00				2.266.832.920,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik		100%	1.137.376.982,00			100%	1.817.832.920,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.11 indeks	29.762.500,00			8.11 indeks	50.650.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kapanewon Tepas, Tepas)	3 dokumen	25.037.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	26.500.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kapanewon Tepas, Tepas)	1 dokumen	350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	2.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kapanewon Tepas, Tepas, Kec. Tepas)	1 dokumen	350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	2.000.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	(Kapanewon Tepas, Tepas)	2 dokumen	605.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	5.750.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	(Kapanewon Tepas, Tepas)	2 dokumen	440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	3.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kapanewon Tepas, Tepas)	17 laporan	1.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 laporan	5.650.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapanewon Tepas, Tepas)	32 laporan	1.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 laporan	5.750.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Kapanewon Tepas, Tepas)	74.67 indeks	988.594.482,00			74.67 indeks	1.559.957.920,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Kapanewon Tepus, Tepus)	196 orang/bulan	986.684.482,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		210.00 orang/bulan	1.548.457.920,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 laporan	940.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	4.500.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Kapanewon Tepus, Tepus)	13 laporan	970.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 laporan	7.000.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Kapanewon Tepus, Tepus)	6 dokumen	560.000,00			6 dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kapanewon Tepus, Tepus)	6 dokumen	560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Kapanewon Tepus, Tepus)	48.32 indeks	43.925.000,00			48.32 indeks	86.700.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	3 paket	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 paket	4.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	3 paket	9.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 paket	40.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	3 paket	2.592.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 paket	4.500.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(Kapanewon Tepus, Tepus, Kec. Tepus)	7 paket	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 paket	8.100.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	247 dokumen	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		248 dokumen	1.140.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kapanewon Tepus, Tepus)	12 laporan	25.532.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 laporan	28.960.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Tepus, Tepus)	7 unit	-			7 unit	6.500.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 unit	6.500.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Tepus, Tepus)	48 laporan	16.235.000,00			48	18.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	48 laporan	16.235.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 laporan	18.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Tepus, Tepus)	137 unit	58.300.000,00			137 unit	91.025.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kapanewon Tepus, Tepus)	68 unit	44.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		68 unit	35.575.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(Kapanewon Tepus, Tepus)	16 unit	6.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 unit	11.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(Kapanewon Tepus, Tepus)	2 unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	36.450.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 unit	300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 unit	2.000.000,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 unit	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	6.000.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana		100%	215.965.000,00			100%	209.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3 laporan	3.535.000,00			3 laporan	17.000.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(Kapanewon Tepus, Tepus)	2 laporan	3.535.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 laporan	17.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		18 laporan	212.430.000,00			18 laporan	192.000.000,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	6 laporan	208.530.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 laporan	176.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	12 laporan	3.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	16.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi		100%	24.890.000,00			100%	63.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.5 indeks	13.285.000,00			6.5 indeks	38.500.000,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	6 dokumen	4.305.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7 dokumen	18.500.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	6 laporan	8.980.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6 laporan	20.000.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	2.5 indeks	11.605.000,00			2.5 indeks	25.000.000,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 lembaga kemasyarakatan	4.800.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		21 embaga kemasyarakatan	12.500.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	(Kapanewon Tepus, Tepus)	3 laporan	6.805.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 laporan	12.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi	(Kapanewon Tepus, Tepus)	100%	6.210.000,00			100%	19.000.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		2 laporan	6.210.000,00			3 laporan	19.000.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 laporan	1.260.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	6.000.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 laporan	4.950.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 laporan	13.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi	(Kapanewon Tepus, Tepus)	100%	66.595.000,00			100%	96.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		38 indeks	66.595.000,00			38 indeks	96.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	(Kapanewon Tepus, Tepus)	75 orang	55.995.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 orang	90.000.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 dokumen	10.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	6.000.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan Terlaksana		100%	35.417.500,00			100%	61.500.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		58 dokumen	35.417.500,00			58 dokumen	61.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	(Kapanewon Tepus, Tepus)	10 dokumen	785.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 dokumen	2.800.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	(Kapanewon Tepus, Tepus)	12 dokumen	490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	2.000.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	(Kapanewon Tepus, Tepus)	27 dokumen	28.992.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 dokumen	33.700.000,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 dokumen	640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	3.500.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 dokumen	660.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	2.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(Kapanewon Tepus, Tepus)	7 dokumen	760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen	2.000.000,00
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kapanewon Tepus, Tepus)	2 dokumen	2.380.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	8.000.000,00
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	(Kapanewon Tepus, Tepus)	1 dokumen	710.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	7.000.000,00
J U M L A H					1.621.454.482,00				2.442.802.920,00

Usulan dari para pemangku kepentingan dalam musrenbang kapanewon yang terdapat dalam bab II , uraian 2.5 ada beberapa yang tidak terakomodir yaitu bantuan sosial PAH untuk 11 KK di Kalurahan Sidoharjo sebesar Rp 88.000.000,- dalam anggaran PIS dan bimtek perencanaan pembangunan sebanyak 1 kali di Kalurahan Purwodadi sebesar Rp 16.000.000,- (PIWK). Dua kegiatan tersebut tidak dapat terakomodir disebabkan keterbatasan biaya. Sehingga jumlah usulan yang terakomodir sejumlah Rp 154.000.000,- dengan rincian sebagai

- Pembangunan jamban sehat sebanyak 11 KK di Kalurahan Sidoharjo dengan anggaran sebesar Rp 44.000.000,-
- Pembangunan jamban sehat sebanyak 10 KK di Kalurahan Giripanggung dengan anggaran sebesar Rp 40.000.000,-
- Pembangunan jamban dan Pмбуangan akhir tinjau sehat bagi KK miskin sebanyak 10 KK di Kalurahan Sumberwungu dengan anggaran sebesar Rp 70.000.000,00,-

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Tepus Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kapanewon Tepus disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Tepus yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kapanewon Tepus Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Tepus telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Tepus Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
KAPANEWON TEPUS,

ALSITO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

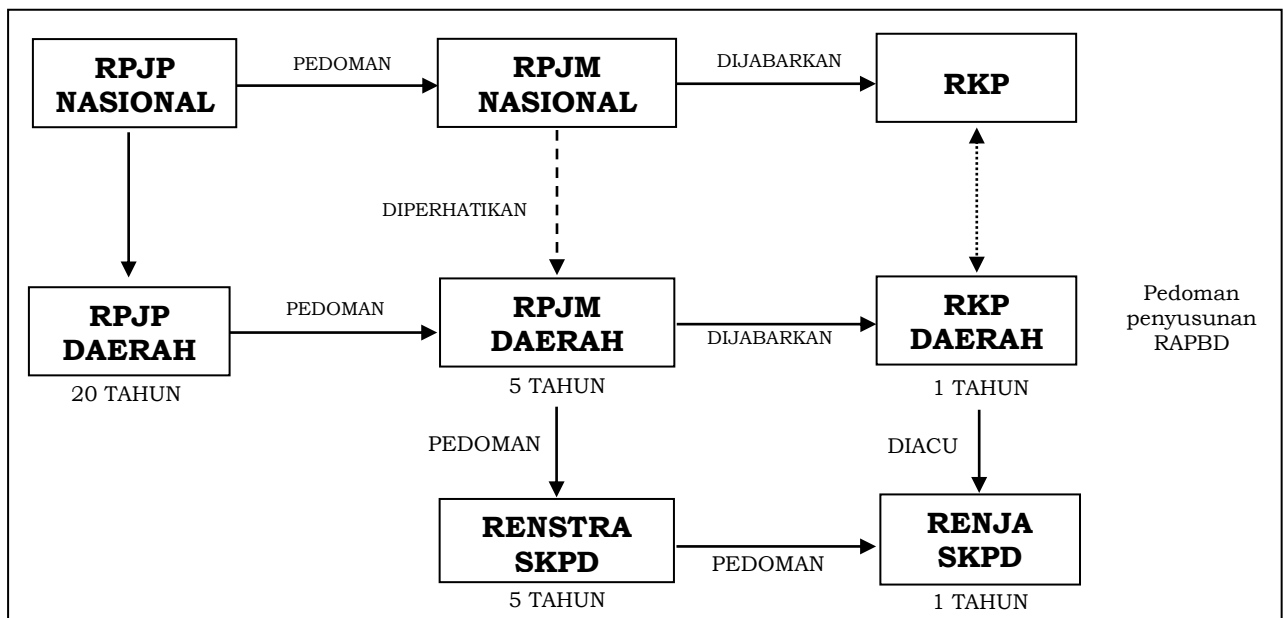
Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya antara lain :

1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan,

- indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya yang disesuaikan dengan Program Prioritas PD.
2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
 3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan Perangkat Daerah Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :



Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 -2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 Tahun 2023 Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kapanewon Rongkop adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kapanewon Rongkop dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

2. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
3. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
4. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Kapanewon Rongkop sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON RONGKOP

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Rongkop dan Capaian Renstra Kapanewon Rongkop
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Rongkop
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 1.2. Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Rongkop

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON RONGKOP

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA KAPANEWON RONGKOP

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Rongkop dan Capaian Renstra Kapanewon Rongkop*

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul disusun mendasar pada prioritas program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu, juga memperhatikan hasil masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat kalurahan, Kapanewon maupun Kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten telah disepakati berbagai program dan kegiatan yang diikuti dengan pendanaan indikatif untuk selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Rongkop disusun dan ditetapkan setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Rongkop atau realisasi APBD untuk Kapanewon Rongkop yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
Pada Perangkat Daerah Kapanewon Rongkop dalam pelaksanaan Renja 2022 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, dengan kata lain target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan terpenuhi.
2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
Pada Perangkat Daerah Kapanewon Rongkop dalam pelaksanaan Renja 2022 program dan kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 yang sudah memenuhi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;
Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Rongkop pada Tahun 2022 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang direncanakan dalam Renja Tahun 2022.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2022.
 - a. Dalam rangka efisiensi waktu sebagian kegiatan Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain.
 - b. Dalam rangka efisiensi anggaran sebagian kegiatan menggunakan anggaran dari Pemerintah Kalurahan.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2023;
 - a. Adanya kesinkronan kegiatan yang dianggarkan perangkat daerah Kapanewon Rongkop dengan agenda kegiatan yang diselenggarakan perangkat daerah di tingkat Kabupaten.
 - b. Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - c. Sumber Daya Manusia yang ada di perangkat daerah Kapanewon Rongkop yang kurang.

- d. Kenaikan harga BBM yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan lainnya.
 - e. Rasionalisasi Anggaran tahun 2023 untuk memenuhi alokasi belanja wajib/mengikat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon.
 - c. Melaksanakan efisiensi anggaran tahun 2023 sesuai ketentuan/intruksi.

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Rongkop dan pencapaian Renstra Kapanewon Rongkop s/d Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100	NA	26 Dokumen	100
		Persentase Dokumen Perencanaan Tersusun Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	NA	96,08 Persen	96,08
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,576	NA	NA	Indek	NA	4,147	4,147	90,63
		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100 Persen	NA	NA	Indek	NA	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	NA	1 Dokumen	100
		Jumlah dokumen Renja perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	NA	1 Dokumen	100
		Jumlah dokumen draft Renstra	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	NA	0 Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah dokumen Renstra	0	1	0	Dokumen	0	NA	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	NA	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	NA	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	1	Dokumen
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	NA	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	1	Dokumen
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen ROPK	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	NA	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	3	Dokumen
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perjanjian Kinerja				n				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	NA	NA	Dokumen	NA	2	2	25
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	NA	NA	Laporan	NA	17	17	25
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP	1	1	1	Dokumen	100	NA	1	100
		Jumlah laporan e Money	4	4	4	Dokumen	100	NA	4	100
		Jumlah Laporan Teppra	12	12	12	Dokumen	100	NA	12	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	NA	NA	Laporan	NA	32	4	25
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Tersusun	NA	14	14	Dokumen	100	NA	12	100
		Persentase Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu	100	100	100	Persen	100	NA	100	100
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88,578	NA	NA	Indek	NA	88,578	88,578	100
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	NA	NA	Persen	NA	100	100	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	Bulan	100	NA	14	100
		Jumlah Orang yang Menerima	1008	NA	NA	Orang/bul	NA	252	252	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Gaji dan Tunjangan ASN		an	ulan	ulan		lan	ulan		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	1	1	Dokumen	100	NA	1	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	NA	NA	Laporan	NA	1	1	Laporan	25
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	12	12	12	Dokumen	100	NA	12	Dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	1	1	Dokumen	100	NA	1	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	NA	NA	Laporan	NA	13	13	Laporan	25
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NA	1	1	Layanan	100	NA	1	Layanan	100
		Tolok Ukur Target Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	Persen	100	NA	100	Persen	100
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24	NA	NA	Dokumen	NA	6	6	Dokumen	25
		Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian	100	NA	NA	Persen	NA	100	100	Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Perangkat Daerah terselesaikan</i>								
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	18 Orang	18 Orang	15 Orang	15 Orang	100	NA Orang	15 Orang	83,33
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	Dokumen	NA	6 Dokumen	6 Dokumen	25
		<i>Jumlah Layanan Administrasi Terfasilitasi</i>	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	Layanan	100	NA Layanan	7 Layanan	100
		<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi</i>	100	100 Persen	100 Persen	Persen	100	NA Persen	100 Persen	100
		<i>Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	42,330	NA Indeks	NA Indeks	Indeks	NA	42,614 Indeks	42,614 Indeks	100
		<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100	NA Persen	NA Persen	Persen	NA	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	4 Paket Belanja	4 Paket Belanja	4 Paket Belanja	Paket Belanja	100	NA Paket Belanja	4 Paket Belanja	100
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	16	NA Paket	NA Paket	Paket	NA	4 Paket	4 Paket	25
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	4 Paket Belanja	4 Paket Belanja	4 Paket Belanja	Paket Belanja	100	NA Paket Belanja	4 Paket Belanja	100
		<i>Jumlah Laptop terbeli</i>	1	1 Unit	1 Unit	Unit	100	NA Unit	1 Unit	100
		<i>Jumlah Kompute/PC terbeli</i>	0	0 Unit	0 Unit	Unit	0	NA Unit	0 Unit	0
		<i>Jumlah Printer terbeli</i>	1	0 Unit	1 Unit	Unit	100	NA Unit	0 Unit	0
		<i>Jumlah Filling Kabinet Terbeli</i>	4	0 Buah	1 Buah	Buah	100	NA Buah	0 Buah	0
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan</i>	16	NA Paket	NA Paket	Paket	NA	6 Paket	16 Paket	18,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perang Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perengkapan Kantor yang Disediakan								
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	4	4	4	4	100	NA	4	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	16	NA	NA	NA	NA	5	5	29,41
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (20 BKP, 20 Disposisi, 4 Amplop Berkop, 12 SPPD)	55	55	55	55	100	NA	55	100
		Jumlah lembar penggandaan	7200	7200	1200	1200	100	NA	1200	100
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	NA	NA	NA	NA	2	2	25
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (12 Bulan X 1 Rekening)	12	12	12	12	100	NA	12	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	992	NA	NA	NA	NA	248	248	25
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minum dan sneck untuk tamu yang terfasilitasi	275	275	75	275	100	NA	275	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	NA	NA	NA	NA	12	12	25
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat karyawan karyawan terfasilitasi	275	275	240	275	100	NA	275	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	14	0	14	14	100	NA	14	100
		Jumlah Laporan	48	NA	NA	NA	NA	12	12	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
X.XX.01.2.07.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi.	2	0	Layanan	Layanan	-	NA	0	Layanan	0
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100	100	Persen	Persen	100	NA	100	Persen	100
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	NA	Unit	Unit	NA	NA	0	Unit	0
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100	NA	Persen	Persen	NA	NA	100	Persen	100
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51	NA	Unit	Unit	0	NA	0	Unit	0
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah filling cabinet terbeli	1	0	Unit	Unit	0	NA	1	Unit	100
		Jumlah Webcam terbeli	2	0	Unit	Unit	0	NA	2	Unit	100
		Jumlah mic meja terbeli	2	0	Paket	Paket	0	NA	2	Paket	100
		Jumlah stand mic terbeli	2	0	Unit	Unit	0	NA	2	Unit	100
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	NA	Unit	Unit	NA	NA	1	Unit	33,33
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gorden yang terbeli	0	0	Meter	Meter	0	NA	0	Meter	0
		Jumlah Pintu Pagor Besi terbeli	0	0	Buah	Buah	0	NA	0	Buah	0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	82	NA	Unit	Unit	NA	NA	30	Unit	36,58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022				Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	NA	NA	Unit	NA	NA	0	Unit	0	Unit	0	0
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	Layanan	Layanan	100	100	3	Layanan	3	Layanan	100	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Tefasilitasi	100	100	Persen	Persen	100	100	100	Persen	100	Persen	100	100
		Jumlah Laporan, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	NA	NA	Laporan	NA	NA	12	Laporan	12	Laporan	27	27
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Tefasilitasi	100	NA	NA	Persen	NA	NA	100	Persen	100	Persen	100	100
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan terfasilitasinya tenaga pengadministrasian	247	12	Bulan	Hari	247	100	247	Hari	247	Hari	100	100
		Jumlah surat terkirim	1500	0	Surat	Surat	1500	100	1500	Surat	1500	Surat	100	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	NA	NA	Laporan	NA	NA	16	Laporan	16	Laporan	33	33
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telephon Dibayar (1 Rekening x 12 Bulan)	12	12	Rekening	Rekening	12	100	12	Rekening	12	Rekening	100	100
		Jumlah Air Dibayar (1 Rekening x 12 bulan)	12	12	Rekening	Rekening	12	100	12	Rekening	12	Rekening	100	100
		Jumlah Listrik Dibayar (1 Rekening x 12 Bulan)	12	12	Rekening	Rekening	12	100	12	Rekening	12	Rekening	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA	36 Laporan	36 Laporan	25
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Termin Jasa Kebersihan di Bayar (non thl)	12 Termin	0 Termin	12 Termin	12 Termin	100	NA Termin	12 Termin	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA	12 Laporan	12 Laporan	25
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	100	NA Layanan	4 Layanan	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	NA Persen	72,99 Persen	72,99
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784 Unit	NA Unit	NA Unit	NA Unit	NA	196 Unit	196 Unit	25
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	100 Persen	NA Persen	NA Persen	NA Persen	NA	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	NA Unit	1 Unit	100
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	4 Paket pemeliharaan	4 Paket pemeliharaan	4 Paket pemeliharaan	4 Paket pemeliharaan	100	NA Paket pemeliharaan	4 Paket pemeliharaan	100
		Jumlah motor dinas yang	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100	NA Unit	9 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	NA	Paket pemeliharaan	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		terbayarkan pajaknya									
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	36	36	36	Paket pemeliharaan	100	NA	36	Paket pemeliharaan	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	684	NA	NA	Unit	NA	171	171	Unit	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	4	4	4	Unit	100	NA	4	Unit	
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	7	7	7	Unit	100	NA	7	Unit	
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	7	7	7	Unit	100	NA	7	Unit	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	NA	NA	Unit	NA	18	18	Unit	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan gedung kantor	1	0	1	Paket Pemeliharaan	100	NA	1	Paket Pemeliharaan	
		Jumlah gedung kantor yang terfasilitasi keamanannya	365	366	365	Hari	100	NA	365	Hari	
		Jumlah Paket Pemeliharaan rumah dinas	1	0	1	Paket Pemeliharaan	100	NA	1	Paket Pemeliharaan	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	NA	NA	Unit	NA	3	3	Unit	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharannya	4	4	4	Unit	100	NA	4	Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	NA Unit	NA Unit	NA Unit	NA	4 Unit	4 Unit	25
X.XX.01.2.13.02	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen IKM, SOP, SPIP tersusun Persentase dokumen IKM tersusun	NA 100	4 100	4 100	4 100	100	NA Persen	4 100	100 100
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	NA Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah dokumen SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	NA Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	NA Dokumen	1 Dokumen	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Layanan	NA Layanan	NA Layanan	NA Layanan	NA	NA Layanan	0 Layanan	0
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	NA Persen	100 Persen	100
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA	2 Laporan	2 Laporan	100
		Persentase Koordinasi	100 Persen	NA Persen	NA Persen	NA Persen	NA	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan. Terlaksana.</i>								
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah kegiatan cabang olahraga yang diikuti dalam Porkab/Pordes</i>	4	4	4	4	100	NA	4	100
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	4	4	4	0	0	NA	0	0
		Jumlah partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	1	1	1	1	100	NA	1	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8	NA	NA	NA	NA	2	2	25
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Layanan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	2	2	2	2	100	NA	2	100
		<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Terlaksana.</i>	100	100	100	100	100	NA	100	100
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan</i>	8	NA	NA	NA	NA	2	2	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>								
		<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100	NA	NA	Persen	NA	100	Persen	100
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	100
		Jumlah layanan dropping air yang diterima masyarakat	420	Tengki	366	Tengki	100	NA	195	46,43
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100	NA	1	100
		Jumlah pelaksanaan pengadaan bansos	0	Kali	30	Kali	100	NA	0	0
		Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20	Laporan	NA	Laporan	NA	5	Laporan	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	1200	Layanan	1200	Layanan	100	NA	1200	100
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	36	Orang	36	Orang	100	NA	36	100
		Jumlah peserta sosialisasi	30	Orang	30	Orang	100	NA	30	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		pengurusan ijin UMK									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56	NA	Laporan	NA	Laporan	14	Laporan	25	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	Layanan	2	Layanan	100	NA	Layanan	100	
		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terfasilitasi	100	100	Persen	100	Persen	NA	Persen	100	
		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9,5	NA	Indeks	NA	Indeks	9,5	Indeks	100	
		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	NA	Persen	NA	Persen	100	Persen	100	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang	1	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	100	
		Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan RPKMDesa dan RKPDes	8	8	Kalurahan	8	Kalurahan	NA	Kalurahan	100	
		Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang meningkatkan kapasitasnya	8	8	Kalurahan	8	Kalurahan	NA	Kalurahan	100	
		Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Kalurahan Terselenggara (PIWK)	1	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	100	
7.01.	Sinkronisasi Program	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	72	NA	Dokumen	NA	Dokumen	18	Dokumen	25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
03.2.01.02	Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	0	1		100	NA	1				
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lomba Kalurahan	9	9	9	9	100	NA	9	9	9	100	
		Jumlah profil Kalurahan dan Kapanewon tersusun	1	0	1	1	100	NA	1	1	1	100	
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba Kalurahan tingkat kabupaten	44	NA	NA	NA	NA	11	11	11	11	25	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	2	2	100	NA	2	2	2	100	
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10	NA	NA	NA	NA	10	10	10	10	100	
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	NA	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	
7.01.	Peningkatan Kapasitas	Jumlah kesepakatan Forum	1	0	1	1	100	NA	1	1	1	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03.2.03.02	Lembaga Kemasyarakatan	anak	an	an	tan	tan		an	tan	
		Jumlah frekuensi rakor TP PKK	12	12	Kali	Kali	100	NA	12	Kali
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	52	NA	Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	NA	13	13	Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dokumen hasil money bidang pemberdayaan masyarakat	1	1	Dokumen	Dokumen	100	NA	1	Dokumen
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	1	0	Kelompok	Kelompok	100	NA	1	Kelompok
		<i>Jumlah kesepakatan koordinasi masa tanam, pembersihan, pemupukan, perkebunan, peternakan dan budidaya perikanan</i>	2	2	Kesepakatan	Kesepakatan	100	NA	2	Kesepakatan
		Jumlah pelaku industri kecil/rumah tangga yang meningkatkan pengetahuannya	20	20	Orang	Orang	100	NA	20	Orang
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16	NA	Laporan	Laporan	NA	4	4	Laporan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	Persen	Persen	100	100	100	Persen
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	1	1	Layanan	Layanan	100	NA	1	Layanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	100	Persentase	100
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	100
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	NA	NA	NA	NA	NA	Laporan	Laporan	2	Laporan	25
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksana	100	NA	NA	NA	NA	NA	Persentase	Persentase	100	Persentase	100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat Kapanewon	40	0	40	Orang	100	NA	Orang	Orang	40	Orang	100
		jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat Kapanewon	1	0	1	Kali	100	NA	Kali	Kali	1	Kali	20
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	NA	NA	NA	NA	NA	Laporan	Laporan	2	Laporan	25
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	1	1	Layanan	100	NA	Layanan	Layanan	1	Layanan	100
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terfasilitasi	100	100	100	Persentase	100	NA	Persentase	Persentase	100	Persentase	100
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	NA	NA	NA	NA	NA	Laporan	Laporan	1	Laporan	25
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	100	NA	NA	NA	NA	NA	Persentase	Persentase	100	Persentase	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	1 Kesepakat an	1 Kesepakat an	1 Kesepakat an	1 Kesepakat an	100	NA Kesepakat an	1 Kesepakat an	100	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA Laporan	NA	NA Laporan	1 Laporan	25	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	100	NA Layanan	2 Layanan	100	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	NA Persen	100 Persen	100	
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33,3 Indeks	NA Indeks	NA Indeks	NA Indeks	NA	33,3 Indeks	33,30 Indeks	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			100	Persentase	NA	Persentase	6	7	Tingkat Realisasi (%)	100	Persentase	100	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100	Persentase	NA	Persentase	NA	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah Kegiatan HUT yang terfasilitasi Pelaksanaannya	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	NA	Kegiatan	1	Kegiatan	100	100
		Jumlah pasuk Kapanewon yang dibentuk dan dilatih	75	Orang	73	Orang	100	NA	Orang	75	Orang	75	Orang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan P	300	Orang	NA	Orang	NA	75	Orang	NA	Orang	75	Orang
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan patroli terpadu bersama Forkompincam	12	Kali	12	Kali	100	NA	Kali	12	Kali	12	Kali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022				Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13	14	15
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100	100	100	100	100	100	Persen	100	100	Persen	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Layanan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9	Layanan	9	Layanan	100	9	Layanan	100	NA	Layanan	9	Layanan
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	NA	Persen	100	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	200	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	50	Dokumen	50	Dokumen
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	100	Persen	NA	Persen	NA	NA	Persen	NA	100	Persen	100	100
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan penyusunan produk hukum Kalurahan	1	Kali	1	Kali	100	1	Kali	100	NA	Kali	1	Kali
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	1	Dokumen	1	Dokumen
7.01.06.2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
01.02											
		Jumlah monografi kalurahan dan kapanewon yang tersusun	18	18	18	Dokumen	100	NA	18	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	72	NA	NA	Dokumen	NA	18	18	Dokumen	25
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APEKkal	8	8	8	Kali	100	NA	8	Kali	100
		Frekuensi movev pengelolaan keuangan kalurahan	8	8	8	Kali	100	NA	8	Kali	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	72	NA	NA	Dokumen	NA	18	18	Dokumen	25
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah koordinasi dengan Lurah dan Pamong lainnya	4	0	4	Kali	100	NA	4	Kali	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	NA	NA	Dokumen	NA	5	5	Dokumen	20
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD/BPK yang meningkatkan pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	30	30	30	Orang	100	NA	30	Orang	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi	4	NA	NA	Dokumen	NA	1	1	Dokumen	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	5	Rekomendasi	0	Rekomendasi	100	NA	5	Rekomendasi	5	Rekomendasi	100
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20	Dokumen	NA	Dokumen	NA	5	5	Dokumen	5	Dokumen	25
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	50	Orang	50	Orang	100	NA	50	Orang	50	Orang	100
		Jumlah koordinasi Mitigasi Bencana	1	Kali	1	Kali	100	NA	1	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	Dokumen	NA	Dokumen	NA	2	2	Dokumen	2	Dokumen	25
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	Persen	100	Persen	100	100	100	Persen	100	Persen	100
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Layanan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana	1	Layanan	1	Layanan	100	NA	1	Layanan	1	Layanan	100
		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	NA	100	Persen	100	Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	2												
		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	1	Laporan	2	Laporan
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	Persen	NA	Persen	NA	Persen	NA	100	Persen	100	Persen
2.22.0		Jumlah gelar budaya Jogja	1	Kali	0	Kali	1	Event	100	NA	Kali	1	Kali
8.2.09		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	NA	1	Laporan	1	Laporan
2.22.09													
.16													
4.01.04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen
4.01.04.5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1	Layanan	1	Layanan	1	Layanan	100	NA	Layanan	1	Layanan
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen
		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	8	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	2	Dokumen	2	Dokumen
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	100	Persen	NA	Persen	NA	Persen	NA	100	Persen	100	Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	8 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	25		
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan; Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurana Tahun 2024	1;2 Laporan; Dokumen	0 Laporan; Dokumen	1;2 Laporan; Dokumen	1;2 Laporan; Dokumen	100	NA Laporan; Dokumen	1;2 Laporan; Dokumen	100		

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Rongkop dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Kapanewon Rongkop				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14
1	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Persentase Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan Benar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Rongkop

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Rongkop merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugasnya Kapanewon mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan

Pemerintah Kapanewon Rongkop sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Rongkop. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kapanewon Rongkop dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Peluang (*Opportunities*)
 1. Regulasi yang jelas
 2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
 3. Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat Kalurahan cukup baik
 4. Situasi dan kondisi Kalurahan yang cukup kondusif, aman dan terkendali.
 5. Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat
- b. Ancaman (*Threat*)
 - 1) Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan.

- 2) Kondisi sosial masyarakat dan Kalurahan yang cukup beragam
- 3) Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti mekanisme pasar.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Rongkop dalam lima tahun yang akan datang, yaitu :

- a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal
- b. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
- c. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi
- d. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal
- e. Infrastruktur publik belum memadai dan belum merata
- f. Pelestarian budaya masih rendah.
- g. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kapanewon.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dirembug mulai dari tingkat desa, Kecamatan/Kapanewon, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kapanewon Rongkop berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kapanewon Rongkop dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 disajikan dalam tabel , sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	1.795.069.482	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	1.610.675.733	
3.1	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.290 Indeks	36.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.290 Indeks	32.974.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.755.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	605.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	575.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	23.998.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	25.158.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.065.000	
	Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.701.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	1.416.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.400.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88.578 Indeks 252 Orang	1.540.154.482 1.535.004.482	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88.578 Indeks 252 Orang	1.293.233.230 1.290.253.230	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	970.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	2.010.000	
3.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen 6 Dokumen	2.500.000 2.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen 6 Dokumen	7.450.000 7.450.000	
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40.755 Indeks 4 Paket	65.715.000 3.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40.755 Indeks 4 Paket	121.242.000 2.809.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	37.620.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	100.183.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	25.200.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.600.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.640.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan									
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.750.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.380.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.145.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6.130.000	
3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	24.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	4.000.000	
		Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	16.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	55.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	42.976.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.390.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.350.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	14.030.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	18.626.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.980.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	196 Unit	71.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	196 Unit	152.158.996	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	171 Unit	30.400.000	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Operasional, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	171 Unit	44.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	5.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	7.600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9.825.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	69.771.496	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	24.875.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	30.087.500	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	336.765.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	67.495.000	
4.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	8.400.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	5.930.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	8.400.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	5.930.000	
4.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19 Laporan	328.365.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19 Laporan	61.565.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	320.485.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	56.085.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	14 Laporan	7.880.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	14 Laporan	5.480.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
1	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rongkop, Semua Kelurahan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rongkop, Semua Kelurahan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100 Persen	60.262.650	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan terfasilitas	100 Persen	57.505.000	
5.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.5 Indeks	42.742.650	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.5 Indeks	43.805.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			18 Dokum	29.742.650	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 Dokumen	32.035.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			11 Laporan	13.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	11.700.000	
5.2	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan			10 Indeks	17.520.000	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	10 Indeks	13.700.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat			13 Lembaga Masyarakat	8.650.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Lembaga Masyarakat	7.250.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			4 Laporan	8.870.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	6.450.000	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100 Persen	10.800.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	11.345.000	
6.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			2 Laporan	9.800.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	11.345.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			0 Laporan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.000.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat			2 Laporan	9.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	10.345.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kelurahan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kelurahan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	0	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	42.550.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	76.215.000	
7.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.3 Indeks	42.550.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.3 Indeks	76.215.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	36.250.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	66.615.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	6.300.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	10.050.000	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kalurahan terlaksana	100 Persen	32.810.396	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kalurahan terlaksana	100 Persen	25.276.000	
8.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50 Dokumen	32.810.396	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50 Dokumen	25.276.000	
	Fasilitasi Penyusunan	Kab.	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	1 Dokumen	1.800.000	Fasilitasi Penyusunan	Kab.	Jumlah Dokumen yang	1 Dokumen	930.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
1	Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan		18 Dokumen	2.200.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	1.608.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan		18 Dokumen	13.750.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	16.084.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan		5 Dokumen	4.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	1.113.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan		1 Dokumen	2.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1.146.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan		5 Dokumen	4.200.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	1.628.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan		2 Dokumen	4.860.396	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum	2 Dokumen	2.767.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				150.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100 Persen	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana (%)	100 Persen	100.000.000	
7.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			2 Laporan	150.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	1 Laporan	100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan		1 Laporan	150.000.000	Gelar Budaya Jogja	(Kapanewon Rongkop, Rongkop)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1 Laporan	100.000.000	
	SEKRETARIAT DAERAH				25.970.000	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD											
No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 Persen	25.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN		Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dokumen)	100 Persen	35.000.000	
8.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	2 Dokumen	25.970.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dokumen)	4 Dokumen	35.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	25.970.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	(Kapanewon Rongkop, Rongkop)	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	4 Dokumen	35.000.000	
					2.454.227.528					2.050.170.726	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kapanewon Rongkop pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan Renstra Kapanewon Rongkop telah merencanakan lanjutan untuk merehabilitasi gedung kantor, sesuai hasil sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, pembangunan Gedung Kantor Kapanewon Rongkop sudah selesai terlaksana Tahun 2019. Sedangkan pada Tahun 2020 Pemerintah Kecamatan merencanakan untuk dapat dilaksanakan rehab berat Aula Kapanewon Rongkop yang mana saat ini kondisi dari bangunan tersebut juga perlu untuk disesuaikan dengan tata ruang kantor kecamatan sehingga dapat selaras, yang dalam pelaksanaannya kami serahkan kepada instansi teknis di tingkat kabupaten, namun belum terlaksana akibat Pandemi COVID-19, harapan kami dari Kapanewon Rongkop untuk tetap dilaksanakan Rehabilitasi pada tahun mendatang.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, Pokok-pokok Pikiran DPRD maupun hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kalurahan maupun Kapanewon.

Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut :

1. Pembahasan DURKP hasil usulan Musrenbangkal yang dilanjutkan di sidang kelompok pada kegiatan Musrenbang Kapanewon yang disusun menurut skala prioritas;
2. Hasil dari sidang masing-masing kelompok dilanjutkan pleno yang menghasilkan usulan yang disepakati dari masing-masing pemangku kepentingan yang diketahui Bappeda dan Instansi/OPD pelaksana Kegiatan.
3. Berita Acara Hasil Kesepakatan pada Pleno tersebut yang ditanda tangani perwakilan Kalurahan, BPD, LPMD dan Panewu.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. KAPANEWON RONGKOP	Kapanewon Rongkop	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. KAPANEWON RONGKOP	1 Kali	6.000.000	6.000.000	Dilanjutkan
2	(PIWK) - Pelatihan perencanaan pembangunan di desa. KAPANEWON RONGKOP	Kapanewon Rongkop	Pelatihan perencanaan pembangunan di desa. KAPANEWON RONGKOP	1 Kali	16.000.000	16.000.000	Dilanjutkan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang Kapanewon tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kapanewon. Sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Dari peraturan-peraturan yang ada tersebut, jelas bahwa Panewu atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai perangkat daerah kabupaten.

Kapanewon Rongkop sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Untuk memperjelas arah pembangunan daerah pada setiap tahun, tahapan perencanaan dalam RPJMD Tahun 2012-2026 juga dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (road map) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026. Sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antara dokumen perencanaan, dilakukan dengan penyelarasan dengan tema dan prioritas nasional maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2024 Kapanewon Rongkop juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan

merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Kalurahan. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Rongkop

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan tema dan prioritas pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah tahun 2022.

Dalam merumuskan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 juga memperhatikan Tema pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dan juga memperhatikan Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2022 “*Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY*”.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	2	3	4		5
1.	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata Kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	1.Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 2. Meningkatnya Akuntabilitas PD	1.Indeks Pelayanan Kapanewon 2.Nilai AKIP PD
2.	Peningkatan ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan

Hubungan antara tujuan perangkat daerah dengan sasaran perangkat daerah yang akan datang dapat disajikan dalam tabel 3.2 dan table 3.3 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Pembangunan Kapanewon Rongkop

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1	2	3	4
	Tujuan :		
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	82.47
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	10 Potensi Budaya

Tabel 3.3
Sasaran Pembangunan Kapanewon Rongkop

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1	2	3	4
	Sasaran :		
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	82.47
2.	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	80,10 ; A
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	10 Potensi Budaya

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Rongkop

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	2	3	4
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	82.47

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Rongkop meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Kapanewon Rongkop dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan Kalurahan. Program dan kegiatan tersebut juga mengacu pada Renstra Kapanewon Rongkop tahun 2022-2026, yang juga disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Kapanewon sebagaimana disepakati dalam forum gabungan SKPD Kapanewon.

Renja Kapanewon Rongkop tahun 2024 terdiri dari 3 Urusan 8 Program 16 Kegiatan dan mencakup 45 Sub kegiatan. Dari program-program tersebut, merupakan program yang menysasar pada internal SKPD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, dan program yang ditujukan bagi masyarakat dan Kalurahan di wilayah Kapanewon Rongkop.

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp1.801.670.730,00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp2.362.587.861,64. Seluruhnya bersumber pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul serta dari Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Jumlah Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kapanewon Rongkop tahun 2024 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab	
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,10 ; A Indeks	7			UNSUR KEWILAYAHAN			
					7	01		KECAMATAN ADMINISTRASI	1.666.670.730		
					7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.497.557.730		
					7	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.134.500		
					7	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.290.000		Kapanewon Rongkop
					7	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	287.000		Kapanewon Rongkop
					7	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	235.000		Kapanewon Rongkop
					7	01	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.282.500		Kapanewon Rongkop
					7	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	520.000		Kapanewon Rongkop
					7	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	820.000		Kapanewon Rongkop
					7	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	700.000		Kapanewon Rongkop
					7	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.291.428.230		Kapanewon Rongkop
					7	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.290.253.230		Kapanewon Rongkop
					7	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	355.000		Kapanewon Rongkop
					7	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	820.000		Kapanewon Rongkop
7	01	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.450.000		Kapanewon Rongkop					
7	01	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.450.000		Kapanewon Rongkop					
7	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.981.000		Kapanewon Rongkop					
7	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.756.000		Kapanewon Rongkop					
7	01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.400.000		Kapanewon Rongkop					

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					7	01	01	01			
					7	01	01	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.200.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.145.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.280.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000	
					7	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.976.500	
					7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.350.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.626.500	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.587.500	
					7	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.700.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.887.500	Kapanewon Rongkop
					7	01	01	2.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.360.000	
					7	01	02		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.110.000	
					7	01	02	2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	3.110.000	Kapanewon Rongkop

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
									Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
					7	01	02	2.02		55.250.000	
					7	01	02	2.02	02	52.680.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	02	2.02	03	2.570.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	03			24.350.000	
					7	01	03	2.01		17.770.000	
					7	01	03	2.01	02	8.500.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	03	2.01	03	9.270.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	03	2.03		6.580.000	
					7	01	03	2.03	02	4.805.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	03	2.03	04	1.775.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	04			3.565.000	
					7	01	04	2.01		3.565.000	
					7	01	04	2.01	01	720.000	
					7	01	04	2.01	02	2.485.000	Kapanewon Rongkop
					7	01	05			68.535.000	
					7	01	05	2.01		68.535.000	
					7	01	05	2.01	01	62.165.000	Kapanewon Rongkop

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					7	01	05	2.01			
					7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Rongkop
					7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kapanewon Rongkop
					7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kapanewon Rongkop
					7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Rongkop
					7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Rongkop
					7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Kapanewon Rongkop
					7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Rongkop
					7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Rongkop
					7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Rongkop
					7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Rongkop
Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	10 Potensi Budaya	2	22				100.000.000,00	Kapanewon Rongkop
					2	22				100.000.000,00	Kapanewon Rongkop
					2	22	08			100.000.000,00	Kapanewon Rongkop
					2	22	08	5.07		100.000.000	Kapanewon Rongkop
					2	22	08	5.07	00	100.000.000,00	Kapanewon Rongkop
					4				06		Kapanewon Rongkop
					4	01				35.000.000,00	Kapanewon Rongkop
					4	01	04			35.000.000,00	Kapanewon Rongkop
					4	01	04			35.000.000,00	Kapanewon Rongkop
					4	01	04	5.06		35.000.000	Kapanewon Rongkop
					4	01	04	5.06	00	35.000.000,00	Kapanewon Rongkop
									01		

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, di Kapanewon Rongkop dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif 2024 (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif Maju 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.497.557.730	1.911.567.617,64
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.134.500	14.801.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.291.428.230	1.634.004.621
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.450.000	5.850.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.981.000	64.345.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000	24.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.976.500	36.920.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.587.500	131.646.496,64

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp1.497.557.730,00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp1.911.567.617,64. Seluruhnya bersumber pada APBD Kabupaten Gunungkidul.

Program dan kegiatan Kapanewon Rongkop yang direncanakan melalui Renja Kapanewon Rongkop Tahun 2024 dan rencana maju di tahun 2025 secara rinci dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan/Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					100.000.000,00				150.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				150.000.000,00
2	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		100	100.000.000,00				150.000.000,00
2	08	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	(Kapanewon Rongkop, Rongkop)	1	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		1	150.000.000
2	08	Gelar Budaya Jogja	(Kapanewon Rongkop, Rongkop)	1	100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		1	150.000.000
4					35.000.000,00				25.970.000,00
4	01	SEKRETARIAT DAERAH			35.000.000,00				25.970.000,00
4	01	04		100	35.000.000,00				25.970.000,00
4	01	04		4	35.000.000	Dana Keistimewaan DIY		2	25.970.000
4	01	04		4	35.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		2	25.970.000
7					1.666.670.730				2.186.617.861,64
7	1	KECAMATAN ADMINISTRASI			1.666.670.730				2.186.617.861,64
7	1	1		100 persen	1.497.557.730			100 persen	1.911.567.617,64
7	1	1		4,290 indeks	28.134.500			4,290 indeks	14.081.500
7	1	1		3 dokumen	1.290.000			2 dokumen	4.300.000

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
7	1	1	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	1 dokumen	605.000	1.300.000	1	dokumen	
7	1	1	3	3	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	1 dokumen	575.000	1.200.000	1	dokumen	
7	1	1	4	4	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	2 dokumen	24.282.500	25.158.000	2	dokumen	
7	1	1	5	5	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	2 dokumen	520.000	1.900.000	2	dokumen	
7	1	1	6	6	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	17 dokumen	820.000	3.301.500	17	dokumen	
7	1	1	7	7	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	4 laporan	700.000	2.800.000	4	laporan	
7	1	1	2.02	2.02	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		88,578 indeks	1.293.233.230	1.634.004.621	88,578	indeks	
7	1	1	2.02	2.02	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	252 orang/bulan	1.290.253.230	1.628.554.621	252	orang/bulan	
7	1	1	2.02	2.02	5	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	1 laporan	355.000	1.450.000	1	laporan	
7	1	1	2.02	2.02	7	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	13 laporan	820.000	4.000.000	13	laporan	
7	1	1	2.05	2.05	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6 dokumen	7.450.000	5.850.000	6	dokumen	
7	1	1	2.05	2.05	3	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	6 dokumen	7.450.000	5.850.000	6	dokumen	
7	1	1	2.06	2.06	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah		40,755 indeks	58.981.000	63.345.000	40,75	indeks	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7 1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	4 paket	1.756.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	3.500.000
7 1 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	6 paket	23.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	36.420.000
7 1 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	4 paket	25.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	2.500.000
7 1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	2 paket	5.145.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket	7.200.000
7 1 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	248 dokumen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	248 dokumen	1.200.000
7 1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	12 laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	1.380.000
7 1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	12 laporan	2.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	12.145.000
7 1 1	2.07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	1 unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 unit	24.000.000
7 1 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	1 unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 unit	24.000.000
7 1 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	60 laporan	42.976.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 laporan	36.920.000
7 1 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	12 laporan	24.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	21.390.000
7 1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	36 laporan	18.626.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 laporan	15.530.000
7 1 1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	196 unit	64.567.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	196 unit	131.646.496
7 1 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	4	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	171 unit	32.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	171 unit	30.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7 1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	9 unit	3.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 unit	6.600.000	
7 1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 unit	69.771.496,64	
7 1 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	1 unit	28.887.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 unit	24.875.000	
7 1 2	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana		100 persen	67.495.000			100 persen	93.670.000	
7 1 2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 laporan	3.110.000		2 laporan	8.400.000	
7 1 2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	2 laporan	3.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 laporan	8.400.000	
7 1 2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		19 laporan	55.250.000		19 laporan	85.270.000	
7 1 2	2.02	2	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	6 laporan	52.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 laporan	77.390.000	
7 1 2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	14 laporan	2.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 laporan	7.880.000	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi		100 persen	24.350.000			100 persen	80.250.244	
7 1 3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		9,5 indeks	17.770.000		9,5 indeks	62.730.244	
7 1 3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	10 dokumen	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 dokumen	48.780.244	
7 1 3	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	10 laporan	9.270.000	Dana Transfer	11 laporan	13.950.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 3	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rongkop, Semua Kelurahan	10 indeks	6.580.000	Umum-Dana Alokasi Umum		10 indeks	17.520.000
7 1 3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	13 lembaga kemasyarakatan	4.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 lembaga kemasyarakatan	8.650.000
7 1 3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	1 laporan	1.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	8.870.000
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi		100 persen	3.565.000			100 persen	22.400.000
7 1 4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		2 laporan	3.565.000			2 laporan	22.400.000
7 1 4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	1 laporan	720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	11.800.000
7 1 4	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	2 laporan	2.845.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	10.600.000
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi		100 persen	68.535.000			100 persen	49.850.000
7 1 5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		33,33 indeks	68.535.000			28,30 indeks	49.850.000
7 1 5	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	75 orang	62.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 orang	43.550.000
7 1 5	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	12 dokumen	6.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	6.300.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	4	100 persen	14.303.000			100 persen	28.880.000
7 1 6	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		50 dokumen	14.303.000			50 dokumen	28.880.000
7 1 6	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	1 dokumen	930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.800.000
7 1 6	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	18 dokumen	283.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 dokumen	2.400.000
7 1 6	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	22 dokumen	11.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 dokumen	14.300.000
7 1 6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	2 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen	1.113.000
7 1 6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	1 dokumen	230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	2.000.000
7 1 6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	5 dokumen	990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen	4.500.000
7 1 6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	2 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	2.767.000
TOTAL					2.050.170.726				2.316.931.365

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Rongkop Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Rongkop Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kapanewon Rongkop disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Rongkop yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Bab penutup Rencana Kerja Kapanewon Rongkop Tahun 2024 mencakup tiga bahasan, yaitu:

5.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Rongkop telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholder*), tetap harus dikedepankan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Rongkop sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 yang akan datang.

Wonosari,
KAPANEWON RONGKOP,

ESI SUHARTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON SEMANU
TAHUN 2024
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

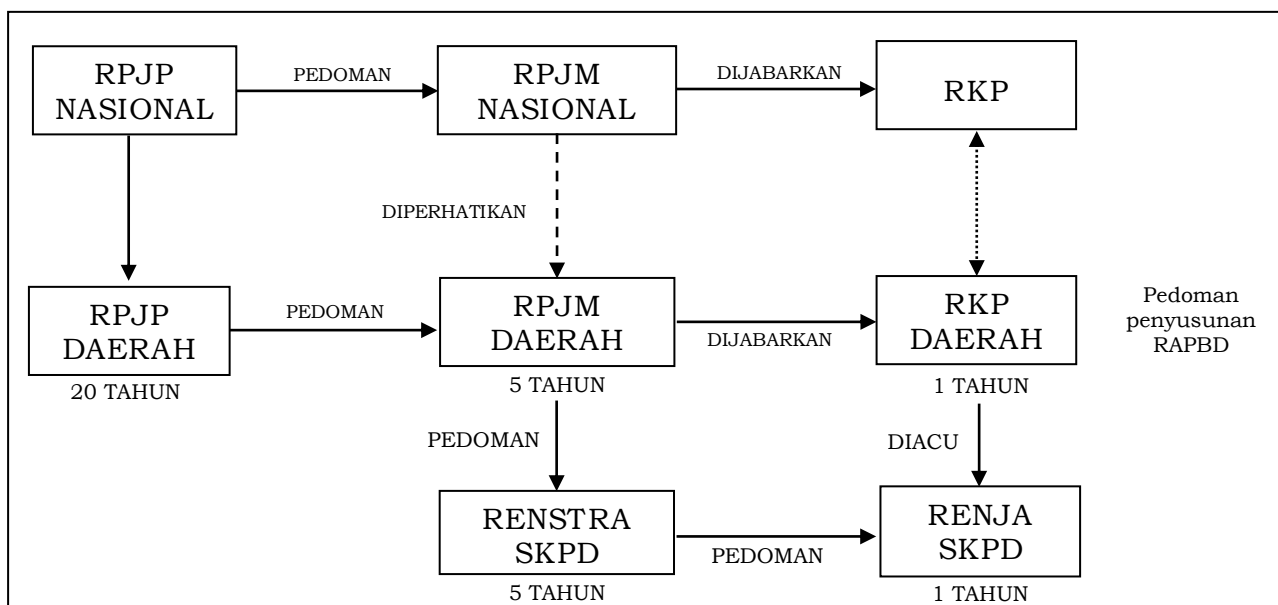
Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya antara lain :

1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja

maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya yang disesuaikan dengan Program Prioritas PD.

2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan Perangkat Daerah Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :



Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semanu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kapanewon Semanu adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kapanewon Semanu adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON SEMANU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Semanu dan Capaian Renstra Kapanewon Semanu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Semanu
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Semanu
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON SEMANU

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Semanu

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON SEMANU

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KAPANEWON SEMANU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Semanu dan Capaian Renstra Kapanewon Semanu

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Semanu Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2024 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Semanu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau Tahun 2023.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Semanu atau realisasi APBD untuk Kapanewon Semanu yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
Pada Perangkat Daerah Kapanewon Semanu dalam pelaksanaan Renja 2022 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, dengan kata lain target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan terpenuhi.
2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
Pada Perangkat Daerah Kapanewon Semanu dalam pelaksanaan Renja 2022 program dan kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 yang sudah memenuhi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;
Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Semanu pada Tahun 2022 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang direncanakan dalam Renja Tahun 2022.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2022.
 - a. Dalam rangka efisiensi waktu sebagian kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain.
 - b. Dalam rangka efisiensi anggaran sebagian kegiatan menggunakan anggaran dari Pemerintah Kalurahan.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2023;
 - a. Adanya kesinkronan kegiatan yang dianggarkan perangkat daerah Kapanewon Semanu dengan agenda kegiatan yang diselenggarakan perangkat daerah di tingkat Kabupaten.
 - b. Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - c. Sumber Daya Manusia yang ada di perangkat daerah Kapanewon Semanu yang kurang.
 - d. Kenaikan harga BBM yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan lainnya.
 - e. Rasionalisasi Anggaran tahun 2023 untuk memenuhi alokasi belanja wajib/mengikat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
 - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.

- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon.
- c. Melaksanakan efisiensi anggaran tahun 2023 sesuai ketentuan/intruksi.

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Semanu dan pencapaian Renstra Kapanewon Semanu s/d Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Semanu dan
Pencapaian Renstra Kapanewon Semanu s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul**

Perangkat Daerah : Kapanewon Semanu

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun	26	26	26	Dokumen	26	Dokumen	26	Dokumen	26	Dokumen
		Persentase Dokumen Perencanaan Tersusun Tepat Waktu	100	100	100	Persen	100	Persen	100	Persen	96,08	Persen
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,576	NA	NA	Indek	NA	Indek	4,147	Indek	4,147	Indek
		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100	NA	NA	Persen	NA	Persen	100	Persen	100	Persen
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
		Jumlah dokumen Renja perubahan	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
		Jumlah dokumen draft Renstra	0	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen
		Jumlah dokumen Renstra	0	1	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan	4	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
												25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1	1	1	1	100	NA	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4	NA	Dokumen	NA	NA	1	1	Dokumen	25
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	1	1	1	100	NA	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	1	1	1	100	NA	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen ROPK	1	1	1	1	100	NA	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	12	NA	Dokumen	NA	NA	2	3	Dokumen	25
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1	1	1	1	100	NA	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1	1	1	1	100	NA	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	8	NA	Dokumen	NA	NA	2	2	Dokumen	25
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	NA	Laporan	NA	NA	17	17	Laporan	25
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP	1	1	1	1	100	NA	1	Dokumen	100
		Jumlah laporan e Money	4	4	Dokumen	4	100	NA	4	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Teppra	12	12	Dokumen	12	100	NA	12	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	16	NA	Laporan	NA	NA	32	4	Laporan	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	NA	14	14	14	100	NA	12	100	
		Jumlah Laporan Keuangan Tersusun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	100	NA	Dokumen	100	
		Persentase Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu	Persen	Persen	Persen	Persen	100	NA	Persen	100	
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88,578	NA	Indek	Indek	NA	88,578	Indek	100	
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	NA	Persen	Persen	NA	100	Persen	100	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	14	Bulan	Bulan	100	NA	14	100	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008	NA	Orang/bulan	Orang/bulan	NA	252	Orang/bulan	25	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	1	Dokumen	Dokumen	100	NA	1	100	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	NA	Laporan	Laporan	NA	1	Laporan	25	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	12	12	Dokumen	Dokumen	100	NA	12	100	
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	1	Dokumen	Dokumen	100	NA	1	100	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	NA	Laporan	Laporan	NA	13	Laporan	25	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NA	1	Layanan	Layanan	100	NA	1	100	
		Tolok Ukur Target Persentase	100	100	Persen	Persen	100	NA	100	100	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terfasilitasi										
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24	NA	NA	Dokumen	NA	6	Dokumen	6	Dokumen	25
		Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terselesaikan	100	NA	NA	Persen	NA	100	Persen	100	Persen	100
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	18	18	Orang	Orang	15	Orang	Orang	15	Orang	83,33
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	NA	Dokumen	Dokumen	NA	6	Dokumen	6	Dokumen	25
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi	7	7	Layanan	Layanan	7	NA	Layanan	7	Layanan	100
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi	100	100	Persen	Persen	100	NA	Persen	100	Persen	100
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	42,330	NA	Indeks	Indeks	NA	42,185	Indeks	42,185	Indeks	100
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	NA	Persen	Persen	NA	100	Persen	100	Persen	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	4	4	Paket Belanja	Paket Belanja	5	NA	Paket Belanja	4	Paket Belanja	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	NA	Paket	Paket	NA	4	Paket	4	Paket	25
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	4	4	Paket Belanja	Paket Belanja	4	NA	Paket Belanja	4	Paket Belanja	100
		Jumlah Laptop terbeli	1	1	Unit	Unit	1	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Komputer/PC terbeli	0	0	Unit	Unit	0	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Printer terbeli	1	0	Unit	Unit	0	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah mesin ketik terbeli	0	0	Unit	Unit	0	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Filling Kabinet Terbeli	4	0	Buah	Buah	0	NA	Buah	0	Buah	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022				Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan				
			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2																
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	8=(7/6)	7	6	6	Paket	10=(5+7+9)	11=(10/4)	18,75
		Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	100		4	4	4	Paket Belanja			100
		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Set	0	Set	0	Set	-		0	0	0	Set			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA		NA	5	5	Paket			29,41
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (20 BKP, 20 Disposisi, 4 Amplop Berkop, 12 SPPD)	54	Bendel	56	Bendel	56	Bendel	100		56	56	54	Bendel			100
		Jumlah lembar penggandaan	9000	Lembar	9000	Lembar	9000	Lembar	100		9000	9000	9.000	Lembar			100
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA		NA	8	8	Paket			25
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (12 Bulan X 1 Rekening)	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	100		12	12	12	Rekening			100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	992	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA		NA	248	248	Dokumen			25
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minum dan snack untuk tamu yang terfasilitasi	75	Orang	75	Orang	75	Orang	100		75	75	75	Orang			100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA		NA	12	12	Laporan			25
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat karyawan karyawan terfasilitasi	240	Orang	240	Orang	240	Orang	100		240	240	240	Orang			100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12	Kali	0	Kali	0	Kali	100		12	12	12	Kali			100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA		NA	12	12	Laporan			25
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	100	Layanan	0	Layanan	0	Layanan	-		0	0	0	Layanan			0
		Persentase Pengadaan Barang Milik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100		100	100	100	Persen			100

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana								
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73	NA	NA	Unit	NA	Unit	0	Unit
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100	NA	Persen		NA	Persen	100	Persen
X.XX.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Almari Buku Arsip Dinamis Terbeli	0	0	Buah		0	Buah	0	Buah
.2.07.05		Jumlah rak Arsip terbeli	0	0	Buah		0	Buah	0	Buah
		Jumlah kursi tamu eksklusif terbeli	0	0	Set		0	Set	0	Set
		Jumlah Rak Almari Arsip Kaca Terbeli	0	0	Buah		0	Buah	0	Buah
		Jumlah Meja 1 Biro Terbeli	0	0	Buah		0	Buah	0	Buah
		Jumlah Meja Pimping	0	0	Buah		0	Buah	0	Buah
		Jumlah Almari Arsip Besi terbeli	0	0	Buah		0	Buah	0	Buah
		Jumlah Kursi Kerja Putar Terbeli	0	0	Buah		0	Buah	0	Buah
		Jumlah kursi tamu Sekretariat terbeli	0	0	Set		0	Set	0	Set
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	NA	Unit		NA	Unit	25	Unit
X.XX.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah TV LED terbeli	0	0	Unit		0	Unit	0	Unit
.2.07.06		Jumlah Wireless Speaker terbeli	0	0	Unit		0	Unit	0	Unit
		Jumlah sound system ruang rapat	0	0	Paket		0	Paket	0	Paket
		Jumlah Pemotong Rumpul terbeli	0	0	Unit		0	Unit	0	Unit
		Jumlah genset terbeli	0	0	Unit		0	Unit	0	Unit
		Jumlah LCD Proyektor yang terbeli	1	0	Unit		0	Unit	0	Unit
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	NA	Unit		NA	Unit	5	Unit
X.XX.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terbeli	0	0	Unit		0	Unit	0	Unit
.2.07.10		Jumlah gorden yang terbeli	0	0	Meter		0	Meter	0	Meter
		Jumlah Lantai Conblock	0	0	Meter		0	Meter	0	Meter

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022						Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
			persegi Buah	persegi Buah	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	
			Buah	Buah	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	
			Meter Persegi	Meter Persegi	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	
			Unit	Unit	8	NA	NA	NA	NA	5	Unit	62,50		
X.XX.01.2.07.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Unit	0	0	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	Layanan	3	Layanan	100	NA	3	Layanan	100	100	
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	100	100	Persen	100	Persen	100	NA	100	Persen	100	100	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	64	64	Laporan	27		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	100	NA	Persen	NA	Persen	NA	100	100	Persen	100	100	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan terfasilitasinya tenaga pengadministrasian	12	12	Bulan	12	Bulan	100	NA	9	Bulan	75		
		Jumlah surat terkirim	600	0	Surat	600	Surat	100	NA	450	Surat	75		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	16	16	Laporan	33		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telephon Dibayar (1 Rekening x 12 Bulan)	12	12	Rekening	12	Rekening	100	NA	12	Rekening	100		
		Jumlah Air Dibayar (1 Rekening x 12	12	12	Rekening	12	Rekening	100	NA	12	Rekening	100		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		bulan)									
		Jumlah Listrik Dibayar (1 Rekening x 12 Bulan)	12	12	Rekening	12	Rekening	100	12	Rekening	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	36	Laporan	25
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Termin Jasa Kebersihan di Bayar (non thi)	12	0	Termin	12	Termin	100	12	Termin	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	12	Laporan	25
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	4	4	Layanan	4	Layanan	100	4	Layanan	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	100	100	Persen	100	Persen	100	72,99	Persen	72,99
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865	NA	Unit	NA	Unit	NA	185	Unit	20,90
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	NA	Persen	NA	Persen	NA	100	Persen	100
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	1	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	100
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	4	4	Paket pemeliharaan	4	Paket pemeliharaan	100	4	Paket pemeliharaan	100
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan	7	7	Unit	7	Unit	100	7	Unit	100

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		pajaknya											
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	28	Paket pemeliharaan	28	Paket pemeliharaan	100	Paket pemeliharaan	28	Paket pemeliharaan	100	Paket pemeliharaan	100
X.XX.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	544	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	25
X.XX.01 .2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan Mebel	0	Paket pemeliharaan	0	Paket pemeliharaan	0	Paket pemeliharaan	0	Paket pemeliharaan	0	Paket pemeliharaan	0
X.XX.01 .2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	20	Unit	125
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	7	Unit	7	Unit	100	Unit	7	Unit	NA	Unit	100
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	Unit	2	Unit	100	Unit	2	Unit	NA	Unit	100
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	6	Unit	6	Unit	100	Unit	6	Unit	NA	Unit	100
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	7	Unit	7	Unit	100	Unit	7	Unit	NA	Unit	100
		Jumlah LCD Proyektor Terfasilitasi Pemeliharaannya	2	Unit	3	Unit	100	Unit	2	Unit	NA	Unit	100
		Jumlah BBM Genset yang tersedia	0	Liter	0	Liter	0	Liter	0	Liter	NA	Liter	0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	20	Unit	25,25
X.XX.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan gedung kantor eternit/platop	10	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	100	Paket Pemeliharaan	2	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	20
		Jumlah gedung kantor yang terfasilitasi keamanannya	365	Hari	366	Hari	100	Hari	365	Hari	NA	Hari	100
		Jumlah Paket Pemeliharaan rehap Gedung Ruang Kerja Kator	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Paket Pemeliharaan Rehap Gedung untuk ruang rapat	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	0	NA	Paket Pemeliharaan 0	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Rehap saluran air hujan	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	0	NA	Paket Pemeliharaan 0	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Terlaksananya rehap Gudang Kator untuk Ruang Arsip	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	0	NA	Paket Pemeliharaan 0	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Rehap Bangunan WC/Toilet Kantor	Paket Pemeliharaan 1	Paket Pemeliharaan 1	Paket Pemeliharaan 1	Paket Pemeliharaan 1	100	NA	Paket Pemeliharaan 1	100
		Jumlah Paket Pemeliharaan Rehap Bangunan Mushola Kantor	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	0	NA	Paket Pemeliharaan 0	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Pengecatan Tembok Dinding Kantor	Paket Pemeliharaan 1	Paket Pemeliharaan 1	Paket Pemeliharaan 1	Paket Pemeliharaan 1	100	NA	Paket Pemeliharaan 1	100
		Jumlah Paket Pemeliharaan Rehap Pagar /Pintu Gerbang Kantor	Paket Pemeliharaan 1	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 1	Paket Pemeliharaan 1	100	NA	Paket Pemeliharaan 0	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Bangunan Tempat Sampah (L 2M X P 3M X T 1M)	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	Paket Pemeliharaan 0	0	NA	Paket Pemeliharaan 0	0
		Jumlah Pintu Gerbang Pagar Bumi Terpelihara	Set 0	Set 0	Set 0	Set 0	0	NA	Set 0	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Bangunan Tempat Sampah (L 2M X P 3M X T 1M)	Buah 0	Buah 0	Buah 0	Buah 0	0	NA	Buah 0	0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit 6	Unit NA	Unit NA	Unit NA	NA	1	Unit 1	16,67
X.XX.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharaannya	Unit 8	Unit 8	Unit 8	Unit 8	100	NA	Unit 8	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32	NA	Unit	NA	Unit	8	Unit	8	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	0	
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen IKM, SOP, SPIP tersusun	NA	4	Dokumen	4	Dokumen	100	Dokumen	4	
X.XX.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase dokumen IKM tersusun	100	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	
		Jumlah dokumen SKM	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100	Dokumen	2	
		Jumlah dokumen SOP	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	1	
		Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	1	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	0	
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksana	100	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	21	
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksana	100	NA	Persen	NA	Persen	NA	Persen	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	NA	Cabor	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pembinaan Cabor yang Diikuti Dalam PORKAB	4	4	4	4	100	NA	4	100	
		Jumlah kesepakatan pelestarian pengembangan budaya	1	1	Kesepakatan	100		Kesepakatan	1	100	
		Jumlah Event festival kesenian tingkat Kaparewon yang terselenggara	1	0	Event	100		NA	1	100	
		Jumlah kelompok Kesenian yang dibentuk dan dipentaskan untuk Hari Jadi dan Peringatan HUT	0	0	Kelompok	0		NA	0	0	
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	1	0	Kesepakatan	100		NA	1	100	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20	NA	Laporan	NA		5	5	25	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2	2	Layanan	100		NA	2	100	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksana	100	100	Persen	100		NA	100	100	
		Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	2	2	Layanan	100		NA	2	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		Daerah yang ada di Kecamatan										
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksana	100	100	100	100	100	NA	Persen	51,66	Persen	51,66
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88	NA	NA	Laporan	NA	NA	Laporan	22	Laporan	25
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	NA	NA	Persen	NA	NA	Persen	100	Persen	100
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan forum Kalurahan siaga	1	0	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan forum Kapanewon sehat	1	1	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	1	1	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	1	1	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah dokumen hasil money bidang kesejahteraan sosial	1	1	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat	70	70	40	Tengki	100	NA	Tengki	40	Tengki	57,14
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	1	1	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	0	0	0	Kali	0	NA	Kali	0	Kali	0
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jmban sehat (PIWK)	82	93	82	KK	100	NA	KK	82	KK	100
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan	11	0	11	KK	100	NA	KK	11	KK	100

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penampungan Air Hujan								
		Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	32	NA	NA	Laporan	NA	8	Laporan	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	8000	8000	Layanan	Layanan	100	NA	Layanan	100
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	25	25	Orang	Orang	100	NA	Orang	100
		Jumlah peserta sosialisasi/pengurusan ijin UMK	25	0	Orang	Orang	100	NA	Orang	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56	NA	NA	Laporan	NA	13	Laporan	25
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100	100	Persen	Persen	100	100	Persen	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	2	Layanan	Layanan	100	NA	Layanan	100
		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terfasilitasi	100	100	Persen	Persen	100	NA	Persen	100
		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9,5	NA	Indeks	Indeks	NA	9,5	Indeks	100
		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	NA	Persen	Persen	NA	100	Persen	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen usulan rencana kegiatan (DURP)/Musrenbang	1	1	Dokumen	Dokumen	100	NA	Dokumen	100
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi	5	5	Kalurahan	Kalurahan	100	NA	Kalurahan	100

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		penyusunan RP JMKal dan RPKKal									
		Evaluasi Penyusunan RPKKal	5	5	5	5	100	NA	5	100	
		Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Kalurahan Terselenggara (PIWK)	1	1	1	1	100	NA	1	100	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	44	NA	NA	Dokumen	NA	11	11	Dokumen	25
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perlombaan Kalurahan tingkat Kapanewon	1	0	1	Kali	100	NA	1	Kali	100
		Jumlah Dokumen profil Kalurahan dan Kapanewon tersusun	6	6	6	Dokumen	100	NA	6	Dokumen	100
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba Kalurahan tingkat kabupaten	1	0	1	Kali	100	NA	1	Kali	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32	NA	NA	Laporan	NA	8	8	Laporan	25
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Layanan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2	2	2	Layanan	100	NA	2	Layanan	100
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terfasilitasi	100	100	100	Persen	100	NA	85,28	Persen	85,28
		Jumlah Layanan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2	2	2	Layanan	100	NA	2	Layanan	100
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terfasilitasi	100	100	100	Persen	100	NA	100	Persen	100
		Indeks Pemberdayaan Lembaga	10	NA	NA	Indeks	NA	10	10	Indeks	100

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>								
		<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	100	NA	NA	Persen	NA	100	Persen	100
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan Posdaya Pasangan Usia Subur	1	0	1	Kesepakatan	1	NA	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan Forum anak	1	0	1	Kesepakatan	1	NA	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan penanganan pencegahan pernikahan usia anak	1	0	1	Kesepakatan	1	NA	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	12	12	12	Kali	12	NA	Kali	100
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	1	1	1	Kesepakatan	1	NA	Kesepakatan	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	64	NA	NA	Lembaga Kemasyarakatan	NA	16	Lembaga Kemasyarakatan	25
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1	1	1	Dokumen	1	NA	Dokumen	100
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	5	0	5	Kelompok	5	NA	Kelompok	100
		Jumlah kesepakatan koordinasi Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1	1	1	Kesepakatan	1	NA	Kesepakatan	100
		Pelaku industri kecil/rumah tangga yang meningkatkan pengetahuannya	20	20	20	Orang	20	NA	Orang	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16	NA	NA	Laporan	NA	4	Laporan	25
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100	Persen	100	100	Persen	100
7.01.04.	Koordinasi Upaya	Jumlah Layanan Koordinasi Upaya	1	1	1	Layanan	1	NA	Layanan	100

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum								
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Terfasilitasi	100	100	100	100	100	NA	100	100
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	8	NA	NA	Laporan	NA	4	Laporan	50
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Terfasilitasi	100	NA	NA	Persen	NA	100	Persen	100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat Kapanewon	5	0	1	Kali	100	NA	1	20
		Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat Kapanewon	25	0	5	Kali	100	NA	5	20
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	NA	NA	Laporan	NA	2	Laporan	25
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	1	1	Layanan	100	NA	1	100
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terfasilitasi	100	100	100	Persen	100	NA	100	100
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8	NA	NA	Laporan	NA	2	Laporan	25
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	NA	NA	Persen	NA	100	Persen	100
7.01.04.	Koordinasi/Sinergi Dengan	Jumlah penyakit masyarakat yang	1	1	1	Kesepakatan	100	NA	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.02.01	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	terpetakan (PIWK)	n	n	an	an	8=(7/6)	n	an	11=(10/4)	
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengetahuan Tentang Bahaya Narkoba	1	1	1	1	100	NA	1	100	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	1	1	1	100	NA	1	100	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terfasilitasi	100	100	100	100	100	NA	100	100	
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33,3	NA	NA	NA	NA	33,3	33,30	100	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	NA	NA	NA	NA	100	100	100	
7.01.05.	Pembinaan Wawasan	Jumlah Kegiatan HUT yang terfasilitasi	1	1	1	1	100	NA	1	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.01.01	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Pelaksanaannya									
		Jumlah paskib Kapanewon yang dibentuk dan dilatih	75	6	75	Orang	100	NA	75	Orang	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan P	300	NA	NA	Orang	NA	75	75	Orang	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kesepakatan penanganan perempuan dan anak korban KDRT	0	0	0	Kesepakatan	0	NA	0	Kesepakatan	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	NA	NA	Laporan	NA	1	1	Laporan	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Koordinasi FORKOMPIMKAB	12	12	12	Kesepakatan	100	NA	12	Kesepakatan	
		Jumlah Pelaksanaan patroli bersama	12	12	12	Kali	100	NA	12	Kali	
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	96	NA	NA	Dokumen	NA	24	24	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022				Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Layanan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9	Layanan	9	Layanan	100	Layanan	9	Layanan	NA	Layanan	9	Layanan
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	196	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	100	Persen	NA	Persen	NA	Persen	NA	Persen	100	Persen	100	Persen
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan penyusunan produk hukum Kalurahan	1	Kali	1	Kali	100	Kali	1	Kali	NA	Kali	1	Kali
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi bidang pemerintahan	1	Kali	0	Kali	100	Kali	1	Kali	NA	Kali	1	Kali
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	2	Kali	1	Kali	100	Kali	2	Kali	NA	Kali	2	Kali
		Jumlah monografi kalurahan yang tersusun	10	Dokumen	10	Dokumen	100	Dokumen	10	Dokumen	NA	Dokumen	10	Dokumen

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022				Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah monografi kapanewon yang tersusun	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	13	Dokumen	13	Dokumen
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali
		Frekuensi monev pengelolaan keuangan kalurahan	10	Kali	0	Kali	10	Kali	10	Kali	10	Kali	10	Kali
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset kalurahan yang terlaksana	1	Kali	0	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali
		Jumlah Kesepakatan hasil Rakor Pelestarian Aset- aset program Pembertayaan masyarakat Kalurahan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan
		Monitoring Pengendalian dan Evaluasi APBKal	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan
		Jumlah Kalurahan yang dapat menyusun Siklus tahunan Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan
		Jumlah Kalurahan yang menyelenggarakan penataan administrasi pertanian dan tanah kas Kalurahan	25	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan
		Jumlah Dokumen Administrasi pertanian dan tanah kas desa	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	84	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	21	Dokumen	21	Dokumen
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah koordinasi dengan Lurah dan Pamong lainnya	1	Kali	0	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	11=(10/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah Orang (Pamong Kalurahan) yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	30	Orang	0	Orang	30	Orang	100	NA	Orang	30	Orang	100
		Jumlah Kalurahan Yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah	0	Kalurahan	0	Kalurahan	0	Kalurahan	0	NA	Kalurahan	0	Kalurahan	0
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	2	Dokumen	2	Dokumen	20
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Orang (BAMUSKAL) yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	54	Orang	54	Orang	54	Orang	100	NA	Orang	54	Orang	100
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	1	Dokumen	1	Dokumen	25
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi kalurahan yang menyelenggarakan pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	6	Rekomendasi	0	Rekomendasi	6	Rekomendasi	100	NA	Rekomendasi	6	Rekomendasi	100
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	6	Dokumen	6	Dokumen	25
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterterapan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Orang (anggota linmas) yang diharapkan meningkat pengetahuannya	80	Orang	80	Orang	80	Orang	100	NA	Orang	80	Orang	100
		Jumlah Kesepakatan koordinasi Mitigasi dan pencegahan Bencana	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	11=(10/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	8	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	25
7.01.06.2.01.14	Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah koordinasi fasilitas kerjasama antar Kelurahan	1	1	Kali	2	100	NA	2	Kali	2	Kali	200
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	25
7.01.06.2.01.15	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah kesepakatan koordinasi tataruang kalurahan	1	1	Kesepakatan	1	100	NA	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	25
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Layanan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana	1	1	Layanan	1	100	NA	1	Layanan	1	Layanan	100
		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana	100	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100
		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2	NA	Laporan	NA	NA	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	NA	Persen	NA	NA	Persen	100	Persen	100	Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	NA	Kali	10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah gelar budaya Jogja	1 Kali	0 Kali	1 Even	1 Event	100	NA	1 Kali	100	
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	NA	1 Laporan	1 Laporan	25	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Layanan Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	NA	1 Layanan	100	
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	NA	100 Persen	100	
		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	8 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	25	
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	100 Persen	NA Persen	NA Persen	NA Persen	NA	100 Persen	100 Persen	100	
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	8 Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	25	
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan; Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurana Tahun 2024	1,2 Laporan; Dokumen	0 Laporan; Dokumen	1,2 Laporan; Dokumen	1,2 Laporan; Dokumen	100	NA	1,2 Laporan; Dokumen	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Semanu

Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Semanu dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Semanu
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Targat/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Kapanewon Semanu				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14
1	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Persentase Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan Benar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Semanu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kapanewon, Panewu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Peningkatan insfrastruktur sarana dan prasarana dalam rangka penunjang wisata;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat / Sumber Daya Manusia;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
6. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
7. Peningkatan Kesejahteraan sosoal.

Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan. Selain itu juga diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan serta Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sudah baik dengan dibuktikan dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai baik. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kapanewon dan Kalurahan
3. Masih rendahnya sumber daya manusia Pamong Kalurahan
4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat dalam masalah peraturan perundangan.
5. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal
6. Angka kemiskinan masih perlu ditangani serius
7. Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan belum seluruhnya berjalan dengan efektif
8. Implementasi kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal

Maka dari itu fungsi alokasi belanja daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini masyarakat Kapanewon Semanu yang tidak dapat disediakan sendiri oleh masyarakat. Selain itu belanja daerah juga dapat dialokasikan dalam kerangka investasi. Investasi yang dilakukan harus pada sektor-sektor prioritas yang dimiliki daerah sehingga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan akhirnya dapat memperbaiki pendapatan masyarakat. Sektor prioritas yang dimaksud adalah sektor yang mampu memberikan nilai tambah dan *output* yang cukup tinggi bagi perekonomian serta dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selain untuk investasi, belanja daerah juga diharapkan dapat dialokasikan pada hal-hal yang dapat mendorong kinerja sektor riil, seperti misalnya perbaikan sistem pelayanan,

infrastruktur, pelatihan keterampilan tenaga kerja, penyediaan dana stimulan, pemberian modal usaha, dan bantuan teknis.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia Pamong Kalurahan belum merata.
2. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil yang ditempatkan di Kecamatan.
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang masih kurang karena keterbatasan anggaran.
4. Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai kompetensi dibidang Akuntansi
5. Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin tinggi
6. Kurangnya SDM yang berkompeten
7. Terbatasnya anggaran dan SDM

Sebelum menentukan isu-isu strategis, lebih dahulu akan disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan SKPD.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Melenium Development Goals).

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah *"Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026"*.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yang meliputi :

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
- b. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2023 juga memperhatikan Arah Kebijakan Nasional dan DIY sebagai berikut:

- a. Arah Kebijakan Nasional
 - 10 destinasi pariwisata prioritas
 - Industry 4.0 di 6 sub sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi, dan alat kesehatan
 - Pembangunan science techno park
 - Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting
 - Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh/MP Perlinsos
 - Transformasi digital
- b. Arah Kebijakan Provinsi
 - Mengatasi ketimpangan wilayah
 - Mengatasi ketimpangan pendapatan
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah

“Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi;
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Semanu adalah Reformasi Birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat serta prioritas peningkatan ekonomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.

Mendasar tugas pokok Kapanewon Semanu, fungsi yang diemban oleh Kapanewon Semanu adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

- Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Tugas dan fungsi Kapanewon Semanu terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Semanu dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan publik.

Pemerintah Kapanewon Semanu sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Semanu. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kapanewon Semanu dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Regulasi yang jelas
- 2) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
- 3) Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat Kalurahan cukup baik
- 4) Situasi dan kondisi Kalurahan yang cukup kondusif, aman dan terkendali.
- 5) Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat

b. Ancaman (*Threat*)

- 1) Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan.
- 2) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- 3) Kondisi sosial masyarakat dan Kalurahan yang cukup beragam
- 4) Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti mekanisme pasar.
- 5) Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat,

gesekan/konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Semanu dalam lima tahun yang akan datang, yaitu :

- a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal
- b. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
- c. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi
- d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal
- e. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal
- f. Infrastruktur publik belum memadai dan belum merata
- g. Pelestarian budaya masih rendah.
- h. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan.

2.4 *Reviuw* terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dimusyawarahkan mulai dari tingkat Kelurahan, Kapanewon, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran, terutama saat ini masih masa pemulihan akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ketersediaan anggaran terutama pengadaan barang atau belanja modal harus di pangkas, yang mengakibatkan program kegiatan pada rancangan awal di Kapanewon Semanu tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kapanewon Semanu berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kapanewon Semanu dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.4, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu ndikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	2.554.610.840	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100	1.418.757.971
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,576 Indeks	62.315.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)	4,576	32.941.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	36.230.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	29.132.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1.915.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	370.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.915.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	370.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	5.560.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	324.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.395.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	324.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	7.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	1.615.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	806.000

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu ndikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.578 Indeks	1.768.888.840	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	88.578	1.200.770.471	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bu	1.755.483.840	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	1.197.325.471	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	785.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	10.055.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	2.660.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.950.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	6	220.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	4.950.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	220.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.328 Indeks	106.695.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	42.328	29.211.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3.100.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	75.350.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	13.551.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	3.800.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	6.215.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	4.860.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	248 Dokumen	1.380.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	0	0	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu ndikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	undangan	Semanu, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Perundang- Undangan yang Disediakan			undangan	Semanu)	Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koord	12 Laporan	12.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	2.400.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29 Unit	127.140.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	29	0	
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	53.600.000	Pengadaan Mebel	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.840.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	61.700.000						
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	109.310.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	60	109.765.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	23.680.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	49.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	45.120.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.350.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	40.965.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177 Unit	375.312.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	177	45.850.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	136 Unit	35.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	119	39.300.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu ndikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	9.800.000	Pemeliharaan Mebel	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	16.682.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13	5.350.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	98.680.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	1.200.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	206.000.000							
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	111.807.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)	100	25.000.000		
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Laporan	47.900.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	5	310.000		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	47.900.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	310.000		
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	22 Laporan	63.907.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	22	24.690.000		
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Kab. Gunungkidul,	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	8 Laporan	41.757.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	(Kapanewon Semanu,	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	2	21.060.000		

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu ndikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian
	Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Semanu, Semua Kelurahan	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Semanu	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	22.150.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	3.630.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	76.220.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)	100	13.545.000
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9,5 Indeks	42.340.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Indeks)	9,5	8.625.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 Dokumen	10.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6	2.545.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	32.340.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	6.080.000
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10 Indeks	33.880.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Indeks)	10	4.920.000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Lembaga Kemasyarakatan	18.200.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	(Kapanewon Semanu, Kec. Semanu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	12	3.090.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	15.680.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1.830.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	23.535.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)	100	3.550.000
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	23.535.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	2	3.550.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	2 Laporan	10.140.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	0	0

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu ndikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian
	Vertikal di Wilayah Kecamatan		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Wilayah Kecamatan		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	13.395.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	3.550.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	73.035.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)	100	59.035.000
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.3 Indeks	73.035.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)	33,3	59.035.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	59.985.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	47.005.000
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	2.800.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	10.250.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12.030.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	87.371.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)	100	2.105.000
6.1	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49 Dokumen	87.371.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	49	2.105.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	2 Dokumen	3.680.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	0	0

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu ndikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian
			dan Peraturan Kepala Desa					dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	12.150.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	38.921.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	1.795.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3 Dokumen	6.380.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	4.700.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6 Dokumen	3.900.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	0
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	13.340.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	310.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	2.750.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	0	0
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	1 Dokumen	1.550.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa (Dokumen)	0	0
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta	100 Persen	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	100	100.000.000

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu ndikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.1	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		urusan kebudayaan	2 Laporan	150.000.000	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana (%)	1	100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	150.000.000	Gelar Budaya Jogja	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	100.000.000	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 Persen	25.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dokumen)	100	35.000.000	
8.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	2 Dokumen	25.970.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dokumen)	4	35.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	25.970.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	(Kapanewon Semanu, Semanu)	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	4	35.000.000	
					3.102.548.840					1.656.992.971	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kapanewon Semanu pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan Renstra Kapanewon Semanu telah merencanakan lanjutan untuk merehabilitasi gedung kantor, sesuai hasil sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, pembangunan Gedung Kantor Kapanewon Semanu sudah selesai terlaksana Tahun 2019. Sedangkan pada Tahun 2020 Pemerintah Kecamatan merencanakan untuk dapat dilaksanakan rehab berat Aula Kapanewon Semanu yang mana saat ini kondisi dari bangunan tersebut juga perlu untuk disesuaikan dengan tata ruang kantor kecamatan sehingga dapat selaras, yang dalam pelaksanaannya kami serahkan kepada instansi teknis di tingkat kabupaten, namun belum terlaksana akibat Pandemi COVID-19, harapan kami dari Kapanewon Semanu untuk tetap dilaksanakan Rehabilitasi pada tahun mendatang.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, Pokok-pokok Pikiran DPRD maupun hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kalurahan maupun Kapanewon.

Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut :

1. Pembahasan DURKP hasil usulan Musrenbangkal yang dilanjutkan di siding kelompok pada kegiatan Musrenbang Kapanewon yang disusun menurut skala prioritas;
2. Hasil dari siding masing-masing kelompok dilanjutkan pleno yang menghasilkan usulan yang disepakati dari masing-masing pemangku kepentingan yang diketahui Bappeda dan Instansi/OPD pelaksana Kegiatan.
3. Berita Acara Hasil Kesepakatan pada Pleno tersebut yang ditandatangani perwakilan Kalurahan, BPD, LPMD dan Panewu.

BAB III TUJUAN, SASARAN, KAPANEWON SEMANU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Dari peraturan-peraturan yang ada tersebut, jelas bahwa Panewu atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai perangkat daerah kabupaten.

Kapanewon Semanu sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Untuk memperjelas arah pembangunan daerah pada setiap tahun, tahapan perencanaan dalam RPJMD Tahun 2012-2026 juga dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (road map) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026. Sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antara dokumen perencanaan, dilakukan dengan penyelarasan dengan tema dan prioritas nasional maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2024 Kapanewon Semanu juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Kalurahan. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Semanu

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan tema dan prioritas pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah tahun 2022.

Dalam merumuskan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 juga memperhatikan Tema pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dan juga memperhatikan Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2022 “Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY”.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	2	3	4		5
1.	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata Kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	1.Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 2. Meningkatnya Akuntabilitas PD	1.Indeks Pelayanan Kapanewon 2.Nilai AKIP PD
2.	Peningkatan ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan

Hubungan antara tujuan perangkat daerah dengan sasaran perangkat daerah yang akan datang dapat disajikan dalam tabel 3.2 dan table 3.3 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Pembangunan Kapanewon Semanu

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1	2	3	4
	Tujuan :		
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	82.8
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	8 Potensi Budaya

Tabel 3.3

Sasaran Pembangunan Kapanewon Semanu

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1	2	3	4
	Sasaran :		
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	82.8
2.	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	82,50 ; A
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	8 Potensi Budaya

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Semanu

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	2	3	4
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	82.8

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semanu meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kapanewon Semanu dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan Kalurahan. Program dan kegiatan tersebut juga mengacu pada Renstra Kapanewon Semanu tahun 2022-2026, yang juga disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Kapanewon sebagaimana disepakati dalam forum gabungan SKPD Kapanewon.

Renja Kapanewon Semanu tahun 2024 terdiri dari 3 Urusan 8 Program 16 Kegiatan dan mencakup 53 Sub kegiatan. Dari program-program tersebut, merupakan program yang menasar pada internal SKPD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, dan program yang ditujukan bagi masyarakat dan Kalurahan di wilayah Kapanewon Semanu.

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 1.656.992.971,00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp3.118.599.817,00. Seluruhnya bersumber pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul serta dari Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Jumlah Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kapanewon Semanu tahun 2024 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
 Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
 Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	82,50 ; A Indeks	7			
					7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI	1.521.992.971	
					7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.418.757.971	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.941.500	
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.132.500	Kapanewon Semanu
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	370.000	Kapanewon Semanu
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	370.000	Kapanewon Semanu
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	324.000	Kapanewon Semanu
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	324.000	Kapanewon Semanu
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.615.000	Kapanewon Semanu
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	806.000	Kapanewon Semanu
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.200.770.471	
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.197.325.471	Kapanewon Semanu
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	785.000	Kapanewon Semanu
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.660.000	Kapanewon Semanu
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.000	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	220.000	Kapanewon Semanu					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.211.000						
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.100.000	Kapanewon Semanu					
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.551.000	Kapanewon Semanu					
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.800.000	Kapanewon Semanu					

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.860.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.400.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.765.000	
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.680.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.120.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.965.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.850.000	
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.300.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.350.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.200.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000	
			Indeks Pelayanan Kapaneuwon	82,8 Indeks	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	310.000	
			Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapaneuwon Meningkat		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	310.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	24.690.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
						Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
					7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	21.060.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.630.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.545.000	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.625.000	
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2.545.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.080.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.920.000	
					7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.090.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.830.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.550.000	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.550.000	
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.550.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59.035.000	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	59.035.000	
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	47.005.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.05.2.01.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	12.030.000	Kapaneuwon

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
					0008	Kecamatan		Semanu
					7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.105.000	
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.105.000	
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.795.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	310.000	Kapaneuwon Semanu
					7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0	Kapaneuwon Semanu
					7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	Kapaneuwon Semanu
					2		100.000.000	
Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	8 Potensi Budaya	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	100.000.000	
					2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	Kapaneuwon Semanu
					4		35.000.000	
					4.01	SEKRETARIAT DAERAH	35.000.000	
					4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
					4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	
					4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	Kapaneuwon Semanu
						J U M L A H	1.656.992.971	

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, di Kapanewon Semanu dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif 2024 (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif Maju 2025 (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.418.757.971	2.526.786.817
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.941.500	64.915.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.132.500	37.030.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	370.000	2.015.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	370.000	2.015.000
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	324.000	6.160.000
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	324.000	3.795.000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.615.000	8.300.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	806.000	5.600.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.200.770.471	1.884.194.817
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.197.325.471	1.870.689.817
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	785.000	3.450.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.660.000	10.055.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.000	5.000.000
3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	220.000	5.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.211.000	112.725.000
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.100.000	5.600.000
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.551.000	80.900.000
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.800.000	5.120.000
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.860.000	6.315.000
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	1.440.000
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	750.000
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.400.000	12.600.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	69.590.000
5.1	Pengadaan Mebel	0	26.090.000
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	43.500.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.765.000	110.550.000
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.680.000	21.600.000
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.120.000	51.000.000
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.965.000	37.950.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.850.000	279.812.000
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.300.000	36.850.000
7.2	Pemeliharaan Mebel	0	10.500.000
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.350.000	19.082.000
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	203.680.000
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.200.000	9.700.000

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp1.418.757.971,00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp2.526.786.817,00. Seluruhnya bersumber pada APBD Kabupaten Gunungkidul.

Program dan kegiatan Kapanewon Semanu yang direncanakan melalui Renja Kapanewon Semanu Tahun 2024 dan rencana maju di tahun 2025 secara rinci dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 (Rp)	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					100.000.000				150.000.000
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000				150.000.000
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana (%)		100	100.000.000			100	150.000.000
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	(Kapanewon Semanu, Semanu)	1	100.000.000			1	150.000.000
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	(Kapanewon Semanu, Semanu)	1	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		1	150.000.000
4					35.000.000				25.970.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000				25.970.000
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)		100	35.000.000			100	25.970.000
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dokumen)	(Kapanewon Semanu, Semanu)	4	35.000.000			2	25.970.000
4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	(Kapanewon Semanu, Semanu)	4	35.000.000	Dana Keistimewaan DIY		2	25.970.000
7					1.521.992.971				2.942.629.817

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 (Rp)	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.521.992.971				2.942.629.817
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	1.418.757.971			100	2.526.786.817
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	4,576	32.941.500			4,57	64.915.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	3	29.132.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	37.030.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	1	370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	2.015.000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	1	370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	2.015.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	2	324.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	6.160.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	2	324.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	3.795.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	17	1.615.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17	8.300.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	4	806.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	5.600.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	88,578	1.200.770.471			88,578	1.884.194.817
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	252	1.197.325.471	Dana Transfer		252	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 (Rp)
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	Semenu, Semenu)					1.870.689.817
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	1	785.000		1	3.450.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	13	2.660.000		13	10.055.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	6	220.000		6	5.000.000
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	6	220.000		6	5.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	42,328	29.211.000		42,33	112.725.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	4	3.100.000		4	5.600.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	4	13.551.000		8,00	80.900.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	4	3.800.000		4	5.120.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	8	4.860.000		8	6.315.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0		248,00	1.440.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	12	1.500.000		12	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 (Rp)	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
		(Laporan)	Semenu, Semenu)				Umum-Dana Alokasi Umum		750.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	12	2.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	12.600.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	29	0			7	69.590.000
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26,00	26.090.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,00	43.500.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	60	109.765.000			60	110.550.000
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	4	23.680.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12,00	21.600.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	36	45.120.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36	51.000.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	12	40.965.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	37.950.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	177	45.850.000			180	279.812.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan (Unit)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	119	39.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	136	36.850.000
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	(Kapaneuwon Semenu, Semenu)	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4,00	10.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 (Rp)	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	13	5.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24	24	19.082.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	3	203.680.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	4	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8	8	9.700.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)		100	25.000.000		100	100	137.257.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	5	310.000		5	5	50.350.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	1	310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5	5	50.350.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	22	24.690.000		22	22	86.907.000
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	2	21.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8	8	63.357.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	13	3.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14	14	23.550.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)		100	13.545.000		100	100	80.510.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Indeks)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	9,5	8.625.000		9,5	9,5	44.690.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 (Rp)	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	6	2.545.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11,00	10.700.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	8	6.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8	33.990.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Tingkat Kecamatan (Indeks)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	10	4.920.000			10	35.820.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu, Kec. Semanu)	12	3.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16	18.550.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	1	1.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	17.270.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)		100	3.550.000			100	25.235.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	2	3.550.000			2	25.235.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	10.940.000
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	1	3.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	14.295.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)		100	59.035.000			100	83.120.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	33,3	59.035.000			33,3	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 (Rp)
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
1	2 Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)	4 Semanu, Semanu)	5 75	6 47.005.000	7 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 9	10 83.120.000
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	75	47.005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75	69.320.000
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,00	3.150.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	12	12.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24	10.650.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)		100	2.105.000		100	89.721.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	49	2.105.000		49	89.721.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	3.950.000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13	12.900.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	5	1.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21	40.251.000
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	4.850.000
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 (Rp)	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(Dokumen)	Semanu)			Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	4.800.000
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	4.300.000
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	1	310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	14.150.000
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	2.870.000
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa (Dokumen)	(Kapaneuwon Semanu, Semanu)	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	1.650.000
J U M L A H					1.656.992.971				3.118.599.817

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Renja Kapanewon Semanu Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Daerah. Renja Kapanewon Semanu disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Renja Kapanewon Semanu yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD. Renja Kapanewon Semanu Tahun 2024 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Renja Kapanewon Semanu telah dan akan selalu melibatkan peran (*stakeholder*) atau pemangku kepentingan. Pelibatan (*stakeholder*) dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

2. Kaidah pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

3. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Kapanewon Semanu Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,

Plh. KAPANEWON SEMANU,

IRWAN TRIWIBOWO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
KAPANEWON PONJONG
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

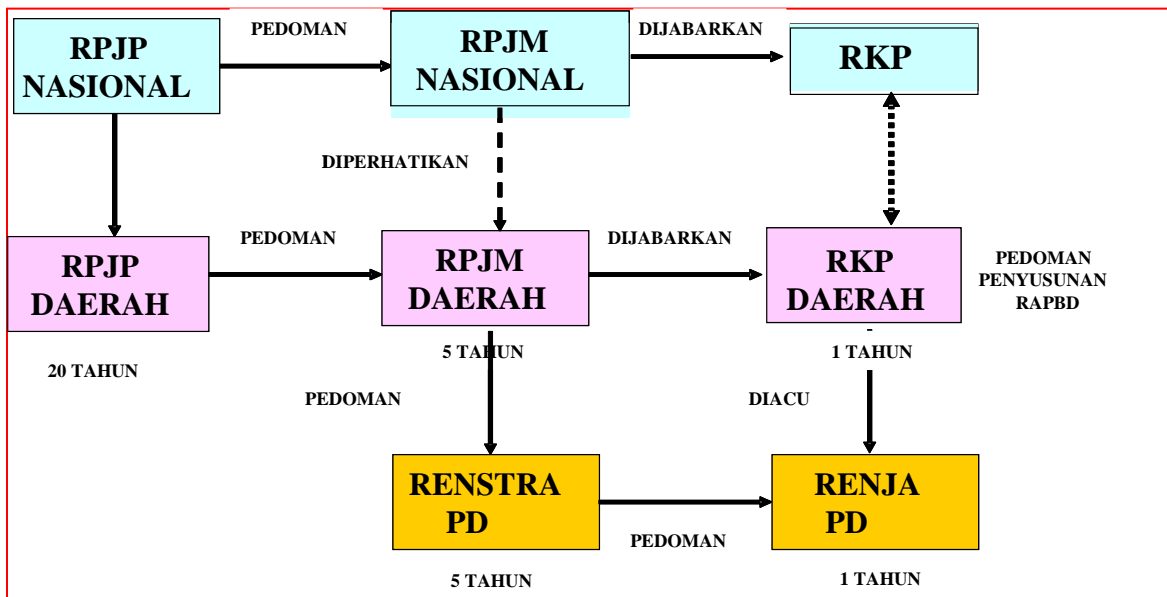
1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan adanya penyempurnaan dalam sistem perencanaan nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1(satu) tahun. Rencana Kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam Periode RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :



Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Ponjong memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Ponjong serta kerangka pendanaan daerah, Renja PD kapanewon secara substansial sesuai dengan visi dan misi serta rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten dan tindak lanjut dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana KerjaKecamatan/Kapanewon Ponjong tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventaris Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul nomor 900.1.2.2/04391 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitas Rencana Kerja Permerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kapanewon Ponjong adalah untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu di tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja kapanewon ini adalah:

1. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kapanewon;
2. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kapanewon Ponjong tahun 2024 adalah:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON PONJONG
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kapanewon Ponjong
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Ponjong
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Ponjong
 - 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON PONJONG
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Ponjong

- BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON PONJONG

- BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KAPANEWON PONJONG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Ponjong dan Capaian Renstra Kapanewon Ponjong

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Ponjong Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2023 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Ponjong berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan dan tahun 2022. Rencana Kerja Kapanewon Ponjong tahun 2023 sesuai dengan DPA nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023 teranggarkan Rp 2.513.932.336,00, terdiri dari 8 program 16 kegiatan dan 41 subkegiatan. Terdiri dari belanja operasi Rp 2.443.382.336,00 dan belanja modal Rp 70.550.000,00.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Ponjong atau realisasi APBD untuk Kapanewon Ponjong yang disampaikan melalui E-Monev. Kapanewon Ponjong telah mencapai 93,78 % untuk realisasi keuangannya, dan 99,97 % untuk realisasi kinerjanya. Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan IV tahun 2022. Terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN (%)
1	2	4	5	7
1.	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	136.250.000,00	136.250.000,00	100,00%
2.	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	25.970.000,00	25.965.500,00	99,98%
3.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.053.859.013,00	1.926.146.758,00	93,78%
4.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	565.505.000,00	564.650.500,00	99,85%
5.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	464.214.300,00	463.269.300,00	99,80%
6.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%
7.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00%
8.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	146.170.000,00	146.170.000,00	100,00%
JUMLAH		3.450.968.313,00	3.321.452.058,00	93,78 %

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah program

- penunjang urusan pemerintah daerah. Hal ini karena ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai diantaranya penyediaan gaji ASN karena ada yang pensiun, penyediaan listrik, air dan telpon yang anggaran lebih karenaantisipasi kenaikan tagihan.
2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah 7 dari 8 kegiatan di Kapanewon sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
 3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan adalah tidak ada.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 adalah efisiensi anggaran untuk penanganan kasus stunting.
 5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2023 adalah:
 - a. Munculnya kebijakan/regulasi setelah program kegiatan dan target ditetapkan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan agenda/jadwal dari Kabupaten.
 - c. Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut adalah:
 - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Ponjong sampai dengan triwulan IV Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Ponjong dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul**

Perangkat Daerah : Kapanewon Ponjong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Sub Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.08.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 persen							
2.22.08.2.09	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan kegiatan adat seni tradisi dan lembaga budaya terlaksana								
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan gelar budaya Jogja	5 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	40%
4.	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
			100 %	4 persen		5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
1	2	3										
4.01.04.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN <i>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</i>	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan <i>Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</i>										
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	10 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	dokumen	4 dokumen		40%
7.	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah/kota terlaksana <i>Indeks perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %									
7.01.01.2.01.	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	dokumen	6 dokumen		60%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	5	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	3 dokumen		60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		penyusunan dokumen RKA-SKPD								
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5	1	1	Dokumen	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	10	2	2	dokumen	100%	2	6	60%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	10	2	2	dokumen	100%	2	6	60%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	85	17	17	laporan	100%	17	51	60%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20	4	4	laporan	100%	4	12	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks administrasi keuangan perangkat daerah								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan 840	orang/bulan 168	orang/bulan 168	orang/bulan 168	100%	168	168 orang/bulan	20%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1	3 laporan	60%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	65 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	13	39 laporan	60%
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah								
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen 30	dokumen 6	6 dokumen	6 dokumen	100%	6	18 dokumen	60%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks administrasi umum perangkat daerah								

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerapan bangunan kantor yang disediakan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35	7	7	7	100%	7	21	60%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	30	6	6	6	100%	6	18	60%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75	15	15	15	100%	15	45	60%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1240	248	248	248	100%	248	744	60%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	300	60	60	60	100%	60	180	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana								
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	320 unit	64 unit	64 unit	64 unit	100%	64 unit	192 unit	60%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	125 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100%	25 unit	75 unit	60%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	60%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit	60%
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 %							
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Sub Kegiatan (Output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah instansi vertikal terkait	25 laporan	4 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	14 laporan	56%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	45 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	100%	9 laporan	27 laporan	60%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65 laporan	12 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	38 laporan	58%
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEJURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 %							
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program Kapanewon Ponjong Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.01.01	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	65 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	13 dokumen	39 dokumen	60%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	39 laporan	60%
7.01.03.2.03.03.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
7.01.03.2.03.04	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100%	2 lembaga	6 lembaga	60%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	15 laporan	60%
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 %							
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Indeks Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	60%
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %							
7.01.05.2.01.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelestarian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	375 orang	75 orang	75 orang	75 orang	100%	75 orang	225 orang	60%
7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	15 dokumen	60%
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 %							
7.01.06.2.01.	Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2023)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan	
			120	Dokumen		Target Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	120	Dokumen	24	Dokumen	100%	24	Dokumen	72	Dokumen	60%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15	dokumen	2	dokumen	100%	3	dokumen	8	Dokumen	53%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	60%
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	5	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Ponjong

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan/ Kapanewon digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan/Kapanewon Ponjong serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dinyatakan bahwa tugas pokok Kapanewon adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi yang harus diemban oleh pemerintah Kapanewon mencakup bidang pemerintah umum dan pemerintah desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang pembangunan masyarakat dan desa, bidang kesejahteraan sosial. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh seksi melalui program / kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi dalam setiap tahun anggaran.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Ponjong berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%. Adapun formula indikator kinerja utama adalah:

- Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu.
- Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu.
- Persentase KK miskin yang tertangani.
- Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum.
- Persentase nilai indeks kepuasan masyarakat.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Ponjong dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON PONJONG
TERHADAP RENSTRA PD TAHUN 2021 - 2026
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM,IKK)	Target Renstra Kapanewon Ponjong					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Indikator IKU	Satuan IKU	90.72	91.2	91.5	91.7	91,49	82,96	91.5	91.7		Tahun 2021 penetapan IKU berdasarkan Persentase desa yang menetapkan RKPdes dan APBDes tepat waktu	

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Ponjong

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ponjong maka diperlukan tentang potret Kapanewon Ponjong saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ponjong adalah sebagai berikut :

2.3.1 Permasalahan dan hambatan

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ponjong maka diperlukan data gambaran kondisi dan saat ini. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ponjong adalah sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi

1. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap pelestarian Budaya;
2. Keberadaan kebudayaan yang ada di masyarakat masih bersifat kedaerahan;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari budaya pesta;
4. Belum tepatnya pemanfaatan teknologi/medsos bagi generasi muda;
5. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan didalam masyarakat;

b. Permasalahan

1. Masih rendahnya minat generasi muda dalam upaya pelestarian budaya;
2. Inventarisasi budaya yang ada di masyarakat belum optimal;
3. Masih banyaknya minat masyarakat terhadap budaya pesta atau hajatan;
4. Efek negatif teknologi terhadap generasi muda;
5. Masih banyaknya pengangguran;
6. Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang menjunjung tinggi toleransi

2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

1. Keterbatasan SDM serta kurang meratanya pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha;
2. Masih banyaknya petani yang menerapkan sistem pertanian secara tradisi dan menggunakan peralatan yang seadanya;
3. Penjualan hasil industri belum optimal seperti, kerajinan akar wangi, mainan anak-anak, dan lain-lain;

4. Belum tercukupi kebutuhan bahan baku untuk produk tertentu sehingga masih harus mengimpor dari luar daerah;
5. Memberikan pemahaman terhadap pelaku ekonomi untuk bisa bekerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga;

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya sumber daya manusia dari pelaku ekonomi;
2. Masih banyaknya petani yang belum memanfaatkan teknologi pertanian;
3. Belum adanya pusat penjualan (*show room*) bagi hasil industri di Kapanewon Ponjong;
4. Kondisi geografis yang kurang mendukung untuk tersedianya bahan baku untuk jenis-jenis produk tertentu;
5. Masih kurangnya minat pelaku ekonomi untuk menangkap peluang kerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga;

3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Mengoptimalkan Gedung yang sudah ada;
2. Kondisi jalan Sebagian bergelombang dan rusak sehingga mengganggu transportasi;
3. Belum optimalnya penataan pedagang pasar dan pedagang kali lima;
4. Tempat pembuangan sampah menggunakan yang sudah ada dan tempat pembuangan akhir di bawa ke daerah lain;
5. Perlunya pemahaman terhadap kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah;
6. Sebagian masyarakat telah memiliki kendaraan sendiri;
7. Keberadaan angkutan umum kurang memadai;
8. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU);
9. Memberikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya petunjuk arah;
10. Memberikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

b. Permasalahan

1. Masih terbatasnya sarana gedung Kapanewon Ponjong sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;

2. Angkutan yang bertonase berat akan mengakibatkan rusaknya jalan;
3. Belum tertibnya penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
4. Masih kurangnya tempat pembuangan sampah dan belum adanya tempat pembuangan akhir;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah;
6. Kurangnya angkutan umum;
7. Masih rendahnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan angkutan umum;
8. Kurangnya penerangan jalan umum (PJU) pada titik-titik tertentu;
9. Kurangnya petunjuk arah di lokasi-lokasi tertentu;
10. Masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

4. Pemerintahan dan Ketertiban

a. Kondisi Saat Ini

1. Perlunya penambahan personil baik ASN maupun THL;
2. Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan ASN;
3. Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Kalurahan;
4. Memberikan pemahaman terhadap Pemerintah Kalurahan tentang ketepatan penyusunan Laporan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hukum;
6. Mengupayakan koordinasi dengan wilayah perbatasan;
7. Memberikan pemahaman tentang Pengadministrasian Tanah Kas Kalurahan;
8. Perlunya sosialisasi/penyuluhan Penyakit Masyarakat;
9. Mengupayakan peningkatan pemetaan Daerah Rawan Bencana.

b. Permasalahan

1. Kurangnya personil ASN;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia personil ASN yang tidak merata;
3. Kualitas SDM Perangkat Kalurahan yang tidak merata;
4. Masih adanya sebagian Pemerintah Kalurahan yang terlambat dalam penyusunan Laporan;
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum;

6. Belum terlaksananya koordinasi antara wilayah perbatasan secara rutin;
7. Belum optimalnya Pengadministrasian Tanah Kas Kalurahan;
8. Masih adanya Penyakit Masyarakat;
9. Kurang optimalnya pemetaan Daerah rawan Bencana.

2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SGDs (Sustainable Development Goals)

SPM (Standar Pelayanan Minimum) bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas public dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. SPM merupakan suatu standar yang diamanatkan dari kesepakatan bersama di tingkat global oleh PBB pada Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target- target TPB/SDGs di tingkat nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dalam bentuk program.

Tema , prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 dirumuskan berdasar pada visi misi Kepala Daerah. Untuk merumuskan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan Nasional dan DIY. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, Kapanewon Ponjong melakukan pembenahan, peningkatan sistem dan prosedur dalam pelayanan kepada masyarakat.

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD adalah :

1. Kualitas dan kuantitas SDM kedinasan yang kurang sesuai dengan load factor activity, mengakibatkan kurang optimalnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
2. Kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung layanan.
3. Terbatasnya anggaran untuk meningkatkan kapasitas pelayanan PD.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD adalah:

1. Akses yang mudah dijangkau karena berada ditengah-tengah wilayah dan dekat dengan tempat umum.

2. Sumber informasi yang mudah didapat dari situs/website.
3. Kemajuan teknologi yang memudahkan untuk mempercepat pelayanan PD.

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:
 - a. Koordinasi kegiatan pembangunan desa
 - b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:
 - a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD kabupaten, APBD propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) memberikan informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk Tahun Anggaran 2024, Besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan Kapanewon Ponjong Tahun Anggaran 2024 direncanakan sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan keterbasan Anggaran. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan

dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat desa/kalurahan sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi penghitungan anggaran pemerintah daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan dana yang dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang ditingkat kabupaten besaran angkanya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Secara lengkap Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada matriks lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan kami sajikan di tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Ponjong

Rencana Kerja Pemerintah Daerah		Hasil Analisis Kebutuhan										
		URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2						100.000.000,00					100.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					100.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100	100.000.000,00	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			Kapanewon Ponjong	1	100.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Kapanewon Ponjong	1	100.000.000,00	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja			Kapanewon Ponjong	1	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja		Kapanewon Ponjong	1	100.000.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4					35.000.000,00					35.000.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000,00	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				35.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				35.000.000,00	
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)		100					100		
4.01.04. 5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				35.000.000,00	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				35.000.000,00	
		Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan (Dokumen)	Kapaneuwon Ponjong	4				Kapaneuwon Ponjong	4		
4.01.04. 5.06.000 1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan				35.000.000,00	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan				35.000.000,00	
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	Kapaneuwon Ponjong	4				Kapaneuwon Ponjong	4		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7					1.659.785.036,0 0					1.659.785.036,0 0	
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.659.785.036,0 0	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.659.785.036,0 0	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	1.272.684.036,0 0	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)</i>		100	1.272.684.036,0 0	
7.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kapaneuwon Ponjong	4.17	37.240.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)</i>	Kapaneuwon Ponjong	4.17	37.240.000,00	
7.01.01. 2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kapaneuwon Ponjong	3	27.830.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	Kapaneuwon Ponjong	3	27.830.000,00	
7.01.01. 2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kapaneuwon Ponjong	1	1.360.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	Kapaneuwon Ponjong	1	1.360.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE- GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RKA-SKPD (Dokumen)									
7.01.01. 2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Kapaneuwon Ponjong	1	1.280.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Kapaneuwon Ponjong	1	1.280.000,00	
7.01.01. 2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kapaneuwon Ponjong	2	1.830.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kapaneuwon Ponjong	2	1.830.000,00	
7.01.01. 2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Kapaneuwon Ponjong	2	1.680.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Kapaneuwon Ponjong	2	1.680.000,00	
7.01.01. 2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.490.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.490.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	17			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	17		
7.01.01. 2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	4	1.770.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	4	1.770.000,00	
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks administrasi keuangan perangkat daerah (Indeks)	Kapaneuwon Pongjong	8.58	1.024.267.536,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks administrasi keuangan perangkat daerah (Indeks)	Kapaneuwon Pongjong	8.58	1.024.267.536,00	
7.01.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kapaneuwon Pongjong	168	992.787.536,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kapaneuwon Pongjong	168	992.787.536,00	
7.01.01. 2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	1	1.650.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	1	1.650.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01. 2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	Kapaneuwon Porjong	13	29.830.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Se mesteran SKPD (Laporan)	Kapaneuwon Porjong	13	29.830.000,00	
7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	6	25.772.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	6	25.772.500,00	
7.01.01. 2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	6	25.772.500,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	6	25.772.500,00	
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks administrasi umum perangkat daerah (Indeks)	Kapaneuwon Porjong	48.43	51.110.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks administrasi umum perangkat daerah (Indeks)	Kapaneuwon Porjong	48.43	51.110.000,00	
7.01.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.625.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.625.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kapaneuwon Porjong	4			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kapaneuwon Porjong	4		
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kapaneuwon Porjong	7	16.225.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kapaneuwon Porjong	7	16.225.000,00	
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Kapaneuwon Porjong	6	22.100.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Kapaneuwon Porjong	6	22.100.000,00	
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kapaneuwon Porjong	15	6.960.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kapaneuwon Porjong	15	6.960.000,00	
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	248	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	248	1.200.000,00	
7.01.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATAN PENTING
									TARGET KINERJA A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kapanewon Ponjong	10			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kapanewon Ponjong	10		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Laporan / Dokumen)	Kapanewon Ponjong	60	34.586.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Laporan / Dokumen)	Kapanewon Ponjong	60	34.586.500,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kapanewon Ponjong	60	34.586.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kapanewon Ponjong	60	34.586.500,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana (Unit)	Kapanewon Ponjong	93	99.707.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana (Unit)	Kapanewon Ponjong	93	99.707.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana (Unit)	Kapanewon Ponjong		61.512.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana (Unit)			61.512.500,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kapaneuon Porjong	64			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kapaneuon Porjong	64		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kapaneuon Porjong	25	5.800.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kapaneuon Porjong	25	5.800.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Kapaneuon Porjong	1	2.530.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Kapaneuon Porjong	1	2.530.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Kapaneuon Porjong	3	29.865.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Kapaneuon Porjong	3	29.865.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				329.757.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				329.757.500,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)</i>		100			<i>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)</i>		100		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)</i>	<i>Kapaneuwon Ponjong</i>	5	2.780.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)</i>	<i>Kapaneuwon Ponjong</i>	5	2.780.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)</i>	<i>Kapaneuwon Ponjong</i>	1	2.780.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)</i>	<i>Kapaneuwon Ponjong</i>	1	2.780.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				326.977.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				326.977.500,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	22			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	22		
7.01.02. 2.02.000 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	3	297.682.500,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	3	297.682.500,00	
7.01.02. 2.02.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	12	29.295.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapaneuwon Pongjong	12	29.295.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)		100	14.968.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)		100	14.968.500,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (Indeks)	Kapaneuwon Porjong	11	8.553.500,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (Indeks)	Kapaneuwon Porjong	11	8.553.500,00	
7.01.03. 2.01.000 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	2	4.273.500,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	2	4.273.500,00	
7.01.03. 2.01.000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapaneuwon Porjong	13	4.280.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapaneuwon Porjong	13	4.280.000,00	
7.01.03. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kecamatan	Indeks pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kapaneuwon Porjong	3.5	6.415.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Kapaneuwon Porjong	3.5	6.415.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tingkat Kecamatan (Indeks)					Kecamatan (Indeks)				
7.01.03. 2.03.000 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Kapaneuon Porjong	1	3.890.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Kapaneuon Porjong	1	3.890.000,00	
7.01.03. 2.03.000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Kapaneuon Porjong	2	2.525.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Kapaneuon Porjong	2	2.525.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)		100	10.850.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)		100	10.850.000,00	
7.01.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Indeks)	Kapaneuon Porjong	1	10.850.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Indeks)	Kapaneuon Porjong	1	10.850.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04. 2.01.000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapaneuwon Ponjong	1	3.920.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapaneuwon Ponjong	1	3.920.000,00	
7.01.04. 2.01.000 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Kapaneuwon Ponjong	1	6.930.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Kapaneuwon Ponjong	1	6.930.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)		100	19.525.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)			19.525.000,00	
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				19.525.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				19.525.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05. 2.01.000 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah (Indeks)	Kapaneuwon Porjong	3	12.075.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah (Indeks)	Kapaneuwon Porjong	3	11	12
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Kapaneuwon Porjong	25			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Kapaneuwon Porjong	25		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3 <i>Indonesia (Orang)</i>	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05. 2.01.000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	5	7.450.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	5	7.450.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tertaksana (%)		100	12.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tertaksana (%)		100	12.000.000,00	
7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Indeks)	Kapaneuwon Porjong	7.04	12.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Indeks)	Kapaneuwon Porjong	7.04	12.000.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06. 2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	24	2.210.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	24	2.210.000,00	
7.01.06. 2.01.000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	3	1.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	3	1.000.000,00	
7.01.06. 2.01.000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	1	1.030.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	1	1.030.000,00	
7.01.06. 2.01.000 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	1	1.380.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	1	1.380.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06. 2.01.000 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	1	1.380.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	1	1.380.000,00	
7.01.06. 2.01.001 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	2	2.710.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	2	2.710.000,00	
7.01.06. 2.01.001 4	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	1	1.030.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	Kapaneuwon Porjong	1	1.030.000,00	
7.01.06. 2.01.001 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kapaneuwon Porjong	1	1.260.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kapaneuwon Porjong	1	1.260.000,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATA N PENTING
									TARGET KINERJ A	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Desa (Dokumen)</i>					<i>Penegasan Batas Desa (Dokumen)</i>				
J U M L A H					1.794.785.036,00					1.794.785.036,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) memberikan informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk Tahun Anggaran 2024, Besaran angka atau kebutuhan dana tersebut direncanakan sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan keterbasan Anggaran. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses pengusulan dari para pemangku kepentingan seperti unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait , LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon.

Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut :

1. Pembahasan DURKP hasil usulan Musrenbangdes yang dilanjutkan di sidang kelompok pada kegiatan Musrenbang Kapanewon yang disusun menurut skala prioritas;
2. Hasil dari sidang masing-masing kelompok dilanjutkan pleno yang menghasilkan usulan yang disepakati dari masing-masing pemangku kepentingan yang diketahui Bappeda dan Instansi/OPD pelaksana Kegiatan.
3. Berita Acara Hasil Kesepakatan pada Pleno tersebut yang ditanda tangani perwakilan Desa, BPD, LPMD dan Camat/Panewu.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi penghitungan anggaran pemerintah daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan dana yang dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang ditingkat kabupaten besaran angkanya tidak sesuai dengan kebutuhan. Usulan masyarakat yang masuk dalam hasil Musrenbang Kapanewon tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

NO	Usulan	LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Harga Satuan	ANGGARAN	CATATAN
1	(PIS) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin KAPANEWON PONJONG	(Bedoyo Kidul, Kalurahan Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, Ponjong)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8 Kepala Keluarga	7.000.000,00	56.000.000,00	Tidak diterima
2	(PIWK) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin KAPANEWON PONJONG	(Bolodukuh Lor, Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Ponjong)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	32 Kepala Keluarga	7.000.000,00	224.000.000,00	
3	(PIWK) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin KAPANEWON PONJONG	(Kalurahan Kenteng Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Ponjong)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3 Kepala Keluarga	7.000.000,00	21.000.000,00	
4	(PIWK) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin KAPANEWON PONJONG	(Kalurahan Tambakromo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Ponjong)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4 Kepala Keluarga	7.000.000,00	28.000.000,00	
5	(PIS) - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. KAPANEWON PONJONG	(Kalurahan Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul, Ponjong)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Kali	6.000.000,00	6.000.000,00	Tidak diterima
							335.000.000,00	

Dari table diatas Kapanewon Ponjong (Kalurahan Bedoyo dan Kalurahan Umbulrejo) mengusulkan pembangunan jamban sehat dan bimtek pengelolaan keuangan desa melalui PIS akan tetapi belum terakomodir, karena terbatasnya anggaran pemerintah daerah. Untuk usulan pembangunan jamban sehat melalui PIWK dapat terakomodir dengan rincian 32 KK dari Kalurahan Sidorejo, 3 KK dari Kalurahan Kenteng dan 4 KK dari Kalurahan Tambakromo. Sehingga anggaran yang terakomodir dari usulan PIWK sebesar Rp 273.000.000,00 dengan harga satuan Rp 7.000.000,00.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, visi pembangunan Nasional yang merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah “ **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta “**Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**” serta Misi Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi “Lima Kemuliaan atau “Pancamulia” yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Arah Pembangunan DIY dalam Lima Tahun ke depan :

1. Yogyakarta akan bertindak secara aktif mengisi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam Kerangka Perjanjian IORA (*Indian Ocean Rim Association*), untuk mengembangkan Wilayah Yogyakarta Bagian Selatan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja secara keseluruhan, baik yang tinggal di Wilayah Selatan maupun yang tinggal di Wilayah lain di seluruh Yogyakarta. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.
2. Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Ekonomi" akan diletakkan sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang masih menggelayut di Wilayah Yogyakarta secara keseluruhan, dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja, melalui langkah-langkah perjumpaan dan saling silang: antara pelaku ekonomi kuat dengan pelaku ekonomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan dengan pelaku ekonomi perdesaan, antara pelaku ekonomi modern dengan pelaku ekonomi tradisional, antara pelaku ekonomi bermodal besar dengan pelaku ekonomi bermodal kecil, dan antara pelaku ekonomi internasional dengan pelaku ekonomi lokal. Pendek kata, melalui "Strategi Perjumpaan dan Saling Silang", maka dalam Lima Tahun ke depan, pembangunan ekonomi di Wilayah Yogyakarta diarahkan untuk tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.
3. Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Keruangan Wilayah" akan diletakkan sebagai strategi untuk memajukan wilayah-wilayah pinggiran melalui silang infrastruktur wilayah, sehingga interkoneksi antara permukiman-permukiman terpencil dengan pusat-pusat pelayanan masyarakat akan terbangun secara baik, termasuk "silang kerjasama infrastruktur" dengan wilayah-wilayah kabupaten tetangga terutama untuk wilayah-wilayah tersulit karena faktor topografi.
4. Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Birokrasi" akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan program-program besar yang memiliki kapasitas dan dampak besar bagi perubahan-perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga ke depan, harus dikurangi terciptanya banyak program-program kecil berbiaya besar, untuk kemudian digantikan dengan program-program besar berdampak besar melalui program-program berbasis "Silang SKPD". Dengan perkataan lain, ke depan program-program "Silang SKPD" yang berbasis "Tema-tema Besar" akan didorong prioritasnya dibanding dengan program-program kecil berbasis SKPD tunggal.
5. Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Birokrasi" akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal (keterbukaan di internal SKPD)", "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).

6. Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh.
7. Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Budaya" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta, melalui program-program saling silang perjumpaan antara: (i) budaya Jawa dengan budaya-budaya etnik lain yang ada di Yogyakarta, (ii) antara budaya Jawa dengan budaya antar bangsa termasuk dengan budaya-budaya bangsa yang tergabung dalam IORA (Yogyakarta berpotensi sebagai "Hub" atau pusat budaya IORA), (iii) silaturahmi budaya antar kelompok agama yang ada di Yogyakarta dan Indonesia, (iv) program silang belajar antar sekolah pada kelas-kelas awal sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk "saling kenal sekolah" sehingga mata rantai tradisi dan sejarah pertikaian atau tawuran antar sekolah tertentu dapat diputus.

Dengan memperhatikan tema nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”. Sumberdaya manusia merupakan modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah di era kompetisi global serta berorientasi pada hasil karya tinggi. Pertumbuhan ekonomi diorientasikan melalui sektor-

sektor unggulan dan potensial, seperti jasa, perdagangan, pariwisata, pertanian dan industri kreatif. Peningkatan infrastruktur dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan wilayah yang selaras, lestari, dan mensejahterakan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Ada tiga strategi perencanaan pembangunan Pemerintah DIY, yaitu pemerataan, penanggulangan kemiskinan, dan upaya mengatasi ketimpangan. Pemerintah DIY dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melakukan pendekatan tematik pembangunan yaitu pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Ketimpangan Wilayah serta Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan. Karena itu program dan kegiatan di Kabupaten Gunungkidul dapat selaras dengan tema pembangunan tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu menangkap peluang kepariwisataan dan pertumbuhan ekonomi dengan adanya penyelesaian JJLS, pengembangan kawasan geopark (Nglanggeran) dan pantai selatan serta rencana investasi.

Selanjutnya, dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah DIY, serta berpedoman

pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026, Visi **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”** dan Misi Yaitu : 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis, 2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Serta menjabarkan dalam **SAPTAKARYA** menjadi panduan dalam mencapai Visi pembangunan daerah yang diinternalisasikan dalam **Misi** Pembangunan Daerah yaitu :

1. Membangun persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, gotong royong dan toleransi;
2. Melakukan Reformasi Birokrasi, dan menerapkan paradigma Reinventing Government, Clean Governance dan kualitas pelayanan public dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Membangun infrastruktur yang interkoneksi antar wilayah/ Kawasan dan terintegrasi antara potensi sector kebudayaan, pariwisata, kelautan/ perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pariwisata berbasis potensi daerah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tata Kelola pariwisata;
5. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun Sentra Industri Pertanian, Sentra Industri Peternakan, dan Perdagangan berbasis masyarakat;
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya;
7. Menciptakan system ekonomi kerakyatan, memperkuat (kapasitas modal dan SDM) bagi UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Balai Latihan Kerja untuk melahirkan pengusaha muda kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola setiap potensi kalurahan dan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Ponjong

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kapanewon dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen renstra kapanewon. Untuk sasaran Kapanewon Ponjong dirumuskan dengan berdasar kepada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran Kapanewon Ponjong tahun 2024 (Renja Kapanewon Ponjong tahun 2024) sebagaimana telah disajikan pula dalam RKPD tahun 2024. Berikut disajikan tabel penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran perangkat daerah Kapanewon Ponjong.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ponjong pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Tujuan Kapanewon Ponjong

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	92
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	4

Sasaran Kapanewon Ponjong pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Sasaran Kapanewon Ponjong

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)	Target Sasaran PD Tahun 2024
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	91,7
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	81,5 (A)
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	4

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Ponjong disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Rumusan mengenai Indikator Kinerja Utama Kapanewon Ponjong adalah

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	20% x Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu
			20% x Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu
			20% x Persentase KK Miskin yang tertangani
			20% x Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum
			20% x Persentase nilai indeks kepuasan masyarakat

Tabel 3.2.3

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Ponjong Tahun 2024

Target Indikator Kinerja Utama di Kapanewon Ponjong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	IKU	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja IKU
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	91,7

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain pembangunan Tahun 2024 dirumuskan berdasarkan pada visi misi Kepala Daerah. Untuk merumuskan tema pembangunan daerah tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul juga memperhatikan arah kebijakan Nasional dan DIY. Sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi untuk mencapai target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat diantaranya : pengurangan kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dll. Untuk mencapai target tersebut diperlukan SPM (Standar Pelayanan Kemiskinan) sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu sebagai control terhadap kinerja pemerintah daerah dan memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah.

Kebijakan umum pemerintah mengacu pada pembangunan yang goodgovernance, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil. Dengan demikian anggaran Negara baik pusat dan daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja (disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Program dan Kegiatan Kapanewon Ponjong dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan kalurahan. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra Kapanewon Ponjong tahun 2021-2026, yang juga disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Kapanewon sebagaimana disepakati dalam forum gabungan SKPD Kapanewon.

Rencana Kerja Kapanewon Ponjong tahun 2024 terdiri dari 8 Program 16 Kegiatan dan mencakup 44 Sub kegiatan. Dari program-program tersebut, merupakan program yang menasar pada internal SKPD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, dan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa, terutama untuk wilayah miskin yang ada di Kapanewon Ponjong.

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 1.794.785.536,00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp 2.769.290481,00. Kegiatan tersebut bersumber pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 1.659.785.036,00 serta dari Dana Keistimewaan Yogyakarta sebesar Rp 135.000.000,00

Jumlah program dan kegiatan Kapanewon Ponjong untuk tahun 2024 yang mendasar pada strategi prioritas pembangunan yaitu Reformasi Birokrasi, yang dapat dilihat dari tabel 4.01 berikut:

Tabel 4.01
Prioritas Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran		Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
			Indikator	Target				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	4	2.22.08.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	Kap.Ponjong
					2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		
					4.01.04.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		
					4.01.04.5.06	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	Kap.Ponjong
Reformasi birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	81,25%	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.272.684.036	Kap. Ponjong
					7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.240.000	
					7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.024.267.536	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran		Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
			Indikator	Target				
Reformasi birokrasi					7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.772.500	
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.110.000	
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.586.500	
					7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.707.500	
Reformasi Birokrasi					7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	329.757.500	Kap. Ponjong
					7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.780.000	
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	326.977.500	
					7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.968.500	
Reformasi Birokrasi					7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.553.500	Kap. Ponjong

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran		Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
			Indikator	Target				
					7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.415.000	
					7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.850.000	
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Indeks Pelayanan Kapanewon	91,5%	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.850.000	Kap. Ponjong
					7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.525.000	Kap. Ponjong
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Indeks Pelayanan Kapanewon	91,5%	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.525.000	
					7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.000.000	Kap. Ponjong
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Indeks Pelayanan Kapanewon	91,5%	7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.000.000	
J U M L A H							1.794.785.036	

Tabel 4.02
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Ponjong
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Ponjong

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					100.000.000,00				150.000.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				150.000.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (%)		100	100.000.000,00				150.000.000,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Kapanewon Ponjong	1				1	150.000.000,00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	Kapanewon Ponjong	1	100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		1	150.000.000,00 150.000.000,00
4					35.000.000,00				25.970.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								25.970.000,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN			100	35.000.000,00				25.970.000,00
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Ketatalaksanaan (%)			35.000.000,00			4	25.970.000,00
4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	<i>Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan (Dokumen)</i>	Kapanewon Ponjong	4				4	25.970.000,00
		<i>Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)</i>	Kapanewon Ponjong	4		Dana Keistimewaan DIY		4	25.970.000,00
7					1.659.785.036,00				2.593.320.481,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.659.785.036,00				2.593.320.481,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.272.684.036,00				2.197.452.181,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100					
7.01.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)</i>	Kapanewon Pongjong	4.17	37.240.000,00			4.17	47.700.000,00
7.01.01.2.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	Kapanewon Pongjong	3	27.830.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	28.795.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	Kapanewon Pongjong	1	1.360.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	3.150.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	Kapanewon Pongjong	1	1.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	3.150.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kapanewon Pongjong	2	1.830.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	2.200.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Kapanewon Pongjong	2	1.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	2.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kapanewon Pongjong	17	1.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17.00	2.005.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kapanewon Pongjong	4	1.770.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.00	6.400.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.024.267.536,00				1.945.927.181,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks administrasi keuangan perangkat daerah (Indeks)	Kapanewon Pongjong	8.58				8.58	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kapanewon Pongjong	168	992.787.536,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		168.00	1.910.766.181,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kapanewon Pongjong	1	1.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	2.790.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Kapanewon Pongjong	13	29.830.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13.00	32.371.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)	Kapanewon Pongjong	6	25.772.500,00			6	26.200.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kapanewon Pongjong	6	25.772.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.00	26.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks administrasi umum perangkat daerah (Indeks)	Kapanewon Pongjong	48.43	51.110.000,00			48.43	51.000.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kapanewon Pongjong	4	2.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.00	3.450.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kapanewon Pongjong	7	16.225.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7.00	31.010.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Kapanewon Pongjong	6	22.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.00	3.450.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					<i>Alokasi Umum</i>			
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	<i>Kapanewon Ponjong</i>	15	6.960.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		15.00	9.200.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	<i>Kapanewon Ponjong</i>	248	1.200.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		248.00	1.260.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	<i>Kapanewon Ponjong</i>	10	2.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		10.00	2.630.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Laporan / Dokumen)</i>	<i>Kapanewon Ponjong</i>	60	34.586.500,00			60	32.750.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
					34.586.500,00				32.750.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kapanewon Ponjong	60		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60.00	32.750.000,00
7.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana (Unit)	Kapanewon Ponjong	93	99.707.500,00			93	93.875.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kapanewon Ponjong	64	61.512.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		64.00	50.080.000,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kapanewon Ponjong	25	5.800.000,00			25.00	5.770.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Kapanewon Portjong	1	2.530.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	9.290.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Kapanewon Portjong	3	29.865.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	28.735.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)		100	329.757.500,00				237.738.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	Kapanewon Portjong	5	2.780.000,00			2	10.600.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Kapanewon Ponjong	1	2.780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	10.600.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	Kapanewon Ponjong	22	326.977.500,00			22	227.138.000,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapanewon Ponjong	3	297.682.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7.00	196.350.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				29.295.000,00				30.788.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	Kapanewon Ponjong	12		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		12	30.788.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)		100	14.968.500,00				54.705.400,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (Indeks)</i>	Kapanewon Ponjong	11	8.553.500,00			11	36.000.000,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)</i>	Kapanewon Ponjong	2	4.273.500,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		2	24.200.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4.280.000,00				11.800.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapanewon Ponjong	13		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13.00	11.800.000,00
		Indeks pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Indeks)	Kapanewon Ponjong	3.5	6.415.000,00			3.5	18.705.400,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Kapanewon Ponjong	1	3.890.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	8.705.400,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Kapanewon Ponjong	2	2.525.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.00	10.000.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)		100	10.850.000,00				13.196.900,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Indeks)	Kapanewon Ponjong	1	10.850.000,00			1	13.196.900,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kapanewon Ponjong	1	3.920.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	5.788.100,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Kapanewon Ponjong	1	6.930.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	7.408.800,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)		100	19.525.000,00				49.778.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				19.525.000,00				49.778.000,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (Indeks)	Kapanewon Ponjong	3				3	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Kapanewon Ponjong	25	12.075.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75.00	42.878.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				7.450.000,00				6.900.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)</i>	<i>Kapanewon Ponjong</i>	5		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		5	<i>6.900.000,00</i>
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)		100	12.000.000,00				40.450.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Indeks Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Indeks)</i>	<i>Kapanewon Ponjong</i>	7.04				7.04	40.450.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)</i>	<i>Kapanewon Ponjong</i>	24		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		24	8.050.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1.000.000,00				8.800.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Kapanewon Ponjong	3		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	8.800.000,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Kapanewon Ponjong	1	1.030.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.00	3.000.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	Kapanewon Ponjong	1	1.380.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Kapanewon Ponjong	1	1.380.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	2.500.000,00
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Kapanewon Ponjong	2	2.710.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	5.100.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	Kapanewon Ponjong	1	1.030.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	4.600.000,00
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	Kapanewon Ponjong	1	1.260.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	5.400.000,00
J U M L A H					1.794.785.036,00				2.769.290.481,00

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Ponjong Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Ponjong Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pemerintah daerah. Rencana Kerja Kapanewon Ponjong disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Ponjong yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Ponjong telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kapanewon. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD. Dokumen renja ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kapanewon Ponjong Tahun 2021-2026, namun sebatas program dan kegiatannya, oleh karena itu hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah mendasarkan pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa evaluasi subjektif atas capaian kinerja program dan kegiatan. Kesulitan menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum mendapatkan solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan atau kondisi empiris pada saat program dan kegiatan dilaksanakan menjadi alternatif yang mungkin satu-satunya bagi kebutuhan informasi yang valid.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Kapanewon Ponjong Tahun 2021-2026 terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul adalah Program Tahunan Kapanewon Ponjong yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kapanewon Ponjong. Rencana Kerja Kapanewon Ponjong selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kapanewon Ponjong.

Rencana kerja Perangkat Daerah Kapanewon Ponjong tahun 2024 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas –tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Rencana kerja Kapanewon tahun 2024 digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan anggaran tahun 2024.

Wonosari,
KAPANEWON PONJONG,

MARWATAHADI

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KECAMATAN / KAPANEWON KARANGMOJO
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah memuat strategi untuk memecahkan setiap isu strategis yang dihadapi. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber-sumberdaya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

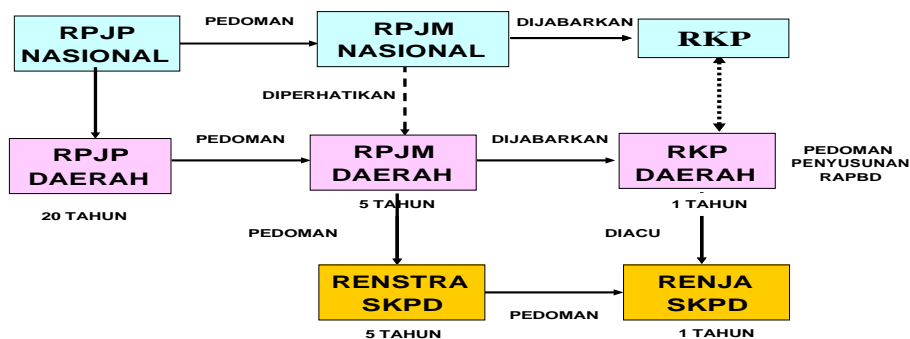
Renja Kecamatan/Kapanewon Karangmojo sebagai Perangkat Daerah sangat terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan bahwa Renja Kecamatan/Kapanewon sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis

RKPD Kabupaten untuk jangka waktu satu tahunan dan disusun oleh

setiap Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rencana Kerja Pembangunan Daerah inilah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Bagan1 :Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan/Kapanewon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan DaerahPembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan/Kapanewon Tahun 2024 adalah untuk menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan tahun 2023. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

- a. untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kecamatan/Kapanewon Karangmojo baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran yang bersifat indikatif;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan/Kapanewon Karangmojo; dan
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja Perangkat Daerah dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN/KAPANEWON KARANGMOJO

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan/Kapanewon Karangmojo
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan/Kapanewon Karangmojo
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan/Kapanewon Karangmojo
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKP
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN/KAPANEWON KARANGMOJO**
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN/KAPANEWON KARANGMOJO**
- BAB V PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KAPANEWON KARANGMOJO

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Karangmojo dan Capaian Renstra Kapanewon Karangmojo

Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun - tahun sebelumnya.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Karangmojo atau realisasi APBD untuk Kapanewon Karangmojo yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target- target PD tahun 2022 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi program kegiatan tahun 2022
yang tidak memenuhi target kinerja keluaran

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan dapat di sampaikan dalam table 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi program kegiatan tahun 2022
yang memenuhi target kinerja keluaran

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penataan Organisasi

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan. Tahun 2022 tidak ada program kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.
4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 adalah dana kegiatan yang berjalan, sudah bisa tercukupi dibawah nilai anggaran yang direncanakan.
5. Faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2023 adalah Kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan setelah pelaksanaan anggaran ditetapkan , juga kurang tepatnya perencanaan anggaran yang dibuat .
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor factor penyebab tersebut adalah pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pengguna anggaran dan perencanaan kegiatan agar perencanaan yang dilakukan lebih akurat dan akuntabel.

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Karangmojo tahun 2022 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel

2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon
Karangmojo

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d							
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100		
2	22	08	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terselenggara dengan baik	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100		
2	22	08	5,07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	6	Laporan	0	Laporan	1	1	0	1	1	16,6667
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH											
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100		
4	01	04	5,01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100		

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10	11=(10/4)*100
4	01	04	5,01	07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	5 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	2	2	40
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	2	20
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	20
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	20

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10	11=(10/4)*100
7 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	2	20
7 01 01 2,01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	2	20
7 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85 Laporan	17 Laporan	17	17	100	17	17	20
7 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4	4	100	4	4	20
7 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/	252 Orang/	252	252	100	252	252	100
7 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1	1	100	1	1	20

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10	11=(10/4)*100
7 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem	65 Laporan	13 Laporan	13	13	100	13	13	20
7 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7 01 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	6 Dokumen	6	6	100	6	6	20
7 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4	4	100	4	4	20
7 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	13 Paket	13	13	100	13	13	20
7 01 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4	4	100	4	4	20
7 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12	12	100	12	12	20

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10	11=(10/4)*100
7 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1240 Dokum	248 Dokum	248	248	100	248	248	20
7 01 01 2,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12	12	100	12	12	20
7 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	24 Laporan	24	24	100	24	24	20
7 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100
7 01 01 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	1	1	100	1	1	20
7 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12	12	100	12	12	20
7 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	36 Laporan	36	36	100	36	36	20

Kode Rekening				Usuran/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d		
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10	11=(10/4)*100	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	540 Unit	108 Unit	108	108	100	108	108	20
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	30 Unit	30	30	100	30	30	20
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4 Unit	4	4	100	4	4	20
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan berjalan dengan baik	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	15 Laporan	3 Laporan	3	3	100	3	3	20
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan berjalan dengan lancar	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	2 Laporan	2	2	100	2	2	20
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65 Laporan	13 Laporan	13	13	100	13	13	20
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10	11=(10/4)*100
7 01 03 2,01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	40 Dokumen	8 Dokumen	8	8	100	8	8	20
7 01 03 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 Laporan	8 Laporan	8	8	100	8	8	20
7 01 03 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7 01 03 2,03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Lembaga	3 Lembaga	3	3	100	3	3	20
7 01 03 2,03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20 Laporan	4 Laporan	4	4	100	4	4	20
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7 01 04 2,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		(7/6)*1	10
1					2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10	11=(10/4)*100
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	2 Laporan	0	0		2	2	20
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	1 Laporan	1	1	100	1	1	20
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10	11=(10/4)*100
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	375 Orang	75 Orang	75	75	100	75	75	20
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	165 Orang	33 Orang	33	33	100	33	33	20
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	20
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10	11=(10/4)*100	
7	01 06 2,01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	
7	01 06 2,01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	20
7	01 06 2,01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80 Dokume	16 Dokume	16	16	100	16	16	20
7	01 06 2,01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	55 Dokume	11 Dokume	11	11	100	11	11	20
7	01 06 2,01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	20
7	01 06 2,01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50 Dokume	10 Dokume	10	10	100	10	10	20

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7	01	06	2,01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	20
7	01	06	2,01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Karangmojo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKU (Indikator kinerja Utama), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yaitu Persentase desa yang menetapkan pertanggungjawaban APBDes , RKPDes dan APBDes tepat waktu

Indikator kinerja dan sasaran yang tersebut menggambarkan pencapaian Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo Tahun 2022. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Karangmojo, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Kapanewon Karangmojo sudah mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga tidak perlu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

Hasil analisis dapat disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul**

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satutuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Kapanewon Karangmojo				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase desa yang menetapkan RKPDKal dan APBKal tepat waktu	100	100	100	100	100	80	90	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kapanewon Karangmojo

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Karangmojo maka diperlukan tentang potret Kapanewon Karangmojo saat ini.

2.3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Kapanewon Karangmojo sudah mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga tidak perlu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

Indikator kinerja dan sasaran yang tersebut menggambarkan pencapaian Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo Tahun 2022. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Karangmojo, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Karangmojo adalah sebagai berikut :

2.3.2.1 Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan masyarakat/publik
- 2) Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
- 3) Belum efektifnya pengawasan melekat
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat pada masalah hukum

b. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
- 2) Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata
- 3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan ASN dan kinerja ASN
- 4) Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai
- 5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.2.2 Bidang Ekonomi

a. Kondisi

- 1) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
- 2) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional
- 4) Belum optimalnya penanganan obyek wisata
- 5) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya
- 6) Perdagangan/perniagaan kurang berkembang

- 7) Potensi industri kecil terutama kerajinan perak dan kerajinan bambu dalam pemasaran kurang.
- b. Permasalahan
- 1) Belum optimalnya pendayagunaan sumber dayamanusiadan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
 - 2) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
 - 3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar PD maupun sumber dana

2.3.2.3 Bidang Fisik dan Prasarana

- a. Kondisi Saat ini
- 1) Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar sulit masuk
 - 2) Masih banyaknya jalan yang kurang representatif dan jembatan yang belum memadai untuk jalur transportasi.
- b. Permasalahan
- 1) Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai
 - 2) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan bahaya bencana

2.3.2.4 Bidang Sosial Budaya

- a. Kondisi Saat Ini
- 1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
 - 2) Masih banyaknya pengangguran
 - 3) Terdapatnya potensi Seni Budaya yang belum difasilitasi dan dikembangkan
 - 4) Terdapatnya potensi Atlet Olah Raga yang belum difasilitasi dan dikembangkan
- b. Permasalahan
- 1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
 - 2) Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya
 - 3) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar
 - 4) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja
 - 5) Kurangnya Peluang Kerja di Wilayah Kapanewon Karangmojo

2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional atau Internasional

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah " Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026". Pada tahapan lima tahun pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas

dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang meliputi :

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
- b. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Karangmojo adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peningkatan perekonomian masyarakat
6. Peningkatan kesejahteraan sosial

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Karangmojo terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Karangmojo dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan Desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Karangmojo sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Paliyan. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Karangmojo, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Karangmojo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan penerangan jalan
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata pantai
4. Adanya potensi Wisata yang belum terekspose
5. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, pertanian dan lain - lain
6. Meningkatnya jumlah alat transportasi
7. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
8. Adanya Industri Olahan Makanan
9. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti, jagung, kedelai, kacang tanah dll
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Karangmojo

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra Kapanewon Karangmojo 2021-2026, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Karangmojo dengan memetakan *kekuatan* dan *kelemahan* yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon.

1) Kondisi Fisik Dasar

- a. Secara topografis berada pada 100 –n400 m dpal pada Zona Karts Pegunungan Seribu Selatan atau disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0m–300m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah, sehingga wilayah Paliyan potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan tembakau) dan penggemukan ternak.

- b. Secara geologi dipengaruhi oleh keberadaan Karst Pegunungan Seribu, sekitar 74% wilayah berformasi kepek yang berbatuan dasar limestone (batuan gamping).
 - c. Secara umum morfologi wilayah Karangmojo berupa bukit-bukit kecil (dolina) dengan tingkat ketinggian berkisar 0–400m dan kelerengan 8–>40%.
- 2) Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- a. Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung pada kelompok usia 26-55 tahun
 - b. Penduduk usia kerja akhir (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah
 - c. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani.
- 3) Kondisi Perekonomian
- a. Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kapanewon Karangmojo, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa
 - b. Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil tembakau), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.
- 4) Kondisi Pemerintahan
- a. Aparat Kapanewon telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
 - b. Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
 - c. Penguatan kelembagaan Kapanewon dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiari
 - d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kapanewon Karangmojo sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

- b) Struktur organisasi dan formasi jabatan pada Kapanewon Paliyan telah diisi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi
- c) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan
- d) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya peternakan
- e) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu dan meubel bambu yang cukup prospektif

2. Kelemahan

- a) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, banjir
- b) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi
- c) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi
- d) Penguasaan teknologi masih rendah
- e) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif
- f) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kapanewon dan desa belum optimal
- g) Jumlah ASN yang setiap tahun selalu berkurang karena memasuki purna tugas

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Kapanewon Karangmojo dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar akhir untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon.

1. Peluang

- a) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional
- b) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
- c) Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya
- d) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

2. Tantangan

- a) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
- b) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan
- c) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif
- d) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Denga berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mestinya desa semakin diperankan sebagai Subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Namun harus diakui bahwa amanah undang-undang tersebut belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Konsep membangun desa dan desa membangun belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Pembahasan isu pembangunan desa dan kawasan perdesaan juga dikaitkan dengan dampak Pandemi COVID 19 terutama dalam upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks pemulihan sosial dan ekonomi, penerapan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang inklusif sangat dibutuhkan,

1. Desa merupakan subjek utama dalam pembangunan yang harus difasilitasi untuk mengoptimalkan kewenangannya.
2. Pemulihan sosial ekonomi harus memanfaatkan potensi lokal dan modal sosial yang mendorong lahirnya matapencaharian alternatif yang tidak eksploitatif dan
3. Pemulihan ekonomi harus membuka akses dan melibatkan kelompok marginal serta kelompok rentan di Desa. Pendekatan PEL tersebut juga dikerangkai oleh konsep “Desa Membangun” dan Membangun Desa.
4. Pemerintah Desa harus difasilitasi untuk mengoptimalisasikan kewenangannya sebagai subjek pembangunan.
5. Mendorong pemerintah Daerah agar menjadikan kawasan perdesaan sebagai “Pintu masuk” pembangunan yang inklsuif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperkuat kerjasama antar desa dan kawasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk tahun anggaran 2024. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai ditingkat Kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2023, dengan memastikan terakomodirnya belanja wajib meningkat, kebijakan belanja prioritas, memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakatai dalam proses Musrenbang seta pemulihan pasca covid-19.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi Penghitungan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum pada rancangan akhir semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan adanya pandemi covid 19 maka program dan kegiatan yang menjadi prioritas di rancangan akhir Renja 2024 terpaksa tidak bisa terakomodir antara lain pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) Pramuka Bakti dan pengadaan sarana prasarana perkantoran, karena prioritas pembangunan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Sehingga prioritas program dan kegiatan di Kapanewon Karangmojo adalah Program Peningkatan Pelayanan Kapanewon walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas.

Secara lengkap Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

PD : KECAMATAN/KAPANEWON KARANGMOJO

No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 Laporan	100.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 Laporan	100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	100.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	100.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	35.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	35.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon /kemantren dan kalurahan/kalurahan yang didampingi	2 Dokumen	35.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon /kemantren dan kalurahan/kalurahan yang didampingi	2 Dokumen	35.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon /kemantren dan kalurahan/kalurahan yang didampingi	2 Dokumen	35.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon /kemantren dan kalurahan/kalurahan yang didampingi	2 Dokumen	35.000.000	

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.434.460.132	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.283.260.132
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Indeks	31.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Indeks	21.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	5.000.000

1	7	8	9	10	11	7	8	9		11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Indeks	1.085.901.632	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Indeks	1.083.901.632	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang	1.074.901.632	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang	1.074.901.632	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Dokumen	6.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.100.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.500.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6.100.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	98.305.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	33.876.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.500.000	

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	72.165.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	20.836.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.440.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.440.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	14.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	4.900.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 Persen	36.257.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 Persen	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Pagar yang di bangun	31 M2	36.257.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Pagar yang di bangun	31 M2	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan	44.802.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan	43.750.000	

1	7	8	9	10	11	7	8	9		11	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.447.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19.302.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19.302.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142 Unit	131.593.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142 Unit	98.732.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108 Unit	66.347.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108 Unit	59.247.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	8.520.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	8.520.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10 Unit	2.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	52.725.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	28.965.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Terlaksana	100 Persen	400.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	387.000.000	

1	7	8	9	10	11	7	8	9		11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	11.400.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	6.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	11.400.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	6.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15 Laporan	389.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15 Laporan	381.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	380.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	376.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	9.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	5.000.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	31.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	17.750.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Laporan	21.425.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Laporan	12.500.000	

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Laporan	13.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Laporan	6.500.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	8.425.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Indeks	9.975.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Indeks	5.250.000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	4.725.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	4.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah laporan usaha ekonomi masyarakat	1 Laporan	5.250.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah laporan usaha ekonomi masyarakat	1 Laporan	1.250.000
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	15.375.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	9.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	15.375.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	9.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	2.285.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	2.000.000

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	13.090.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	7.000.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	86.424.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	58.399.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Indeks	86.424.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Indeks	58.399.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	75 Orang	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	75 Orang	23.000.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	14 Orang	3.025.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	14 Orang	2.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	33.399.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	33.399.000	

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	29.850.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	16.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Indeks Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Indeks	29.850.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Indeks Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Indeks	16.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	3.850.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	2.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	4.700.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	5.900.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	2.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	4.025.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	3.000.000
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	5.050.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	3.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	3.125.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	2.000.000

1	7	8	9	10	11	7	8	9		11	12
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	3.200.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	2.000.000	
					2.132.909.132					1.906.409.132	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah ditingkat Kapanewon dengan kegiatan memproses keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah Kapanewon. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide - ide maupun anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana kebersihan suatu program pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Rencana Strategis Kapanewon Karangmojo 2021-2026, merupakan hasil analisis dari isu - isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk menganalisa isu - isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Karangmojo dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon. Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kapanewon Karangmojo dalam kurun waktu lima

(5) tahun kedepan sebagai dasar akhir untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Dasar penyusunan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/volume	HARGA SATUAN	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan KAPANEWON KARANGMOJO	Kalurahan Jetis, Karangmojo	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung air hujan (5000) liter	12	8.000.000	96.000.000	Pemangku Aspirasi
2	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin KAPANEWON KARANGMOJO	Kalurahan Monggol, Karangmojo	Pembangunan jamban sehat bagi KK Miskin	69	4.000.000	276.000.000	Pemangku Aspirasi

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan PD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan nasional dikaitkan dengan 7 prioritas nasional, sedangkan telaahan kebijakan provinsi dapat dikaitkan dengan prioritas pengembangan kawasan Wilayah Utara dan Geopark Gunung Sewu serta pendekatan tematik pembangunan DIY meliputi penurunan kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.

Kapanewon Karangmojo sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul serta visi dan misi Kapanewon Karangmojo. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Sehingga perlu memperhatikan kebijaksanaan nasional maupun kebijaksanaan daerah/propinsi. Kebijakan nasional yang menjadi titik fokus terhadap pelaksanaan rencana kerja di Kapanewon Karangmojo adalah Pemberdayaan potensi wisata terutama wisata pantai dimana di wilayah Kapanewon Karangmojo 70% adalah wilayah pantai dengan beberapa titik pantai yang indah. Sedangkan kebijakan propinsi meliputi penanggulangan masalah kesehatan (stop phbs) dengan pemberian sarana untuk pembuatan jambanisasi.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Karangmojo

Perumusan tujuan dan sasaran Kapanewon Karangmojo didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Karangmojo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Kapanewon Karangmojo. Untuk sasaran Kapanewon Karangmojo dirumuskan dengan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran Kapanewon Karangmojo tahun 2021 (Renja PD Tahun 2020) sebagaimana telah disajikan pula dalam Rancangan RKPD Tahun 2024. Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Kapanewon Karangmojo akan disempurnakan dalam proses verifikasi Renja Kapanewon Karangmojo Tahun

2024 serta Renstra Kapanewon Karangmojo Tahun 2021-2026. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Kapanewon Karangmojo dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kapanewon Karangmojo

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD
			Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Indeks kepuasan masyarakat
		Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks Ketentraman dan ketertiban		
2	Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Kapanewon Karangmojo

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan Tahun 2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	78%
2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	1

Tabel 3.2
Sasaran Kapanewon Karangmojo

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024
1	Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Indeks kepuasan masyarakat	80,07%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	100%
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	1

Disini, disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama PD

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	80,07%

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kapanewon Karangmojo dalam menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, yaitu :

- 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- 2) Kebijakan Umum Bupati.
- 3) Prioritas pembangunan;
- 4) Pencapaian SDGs;
- 5) Pengurangan kemiskinan;
- 6) Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
- 7) Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
- 8) Pencapaian IKU;
- 9) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- 10) Pengembangan wilayah miskin;

Kapanewon Karangmojo mendukung 2 prioritas, 2 sasaran daerah dan 3 sasaran perangkat daerah. Tahun 2023 di Kapanewon Karangmojo terdapat 6 program 16 kegiatan dan 45 sub kegiatan, yang keseluruhan dananya berjumlah Rp1.906.409.132,00 Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah di seluruh kalurahan di wilayah Kapanewon Karangmojo. Sedangkan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut adalah dari DAU dan PIWK. Secara terinci akan disajikan dalam tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini

TABEL 4.1
**Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul**

**Kapanewon
Karangmojo**

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	100 Persen	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.283.260.132,00	Kapanewon Karangmojo
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.500.000,00	
					7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	
					7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	
					7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.000.000,00	
					7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	
					7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	
					7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	
					7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.083.901.632,00	
					7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.074.901.632,00	
					7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	
					7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000,00	
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000,00	
					7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.500.000,00	
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.876.000,00	
					7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
					7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.836.000,00	
					7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	
					7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
					7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.440.000,00	
					7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000,00	

Prioritas	asasan Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.900.000,00	
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
					7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.750.000,00	
					7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.447.500,00	
					7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.302.500,00	
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.732.500,00	
					7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.247.500,00	
					7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	
					7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	
					7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.965.000,00	
		Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Indeks pelayanan kapanewon	80,07 persen	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	387.000.000,00	
					7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000,00	
					7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.000.000,00	
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	381.000.000,00	
					7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	376.000.000,00	
					7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.750.000,00	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.500.000,00	

Prioritas	asasan Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.500.000,00	
					7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.250.000,00	
					7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	
					7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.250.000,00	
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.399.000,00	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000,00	
					7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	
					7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.000.000,00	
					7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	58.399.000,00	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.399.000,00	
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.000.000,00	
					7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.000.000,00	
					7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.399.000,00	
					7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.000.000,00	

Prioritas	asasan Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.000.000,00	
					7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000,00	
					7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000,00	
					7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000,00	
					7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	
					7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000,00	
					7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.000.000,00	
					7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.000.000,00	
Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata;	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	2 Potensi Budaya	2.22.08.5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	
					2.22.08.5.07.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	
					2.22.08.5.07.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100.000.000,00	
					4.01.04.5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	
					4.01.04.5.01.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	35.000.000,00	
					4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	35.000.000,00	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting	PERKIRAAN Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					100.000.000,00				-
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				-
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (%)</i>		100	100.000.000,00				-
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000,00			1	150.000.000,00
		<i>Jumlah Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1					
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja				100.000.000,00				150.000.000,00
		<i>Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)</i>		1				1	
		<i>Gelar Budaya (Event)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1	100.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			150.000.000,00
4					35.000.000,00				35.000.000,00
4,01	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000,00				35.000.000,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)</i>		100	35.000.000,00				35.000.000,00
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				35.000.000,00			2	35.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	2					
4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan				35.000.000,00				35.000.000,00
		<i>Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	2				2	35.000.000,00
		<i>Program dan Kegiatan Keistimewaan (Laporan / Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	2	35.000.000,00	<i>Dana Keistimewaan DIY</i>			
7					1.771.409.132,00				2.823.182.313,00
7,01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.771.409.132,00				2.823.182.313,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	1.283.260.132,00				2.262.981.602,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.500.000,00			7	46.400.000,00
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	7					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00			2,00	30.000.000,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	3					
		Draf Renstra (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Perubahan Renja (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Renja (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.500.000,00				3.500.000,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1				1	
		Penyusunan RKA (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000,00				2.000.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1				1	
		Perubahan RKA (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000,00				4.000.000,00
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	2				2	
		DPA (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Perjanjian Kinerja (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.000.000,00				3.000.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	2				2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perubahan DPA (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00				2.500.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	17				17	
		Laporan Pengendalian (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	12	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		LKj-IP (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Monev Program dan Kegiatan (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	4	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00				1.400.000,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	4				4	
		IKM (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	2	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		RTP (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		SPIP (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.083.901.632,00				1.920.941.602,00
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	3				3	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.074.901.632,00				1.912.441.602,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	210				210	
		Gaji (Orang / Bulan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	210	1.074.901.632,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000,00				1.500.000,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1				1	
		Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6.000.000,00				7.000.000,00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	2				2	
		Laporan Keuangan Bulanan (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	12	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Laporan Keuangan Semesteran (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.500.000,00			6	1.500.000,00
		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	6					
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.500.000,00				1.500.000,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	6				6	
		Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	6	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.876.000,00				98.440.000,00
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	7				7	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000,00				2.000.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	4				4	
		Alat-alat listrik (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	4	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.836.000,00				80.000.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	13				13	
		Pembelian Alat Tulis Kantor (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	12	20.836.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000,00				3.000.000,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	6				6	
		Alat-alat kebersihan (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	6	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000,00				3.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	24				24	
		Barang Cetak (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	4	1.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Penggandaan (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	12	900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.440.000,00				1.440.000,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	248				248	
		KR (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	248	1.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.200.000,00				2.000.000,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	12				12	
		Jamuan Tamu (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	12	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.900.000,00				7.000.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	24				24	
		Konsultasi (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	12	2.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Rapat Koordinasi (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	12	2.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-			0	-
		Jumlah Luas Pagar yang di bangun (M2)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	31					
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-				-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	0,00				0,00	
		Pembangunan Pagar (M2)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	31		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.750.000,00				39.487.000,00
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	48				48	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24.447.500,00				20.185.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	24				24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Penataan kearsipan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	12	1.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
		<i>THL (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	12	23.447.500,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				19.302.500,00				19.302.000,00
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	36				36	
		<i>Air (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	12	3.008.500,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
		<i>Listrik (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	12	13.294.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
		<i>Telephon (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	12	3.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98.732.500,00			142	156.213.000,00
		<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	142					
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				59.247.500,00				56.200.000,00
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	108				108	
		<i>Kendaraan Beroda dua (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	96	14.400.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
		<i>Kendaraan Beroda empat (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	12	21.400.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
		<i>THL (Orang / Bulan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	12	23.447.500,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				2.000.000,00				-
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	51				0,00	
		<i>Pemeliharaan mebelair (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	20	2.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.520.000,00				6.000.000,00
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	26				30,00	
		<i>Pemeliharaan AC (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	8	1.320.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan Komputer dan Laptop (Unit)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	12	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Printer (Unit)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	6	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.965.000,00				94.013.000,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	4				4	
		Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Pemeliharaan Rumah Dinas (Paket)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL (Bulan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	12	28.965.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)		100	387.000.000,00				366.515.711,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6.000.000,00				18.500.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	3				3	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6.000.000,00				18.500.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	2				2	
		Pelaksanaan lomba/kejuaraan porkab (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua			
		Pembinaan seni (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				381.000.000,00				348.015.711,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1				1	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				376.000.000,00				333.265.711,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1				1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bantuan Sosial (KK)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	81	372.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Laporan Percepatan SPM (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00				14.750.000,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	13				13	
		Pelayanan masyarakat (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	13	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)		100	17.750.000,00				39.500.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				12.500.000,00				23.000.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	10				10	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6.500.000,00				13.000.000,00
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	8				8	
		Pelaksanaan musrenbang (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	8	6.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6.000.000,00				10.000.000,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1				1	
		Lomba Kelurahan (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Profil Kelurahan (Laporan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.250.000,00			2	16.500.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	2					
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.000.000,00				6.500.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	(Kapanewon Karangmojo, Watugajah, Kec. Gedangsari)	2				2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Karang Taruna (Lembaga)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
		<i>PKK (Lembaga)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1	4.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1.250.000,00				10.000.000,00
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	3				3	
		<i>koordinasi masa tanam (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	3	1.250.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
		<i>monev pemberdayaan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	3		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
		<i>pameran (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	3		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)</i>		100	9.000.000,00				14.000.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9.000.000,00				14.000.000,00
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	2				2	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2.000.000,00				5.000.000,00
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1,00				1,00	
		<i>pekat (Kesepakatan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1	2.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				7.000.000,00				9.000.000,00
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	2				2	
		<i>Dialok bidang keagamaan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	2		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
		<i>Safari Taraweh (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1	7.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-			1	-
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kesepakatan)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				58.399.000,00				115.185.000,00
		<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)</i>		100					
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				58.399.000,00				115.185.000,00
		<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	3				3	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				23.000.000,00				75.000.000,00
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	75				75	
		<i>Paskibraka (Orang)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	75	23.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2.000.000,00				4.800.000,00
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	20				20	
		<i>Pembinaan ketentraman ketertiban (Orang)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	20	2.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				33.399.000,00				35.385.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1				1	
		<i>Honorarium THL (Hari)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	247	22.847.500,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
		<i>Patroli Muspika (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1	9.951.500,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		THR THL (Bulan)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)		100	16.000.000,00				25.000.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				16.000.000,00				25.000.000,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	40				40	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2.000.000,00				2.000.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1				1	
		penyusunan peraturan desa (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.000.000,00				2.500.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	16				16	
		Penyusunan administrasi tata pemerintahan desa (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	16	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3.000.000,00				3.000.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	11				11	
		Penyusunan pengelolaan (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	11	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2.000.000,00				2.500.000,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1				1	
		Fasilitasi tugas kepala desa (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3.000.000,00				13.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	10				10	
		Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian (Dokumen)	(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)	10	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				2.000.000,00				1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1				1	
		<i>Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1	2.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2.000.000,00				1.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1				1	
		<i>Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Karangmojo, Karangmojo)</i>	1	2.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			
J U M L A H					1.906.409.132,00				2.858.182.313,00

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karenanya Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
KAPANEWON KARANGMOJO

KAWIT RAHARJANTO

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kapanewon Playen merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Kapanewon Playen melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Dokumen Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Playen, yang disusun berpedoman kepada Renstra Kapanewon Playen dan RKPD.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kapanewon Playen dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan UUD 1945 pasal 4 ayat 1, Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Panewu, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kapanewon dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kapanewon maka perencanaan tujuan kapanewon mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembanguna yang ingin dicapai pemerintah kapanewon bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kapanewon Playen memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Playen serta kerangka pendanaan daerah , Renja PD kapanewon secara substansial sesuai dengan visi dan misi dan rencana resmi daerah (RKPD,RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 menyesuaikan urusan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal renja dengan rentra perangkat daerah.
4. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kapanewon Playen Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|-------|-----------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| 1.1 | Latar Belakang |
| 1.2 | Landasan Hukum |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan |
| 1.4 | Sistematika Penulisan |

BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Playen dan Capaian Renstra Kapanewon Playen
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Playen
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Playen
2.4	Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Playen dan Capaian Renstra Kapanewon Playen

Rencana Kerja Kapanewon Playen tahun 2022 sesuai DPA Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2022 tanggal 6 Januari 2022 telah teranggarkan sebesar Rp. 3.019.892.218 yang terdiri dari delapan program, delapan belas kegiatan dan empat puluh sembilan subkegiatan. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022 Kapanewon Playen mengalami pergeseran anggaran untuk penambahan tunjangan kinerja (TPP) ASN sebesar Rp. 52.404.548 sehingga pagu yang dikelola Kapanewon Playen menjadi sebesar Rp. 3.072.296.766.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 Kapanewon Playen perlu menyusun perubahan rencana kerja tahun 2022 karena terdapat beberapa kegiatan yang harus disesuaikan dengan program, kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif dan target kinerja yang mengalami perubahan yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah karena masih dalam keadaan pemulihan dari pandemi COVID-19.

Selanjutnya sesuai dengan kebijakan dari Kabupaten Gunungkidul terkait berlakunya PPKM maka terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa diselenggarakan ataupun diselenggarakan dengan sederhana sehingga perlu adanya perubahan penyusunan rencana kerja tahun 2022. Adapun kegiatan yang tidak diselenggarakan/diselenggarakan dengan sederhana yaitu kegiatan safari tarawih dan peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul. Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan penyesuaian penambahan maupun pengurangan target kinerja maupun pagu indikatif untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan. Adapun penambahan ini digunakan untuk fasilitasi kegiatan dialog antarumat beragama, fasilitasi rapat koordinasi, belanja servis dan BBM kendaraan dinas roda dua, dan digunakan untuk belanja perjalanan dinas terkait pendampingan penyusunan APBD dan pendampingan musyawarah pembangunan kalurahan, serta terdapat penambahan pagu untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan sehingga pagu yang dikelola Kapanewon Playen pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 3.136.968.915,00 sesuai dengan DPPA Nomor DPPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

Pada tahun anggaran 2022 Kapanewon Playen telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.136.968.915,00 telah terealisasi sebesar Rp. 3.110.762.917 (99.16%). Realisasi anggaran untuk program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022

No	Uraian Program, Kegiatan Dan Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik(%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	132.750.000	132.750.000	100,00	100,00
	Adat, Seni, Tradisi dan	132.750.000	132.750.000	100,00	100,00

	Lembaga Budaya				
	Gelar Budaya Jogja	132.750.000	132.750.000	100,00	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	25.970.000	25.970.000	100,00	100,00
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	25.970.000	100,00	100,00
	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	25.970.000	25.970.000	100,00	100,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.120.510.91 5	2.095.114.91 7	98,80	100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.327.500	30.235.000	99,69	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.407.500	25.315.000	99,64	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	690.000	690.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	510.000	510.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	760.000	760.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	740.000	740.000	100,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.220.000	2.220.000	100,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.706.793.415	1.689.274.257	98,97	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.703.773.415	1.686.254.257	98,97	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	880.000	880.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	2.140.000	2.140.000	100,00	100,00
	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.635.000	60.633.880	100,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.945.000	46.945.000	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	1.498.880	99,93	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1.080.000	1.080.000	100,00	100,00

	undangan				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.000	300.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.310.000	4.310.000	100,00	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.890.000	32.890.000	100,00	100,00
	Pengadaan Mebel	4.890.000	4.890.000	100,00	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000	18.000.000	100,00	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.297.500	68.514.280	89,80	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.777.500	20.695.000	99,60	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	31.376.780	80,45	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.520.000	16.442.500	99,53	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.077.500	75.077.500	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.500.000	35.500.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.290.000	6.290.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.687.500	28.687.500	100,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00
	Penataan Organisasi	136.490.000	136.490.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	136.490.000	136.490.000	100,00	100,00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	493.525.000	492.715.000	99,84	100,00
	Koordinasi Penyeleggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	299.835.000	299.835.000	100,00	100,00

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	299.835.000	299.835.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	93.690.000	92.880.000	99,58	100,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	191.350.000	190.540.000	99,58	100,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.340.000	2.340.000	100,00	100,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	173.888.000	173.888.000	100,00	100,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.678.000	32.678.000	100,00	100,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.730.000	25.730.000	100,00	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.948.000	6.948.000	100,00	100,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	141.210.000	141.210.000	100,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000	10.800.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	130.410.000	130.410.000	100,00	100,00
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.420.000	6.420.000	100,00	100,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.640.000	2.640.000	100,00	100,00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.640.000	2.640.000	100,00	100,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.780.000	3.780.000	100,00	100,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.780.000	3.780.000	100,00	100,00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	72.985.000	72.985.000	100,00	100,00

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	72.985.000	72.985.000	100,00	100,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	69.735.000	69.735.000	100,00	100,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.250.000	3.250.000	100,00	100,00
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	110.920.000	110.920.000	100,00	100,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	110.920.000	110.920.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.950.000	3.950.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.610.000	11.610.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.380.000	1.380.000	100,00	100,00
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88.700.000	88.700.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.380.000	1.380.000	100,00	100,00
	JUMLAH	3.136.968.915	3.110.762.917	99,16	100,00

Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan Kapanewon Playen telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
- b. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 secara keseluruhan telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
- c. Tidak ada realiasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 adalah komitmen dan kerja keras yang dilakukan Kapanewon Playen untuk memastikan pencapain kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD antara lain Alokasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan, Adanya regulasi/kebijakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kegiatan harus menyesuaikan kebijakan.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang diperkirakan akan memengaruhi upaya pencapaian target kinerja adalah berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten agar pelaksanaan program/kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan, serta berkoordinasi dengan TAPD terkait alokasi anggaran terealisasi sesuai dengan usulan yang ada.

Berdasarkan dokumen DPA Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/ 001/2023 tanggal 3 Januari 2023 telah teranggarkan sebesar Rp. 2.680.205.305,00. Pada tahun anggaran 2023 ini telah dilakukan rasionalisasi DPA SKPD sebagai bentuk tindak lanjut PMK No. 194/PMK.07 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD. Oleh karena itu faktor –faktor yang diperkirakan akan memengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun anggaran 2023 antara lain adanya Alokasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan, Adanya regulasi/kebijakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kegiatan harus menyesuaikan kebijakan, adanya rasionalisasi anggaran tahun 2023 untuk memenuhi alokasi wajib/mengikat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Playen Tahun 2022, disajikan dalam tabel. 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Playen	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				4		5		6			7		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
				26	27	25	25	100,00	8=(7/6)	NA	100,00	NA	100,00	0,00	NA 2	2	NA	0
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	26	27	25	25	100,00	8=(7/6)	7	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	indeks	indeks	indeks	indeks					
X.XX.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perubahan renja	1	1	1	1	100,00	100,00	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen					
X.XX.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	1	1	100,00	100,00	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen					
X.XX.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4	NA	NA	dokumen	NA	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	25
X-XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	1	1	dokumen	1	1	dokumen	100,00	NA	NA	dokumen	
		Jumlah dokumen ROPK	1	1	0	dokumen	0	0	dokumen	0,00	NA	NA	dokumen	
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1	1	1	dokumen	1	1	dokumen	100,00	NA	NA	dokumen	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	8	NA	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	2	2	dokumen	25
X-XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	1	1	1	dokumen	1	1	dokumen	100,00	NA	NA	dokumen	
		Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja	1	1	1	dokumen	1	1	dokumen	100,00	NA	NA	dokumen	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	8	NA	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	2	2	dokumen	25
X-XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	NA	NA	laporan	NA	NA	laporan	NA	17	17	laporan	25
X-XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan TEpra	12	12	12	dokumen	12	12	dokumen	100,00	NA	NA	dokumen	
		Jumlah dokumen LKjJP	1	1	1	dokumen	1	1	dokumen	100,00	NA	NA	dokumen	
		Jumlah laporan e monev	4	4	4	dokumen	4	4	dokumen	100,00	NA	NA	dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	9	10=(5+7+9)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	16	NA	NA	laporan	NA	laporan	4	laporan	25
X-XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Daerah	84	NA	NA	indeks	NA	indeks	84	indeks	100
		Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	4	4	4	layanan	100,00	layanan	NA	layanan	
X-XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	bulan	100,00	bulan	NA	bulan	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	952	NA	NA	orang/bulan	NA	orang/bulan	238	orang/bulan	25
X-XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	1	1	dokumen	100,00	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	NA	NA	laporan	NA	laporan	1	laporan	25
X-XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester dan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	12	12	12	dokumen	100,00	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	1	1	dokumen	100,00	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	52	NA	NA	laporan	NA	laporan	13	laporan	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24	NA	NA	dokumen	NA	6	dokumen	6	dokumen	6	25
		Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	1	1	layanan	1	100,00	NA	NA	layanan	NA	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	17	17	17	orang	17	100,00	orang	NA	orang	NA	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	NA	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	6	dokumen	6	25
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	15	15	20	layanan	20	100,00	layanan	NA	layanan	NA	
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	45,43	NA	NA	indeks	NA	NA	43,71	indeks	indeks	43,71	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	6	5	6	paket belanja	6	100,00	paket belanja	NA	paket belanja	NA	25
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	NA	NA	paket	NA	NA	paket	4	paket	4	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12	12	12	paket belanja	12	100,00	paket belanja	NA	paket belanja	NA	
		Jumlah laptop yang terbeli	2	1	2	unit	2	100,00	unit	NA	unit	NA	
		Jumlah box arsip yang terbeli	50	0	50	buah	50	100,00	buah	NA	buah	NA	
		Jumlah printer dot matrix yang terbeli	1	0	1	unit	1	100,00	unit	NA	unit	NA	
		Jumlah map gantung yang terbeli	50	0	50	buah	50	100,00	buah	NA	buah	NA	
		Jumlah filing kabinet yang terbeli	1	0	1	unit	1	100,00	unit	NA	unit	NA	
		Jumlah peralatan jaringan yang terbeli	1	0	1	paket belanja	1	100,00	paket belanja	NA	paket belanja	NA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	70 paket	NA paket	NA paket	NA paket	NA	NA 15 paket	15 paket	21	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	6 paket belanja	8 paket belanja	6 paket belanja	6 paket belanja	100,00	NA paket belanja	NA paket belanja	25	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 paket	NA paket	NA paket	NA paket	NA	NA 4 paket	4 paket	25	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	64 bendel	64 bendel	64 bendel	64 bendel	100,00	NA bendel	NA bendel		
		Jumlah lembar penggandaan	7500 lembar	7500 lembar	7500 lembar	7500 lembar	100,00	NA lembar	NA lembar		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	NA paket	NA paket	NA paket	NA	NA 2 paket	2 paket	25	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibayar	12 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100,00	NA rekening	NA rekening		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	992 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA	NA 248 dokumen	248 dokumen	25	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi minum dan snack	30 orang	0 orang	30 orang	30 orang	100,00	NA orang	NA orang		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan	0 laporan	NA laporan	NA laporan	NA	NA 12 laporan	12 laporan	25	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat yang terfasilitasi minum dan snack	80 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100,00	NA orang	NA orang		
		Jumlah peserta rapat yang terfasilitasi makan dan minum	30 orang	0 orang	50 orang	50 orang	100,00	NA orang	NA orang		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 laporan	NA laporan	NA laporan	NA laporan	NA	NA 21 laporan	21 laporan	19	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
			4	3	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	NA	NA	NA	jenis	NA	jenis	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah rak arsip yang terbeli	78 unit	NA	NA	NA	NA	59	59	76	unit	59	unit	76
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 buah	0	0	4	100,00	NA	NA	68	buah	NA	buah	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 unit	NA	NA	NA	NA	25	25	68	unit	25	unit	68
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terbeli	5 unit	NA	NA	NA	NA	0	0	94	unit	0	unit	94
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	0	0	3	100,00	NA	NA		unit	NA	unit	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	36 unit	NA	NA	NA	NA	34	34	94	unit	34	unit	94
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah backdrop yang terbeli	1 buah	0	0	1	100,00	NA	NA		buah	NA	buah	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 layanan	3 layanan	3 layanan	5 layanan	100,00	NA	NA		layanan	NA	layanan	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240 laporan	NA	NA	NA	NA	60	60	25	laporan	60	laporan	25
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah surat terkirim	480 surat	0 surat	0 surat	360	75,00	NA	NA		surat	NA	surat	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	NA	NA	480	NA	12	12	25	laporan	12	laporan	25
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telephone yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	12 rekening	12 rekening	12 rekening	12	100,00	NA	NA		rekening	NA	rekening	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan)	12 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100,00	rekening	NA	rekening	NA	rekening	
		Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	12 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100,00	rekening	NA	rekening	NA	rekening	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 laporan	NA laporan	NA laporan	NA laporan	NA	laporan	NA	36 laporan	36 laporan	laporan	25
X-XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari terfasilitasinya jasa kebersihan kantor	247 hari	247 hari	208 hari	208 hari	100,00	hari	NA	hari	NA	hari	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	NA laporan	NA laporan	NA laporan	NA	laporan	NA	12 laporan	12 laporan	laporan	25
X-XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	100,00	layanan	NA	layanan	NA	layanan	
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527 unit	NA unit	NA unit	NA unit	NA	unit	NA	116 unit	116 unit	unit	22
X-XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	unit	NA	unit	NA	unit	
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	12 paket pemeliharaan	12 paket pemeliharaan	12 paket pemeliharaan	12 paket pemeliharaan	100,00	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	
		Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100,00	unit	NA	unit	NA	unit	
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	72 paket pemeliharaan	72 paket pemeliharaan	72 paket pemeliharaan	72 paket pemeliharaan	100,00	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022				Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	3	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	364 unit	NA	unit	NA	NA	unit	91 unit	91 unit	25	91 unit	NA	unit	25
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebleur yang dipelihara	10 unit	0	unit	10 unit	100,00	unit	NA	NA	NA	NA	unit	NA	unit
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharannya Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	40 unit 7 unit 6 unit 1 unit 8 unit	NA 7 unit 6 unit 1 unit 8 unit	unit unit unit unit unit	NA 4 unit 6 unit 1 unit 8 unit	NA 100,00 100,00 100,00 100,00	unit unit unit unit unit	10 unit NA NA NA NA	10 unit NA NA NA NA	25	10 unit NA NA NA NA	unit unit unit unit unit	unit unit unit unit unit	25
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah mesin scan yang terfasilitasi pemeliharannya Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit 103 unit	1 unit NA	unit unit	1 unit NA	100,00 NA	unit unit	1 unit NA	1 unit NA	18	1 unit 19 unit	NA 19 unit	unit unit	18
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah hari terfasilitasinya jasa keamanan kantor Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharannya	365 hari 6 unit	365 hari 4 unit	hari unit	365 hari 6 unit	100,00 100,00	hari unit	365 hari 6 unit	365 hari 6 unit	20	NA NA	hari unit	NA unit	20
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	NA	unit	NA	NA	unit	NA	NA	20	6 unit	6 unit	unit	20
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen evaluasi pelayanan publik	4 dokumen	4 dokumen	dokumen	4 dokumen	100,00	dokumen	NA	NA	100,00	4 dokumen	4 dokumen	NA	dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (%)	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	dokumen	NA	NA	dokumen		
		Jumlah Dokumen SOP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	NA	dokumen		
		Jumlah Dokumen SKM	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	NA	dokumen	NA	NA	dokumen		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana				0,00							
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2	jenis	2	2	jenis		
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 laporan	NA laporan	NA laporan	NA	NA	laporan	NA	2	laporan		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	2 kelompok	6 kelompok	2 kelompok	100,00	2	kelompok	2	NA	kelompok		
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan hari jadi Kabupaten Gunungkidul	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100,00	1	kesepakatan	1	NA	kesepakatan		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 laporan	NA laporan	NA laporan	NA	NA	laporan	NA	2	laporan		25
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00	5	jenis	5	NA	jenis		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	58	NA	NA	NA	NA	NA	16	16	16	16	16	28
7.01.02.2.0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan pelaksanaan update data SID	1	1	1	1	100,00	keepakatanan	NA	keepakatanan	NA	keepakatanan	keepakatanan	
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	1	1	1	1	100,00	kali	1	kali	NA	kali	NA	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	NA	NA	NA	NA	laporan	NA	laporan	3	laporan	3	50
7.01.02.2.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	2100	2000	2100	2100	100,00	layanan	2100	layanan	NA	layanan	NA	
		Jumlah pelaksanaan pembinaan pelayanan umum	1	1	1	1	100,00	kali	1	kali	NA	kali	NA	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52	NA	NA	NA	NA	laporan	NA	laporan	13	laporan	13	25
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi												
7.01.03.2.0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	6	6	6	6	100,00	jenis	6	jenis	NA	jenis	NA	
1		Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	15	NA	NA	NA	NA	indeks	NA	indeks	9	indeks	9	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen musrenbang	1	1	1	1	100,00	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen		
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJM Kal	0	13	0	0	0,00	kalurahan	0	kalurahan	0	kalurahan		
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RKP Kal	13	13	13	13	100,00	kalurahan	NA	kalurahan	NA	kalurahan		
7.01.03.2.0 1.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	74	NA	NA	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	16	dokumen	22	
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kaparewon	1	0	1	1	100,00	kali	1	kali	NA	kali		
		Jumlah dokumen profil kaparewon	1	1	1	1	100,00	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen		
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kabupaten	1	0	1	1	100,00	kali	1	kali	NA	kali		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	NA	NA	NA	NA	laporan	NA	laporan	2	laporan	25	
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6	6	6	6	100,00	jenis	6	jenis	NA	jenis		
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3	NA	NA	NA	NA	indeks	NA	indeks	3	indeks		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.03.2.0 3.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan bidang kesehatan dan KB	1	1	1	1	100,00	keepakatan	NA	keepakatan	
		Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	12	12	12	12	100,00	keepakatan	NA	keepakatan	
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	1	1	1	1	100,00	keepakatan	NA	keepakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	NA	lembaga kemasyarakatan	lembaga kemasyarakatan	NA	lembaga kemasyarakatan	2	lembaga kemasyarakatan	25
7.01.03.2.0 3.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	100,00	dokumen	NA	dokumen	
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	2	2	2	2	100,00	kelompok	NA	kelompok	
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur kalurahan	13	13	13	13	100,00	kalurahan	NA	kalurahan	
		Jumlah kesepakatan koordinasi kelompok pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan darat serta lingkungan hidup	1	0	0	0	0,00	keepakatan	NA	keepakatan	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16	NA	laporan	laporan	NA	laporan	4	laporan	25
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	100,00	NA	NA	layanan	NA	layanan		
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 laporan	NA	NA	NA	NA	2	2	laporan	2	laporan		
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 laporan	NA	NA	NA	NA	2	2	laporan	2	laporan		25
7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kapanewon	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA	NA	kali	NA	kali		
		Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat kapanewon	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0,00	NA	NA	kali	NA	kali		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 laporan	NA	NA	NA	NA	2	2	laporan	2	laporan		25
7.01.04.2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	100,00	NA	NA	layanan	NA	layanan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
				4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.04.2.0 2.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	1 pekat	1 pekat	1 pekat	1 pekat	100,00	NA pekat	NA pekat	25	
		Jumlah laporan hasil patroli bersama	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	NA dokumen	NA dokumen		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 laporan	NA laporan	NA laporan	NA laporan	NA	NA 2 laporan	2 laporan		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi									
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100,00	NA layanan	NA layanan		
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38 indeks	NA indeks	NA indeks	NA indeks	NA	NA 38 indeks	38 indeks		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	5	6	7	Tingkat Realisasi (%)	9	10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI yang terfasilitasi	1 kali	0 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA kali	NA kali	NA kali		
		Jumlah paskib kapawon yang terbentuk dan dilatih	75 orang	3 orang	75 orang	75 orang	100,00	NA orang	NA orang	NA orang		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan P	75 orang	NA orang	NA orang	NA orang	NA	75 orang	75 orang	75 orang		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kesepakatan koordinasi forkompimka	1	1	1	1	100,00	kesepakatan	kesepakatan	kesepakatan		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	NA	NA	NA	NA	dokumen	dokumen	dokumen		25
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana										

Kode	Urusan/Pbidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	3	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah Layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	13 jenis	14 jenis	13 jenis	13 jenis	100,00	NA	NA	NA	NA	jenis	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	227 dokumen	NA	NA	NA	NA	61	61	61	dokumen	dokumen	27
7.01.06.2.0 1.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan produk hukum kalurahan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100,00	NA	NA	NA	kali	kali	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	1	1	1	dokumen	dokumen	25
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen monografi kalurahan	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	100,00	NA	NA	NA	dokumen	dokumen	NA
		Jumlah dokumen monografi kapanewon	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	NA	NA	NA	dokumen	dokumen	NA
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100,00	NA	NA	NA	kesepakatan	kesepakatan	NA
		Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	112 dokumen	NA	NA	NA	NA	28	28	28	dokumen	dokumen	25
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan kalurahan terselenggara	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA	NA	NA	kali	kali	NA
		Jumlah pembinaan siklus tahunan kalurahan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100,00	NA	NA	NA	kali	kali	NA
		Jumlah pembinaan bidang tanah kas kalurahan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA	NA	NA	kali	kali	NA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keuaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah kalurahan yang terdampingi dalam penyusunan pengelolaan APB kalurahan	13 kalurahan	13 kalurahan	13 kalurahan	13 kalurahan	100,00	NA	NA	kalurahan	NA	kalurahan	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	72 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA	NA	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	25	
7.01.06.2.0 1.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pamong kalurahan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	26 orang	26 orang	26 orang	26 orang	100,00	NA	NA	orang	NA	orang	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	25	
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	
7.01.06.2.0 1.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengisian pamong kalurahan	5 pamong kalurahan	0 pamong kalurahan	5 pamong kalurahan	5 pamong kalurahan	100,00	NA	NA	pamong kalurahan	NA	pamong kalurahan	
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA	NA	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	53	
7.01.06.2.0 1.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterampilan dan Ketertarikan Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	26 orang	26 orang	26 orang	26 orang	100,00	NA	NA	orang	NA	orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
		Jumlah koordinasi kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	NA	NA	NA	NA	NA	kali		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 dokumen	NA	NA	NA	NA	dokumen	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	25	
7.01.06.2.0 1.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kesepakatan kerjasama antar kalurahan	1 kesepakatan	1	1	kesepakatan	100,00	kesepakatan	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	dokumen	dokumen	NA	1	dokumen	1	dokumen	25
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi													
2.22.08.5.0 7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4 laporan	NA	NA	laporan	NA	laporan	laporan	NA	1	laporan	1	laporan	
		Jumlah kegiatan adat, seni dan lembaga budaya	1 jenis	0	1	jenis	100,00	jenis	jenis	NA	jenis	NA	jenis		
2.22.08.5.0 7.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY	1 even	0	1	even	100,00	even	even	NA	even	NA	even		
2.22.08.5.0 7.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4 laporan	NA	NA	laporan	NA	laporan	laporan	NA	1	laporan	1	laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/ Kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	8	NA	NA	NA	NA	dokumen	2	dokumen	25
4.01.04.5.0 1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	2	0	2	2	100,00	layanan	NA	layanan	
4.01.04.5.0 1.07	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	8	0	NA	NA	NA	dokumen	2	dokumen	25
4.01.04.5.0 1.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan	1	0	1	1	100,00	laporan	NA	laporan	
		Rencana Program kegiatan keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan tahun 2024	2	0	2	2	100,00	dokumen	NA	dokumen	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Playen mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kapanewon Playen sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, di samping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Playen merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis Pemerintah. Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah Kapanewon Playen. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui pelayanan satu pintu/pelayanan terpadu di Kapanewon, jenis layanan yg dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Surat Izin Keramaian
2. Pelayanan BPJS
3. Pelayanan SKTM
4. Pelayanan SKCK
5. Pelayanan waris
6. Surat pernyataan beda nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir
7. Pelayanan pinjaman perangkat daerah
8. Pelayanan pengajuan proposal
9. Surat keterangan tunjangan keluarga/KP4
10. Rekomendasi Pelaksanaan Nikah Karena Dilaksanakan Kurang Dari 10 Hari Setelah Pendaftaran
11. Pengelolaan Pengaduan Pada Penyelenggara Pelayanan Publik

Indikator kinerja utama kapanewon ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021, salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kapanewon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon tahun 2024. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Playen Kabupaten gunungkidul disajikan dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Playen
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)										
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	NA	72.96	76.10	76.15	NA	84.90	76.10	76.15	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan/Kapanewon Playen.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kapanewon Playen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Playen. Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berisi uraian sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Playen antara lain:
 - a. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas
 - b. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi tentang pengentrian data-data terkait data pamong kalurahan/lembaga terkait.
 - c. Pemahaman dan pengendalian SOP pelayanan di kalurahan-kalurahan belum optimal karena masih ada permohonan yang persyaratannya belum lengkap.
 - d. Adanya regulasi/peraturan yang akan memengaruhi proses perencanaan di kapanewon dan kalurahan, pekerjaan dapat terselesaikan tetapi tidak tepat waktu.
 - e. Adanya kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kapanewon tetapi belum dapat dilaksanakan (IMB) karena belum ada pelatihan untuk sumber daya manusia dan belum ada sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan.
 - f. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke kapanewon dan kalurahan
 - g. Angka kemiskinan masih perlu ditangani
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*).

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah *”Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”*.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yang meliputi :

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
- b. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut:

- a. Isu strategis nasional
 - Percepatan penghapusan kemiskinan
 - Penanganan Stunting
 - Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19
 - Middle income trap riset, alokasi sumber daya, dan human capital
 - Percepatan pembangunan infrastruktur
 - Pengurangan risiko bencana
 - Pasokan energi dan pangan
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Reformasi Birokrasi
 - Pilpres dan Pilkada Serentak tahun 2024
 - Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045

- b. Isu strategis provinsi
 - Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024
 - Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - Pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19
 - Penanganan Stunting
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pasokan Energi dan Pangan
 - Perencanaan Pembangunan jangka Panjang 2025 - 2045
- c. Isu strategis daerah
 - Pilpres dan pilkada serentak tahun 2024
 - Penanganan stunting
 - Perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - Penanganan dan pemulihan paska pandemi Covid-19
 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 0 (nol) Kemiskinan Ekstrem
 - Pengembangan potensi Pariwisata
 - Peningkatan Investasi
 - Perkembangan Teknologi Informasi
 - Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana
 - Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah
 - Pengembangan inovasi daerah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah: “Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia” Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi;
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Playen adalah Reformasi Birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat serta prioritas peningkatan ekonomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.

Mendasar tugas pokok Kapanewon Playen, fungsi yang diemban oleh Kapanewon Playen adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Tugas dan fungsi Kapanewon Playen terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Playen dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan publik.

Pemerintah Kapanewon Playen sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Playen.

Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Playen beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Playen antara lain:
 - Jumlah sumber daya manusia yang terbatas;
 - Kapanewon sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kapanewon hanya sebatas pengelola gaji pegawai dan biaya operasional Kapanewon. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui perangkat daerah terkait.
 - Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal dan tepat waktu.
 - Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir tindak dari masyarakat
 - Permohonan KK dan KTP di wilayah Kapanewon Playen cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya satu (1) orang maka diperlukan kerja ekstra untuk mencukupi target tersebut
 - Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut kapanewon untuk responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
 - Tingginya angka kemiskinan, daerah perbatasan yang rawan konflik
 - Infrastruktur Pedesaan yang kurang baik (Jalan, Jembatan, Drainase)
 - Kurangnya Akses Teknologi Pertanian, Peternakan, Perindustrian/ Kerajinan, Permodalan, dan Pemasaran produk
 - Kurangnya Akses Air Bersih, Pendidikan, dan kesehatan

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan Kapanewon Playen antara lain:

- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kapanewon, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kapanewon Playen dengan Forkompimka, Dinas Instansi, Korwil, lurah dan pamong kalurahan, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi.
- Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Playen yaitu:

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
- b. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan
- c. Kemampuan keuangan relatif terbatas
- d. Masih banyaknya jumlah masyarakat miskin
- e. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/menengah

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026 maka Kapanewon Playen berperan aktif dalam perumusan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Adapun program yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Program Penyelegaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- Program Penyelegaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD telah dilakukan melalui musyawarah mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon dan kabupaten dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kapanewon Playen berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah pagu pendanaannya.

Dalam reviu terhadap Rencana Kerja Kapanewon Playen Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat point-point sebagai berikut:

1. Proses pertama yang dilakukan adalah membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Total pagu Kapanewon Playen pada rancangan awal sebesar 2.726.456.378,00. Setelah melalui tahapan-tahapan terdapat perubahan pagu menjadi 1.636.168.460,00. Ada beberapa program, kegiatan maupun subkegiatan yang mengalami penyesuaian karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan pagu anggaran.
2. Alasan dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui kebutuhan riil dari Kapanewon Playen, salah satunya dengan menyesuaikan Program, Kegiatan, subkegiatan dan indikator subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan pagu anggaran. Serta sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2023 sebesar 2,2%.
3. Proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan menghasilkan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD yaitu untuk program yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta di tahapan ini ada perbedaan tolak ukur dan pagu anggaran baik program, kegiatan maupun subkegiatan yang menyesuaikan dengan Berita Acara Dais. Secara rinci hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Playen		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
NO	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	100 persen	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	100 persen	10		
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	150.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan		100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 laporan	150.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan		100.000.000	Pindah subkegiatan mengikuti Berita Acara dais
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	25.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen		35.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	2 dokumen	25.970.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	2 dokumen		35.000.000	Pindah kegiatan mengikuti Berita Acara dais
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan yang Didampingi	2 dokumen	25.970.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Playen	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	4 dokumen		35.000.000	Pindah subkegiatan dan tolak ukur mengikuti Berita Acara dais
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	2.290.107.878	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen		1.274.812.460	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,14	45.637.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,14		32.326.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	26.987.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen		28.452.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		390.000	

RANCANGAN AWAL RENJA PD										Hasil Analisis Kebutuhan		
NO	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
											1	2
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Playen	8	9	10		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	3.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Playen	2	2	510.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Playen	2	2	710.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	3.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Playen	17	17	1.324.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	3.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	4	4	550.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	1.852.966.878	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	84	84	1.065.441.005		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Playen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	1.846.666.878	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Playen	224	224	1.062.391.005		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Playen	1	1	1.060.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	3.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Playen	13	13	1.990.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	4.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	6	6	590.000		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	4.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Playen	6	6	590.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	45	100.326.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	45	45	21.018.900		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Playen	2	2	535.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	81.246.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Playen	12	12	14.782.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Playen	2	2	1.150.000		

RANCANGAN AWAL RENJA PD

Hasil Analisis Kebutuhan

NO	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
				4	5					7	8		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	10	1.931.900		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	248	1.080.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	248	dokumen	1.200.000		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	1.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	300.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	7.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	laporan	1.120.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	35.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	unit	0		
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	15.000.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	unit	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	unit	0		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	0		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	209.862.500	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	laporan	113.186.055		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	41.555.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	25.917.500		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	38.561.055		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	123.307.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	48.707.500		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135	42.315.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135	unit	42.250.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Playen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91	28.275.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Playen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91	unit	39.300.000		
	Pemeliharaan Mebel	Kapanewon Playen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	2.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kapanewon Playen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	unit	0		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	9.040.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	1.750.000		

RANCANGAN AWAL RENJA PD										Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
				8	4					5	7		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kapanewon Playen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	2.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	9	1.200.000		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 persen	31.680.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 persen		116.236.000		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 laporan	24.090.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 laporan		500.000		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	24.090.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan		500.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14 laporan	7.590.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14 laporan		115.736.000		
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5.250.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan		114.120.000		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	2.340.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		1.616.000		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100 persen	41.598.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100 persen		15.395.000		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8,5 indeks	16.548.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8,5 indeks		9.860.000		
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15 dokumen	9.600.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	14 dokumen		3.610.000		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.948.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		6.250.000		

RANCANGAN AWAL RENJA PD										Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
				3	4					5	7		
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3	indeks	25.050.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3	indeks	5.535.000	
	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Playen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	lembaga kemasyarakatan	13.900.000	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Playen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	lembaga kemasyarakatan	4.910.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	laporan	11.150.500	Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	laporan	625.000	
6	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	persen	20.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	persen	18.400.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	2	laporan	20.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	2	laporan	18.400.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	laporan	7.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	laporan	0	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	laporan	13.500.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	laporan	18.400.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	persen	114.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	persen	72.965.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38	indeks	114.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38	indeks	72.965.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Playen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	orang	110.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Playen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	orang	64.935.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	dokumen	4.500.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	dokumen	8.030.000	

RANCANGAN AWAL RENJA PD										Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2		3	4	5	7		8	9	10			
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 persen	52.100.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 persen	3.360.000			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64 dokumen	52.100.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64 dokumen	3.360.000			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	4.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 dokumen	0			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28 dokumen	4.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28 dokumen	670.000			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	18.100.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 dokumen	1.950.000			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	2.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 dokumen	0			
	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kapanewon Playen	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	4 dokumen	6.000.000	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kapanewon Playen	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	4 dokumen	740.000			
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9 dokumen	4.500.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 dokumen	0			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	9.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 dokumen	0			
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 dokumen	3.500.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0 dokumen	0			
					2.726.456.378					1.636.168.460			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, bagian ini diuraikan dalam kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun hasil informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon. Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/lingkungan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum musrenbangkal
2. Di forum musrebangkal menghasilkan skala prioritas usulan tingkat kalurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari kalurahan untuk mengawal usulan tersebut di forum musrenbang tingkat Kapanewon
3. Hasil musrenbang Kapanewon merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu isu penting dari masing masing SKPD yang ada. Kegiatan musrenbang kapanewon yang telah disepakati antara lain dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial berupa jamban dan septictank kepada kk miskin, dalam bidang ekonomi menyelenggarakan bimtek perencanaan pembangunan kalurahan dan bimtek pengelolaan keuangan kalurahan.
4. Kedepan kamus usulan sudah ada sehingga pada saat pelaksanaan musrenbangkal semua usulan program kegiatan yg ada di kalurahan bisa terakomodir sesuai kegiatan yang direncanakan, sehingga terjadi sinkronisasi data antara usulan pemerintah kalurahan, kapanewon dan kabupaten.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisine/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	PIWK - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin	Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen	Terlaksananya kegiatan pembangunan jamban sehat bagi KK miskin	21 KK	4.000.000	84.000.000	Diterima
2	PIWK - Pembangunan dan pembangunan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Kalurahan Gading, Kapanewon Playen	Terlaksananya kegiatan pembangunan jamban dan pembangunan akhir tinja sehat bagi KK miskin	4 KK	7.000.000	28.000.000	Diterima

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah sehingga diharapkan program dan kegiatan perangkat daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Kebijakan nasional tentang kapanewon tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Sedangkan Kapanewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Playen sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2024 Kapanewon Playen juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran

adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional dan kegiatan pokok yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kapanewon Playen

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	1. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 2. Meningkatnya Akuntabilitas PD	1. Indeks pelayanan kapanewon 2. Nilai AKIP PD
2	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan Sasaran PD dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut

Tabel 3.2
Tujuan Kapanewon Playen

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	76.28
2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	7

Tabel.3.3
Sasaran Kapanewon Playen Tahun 2024

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target sasaran PD Tahun 2024
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	76.15
2.	Meningkatnya akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	A (80.03)
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	7

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kapanewon dengan tabel sebagai berikut :

Tabel.3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Playen Tahun 2024

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	2	3	4
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	76.15

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Playen meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON PLAYEN

Perencanaan Kinerja Kapanewon Playen tahun 2024 mendasar pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 yaitu terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat tahun 2026. Oleh karena itu rencana kinerja tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan pembinaan atau fasilitasi kalurahan, kegiatan PIWK, penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan STOP BABS atau jamban sehat dan septictank, evaluasi APBKal dan RKPKal, koordinasi penanggulangan kemiskinan serta koordinasi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

4.1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan yaitu:

1. Sebagai konsekuensi untuk merealisasikan program/kegiatan Kapanewon Playen dalam rangka mendorong visi dan misi Bupati Kepala Daerah.
2. Prioritas pembangunan, dalam hal ini prioritas Kapanewon Playen adalah reformasi birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat, serta prioritas peningkatan ekonomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.
3. Pengurangan kemiskinan dengan mengembangkan kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan meningkatkan keterampilan dalam mengolah hasil bumi/pertanian menjadi produk bernilai tambah dan Peningkatan akses pemasaran melalui promosi produk.
4. Pencapaian IKU untuk tahun 2022-2026 dengan indikator kinerja utama “Indeks Pelayanan Kapanewon” yang formulasi perhitungannya menggunakan lima komponen yaitu persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, persentase KK miskin yang tertangani, persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, dan nilai indeks kepuasan masyarakat.
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dengan penumbuhan BUMKalurahan yang dapat menumbuhkan iklim usaha kecil yang produktif.
6. Melakukan program promosi kesehatan, dimana lebih diupayakan untuk membiasakan masyarakat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
7. Penyuluhan Keluarga Berencana bagi semua warga, kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan usia dini.
8. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanakan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di Pemerintahan Kalurahan maupun Kapanewon
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif.
10. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
11. Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan Rancangan Program dan Kegiatan Kapanewon Playen Tahun 2024 terdiri dari 8 program , 16 kegiatan dan 47 subkegiatan dimana dalam pelaksanaannya kegiatan untuk difokuskan pada pelayanan masyarakat tersebar di wilayah Playen yang terdiri dari 13 kalurahan. Adapun total pagu Renja tahun 2024 sebesar 1.636.168.460. sedangkan untuk perkiraan tahun 2025 sebesar 2.780.985.506. Progam dan kegiatan Pembangunan Kapanewon Playen Tahun 2024 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Progam Pembangunan
Kapanewon Playen Tahun 2024

NO	Sasaran Kapanewon Playen	Nama Progam/ Kegiatan
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik <ol style="list-style-type: none"> a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan <ol style="list-style-type: none"> a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum <ol style="list-style-type: none"> a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan a) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan a) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

Selanjutnya dari enam prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, Kapanewon Playen mendukung dua prioritas pembangunan yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan ekonomi. Selanjutnya rekapitulasi program dan kegiatan prioritas pembangunan yang lebih terperinci dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	7 potensi budaya	2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000	Kapanewon Playen
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	Kapanewon Playen
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	Kapanewon Playen
					4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000	Kapanewon Playen
					4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	Kapanewon Playen

				4.01.04.5.01.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	Kapanewon Playen
Reformasi Birokasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	A (80.03)	7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kapanewon Playen
				7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	32.326.500	<i>Kapanewon Playen</i>
				7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.452.500	Kapanewon Playen
				7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	390.000	Kapanewon Playen
				7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	390.000	Kapanewon Playen
				7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	510.000	Kapanewon Playen
				7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	710.000	Kapanewon Playen

					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.324.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.065.441.005	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.062.391.005	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.060.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.990.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	590.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	590.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.018.000	Kapanewon Playen

					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	535.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.782.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.150.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.931.900	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitas kunjungan tamu	3000.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.120.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0	<i>Kapanewon Playen</i>
					7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Kapanewon Playen

	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	76.15	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	116.236.000	Kapanewon Playen
					7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	500.000	<i>Kapanewon Playen</i>
					7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500.000	Kapanewon Playen
					7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan</i>	115.736.000	<i>Kapanewon Playen</i>
					7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	114.120.000	Kapanewon Playen
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1.616.000	Kapanewon Playen
					7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15.395.000	Kapanewon Playen

					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.030.000	Kapanewon Playen
					7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.360.000	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	3.360.000	<i>Kapanewon Playen</i>
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	670.000	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.950.000	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	740.000	Kapanewon Playen

					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	Kapanewon Playen			
					7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	0	Kapanewon Playen			
					7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0	Kapanewon Playen			
Total								1.636.168.460			

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Playen		Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	100 persen	100.000.000		100 persen				150.000.000	
2 22 08 5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	100.000.000		1 laporan			1	150.000.000	
2 22 08 5.07	Gelar Budaya Jogja	0006	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY	1 laporan			1	150.000.000	
4 01 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	35.000.000		100 persen			100	25.970.000	
4 01 04 5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	2 dokumen	35.000.000		2 dokumen			2	25.970.000	
4 01 04 5.06	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	0001	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	4 dokumen	35.000.000	Dana Keistimewaan DIY	2 dokumen			2	25.970.000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	1.274.812.460		100 persen			100	2.325.715.506	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.14 indeks	32.326.500		4.29 indeks			4.29	52.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 01 01 2.01 0001	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	3 dokumen	28.452.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	31.500.000
7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Playen	1 dokumen	390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	3.500.000
7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Playen	1 dokumen	390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	3.000.000
7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kapanewon Playen	2 dokumen	510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	3.750.000
7 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Playen	2 dokumen	710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	2.750.000
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Playen	17 laporan	1.324.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 laporan	3.900.000
7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	4 laporan	550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	3.600.000
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		84 indeks	1.065.441.005			84 indeks	1.855.699.006
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Playen	224 orang/bulan	1.062.391.005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		238 orang/bulan	1.849.399.006

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Playen	1 laporan	1.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	3.000.000
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Playen	13 laporan	1.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 laporan	3.300.000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6 dokumen	590.000			6 dokumen	4.800.000
7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Playen	6 dokumen	590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 dokumen	4.800.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah		45 indeks	21.018.900			46,14 indeks	93.376.500
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Playen	2 paket	535.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 paket	2.000.000
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Playen	12 paket	14.782.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 paket	68.396.500
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kapanewon Playen	2 paket	1.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 paket	3.000.000
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kapanewon Playen	2 paket	1.931.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 paket	6.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kapanewon Playen	248 dokumen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		248 dokumen	1.080.000
7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Playen	12 laporan	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	2.000.000
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Playen	7 laporan	1.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 laporan	10.900.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7 unit	0			5 unit	60.000.000
7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kapanewon Playen	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	60.000.000
7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kapanewon Playen	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 unit	0
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60 laporan	113.186.055			60 laporan	204.785.000
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Playen	12 laporan	25.917.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	41.555.000
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kapanewon Playen	36 laporan	38.561.055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 laporan	45.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kapanewon Playen	12 laporan	48.707.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	118.230.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		135 unit	42.250.000			138 unit	55.055.000
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kapanewon Playen	91 unit	39.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		91 unit	36.475.000
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kapanewon Playen	5 unit	1.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29 unit	14.580.000
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kapanewon Playen	4 unit	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 unit	4.000.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana		100 persen	116.236.000			100 persen	51.750.000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 laporan	500.000			2 laporan	35.250.000
7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Playen	1 laporan	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	35.250.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		14 laporan	115.736.000			14 laporan	16.500.000
7 01 02 2.02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	2 laporan	114.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	6.700.000
7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	12 laporan	1.616.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 laporan	9.800.000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEJURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi		100 persen	15.395.000			100 persen	48.150.000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		8.5 indeks	9.860.000			8.5 indeks	19.000.000
7 01 03 2.01 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Playen	14 dokumen	3.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 dokumen	10.000.000
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	2 Laporan	6.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	9.000.000
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		3 indeks	5.535.000			3 indeks	29.150.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kapanewon Playen	1 lembaga kemasyarakatan	4.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 lembaga kemasyarakatan	14.150.000
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Playen	1 laporan	625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	15.000.000
7 01 04 2.01 0001	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi		100 persen	18.400.000			100 persen	23.000.000
7 01 04 2.01 0002	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		2 laporan	18.400.000			2 laporan	23.000.000
7 01 04 2.01 0003	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	0 laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	8.500.000
7 01 04 2.01 0004	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Playen	1 laporan	18.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	14.500.000
7 01 05 2.01 0005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi		100 persen	72.965.000			100 persen	108.900.000
7 01 05 2.01 0006	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		38 indeks	72.965.000			38 indeks	108.900.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 05 2.01 0001	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Playen	75 orang	64.935.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 orang	103.900.000
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Playen	1 dokumen	8.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	5.000.000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana		100 persen	3.360.000			100 persen	47.500.000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		64 dokumen	3.360.000			51 dokumen	47.500.000
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Playen	0 dokumen		Dana Transfer 0 Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	4.200.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Playen	28 dokumen	670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 dokumen	4.500.000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Playen	15 dokumen	1.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 dokumen	22.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Playen	0 dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	3.000.000
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kapanewon Playen	4 dokumen	740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 dokumen	0
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Playen	0 dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 dokumen	0
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Playen	0 dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	9.000.000
7 01 06 2.01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kapanewon Playen	0 dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	4.000.000
					1.636.168.460				2.780.985.506

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Renja Kapanewon Playen Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Daerah. Renja Kapanewon Playen disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD.

Renja Kapanewon Playen Tahun 2024 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Renja Kapanewon Playen telah dan akan selalu melibatkan peran (*stakeholder*) atau pemangku kepentingan. Pelibatan (*stakeholder*) dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2. Kaidah pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Kapanewon Playen Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
KAPANEWON PLAYEN,

AGUS SUMARYONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

RENCANA KERJA
KAPANEWON NGLIPAR
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

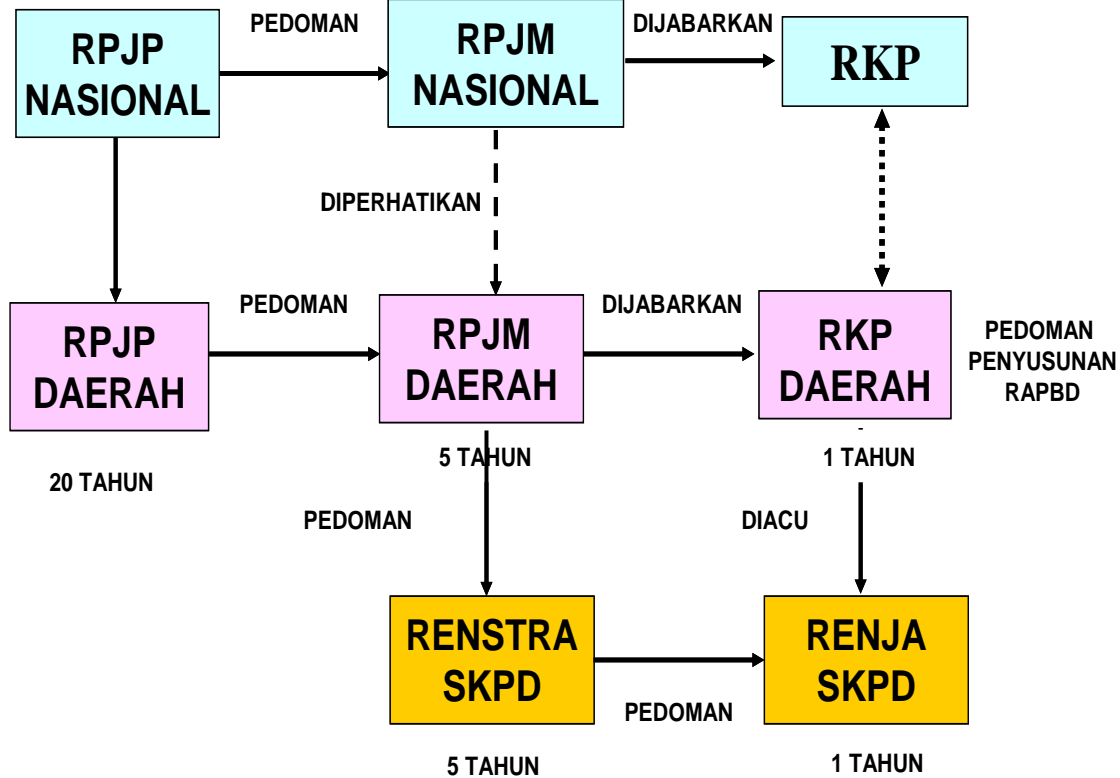
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Keterkaitan antara Renja Kapanewon Nglipar 2024 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja Kapanewon Nglipar sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RKPD. Renja Kapanewon Nglipar 2024 memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu satu tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja Kapanewon Nglipar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590) dan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/0237 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pemabngunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2024;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2024;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
 14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 052/5969 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Kapanewon Nglipar Tahun 2024 adalah untuk menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Maksud

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kapanewon Nglipar.

2. Tujuan

- a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kapanewon Nglipar baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
- b. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;

- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kapanewon Nglipar.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kapanewon Nglipar Tahun 2024 disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KAPANEWON NGLIPAR TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Nglipar dan Capaian Renstra Kapanewon Nglipar
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Nglipar
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kapanewon Nglipar
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.3 Rencana tindak lanjut

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON NGLIPAR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun berjalan 2022 mengacu pada APBD Tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Nglipar atau realisasi APBD untuk Kapanewon Nglipar yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan dalam hal ini Program dan Kegiatan Kapanewon Nglipar tahun 2024 semua telah memenuhi target kinerja .
2. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Tahun 2024 semua target telah terpenuhi.
3. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan. Tahun 2024 tidak ada Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja kaluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2024 adalah dana kegiatan yang berjalan, sudah bisa tercapai dibawah nilai anggaran yang direncanakan.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024 adalah kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan setelah pelaksanaan anggaran ditetapkan, kurang tepatnya anggaran yang dibuat serta kurangnya SDM dan Tenaga kepegawaian yang berkompetensi dibidangnya.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah penambahan tenaga SDM dan pemeberian pendidikan pelatihan kepada pengguna anggaran dan perencanaan kegiatan agar perencanaan yang dilakukan lebih akurat dan akuntabel.

Dalam implementasi program kegiatan dari Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2024 dan agar terjadi konsistensi dalam upaya capaian target yang telah ditetapkan dan mengacu pada APBD Tahun 2024 maka pada prioritas ini ditetapkan indikator kinerja sebagai instrumen kontrol. Adapun capaian target tersebut sebagaimana pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) / Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target KInerja Hail Program Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, dan kegiatan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM									
	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%	1 event
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase adat, seni, tradisi dan lembaga budaya terlaksana	100%	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%	1 event
	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni Budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY	1 event	0 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hail Program Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian program, dan kegiatan, dan sub kegiatan s/d Tahun 2023
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN								
	YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAA	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di kalurahan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	Rencana program kegiatan keistimewaan pada kapanewon dan kalurahan Tahun 2024	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%

		terlaksana		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	200%	
Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	200%	
		Jumlah dokumen renja perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	200%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	1 dokumen	1 dok	100%	
		Jumlah dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	1 dokumen	1 dok	100%	
		Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dok	200%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dok	200%	
		Jumlah dokumen ROPK	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dok	200%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	1 dokumen	1 dok	100%	
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	1 dokumen	1 dok	100%	
		Jumlah dokumen e monev	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	50%	4 dokumen	6 dok	150%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dok	200%	
		Jumlah dokumen TEPPRA	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	50%	12 dokumen	18 dok	150%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hail Program Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Realisasi Target	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
				100%	100%	50%	50%	100%	150%	150%
			14 bulan	14 bulan	14 bulan	8 bulan	50%	14 bulan	22 bulan	157%
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	200%
			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	12 dokumen	24 dokumen	200%
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	200%
			16 ASN	13 ASN	16 ASN	16 ASN	100%	16 ASN	32 ASN	200%
			100%	100%	100%	50%	50%	100%	150%	150%
			4 paket belanja	4 paket belanja	4 paket belanja	2 paket belanja	50%	4 paket belanja	6 paket belanja	150%
			4paket belanja	4paket belanja	4paket belanja	4paket belanja	50%	4paket belanja	8 paket belanja	200%
			1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	2 jenis	200%
			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	200%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hail Program Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	4paket belanja	4paket belanja	50%	4paket belanja	6 paket belanja	150%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	96 bendel	96 bendel	50%	96 bendel	144 bendel	150%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundangan	Jumlah barang penggandaan	10.000 lembar	10.000 lembar	40%	10.000 lembar	14000 lembar	140%		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	12 rekening	12 rekening	0%	12 rekening	12 rekening	0%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tamu terfasilitasi minum snack	200 orang	200 orang	50%	100 orang	300 orang	150%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	26 kali	26 kali	50%	13 kali	39 kali	150%		
	Pemerintah Daerah	Jumlah peserta rapat terfasilitasi makan dan minum	40 orang	40 orang	50%	20 orang	60 orang	150%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100%	100%	100%	100%	200%	200%		
	Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terbeli	2 unit	0 unit	100%	2 unit	2 unit	100%		
	Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100%	100%	100%	100%	200%	200%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah hari terfasilitasinya administrasi umum	240 hari	0 hari	50%	240 hari	120 hari	50%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hail Program Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang terbayar (2 rekening X 12 Bulan), Jumlah rekening listrik yang terbayar (2 rekening X 12 Bulan),	24 rekening	24 rekening	24 rekening	24 rekening	50%	24 rekening	36 rekening	150%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan di Bayar (non thl)	12 termin	12 termin	12 termin	12 termin	50%	12 termin	18 termin	150%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100%	100%	100%	100%	50%	100%	150%	150%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah sopir dibayar (Non THL) Jumlah mobil dinas terbayarkan pajaknya	12 termin 1 unit 8 unit	12 termin 1 unit 8 unit	12 termin 1 unit 8 unit	12 termin 1 unit 8 unit	50% 0% 50%	12 termin 1 unit 8 unit	18 termin 1 unit 12 unit	150% 100% 150%

			1 paket	1 paket	8 unit 1 paket	8 unit 1 paket	8 unit 1 paket	100%	1 paket	1 paket	2 paket	200%			
Dinas Jabatan	Jumlah motor dinas terbayarkan pajaknya	Jumlah paket pemeliharaan mobil dians	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	2 paket	200%			
			5 unit 4 unit 7 unit 6 unit 2 unit	5 unit 4 unit 7 unit 6 unit 2 unit	5 unit 4 unit 7 unit 6 unit 2 unit	5 unit 4 unit 7 unit 6 unit 2 unit	100% 100% 100% 100% 50%	5 unit 4 unit 7 unit 6 unit 2 unit	5 unit 4 unit 7 unit 6 unit 2 unit	10 unit 8 unit 14 unit 12 unit 3 unit	200% 200% 200% 200% 150%				
Dinas Jabatan	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah sound system yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah rehab papan nama kapanewon	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah sound system yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah rehab papan nama kapanewon	1 paket pemeliharaan	0 paket pemeliharaan	1 paket pemeliharaan	1 paket pemeliharaan	0%	1 paket pemeliharaan	1 paket pemeliharaan	1 paket pemeliharaan	1 paket pemeliharaan	100%			
			100 m2	100 m2	100 m2	100 m2	100%	100 m2	100 m2	200m2	200%				
			365 hari	365 hari	365 hari	365 hari	50%	365 hari	365 hari	548 hari	150%				
			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	50%	2 unit	2 unit	3 unit	150%				
			100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0%	100 Persen	100 Persen	100%	100%				
			100 %	100 %	100 %	100 %	0%	100 %	100 %	100%	100%				
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hail Program Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	55%	100 persen	155%	155%
			3 cabor	3 cabor	3 cabor	3 cabor	67%	3 cabor	5 cabor	167%
			5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100%	5 kelompok	10 kelompok	200%
			1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	0%	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%
			100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	100 %	200 %	200 %
			1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%	1 kesepakatan	2 kesepakatan	200%
			1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%	1 kesepakatan	2 kesepakatan	200%
			1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	0%	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hail Program Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun Lalu 2022		Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%	1 kesepakatan	2 kesepakatan	200%
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	0%	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	6 kali	200%
		Jumlah layanan dropping air yang diterima masyarakat	80 tangki	100 tangki	80 tangki	100%	80 tangki	180 tangki	225%
		Jumlah penerima bantuan sosial jamban sehat (PIWK)	12 KK	16 KK	12 KK	100%	12 KK	28 KK	233%
	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	2400 layanan	2400 layanan	2400 layanan	50%	2400 layanan	3600 layanan	150%
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 %	100 %	100%	50%	100%	100 %	100 %
		Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	100 %	100 %	100%	50%	100%	100 %	100 %
		Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (PIWK)	1 kali	1 kali	1 kali	0%	1 kali	1 kali	100%
		Dokumen usulan rencana kegiatan (DURP)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	200%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hail Program Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
			7 kalurahan	7 kalurahan	7 kalurahan	7 kalurahan	0%	7 kalurahan	7 kalurahan	100%
			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	200%
			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	200%
			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	200%
			7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	0%	7 dokumen	7 dokumen	100%
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	1 dokumen	1dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Nglipar

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintah Kapanewon dan tugas pembantuan serta melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah Kapanewon mencakup bidang pemerintah umum dan pemerintah Kalurahan, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang pembangunan masyarakat dan Kalurahan, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing – masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh Seksi yang berkaitan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Umum di Kapanewon.

Pelayanan Umum yang dilaksanakan Kapanewon Nglipar terdiri dari :

d.1. PARIPURNA

1. Surat Keterangan Pindah Masuk dan Pindah Keluar
2. Surat Keterangan Duplikat Kelahiran
3. Surat Keterangan Duplikat Kematian

d.2. REKOMENDASI

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2. Surat Keterangan Tidak Mampu, Belum Pernah Nikah, Bantuan Sosial, Keringanan Biaya, Bea Siswa
3. Izin HO
4. Proposal
5. Surat Tanda Penduduk (KTP)
6. Proposal
7. Dispensasi Nikah
8. Akta Kelahiran

d.3 PENGESAHAN / LEGALISASI

1. Keterangan Ahli Waris
2. Permohonan Kredit dan Surat Kuasa Menbebaskan Hak Tanggungan
3. Permohonan Sertifikat Tanah
4. Permohonan Tanah Wakaf

Dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang kinerja pelayanann Kapanewon Nglipar akan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan rencana strategis tahun 2021–2026 dengan dukungan APBD Kabupaten Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam DPA Kapanewon Nglipar.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kapanewon Nglipar

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Nglipar maka diperlukan tentang potret Kapanewon Nglipar saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Nglipar adalah sebagai berikut :

2.3.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat Kalurahan
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah Kalurahan belum merata
3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal
4. Belum sesuai jabatan dengan kompetensi pegawai
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
3. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional
4. Belum optimalnya kunjungan wisatawan
5. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya
6. Penjualan hasil tanaman keras belum optimal
7. Perdagangan / perniagaan kurang berkembang
8. Potensi industri kecil terutama kerajinan genteng dan anyaman bambu (caping) dalam pemasaran kurang.

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar SKPD maupun sumber dana
4. Potensi wisata Embung Sriten dan Hutan Buah sudah mulai tergarap, namun belum secara optimal
5. Belum adanya pusat penjualan (*show room*) bagi hasil industri Kapanewon Nglipar

6. Kapanewon Nglipar secara geografis tidak berada pada simpul jalan sehingga tidak menguntungkan untuk perkembangan sektor perdagangan

2.3.3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar sulit masuk
2. Air sungai Oya belum dimanfaatkan secara optimal
3. Masih banyaknya prosentase jalan yang kurang representatif dan jembatan yang belum memadai untuk jalur transportasi. Sebagian Kalurahan termasuk kategori daerah rawan bencana (tanah longsor)

b. Permasalahan

1. Belum adanya Gapura masuk Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang layak
2. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah yang menuju obyek wisata.
3. Belum adanya prasarana pengolahan air Sungai Oya untuk air minum, atau pemuatan karamba untuk budidaya ikan
4. Masih banyak jalan lingkungan dan Kalurahan yang kondisinya belum memadai
5. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana antar daerah perbatasan

2.3.4. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Terdapatnya potensi konflik daerah perbatasan

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya
3. Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar
4. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja

2.3.5. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional atau Internasional

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah "Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat". Pada tahapan lima tahun kedua ini pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang industri kecil dan menengah berbasis pertanian serta pariwisata yang unggul dan mampu

menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2025 yang meliputi:

- a. Persatuan dan kesatuan menjadi modal utama;
- b. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal;
- c. Pemberdayaan ekonomi sosial kemasyarakatan;
- d. Terselenggaranya harmonisasi antar birokrasi, pemerintah yang bersih dan demokratis;
- e. Pengembangan dan pelestarian seni budaya;
- f. Menjadikan peran penting bidang pendidikan dan kesehatan;
- g. Pembangunan kawasan yang terintegrasi.

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2021-2025, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Nglipar adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kapanewon
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan
5. Peningkatan perekonomian masyarakat
6. Peningkatan kesejahteraan sosial

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Nglipar terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2025, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Nglipar dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan Kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Nglipar sebagai birokrasi /aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Nglipar. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil

hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Nglipar, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Nglipar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2025.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata
4. Adanya potensi kerajinan
5. Adanya potensi hasil tanaman keras
6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, dan lain – lain
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi
8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
9. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
10. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah Kapanewon dan Kalurahan

Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil tanaman keras seperti, coklat, mete
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/corblok) dengan peningkatan jumlah alat transportasi
8. Sebagian Kalurahan termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor

2.3.6. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Nglipar

Dalam rangka merumuskan Renstra Kapanewon Nglipar 2021-2026, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah RPJMD,

dan implikasi RT / RW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Nglipar dengan memetakan *kekuatan* dan *kelemahan* yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon.

a.1.Kondisi Fisik Dasar

1. Secara topografis termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung, sehingga wilayah Nglipar potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan tembakau), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak
2. Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar Opak-oya yang sangat berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi
3. Secara geomorfologi wilayah Nglipar 80 % berupa perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60 derajat terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan

a.2. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung di usia 26-55 th
2. Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah
3. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani

a.3.Kondisi Perekonomian

1. Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kapanewon Nglipar, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua Kalurahan
2. Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil buah-buahan dan tembakau), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.

a.4.Kondisi Pemerintahan

1. Aparat Kapanewon telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 206 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kapanewon

2. Pengembangan otonomi Kalurahan yang ditandai dengan dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan melalui Alokasi Dana Kalurahan (ADD).
3. Penguatan kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiary
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kapanewon Nglipar sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kapanewon sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Jumlah aparatur pemerintah Kapanewon yang cukup memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas
3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan
4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan
5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu yang cukup prospektif

b. Kelemahan

1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, tanah longsor
2. Sebagai wilayah perbatasan, Kapanewon Nglipar kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat
3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi
4. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi
5. Penguasaan teknologi masih rendah
6. Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif
7. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kapanewon dan Kalurahan belum optimal

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kapanewon Nglipar dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tinjauan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Nglipar sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Gunungkidul.

b.1. Peluang

1. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional
2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
3. Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten - kabupaten
4. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

b.2. Tantangan

1. Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan
3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif
4. Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat

2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk tahun anggaran 2024. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat Kalurahan sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi Penghitungan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan

dana yang dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang ditingkat kabupaten besaran angkanya tidak sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Musyawarah ditingkat Kapanewon dengan kegiatan memproses keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah Kapanewon. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide-ide maupun anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana suatu program pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

2.5.2 Dalam rangka merumuskan visi dan misi Rencana Strategis Kapanewon Nglipar 2021 – 2025, merupakan hasil analisis dari isu – isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD. Untuk menganalisa isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Nglipar dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon. Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kapanewon Nglipar dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tujuan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Nglipar sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dan Klaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Kebijakan nasional tentang Kapanewon tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kapanewon dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 91 tahun 2019 tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan dan tugas Kapanewon dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Kapanewon.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Nglipar

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dimana tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Dimana indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 tahun 2016 perihal adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2024”

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional dan nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring

budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang memiliki jiwa wirausaha dan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan baik, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

Tugas dan Fungsi Kapanewon Nglipar sebagai Perangkat Daerah yang akan mendukung Visi dan Misi RPJM Daerah Tahun 2021 – 2026 antara lain :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa;

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas di atas, terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor-faktor penghambat pelayanan Kapanewon Nglipar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas;
2. Belum cukup memadainya sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*);
3. Masih kurang lancarnya jaringan teknologi informasi dan telekomunikasi;

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung terlaksanannya pelayanan Kapanewon Nglipar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang telah tersedia;
2. Partisipasi masyarakat dan desa yang cukup tinggi;
3. Koordinasi yang cukup baik lintas sektor;
4. Wilayah Kapanewon Nglipar yang dilalui jalur-jalur alternatif menuju pantai;
5. Beberapa objek wisata ada di wilayah Kapanewon Nglipar;

Berdasarkan misi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan dikaitkan dengan tugas dan fungsinya maka Kapanewon Nglipar akan mendukung upaya pencapaian misi ke satu yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Kapanewon Nglipar merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, sehingga hanya merupakan salah Perangkat Daerah pendukung misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tersebut. Keberhasilan dalam

pencapaian misi tersebut bagi Kabupaten Gunungkidul tentunya juga harus didukung oleh Perangkat Daerah yang lainnya.

Faktor Penghambat :

- 1) Perilaku dan kinerja sebagian aparaturnya Kapanewon dan desa belum optimal.
- 2) Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.
- 3) Masih tingginya/banyaknya keluarga miskin dan pengangguran.
- 4) Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum terlaksana secara optimal.
- 5) Infrastruktur publik belum merata dan memadai.
- 6) Pelestarian kebudayaan masih rendah.
- 7) Potensi bencana tanah longsor sangat tinggi khususnya pada musim penghujan

Faktor Pendukung :

- 1) Potensi wisata daerah yaitu pariwisata embung air dan pegunungan.
- 2) Potensi kerajinan kayu yang cukup prospektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 3) Potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
- 4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan.
- 5) Adanya lembaga perbankan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030, wilayah Kapanewon Nglipar terbagi dalam dua struktur, sebagian masuk dalam Struktur Ruang Sistem Perkotaan yaitu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk Perkotaan Nglipar, dan sebagian masuk dalam Sistem Perdesaan, yaitu desa Nglipar.

Sedangkan dari rencana pola ruang Kapanewon Nglipar termasuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yaitu kawasan karst yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi.

Dari peruntukan lahan, wilayah Kapanewon Nglipar termasuk dalam kawasan peruntukan hutan produksi.

3.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis juga belum dapat dilakukan penelaahan yang lebih mendalam. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sudah ditetapkan pada Tahun 2011 yang lalu setelah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan, namun kajian mengenai lingkungan strategis belum pernah dilakukan. Sedapat mungkin dilakukan kajian yang dapat dikemukakan seperti penjelasan di bawah ini.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul dikelompokkan ke dalam tiga zona pengembangan, yaitu Zona Utara, Zona Tengah, dan Zona Selatan. Sebagian wilayah Kapanewon Nglipar terletak di Zona Utara dengan ibukota Kapanewon terletak di Desa Nglipar, dan sebagian termasuk pada Zona Tengah. Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan curah hujan rata-rata 397 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 22 hari, suhu udara berkisar 18⁰ C – 35⁰ C. Wilayah Kapanewon cukup potensial untuk tanaman tahunan seperti tanaman perkebunan, dan tanaman keras, juga tanaman semusim seperti padi, palawija.

Tabel 3.1
 Tujuan Kapanewon Nglipar

No.	Tujuan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kapanewon	81,00%

Tabel 3.2
Sasaran Kapanewon Nglipar

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	81
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	81.2(A)
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	4

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kapanewon Nglipar dalam menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasikan tuntutan formal, akan tetapi berdasarkan beberapa faktor yang memang harus direalisasikan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai konsekuensi untuk merealisasikan visi dan misi Kapanewon Nglipar dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
- b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah baik Kapanewon maupun desa.
- c. Pemanfaatan potensi yang ada dengan tujuan mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan prima.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			135,000,000				135,000,000
2	22	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		100 Persen	100,000,000			100 Persen	135,000,000
2	22	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		100 Persen	100,000,000			100 Persen	135,000,000
2	22	7 Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	1 laporan	100,000,000	[DANA KHUSUS] - Dana Keistimewaa n DIY		1 laporan	135,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4									
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH					35,000,000	35,000,000
4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 Persen	35,000,000		100 Persen	35,000,000
4			Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	100 Persen	35,000,000		100 Persen	35,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
4	1	4	2.01	10	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	4 dokume n	35,000,000	[DANA KHUSUS] - Dana Keistimewaa n DIY	4 doku men	35,000,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN ADMINISTRASI							
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	1.246.386.42 5		100 Persen	1.358.166.42 5	1.711.366.42 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 1 1 2.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana		100 Persen	27.740.000		100 Persen	49.040000	
7 1 1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	3 dokumen	24.740.000		3 dokumen	30.040,000	
7 1 1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	1 dokumen	500,000		1 dokumen	5.000,000	
7 1 1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kab. Gunungkidul	1 dokumen	500,000		1 dokumen	4.000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	, Nglipar, Semua Kelurahan	n		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7 1 1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	2 dokume n	500,000			2 dokume n	2,000,000
7 1 1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	2 dokume n	500,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokume n	2,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	1 1 2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	13 dokumen	500,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 dokumen	3,000,000
7	1 1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	12 dokumen	500,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen	2.500,000
7	1 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)		100 persen	1,041,700,000		100 persen	1.043.700.000
7	1 1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	210 orang/bulan	1.040.200.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	210 orang/bulan	1.040.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	1 1 2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	1 dokumen	750,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.500,000
7	1 1 2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	13 dokumen	750,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 dokumen	2.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja ^a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	655,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	2.500,000	
7 1 1 2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	90 dokumen	655,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 dokumen	2.500,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	12,305,000			100 persen	48.900.000	
7 1 1 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	850.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 paket	2.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja ^a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 1 1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	17 paket	4.550.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 paket	25.000.000	
7 1 1 2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	4 paket	770.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	2.000.000	
7 1 1 2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	8 paket	1.260.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 paket	8.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 1 1 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	248 dokumen	2.400.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	248 dokumen	2.500.000	
7 1 1 2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	12 laporan	1.050.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	4.000.000	
7 1 1 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	24 laporan	800,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 laporan	3.000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	4 dokumen	625.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	2.000.000	
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)		0 persen	0		100 persen	40.000.000	
7 1 1 2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	0 paket	0	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	10.000.000	
7 1 1 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	0 unit	0	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 unit	30.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	1	2.08	100 persen	96.926.425		100 persen	96.926.425	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)							
7	1	1	2.08	36 laporan	44.638.925,	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	36 laporan	44.638.925,	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7	1	1	2.08	12 laporan	52.287.500	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	12 laporan	52.287.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7	1	1	2.09	100 persen	67.060.000		100 persen	77.100.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	121 kendara an dinas	59.900.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Target Capai an Kinerj a Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1							121 kenda raan dinas
1							
2.09							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catat an Penti ng	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1 1 2.09	6	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	15 unit	2,500,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	6.000,000
7	1 1 2.09	9	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	2 unit	4.060.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 1 1 2 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kelurahan	2 unit	600.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 unit	1.200.000	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana		100 Persen	31.180.000		100 Persen	44.180.000	
7 1 2 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terlaksana		100 persen	3.180.000		100 persen	5.180.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	3 laporan	3.180.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 laporan	5.180.000
7	1	2	2.02	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100 persen	28.000.000		100 persen	39.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
7								
1								
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	6 laporan	16.500.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 laporan	24.000.000
2.02								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 2 1 2 2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	5 laporan	11.500.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 laporan	15.000.000	
7 3 1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi		100 persen	27.129.800		100 persen	49.500,000	
7 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Terfasilitasi	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	100 persen	18.084.800	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	28.500,000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		15 dokumen	9.244.800		4 dokumen	19.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kelurahan	3 laporan	8.840.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 laporan	9.000.000
3								
2.01								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase terfasilitasinya layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana		100 persen	9.045.000		100 persen	21.000.000
7 1 3 2.03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Kab. Gunungkidul , Ngipar, Semua Kelurahan	2 lembaga	7.410.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 lembaga	16.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	5 laporan	1.635,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 laporan	5,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi		100 Persen	19.450.000		100 Persen	41.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Laporan / Dokumen)		4 laporan	19.450.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	41.000.000
7 1 4 2.01 2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	2 laporan	7.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	18.000.000
7 1 4 2.01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	2 laporan	12.450.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	23.000.000
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi		100 Persen	43.600.000			100 Persen	158.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 Persen	43.600.000		100 Persen	158.000.000	
7 1 5 2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	30 orang	34.750.000		75 orang	140.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
	Indonesia	Indonesia (Orang)				Target Capaian Kinerja a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 1 5 2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kelurahan	2 dokumen	8.850.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	18.000.000	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana		100 Persen	8.675.000		100 Persen	104.700.000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 persen	8.675.000		100 persen	104.700.000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.125.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	1 kali	3,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja ^a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)							
7 1 6 2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	2 dokumen	1.400.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	4.700.000
7 1 6 2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	4 dokumen	1.200.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen	5.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja ^a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	1 6 2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kelurahan	2 dokumen	1.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali 21 orang	2,500,000
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kelurahan	0 kalurahan	0	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kalurahan	76.500.000
7	1 6 2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kelurahan	1 dokumen	950.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	3,500,000
7	1 6 2.01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua	1 dokumen	1.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer	1 dokumen	2,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Kelurahan			Umum-Dana Alokasi Umum			
7 1 6 2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	2.000.000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul , Nglipar, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 kesepakatan	4.000.000	
			TOTAL		1.511.421.225			1.711.366.425	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kapanewon Nglipar disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Nglipar yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Nglipar telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan Pembangunan.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Nglipar sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2024.

KAPANEWON NGLIPAR,

ttd

MUH SETYAWAN INDRIYANTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XL
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON NGAWEN
TAHUN 2024
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam regulasi tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD. Renja PD disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), artinya, Renja PD disusun berdasarkan pada RKPD.

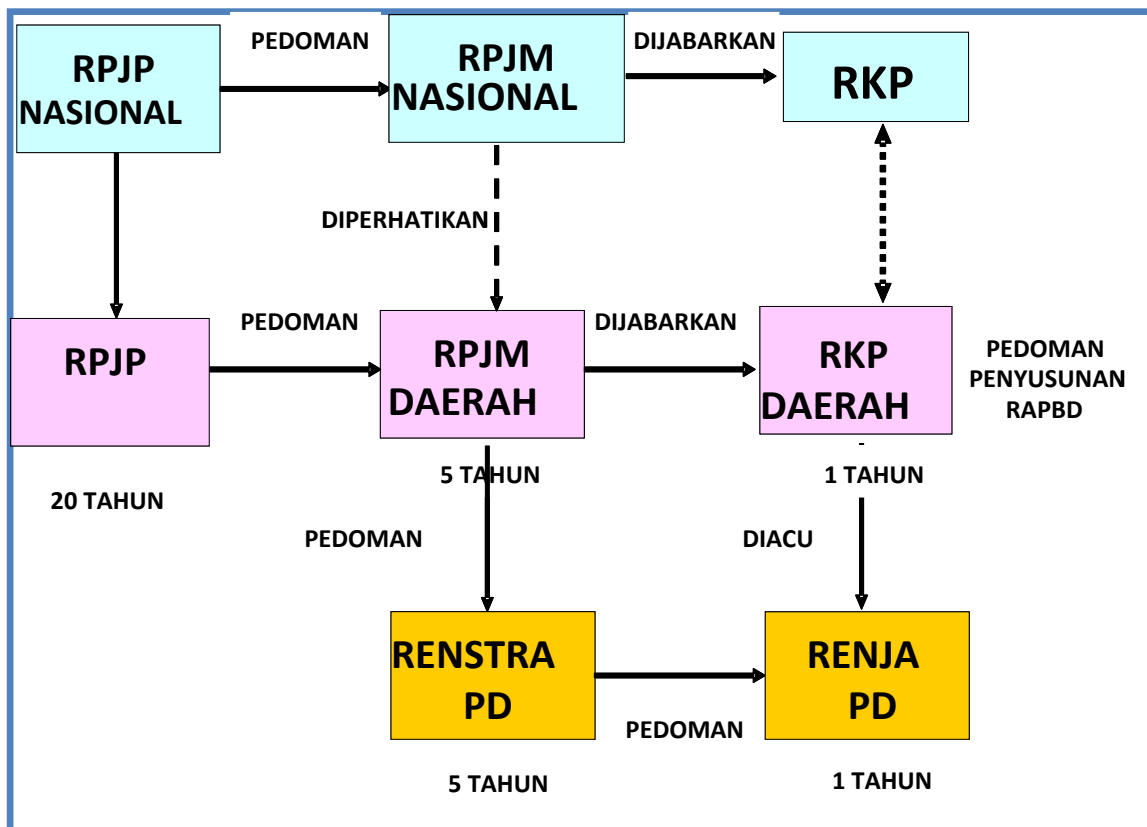
Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan. Program/kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kapanewon, yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam Renja PD mengandung strategi yang menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kapanewon Ngawen 2024 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja Kapanewon Ngawen sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis

RKPD. Renja Kapanewon Ngawen 2024 memuat arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu satu tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :



Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja SKPD serta dokumen perencanaan lainnya

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 052/5969 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
17. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/KPTS/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gunungkidul.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai

dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kapanewon Ngawen.

2. Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2024 adalah:

- a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kapanewon Ngawen baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
- b. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kapanewon Ngawen.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
- e. Menjadi dasar Penyusunan RKA Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kapanewon Ngawen Tahun 2024 disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON NGAWEN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Ngawen dan Capaian Renstra Kapanewon Ngawen
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Ngawen
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Ngawen
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON NGAWEN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Ngawen

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON NGAWEN

- 4.1. Sasaran dan Program/Kegiatan
- 4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan penting
- 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.3 Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON NGAWEN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Ngawen dan Capaian Renja Kapanewon Ngawen

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul lebih terarah, terfokus serta untuk mencapai target sasaran tahun 2024.

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ini memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2/Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan untuk menyusun Perencanaan tahunan daerah tahun 2021 mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025.

Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Pada Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen dalam pelaksanaan Renja 2023 program dan kegiatan pada semester I (Triwulan I), sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Kapanewon Ngawen Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Perse ntase
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	I. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.610.000	10.162.000	38,18
	II. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	0	0
	III. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	820.000	0	0
	IV. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.595.000	1.595.000	100
	V. Koordinasi dan Penyusunan	1.130.000	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Perse ntase
	Perubahan DPA-SKPD	4.545.000	885.000	19,47
VI.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.435.000	1.587.000	46,20
VII.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
I.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.000.357.176	206.211.467	20,61
II.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.440.000	1.440.000	100
III.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4.960.000	1.070.000	21,57
	✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
I.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.830.000	2.870.000	49,22
	✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah			
I.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.063.000	1.132.000	36,95
II.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.347.000	39.687.000	57,22
III.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.724.000	6.908.200	26,85
IV.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaa	7.450.000	3.230.000	43,35
V.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	300.000	0,25

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Perse ntase
	VI. Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000	525.000,00	0,25
	VII. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.140.000	3.270.000	26.93
	✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	I. Pengadaan Mebel	12.375.000	12.375.000	100
	II. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.900.000	2.900.000	100
	✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	I. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.190.000	6.165.000	24,47
	II. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.399.100	3.882.126	22,31
	✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.900.000	13.719.000,0	31,97
	II. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.620.000	0	0
	III. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.887.500	6.975.000	20,58
	IV. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000	900.000	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Perse nta se
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan I. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan I. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan II. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ✓ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat I. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 	<p>5.750.000</p> <p>117.910.000</p> <p>6.840.000</p> <p>690.440.000</p>	<p>0</p> <p>1.470.000</p> <p>2.810.000</p> <p>313.260.000</p>	<p>0</p> <p>1,24</p> <p>41,08</p> <p>0,45</p>
3	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa I. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh 	55.105.000	19.000.000	34,47

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Perse ntase
	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan II. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ✓ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan I. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan II. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.320.000 4.370.000 6.440.000	7.370.000 2.010.000 0	88,58 45,99 0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum I. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan II. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.000 8.880.000	3.500.000 0	100 0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah I. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	53.412.500	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Perse ntase
	<p>rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>II. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>	3.910.000	1.130.000	28,90
6	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>I. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</p> <p>II. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p> <p>III. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</p> <p>IV. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</p> <p>V. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa</p> <p>VI. Rekomendasi</p>	<p>2.300.000</p> <p>1.680.000</p> <p>40.215.000</p> <p>1.801.000</p> <p>1.670.000</p>	<p>1.190.000</p> <p>0</p> <p>12.901.000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>51,73</p> <p>0</p> <p>32,08</p> <p>0</p> <p>0</p>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Perse ntase
	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.030.000	0	0
	VII. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.135.000	0	0
	VIII. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.230.000	0	0
	IX. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.921.000	1.525.000	52,21
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN I. Adat, Seni, Tradisi dan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100.000.00 0	0	0
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN ✓ Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan I. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	35.000.000, -	5.256.000	15,01

TABEL 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 (Tahun lalu/ n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/ n-1)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen 100	100	100	100	100	100	100	100,00

X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Indeks	8,29	0	0	0	0	0	8,14	8,14	8,14	100,00
		<i>Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana.</i>	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15	3	3	3	3	100	2	8	53,33	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	1	100	1	3	60,00	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	100	1	3	60,00	

X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	3	2	2	2	100	2	70,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10	3	2	2	2	100	1	60,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	85	17	17	17	17	100	17	60,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	104	6	32	32	32	100	32	67,31
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	84	0				0	84	100,00
		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00

X.XX.01.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	1190	238	238	238	238	100	238	714	60,00
X.XX.01.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	1	100	1	3	60,00
X.XX.01.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65	13	13	13	13	100	13	39	60,00
X.XX.01.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	30	6	6	6	6	100	6	18	60,00
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00

X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	30	6	6	6	6	100	6	18	60,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks</i>	43,57	0				0	43,71	43,71	100,32
		<i>Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi</i>	<i>persen</i>	100	100	100	100	100	100	100	300	300,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	3	3	3	3	100	3	9	60,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	12	12	12	12	100	7	31	147,62
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	75	3	3	3	3	100	15	21	28,00

X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	2	2	2	2	100	2	6	60,00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1240	247	247	247	248	100	248	742	59,84
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	25	3	3	3	5	100	5	11	44,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	24	24	24	24	100	24	72	60,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	150	0	3	3	30	100	30	33	22,00
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana.	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	131	0	0	0	25	0	25	25	19,08

X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	0	0	0	0	0	0	5	5	55,56
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60					0	60	60	60	100,00
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	12	100	12	36	36	60,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	180	36	36	36	36	100	36	108	108	60,00

X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari terfasilitasinya jasa kebersihan	Laporan	60	12	12	12	12	100	12	36	60,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Unit	820			200		100		200	24,39
		<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana.</i>	<i>persen</i>	100	100	100	100	100	100	100	300	300,00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	672	168	168	168	168	100		504	75,00
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan Mebel	Paket Pemeliharaan	1	0	0	0	0	0		0	0,00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	108	23	23	23	23	100		73	67,59

X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	9	9	9	9	9	100	9	27	300,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	10	2	2	2	2	2	100	2	6	60,00
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00

7.01.02.2.01.0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	15	2	2	2	2	100	2	6	40,00
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Laporan</i>	<i>110</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>100</i>	<i>21</i>	<i>65</i>	<i>59,09</i>
		<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terfasilitasi</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>
7.01.02.2.02.0 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	40	8	8	8	8	100	8	24	60,00

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	70	14	14	14	14	14	100	14	100	14	42	60,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Pemberdayaan Desa	Indeks	8	0	0	0	0	0	0	8,5	0	9	106,25	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300,00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	45	9	9	9	9	9	100	9	100	27	60,00	

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	2	0	0	0	0	0	0	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terfasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasya rakatan	10	2	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	10	2	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	10	2	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60,00
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300,00

7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	2	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	1	1	1	100	100	1	3	60,00
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00

7.01.04.2.02.0 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5	1	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks	41,5	0	0,0	0,0	0,0	0	41,5	42	100,00
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00

7.01.05.2.01.0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	300	30	75	75	100	75	180	60,00
7.01.05.2.01.0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	40	8	8	8	100	8	24	60,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	57	57	57	57	57	57	0	57	114	200,00
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300,00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	20	4	4	4	4	4	100	4	12	60,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	70	14	14	14	14	14	100	14	42	60,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	160	32	32	32	32	32	100	32	96	60,00

7.01.06.2.01.0 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	5	1	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.06.2.01.0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	4	1	1	1	1	100	0	2	50,00
7.01.06.2.01.0 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	5	1	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.06.2.01.0 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	10	2	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.06.2.01.1 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	10	2	2	2	2	100	2	6	60,00

7.01.06.2.01.1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	5	1	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.06.2.01.1 4	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	dokumen	5	1	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.06.2.01.1 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	5	1	1	1	1	100	1	3	60,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan	5	1	1	1	1	100	1	3	60,00

			<i>Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana</i>	<i>persen</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2.22.08.5.07.0 6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja	Laporan	4	0	1	1	100	100	100	100	100	1	2	50,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen	12	0	3	3	100	100	100	100	100	3	6	50,00
		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan terlaksana	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan terlaksana	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00

4.01.04.5.06.0 1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen	8	0	2	2	100	2	4	50,00
---------------------	--	---	---------	---	---	---	---	-----	---	---	-------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Ngawen

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelayanan Kapanewon digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Ngawen serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Tugas Pokok dan Fungsi yang harus diemban oleh Pemerintah Kapanewon mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan bidang Sosial. Fungsi dari masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh jawatan melalui program/kegiatan dalam setiap tahun anggaran.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Ngawen berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan meningkat yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%. Adapun formula indikator kinerja utama adalah:

- Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKalurahan tepat waktu dibagi jumlah kalurahan se kapanewon;
- Jumlah desa yang menetapkan RPKalurahan tepat waktu dibagi jumlah kalurahan se kapanewon;
- Jumlah KK miskin yang tertangani dibagi jumlah KK miskin se Kapanewon
- Jumlah kasus Kententraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dibagi jumlah kasus Kententraman dan Ketertiban Umum se kapanewon.
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon meningkat.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP). Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Ngawen dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON NGAWEN
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM,IKK)	Target Renstra Kapanewon Ngawen				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)										
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	NA	83,66	84,66	85,66	NA	85,81	84,66	85,66	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kapanewon Ngawen

Kinerja pelayanan di Kapanewon Ngawen mengacu pada tugas dan fungsi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

- masyarakat kalurahan; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
 - p. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Ngawen dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Ngawen sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Ngawen secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan
2. Terfasilitasinya pelayanan administrasi pemerintahan secara umum (Dispensasi Nikah, Penerbitan ijin UMK, Persetujuan SKTM, Surat Keterangan Domisili, surat keterangan ahli waris dll)
3. Terfasilitasinya kegiatan pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
4. Terfasilitasinya kegiatan monitoring Penyaluran BLT.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
6. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraanpemerintah kalurahan.
7. Terfasilitasinya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
8. Terfasilitasinya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan kalurahan.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan, karawitan, pedalangan dll)
12. Terfasilitasinya pembuatan buku profil desa, buku profil Kapanewon dan monografi Kalurahan

Adapun tingkat kinerja Kapanewon Ngawen yang tidak secara langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya kegiatan pelayanan antara lain :

1. terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti :

- LKj.IP, Laporan Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan keuangan bulanan.
4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen dan Pengendalian internal PD.

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ngawen maka diperlukan tentang potret Kapanewon Ngawen saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ngawen adalah sebagai berikut :

2.3.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

- 1) Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan masyarakat
- 2) Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
- 3) Belum efektifnya pengawasan melekat
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat

b. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan
- 2) Kualitas sumber daya manusia belum merata
- 3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS
- 4) Belum sesuai jabatan dengan kompetensi pegawai
- 5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

- 1) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
- 2) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional
- 4) Belum optimalnya penanganan obyek wisata
- 5) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas
- 6) Perdagangan / perniagaan kurang berkembang
- 7) Potensi industri kecil terutama kerajinan genteng dan anyaman bambu (caping) dalam pemasaran kurang.

b. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar PD maupun sumber dana
- 3) Potensi wisata Gunung Gambar dan Hutan Wonosadi sudah mulai tergarap, namun belum secara optimal
- 4) Belum adanya pusat penjualan (*show room*) bagi hasil industri Kapanewon Ngawen
- 5) Kapanewon Ngawen secara geografis tidak berada pada simpul jalan sehingga tidak menguntungkan untuk perkembangan sektor perdagangan.

2.3.3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini

- 1) Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar sulit masuk
- 2) Air sungai Oya belum dimanfaatkan secara optimal

- 3) Masih banyaknya prosentase jalan yang kurang representatif dan jembatan yang belum memadai untuk jalur transportasi. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan bencana (tanah longsor)

b. Permasalahan

- 1) Belum adanya prasarana pengolahan air Sungai Oya untuk air minum, atau pembuatan karamba untuk budidaya ikan
- 2) Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai
- 3) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana antar daerah perbatasan.

2.3.4. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

- 1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
- 2) Masih banyaknya pengangguran
- 3) Terdapatnya potensi Seni Budaya yang belum difasilitasi dan dikembangkan
- 4) Terdapatnya potensi Atlet Olah Raga yang belum difasilitasi dan dikembangkan

b. Permasalahan

- 1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
- 2) Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah
- 4) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan
- 5) Kurangnya Peluang Kerja di Wilayah Kapanewon Ngawen

2.3.5. Bidang Kesehatan

a. Kondisi Saat Ini

- 1) Masyarakat kurang teredukasi terkait pengertian dan penanganan terhadap pandemi Covid-19
- 2) Kurangnya fasilitas yang memadai bagi tenaga kesehatan dalam upaya penanganan Covid-19
- 3) Masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19
- 4) Minimnya fasilitas kebersihan seperti handsoap dan air bersih di tempat umum

b. Permasalahan

- 1) Banyak masyarakat yang belum tersosialisasi terkait langkah yang harus diterapkan dalam pencegahan Covid-19
- 2) Minimnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 3) Minimnya ketersediaan fasilitas kebersihan seperti handsoap dan air bersih di tempat umum.

2.3.6. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Terhadap Capaian Program Nasional atau Internasional

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 adalah "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026". Pada tahapan lima tahun pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 yang meliputi :

1. Mewujudkan Tata Pemerintah yang Berkualitas dan Dinamis.
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut:

- a. Isu strategis nasional
 - ✓ Percepatan penghapusan kemiskinan
 - ✓ Penanganan Stunting
 - ✓ Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19
 - ✓ Middle income trap riset, alokasi sumber daya, dan human capital
 - ✓ Percepatan pembangunan infrastruktur
 - ✓ Pengurangan risiko bencana
 - ✓ Pasokan energi dan pangan
 - ✓ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - ✓ Reformasi Birokrasi
 - ✓ Pilpres dan Pilkada Serentak tahun 2024
 - ✓ Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045
- b. Isu strategis provinsi
 - ✓ Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024
 - ✓ Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - ✓ Pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19
 - ✓ Penanganan Stunting
 - ✓ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - ✓ Pasokan Energi dan Pangan
 - ✓ Perencanaan Pembangunan jangka Panjang 2025 - 2045
- c. Isu strategis daerah
 - ✓ Pilpres dan pilkada serentak tahun 2024 -
 - ✓ Penanganan stunting
 - ✓ Perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
 - ✓ Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 5
 - ✓ Penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19
 - ✓ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 0 (nol) Kemiskinan Ekstrem
 - ✓ Pengembangan potensi Pariwisata
 - ✓ Peningkatan Investasi
 - ✓ Perkembangan Teknologi Informasi
 - ✓ Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana
 - ✓ Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah
 - ✓ Pengembangan inovasi daerah

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2021 - 2026, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Ngawen adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peningkatan perekonomian masyarakat
6. Peningkatan kesejahteraan social
7. Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

8. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
9. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan
10. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana
11. Reformasi Birokrasi

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Ngawen dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Ngawen sebagai birokrasi /aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Ngawen. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan ketrampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah “Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.”

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi;
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kapanewon Ngawen sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Ngawen.

Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Ngawen, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Ngawen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan kesepakatan dari negara negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun negaranya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara negara yang ikut menandatangani program ini. Seperti program pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekwensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kapanewon Ngawen diimplementasikan untuk mencapai target target SDGs itu dalam lingkup Kapanewon.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolok ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai kebutuhan. Penyusunan program dan kegiatan di Kapanewon Ngawen diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Pemerintah Kapanewon Ngawen juga turut bertanggung jawab terhadap pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan, peningkatan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan, serta

kesiapsiagaan penanganan bencana dalam suasana pandemi Covid-19 yang sangat berdampak bagi jalannya sistem pemerintahan dan perekonomian masyarakat.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Ngawen, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Ngawen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan penerangan jalan
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata di Gununggambir dan Wonosadi
4. Adanya potensi kerajinan (Batik, Caping, Genteng, Mebel, Wuwung Seng)
5. Adanya potensi Wisata yang belum terekspose
6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, pertanian dan lain - lain
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi
8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
9. Adanya Industri Olahan Makanan
10. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11. Peningkatan fasilitas kesehatan dan kebersihan bagi masyarakat
12. Pemberian bantuan stimulan bagi KK miskin
13. Pemberian edukasi penerapan PHBS bagi masyarakat
14. Pengembangan SDM masyarakat

Faktor Penghambat :

1. Banyaknya pertambahan pengangguran dan rumah tangga miskin karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK)
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti, jagung, kedelai, kacang tanah dll
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

Adapun Prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Ngawen adalah Reformasi Birokrasi dengan sasaran daerah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

Dari penjabaran visi dan misi, maka tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen adalah:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon.
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kalurahan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
6. Peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.
7. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan.

2.3.7. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Ngawen

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra Kapanewon Ngawen 2021-2026, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RT / RW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Ngawen dengan memetakan *kekuatan* dan *kelemahan* yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon.

1) Kondisi Fisik Dasar

- a) Secara topografis termasuk dalam Zona Utara atau Zona Batur Agung, sehingga wilayah Ngawen potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan tembakau), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak
- b) Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar Opak-Oya yang sangat berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi
- c) Secara geomorfologi wilayah Ngawen 80 % berupa perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60 derajat terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan.

2) Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- a) Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung pada kelompok usia 26-55 th
- b) Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah
- c) Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani.

3) Kondisi Perekonomian

- a) Meningkatnya pengangguran karena dampak dari pandemi Covid-19 yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK)
- b) Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kapanewon Ngawen, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa
- c) Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil buah-buahan dan tembakau), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.

4) Kondisi Pemerintahan

- a) Aparat Kapanewon telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

- b) Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
- c) Penguatan kelembagaan Kapanewon dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiari
- d) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kapanewon Ngawen sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
- b) Jumlah aparatur pemerintah Kapanewon yang cukup memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas
- c) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan
- d) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan
- e) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu yang cukup prospektif
- f) Pemberian bantuan bagi KK miskin
- g) Kesadaran pentingnya penerapan PHBS bagi masyarakat

2. Kelemahan

- a) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, tanah longsor
- b) Sebagai wilayah perbatasan, Kapanewon Ngawen kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat
- c) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi
- d) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi
- e) Penguasaan teknologi masih rendah
- f) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif
- g) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kapanewon dan desa belum optimal

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kapanewon Ngawen dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tinjauan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Ngawen sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.

1. Peluang

- a) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional
- b) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat

- c) Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten – kabupaten di sekitarnya
- d) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

2. Tantangan

- a) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
- b) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan
- c) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif
- d) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat
- e) Membuka peluang kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran
- f) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

2.3.8. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2021-2026 maka Kapanewon Ngawen merumuskan Program dan Kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Adapun Program yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
- ✓ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- ✓ Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- ✓ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- ✓ Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
- ✓ Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk tahun anggaran 2024. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat desa sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi

Penghitungan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada di masyarakat pada sektor perekonomian dan kesehatan belum seluruhnya dapat diakomodir, namun dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Kapanewon Ngawen, maka prioritas usulan sesuai kebutuhan adalah peningkatan SDM masyarakat sehingga mampu untuk mendukung terlaksananya peningkatan dan pemulihan perekonomian serta meningkatkan ketahanan pangan. Disamping itu juga prioritas kegiatan pada program pengentasan kemiskinan adalah Jambanisasi yang terakomodir melalui proses Musrenbang.

Adapun beberapa usulan di maksud akan mempengaruhi besaran pagu pada tahap analisis kebutuhan, hal ini yang membuat besaran dana yang lebih besar dari Rancangan Awal RKPD tahun 2024. Hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 2.4 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pagu, indikator kinerja, target capaian kinerja antara RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada Rancangan Renja Kapanewon Ngawen disebabkan karena perubahan kebijakan Tim Anggaran Perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat.

Tabel 2.4
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul

PERANGKAT DAERAH : KAPANEWON NGAWEN		Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting	
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif 2024
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00	
1. 2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana (%)	100 %	100.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana (%)	100 %	100.000.000,00	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	1 Laporan	100.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	1 Laporan	100.000.000,00	

2.22.08.5 .07.0006	Gelar Budaya Jogja	(Kapan ewon Ngawen Ngawen)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	Lap oran	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	(Kapan ewon Ngawen Ngawen)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	Lap oran	100.000.000,00
4						35.000.000,00						35.000.000,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					35.000.000,00
1.	4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN					35.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN					35.000.000,00
			Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)	100	%				Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)	100	%	
4.01.04.5 .06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan(D okumen)	4	Dok umen	35.000.000,00	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan(Dok umen)	4	Dok umen	35.000.000,00

4.01.04.5 .06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	(Kapan ewon Ngawen Ngawen)	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	4	Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	(Kapan ewon Ngawen Ngawen)	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	4	Dokumen	35.000.000,00
7						1.482.854.676,00						1.482.854.676,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI					1.482.854.676,00	KECAMATAN ADMINISTRASI					1.482.854.676,00
1. 7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					1.213.875.176,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					1.213.875.176,00
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100	%				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100	%	
7.01.01.2 .01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					34.952.500,00	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					34.952.500,00

7.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.14	Indeks	25.587.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Indeks	25.587.500,00
7.01.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	Indeks	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	Indeks	1.000.000,00
7.01.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Indeks	820.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)			Indeks	820.000,00

7.01.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD(Dokumen)	1	Dok ume n	1.595.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	Dok ume n	1.595.000,00
7.01.01.2 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	Dok ume n	1.130.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2.00	Dok ume n	1.130.000,00
7.01.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD(Dokumen)	1	Dok ume n	1.525.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD(Dokumen)			1.525.000,00

7.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapane wone Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.00	Lap oran	3.295.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapane wone Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	28	Lap oran	3.295.000,00
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah (Laporan)	5.00	Lap oran	1.006.187.176,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	84	Inde ks	1.006.187.176,00
7.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kapane wone Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.00	Lap oran	1.000.357.176,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kapane wone Ngawen , Ngawen)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	238	Ora ng/ Bul an	1.000.357.176,00
7.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Akhir SKPD	(Kapane wone Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.00	Lap oran	870.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Kapane wone Ngawen , Ngawen)				870.000,00

7.01.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Ngawen)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD(Laporan)	1	Lap oran	4.960.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Kapan e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	Lap oran	4.960.000,00	
7.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ngawen)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	6	Dok ume n	1.230.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	6	Dok ume n	1.230.000,00	

7.01.01.2 .05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kaparewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	Dokumen	1.230.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kaparewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	Dokumen	1.230.000,00
7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	44.43	Indeks	58.643.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	44.43	Indeks	58.643.900,00
7.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kaparewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	Paket	1.932.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kaparewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	Paket	1.932.000,00
7.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kaparewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	3	Paket	18.630.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kaparewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	3	Paket	18.630.000,00

7.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kapaneon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	Paket	23.325.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kapaneon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	Paket	23.325.500,00
7.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kapaneon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	Paket	4.766.400,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kapaneon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	Paket	4.766.400,00
7.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Kapaneon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Dokumen Bahan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	247	Dokumen	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Kapaneon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Dokumen Bahan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	247	Dokumen	1.200.000,00
7.01.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Kapaneon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.00	Laporan	1.050.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Kapaneon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.00	Laporan	1.050.000,00

7.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Lap oran	7.740.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Lap oran	7.740.000,00
7.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	17	Unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	17	Unit	-
7.01.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	Unit	-
7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Laporan)	60	Lap oran	40.096.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Laporan)	60	Lap oran	40.096.600,00

7.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	Lap oran	25.097.500,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	Lap oran	25.097.500,00
7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Lap oran	14.999.100,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Lap oran	14.999.100,00
7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	Lap oran	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	Lap oran	-
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah					72.765.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.765.000,00

7.01.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	205	Unit	39.300.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	205	Unit	39.300.000,00
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	96	Unit				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	96	Unit	
7.01.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0.00	Unit	-	Pemeliharaan Mebel	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0.00	Unit	-
7.01.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9.00	Unit	3.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9.00	Unit	3.500.000,00

7.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Kapanewon Ngawen)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	Unit	29.965.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Kapanewon Ngawen)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	Unit	29.965.000,00
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				159.947.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					159.947.000,00
	7.01.02.2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9.395.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					9.395.000,00
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)	100	%				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)	100	%	
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	3	Laporan				Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	3	Laporan	

7.01.02.2 .01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2.00	Lap oran	9.395.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2.00	Lap oran	9.395.000,00
7.01.02.2 .02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah laporan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	21	Lap oran	150.552.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	21	Lap oran	150.552.000,00

7.01.02.2 .02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan(Laporan)	4.00	Lap oran	145.322.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan(Laporan)	4.00	Lap oran	145.322.000,00
7.01.02.2 .02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9.00	Lap oran	5.230.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9.00	Lap oran	5.230.000,00
3.	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terfasilitasi (%)	100	%	34.977.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)	100	%	34.977.500,00

7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Indeks Koordinasi Pemberdayaan Desa (Indeks)</i>	8	<i>Indeks</i>	31.457.500,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Indeks Koordinasi Pemberdayaan Desa (Indeks)</i>	8	<i>Indeks</i>	31.457.500,00
7.01.03.2 .01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	(Kapan e won Ngawen , Ngawen)	8.00	Dok ume n	28.087.500,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)</i>	8.00	Dok ume n	28.087.500,00
7.01.03.2 .01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapan e won Ngawen ,			3.370.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.370.000,00

7.01.03.2 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Ngawen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1.00	Lap oran	3.520.000,00		Ngawen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1.00	Lap oran	3.520.000,00
				2	Indeks				Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Indeks)	2	Indeks	
7.01.03.2 .03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Ngawen)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan	1.00	Lem bag a Kem asy ara kata n	3.520.000,00		(Kap e won Ngawen)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1.00	Lem bag a Kem asy ara kata n	3.520.000,00
									Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
7.01.03.2 .03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Ngawen)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			-		(Kap e won Ngawen				-

4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	,	Ngawen)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0.00	Lap oran	4.300.000,00
					Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)	100	%	
	7.01.04.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	2	Lap oran	4.300.000,00
	7.01.04.2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		(Kapal e on Ngawen , Ngawen)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-

7.01.04.2 .01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	(Kaparewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	Laporan	4.300.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	(Kaparewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	Laporan	4.300.000,00
5. 7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)	100	%	35.271.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)	100	%	35.271.500,00

7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)</i>	41.5	<i>Indeks</i>	35.271.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)</i>	41.5	<i>Indeks</i>	35.271.500,00
7.01.05.2 .01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)</i>	41.5	<i>Indeks</i>	29.051.500,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)</i>	41.5	<i>Indeks</i>	29.051.500,00

7.01.05.2 .01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	(Kapaneon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Orang)	25	orang	6.220.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	(Kapaneon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Orang)	25	orang	6.220.000,00

6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tertaksana (%)	100	%	34.483.500,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tertaksana (%)	100	%	34.483.500,00
	7.01.06.2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	60	Dokumen	34.483.500,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	60	Dokumen	34.483.500,00
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0.00	Dokumen	-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	(Kapanewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0.00	Dokumen	-

7.01.06.2 .01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	0.00	Dok ume n	-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	0.00	Dok ume n	-
7.01.06.2 .01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	26.00	Dok ume n	29.982.500,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	26.00	Dok ume n	29.982.500,00
7.01.06.2 .01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	Dok ume n	1.801.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	(Kapan ewon Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	Dok ume n	1.801.000,00

7.01.06.2 .01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	Dokumen	1.670.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	Dokumen	1.670.000,00
7.01.06.2 .01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3	Dokumen	1.030.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3	Dokumen	1.030.000,00
7.01.06.2 .01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0.00	Dokumen	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kapal e won Ngawen , Ngawen)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0.00	Dokumen	-

7.01.06.2 .01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	(Kapanewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	0.00	Dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	(Kapanewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	0.00	Dokumen	-	
7.01.06.2 .01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Pihak Ketiga					-	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Pihak Ketiga					-	
		(Kapanewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Pihak Ketiga (Dokumen)	0.00	Dokumen			(Kapanewon Ngawen, Ngawen)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Pihak Ketiga (Dokumen)	0.00	Dokumen		
TOTAL												1.617.854.676,00	1.617.854.676,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah ditingkat Kapanewon dengan kegiatan memproses keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah Kapanewon. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana suatu program pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Kapanewon Ngawen 2021 - 2026, yang merupakan hasil analisis dari isu –isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk menganalisa isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Ngawen dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon. Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kapanewon Ngawen dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tujuan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Ngawen sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Klaten.

Hasil Musrenbang Kapanewon Ngawen untuk tahun 2024 telah sesuai dan dapat mengakomodir sasaran dan program prioritas yang menjadi isu strategis Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan sektor wisata, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan. Adapun salah satu program prioritas pengentasan kemiskinan, melalui tahapan Musrenbang.

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa KAPANEWON NGAWEN	Kalurahan Tancep	Jumlah Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa	1 Kali	6.000.000,00	6.000.000,00	
2	(PIWK) - Koordinasi pemetaan wilayah Desa dalam satu Kecamatan yang terindikasi rawan masalah Penyakit Masyarakat (PEKAT).	Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	Jumlah Koordinasi pemetaan wilayah Desa dalam satu Kecamatan yang terindikasi rawan masalah Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1 Kali	3.500.000,00	3.500.000,00	

3	(PIWK) - Pelatihan perencanaan pembangunan di desa. KAPANEWON NGAWEN	Kalurahan Tancep	Jumlah Pelatihan perencanaan pembangunan di desa	1 Kali	16.000.000,00	16.000.000,00
4	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin KAPANEWON NGAWEN	Kalurahan Tancep	Jumlah KK yang memperoleh Bantuan Jamban	12	4.000.000,00	48.000.000,00
5	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin KAPANEWON NGAWEN	Kalurahan Jurangjero	Jumlah KK yang memperoleh Bantuan Jamban	1	4.000.000,00	4.000.000,00
6	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin KAPANEWON NGAWEN	Kampung Kidul, Kampung, Ngawen	Jumlah KK yang memperoleh Bantuan Jamban	10	4.000.000,00	40.000.000,00
7	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin KAPANEWON NGAWEN	Tapansari, sambirejo, cikal, buyutan, ngimbang, ngampon, sabrang, kepek, watusigar	Jumlah KK yang memperoleh Bantuan Jamban	12	4.000.000,00	48.000.000,00
TOTAL						165.500.000,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Pada Tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam Isu Strategis yang dikaitkan dengan 11 (sebelas) Isu Strategis Nasional, 7 (tujuh) Isu Strategis Provinsi dan 12 (dua belas) Isu Strategis Daerah yang dikaitkan dengan prioritas pengembangan kawasan wilayah utara dan geopark gunungsewu serta pendekatan tematik pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi penurunan angka kemiskinan, ketimpangan wilayah dan peningkatan sosial ekonomi pasca pandemi covid 19 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen pada Tahun 2023 belum menganggarkan kegiatan yang menunjang kebijakan tersebut.

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang terkait dengan tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen sesuai dengan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

A. Tugas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Panewu Ngawen adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

- yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
 - j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
 - k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
 - l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
 - m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
 - n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
 - p. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Ngawen

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, bahwa Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah “Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi;
 - a. Investasi dan pariwisata
 - b. Pengembangan sektor unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi;

Sedangkan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Ngawen didasarkan atas pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Rencana Strategis Kapanewon Ngawen. Sasaran Daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024, selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran OPD, Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran OPD dengan Format (tabel 3.1) sebagai berikut :

TABEL 3.1

Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD
2	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi Budaya Lokal yang dilestarikan

Selanjutnya disajikan hubungan antara sasaran pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1.1.1
TUJUAN KAPANEWON NGAWEN

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
	Tujuan :		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	87,66
	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi Budaya Lokal yang dilestarikan	12

TABEL 3.1.2
SASARAN KAPANEWON NGAWEN TAHUN 2024

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
	Sasaran :		
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	85,66

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,40 (A)
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	2

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Kapanewon Ngawen dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Ngawen

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	85,66

Tujuan “Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kapanewon yang berkualitas” untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan memiliki aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja.
2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat.
3. Pelayanan publik dilakukan sesuai dengan standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
4. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan secara tertib dan damai.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON NGAWEN

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a. Tema, Prioritas, dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah “Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”.

Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan Kapanewon Ngawen

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program /kegiatan	Pagu
1	Meningkatnya akuntabilitas PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.952.500,00
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.006.187.176,00
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.230.000,00
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.643.900,00
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.096.600,00
		7. Pemeliharaan Barang	

		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.765.000,00
2	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>9.395.000,00</p> <p>150.552.000,00</p> <p>31.457.500,00</p> <p>3.520.000,00</p> <p>34.483.500,00</p>
		<p>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	4.300.000,00

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.271.500,00
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	100.000.000 35.000.000

Pemerintah Kapanewon Ngawen sebagai birokrasi/aparat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Ngawen Tahun 2024 mengacu pada RKPD Tahun 2024. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kapanewon Ngawen didukung Aparatur Perangkat Daerah/Aparat Penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat diperlukan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Adapun rencana Pembiayaan bagi Aparatur Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.000.357.176,00.

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Ngawen Tahun 2024 terdiri dari 8 program, 17 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, dan Jawatan Umum sifat penyebarannya adalah menyeluruh ke semua kalurahan di wilayah Kapanewon Ngawen. Terkecuali program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, lokasi kegiatan ini di kantor Kapanewon yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kapanewon Ngawen.

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan di Kapanewon Ngawen Tahun 2024, total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah Rp1.617.854.676,00 (Satu milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

4.3 Usulan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Ngawen Tahun 2024 sudah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Dari usulan program dan kegiatan Kapanewon berasumsi kebutuhan selama Tahun Anggaran untuk kebutuhan Kapanewon Ngawen, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya program dan kegiatan utama dan pendukung berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.3.1 dan 4.3.2 sebagai berikut:

Tabel 4.3.1
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama berdasarkan 6 (enam) Prioritas
Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program /kegiatan	Pagu
1	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.395.000,00
		2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	150.552.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.457.500,00
		2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.520.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.483.500,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.300.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	35.271.500,00

		Kepala Daerah	
2	Peningkatan Ekonomi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	100.000.000 35.000.000

Sedangkan Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Pembangunan Tahun 2022 dapat dilihat pada table 4.3.2

Tabel 4.3.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program /kegiatan	Pagu
1	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.952.500,00 1.006.187.176,00 1.230.000,00 58.643.900,00 0,00 40.096.600,00

		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.765.000,00
--	--	--	---------------

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kapanewon Ngawen Tahun 2024

NO	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Maju (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.213.875.176,00	2.143.402.269,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.952.500,00	41.975.000,00	Kapanewon Ngawen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.006.187.176,00	1.782.242.269,00	Kapanewon Ngawen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.230.000,00	6.200.000,00	Kapanewon Ngawen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.643.900,00	157.460.000,00	Kapanewon Ngawen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	Kapanewon Ngawen
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.096.600,00	41.695.000,00	Kapanewon Ngawen
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.765.000,00	113.830.000,00	Kapanewon Ngawen
	Jumlah	1.213.875.176,00	2.143.402.269,00	

4.4 Rencana program dan kegiatan Kapanewon Ngawen

Rencana program dan kegiatan Kapanewon Ngawen Tahun 2024 untuk keseluruhan program dan kegiatan dapat dilihat pada (Tabel 4.4) berikut ini :

TABEL 4.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				150.000.000,00
1. 2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana (%)		100 %	100.000.000,00			%	150.000.000,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	(Kapanewon Ngawen, Ngawen)	1 Laporan	100.000.000,00			1 Laporan	150.000.000,00

2.22.08.5.07.000 6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta(Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	1	Laporan	100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY	1	Laporan	150.000.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH					35.000.000,00				25.970.000,00
4.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					35.000.000,00				25.970.000,00
1. 4.01.04		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)		100	%	35.000.000,00			%	25.970.000,00
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	4	Dokumen	35.000.000,00			2	Dokumen
4.01.04.5.06.000 1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan					35.000.000,00				25.970.000,00

		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	4	Doku men		Dana Keisti mewan DIY	2.00	Doku men	25.970.000,00
7							1.482.854.676,00			2.654.492.269,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						1.482.854.676,00			2.654.492.269,00
1. 7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	%		1.213.875.176,00		%	2.143.402.269,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	8.14	Indeks		34.952.500,00	8.29	Indeks	41.975.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.587.500,00			25.985.000,00

7.01.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	3	Doku men	1.000.000,00	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	2.00	Doku men	25.985.000,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	1	Doku men	1.000.000,00	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	1	Doku men	1.000.000,00
7.01.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	1	Doku men	820.000,00	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	1	Doku men	810.000,00
7.01.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	2	Doku men	1.595.000,00	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	2	Doku men	1.030.000,00

7.01.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	2.00	Dokumen	1.130.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.00	Dokumen	2.450.000,00
7.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	5.00	Laporan	1.525.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.00	Laporan	4.800.000,00
7.01.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	28	Laporan	3.295.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32.00	Laporan	5.900.000,00

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Daerah (Indeks)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	84	Indeks	1.006.187.176,00		84	Indeks	1.782.242.269,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	238	Oran g/Bu lan	1.000.357.176,00		238	Oran g/Bu lan	1.774.492.269,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	1	Lapo ran	870.000,00		1	Lapo ran	1.800.000,00

7.01.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	<i>(Kapane won Ngawen, Ngawen)</i>	13	Lapo ran	4.960.000,00	<i>Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum</i>	13	Lapo ran	5.950.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	<i>(Kapane won Ngawen, Ngawen)</i>	6	Doku men	1.230.000,00		6	Doku men	6.200.000,00
7.01.01.2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	<i>(Kapane won Ngawen, Ngawen)</i>	6	Doku men	1.230.000,00	<i>Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum</i>	6	Doku men	6.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					58.643.900,00				157.460.000,00

7.01.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	44.43	Indeks	1.932.000,00		44.43	Indeks	3.500.000,00
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	<i>(Kapane won Ngawen, Ngawen)</i>	3	<i>Paket</i>		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	3	<i>Paket</i>	<i>3.500.000,00</i>
7.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					18.630.000,00				105.500.000,00
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	<i>(Kapane won Ngawen, Ngawen)</i>	3	<i>Paket</i>		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	7.00	<i>Paket</i>	<i>105.500.000,00</i>
7.01.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					23.325.500,00				27.160.000,00

7.01.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	3	Paket	4.766.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.00	Paket	27.160.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	2	Paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	Paket	10.200.000,00
7.01.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	247	Dokumen	1.200.000,00				1.500.000,00
										1.500.000,00
7.01.01.2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1.050.000,00				2.500.000,00

7.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	3.00	Laporan	7.740.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.00	Laporan	2.500.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	12	Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24.00	Laporan	7.100.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	17	Unit	-		41	Unit	-
7.01.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-				-

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	0	Unit		40.096.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00	Unit	41.695.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	60	Laporan					60	Laporan	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						25.097.500,00					24.895.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	1	Laporan					12.00	Laporan	24.895.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.999.100,00					16.800.000,00

7.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	12	Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36.00	Laporan	16.800.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	0.00	Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.00	Laporan	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	205	Unit	72.765.000,00		205	Unit	113.830.000,00
7.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	96	Unit	39.300.000,00		168.00	Unit	35.230.000,00
7.01.01.2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel					-				-

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	0.00	Unit	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.00	Unit	19.500.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	9.00	Unit	29.965.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27.00	Unit	19.500.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	1	Unit	159.947.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	Unit	59.100.000,00
2.		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)		100	%				%	283.000.000,00

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	3	Laporan	9.395.000,00	2	Laporan	6.200.000,00
7.01.02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	2.00	Laporan	9.395.000,00	2.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.200.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	21	Laporan	150.552.000,00	21	Laporan	276.800.000,00

7.01.02.2.02.000 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	<i>(Kapane won Ngawen, Ngawen)</i>	4.00	Laporan	145.322.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	8.00	Laporan	262.500.000,00
7.01.02.2.02.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	<i>(Kapane won Ngawen, Ngawen)</i>	9.00	Laporan	5.230.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	14.00	Laporan	14.300.000,00
3. 7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)</i>		100	%	34.977.500,00			%	63.495.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Indeks Koordinasi Pemberdayaan Desa (Indeks)</i>	<i>(Kapane won Ngawen, Ngawen)</i>	8	Indeks	31.457.500,00		8	Indeks	44.975.000,00

7.01.03.2.01.000 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan(Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	8.00	Dokumen	28.087.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.00	Dokumen	36.575.000,00
7.01.03.2.01.000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	1.00	Laporan	3.370.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.00	Laporan	8.400.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Indeks)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	2	Indeks	3.520.000,00		2	Indeks	18.520.000,00

7.01.03.2.03.000 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	1.00	Lembaga Kemasyarakatan	3.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.00	Lembaga Kemasyarakatan	10.500.000,00
7.01.03.2.03.000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	0.00	Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.00	Laporan	8.020.000,00
4. 7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)		100	%	4.300.000,00			%	6.650.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					4.300.000,00				6.650.000,00

7.01.04.2.01.000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	2	Laporan	-	-	0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	Laporan	6.650.000,00
7.01.04.2.01.000 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	2	Laporan	4.300.000,00	6.650.000,00	2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	Laporan	6.650.000,00
5. 7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi(%)		100	%	35.271.500,00	94.000.000,00				%	

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)</i>	<i>(Kapane won Ngawen, Ngawen)</i>	41.5	<i>Indeks</i>	35.271.500,00	94.000.000,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)</i>	<i>(Kapane won Ngawen, Ngawen)</i>	25	<i>Orang</i>	29.051.500,00	89.000.000,00
				75.00	<i>Orang</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	89.000.000,00

7.01.05.2.01.000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	4	Doku men	6.220.000,00	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	8.00	Doku men	5.000.000,00
6.	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)		100	%	34.483.500,00			%	63.945.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	60	Doku men	34.483.500,00			Doku men	63.945.000,00
7.01.06.2.01.000 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					-				-

7.01.06.2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	0.0 0	Doku men	-	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	4.00	Doku men	2.800.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	0.0 0	Doku men	29.982.500,00	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	14.0 0	Doku men	2.800.000,00
7.01.06.2.01.000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	26. 00	Doku men	1.801.000,00	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	32.0 0	Doku men	40.245.000,00
7.01.06.2.01.000 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa(Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	1	Doku men		Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	1	Doku men	2.700.000,00

7.01.06.2.01.000 7	7.01.06.2.01.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	1	Doku men	1.670.000,00	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	1	Doku men	3.000.000,00
	7.01.06.2.01.000 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	3	Doku men	1.030.000,00	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	2.00	Doku men	2.700.000,00
	7.01.06.2.01.001 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	0.00	Doku men	-	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	2.00	Doku men	6.000.000,00
	7.01.06.2.01.001 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	0.00	Doku men	-	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	1.00	Doku men	2.900.000,00

7.01.06.2.01.001 4	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	(Kapane won Ngawen, Ngawen)	0.00	Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.00	Dokumen	3.600.000,00
J U M L A H										
										2.830.462.269,00

LAMPIRAN BY NAME BY ADDRESS PENERIMA JAMBAN SEHAT

KAPANEWON NGAWEN TAHUN 2024

No	Nama	NIK Kepala Keluarga	No. RTS	Alamat	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Ke t.
1	SUMARYONO	3403133112400007	3403140004000392	Kranggan RT01 RW 04	1	KK	4.000.000	4.000.000	
2	GITOSUNARYO	3403133112510092	3403140003000360	Candi Rt 004 /010	1	KK	4.000.000	4.000.000	
3	MUSIYEM	3403137112790006	3403140003001169	Gelaran Rt 004 / 009	1	KK	4.000.000	4.000.000	
4	NIKARIYANI	3403125508800001	3403150008000294	Gudang Rt 002 / 011	1	KK	4.000.000	4.000.000	
5	NGATIYO	3403131808420002	3403140003000589	Kaliwaru Rt 003/014	1	KK	4.000.000	4.000.000	
6	JUMARWAN	3403131507780001	3403140003000768	Kampung Kidul Rt 02 rw 02	1	KK	4.000.000	4.000.000	
7	SUMIYEM	3403137112540056	3403140003000320	Kampung Lor Rt 001/003	1	KK	4.000.000	4.000.000	
8	YATMIN	3403132507660002	3403140003000144	Kepil Rt 003 / 015	1	KK	4.000.000	4.000.000	
9	SUTIYAH	3403136410440002	3403140003000259	Ngawen Rt 002 / 008	1	KK	4.000.000	4.000.000	
10	JUMINTEN	3403135007550018	3403131309180002	Tempuran Kulon Rt 002/013	1	KK	4.000.000	4.000.000	
11	MOHAMMAD RIZKI FIRMANSYAH	3403130609040001	3403140003000602	tempuran Wetan Rt 001/012	1	KK	4.000.000	4.000.000	
12	SUTARNO	3403131010790001	3403140006000774	Bundelan 04/08	1	KK	4.000.000	4.000.000	
13	MASIYEM	3403134107410005	3403140006001047	Jono 06/05	1	KK	4.000.000	4.000.000	
14	KIYEM	3403134107430023	3403140006001259	Mundon 02/07	1	KK	4.000.000	4.000.000	

15	KASIDI	3403130903710002	3403140006000875	Sendangrejo 01/04	1	KK	4.000.000	4.000.000
16	SAGIYO SUGI HARTONO	3403133112530089	3403140006000085	Sendangrejo 02/04	1	KK	4.000.000	4.000.000
17	MULYATI	3403134107550012	3403140006000768	Sendangrejo 03/04	1	KK	4.000.000	4.000.000
18	YATIMIN	3403130107600106	3403140006000372	Sumberan 01/03	1	KK	4.000.000	4.000.000
19	SUGIMAN	3403130107620084	3403140006001378	Sumberan 02/03	1	KK	4.000.000	4.000.000
20	PAINEM	3403134107390086	3403140006001088	Tancep 02/06	1	KK	4.000.000	4.000.000
21	PONIKEM	3403137112410101	3403140006000150	Wonongso 01/09	1	KK	4.000.000	4.000.000
22	NGATINEM	3403134107300093	3403140006001104	Wonongso 03/09	1	KK	4.000.000	4.000.000
23	RATNO	3403133112630058	3403140006000222	Wonongso 04/09	1	KK	4.000.000	4.000.000
24	RAKINEM	3403135904500001	3403140001000087	BUYUTAN	1	KK	4.000.000	4.000.000
25	RUBIYEM	3403135611680004	3403140001000051	BUYUTAN	1	KK	4.000.000	4.000.000
26	TUKINEM	3403135602600001	3403131411078032	CIKAL	1	KK	4.000.000	4.000.000
27	SUMARTO	3403130108360001	3403140001000379	DUNGMAS	1	KK	4.000.000	4.000.000
28	ENDRI SUPONO	3403132005800003	3403132109100008	DUNGMAS	1	KK	4.000.000	4.000.000
29	TUMI	3403135405560001	3403140001000446	DUNGMAS	1	KK	4.000.000	4.000.000
30	JUMINEM	3403134306460001	3403140001000564	KEPEK	1	KK	4.000.000	4.000.000
31	JUMADI	3403131011710002	3403140001000753	MUNGGUR	1	KK	4.000.000	4.000.000
32	RANTEM	3403135505630001	3403140001000690	MUNGGUR	1	KK	4.000.000	4.000.000
33	SRI HARTONO	3403131009540001	3403140001000257	MUNGGUR	1	KK	4.000.000	4.000.000
34	SANIYEM	3403135507530002	3403140001000326	RANDUSARI	1	KK	4.000.000	4.000.000
35	MARSONO	3403130107300045	3403140001000786	TAPANSARI	1	KK	4.000.000	4.000.000
TOTAL								140.000.000

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Ngawen sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,
KAPANEWON NGAWEN,

SUGITO

BUPATI GUNUNGGIDUL,

ttd

SUNARYANTA



RENCANA KERJA
KAPANEWON SEMIN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON SEMIN	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan Capaian Renstra Kapanewon Semin.....	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3	Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4	Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	37
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	48
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	50
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Semin.....	50
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	55
BAB V	PENUTUP	78

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON SEMIN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan. Program /kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kapanewon, yaitu tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mempunyai fungsi untuk perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat; pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum; pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon; penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

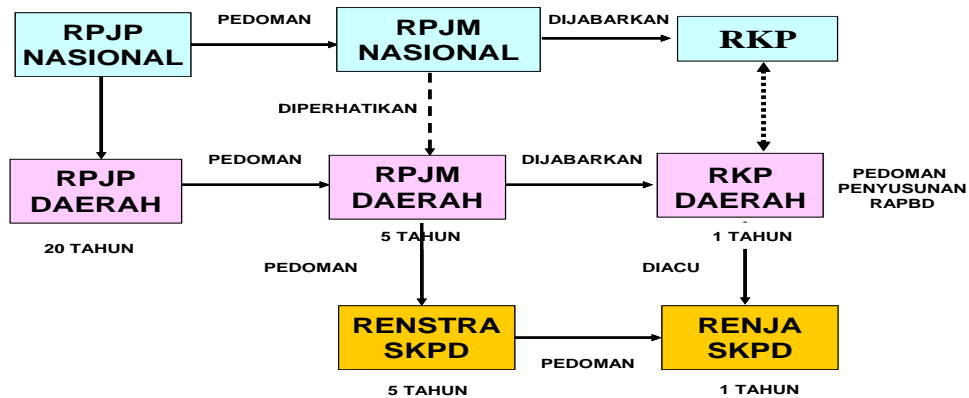
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah memuat strategi untuk memecahkan setiap isu strategis yang dihadapi. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Rencana Kerja Kapanewon Semin sebagai Perangkat Daerah sangat terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan bahwa Renja Kapanewon Semin sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RKPD Kabupaten untuk jangka waktu satu tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rencana Kerja Pembangunan Daerah inilah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :



Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, kemudian setelah dikompilasi dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) semua perangkat daerah menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semin Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
 16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kapanewon Semin Tahun 2024 adalah untuk menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

- a. untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kapanewon Semin baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran yang bersifat indikatif;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kapanewon Semin; dan
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kapanewon Semin Tahun 2022 disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, penyajian Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON SEMIN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan Capaian Renstra Kapanewon Semin
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON SEMIN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Semin

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON SEMIN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KAPANEWON SEMIN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Semin dan Capaian Renstra Kapanewon Semin

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Semin Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2023 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Semin berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau Tahun 2023.

hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/ Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan (Tahun 2023) yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. target-target SKPD Tahun 2023 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Pada Perangkat Daerah Kapanewon Semin dalam pelaksanaan Renja 2023 telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;

Pada Perangkat Daerah Kapanewon Semin dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 realisasi program dan kegiatan sesuai target kinerja hasil/keluaran pada Triwulan I sebagai berikut :

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.660.000	7.212.500	19,67
		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	930.390.192	199.797.987	21,47
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.100.000	3.180.000	39,26
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.030.000	44.053.500	64,76
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.825.000	5.200.000	20,95

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE %
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.870.224	11.541.597	17,79
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.932.500	24.861.000	26,75
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.690.000	825.000	12,33
		2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	68.275.000	19.165.000	28,07
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	578.900.000	264.740.000	45,73
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.147.000	18.725.000	51,80
		2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.050.000	5.200.000	24,70
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.260.000	6.915.000	35,90
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	76.460.000	1.665.000	2,18
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.820.000	11.425.000	41,07

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE %
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	-	-
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	35.000.000	9.960.000	28,46

2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan adalah:

Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Semin pada Tahun 2023 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang direncanakan dalam Renja Tahun 2023.

3. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2023;
- Adanya kesinkronan kegiatan yang dianggarkan Perangkat Daerah Kapanewon Semin dengan agenda kegiatan yang diselenggarakan Perangkat Daerah di tingkat kabupaten.
 - Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - Sumber Daya Manusia yang ada di Perangkat Daerah Kapanewon Semin.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
- Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
 - Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon.

Pada Rencana Kerja Kapanewon Semin semua Rumusan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran tidak mengalami perbedaan dengan Rancangan Awal RKPd.

Dari uraian di atas Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewo n Semin) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewo n Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewo n Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11,86	0	0	0	0	0	12,06	101,69
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	3	2	2	100	2	2	20,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5	1	1	1	0	1	1	20,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100,00	1	1	20,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	15	3	3	3	100,00	3	3	20,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	2	2	2	100,00	2	2	20,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85	17	17	17	100,00	17	17	20,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160	32	32	32	100,00	32	32	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewo n Semin) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewo n Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Kapanewo n Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewo n Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewo n Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewo n Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,26	0	0	0	0	1,26	1,26	100,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.120	224	224	224	100,00	224	224	20,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100,00	1	1	20,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65	13	13	13	100,00	13	13	20,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24	0	0	0	0	6	6	25,00
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30	6	6	6	100,00	6	6	20,00
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pengiriman peserta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	0	0	0	0	2	2	20,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	12	4	4	100,00	4	4	20,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65	41	12	12	100,00	13	13	20,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	4	4	100,00	4	4	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output dan Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Kapanewo n Semin) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewo n Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Kapanewo n Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewo n Semin sampai Tahun 2022	
					Target Kapanewo n Semin Tahun 2022	Realisasi Kapanewo n Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	4	4	4	0	2	2	20,00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1237	247	247	246	99,60	248	248	20,05
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	40	40	40	100,00	12	12	25,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	17	17	17	100,00	17	17	20,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	4	4	3	100,00	12	12	20,00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55	0	0	0	0	1	1	1,82
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0	5	5	0,00
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Gudang	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	1	1	1	100,00	6	6	100,00
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0	1	1	100,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360	72	72	72	100,00	72	72	20,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100,00	12	12	20,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300	60	60	60	100,00	60	60	20,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon dan Semin Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Kapanewon dan Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Kapanewon dan Semin Tahun 2022	Realisasi Kapanewon dan Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855	182	179	179	100,00	178	178	20,82
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	690	140	141	141	100,00	141	141	20,43
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	10	10	10	100,00	10	10	25,00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	19	15	15	100,00	14	14	NA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	10	2	2	2	100,00	2	2	20,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	55	11	11	11	100,00	11	11	20,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	100	100	100	0	100	100	100,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15	3	3	3	100,00	3	3	20,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9	2	2	2	100,00	2	2	22,22
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	95	19	19	19	100,00	19	19	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon dan Semin) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewon dan Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewon dan Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon dan Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	25	5	5	5	100,00	5	5	20,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70	14	14	14	100,00	14	14	20,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	32	0	0	0	0	8	8	25,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	60	12	12	12	100,00	12	12	20,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65	13	13	13	100,00	13	13	20,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25	0	0	0	-	5	5	20,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	2	2	2	2	2	2	20,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30	6	6	6	100,00	6	6	20,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Sub Kegiatan) (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewo n Semin) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewo n Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewo n Semin Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewo n Semin sampai Tahun 2022
					Target Renja Kapanewo n Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewo n Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	35	7	7	7	100,00	7	7	20,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	2	2	2	100,00	2	2	20,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20	5	5	5	0	5	5	25,00
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20	5	5	5	100,00	5	5	25,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,53	0	0	0	0	2,53	2,53	100,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	375	75	75	75	75	75	75	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon dan Semin) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewon dan Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022
					Target Renja Kapanewon dan Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon dan Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/4)*100
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan/ Dokumen hasil patroli terpadu Forkompinkap	15	4	4	4	100,00	4	26,67
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100	100	100	100	100,00	100	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16,36	0	0	0	-	15,78	96,45
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten	10	50	2	2	100,00	2	20,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10	2	2	2	100,00	2	20,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	115	23	23	23	100,00	23	20,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	4	4	4	100,00	4	20,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	2	2	2	100,00	2	20,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	1	1	1	100,00	1	20,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40	8	8	8	100,00	8	20,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	2	2	2	100,00	2	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Kapanewon Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Rencana Kapanewon Tahun 2022	Realisasi Rencana Kapanewon Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	1	1	1	100,00	1	1	20,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	5	1	1	1	100,00	1	3	60
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	100	100	100	100	100,00	100	100	100
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja	4	0	1	1	100,00	1	2	50
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	12	0	3	3	100	3	6	50
		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	8	0	2	2	100	2	4	50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Semin

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelayanan Kapanewon digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Semin serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Tugas Pokok dan Fungsi yang harus diemban oleh Pemerintah Kapanewon mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan bidang Sosial. Fungsi dari masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh jawatan melalui program/kegiatan dalam setiap tahun anggaran.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Semin berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan meningkat yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%. Adapun formula indikator kinerja utama adalah:

- Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKalurahan tepat waktu dibagi jumlah kalurahan se kapanewon;
- Jumlah desa yang menetapkan RPKKalurahan tepat waktu dibagi jumlah kalurahan se kapanewon;
- Jumlah KK miskin yang tertangani dibagi jumlah KK miskin se Kapanewon
- Jumlah kasus Kententraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dibagi jumlah kasus Kententraman dan Ketertiban Umum se kapanewon.
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon meningkat.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Semin

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Semin maka diperlukan tentang potret Kapanewon Semin saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Semin adalah sebagai berikut :

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Kapanewon Semin

Kinerja pelayanan di Kapanewon Semin mengacu pada tugas dan fungsi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan

- dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
 - p. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Semin, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Semin dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Semin sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Semin hingga Tahun 2021 secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan
2. Terfasilitasinya pelayanan administrasi pemerintahan secara umum (Dispensasi Nikah, Penerbitan ijin UMK, Persetujuan SKTM, Surat Keterangan Domisili, surat keterangan ahli waris dll)
3. Terfasilitasinya kegiatan pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
4. Terfasilitasinya kegiatan monitoring Penyaluran BLT.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
6. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraanpemerintah kalurahan.
7. Terfasilitasinya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
8. Terfasilitasinya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan kalurahan.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan, karawitan, pedalangan dll)
12. Terfasilitasinya pembuatan buku profil desa, buku profil Kapanewon dan monografi Kalurahan

Adapun tingkat kinerja Kapanewon Semin yang tidak secara langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya kegiatan pelayanan antara lain :

1. terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.

3. terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LKj.IP, Laporan Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan keuangan bulanan.
4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semin dan Pengendalian internal PD.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Semin maka diperlukan data gambaran kondisi dan saat ini. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Semin adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan Sosial Budaya

a. Kondisi

1. Perlu penambahan Sumber Daya Aparatur
2. Perlu Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai regulasi terutama di bidang Pelayanan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari budaya pesta;
5. Belum tepatnya pemanfaatan teknologi/media sosial bagi generasi muda;
6. Masih rendahnya angka pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
7. Penambahan Pengangguran karena adanya sebagian tenaga kerja yang terkena PHK karena terdampak wabah Covid-19;
8. Perlunya sosialisasi/penyuluhan Penyakit Masyarakat;
9. Mengupayakan peningkatan pemetaan daerah rawan Bencana.
10. Mengupayakan koordinasi dengan wilayah perbatasan;
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hukum;

b. Permasalahan

1. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Aparatur;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia personil ASN yang tidak merata;
3. Regulasi yang selalu berubah-ubah.
4. Inventarisasi budaya yang ada dimasyarakat belum optimal;
5. Masih banyaknya minat masyarakat terhadap budaya pesta atau hajatan;
6. Efek negatif teknologi terhadap generasi muda;
7. Masih banyaknya pengangguran;
8. Masih adanya Penyakit Masyarakat;
9. Kurang optimalnya pemetaan daerah rawan bencana;
10. Belum terlaksananya koordinasi antara wilayah perbatasan secara rutin;
11. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum;

2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

1. Keterbatasan SDM serta kurang meratanya pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha;
2. Masih banyaknya petani yang menerapkan sistem pertanian secara tradisi dan menggunakan peralatan yang seadanya;
3. Belum tercukupiya kebutuhan bahan baku untuk produk tertentu sehingga masih harus mengimpor dari luar daerah;

4. Memberikan pemahaman terhadap pelaku ekonomi untuk bisa bekerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga;
- b. Permasalahan
1. Belum optimalnya sumber daya manusia dari pelaku ekonomi;
 2. Masih banyaknya petani yang belum memanfaatkan teknologi pertanian;
 3. Belum adanya pusat penjualan (*show room*) bagi produk UMKM di Kapanewon Semin;
 4. Kondisi geografis yang kurang mendukung untuk tersedianya bahan baku untuk jenis-jenis produk tertentu;
 5. Masih kurangnya minat pelaku ekonomi untuk menangkap peluang kerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga;
3. Bidang Fisik dan Prasarana
- a. Kondisi Saat ini
1. Mengoptimalkan Gedung perkantoran yang sudah ada;
 2. Kondisi jalan sebagian bergelombang dan rusak sehingga mengganggu transportasi;
 3. Belum optimalnya penataan pedagang di pasar dan pedagang kaki lima;
 4. Pembuangan sampah akhir masih di bawa ke daerah lain serta perlunya pemahaman terhadap masyarakat terhadap penanganan sampah;
 5. Sebagian masyarakat telah memiliki kendaraan sendiri juga dikarenakan keberadaan angkutan umum kurang memadai;
 6. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU);
 7. Memberikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- b. Permasalahan
1. Masih terbatasnya sarana gedung Kapanewon Semin sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
 2. Kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur baik jalan desa maupun jalan kabupaten dan adanya angkutan yang bertonase berat akan mengakibatkan cepatnya kerusakan jalan;
 3. Belum tertibnya penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
 4. Masih kurangnya tempat pembuangan sampah dan belum adanya tempat pembuangan akhir serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah;
 5. Terbatasnya angkutan umum serta masih rendahnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan angkutan umum;
 6. Kurangnya penerangan jalan umum (PJU) pada titik-titik tertentu;
 7. Masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

2.3.3. Dampak Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026". Sedangkan Misi Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah;

Dalam merumuskan tema pembangunan Tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi DIY sebagai berikut

- a. Isu Strategis Nasional :
 - Percepatan penghapusan kemiskinan
 - Penanganan Stunting
 - Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19
 - Middle income trap riset, alokasi sumber daya, dan human capital
 - Percepatan pembangunan infrastruktur
 - Pengurangan risiko bencana
 - Pasokan energi dan pangan
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Reformasi Birokrasi
 - Pilpres dan Pilkada Serentak tahun 2024
 - Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045
- b. Isu Strategis Provinsi :
 - Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024
 - Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - Pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19
 - Penanganan Stunting
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pasokan Energi dan Pangan
 - Perencanaan Pembangunan jangka Panjang 2025 – 2045
- c. Isu Strategis Daerah :
 - Pilpres dan pilkada serentak tahun 2024
 - Penanganan stunting
 - Perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - Penanganan dan pemulihan paska pandemi Covid-19
 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 0 (nol) Kemiskinan Ekstrem
 - Pengembangan potensi Pariwisata
 - Peningkatan Investasi
 - Perkembangan Teknologi Informasi
 - Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana
 - Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah
 - Pengembangan inovasi daerah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah: "Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi;
 - a. Investasi dan pariwisata
 - b. Pengembangan sektor unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi;

Pemerintah Kapanewon Semin sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Semin. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Semin, yang meliputi permasalahan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban; Reformasi Birokrasi; Pendidikan dan Kesehatan); Ketahanan Pangan; Ekonomi (UMKM, Investasi dan Pariwisata; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Semin yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2022-2026.

Berkaitan dengan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan kesepakatan dari negara negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun negaranya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara negara yang ikut menandatangani program ini. Seperti program pengentasan kemiskinan, upaya peningkatan kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target target SDGs. Sebagai konsekwensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kapanewon Semin diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kapanewon.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi khususnya di bidang pelayanan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi di bidang pelayanan dibutuhkan sosialisasi sampai ke tingkat bawah mulai dari kalurahan padukuhan bahkan sampai ke tingkat RT.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolok ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai kebutuhan. Penyusunan program dan kegiatan di Kapanewon Semin diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

2.3.3.1 Faktor Pendorong :

Faktor – faktor yang bisa mendorong upaya pencapaian keberhasilan visi dan misi Bupati Gunungkidul antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
3. Adanya potensi sumber daya alam;
4. Adanya potensi wisata;
5. Adanya potensi produk unggulan daerah;
6. Adanya potensi bidang Pertanian dan perkebunan;
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi;
8. Meningkatnya prosentase kualitas infrastruktur baik jalan desa maupun jalan kabupaten;
9. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah Kapanewon dan kalurahan dan tenaga teknis lainnya.

2.3.3.2 Faktor Penghambat :

Sedangkan Faktor–faktor yang dimungkinkan bisa menghambat upaya pencapaian keberhasilan visi dan misi Bupati Gunungkidul khususnya di Kapanewon Semin antara lain sebagai berikut :

1. Makin bertambahnya pengangguran dan rumah tangga miskin akibat pandemi Covid 19;
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang ada;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi sektor pariwisata;
4. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan;
5. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil;
6. Kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur baik jalan desa maupun jalan kabupaten
7. Kurang optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur di Wilayah Kapanewon Semin yang merupakan jalur utama dari

wilayah timur dan utara menuju akses pariwisata Kabupaten Gunungkidul;

8. Masih miKetidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/cor blok) dengan peningkatan jumlah alat transportasi;
9. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Semin

Kapanewon Semin secara topografis termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung Timur, sehingga wilayah Semin potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak. Secara geomorfologi masuk dalam satuan Perbukitan Seribu (Gunung Sewu). Kapanewon Semin dilalui Sungai Oya dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Sungai Oya. Sungai Oya termasuk tipe aliran permanen, sepanjang tahun air mengalir, sedangkan beberapa sungai lain hanya mengalir pada musim penghujan. Kondisi tanahnya yang subur banyak terdapat sumber air yang cocok untuk segala macam tanaman pangan serta banyak diusahakan padi gogo rancah, mempunyai dataran tinggi dan rendah bahkan pegunungan tertinggi di Kabupaten Gunungkidul berada di Kapanewon Semin, dari bawah sampai atas dapat digunakan untuk lahan usaha tani.

Kondisi alam wilayah Semin sebagian besar lahan agak datar dengan kemiringan antara 8 – 14 % yang terletak di Desa Sumberejo, Bendung, Bulurejo, Kemejing dan sebagian kecil dari desa lainnya, sedangkan yang mempunyai kemiringan diatas 15 % terdapat di Desa Semin, Kalitekuk, Pundungsari, Karang Sari, Candirejo dan Rejosari. Walaupun demikian tanah yang mempunyai kemiringan lebih dari 15% tersebut banyak terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan persawahan.

Sedangkan ketinggian alam adalah antara 250 – 350 m di atas permukaan laut terdapat di Desa Sumberejo, Bendung, Kemejing, Bulurejo serta wilayah desa lainnya, sedangkan letak ketinggian yang relatif tinggi terletak di Desa Semin, Pundungsari dan Karang Sari, ketinggian yang paling tinggi berada di Gunung Panggung yang berbatasan dengan Kapanewon Ponjong berada di Desa Pundungsari dengan ketinggian mencapai kurang lebih 900m diatas permukaan laut.

Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan curah hujan rata-rata 1.955 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 129 hari, suhu bulanan berkisar 18 C – 35 C. Secara administrasi Kapanewon Semin berbatasan dengan Kapanewon Ngawen, Karangmojo, Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

2.3.4.1. Faktor Pendorong:

1. Wilayah potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan);
2. Wilayah potensial untuk tanaman semusim (padi, palawija);
3. Wilayah potensial untuk budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak;
4. Dilalui Sungai Oya dengan debit air yang mencukupi sepanjang tahun;

5. Merupakan pintu gerbang masuk wilayah Kabupaten Gunungkidul dari arah Timur Laut;
 6. Wilayah potensial untuk pertambangan batu putih.
- 2.3.4.2. Faktor Penghambat:
1. Wilayah potensial terhadap bencana terutama banjir, erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan.
 2. Sebagai wilayah perbatasan, Kapanewon Semin kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat.

Dalam rangka merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Semin 2021-2026, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis internal dan analisis eksternal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Semin dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon.

1. Kondisi Fisik Dasar

- 1) Secara topografis termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung, sehingga wilayah Semin potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan tembakau), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak
- 2) Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar Opak-oya yang sangat berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi
- 3) Secara geomorfologi wilayah Semin 80 % berupa perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60 derajat terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan.

2. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- 1) Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung di usia 26-55 th
- 2) Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah
- 3) Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani

3. Kondisi Perekonomian

- 1) Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kapanewon Semin, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa
- 2) Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil buah-buahan dan tembakau), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan ayam) cukup tinggi.

4. Kondisi Pemerintahan

- 1) Aparat Kapanewon telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

- 2) Dilaksanakannya pencairan dana desa sesuai dengan undang-undang desa.
- 3) Penguatan kelembagaan Kapanewon dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas *subsidiary*.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kapanewon Semin sebagai berikut :

1. Kekuatan

- 1) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- 2) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan;
- 3) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan;
- 4) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu yang cukup prospektif.

2. Kelemahan

- 1) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, tanah longsor;
- 2) Sebagai wilayah perbatasan, Kapanewon Semin kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat;
- 3) Jumlah penduduk miskin masih ada;
- 4) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi;
- 5) Penguasaan teknologi masih rendah;
- 6) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif;
- 7) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kapanewon dan kalurahan belum optimal.
- 8) Kualitas sumber daya aparatur yang tidak merata dan masih di pengaruhi jumlah sumber daya aparatur yang sangat terbatas.

a. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kapanewon Semin dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tinjauan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Semin sebagai

daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo.

1. Peluang

- 1) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional;
- 2) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat;
- 3) Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten - kabupaten lainnya;
- 4) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Tantangan

- 1) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- 2) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan;
- 3) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 4) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan tantangan dan peluang, maka untuk perumusan program dan kegiatan perlu disusun berdasarkan skala prioritas demi tercapainya pencapaian sasaran secara efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skala prioritas maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memanfaatkan peluang yang tersedia guna memperkuat posisi pemerintah kabupaten untuk melaksanakan otonomi daerah yang bertanggung jawab dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada.
2. Menjalinkan kerjasama dengan dunia usaha maupun pihak yang lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai peraturan yang berlaku untuk menambah PAD.
3. Melakukan perencanaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok dasar dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan mengacu pada kemampuan untuk menentukan skala prioritas.
4. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menambah wawasan dalam rangka pengembangan wilayah secara merata dan berkesinambungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD kabupaten, APBD propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk Tahun Anggaran 2024, Besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan Kapanewon Semin Tahun Anggaran 2024 direncanakan sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan keterbatasan Anggaran, hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Gunungkidul, sehingga berpengaruh terhadap Perolehan PAD Tahun Anggaran 2023 terutama pada sektor Pariwisata dan Perdagangan, Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat kalurahan sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi penghitungan anggaran pemerintah daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan dana yang dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang ditingkat kabupaten besaran angkanya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Secara lengkap Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada matriks lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan kami sajikan di tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2		10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (%)	100	100.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (%)	100	100.000.000,00	Kapanewon Semin
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	1	100.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	1	100.000.000,00	Kapanewon Semin
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	100.000.000,00	Kapanewon Semin
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)	100	35.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)	100	35.000.000,00	Kapanewon Semin
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan (Dokumen)	2	35.000.000,00	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan (Dokumen)	2	35.000.000,00	Kapanewon Semin
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	4	35.000.000,00	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	4	35.000.000,00	Kapanewon Semin
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100	1.153.287.692,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100	1.153.287.692,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.415.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.415.000,00	Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RPKD						Rencana Rancangan Awal RPKD						Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17		
			(Kapanewon Semin, Semin, Kec. Semin)	Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Indeks)	12.06			(Kapanewon Semin, Semin, Kec. Semin)		12.06				
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	29.145.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	29.145.000,00	Kapanewon Semin		
7.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Kapanewon Semin		
7.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Kapanewon Semin		
7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1.500.000,00	Kapanewon Semin		
7.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	800.000,00	Kapanewon Semin		
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2.760.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	2.760.000,00	Kapanewon Semin		
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32	2.210.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32	2.210.000,00	Kapanewon Semin		
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				930.350.192,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				930.350.192,00	Kapanewon Semin		

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD						Rencana Rancangan Awal RKPD						Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17		
			(Kapanewon Semnin, Semnin, Kec. Semnin)	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	1,26			(Kapanewon Semnin, Semnin, Kec. Semnin)	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	1,26				
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	196	925.510.192,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	196	925.510.192,00	Kapanewon Semnin		
7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1.300.000,00	Kapanewon Semnin		
7.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	3.540.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	3.540.000,00	Kapanewon Semnin		
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Kapanewon Semnin, Semnin, Kec. Semnin)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	2.140.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Kapanewon Semnin, Semnin, Kec. Semnin)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	2.140.000,00	Kapanewon Semnin		
7.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	6,00	2.140.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6,00	2.140.000,00	Kapanewon Semnin		
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	0	33.217.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	0	33.217.500,00	Kapanewon Semnin		
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2.200.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2.200.000,00	Kapanewon Semnin		
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	15.437.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kapanewon Semnin, Semnin)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	15.437.500,00	Kapanewon Semnin		

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RPKD						Rencana Rancangan Awal RPKD						Catatan Penting	
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)				
1	7.01.01.2.06.0003	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10	4	8	9	6.000.000,00	3	10	4	8	9	6.000.000,00	Kapanewon Semrin
				(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	6.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	6.000.000,00	Kapanewon Semrin	
	7.01.01.2.06.0005	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	5.000.000,00	Kapanewon Semrin	
	7.01.01.2.06.0006	2.47	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.47	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.47	2.47	1.200.000,00	Kapanewon Semrin	
	7.01.01.2.06.0008	12	Fasilitas Kunjungan Tamu	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.300.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	1.300.000,00	Kapanewon Semrin	
	7.01.01.2.06.0009	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	2.080.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	2.080.000,00	Kapanewon Semrin	
	7.01.01.2.07	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	4	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	4	4	-	Kapanewon Semrin	
	7.01.01.2.07.0005	0,00	Pengadaan Mebel	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	Pengadaan Mebel	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	0,00	-	Kapanewon Semrin	
	7.01.01.2.08	72	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	72	65.800.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	72	72	65.800.000,00	Kapanewon Semrin	
	7.01.01.2.08.0001	48.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	48.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	48.000.000,00	Kapanewon Semrin	
	7.01.01.2.08.0002	17.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	17.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	72	17.800.000,00	Kapanewon Semrin	

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD						Rencana Rancangan Awal RKPD						Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	7.01.01.2.09	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	8	84.365.000,00	17
	7.01.01.2.09.0002	169	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	169	84.365.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	169	84.365.000,00	169	84.365.000,00	Kapanewon Semrin
	7.01.01.2.09.0005	143	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	143	44.700.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	143	44.700.000,00	143	44.700.000,00	Kapanewon Semrin
	7.01.01.2.09.0006	30	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	1.500.000,00	Pemeliharaan Mebel	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	1.500.000,00	30	1.500.000,00	Kapanewon Semrin
	7.01.01.2.09.0009	14	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	5.400.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	5.400.000,00	14	5.400.000,00	Kapanewon Semrin
	7.01.01.2.09.0010	0.00	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	28.965.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	28.965.000,00	0.00	28.965.000,00	Kapanewon Semrin
	2. 7.01.02	12	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	3.800.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	3.800.000,00	12	3.800.000,00	Kapanewon Semrin
		100		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)	100	119.938.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)	100	119.938.000,00	100	119.938.000,00	Kapanewon Semrin
	7.01.02.2.01	3	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	3	3.790.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	3	3.790.000,00	3	3.790.000,00	Kapanewon Semrin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD							Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting							
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)										
1	7.01.02.2.01.0001	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	3.790.000,00	8	9	Kapanewon Semini	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(Kapanewon Semini, Semini)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2.00	3.790.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(Kapanewon Semini, Semini)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2.00	3.790.000,00									Kapanewon Semini	
	7.01.02.2.02					116.148.000,00					116.148.000,00									Kapanewon Semini	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	(Kapanewon Semini, Semini)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	19	116.148.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	(Kapanewon Semini, Semini)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	19	116.148.000,00										Kapanewon Semini
	7.01.02.2.02.0002					87.250.500,00					87.250.500,00									Kapanewon Semini	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semini, Semini)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	87.250.500,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semini, Semini)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	87.250.500,00										Kapanewon Semini
	7.01.02.2.02.0003					28.897.500,00					28.897.500,00									Kapanewon Semini	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semini, Semini)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	28.897.500,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semini, Semini)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	28.897.500,00										Kapanewon Semini
3.	7.01.03					28.887.000,00					28.887.000,00									Kapanewon Semini	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELLURAHAN				28.887.000,00					28.887.000,00										Kapanewon Semini
																					Kapanewon Semini
																					Kapanewon Semini
	7.01.03.2.01					15.177.000,00					15.177.000,00										Kapanewon Semini
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	(Kapanewon Semini, Semini)	Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (Indeks)	8	15.177.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	(Kapanewon Semini, Semini)	Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (Indeks)	8	15.177.000,00										Kapanewon Semini
	7.01.03.2.01.0002					6.477.000,00					6.477.000,00										Kapanewon Semini
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6.477.000,00					6.477.000,00										Kapanewon Semini

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RPKD						Rencana Rancangan Awal RPKD						Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17		
			(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12			(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12				
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	8.700.000,00		(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	8.700.000,00	Kapanewon Semrin		
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Indeks)	25	13.710.000,00		(Kapanewon Semrin, Semrin)	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Indeks)	25	13.710.000,00	Kapanewon Semrin		
7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	6.780.000,00		(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	6.780.000,00	Kapanewon Semrin		
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	6.930.000,00		(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	6.930.000,00	Kapanewon Semrin		
4. 7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)	100	9.175.000,00			Persentase Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)	100	9.175.000,00	Kapanewon Semrin		
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Laporan)	7	9.175.000,00		(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Laporan)	7	9.175.000,00	Kapanewon Semrin		
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1.475.000,00		(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1.475.000,00	Kapanewon Semrin		

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RPKD						Rencana Rancangan Awal RPKD						Catatan Penting	
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	7.700.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	(Kapanewon Semtin, Semtin)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	7.700.000,00	8	9	7.700.000,00	Kapanewon Semtin
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)	100	23.380.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)	100	23.380.000,00			23.380.000,00	Kapanewon Semtin
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	(Kapanewon Semtin, Semtin)	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)	2.53	23.380.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	(Kapanewon Semtin, Semtin)	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)	2.53	23.380.000,00			23.380.000,00	Kapanewon Semtin
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	(Kapanewon Semtin, Semtin)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	3	11.500.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	(Kapanewon Semtin, Semtin)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	3	11.500.000,00			11.500.000,00	Kapanewon Semtin
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	(Kapanewon Semtin, Semtin)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	11.880.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	(Kapanewon Semtin, Semtin)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	11.880.000,00			11.880.000,00	Kapanewon Semtin
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20.910.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20.910.000,00			20.910.000,00	Kapanewon Semtin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKP					Rencana Rancangan Awal RKP					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
					100					100		
7.01.06.2.01	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	18	20.910.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	18	20.910.000,00	Kapanewon Semrin
7.01.06.2.01	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2.00	970.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2.00	970.000,00	Kapanewon Semrin
7.01.06.2.01	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	23.00	1.905.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	23.00	1.905.000,00	Kapanewon Semrin
7.01.06.2.01	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	51.00	6.625.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	51.00	6.625.000,00	Kapanewon Semrin
7.01.06.2.01	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4	1.970.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4	1.970.000,00	Kapanewon Semrin
7.01.06.2.01	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	870.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(Kapanewon Semrin, Semrin)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	870.000,00	Kapanewon Semrin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RPKD						Rencana Rancangan Awal RPKD						Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2 7.01.06.2.01.0011	3 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	10	4 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	8	9 6.550.000,00	3 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	10	4 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	2	9 6.550.000,00	17 Kapanewon Semin		
J U M L A H												17		
												1.490.577.692,00		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Musyawarah ditingkat Kapanewon dengan kegiatan memproses keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah Kapanewon. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide-ide maupun anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana suatu program pembangunan dalam 1 tahun anggaran dapat mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Kapanewon Semin 2021-2026, yang merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Semin dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon. Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kapanewon Semin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tujuan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Semin sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri.

Berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan RKPDP Kapanewon Semin Tahun 2024, semua usulan program pembangunan di Kapanewon Semin telah sesuai dan dapat mengakomodir sasaran dan program prioritas yang menjadi isu strategis Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan sektor wisata, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan. Adapun salah satu program prioritas pengentasan kemiskinan, melalui tahapan Musrenbang yang melalui kapanewon dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5

USULAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin KAPANEWON SEMIN	Kalurahan Rejosari, Kapanewon Semin, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat	7 KK	4.000.000,00	28.000.000,00	
2	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin KAPANEWON SEMIN	Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat	7 KK	4.000.000,00	28.000.000,00	
	TOTAL					56.000.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Pada Tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam Isu Strategis yang dikaitkan dengan 11 (sebelas) Isu Strategis Nasional, 7 (tujuh) Isu Strategis Provinsi dan 12 (dua belas) Isu Strategis Daerah yang dikaitkan dengan prioritas pengembangan kawasan wilayah utara dan geopark gunungsewu serta pendekatan tematik pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi penurunan angka kemiskinan, ketimpangan wilayah dan peningkatan sosial ekonomi pasca pandemi covid 19 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Semin pada Tahun 2023 belum menganggarkan kegiatan yang menunjang kebijakan tersebut.

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang terkait dengan tugas dan fungsi Kapanewon Semin sesuai dengan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Semin

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, bahwa Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah “Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi;
 - a. Investasi dan pariwisata
 - b. Pengembangan sektor unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi;

Sedangkan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Semin didasarkan atas pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Semin yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kapanewon Semin. Sasaran Daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024, selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran OPD, Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran OPD dengan Format (tabel 3.1) sebagai berikut :

TABEL 3.1
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP PD	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD
2	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi Budaya Lokal yang dilestarikan

Selanjutnya disajikan hubungan antara sasaran pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1.1.1
TUJUAN KAPANEWON SEMIN TAHUN 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2024
	Tujuan :		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	92,75
	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi Budaya Lokal yang dilestarikan	7

TABEL 3.1.2
SASARAN KAPANEWON SEMIN TAHUN 2024

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran PD 2024
	Sasaran :		
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	92,65
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,50 (A)
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	5

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Kapanewon Semin dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1.3
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Semin

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	92,65

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Semin Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2023. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban Kapanewon Semin untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Semin. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Pelayanan Masyarakat

Tertuang dalam dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaanyang di rumuskan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan meningkatkan fasilitas kelengkapan administrasi, perlengkapan, dan sarana prasarana perkantoran.

b. Faktor SDM

Tertuang dalam satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dirumuskan dalam rangka peningkatan kemampuan dan integritas aparat Kapanewon Semin dalam pelayanan kepada masyarakat.

c. Faktor Pengelolaan Keuangan

Tertuang Tertuang dalam satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dirumuskan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan di Kapanewon Semin melalui proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi.

d. Faktor Utama Pelayanan Masyarakat

Ada Tujuh program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan, Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dari 7 (Tujuh) program tersebut di jabarkan menjadi 10 (sepuluh) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang:

1. Pemerintahan Kalurahan
2. Sosial dan Kemasyarakatan
3. Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Kecintaan pada Tanah Air (Pembentukan PASKIBRA)

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa
8. Peningkatan Pelayanan Terpadu di Kapanewon
9. Pelestarian Seni dan Budaya
10. Kelembagaan dan Keistimewaan

2. Jumlah program dan jumlah kegiatan

Rencana program dan kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024 terdiri dari 8 program dan 17 kegiatan.

3. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan:

Semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, dan Jawatan Pelayanan Umum sifat penyebarannya adalah menyeluruh ke semua kalurahan di wilayah Kapanewon Semin. Terkecuali program pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur, Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, lokasi kegiatan ini di kantor Kapanewon yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kapanewon Semin.

4. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan di Kapanewon Semin Tahun 2024, total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah Rp.1.490.577.692,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Rencana program dan kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024 terdiri dari Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (Tabel 4.1), dan untuk Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel 4.2 Sebagai berikut :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	5 Potensi Budaya	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	Kapanewon
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	Kapanewon
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	Semin Kapanewon
					4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	Kapanewon Semin
					4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	Kapanewon Semin
					4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	Kapanewon Semin
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.50 (A)	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.153.287.692,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.415.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.145.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	800.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.760.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.210.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	930.350.192,00	Kapanewon Semin

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	925.510.192,00	Kapanewon
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000,00	Semin
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.540.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.140.000,00	Kapanewon
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.140.000,00	Semin
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.217.500,00	
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.200.000,00	Kapanewon
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.437.500,00	Semin
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	Kapanewon
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	Semin
					7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	Kapanewon
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.300.000,00	Semin
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.080.000,00	Kapanewon
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Semin
					7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	Kapanewon
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.800.000,00	Semin
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.000.000,00	Kapanewon
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.800.000,00	Semin
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.365.000,00	Kapanewon
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel	44.700.000,00	Semin
					7.01.01.2.09.0005		1.500.000,00	Kapanewon
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	Semin
								Kapanewon

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.965.000,00	Kapanewon
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.800.000,00	Kapanewon Semin
	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	92.65	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119.938.000,00	
					7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.790.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.790.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	116.148.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	87.250.500,00	Kapanewon Semin
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.897.500,00	Kapanewon Semin
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.887.000,00	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.177.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.477.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.700.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.710.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.780.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.930.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.175.000,00	Kapanewon Semin

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.175.000,00	Kapanewon
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.475.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.700.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.380.000,00	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.380.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.500.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.880.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.910.000,00	
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.910.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	970.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.905.000,00	Kapanewon
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.625.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.970.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.020.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Penguatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	870.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.550.000,00	Kapanewon Semin
					J U M L A H		1.490.577.692,00	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Semin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	15	16
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00			150.000.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (%)		100	100.000.000,00			150.000.000,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	1	100.000.000,00		1	150.000.000,00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	1	100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY	1	150.000.000,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000,00			25.970.000,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				35.000.000,00			25.970.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)</i>		100					
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan (Kapanewon Semin, Semin)</i>		2	35.000.000,00			2	25.970.000,00
4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	<i>Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)</i>		4	35.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		4	25.970.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.355.577.692,00				2.279.189.944,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)</i>		100	1.153.287.692,00				2.018.117.444,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Indeks)</i>		12.06	37.415.000,00			11.86	35.787.500,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.145.000,00				28.705.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	3		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	28.705.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	500.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	202.500,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	2	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	1.080.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	2	800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	300.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.760.000,00				3.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	17		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17	3.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	32	2.210.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32	2.000.000,00 2.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	(Kapanewon Semin, Kec. Semin)	1.26	930.350.192,00			1.26	1.740.894.944,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(Kapanewon Semin, Semin)	196	925.510.192,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		224	1.734.454.944,00 1.734.454.944,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	1	1.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	1.200.000,00 1.200.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.540.000,00				5.240.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	13		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13	5.240.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin, Kec. Semin)	6	2.140.000,00			6	3.850.000,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	6.00	2.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.00	3.850.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	(Kapanewon Semin, Semin)	0	33.217.500,00			0	51.995.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Semin, Semin)	4	2.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.437.500,00				34.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Semin, Semin)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16.00	34.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Semin, Semin)	5	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	3.000.000,00 3.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Semin, Semin)	2	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	5.500.000,00 5.500.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	247	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		248	1.320.000,00 1.320.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	12	1.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	775.000,00 775.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	12	2.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	4.400.000,00 4.400.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	(Kapanewon Semin, Semin)	4	-	-	38.500.000,00	9	38.500.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	(Kapanewon Semin, Semin)	0.00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38.500.000,00	4.00	38.500.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	72	65.800.000,00	-	62.150.000,00	72	62.150.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	12	48.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44.990.000,00	12	44.990.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	72	17.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.160.000,00	60	17.160.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84.365.000,00		84.940.000,00		84.940.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	(Kapanewon Semin, Semin)	169				183	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	(Kapanewon Semin, Semin)	143	44.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		169	39.200.000,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	(Kapanewon Semin, Semin)	30	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10.00	1.500.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	(Kapanewon Semin, Semin)	14	5.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14	5.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Kapanewon Semin, Semin)	0.00	28.965.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	34.840.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.800.000,00				4.400.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	(Kapanewon Semin, Semin)	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11.00	4.400.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)		100	119.938.000,00				94.630.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	3	3.790.000,00			3	5.400.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	2.00	3.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.00	5.400.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja
2	3	4	10	8	9	11	15	16
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	19	116.148.000,00		19	89.230.000,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	3	87.250.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.00	59.875.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	14	28.897.500,00		14	29.355.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)		100	28.887.000,00			51.355.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.177.000,00			37.415.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (Indeks)</i>	(Kapanewon Semin, Semin)	8				8	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)</i>	(Kapanewon Semin, Semin)	12	6.477.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	27.165.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	(Kapanewon Semin, Semin)	13	8.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13	10.250.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Indeks)</i>	(Kapanewon Semin, Semin)	25	13.710.000,00			25	13.940.000,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)</i>	(Kapanewon Semin, Semin)	2	6.780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	8.120.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6.930.000,00				5.820.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4	5.820.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)		100	9.175.000,00				10.000.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	7	9.175.000,00			7	10.000.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	1	1.475.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	3.000.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				7.700.000,00				7.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	(Kapanewon Semin, Semin)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	7.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)		100	23.380.000,00				80.025.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)	(Kapanewon Semin, Semin)	2.53	23.380.000,00			2.53	80.025.000,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				11.500.000,00				71.825.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	(Kapanewon Semin, Semin)	3		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75.00	71.825.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	4	11.880.000,00				8.200.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)		100	20.910.000,00				25.062.500,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	18	20.910.000,00				25.062.500,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4			970.000,00				2.300.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	2.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.00	2.300.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			23.00	1.905.000,00				1.320.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	23.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23.00	1.320.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			51.00	6.625.000,00				13.870.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	51.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		51.00	13.870.000,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1.970.000,00				2.100.000,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	2.100.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.020.000,00				2.500.000,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	2.500.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				870.000,00				600.000,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	600.000,00
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6.550.000,00				2.372.500,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	(Kapanewon Semin, Semin)	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	2.372.500,00
J U M L A H									2.455.159.944,00
					1.490.577.692,00				

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Semin Tahun 2024 disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan. Rencana Kerja Kapanewon Semin disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Semin yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kapanewon Semin Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Semin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Adapun pelaksanaan rencana kerja akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing Jawatan. Dengan begitu kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Semin sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Anggaran Tahun 2024.

Wonosari,
KAPANEWON SEMIN,

HARYANTO

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

SUNARYANTA

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON SEMIN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan. Program /kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kapanewon, yaitu tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mempunyai fungsi untuk perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat; pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum; pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon; penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

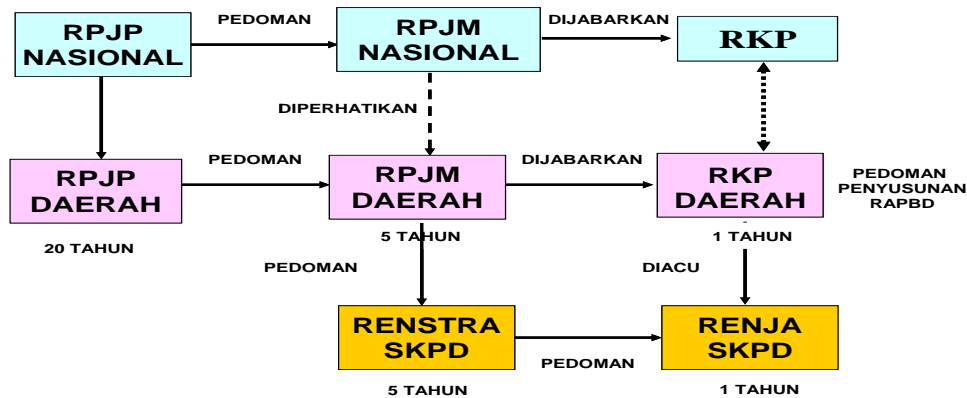
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah memuat strategi untuk memecahkan setiap isu strategis yang dihadapi. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Rencana Kerja Kapanewon Semin sebagai Perangkat Daerah sangat terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan bahwa Renja Kapanewon Semin sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RKPD Kabupaten untuk jangka waktu satu tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rencana Kerja Pembangunan Daerah inilah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :



Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, kemudian setelah dikompilasi dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) semua perangkat daerah menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semin Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
 16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kapanewon Semin Tahun 2024 adalah untuk menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

- a. untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kapanewon Semin baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran yang bersifat indikatif;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kapanewon Semin; dan
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kapanewon Semin Tahun 2022 disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, penyajian Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON SEMIN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan Capaian Renstra Kapanewon Semin
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON SEMIN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Semin

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON SEMIN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KAPANEWON SEMIN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Semin dan Capaian Renstra Kapanewon Semin

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Semin Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2023 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Semin berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau Tahun 2023.

hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/ Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan (Tahun 2023) yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. target-target SKPD Tahun 2023 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Pada Perangkat Daerah Kapanewon Semin dalam pelaksanaan Renja 2023 telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;

Pada Perangkat Daerah Kapanewon Semin dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 realisasi program dan kegiatan sesuai target kinerja hasil/keluaran pada Triwulan I sebagai berikut :

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.660.000	7.212.500	19,67
		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	930.390.192	199.797.987	21,47
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.100.000	3.180.000	39,26
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.030.000	44.053.500	64,76
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.825.000	5.200.000	20,95

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE %
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.870.224	11.541.597	17,79
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.932.500	24.861.000	26,75
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.690.000	825.000	12,33
		2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	68.275.000	19.165.000	28,07
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	578.900.000	264.740.000	45,73
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.147.000	18.725.000	51,80
		2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.050.000	5.200.000	24,70
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.260.000	6.915.000	35,90
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	76.460.000	1.665.000	2,18
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.820.000	11.425.000	41,07

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE %
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	-	-
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	35.000.000	9.960.000	28,46

2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan adalah:

Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Semin pada Tahun 2023 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang yang direncanakan dalam Renja Tahun 2023.

3. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2023;
- Adanya kesinkronan kegiatan yang dianggarkan Perangkat Daerah Kapanewon Semin dengan agenda kegiatan yang di selenggarakan Perangkat Daerah di tingkat kabupaten.
 - Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - Sumber Daya Manusia yang ada di Perangkat Daerah Kapanewon Semin.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
- Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
 - Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon.

Pada Rencana Kerja Kapanewon Semin semua Rumusan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran tidak mengalami perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD.

Dari uraian di atas Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11,86	0	0	0	0	12,06	12,06	101,69
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	3	2	2	100	2	2	20,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	0	1	1	20,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100,00	1	1	20,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15	3	3	3	100,00	3	3	20,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	2	2	2	100,00	2	2	20,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85	17	17	17	100,00	17	17	20,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160	32	32	32	100,00	32	32	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,26	0	0	0	0	1,26	1,26	100,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN	1120	224	224	224	100,00	224	224	20,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100,00	1	1	20,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65	13	13	13	100,00	13	13	20,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24	0	0	0	0	6	6	25,00
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30	6	6	6	100,00	6	6	20,00
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pengiriman peserta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	0	0	0	0	2	2	20,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	12	4	4	100,00	4	4	20,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65	41	12	12	100,00	13	13	20,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	4	4	100,00	4	4	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	4	4	4	0	2	2	20,00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1237	247	247	246	99,60	248	248	20,05
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	40	40	40	100,00	12	12	25,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	17	17	17	100,00	17	17	20,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	4	3	3	100,00	12	12	20,00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55	0	0	0	0	1	1	1,82
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0	5	5	0,00
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Gudang	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	1	1	1	100,00	6	6	100,00
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0	1	1	100,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360	72	72	72	100,00	72	72	20,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100,00	12	12	20,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300	60	60	60	100,00	60	60	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855	182	179	179	100,00	178	178	20,82
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	690	140	141	141	100,00	141	141	20,43
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	10	10	10	100,00	10	10	25,00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	19	15	15	100,00	14	14	NA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	2	2	2	100,00	2	2	20,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55	11	11	11	100,00	11	11	20,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	100	100		0	100	100	100,00
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	15	3	3	3	100,00	3	3	20,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9	2	2	2	100,00	2	2	22,22
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	95	19	19	19	100,00	19	19	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	25	5	5	5	100,00	5	5	20,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70	14	14	14	100,00	14	14	20,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	32	0	0	0	0	8	8	25,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	60	12	12	12	100,00	12	12	20,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65	13	13	13	100,00	13	13	20,00
7.01.03.2.03	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	25	0	0	0	-	5	5	20,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	2	2	2	2	2	2	20,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30	6	6	6	100,00	6	6	20,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	35	7	7	7	100,00	7	7	20,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	2	2	2	100,00	2	2	20,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20	5	5	5	0	5	5	25,00
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20	5	5	5	100,00	5	5	25,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,53	0	0	0	0	2,53	2,53	100,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan P	375	75	75	75	75	75	75	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan/ Dokumen hasil patroli terpadu Forkompimkap	15	4	4	4	100,00	4	4	26,67
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	16,36	0	0	0	-	15,78	15,78	96,45
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kalurahan	10	50	2	2	100,00	2	2	20,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10	2	2	2	100,00	2	2	20,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	115	23	23	23	100,00	23	23	20,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	70	14	14	14	100,00	14	14	20,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	4	4	4	100,00	4	4	20,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	2	2	2	100,00	2	2	20,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	1	1	1	100,00	1	1	20,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40	8	8	8	100,00	8	8	20,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	2	2	2	100,00	2	2	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2022			Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun 2022	
					Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	1	1	1	100,00	1	1	20,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2.22.08.5.07	<i>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	<i>Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	5	1	1	1	100,00	1	3	60
		<i>Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana</i>	100	100	100	100	100,00	100	100	100
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja	4	0	1	1	100,00	1	2	50
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	12	0	3	3	100	3	6	50
		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	8	0	2	2	100	2	4	50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Semin

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelayanan Kapanewon digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Semin serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Tugas Pokok dan Fungsi yang harus diemban oleh Pemerintah Kapanewon mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan bidang Sosial. Fungsi dari masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh jawatan melalui program/kegiatan dalam setiap tahun anggaran.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Semin berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan meningkat yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%. Adapun formula indikator kinerja utama adalah:

- Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKalurahan tepat waktu dibagi jumlah kalurahan se kapanewon;
- Jumlah desa yang menetapkan RPKalurahan tepat waktu dibagi jumlah kalurahan se kapanewon;
- Jumlah KK miskin yang tertangani dibagi jumlah KK miskin se Kapanewon
- Jumlah kasus Kententraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dibagi jumlah kasus Kententraman dan Ketertiban Umum se kapanewon.
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon meningkat.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Semin

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Semin maka diperlukan tentang potret Kapanewon Semin saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Semin adalah sebagai berikut :

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Kapanewon Semin

Kinerja pelayanan di Kapanewon Semin mengacu pada tugas dan fungsi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan

- pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
 - p. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Semin, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Semin dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Semin sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Semin hingga Tahun 2021 secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan
2. Terfasilitasinya pelayanan administrasi pemerintahan secara umum (Dispensasi Nikah, Penerbitan ijin UMK, Persetujuan SKTM, Surat Keterangan Domisili, surat keterangan ahli waris dll)
3. Terfasilitasinya kegiatan pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
4. Terfasilitasinya kegiatan monitoring Penyaluran BLT.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
6. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah kalurahan.
7. Terfasilitasinya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
8. Terfasilitasinya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan kalurahan.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan, karawitan, pedalangan dll)
12. Terfasilitasinya pembuatan buku profil desa, buku profil Kapanewon dan monografi Kalurahan

Adapun tingkat kinerja Kapanewon Semin yang tidak secara langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya kegiatan pelayanan antara lain :

1. terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LKj.IP, Laporan Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan keuangan bulanan.

4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semin dan Pengendalian internal PD.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Semin maka diperlukan data gambaran kondisi dan saat ini. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Semin adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan Sosial Budaya

a. Kondisi

1. Perlu penambahan Sumber Daya Aparatur
2. Perlu Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai regulasi terutama di bidang Pelayanan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari budaya pesta;
5. Belum tepatnya pemanfaatan teknologi/media sosial bagi generasi muda;
6. Masih rendahnya angka pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
7. Penambahan Pengangguran karena adanya sebagian tenaga kerja yang terkena PHK karena terdampak wabah Covid-19;
8. Perlunya sosialisasi/penyuluhan Penyakit Masyarakat;
9. Mengupayakan peningkatan pemetaan daerah rawan Bencana.
10. Mengupayakan koordinasi dengan wilayah perbatasan;
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hukum;

b. Permasalahan

1. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Aparatur;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia personil ASN yang tidak merata;
3. Regulasi yang selalu berubah-ubah.
4. Inventarisasi budaya yang ada dimasyarakat belum optimal;
5. Masih banyaknya minat masyarakat terhadap budaya pesta atau hajatan;
6. Efek negatif teknologi terhadap generasi muda;
7. Masih banyaknya pengangguran;
8. Masih adanya Penyakit Masyarakat;
9. Kurang optimalnya pemetaan daerah rawan bencana;
10. Belum terlaksananya koordinasi antara wilayah perbatasan secara rutin;
11. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum;

2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

1. Keterbatasan SDM serta kurang meratanya pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha;
2. Masih banyaknya petani yang menerapkan sistem pertanian secara tradisi dan menggunakan peralatan yang seadanya;
3. Belum tercukupiya kebutuhan bahan baku untuk produk tertentu sehingga masih harus mengimpor dari luar daerah;
4. Memberikan pemahaman terhadap pelaku ekonomi untuk bisa bekerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga;

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya sumber daya manusia dari pelaku ekonomi;
2. Masih banyaknya petani yang belum memanfaatkan teknologi pertanian;
3. Belum adanya pusat penjualan (*show room*) bagi produk UMKM di Kapanewon Semin;
4. Kondisi geografis yang kurang mendukung untuk tersedianya bahan baku untuk jenis-jenis produk tertentu;
5. Masih kurangnya minat pelaku ekonomi untuk menangkap peluang kerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga;

3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Mengoptimalkan Gedung perkantoran yang sudah ada;
2. Kondisi jalan sebagian bergelombang dan rusak sehingga mengganggu transportasi;
3. Belum optimalnya penataan pedagang di pasar dan pedagang kaki lima;
4. Pembuangan sampah akhir masih di bawa ke daerah lain serta perlunya pemahaman terhadap masyarakat terhadap penanganan sampah;
5. Sebagian masyarakat telah memiliki kendaraan sendiri juga dikarenakan keberadaan angkutan umum kurang memadai;
6. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU);
7. Memberikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

b. Permasalahan

1. Masih terbatasnya sarana gedung Kapanewon Semin sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
2. Kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur baik jalan desa maupun jalan kabupaten dan adanya angkutan yang bertonase berat akan mengakibatkan cepatnya kerusakan jalan;
3. Belum tertibnya penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
4. Masih kurangnya tempat pembuangan sampah dan belum adanya tempat pembuangan akhir serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah;
5. Terbatasnya angkutan umum serta masih rendahnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan angkutan umum;
6. Kurangnya penerangan jalan umum (PJU) pada titik-titik tertentu;
7. Masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

2.3.3. Dampak Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026". Sedangkan Misi Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah;

Dalam merumuskan tema pembangunan Tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi DIY sebagai berikut

- a. Isu Strategis Nasional :
 - Percepatan penghapusan kemiskinan
 - Penanganan Stunting
 - Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19
 - Middle income trap riset, alokasi sumber daya, dan human capital
 - Percepatan pembangunan infrastruktur
 - Pengurangan risiko bencana
 - Pasokan energi dan pangan
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Reformasi Birokrasi
 - Pilpres dan Pilkada Serentak tahun 2024
 - Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045
- b. Isu Strategis Provinsi :
 - Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024
 - Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - Pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19
 - Penanganan Stunting
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pasokan Energi dan Pangan
 - Perencanaan Pembangunan jangka Panjang 2025 – 2045
- c. Isu Strategis Daerah :
 - Pilpres dan pilkada serentak tahun 2024
 - Penanganan stunting
 - Perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - Penanganan dan pemulihan paska pandemi Covid-19
 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 0 (nol) Kemiskinan Ekstrem
 - Pengembangan potensi Pariwisata
 - Peningkatan Investasi
 - Perkembangan Teknologi Informasi
 - Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana
 - Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah
 - Pengembangan inovasi daerah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah: "Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi;
 - a. Investasi dan pariwisata
 - b. Pengembangan sektor unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi;

Pemerintah Kapanewon Semin sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Semin. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Semin, yang meliputi permasalahan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban; Reformasi Birokrasi; Pendidikan dan Kesehatan); Ketahanan Pangan; Ekonomi (UMKM, Investasi dan Pariwisata; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Semin yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2022-2026.

Berkaitan dengan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan kesepakatan dari negara negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun negaranya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara negara yang ikut menandatangani program ini. Seperti program pengentasan kemiskinan, upaya peningkatan kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target target SDGs. Sebagai konsekwensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kapanewon Semin diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kapanewon.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi khususnya di bidang pelayanan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi di bidang pelayanan dibutuhkan sosialisasi sampai ke tingkat bawah mulai dari kalurahan padukuhan bahkan sampai ke tingkat RT.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolok ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai kebutuhan. Penyusunan program dan kegiatan di Kapanewon Semin diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

2.3.3.1 Faktor Pendorong :

Faktor – faktor yang bisa mendorong upaya pencapaian keberhasilan visi dan misi Bupati Gunungkidul antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
3. Adanya potensi sumber daya alam;
4. Adanya potensi wisata;
5. Adanya potensi produk unggulan daerah;
6. Adanya potensi bidang Pertanian dan perkebunan;
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi;
8. Meningkatnya prosentase kualitas infrastruktur baik jalan desa maupun jalan kabupaten;
9. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah Kapanewon dan kalurahan dan tenaga teknis lainnya.

2.3.3.2 Faktor Penghambat :

Sedangkan Faktor–faktor yang dimungkinkan bisa menghambat upaya pencapaian keberhasilan visi dan misi Bupati Gunungkidul khususnya di Kapanewon Semin antara lain sebagai berikut :

1. Makin bertambahnya pengangguran dan rumah tangga miskin akibat pandemi Covid 19;
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang ada;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi sektor pariwisata;
4. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan;
5. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil;
6. Kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur baik jalan desa maupun jalan kabupaten
7. Kurang optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur di Wilayah Kapanewon Semin yang merupakan jalur utama dari

wilayah timur dan utara menuju akses pariwisata Kabupaten Gunungkidul;

8. Masih miKetidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/cor blok) dengan peningkatan jumlah alat transportasi;
9. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Semin

Kapanewon Semin secara topografis termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung Timur, sehingga wilayah Semin potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak. Secara geomorfologi masuk dalam satuan Perbukitan Seribu (Gunung Sewu). Kapanewon Semin dilalui Sungai Oya dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Sungai Oya. Sungai Oya termasuk tipe aliran permanen, sepanjang tahun air mengalir, sedangkan beberapa sungai lain hanya mengalir pada musim penghujan. Kondisi tanahnya yang subur banyak terdapat sumber air yang cocok untuk segala macam tanaman pangan serta banyak diusahakan padi gogo rancah, mempunyai dataran tinggi dan rendah bahkan pegunungan tertinggi di Kabupaten Gunungkidul berada di Kapanewon Semin, dari bawah sampai atas dapat digunakan untuk lahan usaha tani.

Kondisi alam wilayah Semin sebagian besar lahan agak datar dengan kemiringan antara 8 – 14 % yang terletak di Desa Sumberejo, Bendung, Bulurejo, Kemejing dan sebagian kecil dari desa lainnya, sedangkan yang mempunyai kemiringan diatas 15 % terdapat di Desa Semin, Kalitekuk, Pundungsari, Karang Sari, Candirejo dan Rejosari. Walaupun demikian tanah yang mempunyai kemiringan lebih dari 15% tersebut banyak terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan persawahan.

Sedangkan ketinggian alam adalah antara 250 – 350 m di atas permukaan laut terdapat di Desa Sumberejo, Bendung, Kemejing, Bulurejo serta wilayah desa lainnya, sedangkan letak ketinggian yang relatif tinggi terletak di Desa Semin, Pundungsari dan Karang Sari, ketinggian yang paling tinggi berada di Gunung Panggung yang berbatasan dengan Kapanewon Ponjong berada di Desa Pundungsari dengan ketinggian mencapai kurang lebih 900m diatas permukaan laut.

Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan curah hujan rata-rata 1.955 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 129 hari, suhu bulanan berkisar 18 C – 35 C. Secara administrasi Kapanewon Semin berbatasan dengan Kapanewon Ngawen, Karangmojo, Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

2.3.4.1. Faktor Pendorong:

1. Wilayah potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan);
2. Wilayah potensial untuk tanaman semusim (padi, palawija);
3. Wilayah potensial untuk budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak;
4. Dilalui Sungai Oya dengan debit air yang mencukupi sepanjang tahun;

5. Merupakan pintu gerbang masuk wilayah Kabupaten Gunungkidul dari arah Timur Laut;
 6. Wilayah potensial untuk pertambangan batu putih.
- 2.3.4.2. Faktor Penghambat:
1. Wilayah potensial terhadap bencana terutama banjir, erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan.
 2. Sebagai wilayah perbatasan, Kapanewon Semin kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat.

Dalam rangka merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Semin 2021-2026, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis internal dan analisis eksternal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Semin dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon.

1. Kondisi Fisik Dasar

- 1) Secara topografis termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung, sehingga wilayah Semin potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan tembakau), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak
- 2) Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar Opak-oya yang sangat berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi
- 3) Secara geomorfologi wilayah Semin 80 % berupa perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60 derajat terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan.

2. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- 1) Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung di usia 26-55 th
- 2) Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah
- 3) Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani

3. Kondisi Perekonomian

- 1) Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kapanewon Semin, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa
- 2) Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil buah-buahan dan tembakau), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan ayam) cukup tinggi.

4. Kondisi Pemerintahan

- 1) Aparat Kapanewon telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

- 2) Dilaksanakannya pencairan dana desa sesuai dengan undang-undang desa.
- 3) Penguatan kelembagaan Kapanewon dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas *subsidiary*.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kapanewon Semin sebagai berikut :

1. Kekuatan

- 1) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- 2) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan;
- 3) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan;
- 4) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu yang cukup prospektif.

2. Kelemahan

- 1) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, tanah longsor;
- 2) Sebagai wilayah perbatasan, Kapanewon Semin kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat;
- 3) Jumlah penduduk miskin masih ada;
- 4) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi;
- 5) Penguasaan teknologi masih rendah;
- 6) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif;
- 7) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kapanewon dan kalurahan belum optimal.
- 8) Kualitas sumber daya aparatur yang tidak merata dan masih di pengaruhi jumlah sumber daya aparatur yang sangat terbatas.

a. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kapanewon Semin dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tinjauan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Semin sebagai

daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo.

1. Peluang

- 1) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional;
- 2) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat;
- 3) Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten - kabupaten lainnya;
- 4) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Tantangan

- 1) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- 2) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan;
- 3) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 4) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan tantangan dan peluang, maka untuk perumusan program dan kegiatan perlu disusun berdasarkan skala prioritas demi tercapainya pencapaian sasaran secara efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skala prioritas maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memanfaatkan peluang yang tersedia guna memperkuat posisi pemerintah kabupaten untuk melaksanakan otonomi daerah yang bertanggung jawab dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada.
2. Menjalinkan kerjasama dengan dunia usaha maupun pihak yang lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai peraturan yang berlaku untuk menambah PAD.
3. Melakukan perencanaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok dasar dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan mengacu pada kemampuan untuk menentukan skala prioritas.
4. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menambah wawasan dalam rangka pengembangan wilayah secara merata dan berkesinambungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD kabupaten, APBD propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk Tahun Anggaran 2024, Besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan Kapanewon Semin Tahun Anggaran 2024 direncanakan sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan keterbatasan Anggaran, hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Gunungkidul, sehingga berpengaruh terhadap Perolehan PAD Tahun Anggaran 2023 terutama pada sektor Pariwisata dan Perdagangan, Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat kalurahan sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi penghitungan anggaran pemerintah daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan dana yang dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang ditingkat kabupaten besaran angkanya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Secara lengkap Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada matriks lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan kami sajikan di tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		<i>Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (%)</i>	100	100.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		<i>Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (%)</i>	100	100.000.000,00	Kapanewon Semin
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	1	100.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	1	100.000.000,00	Kapanewon Semin
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	100.000.000,00	Kapanewon Semin
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		<i>Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)</i>	100	35.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		<i>Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)</i>	100	35.000.000,00	Kapanewon Semin
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan (Dokumen)	2	35.000.000,00	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan (Dokumen)	2	35.000.000,00	Kapanewon Semin
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	4	35.000.000,00	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	4	35.000.000,00	Kapanewon Semin
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)</i>	100	1.153.287.692,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)</i>	100	1.153.287.692,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.415.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.415.000,00	Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Kec. Semin)	Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Indeks)	12.06	29.145.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Kec. Semin)	Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Indeks)	12.06	29.145.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	500.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.500.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	800.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2.760.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2.760.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	2.210.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	2.210.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32	930.350.192,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32	930.350.192,00	Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kapanewon Semin, Kec. Semin)	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	1.26	925.510.192,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kapanewon Semin, Kec. Semin)	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	1.26	925.510.192,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	196	1.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	196	1.300.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	3.540.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	3.540.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin, Kec. Semin)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2.140.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin, Kec. Semin)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2.140.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.00	2.140.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.00	2.140.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	0	33.217.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	0	33.217.500,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2.200.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2.200.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	15.437.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	15.437.500,00	Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	6.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	6.000.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	247	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	247	1.200.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.300.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.300.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	2.080.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	2.080.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	4		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	4		- Kapanewon Semin
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0.00		- Pengadaan Mebel	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0.00		- Kapanewon Semin
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	72	65.800.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	72	65.800.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				48.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				48.000.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	17.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	17.800.000,00	Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	169	84.365.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	169	84.365.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	143	44.700.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	143	44.700.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	1.500.000,00	Pemeliharaan Mebel	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	1.500.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	5.400.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	5.400.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	28.965.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	28.965.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	3.800.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	3.800.000,00	Kapanewon Semin
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				119.938.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				119.938.000,00	Kapanewon Semin
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)	100				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)	100		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	3	3.790.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	3	3.790.000,00	Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2.00	3.790.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2.00	3.790.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	19	116.148.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	19	116.148.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	87.250.500,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	87.250.500,00	Kapanewon Semin
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	28.897.500,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	28.897.500,00	Kapanewon Semin
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				28.887.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				28.887.000,00	Kapanewon Semin
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)	100				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)	100		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (Indeks)	8	15.177.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (Indeks)	8	15.177.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6.477.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6.477.000,00	Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12	8.700.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12	8.700.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Indeks)	25	13.710.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Indeks)	25	13.710.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	6.780.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	6.780.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	6.930.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	6.930.000,00	Kapanewon Semin
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terasilitasi (%)	100	9.175.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terasilitasi (%)	100	9.175.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Laporan)	7	9.175.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Laporan)	7	9.175.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1.475.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1.475.000,00	Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	7.700.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	7.700.000,00	Kapanewon Semin
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)	100	23.380.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)	100	23.380.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)	2.53	23.380.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	(Kapanewon Semin, Semin)	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)	2.53	23.380.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				11.500.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				11.500.000,00	Kapanewon Semin
			(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	3			(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	3		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	11.880.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	11.880.000,00	Kapanewon Semin
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20.910.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20.910.000,00	Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)	100				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)	100		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	18	20.910.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	18	20.910.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2.00	970.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2.00	970.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	23.00	1.905.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	23.00	1.905.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6.625.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6.625.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	51.00			(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	51.00		
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4	1.970.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4	1.970.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	2.020.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	2.020.000,00	Kapanewon Semin
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	870.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	870.000,00	Kapanewon Semin

NO	KODE	Rencana Rancangan Awal RKPD					Rencana Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9	17
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	2	6.550.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kapanewon Semin, Semin)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	2	6.550.000,00	Kapanewon Semin
J U M L A H						1.490.577.692,00						1.490.577.692,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Musyawarah ditingkat Kapanewon dengan kegiatan memproses keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah Kapanewon. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide-ide maupun anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana suatu program pembangunan dalam 1 tahun anggaran dapat mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Kapanewon Semin 2021-2026, yang merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Semin dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon. Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kapanewon Semin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tujuan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Semin sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri.

Berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan RKPD Kapanewon Semin Tahun 2024, semua usulan program pembangunan di Kapanewon Semin telah sesuai dan dapat mengakomodir sasaran dan program prioritas yang menjadi isu strategis Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan sektor wisata, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan. Adapun salah satu program prioritas pengentasan kemiskinan, melalui tahapan Musrenbang yang melalui kapanewon dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5

USULAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin KAPANEWON SEMIN	Kalurahan Rejosari, Kapanewon Semin, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat	7 KK	4.000.000,00	28.000.000,00	
2	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin KAPANEWON SEMIN	Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat	7 KK	4.000.000,00	28.000.000,00	
	TOTAL					56.000.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Pada Tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam Isu Strategis yang dikaitkan dengan 11 (sebelas) Isu Strategis Nasional, 7 (tujuh) Isu Strategis Provinsi dan 12 (dua belas) Isu Strategis Daerah yang dikaitkan dengan prioritas pengembangan kawasan wilayah utara dan geopark gunungsewu serta pendekatan tematik pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi penurunan angka kemiskinan, ketimpangan wilayah dan peningkatan sosial ekonomi pasca pandemi covid 19 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Semin pada Tahun 2023 belum menganggarkan kegiatan yang menunjang kebijakan tersebut.

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang terkait dengan tugas dan fungsi Kapanewon Semin sesuai dengan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Semin

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, bahwa Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah “Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi;
 - a. Investasi dan pariwisata
 - b. Pengembangan sektor unggulan
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi;

Sedangkan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Semin didasarkan atas pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Semin yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kapanewon Semin. Sasaran Daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024, selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran OPD, Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran OPD dengan Format (tabel 3.1) sebagai berikut :

TABEL 3.1
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP PD	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD
2	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi Budaya Lokal yang dilestarikan

Selanjutnya disajikan hubungan antara sasaran pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1.1
TUJUAN KAPANEWON SEMIN TAHUN 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2024
	Tujuan :		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	92,75
	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi Budaya Lokal yang dilestarikan	7

TABEL 3.1.2
SASARAN KAPANEWON SEMIN TAHUN 2024

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran PD 2024
	Sasaran :		
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	92,65
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,50 (A)
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	5

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Kapanewon Semin dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Semin

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	92,65

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Semin Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2023. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban Kapanewon Semin untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Semin. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Pelayanan Masyarakat

Tertuang dalam dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaanyang di rumuskan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan meningkatkan fasilitas kelengkapan administrasi, perlengkapan, dan sarana prasarana perkantoran.

b. Faktor SDM

Tertuang dalam satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dirumuskan dalam rangka peningkatan kemampuan dan integritas aparat Kapanewon Semin dalam pelayanan kepada masyarakat.

c. Faktor Pengelolaan Keuangan

Tertuang Tertuang dalam satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dirumuskan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan di Kapanewon Semin melalui proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi.

d. Faktor Utama Pelayanan Masyarakat

Ada Tujuh program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan, Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dari 7 (Tujuh) program tersebut di jabarkan menjadi 10 (sepuluh) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang:

1. Pemerintahan Kalurahan
2. Sosial dan Kemasyarakatan
3. Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Kecintaan pada Tanah Air (Pembentukan PASKIBRA)

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa
8. Peningkatan Pelayanan Terpadu di Kapanewon
9. Pelestarian Seni dan Budaya
10. Kelembagaan dan Keistimewaan

2. Jumlah program dan jumlah kegiatan

Rencana program dan kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024 terdiri dari 8 program dan 17 kegiatan.

3. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan:

Semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, dan Jawatan Pelayanan Umum sifat penyebarannya adalah menyeluruh ke semua kalurahan di wilayah Kapanewon Semin. Terkecuali program pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur, Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, lokasi kegiatan ini di kantor Kapanewon yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kapanewon Semin.

4. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan di Kapanewon Semin Tahun 2024, total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah Rp.1.490.577.692,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Rencana program dan kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024 terdiri dari Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (Tabel 4.1), dan untuk Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel 4.2 Sebagai berikut :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	5 Potensi Budaya	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	Kapanewon Semin
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	Kapanewon Semin
					4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	Kapanewon Semin
					4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	Kapanewon Semin
					4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	Kapanewon Semin
Reformasi Birokasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.50 (A)	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.153.287.692,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.415.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.145.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	800.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.760.000,00	Kapanewon Semin
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.210.000,00	Kapanewon Semin					
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	930.350.192,00	Kapanewon Semin

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	925.510.192,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000,00	
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.540.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.140.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.140.000,00	
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.217.500,00	
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.200.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.437.500,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.300.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.080.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		- Kapanewon Semin
					7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		- Kapanewon Semin
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.800.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.000.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.800.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.365.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.700.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	Kapanewon Semin

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.965.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.800.000,00	Kapanewon Semin
	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	92.65	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119.938.000,00	
					7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.790.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.790.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	116.148.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	87.250.500,00	Kapanewon Semin
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.897.500,00	Kapanewon Semin
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.887.000,00	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.177.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.477.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.700.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.710.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.780.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.930.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.175.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.175.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.475.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.700.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.380.000,00	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.380.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.500.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.880.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.910.000,00	
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.910.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	970.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.905.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.625.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.970.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.020.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	870.000,00	Kapanewon Semin
					7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.550.000,00	Kapanewon Semin
						J U M L A H	1.490.577.692,00	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Semin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				150.000.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (%)</i>		100	100.000.000,00				150.000.000,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	1	100.000.000,00			1	150.000.000,00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	<i>Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	1	100.000.000,00	<i>Dana Keistimewaan DIY</i>		1	150.000.000,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000,00				25.970.000,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				35.000.000,00				25.970.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)		100					
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan (Dokumen)</i>	(Kapanewon Semin, Semin)	2	35.000.000,00			2	25.970.000,00
4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	<i>Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)</i>	(Kapanewon Semin, Semin)	4	35.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		4	25.970.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.355.577.692,00				2.279.189.944,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.153.287.692,00				2.018.117.444,00
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Indeks)</i>	(Kapanewon Semin, Semin, Kec. Semin)	12.06	37.415.000,00			11.86	35.787.500,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.145.000,00				28.705.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	3		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		3	28.705.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				500.000,00				500.000,00
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	1		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		1	500.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				500.000,00				202.500,00
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	1		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		1	202.500,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				1.500.000,00				1.080.000,00
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	2		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		3	1.080.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				800.000,00				300.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	2		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		2	300.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.760.000,00				3.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	17		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		17	3.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	32	2.210.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		32	2.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin, Kec. Semin)</i>	1.26	930.350.192,00			1.26	1.740.894.944,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	196	925.510.192,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		224	1.734.454.944,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	1	1.300.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		1	1.200.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.540.000,00				5.240.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	13		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		13	5.240.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin, Kec. Semin)</i>	6	2.140.000,00			6	3.850.000,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	6.00	2.140.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		6.00	3.850.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	0	33.217.500,00			0	51.995.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	4	2.200.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		4	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.437.500,00				34.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	12		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		16.00	34.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	5	6.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		5	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	2	5.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		2	5.500.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	247	1.200.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		248	1.320.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	12	1.300.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		12	775.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.080.000,00				4.400.000,00
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	12		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		12	4.400.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	4	-			9	38.500.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	0.00	-	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		4.00	38.500.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	72	65.800.000,00			72	62.150.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	12	48.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		12	44.990.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	72	17.800.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		60	17.160.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84.365.000,00				84.940.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Jumah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	169				183	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	143	44.700.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		169	39.200.000,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	30	1.500.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		10.00	1.500.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	14	5.400.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		14	5.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	0.00	28.965.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		2.00	34.840.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.800.000,00				4.400.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	12		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		11.00	4.400.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)</i>		100	119.938.000,00				94.630.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	3	3.790.000,00			3	5.400.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	2.00	3.790.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		3.00	5.400.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	19	116.148.000,00			19	89.230.000,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	3	87.250.500,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		5.00	59.875.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	14	28.897.500,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		14	29.355.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)</i>		100	28.887.000,00				51.355.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.177.000,00				37.415.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (Indeks)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	8				8	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	12	6.477.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		12	27.165.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	13	8.700.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		13	10.250.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Indeks)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	25	13.710.000,00			25	13.940.000,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	2	6.780.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		2	8.120.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6.930.000,00				5.820.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	4		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</i>		4	5.820.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)</i>		100	9.175.000,00				10.000.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	7	9.175.000,00			7	10.000.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	1	1.475.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		2.00	3.000.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				7.700.000,00				7.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	1		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		2.00	7.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)</i>		100	23.380.000,00				80.025.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	2.53	23.380.000,00			2.53	80.025.000,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				11.500.000,00				71.825.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	3		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		75.00	71.825.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	4	11.880.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		4	8.200.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)</i>		100	20.910.000,00				25.062.500,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	18	20.910.000,00			17.64	25.062.500,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	2.00	970.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		2.00	2.300.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	23.00	1.905.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		23.00	1.320.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	51.00	6.625.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		51.00	13.870.000,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	4	1.970.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		4	2.100.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.020.000,00				2.500.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	1		<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		1	2.500.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	2	870.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		2	600.000,00
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)</i>	<i>(Kapanewon Semin, Semin)</i>	2	6.550.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		2	2.372.500,00
J U M L A H					1.490.577.692,00				2.455.159.944,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Semin Tahun 2024 disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan. Rencana Kerja Kapanewon Semin disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Semin yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kapanewon Semin Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Semin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Adapun pelaksanaan rencana kerja akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing Jawatan. Dengan begitu kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Semin sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Anggaran Tahun 2024.

Wonosari,
KAPANEWON SEMIN,

HARYANTO

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA KAPANEWON PATUK
TAHUN 2024
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah membuat surat edaran untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Sesuai dengan ketentuan tersebut dan dalam rangka penyusunan tersebut dan dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tahun 2024 merupakan tahun ke 3 dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, oleh karena itu dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024 harus bepedoman pada visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai tema dan prioritas pembangunan tahun 2024;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2024 disempurnakan dengan memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang serta pemulihan pasca COVID-19;
3. Renja Perangkat Daerah akan ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan;

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Kerja PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-

2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD, Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Rencana Kerja Kapanewon Patuk dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Kapanewon Patuk disesuaikan dengan Program Prioritas RKPD. Rencana Kerja Kapanewon Patuk dengan Renstra Kapanewon Patuk, menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/KPTS/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gunungkidul bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada wabah pandemi COVID-19 diperlukan penyesuaian dan optimalisasi capaian target kinerja dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan perkembangan kondisi daerah. Penyesuaian perencanaan tersebut diwujudkan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024.

KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN

1. Renja PD dengan RKPD

RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif Renja PD disesuaikan dengan program prioritas PD.

2. Renja PD dengan Renstra PD

Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.

3. Renja PD dengan Renja K/L (Kementerian/ Lembaga) dan PD Provinsi

Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD provinsi

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. PP Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
 14. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gunungkidul;
 15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Patuk yaitu menjadi pedoman bagi aparatur Kapanewon Patuk dalam Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Patuk adalah untuk memberikan pedoman bagi Kapanewon Patuk dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Patuk Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyajian Rencana Kerja Kapanewon Patuk disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON PATUK

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Patuk dan Capaian Renstra Kapanewon Patuk

	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Patuk
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Patuk
	2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Patuk
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON PATUK

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Patuk dan Capaian Rencana Strategis Kapanewon Patuk

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Patuk menjelaskan mengenai kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/ Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Realisasi Renja Kapanewon Patuk mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Patuk dan atau realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, indikator kinerja dropping air;
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan Kecuali pengadaan jamban sehat ada beberapa KK yang tidak terealisasi dan Dropping Air;
3. Pada tahun 2022 realisasi program dan kegiatan di Kapanewon Patuk tidak ada yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 yaitu:
 - a. Penerima Jamban sehat telah memiliki jamban secara swadaya maupun mendapatkan bantuan dari pihak lain,
 - b. Faktor Cuaca sehingga na tidak ada permohonan dropping air dari masyarakat;
5. Faktor yang mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2022 diantaranya faktor internal yaitu manajemen waktu dan SDM serta penyesuaian indikator kinerja, pergeseran rincian obyek maupun pergeseran anggaran kas;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
 - a. usulan perubahan penjelasan rincian obyek maupun pergeseran rincian obyek untuk beberapa rekening belanja,
 - b. menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak yang berkepentingan,
 - c. memaksimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian target kinerja kegiatan

Apa yang telah disampaikan di atas dapat dilihat pada format tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Patuk

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100	100	100	1	100		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana</i>		4,143	100	100	1	100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		NA	NA	NA	NA	4		
		Jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen Renja perubahan, Jumlah dokumen draft Renstra, Jumlah dokumen Renstra		4	4	4	1	NA		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		NA	NA	NA	NA	1		
		Jumlah Dokumen RKA		1	1	1	1	NA		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		NA	NA	NA	NA	1		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA		1	1	1	1	NA		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		NA	NA	NA	NA	3		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD, Perjanjian Kinerja, ROPK		3	3	3	1	NA		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		NA	NA	NA	NA	2		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA, Perubahan Perjanjian Kinerja		2	2	2	1	NA		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat		NA	NA	NA	NA	13		
		Jumlah Dokumen LKJLP, Jumlah Laporan Monev, Jumlah Laporan Tepra		17	17	17	1	NA		
X.XX. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan		17	0	0	0	4		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		84	84	84	1	84		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rensstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		NA	NA	NA	NA	238		
		Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan AN		12	12	12	1	NA		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		NA	NA	NA	NA	1		
		Jumlah dokumen laporan akhir tahun		1	1	1	1	NA		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		NA	NA	NA	NA	12		
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ SPJ		12	12	12	1	NA		
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran		1	1	1	1	NA		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6	6	6	1	6		
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan		NA	NA	NA	NA	6		
		Jumlah ASN tertangani		16	16	16	1	NA		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Administrasi Umum Perangkat Daerah		51,571	51,571	51,571	1	51,571		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		NA	NA	NA	NA	4		
		Jumlah Komponen Kelistrikan yang Tersedia		4	4	4	1	NA		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		NA	NA	NA	NA	2		
		Kantor yang Disediakan		NA	NA	NA	NA	0		
		Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia		2	2	2	1	NA		
		Jumlah Papan Kegiatan/Papan Pengumuman yang Terbeli		1	1	1	1	NA		
		Jumlah Printer yang terbeli		1	1	1	1	0		
		Jumlah Laptop yang terbeli		1	1	1	1	1		
		Jumlah CCTV yang terbeli		1	0	0	0	1		
		Jumlah Pendingin Ruangan (AC) yang terbeli		4	0	0	0	0		
		Jumlah PC All in One yang terbeli		2	0	0	0	0		
		Jumlah mesin ketik elektrik yang terbeli		1	0	0	0	0		
		Jumlah Filling kabinet yang terbeli		0	0	0	0	0		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah rakat perantara Rumah Tangga yang Disediakan		NA	NA	NA	NA	4		
		Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Yang Terbeli		4	4	4	1	NA		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan Sub/d Tahun 2021 s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Persentase pengadaan BMD penunjang</i>		100	100	100	1	100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah lemari kayu yang terbeli		1	1	1	1	0		
		Jumlah lemari kaca yang terbeli		0	0	0	0	1		
		Jumlah kursi tamu yang terbeli		0	0	0	0	0		
		Jumlah kursi rapat yang terbeli		0	0	0	0	0		
		Jumlah kursi pejabat yang terbeli		0	0	0	0	0		
		Jumlah kursi tunggu yang terbeli		0	0	0	0	2		
		Jumlah meja rapat yang terbeli		0	0	0	0	0		
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah instalasi jaringan listrik yang terbeli		0	1	1	1	0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		49	49	49	1	49		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		NA	NA	NA	NA	12		
		Jumlah Hari Terasilitasinya Pengadministrasian Surat Menyurat		457	462	462	1	NA		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		NA	NA	NA	NA	12		
				NA	NA	NA	NA	24		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan Sub/d Tahun 2021 s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Rekening Jasa Tagihan Telepon yang Dibayar (1 rekening x 12 bulan)		12	12	12	1	NA		
		Jumlah Rekening Jasa yang Diterima Atas Pemanfaatan Listrik (2 rekening x 12 bulan)		24	24	24	1	NA		
X.XX.2.0.8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	1	1	1	1		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		148	148	148	1	148		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		NA	NA	NA	NA	114		
		Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya		1	1	1	1	NA		
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas		1	1	1	1	NA		
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya		9	9	9	1	NA		
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas		27	27	27	1	NA		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		NA	NA	NA	NA	6		
		Jumlah paket pemeliharaan mebelair		1	1	1	1			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		NA	NA	NA	NA	22		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	7	7	7	7	1	NA		
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharannya	2	2	2	2	1	NA		
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	6	6	6	6	1	NA		
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	7	7	7	7	1	NA		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	2		
		Jumlah paket pemeliharaan Gedung kantor	1	1	1	1	1	NA		
		Jumlah paket pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	1	1	1	1	1	NA		
		Jumlah Bulan terfasilitasi keamanan Gedung Kantor oleh Petugas Jaga Malam (tenaga Kontrak)	12	12	12	12	1	NA		
		Jumlah Jasa Sewa Tanah Gedung Kantor	12	12	12	12	1	NA		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	4		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan Sub/d Tahun 2021 s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharaannya		4	4	4	1	NA		
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP Jumlah dokumen SKM Jumlah dokumen SOP		NA	NA	NA	NA	NA		
		Jumlah Dokumen RTP/SPIP Jumlah dokumen SKM Jumlah dokumen SOP		4	4	4	1	NA		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana		100	100	100	1	100		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapaneuon terlaksana dengan baik		2	2	2	1	2		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		NA	NA	NA	NA	2		
		Jumlah kesepakatan partisipasi Peringatan Hari Jadi Gunungkidul		1	1	1	1	NA		
		Jumlah Kelompok Seni yang Dikirim dan Dipentaskan		1	1	1	1	NA		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		20	20	20	1	20		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		NA	NA	NA	NA	6		
		Jumlah kesepakatan forum desa siaga		1	1	1	1	NA		
		Jumlah kesepakatan forum kecamatan sehat		1	1	1	1	NA		
		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS		1	1	1	1	NA		
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB		1	1	1	1	NA		
		Jumlah dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial		1	1	1	1	NA		
		Jumlah layanan dropping air yang diterima masyarakat		90	90	90	1	NA		
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)		30	30	30	1	NA		
		Jumlah KK yang menerima Penampungan Air Hujan (PAH)-pokir		2	2	2	1	NA		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		NA	NA	NA	NA	14		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan Sub Tahun 2021 s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan		4500	4500	4500	1	NA		
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum		30	30	30	1	NA		
		Jumlah peserta sosialisasi pengurusan ijin UMK		60	60	60	1	NA		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi		100	100	100	1	100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Indek Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		23	23	23	1	23		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen usulan rencana kegiatan (DURKP)		1	1	1	1	NA		
		Jumlah peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan/Bumkal		1	1	1	1	NA		
		Jumlah penyelenggaraan bintek perencanaan pembangunan kalurahan bagi pamong kalurahan (PIWK)		1	1	1	1	NA		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		NA	NA	NA	NA	17		
		Jumlah perlombaan kalurahan tingkat kapanewon		1	1	1	1	NA		
		Jumlah profil kalurahan dan kapanewon tersusun		12	12	12	1	NA		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan Sub/d Tahun 2021 s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kepanewon		4	4	4	1	NA		
X.XX.03.20.1.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		29	0	0	0	29		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		8	8	8	1	8		
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan rakor TP PKK		NA	NA	NA	NA	13		
		Jumlah kesepakatan penangan kepemudaan dan karang taruna		12	12	12	1	NA		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1	1	1	1	NA		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat		NA	NA	NA	NA	3		
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang mengikuti pameran pembangunan		1	1	1	1	NA		
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang mengikuti pameran pembangunan		25	25	25	1	NA		

Kode Rekening	Urusan./Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rensstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan Sub/d Tahun 2021 s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kesepakatan koordinasi masa tanam, perbenihan, pemupukan, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikanan	1	1	1	1	1	NA		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi		100	100	100	1	100		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		11	11	11	1	11		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		NA	NA	NA	#VALUE!	11		
		Jumlah Pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kecamatan		1	1	1	1	NA		
		Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat kecamatan		10	10	10	1	NA		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		NA	NA	NA	NA	100		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rensstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	1	1	1	1		
		Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	1	1	1	1	1	NA		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	100	100	100	1	100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Indek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	38	38	38	38	1	38		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketutuhan Negara K	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	NA	NA	NA	NA	NA	75		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Kegiatan HUT yang terfasilitasi Pelaksanaannya		1	1	1	1	NA		
		Jumlah paskib kapanewon yang dibentuk dan dilatih		75	75	75	1	NA		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		NA	NA	NA	NA	1		
		Jumlah kesepakatan koordinasi FORKOMPIMKAP		1	1	1	1			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana		100	100	100	1	100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kepala Desa		22	22	22	1	22		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan		NA	NA	NA	NA	22		
		Jumlah peserta pembinaan penyusunan produk hukum kalurahan		0	80	80	1	NA		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		NA	NA	NA	NA	28		
		Jumlah koordinasi bidang pemerintahan		0	4	4	1			
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB		1	1	1	1			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rensstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah monografi kalurahan dan kapanewon yang tersusun		24	24	24	1			
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		NA	NA	NA	NA	24		
		Jumlah Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal		12	12	12	1	NA		
		Frekuensi money pengelolaan keuangan kalurahan		0	11	11	1	NA		
		Jumlah pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan desa		0	2	2	1	NA		
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		NA	NA	NA	NA	15		
		Jumlah koordinasi dengan Lurah dan Pamong lainnya		0	4	4	1	NA		
		Jumlah Pamong Kalurahan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan		0	120	120	1	NA		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan lurah		0	0	0	#DIV/0!	0		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		NA	NA	NA	NA	11		
		Jumlah BPKal/BPK yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan		120	120	120	1	NA		
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		NA	NA	NA	NA	7		
		Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan atau Staf Pamong Kalurahan		10	10	10	1	NA		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		NA	NA	NA	NA	2		
		Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya		90	90	90	1	NA		
		Jumlah satgas siaga bencana yang meningkat pengetahuannya		60	60	60	1	NA		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Patuk

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan/Kapanewon Patuk berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Patuk yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 80,65.

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel 2.2 dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Patuk
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke							Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024		
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	80,24	80,27	80,31	80,34	80,38	80,41	80,24	80,27	80,31	80,34		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	N/A	81.50 (A)	82.00 (A)	82.50 (A)	83.00 (A)	83.50 (A)	N/A	81,50	82	82,50		
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	N/A	5	7	9	10	12	N/A	5	7	9		

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD: KAPANEWON PATUK

No	Rencana Rancangan Awal RKPD				Rancangan Akhir				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan			
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Gelar Seni Budaya dalam hari Keistimewaan			
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Adat Seni, TRadisi dan Lembaga Budaya	2 Laporan	150.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Adat Seni, TRadisi dan Lembaga Budaya	1 Laporan	100.000.000	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH				30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		35.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				30.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				35.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	2 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah laporan program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 Laporan	35.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN				2.365.134.497	KECAMATAN				2.365.134.497	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PRESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.124.845.997	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PRESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.124.845.997	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.894.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.919.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja	2 Dokumen	3.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.385.000
			Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	
			Dokumen Perubahan Renja	1 Dokumen				Dokumen Perubahan Renja	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-PD	1 Dokumen	462.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-PD	1 Dokumen	462.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	322.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	462.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA, Dokumen Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	675.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA, Dokumen Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	585.000
			Jumlah Dokumen DPA					Jumlah Dokumen DPA		
			Dokumen Perjanjian Kinerja					Dokumen Perjanjian Kinerja		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA, Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	435.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA, Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	435.000
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA					Jumlah Dokumen Perubahan DPA		
			Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja					Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen LKJIIP, Laporan Emonev, Jumlah Laporan Tepra	14 Dokumen	3.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen LKJIIP, Laporan Emonev, Jumlah Laporan Tepra	14 Dokumen	1.880.000
			Jumlah Dokumen LKJIIP	1 Dokumen				Jumlah Dokumen LKJIIP	1 Dokumen	
			Laporan Emonev	4 Dokumen				Laporan Emonev	4 Dokumen	
			Jumlah Laporan Tepra	12 Dokumen				Jumlah Laporan Tepra	12 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja PD	2 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja PD	2 Laporan	710.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.882.331.997	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.020.350.859
								Indeks Administrasi Keuangan Daerah	84 Indeks	

Catatan Penting

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang	1.873.936.997	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang	1.015.710.859
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	980.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semester tersusun tepat waktu	13 Dokumen	6.895.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semester tersusun tepat waktu	13 Dokumen	3.660.000
			Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen				Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen	
			Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen				Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.390.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.260.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.390.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.260.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.342.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah				39.295.000
	Listrikk/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	2.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	1.200.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	28.450.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	7.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4 Paket	21.742.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4 Paket	21.320.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	5.300.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	2.025.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.500.000

Catatan Penting

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	10.450.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	5.050.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	32.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.732.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.598.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.012.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.060.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	26.720.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	25.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.538.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76.245.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.600.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	114 unit	32.065.000	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	114 unit	44.700.000
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	1.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	1.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	7.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	4.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	32.580.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	23.400.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.400.000
	Penataan Organisasi				1.410.000	Penataan Organisasi				0
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RTP/SPP, Jumlah Dokumen SKM, Jumlah Dokumen SOP	4 Dokumen	1.410.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RTP/SPP, Jumlah Dokumen SKM, Jumlah Dokumen SOP	4 Dokumen	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		54.795.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		195.450.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5.080.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.500.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	5.080.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	10.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				49.715.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				184.950.000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	38.915.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	176.750.000
			Desa Siaga					Desa Siaga		
			Kecamatan Sehat					Kecamatan Sehat		
			Update SID/SIKAB					Update SID/SIKAB		
			Dropping Air					Dropping Air		
			Jamban Sehat					Jamban Sehat		
			Monev Bidang					Monev Bidang		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	10.800.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	8.200.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		39.876.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		25.830.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		26.406.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				16.290.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29 Dokumen	14.556.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29 Dokumen	6.650.000
			DURKP					DURKP		
			RPKPKAL					RPKPKAL		
			APBKAL					APBKAL		
			RPJMKal					RPJMKal		
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	11.850.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	9.640.000
			Laporan pendampingan lomba					Laporan pendampingan lomba		
			Laporan Lomba					Laporan Lomba		
			Laporan Kapanewon					Laporan Kapanewon		
			Profil Kalurahan					Profil Kalurahan		
			Profil Kalurahan					Profil Kalurahan		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				13.470.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				9.540.000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Lembaga Kemasyarakatan	6.275.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Lembaga Kemasyarakatan	6.075.000
			PKK					PKK		
			Karang Taruna					Karang Taruna		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	7.195.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3.465.000
			Pameran					Pameran		
			Laporan Koordinasi Tanam					Laporan Koordinasi Tanam		
			Monev Bid.Pemberdayaan					Monev Bid.Pemberdayaan		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				17.260.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				6.250.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum				13.960.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum				4.280.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	13.960.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	4.280.000
			Safari Taraweh					Safari Taraweh		
			Dialog antar umat Beragama					Dialog antar umat Beragama		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah				3.300.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.970.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	3.300.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1.970.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		79.747.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		36.048.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				79.747.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				36.048.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	25.413.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4.995.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.635.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		48.610.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		16.610.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				48.610.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				16.610.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	5.040.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	2.050.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28 Dokumen	6.175.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28 Dokumen	2.595.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	/Pagu Indikatif (Rp)	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen	5.880.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen	3.140.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Dokumen	6.880.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Dokumen	2.790.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	null	0 null	8.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	null	0 null	0	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	3.100.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1.220.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7 Dokumen	4.600.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7 Dokumen	1.400.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	4.605.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	1.585.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 Dokumen	3.830.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 Dokumen	1.830.000	
TOTAL										2.545.134.497	1.609.210.859

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Patuk

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Kapanewon Patuk dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kapanewon Patuk

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Panewu Patuk adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
7. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada di Kapanewon;
9. menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Patuk, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Patuk dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Patuk sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Patuk hingga tahun 2022 secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan SKCK, HO, Surat Keterangan Miskin, dll.
2. terselesaikannya pendataan keluarga miskin dan pengangguran.

3. Terlaksananya monitoring kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
4. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.
6. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
7. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
8. Terlaksananya kegiatan droping air bagi masyarakat miskin.
9. Terlaksananya bantuan sosial jamban sehat dan PAH untuk Keluarga Miskin.
10. Terlaksanakannya kegiatan safari tarawih.
11. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan desa.
12. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
13. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan dll) hingga mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten.
14. Terlaksananya pembuatan buku profil desa, buku profil Kecamatan/Kapanewon dan buku monografi.
15. Terfasilitasinya proses dan mekanisme perizinan.

Adapun tingkat kinerja Kapanewon Patuk yang tidak secara langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya kegiatan pelayanan antara lain :

1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. Tefasilitasinya penyelenggaraan ketatalaksanaan kepegawaian.
4. Terfasilitasinya pengembangan kapasitas aparatur.
5. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LKjIP, Laporan Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan keuangan bulanan.
6. Terselesaikannya Pelaporan Barang Milik Daerah yaitu Laporan Aset dan Persediaan Bulanan maupun Semesteran.
7. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon, Rencana Strategis Kapanewon, RKA, RKA Perubahan, ROPK, DPA dan DPA Perubahan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Patuk

Untuk mendapatkan potret gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Patuk, berikut dijabarkan secara rinci yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang pemerintahan.

A. Bidang Sosial Budaya

Permasalahan

- a. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
- b. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar.
- d. Belum sinkronnya data-data keluarga miskin dan pengangguran yang ada.
- e. Belum optimalnya penyajian event-event budaya di dalam pengembangan pariwisata

- f. Kurangnya kesadaran menjaga keharmonisan rumah tangga
- g. Kurangnya pemahaman agama

B. Bidang Ekonomi

Permasalahan

- a. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun.
- b. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan baik antar SKPD maupun sumber dana di bidang ekonomi.
- d. Potensi wisata belum dikelola secara profesional oleh pelaku pariwisata.
- e. Belum adanya pabrik pengolahan hasil tanaman keras, pabrik pengolahan coklat yang harganya terjangkau oleh petani.
- f. Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil industri Kapanewon Patuk.
- g. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
- h. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
- i. Belum optimalnya kunjungan wisatawan.
- j. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.
- k. Penjualan hasil tanaman keras belum optimal seperti, coklat, mete, sukun, dll
- l. Kurangnya jiwa kewirausahaan/ penguasaan pasar untuk produk-produk UMKM

C. Bidang Fisik Prasarana

Permasalahan

- a. Diperlukan jalan dengan 4 jalur dan pembatas jalan untuk memperbaiki geometri jalan.
- b. Belum adanya prasarana pengolahan air sungai Oya untuk air minum, atau pemuatan karamba untuk budidaya ikan.
- c. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai.
- d. Kurangnya koordinasi dengan Pemda Bantul untuk penataan kawasan hargodumilah agar tidak terkesan kumuh.

D. Bidang Pemerintahan

Permasalahan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
- b. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
- c. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal
- d. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.
- e. Ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah daerah yang berupa Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyelenggaraan desa
- f. Masih minimnya data-data potensi wilayah rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern
- g. Kurangnya penguasaan teknologi informasi di kalangan aparat.
- h. Kurangnya kepedulian tanggap bencana

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan diatas berdampak pada pencapaian visi kepala daerah tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

Dengan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis.
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Target SDGs

Target utamanya mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau *social economic development* dan lingkungan yang besar atau *environmental development* berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030)

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

tempat. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

Tujuan 5 - Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan 14 - Ekosistem laut

Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

Tujuan 15 - Ekosistem daratan

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Patuk

Dalam meningkatkan pelayanan Kapanewon Patuk, tantangan yang dihadapi meliputi :

1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliung.
2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan/Kapanewon Patuk kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat, terutama dalam bidang infrastruktur dan perekonomian.
3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi.
4. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi.
5. Penguasaan teknologi masih rendah.
6. Data pembangunan dan kemiskinan belum tersedia secara sistematis dan integratif.
7. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
8. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan.
9. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Sedangkan peluang yang dimiliki Kapanewon Patuk untuk peningkatan pelayanan meliputi :

1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

2. Jumlah aparatur pemerintah Kapanewon dan desa yang cukup memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan.
4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan.
5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.
6. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional.
7. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
8. Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

1. Peningkatan kinerja SDM aparatur Kapanewon, desa dan masyarakat baik hardware, software, dan brainware.
2. Pemantapan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga terjaminnya validasi data untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah untuk mendukung kebutuhan dalam dan luar daerah.
4. Peningkatan potensi wisata dan kerajinan.
5. Optimalisasi penggunaan APBD Kabupaten, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan APBN untuk kegiatan pembangunan dan untuk pencegahan/penanggulangan bencana.
6. Optimalisasi peran dan fungsi masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan dan proses pengembangan wilayah.
7. Peningkatan peran aparat dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi wilayah.
8. Peningkatan penyebaran informasi tentang kesempatan kerja.
9. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pembangunan, ekonomi dan sosial.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Merupakan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan adalah sebagai berikut:

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan PD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan nasional dikaitkan dengan 7 prioritas nasional, sedangkan telaahan kebijakan provinsi dapat dikaitkan dengan prioritas pengembangan kawasan wilayah utara dan geopark gunungsewu serta pendekatan tematik pembangunan DIY meliputi, Penurunan Kemiskinan, Ketimpangan Wilayah, dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.

A. Tugas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Panewu Patuk adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada di Kapanewon;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Patuk

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kapanewon Patuk didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Patuk yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kapanewon Patuk.

1. Tujuan Rencana Kapanewon Patuk tahun 2024 meliputi :
 - a. Peningkatan pelayanan publik
 - b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - d. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Patuk tahun 2024 meliputi :
 - a. Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pengelolaan obyek wisata.
 - c. Peningkatan kemampuan lembaga-lembaga desa.
 - d. Peningkatan informasi dan akses kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat Patuk
 - e. Peningkatan kapasitas pemerintah Kecamatan/Kapanewon dan desa serta pemberdayaan masyarakat.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan dari Kapanewon Patuk adalah

“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kapanewon yang berkualitas”

Indikator tujuan tersebut adalah indeks kualitas pelayanan kapanewon tahun 2026 dengan kondisi awal Renstra tahun 2021 adalah 80,24 % dan target akhir periode Renstra tahun 2026 adalah 80,41% secara lebih rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel.3.1

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	80,41

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran dari tujuan diatas dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan :

Terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas.

Sasaran :

1. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon Meningkatkan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD
3. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Secara rinci sasaran perangkat daerah kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran PD Tahun 2024
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	80,34
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	82.50 (A)
Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	9

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD: KAPANEWON PATUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan							
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	2 Laporan	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		100 Persen	150.000.000
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000				30.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			35.000.000				30.000.000
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				35.000.000				30.000.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah laporan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	2 Dokumen	35.000.000	Dana Keistimewaan DIY		100 Persen	30.000.000
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN								2.384.382.187
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PRESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			1.194.022.859				2.111.788.687

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.919.000				9.104.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen		3.850.000
		Jumlah Dokumen Renja		1 Dokumen					
		Dokumen Perubahan Renja		1 Dokumen					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-PD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	462.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen		462.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	462.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen		322.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA, Dokumen Perjanjian Kinerja	Kab. Gunungkidul, Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	585.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen		675.000
		Jumlah Dokumen DPA							
		Dokumen Perjanjian Kinerja							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA, Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	2 Dokumen	435.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen		435.000
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA							
		Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP, Laporan Emonev, Jumlah Laporan Teppra	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	14 Dokumen	1.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen		3.360.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Jumlah Dokumen LKJIP	1 Dokumen					
			Laporan Emonev	4 Dokumen					
			Jumlah Laporan Tepra	12 Dokumen					
									1.907.784.687
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang	1.015.710.859	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	1.898.949.687
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	1.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/trivulanan/Semeste tersusun tepat waktu	13 Dokumen	3.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	6.995.000
			Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen					
			Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen					
									1.450.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	1.450.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	2.300.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	20.150.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4 Paket	21.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	21.842.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	9 Paket	2.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	5.450.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	248 Dokumen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	1.200.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	80 Laporan	5.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	10.550.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah				0			0	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	1 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	0	
	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah				51.598.000			51.732.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	12 Laporan	25.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 0	22.012.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	48 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 0	27.720.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.538.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 0	2.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah				74.600.000			76.765.000	
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	114 unit	44.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	33.415.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	6 unit	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	1.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	22 Unit	4.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	7.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	2 Unit	23.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	31.650.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	4 Unit	1.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	2.300.000	
	Penataan Organisasi				0			1.460.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP/SPIP, Jumlah Dokumen SKM, Jumlah Dokumen SOP	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	4 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	1.460.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			195.450.000			70.755.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.500.000			5.280.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	2 Laporan	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	5.280.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				184.950.000			65.475.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	6 Laporan	176.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	54.225.000	
		Desa Siaga							
		Kecamatan Sehat							
		Update SID/SIKAB							
		Dropping Air							
		Jamban Sehat							
		Monev Bidang							
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	14 Laporan	8.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	11.250.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			25.830.000			40.426.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				16.290.000			27.456.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	29 Dokumen	6.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	15.156.000	
		DURKP							
		RKPKAL							
		APBKAL							
		RPJMkal							
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		17 Laporan	9.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	12.300.000	
		Laporan pendampingan lomba		1 Laporan					
		Laporan Lomba		1 Laporan					
		Profil Kapanewon		1 Dokumen					
		Profil Kelurahan		11 Dokumen					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				9.540.000			12.970.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	6.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	6.325.000	
		PKK							
		Karang Taruna							
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	3 Laporan	3.465.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	6.645.000	
		Panteran							
		Laporan Koordinasi Tanam							
		Monev Bid. Pemberdayaan							
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			6.250.000			17.410.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				4.280.000			13.960.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	2 Laporan	4.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	13.960.000	
		Safari Taraweh							
		Dialog antar umat Beragama							
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah				1.970.000			3.450.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Urdangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	3.450.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			36.048.000			95.142.500	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				36.048.000			95.142.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	75 Orang	25.413.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	89.947.500	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10.635.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	5.195.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			16.610.000			48.860.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				16.610.000			48.860.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	5.240.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	28 Dokumen	2.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	6.225.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	28 Dokumen	3.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	6.030.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	15 Dokumen	2.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	7.130.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	null	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	0 null	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	7.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	3.200.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	7 Dokumen	1.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.800.000	
	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.585.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.805.000	
	Facilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	3.930.000	
		TOTAL			1.609.210.859			2.564.382.187	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :
“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.
Dengan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026:
 1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis.
 2. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah
 - b. Prioritas pembangunan
 1. Ketentraman dan Ketertiban
 2. Reformasi Birokrasi
 3. Pendidikan dan Kesehatan
 4. Ketahanan Pangan
 5. Ekonomi:UMKM, Investasi, dan Pariwisata
 6. Penanggulangan Kemiskinan
 7. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
 - c. Pencapaian SDGs;
 - d. Pengurangan kemiskinan;
 - e. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
 - f. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
 - g. Pencapaian IKU
 - h. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
 - i. Pengembangan wilayah miskin;

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

- a. Jumlah Program dan Kegiatan,
Kapanewon Patuk pada tahun 2024 mengampu 8 program, 17 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu masyarakat Kapanewon Patuk dan Perangkat Kalurahan di Kapanewon Patuk
- c. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.
Kapanewon Patuk pada tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.609.210.859,00
- d. Sumber Dana pagu indikatif Kapanewon Patuk Berasal dari PIS, PIWK, dan Dana Keistimewaan.

Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Patuk adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang dijabarkan dalam 8 (Delapan) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Rumusan Program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Kapanewon Patuk berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja ini dalam proses penyusunannya mendasarkan kesesuaian dan sinergisme dengan dokumen perencanaan lainnya baik RPJMD Kabupaten Gunungkidul maupun Renstra Kapanewon Patuk. Selain itu Rencana Kerja dapat digunakan sebagai input penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian terdapat keterkaitan dan aliran pemikiran antar dokumen.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kapanewon Patuk tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang kemudian diwujudkan dalam program kegiatan. Peranan program kegiatan pembangunan tersebut menjadi pentingnya karena merupakan implementasi dari langkah dan kebijakan dalam proses menuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan, instrument pengendalian yang diperlukan adalah peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat dilihat kesesuaian rencana dan pelaksanaan program kegiatan maupun tingkat capaian kinerja, selanjutnya mampu menyajikan laporan secara obyektif dan tepat waktu. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan rencana, dapat diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif sebelum pelaksanaan program kegiatan tersebut menyimpang.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Rencana Kerja Kapanewon Patuk tahun 2024 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kapanewon Patuk tahun 2024.
- b. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kapanewon Patuk tahun 2024 merupakan salah satu input bagi penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kapanewon Patuk tahun 2024 setelah dibahas dan disahkan oleh eksekutif dan legislatif akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Patuk tahun 2024.
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Patuk tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kapanewon Patuk tahun 2024.
- e. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian program kegiatan dengan menggunakan tata cara pengendalian sesuai aturan yang berlaku.
- f. Dari hasil rencana kerja hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut dijadikan evaluasi target capaian kinerja Renstra Kapanewon Patuk Tahun 2021-2026.

Wonosari,
KAPANEWON PATUK,

MARTONO IMAN SANTOSO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAHTAHUN 2024

RENCANA KERJA
KECAMATAN/KAPANEWON SAPTOSARI
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

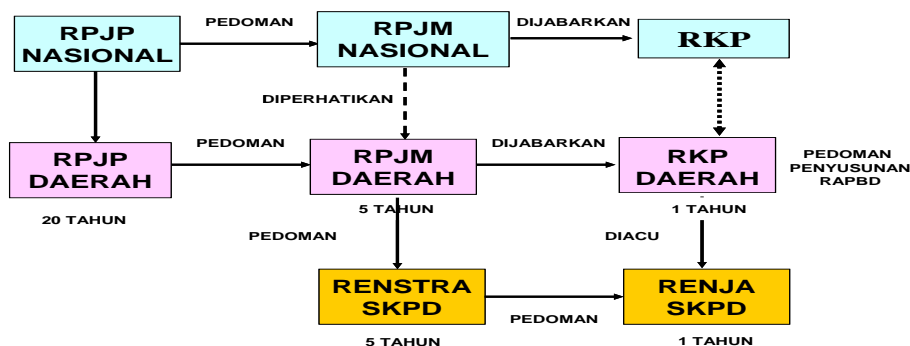
Renja Perangkat Daerah memuat strategi untuk memecahkan setiap isu strategis yang dihadapi. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber-sumberdaya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Renja Kecamatan/Kapanewon Saptosari sebagai Perangkat Daerah sangat terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan bahwa Renja Kecamatan/Kapanewon sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RKPD Kabupaten untuk jangka waktu satu tahunan dan disusun oleh

setiap Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rencana Kerja Pembangunan Daerah inilah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Bagan1 :Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan/Kapanewon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan DaerahPembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan/Kapanewon Tahun 2024 adalah untuk menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan tahun 2023. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

- a. untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kecamatan/Kapanewon Saptosari baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran yang bersifat indikatif;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan/Kapanewon Saptosari; dan
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja Perangkat Daerah dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN/KAPANEWON SAPTOSARI

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan/Kapanewon Saptosari
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan/Kapanewon Saptosari
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan/Kapanewon Saptosari
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN/KAPANEWON SAPTOSARI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN/KAPANEWON
SAPTOSARI

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KAPANEWON SAPTOSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Saptosari dan Capaian Renstra Kapanewon Saptosari

Rencana Kerja Kapanewon Saptosari memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Saptosari atau realisasi APBD untuk Kapanewon Saptosari yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target- target PD tahun 2022 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi program kegiatan tahun 2022
yang tidak memenuhi target kinerja keluaran

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan dapat di sampaikan dalam table 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi program kegiatan tahun 2022
yang memenuhi target kinerja keluaran

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penataan Organisasi

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan. Tahun 2022 tidak ada program kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.
4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 adalah dana kegiatan yang berjalan, sudah bisa tercukupi dibawah nilai anggaran yang direncanakan.
5. Faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2023 adalah Kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan setelah pelaksanaan anggaran ditetapkan , juga kurang tepatnya perencanaan anggaran yang dibuat .
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor factor penyebab tersebut adalah pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pengguna anggaran dan perencanaan kegiatan agar perencanaan yang dilakukan lebih akurat dan akuntabel.

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Saptosari tahun 2022 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Saptosari

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi target program/kegiatan Renstra PD s/d 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program, Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/4)*100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
	URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
2	22 08 5,07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
2	22 08 5,07 11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	6 Laporan	0 Laporan	1	1	0	1	1	16,6667
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01	SEKRETARIAT DAERAH								
4	01 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
4	01 04 5,01	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan kelembagaan urusan ketatalaksanaan	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100
4	01 04 5,01	Pembinaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100

		1	2		3		4		5	Target dan realisasi kinerja program dan realisasi kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat capaian Target Renstra (%)
	Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	tingkat realisasi (%)							11=(10/4)*100
4	01	04	5,01	07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	100	100	100	100	100	100	40
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN											
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	20
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	20
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	20

Kode Rekening	1	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi target program/kegiatan Renstra PD s/d 2023		Tingkat capaian Target Renstra (%)	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi capaian sub kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat capaian Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	7/6*1	9	10	11=(10/4)*100		
Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	tingkat realisasi (%)	kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Target Renstra (%)		
	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	Dokumen	2	Dokumen	2	2	20
	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	Dokumen	2	Dokumen	2	2	2	20
	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85	Laporan	17	Laporan	17	17	17	20
	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Dokumen	4	Dokumen	4	4	4	20
	01	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100
	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252	Orang/	252	Orang/	252	252	100
	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	1	Laporan	1	1	20

Kode Rekening	1	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Pencapaian target program/kegiatan Renstra PD s/d 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Target Renstra (%)
Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/4)*100
7 01 01 2,02 07	01 01 2,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	65 Laporan	13 Laporan	13	13	100	13	13	20
7 01 01 2,05 03	01 01 2,06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7 01 01 2,05 03	01 01 2,06	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	6 Dokumen	6	6	100	6	6	20
7 01 01 2,06	01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
7 01 01 2,06 01	01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4	4	100	4	4	20
7 01 01 2,06 02	01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	13 Paket	13	13	100	13	13	20
7 01 01 2,06 03	01 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4	4	100	4	4	20
7 01 01 2,06 05	01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12	12	100	12	12	20

Kode Rekening	1	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan PD tahun 2022				Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan kemampuan target program/kegiatan Renstra PD s/d 2023		Tingkat capaian Target Renstra (%)	
						6	7	8	9		10	11=(10/4)*100		
Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	1	2	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	tingkat realisasi (%)						
	01	01	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1240 Dokum	248 Dokum	248	248	100	248	248	248	20		
	01	01	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12	12	100	12	12	12	20		
	01	01	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	24 Laporan	24	24	100	24	24	24	20		
	01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	01	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	1	1	100	1	1	1	20		
	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100		
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12	12	100	12	12	12	20		
	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	36 Laporan	36	36	100	36	36	36	20		

Kode Rekening	1	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan kelurahan kegiatan PD tahun 2022				Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Pencapaian target program/kegiatan Renstra PD s/d 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)	Target tahun berjalan (tahun 2023)		Realisasi capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah Tahun 2022	tingkat realisasi (%)	Target kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Realisasi capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	1	2		4	5	6	7	(7/6)*1	9	10	11=(10/4)*100	
7 01 01 01 2,09 02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	540 Unit	108 Unit	108	108	100	108	108	20	
7 01 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	30 Unit	30	30	100	100	30	30	20	
7 01 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	20 Unit	4 Unit	4	4	100	100	4	4	20	
7 01 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7 01 02 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan berjalan dengan baik	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Kode Rekening	1	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Pencapaian target program/kegiatan Renstra PD s/d 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
	01	02	01	15	3	3	100	3	100	3	100
	01	02	02	100	100	100	100	100	100	100	100
	01	02	03	65	13	13	100	13	100	13	20
	01	03		100	100	100	100	100	100	100	100
	01	2,01		100	100	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	1	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Pencapaian target program/kegiatan Renstra PD s/d 2023				
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Target Renstra (%)			
	1	2	3	4	5	6	7	$(7/6)*1$	9	10	$11=(10/4)*100$			
	01	03	2,01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	40	Dokumen	8	Dokumen	8	8	8	20
	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	Laporan	8	Laporan	8	8	8	20
	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100
	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15	Lembaga	3	Lembaga	3	100	3	20
	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20	Laporan	4	Laporan	4	100	4	20
	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100
	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100

Kode Rekening	1	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Pencapaian target program/kegiatan Renstra PD s/d 2023							
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi capaian sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Target Renstra (%)					
	1	2	3	4	5	6	7	$(7/6)*1$	9	10	$11=(10/4)*100$						
	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan dengan Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	Laporan	2	Laporan	0	0	100	100	100	20	
	7	01	04	2,02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Percentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	Laporan	1	Laporan	1	1	100	100	100	20
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	7	01	05	2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Percentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100	100	100	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Pencapaian target program/kegiatan Renstra PD s/d								
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program,Kegiatan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4	5	6	7	$(7/6) \times 1$	9	10	$11 = (10/4) \times 100$							
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	375 Orang	75 Orang	75	75	100	$(7/6) \times 1$	75	10	75	20	
7	01	05	2,01	02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah anggota inmas yang diharapkan meningkatkan pengetahuannya	165 Orang	33 Orang	33	33	100	$(7/6) \times 1$	33	33	100	33	20
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	$(7/6) \times 1$	1	1	100	1	20
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	100	100	$(7/6) \times 1$	100	100	100	100	100

Kode Rekening	1	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD berjalan (tahun 2023)	Pencapaian target program/kegiatan Renstra PD s/d 2023														
						6	7	=(7/6)*100		Realisasi capaian Program, Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Target Renstra (%)													
	01	06	2,01	01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana dengan baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
	01	06	2,01	02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80	Dokume	16	Dokume	16	Dokume	100	16	16	20								
	01	06	2,01	03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	55	Dokume	11	Dokume	11	Dokume	100	11	11	20								
	01	06	2,01	05	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	1	20								
	01	06	2,01	08	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50	Dokume	10	Dokume	10	Dokume	100	10	10	20								

Kode Rekening	1	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Pencapaian target program/kegiatan Renstra PD s/d 2023			
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
	1	2	3	4	5	6	7	$(7/6)*1$	9	10	$11=(10/4)*100$		
	01	06	2,01	14	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitas Antar Desa dan Kerja Sama Desa dan Kerja Sama	5	Dokumen	1	1	100	1	20
	01	06	2,01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan	5	Dokumen	1	1	100	1	20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Saptosari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKU (Indikator kinerja Utama), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yaitu Persentase desa yang menetapkan pertanggungjawaban APBDes , RKPDes dan APBDes tepat waktu

Indikator kinerja dan sasaran yang tersebut menggambarkan pencapaian Rencana Kerja Kapanewon Saptosari Tahun 2022. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Kapanewon Saptosari sudah mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga tidak perlu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

Hasil analisis dapat disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel : 2.4
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan/Kapanewon Saptosari
 Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Capaian Target PD		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks	80	80,05	80,06	80,07	80,89	80,97	80,08	80,09	0

2.3 Isu-isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kapanewon Saptosari

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Saptosari maka diperlukan tentang potret Kapanewon Saptosari saat ini.

2.3.1 Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Kapanewon Saptosari sudah mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga tidak perlu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

Indikator kinerja dan sasaran yang tersebut menggambarkan pencapaian Rencana Kerja Kapanewon Saptosari Tahun 2022. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Saptosari adalah sebagai berikut :

2.3.2.1 Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan masyarakat/publik
- 2) Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
- 3) Belum efektifnya pengawasan melekat
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat pada masalah hukum

b. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
- 2) Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata
- 3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan ASN dan kinerja ASN
- 4) Belum sesuai jabatan dengan kompetensi pegawai
- 5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.2.2 Bidang Ekonomi

a. Kondisi

- 1) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
- 2) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional
- 4) Belum optimalnya penanganan obyek wisata
- 5) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya
- 6) Perdagangan/perniagaan kurang berkembang

- 7) Potensi industri kecil terutama kerajinan perak dan kerajinan bambu dalam pemasaran kurang.
- b. Permasalahan
- 1) Belum optimalnya pendayagunaan sumber dayamanusiadan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
 - 2) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
 - 3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar PD maupun sumber dana

2.3.2.3 Bidang Fisik dan Prasarana

- a. Kondisi Saat ini
- 1) Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar sulit masuk
 - 2) Masih banyaknya jalan yang kurang representatif dan jembatan yang belum memadai untuk jalur transportasi.
- b. Permasalahan
- 1) Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai
 - 2) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan bahaya bencana

2.3.2.4 Bidang Sosial Budaya

- a. Kondisi Saat Ini
- 1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
 - 2) Masih banyaknya pengangguran
 - 3) Terdapatnya potensi Seni Budaya yang belum difasilitasi dan dikembangkan
 - 4) Terdapatnya potensi Atlet Olah Raga yang belum difasilitasi dan dikembangkan
- b. Permasalahan
- 1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
 - 2) Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya
 - 3) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar
 - 4) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja
 - 5) Kurangnya Peluang Kerja di Wilayah Kapanewon Saptosari

2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional atau Internasional

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah " Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026". Pada tahapan lima tahun pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas

dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang meliputi :

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
- b. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Saptosari adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peningkatan perekonomian masyarakat
6. Peningkatan kesejahteraan sosial

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Saptosari dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan Desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Saptosari sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Paliyan. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Saptosari, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Saptosari yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan penerangan jalan
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata pantai
4. Adanya potensi Wisata yang belum terekspose
5. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, pertanian dan lain - lain
6. Meningkatnya jumlah alat transportasi
7. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
8. Adanya Industri Olahan Makanan
9. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti, jagung, kedelai, kacang tanah dll
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Saptosari

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra Kapanewon Saptosari 2021-2026, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Saptosari dengan memetakan *kekuatan* dan *kelemahan* yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon.

1) Kondisi Fisik Dasar

- a. Secara topografis berada pada 100 –n400 m dpal pada Zona Karts Pegunungan Seribu Selatan atau disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0m–300m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah, sehingga wilayah Paliyan potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan tembakau) dan penggemukan ternak.

- b. Secara geologi dipengaruhi oleh keberadaan Karst Pegunungan Seribu, sekitar 74% wilayah berformasi kepek yang berbatuan dasar limestone (batuan gamping).
 - c. Secara umum morfologi wilayah Saptosari berupa bukit-bukit kecil (dolina) dengan tingkat ketinggian berkisar 0–400m dan kelerengan 8->40%.
- 2) Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- a. Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung pada kelompok usia 26-55 tahun
 - b. Penduduk usia kerja akhir (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah
 - c. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani.
- 3) Kondisi Perekonomian
- a. Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kapanewon Saptosari, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa
 - b. Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil tembakau), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.
- 4) Kondisi Pemerintahan
- a. Aparat Kapanewon telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
 - b. Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
 - c. Penguatan kelembagaan Kapanewon dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiari
 - d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kapanewon Saptosari sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

- b) Struktur organisasi dan formasi jabatan pada Kapanewon Paliyan telah diisi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi
- c) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan
- d) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya peternakan
- e) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu dan meubel bambu yang cukup prospektif

2. Kelemahan

- a) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, banjir
- b) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi
- c) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi
- d) Penguasaan teknologi masih rendah
- e) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif
- f) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kapanewon dan desa belum optimal
- g) Jumlah ASN yang setiap tahun selalu berkurang karena memasuki purna tugas

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Kapanewon Saptosari dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar akhir untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon.

1. Peluang

- a) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional
- b) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
- c) Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya
- d) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

2. Tantangan

- a) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
- b) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan
- c) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif
- d) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Denga berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mestinya desa semakin diperankan sebagai Subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Namun harus diakui bahwa amanah undang-undang tersebut belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Konsep membangun desa dan desa membangun belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Pembahasan isu pembangunan desa dan kawasan perdesaan juga dikaitkan dengan dampak Pandemi COVID 19 terutama dalam upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks pemulihan sosial dan ekonomi, penerapan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang inklusif sangat dibutuhkan,

1. Desa merupakan subjek utama dalam pembangunan yang harus difasilitasi untuk mengoptimalkan kewenangannya.
2. Pemulihan sosial ekonomi harus memanfaatkan potensi lokal dan modal sosial yang mendorong lahirnya matapencaharian alternatif yang tidak eksploitatif dan
3. Pemulihan ekonomi harus membuka akses dan melibatkan kelompok marginal serta kelompok rentan di Desa. Pendekatan PEL tersebut juga dikerangkai oleh konsep “Desa Membangun” dan Membangun Desa.
4. Pemerintah Desa harus difasilitasi untuk mengoptimalisasikan kewenangannya sebagai subjek pembangunan.
5. Mendorong pemerintah Daerah agar menjadikan kawasan perdesaan sebagai “Pintu masuk” pembangunan yang inklsuif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperkuat kerjasama antar desa dan kawasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk tahun anggaran 2024. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai ditingkat Kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2023, dengan memastikan terakomodirnya belanja wajib meningkat, kebijakan belanja prioritas, memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakatai dalam proses Musrenbang seta pemulihan pasca covid-19.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi Penghitungan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum pada rancangan akhir semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan adanya pandemi covid 19 maka program dan kegiatan yang menjadi prioritas di rancangan akhir Renja 2024 terpaksa tidak bisa terakomodir antara lain pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) Pramuk Bakti dan pengadaan sarana prasarana perkantoran, karena prioritas pembangunan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Sehingga prioritas program dan kegiatan di Kapanewon Saptosari adalah Program Peningkatan Pelayanan Kapanewon walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas.

Secara lengkap Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

PD : KECAMATAN/KAPANEWON SAPTOSARI

No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	7	8	9	10	11	7	8	9		11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 Laporan	100.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 Laporan	100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	100.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	100.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	35.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	35.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon /kemantran dan kalurahan/kalurahan yang didampingi	2 Dokumen	35.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon /kemantran dan kalurahan/kalurahan yang didampingi	2 Dokumen	35.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantran dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon /kemantran dan kalurahan/kalurahan yang didampingi	2 Dokumen	35.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantran dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon /kemantran dan kalurahan/kalurahan yang didampingi	2 Dokumen	35.000.000	

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan peruntiang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.434.460.132	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan peruntiang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.283.260.132
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Indeks	31.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Indeks	21.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	5.000.000

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
Penyediaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Indeks	1.085.901.632	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Indeks	1.083.901.632	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang	1.074.901.632	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang	1.074.901.632	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	13 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	13 Dokumen	6.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.100.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.500.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6.100.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.500.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	98.305.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	33.876.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.500.000	

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	72.165.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	20.836.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	2.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.440.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.440.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.600.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.200.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	14.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	4.900.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 Persen	36.257.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 Persen	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Pagar yang di bangun	31 M2	36.257.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Pagar yang di bangun	31 M2	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan	44.802.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan	43.750.000			

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.447.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19.302.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19.302.500	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142 Unit	131.593.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142 Unit	98.732.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108 Unit	66.347.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	108 Unit	59.247.500	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	8.520.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	8.520.000	
Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10 Unit	2.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	52.725.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	28.965.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	400.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	387.000.000	

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	11.400.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	6.000.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	11.400.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	6.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15 Laporan	389.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15 Laporan	381.000.000
	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	380.000.000	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	376.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	9.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	5.000.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	31.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	17.750.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Laporan	21.425.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Laporan	12.500.000

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Laporan	13.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Laporan	6.500.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	8.425.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Indeks	9.975.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Indeks	5.250.000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	4.725.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	4.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah laporan usaha ekonomi masyarakat	1 Laporan	5.250.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah laporan usaha ekonomi masyarakat	1 Laporan	1.250.000
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	15.375.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	9.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	15.375.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	9.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	2.285.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Senua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	2.000.000

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	13.090.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	7.000.000
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	86.424.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	58.399.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Indeks	86.424.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Indeks	58.399.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	75 Orang	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	75 Orang	23.000.000
	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah anggota himmas yang diharapkan meningkatkan pengetahuannya	14 Orang	3.025.000	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah anggota himmas yang diharapkan meningkatkan pengetahuannya	14 Orang	2.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	33.399.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	33.399.000

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	29.850.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	16.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Indeks Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Indeks	29.850.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Indeks Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Indeks	16.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	3.850.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	2.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	4.700.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	5.900.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	2.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	4.025.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	3.000.000
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	5.050.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	3.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	3.125.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	2.000.000

1	7	8	9	10	11	7	8	9	11	12	
	Fasilitas Penataan, Pemantafaan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemantafaan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	1 Dokumen	3.200.000	Fasilitas Penataan, Pemantafaan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemantafaan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	1 Dokumen	2.000.000	
					2.132.909.132					1.906.409.132	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah ditingkat Kapanewon dengan kegiatan memproses keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah Kapanewon. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana kebersihan suatu program pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Rencana Strategis Kapanewon Saptosari 2021-2026, merupakan hasil analisis dari isu – isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk menganalisa isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Saptosari dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon. Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kapanewon Saptosari dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan sebagai dasar akhir untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Dasar penyusunan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/volume	HARGA SATUAN	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan KAPANEWON SAPTOSARI	Kalurahan Jetis, Saptosari	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung air hujan (5000) liter	12	8.000.000	96.000.000	Pemangku Aspirasi
2	(PIWK) - Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin KAPANEWON SAPTOSARI	Kalurahan Monggol, Saptosari	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin	69	4.000.000	276.000.000	Pemangku Aspirasi

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan PD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan nasional dikaitkan dengan 7 prioritas nasional, sedangkan telaahan kebijakan provinsi dapat dikaitkan dengan prioritas pengembangan kawasan Wilayah Utara dan Geopark Gunung Sewu serta pendekatan tematik pembangunan DIY meliputi penurunan kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.

Kapanewon Saptosari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul serta visi dan misi Kapanewon Saptosari. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Sehingga perlu memperhatikan kebijaksanaan nasional maupun kebijaksanaan daerah/propinsi. Kebijakan nasional yang menjadi titik fokus terhadap pelaksanaan rencana kerja di Kapanewon Saptosari adalah Pemberdayaan potensi wisata terutama wisata pantai dimana di wilayah Kapanewon Saptosari 70% adalah wilayah pantai dengan beberapa titik pantai yang indah. Sedangkan kebijakan propinsi meliputi penanggulangan masalah kesehatan (stop phbs) dengan pemberian sarana untuk pembuatan jambanisasi.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Saptosari

Perumusan tujuan dan sasaran Kapanewon Saptosari didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Kapanewon Saptosari. Untuk sasaran Kapanewon Saptosari dirumuskan dengan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran Kapanewon Saptosari tahun 2021 (Renja PD Tahun 2020) sebagaimana telah disajikan pula dalam Rancangan RKPD Tahun 2024. Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Kapanewon Saptosari akan disempurnakan dalam proses verifikasi Renja Kapanewon Saptosari Tahun

2024 serta Renstra Kapanewon Saptosari Tahun 2021-2026. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Kapanewon Saptosari dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kapanewon Saptosari

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD
			Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Indeks kepuasan masyarakat
		Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks Ketentraman dan ketertiban		
2	Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Kapanewon Saptosari

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan Tahun 2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	78%
2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	2

Tabel 3.2
Sasaran Kapanewon Saptosari

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024
1	Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Indeks kepuasan masyarakat	78%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,07%
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	2

Disini, disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama PD

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	78%

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kapanewon Saptosari dalam menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, yaitu :

- 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- 2) Kebijakan Umum Bupati.
- 3) Prioritas pembangunan;
- 4) Pencapaian SDGs;
- 5) Pengurangan kemiskinan;
- 6) Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
- 7) Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
- 8) Pencapaian IKU;
- 9) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- 10) Pengembangan wilayah miskin;

Kapanewon Saptosari mendukung 2 prioritas, 2 sasaran daerah dan 3 sasaran perangkat daerah. Tahun 2023 di Kapanewon Saptosari terdapat 6 program 16 kegiatan dan 45 sub kegiatan, yang keseluruhan dananya berjumlah Rp1.906.409.132,00 Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah di seluruh kalurahan di wilayah Kapanewon Saptosari. Sedangkan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut adalah dari DAU dan PIWK. Secara terinci akan disajikan dalam tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini

TABEL 4.1
**Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul**

Kapanewon Saptosari

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	100 Persen	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.283.260.132,00	Kapanewon Saptosari
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.500.000,00	
					7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	
					7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	
					7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.000.000,00	
					7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	
					7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	
					7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	
					7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.083.901.632,00	
					7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.074.901.632,00	
					7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	
					7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000,00	
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000,00	
					7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.500.000,00	
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.876.000,00	
					7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
					7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.836.000,00	
					7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	
					7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
					7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.440.000,00	
					7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.900.000,00	
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
					7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.750.000,00	
					7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.447.500,00	
					7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.302.500,00	
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.732.500,00	
					7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.247.500,00	
					7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	
					7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	
					7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.965.000,00	
		Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Indeks kepuasan masyarakat	80,07 persen	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	387.000.000,00	
					7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000,00	
					7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.000.000,00	
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	381.000.000,00	
					7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	376.000.000,00	
					7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.750.000,00	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.500.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.500.000,00	
					7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.250.000,00	
					7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	
					7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.250.000,00	
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.399.000,00	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000,00	
					7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	
					7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.000.000,00	
					7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	58.399.000,00	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.399.000,00	
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.000.000,00	
					7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.000.000,00	
					7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.399.000,00	
					7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.000.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.000.000,00	
					7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000,00	
					7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000,00	
					7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000,00	
					7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	
					7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000,00	
					7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.000.000,00	
					7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.000.000,00	
Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata;	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	2 Potensi Budaya	2.22.08.5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	
					2.22.08.5.07.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	
					2.22.08.5.07.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100.000.000,00	
					4.01.04.5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	
					4.01.04.5.01.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	35.000.000,00	
					4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	35.000.000,00	

Tabel 4.2
Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul
Kapanewon Saptosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting	PERKIRAAN Maju Rencana Tahun 2025	
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp.)	7			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				-	
2.22	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (%)		100	100.000.000,00				-	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Pembinaan Kelengkapan Adat dan Tradisi (laporan)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	1					-	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (laporan)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	1	100.000.000,00	Dana Transfer Urun-Dana Alokasi Urun		1	-	
4					35.000.000,00				35.000.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000,00				35.000.000,00	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelengkapan Dan Ketatalaksanaan (%)		100	35.000.000,00				35.000.000,00	
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan (Dokumen)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	2					35.000.000,00	
4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen) Program dan Kegiatan Keistimewaan (laporan / Dokumen)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	2					35.000.000,00	
7					1.771.409.132,00	Dana Keistimewaan DIY			2.823.182.313,00	
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.771.409.132,00				2.823.182.313,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penjangkuran Pemenuhan Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)		100	1.283.260.132,00				2.262.981.602,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	7	21.500.000,00			7	46.400.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	3	5.000.000,00			2,00	30.000.000,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Perubahan Renja (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Renja (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.500.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	2.000.000,00
		Perubahan RKA (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	2	3.000.000,00			2	4.000.000,00
		DPA (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Perjanjian Kinerja (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	2	2.000.000,00			2	3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perubahan DPA (Dokumen)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	17				17	
		Laporan Pengendalian (Laporan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	12	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		LKf-IP (Laporan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Monv Program dan Kegiatan (Laporan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	4	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	4	2.000.000,00			4	1.400.000,00
		KM (Dokumen)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	2	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		RTP (Dokumen)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		SPP (Dokumen)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.083.901.632,00				1.920.941.602,00
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	3				3	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	210	1.074.901.632,00			210	1.912.441.602,00
		Gaji (Orang / Bulan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	210	1.074.901.632,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1	3.000.000,00			1	1.500.000,00
		Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	2	6.000.000,00			2	7.000.000,00
		Laporan Keuangan Bulanan (Dokumen)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	12	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Laporan Keuangan Semesteran (Dokumen)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	6	1.500.000,00			6	1.500.000,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	6	1.500.000,00			6	1.500.000,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	6	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	7	33.876.000,00			7	98.440.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	4	1.500.000,00			4	2.000.000,00
		Alat-alat listrik (Paket)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	4	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	13	20.836.000,00			13	80.000.000,00
		Pembelian Alat Tulis Kantor (Paket)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	12	20.836.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	6	2.000.000,00			6	3.000.000,00
		Alat-alat kebersihan (Paket)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	6	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000,00				3.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Barang Cetak (Paket)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	24				24	
		Penggandaan (Paket)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	4	1.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.440.000,00				1.440.000,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	248				248	
		KR (Dokumen)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	248	1.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu				1.200.000,00				2.000.000,00
		Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	12				12	
		Jamuan Tamu (Laporan)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	12	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.900.000,00				7.000.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	24				24	
		Konsultasi (Laporan)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	12	2.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Rapat Koordinasi (Laporan)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	12	2.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	-
		Jumlah Luas Pagur yang di bangun (M2)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	31					
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0,00	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Pembangunan Pagar (M2)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	0,00				0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.750.000,00				39.487.000,00
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	48				48	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24.447.500,00			24	20.185.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	(Kapanewon Saptosari, Saptosari)	24				24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penataan kearsipan (laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	12	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL (laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	12	23.447.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	36	19.302.500,00			36	19.302.000,00
		Air (laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	12	3.008.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Listrik (laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	12	13.294.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Telephon (laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	12	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah				98.732.500,00			142	156.213.000,00
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	142					
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				59.247.500,00			108	56.200.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	108					
		Kendaraan Beroda dua (Unit)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	96	14.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Kendaraan Beroda empat (Unit)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	12	21.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL (Orang / Bulan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	12	23.447.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				2.000.000,00			0,00	-
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	51					
		Pemeliharaan mebekar (Unit)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	20	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.520.000,00			30,00	6.000.000,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	26					
		Pemeliharaan AC (Unit)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	8	1.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan Komputer dan Laptop (Unit)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	12	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Printer (Unit)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	6	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	4	28.965.000,00			4	94.013.000,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	4					
		Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Pemeliharaan Rumah Dinas (Paket)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		THL (Bulan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	12	28.965.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	387.000.000,00				366.515.711,00
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)							
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	3	6.000.000,00			3	18.500.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)							
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	2	6.000.000,00			2	18.500.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)							
		Pelaksanaan lomba/kejuaraan porakab (Laporan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua			
		Pembinaan seni (Laporan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				381.000.000,00				348.015.711,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Laporan)							
		Jumlah Laporan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Laporan)	[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1				1	
7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		[Kapanewon Saptosari, Saptosari]	1	376.000.000,00			1	333.265.711,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bantuan Sosial (KK)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	81	372.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Laporan Percepatan SPM (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	13	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13	
									14.750.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pembedayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)		100	17.750.000,00				39.500.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa				12.500.000,00				23.000.000,00
				10				10	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	8	6.500.000,00			8	13.000.000,00
				8	6.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	6.000.000,00			1	10.000.000,00
				1	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
				1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.03.2.03	Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Profil Kelurahan (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	5.250.000,00			2	16.500.000,00
				2					
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	2	4.000.000,00				6.500.000,00
				2				2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Karang Taruna (Lembaga)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		PKK (Lembaga)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	3	1.250.000,00			3	10.000.000,00
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	3					
		koordinasi masa tanam (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	3	1.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		monvemberdayaan (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	3		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		panerani (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	3		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	9.000.000,00				14.000.000,00
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)							
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	2	9.000.000,00			2	14.000.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	2					
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1,00	2.000.000,00			1,00	5.000.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.04.2.01.0002	Hamornisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	2	7.000.000,00			2	9.000.000,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Hamornisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	2					
		Dialok bidang keagamaan (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Safari Taraweh (Laporan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	-			1	-
		Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kesepakatan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				58.399.000,00				115.185.000,00
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)		100					
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				58.399.000,00				115.185.000,00
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)	[Kapaneuon Saposari, Saposari]	3				3	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta Perertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				23.000.000,00				75.000.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta Perertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	[Kapaneuon Saposari, Saposari]	75				75	
		Pastbraka (Orang)	[Kapaneuon Saposari, Saposari]	75	23.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.05.2.01.0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2.000.000,00				4.800.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	[Kapaneuon Saposari, Saposari]	20				20	
		Pembinaan ketertarikan ketertiban (Orang)	[Kapaneuon Saposari, Saposari]	20	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				33.399.000,00				35.385.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	[Kapaneuon Saposari, Saposari]	1				1	
		Honorarium THL (Hari)	[Kapaneuon Saposari, Saposari]	247	22.847.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
		Patroli Muspika (Dokumen)	[Kapaneuon Saposari, Saposari]	1	9.951.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		THR THL (Bulan)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06	PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)		100	16.000.000,00				25.000.000,00
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40	16.000.000,00			40	25.000.000,00
		Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]						
7.01.06.2.01.0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2.000.000,00				2.000.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1				1	
		penyusunan peraturan desa (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			16	2.000.000,00			16	2.500.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	16					
		Penyusunan administrasi tata pemerintahan desa (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	16	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			11	3.000.000,00			11	3.000.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	11					
		Penyusunan pengelolaan (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	11	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0005	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			1	2.000.000,00			1	2.500.000,00
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1					
		Facilitasi tugas kepala desa (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			10	3.000.000,00			10	13.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	10					
		Rekomendasi peningkatan dan pemberhentian (Dokumen)	[Kapaneuon Saptosari, Saptosari]	10	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7.01.06.2.01.0014	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				2.000.000,00				1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	(Kapaneuon Saptosari)	1				1	
		Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa (Dokumen)	(Kapaneuon Saptosari)	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.000.000,00
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penguasaan Batas Desa				2.000.000,00				
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penguasaan Batas Desa (Dokumen)	(Kapaneuon Saptosari)	1				1	
		Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penguasaan Batas Desa (Dokumen)	(Kapaneuon Saptosari)	1	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
J U M L A H					1.906.409.132,00				2.858.182.313,00

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Saptosari Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kapanewon Saptosari disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Saptosari yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Kapanewon Saptosari Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Saptosari telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Saptosari sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Wonosari,
KAPANEWON SAPTOSARI,

EKA PRAYITNO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON GEDANGSARI
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Gedangsari Tahun 2021-2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Gedangsari Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Gedangsari tahun 2024 juga tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Kapanewon Gedangsari tahun 2022, sebagai bahan pertimbangan

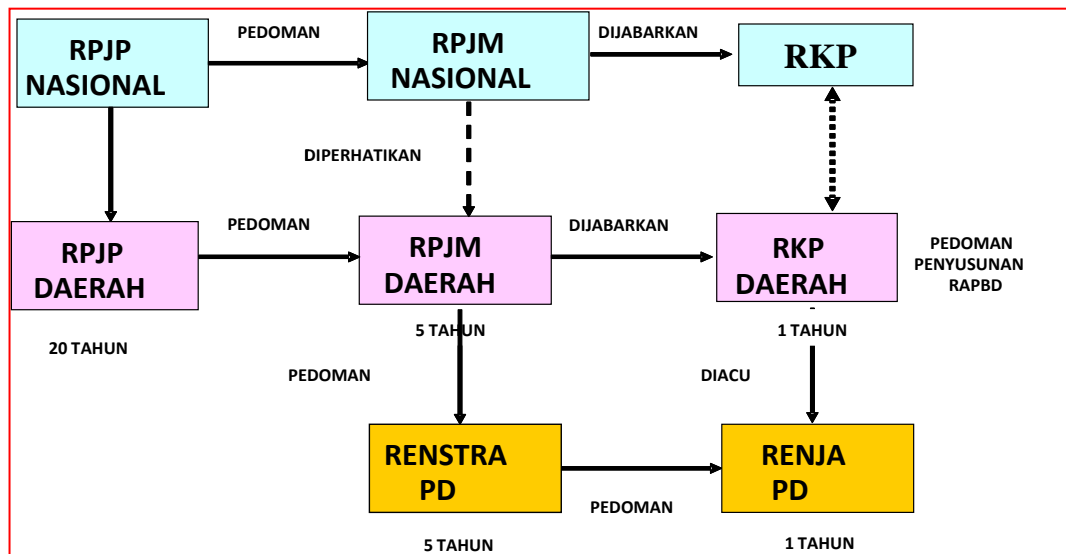
Perubahan Renstra Kapanewon Gedangsari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas, maka perlu segera disusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 bagian ketujuh paragraf kedua pasal 126 sampai dengan pasal 130.

Penyusunan Renja PD dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja PD, tahap pelaksanaan forum PD, dan tahap penetapan renja PD. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya antara lain :

1. Renja PD dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja PD, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya sesuai dengan Program Prioritas RKPD.
2. Renja PD dengan Renstra PD, artinya Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L dan PD Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja PD juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja kapanewon Gedangsari tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 052/5869 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Renja Kapanewon Gedangsari adalah untuk merumuskan rencana kerja Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan.
2. Memberi landasan bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab dan memuaskan.
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kapanewon Gedangsari

Agar pelaksanaan pembangunan Kapanewon Gedangsari tahun 2023 lebih terarah dan fokus untuk mencapai prioritas dan sasaran sesuai dengan tema pembangunan tahun 2023 adalah *“Peningkatan kondisi ekonomi daerah dan layanan dasar melalui penguatan UMKM, Pengembangan sektor unggulan, investasi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM”*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Renja Kapanewon Gedangsari adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN/KAPANEWON GEDANGSARI

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gedangsari dan capaian Renstra Kecamatan Gedangsari.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Gedangsari
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Gedangsari
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN/KAPANEWON GEDANGSARI
 - 1.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 1.2. Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Gedangsari.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN/KAPANEWON GEDANGSARI
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON GEDANGSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Capaian Renstra 2023

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Gedangsari Tahun 2023 merupakan Renja tahun ketiga yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renja Tahun 2023 telah dapat terakomodasi dalam DPA 2023, sehingga program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Gedangsari Tahun 2023 sejumlah 8 program yang terbagi dalam 18 kegiatan dan 43 subkegiatan

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), hal tersebut terlihat dari SDM yang ada sampai dengan tahun ini belum mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. SDM yang ada di Kapanewon Gedangsari sangatlah terbatas dan telah diikutsertakan dalam berbagai diklat, namun setelah selesai ilmu yang diperoleh tidak dimanfaatkan secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena keterbatasan kualitas SDM.

Dalam rangka memperbaiki kinerja PD Kapanewon, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan atau menjadi kewenangan kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk PD Kapanewon. Kedepan perlu dirumuskan kembali kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagian tugas dan atau wewenang Bupati kepada Panewu, agar lebih jelas tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kapanewon sebagai PD, apalagi pada tahun 2015 mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka tugas yang diemban oleh Kapanewon akan semakin berat khususnya dalam hal pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada PD Kapanewon.

Adapun pada TA 2022 sampai dengan Tri wulan ke-3, capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target Rp 2.031.340.286,00 realisasi senilai Rp 1.569.272.357,00 tingkat realisasi 77,25 %. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dari target Rp 100.000.000,00, realisasi senilai Rp 100.000.000,00 tingkat realisasi 100,00 %. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan, dari target Rp 25.070.000,00, realisasi senilai Rp 19.745.000,00, tingkat realisasi 76,03 %. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari target Rp 1.231.909.000,00 realisasi senilai Rp 504.125.000,00 tingkat realisasi 40,92 %. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari target Rp 173.575.000,00 realisasi senilai Rp 162.918.500,00 tingkat realisasi 93,86 %. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dari target Rp 20.450.000,00 realisasi senilai Rp

18.080.000,00 tingkat realisasi 88,41 %. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari target Rp 67.800.000,00 realisasi senilai Rp 67.010.000,00 tingkat realisasi 98,83 %. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dari target Rp 105.172.000,00 realisasi senilai Rp 93.922.000,00 tingkat realisasi 89,30,56 %.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 Kapanewon Gedangsari dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2021			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja PD Jumlah dokumen Renja perubahan Jumlah Renstra 2021-2024	5 5 5	1 1 1	1 1 1	1 1 1	100 100 100	1 1 1	1 1 1	20 20
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen ROPK	5 5	1 1	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	20 20
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA Perubahan	5	1	1	1	100	1	3	60
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	5 5	1 1	1 1	1 1	100	1 1	3 3	60 60
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	5 5	1 1	1 1	1 1	100	1 1	3 3	60 60
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi RKPD Jumlah laporan teptra	20 60	4 12	4 12	3 9	75 75	4 12	11 33	55 55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	68	0	0	0	0	17	17	0.25
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	130	4	14	14	100,0	14	28	24.6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	1	1	1	100	1	1	20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	5 60	1 12	1 12	1 12	100 100	1 12	1 12	20 60
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara								
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi administrasi kepegawaianya	60	12	12	12	100,0	12	12	60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terfasilitasi dan terselenggara dengan baik								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	2	2	2	100	2	6	60
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	20	4	4	4	100,0	4	12	60,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan kantor	10	2	2	2	100	2	6	60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan Jumlah penggandaan/fotocopy	1450 14765	290 2953	290 2953	290 2953	100 100	290 738	870 6776	60 75
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan ketersediaan surat kabar dan majalah	60	12	12	12	100	9	33	55

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah minum dan snack untuk tamu	60	20	20	20	100	20	20	60
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah snack dan minuman rapat Jumlah perjalanan dinas	1500	300	300	300	100	300	300	60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah								
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	160	40	40					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	2	2	2	2	100	0	2	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah monitor PC yang terbeli Jumlah Running teks terbeli Jumlah web cam terbeli Jumlah UPS terbeli Jumlah LCD Proyektor terbeli Jumlah alat pemadam Kebakaran Jumlah peralatan mesin lainnya yang disediakan	1 1 4 3 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0	1 1 4 3 1 1 0	1 1 4 3 1 1 0	100 100 100 100 100 100 100	0 0 0 0 0 0 0	1 1 4 3 1 1 0	100 100 100 100 100 100 100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unut sarana dan prasarana gedung kantor atau bangun lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa rekening listrik dibayar Jumlah rekening telepon dibayar	60 60	12 12	12 12	12 12	100	12 12	12 12	60 60
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang Terpelihara Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 2 Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 4	50 5 45 5	10 1 9 1	10 1 9 1	10 1 9 1	100 100 100 100	10 1 9 1	10 1 9 1	24 40 28 20
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja printer Jumlah perbaikan peralatan komputer/laptop	50 60	2 4	3 4	2 4	20 33.3	3 4	5 8	10 13.3
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kecamatan terpelihara. Jumlah hari terfasilitasinya penjagaan keamanan kantor. Tersedianya tempat parkir (canopi)	5 1830 5	1 366 1	1 365 1	1 366 1	100 100 100	1 365 1	2 731 2	20 25 20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pendingin ruangan AC Jumlah neja kursi tamu Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	4 20 5	0 5 1	4 5 1	4 5 1	100 100 100	0 5 1	4 15 3	100 75 75
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah penataan lingkungan kantor kapanewon	5	1	1	1	100	1	3	75
	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi berjalan dengan baik								
	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen IKM Jumlah Dokumen RTP/SPIP Jumlah dokumen SOP	10 5 5	2 0 0	2 1 1	0 0 0	0	2 1 1	2 1 2	20 20 40
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar								
	Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan								

Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Cabang Olah Raga yang dibina Jumlah Kesepakatan dengan Pelestarian pengembangan Budaya Jumlah Kelompok seni yang di bina dan dipentaskan Jumlah Laporan Koordinasi/sinergipe perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instans vertikal terkait	0 5 40 1	0 1 8 1	0 1 8 1	0 1 8 1	0 1 8 1	0 0 100 100 100	0 1 1 8 1	0 60 60 100
Facilitasi Percepatan Pencapaian Pelayanan Standar aMinimal di Kecamatan	Jumlah Update data SID/SIKAB Jumlah layanan dropping air Jumlah kesepakatan penagulangan kemiskinan Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bantuan sosial Jumlah KK yang memperoleh Bantuan PAH Jumlah KK Yang memperoleh bantuan Septic tank	5 0 60 15 225 410 300	1 0 12 3 45 82 60	1 0 12 3 45 82 60	0 0 0 0 45 82 60	0 0 0 0 20 20 20	1 0 12 3 45 82 60	3 0 36 9 135 246 180	
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan Jumlah Peserta pembinaan/koordeinasi penyelenggaraan pelayanan umum/IUMK Jumlah hari tenaga	1600 140 1235	4000 35 247	4000 35 247	3000 26 123	75 74 50	4000 35 247	12000 105 741	75 75 75
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa berjalan dengan baik								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan DURKP Jumlah dokumen musrenbang tingkat kapanewon Jumlah desa yang terfallilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes Terlaksananya pembinaan perencanaan pembangunan desa scara aplikasi Jumlah terlaksananya bimtek pembangunan desa Jumlah dokumen sinkronosasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan	35 5 35 100 5	7 1 7 20 1	7 1 7 20 1	7 1 7 20 1	7 1 7 0 1	100 100 100 0 100	7 1 7 20 1	60 60 60 60 60
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perlombaan desa tingkat kecamatan Jumlah Profil desa tersusun	5 53	1 7	1 7	1 7	1 7	100 100	3 21	60 60
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase layanan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang terfasilitasi								
Peningkatan Kapasitas Lembags Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan TP PKK Jumlah Kesepakatan peangganan kepemudaan dan karang taruna	60 5	12 1	12 1	9 1	75 100	12 1	36 3	60 100
Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dokumen hasil monev pemberdayaan masyarakat (dna desa) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang di bina Jumlah koordinasi kesepakatan masa tanam	35 80 5	7 16 1	7 16 1	6 16 0	86 100 0	7 16 1	20 48 3	20 58 60
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar								
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berjalan dengan baik								
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta dialog antar umat beragama Jumlah safari tarweh tingkat kapanewon	125 5	25 1	25 1	25 1	100 100	25 1	75 3	60 60

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi								
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia	Jumlah Penyakit masyarakat yang tepetakan Jumlah koordinasi pemetakan penyakit masyarakat	5 5	1 1	1 1	0 1	0 100	1 1	2 3	40 60
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah berjalan dengan baik								
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah HUT RI yang terfasilitasi pelaksanaannya Jumlah Paskibraka yang terbentuk	5 375	1 75	1 75	1 75	100 100	1 75	3 225	60 60
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kesepakatan koordinasi Forkompinkap Jumlah laporan patroli bersama	35 20	7 4	7 4	7 4	100 100	7 4	14 8	40 40
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik								
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi bidang pemerintahan Jumlah koordinasi intensifikasi PBB Jumlah monografi kalurahan dan kapanrwon tersusun	5 5 80	1 1 16	1 1 16	1 1 8	100 100 50	7 7 2	3 3 16	60 60 50
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKalrekuensi monev pebelogolaan keuangan kalurahan Jumlah Peklaksanaan fasilitasi pengelolaan aset kalurahan yang terlaksana Jumlah bimtek pengelolaan keuangan desa	35 35 5 5	7 7 1 1	7 7 1 1	3 3 0 0	43 43 0 0	7 7 1 1	13 13 2 2	37 37 40 40
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah koordinasi dengan lurah dan pamong lainnya	35	7	7	7	100	7	7	60,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPKal yang meningkat pengetahuanya dan pemahamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	150	30	30	30	100	30	90	60,00
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengisian pamomng kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	25	5	5	5	100	5	15	60
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota lonmas yang terlatih Jumlah satgas siaga bencana yang meningkat kemampuanya	350 200	70 40	70 40	0 40	0 100	70 40	140 120	40 60

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Gedangsari

Capaian kinerja pelayanan Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2022 pada umumnya sudah dapat berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan Kapanewon Gedangsari sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Gedangsari
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SP M,IKK)	Satuan (IKU,SP M,IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Pelayanan	Indeks	78,50	80,00	80,25	80,50	79,54	80,60	81,25	81,50	
2	Kapanewon	Nilai	0	72,68	80,05	80,06	0	0	80,05 (A)	80,06 (A)	
3	Nilai AKIP	Potensi Budaya	0	(BB)	(A) 1	(A) 2	0	0	1	2	
	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan			0							

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Gedangsari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja kecamatan Tugas Kecamatan. Dalam peraturan tersebut, telah diuraikan tugas dari masing-masing jabatan, struktural organisasi kecamatan. Sesuai dengan ketentuan tersebut untuk jabatan struktural telah terisi seluruhnya, namun demikian jumlah personil yang ada sekarang ini masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sehingga berakibat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal. Saat ini jumlah pegawai di PD Kapanewon Gedangsari sebanyak 18 orang PNS, dengan rincian : pejabat struktural eselon III sebanyak 2 orang, pejabat struktural eselon IV a sebanyak 5 orang, pejabat struktural eselon IV b sebanyak 2 orang dan staf sejumlah 9 orang. Kondisi ini sebenarnya tidak mencukupi dari segi jumlah maupun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Kapanewon Gedangsari sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 bisa dikatakan cukup baik. Target-target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Meski ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait dengan kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan kepada kapanewon. Meskipun demikian, justru ada beberapa kegiatan baru yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian target dimaksud. Hal ini dikarenakan adanya standarisasi program dan kegiatan yang dapat atau boleh dilaksanakan oleh PD Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi seperti di atas menjadikan bahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagian wewenang dan tugas Bupati kepada Panewu di kemudian hari. Hal ini akan menjadi peluang bagi PD Kapanewon untuk lebih kreatif menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masa yang akan datang. Sejauh ini situasi dan kondisi yang demikian tidak terlalu berdampak pada pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Kapanewon. Namun secara makro bisa jadi pencapaian visi dan misi Kabupaten Gunungkidul menjadi terganggu. Oleh karena itu perlu kebijakan strategis agar dapat mengoptimalkan kinerja PD Kapanewon pada masa yang akan datang.

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 berpedoman pada program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Rancangan awal RKPD yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja PD termasuk Kapanewon Gedangsari disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan kalurahan (Musrenbangkal), dengan harapan akan mendapatkan berbagai masukan dari forum Musrenbang Kapanewon, Forum (gabungan) PD maupun Musrenbang Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rancangan awal Renja 2024 Kapanewon Gedangsari telah dimutakhirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini :

NO	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan	100 persen	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	100 persen	100.000.000	
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana	100 persen	150.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah event kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100 persen	100.000.000	
1	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Seni	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan 2 Adat dan Tradisi	Laporan	150.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja	1 laporan	100.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	25.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	35.000.000	
2	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksana	100 persen	25.970.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	1 layanan	35.000.000	
2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kalurahan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kalurahan	3 dokumen	25.970.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	3 dokumen	35.000.000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	100 persen	2129.564.165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	1.289.918.144	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana	100 persen	35.668.050	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 layanan	11.265.800	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	27.736.950	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.332.800	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	446.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	423.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	360.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	345.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 dokumen	1.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	1.104.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	424.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 dokumen	613.000	
8	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	17 Laporan	2.800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	17 laporan	2.299.000,00	

9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pwringkat Daerah	4 Laporan	2.800.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pwringkat Daerah	4 Laporan	1.149.000	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100 Persen	1.810.884.315	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	3 layanan	1.155.877.744	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 orang	1.809.294.315	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang	1.151.222.744	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 laporan	1.155.000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan yang	13 Laporan	440.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	13 laporan	3.500.000	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	dilayani dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 Peren	5.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 layanan	1.265.000	
12	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.200.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	1.265.000	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Umum Kapanewon Terfasilitasi	100 Persen	58.031.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7 layanan	34.901.000	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	3.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	1.272.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 paket	35.361.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 paket	24.144.000	
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	4.300.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	2.100.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	2.133.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	2.275.000	
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	248 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	248 dokumen	1.200.000	
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	660.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	600.000	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	11.276.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 laporan	3.310.000	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana	100 Persen	55.080.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	1 layanan	0	
19	Pengadaan Mebel	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	40 unit	55.080.000	Pengadaan Mebel	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 unit	0	
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Unit saraba dab Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Unit saraba dab Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	

8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana	100 Peren	22.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 layanan	21.521.100	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumbwe Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	22.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumbwe Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	21.521.100	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana	100 Persen	141.900.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 layanan	65.087.500	
22	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara/dibayarkan pajak dan perizinanya	86 unit	30.603.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara/dibayarkan pajak dan perizinanya	86 unit	29.400.000	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	109.297.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	5.000.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	28.887.500	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	2.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	1.800.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	1.065.327.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 persen	380.421.500	
10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksana	100 Persen	28.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 layanan	8.655.000	
26	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Lapran	28.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	8.655.000	
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	1.037.327.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1 layanan	371.766.500	
27	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1.001.963.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kecamatan	3 laporan	342.379.000	
28	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	35.364.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	29.387.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100 Persen	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	0 Persen	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	43 Laporan	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	0 Laporan	0	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100 persen	62.765.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100 persen	29.525.000	
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Pemberdayaan desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	39.700.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	1 layanan	17.960.000	
28	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh	16 dokumen	26.700.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	10 Dokume	11.000.000	

29	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	13.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 laporan	6.960.000	
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase laporan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon yang terfasilitasi	100 Persen	23.065.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	2 layanan	11.565.000	
30	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Lembaga	10.565.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan	5.890.000	
31	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	12.500.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	5.675.000	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 persen	19.150.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi		9.704.800	
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	15.700.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan	2 layanan	9.704.800	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.954.800	
32	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	15.700.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	7.750.000	
15	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	2 layanan	3.450.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi		0	
33	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	3.450.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 laporan	0	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 persen	79.880.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 persen	38.660.000	
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah Terfasilitasi	100 persen	79.880.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 layanan	38.660.000	
34	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	75 Orang	74.050.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	30 orang	32.515.000	

35	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	5.830.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	6.145.000
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang	100 persen	59.496.250	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 persen	21.474.800
16	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100 persen	59.496.250	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah layanan kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	6 layanan	21.474.800
36	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	1 Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Praturan Kepala	1 dokumen	1.710.000
37	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	7.125.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	1.580.000
38	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	17 dokumen	32.052.250	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	21 dokumen	12.285.000
39	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen dalam rangka fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	3.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen dalam rangka fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	1.665.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	3.000.000					
	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kelurahan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dalam Rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	3.500.000	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kelurahan	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dalam Rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	1.079.800
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	3.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 dokumen	1.585.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	7.319.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab, Gunungkidul, Gedangsari Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 dokumen	1.570.000

2.5. Penelaahan Usulan dan Program Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan merupakan upaya untuk mencapai cita-cita dan gambaran warga masyarakat yang ingin membangun dan memajukan daerahnya. Usulan program meliputi pembangunan fisik maupun non fisik, pelaksanaan musrenbang Tingkat Kapanewon Gedangsari yang dilaksanakan Tanggal 1 Februari 2024 ini forum untuk mempertemukan antara kebutuhan Masyarakat dan pemangku kepentingan Kapanewon Gedangsari dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah pusat daerah pada tahun 2024.

Pada Tahun 2024 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Kapanewon maupun OPD Kabupaten Tahun 2024 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPd. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka dilakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan

dan kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan OPD Tahun 2024, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan usulan program kegiatan sesuai dengan program kegiatan OPD. Usulan pemangku kepentingan secara rinci pada Tabel 2.5.1:

Tabel 2.5
Usulan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)	Catatan
1	Pelatihan Perencanaan Pembangunan di Desa	Kap. Gedangsari	Terlaksananya bimtek perencanaan pembangun	1 kali	16.000.000	16.000.000	PIS
2	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin	Kap. Gedangsari	Terlaksananya pembangunan jamban sehat	11 KK	8.000.000	16.000.000	PIS
3	Bantuan PAH	Kap. Gedangsari	Terlaksananya pemberian PAH	4 KK	8.000.000	32.000.000	PIS
4	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Kap. Gedangsari	Terlaksananya bimtek pengelolaan keuangan desa	1 kali	6.000.000	6.000.000	PIWK
5	Pelatihan Perencanaan Pembangunan di Desa	Kap. Gedangsari	Terlaksananya bimtek perencanaan pembangun	1 kali	16.000.000	16.000.000	PIWK
6	Bantuan PAH	Kap. Gedangsari	Terlaksananya pemberian PAH	11 KK	8.000.000	88.000.000	PIWK
7	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin	Kap. Gedangsari	Terlaksananya pembangunan jamban sehat	11 KK	4.000.000	44.000.000	PIWK
8	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin	Kap. Gedangsari	Terlaksananya pembangunan jamban sehat	19 KK	4.000.000	76.000.000	PIWK
9	Bantuan PAH	Kap. Gedangsari	Terlaksananya pemberian PAH	4 KK	8.000.000	32.000.000	PIWK

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON GEDANGSARI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang Kapanewon dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2019, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Kapanewon

Kapanewon Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan PD setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD. Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Gedangsari

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat di tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kapanewon Gedangsari

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
Peningkatan ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan

	meningkat		kerakyatan	
Reforma si Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintah an meningkat	Nilai AKIP	Kualitas Penyelenggara an Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan kapanewon
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP

Tujuan yang akan dicapai Kapanewon Gedangsari dalam tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Kapanewon Gedangsari

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kapanewon yang berkualitas.	Indeks kualitas pelayanan kapanewon tahun 2026	81,00
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan.	2

Sasaran yang akan dicapai Kapanewon Gedangsari dalam tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Kapanewon Gedangsari

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan kapanewon	80,75
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP	80,07 (A)

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Gedangsari Tahun 2023

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU Tahun 2023
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	80,50

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON GEDANGSARI

Program dan Kegiatan Kapanewon Gedangsari yang direncanakan melalui Rancangan Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024 tidak jauh berbeda dari Renja 2023, hal tersebut disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan wajib yang harus tetap dilaksanakan oleh Kapanewon Gedangsari. Meskipun demikian ada beberapa kegiatan baru yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Selain menampilkan rencana program dan kegiatan tahun 2024 juga dapat dilihat perkiraan maju tahun 2025 dengan harapan bahwa pada tahun 2025 sudah dapat diketahui gambaran perkiraan pagu anggaran untuk Kapanewon Gedangsari.

Rancangan Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2024 terdiri dari 8 Program dan mencakup 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Dari program-program tersebut, 7 program di antaranya merupakan program yang menysasar pada internal PD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 1 program merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan kalurahan di wilayah Kapanewon Gedangsari. Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 109.590.000,00. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kapanewon Gedangsari untuk Tahun 2023 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan RKPD khususnya dalam pagu anggaran. Hal ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun sebelumnya/tahun berjalan. Namun dalam perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai forum yang ada dan RKPD Kabupaten Gunungkidul, rancangan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian. Harapannya penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-aturan yang berlaku.

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Gedangsari dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6				7	8	9
					1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN		Kapanewon Gedangsari
					1	1			URUSAN KABUPATEN/KOTA	100.000.000	
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2 Potensi Budaya	1	1	1		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
					1	1	1	2	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	
					2	22	08	5070	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	

					4					URUSAN KABUPATEN/KOTA		
					4	01				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	Kapanewon Gedangsari
					4	01	04	501		Perencanaan dan pPengendalian Pelaksanaan Kegiatan		
					4	01	04	501	06	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	
					7	01				KECAMATAN		
Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	80,8 (A)	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.289.918.144	Kapanewon Gedangsari
					7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.265.800	
					7	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	5.332.800	
					7	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	423.000	
					7	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	345.000	
					7	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.104.000	
					7	01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	613.000	
					7	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2.299.000	
					7	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.149.000	
					7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.155.877.744	
					7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.151.222.744	
					7	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.155.000	
					7	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.500.000	
					7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.265.000	
					7	01	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.265.000	
					7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.901.000	
					7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.272.000	
					7	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.144.000	
					7	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.100.000	
					7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.275.000	
					7	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
					7	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	600.000	
					7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.310.000	
					7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
					7	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	0	
					7	01	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	0	
					7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.521.100	
					7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.521.100	
					7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.087.500	
					7	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.400.000	
					7	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
					7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.887.500	
					7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000	
					7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	
					7	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	

		Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	84,64	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	380.421.500	Kapanewon Gedangsari
					7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.655.000	
					7	01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	8.655.000	
					7	01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	371.766.500	
					7	01	02	202	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	342.379.000	
					7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.387.500	
					7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.525.000	Kapanewon Gedangsari
					7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.960.000	
					7	01	03	201	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11.000.000	
					7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Muayawarah Perencanaan Pembangunan zdesa	0	
					7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.960.000	
					7	01	03	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.565.000	
					7	01	03	203	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.890.000	
					7	01	03	203	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.675.000	
					7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.704.800	Kapanewon Gedangsari
					7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.704.800	
					7	01	03	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vverikal di Wilayah Kecamatan	1.954.800	
					7	01	03	201	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.750.000	
					7	01	04	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	
					7	01	04	202	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Satuan Perangkat Daerah Kapanewon Gedangsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						135.000.000				
2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terfasilitasi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	100 persen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	100.000.000	
2	22	08	5,07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Layanan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Layanan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Layanan	100.000.000	
2	22	08	5,07	06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100.000.000
4	01	04	06	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	100 Persen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	35.000.000	
4	01	04	6	01	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Layanan Kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Layanan	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Layanan	35.000.000
4	01	04	5	06	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	35.000.000
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01			KECAMATAN					1.289.918.144				3.492.217.663
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Terlaksana dengan baik	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	100 Persen	1.289.918.144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	2.170.816.193	
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	6 Layanan	11.265.800			6 Layanan	36.950.800	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	3 Dokumen	5.332.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	28.741.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Dokumen	423.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	438.900
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Dokumen	345.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	375.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.104.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.150.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Dokumen	613.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	445.900
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	17 Laporan	2.299.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Laporan	2.900.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	4 Laporan	1.149.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	2.900.000

7	01	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Layanan	1.155.877.744	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Layanan	1.814.994.343
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252 Orang	1.151.222.744	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	252 Orang	1.809.294.343
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.200.000
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem est SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	13 Laporan	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4.500.000
7	01	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 layanan	1.265.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 layanan	5.600.000
7	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	6 Dokumen	1.265.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	5.600.000
7	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	7 Layanan	34.901.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Layanan	51.313.200
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Paket	1.272.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	3.300.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	6 Paket	24.144.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	30.094.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	4 Paket	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	2.400.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	5 Paket	2.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	2.214.200
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	248 Dokumen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	248 Dokumen	1.200.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	12 Laporan	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	690.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	16 Laporan	3.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Laporan	11.415.000
7	01	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Layanan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Layanan	75.530.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	0 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Unit	75.530.000
7	01	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 layanan	21.521.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		n bv v v	23.700.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	21.521.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	23.700.000
7	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Layanan	65.087.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Layanan	162.727.850
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	85 Unit	29.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	86 Unit	32.127.850
7	01	01	2,09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Peralatan mesin lainnya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	10 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	10.000.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Unit	28.887.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	119.000.000
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	5 Unit	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	1.600.000

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terlaksana	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	100 Persen	380.421.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	1.084.352.715
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Layanan	8.655.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Layanan	35.000.000
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	3 Laporan	8.655.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	35.000.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	3 layanan	371.766.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 layanan	1.049.352.715
7	01	02	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	3 Laporan	342.379.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	1.012.445.715
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	13 Laporan	29.387.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	36.907.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Terlaksana	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	100 persen	29.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	65.050.000
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 layanan	17.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 layanan	41.200.000
7	01	03	2,01	01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	11 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Dokumen	27.700.000
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	9 Laporan	6.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	13.500.000
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Layanan	11.565.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Layanan	23.850.000
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Lembaga	5.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Lembaga	10.850.000
7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	4 Laporan	5.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	13.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terfasilitasi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	100 Persen	9.704.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	25.000.000
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Layanan	9.704.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Layanan	25.000.000
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Laporan	1.954.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.000.000
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Laporan	7.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	20.000.000

7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terfasilitasi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	100 Persen	38.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	80.050.000
7	01	05	2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	2 Layanan	38.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Layanan	80.050.000
7	01	05	2,01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	30 Orang	32.515.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 Orang	74.050.000
7	01	05	2,01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6.145.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	100 Persen	21.474.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	61.475.000
7	01	06	2,01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	6 layanan	21.474.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 layanan	61.475.000
7	01	06	2,01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	3.000.000
7	01	06	2,01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	8 Dokumen	1.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	8.548.000
7	01	06	2,01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	21 Dokumen	12.285.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Dokumen	32.187.000
7	01	06	2,01	05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.665.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.500.000
7	01	06	2,01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pemilihan kepala desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	0 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	0
7	01	06	2,01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		1 Dokumen	1.079.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.500.000
7	01	06	2,01	08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan	3 Dokumen	1.585.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	3.000.000
7	01	06	2,01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		2 Dokumen	1.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	7.740.000
TOTAL								1.904.704.244				3.621.743.908

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Gedangsari sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,

KAPANEWON GEDANGSARI,

EKO KRISDIYANTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XLV
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON GIRISUBO
TAHUN 2024

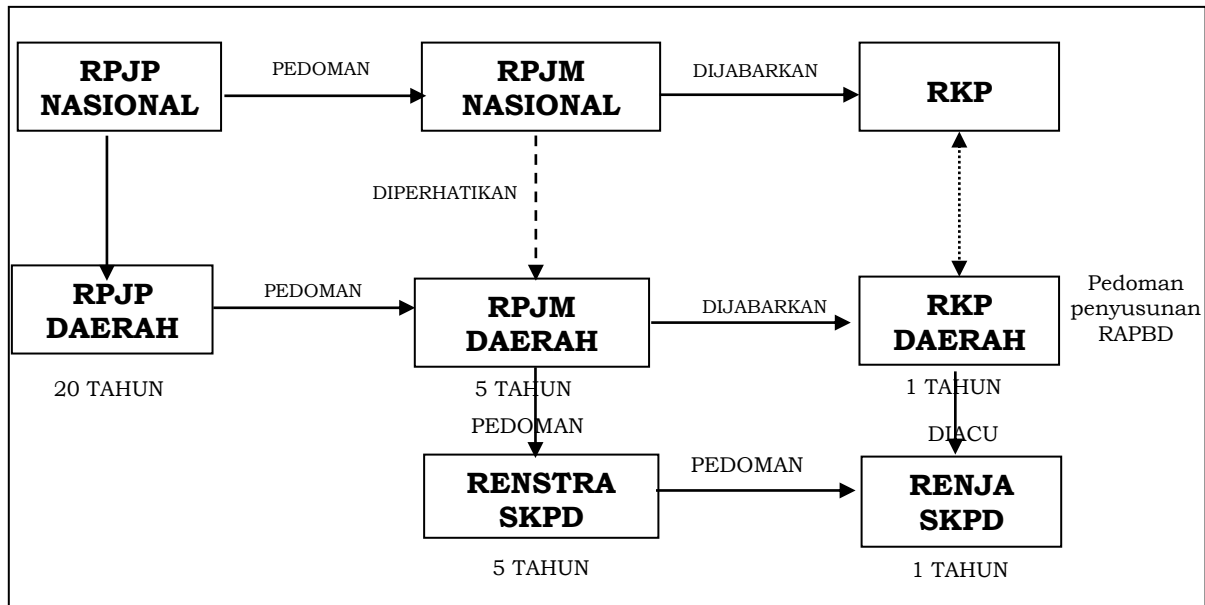
BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PD. Rencana Kerja Kapanewon Girisubo yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Kapanewon Girisubo Tahun 2021-2026 sehingga Renja Tahun 2024 disusun memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Girisubo, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja Kapanewon Girisubo diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang. Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 dengan urusan serta susunan perangkat daerah, tentunya penyusunan Renja PD berpedoman pada Surat Edaran yang ada demi memaksimalkan hasil dan tujuan disusunnya Renja PD.

Kaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan Nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat. Sasaran daerah tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat terwujud keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan hal itu, perlu disusun pedoman yang lebih lengkap dan komprehensif sebagai dasar dan acuan penyesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan tahapan Lima Tahunan RKPD tahun 2021-2026 tersebut, tahun 2024 merupakan tahun ke-3 dalam kerangka RPJMD 2021-2026. RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum mampu diwujudkan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu perlu dilaksanakan berbagai upaya dan strategi untuk mewujudkan RKPD Tahun 2024 yang baik, komprehensif dan aplikatif dalam mewujudkan target pembangunan tahun 2024. Dalam RKPD 2024 harus dapat dituangkan secara lengkap dan terstruktur bagaimana strategi mengoptimalkan dan mensinergikan semua sumberdaya yang ada untuk mendorong percepatan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 telah disusun dokumen operasional sebagai pedoman penyusunan perencanaan. Dokumen yang dipergunakan sebagai pedomannya adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Konsekuensi

logis yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ialah harus menyusun Pedoman dan arah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024. Pemerintah kabupaten Gunungkidul harus menyusun :

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah,
2. Sasaran dan Indikator Kinerja PD, serta
3. Program/Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2024.

Tema, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu *“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul Yang Bermartabat Tahun 2026”*.

Sedangkan Misi Kepala daerah Tahun 2021-2026 :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis;
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Dalam merumuskan tema Pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan Nasional dan DIY sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Nasional :
 - 10 destinasi pariwisata prioritas
 - Industri 4.0 di sub sektor prioritas : makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi, dan alat kesehatan
 - Pembangunan science techno park
 - Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting
 - Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh/MP Perlinsos
 - Transformasi digital
2. Arah Kebijakan Provinsi
 - Mengatasi ketimpangan wilayah
 - Mengatasi ketimpangan pendapatan
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah *“Peningkatan kondisi ekonomi daerah dan layanan dasar melalui Penguatan UMKM, Pengembangan Sektor Unggulan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM”*.

Tema Pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yaitu :

1. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
2. Peningkatan Ekonomi;
 - UMKM Unggulan
 - Investasi dan Pariwisata
 - Pengembangan Sektor Unggulan
3. Penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Ketentraman dan Ketertiban;
5. Reformasi Birokrasi.

Sasaran Pembanugunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1

Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

No	Prioritas	Sasaran Daerah
1	2	3
1.	Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkatkan
2.	Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan
3.	Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM Meningkatkan
4.	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan SDA dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Nilai Investasi Meningkatkan
5.	Penanggulangan Kemiskinan	Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun
6.	Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan Kawasan Teritegrasi dan Berkelanjutan

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja Kapanewon Girisubo Tahun 2024 disusun setelah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kapanewon. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan. Renja sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena didalam dokumen Renja terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan kegiatan. Lebih-lebih didalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026;
 15. Surat Edaran Bupati Nomor 050/0508 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

1. Memberikan gambaran riil permasalahan dan usulan kebutuhan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan,
2. Dalam rangka mengatasi permasalahan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

b) Tujuan

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD Tahun 2024.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
3. Sebagai salah satu bahan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENANA KERJA KAPANEWON GIRISUBO

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Girisubo dan Capaian Renstra Kapanewon Girisubo
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Girisubo
- 2.4 Review terhadap Renja PD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON GIRISUBO

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Girisubo

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON GIRISUBO

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON GIRISUBO

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Girisubo dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja PD Tahun Lalu (n-2/ Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Renstra Tahun 2021-2026 menyesuaikan RKPD Tahun berjalan sehingga program dan kegiatan yang diusulkan menyesuaikan program kegiatan dari SKPD kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan riil Kapanewon. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Girisubo mempunyai komitmen untuk berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih ada program/kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat tepat waktu seperti target yang telah ditetapkan. Hal demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan dropping air bersih dan bantuan sosial kepada masyarakat (PIWK). Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak menentu dan proses lelang yang cukup panjang, sehingga dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan. Disisi lain munculnya kebijakan/regulasi dan juga kesepakatan bersama terkait dengan standarisasi program dan kegiatan yang dapat/boleh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kapanewon setelah program/kegiatan dan target ditetapkan ikut mempengaruhi dalam ketepatan waktu pelaksanaannya.

Tidak semua program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra maupun Renja Kapanewon Girisubo dapat dilaksanakan. Namun demikian, justru ada program dan kegiatan baru yang dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kekurangan dana bukanlah satu-satunya faktor yang menghambat. Namun ada faktor lain yang lebih kuat, yang mengakibatkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kurang adanya kebijakan di tingkat Kabupaten untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Kapanewon, sehingga program dan kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kapanewon. Selain itu, adanya standarisasi/penyeragaman program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kapanewon-Kapanewon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sehingga menyebabkan beberapa program dan kegiatan harus disesuaikan atau diganti rekening kegiatannya.

Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan menjadi kewenangan Kapanewon. Selanjutnya yang perlu ditempuh adalah dengan mereview Renstra Kapanewon, dan melakukan penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-kegiatannya beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Perangkat Daerah Kapanewon.

Selama Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Girisubo telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah tertuang dalam DPA maupun DPPA meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat habis anggarannya sesuai dengan yang telah direncanakan dikarenakan telah tercukupi sesuai kebutuhan. Selain itu untuk kegiatan penanganan dan penanggulangan kekeringan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena sudah memasuki musim hujan dan pada kegiatan penyaluran bansos PIWK terdapat penyesuaian harga perolehan dari pihak ketiga. Sesuai dengan perhitungan dan laporan yang telah disusun dapat diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian kinerja secara fisik untuk Kapanewon Girisubo adalah 99 % (prosentase jumlah keseluruhan belanja langsung dan tidak langsung).

Pada belanja pegawai tidak langsung sebelum adanya Perubahan Anggaran terdapat anggaran sebesar Rp. 1.695.514.026,00 dan setelah Perubahan Anggaran menjadi sebesar Rp. 1.648.144.958,00 terdapat selisih Rp. 47.369.068,00. Hal ini dikarenakan menyesuaikan kebutuhan anggaran yang diperlukan pada Triwulan IV terutama untuk kebutuhan belanja gaji (belanja tidak langsung).

Sedangkan untuk belanja pada kegiatan lainnya hampir rata-rata terealisasi, hanya ada pada Belanja Bansos (PIWK) yang tidak terealisasi secara keuangan karena menyesuaikan harga lelang.

Dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2022 terdapat program dan kegiatan yang tidak memenuhi target yang direncanakan, sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	435.995.000	407.797.712	28.279.788	93,90
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.400.000	24.082.840	2.317.160	91,20

Untuk mengatasi hal tersebut terkait belanja dropping air pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kapanewon akan dilakukan persiapan yang lebih awal sehingga realisasi terlaksana tepat waktu. Secara fisik kegiatan diatas terlaksana 86% sehingga menjadi evaluasi.

Kapanewon Girisubo tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 mengacu pada APBD Tahun 2022 adalah terdiri dari 8 Program dan 19 kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok program *pertama*, semua urusan : berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kePanewuan yang meliputi program sebagai berikut :

1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan, -rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran. Keseluruhan kegiatan dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Pelayanan surat masuk mencapai 768 buah dan surat keluar 751 buah. perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset kantor terdiri atas 2 unit gedung kantor dan 1 unit rumah dinas Panewu, 6 unit komputer, 5 unit laptop, 2 unit mesin tik, 2 unit printer, 25 unit meja rapat, 1 kamera digital, dan 1 unit *wireless*, 1 buah kendaraan roda 4 dan 7 unit sepeda motor, Penyediaan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. Seluruh kegiatan juga berjalan sesuai dengan harapan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset kantor terdiri atas 2 unit gedung kantor dan 1 unit rumah dinas Panewu, serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 7 unit dan roda 4 (empat) 1 unit. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (menyusun dokumen LAKIP), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ. Pencapaian program ini tertib dokumentasi keuangan dilihat dengan terkelolanya administrasi keuangan. Ketepatan waktu dalam pengiriman pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja kapanewon yang keduanya harus dikirim ke BKAD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 6 setiap bulannya, telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja, dan Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD. Pencapaian program peningkatan kualitas perencanaan secara keseluruhan meliputi tertib dokumentasi perencanaan, pengorganisasian, keuangan dilihat dengan 2 indikator yaitu tersusunnya dokumen perencanaan, program kerja dan pelaporan/evaluasi dapat dilaksanakan dengan benar dan akuntabel.

1.2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, antara lain :

Frekuensi FKUB dan Safari Ramadhan di 7 kalurahan terlaksana, dan Kesepakatan koordinasi PEKAT sebanyak 12 bulan pada 8 kalurahan.

1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, antara lain:

Kegiatan Musrenbang 1 kali, Frekuensi rakor pelestarian aset program 1 kesepakatan, Jumlah dokumen musrenbang 8 dokumen, Jumlah dokumen RPJMDes dan RKPDes 8 dokumen, Jumlah penyusunan dokumen profil desa dan kePanewuan 9 dokumen, Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 8 kalurahan. Frekuensi rakor pengembangan lembaga keuangan mikro desa 8 dokumen, Jumlah industri kecil/rumah tangga yang meningkat pengetahuannya 8 kelompok, Penyusunan dokumen hasil pelaksanaan program 1 dokumen.

1.4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, antara lain:

Dokumen monografi desa dan kePanewuan 16 dokumen, Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa 1 kali, Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa 8 kali, Frekuensi pendampingan penyusunan APBDDes 8 kali, Jumlah kesepakatan koordinasi pelestarian asset desa 1 kali, Jumlah Perangkat desa terfasilitasi dan peningkatan kapasitas 8 desa, Jumlah Pengisian Jabatan Kepala Desa yang terfasilitasi 3 desa, Jumlah Linmas yang terbina 25 orang.

1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain :

Jumlah THL Pengolah data pelayanan 247 hari, Peningkatan Pelayanan umum kePanewuan 4800 layanan, Bansos PIWK 32 KK, Droning air 693 tengki, Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul 1 kesepakatan, Jumlah Sosialisasi Perda Terlaksana 9 sosialisasi, Jumlah kesepakatan penanganan PMKS 1 Kesepakatan.

2. Kelompok program *kedua* berkaitan dengan Urusan Bidang Kebudayaan, yang terdiri dari 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu :

2.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan menampilkan kelompok kesenian pada Kapanewon dengan bersumber pada dana Keistimewaan.

3. Kelompok program *ketiga* berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan ,yang terdiri dari 2 (dua) Program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

2.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang didalamnya terdapat 2 (dua) keluaran , antara lain :

jumlah paskibra kePanewuan terbentuk sebanyak 85 orang. Pada program ini juga menangani tentang konflik undang-undang yang menasar pada Kasus KDRT dan Anak pada 8 kelurahan. Sub kegiatan lainnya juga menangani Frekuensi Patroli Terpadu terfasilitasi sebanyak 12 kali.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan munculnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam menciptakan lapangan usaha menjadi kunci dari Program dan Kegiatan Kapanewon Girisubo yang direncanakan melalui Renja Kapanewon Girisubo Tahun 2022 secara riil dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON GIRISUBO DAN PENCAPAIAN RENSTRA KAPANEWON GIRISUBO SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

KODE REK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2023) %	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	125.500.000	125.500.000	100	100	100	100
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Prosentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	100	100	125.500.000	125.500.000	100	100	100	100
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	100	100	125.500.000	125.500.000	100	100	100	100
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAANYOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	100	25.970.000	25.970.000	100	100	100	100
4.01.04.2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar terlaksana	100	100	25.970.000	25.970.000	100	100	100	100
4.01.04.2.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli (Kapanewon Girisubo)	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan di Kalurahan; Jumlah Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	100	100	25.970.000	25.970.000	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100	95	2.005.008.958	1.898.982.644	95	100	100	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana	100	100	51.156.000	50.998.500	100	100	100	100
7.01.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja; Jumlah dokumen Renja perubahan	100	100	42.556.000	42.398.500	100	100	100	100
7.01.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	100	100	800.000	800.000	100	100	100	100
7.01.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	100	100	600.000	600.000	100	100	100	100
7.01.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	100	100	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100
7.01.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA; Jumlah dokumen perubahan Perjanjian Kinerja	100	100	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100
7.01.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen e-money; Jumlah dokumen LKJIP; Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja; Jumlah Dokumen ROPK; Jumlah Dokumen Tepra	100	100	5.000.000	5.000.000	100	100	100	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	94	1.672.934.958	1.570.113.804	94	100	100	100
7.01.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	100	94	1.648.144.958	1.545.398.804	94	100	100	100
7.01.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	100	100	2.500.000	2.500.000	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan; Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	100	100	22.290.000	22.215.000	100	100	100	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	2.600.000	2.600.000	100	100	100	100
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	100	100	2.600.000	2.600.000	100	100	100	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	41.830.000	41.830.000	100	100	100	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	100	100	2.500.000	2.500.000	100	100	100	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100	100	22.330.000	22.330.000	100	100	100	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	100	100	2.600.000	2.600.000	100	100	100	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan; Jumlah penggandaan	100	100	6.200.000	6.200.000	100	100	100	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	100	100	1.200.000	1.200.000	100	100	100	100
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minum dan snack untuk tamu	100	100	2.000.000	2.000.000	100	100	100	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum dan snack tersedia untuk rapat; Perjalanan dinas	100	100	5.000.000	5.000.000	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan terlaksana	100	100	22.000.000	22.000.000	100	100	100	100
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah laptop terbeli; Jumlah sound system terbeli	100	100	22.000.000	22.000.000	100	100	100	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	95	44.090.000	41.702.840	95	100	100	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang terbayar; Jumlah rekening listrik yang terbayar (2 rekening X 12 Bulan); Jumlah rekening telephone yang terbayar	100	91	26.400.000	24.082.840	91	100	100	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan di Bayar	100	100	17.620.000	17.620.000	100	100	100	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan yang terlaksana	100	100	44.489.500	44.489.500	100	100	100	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya; Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya; Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas; Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	100	100	30.999.500	30.999.500	100	100	100	100
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	100	100	1.500.000	1.500.000	100	100	100	100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya; Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya; Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya; Jumlah sound system yang terfasilitasi pemeliharaannya	100	100	4.800.000	4.800.000	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	100	100	5.990.000	5.990.000	100	100	100	100
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharannya	100	100	1.200.000	1.200.000	100	100	100	100
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	125.908.000	125.248.000	100	100	100	100
7.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP; Jumlah dokumen SKM; Jumlah dokumen SOP; Jumlah Sosialisasi Perda Terlaksana	100	100	125.908.000	125.248.000	100	100	100	100
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	95	532.631.000	504.291.212	95	100	100	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Keuangan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100	100	65.950.000	65.890.000	100	100	100	100
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah cabang olahraga yang dibina; Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan; Jumlah kesepakatan dan pelestarian pengembangan budaya; Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul; Jumlah Sosialisasi Perda Terlaksana	100	100	65.950.000	65.890.000	100	100	100	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan yang Terfasilitasi	100	94	466.681.000	438.401.212	94	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.02 .02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen hasil money bidang kesejahteraan sosial; Jumlah kesepakatan penanganan PMKS; Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK; Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB; Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PTWK); Jumlah layanan dropping air yang diterima masyarakat; Jumlah Sosialisasi Perda Terlaksana	100	94	435.995.000	407.797.712	94	100	100	100
7.01.02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan; Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum; Jumlah peserta sosialisasi pengurusan ijin IUMK	100	100	30.686.000	30.603.500	100	100	100	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100	100	182.588.000	182.588.000	100	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	100	100	3.000.000	3.000.000	100	100	100	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Industri Kecil yang meningkat pengetahuannya; Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang meningkat kapasitasnya	100	100	3.000.000	3.000.000	100	100	100	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	100	100	45.290.000	45.290.000	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dokumen usulan Musrenbang; Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Kelurahan Terselenggara (PIWK); Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDes; Jumlah profil kalurahan dan kecamatan tersusun serta pelestarian aset program; Terlaksananya pembinaan perencanaan pembangunan kalurahan secara aplikasi	100	100	45.290.000	45.290.000	100	100	100	100
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase layanan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kapanewon yang terfasilitasi	100	100	134.298.000	134.298.000	100	100	100	100
7.01.03.2.03 .02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna; Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	100	100	3.000.000	3.000.000	100	100	100	100
7.01.03.2.03 .04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dokumen hasil money bidang pemberdayaan masyarakat; Jumlah Sosialisasi Perda Terlaksana; Pelaku industri kecil/rumah tangga yang meningkatkan pengetahuannya	100	100	131.298.000	131.298.000	100	100	100	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	4.000.000	4.000.000	100	100	100	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi	100	100	2.000.000	2.000.000	100	100	100	100
7.01.04.2.01 .02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat kecamatan	100	100	2.000.000	2.000.000	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	100	100	2.000.000	2.000.000	100	100	100	100
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	100	100	2.000.000	2.000.000	100	100	100	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	100	35.920.000	35.920.000	100	100	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	100	100	35.920.000	35.920.000	100	100	100	100
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah pasukib kecamatan yang dibentuk dan dilatih	100	100	26.920.000	26.920.000	100	100	100	100
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kesepakatan penanganan perempuan dan anak korban KDRT	100	100	1.000.000	1.000.000	100	100	100	100
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Koordinasi FORKOPIMKAP; Jumlah laporan hasil patroli bersama	100	100	8.000.000	8.000.000	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDDesa tepat waktu dan benar	100	100	92.734.000	92.584.000	100	100	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	100	100	92.734.000	92.584.000	100	100	100	100
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan penyusunan produk hukum desa	100	100	1.500.000	1.500.000	100	100	100	100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen monografi kalurahan; Jumlah dokumen monografi kapanewon; Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	100	100	6.500.000	6.500.000	100	100	100	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Evaluasi Rancangan APBKal; Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal; Frekuensi monev pengelolaan keuangan kalurahan; Jumlah Bimtek Pengelolaan Keuangan Kalurahan Terselenggara (PIWK); Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset kalurahan yang terlaksana	100	100	12.000.000	12.000.000	100	100	100	100
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pamong Kalurahan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	100	100	3.500.000	3.500.000	100	100	100	100
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BamusKal yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	100	100	1.500.000	1.500.000	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01 .11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya; Jumlah satgas siaga bencana yang meningkat kemampuannya; Jumlah Sosialisasi Perda Terlaksana	100	100	66.234.000	66.084.000	100	100	100	100
7.01.06.2.01 .15	Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kesepakatan koordinasi tata ruang kalurahan	100	100	1.500.000	1.500.000	100	100	100	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di Kapanewon yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja Kapanewon.

Pelayanan yang diselenggarakan Kapanewon Girisubo sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diberikan meliputi: pelayanan legalisasi /pengantar pendaftaran penduduk (untuk pembuatan KTP dan KK), pelayanan proposal pembangunan fisik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, pelayanan rekomendasi Jamkesmas, rekomendasi keluarga miskin (gakin), rekomendasi perizinan, serta pelayanan pengesahan surat-surat.

Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja yang dikembangkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana telah disusun oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Sedangkan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pendampingan penyusunan LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang menghendaki adanya perubahan Renstra tahun 2021-2026 untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat Outcome.

Untuk Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator IKU yang dibebankan pada Kapanewon Girisubo Tahun 2021, meliputi 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator yaitu :

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas PD
2. Kinerja Penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat
3. Pelestarian Potensi ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Indikator :

1. Nilai AKIP PD
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Adapun target dan capaian kinerja yang dicapai dapat dilihat dari Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standart	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Akuntabilitas PD	100	80,06	80,07	80,08	80,09	80,10	78,07	78,07	80,06	80,07	
2	Kualitas Penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	78	95,01	95,01	95,01	95,01	95,01	94,00	94,02	95,00	95,00	
3	Pelestarian Potensi ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Girisubo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon, Panewu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021, tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Girisubo antara lain :

- Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kapanewon adalah sebuah Perangkat Daerah, tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya (badan, dinas, dan kantor). Perbedaan tersebut yaitu bahwa Perangkat Daerah lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral sedangkan Kapanewon melaksanakan tugas yang bersifat teritorial (kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban Kapanewon untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan.
- Sedangkan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala daerah terhadap capaian program Nasional/internasional antara lain :

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi format kewenangan yang berbeda antara Perangkat Daerah Kapanewon dengan

Perangkat Daerah yang bukan Kapanewon. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Panewu yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kapanewon berjalan secara efektif dan efisien.

Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi Kapanewon yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sementara pada saat yang sama dukungan anggaran Kapanewon masih belum sebanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan Perangkat Daerah setingkat kantor, menjadikan capaian kinerja Kapanewon kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian untuk capaian yang ideal di masa-masa mendatang.

Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Girisubo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kapanewon, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Tersedianya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan.
2. Semakin meningkatnya kualitas aparat pemerintah Kapanewon dan desa;
3. Telah adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Meningkatnya prosentase jalan yang diperkeras/diaspal; dan
5. Semakin meningkatnya dana-dana yang masuk ke desa-desa (ADD, Dana Desa, Bantuan Hibah, dll)

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata;
3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS sehingga kinerja PNS belum maksimal;
4. Masih adanya kekurang sesuaian jabatan dengan kompetensi pegawai;
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil; dan
7. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/cor-block) dengan peningkatan jumlah alat transportasi.

- Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Kapanewon Girisubo antara lain :

Memperhatikan bahwa wilayah Kapanewon Girisubo dengan kondisi alam yang terletak di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul, dengan wilayahnya yang memiliki sumber daya alam berupa potensi alam yang terletak perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah tentunya banyak tantangan dan peluang yang perlu dihadapi agar mampu berkembang baik antara lain :

1. Tantangan
 - a. Letak wilayah yang dekat dengan pelabuhan memungkinkan adanya pengaruh negatif dari luar wilayah.
 - b. Masih sering terjadinya bencana alam kekeringan akibat musim kemarau.
 - c. Rendahnya nilai hasil jual pertanian dan peternakan.
 - d. Masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia baik ditinjau dari tingkat pengetahuan maupun ketrampilan penduduk.
 - e. Kurangnya jumlah Pegawai
 - f. Belum optimalnya dalam penyusunan perencanaan

- g. Insfratraktur dan akses jalan yang kurang memadai
 - h. Terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.
2. Peluang.
- a. Tingkat partisipasi dan gotong royong masyarakat masih tinggi.
 - b. Terbukanya akses informasi dan komunikasi.
 - c. Sumber daya berupa pelabuhan yang merupakan sumber pendapatan.
 - d. Telah dibukanya sebagian Jalur-jalur Lintas Selatan (JJLS) yang memperlancar arus transportasi antar wilayah/ daerah.
 - e. Semakin meningkatnya dana dana yang masuk ke desa untuk dikelola desa (ADD, Dana Desa, bantuan Hibah, Sumber lain)

Formulasi Isu-isu Strategis dan rekomendasi dan catatan yang bisa ditindak lanjuti antara lain :

1. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha;
2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, percepatan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, mitigasi dan pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya;
3. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih profesional dan mampu bersaing menjadi daerah tujuan wisata terkemuka yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (*length of stay*) di Gunungkidul. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah melalui percepatan ketersediaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum, meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah dengan pemerintah, serta pemerintah-swasta dan meningkatkan infrastruktur publik terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan; perencanaan pembangunan tersebut antara lain diprioritaskan pada :
 - Pembangunan Kawasan Perkotaan Kapanewon Girisubo;
 - Normalisasi jalan Pantai Sadeng;
 - Normalisasi jalan Pantai Krokoh – Pantai Sadeng;
 - Normalisasi jalan Pantai Sedahan – Jepitu;

- Normalisasi jalan ke Pantai Watulumbung (Gunung Batur), dan jalan-jalan lain yang menuju objek wisata Pantai Selatan;
 - Pembangunan *Rest Area* Jerukwudel;
 - Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi (UMKM dan IKM).
6. Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu Menjadikan Laut sebagai Halaman Muka dan bidang pertanian sebagai tulang punggung (*back bone*) pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.

2.4 Review terhadap Renja PD

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 telah mengakomodir berbagai masukan dari aspirasi para pemangku kepentingan.

RKPD tahun 2024 yang terdiri dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Kapanewon Girisubo disusun setelah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kapanewon. Dalam perkembangannya Renja PD tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel 2.4 berikut :

TABEL 2.4
REVIEW TERHARAP RENJA PD TAHUN 2024
KAPANEWON GIRISUBO

Nomor Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Nomor Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan			2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan		
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah layanan kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		100.000.000	2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah layanan kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		100.000.000
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Girisub	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Girisub	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan			4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan		
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				35.000.000	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				35.000.000

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapane won Girisub o	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	4 Dokumen	35.000.000	4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanew on Girisub o	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	4 Dokumen	35.000.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan		64.310.000	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan		59.250.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapane won Girisub o	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.810.000	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanew on Girisub o	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	49.970.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kapane won Girisub o	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.090.000	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanew on Girisub o	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	670.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapane won Girisub o	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.010.000	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanew on Girisub o	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	740.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapane won Girisub o	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.610.000	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanew on Girisub o	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.040.000

1	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapane won Girisub o	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	1.390.000	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanew on Girisubo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	970.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapane won Girisub o	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	4.230.000	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanew on Girisubo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.560.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapane won Girisub o	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.170.000	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanew on Girisubo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.300.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan; Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		969.724.051	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan; Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		967.849.051	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapane won Girisub o	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/B ulan	939.101.551	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanew on Girisubo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/B ulan	939.101.551	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Girisub o	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	2.880.000	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanew on Girisubo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.900.000	

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Girisub	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	27.742.500	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Girisub	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	26.847.500
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian		4.500.000	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Jumlah ASN tertangani		1.880.000
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Girisub	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	4.500.000	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Girisub	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.880.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		81.422.500	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		47.630.500
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Girisub	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.511.000	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Girisub	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.511.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Girisub	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	35.400.000	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Girisub	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	10.080.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Girisub	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	23.101.500	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Girisub	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	22.789.500

1	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapane won Girisub o	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	7.000.000	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanew on Girisub o	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	3.380.000
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapane won Girisub o	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanew on Girisub o	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000
	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kapane won Girisub o	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.250.000	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kapanew on Girisub o	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.700.000
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapane won Girisub o	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.960.000	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanew on Girisub o	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.970.000
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah		Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		49.691.504	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapane won Girisub o	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.300.000	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanew on Girisub o	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapane won Girisub o	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terfasilitasi	8 meter	27.391.504	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanew on Girisub o	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terfasilitasi	0 meter	0

1	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	31.425.600	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Girisubo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	31.425.600	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Girisubo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	31.425.600
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	230.448.896	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Girisubo	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 paket pemeliharaan	46.371.400	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Girisubo	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	16 paket pemeliharaan	46.371.400
X.XX.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendararaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	41.100.000	X.XX.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Girisubo	Jumlah Kendararaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	16 paket pemeliharaan	41.100.000	X.XX.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Girisubo	Jumlah Kendararaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	16 paket pemeliharaan	41.100.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.500.000	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Mebel	Kapanewon Girisubo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	500.000	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Mebel	Kapanewon Girisubo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	500.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.500.000	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Girisubo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1.900.000	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Girisubo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.900.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180.548.896	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Girisubo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.271.400	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Girisubo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.271.400

X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Girisubo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.800.000	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Girisubo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	600.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana		481.769.000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana		453.930.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terselenggara		12.484.000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terselenggara		5.200.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Girisubo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	12.484.000	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Girisubo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	5.200.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan yang Terasiliansi		469.285.000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan yang Terasiliansi		448.730.000

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapane won Girisub o	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	434.365.000	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanew on Girisub o	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	414.847.500
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapane won Girisub o	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	34.920.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanew on Girisub o	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	33.882.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi		69.545.000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi		17.625.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi		56.965.000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi		12.075.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapane won Girisub o	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	45.960.000	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanew on Girisub o	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	9.725.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapane won Girisub o	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	11.005.000	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanew on Girisub o	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	2.350.000

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Girisubo	Persentase layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon yang terfasilitasi		12.580.000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Girisubo	Persentase layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon yang terfasilitasi		5.550.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Girisubo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 lembaga	6.640.000	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Girisubo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 lembaga	3.000.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Girisubo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	5.940.000	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Girisubo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	2.550.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi		8.955.000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi		3.870.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi		8.955.000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi		3.870.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Girisubo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.055.000	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Girisubo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapane won Girisub o	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 laporan	6.900.000	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanew on Girisubo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 laporan	2.870.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi		84.070.000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi		41.750.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Daerah		Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Daerah yang terfasilitasi		84.070.000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Daerah		Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Daerah yang terfasilitasi		41.750.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	Kapane won Girisub o	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	70.930.000	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	Kapanew on Girisubo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	33.650.000

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Girisubo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1.120.000	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Girisubo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	900.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	12.020.000	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	7.200.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana		33.390.000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana		20.170.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana		33.750.000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana		20.170.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi, Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Girisubo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	1.500.000	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	1.100.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Desa	Girisubo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 dokumen	6.800.000	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	4.500.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi, Pengelolaan Aset Desa	Girisubo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	12.450.000	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	6.500.000

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Girisub	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 dokumen	3.400.000	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	1.650.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Girisub	Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 dokumen	1.300.000	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 dokumen	1.120.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Girisub	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	6.960.000	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	4.100.000
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kapanewon Girisub	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 dokumen	1.390.000	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 dokumen	1.200.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Girisubo disusun setelah pelaksanaan Musrenbang Kapanewon. Dalam perjalanannya usulan tersebut mengalami perubahan, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun.

Salah satu kegiatan yang juga harus dilaksanakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah PIWK berupa bantuan pengadaan closed, semen, pasir, batu bata, serta PAH untuk KK miskin.

Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan tersebut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024
dari Para Pemangku Kepentingan Kapanewon Girisubo

NO	PROGRAM	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- NGLINDUR	- Jumlah KK yang memperoleh bantuan PAH (PIWK)	26 KK	
		- PUCUNG	- Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	39 KK	
		- SONGBANYU	- Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	3 KK	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON GIRISUBO

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :

a. Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 :

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

b. Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 :

- Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis.
- Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan Nasional dan DIY sebagai berikut :

a. Arah kebijakan Nasional

- 10 destinasi pariwisata prioritas
- Industry 4.0 di 6 sub sector prioritas: makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi, dan alat kesehatan
- Pembangunan science techno park
- Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting
- Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan social menyeluruh/MP Perlinsos
- Transformasi digital

b. Arah kebijakan Provinsi

- Mengatasi ketimpangan wilayah
- Mengatasi ketimpangan pendapatan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah :

“Peningkatan kondisi ekonomi daerah dan layanan dasar melalui penguatan UMKM, Pengembangan sector unggulan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana;
2. Peningkatan ekonomi;
 - a. UMKM Unggulan
 - b. Investasi dan Pariwisata
 - c. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Ketentraman dan Ketertiban;
6. Reformasi Birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Girisubo

Perumusan tujuan dan sasaran Kapanewon Girisubo didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Girisubo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Kapanewon Girisubo. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kapanewon Girisubo

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome)
1	Reformasi birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon
2		Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD
3		Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat	Jumlah potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Kapanewon

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan dengan sasaran Kapanewon Girisubo dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Kapanewon Girisubo

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Tujuan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayananan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan kapanewon tahun 2026	95,01
		Indeks kualitas pelayanan kapanewon tahun 2026	80,08 (A)
2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	10

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Kapanewon

Tabel 3.3
Sasaran Kapanewon Girisubo

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target sasaran Tahun 2024
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	95,01

2	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	80,08(A)
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	10

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Kapanewon

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kapanewon Girisubo, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Girisubo

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,01 %

Sumber : SE Bupati Gunungkidul nomor : 350/KPTS/2021

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEPANEWON GIRISUBO

Sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa penentuan program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah haruslah mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi umum wilayah yang ada sekarang maupun proyeksi ke masa depan, Visi dan Misi, berikut tujuan dan sasarannya, dan tidak kalah pentingnya faktor strategi dan kebijakan yang diambil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

Hal hal yang menjadi prioritas dan titik tekan dari program dan kegiatan di Kapanewon Girisubo diupayakan untuk selaras dengan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala daerah yang telah dielaborasi menjadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2021- 2026.

Acuan ini penting agar pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan dapat lebih terarah, terinci dan terukur, untuk itulah perlu juga dibuat matrik rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matrik tersebut memuat komponen kebijakan, program indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Matriks ini menjadi acuan dan pedoman bagi Kapanewon Girisubo dalam menyusun rencana kerja bagi satuan kerja Kapanewon dan untuk lebih memudahkan dalam pembagian alur kerja maka, matrik berikut akan dibagi menjadi 3 bagian besar yakni program PD, Program lintas PD, program kewilayahan.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai melakukan penataan dan penyederhanaan program dan kegiatan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar Perangkat Daerah, serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Disamping itu penyederhanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mempertajam fokus Perangkat Daerah untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan Kapanewon Girisubo dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan desa. Program dan kegiatan tersebut, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan, juga disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo, sebagaimana disepakati dalam forum gabungan Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo yang sudah masuk pada data base Bappeda beserta tolok ukur kinerja (TUK).

Renja Kapanewon Girisubo tahun 2024 terdiri dari 8 Program dan mencakup 17 kegiatan. Dari program-program tersebut, 1 program di antaranya merupakan program yang menysasar pada internal Kapanewon Girisubo yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 7 program merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah Kapanewon Girisubo.

Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp. 1.961.751.551,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Hasil dari perumusan program dan kegiatan Kapanewon Girisubo tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1	Nilai AKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kapanewon meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman dan dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sedangkan Program dan Kegiatan dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan yakni :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Ket
1	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Sekretariat
2		- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jawatan Pelayanan Umum dan Jawatan Sosial
3		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Jawatan Kemakmuran
4		- Program Koordinasi Ketentraman dan dan Ketertiban Umum	Jawatan Keamanan dan Jawatan Sosial
5		- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jawatan Keamanan
6		- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan
7		- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jawatan Sosial
8		- Program Penyelenggaraan	Jawatan Kemakmuran

		Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
--	--	--	--

Rincian Rencana Perubahan Pembiayaan Aparatur Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Belanja Tidak Langsung Gaji Kapanewon Girisubo
Tahun 2024

REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok/Uang Representasi	1,00	Tahun	718.078.193	718.078.193
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	1,00	Tahun	78.854.928	78.854.928
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	1,00	Tahun	82.880.000	82.880.000
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	1,00	Tahun	12.670.000	12.670.000
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	1,00	Tahun	41.569.080	41.569.080
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,00	Tahun	5.040.894	5.040.894
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	1,00	Tahun	8.456	8.456
JUMLAH RENCANA PEMBIAYAAN					939.101.551

Untuk mencapai keberhasilan Program dan Kegiatan di Kapanewon Girisubo diperlukan Program Pendukung yaitu :

Tabel 4.4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	OPD
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Kapanewon Girisubo
	- Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		
	- Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	OPD
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah	59.250.000	Kapanewon Girisubo
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	967.849.051	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.880.000	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.630.500	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.425.600	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.371.400	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.200.000	
	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	448.730.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.075.000	
	- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.550.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.870.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.750.000	

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	OPD
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.170.000	

Berikut ini kami sampaikan tabel 4.5 tentang Prioritas, Sasaran Daerah Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.5
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Kegiatan	Pagu Murni	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10S
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	80,08	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah	59.250.000	Kapanewon Girisubo
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	967.849.051	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.880.000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.630.500	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
							Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	31.425.600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.371.400	
		Kualitas Pelayanan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	95,01	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.200.000	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	448.730.000	
					7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.075.000	
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.550.000	
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.870.000	
					7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.750.000	
					7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.170.000	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2				100.000.000,00					100.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			100.000.000,00					100.000.000,00	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana (%)	100	100.000.000,00					100.000.000,00	Kapanewon Girisubo
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah layanan kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Layanan)	1	100.000.000,00	(Girisubo, Girisubo)			1	100.000.000,00	Kapanewon Girisubo
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	100.000.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	100.000.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	100.000.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Kapanewon Girisubo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				35.000.000,00					0,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			35.000.000,00					0,00	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Yang Terlaksana (%)	100	35.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Masyarakat		0,00	Kapanewon Girisubo
4.01.04.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Layanan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan (Layanan)	1	35.000.000,00	(Girisubo, Girisubo)		Kelompok Masyarakat	1	-	Kapanewon Girisubo
4.01.04.5.03.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun (Dokumen)	4	35.000.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Masyarakat		-	Kapanewon Girisubo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7				1.691.751.551,00					2.687.149.570,00	
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			1.691.751.551,00					2.687.149.570,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100	1.154.406.551,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat		2.185.919.570,00	Kapanewon Girisubo
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	26	59.250.000,00	(Girisubo, Girisubo)		Masyarakat	30	67.200.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			49.970.000,00			Masyarakat		53.600.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	ASN, THL	2.00		
		Jumlah Dokumen Draft Renstra (Dokumen)	1	300.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN			
		Jumlah Dokumen Renja (Dokumen)	1	770.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Alokasi Umum	ASN			
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan (Dokumen)	1	770.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		Jumlah Hari THL Terfasilitasi (Hari)	247	48.130.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	THL			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN	2		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA (Dokumen)	1	670.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)	1	300.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.560.000,00			ASN		6.600.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN	17		
		Jumlah Dokumen E-Monev (Dokumen)	4	820.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		Jumlah Dokumen LKJIP (Dokumen)	1	920.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		Jumlah Dokumen Pengendalian Program Kegiatan (Dokumen)	12	820.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.300.000,00			ASN		2.800.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN, ASN dan Perencana Jasa Pelayanan ASN	4		
		Jumlah Dokumen Aset dan Persediaan (Dokumen)	2	1.200.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		Jumlah Dokumen SKM (Dokumen)	2	1.200.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN dan Perencana Jasa			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Jumlah Dokumen SOP (Dokumen)</i>	1	900.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)</i>	80.6	967.849.051,00	(Girisubo, Girisuko, Kec. Panggang)		ASN	80.6	1.984.179.570,00	Kapanewon Girisubo
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)</i>	182	939.101.551,00		DANA UMUM	ASN	224	1.955.754.570,00	Kapanewon Girisubo
		<i>Jumlah ASN yang terfasilitasi (Orang)</i>	182	939.101.551,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1	1.900.000,00			ASN	1	5.500.000,00	Kapanewon Girisubo
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun (Dokumen)</i>	1	1.900.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	13	26.847.500,00		DANA UMUM	ASN	13	22.925.000,00	Kapanewon Girisubo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan (Dokumen)</i>	12	2.400.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran (Dokumen)</i>	1	1.000.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		<i>Jumlah Hari THL Terfasilitasi (Hari)</i>	247	23.447.500,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	THL			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6	1.880.000,00	(Girisubo, Girisubo)		THL	6	3.700.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)</i>		1.880.000,00			THL		3.700.000,00	Kapanewon Girisubo
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	6		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN	6.00		
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	6	1.880.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Layanan)</i>	6	47.630.500,00	(Girisubo, Girisubo)		ASN	6	58.140.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	4	2.511.000,00			ASN		2.520.000,00	Kapanewon Girisubo
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4	2.511.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN	4		
					(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<p><i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i></p> <p><i>Jumlah Laptop Terbeli (Unit)</i></p> <p><i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i></p> <p><i>Jumlah Printer Terbeli (Unit)</i></p>	12	10.080.000,00	(Girisubo, Girisubo)	<p><i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM</i></p> <p><i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DANA UMUM</i></p>	ASN	12	20.000.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<p><i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i></p> <p><i>Jumlah Hari THL Terfasilitasi (Hari)</i></p> <p><i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)</i></p>	4	22.789.500,00	(Girisubo, Girisubo)	<p><i>DANA UMUM</i></p> <p><i>DANA UMUM</i></p> <p><i>DANA UMUM</i></p>	ASN, THL	4	19.600.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4	3.047.000,00	(Girisubo, Girisubo)	<p><i>DANA UMUM</i></p>	ASN		7.700.000,00	Kapanewon Girisubo
				3.380.000,00			ASN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i> <i>Jumlah Dokumen Cetak dan Penggandaan (Paket)</i>	4 4	3.380.000,00	(Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM DANA UMUM	ASN ASN	4		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000,00			ASN		1.320.000,00	Kapanewon Girisubo
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)</i> <i>Jumlah Dokumen Surat Kabar (Dokumen)</i>	248 248	1.200.000,00	(Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM DANA UMUM	ASN ASN	248		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.700.000,00			ASN		2.000.000,00	Kapanewon Girisubo
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i> <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12 12	2.700.000,00	(Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM DANA UMUM	ASN ASN	12		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.970.000,00			ASN		5.000.000,00	Kapanewon Girisubo
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i> <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)</i>	12 12	4.970.000,00	(Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM DANA UMUM	ASN ASN	12		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-			ASN		-	Kapanewon Girisubo
		<i>Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana (Layanan)</i>	2		(Girisubo, Girisubo)		ASN	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	-	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN	0.00	-	Kapanewon Girisubo
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	-	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	0.00	-	Kapanewon Girisubo
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana (Laporan)	48	31.425.600,00	(Girisubo, Girisubo)		ASN	48	27.000.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	31.425.600,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN	48	27.000.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi yang Disediakan (Laporan)	12	1.200.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		Jumlah Laporan Penyediaan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24.465.600,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		Jumlah Laporan Penyediaan Sumber Daya Air yang Disediakan (Laporan)	12	5.760.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana (Unit)	66	46.371.400,00	(Girisubo, Girisubo)		ASN	66	45.700.000,00	Kapanewon Girisubo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			41.100.000,00			ASN		31.350.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertizinannya (Unit)	8		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN	8		
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua Terfasilitasi (Unit)	7	12.600.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat Terfasilitasi (Unit)	1	28.500.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			500.000,00			ASN		1.500.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN	30.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	500.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.900.000,00			ASN		5.650.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN	12.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	1.900.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.271.400,00			ASN		5.900.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN	5.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (POKIR) (Unit)	2	2.271.400,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			
		Jumlah Gedung Pelayanan Umum yang Dipelihara/Direhabilitasi (POKIR) (Unit)	0		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	ASN			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2 2	600.000,00 600.000,00	(Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM DANA UMUM	ASN ASN ASN	6.00	1.300.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana (Persentase)	100	453.930.000,00		DANA UMUM	ASN		341.542.500,00	Kapanewon Girisubo
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terselenggara (Laporan)	3	5.200.000,00	(Girisubo, Girisubo)		ASN ASN	4	11.000.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) Jumlah Partisipasi Hari Jadi Kabupaten (Kali) Partisipasi Porda (Kali)	3 1 1	5.200.000,00 1.850.000,00 500.000,00	(Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM	ASN ASN ASN ASN	3	11.000.000,00	Kapanewon Girisubo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						DANA UMUM	ASN			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peringatan Hari-Jadi Kapanewon Girisubo Terlaksana (Kali)	1	2.850.000,00	(Girisubo, Girisubo)		ASN		330.542.500,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	6	448.730.000,00	(Girisubo, Girisubo)		ASN	6		
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	414.847.500,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM DANA UMUM	ASN	6	295.542.500,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Bansos Tersalurkan (Kali)	1	500.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DANA UMUM	Masyarakat			
		Jumlah Bansos Tersalurkan (PIWK) (KK)	68	312.000.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DANA UMUM	Kelompok Masyarakat			
		Jumlah Belanja Dropping Air (Unit)	445	75.650.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Masyarakat			
		Jumlah Hari THL Terfasilitasi (Hari)	247	23.447.500,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	THL			
		Jumlah Kesepakatan Penanggulan Kemiskinan TKPK (Kesepakatan)	0		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelompok Masyarakat			
		Jumlah Monev Kesos Terfasilitasi (Kali)	1	1.150.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Masyarakat			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<p><i>Jumlah Pelatihan Entri Data SID Tertaksana (Kali)</i></p> <p><i>Jumlah Penanganan Stunting Tertaksana (Kali)</i></p> <p><i>Jumlah PMKS Tertangani (Kali)</i></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>0</p>	<p>1.300.000,00</p> <p>800.000,00</p>	<p>(Girisubo, Girisubo)</p> <p>(Girisubo, Girisubo)</p> <p>(Girisubo, Girisubo)</p>	<p>DANA UMUM</p> <p>DANA UMUM</p> <p>DANA UMUM</p>	<p>Kelurahan</p> <p>Kelompok Masyarakat</p> <p>Masyarakat</p>		35.000.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<p><i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i></p> <p><i>Jumlah Hari THL Terfasilitasi (Hari)</i></p> <p><i>Jumlah Pelayanan Umum Tertaksana (Laporan)</i></p>	<p>12</p> <p>247</p> <p>12</p>	<p>33.882.500,00</p> <p>24.682.500,00</p> <p>9.200.000,00</p>	<p>(Girisubo, Girisubo)</p> <p>(Girisubo, Girisubo)</p> <p>(Girisubo, Girisubo)</p>	<p>DANA UMUM</p> <p>DANA UMUM</p> <p>DANA UMUM</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat, THL</p> <p>THL</p> <p>Masyarakat</p>	<p>12</p>	68.800.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<p><i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi (Persentase)</i></p> <p><i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terselenggara (Laporan)</i></p>	<p>100</p> <p>2</p>	<p>17.625.000,00</p> <p>12.075.000,00</p>	<p></p> <p>(Girisubo, Girisubo)</p>	<p>DANA UMUM</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat</p>	<p></p> <p>2</p>	56.300.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.03.2.01.0002	Simkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			9.725.000,00			Masyarakat		53.900.000,00	Kapanewon Girisubo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6		(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Kelompok Masyarakat, Kelurahan	5.00		
		Jumlah Bimtek Perencanaan (PWK) (Kali)	0		(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Masyarakat			
		Jumlah Kesepakatan Musrenbang (Kesepakatan)	1	3.500.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelompok Masyarakat			
		Jumlah Kesepakatan Pra-Musrenbang (Kesepakatan)	1	2.200.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelompok Masyarakat			
		Jumlah Laporan Aset Program Kelurahan (Laporan)	1	1.100.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan			
		Jumlah Laporan Penyusunan RKP/Kal (Laporan)	1	1.325.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan			
		Jumlah Monev Dana Desa Terlaksana (Desa/ Kelurahan)	8	500.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan			
		Jumlah Pelatihan E-Musren Terlaksana (Kali)	1	1.100.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.350.000,00			Kelurahan		2.400.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10		(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan	11.00		
		Jumlah Dokumen Profil Kelurahan (Desa/ Kelurahan)	8	1.250.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan			
		Jumlah Lomba Desa Tingkat Kabupaten Terlaksana (Desa/ Kelurahan)	1	1.100.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terselenggara (Indeks)</i>	8	5.550.000,00	(Girisubo, Girisubo)		Kelurahan	8	12.500.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) Jumlah Pembinaan Karangtaruna Tertaksana (Desa/ Kelurahan) Jumlah Rapat PKK Kapanewon Kapanewon (Desa/ Kelurahan)</i>	8 0 8	3.000.000,00	(Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM	Kelurahan Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat	16.00	6.000.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) Jumlah Partisipasi dalam Pameran Hari Jadi Kabupaten (Kegiatan) Jumlah Partisipasi Hari Jadi Kapanewon (Kegiatan)</i>	2 1 1	2.550.000,00 1.750.000,00 800.000,00	(Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM	Kelompok Masyarakat IKM IKM IKM	2	6.500.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Program koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi (Persentase)</i>	100	3.870.000,00		DANA UMUM	IKM		5.000.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.870.000,00			IKM		5.000.000,00	Kapanewon Girisubo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terlaksana (Laporan)</i>	8	1.000.000,00	(Girisubo, Girisubo)		IKM	2	2.600.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i> <i>Jumlah Koordinasi PEKAT Terlaksana (Kegiatan)</i>	1 1	1.000.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelompok Masyarakat	1		Kapanewon Girisubo
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)</i> <i>Jumlah Safari Tarawih Terlaksana dengan Baik (Desa/ Kelurahan)</i>	7 7	2.870.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelompok Masyarakat	7	2.400.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi (Persentase)</i> <i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)</i>	100 45	41.750.000,00		DANA UMUM	Kelompok Masyarakat		46.100.000,00	Kapanewon Girisubo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.05.2.01.0001	<p>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p><i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)</i></p> <p><i>Jumlah Lomba Pengagungan Terlaksana (Desa/ Kelurahan)</i></p> <p><i>Jumlah Paskibraka Terbina dengan Baik (Orang)</i></p>	75.00	33.650.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Kelompok Masyarakat	75.00	35.000.000,00	Kapanewon Girisubo
7.01.05.2.01.0005	<p>Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p><i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)</i></p> <p><i>Jumlah Konflik KDRT Tertangani (Kegiatan)</i></p>	1	900.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelompok Masyarakat	1	1.100.000,00	Kapanewon Girisubo
			1	900.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelompok Masyarakat			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	7.200.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM DANA UMUM	Masyarakat Masyarakat	2	10.000.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon (Dokumen)	2	5.700.000,00	(Girisubo, Girisubo)		Masyarakat			
		Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu (Kegiatan)	1	1.500.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana (Persentase)	100	20.170.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat		39.787.500,00	Kapanewon Girisubo
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (Dokumen)	43	20.170.000,00	(Girisubo, Girisubo)		Masyarakat	8	39.787.500,00	Kapanewon Girisubo
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			1.100.000,00			Masyarakat		1.500.000,00	Kapanewon Girisubo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Monev Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Desa/ Kelurahan)	8	2.200.000,00	(Girisubo, Girisubo)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DANA UMUM	Kelompok Masyarakat			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Penyusunan dan Monev APBKal (Desa/ Kelurahan)	8	1.100.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kalurahan		3.500.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) Peningkatan Kapasitas Pamong (Desa/ Kelurahan)	1	1.650.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan	2.00		
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) Peningkatan Kapasitas BPK (Dokumen)	8	1.650.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan		1.500.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) Peningkatan Kapasitas BPK (Dokumen)	8	1.120.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan	8		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) Dokumen Satgas Siaga Bencana (Dokumen) Pembinaan Linmas (Dokumen)	2	4.100.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelurahan	2	7.870.000,00	Kapanewon Girisubo
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) Dokumen Satgas Siaga Bencana (Dokumen) Pembinaan Linmas (Dokumen)	1	2.050.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelompok Masyarakat			
			1	2.050.000,00	(Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM	Kelompok Masyarakat			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen) Jumlah Dokumen Koordinasi Tata ruang (Dokumen)	1 1	1.200.000,00 1.200.000,00	(Girisubo, Girisubo) (Girisubo, Girisubo)	DANA UMUM DANA UMUM	kelompok masyarakat kelompok masyarakat	1	1.500.000,00	Kapanewon Girisubo
J U M L A H				1.826.751.551,00					2.787.149.570,00	

LAMPIRAN DATA PENERIMA PROGRAM/KEGIATAN
PAGU INDIKATIF WILAYAH KAPANEWON (PIWK)
TAHUN 2024

KAPANEWON : GIRISUBO

No	Nama Kepala Rumah Tangga	No. RTS	Alamat Lengkap	Kalurahan	Keterangan
1	WARSINEM	3403051005000443	Nglindur wetan RT 01 RW 01	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
2	SARMINTO	3403051005000532	Sumur RT 07 RW 02	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
3	PAINEM	3403051005000417	Gangsalan kidul RT 20 RW 05	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
4	SARIYAH	3403051005000470	Gangsalan lor RT 21 RW 06	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
5	TUPAN	3403051005000361	Gangsalan lor RT 21 RW 06	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
6	SARTINI	3403051005000511	Gangsalan lor RT 22 RW 06	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
7	EVI MAHANANI	3403060003001144	Sumur RT 07 RW 02	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
8	SUBUR RIYADI	3403051005000182	Gangsalan kidul RT 19 RW 06	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
9	TUGIMIN	3403051005000237	Gangsalan kidul RT 19 RW 06	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
10	GIYARNO	3403051005000432	Gangsalan kidul RT 20 RW 06	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
11	KATIYEM	3403051005000244	Tekik RT 28 RW 08	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
12	PRAPTO	3403051005000408	Ngepoh RT 16 RW 04	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
13	YADI PRANOTO	3403051005000526	Nglindur kulon RT 11 RW 03	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
14	SUKIMIN	3403051005000107	Ngepoh RT 14 RW 04	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
15	PAIDIONO	3403051005000158	Nglindur wetan RT 01 RW 01	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
16	WARSONO	3403051005000178	Nglindur kulon RT 10 RW 03	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
17	WASIRIN	3403051005000017	Nglindur kulon RT 11 RW 03	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
18	ESTRI RAHAYU	3403051005000105	Nglindur wetan RT 04 RW 01	Nglindur	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan
19	SAKIRAN	3403051007000188	Padukuhan : Karangtengah RT 02/RW 04 Pucung, Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin

20	NUR COLIS	3403051007000338	Padukuhan : Karangtengah RT 03/RW 04 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
21	SUGIYATO	3403051007000031	Padukuhan : Ngreyung RT 02/RW 02 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
22	SRINEM	3403051007000303	Padukuhan : Ngreyung RT 02/RW 02 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
23	PAIKEM	3403051007000548	Padukuhan : Ngreyung RT 02/RW 02 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
24	TIJEM	3403051007000181	Padukuhan : Nujo RT 03/RW 08Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
25	NGADIMIN	3403051007000452	Padukuhan : Nujo RT 03/RW 08Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
26	WASILAN	3403051007000473	Padukuhan : Nujo RT 03/RW 08Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
27	TUSINO	3403051007000034	Padukuhan : Pakelkopek RT 01/RW 06 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
28	KARMI	3403051007000199	Padukuhan : Pakelkopek RT 02/RW 06 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
29	SUWARDI	3403051007000206	Padukuhan : Pakelkopek RT 02/RW 06 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
30	TUGIYO	3403051007000360	Padukuhan : Pakelkopek RT 03/RW 06 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
31	NGATINI	3403161711073388	Padukuhan : Wonotoro RT 04/RW 09 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
32	SUKIRAH	3403051007000200	Padukuhan : Wonotoro RT 03/RW 09 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
33	EDI SUGIYARNO	3403051007000073	Padukuhan : Wonotoro RT 03/RW 09 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
34	WIDODO	3403051007000144	Padukuhan : Wonotoro RT 03/RW 09 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
35	SUGENG	3403161711073719	Padukuhan : Wonotoro RT 04/RW 09 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
36	SAMAN	3403051007000192	Padukuhan : Wotawati RT 02/RW 01 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
37	BAHRON	3403051007000458	Padukuhan : Wotawati RT 03/RW 01 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
38	WAKIM	3403161005100015	Padukuhan : Wotawati RT 03/RW 01 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
39	PAIKEM	3403051007000023	Padukuhan : Wotawati RT 04/RW 01 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
40	NGADI	3403051007000402	Padukuhan : Wotawati RT 04/RW 01 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
41	JUMADI	3403051007000482	Padukuhan : Wotawati RT 04/RW 01 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin

42	KASTO	3403051007000542	Padukuhan : Wotawati RT 04/RW 01 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
43	NARTO SUWITO	3403051007000264	Padukuhan : Benge 02/RW 05 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
44	PONIRIN	3403051007000515	Padukuhan : Benge 02/RW 05 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
45	SUNARTO	3403051007000313	Padukuhan : Benge 02/RW 05 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
46	SATIRAN	3403051007000341	Padukuhan : Pucung RT 01/RW 07 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
47	PURMANTO	3403051007000422	Padukuhan : Pucung RT 01/RW 07 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
48	SAMIJEM	3403051007000325	Padukuhan : Pucung RT 01/RW 07 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
49	AMIN SLAMETO	3403051007000573	Padukuhan : Pucung RT 01/RW 07 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
50	TUMIRAH	3403051007000455	Padukuhan : Pucung RT 01/RW 07 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
51	SUMINTA	3403051007000414	Padukuhan : Pucung Rt 01/RW 07 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
52	SUTADI	3403051007000170	Padukuhan : Pucung Rt 01/RW 07 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
53	SUGITO	3403051007000228	Padukuhan : Pucung Rt 01/RW 07 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
54	PRIYONO	3403051007000049	Padukuhan : Pucung Rt 01/RW 07 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
55	RUKINAH	3403051007000530	Padukuhan : Pucung Rt 01/RW 07 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
56	KASTOMO	3403051007000541	Padukuhan : Traju 01/RW 03 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
57	MISINAH	3403051007000428	Padukuhan : Traju 01/RW 03 Pucung,Girisubo	Pucung	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
58	PAIT	3403051008000466	SONGBANYU II RW:3 RT:1	Songbanyu	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
59	SRIYANTO	3403051008000121	SONGBANYU II RW:3 RT:1	Songbanyu	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin
60	JIRAH	3403051008000206	SONGBANYU II RW:3 RT:1	Songbanyu	Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin

BAB V

PENUTUP

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul 2005-2025, khususnya pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun ketiga (2015-2021), dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, karena dokumen yang lebih tinggi yang bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan dokumen lain sebagai penjabaran secara operasional.

Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur dan akuntabel yang dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah apabila dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Ketaatan terhadap dokumen tersebut juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistensi kebijakan pembangunan.

Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girisubo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Girisubo Tahun 2024 disusun berpedoman pada RPJMD 2021-2026.

RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pada masing masing OPD.

Dokumen Renja ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, oleh karena itu hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah mendasarkan pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa evaluasi subjektif atas capaian kinerja program dan kegiatan. Kesulitan menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum mendapatkan solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan atau kondisi empiris pada saat program dan kegiatan dilaksanakan menjadi alternatif yang mungkin satu-satunya bagi kebutuhan informasi yang valid.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Kapanewon Girisubo Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kapanewon Girisubo sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka koordinasi perencanaan pembangunan, dilakukan penyempurnaan Renja PD Tahun 2024.
3. Organisasi Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dan evaluasi tersebut meliputi pencapaian sasaran dan target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah wajib melaporkan hasil-hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala kepada Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Rencana tidak lanjut

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul adalah Program Tahunan Kapanewon Girisubo yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kapanewon Girisubo.

Renja Kapanewon Girisubo selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kapanewon Girisubo.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan, dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kapanewon Girisubo, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Wonosari,
KAPANEWON GIRISUBO,

SLAMET WINARNO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Tanjungsari Tahun 2021-2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Tanjungsari Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari tahun 2024 juga tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari tahun 2022, sebagai bahan pertimbangan.

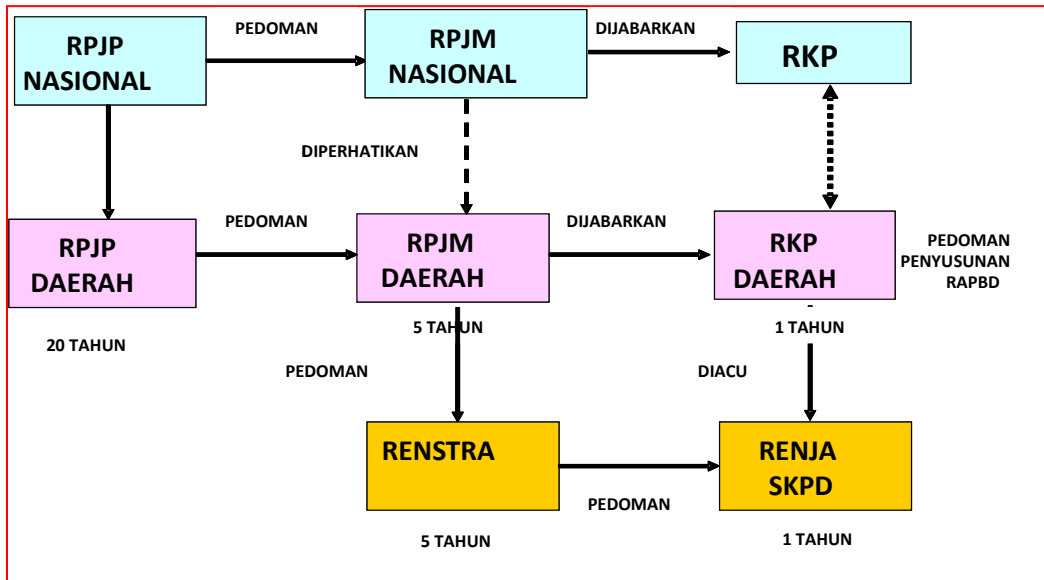
Perubahan Renstra Kapanewon Tanjungsari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas, maka perlu segera disusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 bagian ketujuh paragraf kedua pasal 126 sampai dengan pasal 130.

Penyusunan Renja PD dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja PD, tahap pelaksanaan forum PD, dan tahap penetapan renja PD. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya antara lain :

1. Renja PD dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja PD, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya sesuai dengan Program Prioritas RKPD.
2. Renja PD dengan Renstra PD, artinya Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L dan PD Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja PD juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 052/5869 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2024

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Good Governance).

Maksud penyusunan Rancangan Renja Kapanewon Tanjungsari adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran serta mempunyai fungsi :

1. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari tahun 2021-2026 dalam rencana program prioritas;
2. Mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegritaskan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kapanewon Tanjungsari yang memuat arah kebijakan di Kapanewon Tanjungsari;
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan satu tahun ke depan;

5. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari disusun untuk menjadi dasar pijakan dan gambaran rencana pembangunan Kapanewon Tanjungsari dalam tahun 2024 yang akan dilaksanakan melalui unit-unit kerja di dalamnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.

Agar pelaksanaan pembangunan Kapanewon Tanjungsari tahun 2024 lebih terarah dan fokus untuk mencapai prioritas dan sasaran sesuai dengan tema pembangunan tahun 2024 adalah :

“Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan Renja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2024 ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON TANJUNGSARI

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Tanjungsari
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Tanjungsari
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Tanjungsari
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON TANJUNGSARI

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Tanjungsari

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON TANJUNGSARI

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA KAPANEWON TANJUNGSARI

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2022 dan Capaian Renstra 2023
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Tanjungsari Tahun 2023 merupakan Renja tahun ketiga yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renja Tahun 2022 telah dapat terakomodasi dalam DPA 2022, sehingga program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Tanjungsari Tahun 2022 sejumlah 8 program yang terbagi dalam 18 kegiatan dan 44 subkegiatan

Dalam rangka memperbaiki kinerja PD Kapanewon, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan atau menjadi kewenangan kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk PD Kapanewon. Kedepan perlu dirumuskan kembali kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagian tugas dan atau wewenang Bupati kepada Panewu, agar lebih jelas tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kapanewon sebagai PD, apalagi pada tahun 2015 mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka tugas yang diemban oleh Kapanewon akan semakin berat khususnya dalam hal pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada PD Kapanewon.

Adapun pada TA 2022 sampai dengan Tri wulan ke-3, capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target Rp 2.193.496.382,00 realisasi senilai Rp 1.646.439.667,00 tingkat realisasi 75,06 %. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dari target Rp 100.000.000,00, realisasi senilai Rp 100.000.000,00 tingkat realisasi 100,00 %. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan, dari target Rp 25.970.000,00, realisasi senilai Rp 20.020.000,00, tingkat realisasi 77,09 %. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari target Rp 424.577.500,00 realisasi senilai Rp 375.854.000,00 tingkat realisasi 88,52 %. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari target Rp 160.330.000,00 realisasi senilai Rp 146.216.000,00 tingkat realisasi 91,20 %. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dari target Rp 8.800.000,00 realisasi senilai Rp 4.000.000,00 tingkat realisasi 45,45%. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari target Rp 46.620.000,00 realisasi senilai Rp 44.920.000,00 tingkat realisasi 96,35 %. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dari target Rp 122.000.000,00 realisasi senilai Rp 116.082.500,00 tingkat realisasi 95,15 %.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 Kapanewon Tanjungsari dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
 Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Tanjung Sari tahun 2022		Target program/kegiatan (Renja Kapanewon Tanjung Sari tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Kapanewon Tanjung Sari Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Renja PD	5	1	1	1	1	3	60
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	5	1	1	1	1	3	60

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
	Jumlah Dokumen ROPK	5	1	0	0	0	1	0	1	1	20
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
	Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
	Jumlah Dokumen Monev	20	4	4	4	4	4	100	4	12	60
	Jumlah Dokumen TEPPA	60	12	12	12	12	12	10	12	36	60
	Jumlah Dokumen LKJIP	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Jumlah Dokumen RTP/SPIP	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
	Jumlah Dokumen IKM	10	2	2	2	2	2	100	2	6	60
	Jumlah Dokumen SOP	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
	Jumlah Dokumen Aset	60	12	12	12	12	12	100	12	36	60
	Jumlah Dokumen Persediaan	60	12	12	12	12	12	100	12	36	60
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah										

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		70	14	14	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah bulan terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	60	12	12	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah hari Terfasilitasinya Tenaga Administrasi Keuangan	1235	248	248	248	248	248	100	248	744	60,24
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara dengan baik										
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	97	17	18	18	18	18	100	6	53	54,64
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
		Persentase Administrasi Umum kapanewon Terfasilitasi										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

	Jumlah Komponen Kelistrikan Tersedia	30	8	6	6	6	100	3	20	66,67
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	60	12	12	12	12	100	12	60	60
	Jumlah Komputer Terbeli	16	3	2	2	2	100	2	7	43,75
	Jumlah Laptop Terbeli	7	0	1	1	1	100	1	2	28,57
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Yang Terbeli	60	12	12	12	12	100	12	36	60
	Jumlah Dispenser Yang Terbeli	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Springbad Terbeli	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan										
	Jumlah Barang cetakan	30	6	6	6	6	100	6	18	60
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy	49015	8000	9015	9015	9015	100	1000	26030	53,11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
	Jumlah tagihan Surat kabar	60	12	12	12	12	100	0	36	60
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	Jumlah Peserta Rapat Yang Diberikan Makan, Minum, Snack Tersedia Untuk Rapat	1200	240	240	240	240	100	360	720	60
	Jumlah Konsultasi Pada Perangkat Daerah Kabupaten	130	0	26	26	26	100	75	52	40
	Jumlah Monitoring Pada Pemerintah Kabupaten	154	0	34	34	34	100	34	68	44,16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana									
Pengadaan Mebel										
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	0	14	14	14	100	6	14	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	Jumlah Filling Cabinet Terbeli	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	Jumlah LCD Proyektor Terbeli	2	0	1	1	1	100	1	2	50

	Jumlah Sound System Terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Printer Terbeli	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fokus Screen/Layar LCD Projector terbeli	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Printer Dot Metrik Terbeli	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Scanner yang Terbeli	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana																	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air, dan Listrik																	
	Jumlah Rekening Listrik Yang Terbayar (2 Rekening x 12 Bulan)	120	24	24	24	24	24	24	24	100	24	72	60					
	Jumlah Rekening Air Yang Terbayar (1 Rekening x 12 Bulan)	60	12	12	12	12	12	12	12	100	12	36	60					
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana																	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	Jumlah Paket Pemeliharaan Mobil Dinas	5	1	1	1	1	1	1	1	100	1	3	60					
	Jumlah Mobil dinas Yang Terbayar Pajaknya	5	1	1	1	1	1	1	1	100	1	3	60					
	Jumlah Paket Pemeliharaan Motor Dinas	40	8	8	8	8	8	8	8	100	8	24	60					

		Jumlah Motor Dinas Yang Terbayar Pajaknya	40	8	8	8	100	8	24	60
		Jumlah Hari Terfasilitasinya Tenaga Pengemudi	1235	248	248	100	0	744		60,24
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Personil Komputer Terfasilitasi Pemeliharaannya	41	4	5	100	4	14		34,15
		Jumlah Laptop Terfasilitasi Pemeliharaannya	28	7	5	100	3	17		60,71
		Jumlah Mesin Ketik Terfasilitasi Pemeliharaannya	5	1	1	100	1	3		60
		Jumlah Printer Terfasilitasi Pemeliharaannya	39	5	7	100	8	19		48,72
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Hari Terfasilitasi Keamanan Gedung Kantor	1826	365	365	100	365	1095		59,97
		Jumlah sewa Rumah/Gedung Kantor	16	0	0	0	16	0		0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Persentase Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan terlaksana								
	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
		Jumlah Cabang Olahraga Yang Terbina	5	1	1	100	1	3		60

		5	1	0	0	0	1	0	0	1	1	14,29
	Jumlah Kelompok Seni Yang Dibina dan Dipentaskan Pada Event Budaya			0	0	0	1	0	0	1	1	14,29
	Jumlah Kesepakatan Partisipasi Peringatan hari Jadi Gunungkidul	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan											
	Persentase Jumlah Layanan Yang Diberikan Kepada Masyarakat											
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Pelayanan Standar Minimal di Kecamatan	25	5	5	5	5	5	100	5	15	60	
	Jumlah Kesepakatan Pelaksanaan Update Data SID/ SIKAB	25	5	5	5	5	5	100	5	15	60	
	Jumlah Kesepakatan Penanggulangan Kemiskinan TKPK	25	5	5	5	5	5	100	5	15	60	
	Dokumen Hasil Monev Bidang Kesejahteraan Sosial	25	5	5	5	5	5	100	5	15	60	
	Jumlah bantuan Air Bersih Kepada Masyarakat	830	273	285	285	285	285	100	145	843	101,57	
	Jumlah KK Yang Memperoleh Bantuan Jamban Sehat (PIWK)	47	47	47	47	47	47	100	18	141	300	
	Jumlah KK Yang Memperoleh Bantuan Septic tank (PIWK)	15	15	15	15	15	15	100	11	45	300	
	Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											

			150	30	30	30	30	30	100	30	90	60
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurusan Izin IUMK										
		Jumlah Layanan Kepada masyarakat Yang terselesaikan	11500	2300	2300	2300	2300	2300	100	2300	6900	60
		Jumlah Peserta Pembinaan/Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum	150	30	30	30	30	30	100	30	90	60
		Jumlah Hari Terfasilitasinya Tenaga Pengelola Data Pelayanan Umum	1235	0	247	247	247	247	100	248	491	40
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi										
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
		Persentase Kegiatan Perberdayaan Desa Terfasilitasi										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
		Jumlah Kelurahan Terfasilitasi Penyusunan RPKal	25	5	5	5	5	5	100	5	3	12
		Jumlah Kelurahan Yang Terfasilitasi Penyusunan RPJMkal	5	1	1	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	25	5	5	5	5	5	100	5	15	60
		Jumlah Dokumen Usulan Rencana Kegiatan (DURP/MUSRENBANG)	30	6	6	6	6	6	100	5	18	60
		Pembinaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Secara Aplikasi	175	35	35	35	35	35	100	35	105	60
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah											

	Kecamatan		5	1	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Pemdamping Pelaksanaan Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten									
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										
		Jumlah Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
		Persentase Terfasilitasinya Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah									
		Jumlah Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kapanewon Yang Terfasilitasi									
	Peningkatan Kapasitas Lembags Kemasyarakatan										
		Jumlah Peringatan Hari Ibu	4	0	0	0	0	0	1	0	0
		Jumlah Peringatan Hari Kartini	4	1	0	0	0	0	0	1	25
		Jumlah Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK	60	9	12	12	12	100	12	33	55
		Jumlah Kesepakatan Penanganan Pencegahan Pernikahan Usia Anak	5	1	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Kesepakatan Penanganan Kepemudaan dan Karang Taruna	4	1	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Kesepakatan Forum Anak	5	0	1	1	1	100	1	2	40
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5	1	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Yang Dikirim Pada Pameran Pembangunan/Pameran Industri	5	1	1	1	1	100	1	3	60

	UMUM																				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrangan dan Keteriban Umum Yang Terfasilitasi																			
		Jumlah Kegiatan Peringatan HUT RI Yang Terfasilitasi Pelaksanaanya	10	0	2	2	2	100	2	4	40										
		Jumlah pasukan Pengibar Bendera Yang Terlatih	350	6	70	70	100	75	146	41,71											
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																				
		Jumlah Kesepakatan Koordinasi FORKOMPIMKAP	5	1	1	1	100	1	3	60											
		Jumlah Patroli Terpadu Bersama FORKOMPIMKAP	25	5	5	5	100	5	15	60											
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa Terlaksana																			
	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah layanan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana																			

Kalurahan											
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
		4	1	0	0	0	1	0	1	1	25
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa											
		180	45	45	45	45	20	100	135	75	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa											
		25	5	5	5	5	5	100	15	60	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
		250	50	50	50	50	25	100	150	60	
		250	50	50	50	50	25	100	150	60	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga											
		25	5	5	5	5	5	100	15	60	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendeayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan											

	Pengasan Batas Desa	Jumlah Kesepakatan Koordinasi Tata Ruang Kalurahan	25	5	5	5	5	100	5	15	60
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Budaya									
	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Jumlah Layanan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya									
		Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat									
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Peringatan Hari Keistimewaan DIY	10	0	1	1	1	100	1	2	20
		Jumlah Gelar Seni Budaya Dalam rangka Peringatan HUT RI Kemerdekaan RI	10	0	1	1	1	100	2	2	20
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan									
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Layanan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan									
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksana									
	Pelaksanaan Kelembagaan Asli										
		Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Kalurahan	4	0	1	1	1	100	2	2	20
		Rencana program Kegiatan Keistimewaan Pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	8	0	2	2	2	100	2	4	50

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Tanjungsari

Kapanewon Tanjungsari sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, susunan organisasi Kapanewon mengalami penambahan unit kerja, yakni Seksi Pelayanan Umum. Pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu/ Pelayanan Terpadu di Kapanewon.

Jenis pelayanan unit pelayanan Kapanewon Tanjungsari meliputi:

1. Pelayanan Pengurusan Pindah;
2. Pelayanan Pengurusan SKTM;
3. Pengurus KIS/BPJS;
4. Pengurus Beda Nama;
5. Pengurus Beda Tanggal;
6. Pelayanan Pengurusan IMB;
7. Pelayanan Pengesahan Pinjam Pegawai;
8. Pelayanan Pengurusan IUMKM;
9. Pelayanan KTP;
10. Pelayanan KK;
11. Pelayanan Legalisir (Despensasi Nikah, Keterangan Waris, Akta Kematian);
12. Rekomendasi Ijin Keramaian.

Capaian kinerja pelayanan Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2022 pada umumnya sudah dapat berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan Kapanewon Tanjungsari sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Tanjung Sari
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKM, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IMM)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Indeks Pelayanan	Indeks	81,5	82	82,5	83	79	*79	83,5	84		
2	Kapanewon Nilai AKIP	Nilai	79	80,5 (A)	81 (A)	81,5 (A)						
3	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	9	10	11	11	9	10	11	11		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Tanjungsari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja kecamatan Tugas Kecamatan. Dalam peraturan tersebut, telah diuraikan tugas dari masing-masing jabatan, struktural organisasi kecamatan. Sesuai dengan ketentuan tersebut untuk jabatan struktural telah terisi seluruhnya, namun demikian jumlah personil yang ada sekarang ini masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sehingga berakibat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal. Saat ini jumlah pegawai di PD Kapanewon Gedangsari sebanyak 18 orang PNS, dengan rincian : 1 pegawai eselon III.a 1, pegawai eselon III.b, 5 pegawai eselon IV.a, 2 pegawai eselon IV.b, dan Staf 9. Kondisi ini seb enarnya tidak mencukupi dari segi jumlah maupun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Kapanewon Tanjungsari sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 bisa dikatakan cukup baik. Target-target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Meski ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait dengan kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan kepada kapanewon. Meskipun demikian, justru ada beberapa kegiatan baru yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian target dimaksud. Hal ini dikarenakan adanya standarisasi program dan kegiatan yang dapat atau boleh dilaksanakan oleh PD Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi seperti di atas menjadikan bahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagian wewenang dan tugas Bupati kepada Panewu di kemudian hari. Hal ini akan menjadi peluang bagi PD Kapanewon untuk lebih kreatif menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masa yang akan datang. Sejauh ini situasi dan kondisi yang demikian tidak terlalu berdampak pada pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Kapanewon. Namun secara makro bisa jadi pencapaian visi dan

misi Kabupaten Gunungkidul menjadi terganggu. Oleh karena itu perlu kebijakan strategis agar dapat mengoptimalkan kinerja PD Kapanewon pada masa yang akan datang.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 berpedoman pada program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Rancangan awal RKPD yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja PD termasuk Kapanewon Tanjungsari disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbangkal), dengan harapan akan mendapatkan berbagai masukan dari forum Musrenbang Kapanewon, Forum (gabungan) PD maupun Musrenbang Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rancangan awal Renja 2024 Kapanewon Tanjungsari telah dimutahirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

NO	Rancangan Awal RENJA PD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kapanewon Tanjungsari	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	100 Persen	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	100 Persen	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta	2 laporan	100.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Tanjungsari	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan hari Keistimewaan DIY	2 Laporan	100.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Tanjungsari	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan hari Keistimewaan DIY	2 Laporan	100.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	35.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 Persen	35.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	3 dokumen	35.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	3 dokumen	35.000.000	
	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	3 dokumen	35.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	3 Dokumen	35.000.000	
	KECAMATAN										
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.478.208.046	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.409.240.039	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		42.210.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		32.670.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	27.010.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.950.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	530.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	450.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	840.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	970.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	3.400.000	Koordinasi dan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kerja SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	1.870.000
Evaluasi Kinerja Daerah	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 laporan	4.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 laporan	3.060.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks administrasi keuangan perangkat daerah		1.227.288.646	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks administrasi keuangan perangkat daerah		1.225.768.639
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah bulan terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	252 Orang	1.195.568.146	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah bulan terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	252 Orang	1.195.568.146
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	780.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	29.970.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Dokumen	29.420.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah		8.700.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah		3.100.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	8.700.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Tangjungsari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	3.100.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.198.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Tanjungsari	Indeks Administrasi umum perangkat daerah	37.098.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.600.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	54.100.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19.406.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 paket	5.698.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4.292.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4.400.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.800.000	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.400.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		20.000.000	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.600.000
Pengadaan Mebel	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	8 Paket	0	Pengadaan Mebel	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	2 Unit	20.000.000	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	1.600.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Yang disediakan	210 Unit	0	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		13.140.900	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	13.140.900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	13.140.900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13.140.900

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	109.670.000	51 Unit	63.982.500	51 Unit	59.870.000	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	51 Unit	63.982.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63.982.500	51 Unit	63.982.500	Kapanewon Tanjungsari	63.982.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	63.982.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.800.000	23 unit	6.800.000	Kapanewon Tanjungsari	3.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	3.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	38.887.500	10 Meter	38.887.500	Kapanewon Tanjungsari	28.887.500	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	28.887.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	120.135.000	100 Persen	120.135.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.480.000	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	8.480.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	18.230.000	4 Laporan	18.230.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.480.000	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Laporan	8.480.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	101.905.000	4 Laporan	101.905.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	81.590.000	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	81.590.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	69.819.500	4 Laporan	69.819.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	55.384.500	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	4 Laporan	55.384.500
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	32.085.500	14 laporan	32.085.500	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	26.205.500	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	14 laporan	26.205.500
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.952.600	100 Persen	49.952.600	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.992.600	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100 Persen	24.992.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi		

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	31.492.600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi pemberdayaan desa	14.637.600
Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat Yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Tingkat kabupaten	8 Dokumen	Peningkatan Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat Yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Tingkat kabupaten	Kapanewon Tanjungsari	8 Laporan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	100 Laporan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	18.460.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		10.355.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Tanjungsari	5 Lembaga Kemasyarakatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Tanjungsari	5 Laporan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi	100 Persen	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6.750.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	9.100.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5.900.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Tanjungsari	2 Laporan
Koordinasi Penerapan dan Peraturan Daerah	Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.100.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		850.000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat yang Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kapanewon Tanjungsari	1 Laporan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	99.365.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 persen	50.430.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	indeks penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepada daerah		84.750.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	indeks penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepada daerah		50.430.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	84.750.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	39.610.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	14.615.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	10.820.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan kalurahan terlaksana	100 persen	49.475.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan kalurahan terlaksana	100 persen	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		49.475.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	5.100.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	2.640.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	20.100.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	6.630.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	6.050.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2.860.000
fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	1 Dokumen	3.775.000	fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	0 Dokumen	0

	fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa	1 Dokumen	3.500.000	fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa	1 Dokumen	1.125.000	
	Rekomendasi pengkakan dan pemberhentian perangkat desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 Dokumen	1.700.000	Rekomendasi pengkakan dan pemberhentian perangkat desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	2 Dokumen	790.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum	2 Dokumen	6.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum	2 Dokumen	1.700.000	
	fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	1.750.000	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	640.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1.500.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	460.000	
TOTAL										1.733.335.646	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan merupakan upaya untuk mencapai cita-cita dan gambaran warga masyarakat yang ingin membangun dan memajukan daerahnya. Usulan program meliputi pembangunan fisik maupun non fisik, pelaksanaan musrenbang Tingkat Kapanewon Tanjungsari yang dilaksanakan Tanggal 1 Februari 2024 ini forum untuk mempertemukan antara kebutuhan Masyarakat dan pemangku kepentingan Kapanewon Tanjungsari dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah pusat daerah pada tahun 2024.

Pada Tahun 2024 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Kapanewon maupun OPD Kabupaten Tahun 2024 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka dilakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan OPD Tahun 2024, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan usulan program kegiatan sesuai dengan program kegiatan OPD.

Usulan pemangku kepentingan secara rinci pada Tabel : 2.5

Tabel 2.5

Usulan dari Pemangku Kepentingan tahun 2024

Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
1	PIWK- Bimtek Pengelolaan Keuangan desa Yang Meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Penanggungjawaban Keuangan Desa	Kalurahan Banjararjo, Kapanewon Tanjung Sari Kab. Gunungkidul	Terlaksananya bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Terselenggara	0 Kali	0,00	0,00	PIWK

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang Kapanewon dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2019, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Kapanewon

Kapanewon Tanjungsari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan PD setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD. Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Tanjungsari

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat di tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
 Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan/Kapanewon Tanjungsari

NO	Peioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1.	Peningkatan Ekonomi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Nilai AKIP	Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon
2.	Reformasi Birokrasi			Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD
3.	Ekonomi : UMKM, Investasi, dan Pariwisata	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan

Tujuan Yang akan dicapai Kapanewon Tanjungarsi dalam Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table 3.2 berikut:
Tabel 3.2

Tujuan Kapanewon/Kecamatan Tanjungarsi

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Target
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas pelayanan kapanewon tahun 2026	83,00
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	12 potensi budaya ^a

Sasaran yang akan dicapai Kapanewon Tanjungarsi dalam Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :
Tabel 3.3

Sasaran Kapanewon Tanjungarsi

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)	Target Sasaran PD Tahun 2024
1.	Kinerja penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	83
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	81,5 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	11 potensi budaya

Tabel 3.4
 Indikator Kinerja Utama Kecamatan/Kapanewon Tanjungsari

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU 2024
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Indeks Pelayanan Kapanewon	83

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Kapanewon Tanjungsari yang direncanakan melalui Rancangan Renja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2024 tidak jauh berbeda dari Renja 2023, hal tersebut disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan wajib yang harus tetap dilaksanakan oleh Kapanewon Tanjungsari. Meskipun demikian ada beberapa kegiatan baru yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Selain menampilkan rencana program dan kegiatan tahun 2024 juga dapat dilihat perkiraan maju tahun 2025 dengan harapan bahwa pada tahun 2025 sudah dapat diketahui gambaran perkiraan pagu anggaran untuk Kapanewon Tanjungsari.

Rancangan Renja Kapanewon Tanjungsari tahun 2023 terdiri dari 8 Program dan mencakup 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Dari program-program tersebut, 7 program di antaranya merupakan program yang menysasar pada internal PD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 1 program merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan kalurahan di wilayah Kapanewon Tanjungsari. Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp1.733.335.646,00. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kapanewon Tanjungsari untuk Tahun 2024 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan RKPD khususnya dalam pagu anggaran. Hal ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun sebelumnya/tahun berjalan. Namun dalam perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai forum yang ada dan RKPD Kabupaten Gunungkidul, rancangan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian. Harapannya penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-aturan yang berlaku.

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Tanjungsari dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6			7	8	9
Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Keola Pemerintahan Meningkatkan	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	83	7	01	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kapanewon Tanjungsari
					7	01	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.480.000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.480.000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	81.590.000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	55.384.500	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.205.500	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.992.600	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.637.600	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.417.600	Kapanewon Tanjungsari

										0	0	201	0	0	0	0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.220.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	3	3	0	0	0	0	0	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.355.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	3	3	0	0	0	0	0	0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.385.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	3	3	0	0	0	0	0	0	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.970.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	4	4	0	0	0	0	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.750.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	4	4	0	0	0	0	0	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.750.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	4	4	0	0	0	0	0	0	Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	850.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	4	4	0	0	0	0	0	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.900.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	5	5	0	0	0	0	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.430.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	5	5	0	0	0	0	0	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.430.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	5	5	0	0	0	0	0	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	39.610.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	5	5	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.820.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	6	6	0	0	0	0	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.845.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	6	6	0	0	0	0	0	0	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.845.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	6	6	0	0	0	0	0	0	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.640.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	6	6	0	0	0	0	0	0	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.630.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	6	6	0	0	0	0	0	0	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.860.000	Kapanewon Tanjungsari
						7	01	7	01	6	6	0	0	0	0	0	0	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	Kapanewon

								6		0	201	6	7	01	0	201	0	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.125.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
								6	0	6	201	6	7	01	0	201	0	6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	790.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
								6	0	6	201	6	7	01	0	201	0	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.700.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
								6	0	6	201	6	7	01	0	201	0	6	Fasilitasi Kerjasama Atar Desa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga	640.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
								6	0	6	201	6	7	01	0	201	0	6	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	460.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	11 Potensi Budaya				0	8	0	22	2	22	0	8	2	22	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
								8	8	0	507	8	2	22	0	507	0	8	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
								8	8	0	507	8	2	22	0	507	0	8	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100.000.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
													4	01					SEKRETARIAT DAERAH	35.0000.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
								0	4	0	01	4	4	01	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
								4	4	0	501	4	4	01	0	501	0	4	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	35.000.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari
								4	4	0	501	4	4	01	0	501	0	4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kalurahan	35.000.000	Tanjung Sari Kapanewon Tanjung Sari

Sedangkan program dan kegiatan pendukung di Kapanewon Tanjungsari seperti pada tabel :

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju	SKPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.409.240.039	2.086.425.209	Kapanewon Tanjungsari
	Kegiatan :			
1	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.670.500	43.875.000	Kapanewon Tanjungsari
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.225.768.646	1.616.546.360	Kapanewon Tanjungsari
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.100.000	4.200.000	Kapanewon Tanjungsari
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.098.000	119.073.349	Kapanewon Tanjungsari
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.140.900	57.702.500	Kapanewon Tanjungsari
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.600.000	187.387.500	Kapanewon Tanjungsari
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.870.000	57.522.500	Kapanewon Tanjungsari

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Tanjungsari

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				150.000.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan budaya (%)		100%	100.000.000,00			100%	150.000.000,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya (Laporan)		1 Laporan	100.000.000,00			1 Laporan	150.000.000,00
2.22.08.5.07.000 6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	(Kapanewon Tanjungsari, Tanjungsari)	1 Laporan	100.000.000,00	Dana Keistimew aan DIY		1 Laporan	150.000.000,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				35.000.000,00				25.970.000,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan (%)		100%	35.000.000,00			100%	25.970.000,00

4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dokumen)	4 Dokumen	35.000.000,00		2 Dokumen	25.970.000
4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	4 Dokumen	35.000.000,00	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	2 Dokumen	25.970.000
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			1.598.335.646,00			2.211.927.709,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100%	1.409.248.046,00		100%	1.888.035.209,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indeks)	7 indeks	32.670.500,00		7 indeks	43.875.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 dokumen	24.950.500,00	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	2 Dokumen	28.625.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 dokumen	530.000,00	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	1 dokumen	1.500.000,00

7.01.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	1 dokumen	450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.350.000,00
7.01.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	2 dokumen	840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	3.500.000,00
7.01.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	2 dokumen	970.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	2.500.000,00
7.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	17 laporan	1.870.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 laporan	3.400.000,00
7.01.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	32 laporan	3.060.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	3.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)		3 indeks	1.225.768.646,00		3 indeks	1.616.564.360,00
7.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	252 orang	1.195.568.146,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	252 orang	1.583.814.360,00

7.01.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	1 laporan	780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	2.000.000,00
7.01.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	13 laporan	29.420.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 laporan	30.750.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)		1 dokumen	3.100.000,00		1 dokumen	4.200.000,00
7.01.01.2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	6 dokumen	3.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	6 dokumen	4.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indeks)		6 indeks	37.098.000,00		6 indeks	119.073.349,00
7.01.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	(kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	3 paket	2.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 paket	3.600.000,00

7.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	12 paket	19.406.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 paket	83.788.349,00
7.01.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	3 paket	4.292.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 paket	13.440.000,00
7.01.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	10 paket	4.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	6.425.000,00
7.01.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	0 dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	248 dokumen	1.200.000,00
7.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	12 laporan	6.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	10.620.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)		3 unit	1.600.000,00		4 unit	46.000.000,00
7.01.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	1 unit	1.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	46.000.000,00

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	2 laporan	13.140.900,00		2 laporan	13.200.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36 laporan	13.140.900,00	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	36 laporan	13.200.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	3 unit	95.870.000,00		3 unit	45.122.500,00
7.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	57 unit	63.982.500,00	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	57 unit	33.922.500,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8 unit	3.000.000,00	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	8 unit	11.200.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	28.887.500,00	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	1 unit	-

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana (%)	100%	90.070.000,00	100%		100%	98.977.500,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	8.480.000,00	1		1 laporan	24.500.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4 laporan	8.480.000,00	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)		5 laporan	24.500.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan)	18 laporan	81.590.000,00			18 laporan	74.477.500,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5 laporan	55.384.500,00	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)		4 laporan	41.250.000,00

7.01.02.2.02.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	13 laporan	26.205.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 laporan	33.227.500,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi (%)		100%	24.992.600,00		100%	63.450.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Indeks)		2 indeks	14.637.600,00		2 indeks	36.350.000,00
7.01.03.2.01.000 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	8 dokumen	6.417.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 dokumen	24.350.000,00
7.01.03.2.01.000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	6 laporan	8.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 laporan	12.000.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan (Indeks)		7 indeks	10.355.000,00		7 indeks	27.100.000,00

7.01.03.2.03.000 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	5 lembaga	7.385.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 lembaga	19.350.000,00
7.01.03.2.03.000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	1 laporan	2.970.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 laporan	7.750.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi (%)		100%	6.750.000,00		100%	12.600.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	2 laporan	6.750.000,00		2 laporan	12.600.000,00
7.01.04.2.01.000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	1 laporan	850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	3.400.000,00
7.01.04.2.01.000 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	(Kapanewon Tanjungarsi, Tanjungarsi)	2 laporan	5.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 laporan	9.200.000,00

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terfasilitasi (%)	100%	50.430.000,00	100%	101.915.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Indeks)	2 indeks	50.430.000,00	2 indeks	101.915.000,00
7.01.05.2.01.000 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	60 orang	39.610.000,00	75 orang	93.615.000,00
7.01.05.2.01.000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2 dokumen	10.820.000,00	2 Dokumen	8.300.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana (%)	100%	16.845.000,00	100%	46.950.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen)	8 dokumen	16.845.000,00	8 dokumen	46.950.000,00

7.01.06.2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	13 dokumen	2.640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 dokumen	6.050.000,00
7.01.06.2.01.000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	2 dokumen	6.630.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	15.600.000,00
7.01.06.2.01.000 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	2 dokumen	2.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	7.050.000,00
7.01.06.2.01.000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)		1 dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-
7.01.06.2.01.000 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	1 dokumen	1.125.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	4.000.000,00
7.01.06.2.01.000 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	3 dokumen	790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	3.750.000,00

7.01.06.2.01.001 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	2 dokumen	1.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	6.750.000,00
7.01.06.2.01.001 4	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	1 dokumen	640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	2.000.000,00
7.01.06.2.01.001 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	(Kapanewon Tanjung Sari, Tanjung Sari)	1 dokumen	460.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.750.000,00
J U M L A H					1.733.335.646,00			2.361.927.709,00

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan PD satu tahun kedepan, oleh karena itu Rancangan Renja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2023 disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Tanjungsari.

Rancangan Renja Kapanewon Tanjungsari disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Renstra Kapanewon Tanjungsari Tahun 2021 – 2026. Renstra tersebut merupakan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2023 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan dalam proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap keberhasilan suatu program. Demikian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun.

Gunungkidul,
KAPANEWON TANJUNGSARI,

EDY SEDONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN XLVII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KAPANEWON PURWOSARI
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinyah Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja dan kegiatan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perencanaan tersebut harus disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

Rencana Kerja Kapanewon Purwosari Tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan perencanaan program kerja dan kegiatan Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024. Selanjutnya pengertian Rencana

Kerja (Renja) Perangkat daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

1.1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

a. Renja PD dengan RKPD

RKPD Menjadi Acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana Indikator Renja Perangkat Daerah di sesuaikan dengan program prioritas Perangkat Daerah

b. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas Perangkat daerah

c. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L (Kementerian /Lembaga) dan Perangkat Daerah Propinsi Renja Perangkat daerah memperhatikan program dan Kegiatan Renja K/L dan Perangkat daerah Provinsi.

1.1.2 Tema ,Prioritas, dan Sasaran pembangunan Daerah Tahun 2024

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2024 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

a. Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026:

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

b. Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut :

a. Isu Strategis Nasional

- Percepatan Penghapusan Kemiskinan
- Penanganan Stunting
- Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19
- Middle income trap riset, alokasi sumber daya, dan human capital
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Pengurangan resiko bencana
- Pasokan energi dan pangan
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Reformasi Birokrasi
- Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024
- Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045

b. Isu strategis provinsi

- Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024
- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Penanganan Stunting
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pasokan energi dan pangan
- Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah :
“Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat melalui Pembangunan Infrastruktur,

Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam insikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi :
 - a. Investasi dan Pariwisata
 - b. Pengembangan sektor unggulan;
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Sasaran pembangunan berdasarakan prooritas pembangunan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.1
Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

No	Prioritas	Sasaran Daerah
1	2	3
1	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Nilai Investasi Meningkatkan
2	Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting;	Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun
3	Ketahanan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Nilai Investasi Meningkatkan
4	Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM Meningkatkan
5	Infra Struktur, lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan
6	Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkatkan
7	Reformasi birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan

1.1.3 Tahapan Penyusunan

Tahapan penyempurnaan penyusunan Renja Perangkat daerah meliputi :

- a. Persiapan penyusunan Renja PD
- b. Penyusunan Rancangan Renja PD
- c. Pelaksanaan forum PD dan
- d. Penetapan rencana Kerja

1.1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. SK Bupati Gunungkidul Nomor 56/KPTS/TIM/2021 Tentang pembentukan tim Penyusun rencana Strategis perangkat daerah Tahun 2021-2026;
16. Surat Edaran Bupati Nomor 000.7.6.1/1013 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Renja Kapanewon Purwosari Tahun 2024 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan strategis, program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kapanewon Purwosari dalam kurun waktu Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kapanewon Purwosari Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan acuan operasional kegiatan, terutama dalam pencapaian tujuan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Purwosari.
2. Mengantisipasi berbagai perubahan yang semakin bervariasi dan beraneka ragam dengan cara proaktif dan responsif.
3. Menumbuhkan komitmen untuk memantapkan berbagai aktifitas kegiatan yang berorientasi kedepan.
4. Memfasilitasi, mengakomodasi dan mendorong proses pengambilan keputusan secara teratur dan pencapaian tujuan akhir yang berdaya guna dan berhasil guna.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON PURWOSARI

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Purwosari dan Capaian Rentsra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Racangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON PURWOSARI

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Purwosari

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON PURWOSARI

- 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- 4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KAPANEWON PURWOSARI

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Purwosari dan Capaian Renstra Kapanewon Purwosari

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2023) yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Purwosari berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kapanewon Purwosari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan beberapa hal di atas, pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
- Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
- Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perangkat daerah Kapanewon Purwosari telah mengevaluasi kinerja kinerja tahun 2022, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan program yang telah di rencanakan dapat dilaksanakan. Kapanewon Purwosari telah mengevaluasi kegiatan yang telah di tetapkan sebagai berikut :

- Program Pogram Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- Pogram Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berikut ini di sajikan Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Purwosari Tahun 2022 :

Tabel. 2.1.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023
 Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Purwosari

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2022		Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	11 = (10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	100%	2.051.307.887	2.020.148.650	98,48	100,00	100

7.01. 01.2. 01.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4,287	4,287	14.000.000	14.000.000	100,00	4,287	4,287	100
7.01. 01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4.000.000	4.000.000	100,00	2	2	100
7.01. 01.2. 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.500.000	1.500.000	100,00	1	1	100
7.01.. 01.2. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.000.000	1.000.000	100,00	2	1	100
7.01.. 01.2. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	3	3.000.000	3.000.000	100,00	3	3	100

7.01. 01.2. 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	2	1.500.000	1.500.000	100,00	2	2	100
7.01. 01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	3.000.000	3.000.000	100,00	17	17	100
7.01. 01.2. 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	79,254	79,254	1.731.342.887	1.710.688.826	98,81	79,254	79,254	100
7.01. 01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	224	1.723.342.887	1.702.688.826	98,80	224 /bulan	224	100

7.01. 01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	100,00	1	1	100
7.01. 01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	13	13	13	100,00	13	13	100
7.01. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	6	6	100,00	6	6	100
7.01. 01.2. 05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	6	6	100,00	6	6	100
7.01. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,847	6,847	6,847	100,00	6,847	6,847	100

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	4	4	4.250.000	4.250.000	4.250.000	100,00	4 paket	4	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	63.985.000	63.985.000	63.985.000	100,00	8 Paket	6	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	6.560.000	6.560.000	6.560.000	100,00	3 Paket	3	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	2 Paket	2	100
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	12	12	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	16	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	17	16	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	5	5	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00		5	100

		<i>Daerah</i>													
7.01.. 01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5	5	8.000.000	8.000.000	100,00	4,00	5	100				
7.01.. 01.2. 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		36	36	19.200.000	16.934.824	88,20			36	100				
7.01.. 01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		36	36	19.200.000	16.934.824	88,20	36,00	36	100					
7.01.. 01.2. 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		43	43	78.510.000	71.470.000	91,03			43	100				
7.01.. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		141	141	50.560.000	43.520.000	86,08	179,00	141	100					

Operasional atau Lapangan	Daerah										
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	27.950.000	27.950.000	27.950.000	100,00	24,00	3	100
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	9	9	110.460.000	109.260.000	98,91			9	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	175.360.000	155.756.000	88,82			100%	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4	50.100.000	43.750.000	87,33		2,00	4	100

7.01.. 02.2. 01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	2	50.100.000	43.750.000	87,33	6,00	2	100
7.01. 02.2. 02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	13	13	125.260.000	112.006.000	89,42	6,00	13	100
7.01.. 02.2. 02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	1	105.260.000	92.006.000	87,41	14,00	1	100
7.01.. 02.2. 02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12	12	20.000.000	20.000.000	100,00		12	100

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100%	100%	100%	102.020.000	101.870.000	99,85	6	1	100
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa I</i>	5,5	5,5	5,5	91.520.000	91.370.000	99,84	6	5,5	100
7.01.03.2.01.01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6	6	6	8.000.000	8.000.000	100,00	8	6	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5	5	83.520.000	83.370.000	99,82	5	5	100

7.01. 03.2. 03	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	4	4	4	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00	2 Lembaga	4	100
7.01. 03.2. 03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	4	4	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00	3	4	100
7.01. 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kapanewon	100%	100%	100%	7.000.000	6.400.000	6.400.000	91,43		100%	100
7.01. 04.2. 01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	2	2	2	7.000.000	6.400.000	6.400.000	91,43	2	2	100
7.01. 04.2. 01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	5	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	2	5	100

7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	2	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	2	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	100%	100%	54.000.000	54.000.000	100,00	100%	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	37	37	54.000.000	54.000.000	100,00	70	37	100

7.01. 05.2. 01.01 .	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	70	70	48.000.000	48.000.000	48.000.000	100,00	4	70	100
7.01. 05.2. 01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	4	100%	100
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	100%	100%	64.180.000	64.180.000	100,00	100,00		100%	

7.01. 06.2. 01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22	22	64.180.000	64.180.000	64.180.000	100,00	2	22	100
7.01.. 06.2. 01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	2	6.000.000	6.000.000	100,00	14	2	100	100
7.01.. 06.2. 01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14	14	9.500.000	9.500.000	100,00	5	14	100	100
7.01.. 06.2. 01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	5	6.000.000	6.000.000	100,00	4	5	100	100
7.01.. 06.2. 01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan	1	1	3.000.000	3.000.000	100,00	2	1	100	100

7.01. 06.2. 01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	2	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	1	2	100
7.01. 06.2. 01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	36.680.000	36.680.000	36.680.000	100,00	1	1,00	100
2.22. 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100%	100%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00		100%	100
2.22. 08.2. 09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00	1	1	100
2.22. 08.5. 07.06	Gelar Budaya Jogja	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00	1	1	100

4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100%	100%	25.970.000	25.970.000	25.970.000	100,00		100%	100
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	2	2	25.970.000	25.970.000	25.970.000	100,00	2	2	100
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan, Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	2	2	25.970.000	25.970.000	25.970.000	100,00	2	2	100

Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang dicapai

Dari tabel evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Purwosari Tahun 2022 ada beberapa target yang belum dan tidak teralisasi yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, karena PORKAB tidak ada, sehingga belanja untuk pakaian olah raga dan sewa kendaraan tidak terealisasi.
 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, karena musim hujan dengan intensitas tinggi tiba lebih cepat, sehingga dropping air dihentikan semelum kontrak berakhir dan mengakibatkan anggaran tidak terealisasi secara optimal.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, karena Kelompok UMKM Purwosari tidak mendapat undangan untuk mengikuti pameran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul, sehingga belanja sewa kendaraan tidak terealisasi.

Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target keluaran yang di rencanakan :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan
 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
8. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 yang melebihi target keluaran yang direncanakan

Untuk realisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 yang melebihi target keluaran yang direncanakan tidak ada

Faktor penyebab tidak tercapainya Target Tahun 2022 antara lain :

1. Kurang cermat dalam pelaksanaan anggaran sehingga ada anggaran yang tidak terlaksana tetapi tidak diajukan perubahan dalam anggaran perubahan
2. Adanya kondisi alam dan cuaca yang tiba-tiba tidak sesuai prediksi, sehingga tidak dapat melaksanakan anggaran.
3. Kurangnya koordinasi dengan OPD pelaksana teknis kegiatan di Kabupaten.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

Implikasi yang timbul tidak terlalu berpengaruh dalam capaian program Renstra PD

Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Melakukan perencanaan dengan lebih cermat
2. Melaksanakan anggaran dengan cermat, tepat dan teliti sehingga jika ada anggaran yang tidak dapat dilaksanakan dapat segera diajukan perubahan dalam anggaran perubahan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Purwosari

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Kapanewon Purwosari berdasarkan indikator kinerja untuk setiap program sesuai dengan

ketentuan dalam SPM, IKU (Indikator Ketentuan Utama) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Dalam bab ini juga memuat indikator kinerja dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Kerja Kapanewon Purwosari pada tahun 2022 jenis indikator yang dikaji di sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan di uji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dewasa ini sudah meningkat walaupun masih dijumpai beberapa kekurangan , tetapi pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat secara umum telah terpenuhi. Hal ini ditandai semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia, semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat, juga semakin meningkat derajat kesehatan serta pendidikan masyarakatnya.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas sesuatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026 dan target sasaran yang ditetapkan oleh Kapanewon Purwosari melalui Rencana strategis (Renstra) serta realisasi kinerja pelayanan Kapanewon Purwosari untuk tolok ukur dan indikator kinerja OPD Kapanewon Purwosari berpedoman pada renstra Kapanewon purwosari tahun 2022-2026 adapun secara rinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Purwosari

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	<p>$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPkal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentrangan dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{persentase nilai indeks kepuasan masyarakat}]$</p> <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPkal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun - 1 dan APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1</p> <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>	Kapanewon	Laporan Tahunan

Tabel 2.2.2
Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kapanewon Purwosari

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu	Rumus: $\frac{\sum \text{Kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu}}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif	Jawatan Praja	Laporan Tahunan
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rumus IKM: $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071	Jawatan Pelayanan Umum	Laporan Semesteran
			Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: IKM Unit Pelayanan x 25 Tipologi data: Non kumulatif		

SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN / ALASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kalurahan yang menetapkan RPKal benar dan tepat waktu	Rumus: $\frac{\sum \text{Kalurahan yang menetapkan RPKal tepat waktu}}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ Tipologi Data Non Kumulatif	Jawatan Kemakmuran	Laporan Tahunan
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rumus: $\frac{\sum \text{Kegiatan penanganan ketentraman dan ketertiban}}{\sum \text{Target Ketentraman dan Ketertiban}} \times 100\%$ Tipologi Data Non Kumulatif	Jawatan Keamanan	Laporan Tahunan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase KK Miskin yang tertangani	Rumus: $\frac{\sum \text{KK Miskin tertangani}}{\sum \text{KK Miskin}} \times 100\%$ Tipologi Data : Non Kumulatif	Jawatan Sosial	Laporan Tahunan
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rumus: $\frac{\sum \text{Kegiatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan}} \times 100\%$ Tipologi Data Non Kumulatif	Jawatan Sosial	Laporan Tahunan

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{Kegiatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan}} \times 100\%$ <p>Tipologi Data Non Kumulatif</p>	Jawatan Sosial	Laporan Tahunan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\sum \text{Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota}}{\sum \text{Target Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>	Panewu Anom	Laporan bulanan, semesteran, tahunan

Tabel 2.2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Purwosari
Kabupaten Gunungkidul Tahun

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Satuan (IKU,SPM,IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	persen	79,00	79,10	79,20	79,40	80,70	82,17	82,20	82,25	
2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Potensi budaya	0	0	2	2	2	2	2	2	
4	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	80	80,10	80,20	80,30	78,50	78,50	78,60	78,70	

a. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dimasukan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Isu-isu penting tersebut mencakup :

1. Program kegiatan yang ada/semua usulan dari Kapanewon merupakan program kegiatan prioritas, selanjutnya program dan kegiatan yang sudah merupakan program prioritas PD semua terdanai;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal jumlah SDM terbatas karena adanya PNS yang pensiun;
3. Pelayanan Publik belum Optimal Sarana dan Prasarana masih terbatas;
4. Terbatasnya SDM Pamong Kalurahan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di Kalurahan belum bisa berjalan secara optimal;
5. Data Kemiskinan belum baik dan belum diupdate secara komperhensif;
6. Pemenuhan kebutuhan air minum belum merata serta tata kelola yang belum memadai;
7. Potensi ekonomi lokal baik Pariwisata maupun UMKM seiring pembangunan JJLS;
8. Kelembagaan Ekonomi Kalurahan (BUMKAL) untuk mendorong pembangunan Kalurahan;
9. Tertib administrasi pertanahan terutama tanah desa masih harus ditingkatkan;.
10. Optimalisasi Keistimewaan DIY dalam mendorong pembangunan wilayah yang merupakan bagian Satuan Ruang Strategis Keistimewaan;
11. Permasalahan Kemiskinan, Stunting, Gender, Disabilitas dan permasalahan sosial yang masih dihadapi;
12. Ketaatan tata ruang dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD sangat di perlukan karena dinamika program dan kegiatan yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kapanewon Purwosari termasuk Kapanewon di wilayah Kabupaten Gunungkidul untuk program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik, masyarakat sangat memerlukan pembangunan diberbagai bidang termasuk sarana prasarana jaringan jalan, pendidikan, kesehatan serta fasilitas yang lain yang bisa memberdayakan masyarakat untuk maju dan mandiri.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di PD Kapanewon Purwosari adalah berdasarkan usulan-usulan yang diajukan oleh

seksi-seksi dan sekretariat, usulan-usulan tersebut dibuat skala prioritas kebutuhan yang sangat mendesak yang diutamakan baru disusul hal-hal lain yang juga mendukung kelancaran program dan kegiatan, dari hasil analisis kebutuhan tersebut menjadi usulan PD ke Kabupaten, kemudian di Kabupaten masih dianalisa lagi mengingat anggaran yang tersedia. Secara Rinci pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No	Rencana Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.000	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kapanewon Purwosari	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	165.375.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan		100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kapanewon Purwosari	Junlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 Laporan	165.375.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Junlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		100.000.000	
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Purwosari	Gelar seni budaya dalam rangka peringatan hari keistimewaan DIY	1 Even	165.375.000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Purwosari	Gelar seni budaya dalam rangka peringatan hari keistimewaan DIY	1 Even	100.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kapanewon Purwosari	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan ketatalaksanaan	100%	27.350.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan		35.000.000	

	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	2 Dokumen	27.350.000	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Purwosari	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan, Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	2 Dokumen	27.350.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Purwosari	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan, Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	35.000.000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Purwosari	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	1.811.479.878	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Purwosari		1.294.774.576	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,287 Indeks	17.640.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari		6.180.000	
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.410.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.460.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	1.653.750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	460.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	240.000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Koordinasi Penyusunan SKPD dan DPA-SKPD	Kapanewon Purwosari	Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.307.500	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Purwosari	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.653.750	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Purwosari	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	3.307.000	17 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.205.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan	1.460.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,254 Indeks	1.572.574.878	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 orang/bulan	1.104.984.576	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Purwosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 orang /bulan	1.563.769.878	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.240.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.205.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.240.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	6.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny+ P58:P60a	13 Laporan	3.030.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.307.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.230.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Kepegawaian terlaksana	6 Dokumen	3.307.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.230.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,847 Indeks	98.947.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Purwosari	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	62.080.670
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Purwosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	59.200.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Purwosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	24.748.170						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Purwosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	26.047.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Purwosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25.222.500						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Purwosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Purwosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.110.000						
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.300.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.500.000						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	4.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2.500.000						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	8.840.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Purwosari			700.000						

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Purwosari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	8.840.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Purwosari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	700.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Laporan	20.947.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19.999.330
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	20.947.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19.999.330
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Unit	89.223.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Purwosari	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99.600.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Purwosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	57.660.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Purwosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 unit	66.912.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Purwosari	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Purwosari	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	3.800.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Purwosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	22.324.050	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Purwosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	28.887.500

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	32.687.500			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Purwosari	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4 Lembaga	13.615.000			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	13.615.000			
		Kapanewon Purwosari						
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Purwosari	Persentase sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kapanewon	100%	7.717.500			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	7.717.500			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3.200.000			
		Kapanewon Purwosari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1.500.000			

a. Penelaahan Usulan dan Program Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan merupakan upaya untuk mencapai cita-cita dan gambaran warga masyarakat yang ingin membangun dan memajukan daerahnya. Usulan program meliputi pembangunan fisik maupun non fisik, pelaksanaan musrenbang Tingkat Kapanewon Purwosari yang dilaksanakan Tanggal 2 Februari 2023 ini forum untuk mempertemukan antara kebutuhan Masyarakat dan pemangku kepentingan Kapanewon Purwosari dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah pusat daerah pada tahun 2023.

Pada Tahun 2023 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Kapanewon maupun OPD Kabupaten Tahun 2024 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka dilakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan OPD Tahun 2024, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan usulan program kegiatan sesuai dengan program kegiatan OPD. Usulan pemangku kepentingan secara rinci pada Tabel : 2.5.1

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Yang Terakomodir Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
					Unit			
1	(PIWK) - Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan	Widoro, Giripurwo, Purwosari	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Terlaksana	2	Unit	8.000.000	16.000.000	
JUMLAH							16.000.000	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON PURWOSARI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema Pembangunan Nasional untuk Tahun 2024 mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial sedang Tema Pembangunan Pemerintah Provinsi DIY Penguatan SDM unggul dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Sosial Ekonomi Masyarakat DIY sedang tema pembangunan untuk Kabupten Gunungkidul Tahun 2024 adalah Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Dari tema-tema pembangunan yang sudah ditetapkan tersebut diambil kebijakan pembangunan yang menunjang terwujudnya tema pembangunan yang telah disepakati. Untuk mewujudkan tema tersebut diatas beberapa bidang yang harus menjadi sasaran program dan kegiatan.

Bidang Pendidikan dan Kesehatan Pemerintah mengupayakan wajib belajar dan rata-rata lama sekolah untuk ditingkatkan bidang Kesehatan rata-rata usia harapan hidup dan juga peningkatan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin.

Kemiskinan merupakan program pemerintah yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat termasuk program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan yang ada di desa serta program dan kegiatan melalui dana desa diharapkan hal-hal tersebut bisa teratasi. Dengan mengacu Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 program kegiatan yang ada, warga masyarakat kehidupannya makin terangkat dimulai dari usaha ekonomi, sarana prasarana jalan, pendidikan, sarana air bersih dan lain lain.

Program pemerintah lainnya yaitu bantuan Langsung tunai (BLT) yang untuk tahun 2023 ini Kapanewon Purwosari untuk penerima BLT tersebar di lima kalurahan atau 32 padukuhan. Kebijakan Nasional lainnya pro kemiskinan merupakan perlindungan rakyat miskin di bidang kesehatan memberikan jaminan kesehatan (Jamkesmas, Jamkesos, Jamkesta) , bidang pendidikan (BOS) dan program PKH yang mencakup pendidikan anak dari paud sampai SLTP dan program kesehatan dari anak masih dalam kandungan sampai usia SLTP .

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Purwosari

Perumusan tujuan dan sasaran PD Kapanewon Purwosari didasarkan atas rumusan-rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Mengingat saat ini Renstra PD Tahun 2021-2026 sudah ditetapkan dan disusun , untuk itu rumusan tujuan dan sasaran PD dengan memperhatikan rumusan rancangan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Untuk sasaran PD dirumuskan dengan berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD Tahun 2024.

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.2.1
Tujuan Kapanewon Purwosari

NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon	80
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi budaya lokal yang dilestarikan	2

Tabel 3.2.2
Sasaran Kapanewon Purwosari

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran PD Tahun 2024
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintah Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	79.40
2	Meningkatkan Akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	80.30
3	Pelestarian potensi ragam budayalokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi budaya lokal yang dilestarikan	2

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Purwosari Tahun 2024

NO	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyusunan APBKal 2. Persentase Penyusunan RKPKal 3. Persentase KK Miskin yang terfasilitasi 4. Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban umum 5. Persentase Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 	79,40

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON PURWOSARI

a. Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :
 1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, untuk tahun 2024 didasarkan pada sasaran daerah pada RPJMD /Pembangunan Jangka Menengah Daerah diarahkan untuk menciptakan kondisi lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal serta mewujudkan sumberdaya alam yang lestari.
 2. Pencapaian MDGs bidang Kesehatan di Kapanewon Purwosari, dalam hal ini Peran Kapanewon hanya mempunyai fungsi koordinasi dan fasilitasi bekerja sama dengan UPT Puskesmas Purwosari.
 3. Sistem manajemen mutu (SMM) Peran Kapanewon Purwosari mendukung fungsi Indikator Progres dan Kegiatan Program Tingkat Makro Reformasi Birokrasi 2021 – 2026 yang terdiri dari 4 (empat) indikator sebagai berikut :
 1. Keberhasilan “penerapan evaluasi kinerja Pelayanan IKM pada pemerintah kabupaten/kota yang merepresentasikan kinerja propinsi” pada tahun 2024
 2. Keberhasilan “ penerapan pedoman standar Pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik” pada tahun 2026.
 3. Keberhasilan “Pengembangan Best Practices peningkatan kualitas Pelayanan publik pada K/L/Pemda” pada tahun 2024.
 4. Adanya peningkatan jumlah “unit pelayanan yang berbasis Sistem Manajemen Mutu yang diakui secara internasional” pada tahun 2026.
 4. Dalam rangka pengentasan kemiskinan Kapanewon Purwosari partisipasi penyiapan pemutakiran data yang telah disiapkan, serta koordinasikan dan fasilitasi terhadap program kegiatan yang diarahkan untuk intervensi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan PD Kabupaten.
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah selain memberdayakan ketahanan pangan juga pengembangan LKM, Pasar Desa dan BUMDes.

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel :
4.1.1 dengan format sebagai berikut :

Tabel : 4.1.1
Sasaran dan Program /Kegiatan

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan		
1	Kapasitas Tata Kelola pemerintahan Meningkatkan	I	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
			1	Adat, Seni Tradisi dan lembaga Kebudayaan
			1	Gelar Budaya Jogja
		II	Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
		1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan	

			Kegiatan Keistimewaan
		1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
III			Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
		1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		4	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
		5	Koordinasi penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
		2	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
		3	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
		1	Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian
		4	Administrasi Umum Perangkat Darah
		1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan/ Kantor
		2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		3	Penyediaan peralatan rumah tangga
		4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		5	Fasilitasi kunjungan tamu
		6	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
		6	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
		1	Penyediaan jasa Komunikasi sumber Daya air dan listrik
		7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Darah

			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		IV	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	
			1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon
			1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait
			2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kapanewon
			1	Fasilitasi Percepatan pencapaian standar Pelayanan minimal di wilayah Kapanewon.
			2	Kegiatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kapanewon
		V	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kalurahan	
			1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
			2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kapanewon
			2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kapanewon
			1	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan
			2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
		VI	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	

			Umum
		1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan vertical di wilayah Kecamatan
		2	Harmonisasi hubungan Dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat.
	VII		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah
		1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila Pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan.
	VII I		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
		1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		2	Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan desa
		3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa
		4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
		5	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKal
		6	Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa
		7	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Jumlah program 8 dan jumlah kegiatan 16.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan bersifat pengentasan kemiskinan yaitu fasilitasi bidang pendidikan , pemberdayaan bidang pertanian, kehutanan, usaha kecil menengah, bencana kekeringan, pembangunan, tata pemerintahan, kepemudaan dan keamanan.
 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan PD Kapanewon Purwosari bersumber dana APBD Kabupaten

Gunungkidul sebesar Rp 1.621.412.076,,00 (Satu milyar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus dua belas ribu tujuh puluh enam rupiah). Pengajuan program dan kegiatan untuk tahun 2024 Perangkat Daerah Kapanewon Purwosari untuk rancangan awal. Rp. 2.364.504.878,00 (Dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dibandingkan dengan rencana turun sebesar Rp. 743.092.802,00.

Tabel 4.1.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kapanewon Purwosari

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan		Pagu Indikatif	Ket	
1	Kapasitas Tata Kelola pemerintahan Meningkat	I	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000		
		1	Adat, Seni Tradisi dan lembaga Kebudayaan	100.000.000		
			1	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	
		II	Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan	35.000.000		
		1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000		
			1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	
		III	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1.294.774.576		
		1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.180.000		
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.460.000	
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	460.000	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	240.000	
			4	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	860.000	
			5	Koordinasi penyusunan Perubahan DPA-SKPD	590.000	
			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.110.000	
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.460.000	
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.104.984.576		
			1.	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.100.714.576	
			2.	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1.240.000	
			3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	3.030.000	
		3	Administraasi Kepegawaian perangkat Daerah	1.230.000		
			1.	Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.230.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Darah	62.080.670				
	1.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan/ Kantor	5.000.000			
	2.	Penyediaan peralatan dan	24.748.170			

			perlengkapan kantor		
		3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	25.222.5000	
		4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.110.000	
		5.	Fasilitasi kunjungan tamu	1.500.000	
		6.	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.500.000	
	5		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	700.000	
		1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	700.000	
	6		<i>Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	19.999.300	
		1.	Penyediaan jasa Komunikasi sumber Daya air dan listrik	19.999.300	
	7		<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah</i>	99.600.000	
		1.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.912.500	
		2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.800.000	
		3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	28.887.500	
		4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
	IV		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	72.710.000	
		1	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon</i>	2.300.000	
		1.	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertical terkait	2.300.000	
		2	<i>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kapanewon</i>	70.410.000	
		1.	Fasilitasi Percepatan pencapaian standar Pelayanan minimal di wilayah Kapanewon.	66.150.000	
		2.	Kegiatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kapanewon	4.260.000	
	V		Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kaluarahan	47.437.500	
		1	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	41.037.500	
		1.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8.350.000	
		2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kapanewon	32.687.500	
		2	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kapanewon</i>	6.400.000	
		1.	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	2.100.000	
		2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.300.000	
	VI		Program koordinasi Ketentraman dan	3.500.000	

			Ketertiban Umum		
		1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	3.500.000	
		1.	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan vertical di wilayah kapanewon	1.500.000	
		2.	Harmonisasi hubungan Dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat.	2.000.000	
	VII		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.525.000	
		1	<i>Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah</i>	53.525.000	
		1.	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasilaPelaksanaan undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka tunggal Ika serta Pemertahana dan Pemeliharaan keutuhan negara kesatuan repblik Indonesia.	45.725.000	
		2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kapanewon.	7.800.000	
	VII		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.465.000	
		1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</i>	14.465.000	
		1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa	2.500.000	
		2.	Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan desa	3.000.000	
		3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	2.430.000	
		4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000	
		5.	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.765.000	
		6.	Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa	1.270.000	
		7.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.500.000	
			TOTAL	1.621.412.076	

3. Program dan kegiatan yang dirumuskan melalui forum Musrenbang pada Hari Rabu tanggal 2 Februari 2023 di Kapanewon Purwosari merupakan prioritas kebutuhan yang diutamakan dan sangat mendesak. Setelah Renja ditetapkan, untuk Kapanewon Purwosari ternyata masih ada kegiatan yang perlu ditambahkan ke dalam rancangan awal RKPD demikian pula dengan pagu indikatif. Bertambahnya kegiatan dan berkutangnya pagu indikatif ini jelas akan berpengaruh dalam merealisasi pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekapitulasi jumlah program dan kegiatan serta jumlah pagu indikatif antara rancangan akhir Renja disajikan dalam tabel 4.1.3. sebagai berikut :

Tabel 4.1.3
Rekapitulasi program dan kegiatan
Rancangan Akhir Renja

No.	Jenis	Jumlah Rancangan Akhir Renja	Lokasi	Sumber Dana
1.	Program	8	Kapanewon Purwosari	DAU dan DAIS
2.	Kegiatan	16		
3.	Pagu indikatif	1.621.412.076,00		

4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan dikelompokkan berdasarkan 7 (tujuh) indikasi prioritas pembangunan ditampilkan dalam tabel 4.1.4 sebagai berikut :

Tabel 4.1.4
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
 Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	79,60	7	UNSUR KEWILAYAHAN		Kapanewon Purwosari
					7.01.	KECAMATAN		Kapanewon Purwosari
					7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.710.000	Kapanewon Purwosari
					7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.300.000	Kapanewon Purwosari
					7.01.02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.300.000	Kapanewon Purwosari

7.01.02.202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70.410.000	Kapanewon Purwosari
7.01.02.202.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	66.150.000	Kapanewon Purwosari
7.01.02.202.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.260.000	Kapanewon Purwosari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.437.500	Kapanewon Purwosari
7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.037.500	Kapanewon Purwosari
7.01.03.201.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8.350.000	Kapanewon Purwosari

				7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.687.500	Kapanewon Purwosari
				7.01.03.203	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	6.400.000	Kapanewon Purwosari
				7.01.03.203.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	2.100.000	Kapanewon Purwosari
				7.01.03.203.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.300.000	Kapanewon Purwosari
				7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.500.000	Kapanewon Purwosari
				7.01.04.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.500.000	Kapanewon Purwosari
				7.01.04.201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.500.000	Kapanewon Purwosari
				7.01.04.201.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.000.000	Kapanewon Purwosari

						7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		53.525.000	Kapanewon Purwosari
						7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		53.525.000	Kapanewon Purwosari
						7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara		45.725.000	Kapanewon Purwosari
						7.01.05.201.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		7.800.000	Kapanewon Purwosari
						7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		14.465.000	Kapanewon Purwosari

7.01.06.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.465.000	Kapanewon Purwosari
7.01.06.201.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.500.000	Kapanewon Purwosari
7.01.06.201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000	Kapanewon Purwosari
7.01.06.201.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.430.000	Kapanewon Purwosari
7.01.06.201.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000	Kapanewon Purwosari
7.01.06.201.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.765.000	Kapanewon Purwosari
7.01.06.201.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.270.000	Kapanewon Purwosari
7.01.06.201.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.500.000	Kapanewon Purwosari

				1.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.294.774.576	Kapanewon Purwosari
				1.1.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.180.000	Kapanewon Purwosari
				1.1.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.460.000	Kapanewon Purwosari
				1.1.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	460.000	Kapanewon Purwosari
				1.1.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	240.000	Kapanewon Purwosari
				1.1.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	860.000	Kapanewon Purwosari
				1.1.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	590.000	Kapanewon Purwosari
				1.1.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.110.000	Kapanewon Purwosari
				1.1.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.460.000	Kapanewon Purwosari
				1.1.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.104.984.576	Kapanewon Purwosari

										1.1.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.100.714.576	Kapanewon Purwosari
										1.1.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.240.000	Kapanewon Purwosari
										1.1.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.030.000	Kapanewon Purwosari
										1.1.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.230.000	Kapanewon Purwosari
										1.1.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.230.000	Kapanewon Purwosari
										1.1.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.080.670	Kapanewon Purwosari
										1.1.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	Kapanewon Purwosari
										1.1.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.748.170	Kapanewon Purwosari
										1.1.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.222.500	Kapanewon Purwosari
										1.1.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.110.000	Kapanewon Purwosari
										1.1.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	Kapanewon Purwosari

								1.1.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.500.000	Kapanewon Purwosari
								1.1.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	700.000	Kapanewon Purwosari
								1.1.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	700.000	Kapanewon Purwosari
								1.1.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.999.330	Kapanewon Purwosari
								1.1.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.999.330	Kapanewon Purwosari
								1.1.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.600.000	Kapanewon Purwosari
								1.1.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.912.500	Kapanewon Purwosari
								1.1.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.800.000	Kapanewon Purwosari
								1.1.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.887.500	Kapanewon Purwosari

				1.1.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kapanewon Purwosari
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Kapanewon Purwosari
				2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			Kapanewon Purwosari
				2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		100.000.000	Kapanewon Purwosari
				2.22.08.507	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		100.000.000	Kapanewon Purwosari
				2.22.08.507.11	Gelar Budaya Jogja		100.000.000	Kapanewon Purwosari
				4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			Kapanewon Purwosari
				4.01	SEKRETARIAT DAERAH			Kapanewon Purwosari

					4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	Kapanewon Purwosari
					4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	Kapanewon Purwosari
					4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	Kapanewon Purwosari

5. Rumusan rencana program dan kegiatan Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 4.1.5 sebagai berikut :

Tabel 4.1.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon
Purwosari

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Kapanewon Purwosari	100%	1.294.774.576,00	DAU		100%	1.915.119.100,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	4,28 Indeks	6.180.000,00	DAU		4,28 Indeks	18.522.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Purwosari	3 Dokumen	1.460.000,00	DAU		2 Dokumen	4.635.750,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kapanewon Purwosari	1 Dokumen	460.000,00	DAU		1 Dokumen	1.736.000,00

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKASKPD	Kapanewon Purwosari	1 Dokumen	240.000,00	DAU	1 Dokumen	1.157.000,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKASKPD	Kapanewon Purwosari	2 Dokumen	860.000,00	DAU	3 Dokumen	3.472.000,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	RKASKPD	Kapanewon Purwosari	2 Dokumen	590.000,00	DAU	2 Dokumen	1.736.000,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RKASKPD	Kapanewon Purwosari	17 Laporan	1.110.000,00	DAU	17 Laporan	3.470.000,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RKASKPD	Kapanewon Purwosari	32 Laporan	1.460.000,00	DAU	4 Laporan	2.315.250,00

7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Kapanewon Purwosari	79,254 Indeks	1.104.984.576,00	DAU	79,254 Indeks	1.664.271.100,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Purwosari	224 orang/bulan	1.100.714.576,00	DAU	224 orang/bulan	1.592.956.100,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Purwosari	1 Laporan	1.240.000,00	DAU	1 Laporan	2.315.000,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Purwosari	13 Laporan	3.030.000,00	DAU	13 Laporan	69.000.000,00
7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Kapanewon Purwosari	6 Dokumen	1.230.000,00	DAU	6 Dokumen	3.472.000,00
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Purwosari	6 Dokumen	1.230.000,00	DAU	6 Dokumen	3.472.000,00
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Kapanewon Purwosari	6,847 Indeks	62.080.670,00	DAU	6,847 Indeks	101.895.000,00

	<i>Daerah</i>											
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Purwosari	4 Paket	5.000.000,00	DAU			4 Paket		3.900.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Purwosari	6 Paket	24.748.170,00	DAU			6 Paket		63.250.000,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kapanewon Purwosari	3 Paket	25.222.500,00	DAU			3 Paket		25.595.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kapanewon Purwosari	2 Paket	3.110.000,00	DAU			2 Paket		3.000.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kapanewon Purwosari	12 Laporan	1.500.000,00	DAU			12 Laporan		850.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Purwosari	6 Laporan	2.500.000,00	DAU			16 Laporan		5.300.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kapanewon Purwosari	1 Unit	700.000,00	DAU			5 Unit		9.240.000,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kapanewon Purwosari	1 Unit	700.000,00	DAU			5 Unit		9.240.000,00	

7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kapanewon Purwosari	36 Laporan	19.999.330,00	DAU	36 Laporan	23.094.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kapanewon Purwosari	36 Laporan	19.999.330,00	DAU	36 Laporan	23.094.000,00
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kapanewon Purwosari	154 Unit	99.600.000,00	DAU	43 Unit	94.625.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kapanewon Purwosari	141 Unit	66.912.500,00	DAU	141 Unit	60.543.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kapanewon Purwosari	10 unit	3.800.000,00	DAU	3 Unit	24.382.000,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kapanewon Purwosari	3 Unit	28.887.500,00	DAU	5 Unit	9.700.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Purwosari	100%	72.710.000,00	DAU	100%	125.023.500,00

7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kapanewon Purwosari	1 Laporan	2.300.000,00	DAU	4 Laporan	9.261.000,00
7.01.02.2.01.01	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Kapanewon Purwosari	1 Laporan	2.300.000,00	DAU	2 Laporan	9.261.000,00
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	Kapanewon Purwosari	2 Laporan	70.410.000,00	DAU	13 Laporan	115.762.500,00
7.01.02.2.02.02	<i>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	Kapanewon Purwosari	1 Laporan	66.150.000,00	DAU	1 Laporan	92.610.000,00
7.01.02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kapanewon Purwosari	12 Laporan	4.260.000,00	DAU	12 Laporan	23.152.500,00

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	Kapanewon Purwosari	100%	47.437.500,00	DAU		100%	62.511.750,00
7.01.03. 2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kapanewon Purwosari	5,5 Indeks	41.037.500,00	DAU		5,5 Indeks	47.566.000,00
7.01.03. 2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Purwosari	6 Doku men	8.350.000,00	DAU		6 Dokum en	9.261.000,00
7.01.03. 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Purwosari	7 Lapora n	32.687.500,00	DAU		7 Lapora n	38.305.000,00
7.01.03. 2.03	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	Kapanewon Purwosari	1 Lemba ga	6.400.000,00	DAU		4 Lemba ga	14.945.750,00
7.01.03. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kapanewon Purwosari	1 Lemba ga	2.100.000,00	DAU		4 Lemba ga	14.945.750,00
7.01.03. 2.03.04	Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi	"Jumlah Laporan Fasilitasi Pembangunan Usaha	Kapanewon Purwosari	2 lapora n	4.300.000,00	DAU			

7.01.04	Masyarakat	Ekonomi Masyarakat"	Kapanewon Purwosari	100%	3.500.000,00	DAU		100%	8.103.375,00
	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kapanewon	Kapanewon Purwosari	100%	3.500.000,00	DAU		100%	8.103.375,00
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum</i>	Kapanewon Purwosari	2 Laporan	3.500.000,00	DAU		2 Laporan	8.103.375,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Purwosari	2 laporan	1.500.000,00	DAU		5 Laporan	3.300.000,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Purwosari	1 Laporan	2.000.000,00	DAU		2 Laporan	4.803.375,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Kapanewon Purwosari	100%	53.525.000,00	DAU		100%	62.511.000,00

7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kapanewon Purwosari	37 Indeks	53.525.000,00	DAU	37 Indeks	62.511.000,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Purwosari	30 orang	45.725.000,00	DAU	70 orang	55.566.000,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Purwosari	4 Dokumen	7.800.000,00	DAU	4 Dokumen	6.945.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	Kapanewon Purwosari	100%	14.465.000,00	DAU	100%	34.728.750,00

7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kapanewon Purwosari	7 Dokumen	14.465.000,00	DAU	22 Dokumen	34.728.750,00
7.01.06.2.01.01	<i>Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	Kapanewon Purwosari	2 Dokumen	2.500.000,00	DAU	2 Dokumen	6.940.000,00
7.01.06.2.01.02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Kapanewon Purwosari	17 Dokumen	3.000.000,00	DAU	14 Dokumen	11.002.750,00
7.01.06.2.01.03	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	Kapanewon Purwosari	12 Dokumen	2.430.000,00	DAU	5 Dokumen	6.945.750,00
7.01.06.2.01.05	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	Kapanewon Purwosari	4 Dokumen	2.000.000,00			
7.01.06.2.01.07	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	Kapanewon Purwosari	1 Dokumen	1.765.000,00	DAU	1 Dokumen	4.051.688,00

	Rekomendasi Pengkangan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengkangan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Purwosari	1 Dokumen	1.270.000,00	DAU	2 Dokumen	5.788.562,00
7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Purwosari	1 Dokumen	1.500.000,00			
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Kapanewon Purwosari	100%	100.000.000,00	DAK	100%	173.643.750,00
2.22.08. 2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Junlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	Kapanewon Purwosari	1 Laporan	100.000.000,00	DAK	1 Laporan	173.643.750,00
2.22.08. 5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kapanewon Purwosari	1 Laporan	100.000.000,00	DAK	1 Laporan	173.643.750,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Kapanewon Purwosari	100%	35.000.000,00	DAK	100%	30.153.000,00
4.01.04. 5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</i>	Kapanewon Purwosari	2 Dokumen	35.000.000,00	DAK	2 Dokumen	30.153.000,00

4.01.04. 5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Kapanewon Purwosari	2 Doku men	35.000.000,00	DAK	2 Dokumen	30.153.000,00
					1.621.412.076,00			2.411.794.225,00

BAB V PENUTUP

Renja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan program kerja dan kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul tahun 2024. Renja tahun 2024 merupakan arah kebijakan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan Tugas pembantuan di Kapanewon Purwosari. Renja juga salah satu dokumen penting bagi suatu OPD yang pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan bila terjadi adanya variabel atau penyebab yang tidak mampu untuk direalisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu disesuaikan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Renja tahun 2024 diharapkan sebagai penentu arah dalam perencanaan dan penyusunan kegiatan maupun anggaran, sehingga implementasinya diharapkan memfasilitasi komunikasi, partisipasi serta mengkoordinasikan perbedaan kepentingan guna mendorong proses pengambilan keputusan yang realistis untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan disamping agar lebih bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh warga sekarang dan yang akan datang di wilayah Kapanewon Purwosari.

Wonosari,
KAPANEWON PURWOSARI,

WAHYU ARDI NUGROHO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA